

Danantara Indonesia

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

MENDORONG KEBERLANJUTAN, MENGAWAL KETAHANAN PANGAN

Promoting Sustainability, Safeguarding Food Security

Laporan Tahunan **2024** Annual Report

PT Pupuk Indonesia (Persero) atau "PTPI" dan "Perseroan", berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai pilar utama sektor pertanian nasional. Sebagai produsen pupuk terbesar di Indonesia, Perseroan memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk secara tepat waktu dan tepat sasaran. Melalui berbagai inisiatif transformasi, Perseroan terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasok, serta menerapkan inovasi dalam produksi dan distribusi pupuk guna mendukung produktivitas pertanian nasional.

Keberlanjutan menjadi landasan utama dalam strategi bisnis Perseroan. Sejalan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), Perseroan berupaya mengurangi jejak karbon melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Selain itu, inovasi dalam pengembangan produk pupuk yang lebih presisi dan efisien bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Perseroan dalam industri pupuk tetapi juga mendukung tercapainya Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya dalam ketahanan pangan dan aksi terhadap perubahan iklim.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan, Perseroan turut mendukung program-program pemerintah, termasuk subsidi pupuk dan pengembangan ekosistem pertanian berbasis teknologi. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat guna meningkatkan efisiensi pemupukan dan memperluas adopsi praktik pertanian berkelanjutan. Dengan berbagai inisiatif tersebut, Perseroan tidak hanya berperan sebagai penyedia pupuk, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi petani dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, volatilitas harga komoditas, serta dinamika kebijakan perdagangan, Perseroan terus memperkuat fondasi bisnisnya dengan berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan. Melalui langkah-langkah tersebut, Perseroan berkomitmen untuk tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung pertanian nasional yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

PT Pupuk Indonesia (Persero) or "PTPI" and "the Company", is committed to fulfilling its role as a key pillar of the national agricultural sector. As the largest fertilizer producer in Indonesia, the Company bears a strategic responsibility to ensure the prompt and targeted availability and distribution of fertilizer. Through various transformation initiatives, the Company continues to strive to improve operational efficiency, optimize the supply chain, and implement innovations in fertilizer production and distribution to support national agricultural productivity.

Sustainability serves as a fundamental pillar of the Company's business strategy. In line with environmental, social, and governance (ESG) principles, the Company strives to reduce its carbon footprint through the adoption of environmentally friendly technologies, energy efficiency measures, and more sustainable waste management practices. Additionally, innovations in the development of more precise and efficient fertilizer products are aimed at enhancing soil fertility while minimizing negative environmental impacts. These initiatives not only strengthen the Company's position in the fertilizer industry but also contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in the areas of food security and climate action.

As part of its commitment to safeguarding food security, the Company supports government programs, including fertilizer subsidies and the development of technology-based agricultural ecosystems. Collaboration with various stakeholders continues to be strengthened to improve fertilization efficiency and expand the adoption of sustainable agricultural practices. Through these initiatives, the Company positions itself not only as a fertilizer provider but also as a strategic partner to farmers in achieving sustainable food security. Amid global challenges such as climate change, commodity price volatility, and trade policy dynamics, the Company continues to strengthen its business foundation by focusing on innovation and sustainability. Through these measures, the Company is committed to remaining at the forefront of supporting a resilient, productive, and sustainable national agriculture sector.



MENDORONG KEBERLANJUTAN, MENGAWAL KETAHANAN PANGAN

Promoting Sustainability, Safeguarding Food Security



Kesinambungan Tema
Theme Continuity



Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan
Forging a Sustainable Future

Perkembangan kegiatan usaha pada tahun 2023 masih diwarnai tantangan yang tak mudah. Bukan hanya pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat, tetapi harga-harga komoditas termasuk pupuk dan amoniak pun melandai.

Kendati demikian, PI *Group* berhasil menavigasi situasi yang berkembang dengan tepat, sehingga menghasilkan pencapaian yang sangat baik. Peringkat PTPI di antara industri sejenis di dunia naik ke "Peringkat 6", dari tahun sebelumnya di posisi ke-9. Pemeringkatan ini diukur dari laba bersih yang diperoleh Perseroan.

Ketangguhan dalam menghadapi tantangan tersebut semakin mengukuhkan posisi PTPI sebagai pemain global untuk mencapai visi yang telah ditetapkan: *"A Leading global agrosolution and integrated chemical company".*

PTPI tidak hanya memperkuat posisinya di industri. Perseroan berkomitmen untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

The development of business activities in 2023 is still characterized by challenges. Not only was the global economic recovery slow, but commodity prices, including fertilizer and ammonia, were also sluggish.

Nevertheless, PI Group managed to navigate the developing situation appropriately, resulting in excellent achievements. PTPI's ranking among similar industries in the world rose to "Rank 6", from the previous year's 9th position. This ranking is measured by the net profit earned by the company.

The resilience in facing these challenges further strengthens PTPI position as a global player to achieve the vision that has been set: "A Leading global agrosolution and integrated chemical company".

PTPI is not only strengthening its position in the industry. The company is committed to contributing to national food security as well as sustainable national economic growth.



Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih
Transformation towards a Greener and Cleaner Industry

Tahun 2022 menjadi catatan tersendiri dalam sejarah Perseroan, dimana PTPI berhasil meraih laba tertinggi sepanjang sejarah Perseroan. Capaian ini tak lepas dari keberhasilan program transformasi yang telah dijalankan selama dua tahun terakhir. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan, seperti sentralisasi di sejumlah bidang, peningkatan efisiensi dan digitalisasi diberbagai bidang yang terbukti berdampak positif terhadap kinerja Perseroan.

Perusahaan juga tetap berkomitmen menjalankan tugas dari Pemerintah dalam mengamankan pasokan pupuk dalam negeri dalam rangka mendukung ketahanan pangan dengan tetap menjalankan aspek-aspek bisnis dengan baik sebagaimana diamanahkan oleh Pemegang Saham.

Selain itu, PTPI juga telah menjalankan komitmennya untuk *Go Global* melalui pembukaan kantor di Uni Emirat Arab, dan menjalankan inisiatif industri hijau melalui pengembangan amoniak bersih, serta pengembangan Kawasan Industri Hijau dan keberhasilan meraih PROPER Emas untuk sejumlah anak usahanya sebagai bagian dari upaya pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) yang dicanangkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2060.

The year 2022 became a separate record in the Company's history, where PTPI managed to achieve the highest profit in the Company's history. This achievement cannot be separated from the success of the transformation program that has been carried out over the past two years. Several initiatives have been carried out, such as centralization in a number of fields, increasing efficiency and digitalization in various fields which have proven to have a positive impact on the Company's performance.

The Company also remains committed to carrying out the duties of the Government in securing domestic fertilizer supply in order to support food security by continuing to carry out business aspects properly as mandated by the Shareholders.

In addition, PTPI has also carried out its commitment to Go Global through opening PTPI an office in the United Arab Emirates, and carrying out green industry initiatives through the development of clean ammonia, as well as the development of Green Industrial Estates and the success of achieving Gold PROPER for a number of its Subsidiaries as part of efforts to achieve Net Zero Emission (NZE) launched by the Government of Indonesia in 2060.



Memperkuat Konsolidasi, Melewati Tantangan, Menyambut Peluang
Strengthening Consolidation, Overcoming Challenges, Embracing Opportunities

Keberhasilan mengelola tantangan dengan hasil akhir yang positif tentu menjadi impian semua manusia. Dibutuhkan terobosan dan cara berpikir yang tidak biasa agar dapat menemukan celah di tengah tantangan yang ada, yang dapat menjadi peluang untuk tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan.

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan tentunya menciptakan imbas yang dalam di berbagai sektor perekonomian. Di tengah tantangan tersebut, PTPI justru berupaya memperkuat sentralisasi peran Holding dan memperkuat sinergi bersama seluruh entitas usaha yang tergabung dalam BUMN *Holding* Sektor Pupuk. Konsolidasi dan sinergi ini menjadi kunci untuk dapat terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Successfully managing challenges with positive end results is certainly the dream of all human beings. It takes a breakthrough and an unconventional way of thinking to find a gap during the challenging times that exist, which can be turned into opportunities to maintain growth momentum.

The prolonged COVID-19 pandemic has certainly deeply impacted the many economic sectors. During these challenges, PTPI has actually sought to strengthen the centralization through its role as a Holding, and to strengthen its synergies with all business entities that are members of the SOE Fertilizer Sector Holding. This consolidation and synergy has been the key to continuing to grow and to providing added value for shareholders and stakeholders.



Pencapaian dan Perkembangan Kinerja Keberlanjutan Tahun 2024

Achievement and Sustainability Performance Progress in 2024

PERTUMBUHAN
GROWTH

Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year

Rp8,89 Triliun
Trillion

Pertumbuhan Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year Growth

42,10%

Pendapatan
Revenue

Rp81,62 Triliun
Trillion

Pertumbuhan Pendapatan
Revenue Growth

3,04%

Volume Produksi
Production Volume

19.052.517 ton
(Pupuk & Non Pupuk | Fertilizer & Non-Fertilizer)

Pertumbuhan Volume Produksi
Production Volume Growth

1,15%

Volume Penjualan
Sales Volume

13.094.333 ton
(Pupuk & Non Pupuk | Fertilizer & Non-Fertilizer)

Pertumbuhan Volume Penjualan
Sales Volume Growth

11,84%

INOVASI
INNOVATION

Integrasi *end-to-end* proses pengadaan barang dan jasa di seluruh PI *Group* melalui aplikasi
End-to-end integration of the procurement process for goods and services across the PI Group through an application

ProcureX

Penguatan transformasi digital dan inovasi untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi distribusi pupuk subsidi melalui *rollout* di 37 Provinsi dengan total 27.208 kios
Strengthening digital transformation and innovation to improve transparency and efficiency of subsidized fertilizer distribution through rollout in 37 Provinces with a total of 27,208 kiosks

i-Pubers

Penyelarasan proses-proses SDM dan mengintegrasikan sistem SDM antar-perusahaan dalam PI *Group*
Aligning HC processes and integrating HC systems across companies in the PI Group

HCIS Single Platform

TATA KELOLA
GOVERNANCE

Most Trusted

"Sangat Tepercaya" di ajang CGPI *Award* 2024 oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG)
"Most Trusted" at the CGPI Award 2024 by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

idAAA

***Rating* Perseroan**
Company Rating

SOSIAL
SOCIAL

350.000 Ha

Realisasi Program Makmur
Makmur Program Realization

318,242 (Rp Miliar | Rp Billion)

Total Dana PUMK dan CSR
Total MSE and CSR Funds

LINGKUNGAN
ENVIRONMENT

1. **PT Petrokimia Gresik**
   PROPER EMAS | PROPER Gold
2. **PT Pupuk Kujang**
   PROPER EMAS | PROPER Gold
3. **PT Pupuk Kalimantan Timur**
   PROPER EMAS | PROPER Gold
4. **PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**
   PROPER EMAS | PROPER Gold
5. **PT Pupuk Iskandar Muda**
   PROPER EMAS | PROPER Gold

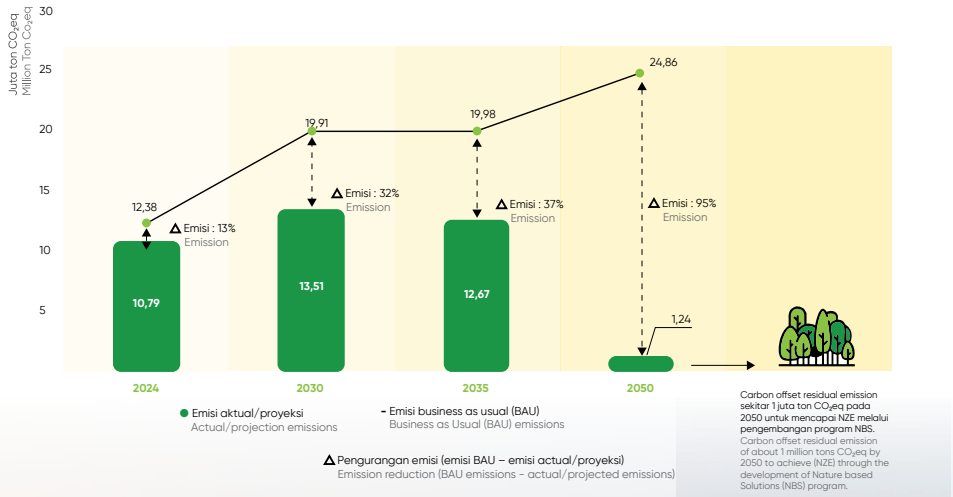
Pengurangan Emisi
Emissions Reduction

1.592.484 ton CO_2eq
Emisi Gas Rumah Kaca
Green House Gas Emissions

Skor ESG
ESG Score

56/100
dari lembaga *Rating* S&P Global
(Peringkat 1 Klaster Industri Pupuk Global)
from S&P Global Rating agency
(Ranked 1st in the Global Fertilizer Industry Cluster)

Roadmap Dekarbonisasi PTPI
Roadmap for Decarbonization of PTPI



2024	2025-2030 (*SHORT-TERM*)	2031-2035 (*MID-TERM*)	2036-2050 (*LONG-TERM*)
• *Energy Efficiency* • *Fuel switching from coal to natural gas* • *Utilization of green energy and Renewable Energy Certificate* • *Nature-based solutions* • *Electric Vehicle* • *Biomass co-firing pilot project*	• *Energy Efficiency (Pusri 3B, Revamp PKT-2)* • *Utilization of CO_2 for Soda Ash* • *CCS/blue ammonia* • *Hybrid green ammonia* • *Utilization of green energy, Renewable Energy Certificate, Co-firing* • *Nature-based solutions* • *Electric Vehicle*	• *Energy Efficiency* • *Addition of CCS capacity/blue ammonia* • *Utilization of green energy, Renewable Energy Certificate, Co-firing* • *Nature-based solutions* • *Electric Vehicle*	• *Energy Efficiency* • *Addition of CCS capacity/blue ammonia* • *Utilization of green energy, Renewable Energy Certificate, Co-firing* • *Nature-based solutions* • *Electric Vehicle*

Penghargaan dan Sertifikasi 2024
Awards and Certification 2024

Penghargaan I Awards



National Lighthouse 4.0 of the year 2024

Kementerian Perindustrian
The Ministry of Industry

21 Februari 2024 | February 21, 2024

Public Relations Indonesia Awards 2024 Category 20 Most Popular Institutions/ Corporations in Print and Online Media

PR Indonesia

7 Maret 2024 | March 7, 2024

Implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan Baik Kategori Kementerian/Lembaga
Implementation Controlling Gratification Well Ministry/Agency Category

KPK

24 Maret 2024 | March 24, 2024



Anugerah BUMN 2024
BUMN Award 2024

MSME Development Program Category-Terbaik 1
MSME Development Program Category-Best 1

Organizational Transformation Category-Terbaik 1
Organizational Transformation Category-Best 1

Best Corporate in Producing the Largest N-Based Fertilizer in The World

The Best CEO Visionary Leadership

BUMN Track

13 Maret 2024 | March 13, 2024



Inabuyer
Pasar Digital Usaha Mikro Kecil Menengah (PaDi UMKM) kategori BUMN
Digital Marketplace for Micro, Small, and Medium Enterprises (PaDi UMKM) in the State-Owned Enterprise (BUMN) Category

Kementerian Koperasi dan UKM
Ministry of Cooperatives and SMEs

17 Mei 2024 | May 17, 2024

Anugerah Transparansi & Penurunan Emisi
Transparency & Emissions Reduction Award

investortrust.id

29 Mei 2024 | May 29, 2024

Indonesia Regulatory Compliance Award (IRCA) 2024 Predikat gold
Indonesia Regulatory Compliance Award (IRCA) 2024 gold predicate

Hukumonline

5 Juni 2024 | June 5, 2024



Anugerah Bisnis Indonesia Social Responsibility Awards (BISRA) 2024 Platinum Award
Bisnis Indonesia Social Responsibility Awards (BISRA) 2024 Platinum Award

Bisnis Indonesia

27 Juni 2024 | June 27, 2024

Anugerah Ekonomi Hijau untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pertanian Lokal
Green Economy Award for Community Empowerment and Local Agriculture

detikcom

30 Juli 2024 | July 30, 2024

20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023
The 20 Largest Taxpayers in 2023

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kementerian Keuangan
Directorate General of Taxes
Ministry of Finance

26 Juli 2024 | July 26, 2024



Peringkat ke-71 dalam daftar 500 perusahaan terbaik ASEAN
Ranked 71st in the list of the 500 best companies in ASEAN

Fortune Southeast Asia 500

8 September 2024 | September 8, 2024



Paritrana Award
Badan Usaha Terbaik Sektor Perkebungan dan Pertanian
Paritrana Award for Best Business Entity in the Plantation and Agriculture Sector

Kemenko PMK
Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs

12 September 2024 | September 12, 2024



Anugerah ESG Republika 2024 kategori Sosial
Republika ESG Award 2024 in the Social category

Republika

19 September 2024 | September 19, 2024



Penghargaan 78 Tahun Serikat Perusahaan PERS (SPS) Kategori Pemimpin Divisi Komunikasi Terpopuler di Media Arus Utama
78th Anniversary Award of the Indonesian Press Association (SPS) in the category of Most Popular Division Head of Communications in Mainstream Media

SPS

20 September 2024 | September 20, 2024



Best Company in Corporate Learning Innovation 2024 – Platinum Award Category State Owned Enterprises Company

Economic Review

26 September 2024 | September 26, 2024



Best Company in Human Capital 2024 – Platinum Award Category State Owned Enterprises Company

Economic Review

26 September 2024 | September 26, 2024



BUMN Branding and Marketing Award

Platinum Trophy untuk sub kategori Employer and Employee Branding in Building Competent and Agile BUMN Personnel

Gold Trophy pada sub kategori Collaborations Between BUMN Personnel and Technology

The Best Brand Innovation Perusahaan BUMN dan Perusahaan Tbk
The Best Brand Innovation of BUMN and Public Companies

Platinum Trophy pada sub kategori Innovation & Technology Advancement dan Best Chief Marketing Officer (CMO) on Leadership & Teamwork

BUMN Track didukung oleh DMID
BUMN Track is supported by DMID

14 November 2024 | November 14, 2024



Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2024 Platinum Level

SNI Award 2024 Indonesia National Standardization & High Achievement Performance, Able to Manage Changes & Transform for Organization's Sustainability- Platinum Level

Most Trusted Company

NCCR

21 November 2024 | November 21, 2024

Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency

21 November 2024 | November 21, 2024

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

25 November 2024 | November 25, 2024



Investortrust ESG Awards 2024
Sectoral Champion Category

Investortrust

28 November 2024 | November 28, 2024

Indonesia CSR Awards (ICA)
Platinum Award untuk program "Social Tour Dambaan" berbasis Creating Shared Value (CSV)

Indonesia CSR Awards (ICA)
Platinum Award for the "Social Tour Dambaan" program based on Creating Shared Value (CSV)

CFCD

28 November 2024 | November 28, 2024

Indonesian SDGs Awards (ISDA)
Silver Award untuk program "Social Tour Dambaan" berbasis Creating Shared Value (CSV)

Indonesian SDGs Awards (ISDA)
Silver Award for the program "Social Tour Dambaan" program based on Creating Shared Value (CSV)

CFCD

28 November 2024 | November 28, 2024

No.	**Nama Sertifikasi** Certification Name	**Dikeluarkan Oleh** Issued By	**Tanggal Penerbitan Sertifikasi** Certification Issuance Date	**Masa Berlaku Sertifikasi** Certification Validity
1	ISO 20000-1:2008 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi ISO 20000-1:2008 Information Technology Service Management System	PT URS Indonesia	13 Februari 2023 February 13, 2023	13 Februari 2026 February 13, 2026
2	ISO 9001:2015-*Quality System Management Certification*	PT SGS Indonesia	10 Juni 2023 June 10, 2023	10 Juni 2025 June 10, 2025
3	SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System	TUV Nord Indonesia	27 Juni 2023 June 27, 2023	26 Juni 2026 June 26, 2026
4	ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 Compliance Management System	PT Chesna	23 Desember 2024 December 23, 2024	22 Desember 2027 December 22, 2027
5	ISO/IEC 27001 : 2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001: 2013 Information Security Management System	BSI	21 Maret 2024 March 21, 2024	31 Oktober 2025 October 31, 2025
6	Sertifikasi SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk PTPI (Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan, Perencanaan & Pemantauan, serta Perencanaan Penjualan & Penagihan *Public Service Obligation* (PSO). SNI ISO 37301:2021 Certification of Compliance Management System for PTPI (Governance & Compliance Function, Planning & Monitoring, and Sales Planning & Public Service Obligation (PSO) Collection).	PT Chesna	23 Desember 2024 December 23, 2024	22 Desember 2027 December 22, 2027
7	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk PT Pupuk Kujang (Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 2803:2012) Certificate of Product Use of SNI Mark (SPPT SNI) for PT Pupuk Kujang (The company has implemented SNI Quality Management System ISO 9001:2015 and the quality of its products has met the requirements of SNI 2803:2012)	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ministry of Industry of the Republic of Indonesia	6 Februari 2023 February 6, 2023	6 Februari 2025 February 6, 2025
8	Sertifikat SNI 2803:2012 untuk Pupuk NPK Padat PT Petrokimia Gresik dengan merek: Phonska Pupuk Indonesia, Phonska Plus, KEBOMAS, Phonska PG, Pelangi Agro, Petro Nitrat, Petro Ningrat, Pupuk Kujang Cikampek, Pupuk Indonesia *Holding Company* Phonska Plus, PETROKIMIA GRESIK Logo PG, Petro Cane, Sipedas, Phonska Booster/BUTIRAN; Granule. SNI 2803:2012 Certificate for PT Petrokimia Gresik Solid NPK Fertilizer with brands: Phonska Pupuk Indonesia, Phonska Plus, KEBOMAS, Phonska PG, Pelangi Agro, Petro Nitrat, Petro Ningrat, Pupuk Kujang Cikampek, Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus, PETROKIMIA GRESIK Logo PG, Petro Cane, Sipedas, Phonska Booster/BUTIRAN; Granule.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur East Java Provincial Government	28 April 2022 April 28, 2022	27 April 2026 April 27, 2026
9	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk PT Pupuk Kaltim (Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 2803:2012) Certificate of Product Use of SNI Mark (SPPT SNI) for PT Pupuk Kaltim (The company has implemented the SNI Quality Management System ISO 9001: 2015 and the quality of its products has met the requirements of SNI 2803: 2012).	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ministry of Industry of the Republic of Indonesia	7 Maret 2022 March 7, 2022	10 Mei 2026 May 10, 2026
10	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 2803:2012) Certificate of Product Use of SNI Mark (SPPT SNI) for PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (The company has implemented Quality Management System SNI ISO 9001:2015 and the quality of its products has met the requirements of SNI 2803:2012)	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ministry of Industry of the Republic of Indonesia	21 Juli 2021 July 21, 2021	21 Februari 2025 February 21, 2025

Daftar Isi
Table of Contents



PENDAHULUAN
INTRODUCTION

4 Kesinambungan Tema
Theme Continuity

8 Pencapaian dan Perkembangan Kinerja Keberlanjutan Tahun 2024
Achievement and Sustainability Performance Progress in 2024

10 Penghargaan dan Sertifikasi 2024
Awards and Certification 2024

16 Daftar Isi
Table of Contents

01 IKHTISAR KINERJA
PERFORMANCE HIGHLIGHTS

20 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

26 Ikhtisar Operasi
Operation Highlights

28 Ikhtisar Organisasi
Organization Highlights

29 Ikhtisar Saham
Stock Highlights

32 Kebijakan dan Pembayaran Dividen
Dividend Policy and Payment

36 Kilas Peristiwa 2024
2024 Event Highlights

02 LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

42 Laporan Komisaris
Board of Commissioners Report

54 Laporan Direksi
Board of Directors Report

70 Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Pupuk Indonesia (Persero)
Statement by the Members of Directors and Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero)

03 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

74 Informasi Umum dan Identitas Perusahaan
Company General Information and Identity

76 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History

82 Jejak Langkah
Milestone

84 Bidang Usaha, Produk dan Jasa, serta Pasar yang Dilayani
Line of Business, Products and Services, and Markets Served

90 Wilayah Operasional
Operational Area

96 Visi dan Misi
Vision and Mission

102 Filosofi Logo Perusahaan
Company Logo Philosophy

104 Struktur Organisasi
Organizational Structure

116 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

126 Profil Direksi
Board of Directors Profile

135 Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer Profile

138 Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer Profile

139 Demografi dan Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Demographics and Competency Development

154 Pemegang Saham
Shareholders

159 Daftar Entitas Anak, dan Entitas Asosiasi, dan Perusahaan Patungan
List of Subsidiaries, Associated, and Joint Ventures (JV)

172 Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham
Chronology of Issuance and Listing

174 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

181 Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

182 Lembaga dan Profesional Penunjang
Supporting Institutions and Professions

Scan QR Code di atas untuk melihat versi digital dari Laporan Tahunan ini

Scan the QR Code above to view a digital version of this Annual Report

184 Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, serta Informasi tentang Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan
List of Addresses of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, as well as Information on Branch Offices and Representative Offices

188 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company Website

04 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

192 Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industry Overview

196 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Review of Operations by Business Segment

202 Kinerja Tahun 2024: Aspek Produksi
Performance in 2024: Production Aspects

217 Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

220 Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya
Financial Review and Other Material Information

05 PENDUKUNG BISNIS
BUSINESS SUPPORT

302 Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Capital Development

324 Teknologi Informasi
Information Technology

335 Riset dan Inovasi
Research and Innovation

06 TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

354 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Commitment to Implementing Good Corporate Governance

375 Implementasi GCG
GCG Implementation

407 Monitoring GCG
GCG Monitoring

424 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

440 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

480 Komisaris Independen
Independent Commissioners

483 Direksi
Board of Directors

526 Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

534 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors

538 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration of the Board of Commissioners and Directors

547 Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan
Board of Commissioners, Directors, and Joint Meetings

558 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners

609 Kebijakan dan Prosedur Nominasi serta Suksesi Direksi
Board of Directors Nomination and Succession Policies and Procedures

612 Komite dan Organ Pendukung Direksi
Committees and Supporting Organs of the Board of Directors

625 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

634 Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan
Governance & Compliance Function

638 Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit/Internal Control Unit

654 Audit Eksternal/Akuntan Publik
External Audit/Public Accountant

664 Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan Kesesuaian terhadap Framework Internasional
Company Internal Control System and Compliance with International Frameworks

669 Manajemen Risiko
Risk Management

677 Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

689 Kebijakan Kompensasi Jangka Panjang: Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen Perseroan (MSOP/ESOP)
Long-Term Compensation Policy: Share Ownership Program by Employees and/or Management of the Company (MSOP/ESOP)

693 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

697 Pedoman Etika dan Perilaku
Ethical and Behavioral Guidelines

703 Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

708 Pengelolaan Benturan Kepentingan
Conflict of Interest Management

709 Kebijakan Anti-Fraud/Antikorupsi
Anti-Fraud/Anti-Corruption Policy

714 Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik
Information on Funding for Political Activities

715 Etika Perusahaan dalam Berhubungan dengan Pejabat Publik
Corporate Ethics in Dealing with Public Officials

716 Pelaporan Kekayaan Pejabat
Official Wealth Reporting

723 Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

727 Rantai Pasok
Supply Chain

729 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System

07 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

752 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility

08 LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT

897 Referensi POJK No. 29/POJK.04/2016 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
POJK NO. 29/POJK.04/2016 and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Reference

916 Referensi Kriteria Annual Report Award (ARA)
Annual Report Award (ARA) Criteria Reference

935 Pemenuhan Pertanyaan Bonus dan Penalti Kriteria ARA
Fulfillment of Bonus and Penalty Questions of ARA Criteria



Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

PTPI memulai cerita baik, menuangkan ide dan strategi dalam rapat. Memberi warna dalam setiap tanggung jawab, memberi inspirasi untuk bersama mewujudkan Swasembada Pangan Nasional.

PTPI begins its positive journey by shaping ideas and strategies through collaboration. Bringing meaning to every responsibility, the Company inspires collective efforts toward achieving national food self-sufficiency.



Mewarnai Masa Depan Ketahanan Pangan Indonesia

Shaping the Future of Indonesia's Food Security

Dalam semangat Sinergi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional, PTPI hadir sebagai entitas yang tidak hanya menyediakan solusi pertanian, tetapi juga memberi warna bagi masa depan bangsa. Warna di sini bukan sekadar simbol, tetapi mencerminkan peran aktif perusahaan dalam menciptakan perubahan positif, membangun inovasi, dan melahirkan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan pertanian masa depan.

Embracing the spirit of Synergy to Achieve National Food Self-Sufficiency, PTPI stands not only as a provider of agricultural solutions but also as a driving force in shaping the nation's future. Here, "shape" is more than just a symbol—it reflects the Company's active role in driving positive change, fostering innovation, and nurturing a new generation prepared to face the challenges of future agriculture.

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain
In Rp million, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Aset Assets							
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**50.343.800**	**58.439.356**	**77.975.094**	**44.174.212**	**38.693.988**	**(13,85)**	**5,40**
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	1.927.194	1.502.881	1.103.067	1.178.092	805.785	28,23	19,05
Aset Tetap Fixed Assets	79.680.596	75.695.175	74.658.647	74.118.213	75.215.169	5,27	1,16
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**88.952.855**	**84.556.974**	**80.745.413**	**84.288.960**	**83.801.568**	**5,20**	**1,20**
Jumlah Aset Total Assets	**139.296.655**	**142.996.330**	**158.720.507**	**128.463.172**	**122.495.556**	**(2,59)**	**2,60**
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	25.286.189	30.278.416	42.749.997	33.008.039	26.335.318	(16,49)	(0,81)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	14.649.740	20.752.736	24.810.210	23.515.157	28.797.421	(29,41)	(12,64)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**39.935.929**	**51.031.152**	**67.560.207**	**56.523.196**	**55.132.739**	**(21,74)**	**(6,25)**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**99.360.726**	**91.965.178**	**91.160.300**	**71.939.976**	**67.362.817**	**8,04**	**8,08**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**139.296.655**	**142.996.330**	**158.720.507**	**128.463.172**	**122.495.556**	**(2,59)**	**2,60**
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	25.057.611	28.160.940	35.225.097	11.166.173	12.358.670	(11,02)	15,18
Investasi Investment	9.323.318	3.911.072	3.461.120	2.113.916	1.523.501	138,38	43,66

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain
In Rp million, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Penjualan Produk Sales of Product	44.202.966	44.221.081	64.491.788	49.313.851	37.356.701	(0,04)	3,42
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia	33.323.915	32.512.230	36.109.067	25.258.692	25.712.148	2,50	5,32
Pendapatan Jasa Rendering of Services	4.089.327	2.473.956	3.258.638	4.030.593	8.808.724	65,30	(14,23)
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Revenue from Contract with Customers	81.616.208	79.207.267	103.859.493	78.603.136	71.877.573	3,04	2,57
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(65.590.416)	(63.303.146)	(70.288.172)	(63.469.789)	(60.755.846)	3,61	1,54
Laba Bruto Gross Profit	16.025.792	15.904.121	33.571.321	15.133.347	11.121.727	0,77	7,58
Beban Penjualan Selling Expenses	(1.039.742)	(1.276.030)	(1.183.293)	(1.280.505)	(1.186.769)	(18,52)	(2,61)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(5.970.735)	(5.031.467)	(5.956.428)	(4.023.124)	(4.024.090)	18,67	8,21
Pendapatan/(Beban) Lainnya – Bersih Other Income/(Expense) – Net	3.677.940	157.838	692.906	150.180	(105.342)	2230,20	(303,52)
Laba Operasi Operating Profit	12.693.255	9.754.462	27.124.506	9.979.898	5.805.526	30,13	16,94
Pendapatan Keuangan Finance Income	1.026.960	925.137	271.478	226.343	284.282	11,01	29,29
Biaya Keuangan Finance Costs	(1.917.934)	(2.519.821)	(2.243.064)	(2.047.494)	(2.975.349)	(23,89)	(8,41)
Bagian atas Laba/(Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures	(581.710)	447.295	(66.175)	296.018	236.889	(230,05)	(219,68)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	11.220.571	8.607.073	25.086.745	8.454.765	3.351.348	30,36	27,34
Beban Pajak Income Tax Expense	(2.334.533)	(2.353.514)	(6.576.153)	(3.320.090)	(1.025.767)	(0,81)	17,88
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	8.886.038	6.253.559	18.510.592	5.134.675	2.325.581	42,10	30,75
Jumlah (Rugi) Penghasilan/ Komprehensif lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Total Other Comprehensive (Loss) Income/for the Year after Tax	**(252.310)**	**(377.799)**	**1.480.776**	**46.592**	**(484.364)**	**(33,22)**	**(12,23)**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**8.633.728**	**5.875.760**	**19.991.368**	**5.181.267**	**1.841.217**	**46,94**	**36,21**

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain
In Rp million, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Profit for the Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	8.668.906	6.200.780	18.461.812	5.321.127	2.337.259	39,80	29,97
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	217.132	52.779	48.780	(186.452)	(11.678)	311,40	(279,42)
	8.886.038	6.253.559	18.510.592	5.134.675	2.325.581	42,10	30,75
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	8.416.596	5.822.981	19.942.588	5.367.719	1.852.895	44,54	35,35
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	217.132	52.779	48.780	(186.452)	(11.678)	311,40	(279,42)
	8.633.728	5.875.760	19.991.368	5.181.267	1.841.217	46,94	36,21
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk-Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah penuh) Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity-Basic and Diluted (in full Rupiah)	346.756	248.031	738.472	212.845	93.490	39,80	29,97



Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statements of Cash Flow

Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain
In Rp million, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows Generated from Operating Activities	22.488.663	6.481.747	22.030.176	14.517.293	16.076.203	246,95	6,94%
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows used in Investing Activities	(10.961.610)	(13.729.227)	(4.383.225)	(3.007.701)	(2.957.883)	(20,16)	29,95
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows used in Financing Activities	(10.929.088)	(9.311.270)	(2.385.661)	(6.457.203)	(12.746.973)	17,37	(3,03)
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents	597.965	(16.558.750)	15.261.290	5.052.389	371.347	(103,61)	10,00
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	94.891	(316.454)	746.025	(4.602)	60.775	(129,99)	9,32
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	16.585.416	33.460.620	17.453.305	12.405.518	11.973.396	(50,43)	6,73
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	17.278.272	16.585.416	33.460.620	17.453.305	12.405.518	4,18	6,85



Rasio-Rasio Keuangan
Financial Ratios

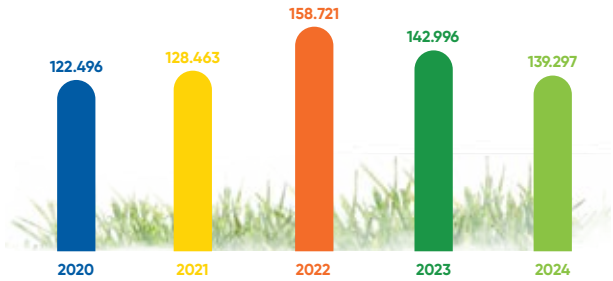
Dalam Persen
In Percent

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2023-2024
Profitabilitas Profitability						
Rasio Marjin Laba Bruto Gross Profit Margin	19,64	20,08	32,32	19,25	15,47	(0,44)
Rasio Marjin Laba Operasi Operating Profit Margin	15,55	12,32	26,12	12,70	8,08	3,24
Rasio Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	10,89	7,90	17,82	6,53	3,24	2,99
Rasio Laba terhadap Aset Profit to Asset	6,38	4,37	11,66	4,00	1,90	2,01
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas Net Income to Equity	8,94	6,80	20,31	7,14	3,74	2,14
Rasio EBITDA terhadap Pendapatan EBITDA to Revenue	16,59	18,40	29,64	18,04	13,72	(1,81)
Likuiditas Liquidity						
Rasio Kas Cash Ratio	68,33	54,78	78,27	52,88	47,11	13,55
Rasio Cepat Quick Ratio	144,84	136,57	134,29	91,69	102,75	8,27
Rasio Lancar Current Ratio	199,10	193,01	182,40	133,83	146,93	6,09
Solvabilitas Solvability						
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio						
Debt to Equity Ratio	40,19	55,49	74,11	78,57	81,84	(15,30)
Interest Bearing Debt	17,62	31,24	34,16	43,53	54,46	(13,62)
Interest Bearing Debt to EBITDA	1,29	1,97	1,01	2,21	3,74	(0,68)
Debt Service to Coverage Ratio (DSCR)	230,45	240,57	485,33	278,12	68,84	(10,12)
Interest Coverage Ratio (ICR)	706,16	578,47	1.379,80	692,53	331,43	127,69

Grafik Kinerja Keuangan
Financial Performance Chart

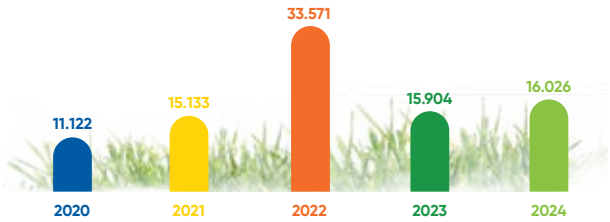
Jumlah Aset 2020–2024
Total Assets 2020–2024

Rp miliar
Rp billion



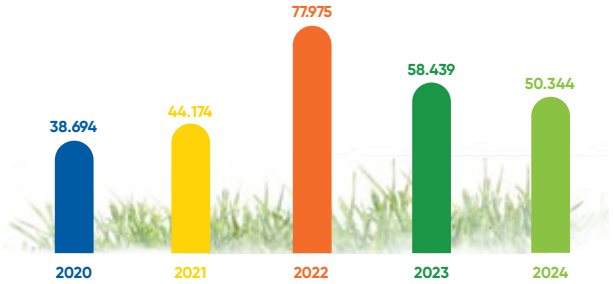
Perkembangan Laba Bruto 2020–2024
Gross Profit Trend 2020–2024

Rp miliar
Rp billion



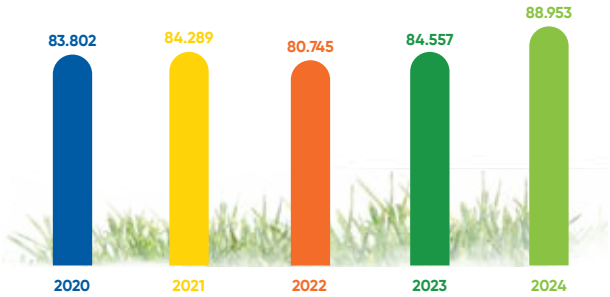
Aset Lancar 2020–2024
Current Assets 2020–2024

Rp miliar
Rp billion



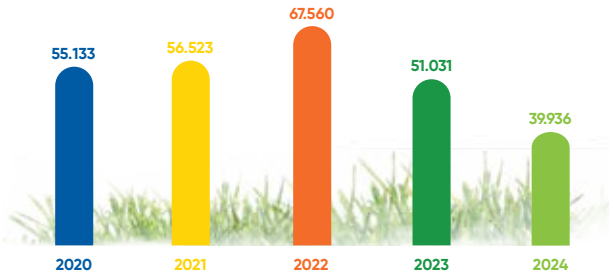
Aset Tidak Lancar 2020–2024
Non-Current Assets 2020–2024

Rp miliar
Rp billion



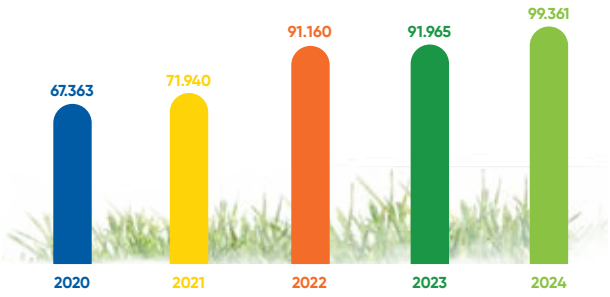
Jumlah Liabilitas 2020–2024
Total Liabilities 2020–2024

Rp miliar
Rp billion



Jumlah Ekuitas 2020–2024
Total Equity 2020–2024

Rp miliar
Rp billion



Ikhtisar Operasi
Operation Highlights

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Volume Produksi Production Volume								
Pupuk Fertilizer								
Urea	Ton	7.681.964	7.697.286	7.467.192	7.968.504	7.983.042	(0,20)	(0,77)
Non Urea	Ton	4,563,787	3.949.867	4.329.025	4.267.597	4.280.791	15,54	1,29
Total Volume Produksi Pupuk Total Fertilizer Production Volume	**Ton**	**12,245,751**	**11.647.154**	**11.796.218**	**12.236.101**	**12.263.833**	**5,14**	**(0,03)**
Non Pupuk Non-Fertilizer								
Amoniak Ammonia	Ton	5.881.249	5.941.798	5.957.455	6.149.670	6.013.016	(1,02)	(0,44)
Asam Sulfat Sulphuric Acid	Ton	570.696	925.912	886.688	881.200	853.111	(38,36)	(7,73)
Asam Fosfat Phosporic Acid	Ton	273.817	253.923	222.388	191.856	218.883	7,83	4,58
Aluminium Fluoride Aluminium Fluoride	Ton	10,830	9.570	9.323	7.265	7.114	13,17	8,77
Lain-Lain Others	Ton	70.174	57.533	64.179	58.899	26.295	21,97	21,69
Total Volume Produksi Non Pupuk Total Non-Fertilizer Production Volume	Ton	6.806.748	7.188.735	7.140.033	7.288.889	7.118.418	(5,31)	(0,89)
Total Volume Produksi Total Production Volume	**Ton**	**19,052,517**	**18.835.889**	**18.936.251**	**19.524.990**	**19.382.252**	**1,15**	**(0,34)**
Rasio Konsumsi Gas Gas Consumption Ratio								
Urea	MMBTU/ Ton	28.28	28,09	27,82	27,45	26,86	0,68	1,04
Amoniak Ammonia	MMBTU/ Ton	36.21	36,09	35,77	35,51	35,1	0,33	0,62
Volume Penjualan Sales Volume								
Pupuk Fertilizer								
Pupuk PSO PSO Fertilizer	Ton	7.327.950	6.186.785	7.406.566	7.919.045	8.430.114	18,69	(2,72)

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)
Pupuk Non PSO Non-PSO Fertilizer	Ton	4.672.762	4.192.880	4.157.003	4.993.125	4.943.888	10,76	(1,24)
Total Volume Penjualan Pupuk Total Fertilizer Sales Volume	**Ton**	**12.000.712**	**10.379.665**	**11.563.569**	**12.912.170**	**13.374.001**	**15,49**	**(2,17)**
Non Pupuk Non-Fertilizer								
Amoniak Ammonia	Ton	814.874	934.899	1.055.915	988.317	797.905	(12,84)	0,42
Non Amoniak Non-Ammonia	Ton	278.747	393.497	397.625	271.693	199.310	(29,16)	6,94
Total Volume Penjualan Non Pupuk Total Non-Fertilizer Sales Volume	Ton	1.093.622	1.328.396	1.453.540	1.260.010	997.215	(17,67)	1,86
Total Volume Penjualan Total Sales Volume	**Ton**	**13.904.333**	**11.708.061**	**13.017.109**	**14.172.180**	**14.371.216**	**11,84**	**(1,84)**
Nilai Penjualan dan Pendapatan Sales and Revenue Value								
Pupuk Fertilizer								
Nilai Penjualan Pupuk PSO PSO Fertilizer Sales Value	Rp juta Rp million	13.237.968	11.191.700	13.352.337	13.693.290	12.348.619	18,28	1,40
Nilai Penjualan Pupuk Non PSO Non-PSO Fertilizer Sales Value	Rp juta Rp million	22.884.956	22.620.206	33.667.340	24.878.782	18.641.100	1,17	4,19
Total Nilai Penjualan Pupuk Total Fertilizer Sales Value	**Rp juta** Rp million	**36.122.924**	**33.811.906**	**47.019.677**	**38.572.072**	**30.989.719**	**6,83**	**3,11**
Non Pupuk Non-Fertilizer								
Total Nilai Penjualan Non Pupuk Total Non-Fertilizer Sales Value	Rp juta Rp million	8.080.042	10.409.175	17.472.111	10.741.779	6.366.982	(22,38)	4,88
Penggantian Biaya Subsidi Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia	Rp juta Rp million	33.323.915	32.512.230	36.109.067	25.258.692	25.712.148	2,50	5,32
Pendapatan Jasa Rendering of Service	Rp juta Rp million	4.089.327	2.473.956	3.258.638	4.030.593	8.808.724	65,30	(14,23)
Jumlah Nilai Penjualan dan Pendapatan Total Sales and Revenue	**Rp juta** Rp million	**81.616.208**	**79.207.267**	**103.859.493**	**78.603.136**	**71.877.573**	**3,04**	**2,57**

Ikhtisar Organisasi
Organization Highlights

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Karyawan [1] Number of Employees	Orang People	7.456	7.441	7.538	7.851	8.336
Jam Kerja Aman Safe Working Hours	Jam Hours	48.103.759	52.800.556	58.471.948	73.560.164	57.173.988
Investasi Pendidikan dan Pelatihan bagi Karyawan Investment in Employee Education and Training	Rp miliar Rp billion	224,083	232,994	194,098	90,094	83,392
Jumlah Mitra Binaan dari program Kemitraan [2] Number of Partners Assisted by Partnership Program	Mitra Partners	3.559*	2.277	1.301	1.030	1.002
Penyaluran Dana PUMK [2] PUMK Fund Distribution	Rp miliar Rp billion	88,79**	63,31	100,96	103,47	127,29
Assessment Penerapan GCG [3] GCG Implementation Assessment	Skor Score	Dilaksanakan 2025 Implemented 2025	Juknis dicabut BUMN The technical guidelines were revoked by the SOE	96,37	92,33	93,90
Kriteria Penilaian Baldrige Excellence Framework (BEF) [4] Baldrige Excellence Framework (BEF) Assessment Criteria	Skor Score	Tidak dilakukan asesmen No assessment conducted	702,00	681,00	643,00	609,00
Rating Perusahaan Company Rating		idAAA	idAAA	idAAA	idAAA	idAAA

*) Jumlah mitra binaan aktif swakelola dan mitra binaan kerjasama BRI
Number of active self-managed fostered partners and BRI cooperation fostered partners
**) Jumlah penyaluran dana PUMK oleh BRI dan dana PUMK swakelola yang masih ada di mitra binaan
Number of PUMK funds disbursed by BRI and self-managed PUMK funds still held by fostered partners

1. Jumlah karyawan mencakup karyawan PKWTT PTPI dan Entitas Anak yang langsung berada di bawah PTPI. Pada tahun 2024 jumlah karyawan PKWTT tidak termasuk PT Pupuk Indonesia Utilitas.
2. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. (BUMN) No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
3. Kegiatan GCG Assessment Tahun Buku 2024 akan dilaksanakan pada tahun 2025.
4. Metode assessment menggunakan pendekatan Baldrige Excellence Framework yang dikeluarkan oleh National Institue of Standard and Technology (NIST) Amerika Serikat, sejak tahun 2013–2019 menggunakan KPKU oleh BEF, sejak tahun 2020 menggunakan Kriteria BEF oleh IQAF. Pada tahun 2024 tidak dilakukan assesmen.

1. The total number of employees includes permanent employees of PTPI and its direct Subsidiaries . In 2024, the count of permanent employees excluded PT Pupuk Indonesia Utilitas
2. The implementation of the Social and Environmental Responsibility Program is guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.
3. The GCG Assessment for the 2024 Fiscal Year will be conducted in 2025.
4. The assessment method adopts the Baldrige Excellence Framework (BEF) issued by the National Institute of Standards and Technology (NIST), United States. From 2013 to 2019, assessments were conducted using KPKU by BEF, and since 2020, the BEF criteria have been applied by IQAF. No assessment was conducted in 2024.

Ikhtisar Saham
Stock Highlights

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, PTPI belum melakukan penawaran umum saham perdana ke publik. Dengan demikian, rincian informasi terkait dengan pergerakan harga maupun volume perdagangan harga saham tidak dapat diuraikan.

As of the end of fiscal year 2024, PTPI has not conducted an initial public offering. Therefore, no detail information pertaining to price movements and share trading volume can be disclosed.

JUMLAH SAHAM

Per 31 Desember 2024, jumlah saham PTPI sebanyak 25.000.000 lembar saham, dengan kepemilikan 100% atau seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hingga penerbitan laporan ini, struktur kepemilikan saham PTPI adalah 1 saham Seri A Dwiwarna (dikuasai Pemerintah) dan 24.999.999 saham Seri B atau 99,99% yang dialihkan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) melalui penyertaan saham inbreng. Pemerintah tetap menjadi pemegang saham pengendali melalui kepemilikan langsung saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B yang dimiliki BKI secara tidak langsung melalui Danantara.

NUMBER OF SHARES

As of December 31, 2024, PTPI has 25,000,000 shares, with 100% ownership by the Government of the Republic of Indonesia.

As of the publication of this report, PTPI's share ownership structure includes 1 Series A Dwiwarna share (controlled by the Government) and 24,999,999 Series B shares (99.99%) transferred to PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) through an in-kind capital contribution. The Government remains the controlling shareholder through its direct ownership of Series A Dwiwarna shares and indirect ownership of Series B shares held by BKI through Danantara.

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI

Sepanjang tahun 2024, tidak ada aksi korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

CORPORATE ACTIONS INFORMATION

During the year of 2024, the Company did not undertake any corporate actions that affects its shares. Moreover, there are no stock split, reverse in stock, bonus shares or dilution in value of shares which taken place in 2024.

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA DAN/ ATAU SANKSI PERDAGANGAN SAHAM SERTA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak menerima sanksi yang berpengaruh pada aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, baik berupa penghentian perdagangan saham sementara atau penghapusan pencatatan saham mengingat Perseroan belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

INFORMATION ON TEMPORARY SUSPENSION AND/OR TRADING SANCTIONS OF SHARES, AND DELISTING OF SHARE

During the fiscal year 2024, the Company did not receive any sanctions that impacted trading activities on the Indonesia Stock Exchange, including but not limited to temporary suspension or delisting of shares, as the Company has not yet listed its shares on the Indonesia Stock Exchange.

INFORMASI PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN

Sebagai entitas usaha yang mendapatkan modal dari Pemerintah Indonesia, PTPI memiliki kewajiban untuk menyampaikan kronologi penerbitan saham sejak awal hingga posisi per tanggal 31 Desember 2024. Posisi Modal Disetor PTPI per tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp25.000.000.000.000 dengan jumlah lembar saham sebanyak 25.000.000 lembar bernilai Rp1.000.000 per lembar. Berikut kronologi penerbitan saham dari awal sampai akhir tahun buku:

INFORMATION ON STATE CAPITAL PARTICIPATION (PMN) AS COMPANY CAPITAL PARTICIPATION

As a business entity that receives capital support from the Indonesian Government, it is important to note chronological event of share issuance. As of December 31, 2024, PTPI's paid-up capital is amounted to Rp25,000,000,000,000, comprising of 25,000,000 shares that valued at Rp1,000,000 per share where the detail changes of company's capital can tabulated as hereunder:

Keterangan Description	Tahun Year	Jumlah (Rp juta) Total (Rp million)	Akumulasi (Rp juta) Accumulation (Rp million)	Akta Notaris Notarial Deed	Nama Notaris Notary's Name
Modal Awal Initial Capital	1970	7.000	7.000	Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 Deed No. 4 dated January 3, 1970	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1975	24.000	31.000	Akta No. 2 tanggal 1 April 1975 Deed No. 2 dated April 1, 1975	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1976	6.000	37.000	Akta No. 62 tanggal 20 Mei 1976 Deed No. 62 dated May 20, 1976	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1981	108.000	145.000	Akta No. 7 tanggal 5 Oktober 1981 Deed No. 7 dated October 5, 1981	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1984	55.000	200.000	Akta No. 19 tanggal 20 Juli 1984 Deed No. 19 dated July 20, 1984	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1989	870.710	1.570.710	Akta No. 4 tanggal 4 September 1989 Deed No. 4 dated September 4, 1989	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1997	1.829.290	2.900.000	Akta No. 14 tanggal 12 September 1997 Deed No. 14 dated September 12, 1997	Imas Fatimah, S.H.
Penambahan Additional	2002	6.000	2.906.000	Akta No. 13 tanggal 5 Februari 2002 Deed No. 13 dated February 5, 2002	Imas Fatimah, S.H.
Penambahan Additional	2005	957.948	3.863.948	Akta No. 20 tanggal 12 September 2005 Deed No. 20 dated September 12, 2005	Fathiah Helmi, S.H.
Penambahan Additional	2008	390.000	4.253.948	Akta No. 6 tanggal 4 Februari 2008 Deed No. 6 dated February 4, 2008	Fathiah Helmi, S.H.
Penambahan Additional	2008	35.058	4.289.006	Akta No. 15 tanggal 11 Desember 2008 Deed No. 15 dated December 11, 2008	Fathiah Helmi, S.H.
Penambahan Additional	2011	6.321.000	10.610.006	Akta No. 7 tanggal 7 Januari 2011 Deed No. 7 dated January 7, 2011	Fathiah Helmi, S.H.
Penambahan Additional	2012	1.338.048	11.948.054	Akta No. 11 tanggal 19 Januari 2012 Deed No. 11 dated January 19, 2012	Lumassia, S.H.
Penambahan Additional	2013	951.854	12.899.908	Akta No. 14 tanggal 26 April 2013 Deed No. 14 dated April 26, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H.
Penambahan Additional	2018	12.100.092	25.000.000	Akta No. 3 tanggal 24 Oktober 2018 Deed No. 3 dated October 24, 2018	Lumassia, S.H.

DIVIDEN SAHAM

Realisasi pembagian Dividen tunai untuk hasil usaha tahun buku 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

SHARE DIVIDENDS

The comparison of paid up dividend on Fiscal Year of 2024 and 2023 can be summarized as follows:

Dividen Saham Share Dividend	**2024 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2023** for Fiscal Year 2023 Operating Results)	**2023 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2022** for Fiscal Year 2022 Operating Results)	**Peningkatan/ (Penurunan)** Increase/(Decrease)
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Entitas Induk (Rp juta) Net Income Attributable to Parent Entity (Rp million)	6.200.780	18.461.812	(66,41)
Jumlah Dividen Kas yang Dibagikan (Rp juta) Total Cash Dividends Distributed (Rp million)	1.213.402	5.046.000	(75,95)
Dividen Kas per Saham (Rp) Cash Dividend per Share (Rp)	48.536	201.840	(75,95)
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Distribution Ratio (%)	19,57	27,33	(28,40)
Tanggal Pengumuman Announcement Date	22 Juli 2024 July 22, 2024	6 Juni 2023 June 6, 2023	-
Tanggal Pembayaran Payment Date	Pembayaran: Payment: 21 Agustus 2024 August 21, 2024	• Pembayaran I: 6 Juli 2023 • Pembayaran II: 4 Agustus 2023 • Pembayaran III: 6 September 2023 • Payment I: July 6, 2023 • Payment II: August 4, 2023 • Payment III: September 6, 2023	-

Kebijakan dan Pembayaran Dividen
Dividend Policy and Payment

DASAR KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Manajemen mengusulkan pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan mengacu pada kinerja Perusahaan selama periode tertentu. Usulan tersebut diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen hanya dapat dibagikan jika Perusahaan memiliki saldo laba ditahan yang positif dan telah memenuhi ketentuan minimal cadangan wajib.

BASIS OF DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

Management proposes dividend payments to shareholders based upon Company's performance at certain specific period. This proposal is accordingly decided upon General Meeting of Shareholders (GMS). Dividends can only be allocated whenever the Company has a positive retained earnings balance and met the minimum mandatory reserve requirements.

PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN 2024 DAN TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPI tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp6,2 triliun, dengan komposisi sebagai berikut:

DIVIDEND DISTRIBUTION FOR 2024 AND PREVIOUS YEARS

Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PTPI regarding the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, shareholders approved the allocation of the net profit for the 2023 fiscal year attributable to the owners of the parent entity, amounting to Rp6.2 trillion, with the following composition:

Laba Bersih yang Diatribusikan
Net Income Attributable

Rp6.200.780
(Rp juta | Rp million)

kepada entitas induk tahun 2024
to parent entity in 2024

Dividen Kas yang Dibagikan
Cash Dividends Distributed

Rp1.213.402
(Rp juta | Rp million)

(jumlah dividen yang didistribusikan)
(total dividends distributed)

Rasio Pembayaran Dividen
Dividend Payout Ratio

19,57%

(persentase laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tahun 2024 yang dibagikan sebagai dividen)
(percentage of net profit attributable to the parent entity in 2024 distributed as dividends)

Nilai Dividen Kas
Cash Dividend Value

Rp48.536

(per lembar saham | per share)

Tanggal Pengumuman
Date of Announcement

22 Juli 2024

July 22, 2024

Tanggal Pembayaran
Payment Date

21 Agustus 2024

August 21, 2024

Pembagian dan pembayaran dividen tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Historical payment of company's dividends from 2020 to 2024 can be seen in the table below.

Tahun Pembagian Year of Sharing	**Tahun Buku Dividen** Dividend Year	**Tanggal Pengumuman** Announcement Date	**Tanggal Pembayaran** Payment Date	**Dividen Kas yang Dibagikan** Cash Dividends Distributed **Rp Juta** Rp Million	**Dividen per Lembar Saham** Dividend per Share **(Rp/lembar saham)** (Rp/share)	**Rasio Pembagian Dividen** Dividend Payout Ratio **(%)**
2024	2023	22 Juli 2024 July 22, 2024	21 Agustus 2024 August 21, 2024	1.213.402	48.536	19,57
2023	2022	6 Juni 2023 June 6, 2023	6 Juli 2023 July 6, 2023 4 Agustus 2023 August 4, 2023 6 September 2023 September 6, 2023	5.046.000	201.840	27,33
2022	2021	29 Juni 2022 June 29, 2022	28 Juli 2022 July 28, 2022 29 Agustus 2022 August 29, 2022 29 September 2022 September 29, 2022	750.000	30.000	14,09
2021	2020	30 Juni 2021 June 30, 2021	29 Juli 2021 July 29, 2021 30 Agustus 2021 August 30, 2021 29 September 2021 September 29, 2021	588.030	23.521	25,16
2020	2019	4 Agustus 2020 August 4, 2020	2 September 2020 September 2, 2020 2 Oktober 2020 October 2, 2020 2 November 2020 November 2, 2020	973.500	38.940	26,73

Rasio pembagian dividen sebesar 26,73% pada tahun 2020 dihitung berdasarkan laba bersih konsolidasian tahun buku 2019 sebesar Rp3,64 triliun, sebagaimana tercantum dalam keputusan RUPS. Nilai tersebut mengacu pada laporan keuangan sebelum dilakukan restatement oleh auditor independen pada tahun 2020, yang menyesuaikan laba tahun 2019 menjadi Rp2,9 triliun. Dengan demikian, rasio dividen tersebut tidak menggunakan angka laba bersih setelah restatement.

The dividend payout ratio of 26.73% in 2020 was calculated based on the consolidated net profit for fiscal year 2019 amounting to Rp3.64 trillion, as stated in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders. This amount referred to the financial statements prior to the restatement conducted by the independent auditor in 2020, which adjusted the 2019 net profit to Rp2.9 trillion. Accordingly, the dividend payout ratio was based on the pre-restated net profit.

Dividen Kas yang Dibagikan Tahun 2020-2024
Cash Dividends Distributed (2020-2024)

Rp miliar
Rp Billion

Tahun Year	**Nilai** Value
2020	974
2021	588
2022	750
2023	5.046
2024	1.213

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA PENDANAAN LAINNYA

PTPI telah beberapa kali menerbitkan obligasi yang dananya digunakan seluruhnya untuk *refinancing* pinjaman perbankan dan obligasi sebelumnya. Obligasi yang masih beredar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selain obligasi berikut ini, PTPI tidak menerbitkan efek apa pun dalam bentuk lain.

INFORMATION ON BOND, SUKUK, AND/OR CONVERTIBLE BOND, AND OTHER FUNDING

PTPI has issued bonds for several times, with the proceeds entirely to refinance bank loans and also previous outstanding bonds. The remaining bonds as per 2024 are depicted in the table below. Apart of these bonds, PTPI has not issued any other forms of securities.

Obligasi yang Masih Beredar Hingga Tahun 2024
Outstanding Bonds at the End of Year 2024

Tahun Penerbitan Issuance Year	Nama Obligasi Name of Bond	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Nilai Obligasi Bond Value (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status	Bursa Efek Stock Exchange
2020	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020 Seri B (PIHC02BCN1) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2020 Series B (PIHC02BCN1)	3 September 2020 September 3, 2020	857.835.000.000	3 September 2025 September 3, 2025	7,70%	Pefindo idAAA (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020 Seri C (PIHC02CCN1) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2020 Series C (PIHC02CCN1)	3 September 2020 September 3, 2020	431.850.000.000	3 September 2027 September 3, 2027	8,30%	Pefindo idAAA (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
2021	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021 Seri B (PIHC02BCN2) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2020 Series B (PIHC02BCN2)	10 Maret 2021 March 10, 2021	1.600.000.000.000	10 Maret 2026 March 10, 2026	6,20%	Pefindo idAAA (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021 Seri C (PIHC02CCN2) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2021 Series C (PIHC02CCN2)	10 Maret 2021 March 10, 2021	800.000.000.000	10 Maret 2028 March 10, 2028	7,20%	Pefindo idAAA (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Jumlah Total			**3.689.685.000.000**					

Obligasi yang Telah Dilunasi pada Periode 2023-2024
Bonds Paid Off in 2023-2024

Tahun Penerbitan Issuance Year	Nama Obligasi Name of Bond	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Nilai Obligasi Bond Value (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status	Bursa Efek Stock Exchange
2017	Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap I Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN1) PTPI Shelf Registration Bonds I, Stage I, Year 2017, Series B (PIHC01BCN1)	12 Juli 2017 July 12, 2017	2.085.000.000.000	12 Juli 2024 July 12, 2024	8,60%	Pefindo idAAA (Outlook Stable)	Lunas sesuai Jatuh Tempo Paid Off According to Maturity Date	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
2020	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020 Seri A (PIHC02ACN1) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2020 Series A (PIHC02ACN1)	3 September 2020 September 3, 2020	1.146.825.000.000	3 September 2023 September 3, 2023	7,00%	Fitch AAAidn (Outlook Stable)	Lunas sesuai Jatuh Tempo Paid Off According to Maturity Date	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
2021	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021 Seri A (PIHC02ACN2) PTPI Shelf Registration Bonds II, Stage II, Year 2021, Series A (PIHC02ACN2)	10 Maret 2021 March 10, 2021	350.000.000.000	10 Maret 2024 March 10, 2024	5,60%	Pefindo idAAA (Outlook Stable)	Lunas sesuai Jatuh Tempo Paid Off According to Maturity Date	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Jumlah Total			**3.581.825.000.000**					

INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Hingga akhir tahun 2024, PTPI tidak memiliki sumber pendanaan selain Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai penyertaan modal Perusahaan, penerbitan obligasi, serta pinjaman perbankan.

INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCES

As of the end of 2024, Company's sources of funding were limited to State Capital Injection (PMN) as equity participation, bond issuance, and bank loans, with no other sources of funding

Kilas Peristiwa 2024
2024 Event Highlights



10 Januari 2024 | January 10, 2024

PTPI menerapkan pemberian diskon atau pengurangan harga bagi penjualan pupuk nonsubsidi di 43 sentra pangan, guna membantu petani dalam percepatan musim tanam akibat dampak fenomena El Nino.

PTPI is implementing discounts or price reductions for the sale of non-subsidized fertilizers in 43 food centers, to help farmers accelerate the planting season due to the impact of the El Niño phenomenon.



29 Februari 2024 | February 29, 2024

Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat di Kawasan Industrial Estate (KIE), Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik ini dikelola secara *joint venture* antara PT Pupuk Kaltim dan PT Dahana, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN). Adapun, nilai investasi pembangunan pabrik mencapai Rp1,2 triliun dengan kapasitas produksi 75.000 ton per tahun.

President Joko Widodo inaugurated the ammonium nitrate plant in the Industrial Estate (KIE), Bontang, East Kalimantan. This plant is managed as a joint venture between PT Pupuk Kaltim and PT Dahana, known as PT Kaltim Ammonium Nitrate (KAN). The investment value for the plant's construction reached Rp1.2 trillion, with a production capacity of 75,000 tons per year.



17 April 2024 | April 17, 2024

PI *Group* menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pengurangan emisi karbon. PT Pupuk Kujang pada tanggal 17 April 2024 meresmikan pabrik *Dry Ice* berkapasitas 3.000 Ton per tahun. Produk dry ice merupakan komoditas yang dibuat dari CO_2 atau karbon dioksida. Selain mengurangi emisi karbon, pabrik ini juga merupakan pengembangan bisnis dan menambah laba Perusahaan.

PI Group demonstrates its commitment to supporting the carbon emission reduction program. On April 17, 2024, PT Pupuk Kujang inaugurated a Dry Ice plant with a capacity of 3,000 tons per year. Dry ice is a commodity made from CO_2 or carbon dioxide. In addition to reducing carbon emissions, this plant also represents business development and increases company profit.



24 April 2024 | April 24, 2024

PTPI berinisiatif untuk menjajaki pengembangan urea dan amoniak bersama Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd (BFI) melalui penandatangan *Head of Agreement* (HoA) tentang pengembangan urea dan amoniak. Kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PTPI, Rahmad Pribadi dan *Chief Executive Officer* BFI Sdn Bhd, Harri Kiiski di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

PTPI is taking the initiative to explore the development of urea and ammonia with Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd (BFI) through the signing of a Head of Agreement (HoA) regarding urea and ammonia development. This cooperation was directly signed by PTPI's President Director, Rahmad Pribadi, and BFI Sdn Bhd's Chief Executive Officer, Harri Kiiski, in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE).



13 Juni 2024 | June 13, 2024

Dalam rangka menjaga budaya inovasi, PTPI mengadakan Pupuk Indonesia *Innovation Awards* 2024 (PIIA). Program ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam mewujudkan ketahanan pangan serta memperkuat sebagai pemain utama industri pupuk di tingkat global.

In order to foster a culture of innovation, PTPI held the Pupuk Indonesia Innovation Awards 2024 (PIIA). This program aims to increase the Company's contribution to realizing food security and strengthening its position as a major player in the global fertilizer industry.



21 Juni 2024 | June 21, 2024

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas oleh PI *Group* di Forum Gas Bumi. PJBG yang ditandatangani dalam forum tersebut yaitu :
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Pertamina EP
- PT Pupuk Kujang dengan Pertamina EP

Penandatanganan PJBG ini merupakan salah satu upaya menjaga kontinuitas pasokan gas bumi untuk mendukung operasional Perusahaan.

PI Group signed Gas Sale and Purchase Agreements (GSPAs) at the Natural Gas Forum. The GSPAs executed during the forum were between:
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and Pertamina EP
- PT Pupuk Kujang and Pertamina EP

The signing of these GSPAs represents a key initiative to ensure continuous natural gas supply, thereby supporting the Company's operational continuity.



22 Juni 2024 | June 22, 2024

PTPI berhasil masuk peringkat ke-71 dalam daftar 500 perusahaan terbaik ASEAN versi Fortune Southeast Asia 500 berkat pendapatan Rp79,2 triliun pada tahun 2023. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan inovasi seluruh tim PTPI, yang juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

PTPI successfully ranked 71st on the Fortune Southeast Asia 500 list of top companies, driven by its Rp79.2 trillion revenue in 2023. This achievement is a result of the hard work and innovation of the entire PTPI team, which also contributes to national food security.



12 Juli 2024 | July 12, 2024

PI *Group* menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan meresmikan pengoperasian gudang curah urea berkapasitas 20.000 ton di Kawasan PT Petrokimia Gresik. Gudang ini menjadi bukti nyata langkah strategis PI *Group* dalam mengoptimalkan rantai pasok pupuk.

PI Group demonstrates its commitment to supporting national food security by inaugurating the operation of a 20,000-ton urea bulk warehouse in the PT Petrokimia Gresik area. This warehouse serves as tangible proof of PI Group's strategic step in optimizing the fertilizer supply chain.



26 Juli 2024 | July 26, 2024

PTPI tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh DJP Kementerian Keuangan yang disampaikan langsung dalam memperingati Hari Pajak 2024.

PTPI has been listed as one of the 20 Largest Taxpayers of 2023 by the Directorate General of Taxes (DJP) of the Ministry of Finance. This award was presented directly by the DJP of the Ministry of Finance during the commemoration of Tax Day 2024.



1 Agustus 2024 | August 1, 2024

PTPI bersama tiga Anak Perusahaannya, yaitu Petrokimia Gresik, Pupuk Kalimantan Timur, dan Pupuk Sriwidjaja Palembang menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Angkat Besi Youth U15-U17 Pupuk Indonesia 2024 di Bandung.

PTPI together with its three Subsidiaries , namely Petrokimia Gresik, Pupuk Kalimantan Timur, and Pupuk Sriwidjaja Palembang, held the National Weightlifting Championship (Kejurnas) Youth U15-U17 Pupuk Indonesia 2024 in Bandung.



14 Agustus 2024 | August 14, 2024

Sebagai salah satu bentuk komitmen PT Pusri Palembang (PSP) yang merupakan Anak Perusahaan PTPI, dalam pemenuhan kebutuhan pupuk nasional, PSP melakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE JM) Penandatanganan ini merupakan langkah penting dalam mengamankan pasokan gas untuk mendukung operasional Perseroan.

As part of its commitment to supporting national fertilizer supply, PT Pusri Palembang (PSP), a Subsidiary of PTPI, signed a Gas Sales and Purchase Agreement (GSPA) with PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE JM). This signing marks a significant step in securing gas supply to support the Company's operational continuity.



15 Agustus 2024 | August 15, 2024

PTPI menerapkan Program Tani Maju Makmur Sejahtera (Tajumase) yang diselenggarakan di dua desa di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kehadiran program ini membuat para petani dan nelayan di Pulau Lembata dapat memanfaatkan lahan-lahan di desanya untuk menciptakan kemandirian pangan dan ekonomi.

PTPI implemented the Tani Maju Makmur Sejahtera (Tajumase) Program in two villages on Lembata Island, East Nusa Tenggara (NTT). The program enables farmers and fishermen on Lembata Island to utilize their village lands to achieve food and economic self-reliance.



22 Agustus 2024 | Agustus 22, 2024

Penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan/*Joint Development Agreement* (JDA) bertajuk *Green Ammonia Initiative from* Aceh (*Project* GAIA) ditandatangani oleh Direktur Utama PTPI, Rahmad Pribadi bersama dengan Presiden dan COO ITOCHU, Keita Ishii serta Presiden dan CEO TOYO, Eiji Hosoi pada 2nd *Asia Zero Emission Community* (AZEC) *Ministerial Meeting* yang dilangsungkan di Jakarta.

The signing of a joint development agreement (JDA) titled Green Ammonia Initiative from Aceh (Project GAIA) was signed by the President Director of PTPI, Rahmad Pribadi, together with the President and COO of ITOCHU, Keita Ishii, and the President and CEO of TOYO, Eiji Hosoi, at the 2nd Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting held in Jakarta.



30 Agustus 2024 | August 30, 2024

PTPI memberikan penghargaan kepada sosok petani inspiratif atau pahlawan pangan melalui Svarna Bhumi *Award* 2024.

PTPI honored inspiring farmers or food heroes through the Svarna Bhumi Award 2024.



6 September 2024 | September 6, 2024

Program Pupuk Indonesia *Quality & Innovation* (PIQI) untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan bisnis Perseroan. Pada PIQI 2024 mengusung tema "*Green Growth*", yaitu menjaring danmengembangkan inovasi yang mampu menciptakan pertumbuhan usaha dan ramah lingkungan.

Pupuk Indonesia Quality & Innovation (PIQI) program to encourage innovation and sustainability of the Company's business. PIQI 2024 carries the theme "Green Growth", which is to capture and develop innovations that can create business growth and are environmentally friendly.



8 September 2024 | September 8, 2024

PTPI berhasil masuk peringkat ke-15 dalam daftar 100 perusahaan terbaik Indonesia versi majalah Fortune Indonesia berkat pendapatan Rp79,2 triliun pada tahun 2023. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan inovasi seluruh tim PTPI, yang juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

PTPI has successfully ranked 15th in Fortune Indonesia 100's list of the 100 best companies in Indonesia, thanks to its revenue of Rp79.2 trillion in 2023. This achievement is the result of the hard work and innovation of the entire PTPI team, which also contributes to national food security.



17 September 2024 | September 17, 2024

Penandatanganan *Head of Terms* (HoT) Perjanjian Pembelian Hidrogen Hijau bersama PLN dan ACWA Power dalam agenda Indonesia *International Sustainability Forum* (IISF) 2024 untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Signing of the Head of Terms (HoT) for the Green Hydrogen Purchase Agreement with PLN and ACWA Power during the Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 to increase the utilization of new and renewable energy (EBT) in Indonesia.



24 September 2024 | September 24, 2024

PTPI Gelar Jambore Makmur di Aceh untuk Dorong Regenerasi Petani. Jambore MAKMUR 2024 berhasil melibatkan lebih dari 500 peserta, termasuk petani muda, penyuluh, serta mahasiswa dari berbagai universitas pertanian di Indonesia. Dalam program ini, para peserta mendapatkan bimbingan dan wawasan baru yang membantu mereka mengadopsi praktik-praktik pertanian modern dan ramah lingkungan.

PTPI held the MAKMUR Jamboree in Aceh to promote farmer regeneration. The MAKMUR 2024 Jamboree successfully involved over 500 participants, including young farmers, agricultural extension workers, and students from various agricultural universities across Indonesia. During the program, participants received guidance and new insights to help them adopt modern and environmentally friendly farming practices.



2 Oktober 2024 | October 2, 2024

PTPI berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pertanian berkelanjutan dan terintegrasi di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah, melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bertajuk Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI).

PTPI is committed to creating a sustainable and integrated agricultural ecosystem in Dieng Kulon Village, Banjarnegara, Central Java, through its social and environmental responsibility program (TJSL) titled Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI).



25 Oktober 2024 | October 25, 2024

PTPI Bawa Karya UMKM di Pagelaran Jakarta *Fashion Week* bertajuk "Merajut Benang Sriwidjaja". Melalui kolaborasi ini, PTPI berharap dapat menjadi sumber inspirasi akan kreasi tanpa batas menggunakan kain-kain wastra yang perlu dilestarikan. Tenun songket adalah salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk digali terutama dalam segmentasi mode dan desain.

PTPI Showcases MSME Creations at Jakarta Fashion Week under the theme "Merajut Benang Sriwidjaja."
Through this collaboration, PTPI hopes to inspire limitless creativity using traditional textiles that need to be preserved.
Songket weaving is one of Indonesia's cultural heritages with great potential to be explored, especially in the fashion and design segments.



12 November 2024 | November 12, 2024

PTPI mengumumkan rencana pengembangan proyek hibrida amoniak pertama di dunia, *Green Ammonia Initiative from* Aceh (GAIA), di COP29, Baku, Azerbaijan.

PTPI announced the development plan of the world's first hybrid ammonia project, Green Ammonia Initiative from Aceh (GAIA), at COP29 in Baku, Azerbaijan.



13 November 2024 | November 13, 2024

PTPI Promosi Proyek *Green Ammonia* di Ajang COP 29. Untuk dapat merealisasikan proyek tersebut, PTPI bekerja sama dengan dua perusahaan asal Jepang, Toyo Engineering Corporation dan ITOCHU Corporation, dalam sebuah joint venture yang mendukung rantai nilai produksi dan distribusi amoniak hijau.

PTPI Promoted Green Ammonia Project at COP 29. To realize that project, PTPI has collaborated with two japanese companies, Toyo Engineering Corporation and ITOCHU Corporation, in a joint venture that supports the production and distribution value chain of green ammonia.



22 November 2024 | November 22, 2024

Rembuk Tani PTPI di Semarang dihadiri Wakil Presiden, Gibran Rakabuming. Sepanjang Tahun 2024, Rembuk Tani terlaksana di 89 titik.

The PTPI Farmers' Forum in Semarang was attended by Vice President Gibran Rakabuming. Throughout 2024, the Farmers' Forum was held at 89 locations.



24 Desember 2024 | December 24, 2024

Teken Kontrak Dari Kementan, PTPI Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Mulai 1 Januari 2025

After signing a contract with the Ministry of Agriculture, PTPI is ready to distribute subsidized fertilizer starting January 1, 2025.



Laporan Manajemen

Management Report



Membangun Masa Depan Ketahanan Pangan dengan Kepedulian dan Dedikasi
Building a Future of Food Security with Care and Dedication

PTPI memastikan niat baik dari seluruh pemangku kepentingan terwujud. Secara konsisten dan terukur membantu mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Menjadikan tanggung jawab PTPI untuk memberi layanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

PTPI ensures that the goodwill of all stakeholders is realized. Consistently and measurably, it helps improve the lives of millions of Indonesians. This reflects PTPI responsibility to provide the best services to all stakeholders.

Laporan Komisaris
Board of Commissioners Report



“Memperkuat peran dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Strengthening the role in supporting Indonesia’s food security.”

Darmin Nasution
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan penuh rasa tanggung jawab, kami atas nama Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero), selanjutnya disebut "Perseroan" atau "PTPI", menyampaikan laporan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi sepanjang tahun 2024. Tahun ini merupakan periode penuh tantangan dan peluang bagi Perseroan dalam memperkuat perannya sebagai pemimpin industri pupuk nasional dan mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Sebagai Dewan Komisaris, kami menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan arahan strategis guna memastikan keberlanjutan bisnis Perseroan dalam menghadapi tantangan industri, perubahan kebijakan pemerintah, serta dinamika ekonomi global. Kami mengapresiasi kinerja Direksi yang telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi Perseroan.

SEKILAS KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI

Tahun 2024 ditandai dengan dinamika ekonomi global yang penuh tantangan akibat ketidakpastian geopolitik, kebijakan moneter yang ketat di negara-negara maju, serta fluktuasi harga energi dan komoditas. Ketegangan di beberapa kawasan utama dunia berdampak pada stabilitas rantai pasok global, termasuk industri pupuk yang sangat bergantung pada pasokan bahan baku utama seperti gas alam. Kebijakan suku bunga tinggi di berbagai negara untuk mengendalikan inflasi juga berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi global, yang pada akhirnya memengaruhi daya beli dan investasi di sektor pertanian serta industri pupuk. Meski demikian, di tengah tekanan eksternal tersebut, perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan stabil. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,03% secara tahunan (c-to-c), didukung oleh permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali pada tingkat 1,57%, serta kebijakan fiskal yang tetap terjaga.

Dari perspektif sektor pertanian, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai respons terhadap tantangan global dan domestik, termasuk perubahan iklim, konversi lahan pertanian, serta volatilitas harga pangan. Dalam mendukung sektor pertanian, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024 serta menambah anggaran subsidi sebesar Rp14 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp40 triliun.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With a great sense of responsibility, we, on behalf of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero), hereinafter referred to as the "Company" or "PTPI", submit a supervisory report on the implementation of the Board of Directors' duties throughout 2024. This year has been a period full of challenges and opportunities for the Company in strengthening its role as the leader of the national fertilizer industry and supporting Indonesia's food security.

As the Board of Commissioners, we carry out supervisory functions and provide strategic direction to ensure the sustainability of the Company's business in facing industry challenges, changes in government policies, and global economic dynamics. We appreciate the performance of the Board of Directors who have implemented various strategic steps in facing challenges and encouraging sustainable growth for the Company.

ECONOMIC AND INDUSTRIAL CONDITIONS AT A GLANCE

The year 2024 is characterized by challenging global economic dynamics due to geopolitical uncertainty, tight monetary policies in developed countries, and fluctuations in energy and commodity prices. Tensions in several major regions of the world have impacted the stability of global supply chains, including the fertilizer industry, which is highly dependent on the supply of key raw materials such as natural gas. High interest rate policies in various countries to control inflation have also contributed to a slowdown in global economic growth, which in turn has affected purchasing power and investment in the agricultural sector as well as the fertilizer industry. Nevertheless, despite these external pressures, the Indonesian economy has continued to grow steadily. Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) increased by 5.03% annually (c-to-c),supported by strong domestic demand, inflation that was kept under control at 1.57%, and a well-maintained fiscal policy.

From the perspective of the agricultural sector, the Indonesian government remains committed to strengthening national food security in response to global and domestic challenges, including climate change, agricultural land conversion, and food price volatility. In supporting the agricultural sector, the government increased the allocation of subsidized fertilizers from 4.7 million tons to 9.55 million tons in 2024, and increased the subsidy budget by Rp14 trillion, bringing the total subsidy

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa petani memiliki akses yang lebih baik terhadap pupuk dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong produktivitas pertanian guna menjaga ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, tantangan seperti keterbatasan lahan pertanian dan peningkatan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan populasi menuntut adanya solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam industri pupuk untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penggunaan pupuk secara optimal.

Industri pupuk nasional menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya tuntutan efisiensi energi dalam produksi pupuk, regulasi lingkungan yang semakin ketat, serta disrupsi rantai pasok global yang berdampak pada harga bahan baku. Sebagai industri yang bergantung pada gas alam sebagai bahan baku utama, volatilitas harga gas menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap biaya produksi. Selain itu, transformasi industri pupuk menjadi semakin mendesak untuk meningkatkan daya saing, baik melalui optimalisasi rantai pasok, diversifikasi energi bersih, maupun digitalisasi sistem distribusi.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA DIREKSI TAHUN 2024

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2024 dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, dinamika industri pupuk, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi mampu merancang dan mengeksekusi strategi yang tepat guna memastikan keberlanjutan bisnis Perseroan, termasuk melalui optimalisasi kapasitas produksi, peningkatan efisiensi operasional, serta inovasi dalam produk dan layanan. Berbagai inisiatif yang dijalankan Direksi berhasil menjaga daya saing Perseroan di tengah meningkatnya regulasi lingkungan serta tekanan terhadap harga bahan baku, terutama gas alam yang merupakan komponen utama dalam produksi pupuk.

Kinerja ekspor pupuk mengalami penurunan pada tahun 2024, dengan volume ekspor tercatat sebesar 1,53 juta ton, turun dari 1,69 juta ton pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena Perseroan lebih memprioritaskan kebutuhan domestik guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Meski demikian, upaya strategis Perseroan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk PTPI tetap berlanjut. Permintaan ekspor dari kawasan Asia dan Afrika tetap menjadi peluang bagi Perseroan untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan regional dan global.

budget to Rp40 trillion. This policy aims to ensure that farmers have better access to affordable fertilizers, while also encouraging agricultural productivity to maintain national food security. On the other hand, challenges such as limited agricultural land and increased food needs due to population growth demand more innovative and sustainable solutions in the fertilizer industry to increase production efficiency and optimal use of fertilizers.

The national fertilizer industry faces increasingly complex challenges, including increasing demands for energy efficiency in fertilizer production, stricter environmental regulations, and disruption of the global supply chain that impacts the price of raw materials. As an industry heavily reliant on natural gas as its primary raw material, gas price volatility is a significant factor affecting production costs. In addition, transforming the fertilizer industry has become increasingly urgent to enhance competitiveness, whether through supply chain optimization, clean energy diversification, or the digitalization of distribution systems.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2024

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors demonstrated solid performance throughout 2024 in navigating various global economic challenges, dynamics in the fertilizer industry, and changes in government policies related to the management of subsidized fertilizers. Amidst an environment filled with uncertainty, the Board of Directors was able to formulate and execute effective strategies to ensure the sustainability of the Company's business, including through the optimization of production capacity, enhancement of operational efficiency, and innovation in products and services. The various initiatives undertaken by the Board of Directors have successfully maintained the Company's competitiveness amid tightening environmental regulations and increasing pressure on raw material prices, particularly natural gas, which is a key component in fertilizer production.

Fertilizer export performance decreased in 2024, with export volume recorded at 1.53 million tons, down from 1.69 million tons in 2023. This decrease was due to the Company prioritizing domestic needs to support the national food security program. However, the Company's strategic efforts to expand the market and increase the competitiveness of Indonesian fertilizer products continue. Export demand from the Asia and Africa regions remains an opportunity for the Company to strengthen its contribution in supporting regional and global food security.

Dari aspek keuangan, Dewan Komisaris mencermati bahwa Perseroan mampu mempertahankan pertumbuhan yang solid dengan membukukan pendapatan sebesar Rp81,62 triliun, yang didorong oleh peningkatan volume produksi, efisiensi biaya operasional, serta strategi ekspansi pasar yang efektif. Direksi juga berhasil mengoptimalkan rantai pasok dan menerapkan strategi cost leadership, yang berkontribusi terhadap peningkatan margin keuntungan meskipun terdapat tekanan dari volatilitas harga bahan baku. Selain itu, strategi diversifikasi produk dan penguatan bisnis pupuk non-subsidi serta produk turunannya, seperti *ammonium* nitrat dan *soda ash*, turut memberikan sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi Perseroan.

Selain pencapaian di bidang operasional dan keuangan, Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah-langkah strategis Direksi dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Perseroan telah mulai mengadopsi energi hijau melalui penggunaan solar PV, grid PLN, dan biomass cofiring sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Direksi juga mendorong pengembangan *clean ammonia* sebagai solusi jangka panjang dalam mengurangi emisi karbon. Berbagai inisiatif ini tidak hanya menunjukkan komitmen Perseroan terhadap agenda keberlanjutan nasional dan global, tetapi juga memperkuat daya saing jangka panjang. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan keberlanjutan usaha di tengah tantangan industri yang terus berkembang.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Dewan Komisaris secara aktif memantau perumusan dan implementasi strategi yang dijalankan oleh Direksi untuk memastikan keselarasan dengan visi dan misi Perseroan serta kebijakan pemerintah. Sepanjang tahun 2024, Perseroan menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks, termasuk volatilitas harga bahan baku, ketatnya regulasi lingkungan, serta peningkatan kebutuhan pupuk nasional dalam mendukung ketahanan pangan. Dalam menghadapi tantangan ini, Direksi merumuskan berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada optimalisasi produksi, efisiensi operasional, penguatan rantai pasok, serta inovasi produk. Dewan Komisaris mengawasi secara intensif pelaksanaan berbagai inisiatif tersebut, termasuk proyek revitalisasi dan revamping pabrik, seperti pembangunan Pusri-IIIB dan Revamping PKT-2, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang usia operasional fasilitas produksi.

From a financial perspective, the Board of Commissioners observed that the Company was able to maintain solid growth by posting revenue of Rp81.62 trillion, driven by increased production volume, operational cost efficiency, and an effective market expansion strategy. The Board of Directors also succeeded in optimizing the supply chain and implementing a cost leadership strategy, which contributed to an increase in profit margins despite pressure from raw material price volatility. In addition, the strategy of product diversification and strengthening of the non-subsidized fertilizer business and its derivative products, such as ammonium nitrate and soda ash, also provide significant additional sources of income for the Company.

In addition to achievements in the operational and financial fields, the Board of Commissioners also appreciates the strategic steps taken by the Board of Directors in implementing the principle of sustainability. The Company has begun to adopt green energy through the use of solar PV, the state electricity grid, and biomass cofiring as part of an effort to reduce dependence on fossil energy. The Board of Directors is also encouraging the development of clean ammonia as a long-term solution to reducing carbon emissions. These various initiatives not only demonstrate the Company's commitment to the national and global sustainability agenda, but also strengthen long-term competitiveness. Taking these various aspects into account, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has performed its duties well in maintaining business growth, improving operational efficiency, and ensuring business sustainability amid evolving industry challenges.

SUPERVISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF COMPANY STRATEGY

As part of its supervisory duties, the Board of Commissioners actively monitors the formulation and implementation of strategies carried out by the Board of Directors to ensure alignment with the Company's vision and mission as well as government policies. Throughout 2024, the Company faces increasingly complex industry challenges, including raw material price volatility, strict environmental regulations, and increased national fertilizer needs in support of food security. In facing these challenges, the Board of Directors formulated various strategic policies that focused on optimizing production, operational efficiency, strengthening the supply chain, and product innovation. The Board of Commissioners intensively supervised the implementation of these initiatives, including Plant revitalization and revamping projects, such as the construction of Pusri-IIIB and Revamping PKT-2, which aimed to improve energy efficiency and extend the operational life of production facilities.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mengawasi upaya Direksi dalam mendorong transformasi digital dan penguatan aspek keberlanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang Perseroan. Implementasi sistem digital, seperti iPubers dan *Command Center*, telah meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi pupuk, sehingga memastikan penyaluran pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, langkah Direksi dalam mengembangkan *clean ammonia* dan penggunaan energi hijau menunjukkan komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan dan transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Dewan Komisaris secara berkala memberikan masukan strategis serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), keseimbangan antara profitabilitas dan keberlanjutan, serta kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang disusun oleh Direksi telah mempertimbangkan secara komprehensif berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi industri pupuk. Dengan meningkatnya kebutuhan pupuk sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional, peluang bagi Perseroan untuk terus berkembang masih sangat besar. Dukungan pemerintah melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi serta kebijakan yang mendorong efisiensi tata kelola pupuk menjadi faktor utama yang dapat memperkuat posisi Perseroan di pasar domestik. Selain itu, permintaan pupuk global juga menunjukkan tren pertumbuhan, terutama dari kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, yang membuka peluang ekspansi bagi Perseroan dalam meningkatkan volume ekspor.

Dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks, Direksi telah menyusun strategi jangka panjang yang mencakup diversifikasi produk, optimalisasi operasional, serta penguatan kapabilitas produksi melalui modernisasi pabrik dan penerapan teknologi digital. Upaya untuk mengembangkan produk inovatif, seperti clean ammonia dan pupuk berbasis teknologi hijau, menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing Perseroan di tengah meningkatnya regulasi lingkungan global. Selain itu, pemanfaatan energi hijau dalam proses produksi serta penerapan digitalisasi dalam sistem distribusi juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dewan Komisaris mendukung strategi ini dan mendorong Direksi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan industri guna memastikan keberlanjutan usaha.

In addition, the Board of Commissioners also oversees the Board of Directors' efforts to encourage digital transformation and strengthen sustainability aspects as part of the Company's long-term strategy. The implementation of digital systems, such as iPubers and Command Center, has increased the transparency and efficiency of fertilizer distribution, ensuring that subsidized fertilizer is distributed more precisely. In addition, the Board of Directors' steps in developing clean ammonia and the use of green energy demonstrate the Company's commitment to sustainability and a more environmentally friendly energy transition. The Board of Commissioners periodically provides strategic input and ensures that every policy implemented continues to prioritize the principles of good corporate governance (GCG), a balance between profitability and sustainability, and a contribution to national food security.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS AS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners is of the opinion that the business outlook prepared by the Board of Directors has comprehensively considered various external and internal factors affecting the fertilizer industry. With the increasing demand for fertilizer as part of the national food security strategy, the opportunities for the Company to continue growing remain very substantial. Government support through increased allocation of subsidized fertilizer and policies that encourage efficient fertilizer management are the key factors that can strengthen the Company's position in the domestic market. In addition, global fertilizer demand is also showing a growth trend, especially from Asia, Africa, and South America, which opens up expansion opportunities for the Company in increasing export volume.

In facing increasingly complex industry challenges, the Board of Directors has formulated a long-term strategy that includes product diversification, operational optimization, and strengthening of production capabilities through Plant modernization and the application of digital technology. Efforts to develop innovative products, such as clean ammonia and green technology-based fertilizers, are strategic steps that can increase the Company's competitiveness amid increasing global environmental regulations. In addition, the utilization of green energy in the production process and the application of digitalization in the distribution system are also expected to improve operational efficiency and provide added value for stakeholders. The Board of Commissioners supports this strategy and encourages the Board of Directors to continue to adapt to industry developments to ensure business sustainability.

Ke depan, keberhasilan Perseroan dalam menjalankan strategi bisnisnya akan sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola risiko serta mengoptimalkan peluang di tengah dinamika industri. Perubahan iklim, fluktuasi harga bahan baku, serta ketatnya regulasi lingkungan merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dengan pendekatan inovatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas riset dan pengembangan (R&D), penguatan kemitraan strategis, serta penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, Perseroan diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri pupuk nasional, sekaligus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

In the future, the Company's success in executing its business strategy will depend heavily on its ability to manage risks and optimize opportunities amid industry dynamics. Climate change, fluctuating raw material prices, and stringent environmental regulations are challenges that need to be anticipated with an innovative and sustainable approach. Therefore, the Board of Commissioners emphasizes the importance of improving research and development (R&D) capabilities, strengthening strategic partnerships, and implementing sustainable business practices as part of a long-term growth strategy. With these initiatives, the Company is expected to maintain its position as the national fertilizer industry leader, while increasing its contribution in supporting food security and sustainable economic development.

PENILAIAN ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG) DI PERSEROAN

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2024, Direksi telah menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dalam mengelola Perseroan. Komitmen terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan tercermin dalam berbagai kebijakan dan inisiatif yang telah diterapkan. Perseroan terus memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi melalui implementasi berbagai mekanisme pengendalian internal, termasuk penerapan sistem *Key Risk Indicators* (KRI) untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko bisnis secara lebih proaktif. Selain itu, Perseroan juga meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional, memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas tata kelola, Perseroan juga terus mengembangkan teknologi digital sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengelolaan risiko. Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) yang semakin diperkuat memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat, untuk melaporkan potensi pelanggaran secara aman dan rahasia. Selain itu, pemanfaatan Command Center dan digitalisasi proses pengadaan melalui ProcureX juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam operasional bisnis. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah ini sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola yang semakin modern dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IN THE COMPANY

The Board of Commissioners considers that throughout 2024, the Board of Directors has implemented the principles of Good Corporate Governance (GCG) well in managing the Company. The commitment to transparent, accountable, and sustainable governance is reflected in the various policies and initiatives that have been implemented. The Company continues to strengthen its regulatory oversight and compliance systems through the implementation of various internal control mechanisms, including the application of a Key Risk Indicators (KRI) system to identify and mitigate business risks more proactively. In addition, the Company also improves transparency in financial and operational reporting, ensuring that every strategic decision made is in accordance with the principles of fairness and accountability to all stakeholders.

In an effort to improve the effectiveness of governance, the Company also continues to develop digital technology as part of the risk monitoring and management system. The increasingly strengthened implementation of the Whistleblowing System (WBS) allows stakeholders, including employees, business partners, and the community, to report potential violations safely and confidentially. In addition, the utilization of the Command Center and the digitization of the procurement process through ProcureX also increase transparency and efficiency in business operations. The Board of Commissioners appreciates these steps as a form of innovation in governance that is increasingly modern and adaptive to changes in the dynamic business environment.

Perseroan juga menunjukkan komitmen kuat dalam mengintegrasikan aspek *Environmental*, *Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi bisnisnya. Penerapan kebijakan keberlanjutan, termasuk efisiensi energi, pengelolaan limbah berbasis prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R), serta peningkatan kesejahteraan karyawan, merupakan bagian dari tata kelola yang bertanggung jawab. Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat implementasi GCG dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur yang diterapkan tidak hanya memenuhi standar kepatuhan nasional, tetapi juga sejalan dengan praktik terbaik internasional.

The company also shows a strong commitment to integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into its business strategy. The implementation of sustainability policies, including energy efficiency, waste management based on the principles of reduce, reuse, recycle (3R), and improving employee welfare, is part of responsible governance. The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue strengthening GCG implementation by ensuring that all policies and procedures implemented not only meet national compliance standards, but are also in line with international best practices.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi dalam pelaporan keuangan Perseroan. Komite Audit secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan dan proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal maupun internal guna memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan Perseroan dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, Komite Audit juga berperan aktif dalam meninjau efektivitas kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan tata kelola risiko serta pengendalian fraud, termasuk pengawasan terhadap penerapan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Komite Pemantau Risiko memainkan peran strategis dalam mengawasi manajemen risiko yang diterapkan oleh Perseroan guna memastikan bahwa setiap potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas bisnis telah diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas harga bahan baku, Komite Pemantau Risiko telah melakukan berbagai kajian risiko, termasuk risiko keuangan, operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Penerapan *Key Risk Indicators* (KRI) telah menjadi instrumen yang efektif dalam memantau dan mengelola risiko yang dihadapi oleh Perseroan secara lebih proaktif. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Komite Pemantau Risiko dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh Direksi tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan serta daya tahan bisnis terhadap berbagai tantangan industri.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners considers that throughout 2024, the Audit Committee has performed its duties well in ensuring the effectiveness of the internal control system, compliance with regulations, and transparency in the Company's financial reporting. The Audit Committee periodically evaluates the financial statements and audit processes carried out by external and internal auditors to ensure that all of the Company's financial activities are managed in accordance with the principles of accountability and transparency. In addition, the Audit Committee also plays an active role in reviewing the effectiveness of policies and procedures relating to risk management and fraud control, including overseeing the implementation of the Whistleblowing System (WBS) as an early detection mechanism for potential misconduct.

The Risk Monitoring Committee plays a strategic role in overseeing the risk management implemented by the Company to ensure that any potential risks that may affect business stability have been properly identified and mitigated. In facing global economic uncertainty and volatility in raw material prices, the Risk Monitoring Committee has conducted various risk assessments, including financial and operational risks, as well as compliance with increasingly stringent environmental regulations. The application of Key Risk Indicators (KRIs) has become an effective instrument in monitoring and managing the risks faced by the Company more proactively. The Board of Commissioners appreciates the performance of the Risk Monitoring Committee in ensuring that every policy and strategy implemented by the Board of Directors continues to consider the aspects of sustainability and business resilience to various industry challenges.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam memastikan bahwa kebijakan terkait pengelolaan SDM, struktur organisasi, serta sistem remunerasi berjalan secara transparan dan kompetitif. Komite ini secara aktif melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi dan manajemen, serta memberikan rekomendasi terkait pengembangan kapabilitas kepemimpinan guna memastikan keberlanjutan kepemimpinan di Perseroan. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga berperan dalam meninjau kebijakan terkait kesejahteraan karyawan serta program peningkatan kompetensi, termasuk melalui penerapan sistem *Human Experience Management* (HXM) yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas tenaga kerja. Dewan Komisaris menilai bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh komite ini telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, berdaya saing, serta mampu mendorong kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memastikan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan secara menyeluruh di seluruh aspek operasional Perseroan. Komite ini secara berkala melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan prosedur tata kelola, serta memberikan rekomendasi terkait peningkatan efektivitas sistem kepatuhan dan transparansi. Sepanjang tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengawal implementasi berbagai inisiatif digitalisasi tata kelola, termasuk ProcureX untuk transparansi dalam pengadaan serta pemanfaatan *Command Center* guna memastikan pengawasan distribusi pupuk yang lebih efektif. Dewan Komisaris mengapresiasi peran strategis yang dimainkan oleh komite ini dalam memperkuat fondasi tata kelola yang lebih modern dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta daya saing Perseroan.

In the aspect of Human Capital management, the Nomination and Remuneration Committee has performed its function well in ensuring that policies related to HC management, organizational structure, and remuneration system are transparent and competitive. This committee actively evaluates the performance of the Board of Directors and management, and provides recommendations related to the development of leadership capabilities to ensure the sustainability of leadership in the Company. In addition, the Nomination and Remuneration Committee also plays a role in reviewing policies related to employee welfare and competency improvement programs, including through the implementation of the Human Experience Management (HXM) system which aims to improve workforce satisfaction and productivity. The Board of Commissioners believes that the policies formulated by this committee have contributed to creating an inclusive and competitive work environment that is capable of driving the Company's performance in a sustainable manner.

As part of efforts to strengthen corporate governance, the Integrated Governance Committee has ensured that the principles of Good Corporate Governance (GCG) are applied comprehensively in all aspects of the Company's operations. The committee periodically reviews governance policies and procedures and provides recommendations on improving the effectiveness of the compliance and transparency systems. Throughout 2024, the Integrated Governance Committee has overseen the implementation of various governance digitalization initiatives, including ProcureX for transparency in procurement and the use of the Command Center to ensure more effective oversight of fertilizer distribution. The Board of Commissioners appreciates the strategic role played by this committee in strengthening the foundation of more modern and sustainability-oriented governance, thus increasing stakeholder trust and the Company's competitiveness.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHAN

Pada tanggal 4 Maret 2024, terjadi penyesuaian dalam susunan Dewan Komisaris PTPI dengan ditetapkannya Riswinandi sebagai Komisaris Independen yang baru. Selanjutnya, pada 22 Juli 2024, Pemegang Saham kembali melakukan penambahan anggota dengan menunjuk Danar Rahmanto dan Irfan Ahmad Fauzi sebagai Komisaris Independen. Penambahan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan kinerja Dewan Komisaris, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan serta pengambilan keputusan dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap dinamika usaha. Kemudian pada 24 November 2024, Anhar Adel telah berakhir jabatannya.

Berikut susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

On March 4, 2024, there was an adjustment to the composition of the Board of Commissioners of PTPI with the appointment of Riswinandi as the new Independent Commissioner. Subsequently, on July 22, 2024, the Shareholders again added members by appointing Danar Rahmanto and Irfan Ahmad Fauzi as Independent Commissioners. This addition was made as a strategic step to strengthen the capacity and performance of the Board of Commissioners, ensuring that supervisory functions and decision-making processes can be carried out more effectively and responsively to business dynamics. Then, on November 24, 2024, Anhar Adel's term of office ended.

The following is the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024:

Nama Name	**Jabatan** Position
Darmin Nasution	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner
Farhat Brachma	Komisaris Commissioner
Suwandi	Komisaris Commissioner
Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris Commissioner
Ari Dwipayana	Komisaris Commissioner
Anwar Sanusi	Komisaris Commissioner
Riswinandi	Komisaris Independen Independent Commissioner
Danar Rahmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner
Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner

APRESIASI

Dewan Komisaris mengapresiasi seluruh jajaran Direksi, manajemen, dan karyawan Perseroan atas dedikasi dan kerja keras yang telah mendorong pencapaian kinerja optimal sepanjang tahun 2024. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para pemegang saham, pemerintah, mitra bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan bagi Perseroan.

Dengan fondasi yang kuat dan strategi yang tepat, kami optimistis bahwa Perseroan akan terus berkembang, memperkuat daya saing global, serta memberikan kontribusi yang semakin besar bagi ketahanan pangan nasional dan pembangunan berkelanjutan.

APPRECIATION

The Board of Commissioners appreciates all members of the Board of Directors, management, and employees of the Company for their dedication and hard work that have driven optimal performance throughout 2024. We would also like to express our appreciation to the shareholders, the government, business partners, and all stakeholders who have provided support to the Company.

With a strong foundation and the right strategy, we are optimistic that the Company will continue to grow, strengthen its global competitiveness, and make an even greater contribution to national food security and sustainable development.

Jakarta, 23 Mei 2025
Jakarta, May 23rd, 2025

Atas Nama Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
On Behalf of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero)



DARMIN NASUTION
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner





Dari kiri ke kanan
From left to right

1. **Riswinandi**
   Komisaris Independen
   Independent Commissioner
2. **Mustoha Iskandar**
   Komisaris Independen
   Independent Commissioner
3. **Febrio Nathan Kacaribu**
   Komisaris
   Commissioner
4. **Danar Rahmanto**
   Komisaris Independen
   Independent Commissioner



5. **Irfan Ahmad Fauzi**
   Komisaris Independen
   Independent Commissioner
6. **Darmin Nasution**
   Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
   President Commissioner concurrently Independent Commissioner
7. **Anwar Sanusi**
   Komisaris
   Commissioner
8. **Ari Dwipayana**
   Komisaris
   Commissioner
9. **Suwandi**
   Komisaris
   Commissioner
10. **Farhat Brachma**
    Komisaris
    Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors Report



> "A Leading global agrosolution and integrated chemical company"

Rahmad Pribadi
Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan penuh rasa syukur, kami atas nama Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI") menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun 2024. Di tengah dinamika industri dan tantangan global yang terus berkembang, Perseroan berhasil mempertahankan perannya sebagai pemimpin industri pupuk nasional dengan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan Indonesia. Tidak hanya itu, PTPI juga berhasil menunjukkan perannya di dunia internasional dengan menjadi produsen urea dan amoniak terbesar di Kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Pasifik.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Perseroan, pemerintah, mitra bisnis, serta para pemangku kepentingan lainnya yang terus mendukung visi kami dalam mewujudkan: *"A Leading Global Agrosolution and Integrated Chemical Company"* Sejalan dengan komitmen tersebut, Perseroan terus memperkuat strategi bisnis melalui optimalisasi kapasitas produksi, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan solusi pertanian berkelanjutan. Upaya transformasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga mencakup digitalisasi, inovasi produk, dan implementasi praktik keberlanjutan guna menjawab tantangan industri pupuk serta mendukung pertumbuhan sektor pertanian Indonesia.

Atas nama Direksi, perkenankan kami menyampaikan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun 2024, sekaligus sebagai refleksi terhadap langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan guna memastikan keberlanjutan bisnis dan kontribusi Perseroan bagi pembangunan ekonomi nasional.

PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI

Tahun 2024 ditandai dengan dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, kebijakan moneter ketat di beberapa negara maju, serta fluktuasi harga energi dan komoditas. Ketidakpastian ini berdampak pada stabilitas rantai pasok dan harga bahan baku industri, termasuk industri pupuk yang bergantung pada pasokan gas alam. Di Indonesia, perekonomian tetap menunjukkan pertumbuhan positif dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,03% secara tahunan (c-to-c), didukung oleh stabilitas inflasi yang terkendali pada tingkat 1,57% dan kebijakan fiskal yang terjaga. Dengan fundamental ekonomi yang kuat, Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengah ketidakpastian global.

Dear Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI"), we would like to convey our heartfelt gratitude for the Company's performance and achievements in 2024. Considering global dynamics and a variety of challenges, the Company has demonstrated significant success in contributing to Indonesia's food self-sufficiency program. Furthermore, PTPI has established itself as the largest producer of urea and ammonia in Asia Pacific, Middle East and North Africa.

This success cannot be separated from the strong synergy between the Company, the government, business partners, and other stakeholders who continue to support our vision in realizing: "A Leading Global Agrosolution and Integrated Chemical Company" In line with this commitment, the Company is continuing to strengthen its business strategy by optimizing production capacity, enhancing operational efficiency, and developing sustainable agricultural solutions. The transformation efforts are not only focused on operational aspects, but also encompass digitalization, product innovation, and implementation of sustainable practices to address fertilizer industry challenges and support the growth of Indonesia's agricultural sector.

On behalf of the Board of Directors, please allow us to submit this report as a form of accountability for the Company's performance achievements in 2024, as well as a reflection on the strategic steps that have been implemented to ensure the Company's business sustainability and contribution to national economic development.

ECONOMIC AND INDUSTRY CONDITIONS DYNAMICS

The year 2024 is marked by challenging global economic conditions brought on by geopolitical tensions, tight monetary policies in a number or developed countries, and fluctuations in the price of energy and commodities. This uncertainty has an impact on the stability of the supply chain and prices of industrial raw materials, including the fertilizer industry which relies on natural gas supplies. In Indonesia, the economy continues to show growth with Gross Domestic Product (GDP) expanding by 5.03% annually (c-to-c), supported by stable inflation at 1.57% and sound fiscal policy. With strong economic fundamentals, Indonesia remains one of the countries with relatively stable economic growth amidst global uncertainties.

Sektor pertanian, sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Perubahan iklim yang semakin ekstrem, konversi lahan pertanian, serta volatilitas harga komoditas menjadi tantangan utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024 serta menambah anggaran subsidi sebesar Rp14 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp40 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung petani dalam meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan.

In an effort to ensure food security, the government continues to focus on the agricultural sector, which is one of the key pillars of the national economy. The main challenges in increasing agricultural productivity are the growing impacts of climate change, land conversion, and commodity price volatility. To address these issues, the government has increased the allocation of subsidized fertilizers from 4.7 million tons to 9.55 million tons in 2024 and increased the subsidy budget by Rp14 trillion, bringing the total budget to Rp40 trillion. This initiative is part of a long-term strategy to support farmers in increasing agricultural output sustainably.

Di sisi lain, industri pupuk juga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, termasuk untuk menjalankan industri yang ramah lingkungan serta tuntutan akan efisiensi energi dalam proses produksi. Selain itu, adanya disrupsi rantai pasok global, khususnya terhadap bahan baku fosfat dan potash dan fluktuasi harga gas sebagai bahan baku utama menuntut industri pupuk untuk terus beradaptasi melalui inovasi dan efisiensi operasional. Dalam konteks ini, transformasi industri pupuk menjadi semakin relevan, baik dalam hal optimalisasi rantai pasok, diversifikasi energi bersih, maupun digitalisasi sistem distribusi. Dengan upaya ini, industri pupuk di Indonesia diharapkan dapat semakin berdaya saing, mendukung ketahanan pangan nasional, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

On the other hand, the fertilizer industry also faces increasingly complex challenges, including running an environmentally friendly industry and demands for energy efficiency in the production process. In addition, disruptions in the global supply chain, especially for phosphate and potash raw materials, as well as fluctuations in gas prices as the main raw material, require the fertilizer industry to continue to adapt through innovation and operational efficiency. In this context, the transformation of the fertilizer industry is becoming increasingly relevant, including supply chain optimization, clean energy diversification, and distribution system digitization. With these efforts, the fertilizer industry in Indonesia is expected to become increasingly competitive to support national food security and contribute to sustainable economic development.

KENDALA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

Industri pupuk di tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari faktor eksternal maupun internal. Secara global, ketersediaan dan volatilitas harga bahan baku, terutama gas alam, fosfat, dan potash menjadi tantangan signifikan yang berdampak langsung pada biaya produksi pupuk. Selain itu, ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok global turut mempengaruhi ketersediaan bahan baku serta meningkatkan risiko operasional. Di tingkat domestik, banyaknya regulasi terkait dengan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mendorong PTPI untuk dapat beradaptasi sekaligus mendukung penyederhanaan regulasi tersebut demi meningkatkan efisiensi distribusi serta memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran bagi petani yang membutuhkan.

OBSTACLES AND CHALLENGES FACED

In 2024, the fertilizer industry faces various complex challenges from both internal and external factors. The availability and volatility of raw material prices, particularly natural gas, phosphate and potash, are substantial challenges that have a direct impact on the fertilizer production cost on a global scale. In addition, geopolitical tensions and global supply chain disruptions have an impact on raw materials availability and increase operational risks. Domestically, the numerous regulations related to the procurement and distribution of subsidized fertilizers encourage PTPI to adapt while supporting for the simplification of these regulations in order to increase distribution efficiency and ensure that subsidized fertilizers reach the farmers who need them most.

Tantangan lainnya datang dari dampak perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem dan penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, yang turut mempengaruhi pola konsumsi pupuk nasional. Dari sisi internal industri, efisiensi operasional dan keberlanjutan menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan industri pupuk. Beberapa pabrik pupuk di lingkungan PTPI masih menggunakan teknologi lama yang kurang efisien dalam konsumsi energi, sehingga memerlukan revitalisasi untuk meningkatkan daya saing.

Another challenge comes from the impact of climate change, such as extreme weather and a decrease in agricultural land area due to land conversion, both of which affects national fertilizer consumption patterns. Internally, operational efficiency and sustainability are the primary focus in addressing the fertilizer industry's challenges. Several fertilizer plants within PTPI still operate with outdated technology that is inefficient in energy consumption, requiring revitalization to enhance

Selain itu, semakin ketatnya regulasi lingkungan menuntut industri pupuk untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan serta menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan. Digitalisasi dalam sistem distribusi dan manajemen rantai pasok juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan keterjangkauan dan ketersediaan pupuk secara merata bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Untuk merespons berbagai risiko tersebut, Direksi menerapkan pendekatan manajemen risiko berbasis data melalui pemantauan risiko utama perusahaan, penyusunan *business continuity plan*, serta diversifikasi sumber bahan baku non-gas yang memungkinkan perusahaan lebih resilien terhadap gangguan rantai pasok global.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN DI TAHUN 2024

Dalam menghadapi tantangan industri dan memastikan keberlanjutan bisnis, Perseroan menerapkan berbagai strategi dan kebijakan yang berfokus pada efisiensi operasional, peningkatan kapasitas produksi, transformasi digital, serta keberlanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan Menyusun *strategic house* dengan 4 pilar, yaitu:

1. Agrichemical yang menekankan pada komitmen terhadap mandat utama PTPI sebagai pendukung ketahanan pangan.
2. Industrial chemical sebagai upaya ekspansi portofolio produk, pengembangan bisnis, dan hilirisasi gas alam.
3. Industrial support sebagai usaha Perseroan untuk memperkuat daya saing operasional, berperan mendukung optimalisasi aset, peningkatan efisiensi, serta percepatan hilirisasi industri dan investasi strategis.
4. *Clean ammonia* sebagai komitmen PTPI terhadap target *Net Zero Emission*.

Direksi memahami bahwa keberhasilan strategi bukan hanya pada rumusannya, tetapi pada eksekusi yang konsisten di tengah tekanan eksternal dan kompleksitas internal. Tahun 2024 menantang kami untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan, antara ekspansi dan efisiensi.

Beberapa inisiatif strategis yang dijalankan pada tahun 2024, antara lain meningkatkan efisiensi konsumsi bahan baku gas lewat program *revamping* PKT-2 untuk menurunkan konsumsi gas sebesar 4 MMBTU/ton amoniak dan menekan emisi CO_2, kemudian penggantian Pusri III dan IV lewat Pembangunan pabrik baru Pusri IIIB yang dapat menekan konsumsi gas dari 34 MMBTU/ton urea menjadi 24 MMBTU/ton urea. Perseroan juga meningkatkan kapasitas produksi NPK dengan mulai beroperasinya Pabrik NPK PIM dan Phonska V di PKG. Guna meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka menunjang ketahanan pangan di Indonesia Timur, Perseroan juga Tengah mengembangkan proyek pabrik urea dan amoniak di Fakfak, Papua Barat.

competitiveness. In addition, increasingly stringent environmental regulations require the fertilizer industry to adopt more environmentally friendly technology and implement sustainable production practices. The digitalization of distribution systems and supply chain management also presents its own set of challenges, particularly in ensuring equitable access to and availability of fertilizers for farmers across Indonesia. To address these risks, the Board of Directors implemented a data-driven risk management approach that included monitoring of the company's key risks, developing a business continuity plan, and diversifying non-gas raw material sources which enables the company to be more resilient to global supply chain disruption.

CORPORATE STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES IN 2024

To address industry challenges and ensure business sustainability, the Company implements various strategies and policies focused on operational efficiency, increased production capacity, digital transformation, and sustainability. To achieve these objectives, The Company has established a strategy house with four pillars to achieve the following objectives:

1. Agrichemical which underscores the Company's dedication to its primary purpose to support national food security.
2. Industrial Chemicals as part of the Company's attempts to expand product portfolios, develop the business, and promote natural gas downstreaming.
3. Industrial Support to improve the Company's operational competitiveness, optimize assets, increase efficiency, and accelerate industrial downstreaming and strategic investmentsm.
4. Clean Ammonia which represents PTPI's strong commitment to Net Zero Emissions target.

The Board of Directors realizes that the success of a strategy lies not only in its formulation, but also by its consistent execution in the face of external pressures and internal complexities. The year 2024 challenges us to maintain a balance between growth and sustainability, expansion and efficiency.

Several strategic initiatives are implemented in 2024, including increasing the efficiency of gas raw material consumption through the revamping of PKT-2, which aims at reducing gas consumption by 4 MMBTU/ton ammonia and lowering CO_2 emissions, as well as replacing Pusri III and IV with the construction of the new Pusri IIIB plant, which is expected to reduce gas consumption from 34 MMBTU/ton urea to 24 MMBTU/ton urea. The Company also increased its NPK production capacity with the commencement of operations at the NPK plant in PIM and the Phonska V in PKG. To increase production capacity and support food security in Eastern Indonesia, the Company is currently developing a urea and ammonia plant project in Fakfak, West Papua.

Perseroan juga terus memperkuat sinergi dalam ekosistem agribisnis melalui program Makmur, yang memberikan kemudahan akses permodalan, sarana pertanian, pupuk, asuransi dan juga bimbingan teknis serta jaminan offtaker bagi petani guna meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian nasional. Dalam aspek keberlanjutan, Perseroan mulai mengadopsi energi hijau dan menjajaki pengembangan clean ammonia, sebagai bagian dari inisiatif untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Langkah ini sejalan dengan kebijakan transisi energi nasional dan target Indonesia dalam mencapai *net zero emission*. Selain itu, implementasi program 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, serta instalasi peralatan monitoring emisi secara *real-time* menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang dijalankan oleh Perseroan.

The Company also continues to strengthen synergies in the agribusiness ecosystem through the Makmur program, which provides farmers with easy access to funding, agricultural facilities, fertilizers, insurance, technical guidance and off-taker guarantees to improve farmer's welfare and national agricultural productivity. In terms of sustainability, the Company has begun to adopt green energy and explore the development of clean ammonia, as part of an initiative to reduce carbon footprints and increase resource efficiency. This step is in line with the national energy transition policy and Indonesia's target of achieving net zero emissions. In addition, the implementation of the 3R program (reduce, reuse, recycle) in waste management, utilization of renewable energy, and installation of real-time emission monitoring equipment are part of the Company's sustainability strategy.

Transformasi digital juga menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi Perseroan. Melalui pengembangan iPubers, Perseroan berupaya membangun sistem distribusi pupuk bersubsidi yang lebih akuntabel, transparan serta memudahkan kios dan petani dalam proses penebusan pupuk bersubsidi. Kemudian, melalui pengembangan Command Center, Perseroan memastikan akurasi penyediaan stok dan distribusi kebutuhan pupuk di berbagai wilayah dapat dipantau setiap saat secara real time. Perseroan juga menerapkan ProcureX, platform pengadaan terintegrasi yang meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok dan logistik. Dengan berbagai strategi dan kebijakan yang diterapkan, Perseroan optimistis dapat menghadapi tantangan industri pupuk, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi lebih besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan berkelanjutan.

Digital transformation is also one of the main priorities in the Company's strategy. Through the development of iPubers, the Company seeks to build a more accountable, transparent subsidized fertilizer distribution system that facilitates kiosks and farmers redeem subsidized fertilizer. Then, through the development of the Command Center, the Company ensures that the accuracy of the provision of stock and distribution of fertilizer needs in various regions can be monitored at any time in real time. The Company also implements ProcureX, an integrated procurement platform that increases efficiency in the supply chain and logistics. With various strategies and policies in place, the Company is optimistic that it can meet the challenges of the fertilizer industry, increase competitiveness, and contribute more to supporting national food security and sustainable development.

Pada tahun 2024 Perseroan juga menjalankan transformasi bisnis dalam rangka penyehatan Anak Perusahaan, yaitu PT Rekayasa Industri (Rekind). Perseroan berupaya menguatkan Kembali posisi Rekind sebagai salah satu tulang punggung inovasi dan *engineering industry* nasional.

In 2024, the Company also carried out a business transformation to improve the health of its Subsidiary, namely PT Rekayasa Industri (Rekind). The Company seeks to strengthen Rekind's position as a cornerstone of the national innovation and engineering industry.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Direksi Perseroan memainkan peran aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang tertuang dalam Buku RKAP Tahun 2024, juga penyusunan RJPP 2025-2029. Untuk memastikan strategi yang telah ditetapkan diimplementasikan dengan baik dan sasaran-sasaran strategis dapat tercapai, Direksi secara aktif menjalankan fungsi kontrol melalui berbagai forum dan metode komunikasi. Mulai dari rapat direksi, rapat dengan jajaran BOD-1, rapat monitoring Anak Perusahaan, kunjungan wilayah serta monitoring kinerja produksi dan distribusi lewat forum S&OP (*Sales and Operation Planning*).

THE BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

The Company's Board of Directors plays is actively involved in formulating and implementing strategies outlined in the 2024 RKAP Book, as well as the preparation of the 2025-2029 RJPP. To ensure that the established strategies are implemented properly and strategic targets can be achieved, the Board of Directors actively carries out control functions through various forums and communication methods. These include board of directors' meetings, meetings with BOD-1 level officials, Subsidiary performance monitoring meetings, site visits, and monitoring of production and distribution performance via the Sales and Operations Planning (S&OP) forum.

Guna memastikan penugasan Pemerintah untuk menjalankan fungsi PSO berjalan dengan baik, Direksi juga menetapkan pembagian Direksi Pembina untuk seluruh propinsi di Indonesia. Tugas Direksi pembina adalah memonitor, meninjau langsung, serta melakukan kunjungan untuk menangkap aspirasi pelanggan dan stakeholder serta membantu pemecahan masalah yang terjadi di setiap wilayah serta memastikan penyaluran pupuk baik subsidi maupun non subsidi berjalan dengan baik di wilayah tersebut.

Dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks, Direksi menetapkan kebijakan strategis yang berfokus pada efisiensi operasional, transformasi digital, dan keberlanjutan. Direksi secara aktif mengawasi proses revitalisasi dan revamping pabrik pupuk, yang bertujuan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, Direksi juga mengambil peran aktif dalam perbaikan tata Kelola pupuk bersubsidi melalui kegiatan advokasi *stakeholder*, sosialisasi melalui media massa dan tatap muka dengan tujuan turut memberi masukan kepada Pemerintah khususnya dalam mendukung penyederhanaan regulasi yang mengutungkan petani penerima pupuk subsidi. mengarahkan penguatan ekosistem agribisnis melalui Program *Agrosolution*, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, petani, dan sektor keuangan. Dalam implementasi strategi, Direksi memastikan bahwa seluruh inisiatif yang dijalankan selaras dengan kebijakan nasional dan perkembangan pasar global. Melalui penerapan digitalisasi, seperti pengembangan iPubers dan Command Center, Direksi mendorong efisiensi dalam distribusi pupuk serta transparansi dalam pengelolaan stok dan permintaan pasar.

Selain itu, Direksi berperan aktif dalam mengawasi penerapan kebijakan keberlanjutan, termasuk transisi menuju energi hijau dan *clean ammonia*, guna mendukung pencapaian target *net zero emission* nasional, termasuk melalui peran aktif dalam berbagai forum baik nasional maupun internasional. Dengan pendekatan yang berbasis tata kelola perusahaan yang baik (GCG), Direksi terus berupaya mengoptimalkan kinerja Perseroan agar tetap kompetitif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

To ensure the effective implementation of the Government's mandate in carrying out Public Service Obligation (PSO) functions, the Board of Directors has assigned Supervising Directors to oversee all provinces across Indonesia. Each Supervising Director is responsible for monitoring, conducting on-site reviews, and visiting their designated regions to gather customer and stakeholder aspirations, assisting in resolving of regional issues, and ensuring the proper distribution of both subsidized and non-subsidized fertilizers in their respective areas.

In facing increasingly complex industry challenges, the Board of Directors has established strategic policies that focus on operational efficiency, digital transformation, and sustainability. The Board of Directors actively oversees the revitalization and revamping process of fertilizer plants, which aims to increase production efficiency and reduce environmental impacts. In addition, the Board of Directors also takes an active role in improving the governance of subsidized fertilizers through stakeholder advocacy activities, socialization through mass media and face-to-face meetings with the aim of providing input to the Government, especially in supporting the simplification of regulations that benefit farmers receiving subsidized fertilizers. The Agrosolution Program is in the forefront of strengthening the agribusiness ecosystem by increasing agricultural productivity while fostering collaborations with diverse stakeholders such as the government, farmers, and the financial sector. In implementing the strategy, the Board of Directors ensures that all initiatives carried out are in line with national policies and global market developments. The Board of Directors encourages fertilizer distribution efficiency and transparency in stock management and market demand by using digitalization, such as the development of iPubers and the Command Center.

In addition, the Board of Directors plays an active role in overseeing the implementation of sustainability policies, including the transition to green energy and clean ammonia, to support the achievement of the national net zero emission target, including through an active role in various national and international forums. With a focus on good corporate governance (GCG), the Board of Directors continues to strive to optimize the Company's performance in order to remain competitive and contribute significantly to national economic development.

PENCAPAIAN KINERJA DAN PERBANDINGAN DENGAN TARGET

Kinerja Produksi

PTPI merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara, dengan total kapasitas produksi mencapai 14,7 juta ton. Angka ini meliputi 9,4 juta ton urea, 4,6 juta ton NPK, 750.000 ton ZA, dan 20.000 ton ZK, di samping produksi amoniak sebesar 7,1 juta ton.

Pada tahun 2024, Perseroan berhasil mempertahankan kinerja produksinya dengan pencapaian produksi pupuk sebesar 12,24 juta ton atau 103,49% dari RKAP serta produk non pupuk (amoniak, asam sulfat dan asam fosfat) sebesar 6,73 juta ton atau 101,0% dari RKAP. Rasio konsumsi gas untuk amoniak sedikit lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu 36,21 MMBTU/ton (dibanding target RKAP 36,04 MMBTU/ton). Sementara itu, rasio konsumsi gas urea tercatat sebesar 28,28 MMBTU/ton, dibandingkan target RKAP 28,05 MMBTU/ton.

Capaian positif ini selaras dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2024. Rencana tersebut secara khusus berfokus pada optimasi kapasitas produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan baik di pasar domestik maupun internasional. Keberhasilan kami dalam mencapai target ini sebagian besar berasal dari inisiatif strategis, seperti peningkatan efisiensi pabrik melalui peningkatan dan perombakan unit produksi yang masih menggunakan teknologi lama.

Untuk mendukung pertumbuhan industri pupuk nasional, perusahaan secara aktif melakukan ekspansi kapasitas produksi. Salah satu langkah signifikan dalam perluasan ini adalah pengoperasian pabrik Phonska V di Gresik, yang memiliki kapasitas 600.000 MTPY. Penambahan ini semakin memperkuat posisi perusahaan di segmen pupuk NPK, di mana permintaan terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi melalui digitalisasi proses produksi dan implementasi teknologi berbasis Kecerdasan Buatan/ Pembelajaran Mesin (AI/ML) turut berkontribusi dalam meningkatkan keandalan operasional, meminimalkan *downtime*, serta memastikan proses produksi berjalan lebih optimal dan ramah lingkungan.

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS AND COMPARISON TO TARGET

Production Performance

PTPI ranks among the largest fertilizer producers in Asia Pacific, the Middle East, and North Africa. Its total production capacity reaches 14.7 million tons. This includes 9.4 million tons of urea, 4.6 million tons of NPK, 750,000 tons of ZA, and 20,000 tons of ZK, alongside 7.1 million tons of ammonia.

In 2024, the Company successfully maintained its production performance. It produced 12.24 million tons, which exceeded the RKAP target by 103.49%. Non-fertilizer production (ammonia, sulfuric acid, and folic acid) also reached 6.73 million tons, or 101.0% of the RKAP target. Gas consumption ratio for ammonia was slightly higher than planned at 36.21 MMBTU/ton (compared to the RKAP target of 36.04 MMBTU/ton), whereas the urea gas consumption ratio was 28.28 MMBTU/ton, compared to a target of 28.05 MMBTU/ton.

This positive performance is consistent with our 2024 company work and budget plan (RKAP). That plan specifically focused on optimizing our production capacity to meet growing demand both domestically and internationally. Our success in achieving this largely stems from strategic initiatives such as boosting plant efficiency through the upgrade and revamp of outdated production units.

To support the national fertilizer industry's growth, the company is actively expanding its production capacity. A significant step in this expansion is the commissioning of the Phonska V Plant in Gresik, boasting a capacity of 600,000 MTPY. This addition further solidifies the company's standing in the NPK fertilizer segment, which is seeing increased demand from both domestic and international markets. Furthermore, efforts to enhance efficiency through the digitalization of production processes and the implementation of Artificial Intelligence/ Machine Learning (AI/ML)-based technology contribute to improve operational reliability, minimize downtime, and create a more optimized and environmentally sound production flow.

Kinerja Penjualan

Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah atas atensinya yang sangat tinggi terhadap sektor pertanian, khususnya untuk industri pupuk. Di tahun 2024, Pemerintah menekankan komitmen tersebut dengan menaikkan alokasi pupuk bersubsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Selain itu, perbaikan tata Kelola pupuk bersubsidi juga telah berhasil dijalankan dan hasilnya sudah dapat dirasakan petani dengan lancar dan mudahnya penyaluran pupuk serta meningkatnya serapan pupuk bersubsidi. Perseroan memastikan distribusi berjalan dengan lebih transparan dan efisien melalui penerapan sistem digital iPubers, yang memungkinkan pemantauan real-time dalam proses penebusan pupuk oleh petani. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi distribusi, tetapi juga memastikan subsidi tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Total penjualan pupuk di tahun 2024 mencapai 12,00 juta ton atau 102,14% dari RKAP. Total penjualan ini terdiri dari penjualan ke sektor PSO atau subsidi sebesar 7,33 juta ton, atau 101,3% dari nilai kontrak dengan Kementerian Pertanian, kemudian penjualan pupuk non subsidi sebesar 4,67 juta ton atau 103,51% dari RKAP. Adapun penjualan produk non pupuk, yang terdiri dari amoniak, asam sulfat dan asam fosfat, mencapai 1,02 juta ton atau 89,69% dari RKAP.

Kinerja ekspor pupuk mengalami penurunan pada tahun 2024, dengan volume ekspor tercatat sebesar 1,53 juta ton, turun dari 1,69 juta ton pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena Perseroan lebih memprioritaskan kebutuhan domestik guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Meski demikian, upaya strategis Perseroan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk PTPI tetap berlanjut. Permintaan ekspor dari kawasan Asia dan Afrika tetap menjadi peluang bagi Perseroan untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan regional dan global.

Kinerja Keuangan

Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan yang solid pada tahun 2024. Pendapatan Perseroan mencapai Rp81,62 triliun, didorong oleh peningkatan volume produksi, efisiensi biaya operasional, serta strategi ekspansi pasar yang efektif. Perseroan juga mencatat peningkatan margin keuntungan sebagai hasil dari optimalisasi rantai pasok dan penerapan strategi *cost leadership*, yang membantu mengurangi dampak fluktuasi harga bahan baku terhadap struktur biaya produksi.

Sales Performance

The Board of Directors expresses its appreciation and gratitude to the Government for its strong commitment to the agricultural sector, particularly the fertilizer industry. In 2024, the Government reinforced this commitment by increasing the subsidized fertilizer allocation from 4.7 million tons to 9.55 million tons. Additionally, improvements in the governance of subsidized fertilizer distribution have been successfully implemented, resulting in smoother and more accessible distribution for farmers, along with higher absorption rates of subsidized fertilizer. The Company ensures more transparent and efficient distribution by implementing the digital iPubers system, which allows for real-time monitoring of fertilizer redemption by farmers. This digitalization not only enhances distribution accuracy but also ensures that subsidies are well-targeted, transparent and accountable.

Total fertilizer sales in 2024 reached 12.00 million tons or 102.14% of the RKAP. Total sales consist of sales to the PSO or subsidy sector of 7.33 million tons, or 101.3% of the RKAP, followed by sales of non-subsidized fertilizers of 4.67 million tons or 103.51% of the RKAP. Meanwhile, sales of non-fertilizer products, consisting of ammonia, sulfuric acid and phosphoric acid, reached 1.02 million tons or 89.69% of the RKAP.

Fertilizer export performance decreased in 2024, with export volume recorded at 1.53 million tons, down from 1.69 million tons in 2023. This decrease was driven by the Company prioritizing domestic needs to support the national food security program. However, the Company's strategic efforts to expand the market and increase the competitiveness of Indonesian fertilizer products continue. Export demand from Asia and Africa offers an opportunity for the Company to strengthen its contribution to support regional and global food security.

Financial Performance

In terms of financial performance, the Company managed to record solid growth in 2024. The Company's revenue reached Rp81.62 trillion, driven by increasing revenue, operational cost efficiency, and an effective market expansion strategy. The Company also recorded an increase in profit margins as a result of supply chain optimization and the implementation of a cost leadership strategy, which helped to reduce the impact of raw material price fluctuations on the production cost structure.

Salah satu tantangan utama dalam kinerja keuangan tahun 2024 adalah volatilitas harga bahan baku, termasuk gas alam, juga fosfat dan potash. yang menjadi komponen utama dalam produksi pupuk. Untuk mengatasi risiko ini, Perseroan secara intensif melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait juga menerapkan strategi diversifikasi sumber bahan baku non gas. Selain itu, penguatan likuiditas juga menjadi prioritas utama, dengan penerapan sistem monitoring *Key Risk Indicator* (KRI) serta mitigasi risiko keuangan yang efektif. Hasilnya, eksposur risiko likuiditas dapat dikendalikan dan dikategorikan sebagai *Low Risk* pada akhir tahun 2024. Dari aspek profitabilitas, Perseroan juga menunjukkan performa yang positif dengan pertumbuhan laba bersih yang meningkat 42,10% menjadi Rp8,89 triliun atau 174,92% dari RKAP. Peningkatan Laba terjadi karena kenaikan penjualan dan dari restrukturisasi Anak Perusahaan. Peningkatan efisiensi produksi dan optimalisasi aset membantu menjaga kestabilan margin keuntungan di tengah tekanan biaya bahan baku. Selain itu, strategi diversifikasi produk dan peningkatan kontribusi dari segmen pupuk non-subsidi serta produk non pupuk, memberikan tambahan sumber pendapatan yang signifikan. Dengan fondasi keuangan yang kuat, Perseroan optimistis dapat terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Terkait dengan program penyehatan Rekind, melalui program restrukturisasi, Perseroan berhasil memulihkan kondisi keuangan Rekind dari semula memiliki ekuitas negatif Rp6,99 triliun di tahun 2023, menjadi ekuitas positif sebesar Rp1,12 triliun. Laba Rekind juga meningkat dari semula rugi Rp107 miliar menjadi laba Rp3,71 triliun.

KINERJA KEBERLANJUTAN

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Perseroan terus mengembangkan inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional bisnisnya. Pada tahun 2024, Perseroan mulai mengadopsi energi hijau, termasuk penggunaan solar PV, *grid* PLN, dan *biomass cofiring*, sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan teknologi *clean ammonia*, yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan emisi karbon di sektor industri pupuk. Kami juga membangun kemitraan dengan lembaga internasional dalam pengembangan clean ammonia berbasis hidrogen hijau. Implementasi sistem *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) juga terus diperluas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ketat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan emisi.

Di sisi pengelolaan limbah, Perseroan menerapkan program 3R (*reduce, reuse, recycle*) guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan meliputi pemanfaatan limbah non-B3 seperti

One of the main challenges in financial performance in 2024 is the volatility of raw material prices, such as natural gas, phosphate and potash, which are the main components in fertilizer production. To overcome this risk, the Company works closely with the relevant Ministries and implements a strategy to diversify non-gas raw material sources. In addition, strengthening liquidity is also a top priority, which includes the implementation of a Key Risk Indicator (KRI) monitoring system and effective financial risk mitigation. As a result, liquidity risk exposure can be controlled and categorized as Low Risk at the end of 2024. In terms of profitability, the Company also showed positive performance, with net profit increasing by 42.10% to Rp8.89 trillion or 174.92% of the RKAP. The increase in profit occurred due to increased sales and the restructuring of Subsidiaries. Increased production efficiency and asset optimization helped to maintain stable profit margins in the face of rising raw material costs. In addition, the product diversification strategy, as well as increased contribution from the non-subsidized fertilizer segment and non-fertilizer products provide significant additional revenue streams. With a strong financial foundation, the Company is optimistic in continuing to growth and making greater contributions to national food security and sustainable economic development.

Regarding the Rekind health program, the restructuring program has successfully restored Rekind's financial condition from negative equity of Rp6.99 trillion in 2023 to positive equity of Rp1.12 trillion. Rekind's profit also rose from a loss of Rp107 billion to a profit of Rp3.71 trillion.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

As part of its commitment to sustainability, the Company continues to develop initiatives to reduce the environmental impact of its business operations. In 2024, the Company began adopting green energy sources, including solar PV, PLN grid, and biomass cofiring, to reduce reliance on fossil fuels. In addition, the Company is developing clean ammonia technology, which is expected to be a long-term solution for reducing carbon emissions in the fertilizer industry. We are also building partnerships with international institutions in the development of green hydrogen-based clean ammonia. The implementation of the Continuous Emission Monitoring System (CEMS) continues to be expanded to ensure stringent compliance with environmental standards and to increase transparency in emission management.

In terms of waste management, the Company implements the 3R program (reduce, reuse, recycle) to optimize resource utilization and reduce the impact of environmental pollution. Some of the initiatives that have been carried out include the utilization of non-B3 waste such as gypsum

gipsum dan kapur sebagai produk bernilai tambah, serta penggunaan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) untuk stabilisasi tanah dan produksi material konstruksi. Dengan berbagai upaya ini, Perseroan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat perannya sebagai pelaku industri yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan nasional.

PROSPEK USAHA

Industri pupuk di Indonesia memiliki prospek yang cerah seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pupuk guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan populasi yang terus bertambah dan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, permintaan pupuk diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi tata kelola pupuk bersubsidi serta peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan industri ini. Di sisi lain, tren global yang mengarah pada pertanian berkelanjutan dan penggunaan pupuk ramah lingkungan memberikan peluang bagi industri pupuk untuk mengembangkan produk inovatif yang lebih efisien dan minim dampak lingkungan.

Perseroan melihat berbagai peluang strategis yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat bisnisnya. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah penguatan bisnis agrichemical melalui diversifikasi produk dan pengembangan solusi pertanian berbasis teknologi. Perseroan juga terus berupaya meningkatkan efisiensi produksi dengan melakukan modernisasi pabrik dan penerapan teknologi digital guna memastikan daya saing yang lebih tinggi di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, ekspansi ke pasar ekspor menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas pangsa pasar, khususnya ke negara-negara yang memiliki permintaan pupuk tinggi seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Keberlanjutan juga menjadi bagian integral dari prospek bisnis Perseroan ke depan. Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan regulasi lingkungan yang semakin ketat, Perseroan akan terus mengembangkan solusi berbasis energi hijau, seperti clean ammonia dan pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam proses produksinya. Perseroan juga akan memperluas implementasi digitalisasi dalam sistem distribusi guna memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk. Dengan strategi ini, Perseroan optimis dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, serta berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.

and limestone as value-added products, as well as the use of Fly Ash and Bottom Ash (FABA) for soil stabilization and construction material production. With these initiatives, the Company not only improves its operational efficiency, but also strengthens its role as a responsible industry player and contributes to the national sustainable development targets.

BUSINESS PROSPECTS

The fertilizer industry in Indonesia has a promising outlook in line with the increasing demand for fertilizers to support national food security. With a growing population and the government's target of achieving food self-sufficiency, fertilizer demand is projected to continue rising in the coming years. Additionally, government policies promoting more efficient governance of subsidized fertilizers and increased budget allocations for the agricultural sector serve as key drivers of growth for this industry. On the other hand, global trends toward sustainable agriculture and the use of environmentally friendly fertilizers present opportunities for the industry to develop innovative products that are more efficient and have minimal environmental impact.

The Company sees various strategic opportunities that can be optimized to strengthen its business. One of the main steps will be to strengthen the agrichemical business through product diversification and develop technology-based agricultural solutions. The Company also continues to strive to improve production efficiency by modernizing plants and implementing digital technology to ensure greater competitiveness in both domestic and international markets. In addition, expansion into the export market is one of the main strategies in increasing revenue and expanding market share, especially to countries with high fertilizers demand such as in Asia, Africa and South America. Sustainability is also an integral part of the Company's future business prospects. To address the challenges of climate change and increasingly stringent environmental regulations, the Company will continue to develop green energy-based solutions, such as clean ammonia and the use of renewable energy sources in its production process. The Company will also expand the implementation of digitalization in the distribution system to ensure fertilizer distribution targets are met efficiently and accurately. The Company is optimistic that by implementing these strategies, it will be able to maintain sustainable growth, enhance global competitiveness and make a significant contribution to national food security and Indonesia's economic development.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Go*od Corporate Governance* (GCG) secara konsisten guna memastikan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2024, Perseroan terus memperkuat kebijakan dan sistem pengawasan internal agar selaras dengan standar regulasi yang berlaku serta praktik terbaik di industri. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penguatan manajemen risiko, yang mencakup pemantauan *Key Risk Indicators* (KRI) secara berkala untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko yang dapat berdampak pada stabilitas operasional maupun keuangan. Selain itu, Perseroan juga melakukan peningkatan tata kelola di bidang kepatuhan hukum dan regulasi guna memastikan operasional bisnis yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan standar internasional. Perseroan juga terus mengembangkan tata kelola berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses bisnis. Implementasi berbagai sistem digitalisasi, seperti ProcureX untuk pengadaan yang lebih transparan dan Command Center untuk pemantauan distribusi pupuk secara real-time, menjadi bagian dari strategi tata kelola yang lebih modern dan adaptif. Selain itu, penerapan *Whistleblowing System* (WBS) yang semakin diperkuat memungkinkan pelaporan dugaan pelanggaran secara lebih efektif, meningkatkan transparansi, serta memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan perusahaan. Dengan sistem ini, Perseroan tidak hanya meningkatkan perlindungan terhadap pemangku kepentingan, tetapi juga memastikan lingkungan kerja yang lebih bersih dari praktik yang tidak etis.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, Perseroan juga menekankan pentingnya penerapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam strategi bisnisnya. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan, termasuk pengelolaan limbah industri yang lebih efisien, peningkatan efisiensi energi, serta penguatan aspek sosial seperti pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan karyawan. Dengan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik dan berkelanjutan, Perseroan optimistis dapat terus meningkatkan kinerja operasional, dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan.

DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company is committed to consistently implementing Good Corporate Governance (GCG) to ensure transparent, accountable, and sustainable corporate governance. Throughout 2024, the Company continues to strengthen its internal control policies and systems to align with applicable regulatory standards and best practices in the industry. One of the main steps taken is strengthening risk management, which includes regular monitoring of Key Risk Indicators (KRI) to identify and mitigate potential risks that can impact operational and financial stability. In addition, the Company is also improving governance in the field of legal and regulatory compliance to ensure business operations are in accordance with government policies and international standards. The Company also continues to develop digital-based governance to improve efficiency and accountability in business processes. The implementation of various digitalization systems, such as ProcureX for more transparent procurement and the Command Center for real-time monitoring of fertilizer distribution, is part of a more modern and adaptive governance strategy. In addition, the implementation of the increasingly strengthened Whistleblowing System (WBS) allows for more effective reporting of alleged violations, increases transparency, and strengthens the culture of compliance within the company. With this system, the Company not only increases protection for stakeholders, but also ensures a cleaner work environment free from unethical practices.

As part of its efforts to strengthen sustainable corporate governance, the Company also emphasizes the importance of implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects in its business strategy. This is realized through policies that support sustainability, such as more efficient industrial waste management, increased energy efficiency, and strengthening social aspects such as developing Human Capitals capacity and improving employee welfare. With a strong commitment to good and sustainable governance, the Company is optimistic that it can continue to improve operational performance while maintain stakeholder trust.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan memiliki berbagai komite di bawah Direksi yang bertugas memastikan implementasi kebijakan strategis sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) memainkan peran penting dalam mengawasi perencanaan, penganggaran, dan implementasi strategi bisnis. Sepanjang tahun 2024, komite ini memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara optimal guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap RKAP juga dilakukan untuk memastikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika industri pupuk serta efektivitas eksekusi program yang telah direncanakan. Selain itu, Komite *Key Performance Indicators* (KPI) berperan dalam memantau pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator utama yang telah ditetapkan. Komite ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas strategi bisnis, produktivitas operasional, serta efisiensi biaya guna memastikan pencapaian target yang optimal.

Komite Harga juga memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kegiatan bisnis Perseroan, khususnya dalam penetapan harga jual produk non-subsidi. Komite ini bertanggung jawab untuk menetapkan harga jual rutin berdasarkan usulan dari Fungsi Pemasaran, serta harga jual non-rutin sesuai dengan otorisasi yang berlaku berdasarkan rekomendasi dari Tim Evaluasi Harga. Sepanjang tahun 2024, Komite Harga menjalankan tugasnya dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian, melalui koordinasi yang erat dengan unit terkait guna memastikan penetapan harga yang kompetitif dan tetap sesuai dengan ketentuan internal serta dinamika pasar.

Dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, Komite Talenta turut memastikan bahwa kebijakan pengelolaan karyawan sejalan dengan strategi pertumbuhan perusahaan. Sepanjang tahun 2024, komite ini mengawal implementasi program pengembangan talenta, peningkatan kompetensi karyawan, serta penerapan sistem *Human Experience Management* (HXM) untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan inovatif. Perseroan juga menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas melalui Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang bertanggung jawab dalam memastikan efektivitas program *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta implementasi praktik

ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

As part of its commitment to good corporate governance, the Company has several committees under the Board of Directors tasked with ensuring the implementation of strategic policies that are consitent with the company's vision and mission. The Company's Work Plan and Budget Committee (RKAP) plays an important role in overseeing the planning, budgeting, and implementation of business strategies. Throughout 2024, this committee ensures optimum resources allocation to support sustainable business growth. Periodic evaluations of the RKAP are also carried out to ensure flexibility in facing the dynamics of the fertilizer industry as well as the effectiveness planned programs executions. In addition, the Key Performance Indicators (KPI) Committee plays a role in monitoring the achievement of the company's performance in accordance with the key indicators that have been set. The KPI committee conducts a comprehensive evaluation of the effectiveness of business strategies, operational productivity, and cost efficiency to ensure optimal target achievement.

The Pricing Committee also plays an important role in supporting the effectiveness of the Company's business activities, particularly in determining the selling prices of non-subsidized products. This committee is responsible for setting regular selling prices based on proposals from the Marketing Function, as well as non-regular selling prices in accordance with applicable authorizations based on recommendations from the Price Evaluation Team. Throughout 2024, the Pricing Committee carried out its duties by upholding the principles of accountability and prudence, through close coordination with related units to ensure competitive pricing that remains in line with internal regulations and market dynamics.

In terms of Human Capital development, the Talent Committee also ensures that employee management policies are in line with the company's growth strategy. Throughout 2024, this committee oversees the implementation of talent development programs, improving employee competencies, and implementing the Human Experience Management (HXM) system to create a more productive and innovative work environment. The Company also prioritizes sustainability through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Committee, which is responsible for ensuring the effectiveness of Corporate Social Responsibility (CSR) programs and the implementation of environmentally

bisnis yang ramah lingkungan. Komite ini mengawasi inisiatif keberlanjutan, termasuk pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta kontribusi sosial bagi masyarakat sekitar operasional perusahaan. Selain itu, guna mendukung budaya kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi, *Komite Respectful Workforce Policy* (RWP) bertugas menegakkan kebijakan lingkungan kerja yang menghormati keberagaman serta mencegah praktik pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja. Dengan peran aktif dari berbagai komite ini, Perseroan terus memastikan bahwa setiap aspek tata kelola perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas.

friendly business practices. This committee oversees sustainability initiatives, including waste management, energy efficiency, and social contributions to communities around the company's operations. In addition, to support an inclusive and discrimination-free work culture, the Respectful Workforce Policy (RWP) Committee is tasked with enforcing work environment policies that respect diversity and prevent harassment and discrimination in the workplace. Through the active role of these committees, the Company continues to ensure that every aspect of corporate governance is carried out in accordance with the principles of sustainability, transparency and accountability

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHAN

Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan Direksi, sehingga berikut susunan Direksi per 31 Desember 2024:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THE CHANGES

In 2024, there were no changes in the composition of the Board of Directors as of December 31, 2024:

Nama Name	**Jabatan** Position
Rahmad Pribadi	Direktur Utama President Director
Gusrizal	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Bob Indiarto	Direktur Produksi Production Director
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan Finance Director
Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Business Transformation Director
Tina T. Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director
Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran Marketing Director
Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Portfolio & Business Development Director
Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director

APRESIASI

Atas nama Direksi, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham dan pemerintah atas kepercayaan serta dukungan kebijakan yang memungkinkan Perseroan untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional. Kami juga mengapresiasi mitra usaha, pelanggan, serta seluruh petani yang telah menjalin kerja sama erat dalam menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Kepada Dewan Komisaris, jajaran manajemen, dan seluruh karyawan Perseroan, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan inovasi yang telah mendorong pertumbuhan perusahaan di tengah berbagai tantangan industri. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimistis Perseroan akan terus memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian nasional dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

APPRECIATION

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our highest appreciation and gratitude to all stakeholders who have supported the Company's achievements in 2024. We would like to thank the shareholders and the government for their trust and policy support, which have enabled the Company to continue growing and contributing to national food security. We also appreciate our business partners, customers, and all farmers who have collaborated closely to create a sustainable agricultural ecosystem. To the Board of Commissioners, management, and all employees of the Company, we would like to thank you for your dedication, hard work, and innovation that have driven the company's growth amidst numerous industry challenges. With a collaborative spirit and a commitment to continuous innovation, we are optimistic that the Company will continue to provide the most valuable contributions to the national economy and sustainable development in the future.

Jakarta, 23 Mei 2025
Jakarta, May 23rd, 2025

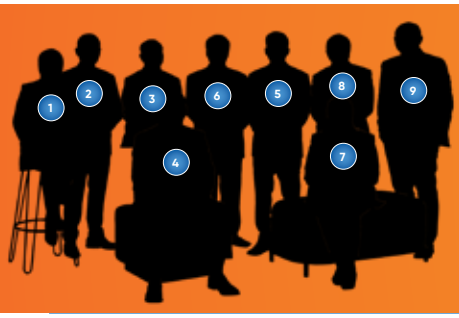
Atas Nama Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)
On Behalf of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)



RAHMAD PRIBADI
Direktur Utama
President Director

Direksi
Board of Directors





Dari kiri ke kanan
From left to right

1. **Tina T. Kemala Intan**
   Direktur Sumber Daya Manusia
   Human Capital Director
2. **Wono Budi Tjahyono**
   Direktur Keuangan
   Finance Director
3. **Jamsaton Nababan**
   Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha
   Portfolio & Business Development Director



4. **Rahmad Pribadi**
   Direktur Utama
   President Director
5. **Bob Indiarto**
   Direktur Produksi
   Production Director
6. **Gusrizal**
   Wakil Direktur Utama
   Vice President Director
7. **Ninis Kesuma Adriani**
   Direktur Manajemen Risiko
   Risk Management Director
8. **Tri Wahyudi Saleh**
   Direktur Pemasaran
   Marketing Director
9. **Panji Winanteya Ruky**
   Direktur Transformasi Bisnis
   Business Transformation Director

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Pupuk Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PTPI tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Mei 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



DARMIN NASUTION
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner



ANWAR SANUSI
Komisaris
Commissioner



ARI DWIPAYANA
Komisaris
Commissioner

MUSTOHA ISKANDAR
Komisaris Independen
Independent Commissioner



SUWANDI
Komisaris
Commissioner



FEBRIO NATHAN KACARIBU
Komisaris
Commissioner



IRFAN AHMAD FAUZI
Komisaris Independen
Independent Commissioner



DANAR RAHMANTO
Komisaris Independen
Independent Commissioner



RISWINANDI
Komisaris Independen
Independent Commissioner



FARHAT BRACHMA
Komisaris
Commissioner

Statement by the Members of Directors and Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero)

We, the undersigned, testify that all information in the 2024 Annual Report of PTPI is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, May 23rd, 2025

Direksi
Board of Directors

RAHMAD PRIBADI
Direktur Utama
President Director

GUSRIZAL
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

BOB INDIARTO
Direktur Produksi
Production Director

WONO BUDI TJAHYONO
Direktur Keuangan
Finance Director

PANJI WINANTEYA RUKY
Direktur
Transformasi Bisnis
Business Transformation Director

TINA T. KEMALA INTAN
Direktur
Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

TRI WAHYUDI SALEH
Direktur Pemasaran
Marketing Director

JAMSATON NABABAN
Direktur Portofolio &
Pengembangan Usaha
Portfolio & Business
Development Director

NINIS KESUMA ADRIANI
Direktur
Manajemen Risiko
Risk Management Director



Profil Perusahaan

Company Profile



Menumbuhkan Kebanggaan dalam Mewujudkan Swasembada Pangan

Growing Pride in Realizing Food Self-Sufficiency

PTPI memastikan setiap karyawan mampu tumbuh dan beradaptasi dalam situasi apapun, mengolah kesempatan menjadi peluang. Mengubah kebiasaan lama menjadi hal positif agar mampu menumbuhkan jiwa-jiwa tangguh. Pencapaian untuk terus maju dan tumbuh bersama dalam situasi yang sulit. Dalam semangat Sinergi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional, PTPI menjadikan Bangga sebagai fondasi utama dalam setiap langkah dan pencapaiannya. Rasa bangga ini bukan hanya sekadar kebanggaan sebagai perusahaan yang berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional, tetapi juga kebanggaan setiap insan PTPI dalam menghadapi tantangan, beradaptasi, dan terus bertumbuh di tengah perubahan zaman.

PTPI ensures that every employee is able to grow and adapt in any situation, processing opportunities into opportunities. Changing old habits into positive things in order to be able to foster resilient souls. Achievements to move forward and grow together in difficult situations. In the spirit of Synergy to Realize National Food Self-Sufficiency, PTPI makes Proud as the main foundation in every step and achievement. This sense of pride is not only pride as a company that contributes to national food security, but also the pride of every person of PTPI in facing challenges, adapting, and continuing to grow in the midst of changing times.

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

Company General Information and Identity



Nama Perusahaan I Company Name

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

3 Januari 1970
January 3, 1970

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20.
Deed No. 4 dated January 3, 1970 made before Soeleman Ardjasasmita, Notary in Jakarta, which has been approved based on the Excerpt from the Register of Determinations of the Minister of Justice dated February 7, 1970 No. J.A.5/7/20.

Jaringan Usaha
Business Network

Jaringan usaha melalui 9 Entitas Anak Kepemilikan Langsung yang menaungi berbagai entitas, baik Entitas Anak Tidak Langsung, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
Business network through 9 Direct Ownership Subsidiaries that oversee various entities, including Indirect Subsidiaries, Associates and Joint Ventures, supported by an extensive distribution network across Indonesia.

Tujuan dan Kegiatan
Objectives and Activities

Melakukan usaha pengelolaan perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk menghasilkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
The Company engages in management, trading and services in the field of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals and other chemicals as well as agroindustry to produce high-quality, competitive products and services to generate profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp100.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued & Paid Up Capital

Rp25.000.000.000.000

Jumlah Karyawan
Total Employees

7.712

Karyawan (PKWT & PKWTT)
Employees (Non-permanent employees & Permanent employees)

Bursa Efek
Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Per 31 Desember 2024
As of December 31, 2024

Negara Republik Indonesia, Republic of Indonesia,	**100,00%**

Per Penerbitan Laporan Tahunan
As of the Issuance of Annual Report

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	**99,99%**
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia,	**0,01%**



Kode Obligasi & Peringkatnya
Bond Codes & Ratings

- PIHC02BCN1 (idAAA) Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B
- PIHC02CCN1 (idAAA) Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C
- PIHC02BCN2 (idAAA) Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B
- PIHC02CCN2 (idAAA) Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C
- PIHC02BCN1 (idAAA) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I 2020 Series B
- PIHC02CCN1 (idAAA) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I 2020 Series C
- PIHC02BCN2 (idAAA) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia phase II 2021 Series B
- PIHC02CCN2 (idAAA) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase II 2021 Series C

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan Jaya
Jakarta 11480-Indonesia
Tel: +62 21 53654900

Surel
E-mail

info@pupuk-indonesia.com

Situs Web
Website

www.pupuk-indonesia.com

Layanan Keluhan Pelanggan
Customer Complaint Service

konsumen@pupuk-indonesia.com

Layanan Pelanggan Bebas Pulsa
Toll-Free Customer Service

0800-100-800-1

WhatsApp (Layanan Pelanggan)
WhatsApp (Customer Service)

+62-811-9918001

Media Sosial
Social Media

Facebook : PT Pupuk Indonesia
Twitter : @pupuk_indonesia
Instagram : pt.pupukindonesia
Youtube : PTPupukIndonesiaOfficial
Tiktok : pupuk.indonesia

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History

"Sentralisasi fungsi *holding* di PI *Group* telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan *value creation* serta memastikan bahwa aktivitas fungsi telah sejalan dengan arah strategi perusahaan."

"The centralization of the holding function in PI Group has been implemented by the company to increase value creation and ensure that the function's activities are in line with the company's strategic direction."



PT Pupuk Indonesia (Persero) kemudian disebut "Perseroan" atau "PTPI" merupakan *holding company* BUMN yang pada proses pendiriannya memiliki sejarah panjang, yaitu sejak tahun 1959.

PTPI pertama kali didirikan dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja berdasarkan Akta No. 177 tanggal 24 Desember 1959 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan menjadi badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Muda Kehakiman melalui Keputusan No. J.A.5/3/19 tanggal 28 Januari 1960. Pengesahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Februari 1960 dengan nomor register 320 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 186 tahun 1960.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 44) didirikan Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja ("PN Pusri"),

PT Pupuk Indonesia (Persero) hereinafter referred to as "the Company" or "PTPI" is a state-owned holding company whose establishment process has a long history, namely since 1959.

PTPI was first established under the name PT Pupuk Sriwidjaja based on Deed No. 177 dated 24 December 1959 made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta and became a legal entity after obtaining ratification from the Junior Minister of Justice through Decree No. J.A.5/3/19 dated 28 January 1960. The ratification was registered at the Registrar's Office of the Jakarta District Court on February 8, 1960 with register number 320 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 7, 1960, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 186 of 1960.

Based on Government Regulation No. 20 of 1964 concerning the Establishment of Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1964 No. 44), Perusahaan Negara Pupuk



dan PT Pupuk Sriwidjaja yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta tersebut dilebur ke dalam PN Pusri sehingga hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta utang usaha dari PT Pupuk Sriwidjaja beralih ke PN Pusri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 31), PN Pusri mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sehubungan hal ini, telah ditandatangani Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20.

Sriwidjaja ("PN Pusri") was established, and PT Pupuk Sriwidjaja which was established based on the Deed of Limited Liability Company of PT Pupuk Sriwidjaja No. 177 dated December 24, 1959 made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta was merged into PN Pusri so that the rights and obligations, equipment and assets and accounts payable of PT Pupuk Sriwidjaja were transferred to PN Pusri.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 20 of 1969 concerning the Transfer of Legal Entity Form of State Company Pupuk Sriwidjaja to Company (Persero) (State Institution of the Republic of Indonesia Year 1969 No. 31), PN Pusri changed its legal entity form from Public Company to Company (Persero). Deed of Establishment No. 4 dated January 3, 1970 was signed before Soeleman Ardjasasmita, Notary in Jakarta and was approved by the Minister of Justice based on the Excerpt from the Register of Determinations of the Minister of Justice dated February 7, 1970 No. J.A.5/7/20.

Pada tahun 1997, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, maka PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) ditugaskan untuk menjadi Induk Perusahaan (*Operation Holding)* yang membawahi 6 (enam) Anak Perusahaan.

Dalam rangka restrukturisasi/pengembangan usaha, telah dilakukan pemisahan aset dengan cara spin off, di mana PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Pengalihan sebagian aset PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dilaksanakan per 1 Januari 2011. Dengan demikian, segala kegiatan operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang meliputi produksi, pemasaran, pengadaan, pengembangan usaha, dan lain-lain diserahkan kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) bertindak murni sebagai *Non-Operating Holding*.

Pada tanggal 5 April 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PTPI yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17695. AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 5 April 2012.

Dalam Akta No. 01 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0175443.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0399104 tanggal 18 Oktober 2020, PTPI berubah menjadi *activist holding*.

In 1997, based on Government Regulation No. 28 of 1997 in conjunction with Government Regulation No. 34 of 1998 concerning the Injection of State Capital of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was assigned to serve as a Parent Company (Operation Holding) overseeing 6 (six) Subsidiaries.

As part of a restructuring and development initiative, a spin-off was carried out whereby PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) established a Subsidiary PT Pupuk Sriwidjaja Palembang with Deed of Establishment No. 14 dated 12 November 2010 made before Fathiah Helmi S.H., Notary in Jakarta. The transfer of some of the assets of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) to PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was carried out as of January 1, 2011. Thus, all operational activities of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) which include production, marketing, procurement, business development, etc. are handed over to PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) acts purely as a Non-Operating Holding.

On April 5, 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) changed its name to PTPI which is domiciled in Jakarta based on Deed No. 3 dated April 3, 2012 made before Nanda Fauz Iwan, S.H., Notary in South Jakarta, with the area of office covering the entire territory of the Special Capital Region of Jakarta, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-17695.AH.01.02 Year 2012 concerning Approval of Amendments to the Company's Articles of Association dated April 5, 2012.

The latest amendment is contained in Deed No. 01 dated October 12, 2020, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System Company Register No. AHU-0175443.AH.01.11 of 2020 dated October 18, 2020 as well as the Letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration No. AHU-AH.01.03-0399104 dated October 18, 2020 and PTPI changed to activist holding.

Sebagai *activist holding* yang menaungi jaringan usaha melalui Entitas Anak Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung serta Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia, PTPI memiliki peran yang lebih aktif dalam bidang operasional, terutama untuk fungsi-fungsi strategis seperti pemasaran, pengadaan, riset, pengembangan, juga untuk fungsi SDM, TI, dan beberapa fungsi lainnya.

As an activist holding that oversees a business network through Direct and Indirect Ownership Subsidiaries as well as Associated Entities and Joint Ventures with distribution networks throughout Indonesia, PTPI plays a more active role in operational functions, particularly in strategic areas such as marketing, procurement, research, development, as well as for HC, IT, and several other functions.

Berdasarkan lembaga riset independen Fertecon, PTPI dan Anak Perusahaan menjadi produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian nasional dan ketahanan pangan, di mana Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki berbagai jenis produk pupuk urea, pupuk non-urea, dan industri kimia lainnya serta layanan jasa *engineering, procurement & construction*, perdagangan umum, distribusi, serta pangan.

Based on the independent research institute Fertecon, PTPI and its Subsidiaries are the largest fertilizer producers in Southeast Asia playing a key role in national agricultural development and food security, where the Company and its Subsidiaries produce various types of urea and non-urea fertilizers, and other chemical industries as well as engineering, procurement & construction services, general trading, distribution, energy, and utilities, and food.

PTPI menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dalam upaya meningkatkan kekuatan jaringan kelompok usaha. Perusahaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu melalui produk pupuk dan amoniak yang berkualitas.

PTPI is a partner of the Government of Indonesia in distributing subsidized fertilizers in an effort to increase the strength of the business group network. The company is also an important part in realizing food security, namely through quality fertilizer and ammonia products.

Pada tahun 2021, Perusahaan resmi menetapkan pemberlakuan sentralisasi fungsi holding di lingkungan PI *Group* sebagai bagian dari amanah Kementerian BUMN selaku pemegang saham Perusahaan untuk melakukan transformasi. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan secara sentralisasi di holding Perusahaan antara lain mencakup fungsi pemasaran dan penjualan komersial, penelitian dan pengembangan, *supply chain* dan *cost management*, pengadaan barang dan jasa, keuangan, audit, manajemen risiko dan kepatuhan, serta manajemen talenta dan pengembangan SDM, dan juga hukum. Tujuan utama sentralisasi dilaksanakan untuk meningkatkan *Value Creation* serta memastikan aktivitas fungsi-fungsi anggota PI *Group* sehingga sejalan dengan strategi perusahaan. Diharapkan dengan penerapan *activist holding role* ini Perusahaan akan mempunyai peran lebih aktif dalam aktivitas operasional Perusahaan.

In 2021, the Company officially established the implementation of centralization of holding functions within the PI Group as part of the mandate of the Ministry of SOEs as the Company's shareholder to transform. Functions that are carried out centrally in the Company's holding include commercial marketing and sales, research and development, supply chain and cost management, procurement of goods and services, finance, audit, risk management and compliance, as well as talent management and HC development, and also legal affairs. The main purpose of centralization is to increase Value Creation and ensure the activities of PI Group member functions are in line with the company's strategy. With the adoption of the activist holding role, the Company is expected to take on a more active role in the Company's operational activities.

Kinerja Perusahaan didukung oleh 9 Anak Perusahaan yang mengoperasikan 14 pabrik urea, 13 pabrik amoniak, 18 pabrik NPK, 3 pabrik ZA, dan 2 pabrik ZK di lokasi yang tersebar di pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

The Company's performance is supported by 9 Subsidiaries operating 14 urea plants, 13 ammonia plants, 18 NPK plants, 3 ZA plants, 2 ZK plants located across Java, Sumatra, and Kalimantan.

Pada tahun 2024, PTPI sesuai arahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan butir 9 mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPI tahun 2024 melakukan inisiatif strategis untuk penyehatan salah satu Anak Perusahaan Non Produsen Pupuk PTPI yang bergerak di bidang layanan jasa *engineering, procurement & construction* yaitu PT Rekayasa Industri (Rekind).

In 2024, PTPI, in accordance with the direction in the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) point 9 concerning the approval of the 2024 PTPI Company Work Plan and Budget (RKAP), will undertake a strategic initiative to revitalize of one of PTPI's Non-Fertilizer Producer Subsidiaries engaged in engineering, procurement & construction services, namely PT Rekayasa Industri (Rekind).

Inisiatif Strategis yang dilakukan PTPI berdasarkan dokumen Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP) yang telah diresmikan oleh Kementerian BUMN. Salah satu inisiatif strategis yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis dan meningkatkan kinerja dari Rekind dengan melaksanakan aksi korporasi berupa inbreng saham PTPI di Anak Perusahaan Non Produsen Pupuk yang bergerak di bidang utilitas yaitu PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU) kepada Rekind.

Strategic Initiatives PTPI are based on the Corporate Recovery Plan (RPP) document that has been formalized by the Ministry of SOEs. One of the strategic initiatives carried out to support business processes and improve the performance of Rekind is by implementing corporate actions in the form of investing PTPI shares in a Non-Fertilizer Producer Subsidiary engaged in the utility sector, namely PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU) to Rekind.

Atas pelaksanaan inisiatif strategis maka terjadi perubahan kepemilikan saham PIU yang dinyatakan melalui Perjanjian Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham PIU pada 16 Desember 2024, serta dinotariskan sesuai Akta Notaris Lumassia, S.H. tanggal 23 Desember 2024 nomor 13 tentang Perubahan Kepemilikan dan Komposisi Saham PIU.

Due to the implementation of strategic initiatives, there was a change in the ownership of PIU shares as stated in the Shareholders Agreement and the General Meeting of Shareholders of PIU on December 16, 2024, and notarized according to the Notarial Deed of Lumassia, S.H. dated December 23, 2024 number 13 concerning Changes in Ownership and Composition of PIU Shares.

Dalam rangka meningkatkan nilai dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung dan mempercepat program Pemerintah serta meningkatkan tertib administrasi, Pemerintah melakukan pengaturan kembali mengenai sumber penyertaan modal negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") yang dapat dijadikan penyertaan ke dalam modal BUMN dan Perseroan Terbatas ("PT") dan menyempurnakan proses penatausahaan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT ("PP No. 72 Tahun 2016").

In order to increase the value and optimize the role of State-Owned Enterprises ("SOEs") as national development agents in supporting and accelerating Government programs and improving administrative order, the Government is re-regulating the sources of state capital participation from the State Revenue and Expenditure Budget ("APBN") that can be used as participation in the capital of SOEs and Limited Liability Companies ("PT") and improving the government administration process through the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in SOEs and PTs ("PP No. 72 of 2016").

Dalam PP No. 72 Tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa salah satu bentuk kekayaan negara adalah saham milik negara pada BUMN atau PT. Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi Anak Perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memilki saham dengan hak istimewa.

In PP No. 72 of 2016, it is stated that one form of state wealth is state-owned shares in SOE or PT. In the case of state wealth in the form of state-owned shares in SOE being used as state capital participation in another SOE, then the SOE becomes a Subsidiary of the SOE with the provision that the state is required to have shares with special rights.



Melalui surat No. S-96/MBU/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal Penetapan Saham Istimewa pada Anak Perusahaan eks BUMN dan/atau Anak Perusahan Hasil Spin Off eks BUMN, Menteri BUMN meminta Direksi PTPI agar dapat menetapkan satu saham istimewa untuk dimiliki negara (selanjutnya disebut saham Seri-A Dwiwarna) pada Anak Perusahaan eks BUMN berikut:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur/PKT (eks BUMN).
2. PT Pupuk Kujang/PKC (eks BUMN).
3. PT Petrokimia Gresik/PKG (eks BUMN).
4. PT Pupuk Iskandar Muda/PIM (eks BUMN).
5. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang/PSP (hasil *spin off* eks BUMN).

Pada tanggal 4 Desember 2024 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Anak Perusahaan dengan agenda sebagai berikut:
1. Perubahan klasifikasi saham.
2. Perubahan anggaran dasar.
3. Persetujuan hibah saham Seri A Dwiwarna kepada Negara Republik Indonesia.

Satu lembar saham PTPI ditetapkan sebagai saham istimewa dan dihibahkan ke negara. Dengan demikian pemegang saham Anak Perusahaan Produsen Pupuk menjadi tiga pihak, yaitu: PTPI (seri-B), Yayasan (seri-B), dan Negara cq Kementerian BUMN (1 lembar seri-A).

Letter No. S-96/MBU/02/2019 dated February 6, 2019 concerning the Determination of Preferred Shares in Subsidiaries of former State-Owned Enterprises and/or Subsidiaries Resulting from Spin-Offs of former State-Owned Enterprises requested the Board of Directors of PTPI to determine one preferred share to be owned by the state (hereinafter referred to as the Dwiwarna Series-A share) in the following Subsidiaries of former State-Owned Enterprises:
1. PT Pupuk Kalimantan Timur/PKT (former SOE).
2. PT Pupuk Kujang/PKC (former SOE).
3. PT Petrokimia Gresik/PKG (former SOE).
4. PT Pupuk Iskandar Muda/PIM (former SOE).
5. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang/PSP (spin off result of former SOE).

On December 4, 2024, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Subsidiary was held with the following agenda:
1. Changes in share classification.
2. Changes to the articles of association.
3. Approval of the grant of Series A Dwiwarna shares to the Republic of Indonesia.

One PTPI share is designated as a preferred share and granted to the state. Thus, the shareholders of Pupuk's Subsidiary become three parties, namely: PTPI (series-B), Yayasan (series-B), and the State cq Ministry of SOE (1 share of series-A).

Jejak Langkah
Milestone

1959, 1979–1980

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berdiri sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di industri pupuk sejak tahun 1959. Dalam rangka kerja sama dengan negara-negara ASEAN dibentuk perusahaan patungan:
- PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menguasai 60% saham.
- Asean Bintulu Fertilizer (ABF) Sdn. Bhd., Pemerintah Indonesia menguasai 13% saham. Pemerintah menugaskan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) untuk mewakili Pemerintah di dalam pengawasan kinerja perusahaan.

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was established as a state-owned company engaged in the fertilizer industry since 1959. In order to cooperate with ASEAN countries, a joint venture company was established:
- PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) holds a 60% stake.
- Asean Bintulu Fertilizer (ABF) Sdn. Bhd. in which the Indonesian government holds a 13% stake. The government assigned PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) to represent the government in overseeing the company's performance.

1997–1998

Diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang dahulu bernama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjadi Perusahaan Induk (*Operating Holding*) yang membawahi 6 (enam) Anak Perusahaan (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, dan PT Mega Eltra).

The issuance of Government Regulation No. 28 of 1997 concerning the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Government Regulation No. 34 of 1998 concerning the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Indonesia (Persero), formerly PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), became an Operating Holding Company which oversees 6 (six) Subsidiaries (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, and PT Mega Eltra).

2010–2012

- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 24 Desember 2010 dan berubah dari *Operating Holding* menjadi *Strategic and Investment Holding*.
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan selanjutnya tanggal 3 April 2012 ditetapkan sebagai hari jadi PT Pupuk Indonesia (Persero).

- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) established PT Pupuk Sriwidjaja Palembang on December 24, 2010 and changed from Operating Holding to Strategic and Investment Holding.
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsequently April 3, 2012 was designated as the anniversary of PT Pupuk Indonesia (Persero).

2013–2017

- Pada tanggal 23 Desember 2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Logistik.
- Pada tanggal 18 Agustus 2014, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Energi.
- Pada tanggal 30 April 2015, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Pangan.
- Peresmian Pabrik PKT 5, November 2015.
- Pembangunan Pabrik NPK II PT Pupuk Kujang.
- Pembangunan Pabrik NPK Fusion I PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di tahun 2016.
- Selesainya konstruksi Pabrik Pusri IIB di tahun 2017.

- On December 23, 2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a Subsidiary named PT Pupuk Indonesia Logistik.
- On August 18, 2014, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a Subsidiary named PT Pupuk Indonesia Energi.
- On April 30, 2015, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a Subsidiary named PT Pupuk Indonesia Pangan.
- Inauguration of PKT Plant 5, November 2015.
- Construction of PT Pupuk Kujang NPK II Plant.
- Construction of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's NPK Fusion I Plant in 2016.
- Completion of Pusri IIB Plant construction in 2017.

2018

Selesainya Konstruksi dan Produksi Urea Pertama Proyek Amurea II Petrokimia Gresik Anak Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) di Gresik, Jawa Timur.

Completion of Construction and First Urea Production of Amurea II Project of Petrokimia Gresik, a Subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) in Gresik, East Java.

2019

Dimulainya konstruksi proyek NPK Chemical PT Pupuk Iskandar Muda.

Commencement of construction of PT Pupuk Iskandar Muda's NPK Chemical project.

2020

- PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi "*Activist Holding*".
- Penyelesaian pabrik CO_2 cair PT Pupuk Kujang.

- PT Pupuk Indonesia (Persero) became an "Activist Holding".
- Completion of PT Pupuk Kujang's liquid CO_2 plant.

2021

- PT Pupuk Indonesia (Persero) menerapkan sentralisasi fungsi Holding.
- Peresmian Program Makmur.
- Pupuk Indonesia luncurkan penyeragaman brand produk ritel.
- Perubahan nama PT Pupuk Indonesia Energi ("PIE") menjadi PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU").

- PT Pupuk Indonesia (Persero) implements centralization of the Holding function.
- Inauguration of the Makmur Program.
- Pupuk Indonesia launches retail product brand uniformity.
- Change of name of PT Pupuk Indonesia Energi ("PIE") to PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU").

2022

- Perubahan nama PT Mega Eltra ("ME") menjadi PT Pupuk Indonesia Niaga ("PI Niaga").
- Peresmian Kantor Perwakilan di Kota Dubai, UAE.
- Penguatan ekosistem Makmur melalui penandatanganan MoU kelanjutan Program Makmur melalui sinergi bersama 6 BUMN.

- Change of name of PT Mega Eltra ("ME") to PT Pupuk Indonesia Niaga ("PI Niaga").
- Inauguration of Representative Office in Dubai City, UAE.
- Strengthening the Makmur ecosystem through the signing of the MoU for the continuation of the Makmur Program through synergies with 6 SOEs.

2023

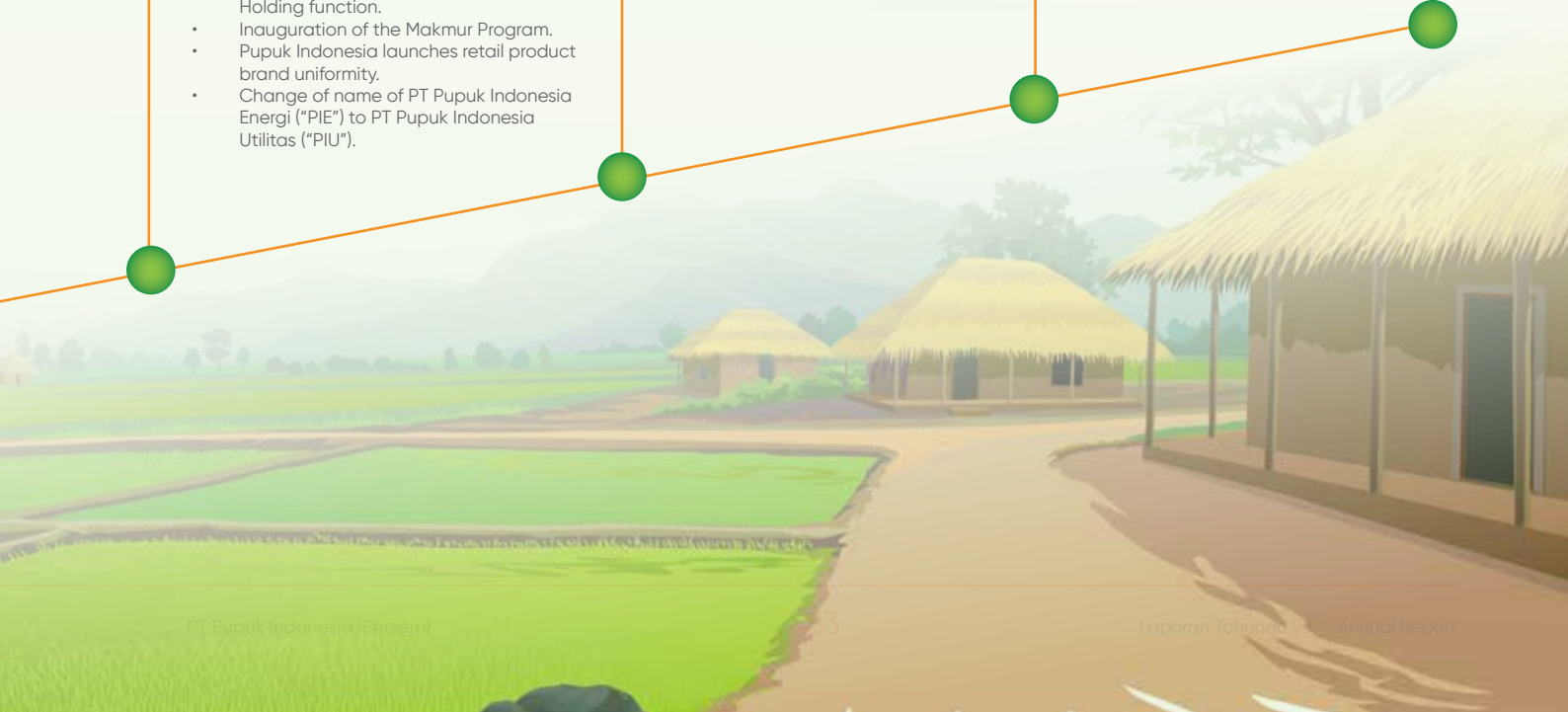
- Peresmian Pabrik NPK PIM oleh Presiden RI, Joko Widodo.
- Penandatanganan Perjanjian Kredit Pendanaan dan *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) Proyek Pusri IIIB.
- *Groundbreaking* Kawasan Industri Pupuk Fakfak.

- Inauguration of PIM NPK Plant by the President of Indonesia, Joko Widodo.
- Signing of Funding Credit Agreement and Engineering, Procurement and Construction (EPC) of Pusri IIIB Project.
- Groundbreaking of Fakfak Fertilizer Industrial Estate.

2024

- PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan inbreng saham di Anak Perusahaan Non Produsen Pupuk yang bergerak di bidang utilitas yaitu PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU) kepada PT Rekayasa Industri.
- PT Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan satu saham istimewa untuk dimiliki negara (selanjutnya disebut saham Seri-A Dwiwarna) pada Anak Perusahaan eks BUMN berikut:
  - PT Pupuk Kalimantan Timur/ PKT (eks BUMN).
  - PT Pupuk Kujang/PKC (eks BUMN).
  - PT Petrokimia Gresik/PKG (eks BUMN).
  - PT Pupuk Iskandar Muda/PIM (eks BUMN).
  - PT Pupuk Sriwidjaja Palembang/PSP (hasil *spin off* eks BUMN).

- PT Pupuk Indonesia (Persero) Undertakes the Share Injection Process of PT Pupuk Indonesia Utilitas into PT Rekayasa Industri.
- PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PI") has designated one preferred share to be owned by the state (hereinafter referred to as Series-A Dwiwarna shares) in the following former BUMN Subsidiaries:
  - PT Pupuk Kalimantan Timur/ PKT (former BUMN).
  - PT Pupuk Kujang/PKC (former BUMN).
  - PT Petrokimia Gresik/PKG (former BUMN).
  - PT Pupuk Iskandar Muda/PIM (former BUMN).
  - PT Pupuk Sriwidjaja Palembang/PSP (spin-off result of former BUMN).



Bidang Usaha, Produk dan Jasa, serta Pasar yang Dilayani

Line of Business, Products and Services, and Markets Served



SESUAI ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta No. 01 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Daftar Perseroan No. AHU-0175443.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0071253.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, maksud dan tujuan dari kegiatan Perusahaan adalah melakukan usaha (manajemen) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agro industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Articles of Association Company which was last amended by Deed No. 01 dated October 12, 2020, made by Lumassia, S.H., Notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Company Register No. AHU-0175443. Company No. AHU-0102733. AH.01.11.TAHUN 2020 dated October 18, 2020, as well as the Letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration No. AHU-0071253.AH.01.02 Tahun 2020 dated October 18, 2020, the purpose and objectives of the Company's activities are to conducting business (management) of companies, trade and services in the fields of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals and other chemicals as well as agro industry to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/pursue profit in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah disampaikan di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND CONDUCTED IN THE FINANCIAL YEAR

To achieve the purposes and objectives as stated above, the Company may carry out business activities with the following description:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activity based on Articles of Association	**Telah/Belum Dijalankan** Executed/ Not Executed	**Keterangan** Description
Kegiatan Usaha Utama Main Business Activities		
Perdagangan Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan pada umumnya termasuk ekspor, impor, lokal dan interinsulair, bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya. **Trade** Organizing distribution and trading activities in general including exports, imports, local and interinsular, raw materials, auxiliary materials, production equipment in the fields of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals, agroindustry and other chemicals.	√	Kegiatan ini merupakan bisnis inti PI Grup This activity is the core business of PI Group
Jasa pengelolaan (*Management*) Perusahaan dan jasa konsultasi manajemen. Company Management Services and Management Consulting Services.	√	Merupakan kegiatan induk usaha produsen pupuk dalam mengelola portofolio investasi dan memberikan arahan kebijakan serta konsultasi pengelolaan Anak Usaha. This is the activity of the parent company of fertilizer producers in managing investment portfolios and providing policy direction and management consulting for its Subsidiaries.
Jasa Lainnya Melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain engineering, pengantongan (*bagging station*), konstruksi *management*, pengoperasian pabrik, perbaikan, reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia, industri kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan. **Other Services** Carrying out research studies, education, development, engineering design, bagging (bagging station), construction management, plant operation, repair, repair, maintenance, consulting (except legal consulting) and other technical services in the fertilizer industry sector, petrochemicals, other chemical industries and services in agriculture and plantations.	√	Merupakan kegiatan usaha EPC dan kegiatan untuk menjamin kelancaran operasional pabrik mulai hulu hingga hilir untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi. EPC business activities and activities to ensure the smooth operation of the plant from upstream to downstream to produce high quality products.
Kegiatan Usaha Penunjang Supporting Business Activities		
Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi, pergudangan, dan kegiatan lainnya yang merupakan sarana dan perlengkapan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha tersebut. Carrying out business activities in the field of transportation, expedition, warehousing and other activities which are facilities and equipment for the smooth implementation of these business activities.	√	Kegiatan ini dilaksanakan melalui Anak Usaha bidang logistik. This activity is carried out through the Logistics Subsidiary.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activity based on Articles of Association	**Telah/Belum Dijalankan** Executed/ Not Executed	**Keterangan** Description
Melaksanakan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan perundang-undangan. Carry out Government assignments in accordance with the principles of good corporate management and legislation.	√	Merupakan kegiatan untuk menjalankan penugasan Pemerintah terutama penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk kebutuhan Petani. An activity to carry out Government assignments, especially the provision of Subsidized Fertilizers for Farmers' needs.

Keterangan/Note:
√ = telah dijalankan/implemented
x = belum dijalankan/not yet implemented

PRODUK DAN JASA

Pupuk dan Amoniak

Kegiatan produksi dan perdagangan produk pupuk dan amoniak yang ditopang oleh 5 (lima) Entitas Anak, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Kegiatan perdagangan produk pupuk mencakup penyaluran pupuk bersubsidi atau *Public Service Obligation* (PSO) dan komersial.

Sesuai dengan peraturan menteri perdagangan No. 04 tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian. PTPI melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/petani dan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh kementerian pertanian meliputi Urea, NPK dan organik. Tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.02/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi.

PRODUCT AND SERVICES

Fertilizer and Ammonia

Production and trading activities of Fertilizer, ammonia and other chemical products are upheld by 5 (five) Subsidiaries, namely PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The trading activities of fertilizer products include the distribution of subsidized fertilizers or Public Service Obligation (PSO).

In accordance with the Regulation of the Minister of Trade No. 04 Year 2023 dated January 2, 2023 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector, the Government of Indonesia provides subsidies to PI Group for the needs of farmer groups and/or farmers in the agricultural sector including urea, NPK, Organic. The procedures for the provision, disbursement, and accountability of fertilizer subsidies are regulated in the Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.02/2016 dated 26 April 2016 on the Procedures for the Provision, Disbursement, and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds. The amount of fertilizer subsidy is calculated based on the difference between the cost of goods sold and the highest retail price.



Berikut adalah produk-produk yang dipasarkan oleh PI *Group*:

1. **UREA**
   Pupuk dengan kandungan N sebesar 46% dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi (komersial). Pupuk Urea memiliki fungsi membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kandungan protein tanaman.

2. **NPK**
   Merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan N, P, K, dan unsur mikro dengan komposisi yang variatif disesuaikan dengan permintaan pasar. Pupuk NPK dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi (komersil). Pupuk NPK memiliki fungsi dapat meningkatkan hasil panen, membuat tanaman lebih hijau, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit dan kekeringan.

3. **Pupuk Organik**
   Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan menyuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pupuk Organik dipasarkan untuk sektor subsidi.

The following are the products marketed by PI Group:

1. **UREA**
   This fertilizer with N content of 46% is marketed to both the subsidized and non-subsidized (commercial) sectors. Urea fertilizer has the function of making plants greener, accelerating plant growth and increasing plant protein content.

2. **NPK**
   A compound fertilizer that contains N, P, K, and micro elements with a varied composition tailored to market demand. NPK fertilizers are marketed for both subsidized and non-subsidized sectors. NPK fertilizers have the function of increasing crop yields, making plants greener, and increasing plant resistance to pests and drought.

3. **Organic Fertilizer**
   Organic fertilizer is a type of fertilizer made entirely or partially from plant or animal materials that have been processed. It can be found in solid or liquid form and is utilized to provide organic matter, thereby enhancing the physical, chemical, and biological attributes of soil. Organic fertilizers are marketed for subsidized sector.

4. **Fosfat**
   Merupakan pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor non-subsidi (komersil). Pupuk Fosfat terdiri dari SP-36 (P36%), SP-26 (P26%), dan Phosgreen (P20%) berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan bunga serta masaknya buah dan biji.

5. **ZA**
   Merupakan pupuk yang diproduksi PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor non-subsidi (komersil). Pupuk ZA memiliki kandungan N sebesar 21% dan Sulfur 24% serta berfungsi untuk meningkatkan produksi khususnya tebu, meningkatkan kualitas hasil panen, menjadikan tanaman lebih sehat dan tahan terhadap hama.

6. **ZK**
   Merupakan pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor non-subsidi (komersil). Pupuk ZK memiliki kandungan K2O sebesar 50% dan Sulfur 17% dan berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah, membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, serta memperbaiki warna, aroma, dan rasa.

7. **Amoniak**
   Merupakan bahan mentah industri kimia dengan kemurnian 99,5% yang diproduksi oleh PI Group dan dipasarkan untuk sektor dalam negeri maupun ekspor.

PRODUK LAINNYA

Asam Sulfat, Asam Fosfat, Alumunium Fluorida, dan lain-lain yang dipasarkan untuk sektor dalam negeri maupun ekspor.

Dengan menawarkan nilai yang istimewa dan kinerja yang unggul, produk-produk PI *Group* telah membantu jutaan petani Indonesia untuk meningkatkan hasil dan kualitas panennya.

Jasa Konstruksi

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri ("Rekind"), Entitas Anak yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement & Construction* (EPC). Dengan pengalaman lebih dari 42 tahun di bidang EPC, Rekind telah membangun pabrik-pabrik skala besar di Indonesia di bidang minyak dan gas bumi (migas), kimia/petrokimia, mineral, infrastruktur, dan pembangkit listrik.

4. **Phosphate**
   It is a fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik and marketed for the non-subsidized (commercial) sector. Phosphate fertilizers consist of SP-36 (P36%), SP-26 (P26%), and Phosgreen (P20%) which function to spur root and flower growth as well as fruit and seed ripening.

5. **ZA**
   A fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik and marketed for the non-subsidized sector. ZA fertilizer has an N content of 21% and 24% Sulfur and functions to increase sugarcane yield production, improve crop quality, make plants healthier and more resistant to pests.

6. **ZK**
   A fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik marketed for the non-subsidized sector. ZK fertilizer contains 50% K2O and 17% Sulfur and functions to increase soil nutrients, make plants more upright and sturdy, and improve color, aroma, and taste.

7. **Ammonia**
   It is a chemical industry raw material with 99.5% purity produced by PI Group and marketed for domestic and export sectors.

OTHER PRODUCTS

Sulfuric Acid, Phosphoric Acid, Aluminum Fluoride and others which are marketed to the domestic and exports.

By offering exceptional value and superior performance, PI Group's products have helped millions of Indonesian farmers to improve the yield and quality of their crops.

Construction Services

Construction Services business activities are carried out by PT Rekayasa Industri ("Rekind"), a Subsidiary engaged in Engineering, Procurement & Construction (EPC). With more than 42 years of experience in EPC, Rekind has built large-scale factories in Indonesia in the fields of oil and gas, chemical/petrochemical, minerals, infrastructure, and power generation.

Lain-Lain

Kegiatan usaha pada segmen lain-lain merupakan kegiatan penunjang yang terdiri dari perdagangan umum, yaitu melalui PT Pupuk Indonesia Niaga dan PT Pupuk Indonesia Pangan, jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik.

Others

Business activities in the other segment are supporting activities consisting of general trading, namely through PT Pupuk Indonesia Niaga and PT Pupuk Indonesia Pangan, shipping services and sea transportation services by PT Pupuk Indonesia Logistik.

PASAR YANG DILAYANI

Perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa terbagi menjadi dua, yakni produk dan layanan yang didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia, serta produk yang diekspor ke luar negeri. Sebaran pasar geografis sebagai negara tujuan ekspor yang dilakukan Perusahaan meliputi Australia, Filipina, Korea Selatan, Vietnam, India, Jepang, Thailand, Singapura, Taiwan, Malaysia, serta beberapa negara lainnya.

Berdasarkan pendapatan konsolidasian Perusahaan, produk yang dipasarkan pada tahun 2024 di pasar domestik (termasuk PSO) mencapai 78% sedangkan produk ekspor sebesar 22% dari total pendapatan konsolidasian Perusahaan.

MARKETS SERVED

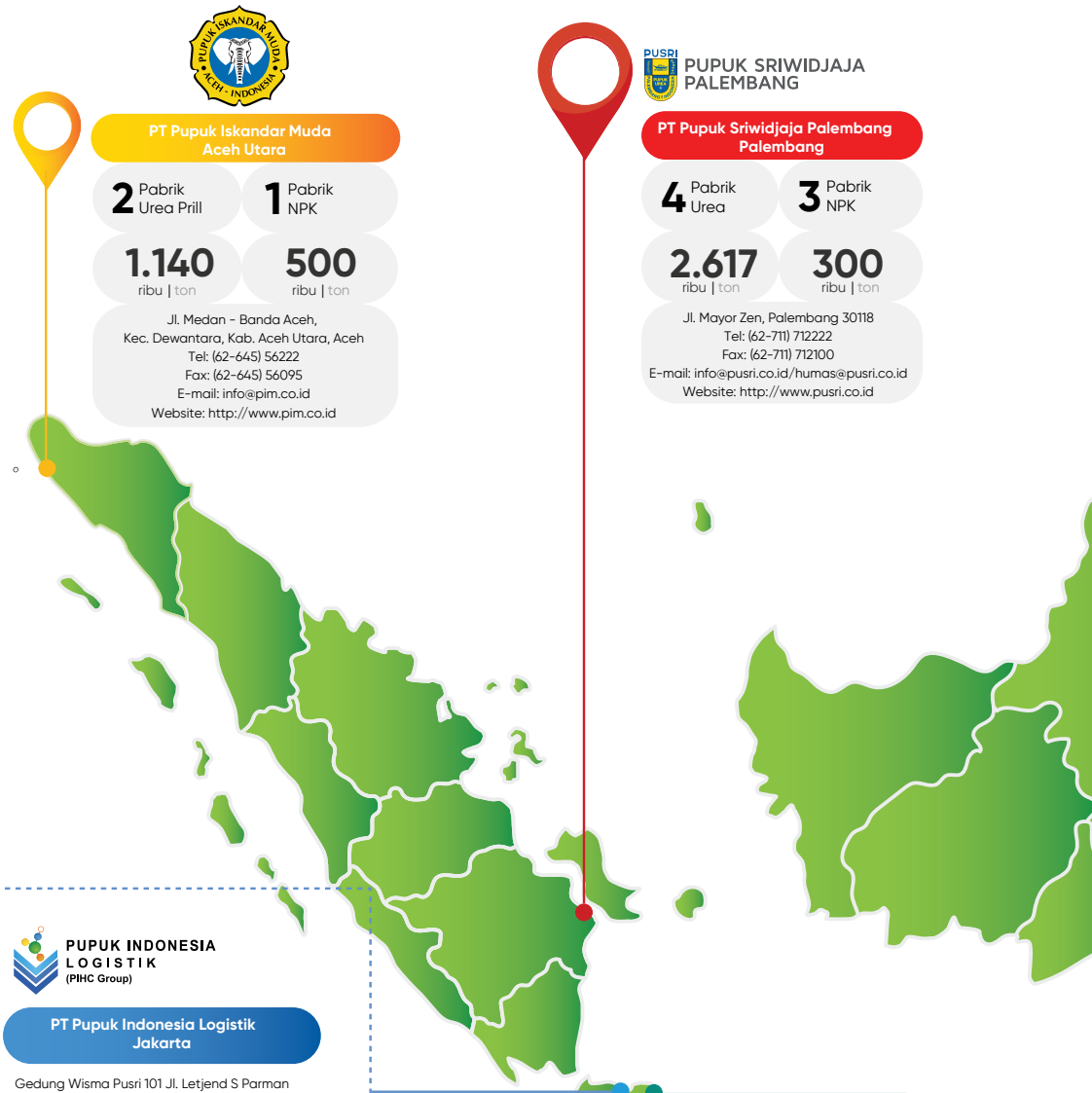
The Company in marketing products and services is divided into two, namely products and services that are distributed throughout Indonesia, as well as products that are exported abroad. The geographic market distribution as export destination countries carried out by the Company includes Australia, Philippines, South Korea, Vietnam, India, Japan, Thailand, Singapore, Taiwan, Malaysia, and several other countries.

Based on the Company's consolidated revenue, products marketed in 2024 in the domestic market reached 78% while non-subsidized or commercial products amounted to 22% of the Company's total consolidated revenue.

Komposisi Persebaran Penjualan Non PSO (%)
Distribution Composition (%)

Keterangan Description	2024	2023
Luar Negeri (Ekspor) Overseas (Export)	35,54	40,42
Domestik Domestic	64,46	59,58

Wilayah Operasional
Operational Area



PT Pupuk Iskandar Muda Aceh Utara

2 Pabrik Urea Prill	1 Pabrik NPK
1.140 ribu | ton	500 ribu | ton

Jl. Medan - Banda Aceh,
Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh
Tel: (62-645) 56222
Fax: (62-645) 56095
E-mail: info@pim.co.id
Website: http://www.pim.co.id

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Palembang

4 Pabrik Urea	3 Pabrik NPK
2.617 ribu | ton	300 ribu | ton

Jl. Mayor Zen, Palembang 30118
Tel: (62-711) 712222
Fax: (62-711) 712100
E-mail: info@pusri.co.id/humas@pusri.co.id
Website: http://www.pusri.co.id

PT Rekayasa Industri Jakarta

Jl. Kalibata Timur I No. 36
Kalibata, Jakarta 12740
Tel: (62-21) 7988700, 7988707
Fax: (62-21) 7988701, 7988702
E-mail: corpsec@rekayasa.co.id
Website: http://www.rekayasa.com

PT Pupuk Indonesia Logistik Jakarta

Gedung Wisma Pusri 101 Jl. Letjend S Parman
Kav. 101 RT/RW. 2/1 Tomang,
Kec. Grogol Petamburan, Jakarta 11440
Tel: (62-21) 22631881, 22631882, 22631883
Fax: (62-21) 22561904
E-mail: info@pi-logistik.com
Website: http://www.pi-logistik.com

PT Pupuk Indonesia Niaga Jakarta

Gedung ROB-2 Lantai 3 & 4
Jl. Kalibata Timur I No. 36,
Kalibata, Jakarta 12740
Tel: +62-21 7919 6026/7919 6027
E-mail: corcom@pi-niaga.com
Web: pi-niaga.com

PT Pupuk Kujang Cikampek

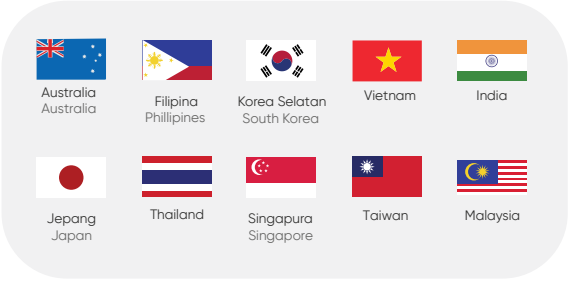
2 Pabrik Urea	3 Pabrik NPK Granular
1.140 ribu | ton	260 ribu | ton

Jl Jenderal A. Yani No. 39, Kec. Cikampek,
Kab. Karawang 41373, Jawa Barat
Tel: (62-264) 316141, 317007
Fax: (62-264) 314235
E-mail: info@pupuk-kujang.co.id
Website: http://www.pupuk-kujang.co.id

PT Pupuk Indonesia Pangan Karawang

Jl Rawamerta Dusun Sukamanah RT/RW. 006/003
Desa Kutawargi, Kec. Rawamerta Karawang
Jawa Barat 41382
Tel: (62-267) 6064389
Fax: (62-267) 6064556
E-mail: pemasaran@pi-pangan.com
Website: http://pi-pangan.com

10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar
10 Largest Export Destination Countries



PUPUK KALTIM

PT Pupuk Kalimantan Timur
Bontang

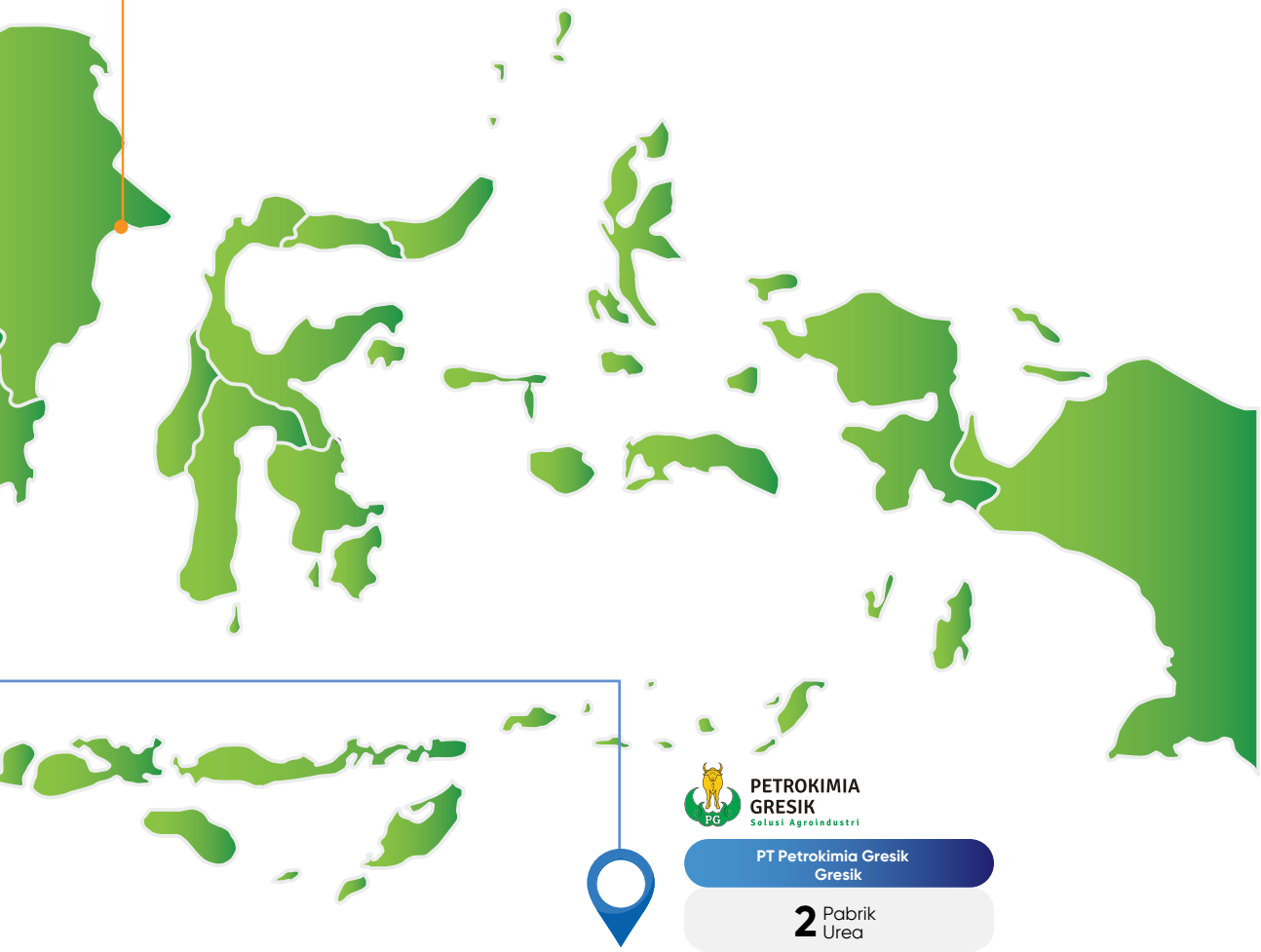
5 Pabrik Urea

3 Pabrik NPK

3.435 ribu | ton

300 ribu | ton

Jl. Ir. James Simandjuntak No.1,
Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara,
Kota Bontang 75313, Kalimantan Timur
Tel: +62-548 41202
Fax: +62-548 41626
E-mail: dof@pupukkaltim.com
Web: www.pupukkaltim.com



PETROKIMIA GRESIK
Solusi Agroindustri

PT Petrokimia Gresik
Gresik

2 Pabrik Urea

1.030 ribu | ton

3 Pabrik ZA

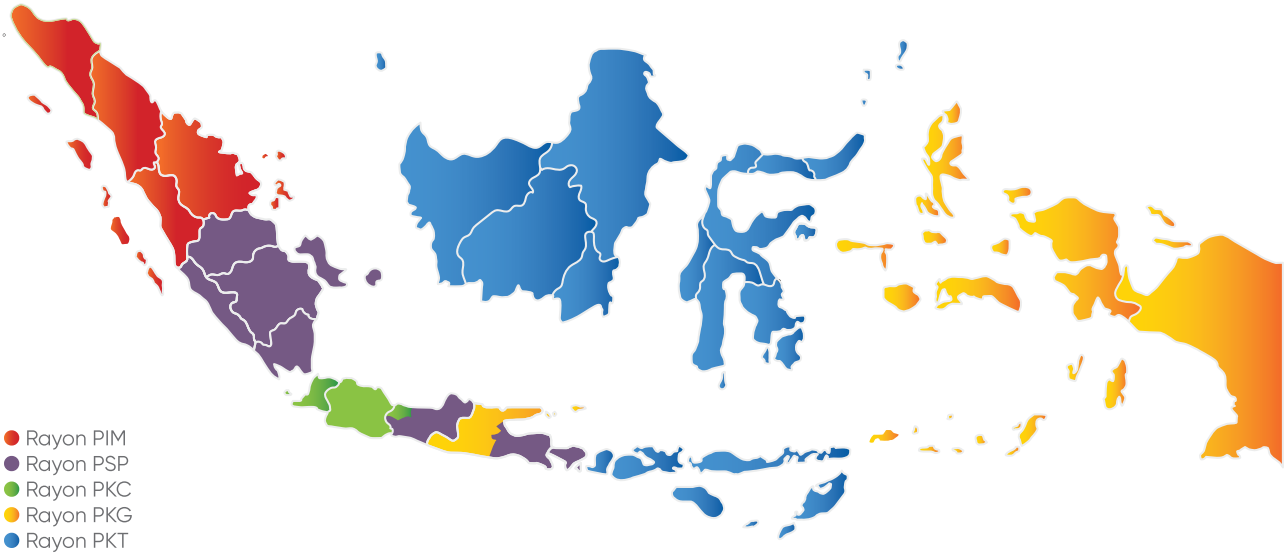
9 Pabrik NPK

750 ribu | ton

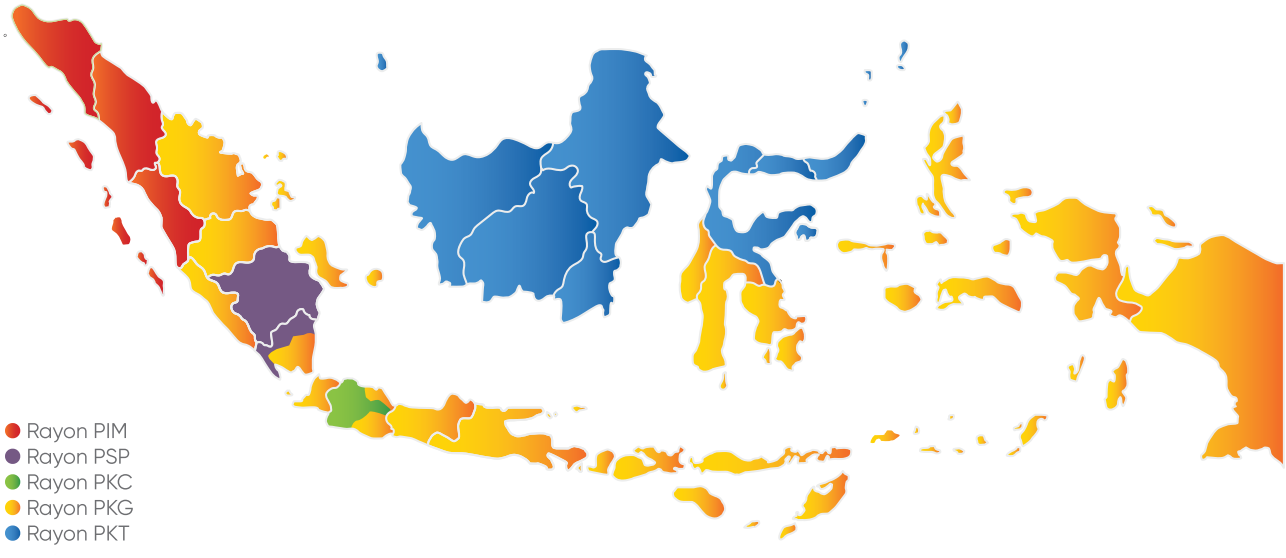
3.220 ribu | ton

Jl. Jend. A. Yani, Gresik 61119, Jawa Timur
Tel: (62-31) 3981811, 3982100, 3982200
Fax: (62-31) 3981722, 3892272
E-mail: pg@petrokimia-gresik.com
Website: http://www.petrokimia-gresik.com

Wilayah Operasional Tahun 2024
Produk Urea PSO
Operational Areas for
Urea PSO Products in 2024



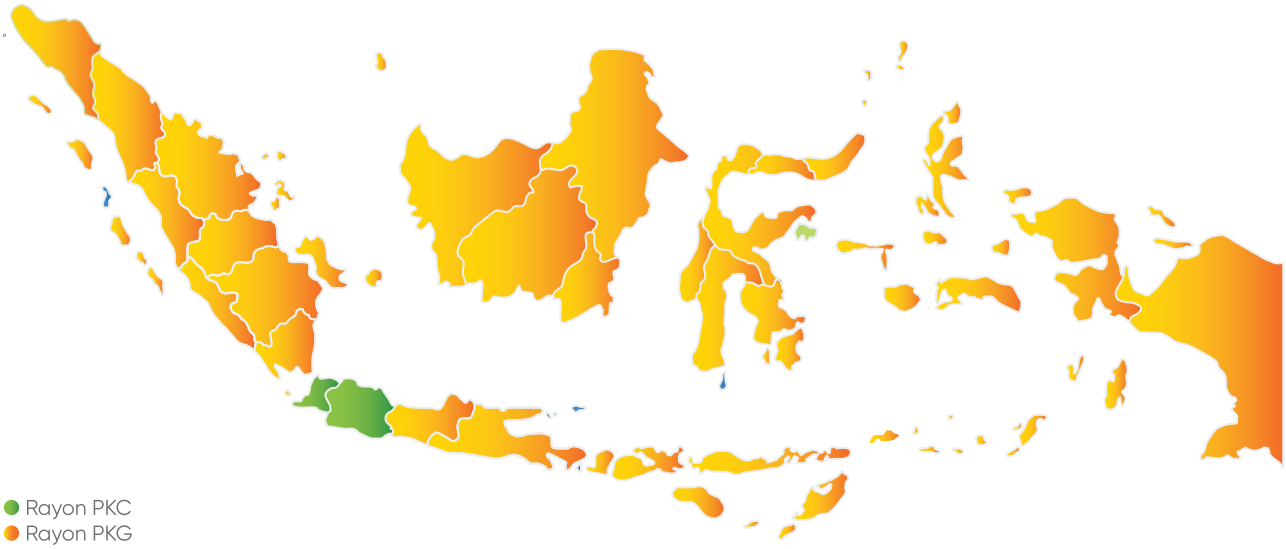
Wilayah Operasional Tahun 2024
Produk NPK PSO
Operational Areas for
NPK PSO Products in 2024



Wilayah Operasional Tahun 2024
Produk NPK Kakao
Operational Areas in 2024
NPK Kakao Products



Pupuk Organik Bersubsidi
Organic Fertilizer PSO Product



Wilayah Operasional Produk Komersial dan Non Pupuk

Operational Areas of Commercial and Non-Fertilizer Products

Nama Perusahaan Company Name	Lokasi Pabrik/ Operasi Plant/Operation Location	Pasar Dalam Negeri Domestic Market	
		Pupuk Komersial Commercial Fertilizer	Non Pupuk Non-Fertilizer
PT Pupuk Iskandar Muda	Lhokseumawe	Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Kalimantan Selatan Aceh, Riau, West Sumatra, North Sumatra and South Kalimantan	Sumatera Utara, Jawa Timur South Sumatra East Java,
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Palembang	Sumatra Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kep. Riau, Sulawesi Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Bali, Kalimantan Selatan, NTB, DI Yogyakarta South Sumatra, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Riau, Bengkulu, Central Java, East Java, DKI Jakarta, Banten, West Kalimantan, Riau Islands, West Sulawesi, West Sumatra, North Sumatra, Bali, South Kalimantan, NTB, DI Yogyakarta	Jawa Timur, Lampung, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Bangka Belitung East Java, Lampung, West Sumatra, South Sumatra, North Sumatra and Bangka Belitung
PT Pupuk Kujang	Cikampek	Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat. West Java, Banten, DI Yogyakarta, Central Java, East Java, Lampung, South Sumatra, DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, West Kalimantan, South Kalimantan, West Sumatra	Banten, Jawa Barat, Kep. Riau, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Tenggara Banten, West Java, Riau Islands, Central Sulawesi, Riau, Southeast Sulawesi
PT Pupuk Kalimantan Timur	Bontang	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Lampung, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Gorontalo, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Banten, Jawa Barat, Riau, DKI Jakarta, Papua, Bali, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau West Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, Central Sulawesi, West Sumatra, East Java, West Nusa Tenggara, Aceh, Lampung, North Sulawesi, North Sumatra, East Java, East Kalimantan, Gorontalo, DI Yogyakarta, Central Java, East Nusa Tenggara, Banten, West Java, Riau, DKI Jakarta, Papua, Bali, Bangka Belitung Islands, Riau Islands	Jawa Timur, Kalimantan Timur East Java, East Kalimantan
PT Petrokimia Gresik	Gresik	Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatra Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo, Kep. Riau, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara Bali, Banten, DI Yogyakarta, West Java, Central Java, East Java, Lampung, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, Papua, Central Kalimantan, West Sumatra, West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, Bangka Belitung Islands, Riau, South Sumatra, Bengkulu, Jambi, North Sumatra, Maluku, Southeast Sulawesi, Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo, Riau Islands, North Maluku, West Papua, West Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, North Sulawesi	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta West Java, East Java, DI Yogyakarta, DKI Jakarta

Negara Tujuan Ekspor Produk PI *Group*

Export Destination Countries of PI Group Product

Negara Country	Produk (ton) Product (ton)						
	Urea	NPK	ZK	ALF3	Amoniak	Asam Fosfat	Total
Australia	585.088				8.449		593.537
Filipina Philippine	354.918				616		355.534
Korea Selatan South Korea	60.486				104.293		164.779
Vietnam	102.627		1.950		33.711		138.288
India	22.940	27.750	2.850	3.280	88.962		145.782
Jepang Japan	5.285			18	107.989		113.292
Thailand	71.503				26.447		97.950
Singapura Singapore	620				30.953		31.573
Taiwan	44.960				43.419		88.379
Malaysia	50.627				2.965		53.592
Kolombia Colombia	48.110						48.110
China					43.589		43.589
Belgia Belgium					26.214		26.214
Sri Lanka	26.893						26.893
Guatemala	20.850						20.850
Nicaragua	4.500						4.500
Kamboja Cambodia	3.790						3.790
Afrika Selatan South Africa	3.745						3.745
Myanmar	3.200						3.200
New Zealand	2.350						2.350
Pakistan			500				500
Chili	480						480
Hong Kong	400						400
Sierra Leone	380						380
Timor Leste East Timor	160						160
Mozambique	160						160
Amerika Serikat United States	138						138
UEA			250				250
Jumlah Total	**1.414.210**	**27.750**	**5.550**	**3.298**	**517.607**		**1.968.415**

Visi dan Misi
Vision and Mission

PURPOSE

Berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Contributing to national food security and sustainable economic growth.

VISION

Menjadi perusahaan agrosolusi dan kimia terintegrasi terkemuka di tingkat global.
A leading global agrosolution and integrated chemical company.

MISSION

1. Menyediakan Solusi pertanian, produk nutrisi tanaman berkualitas tinggi sesuai kebutuhan konsumen serta solusi industri kimia berkelanjutan yang andal untuk Indonesia dan dunia.
2. Memaksimalkan *circular economy* sehingga memberikan manfaat serta nilai tambah ekonomi dan sosial untuk Indonesia.
3. Mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan nasional, serta berkontribusi dalam hilirisasi industri berkelanjutan di Indonesia.
4. Menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi terkini yang mengedepankan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup dengan menjaga risiko dan prinsip tata Kelola yang baik dengan manajemen risiko yang efektif dan didukung oleh SDM kelas dunia yang kompeten dan profesional.
5. Membangun budaya yang inovatif, kolaboratif, dan berkinerja unggul untuk menjamin Perusahaan yang berkelanjutan.

1. Provide reliable agricultural solutions and high-quality crop nutrition products tailored to customer needs, as well as sustainable chemical industry solutions for Indonesia and the world.
2. Maximize the circular economy to deliver economic and social benefits and added value for Indonesia.
3. Support national food security and self-sufficiency programs and contribute to the downstream development of sustainable industries in Indonesia.
4. Conduct business by applying the latest technology that prioritizes occupational safety and environmental sustainability, upholding risk management and good governance principles, and supported by competent and professional world-class Human Capitals.
5. Foster an innovative, collaborative, and high-performance culture to ensure the Company's sustainability.

REVIU SERTA PENETAPAN VISI DAN MISI PERUSAHAAN OLEH MANAJEMEN KUNCI

Manajemen PI *Group* yang terdiri dari Dewan Komisaris PTPI, Direksi PTPI, dan Direktur Utama Anak Perusahaan telah menetapkan dan menyepakati purpose dan visi PI Group melalui *Strategic Workshop* Perumusan Purpose dan Visi Perusahaan yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang kemudian disahkan dalam RKAP 2024 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun Buku 2024 PTPI tanggal 30 Januari 2024.

Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bisnis dan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis serta tantangan yang akan dihadapi oleh Perseroan. Perubahan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris seperti ditampilkan pada halaman Laporan Tahunan ini.

REVIEW AND ESTABLISHMENT OF THE COMPANY'S VISION AND MISSION BY KEY MANAGEMENT

The PI Group's management, consisting of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Presidents of Subsidiaries, established and agreed upon the Group's purpose, vision, and mission through a Strategic Workshop on the Formulation of Purpose, Vision, and Mission held on October 31, 2023. These were subsequently ratified in the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) at the Annual General Meeting of Shareholders, as well as in the 2024 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) of PTPI on January 30, 2024.

These changes were made to align with business conditions and to ensure their relevance to the evolving business environment and future challenges faced by the Company. The changes were approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners, as presented in the pages of this Annual Report.

NILAI-NILAI DAN PARADIGMA

PTPI mengimplementasikan nilai-nilai utama dan paradigma Perusahaan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri BUMN No. SE–7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan tersebut telah menetapkan nilai-nilai yang disebut AKHLAK, akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

VALUES AND PARADIGM

PTPI implements the Company's core values and paradigm as stipulated in the Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE–7/MBU/07/2020 concerning the Core Values of Human Capitals of State-Owned Enterprises. These provisions establish the values known as AKHLAK, an acronym for Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative).

AKHLAK

DASAR DAN TUJUAN PENERAPAN AKHLAK

Dasar Penerapan AKHLAK

Acuan yang menjadi dasar dalam implementasi nilai-nilai AKHLAK di lingkungan Perusahaan adalah:

1. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE–7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Edaran PTPI No. 08/A/KK/S22/SE/2020 perihal Implementasi Nilai–Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*).
3. Panduan Tata Nilai PTPI tanggal 2 September 2020.
4. Surat Keputusan Direksi PTPI No. SK/DIR/072/2020 tentang Tata Nilai Perusahaan.
5. Surat Keputusan Direksi PTPI No. SK/DIR/089/2020 tentang Pembentukan Tim Proyek Implementasi Budaya Perusahaan "AKHLAK" PTPI.

BASIS AND OBJECTIVE OF AKHLAK IMPLEMENTATION

Basis for AKHLAK Implementation

The following references serve as the foundation for implementing AKHLAK values within the Company:

1. Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Capitals of State-Owned Enterprises.
2. PTPI Circular Letter No. 08/A/KK/S22/SE/2020 regarding the Implementation of Core Values of Human Capitals of State-Owned Enterprises into Corporate Culture.
3. PTPI Values Manual dated September 2, 2020.
4. Decree of the Board of Directors of PTPI No. SK/DIR/072/2020 concerning Corporate Values.
5. Decree of the Board of Directors of PTPI No. SK/DIR/089/2020 concerning the Establishment of the PTPI "AKHLAK" Corporate Culture Implementation Project Team.

Perusahaan juga telah memiliki ketetapan yang mewajibkan penerapan nilai-nilai AKHLAK di lingkungan Anak Perusahaan. Ketetapan internal itu disampaikan melalui Surat Edaran No. 08/A/KK/S22/SE/2020 perihal Implementasi Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) tanggal 4 Agustus 2020.

The Company also has a provision that requires implementation of AKHLAK values in the Subsidiary environment. The internal decree was conveyed through Circular Letter No. 08/A/KK/S22/SE/2020 regarding the Implementation of Core Values of State-Owned Enterprise Human Capitals into Corporate Culture on August 4, 2020.

Core values Perusahaan terdiri dari:

The Corporate core values consist of

A

AMANAH
Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan Perilaku:
1. Memenuhi janji dan komitmen;
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

TRUSTWORTHY
Definition: Upholding the trust that has been given.
Behavioral Guidelines:
1. Fulfilling promises and commitments;
2. Taking responsibility for tasks, decisions, and actions;
3. Adhering to moral and ethical values.

K

KOMPETEN
Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan Perilaku:
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. Membantu orang lain belajar;
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

COMPETENT
Definition: Continuously learning and developing capabilities.
1. Enhancing personal competencies to meet ever-changing challenges;
2. Helping others to learn;
3. Completing tasks to the highest quality standards.

H

HARMONIS
Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan Perilaku:
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. Suka menolong orang lain;
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

HARMONIOUS
Definition: Caring for one another and respecting differences.
1. Respecting everyone, regardless of background;
2. Being helpful to others;
3. Creating a conducive work environment.

L

LOYAL
Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Panduan Perilaku:
1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

LOYAL
Definition: Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State.
1. Maintaining the good reputation of fellow employees, leaders, SOEs, and the State;
2. Willing to make sacrifices to achieve greater goals;
3. Obeying leadership as long as it does not conflict with laws and ethics.

A

ADAPTIF
Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Panduan Perilaku:
1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
3. Bertindak proaktif.

ADAPTIVE
Definition: Continuously innovating and being enthusiastic in driving or responding to change.
1. Quickly adapting to improve;
2. Continuously making improvements in line with technological advancements;
3. Acting proactively.

K

KOLABORATIF
Definisi: Membangun Kerja sama yang sinergis.
Panduan Perilaku:
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

COLLABORATIVE
Definition: Building synergistic cooperation.
1. Providing opportunities for all parties to contribute;
2. Being open to collaboration to create added value;
3. Mobilizing various resources to achieve common goals.


110-J

Tujuan Penerapan AKHLAK

Implementasi budaya "AKHLAK" di lingkungan PI Grup bertujuan untuk mendukung transformasi bisnis, sesuai arahan Manajemen PTPI. Selain itu, penerapan nilai-nilai tersebut juga telah menjadi program kerja yang disusun oleh Tim Pengelola Budaya PTPI dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan.

Purpose of AKHLAK Implementation

The implementation of the AKHLAK core values across the PI Group serves as a strategic initiative to support ongoing business transformation, in alignment with the directives of PTPI Management. This initiative also forms part of the PTPI Culture Management Team's work program, aimed at reinforcing organizational culture to achieve the Company's vision and mission.

Program Implementasi Budaya Perusahaan Tahun 2024

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam merealisasikan nilai-nilai AKHLAK, sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan sejumlah program yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Corporate Culture Implementation Programs in 2024

As part of the Company's commitment to upholding the AKHLAK core values, a series of programs were implemented throughout 2024, as outlined in the table below

No.	Program Program	Deskripsi Description	Waktu Pelaksanaan Implementation Date
1	*Inclusive Workplace* PTPI	Program budaya perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif A corporate culture program aimed at creating an inclusive work environment.	Januari-Desember 2024 January-December 2024
2	eNPeKa *Fest*	Acara tahunan untuk mengapresiasi dan merayakan keberhasilan unit-unit kerja yang telah memberikan pencapaian nyata atas Program eNPeKa (Ekspresi Nyata Pemahaman Kualitas AKHLAK) yang sudah dijalankan. An annual event held to recognize and celebrate the achievements of work units that have demonstrated concrete results through the implementation of the eNPeKa Program (Real Expression of AKHLAK Quality Understanding)	Februari-April 2024 February-April 2024
3	*Leaders Talk* AKHLAK	Program sharing session yang diadakan secara offline maupun online dengan Direksi PTPI sebagai narasumber yang membahas tentang core values AKHLAK. A sharing session program conducted in both offline and online formats, featuring the Board of Directors of PTPI as speakers, focusing on discussions around the AKHLAK core values	Juli 2024 July 2024
4	*Risk Culture Awareness*	Program internalisasi budaya yang bekerja sama dengan Tim Manajemen Risiko PTPI yang bertujuan meningkatkan budaya sadar risiko karyawan PTPI. A cultural internalization program conducted in collaboration with PTPI's Risk Management Team, aimed at strengthening risk awareness among employees	April 2024 April 2024
5	Integrasi Program AKHLAK, EWP, RWP dan Inklusivitas PI *Group* Integration of AKHLAK, EWP, RWP Programs, and Inclusivity within PI Group	Program untuk mengintegrasikan progam budaya perusahaan AKHLAK, dengan program Employee Wellbeing Policy, Respectful Workplace Policy dan Inklusivitas sebagai bentuk penyusunan Employee Value Proposition PI *Group* A program designed to integrate the AKHLAK corporate culture with the Employee Wellbeing Policy, Respectful Workplace Policy, and inclusivity initiatives, as part of the preparation for the PI Group's Employee Value Proposition	November-Desember 2024 November-December 2024
6	AKHLAK Culture Festival	Program yang bertujuan untuk memperingati 4 (empat) tahun AKHLAK Kementerian BUMN. A program aimed at commemorating four years of AKHLAK implementation at the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs)	Juli-September 2024 July-September 2024
7	Pengukuran Implementasi Budaya Culture Measurement Implementation	Program pengukuran tingkat efektivitas implementasi budaya perusahaan. A program to assess the effectiveness of corporate culture implementation.	Juni-Desember 2024 June-December 2024

No.	Program Program	Deskripsi Description	Waktu Pelaksanaan Implementation Date
8	Program eNPeKa (Ekspresi Nyata Pemahaman Kualitas AKHLAK) dengan Tema *Know Your Customer* eNPeKa Program (Real Expression of AKHLAK Quality Understanding) with the theme Know Your Customer	Merupakan program bersama yang dirumuskan oleh *Culture Leader* (SVP), *Culture Champion* (VP), dan *Culture Fertilizer* (Tim Budaya) untuk meningkatkan *core value* AKHLAK. Pada tahun 2024 Program eNPeKa fokus pada *customer centric* dan *risk culture.* A joint program developed by the Culture Leader (SVP), Culture Champion (VP), and Culture Fertilizer (Culture Team) to strengthen the AKHLAK core values. In 2023, the eNPeKa Program focused on fostering a customer-centric mindset and enhancing risk culture	Oktober-Desember 2024 October-December 2024
9	Program SaPa PaGi (*Sharing* Pemahaman Padu bersinerGi) SaPa PaGi Program (Sharing Unified Understanding in Synergy)	Kegiatan rutin bulanan yang dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkungan PTPI yang bertujuan meningkatkan internalisasi *Core Values* AKHLAK. Monthly routine activities conducted by each work unit within PTPI, aimed at strengthening the internalization of AKHLAK core values	Januari-Desember 2024 January-December 2024
10	AKHLAK *Goes to School*	Program internalisasi AKHLAK kepada siswa/keluarga karyawan di sekolah yang berada di sekitar lingkungan dan di bawah yayasan Anak Perusahaan PTPI dengan game board AKHLAK Keluarga (AKAR) yang telah disusun Tim Budaya PTPI untuk menciptakan ekosistem AKHLAK secara lebih luas. An AKHLAK internalization program targeting students and families of employees in schools surrounding PTPI's operational areas, and those under the Company's children's foundation. The program utilizes the AKHLAK Keluarga (AKAR) board game, developed by the PTPI Culture Team, to foster a broader AKHLAK ecosystem	Maret-Agustus 2024 March-August 2024
11	*Safety Culture Awareness*	Program Penguatan *awareness* budaya *safety* yang bekerja sama dengan Tim K3LH PTPI yang bertujuan meningkatkan *awareness* budaya *Safety* karyawan PTPI. A safety culture awareness program conducted in collaboration with the K3LH Team of PTPI, aimed at enhancing employees' awareness and adherence to the Company's safety culture	April-Desember 2024 April-December 2024
12	FGD *for Culture Champion* (BOD-2)	Program budaya perusahaan yang dikemas dalam bentuk diskusi dua arah sebagai bentuk tindak lanjut hasil pengukuran indeks maturitas budaya dan bagian dari rangkaian penyusunan *roadmap* program budaya 2025-2029 yang bertujuan untuk *refreshment* dan penguatan peran *Culture Champion* PI *Group* dalam implementasi program budaya yang berjalan di Perusahaan A corporate culture program delivered through two-way discussion sessions to follow up on the culture-maturity index assessment. These sessions form part of the 2025 roadmap for cultural programs and are intended to refresh and strengthen the role of PI Group Culture Champions in executing Company-wide cultural initiatives	September-Desember 2024 September-December 2024
13	*Re-Engineering Culture Fertilizer (Change Agent)*	Program budaya perusahaan yang dikemas dalam bentuk diskusi dua arah yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan *roadmap* program budaya 2025-2029 yang bertujuan untuk refreshment dan penguatan peran *Culture Fertilizer* PI *Group* dalam implementasi program budaya yang berjalan di Perusahaan A corporate culture program delivered through two-way discussion sessions, as part of the 2025 Cultural Program Roadmap development. This initiative aims to refresh and strengthen the role of Culture Fertilizers within the PI Group in supporting the implementation of cultural programs across the Company	September-Desember 2024 September-Desember 2024

Filosofi Logo Perusahaan
Company Logo Philosophy

PUPUK INDONESIA
HOLDING COMPANY

OBJEKTIVITAS
OBJECTIVITY

Objektif dari desain logo adalah memberikan image baru untuk PTPI sebagai *Holding Company*, sehingga dapat menghilangkan *image brand* sebelumnya yaitu Pusri.
The objective of the logo design is to create a new image for PTPI as a holding company, replacing the previous brand image associated with Pusri.

BENTUK
SHAPE

Bentuk dasar logo terinspirasi dari hal-hal yang menjadi dasar usaha PTPI yaitu molekul atom yang terkandung di dalam senyawa pupuk, *petrochemical* dan *energy*. Bentuk dasar logo PTPI diilhami dari bentuk senyawa kimia pupuk urea, yang merupakan produk utama PTPI. Besaran lingkaran yang ada melambangkan *main-business* dan *sub-business*. Lingkaran kosong melambangkan bisnis yang akan terus berkembang, terus berkarya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
The basic shape of the logo is inspired by the fundamental elements of Pupuk Indonesia's business: atomic molecules found in fertilizer compounds, petrochemicals, and energy. The design is specifically inspired by the chemical structure of urea fertilizer, the company's main product. The varying sizes of the circles represent the main business and sub-businesses, while the open circle symbolizes a business that will continue to grow and innovate to meet society's needs.

JENIS HURUF
TYPEFACE

Huruf yang digunakan adalah huruf tanpa 'serif' yang memberi kesan modern, dinamis, dan profesional.
The typeface used is a sans-serif font, which conveys a modern, dynamic, and professional impression.

WARNA

Warna-warna yang mewakili unsur-unsur bisnis PTPI, yaitu *fertilizer, petrochemical*, dan *energy*. Warna logo diilhami dari bisnis inti PTPI dan filosofi yang terkandung di dalamnya.

COLOR

The colors represent the business elements of PTPI: fertilizer, petrochemicals, and energy. The logo's colors are inspired by the company's core businesses and their underlying philosophy.



Hijau | Green

Mewakili *main business* PTPI yang bergerak di bidang agrokimia dan juga melambangkan pembaharuan.
Represents PTPI's main business in agrochemicals and also symbolizes renewal.

Kuning | Yellow

Mewakili padi yang menguning dan juga melambangkan kesuburan.
Represents ripening rice and also symbolizes fertility.



Oranye | Orange

Mewakili sumber daya alam, energi, dan hasil bumi yang diolah PTPI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan dapat diartikan juga sebagai kesuksesan dan pencapaian bisnis.
Represents natural resources, energy, and agricultural products processed by PTPI to meet the needs of the Indonesian people, and also signifies business success and achievement.



Biru Muda | Light Blue

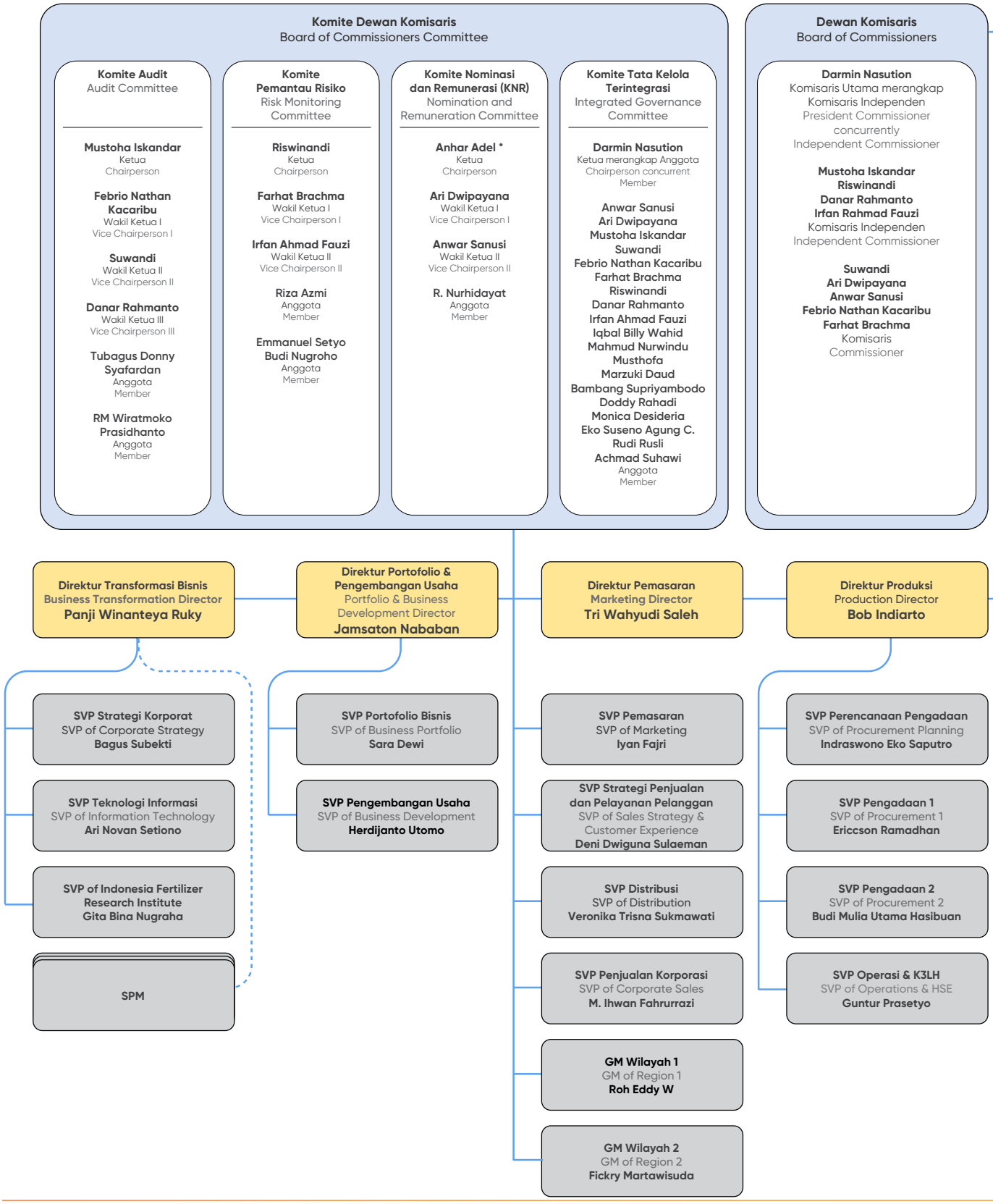
Mewakili keselarasan dan keseimbangan alam.
Represents harmony and balance in nature.



Biru Tua | Dark Blue

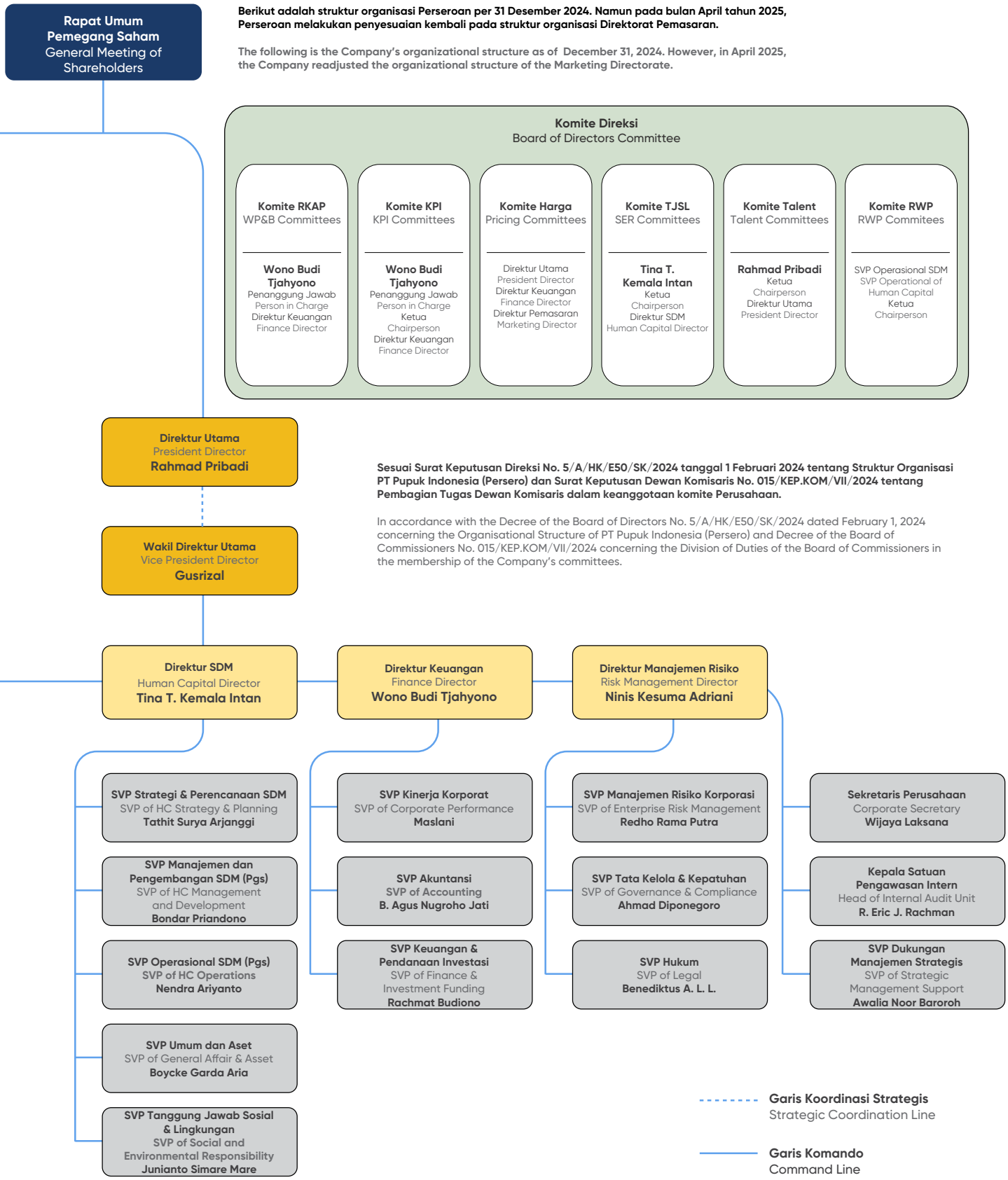
Mewakili sifat dan sikap profesional yang diusung PTPI dan juga kepercayaan.
Represents the professionalism and trust promoted by Pupuk Indonesia.

Struktur Organisasi
Organizational Structure



Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2024. Namun pada bulan April tahun 2025, Perseroan melakukan penyesuaian kembali pada struktur organisasi Direktorat Pemasaran.

The following is the Company's organizational structure as of December 31, 2024. However, in April 2025, the Company readjusted the organizational structure of the Marketing Directorate.



Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 5/A/HK/E50/SK/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris dalam keanggotaan komite Perusahaan.

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 5/A/HK/E50/SK/2024 dated February 1, 2024 concerning the Organisational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Decree of the Board of Commissioners No. 015/KEP.KOM/VII/2024 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners in the membership of the Company's committees.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PERUBAHANNYA

Di sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris dan tidak terdapat perubahan komposisi Direksi, sehingga susunan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS AS WELL AS ITS CHANGES

Throughout 2024, there were changes in the composition of the composition of the Board of Commissioners and there was no change in the composition of the Board of Directors, so that the composition as of December 31, 2024 is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
1	Darmin Nasution	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020	RUPS Tahun 2025 GMS 2025	Ke-1 1st
2	Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020	RUPS Tahun 2025 GMS 2025	Ke-1 1st
3	Anhar Adel	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-280/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-280/MBU/11/2019 dated November 22, 2019	22 November 2019 November 22, 2019	8 Januari 2020 January 8, 2020	Ke-1 1st
		Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-13/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-13/MBU/01/2020 dated January, 2020	9 Januari 2020 January 9, 2020	21 November 2024 November 21, 2024	
4	Farhat Brachma	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-253/MBU/11/2022 tanggal 4 November 2022 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-253/MBU/11/2022 dated November 4, 2022	4 November 2022 November 4, 2022	RUPS Tahun 2027 GMS 2027	Ke-1 1st
5	Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020	RUPS Tahun 2025 GMS 2025	Ke-1 1st
6	Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020	RUPS Tahun 2025 GMS 2025	Ke-1 1st
7	Ari Dwipayana	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020	RUPS Tahun 2025 GMS 2025	Ke-1 1st

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
8	Anwar Sanusi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-163/MBU/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-163/MBU/06/2023 dated June 22, 2023	22 Juni 2023 June 22, 2023	RUPS 2028 GMS 2028	Ke-2 2nd
9	Riswinandi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK/53/MBU/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK/53/MBU/03/2024 dated March 4, 2024	4 Maret 2024 March 4, 2024	RUPS 2029 GMS 2029	Ke-1 1st
10	Danar Rahmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-188/MBU/07/2024 dated July 22, 2024	22 Juli 2024 July 22, 2024	RUPS 2029 GMS 2029	Ke-1 1st
11	Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-188/MBU/07/2024 dated July 22, 2024	22 Juli 2024 July 22, 2024	RUPS 2029 GMS 2029	Ke-1 1st
Direksi Board of Directors						
1	Rahmad Pribadi	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-212/MBU/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-212/MBU/07/2023 dated July 27, 2023	27 Juli 2023 July 27, 2023	RUPS 2028 GMS 2028	Ke-1 1st
2	Gusrizal	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Pertama kali menjabat sebagai Direktur PTPI pada tanggal 4 Desember 2015 berdasarkan keputusan No. SK-243/MBU/12/2015, kemudian dialihkan sebagai Direktur Investasi PTPI pada tanggal 13 September 2017 berdasarkan keputusan No. SK-196/MBU/09/2017, kemudian dialihkan sebagai Direktur Pemasaran PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-263/MBU/08/2020, kemudian diberhentikan dan diangkat sebagai Direktur Pemasaran PTPI pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan keputusan No. SK-377/MBU/11/2020, kemudian dialihkan sebagai Wakil Direktur Utama PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK-303/MBU/11/2023.	2 November 2023 November 2, 2023	RUPS 2025 GMS 2025	Ke-2 2nd

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
			He first served as Director of PTPI on December 4, 2015 based on Decree No. SK-243/MBU/12/2015, then transferred as Investment Director of PTPI on September 13, 2017 based on Decree No. SK-196/MBU/09/2017, then transferred as Marketing Director of PTPI on August 4, 2020 based on Decree No. SK-263/MBU/08/2020, then dismissed and appointed as Marketing Director of PTPI on November 20, 2020 based on Decree No. SK-377/MBU/11/2020, then transferred as Vice President Director of PTPI on November 20, 2020 based on Decree No. SK-263/MBU/08/2020. SK-263/MBU/08/2020, then dismissed and appointed as Marketing Director of PTPI on 20 November 2020 based on decree No. SK-377/MBU/11/2020, then transferred as Vice President Director of PTPI on 2 November 2023 based on decree No. SK-303/MBU/11/2023.			
3	Bob Indiarto	Direktur Produksi Production Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020	RUPS 2025 GMS 2025	Ke-1 1st
4	Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan Finance Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023 Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK-408/MBU/12/2021, kemudian dialihkan sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK-22/MBU/02/2023, kemudian dialihkan sebagai Direktur Keuangan PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK-303/MBU/11/2023. First served as Director Finance & Investment Director of PTPI on December 22 2021 based on decision No. SK-408/MBU/12/2021, then transferred as Director of Finance & Risk Management of PTPI on February 3, 2023 based on decree Decree No. SK-22/MBU/02/2023, then transferred as Finance Director of PTPI on November 2, 2023 based on decree SK-303/MBU/11/2023.	22 Desember 2021 December 22, 2021	RUPS 2026 GMS 2026	Ke-1 1st
5	Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Business Transformation Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020	RUPS 2025 GMS 2025	Ke-1 1st

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
6	Tina T. Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023 Pertama kali menjabat sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK-408/MBU/12/2021, kemudian dialihkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK-22/MBU/02/2023. First served as Human Capital Directors, Governance, & Risk Management of PTPI on 22 December 2021 based on decree No. SK-408/MBU/12/2021, then transferred as Human Capital Directors of PTPI on 3 February 2023 based on decree No. SK-22/MBU/02/2023.	22 Desember 2021 December 22, 2021	RUPS 2026 GMS 2026	Ke-1 1st
7	Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran Marketing Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023	2 November 2023 November 2, 2023	RUPS 2028 GMS 2028	Ke-1 1st
8	Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Director of Portfolio & Business Development	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2021 July 16, 2021	RUPS 2026 GMS 2026	Ke-1 1st
9	Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023	2 November 2023 November 2, 2023	RUPS 2028 GMS 2028	Ke-1 1st

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
Komite Audit Audit Committee						
1	Mustoha Iskandar	Ketua Chairperson	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
2	Febrio Nathan Kacaribu	Wakil Ketua I Vice Chairperson I	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
3	Suwandi	Wakil Ketua II Vice Chairperson II	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
4	Danar Rahmanto	Wakil Ketua III Vice Chairperson III	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
5	Elly Fariani	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/II/2024 dated February 29, 2024	29 Februari 2024 February 29, 2024	30 November 2024 November 30, 2024	Ke-1 1st
6	RM. Wiratmoko Prasidhanto	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 19/KEP.KOM/X/2024 tanggal 28 September 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 19/KEP.KOM/X/2024 dated September 28, 2024	27 September 2024 September 27, 2024	26 September 2026 September 26, 2026	Ke-2 2nd
7	Tubagus Donny Syafardan	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 021/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 021/KEP.KOM/XII/2024 dated December 5, 2024	9 Desember 2024 December 9, 2024	8 Desember 2027 December 8, 2027	Ke-1 1st
Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee						

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
1	Riswinandi	Ketua Chairperson	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
2	Farhat Brachma	Wakil Ketua I Vice Chairperson I	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
3	Irfan Ahmad Fauzi	Wakil Ketua II Vice Chairperson II	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
4	Emmanuel Setyo Budi Nugroho	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 017/KEP.KOM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 017/KEP.KOM/VIII/2024 dated August 26, 2024	26 Agustus 2024 August 26, 2024	25 Agustus 2027 August 25, 2027	Ke-1 1st
5	Riza Azmi	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI Nomor 005/KEP.KOM/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 Decree of the Board of Commissioners of PTPI Number 005/KEP.KOM/VII/2023 dated July 29, 2023	29 Juli 2023 July 29, 2023	28 Juli 2026 July 28, 2026	Ke-1 1st
6.	Asri Saraswati	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI Nomor 004/KEP.KOM/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 Decree of the Board of Commissioners of PTPI Number 004/KEP.KOM/VII/2023 dated July 29, 2023	11 Juli 2023 July 11, 2023	25 Agustus 2024 August 25, 2024	Ke-2 2nd

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee						
1	Anhar Adel*	Ketua Chairperson	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	21 November 2024 November 21, 2024	Ke-1 1st
2	Ari Dwipayana	Wakil Ketua I Vice Chairperson I	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
3	Anwar Sanusi	Wakil Ketua II Vice Chairperson II	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 July 31, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
4	R. Nurhidayat	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 012/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VI/2021 dated June 9, 2021	9 Juni 2024 Juni 9, 2024	8 Juni 2026 Juni 8, 2026	Ke-2 2nd

* Sampai dengan 31 Desember 2024 belum ditunjuk Ketua Komite Nominasi & Remunerasi
* Until December 31, 2024 no Chairperson of the Nomination & Remuneration Committee has been appointed.

Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee						
1	Darmin Nasution (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently Independent Commissioner)	Ketua Chairperson	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
2	Anwar Sanusi (Komisaris) (Commissioner)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
3	Ari Dwipayana (Komisaris) (Commissioner)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
4	Mustoha Iskandar (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
5	Suwandi (Komisaris) (Commissioner)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
6	Febrio Nathan Kacaribu (Komisaris) (Commissioner)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
7	Danar Rahmanto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
8	Riswinandi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
9	Farhat Brachma (Komisaris) (Commissioner)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
10	Irfan Ahmad Fauzi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris Concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
11	Iqbal Billy Wahid (Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik) (Independent Commissioner of PT Petrokimia Gresik)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st
12	Mahmud Nurwindu (Komisaris Independen PT Pupuk Kujang (Independent Commissioner of PT Kujang)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st
13	Musthofa (Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur) (Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st
14	Marzuki Daud (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pupuk Iskandar Muda) (President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PT Pupuk Iskandar Muda)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st
15	Bambang Supriyambodo (Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) (Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
16	Monica Desideria (Komisaris PT Pupuk Indonesia Utilitas) (Commissioner of PT Pupuk Indonesia Utilitas)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st
17	Doddy Rahadi (Komisaris PT Rekayasa Industri) (Commissioner of PT Rekayasa Industri)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st
18	Eko Suseno Agung Cahyanto (Komisaris PT Pupuk Indonesia Niaga) (Commissioner of PT Pupuk Indonesia Niaga)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st
19	Rudi Rusli (Komisaris PT Pupuk Indonesia Logistik) (Commissioner of PT Pupuk Indonesia Logistik)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st
20	Achmad Suhawi (Komisaris PT Pupuk Indonesia Pangan) (Commissioner of PT Pupuk Indonesia Pangan)	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 December 18, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027	Ke-1 1st
21	MM Restu Hapsari	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023	14 Agustus 2023 August 14, 2023	20 Juli 2024 July 20, 2024	Ke-1 1st

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



DARMIN NASUTION

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Usia | *Age*
76 tahun
76 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama.	August 4, 2020–AGMS 2025, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	First served as President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on Decree No. SK-262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Ketua merangkap anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020–sekarang) • Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Finance (2020–sekarang)	• Chairperson and concurrent member of the Integrated Governance Committee • President Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk (2020-present) • President Commissioner of Indonesia Infrastructure Finance (2020-present)
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Doktor Ilmu Ekonomi dari Paris-Sorbone University, Prancis (1984) • Master Sains dari Paris-Sorbone University, Prancis (1977) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1970)	• Doctor of Economics from Paris-Sorbone University, France (1984) • Master of Economics from Paris-Sorbone University, France (1977) • Bachelor of Economics from University of Indonesia (1970)
Pengalaman Kerja Employment History	• Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020–sekarang) • Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Finance (2020–sekarang) • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2015–2019) • Gubernur Bank Indonesia (2010–2013) • Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2009–2010) • Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (2006–2009) • Direktur Jenderal Lembaga Keuangan/Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Kementerian Keuangan (2005–2006) • Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2000–2005) • Deputi Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur (1997–1999) • Deputi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi (1995–1996) • Deputi Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan (1993–1994) • Direktur Utama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia(1989–1993)	• President Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk (2020-present) • President Commissioner of Indonesia Infrastructure Finance (2020-present) • Coordinating Minister for Economic Affairs (2015-2019) • Governor of Bank Indonesia (2010-2013) • Senior Deputy Governor of Bank Indonesia (2009-2010) • Director General of Tax, Ministry of Finance (2006-2009) • Director General of Financial Institutions/Head of Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM), Ministry of Finance (2005-2006) • Director General of Financial Institutions, Ministry of Finance (2000-2005) • Deputy to the Coordinating Minister of State for Development Supervision and Administrative Reform (1997-1999) • Deputy to the Coordinating Minister for Production and Distribution (1995-1996) • Deputy to the Coordinating Minister for Industry and Trade (1993-1994) • President Director of the Institute for Economic and Social Research (LPEM) (1989-1993)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



MUSTOHA ISKANDAR

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia | *Age*
64 tahun
64 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama.	August 4, 2020–AGMS 2025, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	First served as Commissioner of PTPI on August 4, 2020 based on Decree No. SK262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Dosen Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Jurusan Manajemen Mata Kuliah Strategic Management STIE Kusuma Negara Jakarta (2011–sekarang) • Dosen Paruh Waktu Program Pasca Sarjana Magister Manajemen untuk Mata Kuliah Strategic Leadership Kwik Kian Gie School of Business Jakarta (2009–sekarang)	• Chairperson of the Audit Committee • Member of the Integrated Governance Committee • Lecturer in the Postgraduate Master of Management Program for Strategic Management Subject STIE Kusuma Negara Jakarta (2011-present) • Part-time Lecturer in the Postgraduate Master of Management Program for Strategic Leadership Subject Kwik Kian Gie School of Business Jakarta (2009-present).
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana (2014) • Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran (2006) • Magister Manajemen Pembangunan dari University of the Phillipines Los Banos, Filipina (1996) • Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (1986) • Sarjana Muda Da'wah dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (1986)	• Bachelor of Laws from Krisnadwipayana University (2014) • Doctor of Business Management from Padjadjaran University (2006) • Master of Development Management from University of the Phillipines Los Banos, Philippines (1996) • Bachelor of Forestry from Gadjah Mada University (1986) • Bachelor of Arts from Sunan Kalijaga State Islamic Institute (1986)
Pengalaman Kerja Employment History	• Komisaris Independen PT Pusri Palembang (2016–2018) • Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (2016) • Direktur Utama Perum Perhutani (2014–2016) • Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani (2014) • Dosen Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Jurusan Manajemen Mata Kuliah Strategic Management STIE Kusuma Negara Jakarta (2011–sekarang) • Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Perum Perhutani (2011–2014) • Dosen Paruh Waktu Program Pasca Sarjana Magister Manajemen untuk Mata Kuliah Strategic Leadership Kwik Kian Gie School of Business Jakarta (2009–sekarang) • Direktur Utama PT Inhutani IV (Persero) (2007–2011) • Direktur Pengembangan PT Inhutani III (Persero) (2001–2007) • Direktur Produksi PT Finnantara Intiga (Joint Venture of PT Inhutani III, Gudang Garam, dan Nordic Forest Development Finlandia) (1996–1998)	• Independent Commissioner of PT Pusri Palembang (2016-2018) • Chairman of the Supervisory Board of Perum Perhutani (2016) • President Director of Perum Perhutani (2014-2016) • Director of Timber Commercial of Perum Perhutani (2014) • Lecturer of Post Graduate Program of Master of Management for Strategic Management Course STIE Kusuma Negara Jakarta (2011-present) • Director of Forest Resources Management and Development Perum Perhutani (2011-2014) • Part-time Lecturer of Master of Management Program for Strategic Leadership Course Kwik Kian Gie School of Business Jakarta (2009-present) • President Director of PT Inhutani IV (Persero) (2007-2011) • Development Director of PT Inhutani III (Persero) (2001-2007) • Production Director of PT Finnantara Intiga (Joint Venture of PT Inhutani III, Gudang Garam, and Nordic Forest Development Finland) (1996-1998)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



FARHAT BRACHMA

Komisaris
Commissioner

Usia | *Age*
48 tahun
48 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang, Banten, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	4 November 2022-RUPS Tahun 2027, Periode Pertama.	November 4, 2022–AGMS 2027, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 4 November 2022 berdasarkan keputusan No. SK-253/MBU/11/2022.	First served as Commissioner of PTPI on 4 November 2022 based on Decree No. SK-253/MBU/11/2022.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Wakil Ketua I Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Direktur PT REA Kaltim Plantation (2017–sekarang) • Direktur PT Sasana Yudha Bakti (2017–sekarang) • Penasihat Senior PT Barat Selatan Makmur Investindo (2016–sekarang) • Direktur Hubungan Korporasi PT Robindo Natayara (2012–sekarang) • Direktur PT Cipta Davia Mandiri (2012–sekarang)	• Vice Chairperson I of Risk Monitoring Committee • Member of the Integrated Govenance Committee (2019-present) • Director of PT REA Kaltim Plantation (2017-present) • Director of PT Sasana Yudha Bakti (2017-present) • Senior Advisor of PT Barat Selatan Makmur Investindo (2016-present) • Director of Corporate Relations of PT Robindo Natayara (2012-present) • Director of PT Cipta Davia Mandiri (2012-present)
Riwayat Pendidikan Educational Program	Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknologi & Industri (1994)	Bachelor of Chemical Engineering from the Islamic University of Indonesia, Faculty of Technology & Industry (1994)
Pengalaman Kerja Employment History	• Staf Ahli Wakil Presiden RI (2019–2024) • Direktur PT REA Kaltim Plantation (2017–sekarang) • Direktur PT Sasana Yudha Bakti (2017–sekarang) • Penasihat Senior PT Barat Selatan Makmur Investindo (2016–sekarang) • Direktur Hubungan Korporasi PT Robindo Natayara (2012–sekarang) • Direktur PT Cipta Davia Mandiri (2012–sekarang) • Penasihat Senior PT REA Kaltim Plantation (2007–2017) • Direktur PT Grand Balikpapan (Owner Novotel dan Hotel Ibis Balikpapan) (2005–2022)	• Senior Advisor to the Vice President of Indonesia (2019-2024) • Director of PT REA Kaltim Plantation (2017-present) • Director of PT Sasana Yudha Bakti (2017-present) • Senior Advisor of PT Barat Selatan Makmur Investindo (2016-present) • Director of Corporate Relations of Director of PT Robindo Natayara (2012-present) • Director of PT Cipta Davia Mandiri (2012-present)-Senior Advisor of PT REA Kaltim Plantation (2007-2017) • Director of PT Grand Balikpapan (Owner of Novotel and Hotel Ibis Balikpapan) (2005-2022)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly



FEBRIO NATHAN KACARIBU

Komisaris
Commissioner

Usia | *Age*
46 tahun
46 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama.	August 4, 2020–AGMS 2025, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	First served as Commissioner of PTPI on 4 August 2020 based on Decree No. SK262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Wakil Ketua Komite Audit • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2020–sekarang) • Lektor (Asisten Profesor) di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2019–sekarang)	• Vice Chairperson of Audit Committee • Member of Integrated Governance Committee • Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance (2020-present) • Lecturer (Assistant Professor) at the Faculty of Economics, University of Indonesia (2019-present)
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Doktor Bidang Ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat (2014) • Magister Bidang International & Development Economics dari Australian National University, Australia (2005) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2002)	• Doctorate in Economics from the University of Kansas, USA (2014) • Master in International & Development Economics from the Australian National University, Australia (2005) • Bachelor of Economics from University of Indonesia (2002)
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2020–sekarang) • Lektor (Asisten Profesor) di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2019–sekarang) • Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2015–2019) • Dosen di Department of Economics, Baylor University, Texas, Amerika Serikat (2012–2015) • Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2012–2015) • Peneliti di LPEM FEB Universitas Indonesia (2005–2007) • Konsultan Asia Now, Singapura (2004–2006)	• Head of Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2020-present) • Associate Professor at the Faculty of Economics, University of Indonesia (2019-present) • Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia (2015-2019) • Lecturer at the Department of Economics, Baylor University, Texas, USA (2012-2015) • Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia (2012-2015) • Researcher at LPEM FEB, University of Indonesia (2005-2007) • Consultant Asia Now, Singapore (2004-2006)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.	Has an affiliation with the controlling shareholder



SUWANDI

Komisaris
Commissioner

Usia | *Age*
57 tahun
57 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama.	August 4, 2020–AGMS 2025, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	First served as Commissioner of PTPI on 4 August 2020 based on Decree No. SK262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Wakil Ketua II Komite Audit • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian (2024 – sekarang)	• Vice Chairperson II of Audit Committee • Member of Integrated Governance Committee • Senior Advisor to the Minister of Agriculture for Agricultural Investment (2024-now)
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Doktor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (2005) • Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2000) • Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1991)	• Doctorate in Natural Resources and Environmental Management from Bogor Agricultural University (2005) • Master of Planning and Public Policy from University of Indonesia (2000) • Bachelor of Agriculture from Bogor Agricultural University (1991)
Pengalaman Kerja Employment History	• Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian (2024 – sekarang) • Komisaris Utama PTPN VIII (2020) • Komisaris PTPN VIII (2019–2020) • Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (2019–2024) • Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2018–2019) • Plt. Kepala Biro Humas dan Kebijakan Publik Kementerian Pertanian (2017–2018) • Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian (2015–2018)	• Senior Advisor to the Minister of Agriculture for Agricultural Investment (2024-present) • President Commissioner of PTPN VIII (2020) • Commissioner of PTPN VIII (2019-2020) • Director General of Food Crops of the Ministry of Agriculture (2019-2024) • Director General of Horticulture of the Ministry of Agriculture (2018-2019) • Acting Head of the Public Relations and Public Policy Bureau of the Ministry of Agriculture (2017-2018) • Head of the Agricultural Data and Information Center of the Ministry of Agriculture (2015-2018)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.	Has an affiliation with the controlling shareholder



ARI DWIPAYANA

Komisaris
Commissioner

Usia | *Age*
52 tahun
52 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama.	August 4, 2020–AGMS 2025, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	First served as Commissioner of PTPI on 4 August 2020 based on Decree No. SK262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Staf Pengajar Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1997–sekarang)	• Vice Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee • Member of the Integrated Governance Committee • Teaching Staff of the Department of Politics and Government FISIPOL Gadjah Mada University (1997-present)
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (2013) • Magister Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003) • Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (1995)	• Doctor of Political Science from Gadjah Mada University (2013) • Master of Political Science from Gadjah Mada University (2003) • Bachelor of Government Science from Gadjah Mada University (1995)
Pengalaman Kerja Employment History	• Koordinator Staf Khusus Presiden RI (2019–2024) • Staf Khusus Presiden RI (2015–2019) • Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (2014–2015) • Staf Pengajar Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1997-sekarang)	• Coordinator of the Senior Advisor of the President of the Republic of Indonesia (2019-2024) • Senior Advisor of the President of the Republic of Indonesia (2015-2019) • Senior Advisor of the Minister of State Secretary (2014-2015) • Teaching Staff of the Department of Politics and Government FISIPOL Gadjah Mada University (1997-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly



ANWAR SANUSI

Komisaris
Commissioner

Usia | *Age*
56 tahun
56 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Tangerang, Banten, Indonesia
Tangerang, Banten, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	22 Juni 2023-RUPS Tahun 2028, Periode Kedua.	June 22, 2023–AGMS 2028, Second Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 8 Juni 2018 berdasarkan keputusan No. SK-193/MBU/06/2018.	First served as Commissioner of PTPI on June 8, 2018 based on Decree No. SK193/MBU/06/2018.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Wakil Ketua II Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (2020-sekarang)	• Vice Chairperson II of Nomination and Remuneration Committee • Member of the Integrated Governance Committee • Secretary General of the Ministry of Manpower (2020-present)
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Post Doctoral National Graduate Institute for Policy Studies (2012) • Doktor bidang Policy Studies dari National Graduate Institute for Policy Studies (2007) • Master of Policy Science National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) dari Universitas Saitama Jepang (1998) • Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik dan Sosial dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992)	• Post Doctoral National Graduate Institute for Policy Studies (2012) • Doctorate in Policy Studies from National Graduate Institute for Policy Studies (2007) • Master of Policy Science National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) from Saitama University Japan (1998) • Bachelor of Government Science Faculty of Political and Social Sciences from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1992).
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia (2025-sekarang) • Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (2020–2025) • Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019–2020) • Plt. Kepala Balilatfo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2017-2019) • Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (2014–2015) • Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan Sumber Daya Aparatur (2014) • Kepala Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara (2007–2014) • Kepala Bidang Akademik dan Pembinaan Alumni, Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (2002-2013) • Kepala Bidang Administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara (2001-2002)	• Head of the Manpower Planning and Development Agency, Ministry of Manpower, Republic of Indonesia (2025-present) • Secretary General of the Ministry of Manpower (2020-2025) • Secretary General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (2019-2020) • Acting. Head of Balilatfo of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (2017-2019) • Head of the Center for Policy Analysis Development (2014-2015) • Head of the Center for Institutional Innovation of Apparatus Resources (2014) • Head of the Center for Institutional Performance Studies of the State Administration Agency (2007-2014). • Head of Academic Affairs and Alumni Development, Pusdiklat Spimnas Leadership Division of the State Administration Institute (2002-2013) • Head of Administration, Center for Research and Development State Administration Information and Automation System (2001-2002)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.	Has an affiliation with the controlling shareholder



RISWINANDI

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia | *Age*
67 tahun
67 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	4 Maret 2024-RUPS Tahun 2029, Periode Pertama.	March 4, 2024–AGMS 2029, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan keputusan No. SK-53/MBU/03/2024.	First served as Commissioner of PTPI on March 4, 2024 based on Decree No. SK53/MBU/03/2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk	• Chairperson of Risk Monitoring Committee • Member of Integrated Governance Committee • Independent Commissioner of PT Bank Permata Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Sarjana Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Trisakti (1983)	• Bachelor of Economics and Business from Trisakti University (1983).
Pengalaman Kerja Employment History	• Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk (2023–saat ini) • Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas (2022-2024) • Chief Executive of Finance Industry Non Bank Supervision Indonesia Financial Services Authority (OJK) (2017– 2022) • Member of the Board of Commissioners Indonesia Financial Services Authority (OJK) (2017–2022). • Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) (2015-2017)	• Independent Commissioner PT Bank Permata Tbk (2023–present) • President Commissioner/Independent Commissioner PT BNI Sekuritas (2022– 2024) • Chief Executive of Finance Industry Non Bank Supervision Indonesia Financial Services Authority (OJK) (2017–2022) • Member of the Board of Commissioners Indonesia Financial Services Authority (OJK) (2017–2022). • President Director of PT Pegadaian (Persero) (2015-2017)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly



IRFAN AHMAD FAUZI

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia | *Age*
37 tahun
37 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Depok, Jawa Barat, Indonesia
Depok, West Java, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	22 Juli 2024-RUPS Tahun 2029, Periode Pertama.	July 22, 2024–AGMS 2029, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan keputusan No. SK-188/MBU/07/2024	First served as Commissioner of PTPI on July 22, 2024 based on Decree No. SK-188/MBU/07/2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Wakil Ketua II Komite Pemantau Risiko • Direktur Utama PT Fatijja Nusantara Inovasi (2021-sekarang)	• Vice Chairperson II of the Risk Monitoring Committee • President Director of PT Fatijja Nusantara Inovasi (2021-present)
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Magister Humaniora, Universitas Padjajaran (2014-2017) • Sarjana Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia (2008-2012)	• Master of Humanities, Padjajaran University (2014-2017) • Bachelor of History Education, Universitas Pendidikan Indonesia (2008-2012)
Pengalaman Kerja Employment History	• Komisaris Independen PT Pupuk Iskandar Muda (2023-2024) • Direktur Utama PT Fatijja Nusantara Inovasi (2021-sekarang) • Asisten Staf Khusus Presiden RI (2020-2023) • Dosen Universitas Indraprasta PGRI (2021-2024)	• Independent Commissioner of PT Pupuk Iskandar Muda (2023-2024) • President Director of PT Fatijja Nusantara Inovasi (2021-present) • Assistant Senior Advisor to the President of the Republic of Indonesia (2020-2023) • Lecturer at Indraprasta PGRI University (2021-2024)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly



DANAR RAHMANTO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia | *Age*
59 tahun
59 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	22 Juli 2024-RUPS Tahun 2029, Periode Pertama.	July 22, 2024–AGMS 2029, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan keputusan No. SK-188/MBU/07/2024	First served as Commissioner of PTPI on July 22, 2024 based on Decree No. SK-188/MBU/07/2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Wakil Ketua III Komite Audit	• Vice Chairperson III of Audit Committee
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah GASANTARA, 2024 • Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi ASMI Solo, 2017	• GASANTARA College of Sharia Economics, 2024 • ASMI Solo College of Administration, 2017
Pengalaman Kerja Employment History	• Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Pangan (2021-2024) • Bupati Wonogiri (2010-2015) • Direktur Utama PT Kedhaton Indo Lumber (2011-2020) • Direktur Utama PT Timbul Jaya Grup (2005-2010) • Direktur Utama PT Timbul Jaya Putra (2000-2005)	• President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Pangan (2021-2024) • Regent of Wonogiri (2010-2015) • President Director of PT Kedhaton Indo Lumber (2011-2020) • President Director of PT Timbul Jaya Group (2005-2010) • President Director of PT Timbul Jaya Putra (2000-2005)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly

Profil Direksi
Board of Directors Profile



RAHMAD PRIBADI

Direktur Utama
President Director

Usia | *Age*
54 tahun
54 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	27 Juli 2023–RUPS Tahun 2028, Periode Pertama.	July 27, 2023–AGMS 2028, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama PTPI pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan keputusan No. SK-212/MBU/07/2023.	First served as President Director of PTPI on July 27, 2023 based on decision No. SK-212/MBU/07/2023.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	Does not hold any concurrent positions within or outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Master of Public Administration, Harvard University, USA (2013) • Bachelor of Business Administration, University of Texas, Austin (1992)	• Master of Public Administration, Harvard University, USA (2013) • Bachelor of Business Administration, University of Texas, Austin (1992)
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (2020–2023) • Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (2018–2020) • Direktur Utama PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2017–2018) • Direktur SDM & Umum PT Petrokimia Gresik (2016–2017) • Founder & Director PPRL Group (2009–2016) • Chief Executive Officer PT Bakrie Niagatama (2000–2009) • Chief Operating Officer-Trading PT Bakrie & Brothers Tbk (1998–2000) • Manager Audit Internal PT Bakrie & Brothers Tbk (1997–1998) • Auditor Sistem Informasi PT Caltex Pacific Indonesia (1996–1997) • Auditor Operasional PT Caltex Pacific Indonesia (1994–1996) • Auditor Keuangan PT Caltex Pacific Indonesia (1993–1994)	• President Director of PT Pupuk Kalimantan Timur (2020-2023) • President Director of PT Petrokimia Gresik (2018-2020) • President Director of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2017-2018) • HR & General Director of PT Petrokimia Gresik (2016-2017) • Founder & Director of PPRL Group (2009-2016) • Chief Executive Officer of PT Bakrie Niagatama (2000-2009) • Chief Operating Officer-Trading PT Bakrie & Brothers Tbk (2000-2009) • Internal Audit Manager PT Bakrie & Brothers Tbk (1997-1998) • Information System Auditor PT Caltex Pacific Indonesia (1996-1997) • Operational Auditor PT Caltex Pacific Indonesia (1994-1996) • Financial Auditor PT Caltex Pacific Indonesia (1993-1994).
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



GUSRIZAL

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Usia | *Age*
60 tahun
60 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	20 November 2020–RUPS Tahun 2025, Periode Kedua.	20 November 2020–RUPS Tahun 2025, Periode Kedua.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali diangkat sebagai Direktur PTPI dalam RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2015 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-243/MBU/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Investasi PTPI pada tanggal 13 September 2017 berdasarkan keputusan No. SK-196/MBU/09/2017, kemudian dialihkan sebagai Direktur Pemasaran PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-263/MBU/08/2020, kemudian diberhentikan dan diangkat sebagai Direktur Pemasaran PTPI pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan keputusan No. SK-377/MBU/11/2020, kemudian dialihkan sebagai Wakil Direktur Utama PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK-303/MBU/11/2023.	Appointed as Director of PTPI in Extraordinary GMS for Fiscal Year 2015 based on Decree of the Minister of SOE Number SK-243/MBU/12/2015 dated December 04, 2015 Furthermore, he served as Investment Director of PTPI on 13 September 2017 based on Decree No. SK-196/MBU/09/2017, then transferred as Marketing Director of PTPI on August 4, 2020 based on Decree No. SK-263/MBU/08/2020, then dismissed and appointed as Marketing Director of PTPI on November 20, 2020 based on Decree No. SK-377/MBU/11/2020, then transferred as Vice President Director of PTPI on November 2, 2023 based on Decree No. SK-303/MBU/11/2023.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	Does not hold any concurrent positions within or outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Master Bidang Manajemen Logistik dan Perkapalan dari World Maritime University, Swedia (1998) • Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1989)	• Master of Logistics and Shipping Management from World Maritime University, Sweden (1998) • Bachelor of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (1989).
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur Pemasaran PTPI (2020–2023) • Direktur Investasi PTPI (2017–2020) • Komisaris Utama PT Pupuk Kujang (2016–2020) • Direktur Investasi & Pengembangan PTPI (2016) • Direktur SDM & Umum PTPI (2015–2016) • Direktur Utama PT Donggi Senoro LNG (2013–2015) • SVP Corporate Investment and Business Development PT Pertamina (Persero) (2010–2013)	• Marketing Director of PTPI (2020-2023) • Investment Director of PTPI (2017-2020) • President Commissioner of PT Pupuk Kujang (2016-2020) • Investment & Development Director of PTPI (2016) • HR & General Director of PTPI (2015-2016) • President Director of PT Donggi Senoro LNG (2013-2015) • SVP Corporate Investment and Business Development of PT Pertamina (Persero) (2010-2013)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



BOB INDIARTO

Direktur Produksi
Production Director

Usia | *Age*
63 tahun
63 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Palembang, Sumatra Selatan, Indonesia
Palembang, South Sumatra, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	4 Agustus 2020–RUPS Tahun 2025, Periode Pertama.	August 4, 2020–AGMS 2025, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Produksi PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-263/MBU/08/2020	First served as Production Director of PTPI on August 4, 2020 based on decision No. SK-263/MBU/08/2020
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	Does not hold any concurrent positions within or outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Magister Bidang Manajemen dari Universitas Tridinanti, Palembang (2006) • Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada (1987)	• Master of Management from Universitas Tridinanti, Palembang (2006) • Bachelor of Chemical Engineering Universitas Gadjah Mada (1987)
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2016–2020) • General Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2014–2016) • General Manajer Teknologi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2013–2014) • General Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2010–2013) • General Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (2009–2010)	• Human Capital Directors and General Affairs of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2016-2020) • General Manager of Operations of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2014-2016) • General Manager of Technology of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2013-2014) • General Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2010–2013) • General Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (2009–2010)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



WONO BUDI TJAHYONO

Direktur Keuangan
Finance Director

Usia | *Age*
57 tahun
57 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	22 Desember 2021–RUPS Tahun 2026, Periode Pertama.	December 22, 2021–AGMS 2026, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK-408/MBU/12/2021, kemudian dialihkan sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK-22/MBU/02/2023, kemudian dialihkan sebagai Direktur Keuangan PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK-303/MBU/11/2023.	First served as Director of Finance & Investment of PTPI on December 22, 2021 based on Decree No. SK-408/MBU/12/2021, then transferred as Director of Finance & Risk Management of PTPI on February 3, 2023 based on Decree No. SK22/MBU/02/2023, then transferred as Finance Director of PTPI on November 2, 2023 based on Decree No. SK-303/MBU/11/2023.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	Does not hold any concurrent positions within or outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Master of Business Administration (MBA) Universitas Gadjah Mada (2009) • Sarjana (S1) Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1991)	• Master of Business Administration (MBA) Universitas Gadjah Mada (2009) • Bachelor of Agriculture Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1991)
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPI (2023) • Direktur Keuangan & Investasi PTPI (2021–2023) • Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2021) • Senior Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2016–2021) • Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2010–2016)	• Director of Finance & Risk Management PTPI (2023) • Director of Finance & Investment PTPI (2021-2023) • Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2021) • Senior Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2016-2021) • Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2010-2016)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



PANJI WINANTEYA RUKY

Direktur Transformasi Bisnis
Business Transformation Director

Usia | *Age*
48 tahun
48 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	4 Agustus 2020–RUPS Tahun 2025, Periode Pertama.	August 4, 2020–AGMS 2025, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Transformasi Bisnis PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-263/MBU/08/2020.	First served as Business Transformation Director of PTPI on August 4, 2020 based on decision No. SK-263/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	Does not hold any concurrent positions within or outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Magister Bidang Kebijakan Publik dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura (2015) • MBA Bidang Keuangan dan Manajemen Jasa Keuangan dari Rotterdam School of Management, Belanda (2003) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1998)	• Masters in Public Policy from Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore (2015) • MBA in Finance and Financial Services Management from Rotterdam School of Management, Netherlands (2003) • Bachelor of Economics from Universitas Indonesia (1998).
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur Kemitraan dan Komunikasi Kartu Pra Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020) • Senior Vice President PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (2018–2020) • Senior Advisor-Strategic Economic Affairs Kantor Staf Presiden RI (2015–2018) • Direktur Senior Treasury Management Visa (2010–2014) • Manajer Senior Treasury Asia Pasifik Honeywell Pte Ltd (2004–2010) • Trade Operations Head Citigroup Global Corporate Bank (1998–2002)	• Director of Partnership and Communication of Pre-Employment Card Coordinating Ministry for Economic Affairs (2020) • Senior Vice President of PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (2018-2020) • Senior Advisor-Strategic Economic Affairs of the Presidential Staff Office (2015-2018) • Senior Director of Treasury Management Visa (2010-2014) • Senior Manager of Asia Pacific Treasury Honeywell Pte Ltd (2004-2010) • Trade Operations Head Citigroup Global Corporate Bank (1998-2002).
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



TINA T. KEMALA INTAN

Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

Usia | *Age*
65 tahun
65 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	22 Desember 2021–RUPS Tahun 2026, Periode Pertama.	December 22, 2021–AGMS 2026, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK-408/MBU/12/2021, kemudian dialihkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK-22/MBU/02/2023.	First served as Human Capital Directors, Governance & Risk Management of PTPI on December 22, 2021 based on Decree No. SK-408/MBU/12/2021, then transferred as Human Capital Directors of PTPI on February 3, 2023 based on Decree No. SK-22/MBU/02/2023.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	Does not hold any concurrent positions within or outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Program	Sarjana Psikologi dari Universitas Padjadjaran (1985)	Bachelor of Psychology from Padjadjaran University (1985)
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko PTPI (2021–2023) • Direktur SDM dan Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2019–2021) • Komisaris PT Angkasa Pura Solusi (2018–2019) • Director of Human Capital, General Affair, and IT PT Angkasa Pura II (Persero) (2017–2019)	• Director of HC, Governance, & Risk Management of PTPI (2021-2023) • Human Capital Directors and Legal Affairs of PT Semen Indonesia (Persero) • Commissioner of PT Angkasa Pura Solusi (2018-2019) • Director of Human Capital, General Affair, and IT of PT Angkasa Pura II (Persero) (2017-2019).
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



TRI WAHYUDI SALEH

Direktur Pemasaran
Marketing Director

Usia | *Age*
57 tahun
57 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Bandung, West Java, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	2 November 2023–RUPS Tahun 2028, Periode Pertama.	November 2, 2023–AGMS 2028, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Pemasaran PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK-303/MBU/11/2023.	First served as Marketing Director of PTPI on November 2, 2023 based on Decree No. SK-303/MBU/11/2023.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	Does not hold any concurrent positions within or outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (2003) • Sarjana Biologi dari Universitas Nasional, Jakarta (1991)	• Master of Agribusiness Management from Bogor Agricultural University (2003) • Bachelor of Biology from National University, Jakarta (1991)
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020–2023) • Direktur Operasional & Pelayanan Publik Perum BULOG (2018–2020) • Direktur Komersial Perum BULOG (2017–2018) • Direktur Pengadaan Perum BULOG (2017) • Direktur Operasional & Pelayanan Publik Perum BULOG (2016–2017) • Kepala Divisi Pengadaan Beras Direktorat Pengadaan BULOG (2016) • Direktur Utama PT Jasa Prima Logistik BULOG (2013–2016)	• President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020-2023) • Director of Operations & Public Services of Perum BULOG (2018-2020) • Commercial Director of Perum BULOG (2017-2018) • Director of Procurement of Perum BULOG (2017) • Director of Operations & Public Services of Perum BULOG (2016-2017) • Head of Rice Procurement Division of BULOG Procurement Directorate (2016) • President Director of PT Jasa Prima Logistik BULOG (2013-2016)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



JAMSATON NABABAN

Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha
Portfolio & Business Development Director

Usia | *Age*
62 tahun
62 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	16 Juli 2021–RUPS Tahun 2026, Periode Pertama.	July 16, 2021–AGMS 2026, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PTPI pada tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan keputusan No. SK-237/MBU/07/2021.	First served as Director of Portfolio & Business Development of PTPI on July 16, 2021 based on Decree No. SK-237/MBU/07/2021.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	Does not hold any concurrent positions within or outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Program	Sarjana (S1) Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara (1987).	Bachelor of Mechanical Engineering, University of North Sumatra (1987).
Pengalaman Kerja Employment History	• President Director PT Pertamina EP Cepu (2017–2021) • Development Director PT Pertamina EP Cepu (2016–2017) • Vice President Surface Facilities PT Pertamina EP (2013–2016)	• President Director PT Pertamina EP Cepu (2017-2021) • Development Director PT Pertamina EP Cepu (2016-2017) • Vice President Surface Facilities PT Pertamina EP (2013-2016)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.



NINIS KESUMA ADRIANI

Direktur Manajemen Risiko
Risk Management Director

Usia | *Age*
58 tahun
58 years old

Kewarganegaraan | *Nationality*
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili | *Domicile*
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan Term of Office	2 November 2023–RUPS Tahun 2028, Periode Pertama.	November 2, 2023–AGMS 2028, First Period.
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK-303/MBU/11/2023.	First served as Risk Management Director of PTPI on November 2, 2023 based on Decree No. SK-303/MBU/11/2023.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	Does not hold any concurrent positions within or outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Program	• Master of Business Administration (MBA), State University of New York at Buffalo, USA (2000) • Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1989)	• Master of Business Administration (MBA), State University of New York at Buffalo, USA (2000) • Bachelor of Agriculture from Bogor Agricultural University (1989).
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2022–2023) • Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, & Manajemen Risiko PT Pegadaian (2021–2022) • Direktur Keuangan & Perencanaan Strategis PT Pegadaian (2018–2021); • Kepala Divisi Hubungan Investor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017–2018)	• Director of Strategic Planning and Finance of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2022-2023) • Director of Finance, Strategic Planning & Risk Management of PT Pegadaian (2021-2022) • Director of Finance & Strategic Planning of PT Pegadaian (2018-2021); • Head of Investor Relations Division of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018).
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the ultimate and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer Profile

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Direktorat Utama President Directorate					
1	Wijaya Laksana	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	47	• S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia (2012) • Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (2001) • Master of Communication Management, University of Indonesia (2012) • Bachelor of Communication Science Padjadjaran University (2001)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
2	Awalia Noor Baroroh	SVP Dukungan Manajemen Strategis SVP of Strategic Management Support	40	S2 Administrasi Bisnis Maastricht school of management (2016) Master of Business Administration Maastricht school of management (2016)	Surat Keputusan Direksi No. 036/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 036/A/HK/P28/SK/2024
3	R. Eric J. Rachman	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	45	S1 Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran (2003) S1 Economics Development Studies Padjadjaran University (2003)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
Direktorat Produksi Directorate of Production					
1	Guntur Prasetyo	SVP Operasi & K3LH SVP of Operations & HSE	45	S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro (2002) S1 Chemical Engineering Diponegoro University (2002)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
2	Ericcson Ramadhan	SVP Pengadaan 1 SVP of Procurement 1	42	S2 Master of Science in Rotating Machinery Eng & Mngmnt Cranfield University, UK (2017) S2 Master of Science in Rotating Machinery Eng & Mngmnt Cranfield University, UK (2017)	Surat Keputusan Direksi No. 059/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 059/A/HK/P28/SK/2024
3	Budi Mulia Utama Hasibuan	SVP Pengadaan 2 SVP of Procurement 2	52	S2 Master of Environmental Studies UNSW Australia (1999) Master of Environmental Studies UNSW Australia (1999)	Surat Keputusan Direksi No. 059/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 059/A/HK/P28/SK/2024
4	Indraswono Eko Saputro	SVP Perencanaan Pengadaan SVP of Procurement Planning	44	S1 Teknik Material Institut Teknologi Bandung (2003) Bachelor of Materials Engineering, Bandung Institute of Technology (2003)	Surat Keputusan Direksi No. 059/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 059/A/HK/P28/SK/2024

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Direktorat Keuangan Directorate of Finance					
1	Maslani	SVP Kinerja Korporat SVP of Corporate Performance	48	S2 Ekonomika Pembangunan (2018) Master's Degree in Development Economics (2018)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
2	B. Agus Nugroho Jati	SVP Akuntansi SVP of Accounting	52	S2 Akuntansi Manajemen Keuangan Universitas Gadjah Mada (2008) Master of Financial Management Accounting Universitas Gadjah Mada (2008)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
3	Rachmat Budiono	SVP Keuangan & Pendanaan Investasi SVP of Finance & Investment Funding	51	S1 Manajemen Universitas Trunajaya (2014) S1 Management Trunajaya University (2014)	Surat Keputusan Direksi 205/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 205/A/HK/P28/SK/2023
Direktorat Transformasi Bisnis Directorate of Business Transformantion					
1	Bagus Subekti	SVP Strategi Korporat SVP of Corporate Strategy	55	S1 Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (1994) Bachelor of Chemical Engineering, Bandung Institute of Technology (1994)	Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021
2	Ari Novan Setiono	SVP Teknologi Informasi SVP of Information Technology	46	S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2009) Master of Business Administration Universitas Gadjah Mada (2009)	Surat Keputusan Direksi No. 193/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 193/A/HK/P28/SK/2022
3	Gita Bina Nugraha	SVP IFRI SVP of IFRI	39	Magister Bioteknologi, ITB (2011) Master's Degree in Biotechnology, ITB (2011)	Surat Keputusan Direksi No. 053/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 053/A/HK/P28/SK/2024
Direktorat Sumber Daya Manusia Directorate of Human Capital					
1	Tathit Surya Arjanggi	SVP Strategi & Perencanaan SDM SVP of HC Strategy & Planning	46	S2 Universitas Bina Nusantara (2023) S2 Bina Nusantara University (2023)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
2	Bondar Priandono	SVP Manajemen dan Pengembangan SDM (Pgs) SVP of HC Management and Development	40	S2 Master of HC & Employment Relation, University of Western Australia (2018) S2 Master of HC & Employment Relation, University of Western Australia (2018)	Surat penunjukkan Pgs. No. 32764/A/SM/E0500/IT/2024 Letter of appointment of Pgs. No. 32764/A/SM/E0500/IT/2024
3	Nendra Ariyanto	SVP Operasional SDM (Pgs) SVP of HC Operations	37	S1 Teknik Industri Universitas Gadjah Mada (2010) Bachelor of Industrial Engineering, University of Gadjah Mada (2010)	Surat penunjukkan PGS. No. 40996/A/SM/E0202/IT/2024 Letter of appointment of PGS. No. 40996/A/SM/E0202/IT/2024
4	Boycke Garda Aria	SVP Umum & Aset SVP of General Affair & Asset	53	S2 Teknik & Manajemen Industri (2012) Magister of Industrial Engineering & Management (2012)	Surat Keputusan Direksi No. 210/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 210/A/HK/P28/SK/2023
5	Junianto Simare Mare	SVP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan SVP of Social and Environmental Responsibility	41	S2 Agroteknologi Tanah, IPB (2012) Masters in Soil Agrotechnology, IPB (2012)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Direktorat Pemasaran Directorate of Marketing					
1	Iyan Fajri	SVP Pemasaran SVP of Marketing	38	S2 Master Manajemen Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran (2019) Master's Degree in Agribusiness Management Veteran National Development University (2019)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
2	Deni Dwiguna Sulaeman	SVP Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan SVP of Sales Strategy & Customer Service	42	S2 Magister Sains Universitas Padjadjaran (2003) Master of Science Padjadjaran University (2003)	Surat Keputusan Direksi No. 033/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 033/A/HK/P28/SK/2024
3	Veronika Trisna Sukmawati	SVP Distribusi SVP of Distribution	42	S2 Magister Manajemen Universitas Airlangga (2009) Master's Degree in Management Universitas Airlangga (2009)	Surat Keputusan Direksi No. 069/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 069/A/HK/P28/SK/2023
4	M. Ihwan Fahrurrazi	SVP Penjualan Korporasi SVP of Corporate Sales	43	S2 Magister Sains Institut Teknologi Bandung (2012) Master of Science, Bandung Institute of Technology (2012)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
5	Roh Eddy W	GM Wilayah 1 GM of Region 1	51	S2 Magister Akuntansi Universitas Indonesia (2012) Master of Accounting Indonesia University (1993)	Surat Keputusan Direksi No. 228/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 228/A/HK/P28/SK/2023
6	Fickry Martawisuda	GM Wilayah 2 GM of Region 2	41	S2 Manajemen Universitas Singaperbangsa (2017) Master of Management, Singaperbangsa University (2017)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha Directorate of Portfolio and Business Development					
1	Sara Dewi	SVP Portofolio Bisnis SVP of Business Portfolio	51	S2 Magister Mangement Keuangan Universitas Gadjah Mada (1995) Master's Degree in Financial Management, Gadjah Mada University (1995)	Surat Keputusan Direksi No. 228/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 228/A/HK/P28/SK/2023
2	Herdijanto Utomo	SVP Pengembangan Usaha SVP of Business Development	53	S1 Teknik Perminyakan Universitas Trisakti (2003) Bachelor of Petroleum Engineering Trisakti University (2003)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
Direktorat Manajemen Risiko Directorate of Risk Management					
1	Benediktus A. L. L.	SVP Hukum SVP of Legal	39	Magister Hukum, University of Adelaide (2016) Master of Laws, University of adelaide (2016)	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
2	Redho Rama Putra	SVP Manajemen Risiko Korporasi SVP of Enterprise Risk Management	34	S2 Master of Business Administration, Stevens Insititute of Technology, USA (2018)	Surat Keputusan Direksi No. 081/A/HK/E0202/SK/2024 Board of Directors Decree No. 081/A/HK/E0202/SK/2024
3	Ahmad Diponegoro	SVP Tata Kelola & Kepatuhan SVP of Governance & Compliance	49	S2 Master of Information Managemen Tillburg University (2008) Master of Information Management Tillburg University (2008)	Surat Keputusan Direksi No. 81/A/HK/E0202/SK/2024 Board of Directors Decree No. 81/A/HK/E0202/SK/2024

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer Profile

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (years old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
1	Yetty Endarwati	SPM Digitalisasi & Data Science SPM of Digitalization & Data Science	48	S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2000) Bachelor of Informatics Engineering Institut Teknologi Sepuluh November (2000)	Surat Keputusan Direksi No. 035/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 035/A/HK/P28/SK/2023
2	M. Rozikin Busro	SPM Green Energy, Blue & Green Ammonia SPM of Blue & Green Ammonia	42	S2 Master of Business Universitas Gadjah Mada (2019) Master of Business Universitas Gadjah Mada (2019)	Surat Keputusan Direksi No. 131/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 131/A/KU/E10/SK/2022
3	Brimadiyanto	SPM Restrukturisasi Keuangan SPM of Financial Restructuring	54	S2 Magister Manajemen Universitas Indonesia (2007) Master of Management, University of Indonesia (2007)	Surat Keputusan Direksi No. 097/A/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 097/A/KU/E10/SK/2021
4	Toto Laksono	SPM Streamlining Lini Bisnis PI Group SPM of Streamlining PI Group's Business Lines	47	S1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002) S1 Chemical Engineering Gadjah Mada University (2002)	Surat Keputusan Direksi No. 097/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 097/A/KU/E10/SK/2022
5	Yana Nurahmad Haerudin	SPM Advokasi Publik SPM of Public Advocacy	48	S2 MSDM Universitas Singaperbangsa Karawang (2014) Magister of HC Singaperbangsa University Karawang (2014)	Surat Keputusan Direksi No. 210/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 210/A/HK/P28/SK/2023
6	Rangga Yuda Putra	SPM Program Swasembada Pangan SPM of Food Self-Sufficiency Program	41	S2 Master of Business, The University of Queensland (2015) Master of Business, The Universitas Queensland (2015)	Surat Keputusan Direksi No. 128/A/HK/E202/SK/2024 Board of Directors Decree No. 128/A/HK/E202/SK/2024

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Demographics and Competency Development

DEMOGRAFI KARYAWAN

Hingga akhir tahun 2024, jumlah karyawan PKWT & PKWTT sejumlah 7.712 orang. Jumlah karyawan PKWTT Perusahaan termasuk Entitas Anak secara langsung mencapai 7.456 orang, mengalami kenaikan 1% dibandingkan tahun 2023 yang 7.441 orang. Kenaikan ini dikarenakan Rekrutmen karyawan di lingkungan PI Grup.

EMPLOYEE DEMOGRAPHY

Until the end of 2024, the number of non-permanent employees & permanent employees amounted to 7,712 people. The number of non-permanent employees of the Company including its direct Subsidiaries reached 7,456 people, an increase of 1% compared to 2023 which was 7,441 people. This increase was due to the recruitment of employees within the PI Group.

Demografi Karyawan (PKWT & PKWTT) Berdasarkan Jenis Kelamin
Demographics of (Non-permanent employees & Permanent employees) by Gender

(orang/people)

Entitas Entity	2024				2023			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Holding								
Pupuk Indonesia	264	97	361	4,68	267	96	363	4,63
Entitas Anak Subsidiaries								
Petrokimia Gresik	2.044	143	2.187	28,36	2.063	145	2.208	28,19
Pupuk Kujang	894	84	978	12,68	909	85	994	12,69
Pupuk Kalimantan Timur	1.168	135	1.303	16,90	1.184	122	1.306	16,68
Pupuk Iskandar Muda	560	68	628	8,14	476	69	555	7,09
Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.634	156	1.790	23,21	1.663	157	1.820	23,24
Rekayasa Industri	311	56	367	4,76	361	61	422	5,39
Pupuk Indonesia Niaga	32	30	62	0,80	36	32	68	0,87
Pupuk Indonesia Logistik	24	3	27	0,35	24	4	28	0,36
Pupuk Indonesia Utilitas*	-	-	-	-	42	8	50	0,64
Pupuk Indonesia Pangan	8	1	9	0,12	17	1	18	0,23
Sub Jumlah Entitas Anak Sub Total of Subsidiaries	**6.675**	**676**	**7.351**	**95,32**	**6.785**	**684**	**7.469**	**95,37**
Jumlah Total	**6.939**	**773**	**7.712**	**100,00**	**7.052**	**780**	**7.832**	**100,00**

*) Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*) Subsidiaries until December 15, 2024

Demografi Karyawan (PKWT & PKWTT) Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Demographics (Non-permanent employees & Permanent employees) by Status

(orang/people)

Entitas / Entity	Karyawan PKWTT / Permanent employees			Karyawan PKWT / Non-permanent employees		
	2024	2023	Penambahan/(Pengurangan) Increase/(Decrease) 2024-2023	2024	2023	Penambahan/(Pengurangan) (Increase/Decrease) 2024-2023
Holding						
Pupuk Indonesia	338	339	(1)	23	25	(2)
Entitas Anak Subsidiaries						
Petrokimia Gresik	2.186	2.006	180	1	201	(200)
Pupuk Kujang	976	994	(18)	2	-	2
Pupuk Kalimantan Timur	1.173	1.223	(50)	130	83	47
Pupuk Iskandar Muda	548	543	5	80	12	68
Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.790	1.803	(13)	-	17	(17)
Rekayasa Industri	358	404	(46)	9	18	(9)
Pupuk Indonesia Niaga	57	60	(3)	5	8	(3)
Pupuk Indonesia Logistik	27	28	(1)	-	-	-
Pupuk Indonesia Utilitas*	-	36	(36)	-	14	(14)
Pupuk Indonesia Pangan	3	5	(2)	6	13	(7)
Sub Jumlah Entitas Anak Sub Total of Subsidiaries	**7.118**	**7.102**	**16**	**233**	**366**	**(133)**
Jumlah Total	**7.456**	**7.441**	**15**	**256**	**391**	**(135)**

*) Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*) Subsidiaries until December 15, 2024

Demografi Karyawan (PKWT & PKWTT) Berdasarkan Grade Jabatan

Employee Demographics (Non-permanent employees & Permanent employees) by Grade Position

(orang/people)

Entitas / Entity	Grade 1		Grade 2		Grade 3		Grade 4		Grade 5-7	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Holding										
Pupuk Indonesia	51	53	109	99	100	88	70	89	31	35
Entitas Anak Subsidiaries										
Petrokimia Gresik	26	22	99	90	248	249	457	432	1357	1414
Pupuk Kujang	13	12	50	54	193	175	248	273	474	480
Pupuk Kalimantan Timur	31	35	99	110	264	271	426	452	483	438
Pupuk Iskandar Muda	10	12	23	24	106	96	237	242	252	181
Pupuk Sriwidjaja Palembang	19	19	97	102	436	409	552	488	686	802
Rekayasa Industri	31	45	120	137	207	228	9	11	0	1
Pupuk Indonesia Niaga	2	2	10	10	21	23	8	10	21	23
Pupuk Indonesia Logistik	2	2	5	6	8	7	5	6	7	7
Pupuk Indonesia Utilitas*	-	4	-	3	-	3	-	15	-	25
Pupuk Indonesia Pangan	-	-	-	1	1	1	8	2	-	14

Demografi Karyawan (PKWT & PKWTT) Berdasarkan Grade Jabatan

Employee Demographics (Non-permanent employees & Permanent employees) by Grade Position

(orang/people)

Entitas Entity	Grade 1		Grade 2		Grade 3		Grade 4		Grade 5-7	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Sub Jumlah Entitas Anak Sub Total of Subsidiaries	**134**	**153**	**503**	**537**	**1.484**	**1.462**	**1.950**	**1.931**	**3.280**	**3.385**
Jumlah Total	**185**	**206**	**612**	**636**	**1.584**	**1.550**	**2.020**	**2.020**	**3.311**	**3.420**

*) Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*) Subsidiaries until December 15, 2024

Demografi Karyawan Berdasarkan (PKWTT & PKWT) Usia

Employee Demographics Based on (Non-permanent employees & Permanent employees) Age

(orang/people)

Entitas Entity	>50 tahun >50 years old		45–50 tahun 45–50 years old		40–45 tahun 40–45 years old		35–40 tahun 35–40 years old		30–35 tahun 30–35 years old		25–30 tahun 25–30 years old		<25 tahun <25 years old	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Holding														
Pupuk Indonesia	34	34	39	30	62	62	90	88	102	105	29	36	5	9
Entitas Anak Subsidiaries														
Petrokimia Gresik	47	60	4	4	24	20	294	168	724	658	948	1.068	146	229
Pupuk Kujang	77	75	63	55	222	174	359	372	207	246	50	72	-	-
Pupuk Kalimantan Timur	75	134	82	68	143	139	300	241	460	467	188	227	55	30
Pupuk Iskandar Muda	12	18	16	12	114	94	178	151	84	106	172	155	52	19
Pupuk Sriwidjaja Palembang	95	98	105	80	267	258	479	419	617	591	227	374	-	-
Rekayasa Industri	108	126	61	64	101	97	64	80	33	55	-	-	-	0
Pupuk Indonesia Niaga	14	14	13	12	9	8	5	9	15	11	6	12	-	2
Pupuk Indonesia Logistik	5	6	6	4	3	3	7	7	4	6	2	2	-	-
Pupuk Indonesia Utilitas*	-	6	-	-	-	4	-	5	-	14	-	15	-	6
Pupuk Indonesia Pangan	2	5	-	1	1	2	3	2	3	5	-	2	-	1
Sub Jumlah Entitas Anak Sub Total of Subsidiaries	**435**	**542**	**350**	**300**	**884**	**799**	**1.689**	**1.454**	**2.147**	**2.159**	**1.593**	**1.927**	**253**	**287**
Jumlah Total	**469**	**576**	**389**	**330**	**946**	**861**	**1.779**	**1.542**	**2.249**	**2.264**	**1.622**	**1.963**	**258**	**296**

*) Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*) Subsidiaries until December 15, 2024

Demografi Karyawan PKWT & PKWTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Non-permanent employees & Permanent employees Demographics by Education Level

(orang/people)

Entitas Entity	Doctor (S3) Doctor Degre		Pasca Sarjana Postgraduate		Sarjana Bachelor		Diploma Diploma		SLTA Senior High School	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Holding										
Pupuk Indonesia	3	-	85	76	272	287	1	1	-	-
Entitas Anak Subsidiaries										
Petrokimia Gresik	-	-	20	52	669	557	228	99	1270	1499
Pupuk Kujang	-	-	70	38	344	189	212	180	352	587
Pupuk Kalimantan Timur	1	1	74	72	417	364	193	185	618	684
Pupuk Iskandar Muda	-	-	59	18	280	171	177	109	112	257
Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	-	160	78	901	480	337	218	391	1044
Rekayasa Industri	1	2	86	117	244	260	10	4	26	39
Pupuk Indonesia Niaga	1	1	30	42	9	20	4	4	18	1
Pupuk Indonesia Logistik	-	-	1	22	17	4	9	2	-	-
Pupuk Indonesia Utilitas*	-	1	-	1	-	38	-	-	-	10
Pupuk Indonesia Pangan	-	-	3	1	3	6	1	5	2	6
Sub Jumlah Entitas Anak Sub Total of Subsidiaries	**4**	**5**	**503**	**441**	**2884**	**2089**	**1171**	**806**	**2789**	**4127**
Jumlah Total	**7**	**5**	**588**	**517**	**3156**	**2376**	**1172**	**807**	**2789**	**4127**

*) Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*) Subsidiaries until December 15, 2024

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

PTPI meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni merupakan ujung tombak dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Untuk itu, PTPI menjalankan program pendidikan dan pengembangan kompetensi karyawan secara berkesinambungan agar lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang begitu pesat serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja.

Perusahaan memberikan perhatian besar terhadap kualitas, profesionalitas, dan efektivitas SDM dalam menjaga serta menumbuhkan loyalitas dan produktivitas SDM setiap tahun. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan dengan mengacu pada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh SDM.

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah merealisasikan biaya pengembangan kompetensi sebesar Rp224,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp236,7 miliar.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

PTPI believes that qualified Human Capital are the spearhead in efforts to realize the Company's vision and mission. For this reason, PTPI runs a continuous employee education and competency development program to be more competitive in the face of rapid changes and developments and increase performance effectiveness and productivity.

The Company pays great attention to the quality, professionalism, and effectiveness of HC in maintaining and growing HC loyalty and productivity every year. This commitment is evidenced by the organization of HC training and development carried out by referring to a training and development framework that covers all aspects and methods of development for all HC.

Throughout 2024, the Company has realized competency development costs of Rp224.1 billion, higher than in 2023 which amounted to Rp236.7 billion.



Realisasi Anggaran Pengembangan Kompetensi
Competency Development Budget Realization

(miliar rupiah/billion rupiah)

Keterangan Description	2024	2023	2022
Realisasi Anggaran Budget Realization	224,1	236,7	164,3

Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan 2024
Realization of Employee Competency Development 2024

No	Kategori Pengembangan Kompetensi Competency Development Categories	Peserta Berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level	Jumlah Peserta Number of Participants
1.	Business/Management Skills	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	139
2.	Business Process & Innovation	BOD-2 & BOD-3	8
3.	Commercial	BOD-2 & BOD-3	6
4.	Corporate Affair	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	59
5.	Corporate Strategy & Business Development	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	27
6.	Finance & Accounting	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	12
7.	Governance, Risk & Compliance	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	287
8.	Human Capital & GA	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	380
9.	Interpersonal Effectiveness	BOD-1 & BOD-2	71
10.	IT & Data Analytics	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	21
11.	Leadership Skills	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	208
12.	Personal Effectiveness	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	11
13.	Supply Chain	BOD-1 & BOD-3	18
14.	Sustainability & HSE	BOD-1, BOD-2 & BOD-3	51

Realisasi Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite di Bawah Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Manajemen Risiko, serta Tata Kelola & Kepatuhan
Realization of Competency Development of the Board of Commissioners, Board of Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Committees under the Board of Commissioners, Corporate Secretary, Internal Audit, Risk Management, and Compliance Governance

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Darmin Nasution	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioners concurrently Independent Commissioner	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Training and Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14 Mei 2024 May 14, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Anhar Adel*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Training and Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14 Mei 2024 May 14, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Anwar Sanusi	Komisaris Commissioners	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Training and Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14 Mei 2024 May 14, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Ari Dwipayana	Komisaris Commissioners	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Training and Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14 Mei 2024 May 14, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Farhat Brachma	Komisaris Commissioners	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Training and Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14 Mei 2024 May 14, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris Commissioners	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Training and Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14 Mei 2024 May 14, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Risk Governance Profesional (CRGP)	15 Oktober 2024 October 15, 2024	LSP Manajemen Risiko (LSPMR)
Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Training and Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14 Mei 2024 May 14, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
		Pelatihan Training	Exploring a New Approach to Corporate Governance Through The Integration of Sustainability and ESG	18 September 2024 18 September 2024	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Riswinandi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Training and Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14 Mei 2024 May 14, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Suwandi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Training and Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14 Mei 2024 May 14, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Rahmad Pribadi	Direktur Utama President Directors	Conference	IFA Annual Conference 2024	20 Mei 2024 May 20, 2024	IFA
		Conference	Indonesia Investment Forum & Indonesian Festival Copenhagen	27 Juni 2024 June 27, 2024	Danish Companies
Gusrizal	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Pelatihan Training	Blue Ocean Strategy Program-INSEAD, France	12 Februari 2024 February 12, 2024	INSEAD
Bob Indiarto	Direktur Produksi Production Director	Conference	IFA Annual Conference 2024	20 Mei 2024 May 20, 2024	IFA
		Conference	2024 Global Conference on Process Safety and Big Data	29 Oktober 2024 October 29, 2024	American Institute of Chemical Engineers (AIChE)

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan Financial Director	Pelatihan Training	Chief Finance Officer (CFO)	13 November 2024 November 13, 2024	BUMN School of Excellence
Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Business Transformation Director	Conference	Indonesia Investment Forum & Indonesian Festival Copenhagen	27 Juni 2024 June 27, 2024	Danish Companies
		Pelatihan Training	Blue Ocean Strategy Program-INSEAD, Singapore	14 Juli 2024 July 14, 2024	INSEAD
Tina T. Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director	Pelatihan Training	Workshop AI & The HC Revolution 2024	11 Maret 2024 March 11, 2024	Transform
Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran Marketing Director	Conference	IFA Annual Conference 2024	20 Mei 2024 May 20, 2024	IFA
		Conference	Konferensi IFA Global Markets-London, United Kingdom	9 Juli 2024 July 9, 2024	IFA
Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio Bisnis & Pengembangan Usaha Portfolio & Business Development Director	Workshop	Workshop Energy Transtition Fundamentals : Hydrogen, Renewables & Carbon Market	12 Maret 2024 March 12, 2024	IHS Global Inc
		Pelatihan Training	Blue Ocean Strategy Program-INSEAD, USA	13 Mei 2024 May 13, 2024	INSEAD
		Conference	Indonesia Investment Forum & Indonesian Festival Copenhagen	27 Juni 2024 June 27, 2024	Danish Companies
		Conference	GasTech Exhibition & Conference 2024	17 September 2024 September 17, 2024	Gastech
Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Seminar	Aligning The Tension of Interest "the main issue on achieving objectives"	20 Juli 2024 July 20, 2024	Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
Gempita Pratiwi	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners	Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14-15 Mei 2024 May 14-15, 2024	LPK MKS
Wiratmoko Prasidhanto	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Sertifikasi Certification	Chartered Accountant Indonesia	16-17 Mei 2024 May 16-17, 2024	IAI
		Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14-15 Mei 2024 May 14-15, 2024	LPK MKS

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
R. Nurhidayat	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of Nomination and Remuneration Committee	Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14-15 Mei 2024 May 14-15, 2024	LPK MKS
Riza Azmi	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	14-15 Mei 2024 May 14-15, 2024	LPK MKS
Wijaya Laksana	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Training	Workshop Investor Relations	21 Mei 2024 May 21, 2024	TICMI (The Indonesia Capital Market Institute)
		Pelatihan Training	Sharing Session STAR	27 Juni 2024 June, 27 2024	Tina T. Kemala Intan
		Pelatihan Training	Pelatihan Business Etiquette BOD-1 (Batch 2)	1 Agustus 2024 August 1, 2024	Herman Pasha & Ellen Tendean

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
R. Eric Juliana Rachman	Ka. Satuan Pengawasan Intern Internal Control Unit	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)	12 Februari 2024 February 12, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		Workshop	Workshop Standards & Code of Ethics for Profesional Internal Auditor (SACEP)	18 April 2024 April 18, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		Pelatihan Training	Pelatihan & Re-Sertifikasi ERMAP	29 Mei 2024 May 29, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Information System Auditor (CISA)	3 Juni 2024 June 3, 2024	ISACA
		Pelatihan Training	Sharing Session STAR	27 Juni 2024 June 27, 2024	Tina T. Kemala Intan
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Internal Audit Executive (CIAE)	15 Juli 2024 July 15, 2024	BPKP
		Pelatihan Training	Pelatihan Business Etiquette BOD-1 (Batch 1)	31 Juli 2024 July 31, 2024	Herman Pasha & Ellen Tendean
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Sertifikasi PIA khusus Kepala SPI	7 Agustus 2024 August 7, 2024	Asosiasi Auditor Internal (AAI)
		Conference	ACIIA Regional Conference 2024	28 Agustus 2024 August 28, 2024	The Institue of Internal Auditors
		Conference	National Anti-Fraud Conference (NAFC) 2024	4 September 2024 September 4, 2024	ACFE
		Pelatihan Training	Workshop Mentoring	19 September 2024 September 19, 2024	Daya Dimensi Indonesia
		Pelatihan Training	Top Gun (BoD-1 Acceleration Development Program) Batch III	27 September 2024 September 27, 2024	BUMN School of Excellence
		Conference	Seminar dan Pengukuhan PIA	5 November 2024 November 5, 2024	Asosiasi Auditor Internal (AAI) Internal Auditor Association
		Pelatihan Training	Sharing Session Top Gun BUMN School of Excellence	20 November 2024 November 20, 2024	BUMN School of Excellence
		Seminar	Seminar Governance and Sustainability Conference	21 November 2024 November 21, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
		Seminar	Global Immersion BUMN School of Excellence	2 Desember 2024 December 2, 2024	BUMN School of Excellence
Ahmad Diponegoro**	SVP Manajemen Risiko Korporasi SVP of Enterprise Risk Management	Pelatihan Training	Data Analytics and Interactive Dashboard	3 April 2024 April 3, 2024	Data Academy
		Pelatihan Training	Accounting in Business	26 April 2024 April 26, 2024	Prasmul Eli
		Pelatihan Training	Merger and Acquisition	29 April 2024 April 29, 2024	Prasmul Eli
		Pelatihan Training	Business Essential Batch 2 Tahun 2024 (Strategic Management)	26 Juni 2024 June 26, 2024	BUMN School of Excellence
		Pelatihan Training	Sharing Session STAR	27 Juni 2024 June 27, 2024	Tina T. Kemala Intan
	SVP Tata Kelola & Kepatuhan SVP Compliance Governance	Pelatihan Training	Pelatihan Business Etiquette BOD-1 (Batch 2)	1 Agustus 2024 August 1, 2024	Herman Pasha & Ellen Tendean
		Pelatihan Training	Top Gun (BoD-1 Acceleration Development Program) Batch II	22 Agustus 2024 August 22, 2024	BUMN School of Excellence
		Seminar	GRC Summit Seminar + Masterclass	22 Agustus 2024 August 22, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
		Pelatihan Training	Business Essential Batch 2 Tahun 2024 (Strategic Management	4 September 2024 September 4, 2024	BUMN School of Excellence
		Pelatihan Training	Workshop Mentoring	19 September 2024 September 19, 2024	Daya Dimensi Indonesia
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Re-Asessment QRMP	23 September 2024 September 23, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Chief Compliance Officer (CCCO)	7 Oktober 2024 October 7, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
		Pelatihan Training	Sharing Session Top Gun BUMN School of Excellence	20 November 2024 November 20, 2024	BUMN School of Excellence

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
Redho Rama Putra***	SVP Manajemen Risiko Korporasi SVP of Enterprise Risk Management	Seminar	BSE Master Class-Unlocking Opportunity for Indonesia Economy Growth 2025	13 November 2024 November 13, 2024	BUMN School of Excellence
		Seminar	Webinar Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dalam Mendukung Making Indonesia 4.0 dan Perlindungan Data Pribadi Sektor Industri Webinar on the Implementation of Information Security Management System in Support of Making Indonesia 4.0 and Personal Data Protection in Industrial Sector	14 November 2024 November 14, 2024	Badan Siber dan Sandi Negara
		Pelatihan Training	Workshop Mentoring	21 November 2024 November 21, 2024	PT Daya Dimensi Indonesia
		Seminar	Webinar INSIGHT-(IT Maturity Networking Session and Highlight) Seri Keempat-Fordigi BUMN	3 Desember 2024 December 3, 2024	BUMN School of Excellence
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Risk Beyond 2024 & Masterclass: Risk Governance + CERG dan QCRO Certification	4 Desember 2024 December 4, 2024	PT Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)

* Menjabat sampai dengan 21 November 2024
** Menjabat sebagai SVP Manajemen Risiko Korporasi sampai dengan 30 Juni 2024, Menjabat sebagai SVP Tata Kelola & Kepatuhan sejak 1 Juli 2024
*** Menjabat sejak 1 Juli 2024
* Served until November 21, 2024
** Served as SVP of Enterprise Risk Management until June 30, 2024, Served as SVP Governance & Compliance since July 1, 2024
*** Served since July 1, 2024

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, pada tahun 2024 PI Grup melaksanakan program-program peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia, meliputi inhouse training, outplant training, dan pelatihan sertifikasi. Mandays pelatihan sampai dengan bulan Desember 2024 sejumlah 99.965 dengan rincian sebagai berikut:

In order to improve HC competencies, in 2024 PI Group will implement programs to programs to improve the knowledge and skills of Human Capitals including inhouse training, outplant training, and certification training. certification training. Training mandays up to December 2024 amounted to 99,965 with the following details as follows:

No.	**Perusahaan** Company	**Realisasi** Realization (Mandays)			
		2024	**2023**	**2022**	**2021**
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	6.813	8.467	4.997	3.498
2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	25.472	15.293	39.600	21.644
3	PT Pupuk Kujang	19.275	9.849	11.425	9.394
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	14.663	12.751	24.745	18.320
5	PT Petrokimia Gresik	11.356	11.566	17.056	17.425
6	PT Pupuk Iskandar Muda	14.778	8.827	16.878	6.647
7	PT Rekayasa Industri	5.777	5.713	7.575	7.493

No.	Perusahaan Company	Realisasi Realization (Mandays)			
		2024	2023	2022	2021
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	1.259	847	696	635
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	467	420	454	388
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas*	-	820	975	1.070
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	105	75	53	74
Jumlah Total		**99.965**	**74.628**	**124.453**	**86.588**

*) Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*) Subsidiaries until December 15, 2024

Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri
Domestic and Overseas Study Assignments

Perusahaan Company	2024		2023		2022	
	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri Overseas	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri Overseas	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri Overseas
PT Pupuk Indonesia (Persero)	17	1	8	1	4	3
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2	1	7	1	2	1
PT Pupuk Kalimantan Timur	2	3	1	1	4	1
PT Petrokimia Gresik	18	1	1	2	8	2
PT Pupuk Kujang	5	1	1	-	3	1
PT Pupuk Iskandar Muda	2	-	-	-	1	1
PT Rekayasa Industri	-	-	-	-	-	-
PT Pupuk Indonesia Niaga	-	-	-	-	-	-
PT Pupuk Indonesia Logistik	-	-	-	-	-	-
PT Pupuk Indonesia Utilitas*	-	-	-	-	-	-
PT Pupuk Indonesia Pangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	**46**	**7**	**18**	**5**	**22**	**9**

*) Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*) Subsidiaries until December 15, 2024

Dalam rangka peningkatan daya saing SDM, Perusahaan merealisasikannya dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di era global melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP IPI) dan lembaga sertifikasi lainnya.

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN TAHUN 2025

Perseroan telah membuat rencana pengembangan kompetensi karyawan Perusahaan pada tahun 2025 di antaranya sebagai berikut:

In order to increase the competitiveness of Human Capitals, the Company realizes it by implementing competency certification in the global era through the Pupuk Indonesia Industry Professional Certification Institute (LSP IPI) and other Certification Institutions.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT PLAN IN 2025

The Company has made a competency development plan for the Company's employees in 2025 as follows:

Rencana Pengembangan Kompetensi tahun 2025
Competency Development Plan In 2025

No.	Nama Kegiatan Activity Name	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level
1	HR for Non HC	Meningkatkan pemahaman bidang HC untuk karyawan di luar HC Improve understanding of HC for outside employees HC	BOD-1 s.d BOD-3
2	Finance for Non Finance	Meningkatkan pemahaman bidang keuangan untuk karyawan di luar keuangan Improve understanding of finance for employees outside of finance	BOD-1 s.d BOD-3
3	Inovasi & Digitalisasi	Mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan yang cepat di era digital dan memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan unit kerja Preparing employees to face the rapid changes in the digital era and utilizing technology for work unit needs	BOD-1 s.d BOD-3
4	Risk Management	Memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam berbagai aspek operasional dan strategi bisnis Provides the understanding and skills necessary to identify, analyze, and manage risk in various aspects of business operations and strategies	BOD-1 s.d BOD-3
5	HSE	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di tempat kerja Increase awareness and understanding of the importance of health, safety and environment in the workplace	BOD-1 s.d BOD-3
6	SIPOC	Meningkatkan pemahaman tentang proses pemetaan proses bisnis dalam suatu unit kerja Improve understanding of the business process mapping process in a work unit	BOD-1 s.d BOD-2
7	Integrasi Business Continuity Management System (BCMS) dengan DRP TI Perusahaan	Pemahaman konsep BCM, Crisis Management & Contigency Plan dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan, serta kemampuan manajemen perusahaan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa di masa depan beserta dampaknya secara keseluruhan. Understanding the concept of BCM, Crisis Management & Contigency Plan in maintaining the company's business continuity, as well as the ability of company management to anticipate future events and their overall impact	BOD-1 dan BOD-2
8	Pelatihan dan Sertifikasi CGRCEO Training and Certification CGRCEO	Meningkatkan kemampuan manajemen risiko dalam bidang terkait Enhance risk management capabilities in related fields	BOD-1
9	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	Meningkatkan kemampuan manajemen risiko dalam bidang terkait Enhance risk management capabilities in related fields	BOD-2
10	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	Meningkatkan kemampuan manajemen risiko dalam bidang terkait Enhance risk management capabilities in related fields	BOD-2
11	Workshop Blue Ocean Innovation BOD-1 & 2	Meningkatkan kapabilitas dalam berinovasi Improving capability to innovate	BOD-1 s.d BOD-2

Rencana Pengembangan Kompetensi tahun 2025
Competency Development Plan In 2025

No.	Nama Kegiatan Activity Name	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level
12	Sales Operation/ Salesmanship (Tutorial Only).	• Perlunya pengembangan kemampuan tim untuk meningkatkan bisnis dan melakukan berbagai teknik penjualan kepada pelanggan, agar dapat menyampaikan value perusahaan dan meningkatkan penjualan. • Standardisasi Kompetensi Tenaga Penjualan Wilayah 2, sebagai bagian dari Kebijakan Sentralisasi Pemasaran dan Program Single Responsibility dalam peran PTPI sebagai Activist Holding (Strategic Foundation Inititives). • The need to develop the team's ability to improve the business and perform various sales techniques selling techniques to customers, in order to convey value of the company and increase sales. • Standardization of Region 2 Sales Force Competencies, as part of the Marketing Centralization Policy and Single Responsibility Program in the role of PTPI as an Activist Holding (Strategic Foundation Inititives).	BOD-2

Pemegang Saham
Shareholders

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Pemegang Saham Shareholders	Per 1 Januari 2024 As of January 1, 2024			Per 31 Desember 2024 As of December 31, 2024		
	Jumlah Saham Number of Shares (lembar saham) (shares)	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** Issued and Fully Paid-up Capital (Rp)	**Kepemilikan** Ownership **%**	**Jumlah Saham** Number of Shares (lembar saham) (shares)	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** Issued and Fully Paid-up Capital **(Rp)**	**Kepemilikan** Ownership **%**
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham Nominal Value of Shares = Rp1,000,000/shares						
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic Indonesia	25.000.000	25.000.000.000.000	100,00%	25.000.000	25.000.000.000.000	100,00
Jumlah Total	**25.000.000**	**25.000.000.000.000**	**100,00%**	**25.000.000**	**25.000.000.000.000**	**100,00**

Hingga akhir tahun 2024, keseluruhan saham PTPI dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 100,00% atau senilai Rp25.000.000.000.000.

As of the end of 2024, all PTPI shares are owned by the Indonesian Government with total share ownership of 100.00% or worth Rp25,000,000,000,000.

PERUBAHAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal 20 Maret 2025, berdasarkan Akta Notaris Lumassia, S.H. No. 02, PTPI melakukan perubahan terhadap struktur modal dan jenis saham perusahaan. Sebelumnya, perusahaan memiliki 100.000.000 saham tanpa alokasi jenis. Kini, perusahaan memiliki 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000, serta 99.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal yang sama. Selain perubahan tersebut, terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, di mana 25.000.000 saham yang sebelumnya hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, kini dialihkan menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 24.999.999 saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (jumlah penuh).

Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. No. 122 tanggal 22 Maret 2025, Pemerintah mengalihkan kepemilikan 24.999.999 saham Seri B, yang setara dengan 99,99% dari saham perusahaan, kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ("BKI") melalui proses penyertaan saham inbreng. Pengalihan saham ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

CHANGES IN THE SHAREHOLDERS COMPOSITION

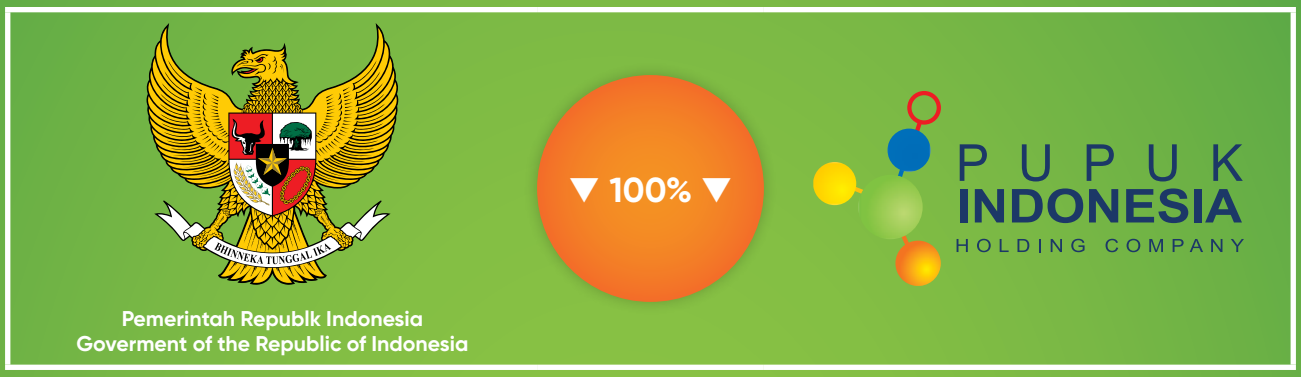
On March 20, 2025, based on Notarial Deed No. 02 of Lumassia, S.H., PTPI made changes to the company's capital structure and share types. Previously, the company had 100,000,000 shares without any allocation of types. Now, the company has 1 Series A Dual-Class Share with a par value of Rp1,000,000, and 99,999,999 Series B shares with the same par value. In addition to this change, there was also change in the composition of fully paid-up shares, where 25,000,000 shares previously owned exclusively by the Republic of Indonesia have been transferred to 1 Series A Dwiwarna share and 24,999,999 Series B shares that may be owned by the Republic of Indonesia and/or the public, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

Furthermore, pursuant to the Deed of Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn. No. 122 dated March 22, 2025, the Government transferred ownership of 24,999,999 Series B shares, equivalent to 99.99% of the company's shares, to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ("BKI") through a share contribution process. This share transfer was carried out in accordance with applicable regulations, namely

penyertaan modal negara. Meskipun Badan Keuangan Indonesia (BKI) menjadi pemegang saham mayoritas, Pemerintah tetap menjadi pemegang saham pengendali PTPI melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B yang dimiliki BKI.

of State Capital Participation.Although BKI (Badan Keuangan Indonesia) becomes the majority shareholder, the Government remains the controlling shareholder of PTPI through its ownership of Series A Dwiwarna shares and Series B shares held by BKI.

Per 31 Desember 2024
As of December 31, 2024



Per Penerbitan Laporan Tahunan
As of the Publishment of Annual Report



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Share Ownership of the Board of Commissioners and Directors

Manajemen Kunci Key Management	Per 1 Januari 2024 As of January 1, 2024	Per 31 Desember 2024 As of December 31, 2024
	Jumlah Total	Jumlah Total
Secara Langsung Directly		
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Directors	Nihil None	Nihil None
Secara Tidak Langsung Indirectly		
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Directors	Nihil None	Nihil None

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Hingga akhir tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari PTPI dengan kepemilikan sebesar 100,00%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Per penerbitan laporan tahunan ini, Pemerintah tetap berkedudukan sebagai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan (Ultimate Beneficial Owner) melalui kepemilikan langsung 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan kepemilikan tidak langsung saham Seri B milik BKI melalui Danantara.

Dalam rangka meningkatkan nilai dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung dan mempercepat program Pemerintah serta meningkatkan tertib administrasi, Pemerintah melakukan pengaturan kembali mengenai sumber penyertaan modal negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") yang dapat dijadikan penyertaan ke dalam modal BUMN dan Perseroan Terbatas ("PT") dan menyempurnakan proses penatausahaan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT ("PP No. 72 Tahun 2016").

INFORMATION ON MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS

As of the end of 2024, the Government of the Republic of Indonesia is the main and controlling shareholder as well as the ultimate owner of PTPI with ownership of 100.00%. Based on Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties, and Authority of the Minister of Finance in the Company (PERSERO), Public Company (PERUM), and Jawatan Company (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises along with the State Gazette of the Republic of Indonesia; the Authorized Shareholder of the Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE).

As of the issuance of this annual report, Government of Indonesia remains the ultimate controlling shareholder of the Company (Ultimate Beneficial Owner) through the direct ownership of one Series A Dwiwarna share with special rights and the indirect ownership of BKI's Series B shares through Danantara.

In order to increase the value and optimize the role of State-Owned Enterprises ("SOE") as national development agents in supporting and accelerating government programs and improving administrative order, the Government is re-regulating the sources of state capital participation from the State Budget ("APBN") which can be used as participation in the capital of SOE and Limited Liability Companies ("PT") and improving the government administration process through the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for State Capital Participation and Administration in SOE and PT ("PP No. 72 of 2016").

Dalam PP No. 72 Tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa salah satu bentuk kekayaan negara adalah saham milik negara pada BUMN atau PT. Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi Anak Perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa. Hak istimewa yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2A ayat 2, mencakup:

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris.
2. Perubahan anggaran dasar.
3. Perubahan struktur kepemilikan saham.
4. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

Anak Perusahaan BUMN (eks. BUMN) diperlakukan sama dengan BUMN dalam mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakukan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN. Perlakuan yang sama dalam kebijakan khusus yang dimaksud antara lain terkait dengan proses dan bentuk perizinan, hak memperoleh HPL (hak pengelolaan), kegiatan perluasan lahan dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang melibatkan BUMN.

Dalam konteks PTPI, Menteri BUMN melalui surat Nomor S-96/MBU/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal Penetapan Saham Istimewa pada Anak Perusahaan eks BUMN dan/atau Anak Perusahan Hasil Spin Off eks BUMN meminta Direksi PTPI agar dapat menetapkan satu saham istimewa untuk dimiliki negara (selanjutnya disebut saham Seri-A Dwiwarna) pada Anak Perusahaan eks BUMN berikut:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur/PKT (eks BUMN).
2. PT Pupuk Kujang/PKC (eks BUMN).
3. PT Petrokimia Gresik/PKG (eks BUMN).
4. PT Pupuk Iskandar Muda/PIM (eks BUMN).
5. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang/PSP (hasil *spin off* eks BUMN).

Dengan terbitnya saham Seri-A Dwiwarna pada Anak Perusahaan PI di atas, status perusahaan-perusahaan tersebut berubah dari semula Anak Perusahaan BUMN menjadi BUMN sehingga hal ini memperkuat landasan bagi Pemerintah dan mempermudah PI Group dalam berbagai penugasan untuk mendukung program-program strategis nasional, seperti:

1. Penyediaan pupuk bersubsidi.
2. Penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (PTPKU) karena berdasarkan PP 19 Tahun 2021 penugasan kepada Badan Usaha hanya bisa dilakukan ke BUMN atau BUMD.

In PP No. 72 of 2016, it is stated that one form of state wealth is state-owned shares in SOE or PT. In the case of state wealth in the form of state-owned shares in SOE being used as state capital participation in other SOE, then the SOE becomes a Subsidiary of SOE with the provision that the state must have shares with special rights. The special rights referred to, as explained in Article 2A paragraph 2, include:

1. Appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
2. Changes to the articles of association.
3. Changes to share ownership.
4. Mergers, amalgamations, separations, and dissolutions, as well as takeovers of companies by other companies.

Subsidiaries of SOE (former SOE) are treated the same as SOE in obtaining Government assignments or implementing public services and/or obtaining special state and/or government policies, including in the management of natural resources with certain treatments as applied to SOE. The same treatment in the special policies referred to includes, among others, related to the licensing process and form, the right to obtain HPL (management rights), land expansion activities and/or participation in state or government activities involving SOE.

In the context of PTPI, the Minister of SOEs through letter Number S-96/MBU/02/2019 dated February 6, 2019 concerning the Determination of Preferential Shares in Subsidiaries of former SOEs and/or Subsidiaries Resulting from Spin-Off of former SOEs requested the Board of Directors of PTPI to determine one preferential share to be owned by the state (hereinafter referred to as Dwiwarna Series-A shares) in the following Subsidiaries of former SOEs:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur/PKT (former SOE).
2. PT Pupuk Kujang/PKC (former SOE).
3. PT Petrokimia Gresik/PKG (former SOE).
4. PT Pupuk Iskandar Muda/PIM (former SOE).
5. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang/PSP (spin-off result of former SOE).

With the issuance of Series-A Dwiwarna shares in the PI Subsidiaries above, the status of these companies has changed from being Subsidiaries of SOE to SOE, thus strengthening the foundation for the Government and facilitating PI Group in various assignments to support national strategic programs, such as:

1. Provision of subsidized fertilizer.
2. Implementation of land procurement for development in the public interest (PTPKU) because based on PP 19 of 2021, assignments to Business Entities can only be carried out to SOE or ROE.

3. Program strategis lainnya yang selaras dengan program Pemerintah.

Struktur kepemilikan saham Anak Perusahaan Produsen Pupuk setelah penerbitan satu saham istimewa (saham Seri-A Dwiwarna) sebagai berikut:

3. Other strategic programs that are in line with Government programs.

The share ownership structure of fertilizer producer Subsidiaries after issuing one preferred share (Dwiwarna Series-A share) as follows:

No	Nama Anak Perusahaan Produsen Pupuk Name of Fertilizer Producer Subsidiary	Kepemilikan Ownership
1	PT Petrokimia Gresik ("PKG")	1. PI 6.599.834 lembar (Seri-B) 2. Yayasan Petrokimia Gresik ("YPG") 165 lembar (Seri-B) 3. Kementerian BUMN 1 lembar (Seri-A) 1. PI 6,599,834 sheets (Series-B) 2. Petrokimia Gresik Foundation ("YPG") 165 sheets (Series-B) 3. Ministry of SOEs 1 sheet (Series-A)
2	PT Pupuk Kujang ("PKC")	1. PI 1.899.915 lembar (Seri-B) 2. Yayasan Kesejahteraan Warga Kujang ("YKWK") 84 lembar (Seri-B) 3. Kementerian BUMN 1 lembar (Seri-A) 1. PI 1,899,915 sheets (Series-B) 2. Kujang Citizens Welfare Foundation ("YKWK") 84 sheets (Series-B) 3. Ministry of SOEs 1 sheet (Series-A)
3	PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	1. PI 17.599.812.012 lembar (Seri-B) 2. Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim ("YKHT PKT") 187.987 lembar (Seri-B) 3. Kementerian BUMN 1 lembar (Seri-A) 1. PI 17,599,812,012 shares (B-series) 2. Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim ("YKHT PKT") 187,987 shares (B-Series) 3. Ministry of State-owned Enterprises 1 share (A-series)
4	PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	1. PI 2.225.663 lembar (Seri-B) 2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh ("YKK PIM") 10 lembar (Seri-B) 3. Kementerian BUMN 1 lembar (Seri-A) 1. PI 2,225,663 shares (B-series) 2. Pupuk Iskandar Muda Aceh (Employee Welfare Foundation ("YKK PIM") 10 shares (Series-B) 3. Ministry of State-Owned Enterprises 1 share (A-series)
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")	1. PI 5.799.985 lembar (Seri-B) 2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri ("YKKP") 14 lembar (Seri-B) 3. Kementerian BUMN 1 lembar (Seri-A) 1. PI 5,799,985 shares (B-series) 2. PSP Employee Welfare Foundation ("YKKP") 14 shares (B-series) 3. Ministry of State-Owned Enterprises 1 share (A-series)

Daftar Entitas Anak, dan Entitas Asosiasi, dan Perusahaan Patungan

List of Subsidiaries, Associated, and Joint Ventures (JV)

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham Shareholding	Jumlah Aset (sebelum Eliminasi) (Rp Juta) Total Assets (before Elimination) (IDR million)	
						2024	2023
Kepemilikan Langsung oleh PTPI Direct Ownership by PTPI							
PT Petrokimia Gresik	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Gresik	1972	Beroperasi komersial sejak tahun 1972 Commercial operation since 1972	99,99%	39.982.278	42.003.902
PT Pupuk Kujang	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Cikampek	1975	Beroperasi komersial sejak tahun 1975 Commercial operation since 1975	99,99%	10.819.908	9.789.802
PT Pupuk Kalimantan Timur	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Bontang	1977	Beroperasi komersial sejak tahun 1985 Commercial operation since 1985	99,99%	38.110.873	37.919.967
PT Pupuk Iskandar Muda	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Aceh	1982	Beroperasi komersial sejak tahun 1982 Commercial operation since 1982	99,99%	8.593.949	8.570.777
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Palembang	2010	Beroperasi komersial sejak tahun 2011 Commercial operation since 2011	99,99%	25.535.320	27.180.230
PT Rekayasa Industri	Konstruksi/EPC Construction/EPC	Jakarta	1981	Beroperasi komersial sejak tahun 1981 Commercial operation since 1981	99,11%	6.237.356	5.967.594
PT Pupuk Indonesia Niaga	Perdagangan Trading	Jakarta	1970	Beroperasi komersial sejak tahun 1970 Commercial operation since 1970	100,00%	651.162	379.510
PT Pupuk Indonesia Logistik	Pengiriman Shipping	Jakarta	2013	Beroperasi komersial sejak tahun 2013 Commercial operation since 2013	100,00%	628.791	671.510

Nama Name	**Bidang Usaha** Line of Business	**Domisili** Domicile	**Tahun Berdiri** Year Established	**Status Operasi** Operation Status	**Kepemilikan Saham** Shareholding	**Jumlah Aset (sebelum Eliminasi) (Rp Juta)** Total Assets (before Elimination) (IDR million)	
						2024	**2023**
PT Pupuk Indonesia Pangan	Pangan Food	Jakarta	2015	Beroperasi komersial sejak tahun 2015 Commercial operation since 2015	100,00%	83.678	104.875
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Petrokimia Gresik Indirect Ownership, through PT Petrokimia Gresik							
PT Petrosida Gresik	Produksi, distribusi, dan perdagangan bahan aktif pestisida serta bertindak sebagai distributor pupuk Production, distribution, and trading of active pepticide ingredients as well as a fertilizer distributor	Gresik	1983	Beroperasi komersial sejak tahun 1983 Commercial operation since 1983	99,99%	845.612	1.008.541
PT Petrokimia Kayaku	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida Producing, formulating and marketing pesticides	Gresik	1976	Beroperasi komersial sejak tahun 1976 Commercial operation since 1976	60,00%	1.039.720	970.090
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Pupuk Kujang Indirect Ownership, through PT Pupuk Kujang							
PT Kawasan Industri Kujang Cikampek	Pengelolaan kawasan industri Industrial area management	Cikampek	1990	Beroperasi komersial sejak tahun 1990 Commercial operation since 1990	96,19%	98.441	76.965
PT Sintas Kurama Perdana	Industri, perdagangan, jasa dan pergudangan dalam sektor industri kimia dasar Industry, trade, services and warehousing in the basic chemical industry sector	Cikampek	1986	Beroperasi komersial sejak tahun 1988 Commercial operation since 1988	99,00%	94.651	67.024
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Pupuk Kalimantan Timur Indirect Ownership, through PT Pupuk Kalimantan Timur							
PT Kaltim Industrial Estate	Pengelolaan kawasan industri Industrial area management	Bontang	1991	Beroperasi komersial sejak tahun 1991 Commercial operation since 1991	99,99%	1.291.506	1.219.601
PT Kaltim Adhiguna Dermaga	Penyedia tenaga kerja, jasa kontraktor Labor providers, contractor services	Bontang	1990	Beroperasi komersial sejak tahun 1990 Commercial operation since 1990	50,99%	78.756	53.754
PT Kaltim Jasa Security	Penyedia tenaga kerja Labor provider	Bontang	2002	Beroperasi komersial sejak tahun 2002 Commercial operation since 2002	70,00%	50.157	37.953

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham Shareholding	Jumlah Aset (sebelum Eliminasi) (Rp Juta) Total Assets (before Elimination) (IDR million)	
						2024	2023
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Pupuk Iskandar Muda Indirect Ownership, through PT Pupuk Iskandar Muda							
PT PIM Prima Medika	Rumah Sakit Hospital	Lhokseumawe	2017	Beroperasi komersial sejak tahun 2017 Commercial operation since 2017	96,00%	40.722	35.210
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Indirect Ownership, through PT Pupuk Sriwidjaja Palembang							
PT Pusri Agro Lestari	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida dan agrokimia lainnya Producing, formulating and marketing pesticides and other agrochemicals	Jakarta	2015	Beroperasi komersial sejak tahun 2015 Commercial operation since 2015	51,00%	55.480	57.851
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Rekayasa Industri Indirect Ownership, through PT Rekayasa Industri							
PT Pupuk Indonesia Utilitas*	Utilitas Utility	Jakarta	2014	Beroperasi komersial sejak tahun 2014 Commercial operation since 2014	100,00%	1.709.680	1.665.018
PT Yasa Industri Nusantara	Perancangan dan perencanaan konstruksi, penyediaan dan pengawasan peralatan dan struktur baja Construction planning, supply and supervision of equipment and steel structures	Jakarta	1999	Beroperasi komersial sejak tahun 1999 Commercial operation since 1999	99,68%	81.028	133.031
PT Tracon Industri	Penyedia jasa konsultasi dan perdagangan Provider of consulting and trading services	Jakarta	2001	Beroperasi komersial sejak tahun 2001 Commercial operation since 2001	80,00%	327.070	436.722
PT Rekayasa Engineering	Penyedia jasa teknik dan engineering Engineering and technical service providers	Jakarta	2001	Beroperasi komersial sejak tahun 2001 Commercial operation since 2001	80,00%	298.432	287.160
Rekind Malaysia Sdn. Bhd.	Penyedia jasa teknik perancangan dan pengadaan Engineering service provider design and procurement	Malaysia	2014	Beroperasi komersial sejak tahun 2014 Commercial operation since 2014	100,00%	12.667	13.914

Nama Name	**Bidang Usaha** Line of Business	**Domisili** Domicile	**Tahun Berdiri** Year Established	**Status Operasi** Operation Status	**Kepemilikan Saham** Shareholding	**Jumlah Aset (sebelum Eliminasi) (Rp Juta)** Total Assets (before Elimination) (IDR million)	
						2024	**2023**
PT Rekind Daya Mamuju	Pembangunan pembangkit tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik Construction of power plants, sales of electric power and distribution of electric power	Jakarta	2013	Beroperasi komersial sejak tahun 2013 Commercial operation since 2013	90,00%	1.699.369	1.703.269
PT Puspetindo	Industri logam dan permesinan umum General metal and machining industry	Gresik	1990	Beroperasi komersial sejak tahun 1991 Commercial operation since 1991	98,38%	72.572	82.462
PT Rekayasa Cakrawala	Penyedia tenaga kerja Labor provider	Jakarta	2006	Beroperasi komersial sejak tahun 2006 Commercial operation since 2006	51,00%	104.733	101.651
Tracon Industri Solusindo	EPC Consultant	Jakarta	2019	Beroperasi komersial sejak tahun 2019 Commercial operation since 2019	98,00%	14.315	8.839
Recon Sarana Utama	EPC Contractor	Jakarta	2014	Beroperasi komersial sejak tahun 2014 Commercial operation since 2014	80,00%	85.171	77.340
PT Kaltim Daya Mandiri	Produsen listrik dan utilitas Power and utility manufacturers	Bontang	1995	Beroperasi komersial sejak tahun 2002 Commercial operation since 2002	95,00%	666.138	592.067
PT KDM Agro Energi	Perdagangan batu bara Coal trading	Bontang	2011	Beroperasi komersial sejak tahun 2011 Commercial operation since 2011	99.98%	42.321	41.203
PT Banyumas Energi Lestari	Pembangkit listrik Power Plant	Purwokerto	**)	-	51.00%	2,745	2,745
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Indonesia Niaga Indirect Ownership, through PT Pupuk Indonesia Niaga							
PT Sigma Utama	Manufaktur Cat Paint Manufacturing	Cibinong	1980	Beroperasi komersial sejak tahun 1982 Commercial operation since 1982	99,99%	115.913	145.901

*) Perusahaan menyerahkan kepemilikan sahamnya di PIU kepada Rekind di bulan Desember 2024 melalui transaksi inbreng saham.
The Company transferred its share ownership in PIU to Rekind in December 2024 through a share inbreng transaction
**) Belum beroperasi secara komersial.
Not yet operated commercially

PROFIL SINGKAT ENTITAS ANAK/KEPEMILIKAN LANGSUNG OLEH PTPI

BRIEF PROFILE OF SUBSIDIARIES/DIRECT OWNERSHIP BY PTPI

PT PETROKIMIA GRESIK ("PKG")

PKG merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, HM. Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Dalam perjalanannya, PT Petrokimia Gresik mengalami perubahan status, pada tahun 1971 sesuai PP No. 35/1971 menjadi Perum, pada tahun 1974 sesuai PP No. 35/1974 juncto PP No. 14/1975 berubah menjadi Persero. Berdasarkan PP No. 28/1997 PKG menjadi anggota holding PTPI.

PKG saat ini menempati areal lebih dari 450 hektare di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Total produksi saat ini mencapai 8,9 juta ton/tahun, terdiri dari produk pupuk sebesar 5 (lima) juta ton/tahun, dan produk non-pupuk sebanyak 3,9 juta ton/tahun. Anak Perusahaan PTPI ini bertransformasi menuju perusahaan Solusi Agroindustri untuk mendukung tercapainya program Ketahanan Pangan Nasional, dan kemajuan dunia pertanian.

Struktur Pemegang Saham PKG adalah PTPI yang memiliki 6.599.834 lembar saham seri-B (99,9975%), Yayasan Petrokimia Gresik yang memiliki 165 lembar saham (0,0024%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A ("Saham Seri-A Dwiwarna").

PKG is the most comprehensive fertilizer plant in Indonesia, which at its inception was called Petrokimia Surabaya Project. The construction contract was signed on August 10, 1964, and came into effect on December 8, 1964. The project was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, HM. Soeharto on July 10, 1972, which was later designated as the anniversary of PT Petrokimia Gresik. In its journey, PT Petrokimia Gresik experienced a change in status, in 1971 according to PP No. 35/1971 it became a Perum, in 1974 according to PP No. 35/1974 juncto PP No. 14/1975 it turned into a Persero. Based on PP No. 28/1997 PKG became a member of the PTPI holding company.

PKG currently occupies an area of more than 450 hectares in Gresik Regency, East Java. Total production currently reaches 8.9 million tons/year, consisting of fertilizer products of 5 (five) million tons/year, and non-fertilizer products of 3.9 million tons/year. This PTPI Subsidiary is transforming into an Agroindustry Solutions company to support the achievement of the National Food Security program, and the advancement of the agricultural world.

The Shareholder Structure of PKG is PTPI which owns 6,599,834 series-B shares (99.9975%), Yayasan Petrokimia Gresik which owns 165 series-B shares (0.0024%), and the the Government of Indonesia 1 series-A share (0.0001%) ("Saham Seri-A Dwiwarna")

Komposisi Kepemilikan Saham PKG per Tanggal 19 Desember 2024
PKG Shareholder Composition as of December 19, 2024

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	99,9975
Yayasan Petrokimia Gresik	0,0024
Saham Seri A Dwiwarna	0,0001

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	T. Nugroho Purwanto
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iqbal Billy Wahid
Komisaris Commissioner	Bin Nahadi
Komisaris Commissioner	Noer Fajrieansyah
Komisaris Commissioner	Cecep Herawan
Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Operasi dan Produksi President Director concurrently Acting Director of Operations and Production	Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Keuangan dan Umum merangkap Plt. Direktur Manajemen Risiko Director of Finance and General Affairs concurrently Acting Director of Risk Management	Robby Setiabudi Madjid

PT PUPUK KUJANG ("PKC")

PKC resmi berdiri pada tanggal 9 Juni 1975. PKC memproduksi dan memasarkan pupuk (urea, NPK, dan organik) serta bahan kimia lain (amoniak). PKC berlokasi di Cikampek, Jawa Barat, dengan kepemilikan saham PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang 0,01%.

PKC was officially established on June 9, 1975. PKC produces and markets fertilizers (urea, NPK, and organic) and other chemicals (ammonia). PKC is located in Cikampek, West Java, with a share ownership of PTPI 99.99% and Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang 0.01%.

Struktur Pemegang Saham PKC adalah PTPI yang memiliki 1.899.915 lembar saham seri-B (99,9955%), Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang yang memiliki 84 lembar saham (0,0044%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A ("Saham Seri-A Dwiwarna").

The Shareholder Structure of PKC is PTPI which owns 1,899,915 series-B shares (99.9955%), Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang which owns 84 series-B shares (0.0044%), and the the Government of Indonesia 1 series-A share (0.0000%) ("Saham Seri-A Dwiwarna")

Komposisi Kepemilikan Saham PKC per Tanggal 31 Desember 2024
PKC Shareholder Composition as of December 31, 2024

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	99,9955
Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang	0,0044
Saham Seri A Dwiwarna	0,0001

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Sripeni Inten Cahyani
Komisaris Commissioner	Gati Wibawaningsih
Komisaris Commissioner	Rachman Ferry Isfianto
Komisaris Independen Independent Commissioner	Jodie Rooseto
Komisaris Independen Independent Commissioner	Riad Oscha Chalik
Komisaris Independen Independent Commissioner	Mahmud Nurwindu
Direktur Utama President Director	Maryono
Direktur Operasi dan Produksi Director of Operation and Production	Robert Sarjaka
Direktur Keuangan dan Umum merangkap Plt. Direktur Manajemen Risiko Director of Finance and General Affairs concurrently Acting Director of Risk Management	Yuni Setyaningrum

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR ("PKT")

PKT merupakan salah satu produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1977. Berawal dari fasilitas pabrik pupuk terapung yang dikelola oleh Pertamina, kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1975 dan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1976 pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Perindustrian. Pada tahun 2012, PKT menjadi Anak Perusahaan PTPI.

PKT is one of Asia's largest producers of urea and NPK fertilizers and was established on 7 December 1977. Starting from a floating fertilizer Plant facility managed by Pertamina, then based on Presidential Decree No. 43 of 1975 and Presidential Decree No. 39 of 1976 its management was handed over to the Ministry of Industry. In 2012, PKT became a Subsidiary of PTPI.

Struktur Pemegang Saham PKT adalah PTPI yang memiliki 17.599.812.012 lembar saham seri-B (99,9988%), Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim yang memiliki 187.987 lembar saham (0,0011%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A ("Saham Seri-A Dwiwarna")..

The Shareholder Structure of PKT is PTPI which owns 17,599,812,012 series-B shares (99,9988%), Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim which owns 187,987 series-B shares (0.0011%), and the the Government of Indonesia 1 series-A share (0.0001%) ("Saham Seri-A Dwiwarna")

Komposisi Kepemilikan Saham PKT per Tanggal 13 Januari 2025
PKT Shareholder Composition as of January 13, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	99,9988
Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim	0,0011
Saham Seri A Dwiwarna	0,0001

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	D. Andhi Nirwanto
Komisaris Independen Independent Commissioner	Gustaaf AC Patty
Komisaris Independen Independent Commissioner	Musthofa
Komisaris Independen Independent Commissioner	Eka Sastra
Komisaris Independen Independent Commissioner	Sukardi Rinakit
Komisaris Independen Independent Commissioner	Etha Rimba Paembonan Tandi Payung
Direktur Utama President Director	Budi Wahju Soesilo
Direktur Operasi Director of Operation	F. Purwanto
Direktur Keuangan dan Umum merangkap Plt. Direktur Manajemen Risiko Director of Finance and General Affairs concurrently Acting Director of Risk Management	Qomaruzzaman
Direktur Pengembangan Director of Development	Hanggara Patrianta

PT PUPUK ISKANDAR MUDA ("PIM")

PIM merupakan Anak Perusahaan PTPI yang memproduksi dan memasarkan pupuk (urea dan NPK) serta bahan kimia lain (amoniak). PIM didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., No. 54 pada tanggal 24 Februari 1982, dan beberapa kali disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, S.H., No. 10 tanggal 30 Agustus 2019.

PIM is a Subsidiary of PTPI that produces and markets fertilizers (urea and NPK) and other chemicals (ammonia). PIM was established based on Notarial Deed of Soeleman Ardjasasmita, S.H., No. 54 dated February 24, 1982, and was amended several times and most recently by Notarial Deed of Lumassia, S.H., No. 10 dated August 30, 2019.

Struktur Pemegang Saham PIM adalah PTPI yang memiliki 2.225.663 lembar saham seri-B (99,9995%), Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh yang memiliki 10 lembar saham (0,0004%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A ("Saham Seri-A Dwiwarna").

The Shareholder Structure of PIM is PTPI which owns 2,225,663 series-B shares (99.9995%), Yayasan Kesejahteraan Karyawan PIM which owns 10 series-B shares (0.0004%), and the the Government of Indonesia 1 series-A share (0.0001%) ("Saham Seri-A Dwiwarna")

Komposisi Kepemilikan Saham PIM per Tanggal 18 Januari 2025
PIM Shareholder Composition as of January 18, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	99,9995
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh	0,0004
Saham Seri A Dwiwarna	0,0001

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commisioner concurrently Independent Commissioner	Marzuki Daud
Komisaris Independen Independent Commissioner	Dominggus Oktavianus Tobu Kiik
Direktur Utama President Director	Budi Santoso Syarif
Direktur Operasi dan Produksi merangkap Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Director of Operation and Production concurrently Acting Director of Risk Management	Jaka Kirwanto

PUSRI PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG ("PSP")

PSP resmi berdiri pada tanggal 12 November 2010, yang memproduksi dan memasarkan pupuk (urea, NPK, dan organik) serta bahan kimia lain (amoniak). PSP berlokasi di Palembang, Sumatra Selatan.

Struktur Pemegang Saham PSP adalah PTPI yang memiliki 5.799.985 lembar saham seri-B (99,9997%), Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri yang memiliki 14 lembar saham (0,0002%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A ("Saham Seri-A Dwiwarna").

PSP was officially established on November 12, 2010, which produces and markets fertilizers (urea, NPK, and organic) and other chemicals (ammonia). PSP is located in Palembang, South Sumatra.

The Shareholder Structure of PSP is PTPI which owns 5,799,985 series-B shares (99.9997%), Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri which owns 14 series-B shares (0.0002%), and the the Government of Indonesia 1 series-A share (0.0001%) ("Saham Seri-A Dwiwarna")

Komposisi Kepemilikan Saham PSP per Tanggal 19 Desember 2024
PSP Shareholder Composition as of December 19, 2024

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	99,9997
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PSP	0,0002
Saham Seri A Dwiwarna	0,0001

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Siti Nurizka Puteri Jaya
Komisaris Commissioner	Ali Jamil
Komisaris Commissioner	Sally Salamah
Komisaris Commissioner	Fadjar Judisiawan
Komisaris Independen Independent Commissioner	Bambang Supriyambodo
Direktur Utama President Director	Daconi Khotob
Direktur Operasi dan Produksi Director of Operation and Production	Filius Yuliandi
Direktur Keuangan dan Umum merangkap Plt. Direktur Manajemen Risiko Director of Finance and General Affairs concurrently Acting Director of Risk Management	Saifullah Lasindrang

PT REKAYASA INDUSTRI ("REKIND")

Rekind resmi berdiri pada tanggal 12 Agustus 1981, Perusahaan berlokasi di Jakarta dan bergerak di bidang usaha jasa *engineering, procurement, & construction*.

Pada tahun 2024, kepemilikan saham PTPI 2.471.445 lembar saham (98,22%), Pemerintah Republik Indonesia 22.366 lembar saham (0,89%), dan PKT 22.366 lembar saham (0,89%).

Rekind was officially established on August 12, 1981, The company is located in Jakarta and it's engaged in the engineering, procurement, & construction services business.

In 2024, the share ownership of PTPI is 2,471,445 shares (98.22%), Government of the Republic of Indonesia is 22,366 shares (0.89%), and PKT is 22,366 shares (0.89%).

Komposisi Kepemilikan Saham Rekind per Tanggal 31 Desember 2024
Rekind Shareholder Composition as of December 31, 2024

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	98,22
Pemerintah Republk Indonesia Goverment of the Republic of Indonesia	0,89
PKT	0,89

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Dody Widodo
Komisaris Commissioner	Doddy Rahadi
Komisaris Independen	Maret Samuel Sueken
Direktur Utama President Director	Triyani Utaminingsih
Direktur Operasi dan Teknologi/Pengembangan Director of Operation and Technology/Development	Yusairi
Plt. Direktur Keuangan dan SDM Act. Director of Finance and HC	Dedy Rinaldi

PT PUPUK INDONESIA NIAGA ("PIN")

Perusahaan ini resmi berdiri pada tahun 1970 dan pada tahun 1977 mendapat penyertaan modal dari Pemerintah berupa aset eks PN Pembangunan Niaga, sehingga perusahaan ini resmi berekspansi ke bisnis perdagangan (trading). Untuk mencerminkan ekspansi tersebut, perusahaan mengubah namanya menjadi "PT Mega Eltra". Sebagai bagian dari upaya pembentukan holding BUMN di bidang pupuk. Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke PT Pupuk Sriwidjaja. Pada tanggal 22 Desember 2022, sesuai dengan keputusan Pemegang Saham, PT Mega Eltra ("ME") diubah namanya menjadi "PT Pupuk Indonesia Niaga" ("PIN"). Per tanggal 31 Desember 2024, saham PI Niaga dimiliki oleh PTPI 303.759 lembar saham (99,84%) dan Rekind 500 lembar saham (0,16%).

The company was officially established in 1970 and in 1977 received capital participation from the Government in the form of assets of the former PN Pembangunan Niaga, so that the company officially expanded into the trading business. To reflect the expansion, the company changed its name to 'PT Mega Eltra'. As part of the efforts to form a state-owned holding company in the fertiliser sector. In 1998, the Indonesian government officially handed over the majority of the company's shares to PT Pupuk Sriwidjaja. On 22 December 2022, in accordance with the Shareholders' decision, PT Mega Eltra ('ME') was renamed to 'PT Pupuk Indonesia Niaga' ('PIN'). As of 31 December 2024, PI Niaga shares are owned by PTPI 303,759 shares (99.84%) and Rekind 500 shares (0.16%).

Komposisi Kepemilikan Saham PIN per Tanggal 31 Desember 2024
PIN shareholder Composition as of December 31, 2024

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	99,84
Rekind	0,16

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Eko Suseno Agung Cahyanto
Komisaris Commissioner	Prihasto Setyanto
Komisaris Commissioner	Sandra Firmania
Direktur Komersil dan Operasi merangkap Plt. Direktur Utama Director of Commercial and Operations concurrently Acting President Director	Yusuf Trudo H. D. M. Nainggolan
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HC	Dundi Insan Perlambang

PUPUK INDONESIA LOGISTIK (PIHC Group)

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK ("PILOG")

PILog resmi berdiri pada tanggal 23 Desember 2013, yang bergerak dalam bidang usaha jasa pelayaran dan jasa angkutan laut. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham adalah PTPI 145.500 lembar saham (55,77%) dan PSP 115.385 (44,23%).

PILog was officially established on December 23, 2013, which is engaged in the business of shipping services and sea transportation services. The company is located in Jakarta, with share ownership of PTPI is 145,500 shares (55.77%) and PSP is 115,385 shares (44.23%).

Komposisi Kepemilikan Saham PILOG per Tanggal 31 Desember 2024
PILOG Shareholder Composition as of December 31, 2024

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	55,77
PSP	44,23

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Rudi Rusli
Komisaris Independen Independent Commissioner	Aridayanto Kusumayuda
Direktur Utama President Director	Zulyan Imansyah
Direktur Operasional Operational Director	Hree Shanty Bayu
Direktur Administrasi dan Keuangan Administration and Finance Director	Priyasdhika
Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	Muhammad Gustri Oktaviandi

PT PUPUK INDONESIA PANGAN ("PIP")

PIP resmi berdiri pada tanggal 30 April 2015, yang bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan di bidang pertanian. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 159.000 lembar saham (60,00%), PKG 26.500 lembar saham (10,00%), PKC 26.500 lembar saham (10,00%), PKT 26.500 lembar saham (10,00%), dan PSP 26.500 lembar saham (10,00%).

PIP was officially established on April 30, 2015, which is engaged in industry and trade in agriculture. The company is located in Jakarta, with share ownership of PTPI is 159,000 shares (60.00%), PKG is 26,500 shares (10.00%), PKC is 26,500 shares (10.00%), PKT is 26,500 shares (10.00%), and PSP is 26,500 shares (10.00%).

Komposisi Kepemilikan Saham PIP per Tanggal 31 Desember 2024
PI Pangan Shareholder Composition as of December 31, 2024

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	60,00
PKG	10,00
PKC	10,00
PKT	10,00
PSP	10,00

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Independen Independent Commissioner	Achmad Suhawi
Direktur Utama President Director	Iwan Daru Sukmana
Direktur Keuangan Finance Director	Kiki Lukmanul Hakim

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham

Chronology of Issuance and Listing

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Saham melalui bursa efek mana pun. Sebanyak 25.000.000 lembar saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai entitas usaha yang mendapatkan modal dari Pemerintah Indonesia, Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kronologi penerbitan saham sejak awal hingga posisi per tanggal 31 Desember 2024. Posisi Modal Disetor PTPI per tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp25 triliun dengan jumlah lembar saham sebanyak 25.000.000 lembar bernilai Rp1.000.000 per lembar. Berikut kronologi penerbitan saham dari awal hingga akhir tahun buku.

Until the end of 2024, the Company did not conduct any Public Offering of Shares through any stock exchange. A total of 25,000,000 shares of the Company are owned by the Government of Indonesia. As a business entity that receives capital from the Government of Indonesia, the Company has an obligation to submit a chronology of share issuance from the beginning to the position as of December 31, 2024. The paid-up capital position of PTPI as of December 31, 2024 is Rp25 trillion with 25,000,000 shares worth Rp1,000,000 per share. The following is the chronology of share issuance from the beginning to the end of the fiscal year.

Keterangan Description	**Tahun** Year	**Jumlah (Rp juta)** Total (Rp million)	**Akumulasi (Rp juta)** Accumulation (Rp million)	**Akta Notaris** Notarial Deed	**Nama Notaris** Notary's Name	**Pengesahan** Endorsement
Modal Awal I Initial Capital	1970	7.000	7.000	Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 Deed No. 4 dated January 3, 1970	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. J.A.5/7/20 tanggal 7 Februari 1970 Ministry of Justice No. J.A.5/7/20 dated February 7, 1970
Penambahan Additional	1975	24.000	31.000	Akta No. 2 tanggal 1 April 1975 Deed No. 2 dated April 1, 1975	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. J.A.5/132/15 tanggal 17 April 1975 Ministry of Justice No. J.A.5/132/15 dated April 17, 1975
Penambahan Additional	1976	6.000	37.000	Akta No. 62 tanggal 20 Mei 1976 Deed No. 62 dated May 20, 1976	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. Y.A.5/317/21 tanggal 3 Juni 1976 Ministry of Justice No. Y.A.5/317/21 dated June 3, 1976
Penambahan Additional	1981	108.000	145.000	Akta No. 7 tanggal 5 Oktober 1981 Deed No. 7 dated October 5, 1981	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2206-HT01-04. tahun 1983 tanggal 12 Januari 1983 Ministry of Justice No. C2206-HT01-04. of 1983 dated January 12, 1983
Penambahan Additional	1984	55.000	200.000	Akta No. 19 tanggal 20 Juli 1984 Deed No. 19 dated July 20, 1984	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2546-HT01-04. tahun 1985 tanggal 2 Februari 1985 Ministry of Justice No. C2546-HT01-04. of 1985 dated February 2, 1985
Penambahan Additional	1989	870.710	1.570.710	Akta No. 4 tanggal 4 September 1989 Deed No. 4 dated September 4, 1989	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2778-HT01-04. tahun 1990 tanggal 16 Februari 1990 Ministry of Justice No. C2778-HT01-04. of 1990 dated February 16, 1990

Keterangan Description	Tahun Year	Jumlah (Rp juta) Total (Rp million)	Akumulasi (Rp juta) Accumulation (Rp million)	Akta Notaris Notarial Deed	Nama Notaris Notary's Name	Pengesahan Endorsement
Penambahan Additional	1997	1.829.290	2.900.000	Akta No. 14 tanggal 12 September 1997 Deed No. 14 dated September 12, 1997	Imas Fatimah, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2-10.682-HT01-04. Th.97 tanggal 14 Oktober 1997 Ministry of Justice No. C2-10.682-HT01-04.Th.97 dated October 14, 1997
Penambahan Additional	2002	6.000	2.906.000	Akta No. 13 tanggal 5 Februari 2002 Deed No. 13 dated February 5, 2002	Imas Fatimah, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2-05201-HT01-04. Th.2002 tanggal 28 Maret 2002 Ministry of Justice No. C2-05201-HT01-04. Th.2002 dated March 28, 2002
Penambahan Additional	2005	957.948	3.863.948	Akta No. 20 tanggal 12 September 2005 Deed No. 20 dated September 12, 2005	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Kehakiman No. C229535-HT01-04. Th.2005 tanggal 25 Oktober 2005 Ministry of Justice No. C229535-HT01-04. Th.2005 dated October 25, 2005
Penambahan Additional	2008	390.000	4.253.948	Akta No. 6 tanggal 4 Februari 2008 Deed No. 6 dated February 4, 2008	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.3906 tanggal 19 Februari 2008 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.3906 dated February 19, 2008
Penambahan Additional	2008	35.058	4.289.006	Akta No. 15 tanggal 11 Desember 2008 Deed No. 15 dated December 11, 2008	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.5826 tanggal 13 Mei 2009 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.5826 dated May 13, 2009
Penambahan Additional	2011	6.321.000	10.610.006	Akta No. 7 tanggal 7 Januari 2011 Deed No. 7 dated January 7, 2011	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHU. AH.01.10.02656 tanggal 18 Januari 2011 Ministry of Law & Human Rights No. AHU. AH.01.10.02656 dated January 18, 2011
Penambahan Additional	2012	1.338.048	11.948.054	Akta No. 11 tanggal 19 Januari 2012 Deed No. 11 dated January 19, 2012	Lumassia, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.08848 tanggal 13 Maret 2012 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.08848 dated March 13, 2012
Penambahan Additional	2013	951.854	12.899.908	Akta No. 14 tanggal 26 April 2013 Deed No. 14 dated April 26, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.17728 tanggal 7 Mei 2013 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.17728 dated May 7, 2013
Penambahan Additional	2018	12.100.092	25.000.000	Akta No. 3 tanggal 24 Oktober 2018 Deed No. 3 dated October 24, 2018	Lumassia, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.24295 tanggal 6 November 2018 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.24295 dated November 6, 2018

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

Perusahaan telah menerbitkan 4 (empat) obligasi yang seluruhnya dicatat di Bursa Efek Indonesia. Rincian kronologi penerbitan obligasi disampaikan dalam tabel di bawah ini:

The Company has issued 4 (four) bonds which are all listed on the Indonesia Stock Exchange. Details of bond issuance can be tabulated as hereunder:

No.	Obligasi Bonds	Tanggal Terbit Date of Issue	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Pokok Obligasi Bond Principal (Rp)	Kode Obligasi Bond Code	Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status
1	Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014–Seri A Bonds I Pupuk Indonesia of 2014– Series A	8 Juli 2014 July 8, 2014	8 Juli 2017 July 8, 2017	568.000.000.000	PIHC01A	9,62%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid
2	Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014–Seri B Bonds I Pupuk Indonesia of 2014– Series B	8 Juli 2014 July 8, 2014	8 Juli 2019 July 8, 2019	1.131.000.000.000	PIHC01B	9,95%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid
3	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri A Shelf Registration Bonds I Pupuk Indonesia Phase I Year 2017 Series A	12 Juli 2017 July 12, 2017	12 Juli 2020 July 12, 2020	1.484.500.000.000	PIHC01ACN1	7,90%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid
4	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B Shelf Registration Bonds I Pupuk Indonesia Phase I Year 2017 Series A	12 Juli 2017 July 12, 2017	12 Juli 2024 July 12, 2024	2.085.000.000.000	PIHC01BCN1	8,60%	idAAA dari Pefindo idAAA from Pefindo	Telah Lunas Paid
5	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A Shelf Registration Bonds I Pupuk Indonesia Phase II Year 2017 Series A	9 November 2017 November 9, 2017	9 November 2020 November 9, 2020	2.601.500.000.000	PIHC01ACN2	7,50%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid
6	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B Shelf Registration Bonds I Pupuk Indonesia Phase II Year 2017 Series B	9 November 2017 November 9, 2017	9 November 2022 November 9, 2020	1.774.000.000.000	PIHC01BCN2	7,90%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid

No.	Obligasi Bonds	Tanggal Terbit Date of Issue	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Pokok Obligasi Bond Principal (Rp)	Kode Obligasi Bond Code	Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status
7	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri A Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series A	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2023 September 3, 2023	1.146.825.000.000	PIHC02ACN1	7,00%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid
8	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series B	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2025 September 3, 2025	857.835.000.000	PIHC02BCN1	7,70%	idAAA dari Pefindo from Pefindo	Aktif Active
9	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series C	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2027 September 3, 2027	431.850.000.000	PIHC02CCN1	8,30%	idAAA dari Pefindo from Pefindo	Aktif Active
10	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A Shelf Registration II Pupuk Indenesia Phase II of 2021 Series A	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2024 March 10, 2024	350.000.000.000	PIHC02ACN2	5,60%	idAAA dari Pefindo from Pefindo	Telah Lunas Paid
11	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B Shelf Registration II Pupuk Indonesia Phase II of 2021 Series B	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2026 March 10, 2026	1.600.000.000.000	PIHC02BCN2	6,20%	idAAA dari Pefindo from Pefindo	Aktif Active
12	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C Shelf Registration II Pupuk Indonesia Phase II of 2021 Series C	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2028 March 10, 2028	800.000.000.000	PIHC02CCN2	7,20%	idAAA dari Pefindo from Pefindo	Aktif Active
Jumlah Penerbitan Obligasi All Time Number of All Time Bond Issuances				**14.830.510.000.000**				
Jumlah Utang Obligasi per 31 Desember 2024 Amount of Bonds Payable as of December 31, 2024				**3.689.685.000.000**				

10 Pemegang Obligasi Terbesar
10 Largest Bondholders

No.	Nama Pemegang Obligasi (Investor) Name of Bondholder (Investor)	Kategori Investor Investor Category	Total Kepemilikan Obligasi Total Bond Ownership (Rp)
1.	BCA-Treasury Dept	Perbankan/Finansial Banking/Financial	690.000.000.000
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)-Divisi Treasury	Perbankan/Finansial Banking/Financial	454.000.000.000
3.	PT Bank Mandiri	Perbankan/Finansial Banking/Financial	389.000.000.000
4.	DP Bank Indonesia	Dana Pensiun Pension Fund	215.000.000.000
5.	Treasury Bank Jatim	Perbankan/Finansial Banking/Financial	207.000.000.000
6.	PT Bank KEB Hana Indonesia-Treasury	Perbankan/Finansial Banking/Financial	200.000.000.000
7.	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia	Yayasan Foundation	150.000.000.000
8.	Dana Pensiun Bank Mandiri	Dana Pensiun Pension Fund	122.000.000.000
9.	Dana Pensiun BRI	Dana Pensiun Pension Fund	102.000.000.000
10.	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Sekretariat Jenderal	Pemerintah/BUMN Government/State-Owned Enterprises	100.000.000.000
10.	DPLK Bank Rakyat Indonesia-Pendapatan Tetap	Dana Pensiun Pension Fund	100.000.000.000

Status Investor Pemegang Obligasi
Investor Status Bondholders

Status Investor Investor Status	Jumlah (Rp) Ammount (Rp)
Bank Domestik Domestic Banks	2.085.000.000.0000
Dana Pensiun Pension Fund	770.500.000.000
Insurance NPWP	255.300.000.000
Yayasan NPWP NPWP Foundation	168.000.000.000
Mutual Funds	165.200.000.000
Pemerintah Indonesia Government of Indonesia	100.000.000.000
Koperasi Cooperative	75.000.000.000
Jamsostek JHT	25.000.000.000
Individual Domestik Domestic Individual	24.685.000.000
Perusahaan Terbatas NPWP Limited Liability Company NPWP	21.000.000.000
Jumlah Utang Obligasi per 31 Desember 2024 Total Bond Debt as of December 31, 2024	**3.689.685.000.000**

Realisasi Penggunaan Dana
Utilization of Funds

Subjek Subject	**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017** Shelf Registration Bond I Phase I Year 2017	**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017** Shelf Registration Bond I Phase II Year 2017	**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020** Shelf Registration Bond II Phase I Year 2020	**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021** Shelf Registration Bond II Phase II Year 2021
Penggunaan Dana Use of Funds	16% Refinancing Obligasi I Tahun 2014 Seri A 16% Refinancing of Bonds I Year 2014 Series A	23% Refinancing Pinjaman Perbankan PT Pupuk Kalimantan Timur 23% Refinancing of Banking Loan of PT Pupuk Kalimantan Timur	33% Refinancing atas Kredit Investasi Perbankan Amurea II dan Revamping PA PT Petrokimia Gresik 33% Refinancing on Investment Credit Amurea II Banking and Revamping PA PT Petrokimia Gresik	91% Refinancing atas Kredit Investasi Perbankan Amurea II PT Petrokimia Gresik 91% Refinancing of Amurea II Investment Banking Loan of PT Petrokimia Gresik
	84% Refinancing Pinjaman Perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 84% Refinancing of Banking Loan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	12% Refinancing Pinjaman Perbankan PT Pupuk Kujang 12% Refinancing of Banking Loan PT Pupuk Kujang	26% Refinancing Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Iskandar Muda 26% Refinancing of PT Pupuk Iskandar Muda Banking Working Capital Loan	9% Refinancing Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik 9% Refinancing of Working Capital Loan of PT Pupuk Indonesia Logistik
		19% Refinancing Pinjaman Perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 19% Refinancing of Banking Loan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	41% Refinancing Obligasi untuk Modal Kerja PT Rekayasa Industri 41% Bond Refinancing for Working Capital PT Rekayasa Industri	
		27% Refinancing Pinjaman Perbankan PT Rekayasa Industri 27% Refinancing of Banking Loan PT Rekayasa Industri		
		6% Refinancing Pinjaman Perbankan PT Pupuk Indonesia Niaga (d/h PT Mega Eltra) 6% Refinancing of Banking Loan PT Pupuk Indonesia Niaga (formerly PT Mega Eltra)		
		13% Refinancing Pinjaman Perbankan PT Petrokimia Gresik 13% Refinancing Banking Loan PT Petrokimia Gresik		

PERKEMBANGAN PEMERINGKAT EFEK

Berdasarkan peringkat utang yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia pada tahun 2024, seluruh surat utang Perusahaan mendapatkan rating idAAA (Outlook : Stable), hal ini mencerminkan kemampuan superior dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya dibandingkan emiten Indonesia lainnya.

DEVELOPMENTS IN CREDIT RATING

Based on the debt ratings issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia in 2024, all of the Company's debt securities have been assigned a rating of idAAA (Outlook: Stable). This rating reflects the Company's superior ability to meet its long-term financial obligations compared to other issuers in Indonesia

Jenis Surat Utang Bonds	2024	2023	Perubahan Change
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017-Seri A (PIHC01ACN1) Shelf Registration Bonds I PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2017-Series A (PIHC01ACN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN1) Shelf Registration Bonds I Pupuk Indonesia Phase I Year 2017 Series B (PIHC01BCN1)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes to Bond Rating Agencies
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017-Seri A (PIHC01ACN2) Shelf Registration Bonds I PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2017-Series A (PIHC01ACN2)	Fitch: AAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN2) Shelf Registration Bonds I PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2017 Series B (PIHC01BCN2)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri A (PIHC02ACN1) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series A (PIHC02ACN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B (PIHC02BCNI) Shelf Registration Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series B (PIHC02BCNI)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes to Bond Rating Agencies
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C (PIHC02CCN1) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series C (PIHC02CCN1)	Pefindo : idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes to Bond Rating Agencies
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A (PIHC02ACN2) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series A (PIHC02ACN2)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes to Bond Rating Agencies
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B (PIHC02BCN2) Shelf Registration Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series B (PIHC02BCN2)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes to Bond Rating Agencies
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C (PIHC02CCN2) Shelf Registration Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series C (PIHC02CCN2)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes to Bond Rating Agencies

Peringkat nasional idAAA menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang yang dinilai memiliki kemampuan superior dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya dibandingkan emiten Indonesia lainnya.

The idAAA national rating represents the highest rating assigned by PT Pemeringkat Efek Indonesia on the national rating scale for Indonesia. This rating is awarded to issuers or debt securities that are deemed to have superior ability to meet their long-term financial obligations compared to other issuers in Indonesia.

Pembayaran Obligasi (Pokok)
Bond Principal Payment

Perihal Subject	**Realisasi 2024** 2024 Realization **(Rp Juta)** (Rp Millon)	**Proyeksi 2025** 2025 Projection **(Rp Juta)** (Rp Millon)	**Perbandingan Proyeksi 2025 Terhadap Realisasi 2024** Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization
	1	**2**	**(2:1)**
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B Shelf Registration Bonds I Pupuk Indonesia Phase I Year 2017 Series B	2.085.000	-	(100)
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series B	-	N/A	
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series A	350.000	-	(100)

Pada tahun 2024 PTPI melunasi Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A Tahun 2021 pada 10 Maret 2024 senilai Rp350.000.000.000 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B Tahun 2017 pada 12 Juli 2024 sebesar Rp2.085.000.000.000.

Pada tahun 2025 hanya terdapat pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2020 pada 3 September 2025 senilai Rp857.835.000.000.

in 2024, PTPI fulfilled the principal repayment of Shelf Registration Bonds II Phase II Series A Year 2021 on March 10, 2024, amounting to Rp350,000,000,000, and the Shelf Registration Bonds I Phase I Series B Year 2017 on July 12, 2024, totaling Rp2,085,000,000,000.

In 2025, the company is scheduled to repay only the principal of its Shelf Registration Bonds II Phase I Series B Year 2020 on September 3, 2025, with a total amount of Rp857,835,000,000.

Pembayaran Obligasi (Bunga)
Bond Interest Payment

Perihal Subject	**Realisasi 2024** 2024 Realization **(Rp Juta)** (Rp Millon)	**Proyeksi 2025** 2025 Projection **(Rp Juta)** (Rp Millon)	**Perbandingan Proyeksi 2025 Terhadap Realisasi 2024** Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization
	1	**2**	**(2:1)**
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B Shelf Registration Bonds I Pupuk Indonesia Phase I Year 2017 Series B	134.482,5	-	(100)
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series B	66.053,3	49.540	75

Pembayaran Obligasi (Bunga)
Bond Interest Payment

Perihal Subject	**Realisasi 2024** 2024 Realization **(Rp Juta)** (Rp Millon)	**Proyeksi 2025** 2025 Projection **(Rp Juta)** (Rp Millon)	**Perbandingan Proyeksi 2025 Terhadap Realisasi 2024** Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization
	1	**2**	**(2:1)**
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series C	35.843,6	35.843,6	100
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series A	4.900	-	(100)
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B Sustainable Bonds II Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series B	99.200	99.200	100
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C Sustainable Bonds II Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series C	57.600	57.600	100

Tidak ada pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B Tahun 2017 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A Tahun 2021 di tahun 2025, hal ini dikarenakan Obligasi tersebut telah lunas pada 12 Juli 2024 dan 10 Maret 2024.

There will be no interest payments for the Shelf Registration Bonds I Phase I Series B Year 2017 and Shelf Registration Bonds II Phase II Series A Year 2021 in 2025, as these bonds were fully repaid on July 12, 2024, and March 10, 2024, respectively.

Terdapat perbedaan pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2020 dikarenakan Obligasi tersebut akan lunas pada 3 September 2025.

Additionally, there will be a difference in the interest payment schedule for the Shelf Registration Bonds II Phase I Series B Year 2020, as this bond is set to mature on September 3, 2025.

Keanggotaan Perusahaan dalam Asosiasi atau Organisasi
Company Membership in Associations or Organizations

Nama Organisasi/Asosiasi Organization/Association Name	**Ruang Lingkup** Scope	**Posisi Keikutsertaan** Participation Position
Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (AP PI) Indonesian Fertilizer Entrepreneurs Association (AP PI)	Nasional National	Ketua Presidium Chairman of the Presidium
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia Indonesia Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)	Nasional National	Anggota Member
Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP-IPI) Professional Certification Institute (LSP-IPI)	Nasional National	Anggota Member
International Fertilizer Association (IFA)	Internasional International	Anggota Tetap Permanent Member

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
Alamat Address	WTC 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29–31 Kuningan, Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 WTC 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29–31 Kuningan, Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi, South Jakarta City DKI Jakarta 12920
Akuntan Accountant	Heryanto
Tahun Audit Audit Year	Tahun Buku 2024 Fiscal Year 2024
Periode Penugasan Assignment Period	Ke-5 5th
Jasa yang Diberikan Services Provided	1. Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (PI Grup) Tahun Buku 2024. 2. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK untuk PTPI, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Rekayasa Industri Tahun Buku 2024. 1. Audit of the Consolidated Financial Statements of PTPI, Subsidiaries and Sub-Subsidiaries (PI Group) for the Financial Year 2024. 2. Audit of Financial Statements for the Implementation of MSE Funding Program for PTPI, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Rekayasa Industri for Financial Year 2024
Jasa Lainnya Other Services	1. Melaksanakan pengujian dan pelaporan atas kepatuhan PTPI dan Anak Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pengungkapan manajemen kepada KAP dan pengendalian internal tertentu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan "PSA No. 62: Audit Kepatuhan yang Diterapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah" yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. 2. Melakukan prosedur yang disepakati atas tingkat pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Direksi Kolegial dan Individu Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atas Konsolidasian PTPI dan Anak Perusahaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023. 3. Menerbitkan Laporan Management Letter atas Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk PTPI, Anak Perusahaan, dan Cucu Perusahaan. 4. Melakukan prosedur yang disepakati atas Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan dari: • RUPS RKAP tahun buku 2024 untuk PTPI dan PT Rekayasa Industri. • RUPS Laporan Kinerja Tahunan tahun buku 2023 untuk PTPI dan PT Rekayasa Industri. 5. Melakukan prosedur yang disepakati terkait tindak lanjut atas Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris di PTPI yang sifatnya strategis dan terukur periode Tahun Buku 2024. 6. Melakukan prosedur yang disepakati atas Paket Informasi dan Struktur Korporasi untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan ruang lingkup AUP. 7. Pelaporan Group Reporting ke BPK RI (SA 600). 1. Conduct testing and reporting on the compliance of PTPI and its Subsidiaries with applicable laws and regulations in accordance with management disclosures to the KAP and certain internal controls for the year ending December 31, 2024, in accordance with "PSA No. 62: Audit of Compliance Applied to Government Entities and Other Recipients of Government Financial Assistance" issued by the Indonesian Institute of Public Accountants. 2. Conduct agreed-upon procedures on the achievement level of Key Performance Indicators (KPIs) of the Collegial Board of Directors and Individual Directors for the year ended December 31, 2024, for the consolidated financial statements of PTPI and its Subsidiaries, in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023. 3. Issue a Management Letter Report on Internal Control for the year ending on December 31, 2024 for PTPI, Subsidiaries, and Sub-Subsidiaries. 4. Perform agreed procedures on the Follow-up to Decisions and Directives from: • The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on the 2024 Budget Plan for PTPI and PT Rekayasa Industri. • The AGMS on the 2023 Annual Performance Report for PTPI and PT Rekayasa Industri. 5. Carry out agreed procedures on follow-up to the Board of Commissioners' responses and suggestions at PTPI that are strategic and measurable for the 2024 fiscal year. 6. Carry out agreed procedures on the Information Package and Corporate Structure for the Ministry of State-Owned Enterprises within the scope of AUP. 7. Submit the Group Reporting to the Indonesian Audit Board (SA 600).
Biaya Fees	Rp21.200.000.000 (Diluar PPN | Exclude VAT)

Lembaga dan Profesional Penunjang
Supporting Institutions and Professions

Nama Name	**Alamat** Address	**Jenis dan Bentuk Jasa** Types and Forms of Services	**Biaya (%)** Cost (%)	**Penugasan** Assignment Period
Bank Mega	Menara Bank Mega, Lt. 16 Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12970 Indonesia Tel.: +62 21 7917 5000 Fax.: +62 21 799 0720 waliamanat@bankmega.com www.bankmega.com	Wali Amanat Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Trustee of Issuance Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,003	2020–2027
Mandiri Sekuritas	Plaza Mandiri, Lt. 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36–38 Jakarta 12190 Indonesia Tel.: +62 21 526 3445 Fax.: +62 21 526 3507 corsec@mandirisek.co.id MS_Prambanan@mandirisek.co.id www.mandirisekuritas.co.id	Underwriter Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of Shelf Registration Bonds II Phase II Issuance in 2021	0,032	2021
Danareksa Sekuritas	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Indonesia Tel.: +62 21 2955 5777/888 Fax.: +62 21 350 1724/25 cs@danareksa.co.id callcenter@danareksa.co.id www.danareksasekuritas.co.id	Underwriter Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of Shelf Registration Bonds II Phase II Issuance in 2021	0,032	2021
BCA Sekuritas	Menara BCA-Grand Indonesia, Lt. 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia Tel.: +62 21 2358 7222 Fax.: +62 21 2358 7290/7250/7300 halo@bcasekuritas.co.id cf@bcasekuritas.co.id www.bcasekuritas.co.id	Underwriter Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of Shelf Registration Bonds II Phase II Issuance in 2021	0,032	2021
BNI Sekuritas	Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78 Jakarta 12910 Indonesia Tel.: +62 21 2554 3946 Fax.: +62 21 5793 6934 customercare@ bnisekuritas.co.id www.bnisekuritas.co.id	Underwriter Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of Shelf Registration Bonds II Phase II Issuance in 2021	0,032	2021
KAP Maksum, Suyamto, dan H	Jl. Kaji No. 2B-5 Petojo Utara Jakarta 10130 Indonesia Tel.: +62 21 632 6436; 6385 2854 Fax: +62 21 632 6371 kap_hms@yahoo.com	Audit Penjatahan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Audit of Allotment Issuance Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,002	2021

Nama Name	**Alamat** Address	**Jenis dan Bentuk Jasa** Types and Forms of Services	**Biaya (%)** Cost (%)	**Penugasan** Assignment Period
Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office	South Tower, Lt. 24 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Sampoerna Strategic Square, Jakarta 12930 Indonesia Tel.: +62 21 577 0108 mmik_mmco@mmiklaw.co.id www.mmiklaw.co.id	Konsultan Hukum Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Legal Consultant for Issuance Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,015	2021
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito	Jl. Panglima Polim V No. 11 RT 1/RW 6 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia Tel.: +62 21 724 4650; 739 2801; 720 9542 Fax.: +62 21 726 5090 poerbaningsih@yahoo.com	Notaris Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Notary Issuance of Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2021	0,002	2021
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Equity Tower 30th Floor Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel.: +62 21 509 684 69 Fax.: +62 21 509 648 68 www.pefindo.com	Lembaga Pemeringkat Penerbitan Obligasi Rating Agency for the Issuance of Shelf Registration Bonds	0,002	2024-2026
Kustodian Sentral Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53 Jakarta 12190 Indonesia Tel.: +62 21 515 2855 Fax.: +62 21 5299 1199 Bebas Pulsa +62 800 186 5734 helpdesk@ksei.co.id www.ksei.co.id	Kustodian Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Bentuk Jasa: Pencatatan Obligasi Bond Issuance Custodian Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2021 Form of Service: Bond Listing	0,00003	2021
Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53 Jakarta 12190 Indonesia Tel.: +62 21 515 2855 Fax.: +62 21 52991199 Bebas Pulsa +62 800 186 5734	Pencatatan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Bentuk Jasa: Pencatatan Obligasi Listing of Issuance Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2021 Form of Service: Listing Bonds	0,0057	2021

Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, serta Informasi tentang Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

List of Addresses of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, as well as Information on Branch Offices and Representative Offices

Alamat Entitas Anak Kepemilikan Langsung
Address of Direct Ownership Subsidiaries

PT Petrokimia Gresik
Jl. Jend. A. Yani, Gresik 61119,
Jawa Timur, Indonesia
Tel.: +62 31 398 1811; 398 2100; 398 2200
Fax.: +62 31 398 1722; 398 2272
E-mail: pg@petrokimia-gresik.com
Web: www.petrokimia-gresik.com

PT Pupuk Kujang
Jl. Jend. A. Yani No. 39
Kec. Cikampek, Kab. Karawang 41373,
Jawa Barat, Indonesia
Tel.: +62 264 316 141; 317 007
Fax.: +62 264 314 235
E-mail: info@pupuk-kujang.co.id
Web: www.pupuk-kujang.co.id

PT Pupuk Kalimantan Timur
Jl. Ir. James Simandjuntak No. 1,
Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara,
Bontang 75313 Kalimantan Timur,
Indonesia
Tel.: +62 548 41202
Fax.: +62 548 41626
E-mail: dof@pupukkaltim.com
Web: www.pupukkaltim.com

PT Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan-Banda Aceh,
Kec. Dewantara,
Kab. Aceh Utara,
Aceh, Indonesia
Tel.: +62 645 56222.
Fax.: +62 645 56095.
E-mail: info@pim.co.id

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Jl. Mayor Zen,
Palembang 30118
Indonesia
Tel.: +62 711 712 222
Fax.: +62 711 712 100
E-mail: info@pusri.co.id;
humas@pusri.co.id
Web: www.pusri.co.id

PT Rekayasa Industri
Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata,
Jakarta 12740 Indonesia
Tel.: +62 21 798 8700; 798 8707
Fax.: +62 21 798 8701; 798 8702
E-mail: corpsec@rekayasa.co.id.
Web: www.rekayasa.com

PT Pupuk Indonesia Niaga
Gedung ROB-2 Lt. 3 & 4
Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata,
Jakarta 12740 Indonesia
Tel.: +62 21 7919 6026; 7919 6027
E-mail: corcom@pi-niaga.com
Web: www.pi-niaga.com

PT Pupuk Indonesia Logistik
Gedung Wisma Pusri 101
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 101 RT/RW. 2/1
Tomang, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta 11440 Indonesia
Tel.: +62 21 2263 1881; 2263 1882; 2263 1883
Fax.: +62 21 2256 1904
E-mail: info@pi-logistik.com;
marketing@pi-logistik.com
Web: www.pi-logistik.com

PT Pupuk Indonesia Pangan
Jl. Raya Rawamerta,
Dusun Sukamanah RT/RW. 006/003
Desa Kutawargi,
Kec. Rawamerta,
Karawang 41382 Indonesia
Tel.: +62 267 606 4389
Fax.: +62 267 606 4556
E-mail: pemasaran@pi-pangan.com
Web: www.pi-pangan.com

Alamat Entitas Anak Kepemilikan Tidak Langsung
Address of Indirect Ownership Subsidiaries

PT Petrosida Gresik
Jl. KIG Raya Utara Kav. O No. 5
Kawasan Industri Gresik (KIG),
Gresik 61151 Jawa Timur, Indonesia
Tel.: +62 31 398 1553,; 398 5541-42,; 398 5594
Fax: +62 31 398 1653
E-mail: corporate@petrosida-gresik.com
Web: www.petrosida-gresik.com

PT Petrokimia Kayaku
Jl. Jendral Ahmad Yani PO Box 107
Gresik, 61119 Jawa Timur, Indonesia
Tel.: +62 31 398 1815/1831/1989
Fax: +62 31 398 1830
E-mail: info@petrokayaku.com
Web: m.petrokayaku.com

PT Kawasan Industri Kujang Cikampek
Kawasan Industri Kujang Cikampek,
Jl. Jend. A. Yani No. 39 Cikampek,
Jawa Barat, Indonesia
Tel.: +62 264 313113
Fax: +62 264 313114
E-mail: info@kikc.co.id
Web: www.kikc.co.id

PT Sintas Kurama Perdana
Kawasan Industri Kujang Cikampek,
Jl. Jend. A. Yani No. 39 Kalihurip,
Cikampek, Jawa Barat 41373 Indonesia
Tel.: +62 264 313392
Fax: +62 264 313043
E-mail: sales@sintas90.co.id
Web: www.sintas90.co.id

PT Kaltim Industrial Estate
Wisma KIE, Lt. 3 Kawasan Industri Bontang,
Jl. Paku Aji Kav. 79
Bontang 75313
Kalimantan Timur, Indonesia
Tel.: +62 548 41368
E-mail: contact@kie.co.id

PT Pusri Agro Lestari
Kawasan Industri Karawang Sukses Makmur,
Dusun Sukamaju, Desa Telukjambe,
Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang,
Jawa Barat-41361
E-mail: pusriagrolestari@gmail.com
Web: www.pusriagro.co.id

PT PIM Prima Medika
Jl. Singgalang No. 1 PIM Housing
Komp. Tambon Tunong, Dewantara,
Kab. Aceh Utara, Aceh, Indonesia
Tel.: +62 822 7262 8796
E-mail: info@ptprime.id;
info@ptprime.id; rspim@ptprime.id

PT Rekind Daya Mamuju
Jl. MT. Haryono No. 8 Tebet
Jakarta 12820 Indonesia
Tel.: +62 21 837 89152,; 837 85961,; 837 87760
Fax: +62 21 830 7578

PT Puspetindo
Gedung Gresik Migas Tower Lt. 2
Jl. Dr. Wahidin S.H. No. 708
Kembangan, Kebomas, Gresik,
Jawa Timur 61124 Indonesia
Tel.: +62 31 99103048
E-mail: info@puspetindo.com
Web: www.puspetindo.com

PT Yasa Industri Nusantara
Jl. Kalibata Timur No. 36 RT/RW. 2/8
Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Indonesia
Tel.: +62 21 79187800
Fax: +62 21 7942030

PT Tracon Industri
Jl. Kalibata Timur No. 27 RT/RW. 2/8
Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Jakarta 12740 Indonesia
Tel.: +62 21 7974367
Fax: +62 21 79180907

PT Rekayasa Engineering
Jl. Kalibata Timur No. 27 RT/RW. 2/8
Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Indonesia
Tel.: +62 21 79181180
Fax: +62 21 7940984
E-mail: marketing@re.rekayasa.co.id
Web: www.rekayasaengineering.co.id

Rekind Malaysia Sdn. Bhd.
Suite 9-2 Lt. 9, Wisma UOA II, No. 21
Jl. Pinang 50450
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel.: +60 3 21815251

PT Sigma Utama
Jl. Lanbau No. 1
Karang Asem Barat, Citeureup,
Kab. Bogor 16810
Jawa Barat, Indonesia
Tel.: +62 21 8756310
Fax: +62 21 8753042
Web: sigmautama.com

PT Pupuk Indonesia Utilitas
Alamanda Tower Lt. 26
Jl. TB Simatupang No. 22-26 RT/RW. 1/1
Cilandak Barat, Kec. Cilandak,
Jakarta 12430 Indonesia
Tel.: +62 21 2966 1628; 2966 1629; 2966 1630; 2966 1631
Fax.: +62 21 345 2609
E-mail: info@pi-energi.com
Web: www.pi-energi.com

PT Kaltim Jasa Sekuriti
Wisma KIE Lt. Dasar, Jl. Paku Aji Kav. 79
Kawasan Industri Bontang, Bontang,
Kalimantan Timur, Indonesia
Tel.: +62 548 41101
Fax: +62 548 41104

PT Kaltim Adhiguna Dermaga
Jl. Paku Aji Kav. 79 Wisma KIE Lt. 1
Guntung, Bontang Utara, Bontang,
Kalimantan Timur, Indonesia
E-mail: kaltim.adhiguna@gmail.com;
kaltimadhiguna@kad.co.id
Web: kad.co.id

PT Rekayasa Cakrawala Resources
Jl. Kalibata Timur I No. 36
Jakarta Selatan 12740 Indonesia
Tel.: +62 21 79181180 Ext. 5511/12/14
Fax: +62 21 79196204
E-mail: marketing@recare.rekayasa.co.id,;
recruitment@recare. rekayasa.co.id,;
designschool@recare.rekayasa.co.id
Web: recare.rekayasa.com

PT Recon Sarana Utama
Jl. Kalibata Timur II No. 27 RT/RW. 002/08
Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Indonesia
Web: recon.co.id

PT Tracon Industri Solusindo
Graha Gabah Pertani Lt. 1
Jl. Raya Pasar Minggu No. 1
Jakarta Selatan 12760 Indonesia
Tel.: +62 21 7974367,; +62 21 79180907
E-mail: bisnis@tracon.rekayasa.co.id;
sales@tracon.rekayasa.co.id (Supply Chain)
Web: tracon.co.id

Alamat Entitas Asosiasi
Address of Associated Entity

PT Petronika
Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin,
Tlogopojok Kec. Manyar, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61151 Indonesia
Tel.: +62 31 395 1956
E-mail: petronika@telkom.net
Web: www.panditaindustries.com

PT Multi Nitrotama Kimia
Equity Tower Lt. 41 Suite E
Sudirman Central Business Disctrict (SCBD),
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9
Jakarta 12190 Indonesia
Tel.: +62 21 29035022 (Hunting)
Fax: +62 21 29035021

PT Clariant Kujang Catalyst
Kawasan Industri Kujang Cikampek,
Jl. Jend. A. Yani No. 39
Kalihurip, Cikampek,
Jawa Barat 41373 Indonesia
Tel.: +62 21 83701020,; 83701719
Fax: +62 21 83700410
E-mail: info@kikc.co.id
Web: www.kikc.co.id

PT Peroksida Indonesia Pratama
Kawasan Industri Kujang Cikampek,
Jl. Jend. A. Yani No. 39 Kalihurip,
Cikampek, Jawa Barat 41373
Indonesia
Tel.: +62 264 313383; 313387
Fax: +62 264 313386
E-mail: info@ptpip.co.id
Web: www.ptpip.co.id

PT Kaltim Amonium Nitrat
Menara MTH,
Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 23,
RT/RW. 11/5 Tebet Barat, Kec. Tebet,
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810

PT Aneka Jasa Grhadika
Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 122,
Jarangkuwung, Ngipik, Kec. Gresik,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61119
Indonesia
Tel.: +62 31 3954726
E-mail: info@ajg.co.id
Web: www.ajg.co.id

PT Petrokopindo Cipta Selaras
Jl. Raya Romo 242,
Maduran, Roomo,
Gresik, Indonesia
Tel.: +62 31 3984194
E-mail: admin@petrokopindo.com
Web: petrokopindo.com

Hotel Bintang Sintuk
Jl. Urea, Komplek Lapangan Golf
PT Pupuk Kaltim, Bontang,
Kalimantan Timur, Indonesia
Tel.: +62 21 548 26268,; 392 2566
E-mail: reservation@hotelbintangsintuk.com
Web: hotelbintangsintuk.com

Alamat Ventura Bersama
Address of Joint Venture

PT Petro Jordan Abadi
Jl. Raya Roomo, Manyar
Gresik, Jawa Timur 61151
Indonesia
Tel.: +62 31 399 1887
E-mail: admin@pja-gresik.com
Web: pja-gresik.com

PT Kalimantan Agro Nusantara
Komplek Thomas Square C-5
Jl. Yos Sudarso II No. 17
Kec. Sengata Utara,
Kab. Kutai Timur, Indonesia
Tel.: +62 549 2027833

PT Kaltim Jordan Abadi
Wisma KIE Lt. 2
Jl. Ammonia Kav. 79 Bontang 75314
Kalimantan Timur, Indonesia
E-mail: contact@kja-bontang.com
Web: kaltimjordanabadi.com

PT Pupuk Agro Nusantara
Jl. Pulau Saparua II, Blok C3,
Kawasan Industri Medan III,
Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan,
Kota Medan

Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company Website



Sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dalam upaya membentuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PTPI menyediakan informasi kepada stakeholders yang salah satunya dapat diakses setiap saat oleh semua pihak melalui situs web yang beralamat di www.pupuk-indonesia.com.

Semua informasi yang disajikan diperbarui secara berkala untuk memberikan informasi yang aktual dan terkini bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Situs resmi Perusahaan menyajikan Informasi dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2015, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

As part of the principle of transparency in efforts to establish Good Corporate Governance, PTPI provides information to stakeholders, one of which can be accessed at any time by all parties through the website located at www.pupuk-indonesia.com.

All information presented is regularly updated to provide current and up-to-date information for all stakeholders and the general public.

The Company's official website presents information in two languages, namely Indonesian and English, and has fulfilled the mandatory information requirements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies, which was determined on June 25, 2015, including:

1. General Information of Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors;
3. Corporate Governance Information;
4. Corporate Social Responsibility Information.

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Link
Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik General Information of Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/
Riwayat Singkat Emiten atau Perusahaan Publik Brief History of the Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor
Struktur Organisasi Emiten atau Perusahaan Publik Organizational Structure of the Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/profile/our-leadership
Struktur Kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik Ownership Structure of Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor
Struktur Grup Emiten atau Perusahaan Publik Group Structure of Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Sekretaris Perusahaan Profile of Board of Directors, Board of Commissioners, Committee, Corporate Secretary	√	https://www.pupuk-indonesia.com/profile/ourleadership https://www.pupuk-indonesia.com/investor/keterbukaan
Lembaga Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor
Dokumen Anggaran Dasar Articles of Association	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/keterbukaan
Informasi bagi Pemodal atau Investor information for Investors	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/keuangan_kinerja
Prospektus Penawaran Umum Public Offering Prospectus	√	https://www.pupuk-indonesia.com/storage/656/6375a3a2e8cc6_62d14cf3dbfb8_Pupuk-Indonesia-Prospektus.pdf
Laporan Tahunan untuk Periode 5 (lima) Tahun Buku Terakhir Annual Report for the Period of the Last 5 (five) Financial Years	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/annual-report
Laporan Keuangan Tahunan (3 tahun terakhir) Annual Financial Statement (last 3 years)	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/keuangan_kinerja
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting, yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), at least includes the material of the agenda discussed in the GMS, summary of the minutes of the GMS, and information on important date, namely the date of the announcement of the GMS, date of the invitation to the GMS, date of the GMS, date of the summary of the minutes of the GMS summary of the minutes of the GMS announced	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/keterbukaan
Informasi Obligasi Bond Information	√	https://www.pupuk-indonesia.com/investor
Informasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Information	√	https://gcg.pupuk-indonesia.com/
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, KomiteKomite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	√	https://gcg.pupuk-indonesia.com/
Isi Kode Etik Content of Code of Conduct	√	https://gcg.pupuk-indonesia.com/
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility	√	https://www.pupuk-indonesia.com/sustainability/regulation-tjsl



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis



Dedikasi untuk Ketahanan Pangan yang Pasti dan Berkelanjutan

Dedication to Secure and Sustainable Food Security

Para Karyawan PTPI dilaboratorium, berdedikasi untuk melayani, memberikan produk yang terukur, agar mampu diwujudkan menjadi niat baik. PTPI menjadikan prinsip Terukur sebagai landasan dalam setiap proses dan inovasi. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, Perusahaan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak nyata, akurat, dan berkelanjutan bagi sektor pertanian nasional.

PTPI employees in the laboratory, dedicated to serve, provide measurable products, so that can be realized into good intentions. PTPI makes the Measurable principle a cornerstone in every process and innovation. With a systematic and data-driven approach, the Company ensures that every step taken has a real, accurate and sustainable impact on the national agricultural sector.

Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industry Overview



KONDISI EKONOMI

Kondisi perekonomian tahun 2024, menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi dunia masih mengalami dampak dari ketidakpastian akibat geopolitik, tekanan inflasi yang belum mereda. Perang timur tengah, Konflik Rusia-Ukraina, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi global berdasarkan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank mencapai 2,5% hingga 3,2%. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global ini salah satunya disebabkan oleh investasi yang tertahan, serta rantai pasokan global yang masih terganggu akibat ketegangan geopolitik.

Selain itu, inflasi tetap menjadi tantangan utama bagi beberapa negara sepanjang tahun 2024. Bank-bank sentral di berbagai negara mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi untuk meredam inflasi, tetapi kebijakan ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pada negara berkembang, tekanan inflasi semakin diperburuk dengan volatilitas nilai tukar mata uang dan tingginya biaya impor bahan baku.

ECONOMIC CONDITIONS

The year 2024 proved intensely challenging for both the global and Indonesian economies. The world economy continues to grapple with uncertainty stemming from geopolitical tensions and stubborn inflationary pressures. The Middle East conflict and Russia-Ukraine war remain key factors dampening global economic growth.

According to International Monetary Fund (IMF) and World Bank estimates, global economic growth reached only 2.5% to 3.2% - significantly lower than pre-pandemic levels. This slowdown reflects constrained investment activity and ongoing disruptions to global supply chains caused by geopolitical instability.

Inflation persisted as a primary challenge throughout 2024. Central banks worldwide maintained high interest rate policies to curb inflation, though these measures simultaneously restrained economic growth and investment. Developing nations faced compounded pressures from currency volatility and soaring costs of imported raw materials.

Meskipun telah menjadi tahun yang penuh tantangan, beberapa negara mulai menerapkan strategi untuk meningkatkan ketahan ekonomi mereka. Melalui diversifikasi ekonomi, investasi dalam infrastruktur hijau, serta penguatan kebijakan perdagangan telah menjadi langkah utama yang diambil untuk mengantisipasi ketidakpastian global. Dengan pendekatan yang tepat, perekonomian global dapat kembali tumbuh secara stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

Despite a challenging year, many nations have implemented strategies to bolster economic resilience. Key measures include economic diversification, green infrastructure investments, and strengthened trade policies to mitigate global uncertainties. With appropriate approaches, the global economy can achieve stable and sustainable growth moving forward.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbuka, termasuk yang merasakan dampak dari dinamika ekonomi global. Perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat berpengaruh pada kinerja ekspor, terutama pada sektor komoditas seperti batu bara, dan minyak kelapa sawit.

As a developing economy with open markets, Indonesia has felt the impact of global economic dynamics. Slowed growth in key trading partners – China, Japan, and the United States – has particularly affected export performance, especially in commodity sectors like coal and palm oil.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional masih menunjukkan ketahan yang cukup baik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 berada diangka 5,02% (YoY). Hal ini disebabkan oleh konsumsi domestik yang masih kuat. Selain itu, daya beli masyarakat dan peningkatan investasi di sektor industri dan infrastruktur yang masih tetap stabil, meskipun mengalami tekanan dari kenaikan harga barang dan jasa.

Nevertheless, Indonesia's economy demonstrated solid resilience. Central Statistics Agency (BPS) data shows 5.02% YoY GDP growth in 2024, driven by robust domestic consumption. Household purchasing power and steady industrial/infrastructure investments remained stable despite goods/services price pressures.

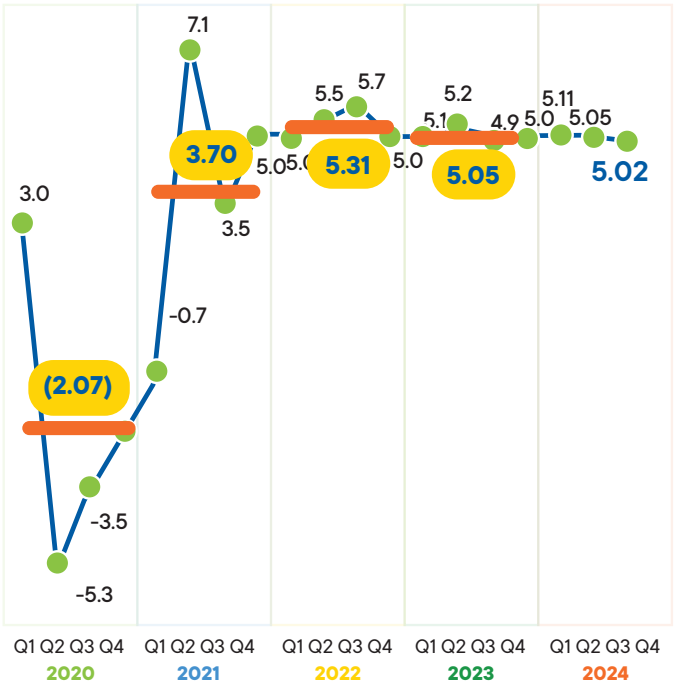
Tantangan terbesar bagi ekonomi Indonesia adalah tekanan inflasi yang masih tinggi. Suku bunga yang dipertahankan oleh The Fed (Bank Sentral AS) menyebabkan aliran modal asing lebih cenderung berinvestasi pada aset berbasis dollar, sehingga memberikan pengaruh pada stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati untuk mengendalikan inflasi, serta memastikan likuiditas tetap cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

The primary challenge remains elevated inflation. The US Federal Reserve's maintained interest rates have diverted foreign capital to dollar-denominated assets, impacting rupiah stability. Bank Indonesia maintains prudent monetary policies to control inflation while ensuring adequate liquidity for economic growth.

Meskipun dihadapkan oleh beberapa tantangan eksternal, prospek ekonomi Indonesia tetap pada kondisi yang optimis, dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat, dukungan dari kebijakan ekonomi yang adaptif dan sektor-sektor yang masih tumbuh positif. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan dan memperkuat daya saing ekonomi di masa depan.

Despite external headwinds, Indonesia's economic prospects remain optimistic, supported by strong fundamentals, adaptive policies, and positively growing sectors. The nation retains significant potential for sustainable growth and enhanced future competitiveness.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesian Economic growth



KONDISI INDUSTRI PUPUK

Industri pupuk pada tahun 2024 menghadapi sejumlah tantangan dan beberapa peluang yang signifikan, dengan perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan lingkungan. Sebagai sektor vital yang mendukung ketahanan pangan global, kondisi industri pupuk saat ini mencerminkan dinamika pasar yang semakin kompleks.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri pupuk, pemerintah di banyak negara mulai memberlakukan standar emisi yang lebih ketat dan mendorong adopsi teknologi yang ramah lingkungan dalam produksi pupuk.

Selain itu, kebijakan pemerintah diberbagai negara, khususnya negara berkembang masih memainkan peran yang besar dalam menjaga harga pupuk tetap terjangkau melalui subsidi. Namun, tantangan dalam alokasi subsidi yang tepat sasaran tetap menjadi isu besar, dengan beberapa pihak menilai subsidi tidak selalu sampai kepada petani yang membutuhkan.

Industri pupuk Indonesia juga menunjukkan arah yang positif, seiring dengan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, permintaan akan pupuk tetap tinggi, terutama untuk mendukung produksi padi, jagung, kedelai, serta komoditas lainnya.

CONDITION OF THE FERTILIZER INDUSTRY

The fertilizer industry in 2024 faces a number of significant challenges and opportunities, with developments influenced by various economic, political, and environmental factors. As a vital sector supporting global food security, the current state of the fertilizer industry reflects increasingly complex market dynamics.

Along with technological advancements and innovation in the fertilizer industry, governments in many countries are beginning to impose stricter emission standards and encourage the adoption of environmentally friendly technologies in fertilizer production.

Furthermore, government policies in various countries, especially developing nations, still play a significant role in keeping fertilizer prices affordable through subsidies. However, challenges in accurately targeting subsidy allocation remain a major issue, with some parties suggesting that subsidies do not always reach the farmers who need them.

Indonesia's fertilizer industry also shows a positive direction, in line with efforts to continuously enhance food security. As the agricultural sector remains the backbone of Indonesia's economy, demand for fertilizer remains high, especially to support the production of rice, corn, soybeans, and other commodities.

PTPI, sebagai salah satu produsen pupuk terbesar di Indonesia, berperan dalam memenuhi kebutuhan pupuk yang sangat vital bagi petani. PTPI berupaya menjaga kestabilan harga di pasar domestik melalui efisiensi produksi dan distribusi. Keberlanjutan pasokan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi, tetap menjadi fokus utama perusahaan untuk mendukung produktivitas pertanian, sekaligus menjaga daya beli petani. Meskipun harga bahan baku seperti gas alam dan fosfat masih terpengaruh oleh fluktuasi harga global.

Secara finansial, PTPI terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil di tahun 2024. Pendapatan dari penjualan pupuk bersubsidi dan non-subsidi, serta peningkatan efisiensi operasional, berkontribusi pada kinerja keuangan yang solid. Perusahaan ini juga mulai mengeksplorasi pasar ekspor untuk produk pupuk non-subsidi, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pupuk yang lebih ramah lingkungan.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2024

Tahun 2024, merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi PTPI ditengah dinamika ekonomi global, serta kebutuhan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam menghadapi beragam tantangan tersebut, Perseroan telah merumuskan berbagai kebijakan dan strategi bisnis terintegrasi, dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi produk, serta penguatan keberlanjutan lingkungan. Strategi-strategi ini mencakup aspek-aspek dari produksi, pemasaran, hingga keuangan yang akan mengarahkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan relevan dalam menghadapi perubahan. Adapun strategi tersebut diantanya:

1. Strategi Produksi, Perusahaan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini dilakukan melalui penerapan teknologi canggih dan perawatan fasilitas produksi yang lebih baik.
2. Strategi Pemasaran, perusahaan memperkuat sistem distribusi melalui digitalisasi yang lebih terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi pupuk yang lebih transparan dan efisien.
3. Strategi keuangan, Perusahaan terus mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, termasuk fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar.
4. Strategi SDM, Perusahaan menaruh perhatian pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk tetap relevan dengan perkembangan industri. Pelatihan dan pengembangan berbasis teknologi, termasuk pelatihan untuk penggunaan alat dan sistem digital terbaru dalam proses produksi dan distribusi, menjadi salah satu fokus utama perusahaan.

PTPI, as one of Indonesia's largest fertilizer producers, plays a crucial role in meeting the vital fertilizer needs of farmers. PTPI strives to maintain price stability in the domestic market through production and distribution efficiency. The continuity of fertilizer supply, particularly subsidized fertilizers, remains the company's primary focus to support agricultural productivity while maintaining farmers' purchasing power. This is despite raw material prices, such as natural gas and phosphate, still being affected by global price fluctuations.

Financially, PTPI continues to show stable growth in 2024. Revenue from the sale of both subsidized and non-subsidized fertilizers, along with increased operational efficiency, contributes to solid financial performance. The company is also beginning to explore export markets for non-subsidized fertilizer products, in line with increasing demand for more environmentally friendly fertilizer products.

BUSINESS POLICY AND STRATEGY 2024

2024 presented both challenges and opportunities for PTPI amidst global economic dynamics and national food security needs, prompting the Company to develop integrated business strategies focused on operational efficiency, product diversification, and environmental sustainability to maintain competitiveness across production, marketing, and financial aspects. The strategies include:

1. Production Strategy: The Company enhances production efficiency through implementation of advanced technologies and improved production facility maintenance.
2. Marketing Strategy: We strengthen distribution systems via more integrated digitalization to ensure more transparent and efficient fertilizer distribution.
3. Financial Strategy: The Company continues implementing more efficient financial management policies to address economic uncertainties, including raw material price fluctuations and exchange rate volatility.
4. Human Capital Strategy: We prioritize Human Capital competency development to maintain industry relevance, with technology-based training programs - particularly on digital tools and systems for production and distribution processes - as a key focus area.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Review of Operations by Business Segment

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI" atau "Perusahaan") membagi segmen usahanya dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi yang tercatat dalam Laporan Keuangan teraudit. Informasi segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI" or "Company") divides its business segments by referring to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 concerning Operational Segments recorded in the audited Financial Statements. Operating segment information is reported consistently with internal reporting provided to key operating decision makers. The main operational decision maker responsible for allocating resources and assessing the performance of operating segments, as well as making strategic decisions is the Board of Directors.

Sesuai dengan kebijakan tersebut, segmen usaha PTPI sesuai dengan produk dan jasa yang dihasilkan, mencakup 3 (tiga) segmen: Segmen Pupuk dan Amoniak, Segmen Jasa Konstruksi, dan Segmen Lain-lain yang disampaikan secara konsolidasi.

In accordance with this policy, PTPI's business segments in accordance with the products and services produced, include 3 (three) segments: Fertilizer and Ammonia Segment, Construction Services Segment, and Other Segments which are presented on a consolidated basis.

Pada tahun 2024, Segmen Pupuk dan Amoniak yang merupakan bisnis inti Perusahaan, merupakan kontributor terbesar terhadap kinerja konsolidasi PTPI. Untuk kinerja penjualan, kontribusi segmen tersebut 99,47% terhadap total penjualan Perusahaan.

In 2024, the Fertilizer and Ammonia Segment, which is the Company's core business, will be the largest contributor to PTPI's consolidated performance. For sales performance, this segment contributed 99.47% to the Company's total sales.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan juga melaksanakan penugasan Pemerintah, yaitu untuk menyalurkan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PI Group atau Perusahaan bersama Entitas Anak.

As a State-Owned Enterprise (SOE), the Company also carries out Government assignments, namely to distribute subsidized fertilizer to the agricultural sector. This activity is carried out by the PI Group or Company together with its Subsidiaries.

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya
Contribution of Business Segments to Sales and Other Operating Income

Segmen Segment	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total **Rp juta** Rp million	**Kontribusi** Contribution **(%)**	**Jumlah** Total **Rp juta** Rp million	**Kontribusi** Contribution **(%)**	**Nominal** **Rp juta** Rp million	**Persentase** Percentage **(%)**
Pupuk dan Amoniak Fertilizer and Ammonia	81.181.882	99,47	78.937.710	99,66	2.244.172	2,84
Jasa Konstruksi Construction Services	4.376.461	5,36	2.225.789	2,81	2.150.672	96,63
Lain-lain Others	5.699.904	6,98	13.376.279	16,89	(7.676.375)	(57,39)
Eliminasi Elimination	(9.642.039)	(11,81)	(15.332.511)	(19,36)	5.690.472	(37,11)
Pendapatan Usaha Bersih Net Revenue	81.616.208	100,00	79.207.267	100,00	2.408.941	3,04

* Terdiri dari pupuk dan non pupuk
Consists of fertilizer and non-fertilizer

Proporsi Penjualan Produk dan Subsidi Terhadap Total Pendapatan
Proportion of Product Sales and Subsidies to Total Revenue

Segmen Segment	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total Rp juta Rp million	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total Rp juta Rp million	Kontribusi Contribution (%)	Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Penjualan Segmen Pupuk dan Amoniak serta Segmen Lain-lain Sales of Fertilizer and Ammonia Segment and Other Segments						
Penjualan Produk* Sales of Products	44.202.966	54,16	44.221.081	55,83	(18.115)	(0,04)
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Subsidy Reimbursement by the Indonesian Government	33.323.915	40,83	32.512.230	41,05	811.685	2,50
Pendapatan Jasa Rendering of Services	4.089.327	5,01	2.473.956	3,12	1.615.371	65,30
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Revenue from Contract with Customers	81.616.208	100,00	79.207.267	100,00	2.408.941	3,04

* Terdiri dari pupuk dan non pupuk
Consists of fertilizer and non-fertilizer

SEGMEN PUPUK DAN AMONIAK

Segmen Pupuk dan Amoniak merupakan bisnis inti PTPI. Segmen ini memiliki kegiatan produksi dan perdagangan produk pupuk dan non-pupuk/amoniak yang ditopang oleh kelompok usaha. Adapun produk yang dihasilkan pada segmen ini adalah Pupuk Urea, NPK, Fosfat,, ZA, dan ZK, serta produk non pupuk berupa amoniak.

FERTILIZER AND AMMONIA SEGMENT

The Fertilizer and Ammonia segment is PTPI's core business. This segment has production and trading activities for fertilizer and non-fertilizer/ammonia products which are supported by the business group. The products produced in this segment are Urea, NPK, SP-36, ZA and ZK fertilizers, as well as non-fertilizer products in the form of ammonia.

Produk Pupuk dan Amoniak Produksi PI Grup
PI Group Fertilizer and Ammonia Products

No.	Produk Product	Uraian Description
1	Urea	Pupuk dengan kandungan Nitrogen (N) sebesar 46% yang dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi (komersil). Pupuk Urea memiliki fungsi membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kandungan protein tanaman. Fertilizer with a Nitrogen (N) content of 46% is marketed for the subsidized and non-subsidized (commercial) sectors. Urea fertilizer has the function of making plants greener, accelerating plant growth and increasing plant protein content.
2	NPK	Merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan Nitrogen (N), Phospat (P), Kalium (K) dan unsur mikro dengan komposisi yang variatif disesuaikan dengan permintaan pasar. Pupuk NPK dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi. Pupuk NPK memiliki fungsi dapat meningkatkan hasil panen, membuat tanaman lebih hijau dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit dan kekeringan. It is a compound fertilizer that contains Nitrogen (N), Phosphate (P), Potassium (K) and micro elements with a varied composition tailored to market demand. NPK fertilizers are marketed for both subsidized and nonsubsidized sectors. NPK fertilizers have the function of increasing crop yields, making plants greener and increasing plant resistance to pests and drought.
3	Pupuk Organik Organic Fertilizer	Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan menyuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pupuk Organik diproduksi oleh Entitas Anak Produsen Pupuk ini dipasarkan untuk sektor subsidi. Organic fertilizer is a type of fertilizer made entirely or partially from plant or animal materials that have been processed. It can be found in solid or liquid form and is used to supply organic matter that improves the soil's physical, chemical, and biological properties. Organic fertilizers produced by Subsidiary fertilizer producers are distributed to the subsidized sector.
4	Fosfat Phosphate	Merupakan pupuk yang dipasarkan untuk sektor subsidi maupun nonsubsidi. Pupuk Fosfat terdiri dari SP-36 (P36%), SP26 (P26%) dan Phosgreen (P20%) berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan bunga serta masaknya buah dan biji. It is a fertilizer marketed for both subsidized and unsubsidized sectors. Phosphate Fertilizers consist of SP-36 (P36%), SP26 (P26%) and Phosgreen (P20%) to spur root and flower growth as well as fruit and seed ripening.
5	ZA	Merupakan pupuk yang dipasarkan untuk sektor non-subsidi. Pupuk ZA memiliki kandungan Nitrogen (N) sebesar 21% dan Sulfur 24% serta berfungsi untuk meningkatkan produksi hasil tebu, meningkatkan kualitas hasil panen, tanaman lebih sehat dan tahan terhadap hama. This is a fertilizer marketed for the non-subsidized sector. ZA fertilizer has a Nitrogen (N) content of 21% and Sulfur 24% and functions to increase sugar cane production, improve the quality of crops, make plants healthier and resistant to pests.
6	ZK	Merupakan pupuk yang memiliki kandungan K2O sebesar 50% dan Sulfur 17% dan berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah, membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, memperbaiki warna, aroma, dan rasa. It is a fertilizer that contains 50% K2O and 17% Sulfur and functions to increase soil nutrients, make plants straighter and stronger, improve color, aroma and taste.
7	Amoniak Ammonia	Merupakan bahan mentah industri kimia dengan kemurnian 99,5% yang dipasarkan untuk sektor dalam negeri maupun ekspor. It is a raw material for the chemical industry with a purity of 99.5% which is marketed for the domestic and export sectors.

Khusus untuk produk pupuk, Perusahaan memiliki 2 (dua) lini bisnis: yaitu pupuk bersubsidi dan non subsidi. Pupuk bersubsidi adalah penugasan dari Pemerintah.

Specifically for fertilizer products, the Company has 2 (two) business lines: namely subsidized and non-subsidized fertilizer. Subsidized fertilizer is an assignment from the Government.

MEKANISME PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI/ PUPUK PSO

PI Group memiliki penugasan untuk mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi atau pupuk Public Service Obligation (PSO). Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

SUBSIDIZED FERTILIZER/PSO FERTILIZER DISTRIBUTION MECHANISM

PI Group has the assignment to distribute and distribute subsidized fertilizers or Public Service Obligation (PSO) fertilizers. This is in accordance with the applicable Minister of Trade Regulation on the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector.

Berdasarkan peraturan tersebut, kewajiban yang diemban Perusahaan diantaranya:

1. Memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini II dan/atau Lini III pada wilayah tanggung jawabnya; Menyediakan, memiliki, atau menguasai sarana pengangkutan Menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan margin dan harga jual di lini IV tidak melebihi HET sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu sesuai dengan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
3. Menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan 3 (tiga) minggu sesuai dengan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada setiap puncak musim tanam;dan Menjamin standar dan mutu Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perusahaan mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional, mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip "6 (enam) Tepat": Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu. Mekanisme dan pola distribusi pupuk bersubsidi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

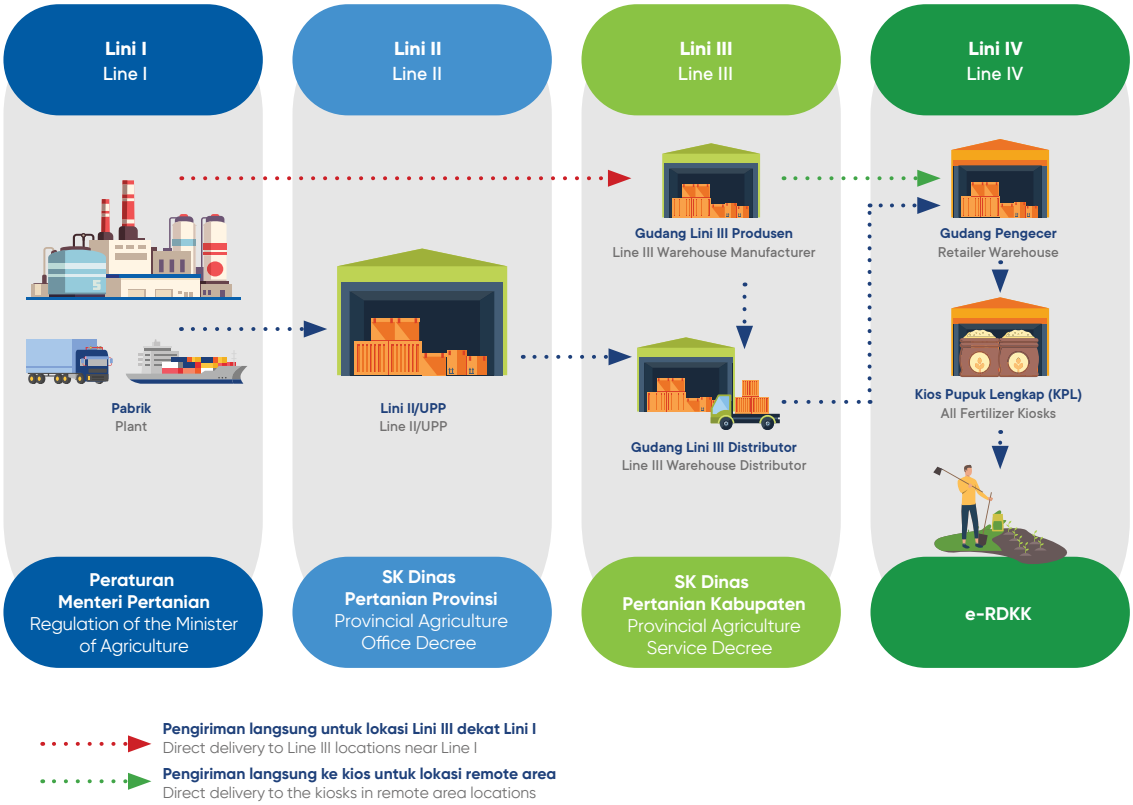
Based on these regulations, the obligations carried out by the Company are:

1. Own and/or control warehouses in Line II and/or Line III in their area of responsibility; Provide, own, or control the means of transportation Sell Subsidized Fertilizers to Distributors at the Line III warehouse at a redemption price taking into account the margin and the selling price in Line IV does not exceed the HET in accordance with statutory provisions;
2. Ensure the availability of Subsidized Fertilizer stock in Line III at least for the needs of 2 (two) weeks in accordance with the allocation of Subsidized Fertilizer stipulated by the minister who organizes government affairs in the field of agriculture;
3. Ensure the availability of Subsidized Fertilizer stock in Line III at least for the needs of 3 (three) weeks in accordance with the allocation of Subsidized Fertilizer stipulated by the minister who organizes government affairs in the field of agriculture at each peak of the planting season; and Ensure the standard and quality of Subsidized Fertilizer in accordance with statutory provisions.

The company regulates the procurement and distribution of domestic subsidized fertilizers for the agricultural sector nationally, from Line I to Line IV in accordance with the "6 (six) Right" principles: Right Type, Quantity, Price, Place, Time and Quality. The mechanism and distribution pattern of subsidized fertilizer can be seen in the chart below.

Mekanisme Pendistribusian dari Lini I-Lini IV Diatur Sesuai Permendag No. 4 Tahun 2023

Distribution Mechanism from Line I to Line IV is Regulated in Accordance MOT Regulation No. 4 of 2023



Sebagai produsen pupuk bersubsidi, Perusahaan wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat dan memiliki/menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III hingga Lini IV. Pengecer/Kios melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani/poktan.

Obliged to ensure the smooth distribution of subsidized fertilizer based on the 6 (six) correct principles and has/controls a warehouse in Line III in its area of responsibility. Distributors distribute subgsidized fertilizer from Line III to Line IV. Retailers/Kiosks distribute subsidized fertilizer to farmers/poktan.

Kuantum moda transportasi PTPI dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PTPI's quantum of transportation modes for the distribution of subsidized fertilizer can be seen in the following table:

Kuantum Moda Transportasi PI GRUP
Transportation Volume by Mode – PI Group

No.	Produsen Manufacturer	Kuantum (ton) Quantity (ton)	Moda Transportasi (ton) Transportation Mode (ton)	
			Angkutan Darat Land Transportation	Angkutan Laut Sea Transportation
1	PT Petrokimia Gresik	3.970.747	3.067.785	902.962
2	PT Pupuk Iskandar Muda	983.348	724.697	258.651
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	2.331.646	818.289	1.513.357
4	PT Pupuk Kujang	866.813	866.813	-
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2.671.911	1.743.261	950.851
	Jumlah Total	**10.824.465**	**7.220.845**	**3.625.820**

FOKUS DAN STRATEGI TAHUN 2024

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pupuk, PTPI terus mengembangkan dan memperkuat segmen pupuk dan amoniak sebagai bisnis inti. Pada tahun 2024, fokus dan strategi yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang, dan mendukung sektor pertanian nasional dalam menghadapi tantangan dan peluang baru. Fokus dan strategi perusahaan di tahun 2024 antara lain:

1. Pengembangan Amurea Papua Barat dengan Kapasitas Amoniak 2.500 MTPD dan Urea 3.500 MTPD dengan tujuan Pengembangan industri pupuk di wilayah timur Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing produk serta monetisasi potensi gas di Papua.
2. Pengembangan Produk Adjacent Chemical, yaitu Soda Ash di PKG dan PKT dengan kapasitas masing-masing 909 TPD (300.000 TPY) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pusri IIIB dengan kapasitas amoniak 1.350 MTPD dan Urea 2.750 MTPD merupakan pengembangan pabrik amurea baru di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam rangka mengganti pabrik lama yang sudah tidak efisien dalam rangka meningkatkan daya saing produk serta monetisasi potensi gas yang cukup besar di Sumatra Selatan.

FOCUS AND STRATEGY FOR 2024

As a company engaged in the fertilizer sector, PTPI continues to develop and strengthen the fertilizer and ammonia segments as its core business. In 2024, the focus and strategies implemented aim to improve efficiency, meet growing market needs, and support the national agricultural sector in facing new challenges and opportunities. The company's focus and strategy in 2024 include:

1. Development of Amurea West Papua with an Ammonia Capacity of 2,500 MTPD and Urea 3,500 MTPD with the aim of developing the fertilizer industry in the eastern region of Indonesia in order to increase product competitiveness and monetize gas potential in Papua.
2. Development of Adjacent Chemical Products, namely Soda Ash at PKG and PKT with a capacity of 909 TPD (300,000 TPY) each, which aims to meet domestic needs.
3. Pusri IIIB with ammonia capacity of 1,350 MTPD and Urea of 2,750 MTPD is the development of a new amurea plant at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in order to replace obsolete inefficient plant to increase product competitiveness and monetize the quite large gas potential in South Sumatra.

4. Revamp Ammonia K-II PKT dengan tujuan penghematan konsumsi gas bumi untuk meningkatkan daya saing Pabrik Kaltim-2 dan menambah profit perusahaan melalui efisiensi pemakaian gas bumi.
5. Ammonium Nitrat PT KAN-PKT kapasitas 75.000 TPY merupakan strategi diversifikasi produk dalam mengembangkan produk adjacent chemical untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
6. Implementasi Digital & Advance Analytics sebagai langkah strategis PTPI untuk membentuk tim digital dan advanced analytics yang inovatif pada level holding sehingga dapat memanfaatkan data analytics dalam proses pengambilan keputusan operasional perusahaan.
7. Penguatan transformasi digital dan inovasi untuk subsidi pupuk melalui rolllout i-Pubers secara nasional.

8. Program Makmur (Agrosolution) 350.000 hektare untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi pertanian untuk komoditas padi, jagung, tebu, sawit, dan kopi.
9. Penjajakan akuisisi tambang potash di luar negeri sebagai upaya PTPI untuk mengamankan pasokan bahan baku NPK khususnya potash bersama dengan BUMN lainnya yang bergerak dalam bidang pertambangan.
10. Streamlining Lini Bisnis PI Group dengan tujuan menghasilkan Portofolio Bisnis yang lebih terstruktur dan menjaga peningkatan/pertumbuhan profit dan penguatan bisnis yang lebih signifikan dari Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi sehingga dapat meningkatkan kontribusi bagi PTPI.
11. Pengembangan Green Industry Cluster dalam rangka mengembangkan kawasan industri hijau dan sebagai upaya melakukan program dekarbonisasi di antaranya melalui pengembangan Blue dan Green Ammonia. Program ini melibatkan BUMN lainnya, *offtaker* serta penyedia teknologi.
12. Reformasi Pupuk Subsidi dalam upaya PTPI bersama dengan K/L terkait untuk melakukan pembenahan tata kelola penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi.

4. Revamp Ammonia K-II PKT with the aim of saving natural gas consumption to increase the competitiveness of the Kaltim-2 Factory and increase company profits through efficient use of natural gas.
5. PT KAN-PKT Ammonium Nitrate with a capacity of 75,000 TPY is a product diversification strategy in developing adjacent chemical products to meet domestic market needs.
6. Implementation of Digital & Advanced Analytics as PTPI's strategic step to form an innovative digital and advanced analytics team at the holding level so that it can utilize analytical data in the company's operational decision making process.
7. Strengthening digital transformation and innovation for fertilizer subsidies through nationwide rollout of i-Pubers.
8. Makmur Program (Agrosolution) 350,000 hectares, to increase agricultural production and productivity through the application of agricultural technology for rice, corn, sugar cane, palm oil, and coffee commodities.
9. Expolarions of potash mining acquisition as PTPI's effort to secure supplies of NPK raw materials, especially potash, together with other state-owned companies engaged in the mining sector.

10. Streamlining PI Group's Business Lines with the aim of producing a more structured Business Portfolio and maintaining increased/growth in profits and more significant business strengthening from Subsidiaries, Subsidiaries and Affiliates so as to increase contributions to PTPI.
11. Development of Green Industry Clusters in order to develop green industrial areas and as an effort to carry out decarbonization programs, including through the development of Blue and Green Ammonia. This program involves other state-owned companies, offtakers and technology providers.
12. Subsidized Fertilizer Reform in PTPI's efforts together with related Ministries/Institutions to improve the governance of the distribution of subsidized fertilizer.

Kinerja Tahun 2024: Aspek Produksi
Performance in 2024: Production Aspects



Kegiatan produksi PI Group untuk Segmen Pupuk dan Amoniak dijalankan oleh Entitas Anak, yaitu: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Pada tahun 2024, realisasi tonase produksi pupuk Urea mencapai 7,68 juta ton, turun 0,20% dibandingkan kinerja tahun 2023 yang sebanyak 7,70 juta ton.

Sedangkan tonase produksi pupuk NPK (termasuk DAP) tahun 2024 tercatat 3,95 juta ton, naik 26,21% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3,13 juta ton.

Realisasi tonase produksi pupuk lainnya pada tahun 2024 mencapai 607,43 ribu ton, turun sebesar 25,49% dibandingkan tahun 2023 sebesar 815,20 ribu ton. Penurunan produksi disebabkan penyesuaian kebijakan penghapusan subsidi pupuk SP-36 dan ZA, serta program revamping pabrik SP-36.

Kinerja produksi amoniak pada tahun 2024 menurun 1,02% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 5,94 juta ton pada tahun 2023 menjadi 5,88 juta ton di tahun 2024.

Production activities are carried out by these five Subsidiaries: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Pupuk Iskandar Muda.

In 2024, the actual production volume of Urea fertilizer stood at 7.68 million tons, representing a slight decrease of 0.20% compared to the 2023 production volume of 7.70 million tons.

Meanwhile, the production volume of NPK fertilizer (including DAP) in 2024 was recorded at 3.95 million tons, marking an increase of 26.21% compared to 3.13 million tons in 2023.

The realized production volume of other fertilizers in 2024 reached 607.43 thousand tons, a decrease of 25.49% compared to 815.20 thousand tons in 2023. This decline was primarily due to policy adjustments, including the removal of subsidies for SP-36 and ZA fertilizers, as well as the revamping program of the SP-36 plant.

Ammonia production performance in 2024 decreased by 1.02% compared to the previous year, namely from 5.94 million tons in 2023 to 5.88 million tons in 2024.

Kinerja Produksi Pupuk dan Amoniak
Fertilizer and Ammonia Production Performance

Keterangan Description	Realisasi 2024 2024 Realization (ton)	Realisasi 2023 2023 Realization (ton)	Target 2024 2024 Target (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%)	Pencapaian Target 2024 2024 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2))	(1/3)
Pupuk Fertilizer					
Urea Urea	7.681.964	7.697.286	7.769.386	(0,20)	98,87
NPK NPK	3.956.361	3.134.663	3.415.658	26,21	115,83
Pupuk Lainnya*) Other Fertilizer*)	607.427	815.204	645.850	(25,49)	94,05
Subtotal Produksi Pupuk Fertilizer Production Subtotal	12.245.751	11.647.154	11.830.894	5,14	103,51
Non-Pupuk Non-Fertilizer					
Amoniak Ammonia	5.881.249	5.941.798	6.031.867	(1,02)	97,50
Non-Amoniak**) Non-Ammonia**)	844.513	1.179.835	630.355	(28,42)	133,97
Subtotal Produksi NonPupuk Subtotal Non-Fertilizer Production	6.725.762	7.121.633	6.662.222	(5,56)	100,95
Produk Samping By-Products					
Subtotal Produksi Produk Samping***) Subtotal of By-Product Production***)	81.004	67.103	64.120	20,72	126,33
Total Produksi Total Production	**19.052.517**	**18.835.889**	**18.557.236**	**1,15**	**102,67**

*) Terdiri dari SP-36, ZA, dan ZK | Consists of SP-36, ZA and ZK
**) Terdiri dari Asam Sulfat dan Asam Fosfat | Consists of Sulfuric Acid and Phosphoric Acid
***) Terdiri dari AlF3, HCl, dan CO_2 | Consists of AlF3, HCl, and CO_2

PI Group menggunakan gas bumi sebagai bahan baku utama dalam produksi pupuk Urea. Gas bumi tersebut juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Perusahaan telah memiliki sejumlah perjanjian pengadaan gas bumi dengan beberapa penyedia sebagai salah satu upaya kesinambungan dalam produksi.

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas:
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Medco Grissik Ltd (20 Desember 2023)
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Joint Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Lematang (20 September 2023)
- PT Petrokimia Gresik dengan Husky CNOOC Madura Ltd (4 Mei 2023)
- PT Petrokimia Gresik dengan PEP Cepu (21 September 2023)
- PT Pupuk Kalimantan Timur dengan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (20 September 2023)

PI Group uses natural gas as the main raw material in the production of Urea fertilizer. This natural gas is also used as an energy source. The company has a number of natural gas procurement agreements with several suppliers to ensure continuous and secure production.

Signing of Gas Sale and Purchase Agreements:
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and Medco Grissik Ltd (December 20, 2023)
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and the Joint Operation of Medco E&P Indonesia and Medco E&P Lematang (September 20, 2023)
- PT Petrokimia Gresik and Husky CNOOC Madura Ltd (May 4, 2023)
- PT Petrokimia Gresik and PEP Cepu (September 21, 2023)
- PT Pupuk Kalimantan Timur and Genting Oil Kasuri Pte Ltd (September 20, 2023)

- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan PHE Jambi Merang (14 Agustus 2024)
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Pertamina EP (21 Juni 2024)
- PT Pupuk Kujang dengan Pertamina EP (21 Juni 2024, 31 Desember 2024)
- PT Pupuk Kujang dengan PT Perusahaan Gas Negara (31 Desember 2024)
- PT Petrokimia Gresik dengan PHE WMO (23 Februari 2024)
- PT Petrokimia Gresik dengan Kris Energi Indonesia (19 Juni 2024)

Penandatanganan MoU Pasokan Gas:

- PT Pupuk Kujang dengan Husky CNOOC Madura Ltd (24 Mei 2024)
- PT Pupuk Iskandar Muda dengan Mubadala Energy (3 Desember 2024)

Gas bumi adalah komponen utama bahan baku sehingga efisiensi konsumsi gas menjadi sangat berpengaruh pada Harga Pokok Produksi (HPP). Capaian kinerja Rasio konsumsi energi tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and PHE Jambi Merang (August 14, 2024)
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and Pertamina EP (June 21, 2024)
- PT Pupuk Kujang and Pertamina EP (June 21, 2024; December 31, 2024)
- PT Pupuk Kujang and PT Perusahaan Gas Negara (December 31, 2024)
- PT Petrokimia Gresik and PHE WMO (February 23, 2024)
- PT Petrokimia Gresik and Kris Energi Indonesia (June 19, 2024)

Signing of Gas Supply Memorandums of Understanding (MoU):

- PT Pupuk Kujang and Husky CNOOC Madura Ltd (May 24, 2024)
- PT Pupuk Iskandar Muda and Mubadala Energy (December 3, 2024)

Natural gas is the main component of raw materials so that the efficiency of gas consumption has a big influence on the Cost of Production (HPP). Energy consumption ratio performance achievements in 2024 are as shown in the following table:

Kinerja Rasio Konsumsi Gas
Gas Consumption Ratio Performance

Keterangan Description	**Realisasi 2024** 2024 Realization **(ton)**	**Realisasi 2023** 2023 Realization **(ton)**	**Target 2024** 2024 Target **(ton)**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease) **(%)**	**Pencapaian Target 2024** 2024 Target Achievement **(%)**
	(1)	**(2)**	**(3)**	**((1-2)/2))**	**(1/3)**
Urea Urea	28,28	28,09	28,05	0,66	100,82
Amoniak Ammonia	36,21	36,09	36,04	0,32	100,44

KINERJA TAHUN 2024: ASPEK PENJUALAN

Perusahaan membagi penjualan pupuk ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu penjualan pupuk bersubsidi atau pupuk Public Service Obligation (PSO) yang tata niaganya diatur regulasi pemerintah serta penjualan pupuk komersial atau non-subsidi/Non-PSO. Penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 (enam) prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T: Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, dan Tepat Mutu. Sedangkan pupuk dan non pupuk komersil dipasarkan kepada jaringan distribusi domestik, penjualan industri, dan ekspor

PERFORMANCE IN 2024: SALES ASPECTS

The Company divides fertilizer sales into 2 (two) categories, namely sales of subsidized fertilizer or Public Service Obligation (PSO) fertilizer distributed under a goverment-regulated trading system and sales of commercial or nonsubsidized/Non-PSO fertilizer. Distribution of subsidized fertilizer must comply with the six main principles known as the 6T: Right Type, Right Quantity, Right Price, Right Place, Right Time, and Right Quality. Conversely, commercial fertilizers and non-fertilizer products are marketed through domestic distribution networks, industrial sales channels, and export markets.

Volume Penjualan Pupuk dan Amoniak
Fertilizer and Ammonia Sales Volume

Keterangan Description	Realisasi 2024 2024 Realization (ton)	Realisasi 2023 2023 Realization (ton)	Target 2024 2024 Target (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%)	Pencapaian Target 2024 2024 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2))	(1/3)
Pupuk Fertilizer					
Pupuk PSO PSO Fertilizer					
Urea Urea	3.704.753	3.675.036	4.107.701	0,81	90,19
NPK NPK	3.576.108	2.511.749	3.126.716	42,38	114,37
Pupuk Lainnya*) Other Fertilizer*)	47.088	-	-	-	-
Subtotal Penjualan Pupuk PSO Subtotal Sales of PSO Fertilizer	7.327.950	6.186.785	7.234.417	18,45	101,92
Pupuk Non PSO Non-PSO Fertilizer					
Urea Urea	3.909.349	3.357.008	3.654.100	16,45	106,99
NPK NPK	165.435	380.363	371.820	(56,51)	44,49
Pupuk Lainnya**) Other Fertilizer**)	597.979	455.509	488.542	31,28	122,40
Subtotal Penjualan Pupuk Non-PSO Subtotal Non-PSO Fertilizer Sales	4.672.762	4.192.880	4.514.462	11,45	103,51
Subtotal Penjualan Pupuk Subtotal Fertilizer Sales	12.000.712	10.379.665	11.748.879	15,62	102,14
Non Pupuk Non-Fertilizer					
Amoniak Ammonia					
Amoniak Ammonia	814.874	934.899	944.894	(12,84)	86,24
Subtotal Penjualan Amoniak Subtotal Ammonia Sales	814.874	934.899	944.894	(12,84)	86,24

*) Terdiri dari Organik | consist of organic
**) Terdiri dari SP-36, ZA, DAP, ZK, Kaptan, Petrocas, KCL, Rock Phosphate | consist of SP-36, ZA, DAP, ZK, Kaptan, Petrocas, KCL, Rock Phosphate

Volume Penjualan Pupuk dan Amoniak
Fertilizer and Ammonia Sales Volume

Keterangan Description	Realisasi 2024 2024 Realization (ton)	Realisasi 2023 2023 Realization (ton)	Target 2024 2024 Target (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%)	Pencapaian Target 2024 2024 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2))	(1/3)
Non-Amoniak Non-Ammonia					
Asam Sulfat Sulfuric Acid	188.944	259.581	172.000	(27,21)	109,85
Asam Fosfat Phosphoric Acid	13.225	69.782	17.000	(81,05)	77,79
Lainnya***) Others***)	76.579	64.135	62.600	19,40	122,33
Subtotal Penjualan Non-Amoniak Subtotal Non-Ammonia Sales	278.747	393.497	251.600	(29,16)	110,79
Subtotal Penjualan Non-Pupuk Subtotal Non-Fertilizer Sales	1.093.621	1.328.396	1.196.494	(17,67)	91,40
Total Volume Penjualan Total Sales Volume	**13.094.333**	**11.708.061**	**12.945.373**	**11,84**	**101,15**

***) Terdiri dari AlF3, HCl, dan CO_2 | Consists of AlF3, HCl, and CO_2

Pupuk Bersubsidi/Pupuk PSO

Untuk sektor PSO, pupuk yang disalurkan oleh PI Group meliputi Urea, NPK dan Organik. Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah menyalurkan pupuk Urea PSO sebanyak 3,70 juta ton, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,68 juta ton. Penyaluran pupuk NPK PSO pada tahun 2024 sebanyak 3,58 juta ton, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,51 juta ton.

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan alokasi PSO menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024.

Subsidised Fertilizer/PSO Fertilizer

For the PSO sector, fertilizers distributed by PI Group include Urea and NPK. Throughout 2024, the Company has distributed 3.70 million tonnes of Urea PSO fertilizer, higher than in 2023 at 3.68 million tonnes. The distribution of NPK PSO fertilizer in 2024 was 3.58 million tonnes, higher than that in 2023 of 2.51 million tonnes.

The increase was driven by the rise in PSO allocation to 9.55 million tons in 2024

Kinerja Penjualan Pupuk PSO (ton)
PSO Fertilizer Sales Performance (ton)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Urea PSO Urea PSO	3.704.753	3.675.036	3.890.315	3.620.209	3.921.178
NPK PSO NPK PSO	3.576.108	2.511.749	2.897.488	2.702.892	2.592.052
Pupuk Lainnya Other Fertilizers	47.088	-	618.764	1.595.945	1.916.884

Dari sisi nilai, total penjualan pupuk PSO tahun 2024 mencapai Rp13,24 triliun naik 18,28% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp11,19 triliun.

Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah tahun 2024 mencapai Rp33,32 triliun atau naik 2,50% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp32,51 triliun.

In terms of value, total PSO fertilizer sales in 2024 reached Rp13.23 trillion, increased 18.28% compared to Rp11.19 trillion in 2023.

Reimbursement of subsidy from the Government in 2024 reached Rp33.32 trillion or increased 2.50% compared to 2023 which amounted to Rp32.51 trillion.

Nilai Penjualan Pupuk PSO (Rp juta)
PSO Fertilizer Sales Value (Rp million)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Penjualan Pupuk PSO PSO Fertilizer Sales	13.237.968	11.191.700	13.352.337	13.693.290	12.348.619
Pendapatan Subsidi Revenue from the Government Subsidy	33.323.915	32.512.230	36.109.067	25.258.692	25.712.148

Pupuk Non Subsidi/Non-PSO

Pada sektor Non-PSO, tonase penjualan pupuk di tahun 2024 naik sebesar 11,45% dibandingkan tonase penjualan pupuk di tahun 2023, yaitu dari 4,19 juta ton menjadi 4,67 juta ton. Kenaikan ini terutama karena kenaikan pada penjualan produk Urea sektor dalam negeri di mana pada tahun 2023 sebesar 1,95 juta ton sedangkan pada tahun 2024 sebesar 2,42 juta ton.

Tonase penjualan pupuk Urea tahun 2024 sebesar 3,91 juta ton, naik sebesar 16,45% dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,36 juta ton. Sementara tonase penjualan pupuk NPK turun sebesar 57%, yaitu dari 380,36 ribu ton di tahun 2023 menjadi 165,45 ribu ton di tahun 2024. Begitu juga dengan tonase penjualan pupuk lainnya sebesar 597,98 ribu ton, naik 31% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 455,51 ribu ton.

Non-Subsidized/Non-PSO Fertilizer

In the Non-PSO sector, fertilizer sales volume in 2024 increased by 11.45% compared to 2023, rising from 4.19 million tons to 4.67 million tons. This growth was primarily driven by an increase in domestic Urea product sales, which rose from 1.95 million tons in 2023 to 2.42 million tons in 2024.

The Urea fertilizer sales volume in 2024 reached 3.91 million tons, an increase of 16.45% compared to 3.36 million tons in 2023. Meanwhile, NPK fertilizer sales volume declined by 57%, falling from 380.36 thousand tons in 2023 to 165.45 thousand tons in 2024. Additionally, the sales volume of other fertilizers rose by 31%, reaching 597.98 thousand tons in 2024 compared to 455.51 thousand tons in 2023.

Kinerja Penjualan Pupuk Non-PSO (ton)
Non-PSO Fertilizer Sales Performance (ton)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Urea Non-PSO Non-PSO Urea	3.909.349	3.357.008	3.378.262	4.259.894	4.292.128
NPK Non-PSO Non-PSO NPK	165.435	380.363	362.766	576.516	567.259
Pupuk Non-PSO Lainnya*) Other Non-PSO Fertilizer*)	597.979	455.509	415.975	156.715	84.501

* Terdiri dari SP-36, ZA, KCL, dan lainnya
Consists of SP-36, ZA, KCL and others

Peningkatan tonase penjualan berdampak pada nilai penjualan pupuk Non-PSO secara keseluruhan yang sedikit lebih tinggi 1,17%, yaitu dari Rp22,62 triliun di tahun 2023 menjadi Rp22,88 triliun di tahun 2024.

The increase in sales volume has an impact on the overall sales value of Non-PSO fertilizers which is 1.17% higher, from Rp22.62 trillion in 2023 to Rp22.88 trillion in 2024.

Kinerja Penjualan Pupuk NON-PSO (Rp juta)
Sales Value of Non-PSO Fertilizer (Rp million)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Non-PSO Non-PSO	22.884.956	22.620.206	33.667.340	24.878.782	18.641.100

Amoniak dan Non-Amoniak

Realisasi volume penjualan amoniak pada tahun 2024 mencapai 814,87 ribu ton, turun 13% dari volume penjualan pada tahun sebelumnya sebanyak 934,90 ribu ton. Sedangkan realisasi volume penjualan non-amoniak pada tahun 2024 mencapai 278,75 ribu ton, lebih rendah 29% dari volume penjualan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 393,50 ribu ton.

Realisasi volume penjualan amoniak pada tahun 2024 mencapai 814,87 ribu ton, turun 13% dari volume penjualan pada tahun sebelumnya sebanyak 934,90 ribu ton. Penurunan ini dikarenakan adanya peningkatan penjualan antar Anak Perusahaan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 138,72 ribu ton menjadi 220,92 ribu ton pada tahun 2024.

Ammonia and Non-Ammonia

The ammonia sales volume in 2024 reached 814.87 thousand tons, declined 13% from the previous year's sales volume of 934.90 thousand tons. Meanwhile, the realized non-ammonia sales volume in 2024 was 278.75 thousand tons, 29% lower than the previous year's volume of 393.50 thousand tons.

The ammonia sales volume in 2024 reached 814.87 thousand tons, declined 13% from the previous year's sales volume of 934.90 thousand tons. This decline was attributed to an increase in intercompany sales, which rose from 138.72 thousand tons in 2023 to 220.92 thousand tons in 2024.

Kinerja Penjualan Amoniak dan Non-Amoniak (ton)
Ammonia and Non-Ammonia Sales Performance (ton)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Amoniak Ammonia	814.874	934.899	1.055.915	988.317	793.373
Non-Amoniak*) Non-Ammonia*)	278.747	393.497	397.625	271.693	191.435

*) Terdiri dari asam sulfat, asam fosfat, alumunium flourida dan lainnya
Consists of sulfuric acid, phosphoric acid, aluminum fluoride and others

Nilai penjualan amoniak pun mengalami penurunan sebesar 25%, menjadi Rp4,92 triliun. Sementara pada tahun 2023 mencapai Rp6,60 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan kuantum penjualan secara konsolidasi.

The sales value of ammonia also decreased by 25%, to Rp4.92 trillion. While in 2023 it reached Rp6.60 trillion. The decline was in line with the decrease in the quantum of sales on a consolidated basis.

Nilai Penjualan Amoniak dan Non-Amoniak (Rp juta)
Ammonia and Non-Ammonia Sales Value (Rp million)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Amoniak Ammonia	4.922.344	6.603.830	13.400.838	7.111.788	3.121.110
Non-Amoniak*) Non-Ammonia*)	628.127	1.133.598	1.003.250	481.526	571.688

* Terdiri dari asam sulfat, asam fosfat, alumunium florida, dan lainnya
Consist of sulfuric acid, phosphoric acid, florid aluminum, and others

Profitabilitas Segmen Pupuk dan Amoniak

Pada tahun 2024, total laba tahun berjalan untuk Segmen Pupuk dan Amoniak yang berhasil dibukukan oleh Perusahaan sebesar Rp7,45 triliun, turun 10,58% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp8,33 triliun. Hal ini antara lain karena harga jual yang lebih rendah serta belum tercapainya untuk penjulan amoniak.

Laporan kinerja profitabilitas untuk Segmen Pupuk dan Amoniak belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian kinerja profitabilitas disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Fertilizer and Ammonia Segment Profitability

In 2024, the Company recorded a total net profit of Rp7.45 trillion for the Fertilizer and Ammonia Segment, representing a decrease of 10.58% compared to Rp8.33 trillion in 2023. This decline was primarily due to lower selling prices and the underperformance in ammonia sales.

The profitability performance report for the Fertilizer and Ammonia Segment excludes inter-segment eliminations. A detailed breakdown of the segment's profitability performance is provided in the table below.

Kinerja Profitabilitas Segmen Pupuk dan Amoniak
Profitability Performance of Fertilizer and Ammonia Segment

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Finance and Profitability Nominal Performance	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Revenues				
Pendapatan Eksternal External Revenues	78.709.747	77.398.190	1.311.557	1,69
Pendapatan antar Segmen Inter-segment Revenues	2.472.135	1.539.520	932.615	60,58
Pendapatan Bersih Net Revenues	81.181.882	78.937.710	2.244.172	2,84
Laba Usaha Operating Income				
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(66.075.932)	(61.931.094)	(4.144.838)	6,69
Beban Penjualan Selling Expenses	(2.412.945)	(2.332.737)	(80.208)	3,44
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(3.025.440)	(3.222.550)	197.110	(6,12)
Pendapatan Lainnya - Bersih Other Income-Net	650.417	635.370	15.047	2,37
Pendapatan Keuangan Finance Income	427.729	436.281	(8.552)	(1,96)
Beban Keuangan Finance Costs	(1.504.294)	(2.304.257)	799.963	(34,72)
Bagian atas Laba/(Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures	306.406	332.356	(25.950)	(7,81)
Laba sebelum Pajak Profit before Income Tax	9.547.823	10.551.079	(1.003.256)	(9,51)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(2.095.318)	(2.216.718)	121.400	(5,48)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Profit / (Loss) for The Year	7.452.505	8.334.361	(881.856)	(10.58)
Laporan Statement of Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	123.042.326	126.258.940	(3.216.614)	(2,55)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	34.840.555	42.440.186	(7.599.631)	(17,91)
Pengeluaran Modal Capital Expenditures	9.172.188	6.231.338	2.940.850	47,19

Rencana Pengembangan Tahun 2025

Perusahaan telah menyiapkan rencana pengembangan untuk segmen pupuk dan amoniak di tahun 2025, dengan fokus pada kelanjutan program-program tahun 2024 serta beberapa inisiatif baru yang akan mendukung pertumbahan jangka panjang perusahaan. Adapun Rencana strategis tersebut akan fokus pada kelanjutan program kerja tahun 2024 dan beberapa program yang akan dijalankan di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk pembangunan pabrik baru yang lebih canggih dan penggunaan teknologi otomatisasi untuk meminimalkan biaya operasional serta meningkatkan volume produksi.
   a. Proyek dalam fase persiapan; Methanol, NPK Phonska 3 & 4 PKC, Pupuk Fosfat PKG, Phonska VI PKG, Amurea III PKG, Natrium Sianida PKG, Natrium Sulfat PKG, Infrasruktur Soda Ash PKT, Pabrik Amurea Papua Barat PKT
   b. Proyek dalam fase tender; NPK Nitrat PKC, Tangki Asam Sulfat PKG, Soda Ash PKG, NPK 3 PKT
   c. Proyek dalam fase pelaksanaan; Tangki Ammonia PIM, Pusri-IIB PSP, Dermaga A PKG, Revamp Ammonia K-2 PKT
2. Perusahaan akan memperkenalkan lebih banyak produk pupuk yang berbasis bahan organik dan ramah lingkungan, mendukung pertanian yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetik.
3. Perusahaan melakukan ekspansi dengan memperkenalkan produk-produk unggulan di pasar-pasar luar negeri yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Selain itu, perusahaan akan memperkuat kemitraan dengan distributor internasional dan menjalin aliansi strategis dengan mitra bisnis global untuk memperkuat jangkauan pasar dan mendiversifikasi sumber pendapatan.

Development Plan for 2025

The Company has prepared a development plan for the fertilizer and ammonia segment in 2025, focusing on the continuation of the 2024 programmes as well as several new initiatives that will support the company's long-term growth. The strategic plan will focus on the continuation of the work program in 2024 and several programs that will be run in 2025 as follows:

1. Development of more efficient and environmentally friendly infrastructure, including the construction of new, more advanced plants and the use of automation technology to minimise operational costs and increase production volumes.
   a. Projects in preparation phase; Methanol, NPK Phonska 3 & 4 PKC, Phosphate Fertilizer PKG, Phonska VI PKG, Amurea III PKG, Sodium Cyanide PKG, Sodium Sulfate PKG, Soda Ash PKT Infrastructure, West Papua Amurea Plant PKT
   b. Projects in tender phase; NPK Nitrate PKC, Sulfuric Acid Tank PKG, Soda Ash PKG, NPK 3 PKT
   c. Projects in implementation phase; Ammonia Tank PIM, Pusri-IIB PSP, Pier A PKG, Revamp Ammonia K-2 PKT
2. The company will introduce more organic-based and environmentally friendly fertilizer products, supporting sustainable agriculture and reducing dependence on synthetic chemical fertilizers.
3. The Company will expand by introducing superior products in overseas markets that have high growth potential. In addition, the company will strengthen partnerships with international distributors and forge strategic alliances with global business partners to strengthen market reach and diversify revenue sources.

SEGMEN JASA KONSTRUKSI

Segmen Jasa Konstruksi dijalankan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind), Entitas Anak yang bergerak di bidang Engineering, Procurement, dan Construction (EPC). Rekind telah membangun pabrik-pabrik skala besar di Indonesia, yaitu di sektor minyak dan gas bumi (migas), kimia/petrokimia, mineral, infrastruktur dan pembangkit listrik. Secara umum, bisnis konstruksi Rekind berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun (multi years). Dengan demikian, kontrak kerja yang diperoleh baru tercatat sebagai pendapatan pada tahun-tahun berikutnya.

CONSTRUCTION SERVICES SEGMENT

The Construction Services segment is run by PT Rekayasa Industri (Rekind), a Subsidiary engaged in the Engineering, Procurement and Construction (EPC) sector. Rekind has built large-scale factories in Indonesia, namely in the oil and natural gas (oil and gas), chemical/petrochemical, mineral, infrastructure and power generation sectors. In general, Rekind's construction business has a term of more than 1 (one) year (multi years). Thus, the work contract obtained will only be recorded as income in the following years.

Fokus dan Strategi Tahun 2024

Segmen Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) pada tahun 2024 berfokus untuk penyelesaian kajian restrukturisasi perusahaan yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan perusahaan dan memberikan nilai tambah maupun efisiensi bagi perusahaan. Kajian restrukturisasi melalui 3 (tiga) fase, yaitu:

- Fase Diagnostic Analytics Atas keadaan saat ini meliputi market sizing dan kompetisi pasar EPC; Best Practice dan Benchmark; Internal Diagnostics.
- Fase Business Plan Membuat perencanaan model bisnis EPC yang meliputi Strategic Initiatives & Quick Wins; Input to Financial Projection; Overall Business Plan.
- Fase Assistance Mendampingi Rekind melakukan restrukturisasi kepada kreditur dan penawaran ke potensial investor.

Focus and Strategy for 2024

The Construction Services segment implemented by PT Rekayasa Industri (Rekind) focuses on finalizing the corporate restructuring study restructuring study which aims to improve the company's health and provide added value and efficiency for the company. The restructuring study went through 3 (three) phases, namely:

- The Diagnostic Analytics phase on the current state includes market sizing and EPC market competition analysis, best practices and benchmarking, as well as internal diagnostics.
- Business Plan Phase Create an EPC business model plan that includes Strategic Initiatives & Quick Wins; Input to Financial Projection; Overall Business Plan.
- Assistance Phase Accompanying Rekind in restructuring its creditors and offering to potential investors.

Kinerja Segmen Jasa Konstruksi
Construction Services Segment Performance

Perolehan Kontrak Baru New Contracts Obtained	**Realisasi 2024** 2024 Realization **Rp juta** Rp million	**Realisasi 2023** 2023 Realization **Rp juta** Rp million	**Target 2024** 2024 Target **Rp juta** Rp million	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease) (%)	**Pencapaian Target 2024** 2024 Target Achievement (%)
	(1)	**(2)**	**(3)**	**((1-2)/2))**	**(1/3)**
Refinery, Oil & Gas Refinery, Oil & Gas	629.993	199.033	275.000	216,53	229,09
Power, Mineral, Fertilizer & Overseas Power, Minerals, Fertilizer & Overseas	142.672	178.129	4.386.000	(19,91)	3,25
Entitas Lain di bawah Rekind Other Entities under Rekind	1.131.917	1.549.949	2.339.009	(26,97)	48,39
Jumlah Perolehan Kontrak Baru Total New Contract Acquisition	**1.904.582**	**1.927.111**	**7.000.009**	**(1,17)**	**27,21**

Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi

Segmen Jasa Konstruksi pada tahun 2024 mencatatkan pencapaian pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Sepanjang tahun 2024, Segmen Jasa Konstruksi membukukan pendapatan Rp4,38 triliun, naik 96,63% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,23 triliun serta laba sebesar Rp3,71 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar rugi Rp124,92 miliar.

Laporan kinerja profitabilitas untuk segmen Jasa Konstruksi belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Profitability of the Construction Services Segment

The Construction Services segment in 2024 recorded higher revenue achievement compared to in 2023.

Throughout 2024, the Construction Services Segment booked revenue of Rp4.38 trillion, increased 96.63% compared to 2023 of Rp2.23 trillion and profit of Rp3.71 trillion which increased compared to 2023 of a loss of Rp124.92 billion.

The profitability performance report for the Construction Services segment excludes inter-segment eliminations. A comprehensive breakdown of the segment's profitability is provided in the table below.

Kinerja Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi
Construction Services Segment Profitability Performance

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Finance and Profitability Nominal Nominal Performance	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Revenues				
Pendapatan Eksternal External Revenues	4.376.461	2.225.789	2.150.672	96,63
Pendapatan antar Segmen Inter-segment Revenues	-	-	-	-
Pendapatan Bersih Net Revenues	4.376.461	2.225.789	2.150.672	96,63
Laba/(Rugi) Usaha Operating Profit/(Loss)				
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(1.969.974)	(1.819.636)	(150.338)	8,26
Beban Penjualan Selling Expenses	(1.791)	(1.408)	(383)	27,20
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(720.988)	(391.910)	(329.078)	83,97
Pendapatan Lainnya – Bersih Other Income-Net	3.363.275	(81.130)	3.444.405	(4.245,54)
Pendapatan Keuangan Finance Income	11.865	11.364	501	4,41
Beban Keuangan Finance Costs	(352.380)	(172.713)	(179.667)	104,03
Bagian atas Laba/(Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net Income/(Loss) of Associates and Joint Ventures	(885.925)	126.542	(1.012.467)	(800,10)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	3.820.543	(103.102)	3.923.645	(3.805,60)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(108.251)	(21.816)	(86.435)	396,20
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Profit/(Loss) for The Year	3.712.292	(124.918)	3.837.210	(3.071,78)
Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	6.237.359	4.301.682	1.935.677	45,00
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	5.113.090	11.307.509	(6.194.419)	(54,78)
Pengeluaran Modal Capital Expenditures	759.596	7.670	751.926	9.803,47

Rencana Pengembangan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Perusahaan berencana memperkuat segmen jasa konstruksi melalui Rekind, dengan meningkatkan produksi pertanian di Indonesia timur dan memanfaatkan sumber gas alam melimpah di wilayah timur Indonesia. Selain itu, perusahaan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk NPK secara bertahap guna memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan mendukung program swasembada pangan.

SEGMEN LAINNYA

Segmen Lain-lain terdiri dari bidang perdagangan umum yang dijalankan melalui PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN") dan PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP"); jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG"); serta jasa non EPC melalui PIN.

Fokus dan Strategi 2024

Strategi bisnis pada tahun 2024 berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan melalui strategi restrukturisasi perusahaan dan sinergi yang memberikan nilai tambah maupun efisiensi bagi perusahaan. Bidang perdagangan umum yang dijalankan melalui PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) menjalankan strategi penguatan bisnis trading pupuk impor, terutama pupuk tunggal yang tidak diproduksi PTPI Grup dan melakukan ekspansi bisnis NPK dengan skema low risk dan light asset melalui maklon NPK dengan produsen NPK swasta. Sedangkan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) menjalankan strategi ekspansi pasar ke sektor retail, modern trade, private label, dan pasar institusi.

Jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) berfokus pada peningkatan pelayanan end to end logistic melalui program Port to Door Service (PTDS) dan bertranformasi menjadi perusahaan one stop logistic company melalui skema light asset model.

Jasa Non EPC melalui PIN dalam proses pengembangan yang menjadikan tidak hanya melaksanakan perdagangan cat tetapi juga menyediakan layanan jasa pengecatan (aplikator).

Development Plan for 2025

By 2025, the Company plans to strengthen the construction services segment through Rekind, by increasing agricultural production in eastern Indonesia and utilising the abundant natural gas resources in eastern Indonesia. In addition, the Company plans to gradually increase its NPK fertilizer production capacity to meet national fertilizer needs and support the food self-sufficiency programme.

OTHER SEGMENTS

The Other Segment consists of the general trading sector which is carried out through PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN") and PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP"); shipping services and sea transportation services by PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG"); as well as non-EPC services via PIN.

Focus and Strategy 2024

The business strategy in 2024 focuses on improving company performance through corporate restructuring strategies and synergies that provide added value and efficiency for the company. The general trading business, operated through PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN), implements a strategy focused on strengthening the imported fertilizer trading segment, particularly singlenutrient fertilizers not produced by the PTPI Group. It also pursues the expansion of the NPK business through a lowrisk, light-asset model by subcontracting NPK production to private producers. Meanwhile, PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) pursues a market expansion strategy targeting the retail sector, modern trade, private label, and institutional markets.

Shipping services and sea transportation services by PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) focus on improving end to end logistics services through the Port to Door Service (PTDS) program and transforming into a one stop logistics company through a light asset model scheme.

Non EPC services via PIN are in the development process which not only carries out paint trading but also provides painting services (applicators).

Kinerja 2024

Jasa pelayaran dan jasa angkutan laut dijalankan oleh PILOG yang merupakan Entitas Anak PI Grup yang berdiri sejak tahun 2014. PILOG memiliki 9 (sembilan) armada kapal laut dengan total kapasitas angkut sebanyak 79,90 ribu MT per tahun yang digunakan untuk mengangkut produk-produk utama PI Grup, seperti pupuk, amoniak, dan produk lainnya seperti LPG. Selain memiliki armada sendiri, PILOG menyewa kapal laut kepada pihak ketiga.

Sepanjang tahun 2024, realisasi tonase angkutan pupuk 992,08 ribu ton, naik 11,39% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 890,61 ribu ton. Angkutan amoniak dan LPG pada tahun 2024 naik 44,67% dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 209,73 ribu ton menjadi 303,43 ribu ton. Angkutan lainnya naik 70,92% dibandingkan tahun 2023 yaitu 59,04 ribu ton menjadi 100,91 ribu ton.

2024 Performance

Shipping services and sea transportation services are carried out by PILOG which is a Subsidiary of the PI Group which was founded in 2014. PILOG has a fleet of 9 (nine) sea vessels with a total carrying capacity of 79.90 thousand MT per year which is used to transport main products PI Group, such as fertilizer, ammonia and other products such as LPG. Apart from having its own fleet, PILOG rents ships to third parties.

Throughout 2024, the realized fertilizer transportation volume reached 992.08 thousand tons, reflecting an increase of 11.39% compared to 890.61 thousand tons in 2023. Ammonia and LPG transportation in 2024 increasedb by 44.67% compared to 2023 namely from 209.73 thousand tons to 303.43 thousand tons. Other transportation increased by 70.92% compared to 2023, from 59.04 thousand tons to 100.91 thousand tons.

Kinerja Tonase Angkutan Laut (ton)
Sea Transportation Tonnage Performance (ton)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pupuk Urea Urea Fertilizer	992.079	890.609	871.982	734.046	935.538
Amoniak Ammonia	303.430	209.734	263.520	225.131	117.265
Angkutan Lainnya*) Other Transportation*)	100.912	59.042	86.829	273.666	255.382

*) Terdiri dari angkutan DAP/KCL, Clay serta PTDS
Consists of DAP/KCL, Clay and PTDS transportation

Kinerja Volume Perdagangan
Trading Volume Performance (ton)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pupuk PSO PSO Fertilizer	132.151	109.702	150.639	140.989	166.531
Pupuk Non PSO Non PSO Fertilizer	347.931	205.874	317.138	219.009	120.551
Produk Lainnya*) Other Products*)	16.168	21.647	127.356	78.942	67.106

* Terdiri dari angkutan herbisida, pewarna pupuk, semen, batu bara, dan lain-lain
Consists of transportation of herbicides, fertilizer dyes, cement, coal, etc.

Realisasi tonase perdagangan pupuk PSO yang dilakukan oleh Perusahaan melalui PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) dan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) pada tahun 2024 sebanyak 132,15 ribu ton, naik 20,46% dibandingkan tahun 2023 yaitu 109,70 ribu ton. Tonase perdagangan pupuk non PSO naik 69% dari 205,87 ribu ton pada tahun 2023 menjadi 347,93 ribu ton pada tahun 2024.

The realization of PSO fertilizer trading tonnage carried out by the Company through PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) and PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) in 2024 was 132.15 thousand tons, increased 20.46% compared to 2023 which was 109.70 thousand tons. Non-PSO fertilizer trade tonnage increased by 69% from 205.87 thousand tons in 2023 to 347.93 thousand tons in 2024.

Profitabilitas Segmen Lain-lain

Segmen Lainnya pada tahun 2024 mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp5,70 triliun, turun 57,39% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp13,38 triliun.

Laporan kinerja profitabilitas untuk Segmen lainnya belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian kinerja profitabilitas disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Other Segment Profitability

The Other segment in 2024 recorded net income of Rp5.70 trillion, down 57.39% compared to Rp13.38 trillion in 2023.

The profitability performance report for the Other Segments excludes inter-segment eliminations. A comprehensive breakdown of the segment's profitability.

Kinerja Profitabilitas Segmen Lain-Lain
Profitability Performance of Other Segments

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Financial Performance and Nominal Profitability	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Revenues				
Pendapatan Eksternal External Revenues	1.302.021	2.258.473	(956.452)	(42,35)
Pendapatan antar Segmen Inter-segment Revenues	4.397.883	11.117.806	(6.719.923)	(60,44)
Pendapatan Bersih Net Income	5.699.904	13.376.279	(7.676.375)	(57,39)
Laba/(Rugi) Usaha Operating Profit/(Loss)				
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(2.783.144)	(2.711.524)	(71.620)	2,64
Beban Penjualan Selling Expenses	(15.351)	(97.633)	82.282	(84,28)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(1.558.300)	(2.540.243)	981.943	(38,66)
Pendapatan Lainnya – Bersih Other Income-Net	(12.239)	29.909	(42.148)	(140,92)
Pendapatan Keuangan Finance Income	1.058.028	993.357	64.671	6,51

Kinerja Profitabilitas Segmen Lain-Lain
Profitability Performance of Other Segments

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Financial Performance and Nominal Profitability	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Beban Keuangan Finance Costs	(384.390)	(560.212)	175.822	(31,38)
Laba sebelum Pajak profit before Income Tax	2.004.508	8.489933	(6.485.425)	(76,39)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(130.964)	(114.980)	(15.984)	13,90
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.873.544	8.374.953	(6.501.409)	(77,63)
Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	47.681.994	49.888.584	(2.206.590)	(4,42)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	6.580.166	9.690.369	(3.110.203)	(32,10)
Pengeluaran Modal Capital Expenditures	373.037	326.146	46.891	14,38

Rencana Pengembangan Tahun 2025

Segmen Perdagangan Umum melalui PIN dan PIP akan berfokus pada diversifikasi produk dan perluasan jaringan distribusi.

Segmen Jasa Logistik akan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk optimalisasi pengapalan dan peningkatan layanan pengangkutan, serta melakukan peremajaan fasilitas penyimpanan

Pada tahun 2025, perusahaan akan memfokuskan pengembangan segmen lain-lain pada pelaksanaan streamlining lini bisnis PI Grup, yaitu penyederhanaan dalam ekosistem PI Group yang meliputi seluruh Anak Perusahaan dan entitas asosiasi dengan skema subholding dan anggota subholding. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing bisnis perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta ekspansi ke sektor industri strategis lainnya.

Development Plan for 2025

The General Trading Segment, through PIN and PIP, will prioritize product diversification and the expansion of distribution networks.

The Logistics Services Segment will pursue strategic partnerships to optimize shipping operations and enhance transport services, in addition to upgrading storage facilities.

In 2025, the Company will focus the development of its Other Business Segments on streamlining the PI Group's business lines. This streamlining will involve restructuring the entire ecosystem of PI Group—comprising Subsidiaries and associated entities—under a subholding structure. The strategy is intended to enhance operational efficiency, effectiveness, and business competitiveness in support of national food security and expansion into other strategic industrial sectors.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

KEBIJAKAN PEMASARAN

PTPI telah memiliki kebijakan di bidang pemasaran. Uraiannya adalah:

1. Sentralisasi bidang pemasaran dimulai bulan Januari 2021 yang meliputi fungsi penjualan PSO, penjualan komersil, logistik, dan strategi pemasaran.
2. Sentralisasi mendorong optimalisasi dan harmonisasi produk, pendapatan, dan laba baik untuk Pupuk Indonesia maupun Anak Perusahaan.
3. Pembentukan unit project management untuk merespons isu strategis perusahaan yang bersifat spesifik (SPM).
4. Prioritas pemenuhan kebutuhan produk:
   a. PSO sebagai pemenuhan penugasan dari Kementerian Pertanian.
   b. Ritel untuk memenuhi kebutuhan petani yang tidak diakomodir di sektor PSO.
   c. Korporasi/Industri dalam negeri.
   d. Ekspor.
5. Sinergi antar BUMN dan antar Anak Perusahaan.

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran PI Grup pada tahun 2024 difokuskan pada upaya mencapai target penjualan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran melalui strategi pemasaran yang sebagai berikut:

1. Penerapan regional penjualan wilayah PSO yang mengakomodir penyaluran Anak Perusahaan.
2. Pengalihan fungsi Pergudangan dari fungsi Distribusi ke fungsi Penjualan Wilayah.
3. Program Agrosolution (Makmur) untuk meningkatkan produktivitas panen dan kesejahteraan petani melalui pendampingan intensif dari hulu sampai hilir, yang meliputi akses permodalan, asuransi pertanian, kawalan budi daya, pengembangan organisasi petani, dan off taker hasil panen.
4. Implementasi Sales & Operation Planning (S&OP) untuk mengoptimalkan alokasi produksi dan penjualan masing-masing Anak Perusahaan.
5. Sentralisasi penjualan produk ZA, Fosfat dan ZK sektor ritel. Operasional penjualan sektor ritel yang awalnya dilakukan oleh Anper, pada tahun 2024 dilakukan oleh fungsi penjualan PTPI.
6. Penggunaan aplikasi ANDALAN untuk penebusan produk non subsidi ritel.
7. Penerapan term franco distributor untuk penjualan sektor ritel untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen.

MARKETING POLICY

PTPI has established comprehensive marketing policies as outlined below:

1. Centralization of marketing functions began in January 2021, covering PSO (Public Service Obligation) sales, commercial sales, logistics, and marketing strategy.
2. The centralized approach enables optimization and harmonization of products, revenue, and profit across Pupuk Indonesia and its Subsidiaries.
3. Establishment of a project management unit to address specific strategic issues (SPM).
4. Priority in product fulfillment is categorized as follows:
   a. PSO to fulfill assign ments from the Ministry of Agriculture.
   b. Retail to serve farmers outside the PSO scheme.
   c. Domestic corporations/industries.
   d. Exports.
5. Synergies among state-owned enterprises (SOEs) and Subsidiaries.

MARKETING STRATEGY

In 2024, PI Group's marketing strategy was directed toward achieving sales targets and improving marketing efficiency and effectiveness through the following initiatives:

1. Implementation of regional sales zones for PSO distribution accommodating Subsidiary operations.
2. Transfer of warehousing functions from Distribution to Regional Sales.
3. Execution of the Agrosolution (Makmur) program to increase crop productivity and farmer welfare through end-to-end support, including financing access, agricultural insurance, cultivation assistance, farmer organization development, and crop off-takers.
4. Implementation of Sales & Operations Planning (S&OP) to optimize production and sales allocation across Subsidiaries.
5. Centralized sales for ZA, Phosphate, and ZK products in the retail sector, now managed by PTPI's sales function.
6. Utilization of the ANDALAN application for non-subsidized product redemption in retail.
7. Application of franco distributor terms to add value for retail sector consumers.

8. Penerapan rayonisasi Urea sektor ritel berdasarkan lokasi dan keekonomian produsen.
9. Penggunaan gudang bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gudang Anak Perusahaan.
10. Sinergi perencanaan dan evaluasi penjualan untuk optimalisasi penjualan dan pendapatan Anak Perusahaan
11. Sinergi komunikasi pemasaran untuk penyeragaman pesan promosi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi Pemasaran.
12. Single pricing Urea dan amoniak Anak Perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan harga jual produk Urea dan amoniak seluruh Anak Perusahaan agar menunjang strategi penjualan Perusahaan.
13. Penentuan layering harga per sektor. Strategi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan harga dalam negeri akibat kenaikan harga internasional demi mendukung ketahanan pangan nasional.
14. Implementasi single branding PI Grup untuk produk pupuk Urea dengan merek Pupuk Indonesia Holding Company Nitrea dan pupuk NPK formula 16-16-16 dengan merek Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus sebagai inisiatif strategi Perusahaan dalam memperkuat *brand awareness* produk dan meningkatkan *engagement* konsumen.
15. Optimalisasi media sosial. Perusahaan beradaptasi terhadap perkembangan di bidang digitalisasi, sehingga pendekatan kepada konsumen melalui edukasi melalui account Sahabat Petani di media sosial YouTube, Instagram, dan Facebook. Strategi tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil survei pasar, di mana konsumsi internet di level petani sebagai konsumen terbesar *relative* meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
16. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas Pelanggan, PTPI menyediakan layanan uji tanah yang bertujuan untuk membuat rekomendasi pemupukan spesifik lokasi. Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 24 unit Mobil Uji Tanah yang tersebar di seluruh Indonesia.

REALISASI KEGIATAN PEMASARAN

Sepanjang tahun 2024, kegiatan pemasaran yang telah direalisasikan, antara lain:

1. Pendampingan luas lahan untuk tahun 2024 mencapai 451.537 hektare dengan Jumlah Petani Binaan 170.969 Orang dan total penjualan Pupuk non subsidi 340.390 ton. Melalui aktivitas pendampingan on-farm yang berfokus pada peningkatan produktivitas petani, terjadi peningkatan dalam produktivitas petani Makmur dimana tanaman Padi naik 14% dari semula 5,7 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha, Jagung naik 23% dari 4,7 ton/ha menjadi 5,8 ton/ha. Nilai Penjualan Pupuk Komersil Agrosolution Tahun 2024 sebesar Rp1,14 Triliun.

8. Retail zoning of Urea based on location and producer economics.
9. Shared warehousing to enhance efficiency in Subsidiary inventory management.
10. Sales planning and evaluation synergies to optimize Subsidiary sales and revenue.
11. Integrated marketing communication for message consistency and greater marketing efficiency.
12. Single Pricing Policy for Subsidiaries' Urea and Ammonia Products. This policy aims to standardize the selling prices of Urea and ammonia products across all Subsidiaries to support the Company's overall sales strategy.
13. Sector-specific pricing tiering to maintain domestic price stability amidst global price fluctuations, supporting national food security.
14. Implementation of PI Group single-branding strategy—Urea under "Pupuk Indonesia Holding Company Nitrea" and NPK 16-16-16 under "Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus"—to strengthen brand awareness and consumer engagement.
15. Enhanced digital engagement through the "Sahabat Petani" social media channels (YouTube, Instagram, Facebook), reflecting increased internet usage among farmers as identified in market research.
16. Improving customer satisfaction and loyalty through soil testing services, providing location specific fertilizer recommendations. PI Group currently operates 24 mobile soil testing units across Indonesia.

REALIZATION OF MARKETING ACTIVITIES

Key accomplishments in marketing throughout 2024 include:

1. Land assistance covered 451,537 hectares, with 170,969 assisted farmers and 340,390 tons of non-subsidized fertilizer sold. The Agrosolution program improved crop productivity, with rice yields increasing by 14% (from 5.7 to 6.5 tons/ha) and corn by 23% (from 4.7 to 5.8 tons/ha). Commercial fertilizer sales under Agrosolution reached Rp1.14 trillion.

2. Pengembangan benefit model untuk sales channel dengan tujuan mendorong peningkatan penjualan melalui program memberikan insentif terhadap pembelian tertentu pada periode tertentu.
3. Total realisasi tonase penjualan pupuk dan non pupuk komersil melalui channel Key Accout, sebesar 2.417.834 ton dari target 1.722.150 ton (140% dari target).
4. Realisasi pendapatan circular economy s.d TW IV sebesar Rp4.612 miliar atau 156% dari target pendapatan circular economy s.d bulan Desember
5. Penjualan sektor ritel 2024 sebesar sebanyak 1.111.857 ton (Urea 652.882 Ton, NPK 111.622 Ton, ZA 280.799 Ton, Phosphate 63.893 Ton, ZK 2.660 Ton) atau 151% dari RKAP 2024.
   - Penunjukkan 480 distributor ritel pupuk yang telah meningkatkan penjualan produk PI Group
   - Penyelenggarakan Performance-based Benefit Model dengan rincian sebagai berikut:
   - Reward Cashback berupa Emas kepada Distributor.
6. Benefit Model Sales Force di wilayah dengan reward berupa barang elektronik.
7. Implementasi Distributor Finance (DF) dan Performance Bond telah dilakukan kepada masing-masing Distributor pupuk lengkap ritel.
8. Penggunaan gudang bersama oleh Anak Perusahaan di wilayah penyaluran PSO dan penjualan retail yang beririsan.
9. Meningkatkan awareness produk PI Grup, yakni dengan melakukan 1.289 demplot, 5.976 sosialisasi, 8.515 sampel uji tanah, 25 sponsorship, 192 pameran, 3 temu pelanggan, dan melakukan kegiatan publikasi melalui media sosial "Sahabat Petani" yang meliputi Instagram, Facebook, YouTube dan website.
10. Monitoring suara pelanggan, tingkat kepuasan, dan loyalitas pelanggan terhadap produk Perusahaan. Untuk kegiatan Unit Layanan Pelanggan pada tahun 2024, interaksi konsumen tercatat sebesar 6.479 suara pelanggan yang terdiri dari informasi, pertanyaan, dan keluhan. Keluhan yang masuk untuk Pupuk Indonesia Grup sebanyak 57 keluhan. Persentase penyelesaian keluhan pada tahun 2024 adalah sebesar 98%.

2. Development of a benefit model for sales channels offering time-bound purchase incentives.
3. Total commercial sales of fertilizers and non-fertilizers through key accounts reached 2,417,834 tons, 140% of the 1,722,150-ton target.
4. Circular economy revenue realization up to Q4 totaled Rp4.61 trillion, or 156% of the year-end target.
5. Retail sales totaled 1,111,857 tons, (Urea: 652,882 tons, NPK: 111,622 tons, ZA: 280,799 tons, Phosphate: 63,893 tons, ZK: 2,660 tons)or 151% of the 2024 RKAP target, comprising:
   - This was supported by 480 appointed retail fertilizer distributors
   - Performance-based benefits,
   - Including gold cashback rewards.
6. Sales Force Benefit Model included electronic goods as rewards in targeted regions.
7. Implementation of Distributor Finance (DF) and Performance Bond programs for retail complete fertilizer distributors.
8. Shared warehouse utilization by Subsidiaries in overlapping PSO and retail regions.
9. Increasing awareness of PI Group products through activities including 1,289 demonstration plots, 5,976 socialization events, 8,515 soil test samples, 25 sponsorships, 192 exhibitions, 3 customer gatherings, and conducting publications via the "Sahabat Petani" social media platforms, which include Instagram, Facebook, YouTube, and the website.
10. Monitoring customer feedback, satisfaction levels, and loyalty toward the Company's products. In 2024, the Customer Service Unit recorded 6,479 customer interactions consisting of information requests, inquiries, and complaints. The number of complaints received for Pupuk Indonesia Group totaled 57. The complaint resolution rate in 2024 was 98%.

PANGSA PASAR

Perkembangan pangsa pasar Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

MARKET SHARE

The development of the Company's market share is described as follows:

Produk Product	**Pangsa Pasar Dalam Negeri (%)** Domestic Market Share (%)	
	2024	**2023**
Urea Urea	99	99
NPK NPK	48	39
Amoniak Ammonia	74	76

Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya

Financial Review and Other Material Information

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Uraian kinerja keuangan PTPI pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal yang berlaku.

INFORMATION PRESENTATION STANDARDS AND CONFORMITY TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The financial performance disclosures presented in this annual report by PTPI are based on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2024, audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, and the Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants and prevailing capital market regulations.

KINERJA KEUANGAN

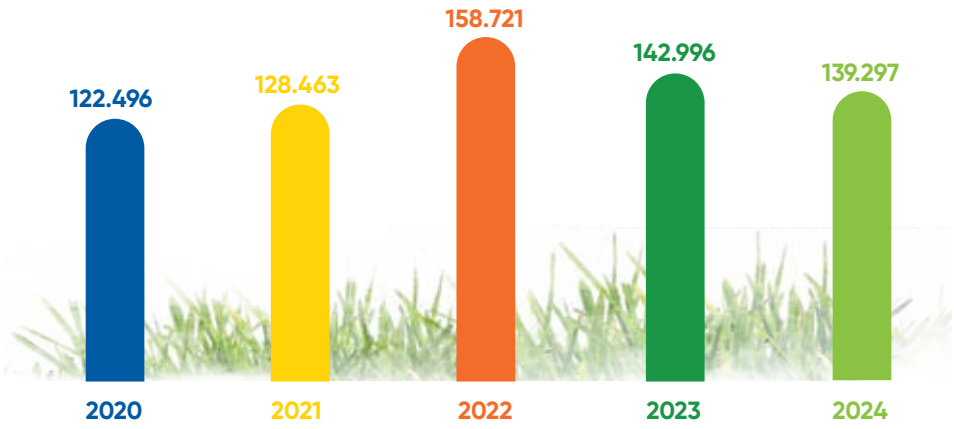
FINANCIAL PERFORMANCE

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statements of Financial Position

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	50.343.800	58.439.356	(8.095.556)	(13,85)
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	88.952.855	84.556.974	4.395.881	5,20
Jumlah Aset Total Assets	**139.296.655**	**142.996.330**	**(3.699.675)**	**(2,59)**
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Liabilities				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	25.286.189	30.278.416	(4.992.227)	(16,49)
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	14.649.740	20.752.736	(6.102.996)	(29,41)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**39.935.929**	**51.031.152**	**(11.095.223)**	**(21,74)**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**99.360.726**	**91.965.178**	**7.395.548**	**8,04**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**139.296.655**	**142.996.330**	**(3.699.675)**	**(2,59)**

Jumlah Aset 2020–2024
Total Assets 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



Jumlah Aset 2023–2024
Total Assets 2023–2024

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	50.343.800	58.439.356	(8.095.556)	(13,85)
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	88.952.855	84.556.974	4.395.881	5,20
Jumlah Aset Total Assets	**139.296.655**	**142.996.330**	**(3.699.675)**	**(2,59)**

Pada tahun 2024, Perusahaan membukukan aset senilai Rp139,30 triliun, lebih rendah 2,59% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp142,99 triliun. Penurunan aset ini utamanya disebabkan oleh penurunan piutang PSO Rp7,73 Triliun dan penurunan persediaan Rp3,37 Triliun.

In 2024, the Company reported total assets of Rp139.30 trillion, a decline of 2.59% compared to Rp142.99 trillion in 2023. The decrease was primarily attributed to a reduction in PSO (Public Service Obligation) receivables of Rp7.73 trillion and a decline in inventories amounting to Rp3.37 trillion.

Aset Lancar
Current Assets

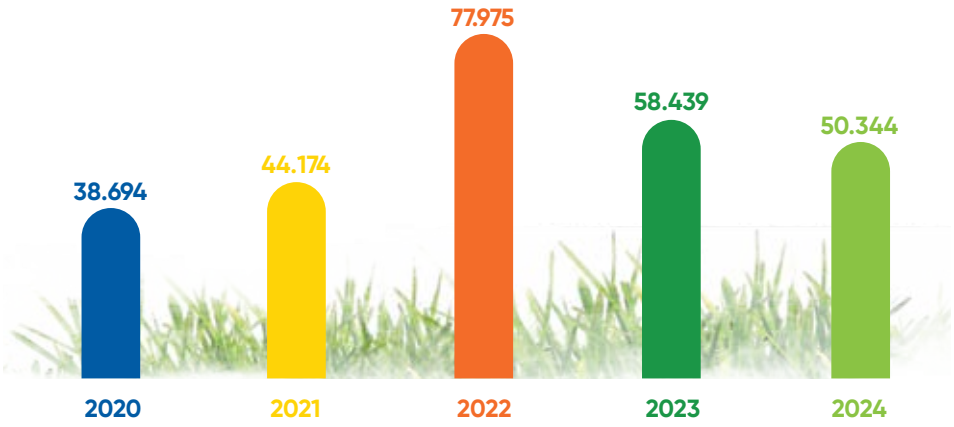
Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	17.278.272	16.585.416	692.856	4,18
Piutang Usaha Trade Receivables	2.450.699	3.025.309	(574.610)	(18,99)
Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia Subsidy Receivables from the Government of Indonesia	1.165.380	8.895.378	(7.729.998)	(86,90)

Aset Lancar
Current Assets

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Piutang Subsidi yang Belum Ditagih Unbilled Subsidy Receivables	930.933	1.159.665	(228.732)	(19,72)
Piutang Lainnya Other Receivables	78.488	382.004	(303.516)	(79,45)
Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi–dari Pelanggan Construction Contract Work in Progress-due from Customers	369.944	529.813	(159.869)	(30,17)
Persediaan Inventories	13.720.295	17.089.004	(3.368.709)	(19,71)
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Advances and Prepayments	392.294	454.092	(61.798)	(13,61)
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	812.897	746.802	66.095	8,85
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	13.144.598	9.571.873	3.572.725	37,33
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**50,343,800**	**58.439.356**	**(8.095.556)**	**(13,85)**

Aset Lancar 2020–2024
Current Assets 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



Jumlah aset lancar pada tahun 2024 mencapai Rp50,34 triliun, turun 13,85% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp58,44 triliun. Penurunan ini, terutama dikontribusikan oleh penurunan piutang PSO Rp7,73 Triliun dan penurunan persediaan Rp3,37 Triliun.

Total current assets in 2024 amounted to Rp50.34 trillion, representing a decrease of 13.85% from Rp58.44 trillion in 2023. This reduction was mainly due to a decrease in PSO receivables by Rp7.73 trillion and inventories by Rp3.37 trillion.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan komponen terbesar dalam aset lancar, dengan kontribusi sebesar 34,32%. Pada tahun 2024, total kas dan setara kas sebesar Rp17,29 triliun, naik 4,18% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp16,59 triliun. Kenaikan kas dan setara kas antara lain disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan maupun penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah RI yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Piutang Usaha

Piutang usaha-bersih merupakan piutang usaha setelah dikurangi cadangan penurunan nilai. Pada tahun 2024, total piutang usaha bersih sebesar Rp2,45 triliun, turun 18,99% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp3,03 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan kinerja Pupuk Indonesia yang lebih baik dalam melakukan monitoring maupun penagihan Piutang Usaha.

PI Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia

Piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk bersubsidi. Pada tahun 2024, penjualan pupuk bersubsidi terdiri dari 3 jenis pupuk yaitu Urea, NPK dan Organik, sedangkan pada tahun 2023 terdiri dari 2 jenis pupuk yaitu Urea dan NPK. Bagian lancar piutang subsidi Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp1,17 triliun. Dibandingkan posisi tahun 2023 yang sebesar Rp8,90 triliun, terjadi penurunan 86,90%. Hal ini karena pembayaran piutang subsidi tahun berjalan relatif lancar sehingga outstanding piutang subsidi tahun berjalan di akhir tahun 2024 lebih kecil dibandingkan tahun 2023.

Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi-dari Pelanggan

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi-dari pelanggan adalah bagian dari kontrak aset yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Total nilai pekerjaan tersebut pada tahun 2024 mencapai Rp369,94 miliar, turun 30,17% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp529,81 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan telah selesainya pekerjaan jasa konstruksi oleh Rekind sebagai anak usaha PTPI.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents represent the largest component of current assets, contributing 34.32% of the total. As of 2024, cash and cash equivalents stood at Rp17.29 trillion, up 4.18% from Rp16.59 trillion in 2023. The increase was largely driven by higher collections from customers and increased disbursement of fertilizer subsidies by the Government of Indonesia compared to the previous year.

Accounts Receivable

Net trade receivables represent trade receivables after deducting the allowance for impairment losses. As of 2024, net trade receivables totaled Rp2.45 trillion, a decrease of 18.99% from Rp3.03 trillion in 2023. The decline reflects improved performance by Pupuk Indonesia in monitoring and collecting trade receivables.

PI Group applies a lifetime expected credit loss model to all trade receivables. Receivables are grouped based on similar credit risk characteristics and due dates to assess expected credit losses

Subsidy Receivable from Government of Indonesia

Subsidy receivables refer to outstanding balances from the Government of Indonesia related to the distribution of subsidized fertilizers. In 2024, subsidized fertilizer sales included three product types: Urea, NPK, and Organic. In comparison, only Urea and NPK were distributed in 2023. The current portion of subsidy receivables in 2024 amounted to Rp1.17 trillion, a significant decline of 86.90% from Rp8.90 trillion in 2023. This decrease was due to the smoother and more timely disbursement of subsidy payments, resulting in a lower outstanding subsidy balance at year-end.

Construction Contract Work in Progress-from Customers

Construction work in progress – from customers represents contract assets recognized in connection with revenue from contracts with customers. As of 2024, the total value of such work amounted to Rp369.94 billion, down 30.17% from Rp529.81 billion in 2023. This decrease was primarily due to the completion of construction service projects carried out by Rekind, a Subsidiary of PI Group.

Persediaan

Nilai persediaan Perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp13,72 triliun, turun 19,71% dibandingkan tahun 2023, yaitu Rp17,09 triliun. Penurunan persediaan terutama pada persediaan barang jadi dan persediaan bahan baku.

Inventories

As of 2024, the Company's inventory stood at Rp13.72 trillion, representing a 19.71% decrease from Rp17.09 trillion in 2023. This decline was primarily attributable to reductions in finished goods and raw material inventories.

Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Jumlah uang muka dan beban dibayar di muka tahun 2024 tercatat Rp392,29 miliar, turun 13,61% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp454,09 milliar.

Advances and Prepaid Expenses

Total advances and prepaid expenses for 2024 were recorded at Rp392.29 billion, reflecting a 13.61% decline compare Rp454.09 billion in 2023.

Pajak Dibayar di Muka

Nilai pajak dibayar di muka pada tahun 2024 sekitar Rp812,90 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp746,80 milliar, angka tersebut terjadi kenaikan sebesar 8,85%. Kenaikan ini utamanya dikontribusikan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Prepaid Tax

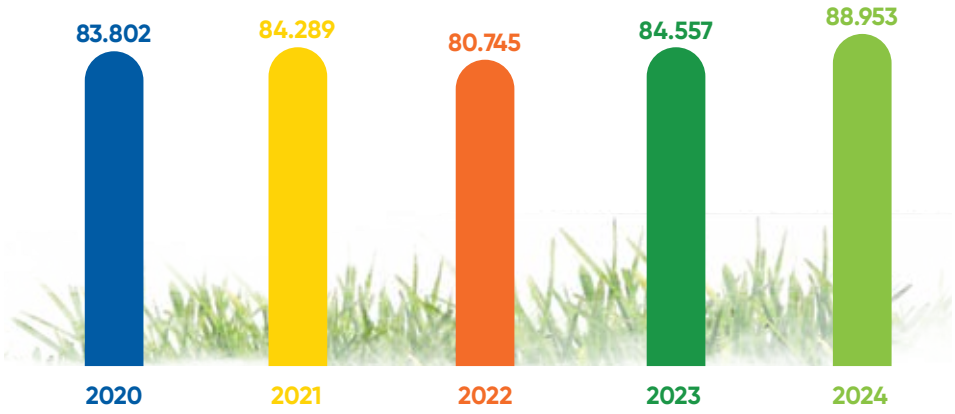
Prepaid taxes amounted to Rp812.90 billion in 2024, an 8.85% increase from Rp746.80 billion in 2023. This increase was primarily driven by higher input tax credits from Value Added Tax (VAT).

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Piutang Lainnya-Tidak Lancar Other Receivables-Non-current	18.462	323.972	(305.510)	(94,30)
Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia-Tidak Lancar Subsidy Receivables from the Government of Indonesia-Non-current	452.313	551.863	(99.550)	(18,04)
Pajak Dibayar di Muka-Tidak Lancar Prepaid Taxes-Non-current	1.378.458	889.377	489.081	54,99
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	1.927.194	1.502.881	424.313	28,23
Properti Investasi Investment Properties	1.956.409	1.862.663	93.746	5,03
Aset Tetap Fixed Assets	79.680.596	75.695.175	3.985.421	5,27
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	273.360	217.751	55.609	25,54
Aset Imbalan Pascakerja Post-employment Benefits Assets	654.558	279.112	375.446	134,51
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	2.611.505	3.234.180	(622.675)	(19,25)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**88.952.855**	**84.556.974**	**4.395.881**	**5,20**

Aset Tidak Lancar 2020–2024
Non-Current Assets 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



Jumlah aset tidak lancar Perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp88,95 triliun, lebih besar 5,20% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp84,56 triliun. Kenaikan ini terutama dikontribusikan oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp3,99 triliun.

As of 2024, the Company's non-current assets totaled Rp88.95 trillion, marking a 5.20% increase from Rp84.56 trillion in 2023. This growth was primarily driven by a Rp3.99 trillion increase in fixed assets.

Piutang Lainnya-Tidak Lancar

Total piutang lainnya-tidak lancar tahun 2024 sebesar sebesar Rp18,46 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp323,97 miliar, terjadi penurunan 94,30%.

Other Receivables-Non-current

Total other receivables-non-current in 2024 amounted to Rp18.46 billion, down 94.30% from Rp323.97 billion in 2023.

Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia Tidak lancar

Jumlah piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia-tidak lancar pada tahun 2024 sebesar Rp452,31 miliar, turun 18,04% dibandingkan posisi tahun 2023 yaitu Rp551,86 miliar.

Berdasarkan notulen rapat tertanggal 9 Januari 2024, piutang subsidi tahun 2020 masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh BPK-RI. Sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan, manajemen masih menunggu Laporan BPK terkait hal ini. Oleh karena itu, manajemen mereklasifikasi piutang subsidi dari porsi lancar menjadi porsi tidak.

Subsidy Receivable from Government of Indonesia-Non-current

As of 2024, non-current subsidy receivables from the Government of Indonesia stood at Rp452.31 billion, representing a decrease of 18.04% compared to Rp551.86 billion in 2023.

As per the minutes of the meeting dated January 9, 2024, the 2020 subsidy receivables remain under verification and validation by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). As of the date of issuance of these Financial Statements, management has not yet received the final BPK report. Consequently, the subsidy receivables were reclassified from current assets to non-current assets.

Pajak Dibayar di Muka-Jangka Panjang

Jumlah pajak dibayar di muka-jangka panjang pada tahun 2024 mencapai Rp1,38 triliun, lebih besar 54,99% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp889,38 miliar. Kenaikan ini utamanya dikontribusikan oleh Pajak Pertambahan Nilai.

Prepaid Taxes-Long-Term

Long-term prepaid taxes for 2024 amounted to Rp1.38 trillion, an increase of 54.99% from Rp889.38 billion in 2023. The increase was primarily due to higher Value Added Tax (VAT) credits.

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas, di mana PI Grup memiliki pengaruh signifikan, namun bukan pengendalian. Biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi PI Group pada entitas asosiasi juga termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi. Realisasi investasi tersebut pada tahun 2024 mencapai Rp1,93 triliun, lebih besar 28,23% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp1,50 triliun.

Investment in Associates and Joint Ventures

Associates are entities over which the PI Group has significant influence but not control, typically through ownership of voting rights ranging between 20% and 50%. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under this method, investments are initially recognized at cost and subsequently adjusted to reflect the Group's share of the investee's profit or loss. The PI Group's investment in associates also includes any goodwill identified upon acquisition. In 2024, the carrying amount of investments in associates and joint ventures reached Rp1.93 trillion, an increase of 28.23% compared to Rp1.50 trillion in 2023.

Properti Investasi

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, dan prasarana yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh entitas di dalam Grup konsolidasian. Properti investasi juga termasuk properti yang sedang dikonstruksi atau pembangunan untuk penggunaan di masa yang akan datang sebagai properti investasi. Total properti investasi pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp1,96 triliun, lebih besar 5,03% dibandingkan tahun 2023. Manajemen melakukan penilaian atas properti investasi secara berkala untuk memastikan ada tidaknya penurunan nilai permanen yang material.

Investment Property

Investment properties comprise land, buildings, and infrastructure held for long-term rental income, capital appreciation, or both, and are not occupied by entities within the consolidated Group. They also include properties under construction or development intended for future use as investment properties. As of year-end 2024, the total carrying value of investment properties stood at Rp1.96 trillion, up 5.03% from Rp1.86 trillion in 2023. The Company conducts periodic assessments of these assets to ensure that any material and permanent impairment in value is promptly identified.

Aset Tetap

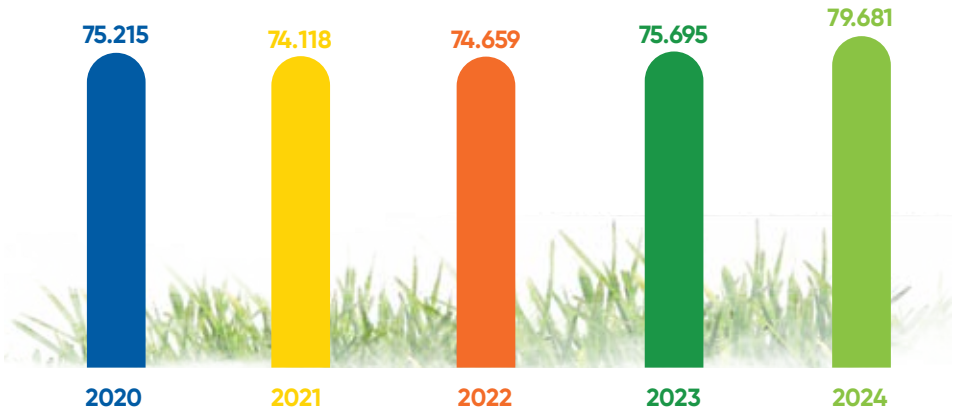
Jumlah aset tetap Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp79,68 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp75,70 triliun, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,27%. Kenaikan ini utamanya karena adanya kenaikan pada aset dalam penyelesaian.

Fixed Assets

The Company's fixed assets amounted to Rp79.68 trillion in 2024, representing a 5.27% increase from Rp75.70 trillion in 2023. This increase was primarily due to additions in construction-in-progress assets.

Perkembangan Nilai Aset Tetap 2020–2024
Fixed Asset Growth, 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, pabrik dan peralatan, mesin bengkel kerja, kendaraan dan alat berat, perlengkapan kantor dan rumah, kapal, lokomotif dan gerbong, aset penyangga, aset hak guna, serta aset dalam penyelesaian. Aset tetap dihitung berdasarkan biaya perolehannya dan dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset Pajak Tangguhan

Jumlah aset pajak tangguhan pada tahun 2024 sebesar Rp273,36 miliar, naik 25,54% dibandingkan tahun 2023 yang sekitar Rp217,75 miliar.

Aset Imbalan Pascakerja

Jumlah aset imbalan pascakerja tahun 2024 Rp654,56 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp279,11 miliar, terjadi kenaikan 134,51%.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Jumlah aset tidak lancar lainnya hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp2,61 triliun, turun 19,25% dibandingkan tahun 2023 yang sekitar Rp3,23 triliun.

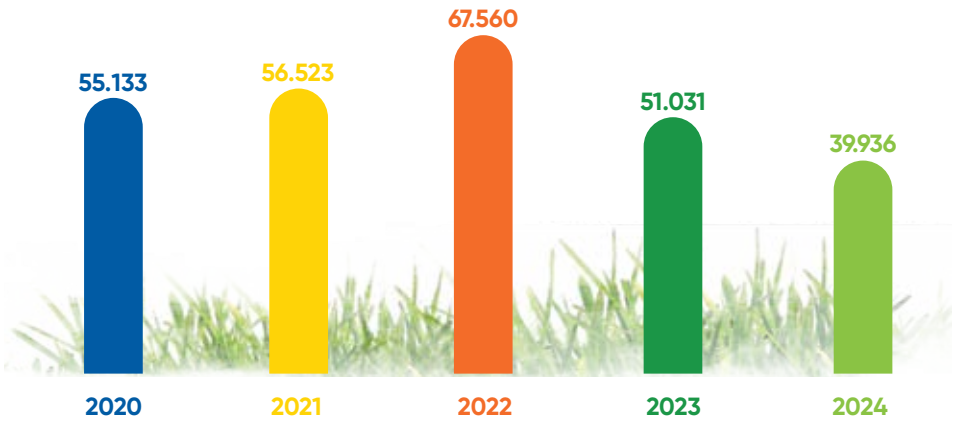
LIABILITAS

Total liabilitas Perusahaan pada tahun 2024 Rp39,94 triliun, turun 21,74% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp51,03 triliun. Penurunan tersebut terutama di kontribusikan oleh penurunan liabilitas jangka panjang yaitu sebesar 29,41%.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Jumlah Liabilitas 2020–2024
Total Liabilities 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



Property, plant and equipment consist of land, buildings and infrastructure, plants and machinery, workshop equipment, vehicles and heavy equipment, office and household furnishings, ships, locomotives and wagons, buffer assets, right-of-use assets, and construction-in-progress. These assets are measured at acquisition cost less accumulated depreciation.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets as of year-end 2024 totaled Rp273.36 billion, an increase of 25.54% from Rp217.75 billion in 2023.

Post-Employment Benefit Assets

Post-employment benefit assets reached Rp654.56 billion in 2024, a significant increase of 134.51% compared to Rp279.11 billion in the previous year.

Other Non-Current Assets

As of December 31, 2024, other non-current assets amounted to Rp2.61 trillion, representing a 19.25% decrease from Rp3.23 trillion in 2023.

LIABILITIES

The Company's total liabilities in 2024 stood at Rp39.94 trillion, reflecting a 21.74% decline from Rp51.03 trillion in 2023. This reduction was primarily driven by a 29.41% decrease in long-term liabilities.

SHORT-TERM LIABILITIES

Jumlah Liabilitas 2023–2024
Total Liabilities 2023–2024

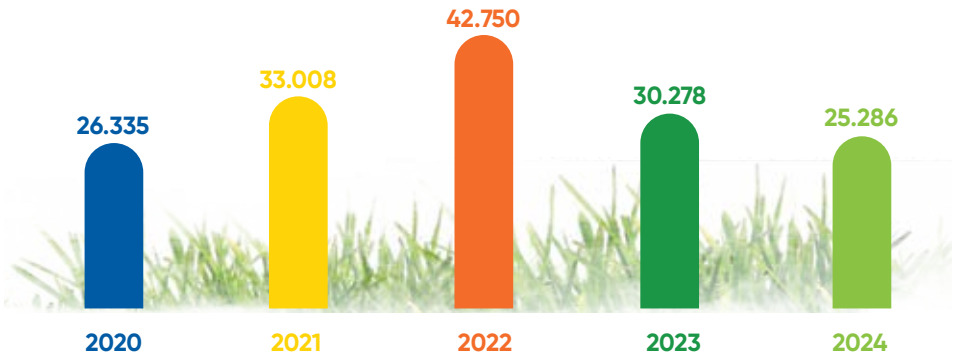
Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	25.286.189	30.278.416	(4.992.227)	(16,49)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	14.649.740	20.752.736	(6.102.996)	(29,41)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**39.935.929**	**51.031.152**	**(11.095.223)**	**(21,74)**

Jumlah liabilitas jangka pendek Perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp25,29 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sekitar Rp30,28 triliun, terjadi penurunan 16,49%. Penurunan tersebut, terutama dikontribusikan penurunan pinjaman bank jangka pendek Rp3,12 triliun.

The Company's total current liabilities as of 2024 amounted to Rp25.29 trillion, a 16.49% decrease compared to Rp30.28 trillion in 2023. This decline was primarily due to a reduction in short-term bank loans amounting to Rp3.12 trillion.

Liabilitas Jangka Pendek
Short-Term Liabilities

Rp miliar | Rp billion



Liabilitas Jangka Pendek
Short-Term Liabilities

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans	4.209.975	7.332.631	(3.122.656)	(42,59)
Utang Usaha Trade Payables	2.335.343	3.569.089	(1.233.746)	(34,57)
Utang Subsidi kepada Pemerintah Indonesia Subsidy Payable to the Government of Indonesia	1.435.708	-	1.435.708	N/A

Liabilitas Jangka Pendek
Short-Term Liabilities

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Utang Bruto kepada Pelanggan untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi Amounts Due to Customers for Construction Contract Work	5.040	5.677	(637)	(11,22)
Utang Lainnya Other Payables	1.264.821	1.204.700	60.121	4,99
Utang Pajak Taxes Payables	618.793	729.276	(110.483)	(15,15)
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar Accrued Liabilities	9.543.703	6.842.022	2.701.681	39,49
Provisi Provisions	860.530	3.414.344	(2.553.814)	(74,80)
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-term Employment Benefit Liabilities	2.638.986	3.082.704	(443.718)	(14,39)
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: Current Maturities of Non-current Borrowings:				
Pinjaman Bank dan Lainnya Bank and Other Loans	1.376.976	1.524.210	(147.234)	(9,66)
Utang Obligasi Bonds Payable	857.394	2.435.029	(1.577.635)	(64,79)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	138.920	138.734	186	0,13
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**25.286.189**	**30.278.416**	**(4.992.227)**	**(16,49)**

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek merupakan salah satu komponen terbesar dalam liabilitas jangka pendek. Pinjaman bank jangka pendek pada tahun 2024 mencapai Rp4,21 triliun, turun 42,59% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp7,33 triliun. Penurunan ini utamanya sejalan dengan adanya penerimaan atas piutang subsidi tahun berjalan.

Short-term Bank Loans

Short-term bank loans remained one of the largest components of current liabilities, amounting to Rp4.21 trillion in 2024. This represents a 42.59% decrease from Rp7.33 trillion in 2023. The reduction was primarily driven by the receipt of government subsidy receivables during the year, which improved the Company's cash position and reduced the need for external financing.

Utang Usaha

Jumlah Utang usaha Perusahaan tahun 2024 mencapai Rp2,34 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,57 triliun, terjadi penurunan 34,57%. Penurunan ini sejalan dengan capaian laba perusahaan. Pada tahun 2024, utang usaha Rekind kepada beberapa pemasok telah direstrukturisasi dengan termin pembayaran menjadi 3-25 tahun tanpa bunga. Restrukturisasi tersebut berdasarkan keputusan homologasi tertanggal 31 Januari 2024. Utang usaha Rekind yang direstrukturisasi tersebut disajikan sebagai liabilitas tidak lancar lainnya.

Trade Payable

Total trade payables decreased to Rp2.34 trillion in 2024, from Rp3.57 trillion in 2023, a decline of 34.57%. This decline is consistent with the Company's profitability improvements. Additionally, in 2024, Rekind's trade payables to several suppliers were restructured with extended payment terms ranging from 3 to 25 years, interest-free. The restructuring was formalized through a court-approved homologation decision dated January 31, 2024. These restructured obligations have been reclassified as other non-current liabilities

Utang Bruto kepada Pelanggan untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi

Jumlah utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi pada tahun 2024 sebesar Rp5,04 miliar, turun 11,22% dibandingkan tahun 2023 yang Rp5,68 miliar.

Utang Lainnya

Jumlah utang lainnya hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp1,26 triliun, naik 4,99% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp1,20 triliun. Kenaikan ini utamanya karena liabilitas kontrak pihak ketiga naik 39,83%.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp618,79 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp729,28 miliar, nilai tersebut menunjukan penurunan sebesar 15,15%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pajak pasal 21 sebesar Rp281,60 miliar atau 82,39%.

Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Jumlah liabilitas yang masih harus dibayar pada 2024 sebesar Rp9,54 triliun, lebih tinggi 39,49% dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar Rp6,84 triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan naiknya biaya bahan bakar dan gas alam serta pencatatan akrual atas kurang bayar pengadaan gas bumi di tahun 2024.

Provisi

Provisi per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp860,53 miliar, turun 74,80% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp3,41 triliun. Penurunan provisi ini utamanya pada provisi liquidated damage dan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi.

Bagian Lancar dari Pinjaman Jangka Panjang: Pinjaman Bank dan Lainnya

Bagian lancar pinjaman bank dan lainnya pada tahun 2024 Rp1,38 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,52 triliun, terjadi penurunan 9,66%.

Bagian Lancar dari Pinjaman Jangka Panjang: Utang Obligasi

Utang obligasi jatuh tempo pada tahun 2024 sekitar Rp857,39 miliar, lebih rendah 64,79% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,44 triliun.

Amounts due to customers for construction contract work

As of 2024, amounts due to customers for construction contract work amounted to Rp5.04 billion, representing a decrease of 11.22% compared to Rp5.68 billion recorded in 2023.

Other Payables

Total Other payables as of 2024 amounted to Rp1.26 trillion, increase of 4.99% compared to Rp1.20 trillion in 2023. The increase was primarily attributable to a 39.83% rise in thirdparty contract liabilities.

Taxes Payables

The Company's taxes payables as of 2024 amounted to Rp 618.79 billion, a 15.15% decrease compared to Rp729.28 billion in 2023. This decrease was mainly driven by a significant decrease in income tax article 21, which declined by Rp281.60 billion or 82.39%.

Accrued Liabilities

Accrued liabilities in 2024 amounted to Rp9.54 trillion, an increase of 39.49% from Rp6.84 trillion in 2023. The increase was largely due to higher fuel and natural gas expenses, as well as accruals recognized for underpayments related to natural gas procurement during the year.

Provisions

As of December 31, 2024, total provisions stood at Rp860.53 billion, marking a significant decrease of 74.80% compared to Rp3.41 trillion in 2023. The decline was mainly attributable to lower provisions for liquidated damages and underpayments of natural gas procurement.

Current Portion of Non-Current Borrowings: Bank and Other Loans

As of 2024, the current portion of non-current borrowings from banks and other institutions was Rp1.38 trillion, reflecting a 9.66% decrease from Rp1.52 trillion in 2023.

Current Portion of Non-Current Borrowings: Bonds Payable

Bonds maturing in 2024 amounted to Rp857.39 billion, a significant decrease of 64.79% compared to Rp2.44 trillion in 2023.

Bagian Lancar dari Pinjaman Jangka Panjang: Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa tahun 2024 sebesar Rp138,92 miliar. Sedikit naik dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp138,73 miliar.

Current Portion of Non-Current Borrowings: Lease Liabilities

Lease liabilities as of 2024 amounted to Rp138.92 billion, showing a slight increase compared to Rp138.73 billion in 2023.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

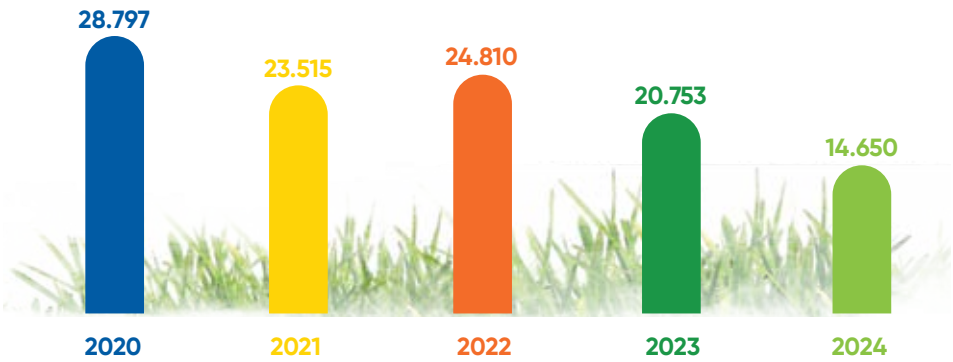
Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Pinjaman Jangka Panjang: Non-Current Borrowings:				
Pinjaman Bank dan Lainnya Bank and Other Loans	7.986.445	13.459.479	(5.473.034)	(40,66)
Utang Obligasi Bonds Payable	2.823.534	3.687.742	(864.208)	(23,43)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	115.362	147.684	(32.322)	(21,89)
Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-employment Benefits Liabilities	2.701.672	2.712.734	(11.062)	(0,41)
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	828.425	708.007	120.418	17,01
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya Other non-current liabilities	194.302	37.090	157.212	423,87
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**14.649.740**	**20.752.736**	**(6.102.996)**	**(29,41)**

Liabilitas jangka panjang Perusahaan tahun 2024 mencapai Rp14,65 triliun, lebih rendah 29,41% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp20,75 triliun. Penurunan tersebut, terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank dan lainya Rp5,47 triliun.

The Company's long-term liabilities in 2024 amounted to Rp14.65 trillion, 29.41% lower than in 2023 which amounted to Rp20.75 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in loans from banks and others of Rp5.47 trillion.

Liabilitas Jangka Panjang 2020–2024
Non-Current Liabilities 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



Pinjaman Jangka Panjang-Pinjaman Bank dan Lainnya

Pinjaman bank jangka panjang dan lainnya yang merupakan komponen terbesar dalam liabilitas jangka panjang, 2024 tercatat sebesar Rp7,99 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp13,46 triliun, mengalami penurunan 40,66%.

Pinjaman Jangka Panjang-Setelah Dikurangi Bagian lancar: Utang Obligasi

Utang obligasi tahun 2024 mencapai Rp2,82 triliun, turun 23,43% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp3,69 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan perusahaan melakukan pelunasan atas Obligasi Berkelanjutan I PTPI - Tahap I Tahun 2017.

Pinjaman Jangka Panjang-Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa tahun 2024 turun 21,89% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp147,68 miliar di tahun 2023, menjadi Rp115,36 miliar pada tahun 2024.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp2,70 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,71 triliun, terjadi sedikit penurunan sebesar 0,41%. Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.
Liabilitas pajak tangguhan hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp828,43 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp708,00 miliar, terjadi kenaikan 17,01%.

Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Liabilitas tidak lancar lainnya hingga akhir tahun buku 2024 sebesar Rp194,30 miliar, naik 423,87% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp37,09 miliar.

EKUITAS

Jumlah ekuitas Perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp99,36 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp91,97 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp7,40 triliun atau 8,04%. Pertumbuhan ini mencerminkan posisi keuangan yang semakin kuat di tahun ini.

Long-Term Loans – Bank and Other Loans

Long-term bank loans and other borrowings, which represent the largest component of the Company's non-current liabilities, amounted to Rp7.99 trillion in 2024. This reflects a 40.66% decrease compared to Rp13.46 trillion in 2023.

Long-Term Loans – Net of Current Portion: Bonds Payable

Bonds payable in 2024 amounted to Rp2.82 trillion, representing a 23.43% decrease from Rp3.69 trillion in 2023. This decline was primarily due to the Company's repayment of the PTPI Shelf Registration Bonds I – Phase I Year 2017.

Long-Term Loans – Lease Liabilities

Lease liabilities in 2024 decreased by 21.89%, from Rp147.68 billion in 2023 to Rp115.36 billion in 2024, reflecting decreased long-term lease obligations.

Post-Employment Benefit Liabilities

As of the end of 2024, post-employment benefit liabilities stood at Rp2.70 trillion, a marginal decrease of 0.41% from Rp2.71 trillion in 2023. Management believes that the estimated liabilities and employee benefits under the Group's pension programs, as determined by actuarial calculations, exceed the minimum requirements mandated by the Job Creation Law (UU Cipta Kerja).

Deferred Tax Liabilities

Deferred tax liabilities represent the income tax obligations arising from temporary differences that are expected to reverse in future periods. As of year-end 2024, deferred tax liabilities amounted to Rp828.43 billion, an increase of 17.01% compared to Rp708.00 billion in 2023.

Other Non-Current Liabilities

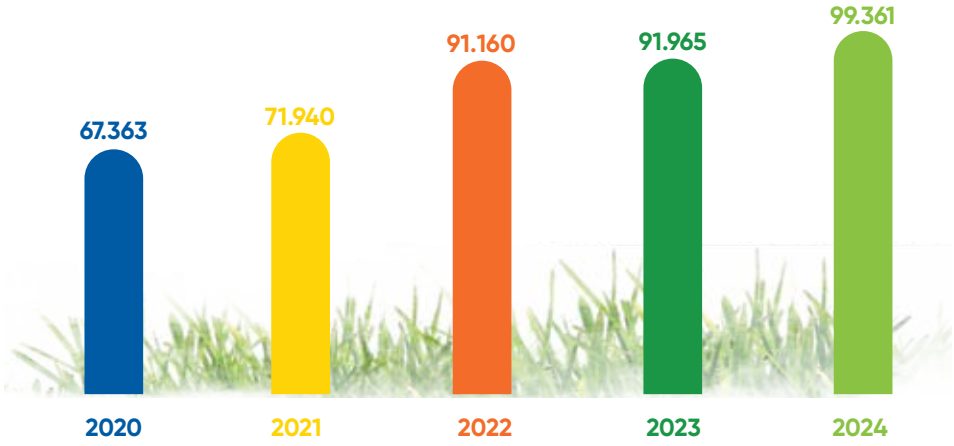
Other non-current liabilities amounted to Rp194.30 billion at the end of 2024, a significant increase of 423.87% from Rp37.09 billion in 2023.

EQUITY

As of 2024, the Company's total equity amounted to Rp99.36 trillion, representing an increase of Rp7.40 trillion or 8.04% compared to Rp91.97 trillion in 2023. This growth reflects the Company's strengthened financial position during the year.

Jumlah Ekuitas 2020–2024
Total Equity 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



Ekuitas 2023–2024
Equity 2023–2024

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity				
Modal Saham Share Capital	25.000.000	25.000.000	-	-
Saldo Laba: Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	39.018.434	34.031.056	4.987.378	14,66
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	5.412.512	2.944.386	2.468.126	83,82
Komponen Ekuitas Lainnya Other Components of Equity	29.656.092	29.908.402	(252.310)	(0,84)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	99.087.038	91.883.844	7.203.194	7,84
Kepentingan non-pengendali Non-controlling Interests	273.688	81.334	192,354	236,50
Jumlah Ekuitas Total Equity	**99.360.726**	**91.965.178**	**7.395.548**	**8,04**

Kinerja ekuitas dipengaruhi oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang terdiri dari modal saham, saldo laba baik yang dicadangkan maupun belum dicadangkan, penghasilan komprehensif lain serta ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali.

The Company's equity performance is primarily driven by equity attributable to the owners of the parent entity, which comprises share capital, retained earnings (both appropriated and unappropriated), other comprehensive income, and equity attributable to non-controlling interests.

Pada tahun 2024, nilai ekuitas Perusahaan sebesar Rp99,36 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp91,97 triliun, terjadi kenaikan 8,04%.

Modal Saham

Modal saham Perusahaan per tanggal 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp25 triliun. Tidak terdapat perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Saldo Laba

Saldo laba terdiri dari saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya.

- Saldo laba yang ditentukan penggunaannya tahun 2024 sebesar Rp39,02 triliun, naik 14,66% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp34,03 triliun.
- Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tahun 2024 sebesar Rp5,41 triliun, lebih tinggi 83,82% dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar Rp2,94 triliun.

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan wajib dari keuntungan paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya (*appropriated*) meliputi cadangan terkait pemenuhan kewajiban sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan cadangan umum lainnya.

Komponen Ekuitas Lainnya

Komponen ekuitas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp29,66 triliun, turun 0,84% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp29,91 triliun.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024 sebesar Rp99,08 triliun, naik 7,84% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp91,88 triliun.

Kepentingan Non-Pengendali

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali tahun 2024 sebesar Rp273,69 miliar, naik 236,50% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp81,33 miliar.

As of 2024, the Company's total equity stood at Rp99.36 trillion, marking an increase of 8.04% from Rp91.97 trillion in 2023.

Share Capital

As of December 31, 2024, the Company's share capital remained unchanged at Rp25 trillion, consistent with the previous year.

Retained Earnings

Retained earnings are classified into appropriated and unappropriated categories:

- Appropriated retained earnings in 2024 amounted to Rp39.02 trillion, an increase of 14.66% compared to Rp34.03 trillion in 2023.
- Unappropriated retained earnings in 2024 amounted to Rp5.41 trillion, a significant increase of 83.82% from Rp2.94 trillion in 2023.

In accordance with the Indonesian Company Law, companies are mandated to allocate a statutory reserve from net profits, amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Appropriated reserves include those allocated to fulfill statutory obligations as mandated by applicable laws and regulations.

Other Equity Components

Other components of equity as of December 31, 2024, amounted to Rp29.66 trillion, a slight decline of 0.84% compared to Rp29.91 trillion in 2023.

Equity Attributable to Owners of the Parent

Equity attributable to the owners of the parent entity reached Rp99.08 trillion in 2024, an increase of 7.84% from Rp91.88 trillion in 2023, reflecting continued growth in retained earnings.

Non-Controlling Interests

Equity attributable to non-controlling interests stood at Rp273.69 billion in 2024, a substantial increase of 236.50% compared to Rp81.33 billion in the previous year.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laba tahun berjalan Perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp8,89 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,25 triliun, naik 42,10%.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

In 2024, the Company recorded a profit for the year of Rp8.89 trillion, representing a 42.10% increase compared to Rp6.25 trillion in 2023.

Uraian Description	**2024 Rp juta** Rp million	**2023 Rp juta** Rp million	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	**Persentase** Percentage **(%)**
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Revenue from Contract with Customers	81.616.208	79.207.267	2.408.941	3,04
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(65.590.416)	(63.303.146)	(2.287.270)	3,61
Laba Bruto Gross Profit	16.025.792	15.904.121	121.671	0,77
Beban Penjualan Selling Expenses	(1.039.742)	(1.276.030)	236.288	(18,52)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(5.970.735)	(5.031.467)	(939.268)	18,67
Pendapatan Lainnya-Bersih Other Income-Net	3.677.940	157.838	3.520.102	2230,20
Laba Operasi Operating Profit	12.693.255	9.754.462	2.938.793	30,13
Pendapatan Keuangan Finance Income	1.026.960	925.137	101.823	11,01
Biaya Keuangan Finance Costs	(1.917.934)	(2.519.821)	601.887	(23,89)
Bagian atas Laba/(Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures	(581.710)	447.295	(1.029.005)	(230,05)
Laba sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	11.220.571	8.607.073	2.613.498	30,36
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(2.334.533)	(2.353.514)	18.981	(0,81)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	8.886.038	6.253.559	2.632.479	42,10
Jumlah (Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Total Other (Loss)/ Comprehensive Income for the Year after Tax	(252.310)	(377.799)	125.489	(33,22)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	8.633.728	5.875.760	2.757.968	46,94

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Total Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Profit for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	8.668.906	6.200.780	2.468.126	39,80
Kepentingan Nonpengendali Non-controlling interests	217.132	52.779	164.353	311,40
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	8.416.596	5.822.981	2.593.615	44,54
Kepentingan Nonpengendali Non-controlling interests	217.132	52.779	164.353	311,40
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk-Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah penuh) Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity-Basic and Diluted (in full Rupiah)	346.756	248.031	98.725	39,80

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Perusahaan diperoleh dari 3 (tiga) segmen usaha: segmen pupuk dan amoniak, jasa konstruksi, dan segmen lainnya.

Pada tahun 2024, penjualan dan pendapatan usaha lainnya mencapai Rp81,62 triliun, naik 3,04% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp79,21 triliun. Kenaikan ini utamanya dikontribusikan dari segmen pupuk dan amoniak.

Revenue from Contracts with Customers

As described in the section Overview of Operations by Business Segment, the Company's sales and other revenues are generated from three business segments: fertilizer and ammonia, construction services, and other segments.

In 2024, the Company recorded sales and other revenues of Rp81.62 trillion, representing an increase of 3.04% compared to Rp79.21 trillion in 2023. This growth was primarily driven by the fertilizer and ammonia segment.

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya berdasarkan Segmen Sales and Other Revenues by Segment	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total Rp juta Rp million	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total Rp juta Rp million	Kontribusi Contribution (%)	Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Pendapatan dari Segmen Pupuk dan Amoniak Revenue from Fertilizer and Ammonia Segment	81.181.882	99,47	78.937.710	99,66	2.244.172	2,84
Pendapatan dari Segmen Jasa Konstruksi Revenue from Construction Services Segment	4.376.461	5,36	2.225.789	2,81	2.150.672	96,63
Pendapatan dari Segmen Lainnya Revenue from Other Segments	5.699.904	6,98	13.376.279	16,89	(7.676.375)	(57,39)
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya sebelum Eliminasi Total Sales and Other Revenues before Elimination	91.258.247	111,81	94.539.778	119,36	(3.281.531)	(3,47)
Eliminasi Elimination	(9.642.039)	(11,81)	(15.332.511)	(19,36)	5.690.472	(37,11)
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Revenues	**81.616.208**	**100,00**	**79.207.267**	**100,00**	**2.408.941**	**3,04**

Pada tahun 2024, kontribusi segmen pupuk dan amoniak masih merupakan yang terbesar, yaitu 99,47% terhadap total penjualan dan pendapatan lainnya. Selanjutnya, diikuti oleh segmen lainnya yaitu sebesar 6,98% terhadap total penjualan dan pendapatan.

In 2024, the fertilizer and ammonia segment remained the primary contributor, accounting for 99.47% of total sales and other revenue. This was followed by other segments, which contributed 6.98% to the total sales and revenue.

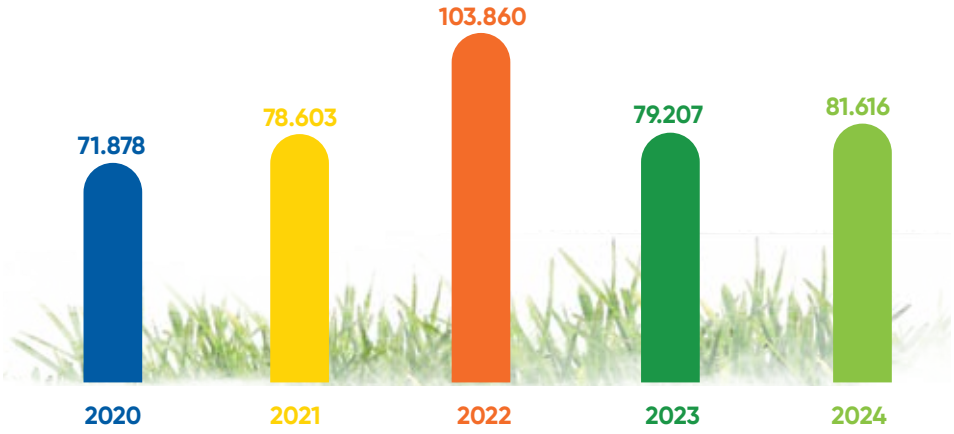
Perusahaan melaksanakan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

The Company implements the fertilizer subsidy program from the Government of Indonesia in accordance with Minister of Agriculture Regulation No. 1 of 2024 concerning Amendments to Minister of Agriculture Regulation No. 10 of 2022 on the Procedures for Determining the Allocation and the Highest Retail Price (HET) of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector.

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Penjualan Segmen Pupuk dan Amoniak serta Segmen Lainnya Sales of Fertilizer and Ammonia Segment and Other Segments				
Penjualan produk Sales of products	44.202.966	44.221.081	(18.115)	(0,04)
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia	33.323.915	32.512.230	811.685	2,50
Pendapatan jasa Rendering of Services	4.089.327	2.473.956	1.615.371	65,30
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Total revenue from contract with customers	**81.616.208**	**79.207.267**	**2.408.941**	**3,04**

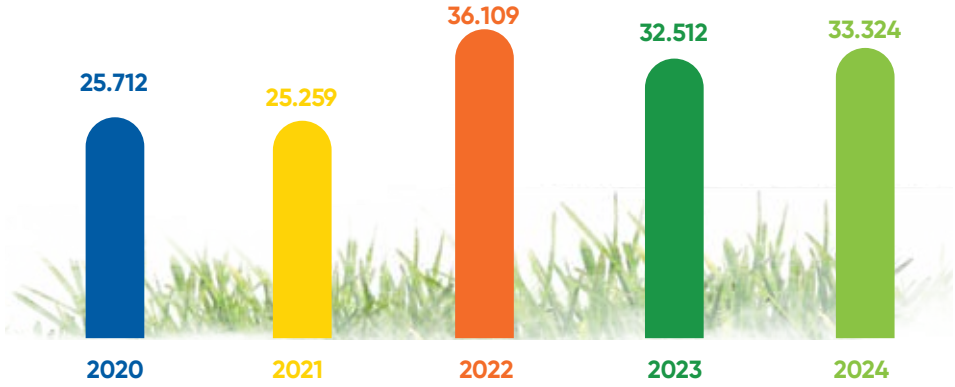
Perkembangan Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya 2020–2024
Trends in Total Sales and Other Revenues (2020–2024)

Rp miliar | Rp billion



Perkembangan Besaran Subsidi dari Pemerintah 2020–2024
Development of Government Subsidy Amount 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



Penjualan Produk
Product Sales

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Penjualan Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer Sales	13.237.968	11.191.700	2.046.268	18,28
Penjualan Pupuk NonSubsidi Sales of Non-Subsidized Fertilizer	22.884.956	22.620.206	264.750	1,17
Penjualan Non-Pupuk Non-Fertilizer Sales	8.008.055	10.210.582	(2.202.527)	(21,57)
Penjualan Produk Lainnya Sales of Other Products	71.987	198.593	(126.606)	(63,75)
Jumlah Penjualan Produk Total Product Sales	**44.202.966**	**44.221.081**	**(18.115)**	**(0,04)**

Nilai penjualan pupuk (subsidi dan non subsidi) tahun 2024 mengalami kenaikan 6,83% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33,81 triliun, menjadi Rp36,12 triliun. Sedangkan penjualan non pupuk turun 21,57% dan penjualan produk lainnya turun 63,75%.

The combined sales value of subsidized and non-subsidized fertilizers increased by 6.83% in 2024 to Rp36.12 trillion, from Rp33.81 trillion in the prior year. Conversely, non-fertilizer sales declined by 21.57%, and sales of other products dropped by 63.75%.

Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia
Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Subsidi Pupuk: Subsidy of fertilizers:				
Urea Urea	12.636.330	12.369.350	266.980	2,16
NPK NPK	20.531.568	19.332.118	1.199.450	6,20
SP-36 SP-36	-	-	-	N/A
ZA ZA	-	-	-	N/A
Organik Organic	45.585	-	45.585	N/A

Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia
Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
NPK Kakao NPK Cocoa	339.164	337.722	1.442	0,43
Subtotal Subtotal	33.552.647	32.039.190	1.513.457	4,72
Penyesuaian Piutang Subsidi dari Pemerintah, yang Belum Ditagih-Bersih setelah Penyesuaian Tahun Sebelumnya Adjustment to Unbilled Government Subsidy Receivables – Net of Prior Year Adjustment	(228.732)	473.040	(701.772)	(148,35)
Jumlah Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Total Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia	**33.323.915**	**32.512.230**	**811.685**	**2,50**

Penggantian biaya subsidi dari pemerintah tahun 2024 mencapai Rp33,32 triliun, naik 2,50% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp32,51 triliun. Kenaikan ini seiring dengan capaian tonase penyaluran PSO tahun 2024 yang naik 18% dari tahun 2023.

The reimbursement of subsidy from government of Indonesia reached Rp33.32 trillion in 2024, representing a 2.50% increase from Rp32.51 trillion in 2023. This growth was aligned with an 18% increase in Public Service Obligation (PSO) distribution volume year-over-year.

Pendapatan Jasa
Rendering of Services

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Konstruksi Construction Revenue	1.999.787	626.230	1.373.557	219,34
Pendapatan dari transaksi tenaga listrik Revenue from electronic power transaction	174.078	386.673	(212.595)	(54,98)
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	977.532	475.825	501.707	105,44
Pendapatan Konstruksi dari Perjanjian Konsesi Jasa Construction Revenue from Service Concession Agreement	451.076	640.694	(189.618)	(29,60)
Pendapatan Keuangan dari Perjanjian Konsesi Jasa Finance Income from Service Concession Arrangement	118.438	121.439	(3.001)	(2,47)
Lainnya Others	368.416	223.095	145.321	65,14
Jumlah Pendapatan Jasa Total Rendering of Services	**4.089.327**	**2.473.956**	**1.615.371**	**65,30**

Pendapatan jasa tahun 2024 sebesar Rp4,09 triliun naik 65,30% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,47 triliun. Peningkatan ini utamanya berasal dari pendapatan konstruksi yang naik sebesar 219,34% serta pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 105,44% dibandingkan tahun 2023.

Revenue from the rendering of services in 2024 amounted to Rp4.09 trillion, an increase of 65.30% compared to Rp2.47 trillion in 2023. This increase was primarily driven by construction service revenue, which rose by 219.34%, as well as operation and maintenance service revenue, which increased by 105.44% compared to 2023.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan terdiri dari beban manufaktur (biaya produksi, persediaan barang jadi, barang dalam proses) dan beban non-manufaktur. Beban pokok pendapatan Perusahaan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

COST OF REVENUE

Cost of revenue comprises manufacturing costs—including production expenses, inventories of finished goods, and work-in-progress—as well as non-manufacturing costs. The Company's cost of revenue by account is detailed in the table below:

Beban Pokok Pendapatan
Cost of Revenue

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Bahan Baku yang Digunakan Raw Materials Used	45.078.668	46.524.427	(1.445.759)	(3,11)
Biaya Overhead Lainnya Other Overhead Costs	5.326.416	4.201.566	1.124.850	26,77
Beban Penyusutan Depreciation Expenses	5.025.076	4.565.168	459.908	10,07
Biaya Tenaga Kerja Langsung Direct Labour	3.516.350	3.703.274	(186.924)	(5,05)
Perbaikan dan Pemeliharaan Repairs and Maintenance	895.865	1.298.132	(402.267)	(30,99)
Penyesuain beban imbalan pascakerja - biaya jasa lalu Adjustment of post-employment benefit expense - past service cost	(331.567)	-	(331.567)	N/A
Jumlah Biaya Produksi Total Production Costs	**59.510.808**	**60.292.567**	**(781.759)**	**(1,30)**

Beban Pokok Pendapatan
Cost of Revenue

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Persediaan Barang Jadi dan Barang Dalam Proses: Finished Goods and Work in Progress Inventories:				
Awal Tahun Beginning of the Year	11.743.310	10.883.698	859.612	7,90
Akhir Tahun End of the Year	(9.371.296)	(11.743.310)	2.372.014	(20,20)
	61.882.822	59.432.955	2.449.867	4,12
Beban Non-Manufaktur Non-Manufacturing Cost				
Perdagangan Trading	2.143.164	1.637.782	505.382	30,86
Listrik, Steam, dan Utilitas Electricity, Steam, and Utilities	1.189.284	876.859	312.425	35,63
Jasa Konstruksi Construction Services	220.253	645.757	(425.504)	(65,89)
Properti dan Jasa Kawasan Industri Properties and Services Industrial Estate	51.577	49.683	1.894	3,81
Lain-lain Others	103.316	660.110	(556.794)	(84,35)
Jumlah Beban Non-Manufaktur Total Cost of Non-Manufacturing	3.707.594	3.870.191	(162.597)	(4,20)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenues	**65.590.416**	**63.303.146**	**2.287.270**	**3,61**

Beban pokok pendapatan tahun 2024 sebesar Rp65,59 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp63,30 triliun, terjadi peningkatan 3,61%. Beban manufaktur pada tahun 2024 turun 1,30% atau setara dengan Rp781,76 miliar, yang utamanya disebabkan penurunan pada biaya bahan baku yang digunakan dari Rp46,52 triliun di tahun 2023 menjadi Rp45,08 miliar di tahun 2024. Beban non manufaktur menurun 4,20% yang utamanya disebabkan penurunan pada beban jasa konstruksi dan juga beban lain-lain.

Cost of revenue in 2024 amounted to Rp65.59 trillion, representing an increase of 3.61% compared to Rp63.30 trillion in 2023. Manufacturing expenses in 2024 decreased by 1.30%, or equivalent to Rp781.76 billion, primarily due to a reduction in raw material costs, which declined from Rp46.52 trillion in 2023 to Rp45.08 trillion in 2024. Non-manufacturing expenses decreased by 4.20%, mainly due to lower construction service expenses and other miscellaneous costs.

LABA BRUTO

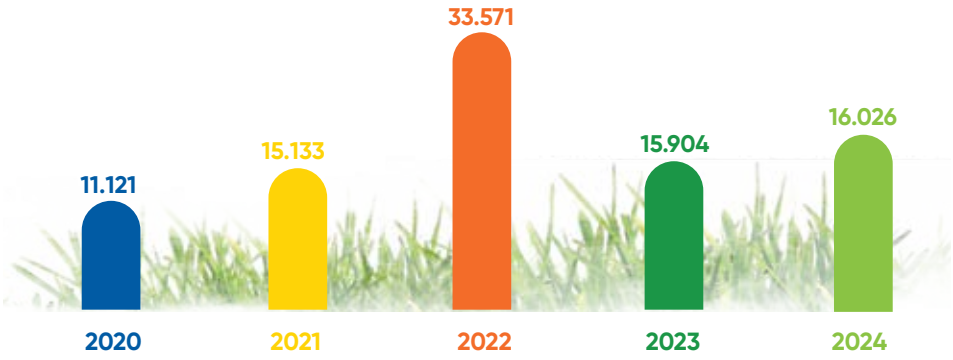
Laba bruto didapatkan dari akun penjualan dan pendapatan usaha lainnya yang diakumulasikan dengan beban pokok pendapatan. Perusahaan mencatat laba bruto tahun 2024 sebesar Rp16,03 triliun, naik 0,77% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp15,90 triliun.

GROSS PROFIT

Gross profit is derived from the aggregation of revenue from sales and other operating income, net of cost of revenue. In 2024, the Company recorded a gross profit of Rp16.03 trillion, representing an increase of 0.77% compared to Rp15.90 trillion in 2023.

Perkembangan Laba Bruto 2020–2024
Gross Profit Development 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



BEBAN PENJUALAN

Beban penjualan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SELLING EXPENSES

Sales expenses per account can be seen in the table below:

Beban Penjualan
Selling Expenses

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Salary, Wages, and Welfare	392.362	491.574	(99.212)	(20,18)
Biaya Jasa Service Fee	125.482	138.191	(12.709)	(9,20)
Beban Sewa Rental Expenses	50.723	78.934	(28.211)	(35,74)
Beban Promosi dan pemasaran Promotion and marketing expenses	189.503	158.746	30.757	19,37
Beban Penyusutan Depreciation Expense	108.125	86.912	21.213	24,41
Beban Perlengkapan dan Operasional Kantor Office Supplies and Operating Expenses	39.863	40.161	(298)	(0,74)
Beban Perjalanan Dinas Office Travel Expenses	22.438	25.311	(2.873)	(11,35)
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	62.528	37.789	24.739	65,47
Beban Penelitian Research Load	14.159	14.130	29	0,21

Beban Penjualan
Selling Expenses

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Beban Unit Pelayanan dan Utilitas Service Unit and Utility Charges	8.560	20.420	(11.860)	(58,08)
Beban Asuransi Insurance Expenses	20.265	22.916	(2.651)	(11,57)
Beban Pelatihan Training cost	10.881	12.913	(2.032)	(15,74)
Penyesuaian Beban Imbalan Pascakerja – Biaya Jasa Lalu Adjustment of Post-Employment Benefits Expense - Past Service Costs	(28.167)	-	(28.167)	N/A
Beban Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000) Other Expenses (each below Rp10,000)	23.020	148.033	(125.013)	(84,45)
Jumlah Beban Penjualan Total Selling Expenses	**1.039.742**	**1.276.030**	**(236.288)**	**(18,52)**

Beban penjualan tahun 2024 mencapai Rp1,04 triliun, lebih rendah 18,52% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp1,28 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan pada gaji,upah dan kesejahteraan yaitu turun 20,18% atau setara Rp99,21 miliar.

Selling expenses in 2024 amounted to Rp1.04 trillion, a decrease of 18.52% compared to Rp1.28 trillion in 2023. The reduction was primarily attributable to a 20.18% decrease in salaries, wages, and employee benefits, equivalent to Rp99.21 billion.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi perusahaan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The company's general and administrative expenses per account can be seen in the table below:

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Salary, Wages and Welfare	2.452.417	2.054.588	397.829	19,36
Beban Jasa Service Charges	891.393	887.365	4.028	0,45
Beban Pajak Tax Expenses	212.933	419.849	(206.916)	(49,28)
Beban Unit Pelayanan dan Utilitas Service Unit and Utility Expenses	182.911	192.818	(9.907)	(5,14)
Beban Penyusutan Depreciation Expenses	200.655	174.141	26.514	15,23
Beban Bina Wilayah Regional Development Expenses	250.864	263.094	(12.230)	(4,65)
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	129.679	78.386	51.293	65,44
Beban Sewa Rent Expenses	81.839	37.007	44.832	121,14

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Beban Promosi dan Pemasaran Promotion and Marketing Expenses	261.235	231.237	29.998	12,97
Beban Perlengkapan dan Operasional Kantor Supply and Office Operating Expenses	148.632	167.745	(19.113)	(11,39)
Beban Pelatihan Training Expenses	159.163	115.861	43.302	37,37
Biaya Perjalanan Dinas Travel Expenses	195.459	158.229	37.230	23,53
Beban Penelitian Research Expenses	50.693	61.905	(11.212)	(18,11)
Penambahan Penurunan Nilai Aset Tetap Addition Impairment of Fixed Assets	54.338	-	54.338	N/A
Beban Asuransi Insurance Expense	17.773	22.354	(4.581)	(20,49)
Penambahan cadang kerugian penurunan nilai piutang – bersih Additional provision for impairment of receivables – net	546.925	29.341	517.584	1.764,03
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu Adjusment of post-employment benefit expense – past service cost	(164.275)	-	(164.275)	N/A
Beban Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000) Other Expenses (each below Rp10.000)	298.101	137.547	160.554	116,73
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Total General and Administrative Expenses	**5.970.735**	**5.031.467**	**939.268**	**18,67**

Beban umum dan administrasi tahun 2024 sebesar Rp5,97 triliun, naik 18,67% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp5,03 triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan kenaikan pada biaya gaji, upah dan kesejahteraan naik 19,36% atau setara Rp397,83 miliar.

General and administrative expenses amounted to Rp5.97 trillion in 2024, increasing by 18.67% from Rp5.03 trillion in 2023. This rise was primarily driven by a 19.36% increase in salaries, wages, and employee benefits, which accounted for Rp397.83 billion.

PENDAPATAN LAINNYA-BERSIH

Pendapatan lainnya-bersih tahun 2024 sebesar Rp3,68 triliun, lebih tinggi 2.230,20% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp157,84 miliar. Hal ini utamanya dikontribusikan dari keuntungan atas restrukturisasi utang dan pinjaman Rekind sebesar Rp3,27 triliun.

OTHER INCOME-NET

Net other income surged to Rp3.68 trillion in 2024, marking an increase of 2,230.20% from Rp157.84 billion in 2023. This substantial gain was mainly attributed to a profit of Rp3.27 trillion from the restructuring of debt and Rekind loans.

LABA OPERASI

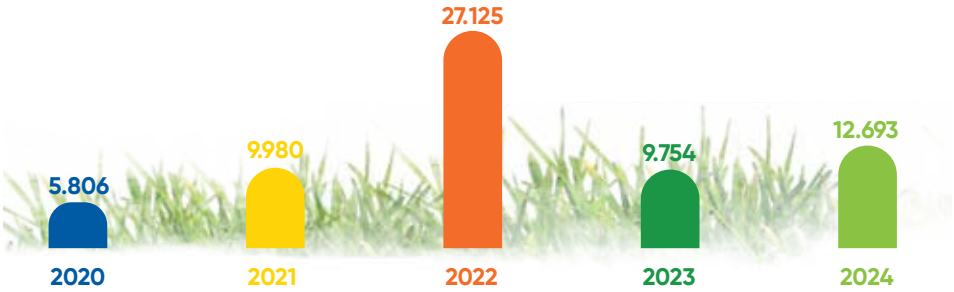
Laba operasi didapatkan dari akun laba bruto yang diakumulasikan dengan beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta (beban) pendapatan lainnya-bersih. Laba operasi tahun 2024 mencapai Rp12,69 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp9,75 triliun, terjadi kenaikan 30,13%.

OPERATING PROFIT

This figure was derived from the gross profit after accounting for general and administrative expenses, selling expenses, and net other income. Operating profit for 2024. Operating profit for 2024 reached Rp12.69 trillion, representing a 30.13% increase from Rp9.75 trillion in 2023.

Perkembangan Laba Usaha 2020–2024
Net Profit Development 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



PENDAPATAN KEUANGAN

Pendapatan keuangan Perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp1,02 triliun, naik 11,01% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp925,14 miliar.

FINANCIAL INCOME

The Company's financial income in 2024 amounted to Rp1.02 trillion, increase 11.01% compared to Rp925.4 billion in 2023.

Biaya Keuangan
Finance Costs

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans	745.118	1.284.073	(538.955)	(41,97)
Utang Obligasi Bonds Payable	350.799	514.730	(163.931)	(31,85)
Pinjaman Jangka Panjang Long-term Loan	351.547	728.439	(376.892)	(51,74)
Amortisasi atas Resrukturi Utang dan Pinjaman-Rekind Amortisasion of Restructured Payables and Loans-Rekind	227.456	-	227.456	N/A
Biaya Bank dan Pinjaman Bank and Loan Cost	84.992	74.558	10.434	13,99
Kerugian/(Keuntungan) Selisih Kurs atas Pinjaman Foreign Exchange Loss/(Gain) on Borrowings	158.022	(81.979)	240.001	(292,76)
Jumlah Biaya Keuangan Total Finance Cost	**1.917.934**	**2.519.821**	**(601.887)**	**(23,89)**

Biaya keuangan yang dikeluarkan Perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp1,92 triliun, turun 23,89% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,52 triliun. Penurunan ini utamanya di kontribusikan oleh penurunan pinjaman Bank jangka pendek sebesar Rp538,96 miliar atau turun 41,97% dan penurunan pinjaman jangka panjang sebesar Rp376,89 miliar atau turun 51,74%.

BAGIAN ATAS LABA/(RUGI) BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Bagian atas Rugi bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama pada tahun 2024 mencapai Rp581,71 miliar. Sementara pada tahun 2023 yang diterima Perusahaan sebesar Laba Rp447,30 miliar.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2024 sebesar Rp11,22 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp8,61 triliun, terjadi kenaikan 30,36%.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Total beban pajak penghasilan Perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp2,33 triliun, turun 0,81% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,35 triliun.

LABA TAHUN BERJALAN

Jumlah laba tahun berjalan yang diperoleh Perusahaan di tahun 2024 mencapai Rp8,89 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,25 triliun, terjadi kenaikan sebesar 42,10%. Kenaikan ini utamanya disebabkan:

1. Volume penjualan produk komersil (pupuk & non pupuk) mencapai 100,97% dari RKAP.
2. Efisiensi beban keuangan yaitu Rp1,92 Triliun atau 77,89% dari RKAP.
3. Pencatatan gain atas restrukturisasi pinjaman Rp2,44 Triliun dan restrukturisasi utang usaha Rekind Rp833,62 Miliar.

Finance costs incurred by the Company in 2024 reached Rp1.92 trillion, a decrease of 23.89% compared to the year 2023 which amounted to Rp2.52 trillion. This decrease was mainly contributed by a decrease in short-term bank loans of Rp538.96 billion or a decrease of 41.97% and a decrease in long-term loans of Rp376.89 billion or a decrease of 51.74%.

SHARE OF NET (LOSS)/PROFIT OF ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

The share of net income from associates and joint ventures in 2024 reached Rp581.71 billion. While in 2023, the Company received Rp447.30 billion.

PROFIT BEFORE INCOME TAX

The company recorded profit before income tax in 2024 of Rp11.22 trillion. Compared to the realization in 2023 of Rp8.61 trillion, there was an increase of 30.36%.

INCOME TAX EXPENSE

The Company's total income tax expense in 2024 reached Rp2.33 trillion, decreased 0.81% compared to 2023 which amounted to Rp2.35 trillion.

PROFIT FOR THE YEAR

The total profit for the year earned by the Company in 2024 reached Rp8.89 trillion. Compared to 2023 which amounted to Rp6.25 trillion, there was an increase of 42.10%. This increase was mainly due to:

1. Sales volume of commercial products (fertilizer & non-fertilizer) reached 100.97% of the RKAP.
2. Financial expense efficiency of Rp1.92 trillion, equivalent to 77.89% of the RKAP.
3. Gains from the restructuring of loans amounting to Rp2.44 trillion trade payables amounting to Rp833,62 billion.

Perkembangan Laba Tahun Berjalan 2020–2024
Profit for the year development 2020-2024

Rp miliar | Rp billion



PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan/(rugi) Komprehensif lain per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)

Other comprehensive income/(loss) per account can be seen in the table below:

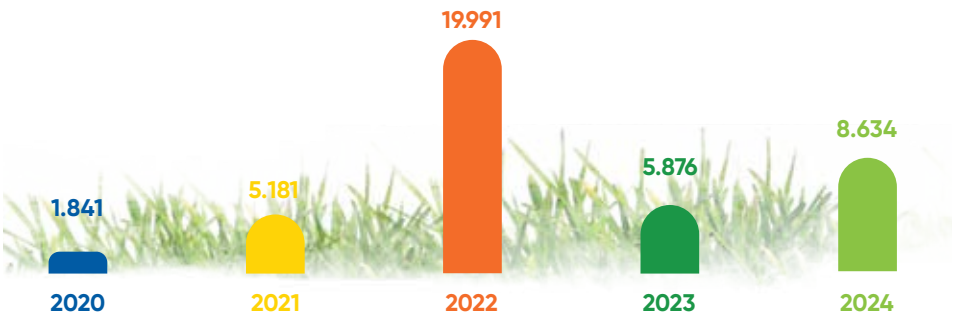
Uraian Description	**2024 Rp juta** Rp million	**2023 Rp juta** Rp million	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	**Persentase** Percentage **(%)**
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak Difference in Foreign Currency Arising from Translation of the Financial Statements of Subsidiaries	73.991	(14.330)	88.321	(616,34)
Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Remesurement Loss on Defined Benefit Plans	(408.978)	(500.415)	91.437	(18,27)
Lainnya Others	(7.298)	(319)	(6.979)	2.187,71
Manfaat Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax Benefit	89.975	137,265	(47.290)	(34,45)
	(326.301)	(363.469)	37.168	(10,23)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Total Other Comprehensive Income for the Year After Taxes	**(252.310)**	**(377.799)**	**125.489**	**(33,22)**

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan didapatkan dari akun laba tahun berjalan yang diakumulasikan dengan laba (rugi) komprehensif lain setelah pajak. Pada tahun 2024, nilainya mencapai Rp252,31 miliar, turun 33,22% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp377,80 triliun.

Total comprehensive income for the year consists of net profit for the year combined with other comprehensive income (loss) after tax. In 2024, the value reached Rp252.31 billion, down 33.22% compared to 2023 which amounted to Rp377.80 trillion.

Perkembangan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 2020–2024
Development of Total Comprehen sive Income for the Year 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2024 sebesar Rp8,67 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,20 triliun, terjadi kenaikan 39,80%.

PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY

In 2024, profit for the year attributable to the owners of the parent entity amounted to Rp8.67 trillion, an increase of 39.80% compared to Rp6.20 trillion in 2023.

Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 2020–2024
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA KEPENTINGAN NON PENGENDALI

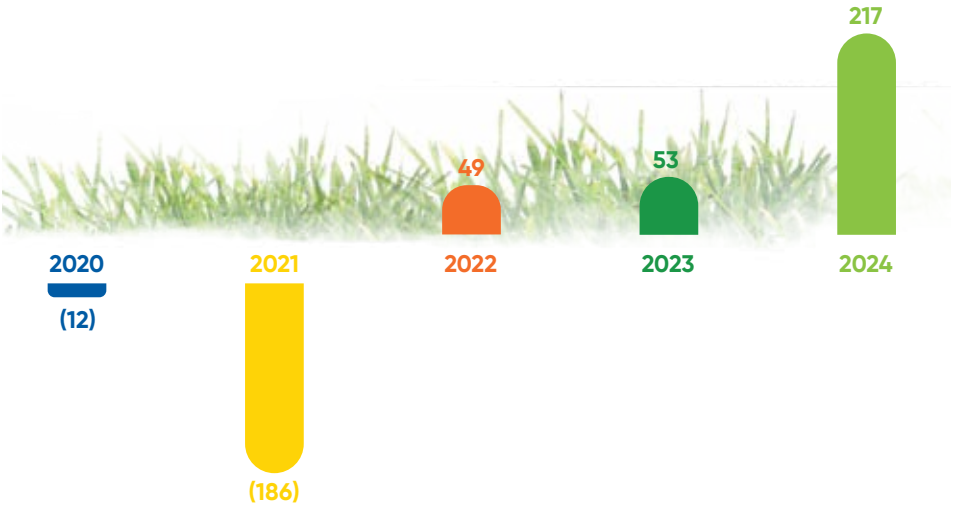
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, pada tahun 2024 nilainya sebesar Rp217,13 miliar, naik 311,40% dibandingkan tahun 2023.

PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO NONCONTROLLING INTERESTS

In 2024, profit attributable to non-controlling interests was recorded at Rp217.13 billion, an increase of 311.40% compared to 2023.

Perkembangan Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali 2020–2024
Development of Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

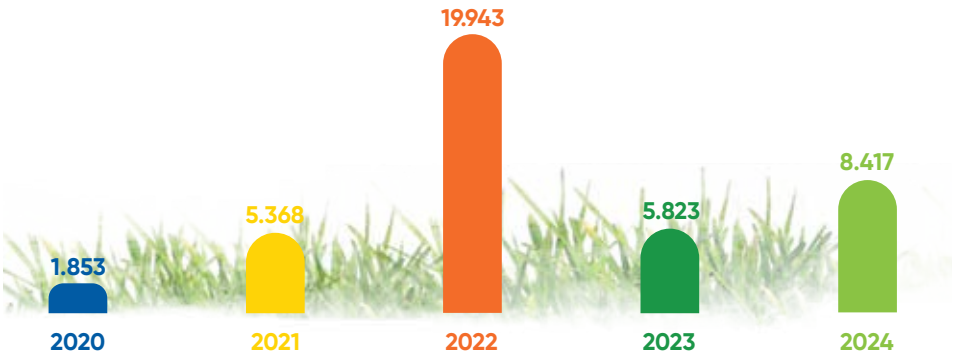
Penghasilan Komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2024 mencapai Rp8,42 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp5,82 triliun, mengalami kenaikan 44,54%.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY

Comprehensive Income attributable to owners of the parent entity in 2024 reached Rp8.42 trillion. Compared to 2023 which amounted to Rp5.82 trillion, an increase of 44.54%.

Perkembangan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 2020–2024
Development of Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



Penghasilan Komprehensif yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali pada tahun 2024 mencapai Rp217,13 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp52,78 miliar, terjadi kenaikan sebesar 311,40%.

Comprehensive Income attributable to non-controlling interests in 2024 reached Rp217.13 billion. Compared to 2023 which amounted to Rp52.78 billion, there was an increase of 311.40%.

LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK-DASAR DAN DILUSIAN (DALAM RUPIAH PENUH)

Laba/rugi bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Berikut disampaikan perhitungan laba per saham-dasar dan dilusian tahun 2024 dan 2023:

EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY-BASIC AND DILUTED (IN FULL RUPIAH)

Basic net profit/loss per share is calculated by dividing the current year's profit attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding in the current year.

For the purposes of calculating diluted earnings per share, the Company adjusts the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the parent entity and the weighted average number of shares outstanding, for the impact of all potential dilutive ordinary share instruments.

The following is the calculation of basic and diluted earnings per share for 2024 and 2023:

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp Juta) Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity (Rp Million)	8.668.906	6.200.780	2.468.126	39,80
Rata-Rata Tertimbang Jumlah Saham Biasa yang Beredar (Lembar Saham) Weighted Average Number of Shares Outstanding (Shares)	25.000.000	25.000.000	-	-
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – dasar dan dilusian Earnings per share attributable to the owener of the parent entity – basic and diluted	346.756	248.031	98.725	39,80

Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – dasar dan dilusian tahun 2024 sebesar Rp346.756 per lembar saham. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp248.031, mengalami kenaikan 39,80%.

Earnings per share attributable to the owener of the parent entity – basic and diluted in 2024 amounted to Rp346,756 per share. Compared to 2023 which amounted to Rp248,031, an increase of 39.80%.

Perkembangan Laba Per Saham-Dasar 2020–2024
Earnings per Share Development-Basic 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling likuid, sehingga semakin besar nilainya maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada waktu dan periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi tiga kegiatan penting: kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Cash is one of the most liquid groups of assets, so the greater its value, the better the company's financial condition. Meanwhile, the cash flow report is a financial report that contains cash receipts and expenditures in a company at a certain time and period. The cash flow report is grouped into three important activities: operating, investing and financing activities.

Uraian Description	**2024 Rp juta** Rp million	**2023 Rp juta** Rp million	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	**Persentase** Percentage **(%)**
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided by Operating Activities	22.488.663	6.481.747	16.006.916	246,95
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows Used in Investing Activities	(10.961.610)	(13.729.227)	2.767.617	(20,16)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Used in Financing Activities	(10.929.008)	(9.311.270)	(1.617.818)	17,37
Kenaikan/(Penurunan)Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	597.965	(16.558.750)	17.156.715	(103,61)
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	94.891	(316.454)	411.345	(129,99)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	16.585.416	33.460.620	(16.875.204)	(50,43)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	17.278.272	16.585.416	692.856	4,18

Pada akhir tahun 2024, Perusahaan mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp17,28 triliun, lebih besar 4,18% dibandingkan posisi tahun 2023 yang sebesar Rp16,59 triliun. Kenaikan ini utamanya di kontribusikan pada arus kas bersih yang di peroleh dari aktivitas operasi.

At the end of 2024, the Company recorded cash and cash equivalents of Rp17.28 trillion, representing a 4.18% increase from the 2023 position of Rp16.59 trillion. This increase was primarily driven by strong net cash flows from operating activities.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 2023-2024
Cash Flows from Operating Activities 2023–2024

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	49.452.261	46.130.668	3.321.593	7,20
Penerimaan Subsidi Pupuk dari Pemerintah Indonesia Receipts of fertilizer subsidy from the Government of Indonesia	42.291.595	37.721.752	4.569.843	12,11
Penerimaan Pendapatan Keuangan Receipt from Finance Income	1.029.782	922.635	107.147	11,61
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan Badan Receipt from Corporate Income Tax Restitutions	70.197	-	70.197	N/A
Penerimaan Klaim Asuransi Receipt from insurance claim	233.540	-	233.540	N/A
Pembayaran kepada Pemasok Payment to Suppliers	(57.652.339)	(60.742.495)	3.090.156	(5,09)
Pembayaran Beban Keuangan dan Transaksi Utang Obligasi Payment of Finance Cost and Bonds Payable Transaction	(1.896.893)	(2.575.340)	678.447	(26,34)
Pembayaran kepada Karyawan Payment to Employees	(7.620.292)	(7.679.864)	59.572	(0,78)
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Payment of Corporate Income Tax	(2.247.193)	(6.587.735)	4.340.542	(65,89)
Penempatan Kas yang Dibatasi Penggunaannya Placement of Restricted Cash	(1.171.995)	(707.874)	(464.121)	65,57
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows Generated from Operating Activities	22.488.663	6.481.747	16.006.916	246,95

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2024 mencapai Rp22,49 triliun, naik 246,95% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,48 triliun. Hal ini utamanya disebabkan naiknya penerimaan subsidi pupuk dari pemerintah Indonesia Rp4,57 triliun atau naik 12,11% dari tahun 2023 karena pembayaran piutang subsidi tahun berjalan yang relatif lancar.

Penerimaan dari Pelanggan

Penerimaan kas dari pelanggan tahun 2024 sebesar Rp49,45 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp46,13 triliun, mengalami kenaikan 7,20%. Hal ini sejalan dengan penjualan produk komersil (pupuk dan non pupuk) yang mencapai target.

Net cash flows provided by operating activities in 2024 reached Rp22.49 trillion, representing a 246.95% increase compared to Rp6.48 trillion in 2023. This significant increase was mainly driven by higher fertilizer subsidy receipts from the Government of Indonesia, which rose by Rp4.57 trillion or 12.11% from 2023, due to the relatively smooth settlement of current-year subsidy receivables.

Receipts from Customers

Cash receipts from customers in 2024 amounted to Rp49.45 trillion, reflecting a 7.20% increase from Rp46.13 trillion in 2023. This growth was in line with the achievement of sales targets for both fertilizer and non-fertilizer commercial products.

Penerimaan Subsidi Pupuk dari Pemerintah Indonesia

Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia tahun 2024 sebesar Rp42,29 triliun, naik 12,11% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp37,72 triliun. Kenaikan ini utamanya karena pembayaran piutang subsidi tahun berjalan yang relatif lancar.

Receipt of Fertilizer Subsidy from the Government of Indonesia

Receipts of fertiliser subsidy from the Government of Indonesia in 2024 totaled Rp42.29 trillion, an increase of 12.11% compared to Rp37.72 trillion in 2023. The increase was primarily attributed to the smooth payment of subsidy receivables for the current year

Penerimaan Pendapatan Keuangan

Penerimaan pendapatan keuangan tahun 2024 sebesar Rp1,03 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp922,64 miliar, terjadi kenaikan 11,61%.

Receipt of Financial Income

Finance income receipts in 2024 amounted to Rp1.03 trillion, representing an increase of 11.61% compared to Rp922.64 billion in 2023.

Penerimaan Restitusi Pajak

Penerimaan restitusi pajak pada tahun 2024 sebesar Rp70,20 miliar, sedangkan pada tahun 2023 adalah nihil.

Receipt of Tax Restitution

Tax restitution received in 2024 amounted to Rp70.20 billion, while in 2023 there was no such receipt.

Pembayaran Kelebihan Subsidi kepada Pemerintah Indonesia

Tidak terdapat pembayaran kelebihan subsidi kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2024, sama seperti pada tahun 2023 yaitu nihil.

Payment of Excess Subsidy to the Government of Indonesia

There were no payments of excess fertilizer subsidies to the Government of Indonesia in 2024, the same as in 2023 (nil).

Pembayaran kepada Pemasok

Pembayaran kepada pemasok tahun 2024 mencapai Rp57,65 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp60,74 triliun, terjadi penurunan 5,09%.

Payment to Suppliers

Payments to suppliers in 2024 amounted to Rp57.65 trillion, representing a 5.09% decrease compared to Rp60.74 trillion in 2023.

Pembayaran Bunga Biaya Transaksi Utang Obligasi

Pembayaran bunga dan biaya transaksi utang obligasi tahun 2024 sebesar Rp1,90 triliun, turun 26,34% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,58 triliun.

Payment of Interest and Bond Transaction Costs

Interest and bond transaction cost payments in 2024 amounted to Rp1.90 trillion, a decrease of 26.34% from Rp2.58 trillion in 2023.

Pembayaran kepada Karyawan

Pembayaran kepada karyawan tahun 2024 mencapai Rp7,62 triliun, turun 0,78% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp7,68 triliun.

Payments to Employees

Payments to employees in 2024 totaled Rp7.62 trillion, down 0.78% compared to Rp7.68 trillion in 2023.

Pembayaran Pajak Penghasilan Badan

Pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2024 sebesar Rp2,25 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,59 triliun, turun 65,89%.

Payment of Corporate Income Tax

Corporate income tax payments in 2024 amounted to Rp2.25 trillion, a 65.89% decrease from Rp6.59 trillion in 2023.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 2023-2024
Cash Flows from Investing Activities 2023–2024

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi Receipts of Dividend from Associates	74.211	351	73.860	21.042,74
Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	(8.556.724)	(6.459.195)	(2.097.529)	32,47
Penempatan Deposito Berjangka Placement of time deposits	(6.772.514)	(7.270.500)	497.986	(6,85)
Pencairan Deposito Berjangka Withdrawal of time deposits	4.218.752	-	4.218.752	N/A
Pelepasan Investasi Asosiasi Disposal of investment in associates	30.000	-	30.000	N/A
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap Receipt from Sale of Fixed Assets	44.665	117	44.548	38.075,21
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows Used in Investing Activities	(10.961.610)	(13.729.227)	2.767.617	(20,16)

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 mencapai Rp10,96 triliun, turun 20,16% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp13,73 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan adanya pencairan deposito berjangka di tahun 2024 sebesar Rp4,22 triliun.

Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi

Penerimaan dividen dari Entitas Asosiasi tahun 2024 sebesar Rp74,21 miliar, naik secara signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp351 juta.

Pembelian Aset Tetap

Pembelian aset tetap tahun 2024 sebesar Rp8,56 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,46 triliun, terjadi kenaikan 32,47%.

Penambahan Kepemilikan pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Tidak terdapat penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi dan ventura bersama di tahun 2024, sama seperti pada tahun 2023 yaitu nihil.

Net cash flows used in investing activities in 2024 amounted to Rp10.96 trillion, representing a decrease of 20.16% compared to Rp13.73 trillion in 2023. The decline was primarily attributable to the withdrawal of time deposits totaling Rp4.22 trillion during 2024.

Receipt of Dividends from Associated Entities

Dividend income from associated entities in 2024 reached Rp74.21 billion, marking a significant increase compared to Rp351 million in 2023.

Purchase of Fixed Assets

Capital expenditures on fixed assets in 2024 amounted to Rp8.56 trillion, an increase of 32.47% from Rp6.46 trillion in 2023.

Addition of Interests in Associates and Joint Ventures

There were no additional investments in associates or joint ventures in 2024, consistent with the nil balance recorded in 2023.

Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap

Hasil penjualan aset tetap tahun 2024 mencapai Rp44,67 milliar, naik 38.075,21% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp117 juta.

Proceeds from the Sale of Fixed Assets

Proceeds from the sale of fixed assets in 2024 totaled Rp44.67 billion, representing a substantial increase of 38,075.21% compared to Rp117 million in 2023.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 2023-2024
Cash Flow from Financing Activities 2023–2024

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek Proceeds from Short-term Bank Loans	18.276.737	9.258.794	9.017.943	97,40
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Repayment of Short-term Bank Loans	(17.973.760)	(7.703.360)	(10.270.400)	133,32
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Proceeds from Non-current Borrowings	2.313.012	4.511.462	(2.198.450)	(48,73)
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang Repayments of Non-current Borrowings	(9.645.714)	(7.623.638)	(2.022.076)	26,52
Penerimaan Utang Salam Proceeds from Salam Payables	150.000	291.927	(141.927)	(48,62)
Pembayaran Utang Salam Repayment of Salam Payables	-	(1.478.631)	1.478.631	(100,00)
Pembayaran Dividen kepada Entitas Non-Pengendali Payment of Dividends to Non-controlling Interest	(24.778)	(24.881)	103	(0,41)
Pembayaran Utang Obligasi Repayments of Bonds Payable	(2.435.000)	(1.146.825)	(1.288.175)	112,33
Pembayaran Liabilitas Sewa Repayments of Lease Liabilities	(376.183)	(350.118)	(26.065)	7,44
Pembayaran Dividen Kas Payment of Cash Dividend	(1.213.402)	(5.046.000)	3.832.598	(75,95)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Used in Financing Activities	(10.929.088)	(9.311.270)	(1.617.818)	17,37

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2024 sebesar Rp10,93 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp9,31 triliun, naik 17,37% atau setara dengan Rp1,62 triliun.

Net cash flows used in financing activities in 2024 amounted to Rp10.93 trillion, representing an increase of 17.37% or Rp1.62 trillion compared to Rp9.31 trillion in 2023.

Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek

Penerimaan pinjaman bank jangka pendek tahun 2024 sebesar Rp18,28 triliun, naik 97,40% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp9,26 triliun.

Proceeds from Short-Term Bank Loans

Proceeds from short-term bank loans in 2024 reached Rp18.28 trillion, a significant increase of 97.40% from Rp9.26 trillion in 2023.

Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp17,97 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp7,70 triliun, mengalami kenaikan 133,32%.

Repayment of Short-Term Bank Loans

In 2024, the Company made short-term bank loan repayments totaling Rp17.97 trillion, a significant increase of 133.32% compared to Rp7.70 trillion in 2023.

Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang

Penerimaan pinjaman jangka panjang tahun 2024 sebesar Rp2,31 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp4,51 triliun, terdapat penurunan 48,73%.

Proceeds from Long-Term Loans

Proceeds from long-term loans in 2024 amounted to Rp2.31 trillion, representing a decrease of 48.73% from Rp4.51 trillion in 2023.

Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang

Pembayaran pinjaman jangka panjang tahun 2024 mencapai Rp9,65 triliun, lebih besar 26,52% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp7,62 triliun.

Repayment of Long-Term Loans

Long-term loan repayments in 2024 totaled Rp9.65 trillion, an increase of 26.52% compared to Rp7.62 trillion in the previous year.

Pembayaran Dividen kepada Entitas Non-Pengendali

Pembayaran dividen kepada entitas non-pengendali tahun 2024 sebesar Rp24,78 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 24,88 miliar.

Dividend Payments to Non-Controlling Interests

Dividend payments to non-controlling interests in 2024 amounted to Rp24.78 billion, slightly lower than the Rp24.88 billion paid in 2023.

Pembayaran Utang Obligasi

Pembayaran utang obligasi tahun 2024 sebesar Rp2,44 triliun, naik 112,33% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp1,15 triliun.

Repayment of Bonds Payable

Bond repayments in 2024 amounted to Rp2.44 trillion, rising by 112.33% compared to Rp1.15 trillion in 2023.

Pembayaran Liabilitas Sewa

Pembayaran liabilitas sewa tahun 2024 sebesar Rp376,18 miliar, meningkat 7,44% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp350,12 miliar.

Lease Liabilities Payment

Lease liability payments in 2024 amounted to Rp376.18 billion, an increase of 7.44% compared to Rp350.12 billion in 2023.

Pembayaran Dividen Kas

Pembayaran dividen kas tahun 2024 sebesar Rp1,21 triliun, turun 75,95% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp5,05 triliun.

Cash Dividend Payments

Cash dividends paid in 2024 amounted to Rp1.21 trillion, representing a significant decrease of 75.95% compared to Rp5.05 trillion in 2023.

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas

Dengan akumulasi pada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, serta arus kas dari aktivitas pendanaan seperti yang telah diuraikan di atas, kas dan setara kas Perusahaan di akhir tahun 2024 mencapai Rp17,29 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp16,59 triliun, terjadi kenaikan 4,18%.

Net Increase in Cash and Cash Equivalents

Taking into account the net cash flows from operating, investing, and financing activities as described above, the Company's cash and cash equivalents at the end of 2024 stood at Rp17.29 trillion. This reflects an increase of 4.18% compared to Rp16.59 trillion in 2023.

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2020–2024
Development of Cash and Cash Equivalents End of Year 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



KEMAMPUAN DALAM MENGHASILKAN LABA

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan indikator utama keberlanjutan dan efisiensi operasionalnya. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, digunakan berbagai rasio profitabilitas yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai efisiensi operasional dan manajerial perusahaan. Beberapa rasio yang digunakan antara lain, melalui Marjin Laba Bruto atau Gross Proft Margin (GPM), Marjin Laba Usaha atau Operating Profit Margin (OPM), Marjin Laba Bersih atau Net Proft Margin (NPM), Tingkat Imbalan Kepada Pemegang Saham atau Return on Equity (ROE), dan Tingkat Imbalan Aset atau Return on Asset (ROA).

Marjin Laba Bruto

Marjin Laba Bruto digunakan untuk menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan.

THE COMPANY'S ABILITY TO GENERATE PROFIT

The Company's ability to generate profit serves as a key indicator of its long-term sustainability and operational efficiency. To evaluate this capability, several profitability ratios are employed to provide a comprehensive assessment of both operational and managerial performance. The key profitability ratios utilized include: Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM) ,Net Profit Margin (NPM), Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Each of these ratios offers unique insights into the Company's financial performance across various dimensions.

Gross Profit Margin (GPM)

Gross Profit Margin reflects the Company's efficiency in generating gross profit from its revenues, after deducting the cost of goods sold (COGS).

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp juta) Sales and Other Revenues (Rp million)	81.616.208	79.207.267	2.408.941	3,04
Laba Bruto (Rp juta) Gross Profit (Rp million)	16.025.792	15.904.121	121.671	0,77
Marjin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	19,64	20,08	(0,44)	(2,19)

Pada tahun 2024, posisi Marjin Laba Bruto Perusahaan mencapai 19,64%, lebih kecil 0,44% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 20,08%. Penurunan tersebut disebabkan tingginya beban pokok pendapatan seiring dengan tingginya pendapatan.

In 2024, the Company's Gross Profit Margin reached 19.64%, a decrease of 0.44% compared to 2023, which was 20.08%. This decrease was due to high cost of revenue in line with high revenue.

Marjin Laba Usaha

Marjin Laba Usaha digunakan untuk mengukur persentase laba usaha yang dihasilkan setelah memperhitungkan seluruh biaya operasional.

Operating Profit Margin

Operating Profit Margin reflects the percentage of operating profit generated after accounting for all operating expenses.

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp juta) Sales and Other Revenues (Rp million)	81.616.208	79.207.267	2.408.941	3,04
Laba Operasi (Rp juta) Operating Profit (Rp million)	12.693.255	9.754.462	2.938.793	30,13
Marjin Laba Operasi (%) Operating Profit Margin (%)	15,55	12,32	3,23	26,22

Pada tahun 2024, nilai Marjin Laba Usaha Perusahaan mencapai 15,55%. Terdapat kenaikan 3,23% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 12,32%.

In 2024, the Company recorded an Operating Profit Margin of 15.55%, representing an increase of 3,23% percentage points compared to 12.32% in 2023.

Marjin Laba Bersih

Marjin Laba Bersih digunakan untuk menunjukkan persentase laba bersih yang dihasilkan dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya, termasuk pajak dan bunga.

Net Profit Margin

Net Profit Margin measures the percentage of net profit derived from total revenue after deducting all expenses, including taxes and interest.

Uraian Description	**2024 Rp juta** Rp million	**2023 Rp juta** Rp million	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	**Persentase** Percentage **(%)**
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp juta) Sales and Other Revenues (Rp million)	81.616.208	79.207.267	2.408.941	3,04
Laba Tahun Berjalan (Rp juta) Profit for the Year (Rp million)	8.886.038	6.253.559	2.632.479	42,10
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	10,89	7,90	2,99	37,85

Pada tahun 2024, rasio Marjin Laba Bersih mencapai 10,89%, naik 2,99% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 7,90% seiring dengan kenaikan laba tahun berjalan sebesar 42,10%

In 2024, the Company's Net Profit Margin reached 10.89%, an increase of 2.99 percentage points from 7.90% in 2023. This growth was driven by a 42.10% increase in profit for the year.

Tingkat Imbalan Aset

Tingkat Imbalan Aset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengoptimalkan profitabilitas berdasarkan aset yang dimilikinya.

Return on Asset

Return on Assets (ROA) is a ratio used to measure a company's ability to optimize profitability based on its assets.

Uraian Description	**2024 Rp juta** Rp million	**2023 Rp juta** Rp million	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	**Persentase** Percentage **(%)**
Jumlah Aset (Rp juta) Total Assets (Rp million)	139.296.655	142.996.330	(3.699.675)	(2,59)
Laba Tahun Berjalan (Rp juta) Profit for the Year (Rp million)	8.886.038	6.253.559	2.632.479	42,10
Tingkat Imbalan Aset (%) Asset Return Rate (%)	6,38	4,37	2,01	46,00

Pada tahun 2024, nilai Tingkat Imbalan Aset Perusahaan mencapai 6,38%, naik 2,01% dibandingkan posisi tahun 2023 yang sebesar 4,37%. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan laba tahun berjalan sebesar 42,10%.

In 2024, the Company's Return on Assets reached 6.38%, up 2.01% compared to 4.37% in 2023. This increase was in line with a 42.10% increase in current profit.

Tingkat Imbalan kepada Pemegang Saham atau Return on Equity (ROE)

Tingkat Imbalan kepada Pemegang Saham merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham.

Rate of Return to Shareholders or Return on Equity (ROE)

Return on Equity is a ratio used to measure the company's effectiveness in generating profits from the capital invested by shareholders.

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Laba Tahun Berjalan (Rp juta) Profit for the Year (Rp million)	8.886.038	6.253.559	2.632.479	42,10
Ekuitas (Rp juta) Equity (Rp million)	99.360.726	91.965.178	7.395.548	8,04
Tingkat Imbalan kepada Pemegang Saham (%) Rate of Return to Shareholders (%)	8,94	6,80	2,14	31,47

Pada tahun 2024, nilai Tingkat Imbalan kepada Pemegang Saham Perusahaan mencapai 8,94%, naik 2,14% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 6,80% seiring dengan kenaikan laba tahun berjalan sebesar 42,10%.

In 2024, the Return on Equity (ROE) of the Company reached 8.94%, an increase of 2.14% compared to 6.80% in 2023, in line with a 42.10% increase in net profit.

Marjin Laba Bruto
Gross Profit Margin (GPM)
dalam % | in %



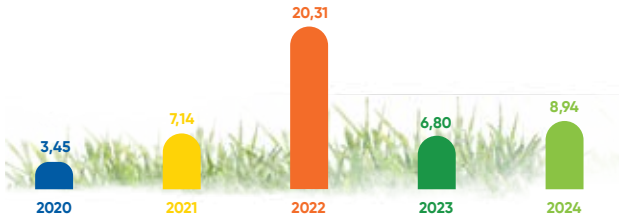
Marjin Laba Operasi
Operating Profit Margin (OPM)
dalam % | in %



Laba terhadap Aset
Return on Asset (ROA)
dalam % | in %



Laba Bersih terhadap Ekuitas
Return on Equity (ROE)
dalam % | in %



Marjin Laba Bersih
Net Profit Margin (NPM)
dalam % | in %



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya merupakan salah satu indkator penting dalam menilai kesehatan finansial dan keberlanjutan operasionalnya. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, digunakan dua jenis rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka pendek tanpa harus bergantung pada pendanaan eksternal atau menjual aset dalam waktu singkat.

Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini mencerminkan seberapa besar aset dan ekuitas perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban yang dimiliki. Untuk rasio solvabilitas, khususnya rasio utang (*interest bearing & leverage*) terhadap modal sendiri, semakin rendah menunjukkan adanya perbaikan kemampuan Perusahaan untuk melunasi kewajibannya.

ABILITY TO PAY DEBT

The ability of a company to fulfill its obligations is one of the important indicators in assessing its financial health and operational sustainability. To measure the company's ability to meet these obligations, two types of ratios are used, namely liquidity ratios and solvency ratios.

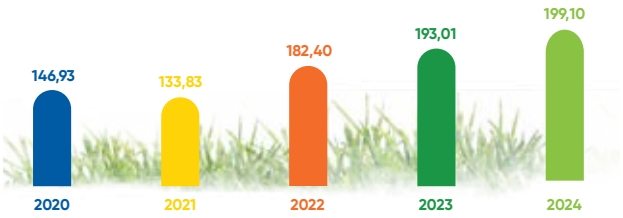
Liquidity ratios are used to measure the company's ability to meet its short-term obligations. The higher the liquidity ratio, the better the company's financial position in dealing with short-term obligations without having to rely on external funding or sell assets in a short time.

Meanwhile, the solvency ratio is used to measure the company's ability to meet its long-term obligations. This ratio reflects how much the company's assets and equity are compared to its total liabilities. For solvency ratios, especially the ratio of debt (interest bearing & leverage) to equity, the lower it is, the better the company's ability to pay off its obligations.

RASIO LIKUIDITAS: MENGUKUR KEMAMPUAN MEMBAYAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

LIQUIDITY RATIO: MEASURES THE ABILITY TO PAY SHORT-TERM OBLIGATIONS

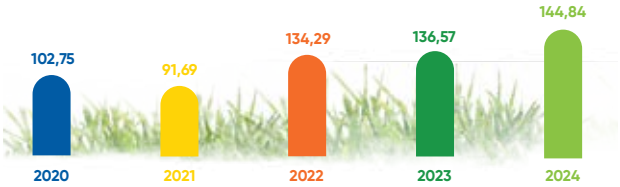
Rasio Lancar
Current Ratio
dalam % | in %



Rasio Kas
Cash Ratio
dalam % | in %



Rasio Cepat
Quick Ratio
dalam % | in %



Rasio Likuiditas: Kemampuan Perusahaan Membayar Kewajiban Jangka Pendek
Liquidity Ratio: The Company's Ability to Pay Short-Term Obligations

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Kas dan Setara Kas (Rp juta) Cash and Cash Equivalents (Rp million)	17.278.272	16.585.416	692.856	4,18
Persediaan (Rp juta) Inventories (Rp million)	13.720.295	17.089.004	(3.368.709)	(19,71)
Aset Lancar (Rp juta) Current Assets (Rp million)	50.343.800	58.439.356	(8.095.556)	(13,85)
Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta) Current Liabilities (Rp million)	25.286.189	30.278.416	(4.992.227)	(16,49)
Rasio Likuiditas: Liquidity Ratio:				
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	199,10	193,01	6,09	3,06
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	144,84	136,57	8,27	68,33
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	68,33	54,78	13,55	19,83

Debt to Equity Ratio (DER) = Total Liabilitas / Total Ekuitas	Interest Bearing Debt = Total Pinjaman Berbunga / Total Ekuitas	Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) = EBITDA / (Bagian Lancar atas Pinjaman Jangka Panjang tahun sebelumnya + Beban Keuangan)	Interest Coverage Ratio (ICR) = EBITDA / Beban Keuangan

Debt to Equity Ratio (DER) = Total Liabilities / Total Equity	Interest Bearing Debt = Total Interest Bearing Debt / Total Equity	Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) = EBITDA / (Current Portion of Previous Year's Long Term Loan + Financial Expenses)	Interest Coverage Ratio (ICR) = EBITDA / Finance Charges

Rasio Solvabilitas: Mengukur Kemampuan Membayar Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Perusahaan mengukur rasio solvabilitas melalui perhitungan tingkat rasio utang (*Leverage and Interest Bearing*) terhadap modal sendiri, *Debt Service to Coverage Ratio* (DSCR), dan *Interest Coverage Ratio* (ICR)

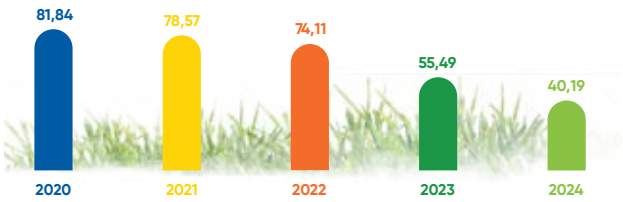
Solvency Ratio: Measures the Ability to Pay Short-Term and Long-Term Obligations

The company measures its solvency ratio by calculating the level of debt ratio (Leverage and Interest Bearing) to its own capital, Debt Service to Coverage Ratio (DSCR), and Interest Coverage Ratio (ICR).

Rasio Solvabilitas: Kemampuan Perusahaan Membayar Seluruh Kewajiban
Solvency Ratio: The Company's Ability to Pay All Obligations

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
Debt to Equity Ratio (%) Debt to Equity Ratio (%)	40,19	55,49	(15,30)	(27,57)
Interest Bearing Debt (%) Interest Bearing Debt (%)	17,62	30,92	(13,30)	(43,01)
Interest Bearing Debt to EBITDA (Kali) Interest Bearing Debt to EBITDA (Times)	1,29	1,95	(0,66)	(33,85)
Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) (%) Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) (%)	230,45	224,98	5,47	2,43
Interest Coverage Ratio (ICR) (%) Interest Coverage Ratio (ICR) (%)	706,16	578,47	127,69	22,07

Leverage
Leverage
dalam % | in %



Interest Bearing Debt
Interest Bearing Debt
dalam % | in %



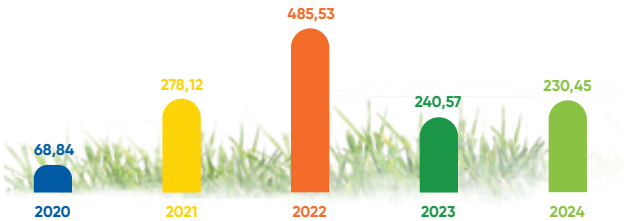
Interest Coverage Ratio (ICR)
Interest Coverage Ratio
dalam % | in %



Interest Bearing Debt to EBITDA
Interest Bearing Debt to EBITDA
dalam % | in %



Debt Service to Coverage Ratio (DSCR)
Debt Service to Coverage Ratio
dalam % | in %



Kemampuan Membayar Efek yang Diterbitkan

Berdasarkan peringkat utang yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia pada tahun 2024, seluruh surat utang Perusahaan mendapatkan rating idAAA.

Ability to Pay for Issued Securities

Based on the debt rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia in 2024, all of the Company's debt securities received an idAAA.

Perkembangan Peringkat Efek
Securities Rating Development

Jenis Surat Utang Types of Notes	2024	2023	Perubahan Changes
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017-Seri A (PIHC02ACN1) Shelf Registration Bonds I PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2017-Series A (PIHC02ACN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017-Seri B (PIHC02BCN1) Shelf Registration Bonds I PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2017-Series B (PIHC02BCN1)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Bonds Rating Agency
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017-Seri A (PIHC02CCN2) Shelf Registration Bonds I PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2017-Series A (PIHC02CCN2)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN2) Shelf Registration Bonds I PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2017 Series B (PIHC01BCN2)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri A (PIHC02ACN1) Shelf Registration Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series A (PIHC02ACN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B (PIHC012BCN1) Shelf Registration Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series B (PIHC012BCN1)	Pefindo: idAAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes at Bonds Rating Agency
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C (PIHC02CCN1) Shelf Registration Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series C (PIHC02CCN1)	Pefindo: idAAA(Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes at Bonds Rating Agency
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A (PIHC02ACN2) Shelf Registration Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series A (PIHC02ACN2)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes at Bonds Rating Agency
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B (PIHC02BCN2) Shelf Registration Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series B (PIHC02BCN2)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes at Bonds Rating Agency
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C (PIHC02CCN2) Shelf Registration Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2020 Series C (PIHC02CCN2)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Perubahan pada Lembaga Pemeringkat Obligasi Changes at Bonds Rating Agency

Peringkat nasional idAAA menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang yang dinilai memiliki kemampuan superior dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya dibandingkan emiten Indonesia lainnya.

The national rating of idAAA represents the highest rating assigned by PT Pemeringkat Efek Indonesia on the national rating scale for Indonesia. This rating is awarded to issuers or debt securities that are considered to have superior ability to meet their long-term financial obligations compared to other Indonesian issuers.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Perusahaan secara konsisten mengelola piutang usaha dengan pemantauan yang ketat terhadap posisi piutang guna memastikan arus kas perusahaan tetap sehat dan stabil. Kemampuan perusahaan untuk menagih piutang-piutang yang dimiliki tercermin pada tingkat kolektibiltas piutang atau collection period. Nilai collection period yang semakin kecil maka semakin baik. Hal itu berarti kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang-piutangnya semakin cepat.

RECEIVABLE COLLECTIBILITY LEVEL

The Company consistently manages its accounts receivable by closely monitoring the receivables position to ensure a healthy and stable cash flow. The company's ability to collect its outstanding receivables is reflected in the receivables collectibility level, or collection period. A shorter collection period indicates better performance. As it means the Company is able to collect its receivables more quickly.

Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility Ratio

Uraian Description	**2024 Rp juta** Rp million	**2023 Rp juta** Rp million	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	**Persentase** Percentage **(%)**
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya tidak termasuk Penggantian Biaya dari Pemerintah Indonesia (Rp juta) Sales and Other Operating Revenues excluding Reimbursement of Expenses from the Government of Indonesia (in million Rupiah)	48.292.293	46.695.037	1.597.256	3,42
Piutang Usaha (Rp juta) Accounts Receivable (in million Rupiah)	2.450.699	3.025.309	(574.610)	(18,99)
Rata-rata Hari Pelunasan Piutang (Collection Period) (hari) Average Receivables (Collection Period) (days)	18,52	23,65	(5,13)	(21,7)

Perusahaan memiliki kebijakan batasan kredit bagi debitur sesuai dengan kemampuan masing-masing pelanggan. Kemampuan tersebut dievaluasi secara periodik untuk menentukan kualitas kredit yang diperkirakan mampu dipenuhi oleh debitur, sehingga Perusahaan terhindar dari risiko gagal bayar debitur.

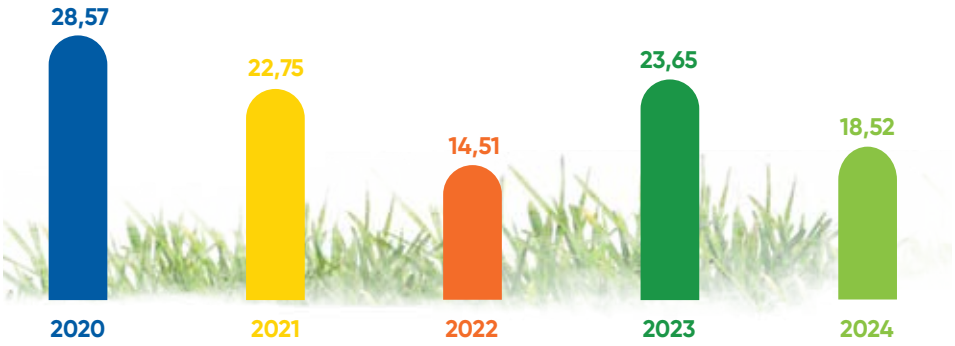
The company implements a credit limit policy for debtors based on each customer's financial capacity. This capacity is periodically evaluated to assess the credit quality that the debtor is expected to meet, thereby helping the company avoid the risk of payment defaults.

Collection period tahun 2024 sebesar 18,52 hari, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang 23,65 hari.

The collection period in 2024 was 18.52 days, showing a decrease compared to 23.65 days in 2023.

Perkembangan Collection Period Tahun 2020–2024
Collection Period Development 2020–2024

hari | days



Total piutang usaha Perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp2,45 triliun,turun 18,99% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp3,03 triliun. Berikut disampaikan rincian umur piutang usaha Perusahaan yang mencerminkan piutang jangka pendek, menengah dan piutang jangka panjang.

The Company's total trade receivables in 2024 amounted to Rp2.45 trillion, representing an 18.99% decrease from Rp3.03 trillion in 2023. Below is a detailed breakdown of the Company's trade receivables by age, including short-term, medium-term, and long-term receivables.

Umur Piutang Usaha
Age of Accounts Receivable

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Lancar Current	1.647.584	2.242.206	(594.622)	(26,52)
Jatuh Tempo: Maturity				
1–90 Hari 1–90 Days	736.435	529.845	206.590	38,99
91–120 Hari 91–120 Days	112.208	136.456	(24.248)	(17,77)
121–365 Hari 121–365 Days	130.023	135.601	(5.578)	(4,11)
> 365 Hari > 365 Days	680.323	681.599	(1.276)	(0,19)
Sub Jumlah Sub Amount	3.306.573	3.725.707	(419.134)	(11,25)
Cadangan Penurunan Nilai Impairment Proposal	(855.874)	(700.398)	(155.476)	22,20
Jumlah Piutang Usaha - Besih Total Accounts Receivable - Net	**2.450.699**	**3.025.309**	**(574.610)**	**(18,99)**

Perusahaan memiliki sistem pengelolaan piutang yang ketat guna memastikan stabilitas arus kas dan kesehatan keuangan. Salah satu aspek penting dalam manajemen piutang adalah umur piutang usaha, yang mencerminkan seberapa lama piutang perusahaan belum tertagih sejak transaksi dilakukan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

The Company maintains a stringent receivables management system to ensure cash flow stability and financial health. A critical component of this management is the aging of accounts receivable, which indicates the duration for which receivables remain uncollected since the transaction's inception.

The assessment of allowance for impairment losses on individual receivables is conducted for customers experiencing payment difficulties, according to the designated period, and those with established credit ratings. This assessment considers trends in receivable payments by consumers, pertinent information regarding past events, current conditions, and economic forecasts.

Based on the review results of individual and collective customer receivables at year-end, the Group's management believes that the provision for impairment is sufficient to address potential losses on uncollectible accounts receivable.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan menerapkan kebijakan struktur modal yang strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Struktur modal yang optimal menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pendanaan dari ekuitas dan utang, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien, mengembangkan bisnis, serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk kepentingan ekspansi, Perusahaan berupaya memaksimalkan pinjaman jangka panjang dari kreditur. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha Perusahaan. Sedangkan untuk kebutuhan modal kerja, Perusahaan menggunakan pinjaman jangka pendek dari kreditur secara proporsional serta memaksimalkan penerbitan obligasi untuk restrukturisasi pinjaman. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga komposisi debt to equity ratio agar tidak melampaui syarat/covenant yang ditetapkan oleh kreditur.

Kebijakan Perusahaan di bidang struktur modal ini diharapkan mampu menjaga kondisi keuangan yang sehat sehingga dapat mendanai kebutuhan permodalan jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk, menjaga kemampuan melakukan pembayaran kembali pinjaman-pinjamannya.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure Policy

The Company adopts a strategic capital structure policy to ensure business sustainability and support long-term growth. An optimal capital structure is essential for maintaining a balance between equity and debt financing, enabling efficient operations, business development, and enhanced value for shareholders and stakeholders.

For expansion, Company aims to maximize long-term loans from creditors to sustain business continuity. For working capital needs, the Company utilizes short-term loans from creditors proportionally and optimizes bond issuance for loan restructuring. This policy is designed to maintain the debt-to-equity ratio within the limits established by creditors.

The Company's capital structure policy is designed to maintain a healthy financial condition, enabling it to fund both short-term and long-term capital requirements. This also includes ensuring the Company's ability to repay its outstanding loans.

Rincian Struktur Modal

Pada tahun 2024, Perusahaan dan Entitas Anak masih menjalankan strategi mempertahankan rasio total liabilitas terhadap ekuitas (Leverage and Debt/EBITDA) masing-masing maksimum 3 (tiga) kali dan 4 (empat) kali. Untuk realisasi total Leverage dan Debt/EBITDA per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar 0,40 kali dan 1,29 kali.

Details of Capital Structure

For the year 2024, the Company and its Subsidiaries continued to implement a strategy of maintaining a maximum total Debt-to-Equity Ratio (Leverage) and Debt/EBITDA ratio of 3.0 times and 4.0 times, respectively. As of December 31, 2024, the realized total Leverage and Debt/EBITDA were 0.40 times and 1.29 times, respectively.

Rasio Struktur Modal Perusahaan dan Perubahannya
Company Capital Structure Ratios and Their Changes

Perihal Subject	2024	2023	Kenaikan (Penurunan Increase (Decrease)
Leverage (kali) Leverage (times)	0,40	0,55	(0,15)
Debt/EBITDA (kali) Debt/EBITDA (times)	1,29	1,97	(0,68)

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Ikatan material untuk investasi barang modal merupakan langkah strategis yang dilakukan perusahaan guna memastikan realisasi proyek pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi. Hal ini dilakukan untuk menunjang penguatan bisnis perusahaan dimasa depan. Pada tahun 2024, Perusahaan memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal yang bukan dalam bentuk pendanaan dengan uraian sebagai berikut:

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE

Material commitments for capital expenditure represent a strategic step undertaken by the Company to ensure the realization of its development projects and production capacity enhancements. These investments are crucial for strengthening the Company's business in the future. As of 2024, the Company has material commitments for capital expenditure that are not in the form of funding, detailed as follows:

Realisasi Ikatan Material Investasi Barang Modal
Realized Material Capital Expenditure Commitments

Jenis Perikatan/ Nama Proyek Type of Engagement/Project Name	Pihak yang Melakukan Perikatan (Kontraktor/Vendor) Contracting Party (Contractor/Vendor)	Nilai Investasi (Rp Juta) Investment Value (Rp Million)	Mata Uang Currency	Sumber Dana Funding Source	Upaya Melindungi Risiko Mata Uang Asing Efforts to Hedge Foreign Currency Risk
Pembangunan pabrik NPK Chemical PIM kapasitas 500.000 ton per tahun Construction of PIM NPK Chemical Plant with a Capacity of 500,000 Tons per Annum	PT Pembangunan Perumahan (Persero)	1.698.128	Rp	DER 70:30	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Reaktivasi Pabrik H2O2 PIM kapasitas 12.000 ton per tahun Reactivation of PIM H2O2 Plant with capacity of 12,000 tons per Annum	Swakelola PIM	120.000	Rp	DER 70:30	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required

Realisasi Ikatan Material Investasi Barang Modal
Realized Material Capital Expenditure Commitments

Jenis Perikatan/ Nama Proyek Type of Engagement/Project Name	**Pihak yang Melakukan Perikatan** (Kontraktor/Vendor) Contracting Party (Contractor/Vendor)	**Nilai Investasi (Rp Juta)** Investment Value (Rp Million)	**Mata Uang** Currency	**Sumber Dana** Funding Source	**Upaya Melindungi Risiko Mata Uang Asing** Efforts to Hedge Foreign Currency Risk
Pembangunan Tangki Amoniak kapasitas 10.000 ton Construction of 10,000 tons capacity Ammonia Tank	PT Kokoh Semesta	167.646	Rp	DER 70:30	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Pembangunan Pabrik Pusri-IIIB kapasitas 445.000 ton per tahun (Amoniak) dan 907.500 ton per tahun (urea) Construction of Pusri-IIIB Plant with capacity of 445,000 tons per year (Ammonia) and 907,500 tons per Annum (urea)	Konsorsium Wuhuan Engineering - PT Adhi Karya (Persero)	11.458.361	USD	DER 70:30	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Pembangunan Pabrik Dry Ice PKC kapasitas 3.000 ton per tahun Construction of PKC Dry Ice Plant with capacity of 3,000 tons per Annum	Pentair Union Engineering	9.879	Rp	DER 0:100	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Pembangunan Gudang Urea Ekspor PG kapasitas 20.000 ton Construction of 20,000 tons PG Export Urea Warehouse	PT Weltes Energi Nusantara	137.819	Rp	DER 70:30	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required

Realisasi Ikatan Material Investasi Barang Modal
Realized Material Capital Expenditure Commitments

Jenis Perikatan/ Nama Proyek Type of Engagement/Project Name	**Pihak yang Melakukan Perikatan** (Kontraktor/Vendor) Contracting Party (Contractor/Vendor)	**Nilai Investasi (Rp Juta)** Investment Value (Rp Million)	**Mata Uang** Currency	**Sumber Dana** Funding Source	**Upaya Melindungi Risiko Mata Uang Asing** Efforts to Hedge Foreign Currency Risk
Pembangunan Pabrik Phonska V kapasitas 600.000 ton per tahun Construction of Phonska V Plant with capacity of 600,000 tons per Annum	1. Gudang Buffer : PT Weltes Energi Nusantara 2. Feeding Rawa Material : PT Aneka Jasa Grhadika 3. Process Plant : PT Nindya Karya (Persero) 4. DCS : PT Petrokopindo Cipta Selaras 5. Komp. Jasa Pelayanan Pabrik PG 6. Scrubbing System : PT Nindya Karya (Persero) 7. Burner System : PT Petro Karya Niaga 1. Buffer Warehouse: PT Weltes Energi Nusantara 2. Feeding Swamp Material : PT Aneka Jasa Grhadika 3. Process Plant: PT Nindya Karya (Persero) 4. DCS: PT Petrokopindo Cipta Selaras 5. Comp. Service PG Factory 6. Scrubbing System: PT Nindya Karya (Persero) 7. Burner System: PT Petro Karya Niaga	648.828	Rp	DER 70:30	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Penyiapan Lahan Industri tahap-2 PKT seluas 16 hektar Preparation of 16 hectares of PKT phase-2 Industrial Land	KSO PT Wijaya Karya (Persero) - Pelayaran Fortuna Nusantara Megajaya KSO PT Wijaya Karya (Persero) - Pelayaran Fortuna Nusantara Megajay	373.000	Rp	DER 70:30	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Proyek Revamping Pabrik Ammonia Kaltim-2 kapasitas 595.000 ton per tahun Kaltim-2 Ammonia Plant Revamping Project with capacity of 595,000 tons per Annum	PT Tripatra Engineers & Constructors	990.051	Rp	DER 70:30	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required

INVESTASI BARANG MODAL

Berikut disampaikan jenis dan nilai investasi barang modal dan penyertaan modal yang direalisasikan pada tahun 2024.

INVESTMENT IN CAPITAL GOODS

Below are the types and values of investment in capital goods and capital participation that will be realized in 2024.

Realisasi Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment Realization

No.	Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Goods Investment	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Tujuan Destination
1	Pembangunan pabrik NPK Chemical PIM kapasitas 500.000 ton per tahun Construction of NPK Chemical PIM plant capacity of 500,000 tons per Annum	107.499	Peningkatan kapasitas produksi pupuk NPK Increased production capacity of NPK fertilizer
2	Reaktivasi Pabrik H2O2 PIM kapasitas 12.000 ton per tahun Reactivation of PIM H2O2 Plant capacity 12,000 tons per Annum	45.048	Pemenuhan potensi market di wilayah Sumatera untuk industry pulp & paper Fulfillment of market potential in the Sumatra region for the pulp & paper industry
3	Pembangunan Tangki Amoniak kapasitas 10.000 ton Construction of 10,000 tons capacity Ammonia Tank	97.968	Meningkatkan fleksibilitas operasi pabrik ammonia-urea eksisting Improve the operating flexibility of the existing ammonia-urea plant
4	Pembangunan Pabrik Pusri-IIIB kapasitas 445.000 ton per tahun (Amoniak) dan 907.500 ton per tahun (urea) Construction of Pusri-IIIB Plant with capacity of 445,000 tons per year (Ammonia) and 907,500 tons per Annum (urea)	3.367.638	Membangun pabrik baru dalam rangka meningkatkan competitiveness produk Building a new factory in order to increase product competitiveness
5	Pembangunan Pabrik Dry Ice PKC kapasitas 3.000 ton per tahun Construction of PKC Dry Ice Plant with capacity of 3,000 tons per Annum	1.676	Memberikan nilai tambah produk CO_2 cair yang dihasilkan Pabrik CO_2 cair Provide added value to liquid CO_2 products produced by liquid CO_2 plants
6	Pembangunan Gudang Urea Ekspor PG kapasitas 20.000 ton Construction of 20,000 tons PG Export Urea Warehouse	4.603	Fasilitas infrastruktur untuk mengakomodasi meningkatknya volume ekspor produk Urea Infrastructure facilities to accommodate the increasing export volume of Urea products
7	Pembangunan Pabrik Phonska V kapasitas 600.000 ton per tahun Construction of Phonska V Plant capacity 600,000 tons per Annum	27.296	Peningkatan kapasitas produksi pupuk NPK Increased production capacity of NPK fertilizer
8	Penyiapan Lahan Industri tahap-2 PKT seluas 16 hektar PKT phase-2 Industrial Land Preparation of 16 hectares	7.695	Perluasan kawasan industri Industrial estate expansion
9	Proyek Revamping Pabrik Ammonia Kaltim-2 kapasitas 595.000 ton per tahun Kaltim-2 Ammonia Plant Revamping Project capacity 595,000 tons per Annum	336.611	Menambah profit perusahaan melalui efisiensi pemakaian gas bumi Increase company profits through emcient use of natural gas

Tujuan dari ikatan material investasi barang modal adalah untuk menjamin terealisasinya proyek-proyek pengembangan Perusahaan untuk menunjang penguatan bisnis di masa mendatang. Investasi barang modal Perusahaan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 4,20 triliun atau meningkat sebesar 109,68% atau Rp 2,19 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya progres proyek pabrik NPK Chemical PIM Kapasitas 500.000 ton per tahun sebesar Rp107.499 miliar, Pembangunan Pabrik Pusri-IIIB kapasitas 445.000 ton per tahun (Amoniak) dan 907.500 ton per tahun (urea) sebesar Rp3,367 triliun dan Revamping Ammonia Pabrik Kaltim-2 kapasitas 600.000 ton per tahun sebesar Rp336,611 miliar.

The purpose of material commitments for capital expenditure is to ensure the realization of the Company's development projects, thereby supporting future business strengthening. The Company's capital expenditure realization in 2024 amounted to Rp4.20 trillion, representing an increase of 109.68%, or Rp2.19 trillion. This increase was primarily driven by the progress of the NPK Chemical PIM plant project with a capacity of 500,000 tons per year totaling Rp107.499 billion, the construction of the Pusri-IIIB Plant with capacities of 445,000 tons per year (Ammonia) and 907,500 tons per year (Urea) totaling Rp3.367 trillion, and the Kaltim-2 Ammonia Plant Revamping project with a capacity of 600,000 tons per year totaling Rp336.611 billion.

Uraian Description	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Rp juta Rp million	Persentase Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realized Capital Expenditure	4.197.932	2.002.088	2.195.844	109,68

DAMPAK NILAI MATA UANG ASING BAGI KINERJA PERUSAHAAN

Perusahaan serta seluruh entitas di bawahnya menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing, yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

IMPACT OF FOREIGN CURRENCY VALUES ON COMPANY PERFORMANCE

The Company and all its subordinate entities face foreign currency exchange rate risk, which primarily arises from monetary assets and liabilities recognized in a currency different from the functional currency of the respective entity. A portion of this risk is managed using the natural offset derived from monetary assets and liabilities denominated in the same foreign currency.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN KINERJA PERUSAHAAN

Bisnis komoditas seperti Urea dan Amoniak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Pada tahun 2024 harga jual Urea dalam negeri sebesar Rp4,90 juta/ton dan Urea ekspor sebesar USD331/ton. Untuk harga jual amoniak dalam negeri Rp6,67 juta/ton dan amoiak ekspor USD356/ton. Harga jual Urea maupun amoniak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan harga jual tahun 2023 seiring dengan kondisi ekonomi global yang belum stabil.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON COMPANY REVENUE AND PERFORMANCE

Commodity businesses such as urea and ammonia are highly influenced by market price fluctuations. In 2024, the domestic selling price of urea was Rp4.90 million/ton and the export price of urea was USD331/ton. For domestic ammonia prices, the selling price was Rp6.67 million per ton, and for exported ammonia, it was USD356 per ton. Both Urea and ammonia selling prices in 2024 saw a decrease compared to 2023 prices, in line with the global economic conditions that remain unstable.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berdasarkan Akta Notaris Lumassia, S.H. No. 2 tanggal 20 Maret 2025 perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PTPI, pemegang saham menyetujui perubahan modal dasar Perusahaan yang terdiri dari 100.000.000 saham tanpa alokasi jenis saham, menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (jumlah penuh) dan 99.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (jumlah penuh).

INFORMATION AND MATERIAL FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Based on Notarial Deed No. 2 dated March 20, 2025, issued by Lumassia, S.H., concerning Amendments to Share Types and Amendments to the Articles of Association of PTPI, the shareholders approved the change in the Company's authorized share capital, which previously consisted of 100,000,000 shares without allocation of share types, into 1 Series A Dwiwarna share with a par value of Rp1,000,000 (fully paid) and 99,999,999 Series B shares, each with a par value of Rp1,000,000 (fully paid).

PEMBAYARAN ATAS PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

Sampai dengan bulan April 2025, Grup melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang kepada Kreditur Perbankan sebesar Rp66,31 Miliar.

REPAYMENT OF LONG-TERM BANK LOANS

As of April 2025, the Group made repayments totaling Rp66.31 billion on its long-term bank loans to Banking Creditors.

RESTRUKTURISASI PINJAMAN RDM

Pada tanggal 26 Januari 2024, RDM mendapatkan persetujuan atas restrukturisasi pinjaman fasilitas A dari Sindikasi Bank Mandiri dan ICBC.

RDM LOAN RESTRUCTURING

On January 26, 2024, RDM received approval for the restructuring of its Facility A loans from the Bank Mandiri and ICBC Syndicate.

Restrukturisasi pinjaman tersebut mengatur perubahan jumlah pembayaran angsuran dan penurunan tingkat suku bunga fasilitas A menjadi 6,5% per tahun sampai dengan 30 Desember 2025.

Restrukturisasi pinjaman tersebut juga mengatur perubahan limit fasilitas B menjadi Rp53.990 dan jangka waktu pembayaran untuk fasilitas B, yang akan dilunasi dengan angsuran bulanan dari Juli 2024 sampai dengan Desember 2025.

The loan restructuring stipulates changes to the amount of installment payments and a reduction in the interest rate for Facility A to 6.5% per annum until December 30, 2025.

The loan restructuring also regulates the change in the limit for Facility B to Rp53,990 and the repayment period for Facility B, which will be settled through monthly installments from July 2024 to December 2025.

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI

Pencapaian Target Tahun 2024

Realisasi produksi pupuk dan non-pupuk tahun 2024 sebesar 19,05 juta ton atau 102,66% terhadap RKAP 2024.

TARGET, REALIZATION, AND PROJECTION

Achievement of Target in 2024

The realization of fertilizer and non-fertilizer production in 2024 was 19.05 million tons, or 102.66% of the 2024 RKAP.

Produksi
Production

Perihal Subject	**Realisasi 2024** 2024 Realization **(ton)**	**Target 2024** 2024 Target **(ton)**	**Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024** Achievement of Realization against 2024 Target **(%)**
	1	**2**	**(1:2)**
Pupuk Fertilizer			
Urea Urea	7.681.964	7.769.386	98,87
SP-36 SP-36	12.418	34.700	35,79
ZA ZA	583.874	602.150	96,96
NPK NPK	3.956.361	3.415.658	115,83
ZK ZK	11.135	9.000	123,72
Subtotal Produksi Pupuk Fertilizer Production Subtotal	12.245.751	11.830.893	103,51
Non Pupuk Non-Fertilizer			
Amoniak Ammonia	5.881.249	6.031.867	97,50
Asam Sulfat Sulfuric Acid	570.696	325.725	175,21
Asam Fosfat Phosphoric Acid	273.817	304.630	89,89
Subtotal Produksi Non-Pupuk Subtotal Non-fertilizer Production	6.725.762	6.662.222	100,95
Produk Samping*) Side Products*)	81.004	64.120	126,33
Total Produksi Total Production	**19.052.517**	**18.557.235**	**102,67**

*) Terdiri dari CO_2 Cair, Dry Ice, HCL, dan Alumunium Fluorida
Consists of Liquid CO_2, Dry Ice, HCL, and Aluminum Fluoride

Realisasi produksi pupuk dan non-pupuk tahun 2024 sebesar 19,05 juta ton atau 102,67% terhadap RKAP 2024.

The realization of fertilizer and non-fertilizer production in 2024 was 19.05 million tons or 102.67% of the 2024 RKAP.

Pemasaran dan Penjualan
Marketing and Sales

Perihal Subject	Realisasi 2024 2024 Realization (ton)	Target 2024 2024 Target (ton)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Achievement of Realization against 2024 Target (%)
	1	2	(1:2)
Pupuk Fertilizer			
Pupuk PSO PSO Fertilizer			
Urea Urea	3.704.753	4.107.701	90,19
NPK NPK	3.576.108	3.126.716	114,37
Organik Organic	47.088	-	N/A
Subtotal Penjualan Pupuk PSO Subtotal PSO Fertilizer Sales	7.327.950	7.243.417	101,29
Pupuk Non-PSO Non-PSO Fertilizer			
Urea Urea	3.909.349	3.654.100	106,99
SP-36 SP-36	81.712	99.276	82,31
ZA ZA	326.957	177.066	184,65
NPK NPK	165.435	371.820	44,49
Lain-lain*) Others*)	189.310	212.200	89,21
Subtotal Penjualan Pupuk Non PSO Subtotal Non PSO Fertilizer Sales	4.672.762	4.514.462	103,51
Subtotal Penjualan Pupuk Subtotal Fertilizer Sales	12.000.712	11.748.879	102,14
Non-Pupuk Non-Fertilizer			
Amoniak Ammonia	814.874	944.894	86,22
Asam Fosfat Phosphoric Acid	188.944	172.000	109,85

Pemasaran dan Penjualan
Marketing and Sales

Perihal Subject	Realisasi 2024 2024 Realization (ton)	Target 2024 2024 Target (ton)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Achievement of Realization against 2024 Target (%)
	1	2	(1:2)
Asam Fosfat Phosphoric Acid	13.225	17.000	77,79
Lainnya Other	76.579	62.600	122,33
Subtotal Penjualan Non- Pupuk Subtotal Non-Fertilizer Sales	1.093.621	1.196.494	91,40
Jumlah Volume Penjualan Total Sales Volume	**13.094.333**	**12.945.373**	**101,15**

Total volume penjualan sampai dengan tahun 2024 mencapai 13,09 juta ton atau 101,15% terhadap RKAP 2024.

Total sales volume up to 2024 reached 13.09 million tons or 101.15% of the 2024 RKAP.

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain
Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Perihal Subject	Realisasi 2024 (Rp Juta) 2024 Realization (Rp Million)	Target 2024 (Rp Juta) 2024 Target (Rp Million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Achievement of Realization against 2024 Target (%)
	1	2	(1:2)
Pendapatan Revenue	48.292.293	51.948.860	92,96
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia	33.323.915	33.834.455	98,49
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Revenue from Contract with Customers	81.616.208	85.783.315	95,14
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(65.590.416)	(69.895.938)	93,84
Laba Bruto Gross Profit	16.025.792	15.887.377	100,87
Beban Penjualan Selling Expenses	(1.039.742)	(1.289.378)	80,64
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(5.970.735)	(5.450.951)	109,54
Pendapatan Lainnya-Bersih Other Income-Net	3.677.940	(19.092)	19463,81
Laba Operasi Operating Profit	12.693.255	9.127.955	139,06
Pendapatan Keuangan Finance Income	1.026.960	299.367	343,04

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain
Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Perihal Subject	Realisasi 2024 (Rp Juta) 2024 Realization (Rp Million)	Target 2024 (Rp Juta) 2024 Target (Rp Million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Achievement of Realization against 2024 Target (%)
	1	2	(1:2)
Biaya Keuangan Finance Costs	(1.917.934)	(2.462.253)	77,89
Bagian atas (Rugi)/Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net (Loss)/Profit of Associates and Joint Ventures	(581.710)	147.204	(395,17)
Laba sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	11.220.571	7.112.273	182,17
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(2.334.533)	(2.032.074)	114,88
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	8.886.038	5.080.199	215,29
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Total Other Comprehensive Income for the Year after Tax	(252.310)	-	N/A
Penghasilan Komprehensif Comprehensive Income	8.633.728	5.080.199	169,95
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	8.668.906	5.032.010	172,28
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interest	217.132	48.189	450,58
Laba Komprehensif yang Diatribusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	8.416.596	5.032.010	167,26
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interest	217.132	48.189	450,58
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk - Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah penuh) Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity - Basic and Diluted (in full Rupiah)	346.756	-	N/A

Pada tahun 2024, Perusahaan membukukan laba tahun berjalan Rp8,89 triliun atau 174,92% dari rencana yang sebesar Rp5,08 triliun. Laba dapat mencapai target antara lain karena:

1. Volume penjualan produk komersil (pupuk & non pupuk) mencapai 100,97% dari RKAP.
2. Efisiensi beban keuangan Rp1,92 Triliun atau 77,89% dari RKAP.
3. Pencatatan gain atas restrukturisasi pinjaman Rp2,44 Triliun dan restrukturisasi utang usaha Rekind Rp833,62 Miliar.

In 2024, the Company recorded a net profit of Rp8.89 trillion, representing 174.92% of the target of Rp5.08 trillion. The profit was achieved, among other things, due to:

1. Commercial product sales volume (fertilizers and non-fertilizers) reached 100.97% of the budget.
2. Financial cost efficiency amounted to Rp1.92 trillion or 77.89% of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP).
3. Gains from loan restructuring of Rp2.44 trillion and restructuring of Rekind's business debt of Rp833.62 billion were recorded.

Posisi Keuangan
Financial Position

Perihal Subject	Realisasi 2024 (Rp Juta) 2024 Realization (Rp Million)	Target 2024 (Rp Juta) 2024 Target (Rp Million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Achievement of Realization against 2024 Target (%)
	1	2	(1:2)
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	50.343.800	66.905.434	75,25
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	88.952.855	84.327.905	105,48
Jumlah Aset Total Assets	139.296.655	151.233.338	92,11
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity			
Liabilitas Liabilities			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	25.286.189	36.200.588	69,85
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	14.649.740	21.213.454	69,06
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	39.935.929	57.414.044	69,56
Ekuitas Equity			
Jumlah Ekuitas Total Equity	99.360.726	93.819,294	105,91
Jumlah Ekuitas dan Liabilitas Total Equity and Liabilities	**139.296.655**	**151.233.338**	**92,11**

Total Aset tahun 2024 mencapai Rp139,30 triliun atau lebih rendah dibandingkan target utamanya disebakan penurunan piutang subsidi dari pemerintah Indonesia karena pembayaran piutang subsidi tahun berjalan yang relatif lancar.

Total assets in 2024 reached Rp139.30 trillion, lower than the main target due to a decrease in subsidy receivables from the Indonesian government as subsidy receivables for the current year were relatively smooth.

Struktur Modal
Capital Structure

Perihal Subject	Realisasi 2024 (Rp Juta) 2024 Realization (Rp Million)	Target 2024 (Rp Juta) 2024 Target (Rp Million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Achievement of Realization against 2024 Target (%)
	1	2	(1:2)
Total Liabilitas Berbasis Bunga (Interest Bearing Debt) Total Interest Bearing Debt	17.508.606	30.674.231	57,08
Total Ekuitas Total Equity	99.360.726	93.819.294	105,91
Jumlah Sumber Permodalan Total capital structure	**116.869.332**	**124.493.525**	**93,88**

Pada tahun 2024, struktur modal Perusahaan didominasi oleh ekuitas atau permodalan sendiri. Hal ini menegaskan bahwa struktur modal Perusahaan memiliki fondasi yang kuat.

In 2024, the Company's capital structure will be dominated by equity or own capital. This confirms that the Company's capital structure has a strong foundation.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Capitals Management

Perihal Subject	Realisasi 2024 2024 Realization	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Achievement of Realization against 2024 Target (%)
	1	2	(1:2)
Jumlah Karyawan (Orang) Number of Employees (People)	7.712	7.980	97
Biaya Pelatihan dan Pendidikan (Rp Juta) Training and Education Costs (Rp Million)	224.083	276.055	82

Jumlah karyawan tahun 2024 sebanyak 7.712 orang dengan memperhitungkan jumlah karyawan PKWTT dan karyawan PKWT atau 97% dari target. Sedangkan biaya pelatihan dan pendidikan mencapai Rp224.083 Miliar atau 82% dari target.

The number of employees in 2024 was 7,712 people taking into account the number of Indefinitive-Term Employees and indefinitive-Term Employees or 97% of the target. Meanwhile, training and education costs reached Rp224,083 billion or 82% of the target.

PROYEKSI KINERJA DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025

Pada tahun buku 2025, Perusahaan telah mencanangkan proyeksi yang ingin dicapai berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 yang telah disetujui Pemegang Saham. Proyeksi yang tertuang dalam RKAP ini disusun berdasarkan kondisi usaha tahun 2024 dan hasil asesmen Perusahaan atas kondisi bisnis periode berikutnya.

PERFORMANCE PROJECTIONS AND STRATEGIC PLAN FOR 2025

In the 2025 financial year, the Company has set out projections to be achieved based on the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) which have been approved by Shareholders. The projections contained in the RKAP are prepared based on business conditions in 2024 and the results of the Company's assessment of business conditions for the following period.

Produksi
Production

Perihal Subject	Realisasi 2024 2024 Realization (ton)	Proyeksi 2025 2025 Projection (ton)	Perbandingan Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Pupuk Fertilizer	12.245.751	12.622.500	103,08
Non-Pupuk* Non-Fertilizer*	6.806.766	6.600.785	96,97
Jumlah Total	**19.052.517**	**19.223.285**	**100,90**

* Terdiri dari Amoniak, Asam Fosfat, ALF3 dan Produk Samping Lainnya
Consists of Ammonia, Phosphoric Acid, ALF3 and Other By-products

Pada Tahun 2025, total produksi diproyeksikan naik 0,91% dibanding realisasi 2024. Hal tersebut utamanya pada produksi pupuk sejalan dengan target penyaluran pupuk bersubsidi yang naik menjadi 9,55 juta ton.

In 2025, total production is projected to increase by 0.91% compared to the 2024 realization. This is mainly due to fertilizer production in line with the target for subsidized fertilizer distribution, which has increased to 9.55 million tons.

Pemasaran dan Penjualan
Marketing and Sales

Perihal Subject	Realisasi 2024 2024 Realization (ton)	Proyeksi 2025 2025 Projection (ton)	Perbandingan Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Pupuk Fertilizer	12.000.712	13.333.021	111,10
Non-Pupuk* Non-Fertilizer*	1.093.621	1.115.680	102,02
Jumlah Total	**13.094.333**	**14.448.701**	**110,34**

* Terdiri dari Amoniak, Asam Fosfat, ALF3 dan Produk Samping Lainnya
Consists of Ammonia, Phosphoric Acid, ALF3 and Other By-products

Pada Tahun 2025, total volume penjualan diproyeksikan meningkat 10,34% dari realisasi 2024. Hal tersebut utamanya karena target penyaluran yang naik menjadi 9,55 juta ton.

In 2025, the total sales volume is projected to increase by 10.34% from the 2024 realization. This is mainly due to the distribution target increasing to 9.55 million tons.

Laba (Rugi) Dan Penghasilan Komprehensif Lain
Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Perihal Subject	Realisasi 2024 (Rp Juta) 2024 Realization (Rp Million)	Proyeksi 2025 (Rp Juta) 2025 Projection (Rp Million)	Perbandingan Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Pendapatan Revenue	48.292.293	52.124.129	107,93
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia	33.323.915	43.111.832	129,37
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Revenue from Contract with Customers	81.616.208	95.235.961	116,69
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(65.590.416)	80.769.731)	123,14
Laba Bruto Gross Profit	16.025.792	14.466.230	90,27
Beban Usaha Operating Expenses	(3.332.537)	(6.286.784)	188,65
Laba Operasi Operating Profit	12.693.255	8.179.446	64,44

Laba (Rugi) Dan Penghasilan Komprehensif Lain
Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Perihal Subject	Realisasi 2024 (Rp Juta) 2024 Realization (Rp Million)	Proyeksi 2025 (Rp Juta) 2025 Projection (Rp Million)	Perbandingan Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Biaya Keuangan Financial Costs	(1,917,934)	(1.914.793)	99,84
Pendapatan dan Beban Lain-lain Other Income and Expenses	445,250	386,779	86,87
Laba sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	11.220.571	6.651.431	59,28
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(2.334.533)	(1.792.726)	76,79
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	8.886.038	4.858.705	54,68

Pada Tahun 2025, Laba Tahun Berjalan diproyeksikan menurun 54,68% dari Realisasi 2024. Hal tersebut utamanya disebabkan karena adanya pengaruh uncontrollable dari pendapatan lain-lain seperti gain restrukturisasi atas pinjaman dan utang usaha Rekind di tahun 2024.

In 2025, current profit is projected to decline by 54.68% from the 2024 realization. This is mainly due to the uncontrollable impact of other income such as restructuring gains on loans and business debts of Rekind in 2024.

Posisi Keuangan
Financial Position

Perihal Subject	Realisasi 2024 (Rp Juta) 2024 Realization (Rp Million)	Proyeksi 2025 (Rp Juta) 2025 Projection (Rp Million)	Perbandingan Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	50.343.800	54.062.323	107,39
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	88.952.855	98.301.148	110,51
Jumlah Aset Total Assets	139.296.655	152.363.471	109,38
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity			
Liabilitas Liabilities			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	25.286.189	29.680.005	117,38
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	14.649.740	20.242.039	138,17
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	39.935.929	49.922.044	125,01
Jumlah Ekuitas Total Equity	**99.360.726**	**102.441.426**	**103,10**
Jumlah Ekuitas dan Liabilitas Total Equity and Liabilities	**139.296.655**	**152.363.470**	**109,38**

Pada Tahun 2025, Jumlah Aset diproyeksikan meningkat 9,38% dari realisasi 2024. Hal tersebut utamaya dikontribusikan oleh kenaikan aset tidak lancar yang diproyeksikan naik 10,51% dari realisasi tahun 2024.

In 2025, the total assets are projected to increase by 9.38% compared to the 2024 realization, primarily driven by a 10.51% rise in non-current assets.

Struktur Modal
Capital Structure

Perihal Subject	Realisasi 2024 (Rp Juta) 2024 Realization (Rp Million)	Proyeksi 2025 (Rp Juta) 2025 Projection (Rp Million)	Perbandingan Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization (%)
	1	2	(1:2)
Total Liabilitas Berbasis Bunga (Interest Bearing Debt) Total Interest-Bearing Liabilities Debt	17.508.606	26.963.909	154,00
Total Ekuitas Total Equity	**99.360.726**	**102.441.426**	**103,10**
Jumlah Sumber Permodalan Total Capital Source	**116.869.332**	**129.405.335**	**110,73**

Pada Tahun 2025, Jumlah Sumber Permodalan diproyeksikan meningkat 10,73% dari realisasi 2024. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh tingginya kebutuhan atas aktivitas Investasi Pengembangan pada Tahun 2024.

In 2025, capital structures are projected to increase by 10.73% from 2024, primarily driven by capital expenditure for plant expansion carried out in 2024.

Pembayaran Obligasi (Pokok)
Bond Payment (Principal)

Perihal Subject	Realisasi 2024 (Rp Juta) 2024 Realization (Rp Million)	Proyeksi 2025 (Rp Juta) 2025 Projection (Rp Million)	Perbandingan Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization (%)
	1	2	(1:2)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B Tahun 2017 Shelf Registration Bonds I Phase I Series B Year 2017	2.085.000	-	N/A
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2020 Shelf Registration Bonds I Phase I Series B Year2020	-	857.835	N/A
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A Tahun 2021 Shelf Registration Bonds II Phase II Series A 2021	350.000	-	N/A

Pada tahun 2024 PTPI melunasi Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A Tahun 2021 pada 10 Maret 2024 senilai Rp350.000.000.000 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B Tahun 2017 pada 12 Juli 2024 sebesar Rp 2.085.000.000.000.

In 2024, PTPI repaid the principal of its Shelf Registration Bond II Tranche II Series A Year 2021, amounting to Rp350,000,000,000, on March 10, 2024, and the principal of its Shelf Registration Bond I Tranche I Series B Year 2017, totaling Rp2,085,000,000,000, on July 12, 2024.

Pada tahun 2025 hanya terdapat pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2020 pada 3 September 2024 senilai Rp857.835.000.000.

In 2025, the principal repayment will involve the Shelf Registration Bond II Tranche I Series B Year 2020, amounting to Rp857,835,000,000, maturing on September 3, 2024.

Pembayaran Obligasi (Bunga)
Bond Payment (Interest)

Perihal Subject	**Realisasi 2024 (Rp Juta)** 2024 Realization (Rp Million)	**Proyeksi 2025 (Rp Juta)** 2025 Projection (Rp Million)	**Perbandingan Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024** Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization (%)
	1	**2**	**(2:1)**
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B Tahun 2017 Shelf Registration Bonds I Phase I Series B Year 2017	134.482,5	-	N/A
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2020 Shelf Registration Bonds II Phase I Series B 2020	66.053,3	49.540	75
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri C Tahun 2020 Shelf Registration Bonds II Phase I Series C 2020	35.843,6	35.843,6	100
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A Tahun 2021 Shelf Registration Bonds II Phase II Series A 2021	4.900	-	N/A
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B Tahun 2021 Shelf Registration Bonds II Phase II Series B 2021	99.200	99.200	100
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C Tahun 2021 Shelf Registration Bonds II Phase II Series BC 2021	57.600	57.600	100

Tidak ada pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B Tahun 2017 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A Tahun 2021 di tahun 2025, hal ini dikarenakan Obligasi tersebut telah lunas pada 12 Juli 2024 dan 10 Maret 2024.

No interest payments in 2025 for the Shelf Registration Bond I Tranche I Series B Year 2017 and the Shelf Registration Bond II Tranche II Series A Year 2021, as both bonds were fully settled on July 12, 2024, and March 10, 2024, respectively.

Terdapat perbedaan pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2020 dikarenakan Obligasi tersebut akan lunas pada 3 September 2025

The interest payment schedule for the Shelf Registration Bond II Tranche I Series B Year 2020 will vary, as the bond is set to mature on September 3, 2025.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Capitals Management

Perihal Subject	Realisasi 2024 2024 Realization	Proyeksi 2025 2025 Projection	Perbandingan Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Jumlah Karyawan PKWTT dan PKWT (orang) Number of indefinitive-Term Employees and Fixed-Term Employees (people)	7.712	8.012	104
Biaya Pelatihan (Rp Juta) Training Cost (Rp Million)	227.317	244.083	107

Untuk tahun 2025, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target di bidang sumber daya manusia. Untuk jumlah karyawan 2025 ditargetkan lebih tinggi atau sekitar 104% dari total karyawan tahun 2024. Target 2025 terhadap 2024 tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena memperhitungkan jumlah karyawan PKWTT dan karyawan PKWT.

Sedangkan untuk biaya pelatihan, proyeksi tahun 2025 yang telah ditetapkan mencapai Rp244.083 miliar atau 107% dari realisasi tahun 2024.

Penetapan target-target di bidang SDM ini disesuaikan dengan RKAP yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Dalam jangka menengah dan panjang diharapkan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Perusahaan.

For 2025, the Company has set several targets in Human Capitals aspect. The total number of employees is projected to reach approximately 104% of the 2024 headcount. This year-over-year increase is higher than in previous years, as it considers both permanent (PKWTT) and contract (PKWT) employees.

For 2025, training expenses have been set at Rp244,083 billion, representing 107% of the actual spending in 2024.

These HC targets were developed in line with the Company's Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and are intended to serve as enablers for the long-term realization of the Company's vision and mission.

PROSPEK USAHA TAHUN 2025

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan moderat. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi pertumbuhan global mencapai 3% di tahun 2025, dengan kontribusi signifikan dari ekonomi Asia yang tumbuh pesat. Namun, tantangan seperti ketegangan geopolitik, terutama di Ukraina dan Timur Tengah, serta kebijakan proteksionisme perdagangan, dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi global. selain itu, perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau menuntut investasi besar dalam teknologi ramah lingkungan, yang dapat memengaruhi dinamika ekonomi global.

Pertumbuhan industri pupuk pada tahun 2025 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi pertanian. Industri pupuk akan dihadapkan pada peluang dan tantangan. Pada tahun 2025, industri pupuk berada pada kondisi yang positif dengan berbagai inisiatif strategis.

BUSINESS OUTLOOK IN 2025

Global economic growth in 2025 is projected to see moderate improvement. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) forecasts global growth at 3%, driven largely by the strong performance of rapidly expanding Asian economies. However, several risks may weigh on this outlook. Geopolitical tensions—particularly in Ukraine and the Middle East—alongside rising protectionist trade policies, pose potential headwinds to global expansion. Additionally, the impact of climate change and the ongoing transition toward a green economy will require substantial investment in environmentally sustainable technologies, which may reshape global economic dynamics in the years ahead.

The fertilizer industry in 2025 will be shaped by a range of factors, including global economic dynamics, government policies, and advancements in agricultural technology. The industry is expected to face both opportunities and challenges. Nonetheless, the outlook for 2025 remains positive, supported by strategic initiatives across the sector.

Permintaan pupuk diprediksi meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan iklim, dan dinamika pasar global tetap perlu diantisipasi oleh pelaku industri. Oleh karena itu, inovasi dalam produksi, efisiensi distribusi, dan penerapan teknologi pertanian modern menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan industri pupuk di Indonesia pada tahun 2025.

Sebagai pemain utama dalam sektor ini, PTPI berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap ketahanan pangan Indonesia melalui peningkatan kapasitas produksi, efisiensi, dan inovasi berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung program swasembada pangan pemerintah, PTPI berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk guna memenuhi kebutuhan pupuk nasional yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, PTPI akan mengembangkan infrastruktur logistik untuk meningkatkan efisiensi distribusi di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Tidak hanya fokus pada produksi dan distribusi, PTPI juga berfokus pada inovasi dan digitalisasi. Dalam menghadapi persaingan di industri pupuk, Pupuk Indonesia terus memetakan pangsa pasar dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan. Melalui riset dan analisis pasar, perusahaan berupaya mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di Indonesia.

Secara keseluruhan, prospek usaha industri pupuk pada tahun 2025 menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Dengan berbagai inisiatif strategis yang telah dan akan dilaksanakan, PTPI optimis dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Manajemen mengusulkan pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan mengacu pada kinerja Perusahaan selama periode tertentu. Usulan tersebut diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen hanya dapat dibagikan jika Perusahaan memiliki saldo laba ditahan yang positif dan telah memenuhi ketentuan minimal cadangan wajib.

Fertilizer demand is projected to grow, driven by government efforts to achieve food self-sufficiency and enhance agricultural productivity. However, the industry must remain vigilant in addressing key challenges such as raw material price volatility, climate change, and shifting global market dynamics. To sustain and accelerate growth in Indonesia's fertilizer industry in 2025, innovation in production processes, improved distribution efficiency, and the adoption of modern agricultural technologies will be essential.

As a key player in the sector, PTPI is firmly committed to supporting Indonesia's food security through expanded production capacity, enhanced operational efficiency, and continuous innovation.

In alignment with the government's food self-sufficiency program, PTPI plans to increase its fertilizer production capacity to meet the growing national demand, driven by the continued expansion of the agricultural sector. In addition, PTPI will invest in strengthening its logistics infrastructure to improve distribution efficiency across the country. These efforts are aimed at ensuring the timely and targeted delivery of subsidized fertilizer to farmers nationwide.

PTPI's focus extends beyond production and distribution to include innovation and digital transformation. In navigating the increasingly competitive fertilizer industry, the Company continues to map market share and identify growth opportunities. Through ongoing market research and analysis, PTPI is committed to strengthening its strategic positioning and maintaining its leadership in the Indonesian fertilizer sector.

Overall, the business outlook for the fertilizer industry in 2025 presents significant growth potential. With a series of strategic initiatives already underway and planned, PTPI remains optimistic in its ability to make a greater contribution to national food security and to enhance the livelihoods of farmers across Indonesia.

DIVIDEND POLICY AND PAYMENT

Basic Dividend Distribution Policy

Management proposes dividend payments to shareholders based on the Company's performance over a given period. Such proposals are subject to approval by the General Meeting of Shareholders (GMS). Dividends may only be distributed if the Company records a positive retained earnings balance and has fulfilled the statutory reserve requirements in accordance with the prevailing regulations.

Pembagian Dividen Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPI tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp6,2 triliun, dengan komposisi sebagai berikut:

Dividend Distribution in 2024 and Previous Years

Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PTPI concerning the approval of the 2023 Annual Report and the ratification of the audited financial statements, shareholders approved the allocation of net income attributable to the Company for the 2023 fiscal year, which can be attributed to the owners of the parent entity amounting to Rp6.2 trillion, with the following composition:

Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tahun 2023 (Rp juta) Net income Attributable to parent entity in 2023 (Rp million)	6.200.780
Dividen kas yang dibagikan (jumlah dividen yang didistribusikan) (Rp juta) Cash dividends distributed (total dividends distributed) (Rp million)	1.213.402
Rasio pembayaran dividen (persentase laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tahun 2023 yang dibagikan sebagai dividen) (%) Dividend payout ratio (percentage of net profit attributable to the parent entity in 2023 distributed as dividends) (%)	19,57
Nilai dividen kas per lembar saham (Rp) Dividend Per Share (Rp)	48.536
Tanggal pengumuman Date of announcement	22 Juli 2024 July 22, 2024
Tanggal pembayaran Payment date	Pembayaran: 21 Agustus 2024 Payment: August 21, 2024

Pembagian dan pembayaran dividen tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dividend distribution and payments from 2019 to 2024 can be seen in the table below.

Tahun Pembagian Year of Distribution	**Tahun Buku** Dividend Fiscal Year	**Tanggal Pengumuman** Announcement Date	**Tanggal Pembayaran** Payment Date	**Dividen Kas yang Dibagikan** (Rp Juta) Cash Dividends Distributed (Rp Million)	**Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (Rp/ share)**	**Rasio Pembagian Dividen** Dividend Payout Ratio (%)
2024	2023	22 Juli 2024 July 22, 2024	21 Agustus 2024 August 21, 2024	1.213.402	48.536	19,57
2023	2022	6 Juni 2023 June 6, 2023	6 Juli 2023 July 6, 2023 4 Agustus 2023 August 4, 2023 6 September 2023 Setpember 6, 2023	5.046.000	201.840	27,33
2022	2021	29 Juni 2022 June 29, 2022	28 Juli 2022 July 28, 2022 29 Agustus 2022 August 29, 2022 29 September 2022 September 29, 2022	750.000	30.000	14,09
2021	2020	30 Juni 2021 June 30, 2021	29 Juli 2021 July 29, 2021 30 Agustus 2021 August 30, 2021 29 September 2021 September 29, 2021	588.030	23.521	25,16
2020	2019	4 Agustus 2020 August 4, 2020	2 September 2020 September 2, 2020 2 Oktober 2020 October 2, 2020 2 November 2020 November 2, 2020	973.500	38.940	26,73
2019	2018	16 Mei 2019 May 16, 2019	14 Juni 2019 June 14, 2019 16 Juli 2019 July 16, 2019 16 Agustus 2019 August 16, 2019	1.045.119	41.805	25,00

Rasio pembagian dividen sebesar 26,73% pada tahun 2020 dihitung berdasarkan laba bersih konsolidasian tahun buku 2019 sebesar Rp3,64 triliun, sebagaimana tercantum dalam keputusan RUPS. Nilai tersebut mengacu pada laporan keuangan sebelum dilakukan restatement oleh auditor independen pada tahun 2020, yang menyesuaikan laba tahun 2019 menjadi Rp2,9 triliun. Dengan demikian, rasio dividen tersebut tidak menggunakan angka laba bersih setelah restatement.

The dividend payout ratio of 26.73% in 2020 was calculated based on the consolidated net profit for fiscal year 2019 amounting to Rp3.64 trillion, as stated in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders. This amount referred to the financial statements prior to the restatement conducted by the independent auditor in 2020, which adjusted the 2019 net profit to Rp2.9 trillion. Accordingly, the dividend payout ratio was based on the pre-restated net profit.

PAJAK DAN KONTRIBUSINYA BAGI NEGARA

Kebijakan Pengelolaan dan Pembayaran Pajak

Pajak yang dibayarkan Perusahaan setiap tahun adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Penghasilan Karyawan (PPh Karyawan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pajak lainnya.

Pembayaran pajak kepada negara pada tahun 2024 turun 38% atau setara dengan Rp3,86 miliar dibandingkan pembayaran pajak tahun 2023. Upaya Pengendalian Perpajakan tahun 2024 PI Grup dilakukan melalui peningkatan Aspek Tax Compliance.

Realisasi Pembayaran Pajak

Pajak yang dibayarkan Perusahaan setiap tahun adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pajak lainnya. Rincian realisasinya untuk tahun buku 2023 dan 2024 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

TAXES AND CONTRIBUTION TO THE STATE

Tax Management and Payment Policy

The taxes paid by the Company each year include Corporate Income Tax, Employee Income Tax, Value Added Tax (VAT), and other applicable taxes.

Tax paymentsin 2024 decreased by 38%, or approximately Rp3.86 billion, compared to the amount paid in 2023. In 2024, PI Group's tax control efforts focused on strengthening tax compliance measures.

Tax Payment Overview

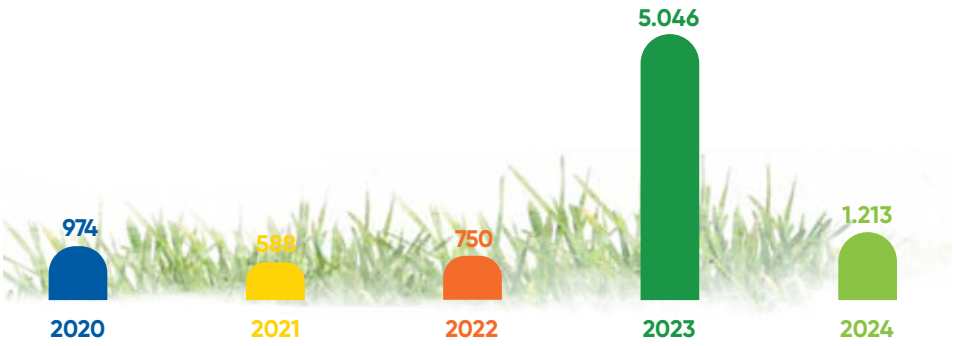
The Company's annual tax obligations include Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), and other statutory taxes. A detailed summary of actual tax payments for fiscal years 2023 and 2024 is presented in the following table.

Uraian Description	**2024** **Rp juta** Rp million	**2023** **Rp juta** Rp million	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal **Rp juta** Rp million	**Persentase** Percentage **(%)**
Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Tax	101.124	99.555	1.568	2
Pajak dan Retribusi Daerah Local Taxes and Retributions	48.913	35.972	12.941	36
Pajak Penghasilan* Income Tax*	4.007.469	7.899.668	(3.892.199)	(49)
PPN** VAT**	2.253.227	2.026.817	226.409	11
Bea dan Pajak Lainnya Other Duties and Taxes	17.119	225.900	(208.781)	(92)
Jumlah Total	**6.427.852**	**10.287.913**	**(3.860.062)**	**(38)**

*Terdiri dari PPh PotPut dan PPh Wajib Pajak Badan
Consist of Witholding Taxes and Corporate Income Tax
**Terdiri dari Kurang Bayar PPN Masa , PPn dipungut oleh WAPU
Consist of Periodic VAT Underpayment, VAT Collected by Collectors (WAPU)

Perkembangan Dividen Kas yang Dibagikan Tahun 2020–2024
Development of Cash Dividends Distributed in 2020–2024

Rp miliar | Rp billion



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham

Hingga akhir tahun 2024 Perusahaan tidak melaksanakan penawaran umum saham perdana. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham.

REALIZATION OF USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

Information regarding the Realization of Use of Proceeds from the Public Offering of Shares

Until the end of 2024, the Company will not carry out an initial public offering of shares. Thus, there is no information regarding the actual use of proceeds from the public offering of shares.

Informasi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Information regarding the Realization of Use of Proceeds from Bond Public Offerings

Subjek Subject	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Shelf Registration Bond I Phase I Year 2017	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Shelf Registration Bond I Phase II Year 2017	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 202 Shelf Registration Bond II Phase I Year 2020	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Pupuk Indonesia Tahun 2021 Shelf Registration Bond II Phase
Penggunaan Dana Use of Funds	16% refinancing Obligasi I Tahun 2014 Seri A 16% refinancing of Bonds I Year 2014 Series A	23% refinancing pinjaman perbankan PT Pupuk Kalimantan Timur 23% refinancing of bank loan PT Pupuk Kalimantan Timur	33% refinancing Perbankan KI Amurea II dan Revamping PA PT Petrokimia Gresik 33% refinancing of KI Amurea II Banking and PT Petrokimia Gresik PA Revamping	91% Refinancing atas Kredit Investasi Perbankan Amurea II PT Petrokimia Gresik 91% Refinancing of Amurea II Banking KI of PT Petrokimia Gresik
	84% refinancing pinjaman perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 84% refinancing of bank loan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	12% refinancing pinjaman perbankan PT Pupuk Kujang 12% refinancing of PT Pupuk Kujang's bank loan	26% refinancing Kredit Perbankan Modal Kerja PT Pupuk Iskandar Muda 26% refinancing of Working Capital Banking Loans PT Pupuk Iskandar Muda	9% Refinancing Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik 9% Refinancing of PT Pupuk Indonesia Logistik's Banking Loan
		19% refinancing pinjaman perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 19% refinancing of bank loan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	41% refinancing Pinjaman Modal Kerja PT Rekayasa Industri 41% refinancing of PT Rekayasa Industri's	

Informasi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Information regarding the Realization of Use of Proceeds from Bond Public Offerings

Subjek Subject	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Shelf Registration Bond I Phase I Year 2017	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Shelf Registration Bond I Phase II Year 2017	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 202 Shelf Registration Bond II Phase I Year 2020	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Pupuk Indonesia Tahun 2021 Shelf Registration Bond II Phase
		27% refinancing pinjaman Perbankan PT Rekayasa Industri 27% loan refinancing of bank loan PT Rekayasa Industri		
		6% refinancing pinjaman perbankan PT Pupuk Indonesia Niaga (d/h PT Mega Eltra) 6% bank loan refinancing PT Pupuk Indonesia Niaga (d/h PT Mega Eltra)		
		13% Refinancing Pinjaman Perbankan PT Petrokimia Gresik 13% loan refinancing of bank loan PT Petrokimia Gresik		

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tahun 2024, Pupuk Indonesia tidak memiliki informasi yang bersifat material, baik terkait dengan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, maupun restrukturisasi utang/modal. Dengan demikian, rincian informasi tidak dapat disampaikan.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENTS, BUSINESS EXPANSION, ACQUISITIONS, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

In 2024, Pupuk Indonesia did not have any material information, either related to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, or debt/capital restructuring. Thus, detailed information cannot be submitted.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, SERTA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

INFORMATION ON AFFILIATE TRANSACTIONS, TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES, AND TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST

Ketentuan Pihak Berelasi
Related Party Provisions

Nama Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Pemerintah Indonesia The Government of Indonesia	Pemegang Saham Utama Ultimate Parent	Dividen, piutang dan penggantian biaya subsidi Dividend, receivables and reimbursement of subsidy
Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Syariah Indonesia	Entitas di bawah kendali Pemerintah Entities controlled by the Government	

Ketentuan Pihak Berelasi
Related Party Provisions

Nama Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Adhi Karya (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bhanda Graha Reksa (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Fokus Jasa Mitra, PT Graha Sarana Gresik, PT Iglas (Persero), PT Industri Gula Glenmore, PT Krakatau Engineering, PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan Entitas Anak, PT Perta Arun Gas, PT Pertagas Niaga, PT Pertamina (Persero) dan Entitas Anak, PT Pertani (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Petro Graha Medika, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, Yayasan Petrokimia Gresik, Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik, Perum Bulog, Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, Dana Pensiun Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BNI, DPLK BRI, Tabungan Hari Tua ("YTHT") PIM, BRI Life, PT Pembangunan Perumahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, PT Pertamina Shipping International, PT Kaltim Medika Utama	Entitas di bawah kendali Pemerintah Entities controlled by the Government	Penjualan pupuk subsidi, penjualan pupuk nonsubsidi, pendapatan jasa EPC, pendapatan jasa non-EPC, pendapatan jasa, penjualan produk non-pupuk, pembelian bahan baku, sewa, jasa pemeliharaan mekanik, pemakaian listrik, jasa pengangkutan gas dan pengelola aset program manfaat pasti. Subsidy fertilizer sales, non-subsidy fertilizer sales, revenue from EPC, revenue from nonEPC, rendering of services, non-fertilizer sales, purchase of raw material, rental, mechanic maintenance, electricities, gas transportation services and defined benefit plan asset manager.
PT Aneka Jasa Grhadika, PT Multi Nitrotama Kimia, PT Petrocentral, PT Gresik Cipta Sejahtera, PT Petrokopindo Cipta Selaras	Entitas asosiasi Associates entity	Penjualan pupuk non-subsidi, penjualan nonpupuk, sewa dan pembelian non-bahan baku. Non-subsidy fertilizer sales, non-fertilizer sales, rental and purchase of non-raw materials.
PT Kaltim Jordan Abadi, PT Petro Jordan Abadi ("PJA"), RDMP Balikpapan JO	Ventura Bersama Joint Ventures	Penjualan non-pupuk, piutang usaha dan utang usaha. Non-fertilizer sales, trade receivables and trade payables.

KEBIJAKAN PENELAAHAN DAN PERSETUJUAN TRANSAKSI

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

TRANSACTION REVIEW AND APPROVAL POLICY

Explanation of Transaction Fairness

The fairness of all transactions carried out by the Company with Related Parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with PSAK 7 standards concerning "Related Party Disclosures". All transactions with related parties are carried out at normal prices, terms and conditions as those carried out with third parties and have been disclosed in the Company's consolidated financial statements.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi.

Reason for Transaction

Like transactions with third parties, the Company's transactions with Related Parties are carried out in line with the Company's operational and business development needs, as well as the principle of mutual need between the Company and Related Parties

Realisasi Saldo dan Transaksi Transaksi Pihak Berelasi
Balance Realization and Related Party Transaction

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Related Parties Balance in Assets	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets	
			2024 (%)	2023 (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	16.201.749	16.169.492	11,63	11,31
Piutang Usaha-Bersih Trade Receivable-Net	516.725	671.636	0,37	0,47
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Gross Receivables to Employers	214.116	408.323	0,15	0,29
Total Aset dari Pihak-pihak Berelasi Total Assets of Related Parties	16.932.590	17.249.451	12,16	12.06
Total Aset Total Assets	**139.296.655**	**142.996.330**		

Total saldo pihak berelasi dalam aset tahun 2024 sebesar Rp16,93 triliun atau lebih rendah 1,84% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp17,25 triliun.

The total balance of related parties in assets in 2024 amounted to Rp16.93 trillion, a decrease of 1.84% compared to Rp17.25 trillion in 2023.

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Related Parties Balance in Liabilities	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Persentase dari Jumlah Liabilitas Percentage of Total Liabilities	
			2024 (%)	2023 (%)
Utang Usaha Trade Payable	338.205	596.107	0,85	1,17
Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi dari Pelanggan Construction Contract Work in Progress-Due from Customers	5.040	5.677	0,01	0,01
Total Liabilitas dari Pihak-Pihak Berelasi Total Liabilities from Related Parties	343.245	601.784	0,86	1,18
Total Liabilitas Total Liabilities	**39.935.929**	**51.031.152**		

Total saldo pihak berelasi dalam liabilitas tahun 2024 sebesar Rp343,25 milliar. Nilai tersebut turun 42,96% jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp601,78 triliun.

The total balance of related parties in liabilities in 2024 amounted to Rp343,25 billion. This value decreased by 42.96% when compared to 2023 which amounted to Rp601.78 trillion.

Transaksi Pihak Berelasi dalam Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Related Party Transactions in Sales and Other Business Income	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Persentase dari Jumlah Penjualan Percentage of Total Sales	
			2024 (%)	2023 (%)
Penjualan Produk Sales of Products	3.058.486	2.067.599	3,75	2,61
Pengganti Biaya Subsidi Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia	33.323.915	32.512.230	40,83	41,05
Pendapatan Jasa Rendering of Services	2.987.612	1.653.687	3,66	2,09
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya dari Pihak-Pihak Berelasi Total Sales and Other Operating Income from Related Parties	39.370.013	36.233.516	48,24	45,75
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Operating Income	81.616.208	79.207.267	100,00	100,00

Total penjualan dan pendapatan usaha lainnya dari pihak pihak berelasi tahun 2024 sebesar Rp39,37 triliun, naik 8,66% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp36,23 triliun.

Total sales and other operating income from related parties in 2024 amounted to Rp39.37 trillion, an increase of 8.66% compared to Rp36.23 trillion in 2023.

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pembelian Related Party Transactions in Purchase	2024 Rp juta Rp million	2023 Rp juta Rp million	Persentase dari Jumlah Pembelian Percentage of Total Purchases	
			2024 (%)	2023 (%)
Total Pembelian Barang dan Jasa dari Pihak Berelasi Purchase of Goods and Services from Related Parties	21.843.691	19.360.774	33,30	30,58
Total Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	65.590.416	63.303.146	100,00	100,00

Total pembelian barang dan jasa dari pihak berelasi pada tahun 2024 sebesar Rp21,84 triliun, naik 12,82% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp19,36 triliun.

Total purchases of goods and services from related parties in 2024 amounted to Rp21.84 trillion, an increase of 12.82% compared to 2023, which amounted to Rp19.36 trillion.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI SERTA PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi/afiliasi dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Sebagaimana telah disampaikan dalam

COMPANY POLICY REGARDING REVIEW MECHANISMS FOR TRANSACTIONS AND FULFILLMENT OF RELATED REGULATIONS AND PROVISIONS

The Company conducts transactions with related parties/affiliates in order to generate business income and these transactions are carried out on a routine, recurring, and/or ongoing basis. As disclosed in the audited financial

Laporan Keuangan Teraudit tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, Perusahaan telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 224. PTPI bukan merupakan perusahaan yang memperdagangkan ekuitasnya kepada umum, seluruh saham PTPI dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian seluruh transaksi telah diketahui oleh pemegang saham.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Direksi memandang bahwa transaksi dengan pihak berelasi/terafiliasi telah memenuhi prosedur memadai serta sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Seluruh transaksi pada tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan praktik bisnis yang berlaku umum dan prinsip arm's length (prinsip transaksi yang wajar).

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi tersebut juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang independen. Transaksi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUJUKAN DI LAPORAN KEUANGAN

Pengungkapan terkait dengan transaksi afiliasi ini juga diuraikan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit pada Catatan 30 seperti terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi keuangan yang dilaporkan mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

statements for the fiscal year 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm (PAF) Rintis, Jumadi, Rianto & Partners, the Company has disclosed transactions with related parties as defined in PSAK No. 224. PTPI is not a company that trades its equity to the public; all shares of PTPI are owned by the Republic of Indonesia. Therefore, all transactions are known to the shareholders.

Directors' statement that the transaction has fulfilled adequate procedures and is in accordance with generally accepted business practices

The Board of Directors views that transactions with related/affiliated parties have fulfilled adequate procedures and are in accordance with generally accepted business practices. All transactions in 2024 will be carried out taking into account generally accepted business practices and the arm's length principle (fair transaction principle).

All transactions with related parties have also been audited by an independent Public Accounting Firm. The transaction is in accordance with applicable laws and regulations.

REFERENCES IN FINANCIAL STATEMENTS

Disclosure regarding this affiliated transaction is also outlined in Note 30 of the audited Financial Statements, as presented in this Annual Report.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EVENTS THAT ARE EXTRAORDINARY AND RARELY OCCUR

Throughout 2024, there will be no reported financial information containing extraordinary or rare events.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LEGAL REGULATIONS THAT AFFECT THE COMPANY

Nomor dan Nama Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Number and Name of Regulations and/ or Legislation Enacted	**Penjelasan atas Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan** Explanation of Enacted Laws and/or Regulations	**Dampak terhadap Perusahaan** Impact on the Company
Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number: 01 of 2024 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Agriculture Number 10 of 2022 concerning Procedures for Determining the Allocation and Maximum Retail Price of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector	Tata cara menyelenggaraka pengelolaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi pada sektor pertanian Diperlukannya penyesuaian pengaturan penyaluran Pupuk bersubsidi terkait jenis, peruntukan, dan penetapan alokasi Pupuk bersubsidi Procedures for administering and distributing subsidized fertilizer in the agricultural sector The need to adjust regulations on the distribution of subsidized fertilizer in terms of type, allocation, and determination of subsidized fertilizer allocations	Pengaturan mengenai penebusan Pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani Regulations regarding the redemption of subsidized fertilizer from retailers to farmers
Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 Decision of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number: 644/ KPTS/SR.310/M/11/2024 concerning the Determination of Allocation and Maximum Retail Prices for Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for the 2025 Fiscal Year	Penetapan alokasi Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2025 berdasarkan jenis, jumlah, dan sebaran provinsi Determination of subsidized fertilizer allocation for the agricultural sector for the 2025 fiscal year based on type, quantity, and provincial distribution	Ditetapkannya harga eceran tertinggi Pupuk bersubsidi tahun 2025 untuk jenis • Pupuk: • Urea • NPK • NPK untuk kakao • Organik The maximum retail price for subsidized fertilizer in 2025 has been set for the following types: • Fertilizer • Urea • NPK • NPK for cocoa • Organic
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan PPN Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Ministry of Finance Regulation No. 131 of 2024 on the Treatment of Value Added Tax (VAT) on the Importation of Taxable Goods, the Supply of Taxable Goods, the Supply of Taxable Services, the Utilization of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area Within the Customs Area, and the Utilization of Taxable Services from Outside the Customs Area Within the Customs Area	Pengenaan PPN dengan tarif sebesar 12 % berlaku sejak 01 Januari 2025; Penyerahan barang/jasa kena pajak dengan dasar pengenaan pajak nilai lain dikecualikan dari ketentuan. The imposition of VAT at a rate of 12% is effective as of January 1, 2025; the supply of taxable goods/services with a different tax base is exempt from this provision.	Perubahan tarif PPN di tahun 2025 atas penyerahan selain pupuk bersubsidi Changes in VAT rates in 2025 on deliveries other than subsidized fertilizers

Nomor dan Nama Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Number and Name of Regulations and/ or Legislation Enacted	**Penjelasan atas Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan** Explanation of Enacted Laws and/or Regulations	**Dampak terhadap Perusahaan** Impact on the Company
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 81 of 2024 Concerning Taxation Provisions in the Context of the Implementation of the Core Tax Administration System	- Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan Dokumen Elektronik; - Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak; Tata cara penyampaian dan pengolahan Surat Pemberitahuan - Procedures for exercising rights and fulfilling tax obligations and issuing, signing, and sending decisions and Electronic Documents; - Procedures for paying and depositing taxes; Procedures for submitting and processing Notification Letters	Pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan tahun 2025 dilakukan di Coretax Perubahan batas pembayaran dan penyetoran PPh dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa berakhir berlaku per 01 Januari 2025. The fulfillment of tax administration obligations for the year 2025 is carried out at Coretax. Changes to the payment and deposit deadlines for Income Tax (PPh) must be made no later than the 15th (fifteenth) day of the month following the expiration of the period effective as of January 1, 2025.
Peraturan direktur jenderal pajak nomor per - 2/pj/2024 Tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 Director General of Taxes Regulation Number Per-2/PJ/2024 Regarding the Form and Procedures for the Preparation of Tax Withholding Certificates for Income Tax Article 21 and/or Income Tax Article 26, as well as the Form, Content, Procedures for Filling Out, and Procedures for Submitting Tax Notification Letters for Income Tax Article 21 and/or Income Tax Article 26	Perubahan aplikasi pelaporan elektronik administrasi perpajakan atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Changes to the electronic reporting application for income tax administration under Article 21 and/or Article 26 of the Income Tax Law	Perubahan aplikasi menggunakan aplikasi berbasis desktop (e-SPT) menjadi aplikasi berbasis web (e-Bupot 21/26). The application has been changed from a desktop-based application (e-SPT) to a web-based application (e Bukti Potong 21/26).

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA BAGI LAPORAN KEUANGAN

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Group dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THEIR IMPACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

The implementation of the following standards, amendments, and annual improvements effective on or after January 1, 2024, did not result in any changes to the Group's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in either the current or prior reporting periods:

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Summary Accounting Policies
Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar	Amendment to SFAS 201: Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current
Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan	Amendment to SFAS 201: Presentation of Financial Statements - Non-Current Liabilities with Covenants
Amandemen PSAK 116: Sewa tentang Jual dan Sewa Balik	Amendment to SFAS 116: Leases regarding Sale and Lease Back
Amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional Ketentuan Model Pilar Dua	Amendment to SFAS 212: Income Taxes - International Tax Reform Pillar Two Model Rules
Amandemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan Amandemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok	Amendment to SFAS 207: Statement of Cash Flows and amendment of PSAK 107: Financial Instrument: Disclosure - Supplier Finance Agreements

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan di Tahun 2024
Mengacu pada perkembangan tahun buku 2024, ada sejumlah isu yang berpotensi mempengaruhi kinerja Perusahaan. Di antaranya adalah:

1. Pergeseran musim tanam akibat fenomena El Nino, yang berdampak pada tren permintaan dan stabilitas harga pasar.
2. Perubahan dalam kebijakan subsidi pupuk oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi permintaan dan distribusi produk.
3. Meningkatnya persaingan dari produsen pupuk domestik dan internasional.

Asesmen Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Mengacu pada kondisi tahun 2024, Manajemen perusahaan melakukan penilaian menyeluruh terhadap aspek-aspek yang dapat berdampak signifikan, baik dari sisi internal maupun eksternal, untuk memastikan operasional yang berkelanjutan dan pertumbuhan yang stabil. Fenomena El Nino telah menyebabkan pergeseran musim tanam, yang berdampak pada tren permintaan dan stabilitas harga pasar. Perubahan ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi produksi dan distribusi guna memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tepat waktu. Selain itu, dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah terkait subsidi pupuk, Perusahaan harus siap beradaptasi dengan kebijakan baru dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Key Factors Potentially Affecting the Company's Business Continuity in 2024. In line with developments during the 2024 financial year, several external and internal issues have been identified that may significantly influence the Company's performance, including:

1. Shifting agricultural seasons caused by the El Niño phenomenon, affecting demand patterns and market price.
2. Changes in the Government's fertilizer subsidy policies, potentially impacting product demand and distribution logistics.
3. Increased competition from both domestic and international fertilizer producers.

Management's Assessment of Factors Potentially Impacting Business Continuity

In response to the conditions observed in 2024, the Company's management conducted a comprehensive assessment of both internal and external factors that may have a significant impact on the Company's operations. This assessment aims to ensure sustainable operations and stable long-term growth. The El Niño phenomenon has caused a shift in the agricultural planting season, affecting demand patterns and market price stability. These changes necessitate adjustments to the Company's production and distribution strategies to ensure the timely availability of fertilizers to farmers. Furthermore, in light of changes to government policy regarding fertilizer subsidies, the Company must remain agile in adapting to new regulations while ensuring full compliance with applicable

berlaku. Dalam menghadapi persaingan di industri pupuk dan petrokimia, disertai oleh meningkatnya persaingan dari produsen pupuk domestik dan internasional menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar.

Namun demikian, Perusahaan tetap optimistis dengan kemampuan kelangsungan usaha ke depan. Keyakinan itu, antara lain didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki Perusahaan, kemampuan operasi yang excellent serta dukungan dari Pemerintah. Oleh karena itu, Perusahaan tidak melihat adanya dampak yang signifikan dan material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan.

Dalam melakukan assessment atas potensi tantangan yang akan dialami, Perusahaan menggunakan sejumlah asumsi, baik dari internal maupun eksternal. Hal ini juga menjadi acuan yang digunakan pada rencana kerja 2024. Asumsi dimaksud adalah:

1. Stabilitas ekonomi makro
2. Peraturan Pemerintah yang mengatur harga gas industri pupuk
3. Inovasi berkelanjutan dan peningkatan efisiensi operasional
4. Mengimplementasikan praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
5. Strategi mitigasi risiko melalui kontrak jangka panjang atau diversifikasi sumber pasokan
6. Melakukan investasi strategis dalam pengembangan kapasitas produksi dan diversifikasi produk

PETA JALAN USAHA: RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

PTPI telah Menyusun rencana pengembangan jangka panjang dalam bentuk roadmap Perusahaan. Secara garis besar, gambaran peta jalan tersebut digambarkan melalui grafis di bawah ini:

laws. Amid heightened competition in the fertilizer and petrochemical industries particularly from both domestic and international producers the Company is required to continuously innovate and enhance product quality to maintain competitiveness in the market.

Nevertheless, the Company remains confident in its ability to sustain operations in the foreseeable future. This confidence is underpinned by several factors, including a highly capable and professional workforce, robust and efficient operational performance and ongoing support from the Government. Based on these strengths, Management does not foresee any significant or material risks that would compromise the Company's business continuity.

Management's Assumptions in Assessing Matters that May Potentially Have a Significant Impact on the Company's Business Continuity.

In assessing potential challenges that may impact its business continuity, the Company has identified several key assumptions, both internal and external in nature. These assumptions also form the foundation of the 2024 corporate work plan. The key assumptions are as follows:

1. Macroeconomic stability
2. Government Regulations on Fertilizer Industry Gas Pricing
3. Continuous Innovation and Enhancement of Operational Efficiency
4. Implementation of Environmentally Friendly and Sustainable Production Practices
5. Risk Mitigation Strategies Through Long-Term Contracts or Diversification of Supply Sources
6. Strategic Investments in Production Capacity Expansion and Product Diversification

BUSINESS ROADMAP: LONG TERM DEVELOPMENT PLAN

has formulated a comprehensive long-term development strategy through its Corporate Roadmap. This roadmap outlines the Company's strategic direction over the next decade and is visually illustrated in the accompanying graphic:

10-Years Roadmap PTPI menuju Global Chemical Company tetap mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan turut berperan serta mendorong Sustainable National Economic Growth

10-Year Roadmap PTPI to become a Global Chemical Company continues to support National Food Security and participate in promoting Sustainable National Economic Growth



PTPI sesuai purpose dan visi, akan menjadi leading company untuk bidang agrosolution dan kimia terintegrasi. Roadmap menuju visi tersebut terbagi dalam 3 tahap utama, yaitu *Operations Excellence & Restructure* (2024-2025), Diversification & Expansion (2026-2029), dan Scale Up Market Foootprints (2030-2034).

Tahap utama yang dilakukan pada 2024 yaitu meningkatkan kehandalan pabrik serta mulai melakukan penataan lini bisnis PI Group.

PTPI kedepannya akan melakukan optimalisasi kapasitas dan pengembangan untuk mendukung swasembada pangan, serta melakukan hilirisasi dan diversifikasi untuk menjadi industrial & chemical powerhouse di Indonesia.

In line with its purpose and vision, PTPI aspires to become the leading company in integrated agrosolutions and chemicals. To achieve this vision, the Company has developed a strategic roadmap consisting of three key phases, Operations Excellence & Restructure (2024–2025), Diversification & Expansion (2026–2029), and Scale-Up of Market Footprints (2030–2034).

The main priority for 2024 is to enhance plant reliability and initiate the restructuring of PI Group's business lines to strengthen operational performance and align with long-term growth objectives.

PTPI will continue to optimize production capacity and pursue strategic development initiatives to support national food self-sufficiency. In parallel, the Company will advance its downstream integration and product diversification efforts to establish itself as a leading industrial and chemical powerhouse in Indonesia.



Pendukung Bisnis

Business Support



Mewujudkan Generasi Penerus yang Berdaya
Creating an Empowered Next Generations

Memegang amanah, tekad untuk merubah hidup individu lain, menjadikan nya sosok inspiratif dalam membantu mewujudkan niat baik para pemangku kepentingan.

Holding a mandate, determination to change the lives of other individuals, makes them an inspiring figure in helping to create the good intentions of stakeholders.

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Capital Development

PTPI pada tahun 2024 melakukan langkah strategis dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan fokus pada standardisasi, penyelarasan, serta digitalisasi *Human Capital Management* (HCM). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap elemen dalam organisasi dapat berfungsi secara efisien dan terintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih besar. Salah satu yang menjadi dasar dalam penerapan ini adalah Human Experience Management Model.

PTPI in 2024 is taking strategic steps in managing and developing Human Capitals (HC) with a focus on standardisation, alignment, and digitalisation of Human Capital Management (HCM). This step is taken to ensure that every element in the organisation can function efficiently and integrated to achieve the company's larger goals. One of the foundations of this implementation is the Human Experience Management Model.

Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas dan kemampuan karyawan yang dimilikinya. Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang sangat penting dalam pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Karena itu, sebagai perusahaan yang bergerak di industri strategis, PTPI dalam pengelolaan dan pengembangan SDM yang efektif, Perseroan memiliki kebijakan dan rencana strategis untuk memastikan daya saing yang tinggi guna menghadapi perubahan dinamis di pasar global.

The company realises that success depends not only on technology and infrastructure, but also on the quality and capabilities of its employees. Human Capitals (HC) is a very important asset in the sustainable development of the company. Therefore, as a company engaged in strategic industries, PTPI in managing and developing effective Human Capitals, the Company has strategic policies and plans to ensure high competitiveness to face dynamic changes in the global market.

Perusahaan menjadikan SDM sebagai salah satu pilar utama dalam pencapaian visi dan misi. Termasuk target kerja yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.

The Company makes HC as one of the main pillars in achieving the vision and mission. Including work targets that have been set by shareholders.

Perusahaan melakukan standardisasi dan penyelarasan dalam pengelolaan SDM diseluruh lini operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada memiliki keselarasan dan keseragaman di seluruh PT PI dan Anak Perusahaan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, perusahaan mengimplementasikan sistem digital yang terintegrasi guna memberikan kemudahan akses bagi karyawan dalam mengelola berbagai hal terkait pengalaman kerja. Sedangkan model *Human Experience Management* yang diterapkan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan produktif.

The company carries out standardization and alignment in HC management across all its operational lines. This aims to ensure that existing policies have alignment and uniformity throughout PT PI and Subsidiaries. In addition, in order to improve efficiency and effectiveness, the company implements an integrated digital system to provide easy access for employees in managing various matters related to work experience. Meanwhile, the Human Experience Management model implemented by the company aims to increase employee engagement and create a more positive and productive work culture.

Kebijakan serta program terkait dengan SDM selalu dimutakhirkan, selaras dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan. Selain itu, PTPI juga mempertimbangkan perkembangan eksternal, khususnya di industri sejenis, dalam mengelola SDM.

Policies and programmes related to HC are always updated, in line with the development of the Company's needs. In addition, PTPI also considers external developments, especially in similar industries, in managing HC.

Berkenaan dengan kebutuhan Perusahaan, perencanaan pengembangan SDM terintegrasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta arah pengembangan usaha Perusahaan dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan keterkaitan dengan kondisi eksternal, Perusahaan selalu beradaptasi agar PTPI senantiasa memiliki nilai unggul dibandingkan entitas bisnis lainnya.

FOKUS PENGEMBANGAN TAHUN 2024

Fokus pengembangan SDM tahun ini dilakukan melalui standardisasi, penyelarasan, dan digitalisasi *Human Capital* (HC) *Management* yang mengacu pada *Human Experience Management* (HXM) Model. Beberapa langkah inisiatif yang dilakukan, diantaranya:

Beberapa langkah inisiatif yang dilakukan, diantaranya:
- Transformasi Pengelolaan SDM melalui Implementasi HC *Shared Services* dan Analisis Kebutuhan Bisnis
- Akselerasi kinerja dan kompetensi unggul pimpinan dan karyawan
- Optimalisasi budaya kolaboratif sejalan dengan pengembangan program *Employee Experience* berdasarkan *Employee Value Proposition* (EVP) Perusahaan
- Redesign Struktur Organisasi untuk mendukung pembentukan Sub Holding di PT PI
- Penetapan roadmap inklusivitas
- Perbaikan pengelolaan dan kinerja dana pensiun secara berkesinambungan

STRUKTUR ORGANISASI SDM

Secara organisasi, pengelolaan dan pengembangan SDM di PTPI dilaksanakan oleh Direktorat SDM.

With regard to the Company's needs, HC development planning is integrated with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the direction of the Company's business development in the medium and long term. While related to external conditions, the Company always adapts so that PTPI always has superior value compared to other business entities.

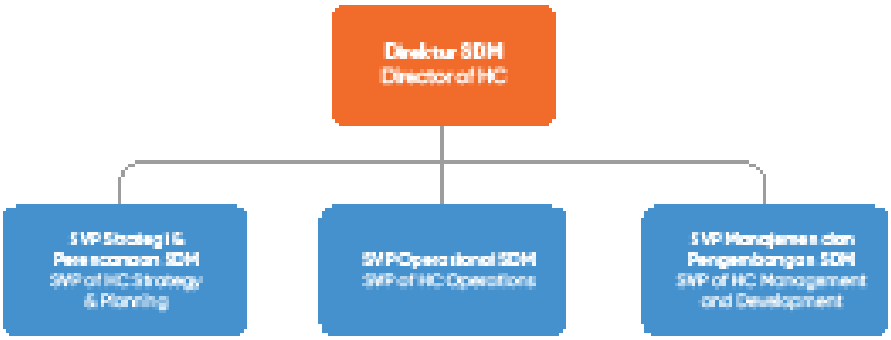
DEVELOPMENT FOCUS IN 2024

The focus of HC development this year is carried out through standardisation, alignment, and digitalisation of Human Capital (HC) Management which refers to the Human Experience Management (HXM) Model. Several initiative steps were taken, including:

Some of the initiatives taken include:
- HR Management Transformation through the Implementation of HC Shared Services and Business Needs Analysis
- Acceleration of performance and superior competence of leaders and employees
- Optimization of collaborative culture in line with development of Employee Experience program based on Employee Value Proposition (EVP) Company
- Redesign of Organizational Structure to support formation of Sub Holding in PT PI
- Establishment of an inclusivity roadmap
- Improvement of pension fund management and performance on an ongoing basis

HC ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Organizationally, HC management and development at PTPI is carried out by the HC Directorate.



KOMPARTEMEN STRATEGI & PERENCANAAN SDM

Kompartemen Strategi & Perencanaan SDM dipimpin oleh Tathit Surya Arjanggi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 tanggal 1 Februari 2024. Kompartemen ini bertugas untuk mendukung transformasi SDM dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Fokus utama dari kompartemen ini adalah menyelaraskan pengelolaan SDM di seluruh PI Grup dengan visi, misi, sasaran, dan strategi perusahaan. Oleh karena itu, kompartemen ini memainkan peran strategis dalam merumuskan perencanaan SDM yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Rincian tugas pokok Kompartemen Strategi & Perencanaan SDM diuraikan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis PI Grup di Bidang Strategi & Kebijakan SDM.
2. Menyusun target kerja dan anggaran untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) di bidang Strategi & Kebijakan SDM PI Grup sebagai acuan sasaran dan kegiatan yang dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.
3. Menyusun program strategi SDM sesuai strategi bisnis perusahaan.
4. Menyusun, melakukan sosialisasi, dan melakukan evaluasi kebijakan/pedoman SDM di lingkup PI Grup.
5. Mengkoordinasikan terkait implementasi strategi & kebijakan SDM di lingkup PI Grup.
6. Menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan transformasi SDM di tahun berikutnya.
7. Mengkoordinasikan pengelolaan aktiva tetap, inventaris, dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
8. Mengkoordinasikan pengelolaan aktiva tetap, inventaris, dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
9. Turut aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Kepatuhan Anti Penyuapan, Good Corporate Governance (GCG), Total Quality Management (TQM), dan Corporate Social Responsibilty (CSR) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

HC STRATEGY & PLANNING COMPARTMENT

The HC Strategy & Planning Compartment is led by Tathit Surya Arjanggi who was appointed based on the Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024 dated 1 February 2024. This compartment is tasked with supporting the transformation of HC in facing increasingly complex future challenges. The main focus of this compartment is to align HC management across PI Group with the company's vision, mission, goals and strategies. Therefore, this compartment plays a strategic role in formulating HC planning that can support the achievement of organisational goals.

Details of the main tasks of the HC Strategy & Planning Compartment are described as follows:

1. Coordinate the preparation of the draft Company Long Term Plan (RJPP) policy which is PI Group's strategic plan in the field of HC Strategy & Policy.
2. Prepare work targets and budgets to support the achievement of the Company Budget Work Plan (RKAP) in the area of PI Group HC Strategy & Policy as a reference for targets and activities that can be evaluated and accounted for.
3. Develop an HC strategy program according to the company's business strategy.
4. Develop, socialize and evaluate HC policies/guidelines within the PI Group.
5. Coordinate the implementation of HC strategies & policies within the PI Group.
6. Develop recommendations for implementing HC transformation in the following year.
7. Coordinate the management of fixed assets, inventory and work equipment under his responsibility so that they are maintained properly.
8. Coordinate the management of fixed assets, inventory and work equipment under his responsibility so that they are maintained properly.
9. Actively participate in the implementation of the Occupational Health and Safety (K3) management system, Risk Management System, Anti-Bribery Compliance, Good Corporate Governance (GCG), Total Quality Management (TQM), and Corporate Social Responsibility (CSR) in the work unit area to achieve K3 standards and quality standards in order to carry out continuous improvements.

KOMPARTEMEN OPERASIONAL SDM

Kompartemen Operasional SDM dipimpin oleh Nendra Ariyanto sebagai Penanggung Jawab Sementara SVP Operasional SDM. Berdasarkan surat Direktur SDM Nomor 40996/A/SM/E0500/IT/2024 Kompartemen ini memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan SDM, yang meliputi hubungan industrial, pengelolaan kompensasi dan benefit karyawan, administrasi data karyawan, serta program pensiun karyawan.

Rincian tugas pokok Kompartemen Operasional SDM diuraikan sebagai berikut:

1. Merencanakan Target Kerja dan Anggaran di lingkup Kompartemen Operasional SDM sebagai acuan kegiatan dan sasaran kerja yang dapat dievaluasi dan dipertanggung jawabkan untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/*Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan pemegang saham.
2. Mengelola dan mengkoordinasikan anggaran operasional SDM yang di PTPI yang dapat dievaluasi dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)(RKAP)/*Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan
3. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan monitoring atas anggaran Gaji dan Kesejahteraan PI Group untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/*Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan pemegang saham.
4. Mengelola dan mengkoordinasikan program-program pascakerja PTPI diantaranya meliputi pelaksanaan offboarding, program dana pensiun dan prokespen agar kesejahteraan karyawan pensiunan tetap terjamin.
5. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola dan melakukan monitoring atas pelaksanaan Asuransi Kesehatan PI Group
6. Mengelola dan mengkoordinasikan perusahaan alihdaya sejak penerbitan kontrak kerja karyawan hingga terminasi dan mengevaluasi kinerja perusahaaan alihdaya.
7. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat pokja khususnya di bidang SDM dengan Anak Perusahaan, sehingga terjalin forum komunikasi yang efektif.
8. Mengelola, memberikan solusi dan memutuskan penyelesaian permasalahan hubungan industrial.
9. Melakukan perencanaan, koordinasi dan monitoring atas pengelolaan travel management di PI Group sesuai ketentuan yang berlaku dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.
10. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.

HC OPERATIONS COMPARTMENT

The HC Operations Compartment is led by Nendra Ariyanto as Temporary SVP of HC Operations. Based on the HC Director's letter No. 40996/A/SM/E0500/IT/2024, this compartment has the responsibility for HC management, which includes industrial relations, management of employee compensation and benefits, employee data administration, and employee retirement programmes.

Details of the main tasks of the HC Operations Compartment are described as follows:

1. Planning Work Targets and Budgets within the scope of the HC Operations Compartment as a reference for activities and work objectives that can be evaluated and accounted for, to support the achievement of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Key Performance Indicators (KPI) set by shareholders.
2. Managing and coordinating the HC operational budget at PTPI to ensure it can be evaluated and accounted for in accordance with the RKAP and KPI set by shareholders.
3. Planning, coordinating, and monitoring the Salary and Welfare budget for the PI Group to support the achievement of the RKAP and KPI set by shareholders.
4. Managing and coordinating post-employment programs at PTPI, including the implementation of offboarding, pension fund programs, and retiree health programs (Prokespen), to ensure the well-being of retired employees remains protected.
5. Planning, coordinating, managing, and monitoring the implementation of Health Insurance for the PI Group to ensure compliance with applicable regulations.
6. Managing and coordinating outsourced service providers, from contract issuance to termination, and evaluating the performance of outsourcing companies.
7. Planning and coordinating the implementation of working group meetings, particularly in the HC sector with Subsidiaries, to establish an effective communication forum.
8. Managing, providing solutions, and making decisions regarding industrial relations issues to create a conducive and harmonious work environment.
9. Planning, coordinating, and monitoring travel management across the PI Group to ensure compliance with applicable regulations and the objectives set by shareholders.
10. Being responsible for the management of fixed assets, inventories, and work equipment under their area of responsibility to ensure proper maintenance and functionality.

11. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di Unit Kerjanya berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Profil Jabatan agar diperoleh SDM berkualitas.
12. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Sistem Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Kepatuhan, Whistleblowing Management System, GCG (Good Corporate Governance), TQM (Total Quality Management), dan CSR (Corporate Social Governance) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

KOMPARTEMEN MANAJEMEN & PENGEMBANGAN SDM

Kompartemen Manajemen & Pengembangan SDM dipimpin oleh Bondar Priandono sebagai penanggungjawab sementara SVP Manajemen & Pengembangan SDM berdasarkan surat Direktur SDM No. 32764/A/SM/E0500/IT/2024. Kompartemen ini memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan SDM, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pengembangan melalui pendidikan atau pelatihan. Salah satu fokus utama dari kompartemen ini adalah memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang dan beradaptasi dengan tantangan yang ada dalam mendukung kinerja perusahaan.

Tugas pokok yang dibebankan kepada Kompartemen Manajemen dan Pengembangan SDM diuraikan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis PTPI agar sesuai dengan rencana strategis Perusahaan
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RKAP) tahunan sebagai acuan kegiatan dan sasaran kerja yang dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan untuk mendukung tercapainya target perusahaan yang ditetapkan pemegang saham.
3. Memimpin dan mengorganisasikan Manajemen dan Pengembangan SDM sehingga selaras dengan strategi bisnis jangka pendek, menengah dan panjang perusahaan secara keseluruhan.
4. Mengelola pemenuhan sumber daya manusia (rekrutmen, rotasi, mutasi, dan promosi) di Perusahaan guna memastikan proses bisnis di Perusahaan dapat berjalan dengan baik.
5. Mengelola pengukuran kinerja individu di Perusahaan untuk memastikan kinerja karyawan dapat mendukung tercapainya target kinerja Perusahaan.

11. Being responsible for employee development, competency enhancement, and work attitude improvement within their unit, in accordance with Company Regulations and Job Profiles, to cultivate high-quality Human Capitals.
12. Actively participating in the implementation of management systems within the work unit, including Occupational Health and Safety Management (K3), Risk Management Systems, Anti-Bribery Compliance, Good Corporate Governance (GCG), Total Quality Management (TQM), and Corporate Social Responsibility (CSR), to achieve K3 standards and quality standards as part of continuous improvement efforts.

HC MANAGEMENT & DEVELOPMENT COMPARTMENT

The HC Management & Development Compartment is led by Bondar Priandono as the interim SVP of HC Management & Development based on the HC Director's letter No. 32764/A/SM/E0500/IT/2024. This compartment has responsibility for HC development, from planning to implementing development programs through education or training. One of the main focuses of this compartment is to ensure that every employee has the opportunity to develop and adapt to the challenges that exist in supporting the company's performance.

The main tasks assigned to the HC Management and Development Compartment are described as follows:

1. Coordinating the formulation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) policy, which serves as PTPI strategic plan, ensuring alignment with the company's overall strategic direction.
2. Coordinating the preparation of the Annual Work Plan and Budget (RKAP) draft, serving as a reference for activities and work objectives that can be evaluated and accounted for, to support the achievement of company targets set by shareholders.
3. Leading and organizing Human Capital Management and Development to align with the company's short-term, medium-term, and long-term business strategies.
4. Managing Human Capital fulfillment (recruitment, rotation, transfer, and promotion) within the company to ensure smooth business operations.
5. Managing individual performance measurement within the company to ensure employee performance supports the achievement of corporate performance targets.

6. Mengkoordinasikan perumusan kegiatan, implementasi kebijakan, implementasi sistem manajemen pengetahuan, evaluasi kebijakan, program kerja, dan kegiatan bidang Budaya & Pembelajaran di Pupuk Indonesia Group.
7. Merencanakan dan mengelola program pengembangan talenta (Leadership Development Program) di PI Group.
8. Mengkoordinasikan pengembangan kegiatan sertfikasi profesi sumber daya manusia di Pupuk Indonesia Group.

9. Sebagai koordinator Tim Penggerak Perubahan (Culture Leader, Culture Champion dan Culture Fertilizer) dan Tim Implementasi Budaya Perusahaan "AKHLAK" dalam mensosialisasikan mengimplementasikan Core Values dan budaya Perusahaan "AKHLAK" di Pupuk Indonesia Group.
10. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
11. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di unit kerjanya berdasarkan peraturan Perusahaan, dan Job Profile agar diperoleh SDM berkualitas.
12. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Sistem Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Kepatuhan, Whistleblowing Management System, GCG (Good Corporate Governance), TQM (Total Quality Management), dan CSR (Corporate Social Governance) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

STRATEGI PENGELOLAAN SDM

Sejalan dengan rencana jangka panjang perusahaan, maka PTPI merancang program Transformasi SDM dengan tema HC Transformation towards Human Experience Management (HXM) and World Class Talent, dengan strategi pengelolaan SDM dibagi kedalam 4 (empat) fase besar, yaitu:

1. Fase 1: Process Standardization and Integration
2. Fase 2: Optimizing Collaboration and High Performance Culture
3. Fase 3: Scaling Up People and Organizational Growth
4. Fase 4: World Class Talent

Pada fase 1, pengelolaan SDM akan berfokus kepada standardisasi dan implementasi model operasi, proses, kebijakan, dan sistem yang digunakan dalam mengelola SDM di seluruh entitas PI Group. Perusahaan melakukan penyusunan kebijakan dan pedoman-pedoman pengelolaan SDM didukung dengan utilisasi teknologi terkini dalam pengembangan HCIS Single Platform dengan tujuan terjaganya validitas dan kualitas data SDM dan peningkatan pengalaman karyawan yang lebih baik. Memasuki Fase 2, Fungsi SDM sudah dapat

6. Coordinating the formulation of activities, policy implementation, knowledge management system implementation, policy evaluation, work programs, and activities in the Culture & Learning sector within the Pupuk Indonesia Group.
7. Planning and managing talent development programs (Leadership Development Program) within the PI Group.
8. Coordinating the development of professional certification programs for Human Capitals within the Pupuk Indonesia Group.
9. Acting as the coordinator for the Change Agent Team (Culture Leader, Culture Champion, and Culture Fertilizer) and the Corporate Culture Implementation Team "AKHLAK" to promote and implement the company's Core Values and corporate culture "AKHLAK" across the Pupuk Indonesia Group.
10. Being responsible for the management of fixed assets, inventory, and work equipment under their responsibility to ensure proper maintenance and functionality.

11. Being responsible for employee development, competency enhancement, and work attitude improvement within their unit, in accordance with company regulations and job profiles, to cultivate high-quality Human Capitals.
12. Actively participating in the implementation of management systems within the work unit, including Occupational Health and Safety Management (K3), Risk Management System, Compliance Management System, Whistleblowing Management System, Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), and Information Security Management System, to achieve K3 standards and quality standards as part of continuous improvement efforts.

HR MANAGEMENT STRATEGY

In line with the company's long-term plan, PTPI has designed a Human Capital Transformation program with the theme HC Transformation towards Human Experience Management (HXM) and World Class Talent, with HC management strategies divided into four major phases, as follows:

1. Phase 1: Process Standardization and Integration
2. Phase 2: Optimizing Collaboration and High Performance Culture
3. Phase 3: Scaling Up People and Organizational Growth
4. Phase 4: World Class Talent

In phase 1, HC management will focus on the standardization and implementation of operating models, processes, policies and systems used in managing HC across all PI Group entities. The company prepares HC management policies and guidelines supported by the utilization of the latest technology in the development of the HCIS Single Platform with the aim of maintaining the validity and quality of HC data and improving better employee experience. Entering Phase 2, the HC function has been able to move more agile with a

melaju lebih lincah dengan fokus mengoptimalisasi budaya kolaborasi dan high-performance di lingkungan PI Group. Hal ini mengindikasikan SDM telah siap menyusun sasaran dengan isu yang lebih strategis dengan dukungan fundamental proses bisnis yang telah terstandardisasi.

Selanjutnya, setelah fase 1 dan fase 2 terimplementasi di perusahaan, pada fase 3 dan fase 4 kegiatan transformasi SDM fokus kepada mempertahankan pertumbuhan karyawan dan organisasi, serta meningkatkan kapabilitas ke level multinasional. Sehingga pada fase ini, SDM PI Group dapat bersaing dengan karyawan lain secara global dan memenuhi kebutuhan talent di lingkungan perusahaan.

MANAJEMEN TALENTA

Pengelolaan talenta PTPI dilakukan secara terintegrasi, dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan karyawan, memotivasi pengembangan mereka, serta mempertahankan karyawan yang berkualitas dalam Perusahaan,dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Talent Acquisition

Proses akuisisi karyawan baru di lingkungan Perusahaan melalui persyaratan dan tahapan seleksi. Pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Proses talent acquisition dilakukan untuk memenuhi kebutuhan reguler dan Talent Pool di Perusahaan.

Talent Development

Pengembangan talenta di PTPI dilakukan melalui serangkaian proses yang mengacu pada ketentuan dan peraturan Perusahaan. Proses talent development disusun agar dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan sesuai dengan visi Perusahaan.

Talent Mobility

Lingkup talent mobility di lingkungan Perusahaan terdiri dari career planning, career development, dan career counseling. Ketiga lingkup itu telah disusun dalam Framework Sistem Manajemen Karir yang didesain sebagai acuan rencana pengembangan SDM.

focus on optimizing a culture of collaboration and high-performance within the PI Group. This indicates that HC is ready to set goals with more strategic issues with the support of standardized business process fundamentals.

Furthermore, after phase 1 and phase 2 are implemented in the company, in phase 3 and phase 4 HC transformation activities focus on maintaining employee and organizational growth, as well as increasing capabilities to a multinational level. So that in this phase, PI Group HC can compete with other employees globally and meet talent needs in the company environment.

TALENT MANAGEMENT

PTPI talent management is carried out in an integrated manner, with a focus on meeting employee needs, motivating their development, and retaining quality employees in the Company, with the following scope:

Talent Acquisition

The process of acquiring new employees within the Company goes through requirements and selection stages. Implementation refers to the provisions and regulations that apply in the Company. The talent acquisition process is carried out to meet regular needs and the Talent Pool in the Company.

Talent Development

Talent development at PTPI is carried out through a series of processes that refer to the Company's rules and regulations. The talent development process is structured to increase employee competency and capability in accordance with the Company's vision.

Talent Mobility

The scope of talent mobility within the Company consists of career planning, career development and career counseling. These three scopes have been prepared in a Career Management System Framework which is designed as a reference for HC development plans.

Melalui manajemen karier yang terencana, Perusahaan dapat mempertahankan SDM terbaik yang dimilikinya. Sistem manajemen karier yang didesain juga sangat mengakomodasi karyawan dalam menentukan arah kariernya serta membantu Perusahaan melaksanakan proses pengembangan karier secara konsisten.

Pada akhirnya, sistem tersebut memberikan manfaat bagi pencapaian cita-cita Perusahaan. Selain itu, manajemen karier juga menggambarkan posisi-posisi yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan.

Selain tuntutan kebutuhan organisasi untuk menyediakan talenta yang memiliki kompetensi sesuai, manajemen karier sangat dibutuhkan oleh karyawan, karena karier merupakan indikator proses pengembangan diri. Bagi Tim SDM, manajemen karier juga sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menciptakan iklim kerja yang nyaman yang diharapkan dapat meningkatkan keterikatan tinggi antara karyawan dengan Perusahaan.

Talent Retention

Talent retentiton di PTPI diturunkan ke dalam 4 (empat) strategi, yaitu:
- Corporate Culture
- Talent Development
- Talent Mobility
- Compensation & Benefit

TINGKAT TURNOVER KARYAWAN

Perusahaan bersama Entitas Anak berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, nyaman, sekaligus bersifat kekeluargaan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, tetapi juga untuk menjadikan PI Grup sebagai tempat kerja yang diinginkan oleh karyawan dan calon karyawan. salah satu indikator keberhasilan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menarik adalah tingkat turnover karyawan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan SDM.

Perusahaan selalu melakukan review secara berkala terkait kebijakan remunerasi dan paket benefit bagi karyawan serta hal-hal lain berkenaan dengan pengelolaan tenaga kerja. Selain hal-hal bersifat materi, perbaikan senantiasa dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi karyawan, sehingga tingkat turnover menjadi rendah. Perkembangan tingkat turnover karyawan PI Grup disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Through planned career management, the Company can retain the best Human Capitals it has. The career management system designed is also very accommodating for employees in determining their career direction and helps the Company carry out the career development process consistently.

Ultimately, this system provides benefits for achieving the Company's goals. Apart from that, career management also describes the positions required to achieve the Company's goals.

Apart from the demands of organizations to provide talents who have appropriate competencies, career management is really needed by employees, because career is an indicator of the self-development process. For the HC Team, career management is also very much needed as an effort to create a comfortable working climate which is expected to increase high levels of engagement between employees and the Company.

Talent Retention

Talent retention at PTPI is divided into 4 (four) strategies, namely:
- Corporate Culture
- Talent Development
- Talent Mobility
- Compensation & Benefits

EMPLOYEE TURNOVER RATE

The Company and its Subsidiaries are committed to creating a professional, comfortable, and family-like work environment. This effort not only aims to improve performance and productivity, but also to make PI Group a desirable workplace for employees and prospective employees. one indicator of success in creating a healthy and attractive work environment is the employee turnover rate, which is one of the important aspects of HC management.

The Company always conducts periodic reviews related to remuneration policies and benefit packages for employees and other matters relating to labour management. In addition to material matters, improvements are always made in order to create a conducive and pleasant working environment for employees, so that the turnover rate is low. The development of the PI Group employee turnover rate is presented in the table below.

Penghentian Status Pekerja PI Group
Termination of PI Group Employee Status

(orang) (person)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021
Pensiun Retire	164	182	278	506
Meninggal Dunia Deceased	9	5	5	31
Pelanggaran Violation	-	1	9	3
Mengundurkan Diri Resigned	42	29	31	28
Jumlah Total	**215**	**217**	**323**	**568**

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Sistem Manajemen Kinerja PI Grup dirancang untuk mengatur kegiatan pengelolaan kinerja yang terdiri dari: tahapan penyusunan target dan indikator kinerja, monitoring, dan evaluasi capaian kinerja secara periodik, penilaian kinerja individu dilakukan setiap triwulan dan penilaian kompetensi secara tahunan, serta pemberian reward atas capaian kinerja. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di perusahaan dapat bekerja secara efisien, efektif, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Pelaksanaan manajemen kinerja didukung oleh aplikasi Human Capital Information System Single Platform PI Grup. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menciptakan iklim kompetisi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

SURVEI EMPLOYEE EXPERIENCE

Perusahaan melakukan survei kepada karyawan setiap tahun di lingkungan PI Grup. Hal ini dilakukan untuk mengukur pengalaman karyawan selama berada di Perusahaan. Survei ini merupakan alat penting yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan yang telah diberikan sekaligus mendapatkan umpan balik untuk mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan karyawan.

Survei tersebut juga bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama para karyawan. Hasil survei memastikan seberapa baik PTPI memenuhi persyaratan dan harapan pekerja dari elemen Meaningful Work, Strong Management, Positive Workplace, Health & Wellbeing, Growth Opportunity, Trust in the Organization, dan Technology & Services.

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

PI Group's Performance Management System is designed to organise performance management activities consisting of: the stages of preparing targets and performance indicators, monitoring and evaluating performance achievements periodically, assessing individual performance and assessing competence on an annual basis, and rewarding performance achievements. This system aims to ensure that every individual in the company can work efficiently, effectively, and contribute to the achievement of the company's strategic goals.

Performance management is supported by the PI Group's Single Platform Human Capital Information System application. The aim is to improve work productivity and create a competitive environment in order to achieve the Company's Vision and Mission.

EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY

The Company conducts annual surveys to employees within the PI Group. These surveys are intended to measure employee experience while working for the Company. This survey is an important tool used to evaluate the service level provided and obtain feedback for developing a responsive service delivery system that meets employee needs.

The survey also aims to ensure compliance with employees' main requirements and expectations. The survey results confirm how well PTPI meets the requirements and expectations of workers from the elements Meaningful Work, Strong Management, Positive Workplace, Health & Wellbeing, Growth Opportunity, Trust in the Organization, and Technology & Services.

Hasil Survei Employee Experience
Employee Experience Survey Results

No.	Perusahaan Company	Nilai Employee Experience Employee Experience Value	Kategori Category
1	PTPI	80,66%	Very Good
2	PT Petrokimia Gresik	89,16%	Very Good
3	PT Pupuk Kujang	83,10%	Very Good
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	88,25%	Very Good
5	PT Pupuk Iskandar Muda	85,22%	Very Good
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	83,73%	Very Good
7	PT Rekayasa Industri	76,64%	Very Good
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	78,22%	Very Good
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	84,04%	Very Good
10	PT Pupuk Indonesia Pangan	77,63%	Very Good
	Konsolidasi PI Grup* Consolidation of PI Group*	**82,75%**	**Very Good**

*termasuk PT Pupuk Indonesia Utilitas
*including PT Pupuk Indonesia Utilitas

Khusus untuk PTPI, pencapaian Nilai Survei Employee Experience di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Specifically for PTPI, the achievement of Employee Experience Survey Values in 2024 is as follows:

Pengukuran Measurement	Struktural Structural	Fungsional Functional
Nilai Employee Experience Employee Experience Value	81,78%	80,14%

Nilai Indeks Employee Experience pada karyawan struktural berada pada kategori Very Good dengan indeks tertinggi berada pada elemen Trust in the Organization dengan nilai 84,35%. Sedangkan nilai Indeks Employee Experience pada karyawan fungsional juga berada pada kategori Very Good dengan indeks tertinggi berada pada elemen Trust in the Organization dengan nilai 82,25%.

The Employee Experience Index value for structural employees is in the Very Good category with the highest index being the Trust in the Organization element with a value of 84.35%. While the value of the Employee Experience Index for functional employees is also in the Very Good category with the highest index being the Trust in the Organization element with a value of 82.25%.

Tabel Pengukuran Survei Employee Experience Berdasarkan Direktorat
Employee Experience Survey Measurement Table by Directorate

Pengukuran Measurement	Struktural Structural	Fungsional Functional
Direktorat Utama & Direktorat Wakil Direktur Utama President Directorate & Directorate of Vice President	84,13%	79,84%
Direktorat Produksi Directorate of Production	83,79%	79,01%
Direktorat Keuangan Directorate of Finance	80,05%	74,76%
Direktorat Transformasi Bisnis Directorate of Business Transformation	78,27%	77,37%
Direktorat SDM Directorate of Human Capital	77,69%	78,69%

Tabel Pengukuran Survei Employee Experience Berdasarkan Direktorat
Employee Experience Survey Measurement Table by Directorate

Pengukuran Measurement	Struktural Structural	Fungsional Functional
Direktorat Pemasaran Directorate of Marketing	83,49%	83,24%
Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha Directorate of Portfolio & Business Development	79,54%	79,06%
Direktorat Manajemen Risiko Directorateof Risk Management	79,14%	77,10%

Tabel Pengukuran Survei Employee Experience Berdasarkan Generasi
Employees Experience Survey Measurement Table by Generation

Pengukuran Measurement	Nilai Employee Experience Employee Experience Value
Gen X (Lahir 1965-1980) Gen X (Born 1965–1980)	83,30%
Gen Y (Lahir 1981-1996) Gen Y (Born 1981–1996)	79,79%
Gen Z (Lahir 1997-2012) Gen Z (Born 1997–2012)	84,35%

REALISASI PROGRAM PENGELOLAAN SDM TAHUN 2024

Pada tahun 2024, realisasi dari pengembangan dan pengelolaan SDM diuraikan dalam tabel di bawah ini.

REALIZATION OF THE HC MANAGEMENT PROGRAM IN 2024

In 2024, the realization of HC development and management is described in the table below.



Realisasi Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2024
HR Development & Management Program 2024

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
1.	Transformasi Pengelolaan SDM melalui Implementasi HC Shared Services dan Analisis Kebutuhan Bisnis Transformation of HC Management through Implementation of HC Shared Services and Business Needs Analysis	Melakukan survei mengenai efektivitas tim SDM. Conduct surveys regarding the effectiveness of the HC team.	Rekomendasi tindak lanjut hasil Survei Employee Experience telah dilaksanakan dan dimonitoring melalui program kerja bidang SDM dan pelaksanaan Survei Employee Experience di tahun 2024 Follow-up recommendations on the results of the Employee Experience Survey have been implemented and monitored through the HC work programme and the implementation of the Employee Experience Survey in 2024.
		HRBP desain pilot project. HRBP pilot project design.	Tersedia Roadmap Implementasi HCBP Holding Sub Holding. Sub Holding HCBP Implementation Roadmap is available.
		Melaksanakan HC Shared Services. Implementing HC Shared Services	Implementasi pelaksanaan HC Shared Service sesuai Surat Edaran Implementasi Human Capital Shared Service di Pupuk Indonesia Group. Implementation of HC Shared Service implementation in accordance with the Circular Letter of Human Capital Shared Service Implementation in Pupuk Indonesia Group
		Melakukan Kajian Sentralisasi HC Operations PT PI Group Conducting a Centralization Study of PT PI Group's HC Operations	
		Mengoptimalkan self service karyawan dalam sistem administrasi HC. Optimizing employee self-service in the HC administration system.	• Telah dioptimalkan selfservice karyawan dalam sistem administrasi HC melalui PI SMART. • Telah terimplementasi chatbot "NISA" dan dashboard SDM • Optimised employee self-service in HC administration system through PI SMART. • 'NISA' chatbot and HC dashboard have been implemented.
		Memperkuat infrastruktur digital HC melalui HC dashboard dan real time data processing untuk memfasilitas digitalisasi pada HXM. Strengthening HC digital infrastructure through HC dashboards and real time data processing to facilitate digitalization of HXM. processes and functionality (AI, RPA, Chatbots).	
		Automatisasi proses dan fungsionalitas sistem administrasi SDM (AI, RPA, Chatbots). Automation of HC administration system	

Realisasi Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2024
HR Development & Management Program 2024

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
2.	Akselerasi kinerja dan kompetensi unggul pimpinan dan karyawan Accelerate superior performance and competence of leaders and employees	• Meningkatkan program pengembangan pegawai untuk memasuki pasar dan bisnis baru (retail, industri hijau, dan keterampilan bisnis internasional). • Mengimplementasikan program Top Talent Acceleration. • Improve employee development programs to enter new markets and businesses (retail, green industry, and international business skills). • Implementing the Top Talent Acceleration program.	A. Meningkatkan Program Pengembangan melalui 4E Framework Enhancing the Development Programme through the 4E Framework 1. Implementasi kurikulum • Konsultan Pendamping penyusunan Kurikulum & Silabus berdasarkan Kompetensi Perilaku & Teknis oleh PT Daya Dimensi Indonesia • Sosialisasi Kurikulum & Silabus Kompetensi Perilaku & Teknis kepada Direktur Keuangan & Umum Anper, Band-1 & Band2 Fungsi Learning, SME, dan Band-1 PI & Anper pada tanggal 11 September 2024 • Penyampaian dokumen Kurikulum & Silabus Kompetensi Perilaku & Teknis kepada fungsi SDM Anper pada tanggal 26 September 2024 1. Curriculum implementation • Assistance Consultant for Curriculum & Syllabus development based on Behavioural & Technical Competencies by PT Daya Dimensi Indonesia • Dissemination of Behavioural & Technical Competency Curriculum & Syllabus to Anper Finance & General Director, Band-1 & Band2 Learning Function, SME, and Band-1 PI & Anper on 11 September 2024 • Submission of Behavioural & Technical Competency Curriculum & Syllabus documents to Anper HC function on 26 September 2024 2. Program peningkatan kompetensi Global Communication • Soft launching GoFluent 28 Agustus 2024 • Soft launching GoFluent August,28 2024 • Soft launching LXP Coursera & LinkedIn 9 Oktober 2024 • Soft launching LXP Coursera & LinkedIn October,9 2024 • Program Kemitraan PI dengan MIT-ILP, penyelenggaraan online conference 2. Global Communication competency improvement programme • Soft launching GoFluent 28 Agustus 2024 • Soft launching GoFluent August,28 2024 • Soft launching LXP Coursera & LinkedIn 9 Oktober 2024 • Soft launching LXP Coursera & LinkedIn October,9 2024 • Program Kemitraan PI dengan MIT-ILP, penyelenggaraan online conference • PI Partnership Programme with MIT-ILP, organising online conferences 3. Pelaksanaan Benchmarking program 4E Sharing Session Online "The 4E Approach in Human Capital Development" by Deloitte pada tanggal 31 Desember 2024 3. Implementation of Benchmarking programme 4E Sharing Session Online 'The 4E Approach in Human Capital Development' by Deloitte on December,31 2024. 4. Program peningkatan kapabilitas Tim SDM Telah dilakukan pembelajaran oleh Tim SDM PI Group : CLT, Business Essential, Tugas Belajar MM UGM Jakarta, CHRP, & AHCA 4. Capability enhancement programme for the HC Team Learning has been conducted by PI Group's HC Team: CLT, Business Essential, MM UGM Jakarta Learning Task, CHRP, & AHCA

Realisasi Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2024
HR Development & Management Program 2024

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
			5. Program peningkatan kapabilitas Data Analytic & AI • Program Business Essential Topik pembelajaran: Manajemen Strategis (Northwestern Kellogg), Mengelola Transformasi Organisasi (MIT Sloan), Keuangan untuk Eksekutif (Columbia Business School), Inovasi & Disrupsi Digital (MIT Sloan) • Digital Talent BUMN merupakan program peningkatan kompetensi digital karyawan di lingkungan BUMN, untuk peningkatan kompetensi Digital Marketing, Business, Supply Chain, Product Management, Innovation Collaboration, dengan pencapaian PI Group sebesar 33,26%. 5. Data Analytics & AI capability improvement programme • Program Business Essential Topik pembelajaran: Manajemen Strategis (Northwestern Kellogg), Mengelola Transformasi Organisasi (MIT Sloan), Keuangan untuk Eksekutif (Columbia Business School), Inovasi & Disrupsi Digital (MIT Sloan) • Digital Talent BUMN is a programme to increase the digital competence of employees within BUMN, to increase the competence of Digital Marketing, Business, Supply Chain, Product Management, Innovation Collaboration, with a PI Group achievement of 33.26%
			B. Mengimplementasikan program Top Talent Acceleration Implemented the Top Talent Acceleration programme 1. Pelaksanaan program pengembangan BOD-1 (untuk Top talent terpilih) dan Terlaksananya Program BUMN School of Excellence (BSE): • CTO dan CFO BSE Masterclass (Mei s.d. November 2024) • Program TOP GUN I sd III (Juni 2024 s.d. Januari 2025) • Business Essential Batch 2 sd 4 (September 2024 s.d. Maret 2025) 1. Implemented the Top Talent Acceleration programme Implementation of the BOD-1 development programme (for selected Top talents) and Implementation of the BUMN School of Excellence (BSE) Programme: • CTO dan CFO BSE Masterclass (May s.d. November 2024) • Program TOP GUN I sd III (June 2024 s.d. Januari 2025) • Business Essential Batch 2 sd 4 (September 2024 s.d. March 2025)

Realisasi Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2024
HR Development & Management Program 2024

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
			2. Pelaksanaan program pengembangan BOD-2 (untuk Top talent terpilih) • Managerial Leadership Development Program (MLDP) MLPD Learning Journey dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, dimulai pada bulan Agustus 2024 s.d. Februari 2025, dalam 4 phase inclass session, Leaders Talk Eksternal dan Internal Workshop, IDP Session, Internal Mentor Session, dan Group Project Presentation, yang diikuti 91 peserta BOD-2 (shortlist) PI Group • LDM (Leadership Development Mission: Strategic Leader, Risk Leader, Digital Leader) BOD-2, yang diikuti oleh 3 peserta BOD-2 (shortlist) PI Group 2. Implementation of BOD-2 development programme (for selected Top talents) • The Managerial Leadership Development Program (MLDP) MLPD Learning Journey was carried out within 6 months, starting in August 2024 to February 2025, in 4 phases of inclass sessions, Leaders Talk External and Internal Workshop, IDP Session, Internal Mentor Session, and Group Project Presentation, which was attended by 91 participants of BOD-2 (shortlist) PI Group. • LDM (Leadership Development Mission: Strategic Leader, Risk Leader, Digital Leader) BOD-2, yang diikuti oleh 3 peserta BOD-2 (shortlist) PI Group
			3. Peningkatan kompetensi leader: CMC, HC for Non HC, Change management di dalam program pengembangan BOD-1 dan BOD-2 • Mentor Workshop Program BOD-1 dan BOD-2 PI Group sebanyak 29 batch, selama 1 hari pada 6 lokasi Perusahaan September s.d. November 2024 • Pelatihan Change Management dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024, dengan kepesertaan 7 Direksi dan 19 orang tim Project Management Office Streamlining 3. Leader competency improvement: CMC, HC for Non HC, Change management in the BOD-1 and BOD-2 development programmes. • Mentor Workshop Programme BOD-1 and BOD-2 PI Group 29 batches, 1 day at 6 company locations September to November 2024 • Change Management training was held on 12 December 2024, with the participation of 7 Directors and 19 people from the Project Management Office Streamlining team.
			4. Desain kurikulum Ritel, Industri Hijau & Keterampilan Bisnis (sesuai penjelasan A.1) 4. Retail curriculum design, Green Industry & Business Skills (as per explanation A.1)
		Membentuk Competency based Career Movement untuk meningkatkan mobilisasi pegawai (Employee Exchange, Job Market, dan Tour of Duty). Establishing a Competency based Career Movement to increase employee mobilization (Employee Exchange, Job Market, and Tour of Duty).	Telah tersedia hasil kajian penyusunan peta karir berdasarkan kompetensi untuk mendukung Talent Mobility lintas entitas. The results of a study on the preparation of competency-based career maps to support cross-entity Talent Mobility are available.

Realisasi Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2024
HR Development & Management Program 2024

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
		Mendorong leaders untuk menumbuhkan budaya kinerja tinggi melalui dialog kinerja. Encourage leaders to foster a high performance culture through performance dialogue.	• Telah dilaksanakan refreshment Performance Management Cycle untuk seluruh karyawan • Telah dilaksanakan penilaian Kompetensi Perilaku Karyawan tahun 2024 • Telah dilaksanakan assessment Learning Agility karyawan tahun 2024 • Telah berjalan program Performance Coaching Triwulan IV • Pelatihan Mentoring untuk BOD-1 dan BOD-2 telah selesai • Performance Management Cycle refreshment has been conducted for all employees. • Employee Behaviour Competency assessment has been carried out in 2024 • Employee Learning Agility assessment has been carried out in 2024 • Performance Coaching programme for the fourth quarter has been implemented • Mentoring training for BOD-1 and BOD-2 has been completed
		Meningkatkan kemampuan tim SDM berdasarkan praktik global SDM untuk menciptakan tim SDM yang berkinerja tinggi. Improve the capabilities of the HC team based on global HC practices to create a high-performing HC team.	• Program pembelajaran untuk peningkatan kompetensi tim SDM PI Group antara lain: Corporate Learning Technologist, Tugas Belajar MM UGM, Business Essential, Tugas Belajar MM UGM Jakarta, CHRP, AHCA, Industrial Relations Summit, Designing a Compelling EX Strategy, dan Redefining Work with Flexibility, Diversity & Well-Being • Pelaksanaan Global Communication Program untuk peningkatan kemampuan berbahasa inggris melalui goFLUENT • Learning programmes to improve the competence of PI Group's HC team include: Corporate Learning Technologist, MM UGM Study Task, Business Essential, MM UGM Jakarta Study Task, CHRP, AHCA, Industrial Relations Summit, Designing a Compelling EX Strategy, and Redefining Work with Flexibility, Diversity & Well-Being. • Implementation of Global Communication Programme to improve English language skills through goFLUENT
		Meningkatkan program suksesi untuk menghadapi bisnis baru PIHC. Improve succession programs to deal with PIHC's new business.	• Pemenuhan posisi kunci di level jabatan BoD-1 dan BoD-2. • Pelaksanaan talent acquisition dengan skema internship dan pegawai tidak tetap melalui Program Diaspora BUMN untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang akan datang, seperti Data Sicence, Nano Technology, Bio Science, Agricultural Engineer, dll. • Fulfilment of key positions at the BoD-1 and BoD-2 levels. • Implementation of talent acquisition with internship schemes and non-permanent employees through the BUMN Diaspora Programme to meet future competency needs, such as Data Science, Nano Technology, Bio Science, Agricultural Engineer, etc.
		Merekrut pekerja profesional yang kompeten untuk mempercepat akselerasi bisnis dan kegiatan operasional. Recruit competent professional workers to accelerate business acceleration and operational activities	Telah dilakukan rekrutmen prohire untuk memenuhi posisi kosong yang membutuhkan kompetensi spesifik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Prohire recruitment has been carried out to fulfil vacant positions that require specific competencies in accordance with the needs of the Company.

Realisasi Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2024
HR Development & Management Program 2024

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
3	Optimalisasi budaya kolaboratif sejalan dengan pengembangan program Employee Experience berdasarkan Employee Value Proposition (EVP) Perusahaan Optimizing a collaborative culture is in line with the development of an Employee Experience program based on the Company's Employee Value Proposition (EVP).	Mengimplementasikan dan mengevaluasi program budaya organisasi (termasuk kolaborasi dan inovasi). Implement and evaluate organizational culture programs (including collaboration and innovation).	1. Telah dilaksanakan sosialisasi Game AKHLAK Keluarga (AKAR) di sekolah yayasan PKC, PIM, PKT dan PSP 2. Telah dilaksanakan Pengukuran tingkat penerimaan (Acceptance) AKHLAK secara serentak oleh Kementerian BUMN 3. Penyiapan materi dan tools untuk pengukuran Indeks Maturitas Budaya dan Acceptance AKHLAK tahun 2024 4. Monitoring pelaksanaan SAPA pagi dengan materi HSE Culture 5. Menjalankan Implementasi Program Employee Wellbeing Surat Edaran Nomor: SE-1/MBU/01/2024 tentang Employee WellBeing Policy (EWP) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara antara lain: • Medical Check Up • Fasilitas Daycare Pupuk Indonesia • Membuat komunitaskomunitas olahraga Pupuk Indonesia • Inisiasi layanan konseling • Pelaksanaan seminar tentang kesehatan finansial 1. Socialisation of the AKHLAK Keluarga (AKAR) Game has been conducted in PKC, PIM, PKT and PSP foundation schools. 2. Acceptance level measurement of AKHLAK has been conducted simultaneously by the Ministry of SOEs. 3. Preparation of materials and tools for measuring the Culture Maturity Index and Acceptance AKHLAK in 2024. 4. Monitoring the implementation of morning SAPA with HSE Culture material 5. Implementing the Employee Wellbeing Programme Circular Letter Number: SE-1/MBU/01/2024 concerning Employee WellBeing Policy (EWP) within State-Owned Enterprises, among others: • Medical Check Up • Pupuk Indonesia Daycare Facility • Creating Pupuk Indonesia sports communities • Initiation of counselling services • Conducting seminars on financial health
		Mengembangkan dan menjalankan strategi EVP yang berfokus pada Employee Experience. Develop and execute an EVP strategy that focuses on Employee Experience.	Telah terdapat hasil kajian Roadmap EVP There has been a review of the EVP Roadmap
		Mengembangkan dan menerapkan strategi hubungan karyawan (komunikasi karyawan, kesejahteraan karyawan). Develop and implement employee relations strategies (employee communications, employee welfare).	Sosialisasi dan campaign program SDM melalui peran leader dan kanal-kanal Perusahaan (PI SMART, email) Socialisation and campaigning of HC programmes through leader roles and Company channels (PI SMART, email)
4	Dukungan SDM dalam pembentukan Sub Holding Pupuk Indonesia HR support in the formation of Pupuk Indonesia SubHolding	Penyusunan kajian struktur organisasi sub holding. Preparation of sub-holding organizational structure studies.	Telah disampaikan usulan struktur organisasi untuk 3 Sub Holding ke PMO Penataan Lini Bisnis The proposed organisational structure for the 3 Sub Holding has been submitted to the PMO Business Line Structuring

Realisasi Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2024
HR Development & Management Program 2024

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
5	Penyusunan roadmap inklusivitas Preparation of an inclusiveness roadmap	Implementasi roadmap inklusivitas dalam menyiapkan framework infrastruktur perusahaan inklusif yang terdiri dari infrastruktur sosial, organisasi, dan fisik dengan inisiatif tahun 2024 antara lain: • Melakukan rekrutmen untuk penyandang disabilitas dilaksanakan melalui Rekrutmen Bersama BUMN. • Pengembangan karir antara lain dengan memberikan pelatihan/peningkatan kompetensi sesuai dengan unit kerja penempatan, kesempatan pengembangan karir di perusahaan; • Menyusun program dan sistem pengupahan yang baik dan pemberian program jaminan sosial antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll. • Menyiapkan kemudahan bagi para penyandang disabilitas di area perkantoran antara lain penyiapan dan peningkatan fasilitas peralatan kerja, fasilitas umum perusahaan, dsb. • Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi karyawan disabilitas (program, peralatan K3, dsb)	1. Audit Infrastruktur Fisik dan Inclusive Readiness survei untuk bahan pembuatan Roadmap Inclusive Workplace 2. Telah dibuat Roadmap Inclusive Workplace Pupuk Indonesia Group tahun 2024-2027. 3. Pelaksanaan Program-Program dalam Roadmap Inclusive Workplace tahun 2024 antara lain: • Solidarity Day (Program yang bertujuan meningkatkan Awareness dan Pemahaman Karyawan terkait lingkungan kerja yang inklusif) • Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pupuk Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia • Assessment Modality dan Sharing Session for Leader "Membangun Perspektif Inklusivitas" bersama Komisi Nasional Disabilitas di PKC, Rekind & PKG dan akan dilaksanakan di PIM, PKT dan PSP 1. Physical Infrastructure Audit and Inclusive Readiness survey for Inclusive Workplace Roadmap development. 2. Pupuk Indonesia Group's Inclusive Workplace Roadmap 2024-2027 has been developed. 3. Implementation of Programmes in the Inclusive Workplace Roadmap 2024 include: • Solidarity Day (A programme aimed at increasing employee awareness and understanding of an inclusive work environment) • Signing of a Memorandum of Understanding between Pupuk Indonesia and the National Commission on Disability of the Republic of Indonesia • Modality Assessment and Sharing Session for Leaders 'Building an Inclusivity Perspective' with the National Commission on Disability at PKC, Rekind & PKG and will be held at PIM, PKT and PSP.
		Implementation of the inclusivity roadmap in preparing an inclusive corporate infrastructure framework consisting of social, organizational, and physical infrastructure with the 2024 initiative including: • Conducting recruitment for people with disabilities carried out through Joint BUMN Recruitment. • Career development including providing training/improvement of competency according to the work unit placement, opportunities for career development in the company; • Preparing a good wage program and system and providing social security programs including BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, etc. • Preparing facilities for people with disabilities in the office area including preparing and improving work equipment facilities, public company facilities, etc. • Occupational Health and Safety Programs for employees with disabilities (programs, K3 equipment, etc.)	

Realisasi Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2024
HR Development & Management Program 2024

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
6	Perbaikan pengelolaan dan kinerja dana pensiun PPIP Pusri secara berkesinambungan Continuously improve the management and performance of the PPIP Pusri pension fund	Implementasi roadmap penyehatan dana pensiun manfaat pasti. Implementation of the roadmap for restructuring defined benefit pension funds.	1. Telah dilakukan sosialisasi kepada peserta pensiunan Dapensri di berbagai daerah seperti Palembang, Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Cilacap, Banyuwangi, dan Sosialisasi penutup dilakukan secara online (Zoom Meeting) pada 06 Maret 2024. 2. Pihak Dapensri telah mengajukan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dapensri kepada OJK melalui surat No. 01315/F/SM/F3P20/E T2024 dan sedang dalam pembahasan bersama pihak OJK melalui Sistem Informasi Perijinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA). 3. Pusri telah mengirimkan jawaban pada tanggal 29 April 2024 dengan No. Surat 04463/F/SM/F3/P30/ET/2 024 perihal tanggapan lampiran catatan atas kesesuaian dokumen permohonan pengesahan perubahan PDP Dapensri. 4. Pada Awal Juni 2024 telah diperoleh kesepakatan dengan Serikat Pekerja PSP dan perwakilan Perkumpulan Pensiunan Karyawan (PPKP), mengenai penyesuaian kenaikan Manfaat Pensiun dari 6% menjadi 2% flat selama 3 tahun. 5. Telah terbit Pengesahan PDP dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner No. 378/PD.02/2024 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pusri (Dapensri). 1. Socialisation has been conducted to Dapensri pensioners in various regions such as Palembang, Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Cilacap, Banyuwangi, and the closing socialisation was conducted online (Zoom Meeting) on March 06, 2024. 2. Dapensri has submitted changes to the Dapensri Pension Fund Regulations (PDP) to OJK through letter No. 01315/F/SM/F3P20/E T2024 and is under discussion with OJK through the Financial Services Institution Licensing Information System (SIJINGGA). 3. Pusri has sent an answer on 29 April 2024 with Letter No. 04463/F/SM/F3/P30/ET/2 024 regarding the response to the attachment of notes on the suitability of the application document for the ratification of the change of PDP Dapensri. 4. In early June 2024, an agreement was reached with the PSP Workers Union and representatives of the Employee Pensioners Association (PPKP), regarding the adjustment of the increase in Retirement Benefits from 6% to 2% flat for 3 years. 5. The approval of the PDP from the Financial Services Authority ('OJK') has been issued through the Decree of the Board of Commissioners Number: 378/PD.02/2024 Regarding the Approval of the Pension Fund Regulations of the Pusri Pension Fund (Dapensri).
7	Implementasi Pedoman Umum Pengelolaan Risiko Dana Pensiun dengan menggunakan Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR) Implementation of General Guidelines for Pension Fund Risk Management using the Early Risk Detection System (SDDR)	Optimalisasi Pengelolaan Pasca Kerja di Dana Pensiun Iuran Pasti yang ada di PI Grup. Optimizing Post-Employment Management in Defined Contribution Pension Funds in the PI Group.	• Implementasi ketentuan Dana Pensiun Total Bobot Keseluruhan : 39 item • Implementasi Dana Pensiun PKT : 37 item • Implementasi Dana Pensiun PKT Grup : 37 item • Implementasi Dana Pensiun PPIP Pusri : 37 item • Implementasi Dana Pensiun Kujang Cikampek : 39 item • Implementation of Pension Fund provisions Total Overall Weight : 39 items • PKT Pension Fund Implementation : 37 items • PKT Group Pension Fund Implementation: 37 items • Implementation of PPIP Pusri Pension Fund : 37 items • Implementation of Kujang Cikampek Pension Fund: 39 items

Penghargaan Bidang SDM Tahun 2024
Human Capitals Award 2024

No	Nama Penghargaan Award Name	Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institution
1	Most Extraordinary Women Business Leaders 2024	SWA
2	Women Leadership & Women Empowerment	HIPMI
3	Indonesia Human Capital Award Best Company in Human Capital – Platinum Award	Economic Review
4	Indonesia Human Capital Award Best Company in Corporate Learning Innovation	

RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN

Untuk tahun 2025, Perusahaan telah menyiapkan sejumlah rencana strategis terkait dengan pengembangan dan pengelolaan SDM. Uraiannya adalah sebagai berikut:

FUTURE HC MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PLAN

For 2025, the Company has prepared a number of strategic plans related to HC development and management. The description is as follows:

Rencana Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2025
HR Development & Management Program 2025

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Strategi Strategy	No.	Program Kegiatan Activity Program
1	Mengakuisisi *World Class Talent* Acquiring World Class Talent	Merancang kembali organisasi dan melakukan perencanaan kapasitas sesuai kebutuhan perusahaan Redesign the organization and conduct capacity planning according to company needs	1	Merancang struktur organisasi untuk mengahadapi pertumbuhan investasi dan diversifikasi bisnis dan perencanaan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan Designing organizational structure to cope with investment growth and business diversification and HC capacity planning in accordance with company needs.
		Meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kapabilitas terutama dalam bisnis inti, dan melakukan *Talent Acquisition* (*build, bridge, borrow, & buy*) yang tepat terutama untuk fungsi core dan manajemen risiko Improve performance, productivity, and capability especially in core business, and conduct appropriate Talent Acquisition (build, bridge, borrow, & buy) especially for core functions and risk management.	2	Pengisian karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama untuk posisi kritikal di perusahaan (*core* dan manajemen risiko) melalui program *talent acquisition* yang tepat. Filling employees in accordance with organizational needs, especially for critical positions in the company (core and risk management) through appropriate talent acquisition programs.
			3	Pelaksanaan program talent selection dengan mengutamakan keberagaman talenta dalam *nominated talent* di perusahaan Implementation of talent selection program by prioritizing talent diversity in nominated talents in the company

Rencana Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2025
HR Development & Management Program 2025

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Strategi Strategy	No.	Program Kegiatan Activity Program
		Meningkatkan kapabilitas SDM melalui program pengembangan yang efektif menggunakan 4E *Framework (Education, Experience, Exposure, Environment)* sesuai dengan hasil pemetaan gap kompetensi terutama di fungsi produksi, pengembangan, penjualan ritel, penjualan korporasi, *project management*, TI, dan bisnis global Improving HC capabilities through effective development programs using the 4E Framework (Education, Experience, Exposure, Environment) in accordance with the results of the competency gap mapping, especially in the functions of production, development, retail sales, corporate sales, project management, IT, and global business	4	Pengukuran kompetensi untuk karyawan terutama di fungsi produksi, pengembangan, penjualan ritel, penjualan korporasi, project management, TI, dan bisnis global Competency measurement for employees mainly in production, development, retail sales, corporate sales, project management, IT, and global business functions
			5	Program pengembangan kompetensi terutama di fungsi produksi, pengembangan, penjualan ritel, penjualan korporasi, project management, TI, dan bisnis global. Competency development programs are mainly in production, development, retail sales, corporate sales, project management, IT, and global business functions.
2	Membangun *Performance Driven Culture* Building a Performance Driven Culture	Meningkatkan kapabilitas pemimpin, terutama dalam *performance coaching*, *driving innovation*, dan *change management* Enhance leader capabilities, especially in performance coaching, driving innovation, and change management.	1	Mendorong pemimpin untuk menumbuhkan budaya kinerja tinggi melalui dialog kinerja. Encourage leaders to foster a culture of high performance through performance dialog.
			2	Meningkatkan program pengembangan bagi pemimpin terutama dalam program *driving innovation* dan *change management*. Improve development programs for leaders, especially in driving innovation and change management programs.
		Meningkatkan budaya *safety*, budaya risiko, kolaboratif, *learning agility*, *diversity*, *Respectful Workplace*, dan kemampuan *problem solving* Enhance safety culture, risk culture, collaborative, learning agility, diversity, respectful workplace, and problem solving skills.	3	Meningkatkan pemahaman karyawan terkait dengan budaya *safety* dan budaya risiko. Improve employee understanding of safety culture and risk culture.
			4	Implementasi AKHLAK *Culture Journey*, *Respectful Workplace Policy*, dan *Employee Well-being Policy* Implementation of AKHLAK Culture Journey, Respectful Workplace Policy, and Employee Welfare Policy
		Mempertajam *performance planning* terutama dalam menentukan indikator kinerja yang selaras dengan target perusahaan Sharpen performance planning, especially in determining performance indicators that are aligned with company targets.	5	Cascading alignment antara indikator kinerja di Holding dengan Anak Perusahaan selaras dengan penetapan target KPI Manajemen, termasuk antara atasan dan anggota tim Cascading alignment between performance indicators in Holding and Subsidiaries aligned with Management KPI target setting, including between supervisors and team members.

Rencana Program Pengembangan & Pengelolaan SDM 2025
HR Development & Management Program 2025

No.	Sasaran Strategis Strategic Objective	Strategi Strategy	No.	Program Kegiatan Activity Program
3	Implementasi Roadmap Human Experience Management Roadmap Implementation Human Experience Management	Implementasi manajemen SDM di PI Group berdasarkan *framework Human Experience Management (digital based Human Capital Management)* Implementation of HC management at PI Group based on the Human Experience Management framework (digital based Human Capital Management)	1	Optimalisasi sistem HCIS melalui pengembangan HC *dashboard*, *Generative* AI, dan HC *Analytics* Optimization of HCIS system through the development of HC dashboard, Generative AI, and HC Analytics
		Transformasi proses bisnis dan operasional SDM melalui implementasi *Shared Service* di PI Group Transformation of business processes and HC operations through the implementation of Shared Service in PI Group	2	Evaluasi efektivitas Implementasi HC *Shared Service* Evaluation of the effectiveness of HC Shared Service Implementation
		Implementasi penyelarasan sistem reward dengan memperhatikan *internal equality* dan *external competitiveness* Implementation of reward system alignment by considering internal equality and external competitiveness.	3	Implementasi penyelarasan total reward di Holding dan Anak Perusahaan. Implementation of total reward alignment in Holding and Subsidiaries.
		Membangun hubungan industrial yang harmonis di PI Group termasuk di antaranya penyelarasan Perjanjian Kerja Bersama antar Anak Perusahaan Building harmonious industrial relations in PI Group including the harmonization of Collective Labor Agreements between Subsidiaries.	4	Penyelarasan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Anak Perusahaan Alignment of Company Regulations (PP) and Collective Labor Agreements (CLA) of Subsidiaries
4	Meningkatkan kematangan pengelolaan SDM (human capital management maturity level) secara berkelanjutan, berdasarkan Arsitektur SDM (Human Capital Architecture) BUMN. Continuously improve the Human Capital management maturity level, based on the SOE's Human Capital Architecture.	• Tindak Lanjut Hasil *Human Capital Maturity Assessment*. • Melakukan evaluasi sistem pengelolaan SDM yang diselaraskan dengan Arsitektur SDM (*Human Capital Architecture*) BUMN. • Follow-up of Human Capital Maturity Assessment Results. • Evaluate the HC management system that is aligned with the SOE's Human Capital Architecture.	1	Melakukan evaluasi sistem pengelolaan SDM yang diselaraskan dengan Arsitektur SDM (*Human Capital Architecture*) BUMN Evaluate the HC management system that is aligned with the SOE's Human Capital Architecture.

Teknologi Informasi
Information Technology



PTPI menyadari pentingnya peran teknologi informasi (TI) dalam mendukung pengembangan kegiatan usaha Perusahaan. Perusahaan memahami bahwa TI merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam mencapai visi perusahaan jangka panjang.

PI Grup terus berkomitmen untuk mendorong transformasi digital yang terintegrasi dalam segala aspek operasionalnya. Melalui langkah strategis dengan penguatan keamanan siber, peningkatan infrastruktur, serta tata kelola TI yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan daya saing perusahaan di pasar global yang semakin kompetitif.

Dalam proses pengembangan TI, perusahaan mengadopsi strategi sentralisasi TI yang bertujuan untuk menyatukan seluruh sumber daya TI yang terpusat di PI group. Sentralisasi ini memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan terkait dengan pengelolaan TI dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi di seluruh bagian perusahaan, sehingga menghasilkan dampak yang lebih besar dan konsisten di setiap lini bisnis.

Dengan strategi ini, Perusahaan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh TI untuk mendukung transformasi digital yang lebih cepat, meningkatkan ketahanan sistem, dan menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan seluruh aspek operasional perusahaan. Strategi ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024.

PTPI acknowledges the strategic importance of Information Technology (IT) as a key enabler in driving the Company's business growth and transformation. The Company fully recognizes that IT constitutes a critical pillar in the realization of its long- term corporate vision.

PI Group remains firmly committed to advancing integrated digital transformation across all facets of its operations. This commitment is executed through strategic initiatives focused on strengthening cybersecurity, enhancing infrastructure, and implementing robust IT governance. These efforts are aimed at improving operational efficiency, effectiveness, and the Company's competitiveness in an increasingly dynamic global market.

In its IT development efforts, the Company has adopted an IT centralization strategy, designed to consolidate all IT resources within the PTPI Group under a unified framework. This centralization ensures that all policies and decisions related to IT management are executed in a coordinated and integrated manner across all business units, thereby delivering broader and more consistent impact throughout the organization.

Through this strategy, the Company seeks to fully harness the potential of IT to accelerate digital transformation, enhance system resilience, and drive greater efficiency in the management of its operations. This strategic direction is outlined in the Company's Long-Term Plan for 2020–2024.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TI PERUSAHAAN

Secara struktural, pengelolaan TI di lingkungan Perusahaan dijalankan oleh Direktorat Transformasi Bisnis melalui Kompartemen Teknologi Informasi dan Proyek Digitalisasi & Data Science (DDS), seperti tercermin melalui struktur organisasi di bawah ini.

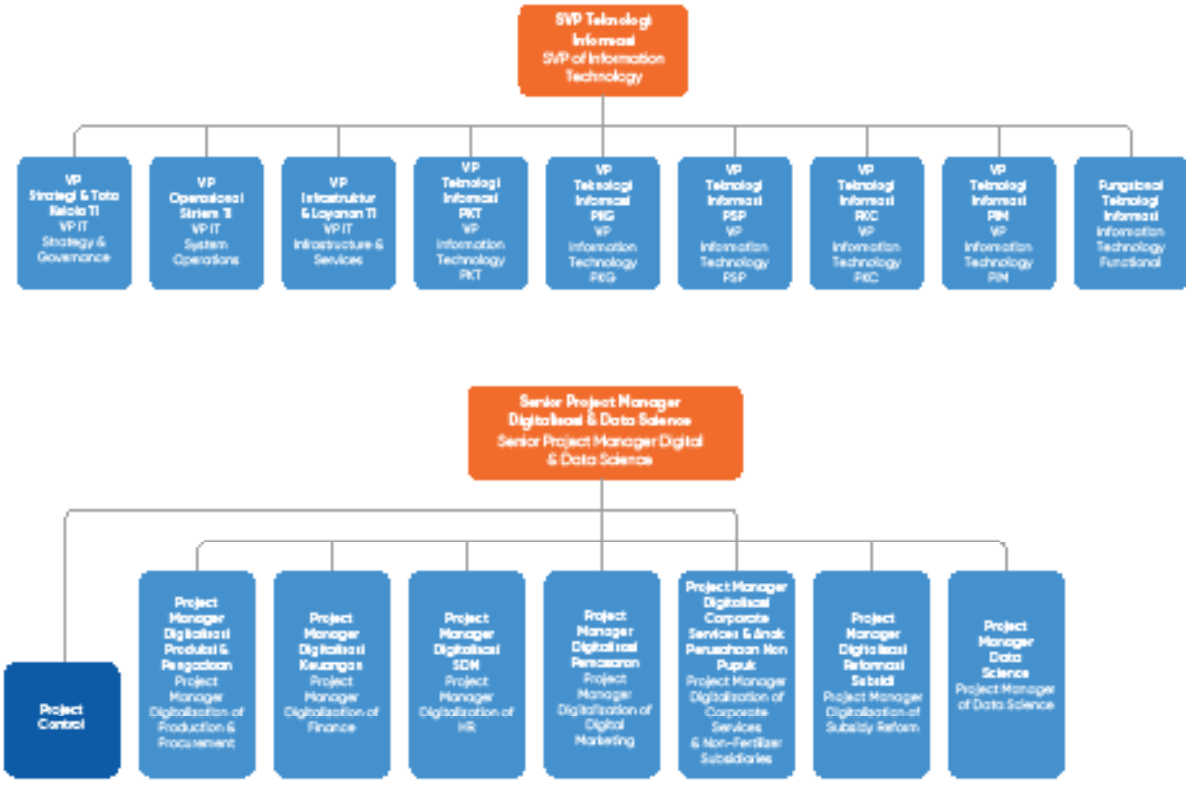
COMPANY IT MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Structurally, IT management within the Company is overseen by the Directorate of Business Transformation through the Information Technology Compartment and the Digitalization & Data Science (DDS) Project Unit, as reflected in the organizational structure below.



Dengan detail struktur organisasi Kompartemen TI dan Proyek Digitalisasi & Data Science sebagai berikut:

With the detailed organizational structure of the Information Technology Compartment and the Digitalization & Data Science Project Unit as follows:



Mengacu pada struktur organisasi tersebut, tanggung jawab pengelolaan TI Perusahaan dijalankan oleh Kompartemen TI yang dipimpin oleh Senior Vice President dan Project Digitalisasi & Data Science (Project DDS) yang dipimpin oleh Senior Project Manager. Keduanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Transformasi Bisnis.

Referring to the organizational structure, the responsibility for IT management within the Company is carried out by the Information Technology Compartment, led by a Senior Vice President, and the Digitalization & Data Science Project (Project DDS), led by a Senior Project Manager. Both report directly to the Business Transformation Director.

Kompartemen TI dan Proyek DDS merupakan divisi di Perusahaan yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi kebijakan dan arahan strategis TI, pengembangan dan implementasi solusi TI, serta pengelolaan operasional dan layanan TI dalam mendukung pencapaian target, strategi, dan kebutuhan bisnis korporasi.

Per tanggal 1 Mei 2022, Kompartemen TI dikepalai oleh Ari Novan Setiono selaku penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan TI PTPI. Adapun per tanggal 16 Januari 2023, Proyek DDS dikepalai oleh Yetty Endarwati selaku penanggung jawab pengembangan sistem aplikasi di PTPI.

TUGAS POKOK KOMPARTEMENT TI & PROYEK DDS

Ruang lingkup kerja yang dijalankan antara lain:
1. Mengelola penerapan tata kelola TI di PTPI dan Entitas Anak.
2. Mengelola pengembangan dan operasional Sistem ERP untuk PTPI dan Entitas Anak.
3. Mengelola pengembangan sistem aplikasi.
4. Mengelola operasional infrastruktur dan layanan TI untuk pengguna di PI *Group*.
5. Mengelola keamanan siber aset Teknologi Informasi PI *Group*.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab, antara lain:
1. Mengkoordinasikan, mengelola dan memastikan terlaksananya IT Master Plan dan roadmap TI sebagai acuan dalam pengembangan Teknologi Informasi di Pupuk Indonesia Group yang selaras dengan arah bisnis Perusahaan.
2. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan ketersediaan serta dukungan Operasional Sistem TI, Tata Kelola TI, dan Kemanan Informasi termasuk layanan pihak ketiga yang aman, handal, dan akurat dalam mendukung operasional bisnis Pupuk Indonesia Group.
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan operasional layanan TI dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan service level agreement (SLA) yang dijanjikan.
4. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan proses manajemen risiko TI yang handal dalam pelaksanaan program kerja dan proses operasional TI.
5. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan fungsi TI di Pupuk Indonesia Group agar sejalan dengan framework pengelolaan TI dan best practice yang efektif.
6. Mengelola mengevaluasi dan memastikan penyediaan kebutuhan infrastruktur TI di PI Group.
7. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi ketersediaan dan kepatuhan terhadap kebijakan TI (pedoman dan prosedur), dan kepatuhan terhadap regulasi eksternal baik nasional maupun internasional sebagai acuan

The Information Technology Compartment and the DDS Project are organizational units within the Company responsible for planning, coordinating, directing, and evaluating IT policies and strategic directives, as well as for the development and implementation of IT solutions, and the management of IT operations and services. These functions are aimed at supporting the achievement of corporate targets, strategies, and business needs..

As of May 1, 2022, the Information Technology Compartment is headed by Mr. Ari Novan Setiono, who is responsible for overseeing the management and development of IT at PTPI. Meanwhile, as of January 16, 2023, the DDS Project is led by Mrs. Yetty Endarwati, who is responsible for application system development at PTPI.

PRIMARY FUNCTIONS OF THE IT COMPARTMENT & DDS PROJECT

Scope of work includes :
1. Managing the implementation of IT governance across PTPI and its Subsidiaries.
2. Overseeing the development and operation of ERP systems for PTPI and its Subsidiaries.
3. Managing the development of application systems.
4. Managing the operations of IT Infrastructure and services for user.
5. Managing cybersecurity of information technology assets of the PI Group.

Key Duties and Responsibilities include:
1. Coordinating, managing, and ensuring the implementation of the IT Master Plan and IT roadmap as key references for the development of Information Technology within the Pupuk Indonesia Group, in alignment with the Company's business direction.
2. Managing, evaluating, and ensuring the availability and support of IT Operational systems, IT Governance, and Information Security including secure, reliable and accurate third party services to support the business operations of Pupuk Indonesia Group.
3. Coordinating and evaluating the operational activites of IT Services to ensure effective execution and in accordance with the agrees Service Level Agreements (SLA).
4. Managing, evaluating and ensuring a reliable IT Risk Management Process in the execution of IT Work programs and IT operational process.
5. Manage, evaluate and ensure the Coordinating, overseeing, and evaluating the management of IT functions within the Pupuk Indonesia Group to ensure alignment with IT Management frameworks and industry best practices.
6. Manging, evaluating and ensuring the fulfillment of IT Infrastructure needs across the Pupuk Indonesia Group
7. Coordinating and evaluating the availability and compliance of IT Policies (including guidelines and procedures), as well as adherence to external regulations both national and international as a

dalam pelaksanaan proses dan pola kerja yang efektif di Pupuk Indonesia Group.
8. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan keamanan siber dan sistem TI untuk menjaga ketersediaan, integritas dan kerahasiaan aset-aset Teknologi Informasi.
9. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
10. Bertanggung jawab dalam mengkolaborasikan semua kebutuhan pengembangan sistem dan data analytics di PI Group.
11. Bertanggung jawab dalam melakukan integrasi dengan sistem sistem lain.
12. Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola serta mengevaluasi kegiatan di bidang transformasi digital dan data science Perusahaan.
13. Bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan, implementasi sistem untuk PI Group.
14. Mendorong pemanfaatan data analytics dalam proses pengambilan keputusan operasional perusahaan.
15. Menciptakan potensi EBITDA uplift dari pemanfaatan digitalisasi & data analytics.
16. Bertanggung jawab dalam membangun kompetensi dan kapabilitas data analytics di PI *group*.
17. Bertanggung jawab dalam support pasca go-live dan pendampingan lapangan (coaching) pada user.
18. Bertanggung jawab dalam improvement, stabilisasi dan optimasi aplikasi pasca go-live.

SDM DAN SERTIFIKASI DI BIDANG TI & DDS

Hingga akhir tahun 2024, jumlah pegawai Kompartemen TI sebanyak 70 orang yang terdiri dari 23 orang di PTPI, 12 orang di Petrokimia Gresik, 8 orang di Pupuk Kujang, 11 orang di Pupuk Kaltim, 4 orang di Pupuk Iskandar Muda, 12 orang di Pupuk Sriwidjaja Palembang. Sedangkan pada Proyek DDS sebanyak 77 orang.

Dalam menjalankan fungsinya, Kompartemen TI serta Proyek DDS didukung oleh SDM yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi di bidangnya. Berikut jumlah sertifikasi SDM di bidang TI dan DDS.

reference for effective process execution and work practices within the Pupuk Indonesia Group.
8. Managing, evaluating, and ensuring cybersecurity and IT system security to safeguard the availability, integrity, and confidentiality of Information Technology assets.
9. Accountable for managing fixed assets, inventory, and work equipment under their responsibility, ensuring they are properly maintained and well-preserved.
10. Responsible for collaborating all system development and data analytics requirements within The Pupuk Indonesia Group.
11. Responsible for carrying out integration with other systems.
12. Responsible for planning, coordinating, managing, and evaluating activities in the areas of digital transformation and data science within the Company.
13. Responsible for the development and implementation of system for The Pupuk Indonesia Group.
14. Promoting the utilization of data analytics in the Company's operational decision-making processes.
15. Creating opportunities for EBITDA upflit through the utilization of digitalization & data analytics.
16. Responsible for building data analytics competencies and capabilities across the Pupuk Indonesia Group.
17. Accountable for providing post go- live support and field coaching to users.
18. Responsible for the improvement, stabilization, and optimization of applications after go-live.

HC AND CERTIFICATION IN THE FIELD OF IT & DDS

As of the end of 2024, the Information Technology Compartment comprises 70 personnel, distributed as follows: 23 at the PTPI, 12 at Petrokimia Gresik, 8 at Pupuk Kujang, 11 at Pupuk Kaltim, 4 at Pupuk Iskandar Muda, and 12 at Pupuk Sriwidjaja Palembang. Meanwhile, the DDS Project team consists of 77 personnel.

In fulfilling their functions, both the IT Compartment and the DDS Project are supported by experienced professionals equipped with relevant industry certifications. The following is a summary of certifications held by personnel within the IT and DDS units.

No.	Sertifikasi Certification	Jumlah Peserta Number of Participants
1	ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management	22
2	COBIT 2019 Foundation Certificate	12
3	IT Architecture Core	2
4	Certified Project Management Professional (PMP)	3
5	CompTIA Security+	3
6	Certified Comptia Network +	3
7	Qualified Risk Management Analyst	2

No.	Sertifikasi Certification	Jumlah Peserta Number of Participants
8	Certified in Risk and Information Systems Control® (CRISC®)	1
9	Certified Six Sigma Black Belt (CSSBB)	1
10	Cisco Certified Network Associate (CCNA) Certification	1
11	Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing & Switching	1
12	Certified Ethical Hacker (CEH)	3
13	Certified Computer Hacking Forensic Investigator	2
14	Certified Ethical Hacker	2
15	Certified Network Defender (CND)	3
16	DevOps Foundation Certification	4
17	BCS Foundation Certificate in Business Analysis V4.0	1
18	Certified Big Data Analyst	1
19	Entry Certificate Business Analysis (ECBA)	2
20	Certified Agile Scrum Foundation	5
21	Certified of Agile Scrum Master by EXIN	4
22	Certified Professional Scrum Master I	2
23	Scrum Fondation Professional Certified SFPC by CertiProf	1
24	Certified Supply Chain Analyst (CSCA)	1
25	Certified of Basic Proficiency in KNIME Analytics Platform by KNIME	1
26	MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)	3
27	ISO 27001 Foundation TUV SUD Indonesia Certificate	4
28	Offensive Security Certified Professional (OSCP)	1
29	Certified ISO 20000 Foundation CertiProf	4
30	EXIN EPI Certified Data Center Professional (CDCP)	1
31	Google Cloud Platform - Professional Cloud Architect	1
32	Pengoordinasian Transformasi Industri 4.0	1
33	Data Protection Officer	1
34	Internet of Things Operation	1
35	EC-Council Disaster Recovery Professional	1
36	Certified International Qualified in Data Modeling (CIQDM)	1
37	Certified International Specialist in Data Modeling (CISDM)	2
38	Tableau Certified Data Analyst	1
39	Certified Professional in Sourcing and Procurement	1
40	Anaplan Certified Model Builder	1
41	Anaplan Level 3 Model Builder	1
42	Remote Pilot	3
43	Analisis Sistem Informasi Geografis	1

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan telah menyusun pedoman strategis TI yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan dan penerapan TI selaras dengan sasaran bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan. Tata kelola TI juga mencakup penanganan gangguan, keamanan, serta pemulihan bencana demi memastikan semua risiko utama dapat diidentifikasi dan dikelola. Seluruh perkembangannya dilaporkan kepada Direksi.

Perusahaan menyadari bahwa TI memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Tata kelola TI yang baik dan terstruktur menjadi salah satu elemen kunci dalam menciptakan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam proses digitalisasi dan pengelolaan TI.

Pedoman strategis tersebut memberikan panduan tata cara dalam melaksanakan pengelolaan TI yang meliputi:

1. Peran TI di dalam Perusahaan.
2. Perencanaan TI.
3. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI.
4. Pengelolaan Investasi TI.
5. Pengelolaan Sumber Daya TI.
6. Pengelolaan Proyek TI.
7. Penanganan Kebutuhan & Identifikasi Solusi.

STRATEGI ATAUPUN PROSES IMPLEMENTASI SISTEM KEAMANAN SIBER DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)

Dalam rangka memenuhi peraturan SK Menteri BUMN No. SK-275/MBU/11/2024 Tentang Prioritas Penerapan Keamanan Siber di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, perusahaan telah melakukan penguatan fungsi *cybersecurity* secara mendasar dengan memindahkan fungsi keamanan yang sebelumnya berada di pilar infrastruktur menjadi di landasan yang meliputi seluruh pilar infrastruktur, aplikasi, dan layanan yaitu fungsi keamanan informasi.

Perusahaan telah menetapkan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai standard ISO 27001. Dalam implementasinya, Perusahaan menjaga keamanan teknologi informasi melalui penerapan analisis kerentanan untuk mendeteksi potensi celah keamanan, serta pelaksanaan audit internal dan eksternal secara berkala guna memastikan kepatuhan terhadap standar dan efektivitas pengendalian sistem informasi. Sepanjang tahun pelaporan, terdapat 16320 kali percobaan intrusi ke sistem/ aplikasi, namun tidak ada satupun yang berhasil menembus perlindungan sistem.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

The Company has developed a strategic IT guideline designed to ensure that IT development and implementation are aligned with its defined business objectives. IT governance also encompasses incident handling, security management, and disaster recovery planning, in order to ensure that all critical risks are properly identified and mitigated. All developments in this area are regularly reported to the Board of Directors.

The Company recognizes that IT plays a vital role in supporting the achievement of its strategic objectives. A well-structured and robust IT governance framework is a key element in driving operational efficiency, optimizing resource utilization, and mitigating potential risks associated with digitalization and IT management.

The strategic guideline serves as a framework for the governance and management of IT, encompassing the following key areasThe role of IT in the Company;

1. The role of IT within the Company.
2. IT planning.
3. IT Process and Organizational Framework.
4. IT Investment Management.
5. IT Resource Management.
6. IT Project Management.
7. Needs assessment and solution identification.

CYBER SECURITY AND PERSONAL DATA PROTECTION (PDP) STRATEGY AND IMPLEMENTATION PROCESS

In compliance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-275/MBU/11/2024 on the Priority of Cybersecurity Implementation within State-Owned Enterprises, and the Republic of Indonesia Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, the Company has significantly reinforced its cybersecurity functions. This was achieved by restructuring the security function previously positioned under infrastructure—into a foundational role that encompasses all pillars: infrastructure, applications, and services, under the scope of information security.

The Company has implemented an Information Security Management System (ISMS) policy in accordance with ISO 27001 standards. In its implementation, the Company safeguards information technology assets by conducting regular vulnerability assessments to detect potential security gaps, as well as performing both internal and external audits to ensure compliance with standards and the effectiveness of information system controls. Throughout the reporting year, there were 16,320 intrusion attempts targeting systems and applications, none of which succeeded in breaching the Company's protection measures.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 0 kali pelanggaran data. Jika terjadi pelanggaran, maka perusahaan akan menindaklanjutinya dengan investigasi serta perbaikan sistem untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

STRATEGI ATAUPUN PROSES PEMULIHAN BENCANA (DISASTER RECOVERY)

Perusahaan telah menyusun aturan dan menyediakan server utama/Data Center (DC) serta server backup/ Disaster Recovery Center (DRC). Perusahaan juga telah melakukan uji coba secara berkala pemulihan sistem atas bencana dengan pengaktifan DRC.

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan telah menetapkan roadmap pengembangan TI yang tertuang dalam Master Plan TI PI Grup Tahun 2020-2024. Roadmap tersebut terbagi atas 3 (tiga) portofolio, yaitu:

1. Business Application
2. Technology & Infrastructure
3. IT Operating Model & Governance

PENCAPAIAN TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, pencapaian yang telah direalisasikan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Accordingly, it can be concluded that there were zero data breaches. In the event of a breach, the Company will conduct an investigation and implement system improvements to prevent similar incidents in the future.

DISASTER RECOVERY STRATEGY AND PROCESS

The Company has established clear policies and provisioned both a primary server (Data Center / DC) and a backup server (Disaster Recovery Center / DRC). The Company conducts periodic disaster recovery drills to validate the effectiveness of its recovery protocols by activating the DRC in simulation scenarios

INFORMATION TECHNOLOGY ROADMAP

The Company has defined its IT development roadmap as outlined in the PTPI Group's IT Master Plan for 2020–2024. The roadmap is structured into three key portfolios:

1. Business Application
2. Technology & Infrastructure
3. IT Operating Model & Governance

2024 ACHIEVEMENTS

Throughout 2024, the achievements that have been realized are outlined in the table below.

No.	Kelompok Inisiatif Initiative group	Nama Inisiatif Initiative name	Uraian Description
1.	Business Application	Pengembangan Single Platform Procurement System (ProcureX). Development of Single Platform Procurement System (ProcureX) application	Integrasi end-to-end proses pengadaan melalui aplikasi ProcureX untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa di seluruh PI Group. Pengembangan ProcureX tahun 2024 melingkupi: • Modul Penerimaan • Roll Out Modul Tender di Pupuk Kujang (PKC), Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) End-to-end integration of the procurement process through the ProcureX application to enhance the efficiency and effectiveness of goods and services procurement across the PTPI Group. The 2024 development of ProcureX included: • Implementation of the Goods Receipt Module • Rollout of the Tender Module at Pupuk Kujang (PKC), Pupuk Kalimantan Timur (PKT) , and Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)
		Pengembangan Plant Digitalization. Development of Plant Digitalization.	Implementasi teknologi 4IR pada Production Analytics Center: • Industrial Internet of Things (IIoT) untuk integrasi data secara real-time di 47 pabrik PI group • AI/ML pada use case predictive maintenance (anomaly detection dan remaining useful life) di Petrokimia Gresik (PKG), Pupuk Kujang (PKC), dan Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) Implementation of Fourth Industrial Revolution (4IR) technologies at the Production Analytics Center, including : • Industrial Internet of Things (IIoT) for real-time data integration across 47 plants within the PTPI Group • Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) for predictive maintenance use cases specifically anomaly detection and estimation of remaining useful life at Petrokimia Gresik (PKG) Pupuk Kujang (PKC), and Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)
		Pengembangan Human Capital (HC) Single Platform. Development of Human Capital (HC) Single Platform.	Pengembangan sistem aplikasi kepegawaian di lingkungan PI Group antara lain: • Assessment Tools: aplikasi alat ukur kompetensi untuk menilai dan mengukur tingkat keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan serta gap kompetensi yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. • Pooling Calibration: aplikasi penilaian untuk mengevaluasi kinerja karyawan dari berbagai sumber antara lain melalui peniliaian kinerja KPI, self-assessment (LAI), feedback Survey 360, inovasi, dan sanksi serta berdasarkan penilaian dari manajer atau supervisor. Melalui penilaian ini manajemen dapat menempatkan karyawan pada kategori/peringkat yang sesuai dari hasil evaluasi. • Learning Agility Index: aplikasi penilaian learning agility yang dapat menggambarkan kemauan belajar dan beradaptasi karyawan. Hasil pengukuran learning agility dapat dijadikan landasan bagi perusahaan untuk lebih memahami learning agility pada setiap karyawannya dan dapat mengembangkan kualitas SDM yang dimiliki. Development of Human Capital Application Systems across the PTPI Group, including: • Assessment Tools: A competency measurement application designed to assess and evaluate employees' skill levels, knowledge, abilities, and competencies, as well as to identify competency gaps relative to specific job requirements. • Pooling Calibration: A performance evaluation application that consolidates assessments from multiple sources—including KPI-based performance reviews, self-assessments (LAI), 360-degree feedback surveys, innovation contributions, and disciplinary records—along with evaluations from managers or supervisors. This tool enables management to place employees into appropriate performance categories or rankings based on comprehensive evaluation results. • Learning Agility Index: An assessment application for measuring employees' learning agility, reflecting their willingness and ability to learn and adapt. The resulting insights provide a foundation for the Company to better understand individual learning agility profiles and to enhance the development and quality of its Human Capital

No.	Kelompok Inisiatif Initiative group	Nama Inisiatif Initiative name	Uraian Description
		Penguatan transformasi digital dan inovasi untuk subsidi pupuk melalui rollout i-Pubers secara nasional serta pengembangan sistem Bantuan Langsung Pupuk bersama Pemerintah. Strengthening digital transformation and innovation for fertilizer subsidies through the national rollout of i-Pubers and developing a Direct Fertilizer Assistance system with the Government	Implementasi >27.000 kios nasional, 26,8 juta transaksi terdigitalisasi di iPubers. Implementation of over 27,000 national kiosks and digitalization of 26.8 million transactions through the iPubers platform.
		Perluasan implementasi ekosistem Integrated Distribution & Outbound Logistik Optimization untuk memperkuat supply chain. Expanding the implementation of the Integrated Distribution & Outbound Logistics Optimization ecosystem to strengthen the supply chain	Visibilitas aliran stok bahan baku utama dan pupuk subsidi/non-subsidi dari lini I sampai kios untuk memastikan keamanan pasokan bahan baku dan ketersediaan stok pupuk di setiap lini. Enhanced visibility of stock flow for key raw materials and both subsidized and non-subsidized fertilizers from Line I to kiosks, ensuring supply chain security and product availability at every distribution stage.
		Implementasi Data Science bidang Supply Chain & Operation. Implementation of Data Science in the field of Supply Chain & Operation	Simulasi S&OP dengan tingkat akurasi 94,2% untuk optimalisasi balansitas bahan baku dan produk sehingga perencanaan produksi dan penjualan lebih mudah dan lebih akurat. Sales & Operations Planning (S&OP) simulation with an accuracy rate of 94.2%, enabling optimized balancing of raw materials and products, and facilitating more accurate and efficient production and sales planning
2.	Teknologi & Infrastruktur Technology & Infrastructure	Migrasi Data Center ERP-SAP ke Cloud Platform ERP-SAP Data Center Migration to Cloud Platform	Proses migrasi data center ERP-SAP ke teknologi *native cloud* yang memberikan portabilitas yang baik untuk dapat memanfaatkan *private cloud* maupun *public cloud* bila membutuhkan skalabilitas baik *upscale* maupun *downscale*. Migration of ERP-SAP data center to native cloud technology, offering increased portability and the flexibility to utilize either private or public cloud environments for scalable (upscale or downscale) operations.
3.	IT Operating Model & Governance	Implementasi standar ISO terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan UU Perlindungan Data Pribadi. Implementation of ISO standards related to Information Security Management Systems and Personal Data Protection Law.	Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Implementasi Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan siber ISO/IEC 27001:2013 certification for Information Security Management Systems and the implementation of Personal Data Protection measures, reflecting compliance with prevailing cybersecurity and data privacy regulations
		Peningkatan IT Maturity berbasis COBIT 2019. Increased IT Maturity based on COBIT 2019	Melakukan peningkatan skor IT Maturity berbasis COBIT 2019 melalui perbaikan proses TI. Improvement of IT Maturity Score based on the COBIT 2019 framework, achieved through enhancements to IT processes.

No.	Kelompok Inisiatif Initiative group	Nama Inisiatif Initiative name	Uraian Description
		Pemutakhiran Rencana Strategis TI tahun 2025–2029 Update to the IT Strategic Plan 2025–2029.	Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) PI Group 2025-2029 yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 sehingga dapat mendukung operasional yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan best practice dan dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terkait teknologi informasi Update of the PTPI Group Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2025–2029, aligned with the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023. This strategic update aims to support more efficient operations by leveraging the latest technologies and best practices, serving as a key reference for management in making strategic IT-related decisions
		Enterprise Architecture (EA) modelling Implementation Enterprise Architecture (EA) modeling Implementation	Implementasi Enterprise Architecture di bidang Pengadaan, Produksi, dan Pemasaran di PI Grup Implementation of Enterprise Architecture in the areas of Procurement, Production, and Marketing across the PTPI Group

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2024, Kompartemen TI telah merealisasikan beberapa item investasi sebagai berikut :
1. Implementasi dan pengembangan sistem.
2. Upgrade dan optimalisasi infrastruktur jaringan, server dan storage.
3. Pembelian lisensi software.
4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Database Server
5. Peningkatan Kualitas Cabling Data Center
6. Distribution Switch Enhancement
7. Regenerasi Fiber Optic
8. Peningkatan Kapasitas DRC
9. Peningkatan Switch Data Center dan DRC

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

Throughout 2024, the IT Compartment has realized the some investment items:
1. System implementation and development.
2. Network infrastructure, server and storage upgrade and optimization.
3. Software license purchase.
4. Database Server Quality and Security Improvement
5. Data Center Cabling Quality Improvement
6. Distribution Switch Enhancement
7. Fiber Optic Regeneration
8. DRC Capacity Improvement
9. Data Center and DRC Switch Improvement

RENCANA PENGEMBANGAN TI 2025

Pada tahun 2025, Perusahaan telah menetapkan rencana pengembangan di bidang TI yang tertuang dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2025-2029. Rencana pengembangan tersebut terbagi atas 5 (lima) portofolio, yaitu :

Model Operasi dan Tata Kelola TI
1. Pemutakhiran *Disaster Recovery Plan* (DRP)
2. Manajemen User Akses
3. Peningkatan IT Maturity PI Group berbasis COBIT 2019

Aplikasi Bisnis
1. Implementasi Digitalisasi Tata Kelola Subsidi Pupuk
2. Pengembangan dan Penyiapan Industri 4.0 untuk Global Lighthouse
3. Pengembangan Sistem/Digitalisasi Proses Bisnis Sub Holding
4. Pengembangan Production Analytics Center
5. Penerapan Single Platform Application
6. Pemanfaatan AI pada Digitalisasi

TI DEVELOPMENT PLAN 2025

In 2025, the Company has outlined a comprehensive IT development agenda as part of the Information Technology Strategic Plan (ITSP) for 2025–2029. The plan is structured into five (5) strategic portfolios :

IT Operating Model & Governance
1. Update of the Disaster Recovery Plan (DRP)
2. User Access Management enhancement
3. Improvement of the PTPI Group IT Maturity Level based on COBIT 2019

Business Applications
1. Implementation of Fertilizer Subsidy Governance Digitalization
2. Development and preparation for Industry 4.0 Global Lighthouse initiatives
3. Development and digitalization of Sub-Holding Business Processes
4. Expansion of the Production Analytics Center
5. Implementation of a Single Platform Application
6. Application of Artificial Intelligence (AI) in digitalization initiatives

Manajemen Data

1. Peningkatan Data Governance
2. Single Source of Truth
3. Regenerasi Middleware Database

Teknologi – Infrastruktur TI

1. Implementasi Network Operation Centre (NOC)
2. Relokasi Fasilitas Data Center
3. Peningkatan Kapasitas Cloud Storage
4. Regenerasi Operating System Server

Teknologi – Keamanan TI

1. Implementasi Security Operation Centre (SOC)
2. Implementasi *Multi-Factor Authentication* (MFA)
3. Implementasi *Database Encryption (Server)*
4. Penyusunan Kebijakan Kepatuhan terhadap Perlindungan Data Pribadi (PDP)
5. Penyediaan *Call Center* untuk Pengaduan Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Data Management

1. Strengthening of Data Governance
2. Establishment of a Single Source of Truth
3. Middleware Database Regeneration

Technology - IT Infrastructure

1. Establishment of a Network Operation Center (NOC)
2. Relocation of Data Center Facilities
3. Expansion of Cloud Storage Capacity
4. Operating System Server Regeneration

Technology - IT Security

1. Establishment of a Security Operation Center (SOC)
2. Implementation of Multi-Factor Authentication (MFA)
3. Database Encryption (Server-Level) implementation
4. Development of Compliance Policies in accordance with Personal Data Protection (PDP) regulations
5. Provision of a Call Center for Personal Data Protection (PDP) Complaints Handling

Riset dan Inovasi
Research and Innovation

Dalam rangka meningkatkan keahlian dan pengetahuan tentang industri pupuk, pertanian serta wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, Kompartemen IFRI melaksanakan pengembangan kompetensi untuk terus meningkatkan peran riset dalam mendukung kinerja Perusahaan.

Riset merupakan elemen penting dalam mendukung kinerja usaha PTPI yang berkesinambungan. Untuk itu, riset yang dilakukan bersama mitra strategis diarahkan untuk mendukung Perusahaan serta Entitas Anak (PI Grup) merespons perkembangan pasar.

Perusahaan meyakini bahwa riset mampu memberikan nilai tambah, baik pada PTPI secara individual maupun kelompok usaha. Hal itu ditunjukkan melalui temuan riset terkait adanya ruang yang besar bagi pengembangan PI Grup.

Perusahaan melakukan riset secara sistematis, terperinci, terencana, mengikuti konsep ilmiah dengan metodologi paling tepat yang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya. Fokus riset Perusahaan untuk mendapatkan, menyempurnakan, dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan bahan baku/penunjang, proses/teknologi, produk, pasar, lingkungan dan sarana penunjang lainnya. Upaya tersebut dilakukan secara konsolidasi untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis Perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI RISET

Riset Perusahaan dikelola oleh Kompartemen Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) yang berada di bawah Direktur Transformasi Bisnis. IFRI membawahi Departemen Perencanaan Riset dan kelompok fungsional seperti Riset Produk, Riset Teknologi, dan Riset Kebijakan Pupuk.

In order to improve expertise and knowledge of the fertilizer industry, agriculture and related science and technology insights, the IFRI carries out competency development to continue to increase the role of research in supporting the Company's performance.

Research is an important element in supporting the sustainable business performance of PTPI. For this reason, research conducted with strategic partners is directed to support the Company and its Subsidiaries (PI Group) to respond to market developments.

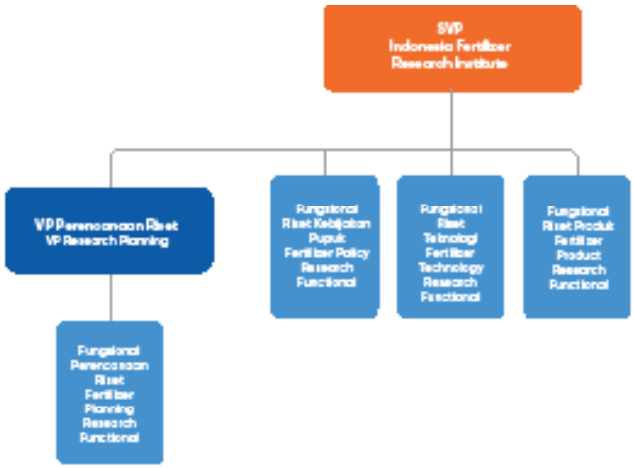
The Company believes that research is able to provide added value to both PTPI individually and the business group. This is shown through research findings related to the large space for the development of PI Group.

The Company conducts research systematically, in detail, and plans, following scientific concepts with the most appropriate methodology supported by competent Human Capitals (HC) in their fields. The Company's research focus is to obtain, refine, and solve problems related to raw materials/supporting materials, processes/technology, products, markets, the environment, and other supporting facilities. These efforts are carried out in a consolidated manner for the growth and development of the Company's business.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF RESEARCH FUNCTION

Corporate Research is managed by the Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) under the Business Transformation Director. IFRI oversees the Research Planning Department and functional groups such as Product Research, Technology Research, and Fertilizer Policy Research.

Struktur Organisasi Fungsi Riset
Organizational Structure of Research Function



Riset Anak Perusahaan Research Lab (Subsidiary)	Fokus Bidang/Keunggulan Focus Area/Excellence	
	Umum General	**Spesifik** Specific
PT Petrokimia Gresik	• Produk dan layanan terkait komoditas pangan dan horti • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Products and services related to food and horticultural commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• *Precision Farming* Komoditas Pangan • Produk efisien P dan K • Pupuk organik • Pupuk untuk pertanian organik • Dekomposisi biomassa pertanian • Precision Farming of Food Commodities • Efficient P and K Products • Organic Fertilizers • Fertilizers for Organic Farming • Decomposition of Agricultural Biomass
PT Pupuk Kujang	• Produk dan layanan terkait komoditas pangan dan horti • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Products and services related to food and horticultural commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• Advanced biofertilizer • Smart farming basis greenhouse • Controlled-release fertilizer • Water-soluble Fertilizer
PT Pupuk Kaltim	• Produk dan layanan terkait komoditas perkebunan • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Products and services related to plantation commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• *Precision Farming* Komoditas Sawit • Produk untuk lahan gambut dan reklamasi tambang • *Blue Ammonia Technology* • Dekomposisi biomassa pertanian • Precision Farming Palm Oil Commodity • Products for peatland and mine reclamation • Blue Ammonia Technology • Decomposition of agricultural biomass
PT Pupuk Iskandar Muda	• Implementasi produk dan layanan PI Grup • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Implementation of PI Group products and services • Utilization of fertilizer industry waste	• *Smart farming basis open field* • *Green/Blue Ammonia Technology*
PT Pusri Palembang	• Produk dan layanan terkait komoditas perkebunan • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Products and services related to plantation commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• *Precision Farming* Komoditas Tebu • *Nanofertilizer* • *Biostimulan* • *Smart farming* basis *open field* • Pupuk dengan Nitrogen stabilizer • Precision Farming Sugar Cane Commodity • Nanofertilizer • Biostimulant • Smart farming the open field • Fertilizer with Nitrogen stabilizer

Riset Anak Perusahaan Research Lab (Subsidiary)	Fokus Bidang/Keunggulan Focus Area/Excellence	
	Umum General	**Spesifik** Specific
PT Rekayasa Industri	• Up-scale teknologi Proses Agrokimia dan Petrokimia • Teknologi Produksi Advanced Fertilizer (CRF, SRF, Chemical) • Up-scale Agrochemical and Petrochemical Process Technology • Advanced Fertilizer (CRF, SRF, Chemical) Production Technology	
PT PI Utilitas*	• Teknologi utilitas pabrik pupuk • Teknologi *Carbon Capture Utility & Storage* • Fertilizer plant utility technology • Carbon Capture Utility & Storage Technology	

*Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*Subsidiary entities until December 15, 2024

Struktur organisasi fungsi riset saat ini dipimpin Senior Vice President yang dijabat oleh Gita Bina Nugraha yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 053/A/HK/P28/SK/2024 tanggal 19 April 2024.

FUNGSI UTAMA IFRI

Secara umum, fungsi utama yang dijalankan IFRI adalah mengoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi, merumuskan sasaran, dan mengelola seluruh kegiatan riset di lingkungan Perusahaan dan Research Lab (Anak Perusahaan). Tujuan dari pelaksanaan fungsi tersebut dalam rangka menunjang penelitian dan kajian dalam bidang riset produk, riset teknologi, serta riset kebijakan pupuk yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun inisiatif strategis yang menjadi sasaran utama dari IFRI adalah:

1. Mengembangkan *Customer Centric R&D* dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman;
2. Mengembangkan solusi pertanian (Agrosolution) sebagai upaya dalam menciptakan keterikatan dengan konsumen;
3. Mendukung *yield productivity* dan keamanan pangan melalui *set-up* dari *research* institute dan melakukan riset pasar & *advokasi policy development*;
4. Memperkuat R&D *Operating Model* dan organisasi yang solid.

SDM RISET

Pada tahun 2024, jumlah SDM riset sebanyak 54 personil, yang terbagi menjadi 10 personel di IFRI (holding) dan 44 orang di Research Lab (Entitas Anak Perusahaan). SDM tersebut berasal dari berbagai bidang keilmuan, antara lain pertanian, teknik kimia, teknik mesin, manajemen, bioteknologi, dan keilmuan lainnya dengan jenjang pendidikan sarjana hingga doktor. Adapun tingkat pendidikan SDM riset diuraikan pada tabel di bawah ini:

The current organizational structure of the research function is led by the Senior Vice President, Gita Bina Nugraha, who was appointed based on the Decree of the Board of Directors No. 053/A/HK/P28/SK/2024 dated April 19, 2024.

MAIN FUNCTION OF IFRI

In general, the main function carried out by IFRI is to coordinate, direct, evaluate, formulate targets, and manage all research activities within the Company and Research Lab (Subsidiary). The purpose of implementing these functions is to support research and studies in the fields of product research, technology research, and fertilizer policy research that can increase the company's competitiveness. The strategic initiatives that are the main targets of IFRI are:

1. Developing Customer Centric R&D and products that suit plant nutritional needs;
2. Developing agricultural solutions (Agrosolution) as an effort to create engagement with consumers;
3. Supporting yield productivity and food security through the set-up of research institutes and conducting market research & advocacy policy development;
4. Strengthening the R&D Operating Model and a solid organization.

RESEARCH HUMAN CAPITALS

In 2024, the number of research Human Capitals will be 54 personnel, divided into 10 personnel at IFRI (holding) and 44 people at Research Lab (Subsidiary entity). These Human Capitals come from various scientific fields, including agriculture, chemical engineering, mechanical engineering, management, biotechnology, and other scientific fields with undergraduate to doctoral education levels. The details education level of research Human Capitals is described in the table below:

No	Bidang Keilmuan Scientific Fields	Pendidikan Education		
		Sarjana Bachelor	Magister Master	Doktor Doctoral
	Holding			
1	Pertanian/Agroteknologi Agriculture/Agrotechnology	2	1	-
2	Teknik Kimia Chemical Engineering	1	1	-
3	Teknik Mesin Mechanical Engineering	-	-	1
4	Manajemen/Ekonomi Management/Economics	1	2	-
5	Biologi/Mikrobiologi/Bioteknologi Biology/Microbiology/Biotechnology		1	-
	Research Lab			
1	Pertanian/Agroteknologi Agriculture/Agrotechnology	11	5	-
2	Sosial Ekonomi/Agribisnis Socio-Economic/Agribusiness	4	-	-
3	Kimia/Mesin/Teknik Chemistry/Mechanical/Engineering	7	1	-
4	Biologi/Mikrobiologi/Bioteknologi Biology/Microbiology/Biotechnology	3	3	-
5	Manajemen dan kompetensi lain Management and other competencies	4	6	-
	Jumlah Total Personil PI Grup Total of PI group Personnel	**33**	**20**	**1**

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan keahlian dan pengetahuan tentang industri pupuk, pertanian, serta wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, Kompartemen IFRI melaksanakan pengembangan kompetensi untuk terus meningkatkan peran riset dalam mendukung kinerja Perusahaan. Hal ini dilaksanakan baik secara outplant training maupun inhouse training. Berikut program peningkatan kompetensi yang dilaksanakan Kompartemen IFRI sepanjang tahun 2024.

COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM IN 2024

In order to improve expertise and knowledge about the fertilizer industry, agriculture, and related scientific and technological insights, the IFRI carries out competency development to continue to improve the role of research in supporting the Company's performance. This is carried out both through outplant training and in-house training. The following are competency improvement programs implemented by the IFRI throughout 2024.

No	Nama Kegiatan Activity Name	Narasumber Speaker/Organizer	Pelaksanaan Implementation	Jumlah Peserta Number of Participants
1	*Management of Phosphate Fertilizers for Feeding The World Sustainably*	IFA	Februari February	2
2	*KNIME Analytics Platform*	Yayasan Komunitas Open Sources	Februari February	4
3	*Masterclass & Networking Program Green Hydrogen Utilization*	Ecadin	Februari February	1
4	Analisis Kebijakan dan Penulisan Policy Brief Policy Analysis and Policy Brief Writing	FISIP UI	Februari February	1
5	*CCS Technology Advancement & Economics*	Ecadin	Februari February	1
6	*MIT Startup Ecosystem Conference*	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Mei May	8
7	*Blue Ocean Strategy*	Panji W. Ruky	Juli July	3
8	Teknis Pelaksana (ToT) Layanan Konsultasi Padi 2.0 Technical Implementation (ToT) of Padi 2.0 Consultation Services	IRRI Indonesia	Juli July	1
9	*Innovative Decision Making*	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Juli July	1
10	Pelatihan New Product Development Professional (NPDP) New Product Development Professional (NPDP) Training	PPM Management	Agustus August	3
11	*MIT Digital Technology and Strategy Conference 2024*	Massachussets Institute of Technology (MIT)	September September	5
12	*Business Acumen*	NuPMK	Februari & September February & September	2
13	*MIT Sustainable Conference - Accelerating the Transition to a Sustainable Future 2024 & MIT Digital Technology and Strategy Conference 2024*	Massachussets Institute of Technology (MIT)	Oktober October	8
14	*Project Management Professional*	PMI - Avenew	Oktober October	7
15	*Artificial Intelligence Days*	PT Pupuk Indonesia (Persero)	November November	6
16	*Remote Pilot Certification*	APDI	November November	1

STRATEGI RISET

Perusahaan memiliki acuan strategi dalam pengembangan riset yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang diuraikan sebagai berikut:

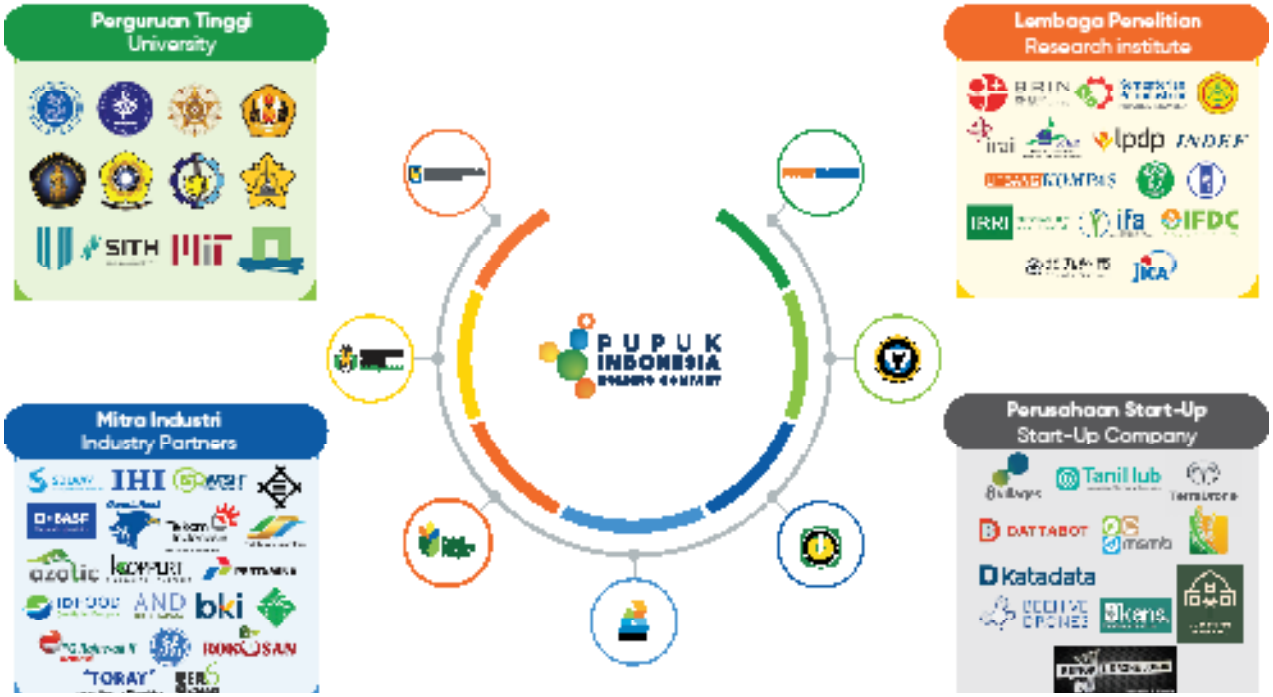
1. Pengembangan produk berdasarkan kebutuhan petani yang disesuaikan dengan tren pasar yang prospektif.
2. Penelitian dan pengembangan produk yang bersifat *advanced* seperti *micronutrient, controlled release, water soluble, biostimulant*, dan lain-lain.
3. Pengembangan dan implementasi teknologi yang mendukung konsep *good agricultural practice* dan *precision farming*.
4. Pelaksanaan sentralisasi fungsi riset dengan membentuk *Center of Excellence* sesuai dengan pengalaman, kompetensi, serta potensi pasar Anak Perusahaan.
5. Kolaborasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan riset dengan pihak eksternal seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun mitra-mitra potensial lain yang sesuai dengan sasaran Perusahaan.
6. Sinergi dengan tim pemasaran maupun produksi untuk memperoleh feedback dan market insight yang diperlukan dalam inisiasi riset.
7. Pengembangan teknologi dalam upaya peningkatan efisiensi produksi maupun kualitas produk serta teknologi prospektif yang mendukung penurunan tingkat emisi karbon perusahaan sesuai target NDC Pemerintah Indonesia.
8. Aktif memberikan rekomendasi maupun kajian terhadap regulasi/kebijakan kepada stakeholder maupun pihak-pihak yang terkait.

RESEARCH STRATEGY

The Company has a strategic reference in research development that aims to increase the company's value, which is described as follows:

1. Product development based on farmers' needs that are adjusted to prospective market trends.
2. Research and development of advanced products such as micronutrients, controlled release, water soluble, biostimulants, and others.
3. Development and implementation of technology that supports the concept of good agricultural practice and precision farming.
4. Implementation of centralization of research functions by forming a Center of Excellence in accordance with the experience, competence, and market potential of Subsidiaries.
5. Active collaboration in implementing research activities with external parties such as research institutions, universities, or other potential partners that are in accordance with the Company's targets.
6. Synergy with marketing and production teams to obtain feedback and market insight needed in research initiation.
7. Technology development in an effort to increase production efficiency and product quality, as well as prospective technology that supports the reduction of the company's carbon emissions, according to the Indonesian Government's NDC target.
8. Actively provide recommendations and studies on regulations/policies to stakeholders and related parties.

Strategi Kolaborasi Riset Pupuk Indonesia
Pupuk Indonesia's Research Collaboration Strategy



PENCAPAIAN TAHUN 2024

Rincian pencapaian IFRI sepanjang tahun 2024 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

ACHIEVEMENTS IN 2024

The details of IFRI's achievements throughout 2024 are outlined in the table below:

Program Kegiatan Activity Program	**Realisasi** Realization
Advance Fertilizer berbasis NPK untuk pangan, hortikultura dan Perkebunan. NPK-based Advanced Fertilizer for food, horticulture, and plantations.	Tercapai parameter TKR 5 yang mencakup standarisasi proses produksi dan uji efektivitas skala terbatas pada tanaman padi dan jagung (rerata peningkatan provitas mencapai 22,9%). Achieved Research Readiness Level parameter 5, which includes standardization of production processes and limited scale effectiveness tests on rice and corn plants (average increase in productivity reached 22.9%).
Controlled Release Fertilizer berbasis NPK untuk hortikultura. NPK-based Controlled Release Fertilizer for horticulture.	Tercapai parameter TKR 6 yang mencakup uji multilokasi di 15 titik dan 5 komoditas, product to market fit, kajian segmentasi pasar dan product knowledge serta pengurusan perizinan produk. Achieved Research Readiness Level 6, parameters which include multi-location tests at 15 points and 5 commodities, product to market fit, market segmentation, and product knowledge studies, as well as product licensing management.
Validasi *Product to Market Fit Validation*.	• Selesai demplot produk NPK Singkong, NPK Kopi dan NPK Plus Mikroba masing-masing di 5 titik lokasi dengan peningkatan provitas hingga 32,34% • Selesai demplot NPK CRF di 10 titik kerjasama PKC dan BSIP Tanah & Pupuk dengan rerata peningkatan provitas mencapai 4,2%. • Completed demonstration plots of NPK Cassava, NPK Coffee and NPK Plus Microbes products, each at 5 locations, with an increase in productivity of up to 32.34% • Completed demonstration plots of NPK CRF at 10 locations in collaboration, with PKC and BSIP Land & Fertilizer with an average increase in productivity of 4.2%.

Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
Pengembangan pupuk basis teknologi nano. Development of nanotechnology-based fertilizers.	• Petro Nano mencapai TKR 4 dengan kemajuan dalam mencapai parameter TKR 5 sebesar 50% yang meliputi uji efektivitas skala terbatas pada tanaman padi (rata-rata peningkatan produktivitas sebesar 11% dan RAE sebesar 16,5%). • Urea Hydroxiapatite Nanohybrid tercapai TKR 4 dengan progres pencapaian parameter TKR 5 sebesar 33% yang mencakup uji coba lapangan padi. • Nano Phosphate basis Nano Biochar tercapai TKR 3 dengan progres pencapaian parameter TKR 4 sebesar 50% yang mencakup formulasi dan karakterisasi prototype. • Petro Nano achieved Research Readiness Level 4 with progress in achieving Research Readiness Level 5 parameters of 50% which includes limited scale effectiveness tests on rice plants (average increase in productivity of 11% and RAE of 16.5%). • Urea Hydroxiapatite Nanohybrid achieved Research Readiness Level 4 with progress in achieving Research Readiness Level 5 parameters of 33% which includes rice field trials. • Nano Phosphate-based Nano Biochar achieved Research Readiness Level 3 with progress in achieving Research Readiness Level 4 parameters of 50% which, includes prototype formulation and characterization.
Implementasi Pengembangan Precision Farming (Padi, Jagung, Kelapa Sawit dan Tebu). Implementation of Precision Farming Development (Rice, Corn, Palm Oil, and Sugar Cane).	Selesai implementasi Sistem Rekomendasi Pemupukan PreciX dengan realisasi *mapping* 256.418 Ha (855%) dari target 30.000 Ha serta deployment 9.208 Ha (921%) dari target 1.000 Ha, dengan rincian sebagai berikut: • Precirice, Mapping : 13.244 Ha Deployment : 191 Ha • Precicane, Mapping : 6.051 Ha Deployment : 340 Ha • Precicorn, Mapping : 665 Ha Deployment : 78 Ha • Precipalm, Mapping : 236.457 Ha Deployment : 8.599 Ha Peningkatan produktivitas rata-rata mencapai 15% dari target 5% Completed implementation of the PreciX Fertilizer Recommendation System with mapping realization of 256,418 Ha (855%) of the target of 30,000 Ha and deployment of 9,208 Ha (921%) of the target of 1,000 Ha, with the following details: • Precirice, Mapping: 13,244 Ha Deployment: 191 Ha • Precicane, Mapping: 6,051 Ha Deployment: 340 Ha • Precicorn, Mapping: 665 Ha Deployment: 78 Ha • Precipalm, Mapping: 236,457 Ha Deployment: 8,599 Ha The average productivity increase reached 15% of the target of 5%
Klasifikasi vegetasi tanaman berbasis data geospasial multitemporal. Multitemporal geospatial data-based plant vegetation classification.	Selesai penentuan algoritma model prediksi komoditas padi dan jagung berbasis *Flooding Signal*, index NDVI, dan *Terrain* dengan akurasi mencapai 83% Completed determination of the prediction model algorithm for rice and corn commodities based on Flooding Signal, NDVI index, and Terrain with an accuracy of 83%
Riset Penerimaan Pelanggan terhadap Produk Baru. Customer Acceptance Research for New Products.	Selesai riset penerimaan pelanggan untuk NPK Kopi, NPK Singkong, NPK plus Mikroba dan Precipalm dengan rerata skor penerimaan pelanggan 4,48 basis parameter ketertarikan dan kepuasan pelanggan. Completed customer acceptance research for NPK Coffee, NPK Cassava, NPK plus Microbes, and Precipalm with an average customer acceptance score of 4.48 based on customer interest and satisfaction parameters.
Penyusunan Indeks Pemupukan dan Pertanian Berkelanjutan Indonesia Compilation of the Indonesian Sustainable Agriculture and Fertilizer Application Index	Selesai kajian dan penyusunan *Agriculture Sustainability Index* mencakup 38 provinsi di Indonesia pada tanaman pangan. Completed study and preparation of the Agriculture covering 38 provinces in Indonesia for food crops.

BIAYA DAN KOMERSIALISASI RISET TAHUN 2024

Biaya Riset

Pada tahun 2024, Perusahaan telah merealisasikan biaya riset sebesar Rp34,3 miliar untuk kegiatan penelitian secara mandiri maupun kerja sama mitra, seperti lembaga riset maupun perguruan tinggi. Rincian realisasi biaya tersebut adalah Rp10,3 miliar dikelola holding dan Rp24 miliar dikelola Anak Perusahaan (Research Lab).

RESEARCH COLLABORATION STRATEGY OF PUPUK INDONESIA

Research Costs

In 2024, the Company has realized research costs of Rp34.3 billion for research activities independently and in collaboration with partners, such as research institutions and universities. The details of the cost realization are Rp10.3 billion managed by the holding and Rp24 billion managed by the Subsidiary (Research Lab).

Komersialisasi Riset

Pada tahun 2024, nilai komersialisasi produk hasil riset yang telah dilakukan mencapai Rp1,29 triliun atau meningkat 55,4% dari tahun 2023 (Rp0,83 triliun). Komersialisasi riset tersebut merupakan nilai penjualan produk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan riset yang meliputi produk pupuk, produk hayati, dan lainnya.

Research Commercialization

In 2024, the commercialization value of research products that have been carried out will reach IDR 1.29 trillion or an increase of 55.4% from 2023 (IDR 0.83 trillion). The commercialization of research is the sales value of the company's products resulting from research activities, including fertilizer products, biological products, and others.

RENCANA RISET 2025

Rencana strategis fokus riset telah disiapkan untuk dilaksanakan dalam tahun 2025, disampaikan dalam tabel di bawah ini:

RESEARCH PLAN 2025

A strategic plan of research focus has been prepared to be implemented in 2025, presented in the table below:

No.	Program Kerja Work Program	Keterangan Description
1	Enhanced Efficiency and Advanced Fertilizer	Melakukan riset lanjutan produk seperti *Controlled Release Fertilizer, Mikroba Endofit, NPK plus mikroba, Nano Fertilizer, Water Soluble Fertilizer*, Biotimulan dan produk potensial lainnya Conducting further research on products such as Controlled Release Fertilizer, Endophytic Microbes, NPK plus microbes, Nano Fertilizer, Water Soluble Fertilizer, Biostimulants, and other potential products.
2	Precision Farming	Pengembangan tools dan pemodelan rekomendasi pemupukan spesifik tanaman (kelapa sawit, padi, tebu dan jagung) berbasis citra satelit, camera multispectral (drone & sensing kit) serta riset geospasial identifikasi vegetasi dan periode tanam. Development of tools and modeling of specific crop Fertilizer Application recommendations (oil palm, rice, sugar cane, and corn) based on satellite imagery, multispectral cameras (drones & sensing kits), and geospatial research on vegetation identification and planting periods.
3	Sustainable Industry	Melakukan kajian rekomendasi dan advokasi Indeks Pemupukan dan Pertanian Berkelanjutan Indonesia serta kajian perhitungan emisi GRK scope 3 Conducting a study of recommendations and advocacy for the Indonesian Sustainable Agriculture and Fertilizer Application Index as well as a
4	Pengembangan R&D operating model dan organisasi yang solid Development of a solid R&D operating model and organization	Pembaruan Roadmap Riset, enhancement aplikasi Sistem Manajemen Riset Terintegrasi dan validasi *product to market fit* Research Roadmap Update, Integrated Research Management System application enhancement and product to market fit validation

Kolaborasi PTPI - Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Salah satu inisiatif dalam Roadmap Riset 2022-2031 adalah peningkatan daya saing dengan membangun kemitraan global. Hal tersebut mendukung visi perusahaan untuk menjadi perusahaan nasional berkelas dunia untuk nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, PI melalui IFRI menjalin kemitraan dengan MIT melalui platform MIT-ILP. MIT-ILP merupakan *platform membership* kemitraan antara MIT dengan industri dan *startup global*. Adapun tujuan kemitraan dengan MIT-ILP mencakup,

- Akses database teknologi dan *expertise*
- Webinar/*Conference*
- *Executive briefing*
- *Customized business visit*
- *Internship*
- Kolaborasi riset

PTPI - Massachusetts Institute of Technology (MIT) Collaboration

One of the initiatives in the 2022-2031 Research Roadmap is increasing competitiveness by building global partnerships. This supports the company's vision to become a world-class national company for plant nutrition and sustainable agricultural solutions. In 2024, PI through IFRI established a partnership with MIT through the MIT-ILP platform. MIT-ILP is a partnership membership platform between MIT and global industry and startups. The objectives of the partnership with MIT-ILP include,

- Access to technology and expertise databases
- Webinar/Conferences
- Executive briefings
- Customized business visits
- Internships
- Research collaborations

Realisasi Kemitraan PIHC-MIT Tahun 2024
PIHC-MIT Partnership Realization in 2024

Webinar/Seminar



MIT Startup Ecosystem Conference
30 April 2024 | April 30, 2024

Seminar yang membahas terobosan teknologi, transfer teknologi, pendanaan startup berbasis sains dan keterlibatan perusahaan dengan startup potensial.
A seminar discussing technological breakthroughs, technology transfer, science-based funding and corporate engagement with potential startups.



MIT Digital Technology and Strategy Conference
17 September 2024 | September 17, 2024

Konferensi yang membahas pemanfaatan AI generatif dalam mendorong inovasi dan membangun industri teknologi digital.
A conference discussing the use of generative AI in driving innovation and building the digital technology industry.



MIT Sustainability Conference
22 Oktober 2024 | October 22, 2024

Seminar yang mengulas terkait perekonomian global serta inovasi yang mendukung aspek keberlanjutan di masa depan. Fokus mencakup energi, carbon capture dan dekarbonisasi yang diterapkan oleh industri.
A seminar that reviews the global economy and innovations that support aspects of sustainability in the future. Focus includes energy, carbon capture, and applied by industry.



Decarbonization
7 November 2024 | November 7, 2024

Seminar diskusi mengenai pengetahuan terkait energi dan sistem perdagangan karbon untuk mendukung perencanaan dan pengembangan strategi perusahaan yang efektif.
Discussion seminar on knowledge related to energy and carbon trading systems to support effective corporate strategy planning and development.



MIT Research and Development Conference
19-20 November 2024 | November 19-20, 2024

Konferensi yang menampilkan hasil penelitian dan pengembangan terbaru MIT di bidang teknologi yang dilaksanakan di MIT Microsystems Technology Laboratories (MTL) mencakup AI, mobilitas, teknologi luar angkasa, mikroelektronik dan komputasi kuantum.
The conference showcases MIT's latest research and development in technologies conducted at the MIT Microsystems Laboratories (MTL), covering AI, mobility, space technology, microelectronics, and quantum.

Event



Closing PI Innovation Award 2024
12 Juni 2024 | June 12, 2024

Kolaborasi secara online dengan narasumber James Rice dengan topik "Supply Chain Resilience and Innovation".
Online collaboration with resource person James Rice on the topic "Supply Chain Resilience and Innovation".



COP 29
19 November 2024 | November 19, 2024

Kolaborasi pada Pavilion Indonesia di Event COP 29 di Baku, Azerbaijan. Materi seminar disampaikan oleh Dwi Satriyo Annurogo (CEO PT Petrokimia Gresik), Alfa Widyawan (SVP Technology PT Pusri Palembang), Dr. Macimilian Jungmann (Executive Manager Heidelberg Center for the Environment) dan Prof. Naoko Ishii (Professor and Director Center for Global Commons the University of Tokyo). Dalam acara ini mengulas terkait perspektif dalam pencapaian net-zero emisi karbon serta pengalaman/inisiatif terkait climate action.
Collaboration at the Indonesian Pavilion at the COP 29 Event in Baku, Azerbaijan. Seminar materials were presented by Dwi Satriyo Annurogo (CEO of PT Petrokimia Gresik), Alfa Widyawan (SVP Technology of PT Pusri Palembang), Dr. Macimilian Jungmann (Executive Manager of Heidelberg Center for the Environment) (Executive Manager of Heidelberg Center for the Environment), and Prof. Naoko Ishii (Professor and Director of the Center for Global Commons at the University of Tokyo). This event reviewed perspectives on achieving net-zero carbon emissions as well as experiences/initiatives related to climate action.

Realisasi Kemitraan PIHC-MIT Tahun 2024
PIHC-MIT Partnership Realization in 2024

Partnership





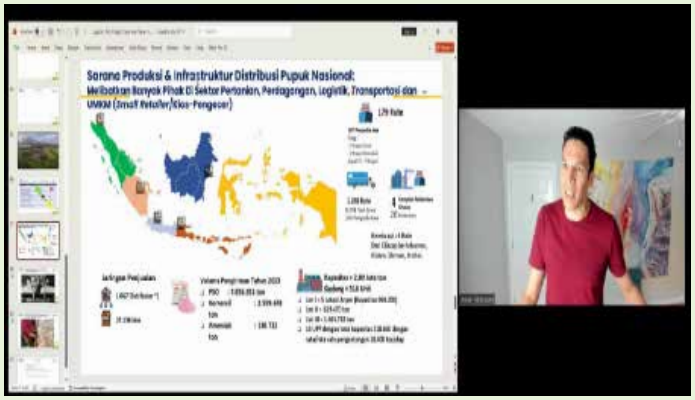
Business Meeting dengan Michael Schrage
24 Juni 2024 | June 24, 2024

Business Meeting dilaksanakan secara offline di Pupuk Indonesia dengan narasumber Michael Schrage dari MIT Sloan School of Management's Center for Digital Business dan Chuan Zhang Tang, dari Industrial Liaison Program (ILP). Fokus pembahasan "Innovation and Management" dengan diskusi mencakup penciptaan dan pengelolaan inovasi yang berfokus pada konsumen, aplikasi dan data.
The Business Meeting was held offline at Pupuk Indonesia with speakers Michael Schrage from MIT Sloan School of Management's Center for Digital Business and Chuan Zhang Tang, from the Industrial Liaison Program (ILP). The focus of the discussion was "Innovation and Management" with discussions covering the creation and management of innovations that focus on consumers, applications, and data.

Business Meeting dengan Chang Jie Guo
23 Agustus 2024 | August 23, 2024

Business Meeting yang dilaksanakan secara hybrid dengan narasumber Chang Jie Guo. Fokus pembahasan "Penyelarasan tujuan Pupuk Indonesia dengan MIT untuk potensi kolaborasi ke depannya" dengan topik big data & supply chain, product tracking dan fertilizer alternatives.
Business Meeting held in a hybrid manner with resource person Chang Jie Guo. Focus of discussion on "Alignment of Pupuk Indonesia's goals with MIT for potential future collaboration" with the topic of big data & supply chain, product tracking, and fertilizer alternatives.





Penjajakan Riset: Dr. Josué C. Velázquez Martínez dan Chris Mejía Argueta Haldrian Iriawan
12 September 2024, 13 September 2024 dan 7 Januari 2025
September 12, 2024, September 13, 2024 and January 7, 2025

Dr. Josué C. Velázquez Martínez dan Chris Mejía Argueta dengan topik kolaborasi terkait "The Supply Chain Optimization", fokus kolabarasi riset adalah forecasting fertilizer demand dan product tracking

Haldrian Iriawan (perwakilan MIT) dengan topik kolaborasi terkait Potensi dan Scale-up Challenges Teknologi Pengolahan N2 menjadi Amoniak serta Scope Techno Economic Analysis dan Scope Technology of Interest.

Dr. Josué C. Velázquez Martínez and Chris Argueta, with a collaboration related to "The Supply Chain Optimization", the focus of the research collaboration is forecasting fertilizer demand and product tracking.

Haldrian Iriawan (MIT representative) with a collaboration topic related to the Potential and Scale-up Challenges of N2 Processing Technology into into Ammonia, as well as the Scope of Techno Economic Analysis and Scope of Technology of Interest.

DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PRODUCT DIVERSIFICATION AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT



Nitrokal, Produk Booster Tinggi Kalium

PTPI melalui IFRI dan Research Lab Pupuk Kujang melakukan diversifikasi produk baru berupa produk anorganik majemuk dengan kandungan hara tinggi kalium (K2O 50%) sebagai komplementer produk subsidi maupun non subsidi eksisting. Produk tersebut telah diuji secara multilokasi pada padi, bawang merah, kentang, cabai dan tomat dengan peningkatan produktivitas secara konsisten hingga 105% (dibandingkan kebiasaan petani). Uji validasi *product to market fit* juga telah dilaksanakan dengan nilai respon penerimaan pelanggan mencapai skor 4,6 (skala 1-5, *passing score* 4,0).

Produk tersebut mulai dilakukan pengurusan izin edar sejak tahun 2023 dengan merek dagang yang terdaftar Nitrokal nomor pendaftaran DID2023047236 serta izin edar sebagai pupuk hara makro majemuk dengan nomor pendaftaran 01.05.2023.1616. Nitrokal akan dibranding sebagai booster rendemen dan kualitas hasil panen dengan segmentasi produk untuk tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Nitrokal ditargetkan untuk petani yang yang fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas panen serta ketahanan terhadap penyakit dan kekeringan. Dengan pencapaian sampai dengan tahun 2024 tersebut, produk Nitrokal diusulkan masuk ke tahap pre-marketing pada tahun 2025.

Nitrokal, High Potassium Booster Product

PTPI, through IFRI and Research Lab Pupuk Kujang, diversified new products in the form of compound inorganic products with high potassium nutrient content (K2O 50%) as a complement to existing subsidized and non-subsidized products. The product has been tested in multiple locations on rice, shallots, potatoes, chilies and tomatoes with a consistent increase in productivity of up to 105% (compared to farmer habits). Validation tests for product to market fit have also been carried out with a customer acceptance response value reaching a score of 4.6 (scale 1-5, passing score 4.0).

The product has started to process distribution permits since 2023 with the registered trademark Nitrokal registration number DID2023047236 and a distribution permit as a compound macro nutrient fertilizer with registration number 01.05.2023.1616. Nitrokal will be branded as a booster for yield and quality of harvest with product segmentation for food crops, horticulture, and plantations. Nitrokal is targeted at farmers who focus on increasing the quantity and quality of harvests, as well as to disease and drought. With the achievements up to 2024, the Nitrokal product is proposed to enter the pre-marketing stage in 2025.

Platform Prediksi Hara dan Rekomendasi Pemupukan

Roadmap Agtech 2034 dicanangkan KBUMN untuk mendukung ketahanan pangan dengan memanfaatkan teknologi pertanian dalam ekosistem pangan melalui sinergi BUMN dan kolaborasi global dalam R&D dan inovasi. Salah satu penugasan dari KBUMN kepada PTPI terkait implementasi *Precise Soil Nutrient Mapping* yang mendukung peningkatan produktivitas tanaman padi, jagung, tebu dan kelapa sawit. PTPI mempunyai inisiatif melakukan pengembangan teknologi pertanian presisi untuk mendukung tercapainya target roadmap Agtech 2034.

Nutrient Prediction and Fertilizer Application Recommendation Platform

The Agtech 2034 Roadmap was initiated by KBUMN to support food security by utilizing agricultural technology in the food ecosystem through synergy between BUMN and global collaboration in R&D and innovation. One of the assignments from KBUMN to PTPI is related to the implementation Mapping, which supports increased productivity of rice, corn, sugar cane, and oil palm plants. PTPI has the initiative to develop precision agricultural technology to support the achievement of the Agtech 2034 roadmap target.



PreciX (Precision Agriculture Platform) merupakan inovasi teknologi pertanian yang dikembangkan oleh Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) PTPI bersama Anak Perusahaan untuk mendukung sistem pertanian presisi yang lebih efisien dan berkelanjutan. PreciX dibangun menggunakan teknologi terkini berbasis satelit, drone multispektral dan proximal sensor yang disesuaikan dengan target konsumen berdasarkan jenis tanaman dan luasan lahan. Output secara umum dari platform ini adalah kadar hara tanah/tanaman serta rekomendasi pemupukannya.

Penerapan teknologi PreciX di tahun 2024 tercapai *mapping* 256.418 Ha (855%) dari target 30.000 Ha, *deployment* seluas 9.208 Ha (921%) dari target 1.000 Ha serta terdapat peningkatan produktivitas rerata mencapai 15% dari target 5%. Platform rekomendasi pemupukan padi tercapai 13.244 Ha dengan *deployment* 191 Ha. Platform rekomendasi pemupukan tebu tercapai 6.051 Ha dengan *deployment* 340 Ha. Platform rekomendasi pemupukan jagung tercapai 665 Ha dengan *deployment* 78 Ha. Platform rekomendasi pemupukan kelapa sawit tercapai 236.457 Ha dengan *deployment* 8.599 Ha.

PreciX (Precision Agriculture Platform) is an agricultural technology innovation developed by the Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) PTPI together with its Subsidiaries to support a more efficient and sustainable precision agriculture system. PreciX is built using the latest satellite-based technology, multispectral drones, and proximal sensors sensors that are tailored to target consumers based on crop type and land area. The general output of this platform is soil/plant nutrients levels and fertilizer recommendations.

The application of PreciX technology in 2024 achieved mapping of 256,418 Ha (855%) of the target of 30,000 Ha, deployment of 9,208 Ha (921%) of 1,000 Ha, and there was an increase in average productivity reaching 15% of the target of 5%. The rice Fertilizer Application recommendation platform achieved 13,244 Ha with a deployment of 191 Ha. The sugar cane Fertilizer Application recommendation platform achieved 6,051 Ha with a deployment of 340 Ha. The corn Fertilizer Application recommendation platform achieved 665 Ha with a deployment of 78 Ha. The palm oil Fertilizer Application recommendation platform achieved 236,457 Ha with a deployment of 8,599 Ha.

PTPI melalui IFRI juga mengembangkan platform dan alat berbasis *proximal sensing* memanfaatkan sensor kamera hyperspektral berbasis gelombang spektrofotometri dengan algoritma *machine learning* untuk memprediksi kandungan hara N, P dan K di tanah di tanah. IFRI juga mengembangkan prediksi kadar hara dan tingkat kemanisan buah melon yang terintegrasi dengan aplikasi mobile. Model algoritma dalam Nutrisense mampu memberikan prediksi dengan tingkat akurasi >80%.

SISTEM KLASIFIKASI TANAMAN BERBASIS GEOSPASIAL

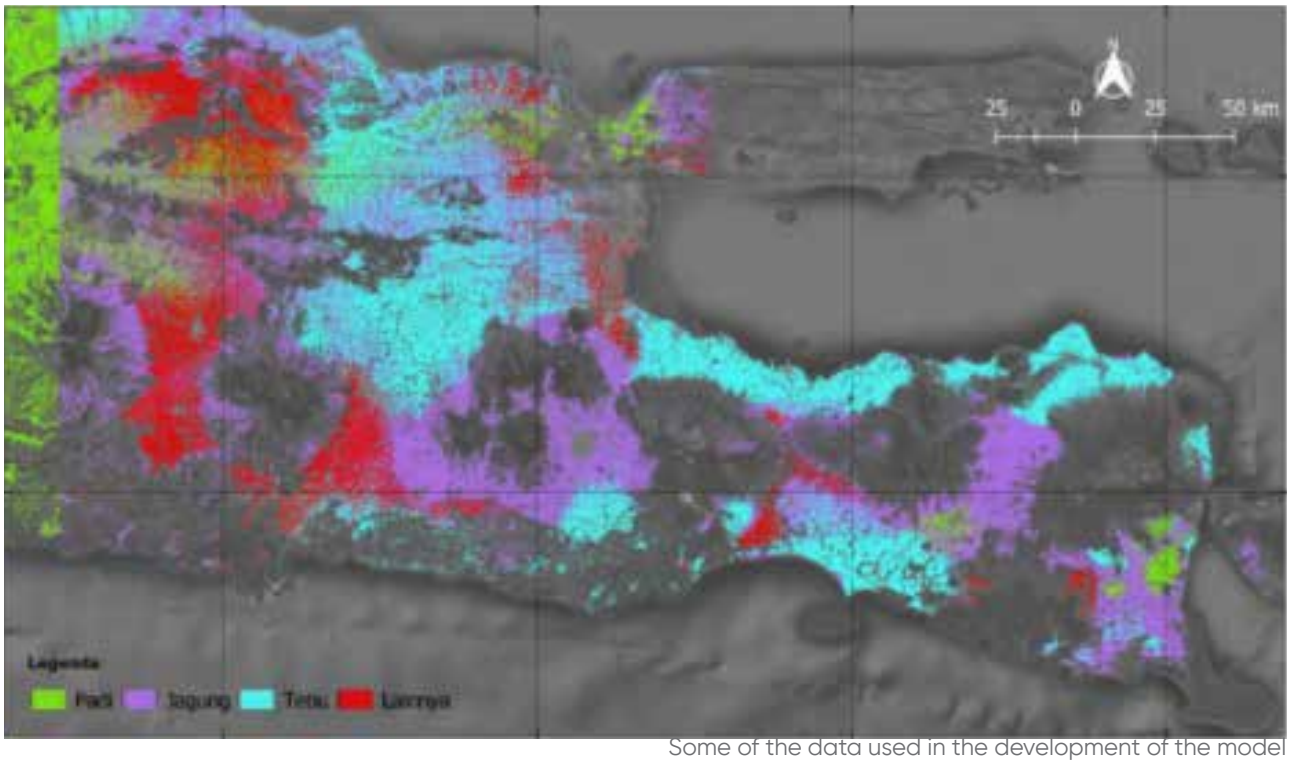
PTPI memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan pupuk subsidi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Distribusi pupuk subsidi dilaksanakan dengan prinsip 6 Tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, dan harga. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan dalam penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk subsidi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola distribusi pupuk subsidi. Salah satu solusi yang menjanjikan adalah memanfaatkan data dan teknologi geospasial untuk melakukan pemetaan komoditas tanaman pertanian dan perkebunan.

PTPI through IFRI also developed a platform and tool based on proximal sensing utilizing a hyperspectral camera sensor based on spectrophotometric waves with a machine learning algorithm to predict the content of N, P and K nutrients in the soil. IFRI also developed a prediction of nutrient levels and sweetness levels of melon fruit integrated with a mobile application. The algorithm model in Nutrisense is able to provide predictions with an accuracy level of >80%.

GEOSPATIAL-BASED PLANT CLASSIFICATION SYSTEM

PTPI has the main responsibility for providing subsidized fertilizers to support the national food security program. The distribution of subsidized fertilizers is carried out with the principle of 6 Rights, namely on time, quantity, type, place, quality, and price. However, there are still disparities in the provision, distribution and use of subsidized fertilizers that require further attention. Therefore, a more effective and efficient approach is needed in managing the distribution of subsidized fertilizers. One promising solution is to utilize geospatial data and technology to map agricultural and plantation crop commodities.

Peta Komoditas Skema Klasifikasi Kelas Bertahap
Commodity Map Phased Class Classification Scheme



Beberapa data yang digunakan dalam Pembangunan model mencakup citra Sentinel-1 dan Sentinel-2, dataset Land Use Land Cover (LULC) Bioma, data curah hujan dari Climate Hazards Groups InfraRed Precipitation with Station Data (CHIRPS), serta model elevasi Digital Elevation Model (DEM) Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Model Machine Learning yang digunakan adalah kombinasi algoritma MLP untuk klasifikasi tanaman padi dan non-padi dengan akurasi lebih dari 90%, serta algoritma ExtraTrees untuk klasifikasi tanaman jagung, tebu, dan tanaman lainnya dengan akurasi lebih dari 80%.

Some of the data used in the development of the model include Sentinel-1 and Sentinel-2 imagery, Land Use Land Cover (LULC) Bioma dataset, rainfall data from Climate Hazards Groups InfraRed Precipitation with Station Data (CHIRPS), and the Digital Elevation Model (DEM) Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) elevation model. The Machine Learning model used is a combination of the MLP algorithm for the classification of rice and non-rice crops with an accuracy of more than 90%, and the ExtraTrees algorithm for the classification of corn, sugar cane, and other crops with an accuracy of more than 80%.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Keyakinan dalam Mewujudkan Swasembada Pangan untuk Masa Depan

Belief in Achieving Food Self-Sufficiency for the Future

Para Insan PI mampu meyakinkan para Petani untuk mewujudkan niat baiknya. Mengelola tantangan dengan keyakinan. memperoleh Pertumbuhan demi generasi Penerus.Dalam semangat Sinergi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional, PTPI menanamkan sikap Percaya Diri sebagai nilai utama dalam setiap langkah yang diambil. Kepercayaan diri ini menjadi landasan bagi seluruh insan perusahaan dalam menghadapi tantangan, mewujudkan inovasi, dan memastikan pertanian Indonesia semakin maju dan berkelanjutan.

PI employees are able to convince farmers to realize their good intentions. Managing challenges with confidence. Achieving growth for future generations. In the spirit of synergy to achieve national food self-sufficiency, PTPI instills self-confidence as a core value in every step taken. This self-confidence serves as the foundation for all company employees in facing challenges, driving innovation, and ensuring that Indonesian agriculture continues to advance and become more sustainable.

"Komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik mendapatkan apresiasi yang positif dari pemangku kepentingan eksternal."

"The Company's commitment to implementing good corporate governance principles has received positive appreciation from external stakeholders."



PTPI berkomitmen untuk selalu menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di setiap kegiatan usahanya. Penilaian penerapan GCG merupakan salah satu ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN khususnya pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara khususnya Pasal 44 mengenai Pengukuran terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PTPI is committed to always implementing Good Corporate Governance in every business activity. Assessment of GCG implementation is one of the provisions stipulated by the Ministry of SOEs, especially in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, especially Article 44 regarding Measurement of the Implementation of Good Corporate Governance.

Prinsip-prinsip GCG diterapkan untuk meningkatkan nilai perusahaan, melindungi kepentingan dari para pemangku kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas dalam seluruh aktivitas dan proses usaha Perseroan. Komitmen GCG ini tercermin dari struktur, serta mekanisme/proses dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Perseroan.

GCG principles are applied to increase corporate value, protect the interests of stakeholders and increase accountability in all activities and business processes of the Company. This GCG commitment is reflected in the structure, mechanisms and policies implemented by the Company.

PENGAKUAN EKSTERNAL

Sepanjang tahun 2024, PTPI telah mendapatkan pengakuan eksternal, yaitu berupa penghargaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

EXTERNAL RECOGNITION

Throughout 2024, PTPI has received external recognition, namely in the form of awards in the implementation of good corporate governance (GCG).

No	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Nama Penghargaan Award Name	Ajang Penghargaan Award Event	Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institution
1	21 November 2024 November 21, 2024	Platinum Award dan Silver Award dalam program "Social Tour Dambaan" berbasis *Creating Shared Value* (CSV) Platinum Award and Silver Award in Creating Shared Value (CSV) based programme 'Social Tour Dambaan'	Indonesian SDGs Award (ISDA) Indonesian SDGs Award (ISDA)	Kementerian PPN/Bappenas Ministry of National Development Planning/Bappenas
2	25 November 2024 November 25, 2024	Predikat "Sangat Tepercaya/Most Trusted" dan skor 87,66 Predicate 'Most Trusted' and score 87.66	Corporate Governance Perception Index (CGPI) Indonesia Trusted Companies Award 2024	The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Commitment to Implementing Good Corporate Governance

Penerapan GCG di lingkungan PTPI, disebut juga PTPI atau Perseroan selalu berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, otoritas, maupun masyarakat umum. Perseroan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik secara konsisten, komprehensif, dan berkesinambungan di setiap kegiatan usaha juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Selain itu, manajemen berharap dapat meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) Perseroan untuk tumbuh dan berkesinambungan di tengah iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.

The implementation of GCG within PTPI, also known as PTPI or the Company, is always committed to maintaining a balance between the needs of the Company and stakeholders, such as shareholders, employees, customers, suppliers, authorities, and the general public. The Company believes that consistent, comprehensive, and sustainable implementation of good GCG principles in every business activity also plays an important role in increasing stakeholders' trust in the Company. In addition, the management hopes to improve the Company's performance and value to grow and sustain in the midst of an increasingly competitive and dynamic business climate.

Perseroan dapat meningkatkan kualitas melalui pengambilan keputusan dan menjalankan kegiatan usaha di industri perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya, serta agroindustri secara sehat sekaligus menjaga kepercayaan Pemegang Saham, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, sampai kepada peran Perseroan sebagai entitas usaha milik negara (BUMN) yang menjadi bagian dari agen percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

The Company can improve quality through decision-making and conduct business activities in the fertilizer, petrochemical, agrochemical and other chemical, and agroindustry industries in a healthy manner while maintaining the trust of Shareholders, the public, and all other stakeholders, up to the Company's role as a state-owned enterprise (SOE) which is part of the agent of accelerating Indonesia's economic growth.

Komitmen Perseroan pada tata kelola perusahaan yang baik tertuang dalam pernyataan komitmen yang ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*) PTPI. Komitmen penerapan GCG terlihat dalam implementasinya yang dicapai melalui penguatan infrastruktur, proses, dan sistem yang dimiliki secara berkesinambungan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG.

The Company's commitment to good corporate governance is contained in a commitment statement signed by all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors. The statement is contained in the Code of Corporate Governance of PTPI. The commitment to GCG implementation is seen in its implementation, which is achieved through continuous strengthening of infrastructure, processes, and systems to support the effectiveness of GCG implementation.

Untuk mendukung penerapan GCG, Perseroan telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola

To support the implementation of GCG, the Company has developed a corporate governance structure and

perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG serta *best practice* yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Penerapan prinsip-prinsip GCG juga merupakan bagian dari kepatuhan Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

2. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021.

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN GCG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PPTPI

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sekaligus sebagai wujud nyata komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PTPI terkait hal ini, maka Dewan Komisaris dan Direksi PTPI telah memberikan Pernyataan Komitmen Bersama pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan yaitu:

- Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten di seluruh aspek bisnis sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja Perseroan agar tetap mampu bertahan di iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan merupakan Pedoman yang disusun untuk menjadi panduan melandasi penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perseroan.

HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

PTPI menerapkan hubungan dengan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya secara berimbang berlandaskan "*Good Corporate Governance*", sehingga tercipta keselarasan.

PTPI tidak menerapkan hubungan yang tidak berimbang dan tidak selaras, sehingga tidak terlihat keterkaitan antar para pemangku kepentingan, atau hubungan yang bermakna "*Bad Corporate Governance*".

system by taking into account GCG principles and best practices that apply both nationally and internationally. The implementation of GCG principles is also part of the Company's compliance as a State-Owned Enterprise (SOE) with:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021.

STATEMENT OF COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS OF PTPI

In order to implement Good Corporate Governance as well as a tangible manifestation of the commitment of the Board of Commissioners and Directors of PTPI in this regard, the Board of Commissioners and Directors of PTPI have provided a Joint Statement of Commitment to the Corporate Governance Guidelines, namely:

- The Company is committed to implementing Good Corporate Governance consistently in all aspects of the business as a step to improve the Company's performance in order to remain able to survive in an increasingly competitive and dynamic business climate.

- The Corporate Governance Guidelines are guidelines prepared to serve as a foundation for the implementation of Good Corporate Governance within the Company.

COMPANY RELATIONS WITH SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

PTPI applies relationships with shareholders and other stakeholders in a balanced manner based on 'Good Corporate Governance', thus creating harmony.

PTPI does not apply relationships that are not balanced and not aligned, so that there is no visible connection between stakeholders, or relationships that mean 'Bad Corporate Governance'.





Aktivitas GCG 2024
GCG Activities Highlights In 2024

Tanggal Dates	Aktivitas Activities
26 Januari 2024 January 26, 2024	Webinar Internalisasi LHKPN PI Group PI Group LHKPN Internalization Webinar
23 Februari 2024 February 23, 2024	Internalisasi *Anti Fraud* kepada *Key Buyer* Pemasaran Komersil Anti-Fraud Internalization for Key Commercial Marketing Buyers
28 Maret 2024 March 28, 2024	Komitmen dan Himbauan Anti Gratifikasi terkait momen Hari Raya IdulFitri 1445 H Commitment and Appeal Against Gratuities in Connection with Eid al-Fitr 1445 H
7 Mei 2024 May 7, 2024	Sosialisasi Komposisi Organ Pengelola Risiko PI Group Socialization of the Composition of PI Group Risk Management Organs
27 Mei 2024 May 27, 2024	Paparan penerapan SMAP, WBS, dan Program Pengendalian Gratifikasi pada Rapat Koordinasi Ops. Distribusi Wilayah 2 Presentation on the implementation of SMAP, WBS, and Gratuity Control Program at the Regional Distribution Operations Coordination Meeting 2
25 Juni 2024 June 25, 2024	Sosialisasi Penyusunan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Socialization of Integrated Governance Report Preparation
22, 26 Agustus 2024 August 22,26, 2024	Internalisasi Pengelolaan WBS Terintegrasi PI Group bersama KPK RI Internalization of Integrated WBS Management for PI Group with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK)
12 November 2024 November 12, 2024	*Workshop* Pengelolaan Risiko *Fraud* untuk PI dengan narasumber ACFE dan CRMS Workshop on Fraud Risk Management for PI with speakers from the ACFE and CRMS
12 November 2024 November 12, 2024	*Workshop* Pengelolaan Risiko Kepatuhan untuk PI dengan narasumber ACFE dan CRMS Workshop on Compliance Risk Management for PI with speakers from the ACFE and CRMS
13 November 2024 November 13, 2024	Sosialiasi Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Socialization of Integrated Governance Policies and Guidelines
19 Desember 2024 December 19, 2024	Himbauan Pengendalian Gratifikasi menjelang Natal dan Tahun Baru Reminder on Gratification Control ahead of Christmas and New Year
11 Desember 2024 Desember 11, 2024	Internalisasi Pengendalian Benturan Kepentingan untuk PI Group Internalization of Conflict of Interest Control for PI Group
23 Desember 2024 December 23, 2024	Sertifikasi SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan PTPI dari PT Chesna dengan No. CHN230006 Certification of SNI ISO 37301:2021 Compliance Management System for PTPI by PT Chesna with No. CHN230006
23-24 Desember 2024 December 23-24, 2024	Surveillance Audit SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh TUV NORD Indonesia. Surveillance Audit of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System by TUV NORD Indonesia

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip GCG yang dilaksanakan oleh Perseroan, terutama diharapkan menciptakan keselarasan hubungan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan GCG diharapkan dapat memberikan nilai tambah. Lebih rinci tentang tujuan penerapan GCG di lingkungan Perseroan adalah:

1. Mendorong terciptanya mekanisme pengambilan keputusan manajemen yang *proper and prudent* melalui mekanisme check and balance sesuai dengan fungsi masing-masing organ Perusahaan.
2. Memaksimalkan nilai Perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja (*high performance*) secara citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*).
3. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan.
4. Mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders*.
5. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko Perusahaan secara lebih efisien dan efektif.
6. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ Perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis Perusahaan.
7. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di lingkungan PI *Group* mengacu pada sejumlah regulasi yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia meliputi:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
   b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
   c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
   e. Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
   f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
   g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

PURPOSE OF IMPLEMENTING GCG

The implementation of GCG principles implemented by the Company is primarily expected to create a harmonious relationship between the Company and its stakeholders. Thus, the implementation of GCG is expected to provide added value. More details about the objectives of implementing GCG in the Company environment are:

1. Encourage the creation of a proper and prudent management decision-making mechanism through a check and balance mechanism in accordance with the functions of each organ of the Company.
2. Maximizing the value of the Company in the form of increased performance (high performance) in agood corporate image.
3. Encouraging the management of the Company in a professional, transparent, and efficient manner as well as empowering the functions and increasing the independence of the Company's organs.
4. Encourage the Company's organs in making decisions and carrying out actions based on high ethical/moral values and compliance with applicable laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility to stakeholders.
5. Encourage more efficient and effective management of the Company's resources and risks.
6. Reducing the potential conflict of interest of the Company's organs and workers in running the Company's business.
7. Creating a business environment that is conducive to the achievement of the Company's objectives.

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG within PI Group refers to a number of relevant regulations, among others:

1. Laws of the Republic of Indonesia include:
   a. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1997 concerning Company Documents.
   b. Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
   c. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on the Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption.
   d. Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2003 on State Finance.
   e. Third Amendment to the Law of the Republic of Indonesia No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises.
   f. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
   g. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

h. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan perubahannya.
i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia meliputi:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

b. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha milik Negara dan Perseroan Terbatas.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

3. Peraturan Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi meliputi:
a. Surat Edaran BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
e. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

h. Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure and its amendments.
i. Law of the Republic of Indonesia No. 43 of 2009 on Archive
j. Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector..

2. Government Regulations of the Republic of Indonesia include:
a. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises as amended by Government Regulation Number 23 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.
b. Government Regulation No. 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation No. 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.
c. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 28 of 2012 concerning the Implementation of Law No. 43 of 2009 concerning Archives.

3. Ministerial, Agency, Institution, or Commission regulations include:
a. SOE Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Capitals of State-Owned Enterprises.
b. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.
c. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
d. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises.
e. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023 concerning the Revocation of Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation ofGood Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

f. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) No. 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
g. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
h. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
i. Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi (Whistleblowing System TPK Terintegrasi) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2021.
j. Pedoman Program Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU).
k. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
l. ISO 26000:2010 Sistem Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL)
m. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
n. SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan.
o. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
p. ISO 37301:2016 Sistem Manajemen Kepatuhan.
q. SNI ISO 31000:2018 Manajemen Risiko
r. SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
s. IT *Governance Framework*, COBIT, ITIL, ISO 27001:2013, ISO 38500:2015, ISO 20000-1, TOGAF, PMBOK.

4. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.
5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 08/KEP. KOM/V/2020 dan No. 023/A/TR/A22/SK/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi dan Rapat Komite Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi.
6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*).
7. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PTPI.
8. Piagam Satuan Pengawasan Intern Perusahaan.

f. Regulation of the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) No. 7 of 2009 on Guidelines for Concurrent Positions in accordance with the Provisions of Article 26 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
g. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement, and Examination of State Organizer's Asset Reports
h. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 2 of 2019 concerning Gratification Reporting.
i. General Guidelines for the Integrated Corruption Crime Complaint HandlingSystem (Integrated TPKWhistleblowing System) of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia in 2021.
j. Guidelines for Compliance Program with Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (KPPU).
k. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) 2021 issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).
l. ISO 26000:2010 Corporate Social Responsibility (CSR) Management System-Guidelines.
m. SNI ISO 9001:2015 Quality Management System Requirements.
n. SNI ISO 14001:2015 Environmental Management System.
o. SNI ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System.
p. ISO 37301:2016 Compliance Management System.
q. SNI ISO 31000:2018 Risk Management.
r. SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems.
s. IT Governance Framework, COBIT, ITIL, ISO 27001:2013, ISO 38500:2015, ISO 20000-1, TOGAF, PMBOK.

4. Articles of Association of the Company and its amendments.
5. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTPI No. 08/KEP. KOM/V/2020 and No. 023/A/TR/A22/SK/2020 concerning Mechanisms for Organizing Board of Commissioners Meetings that Include Directors and Board of Commissioners Committee Meetings that Include Directors.
6. Code of Corporate Governance.
7. Code of Conduct of PTPI.
8. Charter of the Company's Internal Audit Unit.

KERANGKA KERJA GCG

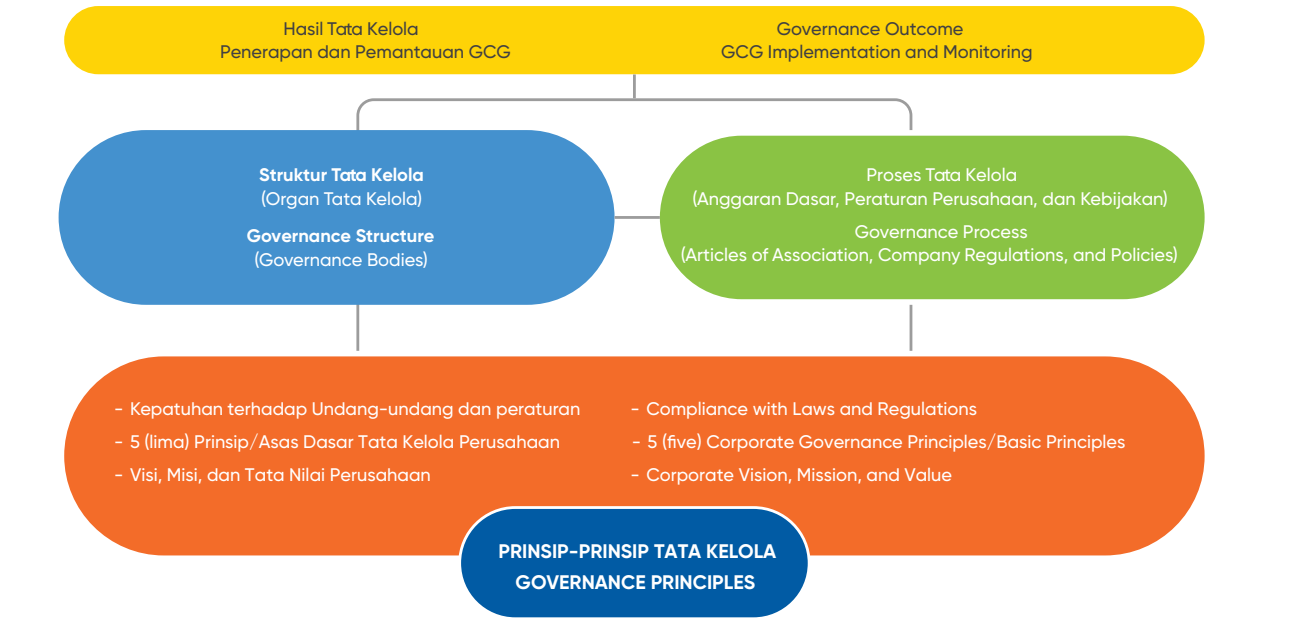
Implementasi prinsip-prinsip GCG di lingkungan PTPI dilakukan melalui Kerangka Kerja GCG atau *Corporate Governance Framework* sebagai landasan utama. *Governance Framework* tersebut terdiri dari: *Governance Commitment, Governance Principle, Governance Structure,* dan *Governance Process.* Keselarasan aspek-aspek tersebut menghasilkan efektivitas tata kelola atau *governance outcome* yang sesuai dengan harapan Perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.

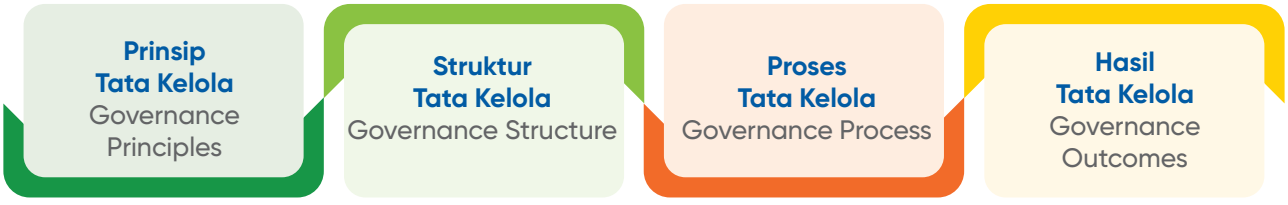
GCG FRAMEWORK

The implementation of GCG principles within PTPI is carried out through the GCG Framework or Corporate Governance Framework as the main foundation. The Governance Framework consists of: Governance Commitment, Governance Principle, Governance Structure, and Governance Process. The alignment of these aspects results in the effectiveness of governance or governance outcome in accordance with the expectations of the Company and all stakeholders.

KERANGKA KERJA GCG PTPI

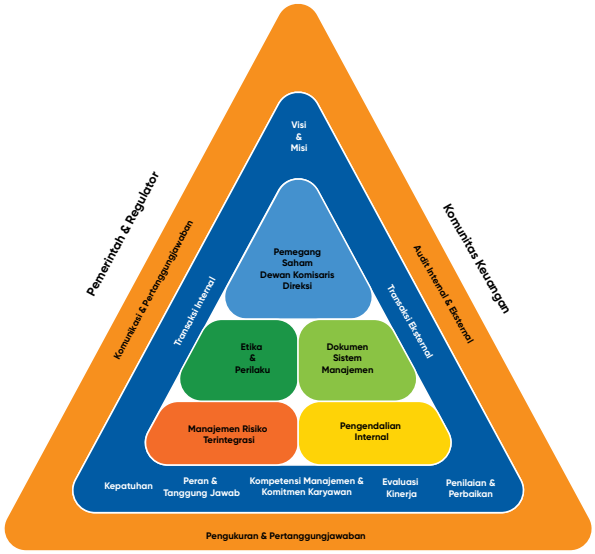
PTPI GOVERNANCE FRAMEWORK





Governance Framework atau Sistem Manajemen Governance Perseroan telah didetailkan dalam bentuk gambar berikut:

The Company's Governance Framework or Governance Management System has been detailed in the form of the following figure:



Sistem Manajemen Governance Perseroan terdiri dari 9 (sembilan) komponen yaitu:
1. Kepemimpinan,
2. Peran dan Tanggung Jawab,
3. Etika dan Perilaku,
4. Kemampuan Manajemen dan Kompetensi Karyawan,
5. Dokumen Sistem Manajemen (DSM),
6. Manajemen Risiko Terintegrasi,
7. Pengendalian Internal,
8. Evaluasi Kinerja, serta
9. Penghargaan dan Pengakuan.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, tindakan Perseroan dalam menjabarkannya dituangkan dalam tabel berikut:

The Company's Governance Management System consists of 9 (nine) components, namely:
1. Leadership,
2. Roles and Responsibilities,
3. Ethics and Behavior,
4. Management Capability and Employee Competence,
5. Document Management System (DSM),
6. Integrated Risk Management,
7. Internal Control,
8. Performance Evaluation, and
9. Rewards and Recognition.

Based on these components, the Company's actions in elaborating them are outlined in the following table:

No.	**Sistem Manajemen Governance** Governance Management System	**Bentuk Tindakan Penjabaran** Form of Explanation Action	**Indikator** Indicator
1	Kepemimpinan Leadership	Penerapan *Balance Score Card* Implementation of the Balance Score Card	Nilai KPI KPI values
		Penerapan Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Implementation of Management System Effectiveness Evaluation	Laporan Tindak Lanjut *Non-Conformity Corective Action Report* (NCCAR) Non-Conformity Corrective Action Report (NCCAR) Follow-up Report
2	Peran dan Tanggung Jawab Roles and Responsibilities	Penetapan Uraian Jabatan Determination of Position Descriptions	Job Description seluruh Insan Perusahaan Job Description for all Company Personnel
		Penetapan Job Description Determination of Job Description	
3	Dokumentasi Sistem Manajemen (DSM) Management System Documentation (DSM)	Penerapan Pedoman, Prosedur, dan Instruksi Kerja Implementation of Guidelines, Procedures, and Work Instructions	Jumlah Temuan Audit terkait DSM Number of Audit Findings related to DSM
		Pemutakhiran DSM dengan peraturan perundang-undangan Updating the DSM with statutory regulations	Daftar Induk DSM DSM Master List

No.	Sistem Manajemen Governance Governance Management System	Bentuk Tindakan Penjabaran Form of Explanation Action	Indikator Indicator
4	Etika dan Perilaku Ethics and Behavior	Penerapan Etika dan Perilaku Insan PI Implementation of Ethics and Behavior of PI Personnel	Laporan Sosialisasi Etika dan Perilaku Ethics and Behavior Socialization Report
		Penerapan *Respectful Workplace Policy (RWP)* Implementation Respectful Workplace Policy (RWP)	Hasil Survei *Employee Experience* Employee Experience Survey Results
		Penerapan *Employee Weelbeing Policy* Implementation Employee Weelbeing Policy	Hasil Survei *Employee Experience* Employee Experience Survey Results
		Penerapan Budaya AKHLAK Implementation of AKHLAK Culture	Indeks Internalisasi AKHLAK AKHLAK Internalization Index
		Penerapan *Whistleblower* Whistleblower Application	Laporan Aduan Pelanggaran Violation Complaint Report
		Penerapan Anti Penyuapan Implementation of Anti-Bribery	Laporan Pengelolaan Risiko *Fraud* Fraud Risk Management Report
		Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Implementation of Gratification Control	Laporan Program Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Program Report
		Penerapan Kepatuhan Laporan Kekayaan Pejabat (LKHPN) Implementation of Official Wealth Report Compliance	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Official Asset Report
5	Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management	Penerapan Manajemen Risiko Terintergrasi Implementation of Integrated Risk Management	*Index Risk Maturity Level* (RML)
6	Pengendalian Internal Internal Control	Penerapan *Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission* (COSO) Implementation of the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO)	Skor *Maturity* Level Penerapan SPIP SPIP Implementation Level Maturity Score
		Penerapan Audit Internal Implementation of Internal Audit	Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Reviu Audit Result Report (LHA) and Review Result Report
7	Kemampuan Manajemen dan Kompetensi Karyawan Management Capabilities and Employee Competencies	Penerapan Kebijakan terkait Pengembangan Kompetensi Karyawan Implementation of Policies related to Employee Competency Development	Buku Kompetensi Insan PI PI Personnel Competency Book
8	Evaluasi Kinerja Performance Evaluation	Penerapan *Balance Score Card* Implementation of the Balance Score Card	Nilai KPI KPI Values
		Penerapan *Review Operational* berdasarkan data dan informasi yang didukung oleh Teknologi Informasi Implementation of Operational Review based on data and information supported by Information Technology	
		Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Implementation of Good Corporate Governance	Skor/Kategori Hasil Pengukuran GCG Score/Category of GCG Measurement Results
9	Penghargaan dan Pengakuan Awards and Recognition	Penerapan *Reward and Punishment* Implementation of Reward and Punishment	Jumlah Penghargaan Number of Awards

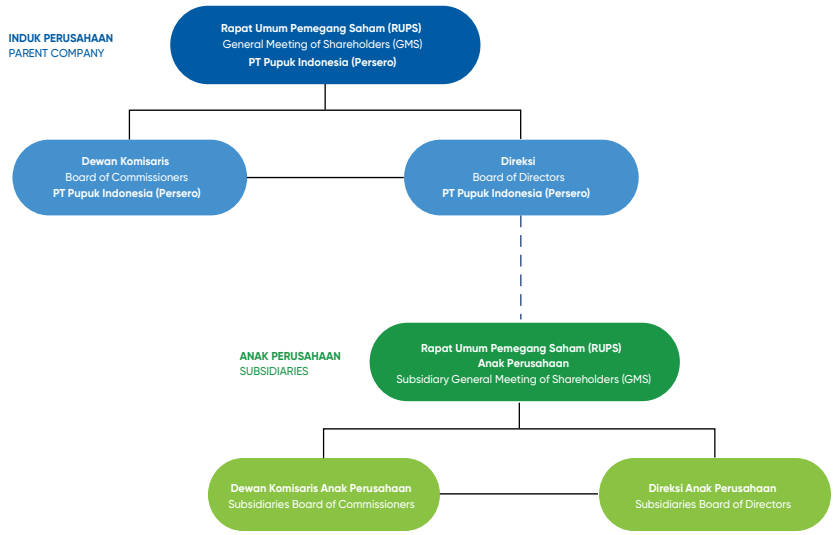
PENERAPAN DAN PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA KELOMPOK USAHA PI GROUP

Sebagai induk (*holding*) BUMN Pupuk, PTPI memiliki Entitas Anak usaha. Karena itu, pelaksanaan GCG di lingkungan PI *Group* dilakukan selaras di seluruh entitas dalam kelompok usaha. Karena itu, Perusahaan telah menetapkan prinsip pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola, baik di lingkungan *holding* maupun Entitas Anak.

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF PI GROUP'S GOVERNANCE PRINCIPLES

As the parent (holding) of SOE Fertilizer, PTPI has Subsidiary entities. Therefore, the implementation of GCG within the PI Group is carried out in harmony across all entities in the business group. Therefore, the Company has established the principles of implementing business activities based on the principles of governance, both within the holding and Subsidiaries.

Desain Tata Kelola Kelompok Usaha PTPI
PTPI Business Group Governance Design



PRINSIP YANG DITERAPKAN DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Pengelolaan induk dan Anak Perusahaan harus memperhatikan prinsip GCG, yang antara lain mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta regulasi lainnya yang relavan. Pelaksanaan di PI *Group* diuraikan seperti di bawah ini:

1. Keterbukaan
   a. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material serta relevan mengenai induk perusahaan dan Anak Perusahaan bagi stakeholders yang mempunyai kepentingan terhadap induk dan Anak Perusahaan, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
   b. Menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan pengelolaan induk dan Anak Perusahaan.

PRINCIPLES APPLIED IN THE COMPANY STRUCTURE

The management of the parent and Subsidiaries must pay attention to GCG principles, which among others refer to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and other relevant regulations. The implementation at PI Group is described as below:

1. Transparency
   a. Openness in carrying out the decision-making process and disclosing material and relevant information about the parent company and Subsidiaries for stakeholders who have an interest in the parent and Subsidiaries, based on applicable rules and regulations.
   b. Ensuring openness and objectivity in carrying out the decision-making process to carry out the management of the parent and Subsidiaries.

c. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar Induk dan Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga halhal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para stakeholders.

2. Akuntabilitas
   Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ di induk dan Anak Perusahaan, sehingga pengelolaan induk dan Anak Perusahaan terlaksana secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* induk dan Anak Perusahaan.
3. Pertanggungjawaban
   Kesesuaian dalam pengelolaan induk dan Anak Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian
   Pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan dilakukan secara profesional berlandaskan kode etik tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko.
5. Kewajaran
   Keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan induk dan Anak Perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selain 5 (lima) prinsip di atas, memperhatikan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) tahun 2021 dan perubahannya, maka pengelolaan Perusahaan dan Anak Perusahaan dijiwai dengan prinsip governansi korporat yaitu:

1. Perilaku Beretika
   Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Setiap perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
2. Keberlanjutan
   Setiap Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan keberkelanjutan usaha perusahaan.

c. Taking the initiative to disclose not only information required by the parent and Subsidiary's Articles of Association and applicable laws and regulations, but also matters that are important and affect the decision making of stakeholders.

2. Accountability
   Clarity of functions, implementation and accountability of organs in the parent and Subsidiaries, so that the management of the parent and Subsidiaries is carried out effectively, efficiently, and can be accounted for to the stakeholders of the parent and Subsidiaries.

3. Responsibility
   Conformity in the management of the parent and Subsidiaries to the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.
4. Independency
   The management of the Parent and Subsidiaries is carried out professionally based on a code of ethics without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles by considering risk management.

5. Fairness
   Balance between the rights and obligations of the parent and Subsidiary management in accordance with applicable rules and regulations.

In addition to the 5 (five) principles above, taking into account the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) in 2021 and its amendments, the management of the Company and its Subsidiaries is imbued with the principles of corporate governance, namely:

1. Ethical Behavior
   In carrying out its activities, the company always prioritizes honesty, treats all parties withrespect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and trust consistently. Each company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles offairness and equality(fairness) and is managed independently so that each organ of the company does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.

2. Sustainability
   Each Company complies with laws and regulations and is committed to carrying out responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is aligned with business interests and the sustainability of the company's business.

Struktur hubungan Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN tersebut, terdapat perluasan kewenangan Dewan Komisaris Perusahaan khususnya Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris yang ditetapkan menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite TKT) Perusahaan.

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PTPI terdiri dari:
1. Komisaris Utama menjabat sebagai Ketua Komite merangkap anggota;
2. Dalam hal pelaksanaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dirangkap oleh Komite lain, maka pada saat menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, bertindak sebagai ketua adalah Komisaris Utama dan ketua komite lain tersebut menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Anggota Komite berasal dari Dewan Komisaris Entitas Induk dan Entitas Anak;
4. Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PRINSIP TATA KELOLA USAHA PI GROUP

Prinsip tata kelola kelompok usaha yang tergabung dalam PI *Group* dibagi berdasarkan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh organ utama dan organ pendukung di masing-masing entitas. Adapun prinsip tata kelola kelompok usaha PI *Group*, sebagai berikut:

1. Prinsip hubungan korporasi antara PTPI dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan mengutamakan kepentingan PTPI secara keseluruhan, dengan didasarkan atas prinsip sinergi serta memperhatikan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka mencapai hasil yang terbaik untuk PTPI dan Anak Perusahaan.
2. Interaksi dan koordinasi antara Direksi PTPI dengan dan antar Anak Perusahaan untuk hal-hal yang belum tercakup dalam Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*), atau tidak terkait dengan pengambilan keputusan ditetapkan oleh Direksi PTPI selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan. Interaksi dan koordinasi tersebut dibuat secara tertulis dan secara tegas menyatakan peran PTPI selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan dan peran Anak Perusahaan.

The relationship structure of the Company and its Subsidiaries has not changed with the issuance of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

However, with the issuance of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises, there is an expansion of the authority of the Company's Board of Commissioners, especially the Board of Commissioners and the Board of Commissioners' Organs who are appointed as members of the Company's Integrated Governance Committee (TKT Committee).

Membership of the Integrated Governance Committee of PTPI consists of:
1. President Commissioner serves as Chairperson of the Committee and concurrently as a member;
2. In the event that the implementation of the Integrated Governance Committee is concurrently held by another Committee, then when carrying out the Integrated Governance function, acting as Chairperson is the President Commissioner and the Chairperson of the other committee serves as a member of the Integrated Governance Committee;
3. Members of the Committee come from the Board of Commissioners of the Parent Entity and Subsidiaries;
4. Other committee members who are not members of the Board of Commissioners do not become members of the Integrated Governance Committee, but may be assigned to assist the duties of the Integrated Governance Committee.

PI GROUP BUSINESS GOVERNANCE PRINCIPLES

Principles of governance of the business groups incorporated in the PI Group are divided based on the bus principles of governance of the business groups incorporated in the PI Group are divided based on the business activities carried out by the main organs and supporting organs in each entity. Principles of governance of the PI Group are as follows:
1. Principle of corporate relations between PTPI and its Subsidiaries and between Subsidiaries prioritises the interests of PTPI as a whole, based on the principle of synergy and taking into account the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in order to achieve the best results for PTPI and its Subsidiaries.
2. Interaction and coordination between the Board of Directors of PTPI with and between Subsidiaries for matters that have not been covered in the Code of Group Governance, or are not related to decision making, are determined by the Board of Directors of PTPI as the Shareholder of the Subsidiary. Such interaction and coordination is made in writing and expressly states the role of PTPI as the Shareholder of the Subsidiary and the role of the Subsidiary.

3. PTPI dan Anak Perusahaan akan bertindak berdasarkan praktik-praktik terbaik pada industri yang terkait, dengan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar PTPI dan Anak Perusahaan, serta memenuhi persyaratan-persyaratan dari stakeholders yang dapat berpengaruh kepada operasi PTPI dan Anak Perusahaan.

HIERARKI STRUKTUR KELOMPOK USAHA PTPI

Prinsip yang diterapkan dalam struktur hubungan antara PTPI dan Anak Perusahaan yaitu:

1. PTPI dan Anak Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri, sehingga pelaksanaan usaha (bisnis) masing-masing entitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan secara keseluruhan terkoordinasi sebagai suatu kelompok usaha.
2. PTPI mempunyai kepemilikan saham mayoritas secara langsung pada Anak Perusahaan yang memungkinkan PTPI untuk memiliki kendali atas Anak Perusahaan secara langsung sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Anak Perusahaan berperan melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari PTPI sebagai Induk Perusahaan.
4. PTPI selaku Induk Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan mengkoordinir, menyelenggarakan dan/atau menyinergikan fungsi untuk Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Anak Perusahaan dan/atau tanpa perjanjian dengan/kuasa terkait dengan hal-hal yang menyangkut hubungan yang ada antar perusahaan dalam kelompok usaha PI *Group*, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas operasional bisnis Anak Perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. PTPI and its Subsidiaries will act based on best practices in related industries, by complying with all applicable laws and regulations, the Articles of Association of PTPI and its Subsidiaries, and fulfilling the requirements of stakeholders that may affect the operations of PTPI and its Subsidiaries.

HIERARCHY OF PTPI GROUP STRUCTURE

Principles applied in the relationship structure between PTPI and its Subsidiaries are:

1. PTPI and Subsidiaries are separate legal entities, so that the business implementation of each entity is carried out in accordance with applicable rules and regulations and as a whole is coordinated as a business group.
2. PTPI has direct majority share ownership in the Subsidiaries which allows PTPI to have direct control over the Subsidiaries in accordance with the prevailing rules and regulations.
3. Subsidiaries play a role in carrying out operational activities in accordance with predetermined targets and are an extension of PTPI as the Parent Company.
4. PTPI as the Parent Company has the authority to set policies and coordinate, organise and/or synergise functions for Subsidiaries based on agreements with/power of attorney from Subsidiaries and/or without agreements with/power of attorney related to matters concerning existing relationships between companies in the PI Group, as well as supervise and evaluate the business operations of Subsidiaries in accordance with applicable rules and regulations.

Pihak-Pihak yang Memegang Peranan dalam Struktur Kelompok Usaha PI *Group*
Parties that Play a Role in the Group Structure of the PI Group

No.	Uraian Description	Peran Role
1	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan General Meeting of Shareholders (GMS)	RUPS Perusahaan adalah Organ Perusahaan tertinggi yang memegang segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi Perusahaan atau Dewan Komisaris Perusahaan. PTPI sebagai perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia bertindak selaku RUPS Perusahaan. The Company's GMS is the highest Company Organ which holds all authority not granted to the Company's Directors or the Company's Board of Commissioners. PTPI is a company whose entire shares are owned by the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia acts as the Company's GMS.
2	Dewan Komisaris Perusahaan Board of Commissioners	1. Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Organ Perusahaan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan serta memberikan saran dan pendapat kepada RUPS Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. The Company's Board of Commissioners as a Company Organ is tasked with supervising and providing advice to the Board of Directors in carrying out Company management activities as well as providing suggestions and opinions to the Company's GMS in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association. 2. Dalam pendekatan satu kesatuan ekonomi, Dewan Komisaris Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengetahui segala kebijakan dan tindakan Perusahaan dalam pengelolaan Anak Perusahaan melalui Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan. In an economic unity approach, the Company's Board of Commissioners has the authority to understand all Company policies and actions in managing Subsidiaries through the Company's Directors as Shareholders of Subsidiaries. 3. Dewan Komisaris Perusahaan berkewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan keputusan RUPS Perusahaan. The Company's Board of Commissioners is obliged to always follow developments in the Company's activities and other obligations within the framework of its duties of supervision and providing advice as long as it does not conflict with statutory regulations, the Company's Articles of Association, and the Company's GMS decisions. 4. Dewan Komisaris Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rekomendasi pada RUPS Perusahaan, saran dan nasihat kepada Direksi Perusahaan, serta memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi Perusahaan sesuai dengan batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan RUPS Perusahaan. The Company's Board of Commissioners has the obligation to provide recommendations at the Company's GMS, suggestions and advice to the Company's Directors, as well as giving approval to the Company's Directors' proposals in accordance with the limits set out in the Company's Articles of Association and the Company's GMS decisions. 5. Mempertimbangkan prinsip independensi/kemandirian, maka tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Dewan Komisaris Perusahaan tidak dapat diberlakukan sebagai tugas, wewenang, dan kewajiban pada Anak Perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*). Considering the principle of independence/independence, the duties, authority and obligations attached to the Company's Board of Commissioners cannot be applied as duties, authority and obligations to the Subsidiary as a separate legal entity

Pihak-Pihak yang Memegang Peranan dalam Struktur Kelompok Usaha PI *Group*

Parties that Play a Role in the Group Structure of the PI Group

No.	Uraian Description	Peran Role
3	Direksi Perusahaan Board of Directors	1. Direksi Perusahaan sebagai Organ Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang penuh terhadap pengurusan jalannya Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. The Company's Directors as a Company Organ have full duties and responsibilities for managing the running of the Company for the interests and objectives of the Company, in accordance with the provisions of applicable laws and the Company's Articles of Association. 2. Direksi Perusahaan mempunyai tugas melakukan pengurusan Perusahaan dan mewakili Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pengurusan, Direksi Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan dan mengatur ketentuanketentuan kepegawaian Perusahaan. The Company's Directors have the task of managing the Company and representing the Company. In carrying out management duties, the Company's Directors have the authority to determine Company management policies and regulate the Company's personnel provisions. 3. Dalam melaksanakan tugas mewakili Perusahaan, Direksi Perusahaan mempunyai kewenangan untuk mengatur penyerahan kekuasaan Direksi Perusahaan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi Perusahaan untuk mengambil keputusan atas nama Direksi Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta mengatur penyerahan kekuasaan Direksi Perusahaan kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. In carrying out their duties on behalf of the Company, the Company's Directors have the authority to regulate the handover of the powers of the Company's Directors to one or several members of the Company's Directors to make decisions on behalf of the Company's Directors in accordance with applicable provisions and the Company's Articles of Association, as well as regulate the handover of the powers of the Company's Directors to one or several employees of the Company, either individually or jointly or with other people in accordance with applicable provisions and the Company's Articles of Association. 4. Mempertimbangkan prinsip independensi/kemandirian, tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada Direksi Perusahaan tidak dapat diberlakukan sebagai tugas, wewenang, dan kewajiban pada Anak Perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah (separate legal entity). Considering the principle of independence/independence, the duties, authority and obligations attached to the Company's Directors cannot be applied as duties, authority and obligations to the Subsidiary as a separate legal entity
4	Perusahaan selaku Pemegang Saham dari Anak Perusahaan The Company as Shareholder of the Subsidiary	1. Perusahaan selaku pemegang saham mayoritas di Anak Perusahaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perkembangan usaha Anak Perusahaan. The company as the majority shareholder in a Subsidiary has the right to obtain information, both directly and indirectly, about the development of the Subsidiary's business. 2. Perusahaan selaku pemegang saham mayoritas di Anak Perusahaan dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS Anak Perusahaan. dengan syarat semua pemegang saham Anak Perusahaan dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul yang bersangkutan. The company as the majority shareholder in a Subsidiary can make binding decisions outside the Subsidiary's GMS, provided that all Subsidiary shareholders with voting rights agree in writing and sign the relevant proposal.

Pihak-Pihak yang Memegang Peranan dalam Struktur Kelompok Usaha PI *Group*
Parties that Play a Role in the Group Structure of the PI Group

No.	Uraian Description	Peran Role
5	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan General Meeting of Shareholders (GMS) of Subsidiaries	1. RUPS Anak Perusahaan merupakan organ Anak Perusahaan tertinggi yang memegang segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi Anak Perusahaan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan. The Subsidiary GMS is the highest Subsidiary organ that holds all authority that is not given to the Subsidiary's Board of Directors or the Subsidiary's Board of Commissioners. 2. Anak Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perusahaan, maka Direksi Perusahaan bertindak selaku RUPS Anak Perusahaan. A Subsidiary whose majority shares are owned by the Company, the Company's Board of Directors acts as the Subsidiary's GMS. 3. RUPS Anak Perusahaan memiliki kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan. The Subsidiary GMS has the authority to provide approval as stipulated in the Subsidiary's Articles of Association.
6	Dewan Komisaris Anak Perusahaan Board of Commissioners of Subsidiaries	1. Dewan Komisaris Anak Perusahaan. sebagai Organ Anak Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Anak Perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengurusan Anak Perusahaan serta memberikan saran dan pendapat kepada RUPS Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan. The Subsidiary's Board of Commissioners, as the Subsidiary's Organ, is tasked with supervising and providing advice to the Subsidiary's Directors in carrying out Subsidiary management activities as well as providing suggestions and opinions to the Subsidiary's GMS in accordance with the provisions in the Subsidiary's Articles of Association 2. Dewan Komisaris Anak Perusahaan juga berkewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan kegiatan Anak Perusahaan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Anak Perusahaan. dan keputusan RUPS Anak Perusahaan. The Board of Commissioners of a Subsidiary is also obliged to always follow developments in the Subsidiary's activities and other obligations within the framework of its duties of supervision and providing advice as long as it does not conflict with applicable regulations, the Subsidiary's Articles of Association, and the decisions of the Subsidiary's GMS. 3. Dewan Komisaris Anak Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rekomendasi pada RUPS Anak Perusahaan. saran dan nasihat kepada Direksi Anak Perusahaan serta memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi Anak Perusahaan sesuai dengan batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta keputusan RUPS Anak Perusahaan. The Board of Commissioners of a Subsidiary has the obligation to provide recommendations at the Subsidiary's GMS, suggestions and advice to the Subsidiary's Directors and give approval to the proposals of the Subsidiary's Directors in accordance with the limits set out in the Subsidiary's Articles of Association and the decisions of the Subsidiary's GMS.
7	Direksi Anak Perusahaan Board of Directors of Subsidiaries	1. Direksi Anak Perusahaan merupakan organ Anak Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Anak Perusahaan. sesuai dengan maksud dan tujuan Anak Perusahaan. Direksi Anak Perusahaan juga mewakili Anak Perusahaan. baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan. The Board of Directors of a Subsidiary is a Subsidiary organ that has the authority and is fully responsible for the management of the Subsidiary, in accordance with the aims and objectives of the Subsidiary. The Subsidiary's Directors also represent the Subsidiary, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Subsidiary's Articles of Association. 2. Direksi Anak Perusahaan menjadi pelaksana strategi perusahaan di Anak Perusahaan sesuai arahan Direksi Perusahaan selaku pemegang saham Anak Perusahaan. The Subsidiary's directors are the implementers of the company's strategy in the Subsidiary in accordance with the direction of the company's directors as shareholders of the Subsidiary.

Hubungan Organ Entitas Induk dengan Organ Entitas Anak
Relationship between Parent Entity Organ and Subsidiary Organ

No	Uraian Description	Pola Hubungan Relationship Pattern
1	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	1. Pada RUPS Anak Perusahaan, Direksi Perusahaan mewakili Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas. At the Subsidiary GMS, the Company's Directors represent the Company as majority shareholders 2. Keputusan-keputusan Direksi PTPI pada RUPS Anak Perusahaan merupakan keputusan yang diambil oleh Direksi Perusahaan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan keputusan RUPS Anak Perusahaan. The decisions of the Company's Directors at the Subsidiary's GMS are decisions taken by the Company's Directors based on the mechanisms stipulated in the Subsidiary's Articles of Association and the Subsidiary's GMS decisions. 3. PTPI diwakili oleh Direktur Utama atau Direksi Perusahaan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan selaku RUPS Anak Perusahaan. The Company is represented by the President Director or Company Directors who are appointed in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association as a Subsidiary GMS.
2	Direksi Perusahaan Company Board of Directors	1. Direksi PTPI bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan secara keseluruhan, termasuk sebagai Pemegang Saham mayoritas Anak Perusahaan. The Board of Directors of the Company is fully responsible for the overall management of the company, including as the majority shareholder of the Company's Subsidiaries. 2. Direktur PTPI dan/atau pegawai Perusahaan yang ditugaskan sebagai Dewan Komisaris Anak Perusahaan atau perangkatnya, menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Anak Perusahaan dalam upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Direktur dan/atau pegawai Perusahaan tersebut mempertanggungjawabkan penugasan yang diembannya kepada Direksi Perusahaan. Company Directors and/or Company employees who are assigned to the Board of Commissioners of Subsidiaries or their apparatus, carry out supervisory duties and provide advice to the Directors of Subsidiaries in an effort to achieve the targets that have been set. Directors and/or employees of the Company are accountable for their assignments to the Company's Directors. 3. Fungsi pendukung PTPI lainnya, sesuai bidang tugasnya, melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan/atau penyelenggaraan dalam upaya terciptanya sinergi baik dalam tahap pengambilan keputusan/perencanaan maupun tahap implementasi di Perusahaan dan Anak Perusahaan. Other Company support functions, according to their field of duties, carry out communication, coordination and/or implementation in an effort to create synergy both in the decision making/planning stage and the implementation stage in the Company and Subsidiaries. 4. Masing-masing fungsi pendukung dimaksud bertanggung jawab kepada Direksi Perusahaan. Each of these supporting functions is responsible to the Company's Board of Directors.

Hubungan Organ Entitas Induk dengan Organ Entitas Anak
Relationship between Parent Entity Organ and Subsidiary Organ

No	Uraian Description	Pola Hubungan Relationship Pattern
3	Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries	1. Direksi PTPI memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. The Company's Directors have the authority to appoint and dismiss the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries in accordance with applicable regulations. 2. Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan dipilih dan diusulkan oleh Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Anak Perusahaan. The Subsidiary's Board of Commissioners and Directors are elected and proposed by the Company's Directors as the Subsidiary's Shareholders in accordance with the Subsidiary's Articles of Association. 3. Pengusulan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi Perusahaan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris Perusahaan dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Nominations to the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries who make significant contributions to the Company and/or have strategic value are determined by the Company's General Meeting of Shareholders, which can only be made by the Company's Directors after receiving a written response from the Company's Board of Commissioners and approval from the Company's General Meeting of Shareholders.

PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE SECARA BERKELANJUTAN

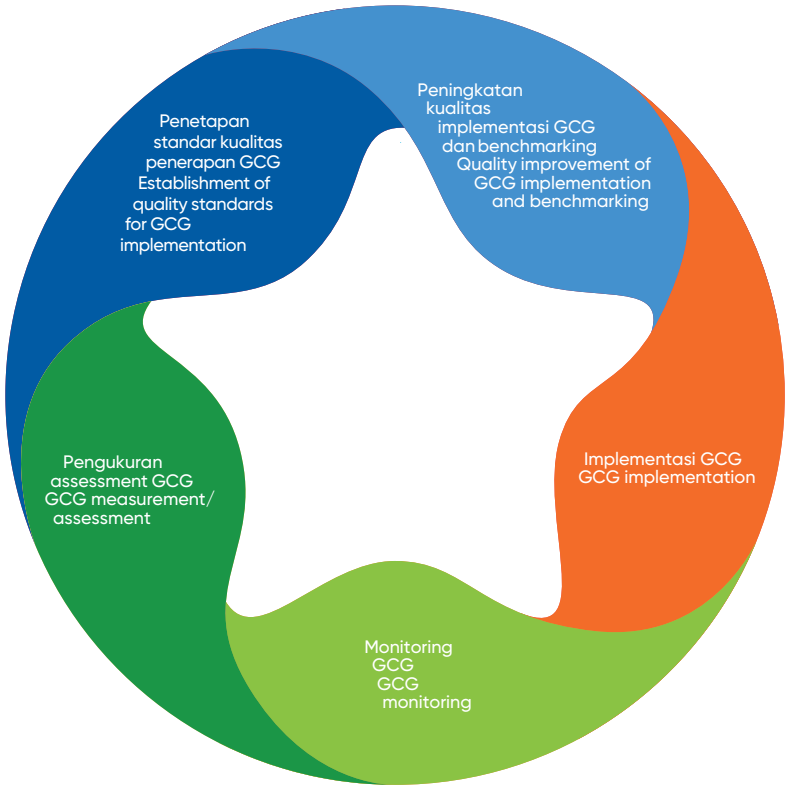
Penerapan prinsip GCG dilakukan oleh seluruh organ Perusahaan secara terus-menerus, terarah, dan diterapkan. Inisiatif ini direalisasikan agar dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan PI *Group*. Siklus penerapan GCG secara berkelanjutan tercermin dalam bagan berikut:

SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of GCG principles is carried out by all organs of the Company in a continuous, targeted and applied manner. This initiative was realized in order to improve the quality of GCG implementation within PI Group. The cycle of GCG implementation on an ongoing basis is reflected in the following chart:

PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Siklus peningkatan kualitas implementasi penerapan GCG, meliputi:

1. Penetapan standar kualitas penerapan GCG, melalui penetapan Struktur Tata Kelola, penetapan Dokumen Sistem Manajemen (DSM) yang terdiri dari Pedoman, Prosedur, dan Instruksi Kerja;
2. Implementasi GCG/GCG Proses, berupa praktik-praktik GCG meliputi aspek tata kelola dan aspek kepatuhan oleh seluruh Insan Perusahaan pada setiap aktivitas Perusahaan;
3. Monitoring penerapan GCG, dilakukan secara terus-menerus oleh Dewan Komisaris dalam tupoksinya melakukan pengawasan jalannya kegiatan operasional Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
4. Pengukuran/*assessment* GCG, dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, guna memastikan konsistensi penerapan GCG guna mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan;

The cycle of improving the quality of GCG implementation includes:

1. Determining quality standards for implementing GCG, through establishing a Management System Document (DSM) consisting of Guidelines, Procedures, and Work Instructions;
2. Implementation of GCG, in the form of GCG practices by all Company Personnel in every Company activity;
3. Monitoring the implementation of GCG, carried out continuously by the Board of Commissioners in its main duties, supervising the Company's operational activities carried out by the Board of Directors;
4. GCG measurement/assessment, carried out every 2 (two) years in accordance with the provisions of the Ministry of State-Owned Enterprises, to ensure consistent implementation of GCG to support the Company's business sustainability;

5. Peningkatan kualitas impelementasi GCG dan *benchmarking,* berdasarkan hasil pengukuran GCG diperoleh rekomendasi-rekomendasi perbaikan termasuk berdasarkan *benchmarking* dari perusahaan lain yang kemudian diadopsi oleh Perusahaan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan GCG di Perusahaan.

PENETAPAN STANDAR KUALITAS PENERAPAN GCG

Standar implementasi GCG dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Perusahaan. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Standar implementasi juga dimaksudkan untuk memacu Perseroan untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut dirumuskan berdasarkan peraturan *mandatory* terkait GCG, masukan dari *stakeholders*, hasil *assessment*, dan *benchmarking*.

Standar implementasi GCG di PTPI khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada Badan Usaha Milik Negera.

Standar penerapan GCG tersebut meliputi:
1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Aspek Dewan Komisaris.
4. Aspek Direksi.
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
6. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan keberlanjutan dan kemampuan Perseroan sebagai benchmark dalam bidangnya.

Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman tersebut ke dalam kebijakan internal Perusahaan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh Insan Perusahaan dan PI *Group*.

Komitmen ini ditunjukkan dari Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan. Visi Perusahaan yang kemudian diwujudkan dalam Misi Perusahaan dengan didasarkan pada Tata Nilai Perusahaan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perusahaan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/*fairness*.

Berdasarkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan mengembangkan struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

5. Improving the quality of GCG implementation and benchmarking, based on the results of GCG measurements, recommendations for improvement are obtained including those based on benchmarking from other companies which are then adopted by the Company to increase the effectiveness and efficiency of GCG implementation in the Company.

DETERMINATION OF QUALITY STANDARDS FOR GCG IMPLEMENTATION

GCG implementation standards are needed as a basic reference in order to realize the vision and carry out the Company's mission. These basic references include the criteria to be achieved from various aspects related to GCG implementation. Implementation standards are also intended to encourage the Company to improve the quality of GCG implementation. These standards are formulated based on relevant regulations, input from stakeholders, assessment results and benchmarking.

GCG implementation standards at PTPI specifically refer to State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities in State-Owned Enterprises.

The GCG implementation standards include:
1. Aspects of Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance.
2. Aspects of Shareholders and GMS/Capital Owners.
3. Aspects of the Board of Commissioners.
4. Aspects of the Board of Directors.
5. Aspects of Information Disclosure and Transparency.
6. Other aspects include sustainability reporting and the Company's ability as a benchmark in its field.

The internalization of various laws and regulations and guidelines into the Company's internal policies is a commitment from the Board of Commissioners and Directors as well as all Company Personnel and PI Group.

This commitment is shown in the Company's Vision, Mission, and Values. The Company's Vision is then realized in the Company's Mission based on the Company's Values. In realizing its Vision and carrying out its Mission, the Company always adheres to the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Based on GCG principles, the Company has developed a GCG structure which includes main organs and supporting organs to implement GCG mechanisms in accordance with existing laws and regulations and best practices. By basing business activities on GCG principles, it is hoped that longterm business sustainability will be created.

KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PTPI sebagai Badan Usaha Milik Negara, tunduk dan patuh pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham sekaligus sebagai regulator. Dalam hal penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada Badan Usaha Milik Negara, termasuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Adapun dalam peran PTPI sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan, Perusahaan merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

PTPI, as a State-Owned Enterprise, is subject to and complies with the provisions issued by the Ministry of State-Owned Enterprises as a Shareholder as well as a regulator. In terms of implementing good corporate governance, the Company refers to the provisions contained in the Minister of State for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities in State-Owned Enterprises, including Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER1/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises. Regarding the role of PTPI as Subsidiary Shareholder, the Company refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises.

Implementasi GCG
GCG Implementation

PRINSIP-PRINSIP GCG SERTA KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM PENERAPANNYA

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah menerbitkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 sebagai pedoman untuk praktik governansi korporat berstandar global, yang direkomendasikan terutama untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip governansi korporat yang baik berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan, menurunkan biaya modal, memperkuat pasar modal dan sektor jasa keuangan, memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

PUGKI 2021 terdiri dari 8 (delapan) prinsip yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok prinsip:
1. Kelompok prinsip pertama yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, prinsip kelompok pertama disajikan dalam prinsip 1 sampai 3;

2. Kelompok prinsip kedua yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, prinsip kelompok kedua disajikan dalam prinsip 4 sampai 6;
3. Kelompok prinsip ketiga yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat, prinsip kelompok ketiga disajikan dalam prinsip 7 sampai 8.

GCG PRINCIPLES AND COMPANY COMMITMENT IN THEIR IMPLEMENTATION

The National Committee for Governance Policy (KNKG) has published the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) as guidelines for global standard corporate governance practices, which are recommended especially for corporations registered on the capital market and managing public funds. The application of good corporate governance principles plays an important role in increasing the confidence of investors and stakeholders, reducing the cost of capital, strengthening the capital market and financial services sector, expanding employment opportunities and encouraging economic growth in line with the principles of sustainable development.

PUGKI 2021 consists of 8 (eight) principles divided into 3 (three) groups of principles:
1. The first group of principles that regulate the corporate management and supervision function, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, the principles of the first group are presented in principles 1 to 3;
2. The second group of principles regulates the processes and outputs produced by the Board of Directors and Board of Commissioners, the second group of principles are presented in principles 4 to 6;
3. The third group of principles regulates resource owners, who will primarily receive benefits from the implementation of corporate governance. The third group of principles is presented in principles 7 to 8.

Penerapan prinsip dan rekomendasi PUGKI 2021 di PTPI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The implementation of PUGKI 2021 principles and recommendations at PTPI in 2024 is as follows:

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	**1.1.1**	
Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh *(corporate resilience)*. To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance results: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in running business; c. contribute positively to society and the environment; as well as d. ability to survive and grow (corporate resilience).	Dalam rangka menjalankan peran dan tanggung jawab, Direksi PTPI telah menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi yang dijabarkan dalam Profil Jabatan (*Job Profile*), sehingga dapat memberikan produktivitas yang optimal untuk mencapai tujuan Perusahaan. In order to carry out its roles and responsibilities, the Board of Directors of PTPI has established an organisational structure and division of duties for each member of the Board of Directors as described in the Job Profile, so as to provide optimal productivity to achieve the Company's goals.
	1.1.2	
	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	PTPI telah menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (*corporate plan*) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan beserta *Key Performance Indicators* (KPI) serta Kontrak Manajemen, untuk memastikan misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja diterapkan secara konsisten. PTPI has established a Long Term Plan (corporate plan) which is elaborated in the annual Work Plan and Budget (RKAP) along with Key Performance Indicators (KPI) and Management Contracts, to ensure that the mission, vision, goals, objectives, strategies, and work programmes are implemented consistently.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.1.3	
	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards.	PTPI telah menetapkan Unit Manajemen Risiko dan Unit Satuan Pengawasan Intern. PTPI telah menetapkan Dokumen Sistem Manajemen (DSM) terkait penerapan Manajemen Risiko dan Audit Internal, antara lain: Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dan Pedoman Umum Audit Internal. Direksi PTPI telah mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan bidang manajemen risiko PTPI dan Anak Perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Direksi PTPI juga telah menetapkan rancangan sistem pengendalian intern berdasarkan Pedoman Umum Audit Internal dan Prosedur Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP). PTPI telah melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern di Perusahaan. PTPI has established a Risk Management Unit and an Internal Audit Unit. PTPI has established Management System Documents (MSDs) related to the implementation of Risk Management and Internal Audit, including: Integrated Risk Management Guidelines and General Internal Audit Guidelines. The Board of Directors of PTPI has directed, coordinated, supervised, and is responsible for setting the direction and policies of risk management at PTPI and its Subsidiaries to support the smooth running of the company's business in both the short and long term. The Board of Directors of PTPI has also established an internal control system design based on the General Guidelines for Internal Audit and the Procedures for Evaluating the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP). PTPI has conducted an evaluation/assessment of the effectiveness of internal controls within the Company.
	1.1.4	
	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	Direksi PTPI telah memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan dalam Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian. Cascading atas sertifikasi terhadap Laporan Keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas Laporan Keuangan yang akan dikonsolidasikan The Board of Directors of PTPI has certified the annual financial statements in the Board of Directors' Statement of Responsibility for the Consolidated Financial Statements. The certification of the financial statements is cascaded to the levels below the Board of Directors that are accounting and reporting entities for the financial statements to be consolidated.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
	1.1.5	
	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared appropriately	PTPI telah memiliki kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan serta pembinaan usaha kecil berdasarkan Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). PTPI telah memiliki unit yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yaitu SVP TJSL. PTPI memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan TJSL. PTPI telah membentuk SPM Green Energy, Blue & Green Ammonia, sebagai bentuk nyata dalam mendukung program dekarbonisasi bisnis energi hijau serta pengembangan keberlanjutan industri pupuk melalui transformasi energi. PTPI has established policies on corporate social and environmental responsibility and small business development based on the Social and Environmental Responsibility Guidelines (CSR). PTPI has established a unit responsible for implementing the Company's social and environmental responsibilities, namely the SVP CSR. PTPI has performance indicators to measure the success of CSR management. PTPI has formed the SPM Green Energy, Blue & Green Ammonia as a concrete step in supporting the decarbonization of green energy business programs and the sustainable development of the fertilizer industry through energy transformation.
	1.1.6	
	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.	PTPI telah memiliki IT *Master Plan* dan menerapkan sistem teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI. Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan PTPI has an IT Master Plan and implements information technology systems in accordance with established policies and sound IT planning covering Human Capitals, organizational management structure, and the level of IT services provided. The current level of IT implementation is in line with the company's needs.
	1.1.7	
	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	PTPI tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian, PTPI telah menetapkan garis koordinasi organ pendukung Direksi dengan organ pendukung Dewan Komisaris untuk memastikan ketersediaan informasi bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya secara efektif. PTPI does not conduct business activities based on sharia principles. However, PTPI has established coordination guidelines between the supporting organs of the Board of Directors and the supporting organs of the Board of Commissioners to ensure the availability of information for the Board of Commissioners in carrying out its role effectively.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.1.8	
	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Directors' Charter or by a Directors' Decree.	PTPI telah menetapkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang merupakan rujukan kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas, hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman telah ditinjau secara periodik dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan. PTPI has established a Board Manual which is a work reference for the Board of Commissioners and Directors in carrying out their duties, the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
	1.1.9	
	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	Dalam Anggaran Dasar telah ditetapkan bahwa anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. In the Articles of Association it has been stipulated that members of the Board of Directors have the right to resign from their positions by notifying the Company in writing of their intention with a copy to the Shareholders, Board of Commissioners and other members of the Company's Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of their resignation.
1.2	**1.2.1**	
Penilaian KinerjaDireksi dan Anggotanya Performance Assessment-Board of Directors and Members	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) telah mengatur Penilaian Kinerja Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu Direksi, dan melaporkannya kepada Pemegang Saham. The Board Manual has established the Performance Evaluation of the Board of Directors. The Board of Commissioners has conducted both collective and individual performance assessments of the Directors and reported the results to the Shareholders.
	1.2.2	
	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi bersama Komite Audit telah melakukan telaah dalam bentuk Kajian atas Usulan Draft KPI Indiviu Direksi PTPI Tahun 2024. The Board of Commissioners, through the Nomination & Remuneration Committee together with the Audit Committee, has conducted a review in the form of an Assessment of the Draft Individual KPI Proposal for the Directors of PTPI for the year 2024.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
1.3	**1.3.1**	
Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	Dewan Komisaris telah melakukan reviu dan menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris telah memberikan saran dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan RKAP dan RJP tersebut. The Board of Commissioners has reviewed and signed the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as well as the Long-Term Plan (RJP) formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners has provided recommendations and actively monitored the implementation of both the RKAP and RJP.
	1.3.2	
	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. Types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	Mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual. The mechanism for the Board of Commissioners regarding the granting of approval for actions of the Board of Directors that require the recommendation/approval of the Board of Commissioners is stipulated in the Articles of Association and the Board Manual.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.3.3	
	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and is decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicity, religion, race, group and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi terhadap Direksi yang sedang menjabat dengan menunjuk Konsultan Independen. Dewan Komisaris menyampaikan Matriks Rekapitulasi Selected Talent BUMN, Nominated Talent BUMN dan Nominated Talent lingkup Klaster BUMN Industri Pupuk kepada Menteri BUMN The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, has evaluated the current Board of Directors by appointing an Independent Consultant. The Board of Commissioners submitted the Recapitulation Matrix of Selected State-Owned Enterprise Talent, Nominated State-Owned Enterprise Talent, and Nominated Talent within the scope of the Fertilizer Industry State-Owned Enterprise Cluster to the Minister of State-Owned Enterprises.
	1.3.4	
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pembahasan *data talent* dalam rapat. Selanjutnya dengan memperhatikan *data talent* dan hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi rencana validasi Top 20% Talent BOD-1 oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee has discussed the talent data in a meeting. Furthermore, taking into account the talent data and the results of the Nomination and Remuneration Committee meeting, the Board of Commissioners has submitted to the Board of Directors a plan for the Nomination and Remuneration Committee to validate the Top 20% Talent BOD-1.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
	1.3.5	
	Dewan Komisaris a) mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b) secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners a) submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b) periodically review the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	Dewan Komisaris telah mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan Usulan Penetapan Tantiem Kinerja Usaha yang diusulkan oleh Direktur Utama. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan Usulan Penetapan Tantiem Kinerja Usaha kepada Menteri BUMN selaku RUPS PTPI. The Board of Commissioners has proposed remuneration for the Board of Directors in accordance with applicable regulations and performance appraisals of the Board of Directors. The Board of Commissioners responded to the Proposed Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Proposed Determination of Performance-Based Bonuses proposed by the President Director. Subsequently, the Board of Commissioners submitted the proposed remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Proposed Determination of Performance-Based Bonuses to the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PTPI.
	1.3.6	
	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners monitors the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas Area of Improvement (AoI) hasil asesmen penerapan GCG dan telaah atas draft Keputusan Menteri BUMN tentang Pedoman Tata Kelola Risiko Berkesinambungan BUMN. The Board of Commissioners has monitored the principles of corporate governance through monitoring the follow-up of recommendations on Areas of Improvement (AoI) resulting from the assessment of the implementation of GCG and a review of the draft Minister of State-Owned Enterprises Decree on Guidelines for Sustainable Risk Management in State-Owned Enterprises.
	1.3.7	
	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with corporate goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit telah melaksanakan pemantauan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal. The Board of Commissioners, through Risk Monitoring Committee and Audit Committee, has undertaken monitoring and provided advice on the policies and implementation of risk management and internal control.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.3.8	
	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dewan Komisaris dibantu Komite Audit telah melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui pemantauan kesesuaian penyelesaian progress audit dengan rencana kerjanya, menelaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik dan menelaah hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui penelaahan atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; penelaahan atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; serta manajemen fungsi SPI. The Board of Commissioners has provided guidance on accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with accounting standards applicable in Indonesia. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, has assessed the effectiveness of the external audit process by monitoring the progress of the audit against the work plan, reviewing the compliance of the audit process with professional standards for public accountants, and reviewing the results of the external audit and the quality of the external audit recommendations. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, has assessed the effectiveness of the implementation of internal audits by reviewing the effectiveness of the monitoring of follow-up actions on SPI audit results and external auditor findings; reviewing the compliance of audit implementation with internal audit standards; the completeness of audit findings and the quality of internal audit recommendations; and reviewing the work plan for supervision and its implementation; as well as the management of SPI functions.
	1.3.9	
	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual report and sustainability report and ensures their integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.	Dewan Komisaris telah memberikan pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran seluruh informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan dengan menandatanganin surat pernyataan bersama anggota Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Commissioners has provided a statement of responsibility for the accuracy of all information in the Company's Annual Report by signing a joint statement with the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
	1.3.10	
	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	Komite Dewan Komisaris telah memiliki Piagam dan Dewan komisaris telah melakukan peninjauan atas Piagam tersebut secara periodik. • Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dimutakhirkan pada 29 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 004/KEP.KOM/II/2024 • Piagam Komite Pemantau Risiko dimutakhirkan pada 29 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris No. 005/KEP.KOM/II/2024 • Piagam Komite Audit pada 29 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 006/KEP.KOM/II/2024 • Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dimutakhirkan pada 29 April 2024 melalui Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris No. 010/KEP.KOM/IV/2024 The Board of Commissioners Committee has a Charter and the Board of Commissioners has reviewed the Charter periodically. • The Charter of the Nomination and Remuneration Committee was updated on February 29, 2024, through Board of Commissioners' Decision No. 004/KEP.KOM/II/2024 • The Risk Monitoring Committee Charter was updated on February 29, 2024, through Board of Commissioners' Decision No. 005/KEP.KOM/II/2024 • The Audit Committee Charter was updated on February 29, 2024, through Board of Commissioners' Decision No. 006/KEP.KOM/II/2024 • The Integrated Governance Committee Charter was updated on April 29, 2024 through Board of Commissioners Decree No. 010/KEP.KOM/IV/2024.
	1.3.11	
	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	Dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* telah ditetapkan kebijakan terkait pemberhentian anggota Dewan Komisaris, salah satunya apabila telibat tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara, atau mengundurkan diri. The Articles of Association and Board Manual stipulate policies regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners, one of which is if they are involved in actions that harm the Company and/or the State, or if they resign.
	1.3.12	
	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif, dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are expected to be able to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	Dewan Komisaris telah memiliki 6 (enam) orang Komisaris Independen atau 55% dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) orang. Komisaris Independen berperan aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran rata-rata 90%. maupun Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi dengan tingkat kehadiran 92%. The Board of Commissioners has 6 (six) Independent Commissioners, or 55% of the total number of members of the Board of Commissioners, which is 11 (eleven) people. Independent Commissioners play an active role in Internal Meetings of the Board of Commissioners with an average attendance rate of 90% and Meetings of the Board of Commissioners attended by the Board of Directors with an attendance rate of 92%.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.3.13	
	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasikan penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The inconsistent with President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a wide range of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Apart from that, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit, telah berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris. Komisaris Utama berperan aktif dalam memimpin Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi. Dalam Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi, Direksi dapat mengikutsertakan BOD-1 untuk memberikan kesempatan Dewan Komisaris bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. Pada Tahun 2024 Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi diselenggarakan sebanyak 12 kali. President Commissioner concurrently Independent Commissioner and Chairperson of the Audit Committee, acts as the coordinator of the Board of Commissioners. The President Commissioner plays an active role in chairing Meetings of the Board of Commissioners and Meetings of the Board of Commissioners attended by the Board of Directors. In Board of Commissioners meetings involving the Board of Directors, the Board of Directors may include BOD-1 to provide the Board of Commissioners with the opportunity to meet with the Board of Directors and senior management. In 2024, Board of Commissioners meetings involving the Board of Directors were held 12 times.
1.4	**1.4.1**	
Pembentukan Komite Formation of Committee	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. The Corporation has committees under the Board of Commissioners, including: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Integrated Governance Committee.	Dewan Komisaris mempunyai hak untuk membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, hal ini tertuang dalam *Board Manual* Perusahaan. Adapun komite yang ada di Perusahaan saat ini adalah: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023. The Board of Commissioners has the right to form other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary with due consideration to the Company's capabilities, as stipulated in the Company's Board Manual. The committees currently existing in the Company are: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and Integrated Governance Committee. The establishment of the Risk Monitoring Committee and the Integrated Governance Committee is a form of compliance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
	1.4.2	
	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees established by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	Dewan Komisaris telah memastikan independensi, kompetensi, dan komitmen dari para anggota Komite Audit dan komite lainnya. Independensi para anggota Komite Audit dan komite lainnya diungkapkan di dalam Laporan Tahunan Perusahaan. The Board of Commissioners has ensured the independence, competence, and commitment of the Audit Committee and other committee members. The independence of Audit Committee and other committee members is disclosed in the Company's Annual Report.
1.5	**1.5.1**	
Penilaian KinerjaDewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment-Board of Commissioners and Its Members	Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja melalui metode self-assessment berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP.KOM/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Piagam Dewan Komisaris PTPI dan No. 17/KEP. KOM/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Kebijakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PTPI. The Board of Commissioners has conducted a performance evaluation through a self-assessment method based on the Decree of the Board of Commissioners No. 07/KEP.KOM/XI/2018 dated November 2, 2018 concerning the Establishment of the Charter of the Board of Commissioners of PTPI, and No. 17/KEP.KOM/X/2020 dated October 5, 2020 concerning the Policy on Performance Measurement and Evaluation of the Board of Commissioners of PTPI	Kebijakan Umum, Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan *self-asssesment* Dewan Komisaris telah tertuang pada Bab terkait Sistem Penilaian Kinerja dan Evaluasi Dewan Komisaris pada Board Manual Perusahaan. The General Policies, Performance Evaluation Criteria for the Board of Commissioners, and self-assessment of the Board of Commissioners are outlined in the relevant chapter on the Performance Evaluation System and Evaluation of the Board of Commissioners in the Company's Board Manual.
1.6	**1.6.1**	
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) telah mengatur ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris. The Corporate Governance Guidelines and the Board Manual regulate the provisions on concurrent positions (multiple appointments) for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Perihal rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur pada bab terkait rangkap jabatan di Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan. Adapun klausul mengenai persetujuan Dewan Komisaris untuk Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi belum diatur dalam Pedoman GCG dan *Board Manual* tersebut, dikarenakan tidak ada ketentuan khusus dari Pemegang Saham sekaligus regulator yaitu Kementerian BUMN. The matter of dual positions held by the Board of Directors and the Board of Commissioners is regulated in the relevant chapter on dual positions in the Company's GCG Guidelines and Board Manual. The clause regarding the approval of the Board of Commissioners for members of the Board of Directors who hold dual positions outside the corporation has not been regulated in the GCG Guidelines and Board Manual, as there are no specific provisions from the Shareholders and regulator, namely the Ministry of State-Owned Enterprises.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.6.2	
	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned	Dewan Komisaris mengelola potensi benturan kepentingan melalui penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dan Pakta Integritas Aksi Korporasi. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau afiliasi tertentu. Dengan memastikan bahwa Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait, Dewan Komisaris dapat menjaga objektivitas dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan The Board of Commissioners manages potential conflicts of interest through the signing of an Annual Integrity Pact and a Corporate Action Integrity Pact. The Board of Commissioners bears a significant responsibility to ensure that decisions are not influenced by personal interests or affiliations. By ensuring that Commissioners with conflicts of interest do not participate in decision-making processes related to such conflicts, the Board of Commissioners can maintain objectivity and fairness in all decision-making processes.
1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Increasing the Competency of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	**1.7.1**	
	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui Sekretaris Perusahaan mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan peran masing-masing. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, corporate characteristics and operations, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors through the Corporate Secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and improving the skills and knowledge required to carry out their respective duties and roles	Dalam Pedoman GCG Perusahaan telah diatur mengenai Program Pengenalan dan Peningkatan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, akan diberikan Program Pengenalan Perusahaan dan bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris dilakukan program peningkatan kompetensi secara periodik baik melalui kegiatan pelatihan, workshop, studi banding ataupun kegiatan terkait lainnya. Setiap Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti sekurang-kurangnya 1(satu) kali program pengembangan kompetensi selama tahun 2024. The Company's GCG Guidelines stipulate the Program for the Introduction and Improvement of the Competence of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Each newly appointed member of the Board of Commissioners will be provided with a Company Orientation Program, and all members of the Board of Commissioners will undergo periodic competency enhancement programs through training activities, workshops, benchmarking studies, or other related activities. Each member of the Board of Commissioners has participated in at least one competency development program during the year 2024.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Principle 2: Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	**2.1.1**	
Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners	Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective Director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination & Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.	Perusahaan secara langsung telah mengadopsi Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terkait sumber rekomendasi penentuan kandidat calon Direktur dan Dewan Komisaris. Kriteria terkait keberagaman Direksi belum dituangkan secara khusus dalam Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan, sehingga dalam laporan tahunan belum diungkapkan terkait keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris. The Company has directly adopted the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Structure and Human Capitals of State-Owned Enterprises regarding the sources of recommendations for determining candidates for Directors and Board of Commissioners. Criteria related to diversity in the Board of Directors have not been specifically outlined in the Company's GCG Guidelines and Board Manual, therefore, the annual report does not disclose information regarding diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners.
	2.1.2	
	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and expertise required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors	Kebijakan seleksi dan nominasi Komisaris terkait proses seleksi Dewan merujuk langsung pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dan telah tertuang secara khusus dalam Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan The selection and nomination policy for Commissioners related to the Board selection process refers directly to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organization and Human Capitals of State-Owned Enterprises, and has been specifically outlined in the Company's GCG Guidelines and Board Manual.
	2.1.3	
	Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi peran Direksi dan Dewan Komisaris. The composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as disclosed in the Annual Report, demonstrates a diversity of capabilities, expertise, knowledge, age, cultural background, and gender, aligned with the requirements of their respective roles.	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan berasal dari Indonesia wilayah timur sampai barat dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang beraneka ragam. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are from eastern to western Indonesia with diverse educational backgrounds and expertise.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	2.1.4	
	Kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. The selection and nomination policy and procedures for Commissioners are governed by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 on the Governance Structure and Human Capitals of State-Owned Enterprises.	Pembatasan masa jabatan untuk Komisaris Independen belum diatur pada *Board Manual* dan Pedoman GCG Perusahaan dikarenakan tidak ada ketentuan khusus dari Pemegang Saham dan Regulator terkait hal ini. Komite Nominasi & Remunerasi belum mempunyai pedoman untuk proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris. There are no term limits for Independent Commissioners as stipulated in the Company's Board Manual and GCG Guidelines, as there are no specific provisions from the Shareholders and Regulators regarding this matter. The Nomination & Remuneration Committee does not yet have guidelines for a formal, rigorous, and transparent process for the appointment and removal of the Board of Directors and Board of Commissioners.
	2.1.5	
	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee which carries out the nomination function determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	Penetapan kriteria nominasi yang digunakan oleh Dewan Komisaris/Komite adalah sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. The nomination criteria used by the Board of Commissioners/Committee are as stated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organization and Human Capitals of State-Owned Enterprises.
	2.1.6	
	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	Komposisi Dewan Komisaris telah mencerminkan keragaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, dan latar belakang budaya, sehingga dapat memenuhi tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners reflects diversity in terms of abilities, expertise, knowledge, experience, age, and cultural background, enabling it to fulfill the duties and obligations of the Board of Commissioners.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
	2.1.7.	
	Laporan Tahunan telah mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari 6 Komisaris Independen atau 55% dari 11 anggota Dewan Komisaris. Setiap awal tahun, seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas sebagai salah satu bentuk komitmen untuk bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan Perusahaan dan menghindari potensi benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi. The Annual Report discloses that the Board of Commissioners comprises 6 Independent Commissioners, accounting for 55% of the total 11 members. At the beginning of each year, all members of the Board of Commissioners sign an Integrity Pact as a demonstration of their commitment to act in the best interests of the Company and to avoid any potential conflicts of interest.	Setiap awal tahun, seluruh Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas sebagai salah satu bentuk komitmen untuk bekerja sebaik mungkin hanya untuk kepentingan Perusahaan dan untuk menghindari potensi benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi. At the beginning of each year, all members of the Board of Commissioners sign an Integrity Pact as a form of commitment to work to the best of their ability solely for the benefit of the Company and to avoid any potential conflicts of interest that may arise.
	2.1.8.	
	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	PT PI memiliki komite Nominasi dan Remunerasi yang berperan dalam memastikan bahwa proses penunjukan dan pengangkatan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang jelas dan transparan. Berikut adalah beberapa elemen utama yang umumnya diterapkan: 1. Proses Formal dan Terstruktur: Penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk langkah-langkah yang sistematis, seperti seleksi calon berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Proses Ketat dan Berdasarkan Kriteria yang Jelas: Proses seleksi calon anggota harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan ketat, seperti keahlian, pengalaman, rekam jejak, serta kemampuan untuk berkontribusi pada arah strategis perusahaan. Hal ini memastikan bahwa anggota yang dipilih dapat memenuhi peran mereka dengan baik. 3. Transparansi dalam Pengambilan Keputusan: Semua tahapan proses seleksi harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi, termasuk pengumuman calon anggota kepada publik dan pemangku kepentingan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengetahui alasan di balik pengangkatan tersebut. 4. Evaluasi dan Pertimbangan Berdasarkan Tata Kelola yang Baik: Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk mengevaluasi calon dengan objektivitas, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan dengan pertimbangan yang adil dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). 5. Mengikuti Ketentuan yang Berlaku: Selain prosedur internal perusahaan, proses ini juga harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, baik dari otoritas pasar modal maupun peraturan sektoral, guna memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengangkatan menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas. Dengan proses yang formal, ketat, dan transparan, perusahaan dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat di antara investor dan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya akan mendukung reputasi dan keberlanjutan perusahaan.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
		PT PI has a Nomination and Remuneration Committee that plays a role in ensuring that the appointment and selection processes are carried out in accordance with clear and transparent principles. The following are some of the main elements that are generally applied: 1. Formal and Structured Process: The appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners must follow the procedures set out in the company's articles of association and applicable regulations. This includes systematic steps, such as selecting candidates based on qualifications and competencies that match the company's needs. 2. Rigorous and Criteria-Based Process: The selection process for candidates must be based on clear and rigorous criteria, such as expertise, experience, track record, and ability to contribute to the company's strategic direction. This ensures that the selected members can fulfill their roles properly. 3. Transparency in Decision Making: All stages of the selection process must be conducted with a high degree of transparency, including the announcement of candidates to the public and stakeholders, and providing them with the opportunity to know the reasons behind the appointment. 4. Evaluation and Consideration Based on Good Governance: The Nomination and Remuneration Committee is responsible for evaluating candidates objectively, avoiding conflicts of interest, and ensuring that the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners is carried out with fair consideration and in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). 5. Compliance with Applicable Regulations: In addition to internal company procedures, this process must also comply with applicable laws and regulations, both from capital market authorities and sectoral regulations, to ensure that all parties involved in the appointment carry out their responsibilities with integrity. With a formal, rigorous, and transparent process, the company can build stronger trust among investors and stakeholders, which in turn will support the company's reputation and sustainability.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
2.2	**2.2.1.**	
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of Directors and Board of Commissioners	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Perusahaan telah mempunyai kebijakan dan kriteria yang terukur atas kebijakan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham. The company has measurable policies and criteria for the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated by the Ministry of State-Owned Enterprises as the Shareholder.
	2.2.2	
	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. Apart from that, consideration must also be given to his position as President Commissioner and chairman as well as his membership in committees.	Kebijakan Remunerasi untuk Dewan Komisaris merujuk pada peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN The Remuneration Policy for the Board of Commissioners refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Capitals of State-Owned Enterprises

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	2.2.3	
	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of Directors and Commissioners taking into account corporate operational performance, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board Commissioner.	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang merujuk pada peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 serta ditetapkan pada piagam KNR melalui SK 004/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024. The Company has established remuneration policies for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the regulations of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/03/2023, which have been formalized in the Company's Articles of Association through Resolution No. 004/KEP.KOM/II/2024 dated February 29, 2024.
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Principle 3: Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners		
	3.1.1	
	PTPI telah mengatur keterbukaan dan kerahasiaan informasi dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu. Selain itu, setiap Insan Perusahaan harus tetap menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. PTPI has regulated information transparency and confidentiality in its Corporate Governance Guidelines. The Board of Directors ensures that the Company implements information disclosure and communication in accordance with the prevailing laws and regulations, and that information is delivered to the Board of Commissioners and Shareholders in a timely manner. In addition, every employee of the Company is required to maintain the confidentiality of corporate information in compliance with applicable laws and regulations.	Perusahaan telah mengatur hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris serta prinsip keterbukaan dan kerahasiaan informasi dalam Pedoman GCG dan Board Manual Perusahaan, yaitu : a. Board Manual telah menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Dewan Komisaris dan Direksi. b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. c. Mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. d. Menerapkan empat pilar governansi korporat (perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan) yang merupakan pengembangan dari lima prinsip GCG, yakni: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (independency), dan kewajaran (*fairness*) di setiap kegiatan di Perseroan secara konsisten. e. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan kewajiban fidusia (*fiduciary duties*) sehingga masing-masing organ terlindungi dari terjadinya pelanggaran yang dapat dikategorikan *piercing the corporate veil*

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
		The Company has established working relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as principles of disclosure and confidentiality of information in the Company's GCG Guidelines and Board Manual, namely: a. The Board Manual serves as a reference/guideline for the main duties and functions of the Board of Commissioners and the Board of Directors. b. Improving the quality and effectiveness of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. c. Facilitating the Board of Commissioners and the Board of Directors in understanding the provisions and regulations related to the work of the Board of Commissioners and the Board of Directors. d. Implementing the four pillars of corporate governance (ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability), which are an extension of the five principles of GCG, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in all activities of the Company on a consistent basis. e. Improving the effectiveness of the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their fiduciary duties so that each organ is protected from violations that can be categorized as piercing the corporate veil.
	3.1.2	
	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	Manajemen PI Group yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Direktur Utama Anak Perusahaan telah menetapkan dan menyepakati *purpose* dan visi serta misi PIHC Group melalui Strategic Workshop Perumusan Purpose, Visi dan Misi Perusahaan yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang kemudian disahkan dalam RKAP 2024. The management of PI Group, consisting of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the President Director of the Subsidiary Company, has established and agreed upon the purpose, vision, and mission of PIHC Group through a Strategic Workshop on the Formulation of the Company's Purpose, Vision, and Mission held on October 31, 2023, which was subsequently approved in the 2024 RKAP.
3.1	**3.1.3**	
Sifat Hubungan Kerja Nature of the Employment Relationship	Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including effective communication with shareholders and other stakeholders.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
3.2	**3.2.1**	
Akses informasi Dewan Komisaris Access to information on the Board of Commissioners	PTPI telah mengatur keterbukaan dan kerahasiaan informasi dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa Komite Audit dan komite lainnya, serta auditor eksternal dan auditor internal mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu mengenai perusahaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. PTPI has regulated information transparency and confidentiality in its Corporate Governance Guidelines. The Board of Commissioners and the Board of Directors ensure that the Audit Committee and other committees, as well as external and internal auditors, are granted access to accurate, relevant, and timely information about the Company as required for the execution of their duties.	Direksi memastikan bahwa Dewan Komisaris berhak mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pedoman GCG dan Board Manual Perusahaan. The Board of Directors ensures that the Board of Commissioners has the right to access accurate, relevant, and timely information, as stipulated in the Company's GCG Guidelines and Board Manual.
3.3	**3.3.1**	
Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Structure	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	Perusahaan telah mengatur hal terkait pelaporan mengenai kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain yang dituangkan dalam Pedoman GCG dan Board Manual Perusahaan. The Company has regulated matters relating to the reporting of share ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners and/or their families in the Company and other companies as set forth in the Company's GCG Guidelines and Board Manual.
Prinsip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung jawab Principle 4: Ethical and Responsible Behavior		
4.1	**4.1.1**	
Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Code of Ethics and Behavior (Code of Conduct)	PTPI telah mengatur perilaku etis seluruh Insan Perusahaan dengan setiap pemangku Kepentingan yang dituangkan pada Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang merupakan salah satu kelengkapan infrastruktur GCG Perusahaan. Pedoman atau charter ini selain mengatur Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan serta Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan juga merupakan panduan panduan etika bisnis dalam kegiatan operasional sehari-hari PTPI has established ethical conduct guidelines for all employees in their interactions with stakeholders, as outlined in the Code of Conduct, which forms an integral part of the Company's GCG (Good Corporate Governance) infrastructure. This Code not only governs the Work Ethics and Conduct of the Company's personnel and the Company's Ethics in dealing with stakeholders, but also serves as a guide for ethical business practices in day-to-day operations.	Perusahaan telah mengatur perilaku Etis seluruh Insan Perusahaan dengan setiap pemangku Kepentingan yang dituangkan pada Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang merupakan salah satu kelengkapan infrastruktur GCG Perusahaan. Pedoman atau *charter* ini selain mengatur Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perseroan serta Etika Perseroan dengan Pemangku Kepentingan juga merupakan panduan panduan etika bisnis dalam kegiatan operasional sehari-hari The Company has regulated the ethical behavior of all Company personnel with each stakeholder as outlined in the Code of Conduct, which is part of the Company's GCG infrastructure. This guideline or charter not only regulates the work ethics and conduct of the Company's personnel and the Company's ethics with stakeholders, but also serves as a guide for business ethics in daily operations.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
	Pedoman Etika dan Perilaku telah memuat komitmen seluruh Insan Perusahaan untuk: 1. Bertindak dan berperilaku untuk kepentingan terbaik perusahaan; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan Informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; 4. Mematuhi Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan dan operasinya; 5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan/atau Peraturan Perusahaan; 6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan Benturan Kepentingan dengan kepentingan terbaik perusahaan atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan; 7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau Informasi yang dimiliki perusahaan, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan pelanggannya; 8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; 9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; 10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap Insan Perusahaan; 11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	The Code of Ethics and Behaviour contains the commitment of all Company personnel to: 1. Act and behave in the best interest of the Company; 2. Act honestly and with high standards of integrity; 3. Be independent and act on the basis of complete information, in good faith, with due diligence and prudence; 4. Comply with Company Regulations and laws and regulations applicable to the company and its operations; 5. Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on the Code of Conduct and/or Company Regulations; 6. Not engaging or participating in any activity that would give rise to a Conflict of Interest with the best interests of the company or that would negatively impact the company's reputation; 7. Not taking advantage of the company's property or Information, other asset holdings or its customers for personal gain or to the detriment of the company and its customers; 8. Not utilise his/her position or opportunities generated by his/her position for personal gain; 9. Avoiding the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for himself or for others that cause conflicts of interest/provide benefits to third parties in violation of laws and regulations; 10. Respecting differences of opinion and the rights of every Company personnel; 11. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.	
	4.1.2	
	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (anti-*fraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anticorruption, anti-fraud or other related standards.	Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (anti-*fraud*), keterlibatan dalam politik yang tertuang pada Pedoman tata Kelola Perusahaan dan Pedoman turunannya. The Board of Directors has established policies and practices on anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement as stipulated in the Corporate Governance Guidelines and its derivative guidelines.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
4.2	**4.2.1**	
Nilai-nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan, dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. Corporations articulate, cultivate and express corporate culture and values.	Nilai-nilai yang dianut Perusahaan telah dituangkan dalam Pedoman GCG Perusahaan. Adapun nilai-nilai ini telah merujuk pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Nilai-nilai perusahaan tersebut adalah Amanah, Harmonis, Kompeten, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK). The values embraced by the Company are outlined in the Company's GCG Guidelines. These values refer to the values established by the Ministry of State-Owned Enterprises. The company's values are Trustworthy, Harmonious, Competent, Loyal, Adaptive, and Collaborative (AKHLAK).
4.3	**4.3.1**	
Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilainilai dan Budaya Enforcement and Communication of Ethics, Values and Culture Guidelines	Pedoman Etika dan Perilaku korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan dan diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan melalui Peraturan Perusahaan. Corporate Ethics and Behavior Guidelines are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees and are integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and are enforced through Company Regulations.	Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) telah disosialisasikan Perusahaan melalui survei pemahaman Pedoman Perusahaan serta dimasukkan ke dalam *website* Perusahaan, sehingga setiap Insan Perusahaan dapat mengakses pedoman tersebut setiap saat. Di tiap awal tahun, perusahaan juga memastikan bahwa tiap insan perusahaan menandatangani Pakta Integritas, di mana salah satu *item* di dalamnya adalah terkait pemahaman *code of conduct* (CoC) perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penegakan CoC dan nilainilai perusahaan. The Code of Conduct has been disseminated by the Company through a survey on the understanding of the Company Guidelines and has been posted on the Company's website so that every employee can access the guidelines at any time. At the beginning of each year, the company also ensures that every employee signs an Integrity Pledge, one of the items of which relates to understanding the company's Code of Conduct (CoC). This is one of the forms of enforcing the CoC and the
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Principle 5: Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1	**5.1.1**	
Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the corporate annual report.	Pengukuran penerapan GCG, pengelolaan risiko dan pengendalian internal telah dilaksanakan secara berkala dan diatur juga dalam Pedoman GCG Perusahaan dan dilaporkan kepada pemegang saham melalui laporan tahunan korporasi The measurement of GCG implementation, risk management, and internal control has been carried out regularly and is also regulated in the Company's GCG Guidelines and reported to shareholders through the corporate annual report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
5.2	**5.2.1.**	
Manajemen Risiko Risk Management	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dibahas secara periodik dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, and are discussed periodically in meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Strategi Risiko Perusahaan ditetapkan oleh Manajemen dalam Buku RKAP. Evaluasi atas strategi risiko dengan melakukan monitoring atas realisasi parameter metrik strategi risiko setiap bulan. The Company's Risk Strategy is determined by Management in the RKAP Book. The risk strategy is evaluated by monitoring the realization of risk strategy metric parameters on a monthly basis.
	5.2.2	
	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko (KPR) untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan (*oversight roles*) dalam perspektif penerapan manajemen risiko terintegrasi. The Board of Commissioners has established a Risk Monitoring Committee to assist the Board of Commissioners in performing oversight roles from the perspective of integrated risk management implementation.	Pemantauan manajemen risiko perusahaan telah diatur dalam Pedoman GCG dan Board Manual Perusahaan, serta pedoman turunan lainnya seperti Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi. The monitoring of enterprise risk management is regulated in the GCG Guidelines and the Company's Board Manual, as well as other derivative guidelines such as the Integrated Risk Management Guidelines.
5.3	**5.3.1**	
Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance	Direksi telah menetapkan fungsi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan berada di dalam struktur organisasi Direktorat Manajemen Risiko. Perusahaan terus meningkatkan integrasi fungsi GRC ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. The Board of Directors has established the Governance, Risk Management and Compliance functions within the organisational structure of the Risk Management Directorate. The Company continues to improve the integration of these GRC functions in accordance with applicable regulations.	Perusahaan telah menerapkan Governansi, *Risk Management*, dan *Compliance* dan saat ini sedang membangun integrasi GRC yang terpadu sesuai dengan peraturan yang berlaku, Adapun fungsi kepatuhan saat ini telah dilaksanakan oleh Departemen Governansi Korporat dan bersifat independen, tidak merangkap dengan fungsi yang lainnya. The Company has implemented Governance, Risk Management and Compliance and is currently developing an integrated GRC system in accordance with applicable regulations. The compliance function is currently performed by the Corporate Governance Department and is independent, not overlapping with other functions.
	5.3.2	
	Direksi telah menetapkan Kompartemen Tata Kelola dan Kepatuhan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan, dan tidak merangkap dengan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors has established the Governance and Compliance Department to carry out the compliance function, and does not concurrently perform functions that have the potential for conflict of interest.	Fungsi kepatuhan berada di bawah koordinasi Kompartemen Tata Kelola dan Kepatuhan terpisah dengan Kompartemen Manajemen Risiko dan Kompartemen Satuan Pengawasan Intern. The compliance function is coordinated by the Governance and Compliance Department, which is separate from the Risk Management Department and the Internal Audit Department.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
5.4	**5.4.1**	
Audit Internal Internal Audit	Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memantau dan memastikan Satuan Pengawasan Intern melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. The Board of Commissioners through the Audit Committee has monitored and ensured that the Internal Audit Unit evaluates the effectiveness of the implementation of risk management, internal control, and corporate governance.	Tugas dan wewenang Komite Audit telah diatur dalam Pedoman GCG Perusahaan dan pedoman turunan terkait Audit Internal. The duties and authorities of the Audit Committee are stipulated in the Company's GCG Guidelines and related guidelines on Internal Audit.
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi Principle 6: Disclosure and Transparency		
6.1	**6.1.1**	
Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets	Perusahaan menyediakan informasi yang bersifat materiel dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para *stakeholders*, hal ini telah dituangkan dalam Pedoman GCG Perusahaan, Pedoman Pengelolaan *Website* Perusahaan, dan Pedoman Pengelolaan Informasi Publik. The Company provides material and relevant information about the Company in a manner that is easily accessible and understandable to stakeholders, as set out in the Company's GCG Guidelines, Website Management Guidelines, and Public Information Management Guidelines.
	6.1.2	
	PTPI telah mengatur keterbukaan dan kerahasiaan informasi dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu. PTPI has regulated information disclosure and confidentiality in the Corporate Governance Guidelines. The Board of Directors ensures that the company carries out information disclosure and communication in accordance with applicable laws and regulations and the timely submission of information to the Board of Commissioners and Shareholders.	Perusahaan menyampaikan Laporan Manajemen kepada Pemegang Saham secara Periodik yaitu : Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan (*Unaudited* dan *Audited*). The Company submits Management Reports to Shareholders on a periodic basis, namely: Quarterly, Semi-annual, and Annual (Unaudited and Audited).
6.2	**6.2.1**	
Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	Perusahaan telah membuat aturan terkait Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kualitas, keakuratan dan kelengkapannya. Hal ini diatur dalam Pedoman GCG Perusahaan dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan The Company has established rules regarding Financial Statements that are accountable in terms of quality, accuracy, and completeness. These rules are stipulated in the Company's GCG Guidelines and Financial Statement Preparation Guidelines.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	6.2.2	
	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of the financial report audit carried out by the external auditor. These activities include recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.	Komite Audit telah menyampaikan hasil evaluasi dan menyampaikan rekomendasi atas penunjukan Auditor Eksternal kepada Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris PTPI pada bulan Oktober 2024 untuk rencana penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) PTPI dan Anak Perusahaan untuk audit atas informasi keuangan tahunan posisi 2024. The Audit Committee has submitted the results of its evaluation and recommendations regarding the appointment of an External Auditor to the President Commissioner and Members of the Board of Commissioners of PTPI in October 2024 for the planned use of the services of a Public Accounting Firm (KAP) for PTPI and its Subsidiaries for the audit of the 2024 annual financial statements.
	6.2.3	
	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	PTPI menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan disusun dengan mengacu pada standar nasional dan internasional, yaitu: 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 16/ SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Global Reporting Initiative (GRI) Standards tahun 2021. 3. Sustainability Accounting Standard Board (SASB) 4. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) PTPI publishes an annual sustainability report as a demonstration of its commitment to sustainability. The Sustainability Report is prepared in accordance with national and international standards, namely: 1. Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies. 2. Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021. 3. Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 4. Task Force on Climate-Related Financial
	6.2.4	
	PTPI menerbitkan Laporan Tahunan secara terintegrasi dengan menempatkan pencapaian dan perkembangan kinerja berkelanjutan sehingga menggambarkan risiko, peluang dan prospek di masa depan untuk membantu pemahaman pemegang saham dan para pemangku kepentingan. PTPI publishes the Annual Report in an integrated manner by placing achievements and sustainable performance developments so as to illustrate risks, opportunities and future prospects to assist the understanding of shareholders and stakeholders.	Perusahaan melakukan pengelolaan risiko utama perusahaan yang berpengaruh secara pareto ke kinerja perusahaan. Risiko Utama tersebut dilakukan monitoring dan pengendalian risiko yang efektif sepanjang tahun sehingga skala risiko dapat diturunkan dan mendukung pencapaian kinerja perusahaan The Company manages key risks that have a significant impact on its performance. These key risks are monitored and controlled effectively throughout the year so that the scale of risk can be reduced and support the achievement of the Company's performance.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
6.3	**6.3.1**	
Diseminasi Informasi Information Dissemination	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	Perusahaan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Hal ini telah dituangkan dalam Pedoman GCG Perusahaan The company ensures that information that needs to be known by all internal and external stakeholders is available through a well-functioning and timely communication system. This has been outlined in the Company's GCG Guidelines.
Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Principle 7: Protection of Shareholder Rights		
7.1	**7.1.1**	
Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	PTPI telah memiliki Pedoman Umum Komunikasi (No.Dok. PI-KOM-PD-004) dan menyediakan media komunikasi resmi untuk berkomunikasi dengan Anak Perusahaan, Pemangku Kepentingan internal (termasuk Pemegang Saham), dan Pemangku Kepentingan eksternal. PTPI has a General Communication Guidelines (No.Dok. PI-KOM-PD-004) and provides official communication media to communicate with Subsidiaries, internal Stakeholders (including Shareholders), and external Stakeholders.	Pemegang saham dapat memberikan suaranya pada Rapat Umum Pemegang Saham. Pedoman-pedoman governansi Korporat perusahaan sebagai entitas induk telah didistribusikan dan diratifikasi oleh Anak Perusahaan. Shareholders can cast their votes at the General Meeting of Shareholders. The corporate governance guidelines of the company as the parent entity have been distributed and ratified by the Subsidiaries.
	7.1.2	
	PTPI telah memiliki Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha yang mengatur hubungan Induk dan Anak Perusahaan. Pedoman ini telah didistribusikan ke seluruh Anak Perusahaan untuk diratifikasi oleh seluruh Anak Perusahaan. PTPI has a Group Governance Charter that governs the relationship between the Parent and Subsidiaries. This guideline has been distributed to all Subsidiaries for ratification by all Subsidiaries.	PTPI telah memiliki Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha yang mengatur hubungan Induk dan Anak Perusahaan. Pedoman ini telah mengalami pemutakhiran di tahun 2021 dan telah didistribusikan ke seluruh Anak Perusahaan untuk diratifikasi oleh seluruh Anak Perusahaan. PTPI has established a Group Governance Guidelines that governs the relationship between the parent company and its Subsidiaries. These guidelines were updated in 2021 and have been distributed to all Subsidiaries for ratification by all Subsidiaries.
	7.1.3	
	PTPI telah memiliki Pedoman Penggabungan, Peleburan, Akuisisi, Divestasi, Likuidasi, dan Investasi Penyertaan (No.Dok. PI-BAN-PD-003) dan Prosedur Persetujuan Pelaksanaan Merger,Akuisisi dan Divestasi (No.Dok. PI-BAN-PR-004) untuk mengatur, memastikan, dan memonitor proses pelaksanaan kebijakan maupun strategi pada penggabungan, peleburan, akuisisi, divestasi, likuidasi, dan investasi penyertaan bagi PTPI dan/atau Anak Perusahaan. PTPI has Merger, Consolidation, Acquisition, Divestment, Liquidation, and Participation Investment Guidelines (No.Dok. PI-BAN-PD-003) and Merger, Acquisition and Divestment Approval Procedures (No.Dok. PI-BAN-PR-004) to regulate, ensure, and monitor the process of implementing policies and strategies on merger, consolidation, acquisition, divestment, liquidation, and participation investment for PTPI and/or its Subsidiaries.	Telah disusun Pedoman Penggabungan, Peleburan, Akuisisi, Divestasi, Likuidasi, dan Investasi Penyertaan tanggal 19 Agustus 2024 untuk mengatur, memastikan, dan memonitor proses pelaksanaan kebijakan maupun strategi pada pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Akuisisi, Divestasi, Likuidasi, dan Investasi Penyertaan bagi Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan The Guidelines for Mergers, Consolidations, Acquisitions, Divestitures, Liquidations, and Equity Investments dated August 19, 2024 have been prepared to regulate, ensure, and monitor the implementation of policies and strategies in the execution of Mergers, Consolidations, Acquisitions, Divestitures, Liquidations, and Equity Investments for the Company and/or its Subsidiaries.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
7.2	**7.2.1**	
Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders	PTPI telah menetapkan ketentuan pengelolaan benturan kepentingan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan dijabarkan lebih rinci dalam Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan (No.Dok. PI-TKK-PD-008) untuk mengatur tata cara pengelolaan potensi benturan kepentingan oleh Insan Perusahaan. PTPI has established conflict of interest management provisions in the Corporate Governance Guidelines and elaborated in more detail in the Conflict of Interest Management Guidelines (No.Dok. PI-TKK-PD-008) to regulate the procedures for managing potential conflicts of interest by Company personnel.	Perlakuan Adil kepada para Pemegang Salah telah diatur dalam Pedoman GCG Perusahaan. Dalam Pedoman GCG Perusahaan diatur bahwa seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham minoritas harus diperlakukan setara. Seluruh Pemegang Saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar. Perlakuan setara bagi Pemegang Saham, meliputi: 1. Perlakuan yang Adil Perseroan memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi Pemegang Saham dalam menerima informasi. 2. Proses Rapat Pemegang Saham Perusahaan akan memfasilitasi penggunaan surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, dan mendorong Pemegang Saham yang tidak dapat hadir untuk menunjuk seorang sebagai wakil mereka. 3. Penggunaan Informasi dari Orang Dalam Hal ini merupakan tanggung jawab Direksi Perseroan dan karyawan untuk menjaga informasi kerahasiaan Perseroan (terutama informasi internal yang tidak seharusnya diungkapkan kepada publik) dari tujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri atau kepentingan orang lain serta untuk menaati peraturan hukum dan kebijakan tentang insider trading. 4. Konflik Kepentingan Direksi dan karyawan harus mengungkapkan setiap kepentingan yang mungkin mereka miliki yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau transaksi terhubung berdasarkan agenda yang terjadwal, sesuai dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan Perusahaan. 5. Perusahaan telah memiliki Pedoman dan Prosedur tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan yang didalamnya mengatur tentang tata cara pengelolaan potensi benturan yang terjadi di Insan Perusahaan.
		Fair treatment of shareholders is regulated in the Company's GCG Guidelines. The Company's GCG Guidelines stipulate that all shareholders, including minority shareholders, must be treated equally. All shareholders must be given the same opportunity to receive attention when their rights are violated. Equal treatment for shareholders includes: 1. Fair Treatment The Company shall provide fair treatment and equal opportunities to Shareholders in receiving information. 2. Shareholders' Meeting Process The Company shall facilitate the use of proxy letters for Shareholders who are unable to attend the General Meeting of Shareholders, and encourage Shareholders who are unable to attend to appoint a representative. 3. Use of Inside Information It is the responsibility of the Company's Board of Directors and employees to maintain the confidentiality of the Company's information (especially internal information that should not be disclosed to the public) from the purpose of obtaining personal gain or the interests of others, as well as to comply with laws and regulations regarding insider trading. 4. Conflict of Interest The Board of Directors and employees must disclose any interests they may have that could give rise to a conflict of interest or related transactions based on the scheduled agenda, in accordance with the Company's regulations and policies. 5. The Company has established Guidelines and Procedures on Conflict of Interest Management, which regulate the procedures for managing potential conflicts that may arise within the Company.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
7.3	**7.3.1**	
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders	Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan PTPI mengatur Direksi melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. PTPI Articles of Association and Corporate Governance Guidelines regulate the Board of Directors to summon the GMS no later than 15 days from the date the request for the GMS is received.	Mekanisme Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham di Perusahaan telah diatur dalam Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat. Namun, Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara Lengkap Diumumkan ke publik pada hari berikutnya belum diatur dalam Pedoman GCG maupun Board Manual Perusahaan dikarenakan Perseroan bukanlah perusahaan publik. The General Meeting of Shareholders of the Company is regulated in the Company's GCG Guidelines and Board Manual. The General Meeting of Shareholders is convened by registered letter. However, the announcement of the voting results and a complete summary of the minutes of the General Meeting of Shareholders to the public on the following day is not regulated in the Company's GCG Guidelines or Board Manual because the Company is not a public company.
	7.3.2	
	Pedoman Tata Kelola Perusahaan PTPI mengatur seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham minoritas harus diperlakukan setara dan diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar. Tata cara pelaksanaan RUPS selanjutnya diatur dalam Prosedur Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (No.Dok. PI-SEK-PR-014). PTPI Corporate Governance Guidelines stipulate that all Shareholders including minority Shareholders must be treated equally and given the same opportunity to get attention if their rights are violated. The procedure for the implementation of the GMS is further regulated in the Procedure for Organising the General Meeting of Shareholders (No.Dok. PI-SEK-PR-014).	Perusahaan telah memiliki ketentuan terkait RUPS sebagaimana tercantum pada Prosedur Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. The Company has provisions regarding the General Meeting of Shareholders as set forth in the Procedures for Conducting the General Meeting of Shareholders.
	7.3.3	
	Sesuai Anggaran Dasar PTPI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. In accordance with PTPI Articles of Association, members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.	Perusahaan telah memiliki ketentuan terkait penunjukkan anggota DIreksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan. The Company has provisions regarding the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	7.3.4	
	Sesuai Anggaran Dasar PTPI, Dewan Komisaris mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS dan selanjutnya RUPS menetapkan Akuntan Publik atas usulan Dewan Komisaris. PTPI menetapkan tata cara penunjukan Akuntan Publik dalam Prosedur Pengadaan Bersama Jasa Kantor Akuntan Publik (No.Dok. PI-SPI-PR-009). In accordance with PTPI'Articles of Association, the Board of Commissioners proposes a Public Accountant to the GMS and then the GMS determines the Public Accountant based on the proposal of the Board of Commissioners. PTPI determines the procedure for appointing a Public Accountant in the Joint Procurement Procedure for Public Accounting Firm Services (No.Dok. PI-SPI-PR-009).	Perusahaan telah memiliki Pedoman Penunjukkan KAP The Company has Guidelines for the Appointment of KAP.
Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Principle 8: Respect for Stakeholders		
8.1	**8.1.1**	
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*Stakeholder Engagement*) Key Stakeholder Engagement	Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan melaksanakan komunikasi yang *regular*, transparan dan efektif dengan seluruh pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan, kepentingan, dan keluhan mereka serta dampak perseroan terhadap mereka. The Company, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent and effective communication with all key stakeholders and involves them to understand their hopes, interests and complaints as well as the company's impact on them.	Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan di antaranya adalah pemberian informasi kepada pemangku kepentingan mengenai data atau performance dari Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Kebijakan Informasi Publik yang ditetapkan Perseroan dan penyampaian laporan-laporan lainnya kepada stakeholders lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta disampaikan secara tepat waktu. The Corporate Secretary has duties and responsibilities to stakeholders, including providing information to stakeholders regarding the Company's data or performance within the limits set forth in the Company's Public Information Policy and submitting other reports to other stakeholders in accordance with the provisions of laws and regulations and in a timely manner.
8.2	**8.2.1**	
Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integration of Sustainability in Business Models	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan mendukung upaya Direksi dalam penguatan aspek keberlanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. PTPI menunjukkan komitmen kuat dalam mengitegrasikan aspek Environment, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnisnya, antara lain dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, yaitu: pengembangan clean ammonia, penggunaan energi hijau, dan pengelolaan limbah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R). The Board of Commissioners supervises and supports the efforts of the Board of Directors in strengthening sustainability aspects as part of the company's long-term strategy. PTPI has shown a strong commitment in integrating Environment, Social, and Governance (ESG) aspects into its business strategy, among others by taking strategic steps in implementing sustainability principles, namely: development of clean ammonia, use of green energy, and waste management with the principles of reduce, reuse, recycle (3R).	Integrasi keberlanjutan dalam model bisnis perusahaan telah diatur secara spesifik dalam pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan. The integration of sustainability into the Company's business model is specifically regulated in the Company's GCG guidelines and Board Manual.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
8.3	**8.3.1**	
Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	Pengelolaan hubungan antar pemangku kepentingan telah diatur dalam Pedoman GCG Perusahaan dan Board Manual. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik hanya demi kepentingan Perseroan dan memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku The management of stakeholder relations is regulated in the Company's GCG Guidelines and Board Manual. In carrying out their duties, authorities, and responsibilities, each member of the Board of Directors must perform their duties properly solely for the benefit of the Company and ensure that the Company fulfills its social and environmental responsibilities and considers the interests of various stakeholders in accordance with applicable laws and regulations.
	8.3.2	
	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability	Direksi memberikan arahan kepada seluruh insan Perusahaan melalui kegiatan Townhall Meeting yang dilaksanakan secara rutin serta pembentukan fungsi yang mengelola keberlanjutan usaha Perusahaan. The Board of Directors provides guidance to all Company personnel through regular Townhall Meetings and the establishment of functions responsible for managing the Company's business sustainability.

PENERAPAN PEDOMAN GOVERNANSI PERUSAHAAN TERBUKA

Hingga tahun buku 2024, PTPI bukan merupakan perusahaan terbuka yang menerbitkan efek bersifat ekuitas. Dengan demikian, Perusahaan tidak menyampaikan rincian penerapan pedoman governansi sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMPANY GOVERNANCE GUIDELINES

Until the 2024 financial year, PTPI is not a public company that issues equity securities. Thus, the Company did not convey details of the implementation of governance guidelines in accordance with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines.

Monitoring GCG
GCG Monitoring

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN GCG

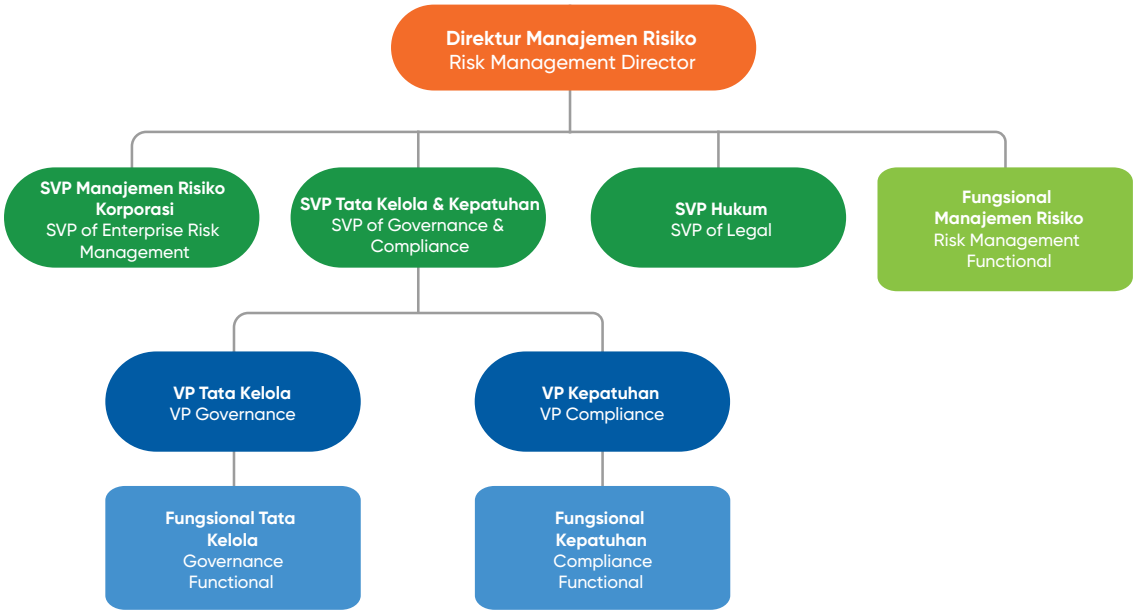
Sesuai Surat Keputusan Direksi PTPI No. 13/A/HK/E50/SK/2024 tanggal 1 Februari 2024 perihal Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko PTPI yang menetapkan Kompartemen Tata Kelola & Kepatuhan berada di bawah komando Direktur Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam penerapan GCG di Perseroan.

Kompartemen Tata Kelola & Kepatuhan diisi oleh 1 (satu) orang SVP, 2 (dua) orang VP, dan 4 (empat) orang staf. Adapun struktur organisasi Kompartemen Tata Kelola Kepatuhan & Kepatuhan sebagai berikut:

RESPONSIBLE PARTY FOR GCG IMPLEMENTATION

In accordance with PTPI Directors Decree No. 13/A/HK/E50/SK/2024 dated 1 February 2024 concerning the Organizational Structure of the Risk Management Directorate of PTPI which stipulates that the Compliance & Governance Compartment is under the command of the Risk Management Director who is responsible for implementing GCG at Company.

The Compliance & Governance Compartment is filled by 1 (one) SVP, 2 (two) VP, and 4 (four) staff. The organizational structure of the Compliance & Governance Compartment is as follows:



Berkenaan dengan *monitoring* penerapan GCG di Perusahaan, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
1. Laporan Kinerja Penerapan GCG Bulanan;
2. Laporan Kinerja Penerapan GCG Triwulanan;
3. Laporan Kinerja Penerapan GCG Semesteran/Tahunan.
4. Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semesteran/Tahunan.

With regard to monitoring the implementation of GCG in the Company, the report on the implementation of duties and responsibilities is as follows:
1. Monthly GCG Implementation Performance Report;
2. Quarterly GCG Implementation Performance Report;
3. Semester/Annual GCG Implementation Performance Report.
4. Integrated Governance Report Semesterly/Annually

PENGUKURAN/ASSESSMENT PENERAPAN GCG

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran atas hasil kualitas penerapan tata kelola, Perusahaan memiliki mekanisme assessment atau penilaian penerapan GCG secara periodik. Dalam melakukan penilaian penerapan GCG, Perusahaan menggunakan 2 (dua) model penilaian, yaitu:

1. Penilaian Penerapan GCG Berlandaskan Kebijakan BUMN
   Sebagai BUMN, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG dengan menggunakan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
2. Penilaian Penerapan GCG melalui program Lembaga Riset/Pemeringkat

Dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan, Manajemen Perusahaan berkepentingan untuk dapat melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan secara menyeluruh pada proses bisnis Perusahaan. Guna menunjang hal tersebut diperlukan pengukuran GCG tambahan yang dapat memberikan hasil dari sudut pandang lain di luar penilaian yang telah dilaksanakan sesuai indikator/parameter yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN.

Upaya tersebut dilakukan agar hasil penilaian tambahan tersebut dapat menjadi pembanding, sekaligus sebagai assurance atas hasil penilaian satu sama lain. Sejak tahun 2018, Perusahaan telah melaksanakan penilaian GCG tambahan melalui program yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset/Pemeringkat. Penilaian penerapan GCG tersebut dilakukan melalui program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) oleh pihak independen, yaitu The Indonesia Institute of Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

MEASUREMENT/ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

To find out and get an overview of the results of the quality of governance implementation, the Company has a periodic assessment mechanism or assessment of GCG implementation. In assessing the implementation of GCG, the Company uses 2 (two) assessment models, namely:

1. Assessment of GCG Implementation Based on SOE Policy
   As a SOE, the Company assesses the implementation of GCG using the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

2. Assessment of GCG Implementation through the Research/Rating Institute program

In order to increase the value of the Company in a sustainable manner, Company Management has an interest in being able to see the extent to which GCG principles are implemented as a whole in the Company's business processes. To support this, additional GCG measurements are needed which can provide results from other points of view beyond the assessments that have been carried out according to the indicators/parameters published by the Ministry of SOE.

This effort is made so that the results of the additional assessments can be used as a comparison, as well as as assurance of the results of each other's assessments. Since 2018, the Company has carried out additional GCG assessments through programs organized by Research/Rating Institutions. The assessment of GCG implementation was carried out through the Corporate Governance Perception Index (CGPI) program by an independent party, namely The Indonesia Institute of Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine.

Penilaian Penerapan GCG PTPI
PTPI GCG Implementation Assessment

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN *Indicators* Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs	**Corporate Governance Perception Index (CGPI)**

PENILAIAN BERDASARKAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN BUMN

Dasar dan Kriteria Penilaian

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara khususnya Pasal 44 ayat (1) Pengukuran terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dinyatakan sebagai berikut:

1. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam bentuk:
   a. penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; dan
   b. evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2024, Kementerian Badan Usaha Milik Negara belum menerbitkan kriteria baru terkait pengukuran terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pihak yang Menilai

Sesuai dengan ketentuan dalam PER-02/MBU/03/2023 bahwa penilaian terhadap penerapan GCG di Perusahaan agar dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun, dan dilakukan evaluasi untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG.

Pada tahun 2024, kegiatan Penilaian Penerapan GCG belum dilaksanakan karena Kementerian BUMN belum menerbitkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang baru tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Pada tahun 2024, PI *Group* telah melaksanakan kegiatan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi (AoI) GCG dan telah dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Adapun hasil penilaian GCG Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

ASSESSMENT BASED ON MINISTRY OF SOE POLICY

Basis and Assessment Criteria

Based on Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated 3 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, especially Article 44 paragraph (1) Measurement of the Implementation of Good Corporate Governance is stated as follows:

1. SOE is obliged to measure the implementation of Good Corporate Governance in the form of:

   a. assessment, namely a program to identify the implementation of Good Corporate Governance in SOE through measuring the implementation and application of Good Corporate Governance in SOE which is carried out periodically every 2 (two) years; and

   b. evaluation (review), namely a program to describe the follow-up to the implementation and implementation of Good Corporate Governance in SOE which is carried out in the following year after the assessment as referred to in letter a, which includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.

As of the end of December 2024, the Ministry of State-Owned Enterprises has not yet issued new criteria regarding the measurement of the Implementation of Good Corporate Governance.

Assessing Party

In accordance with the provisions in PER-01/MBU/2011, an assessment of the implementation of GCG in the Company must be carried out periodically every 2 (two) years, and an evaluation is carried out to describe the follow-up to the implementation and application of GCG.

In 2024, GCG Implementation Assessment activities have not been carried out because the Ministry of SOEs has not issued a new Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

In 2024, PI Group conducted an evaluation of the follow-up to the recommendations (AoI) of the GCG and reported the results to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders.

The results of the GCG assessment for the 2022 fiscal year, conducted in 2023, are as follows:

Hasil Penilaian
Assessment Results

No.	Aspek Penilaian Test Aspect	Nilai Maksimum Maximum Score	Skor Capaian PTPI Achievement Score of PTPI	Tingkat Pemenuhan PTPI Fullfilment Level of PTPI (%)	Penjelasan Explanation
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7	6,728	96,22	Sangat Baik Excellent
2	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9	8,819	98,22	Sangat Baik Excellent
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	33,954	97,01	Sangat Baik Excellent
4	Direksi Board of Directors	35	33,911	96,89	Sangat Baik Excellent
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information disclosures and transparency	9	8,811	98,11	Sangat Baik Excellent
6	Aspek Lainnya Other Aspects	9	4,107	82,14	Sangat Baik Excellent
	Jumlah Total	**100**	**96,371**	**96,37**	**Sangat Baik** Excellent

Pelaksanaan penilaian GCG Perusahaan menunjukkan hasil dengan predikat "Sangat Baik" mencakup 6 (enam) aspek yang di ukur seperti yang telah diuraikan di atas, dengan capaian skor sebesar 96,37.

Dilihat dari skor GCG yang dicapai Perusahaan, terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun Peningkatan skor GCG PTPI dari tahun 2021 hingga tahun 2022 adalah 4,045 poin atau 4%. Pelaksanaan GCG *Assessment* untuk tahun buku 2024 akan dilaksanakan di tahun 2025.

Adapun pada tahun buku 2024, PI Group melaksanakan kegiatan Evaluasi atas Tindak Lanjut AoI GCG yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Entitas.

Terkait hasil GCG *Assessment* pada 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai perbandingan, berikut skor hasil GCG *assessment* dari tahun 2020 sampai tahun 2022 Perusahaan:

The implementation of the Company's GCG assessment showed results with the title "Very Good" covering 6 (six) aspects measured as described above, with a score of 96.37.

Judging from the GCG score achieved by the Company, there has been a continuous increase from year to year. The increase in PTPI's GCG score from 2021 to 2022 is 4.045 points or 4%. The implementation of the GCG Assessment in 2024 is still awaiting further direction from the Ministry of SOE.

In the 2024 fiscal year, PI Group carried out an evaluation of the follow-up actions on the Areas of Improvement (AoI) in GCG implementation that had been conducted by each entity.

Regarding the results of the GCG Assessment over the last three years, for comparison, the following are the GCG assessment scores from 2020 to 2022 for the Company:

2022		2021		2020	
Penilaian Eksternal External Assessment		**Penilaian Eksternal** External Assessment		**Penilaian Eksternal** External Assessment	
(PT SDP)		**(BPKP)**		**(PT SDP)**	
Skor Score	**Predikat** Predicate	**Skor** Score	**Predikat** Predicate	**Skor** Score	**Predikat** Predicate
96,371%	Sangat Baik Excellent	92,325%	Sangat Baik Excellent	93,901%	Sangat Baik Excellent

No	Entitas Entity	2020		2021		2022		Perbandingan	
		SDP		BPKP		SDP		2022 Vs 2020	2022 Vs 2021
		Skor	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Predikat		
1	PTPI	93,901	Sangat Baik Excellent	92,325	Sangat Baik Excellent	96,371	Sangat Baik Excellent	↑	↑
2	PT Petrokimia Gresik	93,535	Sangat Baik Excellent	94,060	Sangat Baik Excellent	97,349	Sangat Baik Excellent	↑	↑
3	PT Pupuk Kujang	91,683	Sangat Baik Excellent	91,469	Sangat Baik Excellent	95,257	Sangat Baik Excellent	↑	↑
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	95,074	Sangat Baik Excellent	95,448	Sangat Baik Excellent	95,544	Sangat Baik Excellent	↑	↑
5	PT Pupuk Iskandar Muda	87,537	Sangat Baik Excellent	85,246	Sangat Baik Excellent	94,226	Sangat Baik Excellent	↑	↑
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	93,578	Sangat Baik Excellent	92,049	Sangat Baik Excellent	95,504	Sangat Baik Excellent	↑	↑
7	PT Rekayasa Industri	88,921	Sangat Baik Excellent	80,811	Baik Good	84,931	Baik Good	↓	↑
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	82,172	Cukup Baik Fairly Good	83,062	Baik Good	87,700	Sangat Baik Excellent	↑	↑
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	82,547	Baik Good	83,047	Baik Good	86,370	Sangat Baik Excellent	↑	↑
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas*	84,397	Baik Good	83,874	Baik Good	88,396	Sangat Baik Excellent	↑	↑
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	73,052	Cukup Baik Fairly Good	75,882	Baik Good	80,241	Cukup Baik Fairly Good	↑	↑

*) Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*) Subsidiaries until the end of December 15, 2024

Dari tabel hasil penilaian (*assessment*) penerapan GCG PI *Group* dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir 2020 sd 2022 dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika perolehan skor GCG tahun buku 2022 dibandingkan dengan perolehan skor GCG tahun buku 2021, seluruh entitas mengalami peningkatan skor.
2. Jika perolehan skor GCG tahun buku 2022 dibandingkan dengan perolehan skor GCG tahun buku 2020, maka terdapat 10 (sepuluh) entitas mengalami peningkatan skor dan terdapat 1 (satu) entitas mengalami penurunan skor, yaitu PT Rekayasa Industri.

Pada tahun 2024, PI *Group* melakukan evaluasi *(review)* penerapan GCG. Evaluasi *(review)* bertujuan untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG setelah penilaian *(assessment)* tahun buku 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023, meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Hasil evaluasi oleh seluruh entitas PI *Group* dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian (*assessment*) penerapan GCG PI *Group* tahun buku 2022 secara umum mengalami peningkatan skor GCG jika dibandingkan dengan perolehan skor GCG tahun buku 2020 dan 2021.

From the assessment results table of the implementation of GCG at PI Group over the past three fiscal years (2020 to 2022), the following conclusions can be drawn:

1. When comparing the GCG score for the 2022 fiscal year with the GCG score for the 2021 fiscal year, all entities experienced an increase in their scores.
2. When comparing the GCG score for the 2022 fiscal year with the GCG score for the 2020 fiscal year, 10 (ten) entities experienced an increase in their scores, while 1 (one) entity experienced a decrease in its score, namely PT Rekayasa Industri.

In 2024, PI Group conducted an evaluation (review) of the implementation of GCG. The evaluation (review) aimed to describe the follow-up to the implementation and application of GCG after the assessment (assessment) for the 2022 fiscal year conducted in 2023, including an evaluation of the assessment results and follow-up on recommendations for improvement.

The results of the evaluation by all PI Group entities can be described as follows:

1. The assessment results of the implementation of GCG at the PI Group for the 2022 fiscal year generally showed an increase in GCG scores compared to the GCG scores achieved in the 2020 and 2021 fiscal years.

2. Hasil penilaian (*assessment*) penerapan GCG PI *Group* tahun buku 2022 terdapat 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) rekomendasi. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut yaitu:
   a. 450 (empat ratus lima puluh) rekomendasi (94%) telah selesai dan sesuai dengan rekomendasi (*closed*);
   b. 28 (dua puluh delapan) rekomendasi (5,8%) dalam proses penyelesaian *(in progress*),
   c. 1 (satu) rekomendasi (0,2%) belum ditindaklanjuti (*open*).

EVALUASI PENERAPAN GCG ENTITAS INDUK/PTPI

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 25 (dua puluh lima) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:
1. 24 (dua puluh empat) rekomendasi (96%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
2. 1 (satu) rekomendasi (4%) dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
3. Tidak ada rekomendasi (0%) yang belum ditindaklanjuti (*open*).

EVALUASI PENERAPAN GCG ANAK PERUSAHAAN/ ENTITAS ANAK

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 di masing-masing Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

EVALUASI PENERAPAN GCG ANAK PERUSAHAAN

1. PT Petrokimia Gresik

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 17 (tujuh belas) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:
   a. 17 (tujuh belas) rekomendasi (100%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
   b. Tidak terdapat rekomendasi dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
   c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum/tidak dapat ditindaklanjuti (*open*).

2. PT Pupuk Kujang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:
   a. 31 (tiga puluh satu) rekomendasi (97%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
   b. 1 (satu) rekomendasi (3%) dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
   c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum/tidak dapat ditindaklanjuti (*open*).

2. The results of the assessment of the implementation of GCG at PI Group for the 2022 fiscal year showed 479 (four hundred and seventy-nine) recommendations. The follow-up actions on these recommendations are as follows:
   a. 450 (four hundred and fifty) recommendations (94%) have been completed and are in accordance with the recommendations (closed);
   b. 28 (twenty-eight) recommendations (5.8%) are in progress (in progress),
   c. 1 (one) recommendation (0.2%) has not been followed up (open).

EVALUATION OF GCG IMPLEMENTATION BY THE PARENT ENTITY/PTPI

The results of the evaluation of the follow-up on 25 (twenty-five) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:
1. 24 (twenty-four) recommendations (96%) have been completed (closed);
2. 1 (one) recommendation (4%) is in progress, and
3. No recommendations (0%) remain unaddressed (open).

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION OF SUBSIDIARIES/SUBSIDIARY ENTITIES

The evaluation results of the follow-up to the assessment recommendations for the 2022 fiscal year at each Subsidiary are as follows:

EVALUATION OF GCG IMPLEMENTATION IN SUBSIDIARIES

1. PT Petrokimia Gresik

The results of the evaluation of the follow-up to 17 (seventeen) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:
   a. 17 (seventeen) recommendations (100%) have been followed up (closed);
   b. There are no recommendations in the process of completion (in progress), and
   c. There are no recommendations that have not been/cannot be followed up (open).

2. PT Pupuk Kujang

The results of the evaluation of the follow-up of 32 (thirty-two) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:
   a. 31 (thirty-one) recommendations (97%) have been completed (closed);
   b. 1 (one) recommendation (3%) is in progress (in progress), and
   c. There are no recommendations that have not been or cannot be followed up (open).

3. PT Pupuk Kalimantan Timur

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 41 (empat puluh satu) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:

a. 41 (empat puluh satu) rekomendasi (100%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
b. Tidak terdapat rekomendasi dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum/tidak dapat ditindaklanjuti (*open*).

4. PT Pupuk Iskandar Muda

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 44 (empat puluh empat) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:

a. 44 (empat puluh empat) rekomendasi (100%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
b. Tidak terdapat rekomendasi dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum/tidak dapat ditindaklanjuti (*open*).

5. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:

a. 31 (tiga puluh satu) rekomendasi (94%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
b. 2 (dua) rekomendasi (6%) dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum/tidak dapat ditindaklanjuti (*open)*

6. PT Rekayasa Industri

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 36 (tiga puluh enam) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:

a. 34 (tiga puluh empat) rekomendasi (94%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
b. 2 (dua) rekomendasi (6%) dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum/tidak dapat ditindaklanjuti (*open*).

7. PT Pupuk Indonesia Niaga

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 46 (empat puluh enam) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:

a. 39 (tiga puluh sembilan) rekomendasi (87%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
b. 6 (enam) rekomendasi (13%) dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum/tidak dapat ditindaklanjuti (*open*).

3. PT Pupuk Kalimantan Timur

The results of the evaluation of the follow-up to 41 (forty-one) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:

a. 41 (forty-one) recommendations (100%) have been followed up (closed);
b. There are no recommendations in the process of being completed (in progress), and
c. There are no recommendations that have not been/cannot be followed up (open).

4. PT Pupuk Iskandar Muda

The results of the evaluation of the follow-up of 44 (forty-four) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:

a. 44 (forty-four) recommendations (100%) have been followed up (closed);
b. There are no recommendations in the process of being resolved (in progress), and
c. There are no recommendations that have not been/cannot be followed up (open).

5. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

The results of the evaluation of the follow-up of 33 (thirty-three) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:

a. 31 (thirty-one) recommendations (94%) have been completed (closed);
b. 2 (two) recommendations (6%) are in progress, and
c. There are no recommendations that have not been/cannot be followed up (open)

6. PT Rekayasa Industri

The results of the evaluation of the follow-up of 36 (thirty-six) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:

a. 34 (thirty-four) recommendations (94%) have been followed up (closed);
b. 2 (two) recommendations (6%) are in progress (in progress), and
c. There are no recommendations that have not been followed up or cannot be followed up (open).

7. PT Pupuk Indonesia Niaga

The results of the evaluation of the implementation of 46 (forty-six) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:

a. 39 (thirty-nine) recommendations (87%) have been completed (closed);
b. 6 (six) recommendations (13%) are in progress (in progress), and
c. There are no recommendations that have not been or cannot be followed up (open).

8. PT Pupuk Indonesia Logistik

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 74 (tujuh puluh empat) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:

a. 74 (tujuh puluh empat) rekomendasi (100%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
b. Tidak terdapat rekomendasi dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum/tidak dapat ditindaklanjuti (*open*).

9. PT Pupuk Indonesia Utilitas

a. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 60 (enam puluh) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:
b. 55 (lima puluh lima) rekomendasi (92%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
c. 5 (lima) rekomendasi (8%) dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
d. Tidak terdapat rekomendasi yang belum/tidak dapat ditindaklanjuti (*open*).

10. PT Pupuk Indonesia Pangan

a. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut sebanyak 72 (tujuh puluh dua) rekomendasi hasil penilaian (*assessment*) tahun buku 2022 yaitu:
b. 60 (enam puluh) rekomendasi (83%) telah selesai ditindaklanjuti (*closed*);
c. 11 (sebelas) rekomendasi (15%) dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
d. 1 (satu) rekomendasi (1%) yang belum ditindaklanjuti (*open*).

Selanjutnya terhadap 28 (dua puluh delapan) AoI yang berstatus *In Progress* dan 1 (satu) AoI yang berstatus *Open*, maka dilakukan kembali kegiatan klinikal *monitoring* tindak lanjut AoI dengan target seluruh AoI GCG akan selesai sebelum pelaksanaan GCG *Assessment* PI *Group* Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

AREA PENGEMBANGAN DAN REALISASI PERUSAHAAN

Realisasi Rekomendasi/*Area of Improvement* (AoI) Pengembangan hasil GCG *Assessment* telah disampaikan pada uraian di atas di masing-masing Entitas.

PENILAIAN MELALUI PROGRAM LEMBAGA RISET/ PEMERINGKAT

Sejak tahun 2018, Perusahaan bersama 3 (tiga) Entitas Anak Perusahaan yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang meningkatkan level penilaian penerapan GCG melalui inisiasi penilaian tambahan terhadap penerapan GCG melalui keikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index*

8. PT Pupuk Indonesia Logistik

The results of the evaluation of the follow-up to 74 (seventy-four) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:

a. 74 (seventy-four) recommendations (100%) have been followed up (closed);
b. There are no recommendations in the process of being resolved (in progress), and
c. There are no recommendations that have not been/cannot be followed up (open).

9. PT Pupuk Indonesia Utilitas

a. The results of the evaluation of the follow-up of 60 (sixty) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:
b. 55 (fifty-five) recommendations (92%) have been fully implemented (closed);
c. 5 (five) recommendations (8%) are in progress, and
d. There are no recommendations that have not been/cannot be followed up (open).

10. PT Pupuk Indonesia Pangan

a. The results of the evaluation of the follow-up of 72 (seventy-two) recommendations from the assessment for the 2022 fiscal year are as follows:
b. 60 (sixty) recommendations (83%) have been completed (closed);
c. 11 (eleven) recommendations (15%) are in progress, and
d. 1 (one) recommendation (1%) has not been followed up (open).

Furthermore, for the 28 AoIs with an "In Progress" status and 1 AoI with an "Open" status, clinical monitoring activities for the follow-up of AoIs will be conducted again, with the target that all GCG AoIs will be completed before the implementation of the GCG Assessment for the PI Group for the 2024 fiscal year, which will be conducted in 2025.

COMPANY DEVELOPMENT AND REALIZATION AREA

The realization of recommendations/areas of improvement (AoI) for the development of GCG assessment results has been presented in the description above for each entity.

ASSESSMENT THROUGH THE RESEARCH/RATING INSTITUTE PROGRAM

Since 2018, the Company together with 3 (three) Subsidiary Entities namely PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang have increased the level of assessment of GCG implementation by initiating additional assessments of GCG implementation through participation in research programs and Corporate Governance Perception rankings. Index (CGPI) organized

(CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA. Pada penilaian kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024 PT Pupuk Kujang juga ikut dalam pelaksanaan penilaian tersebut.

Metode Penilaian

Metode penilaian CGPI terdiri dari 3 (tiga) tahapan penilaian yang meliputi *self-assessment*, sistem dokumentasi, dan observasi.

1. *Self-assessment*
   Merupakan penilaian mandiri oleh perusahaan mengenai kualitas pelaksanaan GCG di lingkup perusahaan. Pada tahapan *self-assessment* perusahaan menetapkan responden sesuai yang dipersyaratkan untuk mengisi kuesioner penilaian GCG. Daftar responden terdiri dari 2 (dua) kategori responden yakni responden internal dan responden eksternal.
2. Sistem Dokumentasi
   a. Kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan penilaian dengan menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema penilaian;
   b. Pengisian data perusahaan (data isian) yang menyajikan dokumen tentang informasi-informasi dasar perusahaan.
3. Observasi
   Tahapan akhir penilaian berupa peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian. Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrumen penilaian melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

Aspek dan indikator penilaian CGPI terdiri dari:

1. Aspek Struktur Tata Kelola Penilaian atas kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan dalam mengelola perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi para Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip Tata Kelola.
2. Aspek Proses Tata Kelola Penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme yang dimiliki perusahaan dalam mengelola perusahaan guna menciptakan nilai bagi para Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip Tata Kelola.
3. Aspek Hasil Tata Kelola Hasil Tata Kelola menggambarkan penilaian terhadap luaran, kualitas luaran, dampak dan manfaat yang dimiliki perusahaan dari proses tata kelola perusahaan yang menciptakan nilai bagi para Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip Tata Kelola. Hasil penilaian CGPI berupa rentang skor yang dicapai oleh perusahaan peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi GCG yang menggunakan istilah "Tepercaya".

by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine. In the 2023 performance assessment which will be carried out in 2024, PT Pupuk Kujang will also take part in implementing the assessment.

Valuation Method

The CGPI assessment method consists of 3 (three) assessment stages which include self-assessment, documentation system, and observation.

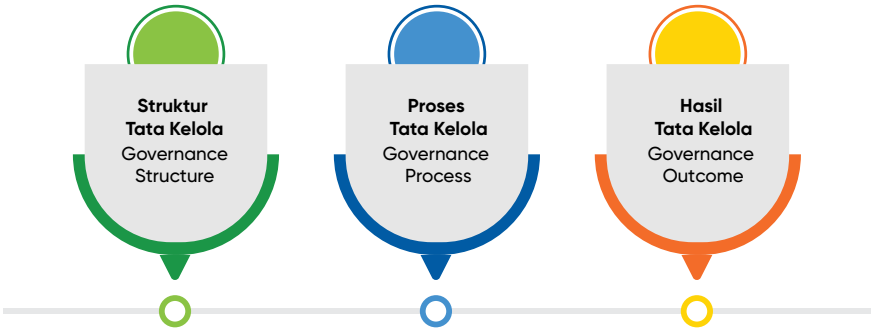
1. Self-assessment
   This is an independent assessment by the company regarding the quality of GCG implementation within the company. At the self-assessment stage, the company determines the respondents as required to fill out the GCG assessment questionnaire. The list of respondents consists of 2 (two) categories of respondents, namely internal respondents and external respondents.
2. Documentation System
   a. Completeness of documents for fulfilling assessment requirements by submitting various documents that the company has in implementing GCG and other documents related to the assessment theme;
   b. Filling in company data (data entry) which presents documents about basic company information.
3. Observation
   The final stage of the assessment is a direct review by the CGPI assessment team to ensure that the process of implementing a series of GCG implementation programs and management efforts is related to the assessment theme. The observation stage was carried out through clarification of the assessment instruments through executive presentations and discussions of company organs.

The CGPI assessment aspects and indicators consist of:

1. Aspects of Governance Structure Assessment of the adequacy of corporate governance structure and infrastructure in managing the company in order to create value for Stakeholders in accordance with Governance principles.
2. Governance Process Aspects Assessment of the effectiveness of the systems and mechanisms the company has in managing the company to create value for Stakeholders in accordance with Governance principles.
3. Aspects of Governance Results Governance Results describe an assessment of the output, quality of output, impact and benefits that the company has from the corporate governance process that creates value for Stakeholders in accordance with Governance principles. The results of the CGPI assessment are in the form of a range of scores achieved by participating companies with a categorization of the level of quality of GCG implementation using the term "Trusted".

ASPEK PENILAIAN CGPI

CGPI ASSESSMENT ASPECT



Rentang Skor Penilaian CGPI
CGPI Assessment Score Range

55–69	"Cukup Tepercaya" "Fairly Trusted"
70–84	"Tepercaya" "Trusted"
85–100	"Sangat Tepercaya" "Most Trusted"

Pihak yang Menilai

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

Assessing Party

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine.

Hasil Penilaian

Rating Result

Skor Penilaian Masing-Masing Kriteria
Assessment Score for Each Criterion

Aspek Penilaian Assessment Aspect	Bobot Weight	Skor Penilaian Assessment Score	
		2024	2023
Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure Aspect	34,73	29,32	28,47
Aspek Proses Tata Kelola Governance Process Aspect	32,13	29,21	28,27
Aspek Hasil Tata Kelola Governance Outcome Aspect	33,14	29,13	29,49
Skor Akhir End Score	100,00	87,66	86,23

Perkembangan Hasil Penilaian CGPI PI *Group*
Development of CGPI PI Group Assessment Results

Tahun Year	Skor Capaian Achievement Score				
	Aspek Struktur Tata kelola Aspects of Governance Structure	**Aspek Proses Tata Kelola** Governance Process Aspects	**Aspek Hasil Tata Kelola** Outcome Aspects of Governance	**Skor Akhir** Final Score	**Kategori** Category
Perusahaan (*Holding*) Company (Holding)					
2024	29,32	29,21	29,13	87,66	Sangat Tepercaya Most Trusted
2023	28,47	28,27	29,49	86,23	Sangat Tepercaya Most Trusted
2022	23,84	32,55	28,89	85,28	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	30,28	30,71	24,15	85,15	Sangat Tepercaya Most Trusted
2020	22,73	30,17	30,47	83,37	Tepercaya Trusted
Entitas Anak Subsidiary					
PT Petrokimia Gresik					
2024	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate CPGI				
2023	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate CPGI				
2022	23,95	32,52	28,78	85,25	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	30,47	30,52	24,13	85,12	Sangat Tepercaya Most Trusted
2020	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate CPGI				
PT Pupuk Kalimantan Timur					
2024	29,87	29,60	29,62	89,09	Sangat Tepercaya Most Trusted
2023	29,20	29,03	30,14	88,37	Sangat Tepercaya Most Trusted
2022	24,52	33,43	29,66	87,61	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	30,70	31,43	24,76	86,89	Sangat Tepercaya Most Trusted
2020	23,57	31,48	31,67	86,72	Sangat Tepercaya Most Trusted
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang					
2024	28,75	28,79	28,70	86,24	Sangat Tepercaya Most Trusted
2023	28,34	28,13	29,21	85,68	Sangat Tepercaya Most Trusted
2022	23,78	32,46	28,77	85,01	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	29,77	30,36	23,79	83,92	Tepercaya Trusted
2020	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate CPGI				

Perkembangan Hasil Penilaian CGPI PI *Group*
Development of CGPI PI Group Assessment Results

Tahun Year	Skor Capaian Achievement Score				
	Aspek Struktur Tata kelola Aspects of Governance Structure	**Aspek Proses Tata Kelola** Governance Process Aspects	**Aspek Hasil Tata Kelola** Outcome Aspects of Governance	**Skor Akhir** Final Score	**Kategori** Category
PT Pupuk Kujang					
2024	27,87	28,25	28,14	84,26	Tepercaya Trusted
2023	27,66	27,43	28,42	83,51	Tepercaya Trusted

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI GCG DAN BENCHMARKING

Sosialisasi dan Internalisasi Prinsip-Prinsip GCG

Untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan GCG kepada seluruh Insan Perusahaan, secara periodik Perusahaan melakukan sosialisasi terkait penerapan prinsipprinsip GCG dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Pedoman Utama GCG kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan baik yang disampaikan secara langsung berbentuk buku, *e-mail* perusahaan, maupun melalui media lainnya yang digunakan oleh Perusahaan.
2. Sosialisasi Pedoman Utama GCG pada *website* perusahaan yang dapat diakses oleh publik.
3. Pemutaran video penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap acara perusahaan baik internal maupun yang mengundang pihak eksternal.
4. Sosialisasi prinsip-prinsip GCG melalui berbagai media seperti *standing banner,* poster, *desktop* laptop/ PC kantor, TV kantor, Majalah SPIN, media sosial Perusahaan, dan lain-lain.
5. Penandatanganan Pakta Integritas melalui aplikasi PIONIR (Pakta Integritas *Online* Terintegrasi) yang diakses melalui link https://pionir.pupuk-indonesia.com/.
6. Sosialisasi Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan, Kebijakan Anti Gratifikasi, Kebijakan Anti-*Fraud* PTPI kepada *stakeholders*.

Peta Jalan dan Rencana Pengembangan GCG

Sebagai upaya pengembangan berkelanjutan serta sejalan dengan pengesahan *Roadmap* GCG 2020–2024, maka Perusahaan menetapkan sasaran, strategi, kebijakan terkait dengan pengembangan Manajemen Kepatuhan untuk Tahun 2020–2024 yang di dalamnya meliputi implementasi GCG.

IMPROVING THE QUALITY OF GCG IMPLEMENTATION AND BENCHMARKING

GCG Roadmap and Development Plan

To provide an understanding of the implementation of GCG to all Company Personnel, the Company periodically conducts outreach regarding the implementation of GCG principles by carrying out the following activities:

1. Submission of the Main GCG Guidelines to the Board of Commissioners, Directors, and all employees, whether delivered directly in the form of a book, company e-mail, or through other media used by the Company.
2. Socialization of the Main GCG Guidelines on the company website which can be accessed by the public.
3. Screening of videos on the application of GCG principles at every company event, both internal and inviting to external parties.
4. Socialization of GCG principles through various media such as standing banners, posters, desktop laptops/ office PCs, office TV, SPIN Magazine, Company social media, etc.
5. Signing of the Integrity Pact via the PIONIR (Integrated Online Integrity Pact) application which is accessed via the link https://pionir.pupuk-indonesia.com/.
6. Socialization of Anti-Bribery Policies and Commitments, Anti-Gratification Policies, Anti-Fraud Policies of PTPI to stakeholders.

GCG Roadmap and Development Plan

As a sustainable development effort and in line with the ratification of the 2020–2024 GCG Roadmap, the Company has set targets, strategies and policies related to the development of Compliance Management for 2020–2024 which includes the implementation of GCG.

Perkembangan Penerapan GCG berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020–2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Development of GCG Implementation based on the Company's Long Term Plan 2020–2024 as in the following table:

No.	Sasaran Target	Strategi Strategy	Kebijakan Policy
1	Terbangunnya Kapabilitas Organisasi dan SDM Manajemen Kepatuhan. Building Organizational Capabilities and Human Capitals for Compliance Management	Membangun Kapabilitas Organisasi dan SDM Manajemen Kepatuhan melalui kerja sama dengan lembaga sertifikasi Manajemen Kepatuhan yang mumpuni. Building Compliance Management Organizational and HC Capabilities through collaboration with qualified Compliance Management certification institutions.	Penguatan kebijakan Manajemen Kepatuhan yang mendukung perkembangan organisasi. Pengembangan kompetensi SDM Manajemen Kepatuhan PI *Group* bekerja sama dengan lembaga sertifikasi Manajemen Kepatuhan yang mumpuni. Strengthening Compliance Management policies that support organizational development. Development of PI Group's Compliance Management HC competency in collaboration with qualified Compliance Management certification institutions.
2	Terselenggaranya Manajemen Kepatuhan berbasis teknologi informasi yang semakin efektif Implementing increasingly effective information technology-based Compliance Management	Membangun Manajemen Kepatuhan berbasis teknologi informasi dengan mengadopsi pengetahuan dan praktik terbaik (*best practice*). Building information technology-based Compliance Management by adopting knowledge and best practices.	Pengembangan Manajemen Kepatuhan yang komprehensif dan mutakhir. Pengelolaan Manajemen Kepatuhan berbasis teknologi informasi yang mampu mencegah dan merespons penyimpangan dalam operasional bisnis Perusahaan. Development of comprehensive and up-to-date Compliance Management. Information technology-based Compliance Management that is able to prevent and respond to irregularities in the Company's business operations
3	Terbangunnya Budaya Kepatuhan Perusahaan yang berkelanjutan. Building a sustainable Company Compliance Culture.	• Meningkatkan budaya kepatuhan secara berkelanjutan. Continuously improve compliance culture. • Mengukur efektivitas penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan dengan menggunakan metode yang tepat dan melibatkan asesor yang mumpuni. Pemantauan, pelaporan, dan pengukuran penerapan sistem manajemen kepatuhan PI *Group* secara periodik. Measuring the effectiveness of implementing the Compliance Management System by using appropriate methods and involving qualified assessors. Monitoring, reporting and measuring the implementation of the PI Group compliance management system periodically.	• Penyusunan peraturan pengembangan budaya kepatuhan yang tepat. Preparation of regulations for developing an appropriate compliance culture. • Penerapan budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Implementation of a sustainable compliance culture. • Pemantauan, pelaporan, dan pengukuran penerapan sistem manajemen kepatuhan PI *Group* secara periodik. Monitoring, reporting and measuring the implementation of the PI Group compliance management system periodically.

STRUKTUR DAN PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Struktur tersebut dibentuk dengan alasan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG.

Sedangkan proses tata kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses tersebut mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, prosedur tetap, piagam, dokumen, hingga pemberlakuan aturan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND PROCESS

The governance structure is an organ or device owned by the Company in order to improve the implementation of GCG. This structure was formed for reasons of compliance with applicable laws and regulations as well as internal needs in order to improve the implementation of GCG.

Meanwhile, the governance process is a series of processes, habits, rules and institutions that influence the management of the Company as a whole. This process includes the rules and regulations that apply to the Company, standing procedures, charters, documents, and the implementation of rules that regulate relationships between organs or devices.

Struktur tata kelola perusahaan terdiri atas organ-organ utama yang memiliki peran dalam menunjang pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Sebagai badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Perseroan terdiri atas tiga organ utama: Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Masing-masing memiliki peran penting dalam penerapan GCG sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masingmasing. Oleh karena itu, ketiga organ-organ tersebut harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

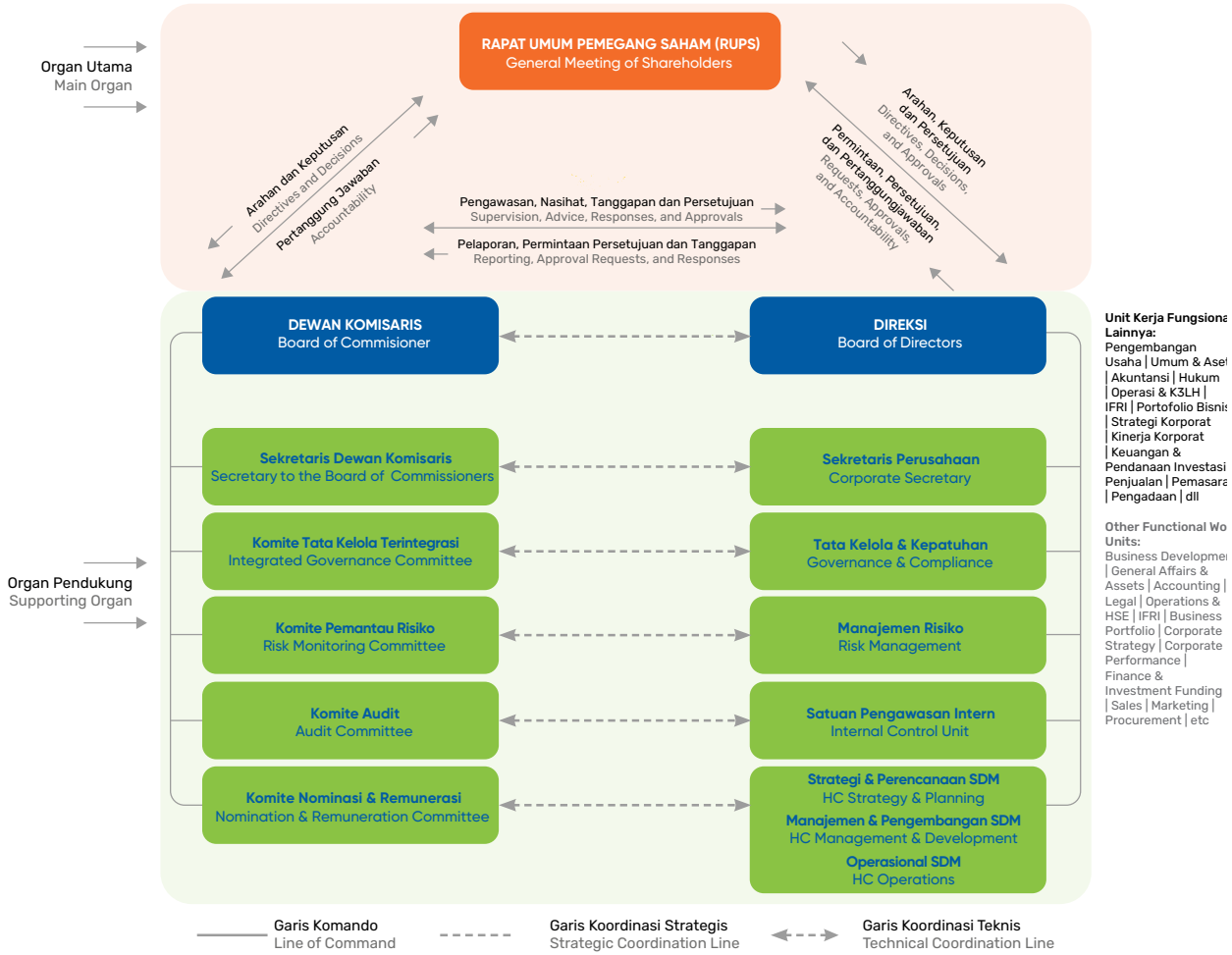
Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*: Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

The corporate governance structure consists of main organs that have a role in supporting the management of the Company in accordance with governance principles. As a business entity in the form of a Limited Liability Company which was established and regulated in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's governance structure consists of three main organs: General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Directors.

Each has an important role in implementing GCG in accordance with their respective functions, duties and responsibilities. Therefore, these three organs must have the same perception of the Company's vision, mission and values.

The Limited Liability Company management system in Indonesia adopts a 2 (two) body model or two tier system: Board of Commissioners and Directors with clear authority and responsibilities in accordance with their respective functions as mandated in the regulations and legislation and the Articles of Association.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PTPI
PTPI Corporate Governance Structure



Dalam mendukung peran organ utama tata kelola, Perusahaan memiliki organ pendukung Dewan Komisaris, yakni Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi & Remunerasi. Untuk Direksi, didukung oleh organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Tata Kelola & Kepatuhan, dan Satuan Pengawasan Intern.

In supporting the role of the main governance organ, the Company has supporting organs to the Board of Commissioners, namely the Secretary to the Board of Commissioners, Integrated Governance Committee, Risk Monitoring Committee, Audit Committee, and Nomination & Remuneration Committee. For the Board of Directors, it is supported by supporting organs, namely Corporate Secretary, Risk Management, Governance & Compliance, and Internal Audit Unit.

Agar struktur tata kelola dapat berjalan dengan baik dan memiliki batasan tanggung jawab masing-masing, diperlukan proses tata kelola yang dioperasikan melalui perangkat kebijakan atau soft structure. Hal itu mencakup peraturan dan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dan serangkaian aturan internal yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi Perusahaan berbasis pengelolaan yang akuntabel.

In order for the governance structure to run well and have individual boundaries of responsibility, a governance process is needed that is operated through policy tools or soft structures. This includes the regulations and legislation previously explained, and a series of internal rules which are expected to create an organizational environment for the Company based on accountable management.

Perusahaan menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan penerapan GCG, antara lain Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha perusahaan, Pedoman Fungsional, Prosedur, Instruksi Kerja dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mendukung penerapan tata kelola secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan-kebijakan ini secara berkala dimutakhirkan agar selaras dengan perkembangan bisnis Perusahaan serta perubahan peraturan perundang-undangan.

The company has established several policies related to the implementation of GCG, including Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Board Manual, Code of Group Governance, Functional Guidelines, Procedures, Work Instructions and other policies to support implementation. governance continuously and consistently. These policies are regularly updated to be in line with the Company's business developments and changes in statutory regulations.



Dokumen Sistem Manajemen Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance System Documents Managements

No	Soft Structure GCG	Pertama Diterbitkan First Published	Terakhir Dimutakhirkan Last Updated
1	Anggaran Dasar Perusahaan Company Articles of Association	3 Januari 1970 January 3, 1970	12 Oktober 2020 October 12, 2020
2	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Code of Corporate Governance	5 November 2012 November 5, 2012	16 Februari 2022 February 16, 2022
3	Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Code of Conduct	5 November 2012 November 5, 2012	20 Desember 2024 December 20, 2024
4	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines (Board Manual)	5 November 2012 November 5, 2012	20 Desember 2024 December 20, 2024
5	Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*) Code of Group Governance	2 Juli 2012 July 2, 2012	30 Desember 2021 December 30, 2021
6	Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Guidelines for Reporting Official Assets	23 September 2015 September 23, 2015	25 Juli 2023 July 25, 2023
7	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Whistle Blowing System Guidelines	23 Desember 2013 December 23, 2013	13 Juli 2023 July 13, 2023
8	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control Guidelines	30 Juni 2015 June 30, 2015	22 November 2021 November 22, 2021
9	Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan Guidelines for Handling Conflicts of Interest	30 September 2015 September 30, 2015	27 Desember 2021 December 27, 2021
10	Pedoman Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management Guidelines	14 Agustus 2019 August 14, 2019	9 Desember 2021 December 9, 2021
11	Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan (*Compliance Management System*) Compliance Management System Guidelines	30 Desember 2021 December 30, 2021	-
12	Pedoman Sistem Pengendalian Fraud (*Fraud Control System*) Fraud Control System Guidelines	28 April 2021 April 28, 2021	4 September 2023 September 4, 2023
13	Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) Integrated Risk Management Guidelines	4 Februari 2013 February 4, 2013	29 Mei 2023 May 29, 2023
14	Pedoman Umum Audit Internal General Internal Audit Guidelines	29 Desember 2017 December 29, 2017	24 Februari 2021 February 24, 2021
15	Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko Risk-based Internal Audit Guidelines	29 Desember 2017 December 29, 2017	-
16	Pedoman Audit Operasional Operational Audit Guidelines	29 Desember 2017 December 29, 2017	-
17	Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perusahaan Company Intern Control System Guidelines	23 Februari 2016 February 23, 2016	29 Desember 2017 December 29, 2017
18	Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Guidelines for the Company's Internal Control System	23 Februari 2016 February 23, 2016	29 Desember 2017 December 29, 2017
19	Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (*Company Manual*) Integrated Management System Guidelines (Company Manual)	8 September 2017 September 8, 2017	8 September 2017 September 8, 2017
20	Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Guidelines	8 September 2017 September 8, 2017	8 September 2017 September 8, 2017
21	Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha Business Continuity Management System Guidelines	23 Juni 2022 June 23, 2022	-
22	Prosedur Pelaporan Kejadian Fraud kepada Penegak Hukum Procedures for Reporting Fraud Incidents to Law Enforcement Officers	21 April 2021 April 21, 2021	-
23	Prosedur Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Official's Assets Reporting Procedure	25 November 2021 November 25, 2021	02 Oktober 2023 October 02, 2023
24	Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Whistleblowing System Management Procedures	8 September 2017 September 8, 2017	13 Juli 2023 July 13,2023

Dokumen Sistem Manajemen Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance System Documents Managements

No	Soft Structure GCG	Pertama Diterbitkan First Published	Terakhir Dimutakhirkan Last Updated
25	Prosedur Pengelolaan Risiko *Fraud* Fraud Risk Management Procedures	14 Agustus 2019 August 14, 2019	28 Desember 2021 December 28, 2021
26	Prosedur Pengelolaan Laporan Gratifikasi Gratification Report Management Procedure	8 September 2017 September 8, 2017	25 November 2021 November 25, 2021
27	Prosedur Pemberian Penghargaan atas Pelaporan Pelanggaran Melalui WBS Procedure for Awarding the Reporting of Violations through WBS	26 September 2022 September 26, 2022	-
28	Prosedur Pelaksanaan GCG *Self Assessment* GCG Self Assessment Implementation Procedure	8 September 2017 September 8, 2017	-
29	Prosedur Audit Internal Internal Audit Procedure	29 Desember 2017 December 29, 2017	24 Feburari 2021 February 24, 2021
30	Prosedur Audit Khusus Special Audit Procedure	29 Desember 2017 December 29, 2017	24 Feburari 2021 February 24, 2021
31	Prosedur Penerapan Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR) Procedure for Implementation of Early Risk Detection System (SDDR)	8 September 2017 September 8, 2017	6 Januari 2023 January 6, 2023
32	Prosedur Penyusunan Kajian Risiko Aksi Korporasi Procedure for Preparation of Corporate Action Risk Assessment	8 September 2017 September 8, 2017	16 Maret 2022 March 16, 2022
33	Prosedur Penyusunan, Pelaporan, dan Reviu Risiko Utama Procedure for Preparation, Reporting, and Review of Major Risks	8 September 2017 September 8, 2017	22 April 2022 April 22, 2022
34	Prosedur Penyusunan, Pelaporan, dan Reviu RCSA Non Risiko Utama Procedure for Preparation, Reporting, and Review of RCSA Non-Major Risks	10 Oktober 2028 October 10, 2028	6 April 2022 April 6, 2022
35	Instruksi Kerja Analisis Kriteria Dampak dan Kemungkinan Risiko Work Instruction for Risk Impact and Likelihood Criteria Analysis	27 September 2018 September 27, 2018	-
36	Instruksi Kerja Penyusunan Indikator Risiko Utama (*Key Risk Indicator*) Key Risk Indicator Preparation Work Instruction	2 November 2017 November 2, 2017	6 Januari 2023 January 6, 2023
37	Instruksi Kerja Penilaian Efektivitas atas Existing Control (*Existing Control Test of Effectiveneness*) Existing Control Test of Effectiveneness Work Instruction	1 Februari 2023 February 1, 2023	-
38	Instruksi Kerja Opsi Perlakuan Risiko (*Risk Treatment Options*) Risk Treatment Options Work Instruction	1 Februari 2023 February 1, 2023	-
39	Instruksi Kerja Analisis Kriteria Dampak dan Kemungkinan, dan Opsi Perlakuan Risiko *Upside Risk* Work Instruction for Impact and Likelihood Criteria Analysis, and Upside Risk Treatment Options	1 Februari 2023 February 1, 2023	-
40	Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit *Charter*) Internal Audit Charter	29 April 2015 April 29, 2015	3 Januari 2023 January 3, 2023
41	Piagam Komite Pemantauan Manajemen Risiko (PMR) Charter of GCG and Risk Management Monitoring (PMR) Committee	23 Februari 2015 February 23, 2015	29 Februari 2024 December 20, 2019

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri BUMN bertindak selaku RUPS Persero dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara.

PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Pemegang saham PTPI hingga entitas pemilik akhir per tanggal 31 Desember 2024 adalah Pemerintah Republik Indonesia.

JENIS-JENIS RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 (dua) jenis RUPS di Perusahaan, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan. Pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS Tahunan dibahas laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan, laporan tahunan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukan Akuntan Publik, serta hal lainnya demi kepentingan Perusahaan.

RUPS Lainnya

RUPS Lainnya biasa disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

RUPS Tahunan dan RUPSLB memiliki wewenang tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perusahaan. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan kebijakan, peraturan, surat keputusan, serta anggaran dasar Perusahaan yang diuraikan sebagai berikut:

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's governing body with authority not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limitations specified in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the Company's Articles of Association. Pursuant to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs), the Minister of SOEs acts as the GMS of the SOE in cases where all shares of the SOE are owned by the State.

MAIN/CONTROLLING SHAREHOLDER

The shareholder of PTPI up to the final owner entity as of December 31, 2024 is the Government of the Republic of Indonesia.

TYPES OF GMS

Based on the Company's Articles of Association, there are 2 (two) types of GMS in the Company, namely Annual GMS and Other GMS.

Annual GMS

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) is held to discuss the Company's annual report and annual calculations. Implementation is no later than 6 (six) months after the financial year. At the Annual GMS, the Directors' report regarding annual calculations, annual reports on the condition and running of the Company, plans for using profits and the amount of dividends paid, requests for the appointment of a Public Accountant, and other matters in the interests of the Company are discussed.

Other GMS

Other GMS, usually called Extraordinary GMS (EGMS) can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine matters that are not carried out at the Annual GMS.

The Annual GMS and EGMS have the highest authority in the corporate governance structure and are the main forum for Shareholders to exercise their rights and authority over the Company's management. The GMS is held based on policies, regulations, decision letters and the Company's articles of association which are described as follows:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI RUPS KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perusahaan menyediakan informasi bagi publik dan khususnya Pemegang Saham yang dapat dilakukan melalui sejumlah media, antara lain:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan media penyampaian laporan dan informasi yang memungkinkan Pemegang Saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
2. Media Elektronik, yaitu situs informasi dengan alamat www.pupuk-indonesia.com;
3. Media Sosial Perusahaan, yaitu dengan alamat:
   a. X : @pupuk_indonesia
   b. Instagram : pt.pupukindonesia
   c. Facebook : @Pupuk.Indonesia
4. Laporan Tahunan, yaitu sarana informasi yang dipublikasikan sebagai laporan kinerja pada setiap tahun buku.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN BUKU 2024

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2024

Hari/Tanggal Day/Date	Selasa/30 Januari 2024 Tuesday/January 30, 2024
Waktu Time	10.37 WIB 10.37 AM
Tempat Place	Hotel Pullman, Jakarta
Kehadiran Attendance	1. Pemegang Saham Perseroan: Ibu Zuryati Simbolon selaku Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk. 2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan a. Rahmad Pribadi Selaku Direktur Utama; b. Bob Indiarto selaku Direktur Produksi; c. Wono Budi Tjahyono selaku Direktur Keuangan; d. Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Transformasi Bisnis; e. Tina T. Kemala Intan selaku Direktur Sumber Daya Manusia; f. Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Pemasaran; g. Jamsaton Nababan selaku Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha; h. Ninis Kesuma Adriani selaku Direktur Manajemen Risiko; 3. Dewan Komisaris Perseroan a. Darmin Nasution selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen b. Anhar Adel selaku Komisaris Independen c. Mustoha Iskandar selaku Komisaris Independen d. Farhat Brachma selaku Komisaris e. Ari Dwipayana selaku Komisars

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Company Articles of Association.

INFORMATION DISCLOSURE AND SUBMISSION OF GMS INFORMATION TO SHAREHOLDERS

The Company provides information to the public and especially Shareholders which can be done through a number of media, including:

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is a medium for submitting reports and information that allows Shareholders to participate in decision making;
2. Electronic Media, namely an information site with the address www.pupuk-indonesia.com;
3. Company Social Media, namely at the address:
   a. X : @pupuk_indonesia
   b. Instagram : pt. pupukindonesia
   c. Facebook : @Pupuk.Indonesia
4. Annual Report, which is a means of information published as a performance report for each financial year.

ORGANIZING THE 2024 FISCAL YEAR GMS

Annual GMS

1. Annual GMS Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the 2024 Financial Year

	1. Shareholders of the Company: Ms. Zuryati Simbolon as Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry. 2. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company a. Rahmad Pribadi as President Director; b. Bob Indiarto as Production Director; c. Wono Budi Tjahyono as Finance Director; d. Panji Winanteya Ruky as Business Transformation Director; e. Tina T. Kemala Intan as Human Capitals Director; f. Tri Wahyudi Saleh as Marketing Director; g. Jamsaton Nababan as Portfolio and Business Development Director; h. Ninis Kesuma Adriani as Risk Management Director; 3. Board of Commissioners of the Company a. Darmin Nasution as President Commissioner concurrently Independent Commissioner; b. Anhar Adel as Independent Commissioner; c. Mustoha Iskandar as Independent Commissioner; d. Farhat Brachma as Commissioner; e. Ari Dwipayana as Commissioner.
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Party in Vote Counting	Notaris Notary

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. Rincian hasilnya adalah sebagai berikut:

The results of the GMS Decision have been stated in Notarial Deed No. 05 dated January 30, 2024 made before Lumassia, notary in Jakarta, Central Jakarta. The details of the results are as follows:

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris PTPI Tahun 2024 **Meeting Agenda 1:** Approval of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) and the 2024 Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners of PTPI	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris PTPI tahun 2024. Approved the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) and the 2024 Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners of PTPI.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2024 Already realized through Notarial Deed No. 05 dated January 30, 2024
Mata Acara 2: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PTPI Tahun 2024 **Meeting Agenda 2:** Approval of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) of PTPI for 2024	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PTPI Tahun 2024 Approved the 2024 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Programs (RKA-TJSL) of PTPI	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2024 Already realized through Notarial Deed No. 05 dated January 30, 2024
Mata Acara 3: Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024 **Meeting Agenda 3:** Establishment of the Annual Management Contract containing the Financial Performance Indicators (KPI) targets of the Board of Directors as a collective body and the Board of Commissioners for 2024	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target Keu Performance Indicators (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024 Establishing the Annual Management Contract containing the collective Financial Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2024	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2024 Already realized through Notarial Deed No. 05 dated January 30, 2024
Mata Acara 4: Persetujuan Penugasan Pemerintah (PSO) melalui Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024 **Meeting Agenda 4:** Approval of Government Assignment (PSO) through the Minister of Agriculture's Decision for the distribution of subsidized fertilizer in 2024	Menyetujui Penugasan Pemerintah (PSO) melalui Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024 Approving the Government Assignment (PSO) through a Decree of the Minister of Agriculture for the distribution of subsidized fertilizer in 2024	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2024 Already realized through Notarial Deed No. 05 dated January 30, 2024

2. RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023

Hari/Tanggal Day/Date	Senin, 22 Juli 2024 Monday July 22, 2024
Waktu Time	09.17 WIB 09.17 AM
Tempat Place	Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Ministry of SOEs Office, Jakarta
Kehadiran Attendance	1. Pemegang Saham Perseroan: Ibu Zuryati Simbolon selaku Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk. 2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan a. Rahmad Pribadi Selaku Direktur Utama; b. Gusrizal selaku Wakil Direktur Utama; c. Bob Indiarto selaku Direktur Produksi; d. Wono Budi Tjahyono selaku Direktur Keuangan; e. Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Transformasi Bisnis; f. Tina T. Kemala Intan selaku Direktur Sumber Daya Manusia; g. Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Pemasaran; h. Jamsaton Nababan selaku Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha; i. Ninis Kesuma Adriani selaku Direktur Manajemen Risiko; 3. Dewan Komisaris Perseroan a. Darmin Nasution selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; b. Anhar Adel selaku Komisaris Independen; c. Mustoha Iskandar selaku Komisaris Independen; d. Riswinandi selaku Komisaris Independen; e. Anwar Sanusi selaku Komisaris; f. Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris; g. Farhat Brachma selaku Komisaris 1. Shareholders of the Company: Ms. Zuryati Simbolon as Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry. 2. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company a. Rahmad Pribadi as President Director; b. Gusrizal as Vice President Director; c. Bob Indiarto as Production Director; d. Wono Budi Tjahyono as Finance Director; e. Panji Winanteya Ruky as Business Transformation Director; f. Tina T. Kemala Intan as Human Capitals Director; g. Tri Wahyudi Saleh as Marketing Director; h. Jamsaton Nababan as Portfolio and Business Development Director; i. Ninis Kesuma Adriani as Risk Management Director; 3. Board of Commissioners of the Company a. Darmin Nasution as President Commissioner concurrently Independent Commissioner; b. Anhar Adel as Independent Commissioner; c. Mustoha Iskandar as Independent Commissioner; d. Riswinandi as Independent Commissioner; e. Anwar Sanusi as Commissioner; f. Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner; g. Farhat Brachma as Commissioner
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Party in Vote Counting	Notaris Notary

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Notaris Lumassia, S.H. No. 05 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. Rincian hasilnya adalah sebagai berikut:

The results of the GMS Decision have been stated in a Deed from Notary Lumassia, S.H. No. 05 dated July 22, 2024, made before Lumassia, S.H., notary in Jakarta, Central Jakarta. The details of the results are as follows:

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Penaan Usaha Mikro dan Usahan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun 2023. **Meeting Agenda 1:** Approval of the Company's Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company, Approval of the Supervisory Board's Audit Report and Approval of the Financial Statements of the Micro and Small Business Development Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023, along with the granting of full discharge and release of liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management of the company and to the Supervisory Board for their supervision of the company during the year 2023..	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00515/2.1025/AU.1/04/1122-4/1/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material"; b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Kompilasi 31 Desember 2023 Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, RIntis & Rekan sebagaiman dimuat dalam laporanya Nomor: N20240405008/DC2/THA/2024 tanggal 5 April 2024, laporan aktivitas dan perubahan aset neto kompilasi dan laporan arus kas kompilasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. 1. Approving the Company's Annual Report and the Supervisory Board's Report for the Fiscal Year 2023. 2. Approving: a. The Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year 2023 ending on December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as stated in their report No. 00515/2.1025/AU. 1/04/1122-4/1/III/2024 dated March 31, 2024, with an opinion of "unqualified, in all material respects"; b. Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ending December 31, 2023, which are part of the Compiled Financial Statements as of December 31, 2023, of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, RIntis & Partners, as stated in their report No. N20240405008/DC2/THA/2024 dated April 5, 2024, the compiled activity report and changes in net assets, and the compiled cash flow statement for the year ended on that date. 3. With the approval of the Company's Annual Report and the Supervisory Board's Audit Report, and the adoption of the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for the fiscal year ended December 31, 2023, the General Meeting of Shareholders hereby grants full discharge and release of liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management of the Company and the supervision of the Company carried out during the 2023 fiscal year, provided that such actions do not constitute criminal offenses and are reflected in the Company's financial statements.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 22 Juli 2024 Already realized through Notarial Deed No. 05 dated July 22, 2024

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 2: Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023. **Meeting Agenda 2:** Approval of the Use of Consolidated Net Profit for the Fiscal Year 2023.	1. Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk sebesar Rp.6.200.780 juta (enam triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebgai berikut: a. sebesar 19,57% (sembilan belas koma lima tujuh persen) atau Rp1.213.402 juta (satu triliun dua ratus tiga belas miliar empat ratus dua juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham; b. Sebesar 80,43% (delapan puluh koma empat tiga persen) atau Rp4.987.378 juta (empat triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan perseroan. 2. Dividen sebesar Rp.1.213.402 juta (satu triliun dua ratus tiga belas miliar empat ratus dua juta rupiah) agar disetor kepada rekening bendahara umum negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan ini dan pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 1. To allocate the current year's profit attributable to the parent entity in the amount of Rp.6,200,780 million (six trillion two hundred billion seven hundred eighty million rupiah) as follows: a. 19.57% (nineteen point five seven percent) or Rp1,213,402 million (one trillion two hundred thirteen billion four hundred two million rupiah) as cash dividends to Shareholders; b. 80.43% (eighty point four three percent) or Rp4,987,378 million (four trillion nine hundred eighty-seven billion three hundred seventy-eight million rupiah) is designated as the company's reserve. 2. A dividend of Rp1,213,402 million (one trillion two hundred thirteen billion four hundred two million rupiah) shall be paid into the state treasury account no later than 1 (one) month after the date of this decision, and its implementation shall be carried out in accordance with applicable laws and regulations.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 22 Juli 2024 Already realized through Notarial Deed No. 05 dated July 22, 2024
Mata Acara 3: Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. **Meeting Agenda 3:** Determination of Salaries/ Honoraria, Benefits, and Allowances for the Fiscal Year 2024, as well as Performance Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for the Fiscal Year 2023 and/ or Long-Term Incentives for the Period 2024-2026, for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, akan ditetapkan secara tersendiri, The determination of salaries/honoraria, facilities, and allowances for the 2024 fiscal year, as well as performance bonuses/incentives/ special incentives for the 2023 fiscal year and/or long-term incentives for the 2024-2026 period, for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, will be determined separately,	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 22 Juli 2024 Already realized through Notarial Deed No. 05 dated July 22, 2024

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 4: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. **Meeting Agenda 4:** Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year 2024 and the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024.	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (dahulu bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (dulu bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dam Rekan), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan. Imbalan jasa audit dan persyaratan launnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 1. Appointing the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto and Partners (formerly known as KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners) as the Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024. 2. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for other periods in the 2024 fiscal year for the purposes and interests of the Company. 3. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the audit fees or other terms and conditions for the Public Accounting Firm, as well as to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto and Partners (formerly known as KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners), for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for the 2024 fiscal year, including determining the audit fees and other terms and conditions for the replacement Public Accounting Firm.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 22 Juli 2024 Already realized through Notarial Deed No. 05 dated July 22, 2024

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI No. SK-53/MBU/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI, memutuskan mengangkat Bapak Riswinandi sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI No. SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PTPI, memutuskan mengangkat:

   a. Bapak Danar Rahmanto sebagai Komisaris Independen;
   b. Bapak Irfan Ahmad Fauzi sebagai Komisaris Independen.

EXTRAORDINARY GMS

Extraordinary GMS

1. The Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, in their capacity as the General Meeting of Shareholders of the State-Owned Company (Persero) PTPI, No. SK-53/MBU/03/2024 dated March 4, 2024, regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Company (Persero) PTPI, decided to appoint Mr. Riswinandi as Independent Commissioner of the Company.
2. The Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, in their capacity as the General Meeting of Shareholders of the State-Owned Company (Persero) PT Pupuk Indonesia, No. SK-188/MBU/07/2024 dated July 22, 2024, regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Company PTPI, decided to appoint:
   a. Mr. Danar Rahmanto as Independent Commissioner;
   b. Mr. Irfan Ahmad Fauzi as Independent Commissioner.

RUPS TAHUN SEBELUMNYA

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2023.

PREVIOUS YEAR'S GMS

Annual GMS

1. Annual GMS Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the 2023 Financial Year.

Hari/Tanggal Day/Date	Kamis, 26 Januari 2023 Thursday, January 26, 2023
Waktu Time	16.08 WIB 4.08 PM
Tempat Place	Kantor Kementerian BUMN Lantai 21 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat Ministry of SOE Office 21st Floor Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Central Jakarta
Kehadiran Attendance	1. Pemegang Saham Perseroan: a. Bapak Pahala Nugraha selaku Wakil Menteri BUMN I; b. Ibu Zuryati Simbolon selaku Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk. 2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan a. Achmad Bakir Pasaman Selaku Direktur Utama; b. Nugroho Christijanto Selaku Wakil Direktur Utama; c. Bob Indiarto selaku Direktur Produksi; d. Wono Budi Tjahyono selaku Direktur Keuangan dan Investasi; e. Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Transformasi Bisnis; f. Tina T Kemala Intan selaku Direktur SDM,Tata Kelola dan Manajemen Risiko; g. Gusrizal selaku Direktur Pemasaran; h. Jamsaton Nababan selaku Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha. 3. Dewan Komisaris Perseroan a. Darmin Nasution selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; b. Anhar Adel selaku Komisaris Independen; c. Mustoha Iskandar selaku Komisaris Independen; d. Anwar Sanusi selaku Komisaris; e. Ari Dwipayana selaku Komisaris. 1. Company Shareholders: a. Mr. Pahala Nugraha as Deputy Minister of SOE I; b. Mrs. Zuryati Simbolon as Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry. 2. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners a. Achmad Bakir Pasaman as President Director; b. Nugroho Christijanto as Vice President Director; c. Bob Indiarto as Production Director; d. Wono Budi Tjahyono as Director of Finance and Investment; e. Panji Winanteya Ruky as Business Transformation Director; f. Tina T Kemala Intan as Director of HC, Governance and Risk Management; g. Gusrizal as Marketing Director; h. Jamsaton Nababan as Director of Portfolio and Business Development. 3. The Company's Board of Commissioners a. Darmin Nasution as President Commissioner concurrently Independent Commissioner; b. Anhar Adel as Independent Commissioner; c. Mustoha Iskandar as Independent Commissioner; d. Anwar Sanusi as Commissioner; e. Ari Dwipayana as Commissioner.
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Party in Vote Counting	Notaris Notary

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
Decisions and Realization of GMS Results

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023 **Agenda item 1:** Ratification of the Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 and Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for 2023	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) tahun 2023. Ratify the Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 and the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for 2023.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 26 Januari 2023 This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023
Mata Acara 2: Persetujuan Indikator Aspek Operasional Tahun 2023 untuk menghitung tingkat Kesehatan perusahaan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-076/KOM/PIHC/XII/2022, tanggal 22 Desember 2022 **Agenda Item 2:** Approval of Operational Aspect Indicators for 2023 to calculate the level of company health Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-076/KOM/PIHC/XII/2022, dated December 22, 2022	Menyetujui Indikator Aspek Operasional tahun 2023 untuk menghitung Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. Approved the Operational Aspect indicators for 2023 to calculate the Company's Health Level based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 26 Januari 2023 This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023
Mata Acara 3: Penetapan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023. **Agenda Item 3:** Determination of the Management Contract between the Directors and the Board of Commissioners and Shareholders in 2023.	Menetapkan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023. Establish a Management Contract between the Directors and Board of Commissioners and Shareholders in 2023.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 26 Januari 2023 This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023
Mata Acara 4: Penetapan Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Agenda item 4: Determination of the 2023 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Establish a 2023 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 26 Januari 2023 This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023
Mata Acara 5: Penetapan Penugasan Pemerintah (PSO) mulai Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2023 **Agenda Item 5:** Determination of Government Assignment (PSO) starting from the Decree of the Minister of Agriculture for the distribution of subsidized fertilizer in 2023	Menetapkan penugasan Pemerintah (PSO) mulai Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2023. Determine the Government Assignment (PSO) starting from the Decree of the Minister of Agriculture for the distribution of subsidized fertilizer in 2023.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 26 Januari 2023 This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023

1. RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022

1. Annual GMS Approval of the 2022 Financial Year Annual Report

Hari/Tanggal Day/Date	Selasa, 6 Juni 2023 Tuesday, June 6, 2023
Waktu Time	09.31 AM
Tempat Place	Ruang Rapat Amanah III Kantor Kementrian BUMN Lantai 8 Jl Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat Amanah III Meeting Room Ministry of SOE Office 8th Floor Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Central Jakarta
Kehadiran Attendance	1. Pemegang Saham Perseroan: a. Bapak Pahala Nugraha selaku Wakil Menteri BUMN I; b. Ibu Zuryati Simbolon selaku Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk. 2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan a. Achmad Bakir Pasaman Selaku Direktur Utama; b. Nugroho Christijanto Selaku Wakil Direktur Utama c. Bob Indiarto selaku Direktur Produksi d. Wono Budi Tjahyono selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko e. Tina T Kemala Intan selaku Direktur SDM,Tata Kelola dan Manajemen Risiko; f. Gusrizal selaku Direktur Pemasaran; 3. Dewan Komisaris Perseroan a. Darmin Nasution selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; b. Anhar Adel selaku Komisaris; c. Mustoha Iskandar selaku Komisaris Independen; d. Anwar Sanusi selaku Komisaris e. Febrio Nathan Kacaribu selaku Komisaris; f. Ari Dwipayana selaku Komisaris. 1. Company Shareholders: a. Mr. Pahala Nugraha as Deputy Minister of SOE I; b. Mrs. Zuryati Simbolon as Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry. 2. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners a. Achmad Bakir Pasaman as President Director; b. Nugroho Christijanto as Vice President Director; c. Bob Indiarto as Production Director; d. Wono Budi Tjahyono as Director of Finance and Risk Management; e. Tina T Kemala Intan as Director of HC, Governance and Risk Management; f. Gusrizal as Marketing Director;. 3. The Company's Board of Commissioners a. Darmin Nasution as President Commissioner concurrently Independent Commissioner; b. Anhar Adel as Commissioner; c. Mustoha Iskandar as Independent Commissioner; d. Anwar Sanusi as Commissioner; e. Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner; f. Ari Dwipayana as Commissioner.
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Party in Vote Counting	Notaris Notary

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
Decisions and Realization of GMS Results

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseoan selama tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Pengesahan laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022. **Agenda item 1:** Approval of the Annual Report regarding the condition and running of the company during the 2022 financial year including the Report on the Implementation of Duties of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Financial Year as well as granting full payment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the company's Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions that have been carried out during the 2022 Financial Year.	1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja Wibisana,Rintis & Rekas sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00316612.1025/AU,1/04/11/22-3/1/IIII/2023 tanggal 16 Maret 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian PTPI dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku Tahun 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana lampiran Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. 1. Approve the Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the 2022 Financial Year including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2022 Financial Year. 2. Ratify the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Fiscal Year ending December 31, 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja Wibisana, Rintis & Rekas as stated in its report No. 00316612.1025/AU,1/04/11/22-3/1/IIII/2023 dated March 16, 2023 with an opinion of "fair, in all material respects", the consolidated financial position of PTPI and its Subsidiaries as of December 31, 2022, as well as consolidated financial performance and cash flow for the year ending on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, while providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions Companies that have been carried out during the 2022 Financial Year, as long as these actions do not constitute criminal acts and/or violate applicable legal provisions and procedures and are recorded in the Company's Annual Report and do not conflict with the provisions of laws and regulations. As attached to Notarial Deed No. 01 dated June 6, 2023 made before Lumassia, S.H., notary in Jakarta, Central Jakarta.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated June 6, 2023

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
Decisions and Realization of GMS Results

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 2: Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*vollegid acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022. **Agenda Item 2:** Approval of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) for the 2022 Financial Year as well as Ratification of the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Financial Year as well as granting full repayment and release of responsibility (vollegid acquit et de charge) to The Company's Directors and Board of Commissioners for their management and supervision of the Social and Environmental Responsibility Program which has been implemented during the 2022 Financial Year.	Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2022 serta Mengesahkan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya No. N20230331011/DC2/THA/2023 tanggal 31 Maret 2023, dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PTPI dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku Tahun 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana lampiran Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. Approved the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) for the 2022 Financial Year and Ratified the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Financial Year which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Colleague as stated in his report No. N20230331011/DC2/THA/2023 dated March 31, 2023, with an opinion of "fair, in all material respects", the financial position of the Micro and Small Business Funding Program of PTPI and its Subsidiaries as of December 31, 2022, as well as the activities and cash flow for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability in Indonesia, as well as providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for actions in managing and supervising the Liability Program Social and Environmental Responsibility for the 2022 Fiscal Year, as long as the action does not constitute a criminal act and/or violates applicable legal provisions and procedures and is recorded in the Annual Report of the Company's Social and Environmental Responsibility Program and does not conflict with statutory provisions. As attached to Notarial Deed No. 01 dated June 6, 2023 made before Lumassia, S.H., notary in Jakarta, Central Jakarta.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023. This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
Decisions and Realization of GMS Results

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 3: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian perseroan Tahun Buku 2022 **Agenda Item 3:** Determination of the Use of the Company's Consolidated Net Profit for the 2022 Fiscal Year	1. Menyetujui penetapan pengunaan laba bersih Tahun Buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp18.461.812 juta (delapan belas triliun empat ratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta rupiah) sebagai berikut: sebagaimana lampiran Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. a. sebesar 27,33% (dua puluh tujuh koma tiga tiga persen) atau Rp5.046.000 juta (lima triliun empat puluh enam miliar rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham; b. sebesar 72,67% (tujuh puluh dua koma enam tujuh persen) atau Rp13.415.812 juta (tiga belas triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus dua belas juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan Perseroan. 2. Dividen sebesar Rp5.046.000 juta (lima triliun empat puluh enam miliar rupiah) agar disetor kepada rekening bendahara umum negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan ini dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 1. Approved the determination of the use of net profit for the 2022 Fiscal Year attributable to the Owner of the Company's Parent Entity in the amount of Rp18,461,812 million (eighteen trillion four hundred and sixty-one billion eight hundred and twelve million rupiah) as follows: as attached to Notarial Deed No. 01 dated June, 6 2023 made before Lumassia, S.H., notary in Jakarta, Central Jakarta. a. amounting to 27.33% (twenty seven point three three percent) or Rp5,046,000 million (five trillion forty six billion rupiah) designated as cash dividends to Shareholders; b. amounting to 72.67% (seventy two point six seven percent) or Rp13,415,812 million (thirteen trillion four hundred fifteen billion eight hundred twelve million rupiah) is designated as the Company's reserves. 2. Dividends amounting to Rp5,046,000 million (five trillion forty-six billion rupiah) must be deposited into the account of the state general treasurer no later than 1 (one) month after the date of this decision and its implementation is carried out in accordance with statutory provisions and regulations.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023. This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023
Mata Acara 4: Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas kinerja Tahun Buku 2022. **Agenda item 4:** Determination of salary/ honorarium along with other facilities and allowances for the company's Directors and Board of Commissioners for the performance of the 2022 Financial Year.	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2022, akan ditetapkan secara tersendiri. Sebagaimana lampiran Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat facilities and allowances for the Company's Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year as well as bonuses/ performance incentives/special incentives for the Directors and Board of Commissioners for the performance of the 2022 Financial Year, will be determined separately. As attached to Notarial Deed No. 01 dated June 6, 2023 made before Lumassia, S.H., notary in Jakarta, Central Jakarta.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023. This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
Decisions and Realization of GMS Results

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 5: Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. **Agenda Item 5:** Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year as well as the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Program (PUMK) for the 2023 Financial Year.	1. Sebagaimana lampiran Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 1. As attached to Notarial Deed No. 01 dated June 6, 2023 made before Lumassia, S.H., notary in Jakarta, Central Jakarta. Reappoint the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as the Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Report as well as the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Financial Year. 2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2023 Financial Year for the purposes and interests of the Company. 3. Grant power to the Company's Board of Commissioners to determine fees for audit services or other requirements for the Public Accounting Firm, as well as appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm, for whatever reason, is unable to complete the audit of the Report The Company's Consolidated Financials as well as the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, including determining fees for audit services and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023. This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023

RUPS Luar Biasa
Extraordinary GMS

Keputusan Resolution	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023, Pemegang Saham mengubah nomenklatur Direktorat Sumber Daya Manusia, Tata Kelola & Manajemen Risiko menjadi Direktorat Sumber Daya Manusia dan Direktorat Keuangan & Investasi menjadi Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko. Based on the Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-22/MBU/02/2023 dated 3 February 2023, Shareholders changed the nomenclature of the Directorate of Human Capitals, Governance & Risk Management to the Directorate of Human Capitals and the Directorate of Finance & Investment to the Directorate of Finance & Risk Management.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 26 Januari 2023 This has been realized through Notarial Deed No. 01 dated January 26, 2023
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI No. SK-163/MBU/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI, memutuskan: a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Anwar Sanusi sebagai Komisaris Perseroan. b. Mengangkat Bapak Anwar Sanusi sebagai Komisaris Perseroan. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PTPI No. SK-163/MBU/06/2023 dated June 22, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners, the Company (Persero) PTPI, decides: a. Respectfully dismissed Mr. Anwar Sanusi as Commissioner of the Company. b. Appointed Mr. Anwar Sanusi as Commissioner of the Company.	Sudah terealisasi melalui SK-163/MBU/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Perusahaan Perseroan PTPI Already realized through SK-163/MBU/06/2023 dated 22 June 2023 concerning Dismissal and Appointment of Board Members Commissioners, Perseroan Company PTPI
3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI No. SK-212/MBU/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI, memutuskan: a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Bakir Pasaman sebagai Direktur Utama Perseroan. b. Mengangkat Bapak Rahmad Pribadi sebagai Direktur Utama Perseroan. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PTPI No. SK-212/MBU/07/2023 dated 27 July 2023 concerning the Dismissal and Appointment of the President Director of the Company (Persero) PTPI, decides: a. Dismissed with respect Mr. Bakir Pasaman as President Director of the Company. b. Appointed Mr Rahmad Pribadi as President Director of the Company.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 28 Juli 2023. Realized through Notary Deed No. 05 dated July 28, 2023.

RUPS Luar Biasa
Extraordinary GMS

Keputusan Resolution		Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI, memutuskan: a. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Nugroho Christijanto sebagai Wakil Direktur Utama terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2023. b. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI: c. Semula: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko d. Menjadi: – Direktur Keuangan – Direktur Manajemen Risiko e. Mengalihkan penugasan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Bapak Gusrizal yang semula Direktur Pemasaran menjadi Wakil Direktur Utama dan Bapak Wono Budi Tjahyono yang semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan. f. Mengangkat Bapak Tri Wahyudi Saleh menjadi Direktur Pemasaran dan Ibu Ninis Kesuma Adriani sebagai Direktur Manajemen Risiko.	3. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PTPI No. SK-303/MBU/11/2023 dated 2 November 2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PTPI, decides: a. Confirming the honorable dismissal of Mr Nugroho Christijanto as Vice President Director effective October 26 2023. b. Changing the nomenclature of positions for members of the Board of Directors of the Company (Persero) PTPI: c. Originally : Director of Finance and Risk Management d. Become : – Finance Director – Director of Risk Management e. Transferred the assignment of members of the Company's Board of Directors (Persero), Mr. Gusrizal, who was originally Marketing Director, to become Vice President Director and Mr. Wono Budi Tjahyono, who was originally Director of Finance and Risk Management, to become Finance Director. f. Appointed Mr Tri Wahyudi Saleh as Marketing Director and Ms Ninis Kesuma Adriani as Risk Management Director.	Sudah terealisasi melalui i Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Novemberi 2023. Realized through Notarial Deed No. 01 dated November 6, 2023.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Keberadaan Dewan Komisaris tersebut, terutama mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris: Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi & Remunerasi.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus dinyatakan lulus dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Proses tersebut untuk memastikan bahwa Komisaris Perusahaan memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Persyaratan formal Anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Orang perseorangan;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan/perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

The Board of Commissioners is a company organ whose duties and responsibility are collectively to oversees and advices to the Board of Directors and ensure that the Company implements GCG at all levels or levels of the organization. The existence of the Board of Commissioners primarily refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the supporting organs of the Board of Commissioners: Secretary to the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Integrated Governance Committee, and Nomination & Remuneration Committee.

BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA

All members of the Company's Board of Commissioners are required to pass the Fit and Proper Test process. This process is to ensure that the Company's Commissioners have the integrity, competence, reputation and experience and expertise needed to carry out their respective functions and duties.

The formal requirements for members of the Company's Board of Commissioners are as follows:
1. Individuals;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Has not been declared bankrupt within the last five (5) years prior to nomination;
4. Has never served as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company/perum to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination; And
5. Has not been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination.

SUKSESI: NOMINASI DAN PENGUSULAN, PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Anggota Dewan Komisaris PTPI wajib memenuhi persyaratan, kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Persyaratan kemampuan mencakup memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta memiliki waktu yang cukup dalam menjalankan tugas.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS. Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apa pun yang dinilai tepat oleh RUPS, dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Beberapa tahapan seleksi calon anggota Dewan Komisaris sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Dewan Komisaris dalam RUPS, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjaringan sumber bakal calon dilakukan oleh Kementerian BUMN (Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber);
2. Evaluasi persyaratan formal dan persyaratan lain dilakukan oleh Deputi Teknis;
3. Penilaian pemenuhan persyaratan material oleh tim yang dibentuk Kementerian BUMN;
4. Penetapan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN/Keputusan RUPS.

SUCCESSION: NOMINATION AND PROPOSAL, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The appointment and dismissal of the Board of Commissioners are conducted by the GMS through a transparent and accountable process. The appointment of the Board of Commissioners is regulated in the provisions of the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 19 of 2003 concerning SOE, Ministry of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises and is based on the principles of professionalism and Good Corporate Governance.

Members of the PTPI Board of Commissioners must meet the requirements, capabilities and propriety as regulated in the Company's Articles of Association. Capability requirements include understanding management issues related to one of the management functions, having adequate knowledge in the Company's business field, and having sufficient time to carry out duties.

The appointment of members of the Board of Commissioners becomes effective as of the date of inauguration or the date specified in the GMS Decision. Appointed members of the Board of Commissioners are required to sign a statement letter/integrity pact containing their ability to carry out their duties well and are willing to be dismissed at any time based on any reason deemed appropriate by the GMS, and not sue or file legal proceedings in connection with the dismissal.

The selection process for prospective members of the Board of Commissioners before being proposed by Shareholders who have the authority to nominate the Board of Commissioners at the GMS are described as follows:

1. Identification of potential candidates by the Ministry of SOE (Ministers, Secretaries, Technical Deputies and/or Deputies search for prospective candidates from various sources);
2. Evaluation of formal requirements and other requirements is carried out by the Technical Deputy;
3. Assessment of fulfillment of material requirements by a team formed by the Ministry of SOE;
4. Determination of the Board of Commissioners based on the Decree of the Ministry of SOE/RUPS of the GMS.

Proses Nominasi Dan Pengangkatan Dewan Komisaris
Nomination and Appointment Process for the Board of Commissioners

No.	Proses Process	Pelaksana Executor
1	Penjaringan oleh Kementerian BUMN Networking by the Ministry of SOE	Menteri, Sekretaris Kementerian, Deputi Teknis Minister, Ministry Secretary, Technical Deputy
2	Evaluasi Persyaratan Formal Evaluation of Formal Requirements	Deputi Teknis Technical Deputy
3	Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiel Assessment of fulfillment of Material Requirements	Tim yang dibentuk oleh Menteri Team formed by the Minister
4	Penetapan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Determination Based on the Decree of the Ministry of SOE	Menteri Minister
5	Keputusan RUPS GMS Decision	Pemegang Saham Shareholders

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu dilakukan apabila yang bersangkutan, antara lain:
1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
2. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
5. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
7. Mengundurkan diri.

Selain alasan pemberhentian tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, di antaranya:
1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
2. Memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS (sirkuler).

Members of the Company's Board of Commissioners can be dismissed at any time based on the GMS by stating the reasons. Dismissal may be executed at any time if the individual concerned:
1. Unable to carry out their duties properly;
2. Violates the provisions of the articles of association and/or laws and regulations;
3. Is involved in acts that are harmful to the SOE or the state;
4. Commits acts that breach ethical standards and/or propriety expected of members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of SOEs;
5. Has been named a suspect or defendant by the authorities in actions that are detrimental to SOE and/or state finances;
6. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force; or
7. Resign.

Apart from the reasons for dismissal, the Minister or GMS may dismiss a member of the Board of Commissioners for other reasons deemed appropriate by the Minister or the GMS for the interests and objectives of the SOE, including:

1. In the context of company restructuring;
2. Reaching retirement age as a State Civil Apparatus, for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who are assigned from the Technical Ministry or other Government Agencies.

The decision to dismiss for reasons other than being declared guilty by a court decision that has permanent legal force and resigning, is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself. Determination of the dismissal of members of the Board of Commissioners can be made by decision of the physical GMS and the decision of all Shareholders outside the GMS (circular).

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Masa jabatan tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Walaupun demikian, ketentuan itu dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period of time starting from the closing date or the date determined by the GMS that appointed them and ending at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment. The term of office shall not exceed five (5) years, in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations in the Capital Markets.

However, this provision does not reduce the rights of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends. Upon the expiration of their term, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) additional term.

Dismissal of a member of the Board of Commissioners is carried out if based on the facts, the member of the Board of Commissioners concerned includes, among others:

1. Unable to carry out their duties properly;
2. Failure to implement the provisions of statutory regulations and/or the provisions of the Articles of Association;
3. Engaging in actions that cause harm to the Company

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris Perusahaan. Dengan demikian, susunannya sepanjang tahun buku seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

NUMBER, COMPOSITION AND COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2024

Throughout 2024 there were changes in the composition of the Company's Board of Commissioners. Thus, the arrangement throughout the financial year is as outlined in the table below below.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 until the GMS which will be held in 2025	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) 1st (previously never served on the Company's Board of Commissioners)
Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 until the GMS which will be held in 2025	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) 1st (previously never served on the Company's Board of Commissioners)
Anhar Adel	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-280/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-280/MBU/11/2019 dated November 22, 2019	22 November 2019 hingga 8 Januari 2020 22 November 22, 2019 to January 8, 2020	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) 1st (previously never served on the Company's Board of Commissioners)
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-13/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-13/MBU/01/2020 dated January 9, 2020	9 Januari 2020 hingga 21 November 2024 January 9, 2020 until November 21,2024	
Farhat Brachma	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-253/MBU/11/2022 tanggal 4 November 2022 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-253/MBU/11/2022 dated November 4, 2022	4 November 2022 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2027 November 4, 2022 until the GMS which will be held in 2027	Ke-1 1st
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 until the GMS which will be held in 2025	Ke-1 1st
Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 until the GMS which will be held in 2025	Ke-1 1st

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Ari Dwipayana	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 until the GMS which will be held in 2025	Ke-1 1st
Anwar Sanusi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-193/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-193/MBU/06/2018 dated June 8, 2018	8 Juni 2018 hingga 8 Juni 2023 June 8, 2018 until June 18, 2023	Ke-1 1st
		Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-163/MBU/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 Decree of the Ministry of SOE as GMS No. SK-163/MBU/06/2023 dated June 22, 2023	22 Juni 2023-RUPS 2028 June 22, 2023–GMS 2028	Ke-2 2nd
Riswinandi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK/53/MBU/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises as GMS No. SK/53/MBU/03/2024 dated March 4, 2024	4 Maret 2024-RUPS 2029 March 4, 2024-GMS 2029	Ke-1 1st
Danar Rahmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-188/MBU/07/2024 dated July 22, 2024	22 Juli 2024-RUPS 2029 July 22, 2024-GMS 2029	Ke-1 1st
Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-188 MBU/07/2024 dated July 22, 2024	22 Juli 2024_RUPS 2029 July 22, 2024-GMS 2029	Ke-1 1st

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Dewan Komisaris Perusahaan, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its functions, the Board of Commissioners acts independently and is free from the interests of any party. The independence of the Company's Board of Commissioners, especially referring to Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Aspek Independensi Independency Aspect	Darmin Nasution	Anhar Adel*	Mustoha Iskandar	Anwar Sanusi	Farhat Brachma
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders.	✓	✓	✓	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia (2025-sekarang) Head of the Manpower Planning and Development Agency, Ministry of Manpower, Republic of Indonesia (2025-present)	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓

*Menjabat hingga 21 November 2024
** Menjabat sejak 4 Maret 2024
*** Menjabat sejak 22 Juli 2024
*Serving until November 21, 2024
** Serving since March 4, 2024
*** Serving since July 22, 2024

Suwandi	Febrio Nathan Kacaribu	Ari Dwipayana	Riswinandi**	Danar Rahmanto***	Irfan Ahmad Fauzi***
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian (2024-sekarang) Senior Advisior to The Ministry of Agriculture (2024-present)	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (April 2020–sekarang) Head of Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (April 2020–present)	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

BOARD MANUAL: PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perusahaan telah memiliki board manual. Board manual tersebut merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan peran jabatannya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Board manual Dewan Komisaris pertama kali disahkan dan diterbitkan pada tanggal 5 November 2012.

Sesuai perkembangan dan kebutuhan Perusahaan, board manual telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 001/KEP.KOM/II/2022 dan No. 012.2/A/KU/A24/SK/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PTPI.

Adapun board manual yang mengatur tentang Dewan Komisaris, antara lain:
1. Fungsi Dewan Komisaris.
2. Konsep Umum Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Persyaratan Dewan Komisaris.
4. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.
5. Kewajiban Dewan Komisaris.
6. Rangkap Jabatan.
7. Etika Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
8. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi.
9. Rapat Dewan Komisaris dan Mekanisme Pengambilan Keputusan.
10. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.

BOARD MANUAL: WORK GUIDELINES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company's Board of Commissioners has a board manual. The board manual is a guideline for the Board of Commissioners in carrying out their official roles in accordance with the articles of association and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners' board manual was first approved and published on November 5, 2012.

In accordance with the Company's developments and needs, the board manual has been updated based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTPI No. 001/KEP.KOM/II/2022 and No. 012.2/A/KU/A24/SK/2022 dated February 16, 2022 concerning Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) of PTPI.

The board manual that regulates the Board of Commissioners includes:
1. Functions of the Board of Commissioners.
2. General Concept of Supervision of the Board of Commissioners.
3. Requirements for the Board of Commissioners.
4. Duties and Authorities of the Board of Commissioners.
5. Obligations of the Board of Commissioners.
6. Multiple Positions.
7. Position Ethics for Members of the Board of Commissioners.
8. Competency Introduction and Improvement Program.
9. Board of Commissioners Meetings and Decision Making Mechanisms.
10. Performance Assessment of the Board of Commissioners.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan board manual, tugas, tanggung jawab, wewenang, serta kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai PTPI maupun usaha PTPI yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, OBLIGATIONS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the board manual, the duties, responsibilities, authority and obligations of the Board of Commissioners are as follows:

Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is tasked with supervising management policies, the overall management activities of PTPI and its business operations carried out by the Directors as well as providing advice to the Directors including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget as well as the provisions of the Articles of Association and General Meeting Resolutions Shareholders, as well as applicable laws and regulations, in the best interests of the Company and aligned with the Company's aims and objectives.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk:
1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
13. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;
4. Memastikan bahwa penyusunan rencana perusahaan terdapat kesinambungan dan RKAP merupakan penjabaran dari RJPP;

Authority of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the authority to:
1. Access books, letters and other documents, verify cash and securities, and inspect the Company's assets;
2. Entering grounds, buildings and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. Know all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors;
5. Request the Directors and/or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend meetings of the Board of Commissioners;
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of these articles of association;
8. Form other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary taking into account the company's capabilities;
9. Using experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary;
10. Carry out actions to manage the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;
12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, articles of association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders; And
13. Approve the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Audit Unit.

Obligations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is obliged to:
1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. Review, assess, and sign the Company's Long-Term Plan, Work Plan, and Budget as prepared by the Board of Directors
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the RJP and RKAP;
4. Ensure that the preparation of company plans is sustainable and the RKAP is an elaboration of the RJPP;

5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
6. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
8. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
9. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
10. Mengusulkan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
12. Membentuk Komite Audit;
13. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
14. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
15. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain;
16. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
17. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
18. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri;
19. Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat;
20. Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Komisaris, Anggota Dewan Komisaris yang tidak lagi menjabat wajib untuk:
    a. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
    b. Apabila Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan meninggal dunia sewaktu menjabat, maka ahli waris Anggota Dewan Komisaris tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir a tersebut di atas.

5. Follow developments in the Company's activities, provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important for the management of the Company;
6. Promptly report to the General Meeting of Shareholders if there are signs of declining Company performance;
7. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report;
8. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested;
9. Prepare the Annual Work Plan and Budget for the Board of Commissioners;
10. Propose Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders;
11. Prepare an annual work program and include it in the Company's Work Plan and Budget;
12. Establish an Audit Committee;
13. Proposing a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders;
14. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners and keep a copy;
15. Report to the Company regarding his and/or his family's share ownership in the company and other companies;
16. Provide a report on the supervisory duties carried out during the previous financial year to the General Meeting of Shareholders;
17. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with statutory regulations, articles of association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders;
18. Submit quarterly reports on the progress of the realization of Performance Achievement Indicators to Shareholders/Ministers;
19. Prepare and submit Statements of Assets;
20. After the end of the Commissioner's term of office, members of the Board of Commissioners who no longer serve are required to:
    a. Return all official documents related to their previous duties to the Company within 30 (thirty) calendar days.
    b. If the member of the Board of Commissioners concerned dies while in office, the heirs of the Member of the Board of Commissioners are obliged to return the documentation in accordance with point a above.

KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar 02 tanggal 27 September 2018 PTPI Pasal 11 Ayat 8 tentang Perbuatan-Perbuatan Direksi yang harus mendapat Persetujuan Dewan Komisaris sebagai beriku:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka pendek;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang kecuali (i) pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, (ii) penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; serta (iii) pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
4. Menghapus dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN masing-masing No. SK-83/MBU/06/2015 tanggal 4 Juni 2015, No. SK-70/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret 2016, No. SK-160/MBU/07/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan No. SK-193/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang lebih baik, disepakati pembagian tugas Dewan Komisaris sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 008/KEP.KOM/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia.

Pembagian tugas dilakukan agar masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat lebih mendalam mengetahui kinerja dari masing-masing Entitas Anak yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja Perusahaan secara konsolidasi. Untuk tahun 2024, pembagian tugas mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31Juli 2024 dan No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 serta di perbaharui pada Tahun 2025 dengan Surat Keputusan No. 003/KEP.KOM/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 dan No. 004/KEP.KOM/II/2025 tanggal 10 Februari 2025

DECISIONS REQUIRING APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Articles of Association No. 02 dated September 27, 2018, PTPI Article 11 Paragraph 8 concerning Acts of the Board of Directors that must obtain the approval of the Board of Commissioners as follows:

1. Pledging fixed assets for short-term loans;
2. Entering into cooperation with business entities or other parties in the form of licensing agreements, management contracts, asset leasing, Joint Operating Agreements (JOA), Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Own-Transfer (BOT), Build-Transfer (or for a specific period as determined by the General Meeting of Shareholders);
3. Receiving or granting medium-term/long-term loans, except for (i) loans (debts or receivables) arising from business transactions, (ii) the issuance of bonds and other debt instruments; and (iii) loans granted to Subsidiaries of the Company, provided that loans to Subsidiaries of the Company are reported to the Board of Commissioners.
4. Write off bad debts and obsolete inventory from the books;
5. Dispose of fixed assets with an economic life of up to 5 (five) years, as generally applicable in the industry;
6. Establish an organizational structure one level below the Board of Directors.

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Company's Articles of Association and based on the Decree of the respective Minister of State for StateOwned Enterprises No. SK-83/MBU/06/2015 dated June 4, 2015, No. SK-70/MBU/03/2016 dated March 29, 2016, No. SK-160/MBU/07/2016 dated July 26, 2016 and No. SK-193/MBU/06/2018 dated June 8, 2018, in order to improve the effectiveness of the supervisory function better, it was agreed to divide the duties of the Board of Commissioners in accordance with Decree of the Board of Commissioners No. 008/KEP.KOM/IX/2023 dated September 13, 2023 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pupuk Indonesia.

The division of duties is intended to enable each member of the Board of Commissioners to gain a deeper understanding of the performance of each Subsidiary, which will indirectly affect the consolidated performance of the Company. For the year 2024, the division of duties refers to Board of Commissioners' Decision No. 014/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024, and No. 015/KEP. KOM/VII/2024 dated July 31, 2024, and updated in 2025 with Decision Letters No. 003/KEP.KOM/II/2025 dated February 10, 2025, and No. 004/KEP.KOM/II/2025 dated February 10, 2025.

Pembagian Tugas Masing-Masing Dewan Komisaris
Division of Duties of Each Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas Task	
Darmin Nasution Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	1. Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi. 2. Mengkoordinasi seluruh pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris di seluruh bidang dan seluruh Anak Perusahaan.	1. Chairperson of the Integrated Governance Committee. 2. Coordinates the implementation of all supervisory tasks of the Board of Commissioners in all areas and all Subsidiaries.
Mustoha Iskandar Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Ketua Komite Audit. 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI khususnya: a. Bidang pemantauan rencana *Streaming Line* Bisnis PI Group; dan b. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.	1. Chairperson of the Audit Committee. 2. Supervises and provides advice and recommendations on the consolidation of PTPI, specifically: a. Monitoring of the PI Group's business streaming line plan; and b. Supervision of the Subsidiary PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
Febrio Nathan Kacaribu Komisaris Commissioner	1. Wakil Ketua I Komite Audit 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI, khususnya : a. Bidang keuangan; dan b. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Rekayasa Industri.	1. Vice Chairperson I of Audit Committee 2. Supervision and provision of consolidated advice and recommendations to PTPI, specifically: a. Finance; and b. Supervision of the Subsidiary, PT Rekayasa Industri.
Suwandi Komisaris Commissioner	1. Wakil Ketua II Komite Audit 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI, khususnya: a. Bidang pemasaran; dan b. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda.	1. Vice Chairperson II of the Audit Committee 2. Supervision and provision of advice and recommendations on the consolidation of PTPI, specifically: a. Marketing; and b. Supervision of Subsidiaries, namely PT Pupuk Iskandar Muda
Danar Rahmanto Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Wakil Ketua III Komite Audit 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI, khususnya : a. Bidang sumber daya manusia; dan b. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Pupuk Indonesia Pangan.	1. Vice Chairperson III of Audit Committee 2. Supervision and provision of advice and recommendations on consolidation of PTPI, specifically: a. Human Capitals; and b. Supervision of Subsidiaries, namely PT Pupuk Indonesia Pangan.
Riswinandi Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Ketua Komite Pemantau Risiko 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI, khususnya : a. Bidang manajemen risiko; b. Kepatuhan terhadap kebijakan di sektor keuangan; dan c. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Pupuk Indonesia Niaga.	1. Chairperson of the Risk Monitoring Committee 2. Supervision and provision of advice and recommendations on consolidation of PTPI, specifically: a. Risk management; b. Compliance with policies in the financial sector; and c. Supervision of Subsidiaries, namely PT Pupuk Indonesia Niaga.
Farhat Brachma Komisaris Commissioner	1. Wakil Ketua I Komite Pemantau Risiko 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI, khususnya : a. Bidang produksi serta keselamatan dan kesehatan kerja; dan b. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Pupuk Kujang.	1. Vice Chairperson I of Risk Monitoring Committee 2. Supervision and provision of advice and recommendations for consolidation of PTPI, specifically: a. Production, occupational safety and health; and b. Supervision of Subsidiaries, namely PT Pupuk Kujang.
Irfan Ahmad Fauzi Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Wakil Ketua II Komite Pemantau Risiko 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI, khususnya : a. Bidang teknologi informasi dan digitalisasi; dan b. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Pupuk Indonesia Utilitas.	1. Vice Chairperson II of Risk Monitoring Committee 2. Supervision and provision of advice and recommendations on consolidation of PTPI, specifically: a. Information technology and digitalization; and b. Supervision of Subsidiaries, namely PT Pupuk Indonesia Utilitas

Pembagian Tugas Masing-Masing Dewan Komisaris
Division of Duties of Each Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas Task	
Anhar Adel* Komisaris Independen Commissioner Independent	1. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI, khususnya : a. Bidang produksi; dan b. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Petrokimia Gresik	1. Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee 2. Supervision and provision of advice and recommendations for consolidation of PTPI, specifically: a. Production; and b. Supervision of Subsidiaries, namely PT Petrokimia Gresik.
Ari Dwipayana Komisaris Commissioner	1. Wakil Ketua I Komite Nominasi dan Remunerasi 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI, khususnya: a. Bidang investasi; dan b. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur	1. Vice Chairperson I of the Nomination and Remuneration Committee 2. Supervision and provision of advice and recommendations for consolidation of PTPI, specifically: a. Investment; and b. Supervision of Subsidiaries, namely PT Pupuk Kalimantan Timur
Anwar Sanusi Komisaris Commissioner	1. Wakil Ketua II Komite Nominasi dan Remunerasi 2. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI, khususnya : a. Bidang tata kelola dan kepatuhan; dan b. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Pupuk Indonesia Logistik.	1. Vice Chairperson II of the Nomination and Remuneration Committee 2. Supervision and provision of advice and recommendations for consolidation of PTPI, specifically: a. Governance and compliance; and b. Supervision of Subsidiaries, namely PT Pupuk Indonesia Logistik.

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Sesuai dengan Board Manual Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program pengenalan Perusahaan yang dikoordinasi oleh Sekretaris Perusahaan. PTPI telah memiliki mekanisme program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

In accordance with the newly appointed Board of Commissioners Manual, they are required to participate in a Company orientation program coordinated by the Corporate Secretary. PTPI has an orientation program mechanism for new members of the Board of Commissioners to ensure that they can contribute to the Company's performance as quickly as possible.



Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Selama tahun 2024 telah dilaksanakan program pengenalan perusahaan kepada Dewan Komisaris baru sebanyak 2 (dua) kali kepada 3 (tiga) orang Komisaris yang diangkat sesuai SK-53/MBU/03/2024 dan SK-188/MBU/07/2024, yaitu kepada:

1. Bapak Riswinandi pada tanggal 18 Maret 2024
2. Bapak Danar Rahmanto dan Irfan Ahmad Fauzi pada tanggal 9 Agustus 2024

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris khususnya terkait fungsi pengawasannya.

Realisasi

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris disampaikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun di awal tahun. Adapun pelaksanaan program kerja di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The Company's introduction program may include presentations, meetings, visits to business units or facilities, document reviews, or other relevant activities deemed appropriate to meet specific needs.

During the year 2024, an orientation program for the new Board of Commissioners was conducted twice for three Commissioners appointed pursuant to SK-53/MBU/03/2024 and SK-188/MBU/07/2024, namely:

1. Mr. Riswinandi on March 18, 2024
2. Mr. Danar Rahmanto and Irfan Ahmad Fauzi on August 9, 2024

TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Policy

The Company facilitates a competency development program for the Board of Commissioners to increase the insight and knowledge of the Board of Commissioners, especially regarding its supervisory function.

Realization

The implementation of activities to increase the competency of the Board of Commissioners is presented in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2024

Throughout 2024, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities in accordance with the work program that was prepared at the beginning of the year. The implementation of the work program in 2024 can be seen in the table below.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
1	Program Kegiatan Pengawasan Supervision Activity Program	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dewan Komisaris tahun 2024 selain berdasarkan aturan perundangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, juga secara khusus mengacu kepada sasaran korporasi, *Key Perfomance Indicator* kolegial, strategi perusahaan, strategi bisnis, dan kebijakan perusahaan yang disajikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada hakekatnya adalah melaksanakan amanat pemegang saham untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan dan kebijakan Direksi dalam pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris Tahun 2024 PTPI, meliputi: 1. Pengawasan implementasi Blue Print/RJPP 2. Pengawasan implementasi RKAP 3. Pengawasan sistem pengendalian internalperusahaan bersama Satuan Pengawas Internal(SPI) 4. Pengawasan manajemen risiko Perusahaan 5. Pengawasan sistem teknologi informasi perusahaan 6. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi) 7. Pengawasan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (termasuk usulan KAP) 8. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan 9. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan pemasaran 10. Pengawasan kebijakan mutu dan layanan 11. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan riset dan pengembangan perusahaan 12. Pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL BUMN 13. Pengawasan terhadap kebijakan investasi 14. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata Kelola perusahaan 15. Pengawasan terhadap implementasi dan penerapan manajemen risiko 16. Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga	1. Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan memberikan masukan, rekomendasi kepada Direksi agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan visi, misi perusahaan yang tertuang dalam *Blue print* perusahaan dan RJPP perusahaan tahun 2020-2024, 2. Dewan Komisaris agar dapat mengantisipasi sejak dini hal-hal yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang dituangkan dalam RKAP PTPI Tahun 2022 3. Dewan Komisaris mendukung serta memastikan setiap kebijakan dan penugasan yang diberikan Pemerintah pada PTPI dapat membantu mensukseskan kedaulatan pangan nasional 4. Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada RUPS dan memberikan nasihat serta masukan dan rekomendasi kepada Direksi minimal diberikan 1 kali dalam setiap bulan atas kinerja perusahaan **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
		The Annual Supervisory Work Program (PKPT) of the Board of Commissioners in 2024 is not only based on the applicable laws and regulations as described above, but also specifically refers to the corporate objectives, collegial Key Performance Indicators, corporate strategies, business strategies, and corporate policies presented in the Company's Work Plan and Budget for 2024. The Board of Commissioners in conducting supervision is essentially carrying out the mandate of the shareholders to supervise and direct the implementation and policies of the Board of Directors in the implementation of the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget, the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the company. The 2024 Annual Work Plan and Budget (RKAT) of the Board of Commissioners of PTPI, includes: 1. Supervision of the implementation of the Blue Print/RJPP 2. Supervision of the implementation of the RKAP 3. Supervision of the company's internal control system with the Internal Supervisory Unit (SPI) 4. Supervision of the Company's risk management 5. Supervision of the company's information technology system 6. Supervision of HC policies and implementation (including training and remuneration) 7. Supervision of accounting policies and preparation of financial statements (including KAP proposal) 8. Supervision of procurement policy and implementation 9. Supervision of marketing policy and implementation 10. Supervision of quality and service policies 11. Supervision of policy and implementation of corporate research and development 12. Supervision of the implementation of SOE CSR programmes 13. Supervision of investment policy 14. Supervision of the implementation of corporate governance 15. Supervision of the implementation and application of risk management 16. Supervision of laws and regulations and agreements with third parties	1. The Board of Commissioners in accordance with its duties and functions supervises and provides advice and input, recommendations to the Board of Directors so that the policies taken remain in line with the company's vision, mission contained in the company's Blue print and RJPP 2020-2024, 2. The Board of Commissioners should be able to anticipate early on matters that have the potential to cause non-achievement of the performance targets outlined in PTPI's 2022 RKAP. 3. The Board of Commissioners supports and ensures that every policy and assignment given by the Government to PTPI can help succeed national food sovereignty. 4. The Board of Commissioners submits advice to the GMS and provides advice and input and recommendations to the Board of Directors at least once a month on the company's performance. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
2	Program Kegiatan Rutin Dewan Komisaris a. Rapat Internal Dewan Komisaris bersama Organ Pendukung Dewan Komisaris	1. Rapat yang dilaksanakan hanya untuk internal Dewan Komisaris bersama Organ Pendukung Dewan Komisaris yaitu: Komite Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris. 2. Tujuan dari Rapat ini adalah untuk melakukan koordinasi antara Dewan Komisaris dan organ pendukungnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap kegiatan operasional Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, melalui: a. Evaluasi bersama atas Laporan Komite Dewan Komisaris terhadap bidang pengawasan Dewan Komisaris yaitu: implementasi *Blue Print*/RJPP, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (termasuk usulan KAP), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. b. Koordinasi dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan yang akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Komisaris maupun Surat Dewan Komisaris kepada Direksi. c. Evaluasi parameter kinerja keuangan *holding* dan Anak Perusahaan berdasarkan *template* Wakil Menteri BUMN I.	1. Memperoleh data, informasi dan hasil analisis serta evaluasi yang lengkap dan memadai dari Organ Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite PMR &GCG, Komite Nominasi & Remunerasi dan Sekretariat Dewan Komisaris atas permasalahan tertentu maupun kondisi perusahaan terkini. 2. Meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan Dewan Komisaris atas permasalahan tertentu yang dihadapi oleh perusahaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris. 3. Meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan Dewan Komisaris atas hal-hal di lingkungan organisasi Dewan Komisaris. 4. Mendelegasikan tugas secara langsung kepada Organ Dewan Komisaris (Komite) khususnya hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang sifatnya strategis ataupun krusial. 5. Menciptakan koordinasi dan hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris organnya. 6. Rapat internal Dewan Komisaris dilaksanakan bersama seluruh perangkat organ Dewan Komisaris minimal 1 setiap bulan pada minggu ke-3 atau ke-4. 7. Rapat Internal Dewan Komisaris lainnya dapat berupa rapat Komite bersama anggota Komite (Dekom dan Non Dekom) minimal 1 minggu sekali setiap bulannya. **Output:** 1. Risalah rapat internal Dewan Komisaris. 2. Keputusan Dewan Komisaris. 3. Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	Routine Activities Program of the Board of Commissioners a. Internal Meeting of the Board of Commissioners with Supporting Organs of the Board of Commissioners	1. Meetings held only for the internal Board of Commissioners with the Supporting Organs of the Board of Commissioners, namely: Board of Commissioners Committee and Board of Commissioners Secretariat. 2. The purpose of this Meeting is to coordinate between the Board of Commissioners and its supporting organs in order to improve the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' supervisory and advisory functions towards the Company's operational activities carried out by the Board of Directors, through: a. Joint evaluation of the Board of Commissioners Committee Report on the areas of supervision of the Board of Commissioners, namely: implementation of the Blue Print/RJPP, implementation of the RKAP, company internal control system, company risk management, company information technology system, HC policies and implementation (including training and remuneration), accounting policies and preparation of financial statements (including KAP proposals), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), laws and regulations and agreements with third parties. b. Coordination in order to make decisions/policies that will be outlined in the form of Board of Commissioners Decisions and Board of Commissioners Letters to the Directors. c. Evaluation of the financial performance parameters of the holding and Subsidiaries based on the template of Deputy Minister of SOEs I.	1. Obtaining complete and adequate data, information and results of analysis and evaluation from the Board of Commissioners Organs, namely: Audit Committee, PMR&GCG Committee, Nomination & Remuneration Committee and Board of Commissioners Secretariat on certain issues and the latest company conditions. 2. Improve the quality of the Board of Commissioners' decision-making on certain issues faced by the company and improve the effectiveness of the implementation of supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners. 3. Improve the quality of the Board of Commissioners' decision-making on matters within the Board of Commissioners organization. 4. Delegate tasks directly to the Organ of the Board of Commissioners (Committee), especially matters that require the attention of the Board of Commissioners that are strategic or crucial. 5. Creating coordination and good working relationships between the Board of Commissioners and its organs. 6. Internal meetings of the Board of Commissioners are held with all organs of the Board of Commissioners at least 1 every month in the 3rd or 4th week. 7. Other Internal Meetings of the Board of Commissioners can be in the form of Committee meetings with Committee members (Dekom and Non Dekom) at least once a week every month. **Output:** 1. Minutes of internal meetings of the Board of Commissioners. 2. Decision of the Board of Commissioners. 3. Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/recommendation.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	b. Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi	1. Rapat yang dilaksanakan antara Dewan Komisaris bersama Direksi dengan hanya melibatkan Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Dewan Komisaris dan organ lainnya sepanjang diperlukan. 2. Tujuan dari Rapat ini adalah: a. Evaluasi terhadap kinerja keuangan dan operasional Perusahaan periode sebelumnya serta rencana tindak lanjut dari Direksi dan jajarannya. b. Evaluasi terhadap keputusan, kebijakan, dan pelaksanaan arahan Dewan Komisaris dalam rapat sebelumnya. c. Pengambilan keputusan, pemberian arahan Dewan Komisaris atas hal-hal strategis yang diusulkan oleh Direksi dan jajarannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar memerlukan keputusan, arahan atau tanggapan Dewan Komisaris. d. Menciptakan hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi.	1. Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. 2. Memperoleh data, informasi dan hasil analisis serta evaluasi yang lengkap dan memadai dari Direksi yang menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan dan rekomendasi Dewan Komisaris. 3. Meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan Dewan Komisaris atas permasalahan tertentu yang dihadapi oleh perusahaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris. 4. Memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). 5. Menciptakan hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi. 6. Rapat dilaksanakan minimal 1 kali setiap bulan pada minggu ke-3 atau ke-4. **Output:** 1. Risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi.
	b. Meetings of the Board of Commissioners that include the Board of Directors	1. Meetings held between the Board of Commissioners and the Board of Directors with only the involvement of the Corporate Secretary, Secretary of the Board of Commissioners and other organs as necessary. 2. The purpose of this Meeting is: a. Evaluation of the Company's financial and operational performance in the previous period as well as follow-up plans from the Board of Directors and its staff. b. Evaluation of decisions, policies, and implementation of the Board of Commissioners' directives in the previous meeting. c. Decision-making, giving direction to the Board of Commissioners on strategic matters proposed by the Board of Directors and its staff which in accordance with the Articles of Association require a decision, direction or response from the Board of Commissioners. d. Creating a good working relationship and coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors.	1. Supervise the Board of Directors in carrying out the company's activities. 2. Obtaining complete and adequate data, information and results of analysis and evaluation from the Board of Directors concerning work plans, operations, business opportunities and strategic issues that require approval and recommendations of the Board of Commissioners. 3. Improve the quality of the Board of Commissioners' decision-making on certain issues faced by the company and improve the effectiveness of the implementation of supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners. 4. Monitor the effectiveness of the implementation of good corporate governance. 5. Creating a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. 6. Meetings are held at least once a month on the 3rd or 4th week. **Output:** 1. Minutes of joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. 2. Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/ approval/recommendation.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
3	Program Kegiatan non-rutin Dewan Komisaris: a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi/ Pejabat terkait yang ditugaskan Direksi/Organ Pendukung Dewan Komisaris dengan atau tanpa menginap yang masih berada dalam wilayah Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1. Melakukan monitoring serta pengecekan baik fisik maupun non fisik terhadap kegiatan/jalannya perusahaan yang dilakukan oleh PTPI dan Anak Perusahaan. 2. Melakukan kegiatan lainnya antara lain: pendidikan, pelatihan, *benchmarking* maupun penugasan dari Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris.	1. Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris. 2. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
	Non-routine activities program of the Board of Commissioners: a. Domestic Service Travel	Domestic official travel is a trip carried out in the context of official duties carried out by the Board of Commissioners together with the Directors/related officials assigned by the Directors/Supporting Organs of the Board of Commissioners with or without overnight stays within the territory of the Republic of Indonesia. This activity aims to: 1. Monitoring and checking both physically and non-physically on the activities/running of the company carried out by PTPI and its Subsidiaries. 2. Conduct other activities, among others: education, training, benchmarking and assignments from the Government related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners in order to increase the effectiveness of the implementation of the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners.	1. Board of Commissioners' Travel Implementation Report. 2. Recommendations of the Board of Commissioners to the Board of Directors.
	b. Perjalanan Dinas Luar Negeri	Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi/Pejabat terkait yang ditugaskan Direksi/Organ Pendukung Dewan Komisaris dengan atau tanpa menginap ke tempat tujuan lain di luar wilayah Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1. Melakukan monitoring serta pengecekan baik fisik maupun non fisik terhadap kegiatan/jalannya perusahaan yang dilakukan oleh PTPI dan Anak Perusahaan. 2. Melakukan kegiatan lainnya antara lain: pendidikan, pelatihan, *benchmarking* maupun penugasan dari Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris.	1. Surat Izin Dewan Komisaris kepada RUPS. 2. Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris. 3. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
	b. Overseas Travel	Foreign official travel is a trip in the context of official duties carried out by the Board of Commissioners together with the Board of Directors/related officials assigned by the Board of Directors/Supporting Organizations of the Board of Commissioners with or without staying overnight to another destination outside the territory of the Republic of Indonesia. This activity aims to: 1. Monitoring and checking both physically and non-physically on the activities/running of the company carried out by PTPI and its Subsidiaries. 2. Conduct other activities, among others: education, training, benchmarking and assignments from the Government related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners in order to increase the effectiveness of the implementation of the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners.	1. Board of Commissioners Permission Letter to GMS. 2. Board of Commissioners' Travel Implementation Report. 3. Recommendations of the Board of Commissioners to the Board of Directors.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	c. Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris	Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi Dewan Komisaris untuk menunjang peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. Kegiatan yang termasuk dalam kategori Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris adalah: 1. Mengikuti Seminar/*Workshop* yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. 2. Kursus dan Sertifikasi. 3. Menghadirkan Narasumber yang ahli dalam bidang tertentu. 4. Keanggotaan Profesi. Mengacu kepada Surat Edaran Kementerian BUMN No: S-013/Kom/PIHC/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, Dewan Komisaris dianjurkan untuk: 1. Mengikuti program-program yang diselenggarakan Forum *Human Capital Indonesia* (FHCI) atau BUMN *Center of Excellence.* 2. Mengikuti program yang berkaitan dengan bidang usaha BUMN yang diselenggarakan oleh regulator sektoral dan/atau institusi lain yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian di bidang usaha BUMN dimaksud. 3. Mengikuti program lainnya yang terkait dengan korporasi, *governance, risk management* dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Lembaga yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.	Meningkatnya kemampuan dan kompetensi Dewan Komisaris sehingga mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. **Output:** Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
	c. Education and Training of the Board of Commissioners	Education and Training of the Board of Commissioners is an activity carried out by the Board of Commissioners in order to improve the ability, knowledge and competence of the Board of Commissioners to support the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' supervisory and advisory duties. Activities included in the Education and Training category of the Board of Commissioners are: 1. Participate in seminars/workshops organized by third parties. 2. Courses and Certifications. 3. Presenting resource persons who are experts in certain fields. 4. Professional Membership. Referring to the Circular Letter of the Ministry of SOEs No. S-013/Kom/PIHC/II/2021 dated February 26, 2021: S-013/Kom/PIHC/II/2021 dated February 26, 2021, the Board of Commissioners is encouraged to: 1. Participate in programs organized by the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) or SOE Center of Excellence. 2. Participate in programs related to the SOE's business field organized by sectoral regulators and/or other institutions that have the authority and/or expertise in the SOE's business field. 3. Participate in other programs related to corporations, governance, risk management and others organized by competent institutions in accordance with their fields.	Increased capability and competence of the Board of Commissioners to support the effective implementation of the Board of Commissioners' supervisory and advisory duties. **Output:** Activity Implementation Report.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	d. Melaksanakan kegiatan FGD	Kegiatan FGD dilakukan untuk membahas isu, perkembangan terkini, rencana transformasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.	1. Mendapatkan informasi terkini yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. 2. Dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. **Output:** Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
	d. Conduct FGD activities	FGD activities are carried out to discuss issues, latest developments, transformation plans related to company activities.	1. Obtain the latest information relating to the implementation of the company's activities, so as to support the implementation of the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners. 2. Conducted twice a year. **Output:** Activity Implementation Report.
	e. Mengikuti forum yang diselenggarakan IFA (*International Fertilizer Association*), AFA (*Asian Farmer Association*), serta kunjungan ke pabrik pupuk di luar negeri	Forum yang diselenggarakan IFA dan AFA merupakan kegiatan yang membahas mengenai industri pupuk global, isu-isu yang berkaitan dengan promosi nutrisi tanaman, hasil panen, dan perbaikan lingkungan, termasuk melihat tren bisnis agrikultur di masa mendatang. Kunjungan ke pabrik pupuk di luar negeri bertujuan untuk mengetahui *best practice* mengenai teknologi, proses bisnis, dan hal-hal lainnya dalam memproduksi pupuk.	Mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan pupuk, arah pemupukan, kualitas pupuk serta kondisi yang terkait dengan permasalahan pupuk di dunia, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. **Output:** Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
	e. Participated in forums organized by IFA (International Fertilizer Association), AFA (Asian Farmer Association), as well as visits to overseas fertilizer factories.	The forum organized by IFA and AFA is an activity that discusses the global fertilizer industry, issues related to the promotion of plant nutrition, crop yields, and environmental improvement, including looking at future agricultural business trends. Visits to overseas fertilizer factories aim to learn best practices regarding technology, business processes, and other matters in producing fertilizers.	Obtain the latest information related to fertilizer development, fertilizer direction, fertilizer quality and conditions related to fertilizer issues in the world, so as to improve the quality of the implementation of supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners. **Output:** Activity Implementation Report.
	f. Mendapatkan *input* dan masukan kajian awal atas Isu Strategis yang Dihadapi Perusahaan	Melakukan telaah dari kajian awal atas isu strategis yang dihadapi perusahaan, dengan bantuan dari pihak profesional dalam bidangnya.	Mendapatkan *second opinion* terkait hal-hal yang bersifat strategis bagi perkembangan Perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris, serta sekaligus sebagai bahan masukan kepada Direksi. **Output:** 1. Hasil Kajian dari internal dan eksternal. 2. Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	f. Obtain input and preliminary study input on Strategic Issues Facing the Company Faced by the Company	Conduct a review of the initial assessment of the strategic issues facing the company, with assistance from professionals in their field.	Obtaining a second opinion related to matters that are strategic to the development of the Company, so as to improve the quality of the implementation of the Board of Commissioners' supervisory and advisory duties, as well as input to the Board of Directors. **Output:** 1. Internal and external assessment results. 2. Board of Commissioners letter in the form of direction/advice
	g. Melakukan pengawasan di bidang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi program TJSL BUMN dengan fokus pada 3 bidang yaitu: Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi program TJSL yang diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan sesama BUMN ataupun dengan lembaga/pihak lainnya dengan tetap berkontribusi atas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi guna mengoptimalkan pelaksanaan penagihan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta memberikan pembinaan terhadap UMK. 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas untuk memastikan program TJSL BUMN mengedepankan asas kemanfaatan atas program TJSL terlebih dari sisi penerima manfaat. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan *report* detail pelaksanaan program TJSL secara berkala.	Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi secara berkala atas laporan manajemen yang memuat implementasi program TJSL. **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi.
	g. Supervise the Social and Environmental Responsibility (CSR) program.	1. Reviewing and evaluating SOEs' CSR programs with a focus on 3 areas, namely: Education, Environment and Development of Micro and Small Enterprises (MSEs). 2. Reviewing and evaluating CSR programs that are expected to increase collaboration with fellow SOEs or with other institutions/parties while contributing to the achievement of Sustainable Development Goals. 3. Conduct reviews and evaluations to optimize the implementation of the Micro and Small Enterprises (MSEs) Funding Program billing and provide guidance to MSEs. 4. Conduct a review and evaluation to ensure that the SOE's TJSL program prioritizes the principle of benefit for the TJSL program, especially from the perspective of the beneficiaries. 5. Reviewing and evaluating the planning and detailed reports on the implementation of the TJSL program on a regular basis.	The Board of Commissioners will periodically evaluate the management report containing the implementation of the CSR program. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	h. Melakukan pengawasan di bidang Keuangan	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap audit laporan keuangan Tahun 2022 dan melakukan *Audit Upon Procedure* (AUP). 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi dengan mengukur parameter EBITDA, CFO (*Cash Flow from Operation*), *Net Profit*, *Return on Invested Capital* atau ROIC, *Weighted Average Cost of Capital* atau WACC atau *Invested Capital*, *debt to Invested Capital*, *debt to* EBITDA. 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi penugasan dari pemerintah, dalam bentuk antara lain *Public Service Obligation* (PSO). 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi laporan capaian *Key Performance Indicators*/Kontrak Manajemen. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi penugasan Proyek Strategis Nasional. 6. Melakukan penelaahan dan evaluasi posisi piutang perusahaan, baik untuk PTPI (secara konsolidasi dan sebagai entitas induk) maupun pada Anak Perusahaan. 7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap sumber-sumber pembiayaan perusahaan yang akan digunakan dalam membiayai rencana investasi dan pengembangan/proyek-proyek di lingkungan perusahaan. 8. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap posisi utang perusahaan dalam rangka mengurangi beban utang perusahaan. 9. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan perusahaan. 10. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan akuntansi perusahaan. 11. Melakukan pengawasan atas kondisi umum kesehatan Anak Perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan belum baik dan Anak Perusahaan dengan *core business* non-pupuk.	Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi secara berkala atas laporan manajemen yang memuat kinerja keuangan. **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/persetujuan/rekomendasi.
	h. Conducting supervision in the field of Finance	1. Review and evaluate the audit of the 2022 financial statements and conduct Audit Upon Procedure (AUP). 2. Conduct a review and evaluation by measuring the parameters of EBITDA, CFO (Cash Flow from Operation), Net Profit, Return on Invested Capital or ROIC, Weighted Average Cost of Capital or WACC or Invested Capital, debt to Invested Capital, debt to EBITDA. 3. Review and evaluate assignments from the government, in the form of Public Service Obligation (PSO). 4. Review and evaluate reports on the achievement of Key Performance Indicators/Management Contracts. 5. Review and evaluate the assignment of National Strategic Projects. 6. Review and evaluate the company's receivables position, both for PTPI (on a consolidated basis and as the parent entity) and its Subsidiaries. 7. Reviewing and evaluating the company's financing sources that will be used in financing investment and development plans/projects within the company. 8. Review and evaluate the company's debt position in order to reduce the company's debt burden. 9. Review and evaluate the company's sources of income. 10. Review and evaluate the application of the company's accounting policies. 11. Supervise the general health condition of Subsidiaries that have poor financial performance and Subsidiaries with non-fertilizer core business.	The Board of Commissioners will periodically evaluate the management report containing financial performance. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/recommendation.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	i. Melakukan pengawasan di bidang Manajemen Risiko	Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap Perencanaan dan Strategi Risiko, mencakup: 1. Penyusunan RKAP 2023 berbasis manajemen risiko dengan menyusun strategi risiko berdasarkan penetapan target risiko, toleransi risiko (*risk tolerance*), batas risiko (*risk limit*), dan selera risiko (*risk appetite*). 2. Penyusunan *risk appetite* statement meliputi *risk appetite threshold* dari masing-masing *risk appetite metric* berdasarkan taksonomi risiko BUMN yang integrasi dengan Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi berdasarkan taksonomi risiko BUMN. 3. Penyusunan dan pengukuran risiko utama perusahaan (top risk) 4. Penyusunan *risk register* risiko utama perusahaan (*top risk*) dengan menampilkan informasi paling sedikit memuat: • Tabel yang meliputi antara lain: (i) sasaran, (ii) jenis/ kategori risiko sesuai dengan taksonomi risiko KBUMN, (iii) peristiwa risiko (*risk event*), (iv) penyebab risiko, (v) dampak risiko kuantitatif rupiah (wajib ada dengan menghitung dampak pada tahun berjalan), (vi) penjelasan dampak risiko, (vii) kontrol eksisting, (viii) penilaian efektifitas kontrol, (ix) tingkat kemungkinan risiko inheren, (x) tingkat dampak risiko inhren, (xi) level risiko inheren, (xii) rencana penanganan risiko, (xiii) target waktu penanganan, (xiv) tingkat kemungkinan risiko residual setiap triwulan, (xv) tingkat dampak risiko residual setiap triwulan, (xvi) level risiko residual setiap triwulan, (xvii) dampak risiko kuantitatif residual setiap triwulan (wajib ada), (xviii) penjelasan dampak risiko residual setiap triwulan. • Peta risiko (*heatmap*) yang memuat *heatmap* risiko inheren di awal tahun dan risiko residual di akhir tahun. • *Timeline* penanganan risiko yang memuat (i) rencana penanganan risiko, (ii) *breakdown* rencana penanganan, (iii) output masing-masing *breakdown* rencana penganganan, (iv) waktu penanganan yang di-*breakdown* secara bulanan, (v) Biaya penanganan risiko, (vi) PIC yanng bertanggungjawab. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Monitoring Risiko, mencakup: • Penyusunan pedoman manajemen risiko BUMN yang paling sedikit meliputi kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pelaporan dan monitoring, serta sistem informasi manajemen risiko dan Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. • klasifikasi risiko Anak Perusahaan berdasarkan tingkat intensitas risiko dan melengkapi organ pengelola risikonya sesuai dengan ketentuan. • sistem informasi manajemen risiko dan memiliki pengelolaan atas catatan kejadian kerugian (loss event database).	Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi secara berkala atas laporan manajemen yang memuat manajemen risiko perusahaan. **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi.

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	i. Supervising in the field of Risk Management	Review and evaluate Risk Planning and Strategy, including: 1. The preparation of the 2023 RKAP is based on risk management by developing a risk strategy based on the determination of risk targets, risk tolerance, risk limits, and risk appetite. 2. The preparation of the risk appetite statement includes the risk appetite threshold of each risk appetite metric based on the SOE risk taxonomy which is integrated with consolidated Subsidiaries and affiliated companies based on the SOE risk taxonomy. 3. Compilation and measurement of the company's main risk (top risk) 4. Preparation of a risk register of the company's main risks (top risks) with displaying information containing at least: • The table includes, among others: (i) objectives, (ii) type/category of risk in accordance with Ministry of SOE risk taxonomy, (iii) risk event, (iv) cause of risk, (v) quantitative risk impact in rupiah (required by calculating the impact in the current year), (vi) explanation of risk impact, (vii) existing controls, (viii) assessment of control effectiveness, (ix) level of likelihood of inherent risk, (x) level of impact of inhren risk, (xi) inherent risk level, (xii) risk handling plan, (xiii) target handling time, (xiv) residual risk likelihood level every quarter, (xv) residual risk impact level every quarter, (xvi) residual risk level every quarter, (xvii) residual quantitative risk impact every quarter (required), (xviii) explanation of residual risk impact every quarter. • A risk map (heatmap) containing heatmaps of inherent risk at the beginning of the year and residual risk at the end of the year. • Risk handling timeline containing (i) risk handling plan, (ii) handling plan breakdown, (iii) output of each handling plan breakdown, (iv) handling time broken down on a monthly basis, (v) risk handling costs, (vi) responsible PIC. 5. Review and evaluation of Risk Implementation and Monitoring, including: • The preparation of SOE risk management guidelines that at least include policies and standard risk management procedures and the determination of risk limits, the process of identification, measurement, control, reporting and monitoring, as well as risk management information systems and comprehensive internal control systems. • classification of Subsidiary risks based on the level of risk intensity and equipping its risk management organ in accordance with the provisions. • risk management information system and maintain a loss event database.	The Board of Commissioners will periodically evaluate the management report containing the company's risk management. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation.
		6. Melakukan Evaluasi Risiko dan Perbaikan Berkelanjutan, mencakup: • Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2023 atas penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan dengan menggunakan panduan penilaian RMI Kementerian BUMN. • *Roadmap* perbaikan manajemen risiko berkelanjutan atas pelaksanaan manajemen risiko Tahun 2023 s.d. 2027 berdasarkan *gap analysis* hasil penilaian RMI. • Hasil penilaian RMI dan roadmap perbaikan manajemen risiko berkelanjutan kepada Kementerian BUMN paling lambat triwulan III Tahun 2023.	

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
		6. Conduct Risk Evaluation and Continuous Improvement, including: • Risk Maturity Index (RMI) assessment in 2023 on the implementation of risk management that has been carried out using the Ministry of SOEs RMI assessment guidelines. • Roadmap for continuous risk management improvement on risk management implementation from 2023 to 2027 based on gap analysis of RMI assessment results. • RMI assessment results and roadmap for continuous risk management improvement to the Ministry of SOEs by the third quarter of 2023.	
	j. Melakukan pengawasan di bidang SDM	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi progress kajian dan/atau rencana implementasi *Talent Management* di Induk dan Anak-Anak Perusahaan (holding dan subholding), antara lain menyangkut *Talent development*, *Career path*, dan *Job grading* serta memastikannya selaras dengan KPI, RKAP, RJPP, dan Anggaran Dasar perusahaan. Dewan Komisaris juga mendukung program suksesi Direksi dan pengembangan *top talent* muda ≤ 40 tahun dan perempuan dalam *nominated talent*. 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi kesiapan sumber daya, antara lain kebijakan, sistem, Human Capital, anggaran dan implementasi *Talent Mobility* sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri BUMN Nomor S-580/MBU/09/2022 tanggal 16 September 2022 hal Aspirasi Perputaran Talenta (*Talent Mobility*) BUMN. 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi progress implementasi *Blueprint* Pemenuhan Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2022, serta rencana aksi Tahun Buku 2023, terutama menyangkut 5 (lima) aspek sebagai berikut: Penempatan tenaga kerja, Pengembangan karir, Kesejahteraan, Aksesibilitas, Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas pemenuhan kuantitas dan kualitas data Pengurus BUMN, Pengurus Anak Perusahaan BUMN, Pengurus Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN, serta Talenta (Direksi/BoD dan BoD-1) dalam Talent Pool Kementerian BUMN melalui portal *Human Capital* BUMN, serta menjadikan pemenuhan kuantitas dan kualitas data dimaksud sebagai salah satu *Key Performance Indicator* bagi Direktur yang membidangi *Human Capital*/Sumber Daya Manusia dalam RKAP Tahun 2023. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas Indikator Pengembangan Talenta 6. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap tenaga ahli di bidang keteknikan. 7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap efektivitas struktur organisasi perusahaan. 8. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap sistem remunerasi pegawai di lingkungan perusahaan. 9. Melakukan telaahan/kajian atas usulan remunerasi yang disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham. 10. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN, Dewan Komisaris perlu menyetujui target KPI Individu tahunan milik Direksi. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan atas capaian KPI Individu masing-masing Direksi.	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi Remunerasi melakukan pengawasan secara berkala atas laporan manajemen yang memuat pengelolaan SDM perusahaan. **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/persetujuan/rekomendasi

No	**Program** Program	**Penjelasan** Explanation	**Target** Target
	j. Conduct supervision in the field of HC	1. Reviewing and evaluating the progress of the study and/or implementation plan of Talent Management in the Parent Company and Subsidiaries (holding and subholding), among others regarding Talent development, Career path, and Job grading and ensuring it is in line with KPI, RKAP, RJPP, and the company's Articles of Association. The Board of Commissioners also supports the Board of Directors succession program and the development of young top talent ≤ 40 years old and women in the nominated talent. 2. Review and evaluate the readiness of resources, including policies, systems, Human Capital, budgets and implementation of Talent Mobility as a follow-up to the Letter of the Minister of SOEs Number S-580/MBU/09/2022 dated September 16, 2022 regarding Aspirations for Talent Mobility of SOEs. 3. Reviewing and evaluating the progress of the implementation of the Blueprint for Fulfilling the Mandate of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in 2022, as well as the action plan for Fiscal Year 2023, especially concerning 5 (five) aspects as follows: Manpower placement, career development, welfare, accessibility, occupational health and safety programs. 4. Reviewing and evaluating the fulfillment of the quantity and quality of data on the Management of SOEs, Management of SOE Subsidiaries, Management of SOE Consolidated Affiliated Companies, as well as Talents (Directors/BoD and BoD-1) in the Talent Pool of the Ministry of SOEs through the SOE Human Capital portal, and making the fulfillment of the quantity and quality of data referred to as one of the Key Performance Indicators for the Director in charge of Human Capital/Human Capitals in the 2023 RKAP. 5. Review and evaluation of Talent Development Indicators 6. Review and evaluate experts in the field of engineering. 7. Review and evaluate the effectiveness of the company's organizational structure. 8. Review and evaluate the employee remuneration system within the company. 9. Reviewing the remuneration proposal submitted by the Board of Directors to the Shareholders. 10. In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-11/MBU/11/2020 on Management Contracts and Annual Management Contracts of Directors of SOEs, the Board of Commissioners needs to approve the annual Individual KPI targets of the Directors. In addition, it is necessary to supervise the achievement of the Individual KPIs of each Director.	The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, periodically monitors the management report on the company's HC management. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/recommendation

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	k. Melakukan Pengawasan atas Pengelolaan Anak Perusahaan	Evaluasi ini dilakukan untuk penekanan pada kondisi Anak Perusahaan yang mengalami penurunan kinerja yang signifikan.	1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas arah kebijakan umum pengembangan Anak Perusahaan dan hubungannya dalam mendukung pengembangan usaha perusahaan induk serta melakukan evaluasi atas kebijakan, pengelolaan, serta pengawasan perusahaan induk terhadap Anak Perusahaan. 2. Dewan Komisaris Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kebijakan dan implementasi hubungan keuangan antara perusahaan induk dan anak, khususnya dalam rangka penguatan kapasitas keuangan Anak Perusahaan. **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi.
	k. Supervising the Management of Subsidiaries	This evaluation was carried out to emphasize the condition of Subsidiaries that experienced a significant decline in performance.	1. The Board of Commissioners supervises and advises on the general policy direction of Subsidiary development and its relationship in supporting the parent company's business development and evaluates the parent company's policies, management and supervision of its Subsidiaries. 2. The Board of Commissioners evaluates and provides recommendations on the policies and implementation of financial relationships between parent and Subsidiary companies, particularly in the context of strengthening the financial capacity of Subsidiaries. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation.

No	**Program** Program	**Penjelasan** Explanation	**Target** Target
	I. Melakukan pengawasan di bidang Teknologi Informasi (TI)	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) agar menyampaikan progress implementasi program dalam Laporan Manajemen Triwulanan BUMN dan Laporan Manajemen Tahunan. 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi hasil Asesmen IT *Maturity Level* dan mencapai target minimal level 3 agar melakukan evaluasi atas dampak investasi TI terhadap bisnis perusahaan. 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas hasil Asesmen Transformasi Digital (INDI 4.0) termasuk penyusunan dan impelementasi rencana pemenuhan *gap* pada Laporan Manajemen Triwulanan BUMN dan Laporan Manajemen Tahunan. 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi Program Digital Talent BUMN dengan menugaskan karyawan dengan pencapaian target kepesertaan minimal sebanyak 7% dari jumlah keseluruhan SDM (organik dan non-organik) perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan pada tahun 2023. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi pengembangan budaya inovasi dan mendorong kerja sama melalui BUMN *Research Institute* dalam dan/atau antar klaster serta mendorong kolaborasi dengan Perguruan Tinggi. Riset dan inovasi yang dihasilkan agar memperhatikan dukungan terhadap *core business* perusahaan.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara berkala atas laporan manajemen yang memuat pengelolaan TI perusahaan. **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi
	I. Conduct supervision in the field of Information Technology (IT)	1. Review and evaluate the Master Plan for Information Technology (MPTI) in order to convey the progress of program implementation in the SOE Quarterly Management Report and Annual Management Report. 2. Review and evaluate the results of the IT Maturity Level Assessment and achieve a minimum target of level 3 in order to evaluate the impact of IT investment on the company's business. 3. Review and evaluate the results of the Digital Transformation Assessment (INDI 4.0) including the preparation and implementation of gap fulfillment plans in the SOE Quarterly Management Report and Annual Management Report. 4. Review and evaluate the SOE Digital Talent Program by assigning employees with the achievement of a minimum participation target of 7% of the total number of Human Capitals (organic and non-organic) of the company, including Subsidiaries and grandchildren of the company by 2023. 5. Review and evaluate the development of a culture of innovation and encourage cooperation through the SOE Research Institute within and/or between clusters and encourage collaboration with universities. Research and innovation produced should pay attention to support for the company's core business.	The Board of Commissioners conducts regular supervision of management reports containing the company's IT management. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	m. Melakukan pengawasan di bidang Produksi dan Teknik	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap produksi dan stok pupuk di lapangan dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk. 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap tingkat produksi pupuk urea di pabrik dalam rangka pasokan pupuk. 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap rencana produksi bulanan untuk pupuk urea dan amoniak. 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap efisiensi pemakaian bahan baku gas bumi. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kebutuhan gas bumi untuk produksi amoniak dan pupuk urea. 6. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap biaya produksi untuk amoniak dan urea dalam rangka meningkatkan produktivitas di bidang produksi. 7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap sinkronisasi jadwal *Turn Around* (TA) dan kualitas pelaksanaan TA Pabrik. 8. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas kinerja bidang produksi dan teknis pada anak-Anak Perusahaan non pupuk.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara berkala atas laporan manajemen yang memuat kinerja produksi dan teknik perusahaan. **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi
	m. Supervise in the field of Production and Engineering	1. Review and evaluate fertilizer production and stock in the field in order to maintain fertilizer availability. 2. Review and evaluate the production level of urea fertilizer at the factory in order to supply fertilizer. 3. Review and evaluate monthly production plans for urea and ammonia fertilizers. 4. Review and evaluate the efficient use of natural gas raw materials. 5. To review and evaluate the need for natural gas for the production of ammonia and urea fertilizer. 6. Review and evaluate production costs for ammonia and urea in order to increase productivity in production. 7. Review and evaluate the synchronization of Turn Around (TA) schedules and the quality of PlantTA implementation. 8. Review and evaluate the performance of production and technical fields in non-fertilizer Subsidiaries.	The Board of Commissioners conducts regular supervision of management reports on the company's production and technical performance. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	n. Melakukan pengawasan di bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas rencana upaya tindak lanjut atas rekomendasi audit kepatuhan baik yang masih merupakan temuan berulang maupun temuan baru yang memerlukan langkah-langkah penyelesaian. 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi penanganan permasalahan hukum dengan mengedepankan proses mediasi penyelesaian masalah hukum antar/terkait BUMN/Anak Perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan (pengadilan atau arbitrase). 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi untuk menentukan parameter pencapaian terhadap penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait BUMN/Anak Perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi, Direksi dapat menentukan permasalahan yang masih berproses di tahun berjalan dan ditargetkan penyelesaiannya pada tahun berikutnya. Dalam hal tidak tercapai penyelesaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan, Direksi dapat melaporkan perkembangan penyelesaiannya kepada pemegang saham beserta target baru terselesaikannya permasalahan tersebut. 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas partisipasi dan mendukung proses pengembangan Portal Aset BUMN yang sedang dikembangkan oleh Kementerian BUMN melalui penginputan data sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan dan sesuai dengan keadaan di lapangan, serta memberikan dukungan lain yang diperlukan dalam pengembangan Portal Aset BUMN. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas penyusunan/penyempurnaan SOP yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara berkala atas laporan manajemen yang memuat kepatuhan atas peraturan perundang-undangan **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/persetujuan/rekomendasi
	n. Conducting supervision in the field of Law and Legislation	1. Review and evaluate the follow-up action plan on compliance audit recommendations, both recurring findings and new findings that require resolution steps. 2. Reviewing and evaluating the handling of legal issues by prioritizing the mediation process of resolving legal issues between/relating to SOEs/SOE Subsidiaries/affiliated companies, before the issue is resolved through judicial institutions (court or arbitration). 3. Reviewing and evaluating to determine the achievement parameters for the settlement of legal issues between/related to SOEs/SOE Subsidiaries/affiliated companies, the Board of Directors may determine issues that are still in process in the current year and are targeted for settlement in the following year. In the event that the settlement is not achieved in accordance with the set target, the Board of Directors may report the progress of the settlement to the shareholders along with a new target for the resolution of the issue. 4. To review and evaluate the participation and support the process of the development of the SOE Asset Portal being developed by the Ministry of SOE through data entry in accordance with the established Standard Operating Procedure (SOP) and in accordance with the situation in the field, as well as providing other necessary support in the development of the SOE Asset Portal. 5. Reviewing and evaluating the preparation/refinement of SOPs required in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs.	The Board of Commissioners conducts regular supervision of management reports containing compliance with laws and regulations. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/recommendation

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	o. Melakukan pengawasan di bidang Investasi	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap rencana investasi dan pengembangan perusahaan. 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap sinkronisasi rencana investasi dan pengembangan antar Anak Perusahaan. 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap terjadinya gangguan pada pabrik pupuk serta sarana produksi non pupuk dan *shutdown* pabrik di lapangan. dan 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan perusahaan.	1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan investasi yang dilakukan PTPI dan Anak Perusahaan, yang bertujuan untuk memastikan. dan 2. Pelaksanaan investasi sudah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan mitigasinya, serta telah diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan manajemen risiko investasi PTPI secara keseluruhan. **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi.
	o. Conduct supervision in the field of Investment	1. Review and evaluate the company's investment and development plans. 2. Review and evaluate the synchronization of investment and development plans among Subsidiaries. 3. Reviewing and evaluating the occurrence of disruptions in fertilizer plants and non-fertilizer production facilities and factory shutdowns in the field. and 4. Review and evaluate the company's procurement policy.	1. The Board of Commissioners evaluates the policies and implementation of investments made by PTPI and its Subsidiaries, which aims to ensure. and 2. The implementation of investment is in accordance with the risk management policy and its mitigation, as well as the implementation of principles, functions and implementation related to the policy on the management of PTPI's investment risk management as a whole. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation.
	p. Melakukan pengawasan di bidang Pemasaran	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap sistem penyaluran pupuk di lapangan. 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap pemasaran pupuk bersubsidi dan non subsidi di lapangan. 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap posisi stok pupuk di lapangan. 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap pengadaan pupuk non urea di lapangan. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kebijakan pemasaran yang diambil Direksi baik pemasaran dalam negeri maupun luar negeri. 6. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap timbulnya kelangkaan pupuk di lapangan. dan 7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemasaran produk non pupuk dan jasa yang dihasilkan Anak Perusahaan.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara berkala atas laporan manajemen terkait kinerja pemasaran **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	p. Supervise in the field of Marketing	1. Review and evaluate the fertilizer distribution system in the field. 2. Review and evaluate the marketing of subsidized and non-subsidized fertilizers in the field. 3. Review and evaluate the fertilizer stock position in the field. 4. Review and evaluate the procurement of non-urea fertilizers in the field. 5. Review and evaluate the marketing policies adopted by the Board of Directors, both domestic and overseas marketing. 6. Review and evaluate the emergence of fertilizer scarcity in the field. and 7. Review and evaluate the policies and implementation of marketing of non-fertilizer products and services produced by Subsidiaries.	The Board of Commissioners conducts regular supervision of management reports related to marketing performance. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation
	q. Melakukan pengawasan di bidang Kerja sama dan GCG	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan. 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap konsep perjanjian kerjasama perusahaan dengan pihak ketiga. 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang berlaku di perusahaan. 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap praktik-praktik pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap program manajemen risiko perusahaan. 6. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan IT yang terintegrasi di lingkungan perusahaan. dan 7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kepatuhan Direksi terhadap peraturan, perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara berkala atas laporan manajemen terkait kerja sama dan GCG **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi
	q. Supervise the field of Cooperation and GCG	1. Review and evaluate legal issues faced by the company. 2. Review and evaluate the concept of the company's cooperation agreement with third parties. 3. Review and evaluate the systems and procedures applicable in the company. 4. Reviewing and evaluating the practices of implementing GCG principles within the company. 5. Review and evaluate the company's risk management program. 6. Reviewing and evaluating the implementation of integrated IT within the company. and 7. Review and evaluate the Board of Directors' compliance with regulations, laws and agreements with third parties.	The Board of Commissioners conducts regular supervision of management reports related to cooperation and GCG **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation
	r. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)	Melakukan penelaahan dan evaluasi atas pengelolaan DPPK termasuk pengelolaan aset likuid dan non likuid DPPK per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2022 serta menyusun roadmap/rencana inisiatif perbaikan/penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun bagi BUMN yang memiliki DPPK dengan kondisi kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari nilai kini aktuaria.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara berkala atas pengelolaan Dana Pension Pemberi Kerja (DPPK) **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/ persetujuan/rekomendasi
	r. Supervising the management of the Employer Pension Fund (DPPK)	Review and evaluate the management of DPPK, including the management of liquid and non-liquid assets of DPPK as of December 31, 2021 and June 30, 2022, and prepare a roadmap/initiative plan for improvement/settlement in accordance with the laws and regulations in the pension fund sector for SOEs that have DPPK with a condition of lack of wealth for funding from the actuarial present value.	The Board of Commissioners conducts regular supervision of the management of the Employer Pension Fund (DPPK). **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	s. Melakukan pengawasan atas arahan penggunaan produk dalam negeri	Melakukan penelaahan dan evaluasi atas arahan Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BUMN diwajibkan untuk menyusun roadmap Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan membentuk Tim P3DN, serta SPI BUMN melakukan monitoring/*review* atas pelaksanaan program tersebut dan melaporkannya dalam Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara berkala atas arahan penggunaan produk dalam negeri **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/persetujuan/rekomendasi
	s. Supervise the direction of the use of domestic products	Reviewing and evaluating the President's directives contained in Presidential Instruction Number 2 of 2022 concerning the Acceleration of Increasing the Use of Domestic Products and Products of Micro, Small and Cooperative Enterprises in the Context of Successful National Movement Proud of Indonesian Products in the Implementation of Government Procurement of Goods/Services, SOEs are required to develop a roadmap for the Use of Domestic Products (P3DN) and form a P3DN Team, and SOE SPI conducts monitoring/review of the implementation of the program and reports it in Quarterly and Annual Management Reports.	The Board of Commissioners conducts periodic supervision on the direction of the use of domestic products **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/recommendation
	t. Melakukan pengawasan atas Inisiatif Strategis, Aspirasi Pemegang Saham dan Key Performance Indicators (KPI) Klaster/Sub Klaster	1. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas Inisiatif strategis dan KPI BUMN Tahun 2023 harus sejalan dengan inisiatif strategis yang ada dalam *roadmap cluster*, dan RJPP masing-masing BUMN. 2. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas Inisiatif strategis dan KPI BUMN Tahun 2023 harus dijabarkan ke dalam lima program prioritas sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Kementerian BUMN. 3. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas Inisiatif strategis dan KPI BUMN Tahun 2023 untuk masing-masing klaster dan sub-klaster adalah sebagaimana dijabarkan pada halaman berikut. Masing-masing inisiatif strategis harus dijabarkan dalam rencana program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 disertai dengan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja tersebut. 4. Melakukan penelaahan dan evaluasi untuk penentuan detail KPI untuk masing-masing BUMN mengacu pada ketentuan yang ada dan atau sesuai kebijakan yang dikoordinasikan oleh Wakil Menteri BUMN yang membidangi BUMN yang bersangkutan dengan memperhatikan panduan sebagaimana KPI setiap Klaster dan Sub Klaster tersebut. 5. Melakukan penelaahan dan evaluasi pendirian DPPK yang telah melakukan *due diligence* dengan kondisi kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari nilai kini aktuarial dan hasil rasio pendanaan/kualitas pendanaan di bawah ketentuan (Rasio Kecukupan Dana <100%) dan menyusun roadmap/rencana inisiatif perbaikan/penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun serta dituangkan dalam bagian KPI perspektif pengembangan talenta.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara berkala atas Inisiatif Strategis, Aspirasi Pemegang Saham dan *Key Performance Indicators* (KPI) Klaster/Sub Klaster **Output:** Surat Dewan Komisaris dalam bentuk arahan/nasihat/persetujuan/rekomendasi

No	Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
	t. Supervise the Strategic Initiatives, Shareholder Aspirations and Key Performance Indicators (KPIs) of Cluster/Sub Cluster.	1. Reviewing and evaluating the strategic initiatives and KPIs of SOEs in 2023 must be in line with the strategic initiatives in the cluster roadmap, and RJPP of each SOE. 2. Reviewing and evaluating SOE strategic initiatives and KPIs for 2023 should be translated into five priority programs as described in the Ministry of SOE Strategic Plan. 3. Review and evaluation of strategic initiatives and KPIs for SOEs in 2023 for each cluster and sub-clusters are as described on the following page. Each strategic initiative must be described in a work program plan that will be implemented in 2023 accompanied by the amount of budget required in the implementation of the work program. 4. Review and evaluate the determination of detailed KPIs for each SOE referring to existing provisions and or in accordance with policies coordinated by the Deputy Minister of SOEs in charge of the SOE concerned by paying attention to guidelines such as KPIs for each Cluster and Sub-Cluster. 5. Review and evaluate the establishment of DPPKs that have conducted due diligence with a condition of lack of wealth for funding from actuarial present value and the results of funding ratio/funding quality below the provisions (Fund Adequacy Ratio <100%) and prepare a roadmap/initiative plan for improvement/resolution in accordance with the laws and regulations in the pension fund sector and as outlined in the KPI section of the talent development perspective.	The Board of Commissioners conducts regular supervision of Strategic Initiatives, Shareholder Aspirations and Key Performance Indicators (KPIs) of Cluster/Sub Cluster. **Output:** Board of Commissioners letter in the form of direction/advice/approval/ recommendation
	u. Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris	Dewan Komisaris berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek pelaksanaan tugas pengawasannya. Untuk itu, diperlukan evaluasi atas kinerja Anggota Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap Anggota Dewan Komisaris dan Organ Pendukung berkontribusi secara optimal sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.	Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja secara mandiri sesuai dengan indikator yang telah disusun. **Output:** Dokumen hasil evaluasi kinerja.
	u. Performance Evaluation of Members of the Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners	The Board of Commissioners is committed to applying the principles of good corporate governance in the implementation of its supervisory duties. For this reason, it is necessary to evaluate the performance of Members of the Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners on a regular basis. This is done to ensure that each Member of the Board of Commissioners and Supporting Organ contributes optimally in accordance with their respective scope of duties.	The Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners conduct performance assessment independently in accordance with the indicators that have been prepared. **Output:** Performance evaluation result document.

PENILAIAN KINERJA ORGAN DAN KOMITE PENDUKUNG DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dasar Penilaian

Dasar penilaian terhadap organ di bawah Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas, baik dalam bentuk rapat untuk menyampaikan rekomendasi, pembahasan materi tertentu, maupun kegiatan reguler yang telah melekat pada fungsi. Selain itu, organ-organ tersebut juga melaksanakan penugasan lain yang berkenaan dengan fungsi Dewan Komisaris serta Organ Pendukung Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja mandiri dengan secara sesuai indikator yang telah disusun.

Dewan Komisaris juga menjadikan rencana kerja organ di bawahnya sebagai dasar penilaian kinerja. Karena itu, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan rencana kerja tersebut selalu dilakukan secara berkala.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Penilaian kerja Sekretaris Dewan Komisaris sejalan dengan realisasi kegiatan tahunan Dewan Komisaris yang diwujudkan melalui kegiatan rutin seperti pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sebanyak 51 kali rapat yang terdiri dari rapat rutin kinerja bulanan maupun rapat non-rutin; membantu konsep surat/korespondensi Dewan Komisaris sebanyak 138 surat, menjadi penghubung (liaison officer) bagi Dewan Komisaris; serta memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun buku 2024, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit tahun 2024 direalisasikan melalui program kerja yang telah direncanakan di awal tahun. Di sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melakukan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal; pengawasan kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP); telaah capaian kinerja Perusahaan; perjalanan dinas dalam rangka meninjau langsung lapangan; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Komite Audit sepanjang tahun buku 2024, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUPPORTING ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Basis of Assessment

The basis for assessing the organs under the Board of Commissioners is the performance of their duties, whether in the form of meetings to submit recommendations, discuss specific matters, or regular activities inherent to their functions. In addition, these organs also carry out other tasks related to the functions of the Board of Commissioners, and the Supporting Organs of the Board of Commissioners conduct independent performance assessments in accordance with the indicators that have been established.

The Board of Commissioners also uses the work plans of subordinate organs as the basis for performance assessment. Therefore, evaluation and monitoring of the implementation of the work plan is always carried out periodically.

Performance Assessment of the Secretary to the Board of Commissioners

The assessment of the work of the Secretary of the Board of Commissioners is in line with the realisation of the annual activities of the Board of Commissioners which are realised through routine activities such as the implementation of meetings and non-routine meetings; helped draft 138 letters/correspondence from the Board of Commissioners, served as liaison officer for the Board of Commissioners; and provide information required by the Board of Commissioners periodically and at any time.

Regarding the implementation of the duties carried out by the Secretary of the Board of Commissioners throughout the 2024 financial year, the Board of Commissioners gave an assessment: "Very Good".

Audit Committee Performance Assessment

The 2024 Audit Committee performance assessment will was conducted based on a work program planned at the beginning of the year. Throughout 2024, the Audit Committee has reviewed the Internal Audit Unit Audit Results Report; monitoring the performance of the Public Accounting Firm (KAP); review the Company's performance achievements; official site visits to inspect the field directly; and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the areas of responsibility. Regarding the implementation of the tasks carried out by the Audit Committee throughout the 2024 financial year, the Board of Commissioners gave an assessment: "Very Good".

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko diwujudkan melalui pelaksanaan program yang direncanakan di awal tahun. Komite ini juga telah melakukan pengawasan atas implementasi RKAP dan RJPP, sistem pengendalian internal Perusahaan, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, pengelolaan SDM, pengadaan, mutu dan layanan, pemantauan pengurusan Perusahaan dalam rangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, evaluasi atas Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan KPI individu Direksi, serta perjalanan dinas dalam rangka meninjau langsung lapangan. Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun buku 2024, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

Penilaian Kinerja Komite Nominasi & Remunerasi

Penilaian kinerja Komite Nominasi & Remunerasi diwujudkan dengan kontribusinya terkait dengan pengembangan talenta di lingkungan Perusahaan. Komite tersebut merupakan Talent Committee untuk Direksi dan BOD-1 yang rekomendasinya disampaikan kepada Menteri BUMN melalui Deputi SDM, Teknologi dan Informasi. Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi & Remunerasi telah menjalankan mandat yang diberikan sehingga memberikan kontribusi besar bagi kesinambungan Perusahaan. Karena itu, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

Risk Management Monitoring Committee Performance Assessment

The performance assessment of the Risk Management Monitoring Committee was carried out based on programs planned at the beginning of the year. This committee has also supervised the implementation of RKAP and RJPP, the Company's internal control system, risk management, information technology systems, HC management, procurement, quality and services, monitoring Company management in the context of compliance with GCG principles, evaluation of Performance Assessment Criteria Unggul (KPKU) and individual KPI for Directors, including official site visits to directly inspect the field. Regarding the implementation of the tasks carried out by the Risk Management Monitoring Committee throughout the 2024 financial year, the Board of Commissioners gave an assessment: "Very Good".

Nomination & Remuneration Committee Performance Assessment

The performance assessment of the Nomination & Remuneration Committee was assessed based on its contributions to talent development within the Company. This committee is a Talent Committee for Directors and BOD-1 whose recommendations are submitted to the Ministry of SOE through the Deputy for Human Capitals, Technology and Information. Throughout 2024, the Nomination & Remuneration Committee has carried out its mandate thus making a major contribution to the Company's sustainability. Therefore, the Board of Commissioners gave an assessment: "Very Good".

Penilaian Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan sejumlah aktivitas sesuai dengan fungsinya, yang antara lain mencakup:

1. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Entitas Induk atau Entitas Anak;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain: Audit Intern, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, serta dapat mengundang Direksi Holding dan Direksi Anak Perusahaan (jika sewaktu-waktu dibutuhkan) untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; dan
7. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun buku 2024, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

Integrated Governance Committee Performance Assessment

Throughout 2024, the Integrated Governance Committee has carried out a number of activities in accordance with its functions, which include

1. Conducting evaluations of the Integrated Governance policies;
2. Monitoring and evaluating the compliance of the Integrated Governance policies of the Parent Entity or Subsidiary Entities;
3. Evaluating the implementation of Integrated Governance, at least through an assessment of the adequacy of internal controls and the integrated implementation of compliance functions;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners for the improvement of Integrated Governance policies;
5. Communicating with work units for functions including: Internal Audit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Capitals, and operational aspects of the business as required, and may invite the Holding Company's Board of Directors and the Board of Directors of the Subsidiary Company (if necessary) to obtain information, clarification, and request reports as required in an integrated manner;
6. Monitoring and evaluating the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders/Minister; and
7. Exercising other authorities, duties, and responsibilities related to its functions.

Regarding the performance of its duties by the Integrated Governance Committee for the fiscal year 2024, the Board of Commissioners issues the following assessment: "Very Good".

Komisaris Independen
Independent Commissioners

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen serta menjaga fairness. Komisaris Independen diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham minoritas termasuk Pemegang Saham publik dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, managerial, ownership, or familial ties with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or with companies that might prevent or inhibit their position from acting independently in accordance with the principles. GCG principles.

The existence of Independent Commissioners aims to create a more objective and independent climate and maintain fairness. Independent Commissioners are expected to be able to provide a balance between the interests of majority Shareholders and protection of the interests of minority Shareholders including public Shareholders and other Stakeholders.

The appointment of Independent Commissioners is regulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen Perusahaan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

CRITERIA FOR DETERMINING INDEPENDENT COMMISSIONERS

The existence of an Independent Commissioner in the Company always ensures that the monitoring mechanism runs effectively and in accordance with statutory regulations. The criteria for determining the Company's Independent Commissioners are in accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely:

1. Is not currently and has not within the last six (6) months been involved in planning, leading, controlling, or supervising,except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;
2. Does not own shares in the Company, either directly or indirectly;
3. Has no affiliation with the Commissioners, Directors and Major Shareholders of the Company;
4. Has no business relationship with the Company, either directly or indirectly.

Komisaris Independen PTPI telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana disebutkan di atas. Kepatuhan tersebut juga telah dinyatakan oleh masing-masing Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan yang diperbarui setiap tahun.

PTPI Independent Commissioners have met the independence criteria as stated above. This compliance has also been stated by each Independent Commissioner by signing a statement letter which is updated every year.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perusahaan
Composition and Membership of Independent Commissioners in the Company's Board of Commissioners

Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	SK-262/MBU/08/2020	4 Agustus 2020–RUPS Tahun 2025 August 4, 2020–AGM 2025	Ke-1 1st
Mustoha Iskandar	SK-262/MBU/08/2020	4 Agustus 2020–RUPS Tahun 2025 August 4, 2020–AGM 2025	Ke-1 1st
Anhar Adel	SK-13/MBU/01/2020	9 Januari 2020–21 November 2024 January 9, 2020–November 21, 2024	Ke-1 1st
Riswinandi	SK/53/MBU/03/2024	4 Maret 2024-RUPS 2029 March 4, 2024-AGMS 2029	Ke-1 1st
Danar Rahmanto	SK-188/MBU/07/2024	22 Juli 2024-RUPS 2029 July 22, 2024-AGMS 2029	Ke-1 1st
Irfan Ahmad Fauzi	SK-188/MBU/07/2024	22 Juli 2024-RUPS 2029 July 22, 2024-AGMS 2029	Ke-1 1st

INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam menjalankan fungsinya, Komisaris Independen terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Pernyataan independensi tersebut disampaikan melalui tabel di bawah ini.

INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

In carrying out their functions, Independent Commissioners are free from the interests of any party. This statement of independence is presented in the table below .a

Aspek Independensi Independence Aspect	Darmin Nasution	Mustoha Iskandar	Anhar Adel *	Riswinandi**	Danar Rahmanto***	Irfan Ahmad Fauzi***
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or activities of the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Major Shareholders.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi Independence Aspect	Darmin Nasution	Mustoha Iskandar	Anhar Adel *	Riswinandi**	Danar Rahmanto***	Irfan Ahmad Fauzi***
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Menjabat hingga 21 November 2024 | *Serving until November 21, 2024
** Menjabat sejak 4 Maret 2024 | ** Serving since March 4, 2024
*** Menjabat sejak 22 Juli 2024 | *** Serving since July 22, 2024

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen
Statement of Independence of Independent Commissioners



PAKTA INTEGRITAS
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Saya, **Darmin Nasution, Komisaris Utama (Independen)/Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi**
Dalam rangka turut berupaya mewujudkan DUNIA USAHA yang BERSIH, TRANSPARAN, dan PROFESIONAL

menyatakan sebagai berikut:

1. Sanggup mengemban amanah dan memegang teguh Prinsip-prinsip Dasar Integritas Perusahaan atas dasar kepercayaan (fiduciary duties), mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau (duty of care), berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan (responsibility), secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi (duty of loyalty), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (conflict of interest rule), mematuhi ketentuan internal Perusahaan termasuk Pedoman Perilaku (code of conduct) dan semua ketentuan perundangan yang berlaku (accountability) serta tidak memberikan toleransi terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan.
3. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Komisaris Utama (Independen)/Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, serta Kontrak Manajemen yang telah saya tandatangani.
4. Sanggup menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data dan informasi Perusahaan, baik digital maupun hardcopy, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen)/Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan maupun rangkap jabatan yang bertentangan dengan pengangkatan sebagai Komisaris Utama (Independen)/Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi pada perusahaan ini, sesuai peraturan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
6. Selama masa perugasan, akan menggunakan setiap manfaat yang diperoleh dari remunerasi dan fasilitas yang diberikan dan disediakan oleh Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris Utama (Independen)/Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan dan memperhatikan ketentuan serta kebijakan yang berlaku di Perusahaan.
7. Apabila berdasarkan penilaian RUPS, saya tidak mencapai kinerja yang ditetapkan dan atau tidak mentaati pakta integritas ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi akibat hal tersebut dan menerima sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana termaktub dalam surat pernyataan ini.

Jakarta, 12 Maret 2024

Yang Menyatakan :
Komisaris Utama (Independen)/Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

Darmin Nasution

• Amanah • Kompeten • Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

Bahwa Seluruh Komisaris secara periodik telah mendatangani pakta integritas sebagai independensi dalam melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap pengurusan Perusahaan.

All Commissioners have periodically signed an integrity pact as proof of their independence in supervising and advising the management of the Company.

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Hal ini mencerminkan wujud akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, auditor eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

KRITERIA DAN PERSYARATAN DIREKSI

Direksi merupakan jabatan strategis di lingkungan Perusahaan yang akan menciptakan keunggulan pengelolaan dan daya saing Perusahaan. Dengan demikian, posisi Direksi membutuhkan kelengkapan persyaratan dan kompetensi tertentu. Di lingkungan Perusahaan, terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi. Persyaratan tersebut adalah:

PERSYARATAN FORMAL

Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

The Board of Directors is a Company organ with the authority and full responsibility to manage the Company in the best interest of the Company, in accordance with the Company's aims and objectives. The Board of Directors represents the Company both inside and outside the court in accordance with the articles of association and applicable laws and regulations, the Articles of Association and GMS Resolutions.

The Board of Directors is accountable to the Shareholders, through the GMS, for the execution of its duties. This reflects a form of accountability in the management of the Company in accordance with GCG principles. The performance of the Directors is evaluated by the Board of Commissioners and reported to the GMS. The Board of Directors follows up on audit findings and recommendations from Internal Audit, external auditors and/or the results of supervision by other authorities.

CRITERIA AND REQUIREMENTS FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a strategic position within the Company that will create management excellence and the Company's competitiveness. Thus, the position of Director requires completeness of certain requirements and competencies. Within the Company, there are 3 (three) types of requirements that must be met by prospective members of the Board of Directors. These requirements are:

FORMAL REQUIREMENTS

Company Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to appointment:
1. Declared bankrupt;
2. Has served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners/Supervisory Board and was found guilty of causing a SOE and/or company to be declared bankrupt;
3. Convicted of committing a criminal act that is detrimental to the finances of the state, SOE, Company, and/or related to the financial sector.

PERSYARATAN MATERIAL

Persyaratan material Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:
1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;
4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

PERSYARATAN LAIN

Persyaratan lain Direksi BUMN adalah sebagai berikut:
1. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat 1, dan DPRD Tingkat II;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Anggota Direksi Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha milik swasta;

2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

SUKSESI: NOMINASI, PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi dilakukan jika persyaratan formal,

MATERIAL REQUIREMENTS

Material requirements for Directors of State-Owned Enterprises (SOE), namely:
1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;
4. Experience;
5. Honest;
6. Good behavior; And
7. High dedication to advancing and developing the company.

OTHER REQUIREMENTS

Other requirements for SOE Directors are as follows:
1. Not a political party administrator and/or legislative candidate and/or legislative member. Candidates for legislative members or legislative members consist of candidates/members of the DPR, DPD, DPRD Level 1, and DPRD Level II;
2. Not a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head;
3. Not serving as a Director of the relevant SOE for 2 (two) consecutive periods;
4. Have dedication and devote full time to carrying out their duties; And
5. Physically and mentally fit (with no medical conditions that may impair the ability to perform duties as a SOE Director, as evidenced by a doctor's certificate.)

Members of the Company's Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions with the following provisions:
1. Member of the Board of Directors of SOE, RegionalOwned Enterprises (BUMD), and private-owned enterprises;
2. Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of statutory regulations, political party administrators and/or legislative candidates/members and/or regional head/deputy regional head candidates;
5. Other positions that may potentially lead to a conflict of interest.

SUCCESSION: NOMINATION, PROPOSAL, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF DIRECTORS

The appointment and dismissal of members of the Board of Directors is carried out through the GMS in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Capitals of State-Owned Enterprises. The appointment of Directors

lainnya dan materiel sesuai dengan ketentuan yang ada.

Rincian tentang suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Kebijakan dan Prosedur Nominasi serta Suksesi Direksi dalam bab ini.

is carried out if the formal, other and material requirements comply with existing regulations.

Details on Board of Directors succession can be seen in the section on Board of Directors Nomination and Succession Policies and Procedures in this chapter.

MASA JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Syarat yang menyertainya adalah tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

TERM OF OFFICE OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors are appointed for a term starting from the closing date or the date determined by the GMS that appointed them and ending at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment. The term shall not exceed five (5) years, taking into account statutory regulations, but does not reduce the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office ends.

After the term of office ends, the Directors can be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the right of the GMS to dismiss at any time.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak terjadi perubahan komposisi dan pergantian nomenklatur Direksi.

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF DIRECTORS IN 2024

Throughout 2024, there will be changes in the composition and nomenclature of the Board of Directors.

Komposisi Direksi Periode 1 Januari—31 Desember 2024
Composition of the Board of Directors Period January 1—December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Rahmad Pribadi	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-212/MBU/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-212/MBU/07/2023 dated July 27, 2023	27 Juli 2023 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 July 27, 2023 to the AGM to be held in 2028	Ke-1 1st
Gusrizal	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023	2 November 2023 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 November 2, 2023 to the AGM to be held in 2025	Ke-2 2nd
Bob Indiarto	Direktur Produksi Production Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st

Komposisi Direksi Periode 1 Januari—31 Desember 2024

Composition of the Board of Directors Period January 1—December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 December 22, 2021 to AGM to be held in 2026	Ke-1 1st
	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finance & Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023		
	Direktur Keuangan Finance Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023		
Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Business Transformation Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st
Tina T. Kemala Intan	Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko Director of HC, Governance, and Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 December 22, 2021 to AGM to be held in 2026	Ke-1 1st
	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023		
Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran Marketing Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023	2 November 2023 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 November 2, 2023 until the AGM to be held in 2028	Ke-1 1st
Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Director of Portfolio & Business Development	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2021 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 July 16, 2021 until the AGM to be held in 2026	Ke-1 1st
Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 20203 Decree of the Ministry of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023	2 November 2023 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 November 2, 2023 until the AGM to be held in 2028	Ke-1 1st

INDEPENDENSI DIREKSI

Dalam menjalankan fungsinya, Direksi bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Direksi Perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan saham dan rangkap jabatannya, di mana tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham di Perusahaan dan perusahaan lain yang berhubungan dengan Perusahaan, serta tidak merangkap jabatan di perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan.

BOARD MANUAL: PEDOMAN KERJA DIREKSI

Perusahaan memiliki Pedoman Kerja (Board Manual) Direksi yang digunakan sebagai pedoman umum bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTPI dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanat Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut pertama kali disahkan dan diterbitkan pada tanggal 5 November 2012.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemutakhiran/revisi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. Board manual yang baru tersebut saat ini sudah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 001/KEP.KOM/II/2022 dan No. 012.2/A/KU/A24/SK/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PTPI.

Adapun board manual yang mengatur tentang Direksi, antara lain:
1. Fungsi Direksi;
2. Persyaratan Direksi;
3. Tugas dan Wewenang Direksi;
4. Tata Laksana Kewenangan Direksi;
5. Kewajiban Direksi;
6. Rangkap Jabatan;
7. Etika Jabatan Anggota Direksi;
8. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi;
9. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
11. Rapat Direksi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
12. Penilaian Kinerja Direksi.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its functions, the Board of Directors acts independently and is free from the interests of any party. The independence of the Company's Directors can be seen from their share ownership and concurrent positions, where there are no members of the Board of Directors who own shares in the Company and other companies related to the Company, and do not hold concurrent positions in companies that have business relationships with the Company

BOARD MANUAL: DIRECTORS' WORK GUIDELINES

The Company has a Board Manual for Directors which is used as a general guideline for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PTPI in carrying out their functions and roles as bearers of the Company's mandate in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. The manual was first ratified and published on November 5, 2012.

In 2017 updates/revisions were carried out in accordance with the Company's developments and needs. The new board manual has now been approved through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTPI No. 001/KEP.KOM/II/2022 and No. 012.2/A/KU/A24/SK/2022 dated February 16, 2022 concerning Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) of PTPI.

The board manual that regulates the Board of Directors includes, among other things:
1. Functions of the Board of Directors;
2. Requirements for Directors;
3. Duties and Authorities of the Board of Directors;
4. Management of the Authority of the Board of Directors;
5. Obligations of the Board of Directors;
6. Multiple Positions;
7. Position Ethics for Members of the Board of Directors;
8. Competency Introduction and Improvement Program;
9. Company Long Term Plan (RJPP);
10. Company Work Plan and Budget (RKAP);
11. Board of Directors Meetings and Decision Making Mechanisms;
12. Performance Assessment of Directors.

TUGAS DIREKSI

Tugas yang menjadi kewajiban Direksi sesuai dengan yang tercantum dalam board manual adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Direksi berwenang untuk:
   a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dan Anak Perusahaan;
   b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
   c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
   d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
   g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

DUTIES OF DIRECTORS

The duties that are the obligations of the Board of Directors as stated in the board manual are as follows:

1. The Board of Directors is tasked with carrying out all actions related to the management of the Company for the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company including representing the Company in and out of court regarding all matters and all events with limitations as regulated in statutory regulations, Articles of Association and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

2. In carrying out the duties as intended in point (1), the Board of Directors has the authority to:
   a. Determine Company and Subsidiary management policies;
   b. Regulate the transfer of the powers of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company inside and outside the court;
   c. Regulate the transfer of the powers of the Board of Directors to a person or several employees of the Company, either individually or jointly or to other people, to represent the Company inside and outside the court;
   d. Regulate provisions regarding Company employment including the determination of salaries, pensions or old age security, and other income for Company workers based on applicable laws and regulations, with provisions for determining salaries, pensions or old age security, and other income for employees exceeding the obligations determined by statutory regulations, must obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders;
   e. Appoint and dismiss Company employees based on Company personnel regulations and applicable laws and regulations;
   f. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and Head of the Internal Audit Unit based on the Company's internal mechanism with approval from the Board of Commissioners;
   g. Carrying out all actions related to the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties, and/or other parties with the Company and representing the Company inside and outside the court regarding all matters and all events, with restrictions as regulated in the regulations legislation, Articles of Association and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders;

h. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Entitas Anak dan/atau perusahaan patungan;
i. Menetapkan kebijakan terhadap Entitas Anak dalam bidang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, pada bidang-bidang antara lain sebagai berikut:
   - Pemasaran dan penjualan;
   - Penelitian dan pengembangan;
   - Supply chain management dan cost management;
   - Pengadaan barang dan/atau jasa;
   - Finance dan audit serta manajemen risiko dan kepatuhan;
   - Manajemen talenta dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi;
   - Hukum;
   - Bidang lainnya.

h. Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries and/or joint venture companies;
i. Establish policies for Subsidiaries in the fields specified in the Articles of Association, in areas including the following:

   - Marketing and sales;
   - Research and development;
   - Supply chain management and cost management;
   - Procurement of goods and/or services;
   - Finance and audit as well as risk management and compliance;
   - Integrated talent management and Human Capital development;
   - Law;
   - Other fields.

KEWAJIBAN DIREKSI

Kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
5. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
6. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
7. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
8. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

DIRECTORS OBLIGATIONS

The obligations of the Board of Directors as regulated in the Company's Articles of Association and applicable provisions are as follows:

1. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives and business activities.
2. Prepare in a timely manner the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, and any amendments thereto and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for approval by the General Meeting of Shareholders.
3. Submit the Board of Directors' KPI proposals collegially to the GMS/Minister to be determined simultaneously with the submission of the Company's Work Plan and Budget.
4. Break down the collective Directors' KPIs into individual KPIs and submit them to the Board of Commissioners for approval.
5. Provide an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget.
6. Make a Shareholders List, Special List, Minutes of General Meeting of Shareholders, and Minutes of Directors' Meetings.
7. Prepare the Annual Report as a statement of accountability for Company management, as well as Company financial documents as intended in the law concerning Company Documents.
8. Prepare Financial Reports based on Financial Accounting Standards and submit them to the Public Accountant for audit.

9. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
10. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan.
11. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan 5, dan dokumen Perusahaan lainnya.
14. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan dokumen berupa: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 11.
15. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
16. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
17. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
18. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
19. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
20. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Submit an Annual Report including Financial Reports to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification, as well as a report regarding the Company's rights which are not recorded in the financial statements, such as those written off due to uncollectible receivables.
10. Provide explanations to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report.
11. Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Report which have been approved by the General Meeting of Shareholders to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of statutory regulations.
12. Submit a report on changes to the composition of Shareholders, Directors and Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights.
13. Maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of General Meeting of Shareholders, Minutes of Meetings of the Board of Commissioners and Minutes of Meetings of the Directors, Annual Report and financial documents of the Company as referred to in points 4 and 5, and other Company documents.
14. Store at the Company's domicile documents in the form of: List of Shareholders, Special List, Minutes of General Meeting of Shareholders, Minutes of Meetings of the Board of Commissioners and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Annual Report and financial documents of the Company, as well as other Company documents as referred to in point 11.
15. Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage and supervision.
16. Provide periodic reports in a timely manner and in accordance with applicable regulations as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
17. Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties.
18. Provide explanations regarding all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders.
19. Prepare and determine the Company's organizational blue print.
20. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the General Meeting of Shareholders based on statutory regulations.

21. Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat.
22. Setelah berakhirnya masa jabatan, Anggota Direksi yang bersangkutan wajib:
    a. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
    b. Apabila Anggota Direksi meninggal dunia selama menjabat, maka ahli waris Anggota Direksi tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir a tersebut di atas.

Kewajiban Direksi lainnya adalah sebagai berikut:
1. Menyusun GCG Manual di antaranya dapat memuat Board Manual, Pedoman Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata Kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
2. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG.
3. Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan/atau Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan dan Anak Perusahaan/ Perusahaan patungan Perseroan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.
4. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
5. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

21. Create and submit Official Asset Reports.

22. After the end of the term of office, the relevant member of the Board of Directors is obliged to:
    a. Return all documentation relating to previously held positions to the Company no later than 30 (thirty) calendar days;
    b. If a member of the Board of Directors dies while serving, the heirs of the member of the Board of Directors are required to return the documentation in accordance with point a above.

Other obligations of the Board of Directors are as follows:
1. Prepare a GCG Manual which may include a Board Manual, Risk Management Guidelines, Internal Control System, Internal Monitoring System, reporting mechanism for suspected irregularities in the relevant SOE, information technology governance, and ethical behavior guidelines (code of conduct).
2. One member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors Meeting as the person responsible for implementing and monitoring GCG.
3. Submit information regarding identity, main jobs, position of the Board of Commissioners in Subsidiaries/ Joint Companies and/or other Companies, including meetings held in one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salary , facilities, and/or other benefits received from the Company and the Company's Subsidiaries/Joint Companies, to be included in the SOE Annual Report.
4. Report to the Company regarding his and/or his family's (wife/husband and children) share ownership in the Company and other companies, including any changes.
5. Ensure that business assets and locations as well as other facilities comply with statutory regulations relating to occupational health and safety and environmental preservation.

PEMBAGIAN LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi melakukan pembagian tugasnya secara masing-masing yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi berjalan efektif dan efisien. Adapun untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi, sebagai berikut:

DIVISION OF SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out their duties, the Directors are assigned specific duties and responsibilities to ensure effective and efficient execution. The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are outlined in the Directors' Decree, as follows:

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duty of Each Director

Direksi Board of Directors	Tugas Tasks
Rahmad Pribadi Direktur Utama President Director	Mengkoordinir tugas-tugas yang dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Wakil Direktur Utama, Direktur Produksi, Direktur Keuangan, Direktur Transformasi Bisnis, Direktur SDM, Direktur Pemasaran, Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha, dan Direktur Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan sesuai dengan ketentuan job description (uraian jabatan), Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Coordinating tasks carried out by and under the responsibility of the Vice President, Production Director, Finance Director, Business Transformation Director, Human Capital Director, Marketing Director, Portfolio & Business Development Director, and Risk Management Director in carrying out their duties in managing the Company in accordance with the provisions of their job descriptions, the Articles of Association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders.
	Menetapkan dan memutuskan arah dan kebijakan strategis Perseroan serta menetapkan visi, misi dan nilai-nilai korporasi bagi Anak Perusahaan Perseroan ("Anak Perusahaan"), serta general guideline untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder. Determining and deciding the strategic direction and policy of each field as well as establishing the vision, mission and corporate values for the Company's Subsidiaries ("Subsidiaries"), as well as general guidelines to fulfill the interests of all stakeholders.
	Mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan Sistem Manajemen Terpadu untuk menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh manajemen Anak Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan. Directing, establishing, and controlling the Integrated Management System to serve as a guideline and reference for all Subsidiary management in achieving the company's objectives.
	Mengoptimalkan tingkat pendapatan dan laba perusahaan serta menghasilkan manfaat (benefit) bagi seluruh stakeholders Perusahaan, sesuai dengan visi, misi, rencana, dan strategi perusahaan. Ensure the continuity of the company's business to optimize the level of revenue and profit of the company and generate benefits for all stakeholders of the company, in accordance with the vision, mission, plans and strategies of the company.

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duty of Each Director

Direksi Board of Directors	Tugas Tasks
	Mengarahkan dan menetapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan jalannya kegiatan operasional dan pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan kebijakan dan peraturan dan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Directing and establishing the internal control system to ensure the operation and achievement of the company's performance in accordance with policies and laws and regulations, the Articles of Association and the Company's Long Term Plan and Budget Work Plan.
	Mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan dalam pengembangan program community development, agar sesuai dengan kebijakan dan keputusan Pemerintah, visi, misi, dan strategi Perusahaan. Direct, establish, and control policies in the development of community development programs, in order to be in accordance with Government policies and decisions, the Company's vision, mission and strategy.
	Mengarahkan dan menetapkan kebijakan bidang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan target perusahaan. Direct and establish policies in the field of Human Capital management and organizational development in accordance with the development and needs of Subsidiaries to support the achievement of the company's vision, mission and targets.
	Menetapkan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, asumsi dan parameter anggaran Korporasi dan Anak Perusahaan, sehingga visi dan misi Perusahaan tercapai. Establish the Long-Term Plan, Corporate Work Plan and Budget, assumptions and budget parameters of the Corporation and Subsidiaries, so that the vision and mission of the company are achieved.
	Mengkoordinasikan dan menetapkan arah dan kebijakan, serta standardisasi & harmonisasi bidang keuangan, pemasaran, logistik dan distribusi, investasi, penelitian dan pengembangan, produksi & pemeliharaan, perhitungan overhead cost, pengadaan, pengelolaan aset, sdm, kepatuhan (compliance) dan pengembangan Human Capital management bagi Anak Perusahaan agar berjalan sesuai dengan strategi untuk mencapai target-target perusahaan yang telah ditetapkan. Establish direction and policies, as well as standardization & harmonization in the fields of finance, marketing, logistics and distribution, investment, research and development, production & maintenance, overhead cost calculation, procurement, asset management, Human Capitals, and Human Capital management development for Subsidiaries to run in accordance with the strategy to achieve the company's targets that have been set.
	Menentukan arah dan kebijakan program-program peningkatan capital expenditure untuk mendukung pengembangan Anak Perusahaan pada taraf yang optimal guna efisiensi perusahaan. Determine the direction and policy of capital expenditure improvement programs to support the development of Subsidiaries at an optimal level for corporate efficiency.
	Menetapkan arah dan kebijakan penetapan Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicator (KPI) bagi Anak Perusahaan serta besaran dividen Anak Perusahaan agar tercipta keadilan dan sinergi yang baik bagi seluruh holding. Establish the direction and policy of determining the Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicator (KPI) for Subsidiaries and the amount of dividends of Subsidiaries in order to create fairness and good synergy for the entire holding.
	Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Holding maupun Anak Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya seluruh kepentingan Stakeholders Perusahaan. Conduct the General Meeting of Shareholders (GMS) of Holding and Subsidiaries to ensure the fulfillment of all interests of the Company's stakeholders.
	Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham serta Laporan Tahunan kepada RUPS. Provide explanations on all matters asked or requested by Members of the Board of Commissioners and Shareholders as well as the Annual Report to the General Meeting of Shareholders.
	Membuat Laporan Tahunan serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Prepare annual reports and other reports in accordance with applicable regulations.
	Menjalin dan membina hubungan yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintahan dan asosiasi profesi yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan di bidang industri pupuk untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis Perusahaan. Establish and maintain good and harmonious relationships with government agencies and professional associations related to the Company's main business activities in the fertilizer industry to ensure the alignment of the Company's work plans and strategic programs.

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duty of Each Director

Direksi Board of Directors	Tugas Tasks
	Koordinasi dan integrasi program-program Korporasi Holding dan Anak Perusahaan untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis Perusahaan. Coordination and integration of Corporate Holding and Subsidiary programs to ensure alignment of work plans and strategic programs of the Company.
Gusrizal Wakil Direktur Utama Vice President Director	Membantu Direktur Utama dalam menetapkan dan memutuskan arah dan kebijakan strategis setiap bidang serta menetapkan visi, misi dan nilainilai korporasi bagi Anak Perusahaan PTPI ("Anak Perusahaan"), serta general guideline untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder. Assist the President Director in setting and deciding the strategic direction and policies of each field as well as establishing the vision, mission and corporate values for Subsidiaries of PTPI ("Subsidiaries"), as well as general guidelines to meet the interests of all stakeholders.
	Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan Sistem Manajemen Terpadu untuk menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh manajemen Anak Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan. Assist the President Director in directing, establishing, and controlling the Integrated Management System to serve as a guideline and reference for all Subsidiary management in achieving corporate goals.
	Membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan kelangsungan usaha Perusahaan untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan dan laba Perusahaan serta menghasilkan manfaat (benefit) bagi seluruh stakeholders Perusahaan, sesuai dengan visi, misi, rencana dan strategi Perusahaan. Assisting the President Director in the implementation of the Company's business continuity to optimize the Company's revenue and profit levels and generate benefits for all Company stakeholders, in accordance with the Company's vision, mission, plans, and strategies.
	Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan dan menetapkan kebijakan bidang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan target Perusahaan. Assist the President Director in directing and establishing policies in the field of Human Capital management and organizational development in accordance with the development and needs of Subsidiaries to support the achievement of the Company's vision, mission and targets.
	Membantu Direktur Utama dalam menetapkan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, asumsi dan parameter anggaran Korporasi dan Anak Perusahaan, sehingga visi dan misi Perusahaan tercapai. Assist the President Director in establishing the Long Term Plan, Work Plan and Corporate Budget, assumptions and budget parameters of the Corporation and Subsidiaries, so that the vision and mission of the Company are achieved.
	Membantu Direktur Utama dalam menetapkan arah dan kebijakan, serta standardisasi dan harmonisasi bidang keuangan, pemasaran, logistik dan distribusi, investasi, penelitian dan pengembangan, produksi & pemeliharaan, perhitungan overhead cost, pengadaan, pengelolaan aset, SDM dan pengembangan Human Capital management bagi Anak Perusahaan agar berjalan sesuai dengan strategi untuk mencapai target-target Perusahaan yang telah ditetapkan. Assist the President Director in setting direction and policies, as well as standardization and harmonization in the fields of finance, marketing, logistics and distribution, investment, research and development, production & maintenance, overhead cost calculation, procurement, asset management, Human Capitals and Human Capital management development for Subsidiaries to run in accordance with the strategy to achieve the company's targets that have been set.
	Membantu Direktur Utama dalam menentukan arah dan kebijakan program-program peningkatan capital expenditure untuk mendukung pengembangan Anak Perusahaan pada taraf yang optimal guna efisiensi Perusahaan. Assist the President Director in determining the direction and policy of capital expenditure improvement programs to support the development of Subsidiaries at an optimal level for Company efficiency.
	Membantu Direktur Utama dalam menetapkan arah dan kebijakan penetapan Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicator (KPI) bagi Anak Perusahaan serta besaran dividen Anak Perusahaan agar tercipta keadilan dan sinergi yang baik bagi seluruh PTPI. Assisting the President Director in determining the direction and policy of determining the Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicator (KPI) for Subsidiaries and the amount of dividends of Subsidiaries in order to create fairness and good synergy for all PTPI.
	Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan RUPS Perseroan maupun Anak Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya seluruh kepentingan stakeholders Perusahaan. Assist the President Director in conducting the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company and its Subsidiaries to ensure the fulfillment of all interests of the Company's stakeholders.

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duty of Each Director

Direksi Board of Directors	Tugas Tasks
	Membantu Direktur Utama dalam memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham serta Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Assist the President Director in providing explanations on all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders as well as the Annual Report to the General Meeting of Shareholders.
	Membantu Direktur Utama dalam membuat Laporan Tahunan serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Assist the President Director in preparing Annual Reports and other reports in accordance with applicable regulations.
	Membantu Direktur Utama dalam menjalin dan membina hubungan yang baik dan harmonis dengan instansi Pemerintahan dan asosiasi profesi yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perusahaan di bidang industri pupuk untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis Perusahaan. Assist the President Director in establishing and maintaining good and harmonious relationships with Government agencies and professional associations related to the Company's main business activities in the fertilizer industry to ensure the alignment of the Company's work plans and strategic programs.
	Membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan koordinasi dan integrasi program-program Korporasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis Perusahaan. Assist the President Director in the implementation of coordination and integration of Corporate programs of the Company and its Subsidiaries to ensure the alignment of work plans and strategic programs of the Company.
	Mewakili Perusahaan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan penugasan dari Direktur Utama. Represent the Company and carry out other duties in accordance with the assignment of the President Director.
Bob Indiarto Direktur Produksi Production Director	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Produksi PTPI sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun Rencana Jangka Panjang serta ketentuan Pemerintah. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for the tasks and work under the Production Directorate of PTPI and Subsidiaries in accordance with the provisions set out in the RKAP and Long Term Plan and Government regulations.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bidang operasi dan produksi di lingkungan Perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis Perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for tasks and work in the field of operations and production within the Company to increase productivity and efficiency in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bidang pengadaan yang mencakup pengadaan strategis dan pengadaan operasional di PTPI dan Anak Perusahaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis Perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for tasks and work in the field of Procurement which includes procurement planning, strategic procurement and operational procurement at PTPI and its Subsidiaries in accordance with applicable procedures and regulations to support the smooth running of the Company's business both short and long term.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan terkait dengan proyek pengembangan bidang produksi dan pengadaan di lingkungan PTPI dan Anak Perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for work related to production and procurement development projects within PTPI and its Subsidiaries to support the smooth running of the company's business in both the short and long term.

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duty of Each Director

Direksi Board of Directors	Tugas Tasks
Wono Budi Tjahyono Direktur Keuangan Finance Director	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kebijakan di Direktorat Keuangan PTPI di bidang keuangan & pendanaan Investasi, akuntansi, serta kinerja korporat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan yang berlaku. Directing, coordinating, supervising, and controlling as well as being responsible for the planning, implementation, monitoring, and evaluation of programs and policies in the Finance Directorate of PTPI in the areas of finance & investment funding, accounting, and corporate performance in accordance with the provisions set forth in the RKAP and long-term plans as well as applicable regulations.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang keuangan dan pendanaan investasi PTPI dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang perbankan dan perbendaharaan, manajemen piutang dan asuransi, dan pendanaan investasi dan pasar modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, control, and be responsible for setting the direction and policies in the field of finance and investment funding at PTPI and its Subsidiaries, covering banking and treasury, accounts receivable and insurance management, and investment funding and capital markets in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business in both the short and long term.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang akuntansi PTPI dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi & pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and control, as well as be responsible for determining the direction and policies in the field of accounting at PTPI and its Subsidiaries, including financial accounting, management accounting, and verification & taxation in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business in both the short and long term.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang kinerja korporat PTPI dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang pengelolaan anggaran, analisa kinerja, dan manajemen kinerja bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang Directing, coordinating, supervising, and controlling, as well as being responsible for setting the direction and policies in the field of corporate performance of PTPI and its Subsidiaries, including budget management, performance analysis, and business performance management in accordance with applicable regulations to support the smooth operation of the company's business in both the short and long term.
	Melaksanakan pengurusan Perusahaan, penetapan strategi dan kebijakan unit kerja dan Anak Perusahaan serta penyusunan dan penyajian laporan bidang Keuangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS/Menteri. Carrying out company administration, determining strategies and policies for work units and Subsidiaries, and preparing and presenting financial reports in accordance with the principles of prudence in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders/Minister.
Panji Winanteya Ruky Direktur Transformasi Bisnis Business Transformation Director	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Transformasi Bisnis PTPI di bidang riset, perencanaan strategis, pengelolaan transformasi bisnis, sistem manajemen terpadu dan inovasi, teknologi informasi serta project-project Ad-Hoc transformasi bisnis untuk PTPI dan Anak Perusahaan sesuai KPI dari Pemegang Saham, RKAP maupun RJPP. Responsible for the implementation of tasks and work under the Business Transformation Directorate of PTPI in the fields of research, strategic planning, business transformation management, integrated management systems and innovation, information technology, and ad hoc business transformation projects for PTPI and its Subsidiaries in accordance with the KPIs of the Shareholders, the Annual Work Plan and Budget (RKAP), and the Long-Term Business Plan (RJPP).

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duty of Each Director

Direksi Board of Directors	Tugas Tasks
	Bertanggung jawab untuk menyusun arah dan kebijakan di bidang teknologi informasi PTPI dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang perencanaan strategis dan tata kelola TI, operasional sistem TI, infrastruktur dan layanan TI sesuai KPI dari Pemegang Saham, RKAP maupun RJPP. Responsible for formulating directions and policies in the field of information technology at PTPI and its Subsidiaries, covering strategic planning and IT governance, IT system operations, infrastructure, and IT services in accordance with the KPIs of the Shareholders, RKAP, and RJPP.
	Bertanggung jawab untuk menyusun arah dan kebijakan di bidang strategi korporat yang mencakup perencanaan srategis, pengelolaan transformasi bisnis, sistem manajemen terpadu dan inovasi PTPI dan Anak Perusahaan sesuai dengan KPI dari Pemegang Saham, RKAP maupun RJPP. Responsible for formulating direction and policies in the field of corporate strategy, including strategic planning, business transformation management, integrated management systems, and innovation at PTPI and its Subsidiaries in accordance with the KPIs of the Shareholders, the Annual Work Plan and Budget (RKAP), and the Long-Term Business Plan (RJPP).
	Bertanggung jawab untuk menyusun arah dan kebijakan di bidang riset mencakup perencanaan riset, riset teknologi, riset produk, serta riset kebijakan pupuk PTPI dan Anak Perusahaan sesuai KPI dari Pemegang Saham, RKAP, maupun RJPP. Responsible for formulating directions and policies in the field of research, including research planning, technology research, product research, and fertilizer policy research for PTPI and its Subsidiaries in accordance with the KPIs of the Shareholders, RKAP, and RJPP.
	Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan arah dan kebijakan project-project Ad-Hoc Transformasi Bisnis uang dilaksanakan oleh Senior Project Manager ("SPM") untuk PTPI dan Anak Perusahaan. Responsible for coordinating the formulation of direction and policies for Ad-Hoc Business Transformation projects implemented by Senior Project Managers ("SPM") for PTPI and its Subsidiaries.
Tina T. Kemala Intan Direktur SDM Human Capital Director	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktur Sumber Daya Manusia PTPI di bidang strategi & perencanaan SDM, manajemen & pengembangan SDM, operasional SDM, umum & aset serta tanggung jawab sosial & lingkungan sesuai RKAP maupun Rencana Jangka Panjang (RJP). Direct, coordinate, supervise, and be responsible for tasks and work under the Human Capital Director of PTPI in the areas of HC strategy & planning, HC management & development, HC operations, general & assets, and social & environmental responsibility in accordance with the Annual Work Plan (RKAP) and Long-Term Plan (RJP).
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan SDM bagi PTPI dan Anak Perusahaan yang mencakup strategi pengelolaan SDM, sistem SDM, desain organisasi serta perencanaan SDM untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien serta berorientasi pada produktifitas dan nilai tambah bagi pemegang saham. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for setting the direction and policies for Human Capitals for PTPI and its Subsidiaries, including Human Capitals management strategies, Human Capitals systems, organizational design, and Human Capitals planning to ensure effective and efficient Human Capital management that is oriented towards productivity and added value for shareholders.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan terkait manajemen dan pengembangan SDM bagi PTPI dan Anak Perusahaan untuk memastikan proses pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan pengembangan perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for determining the direction and policies related to Human Capital management and development for PTPI and its Subsidiaries to ensure that the Human Capital development process is in line with the company's development needs to support the smooth running of the company's business in both the short and long term.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan terkait operasional SDM bagi PTPI dan Anak Perusahaan untuk memastikan pengelolaan SDM yang meliputi kompensasi dan benefit, pengelolaan pascakerja, serta hubungan industrial berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for setting the direction and policies related to HC operations for PTPI and its Subsidiaries to ensure HC management, including compensation and benefits, post-employment management, and industrial relations, are carried out in accordance with applicable regulations

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duty of Each Director

Direksi Board of Directors	Tugas Tasks
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawan untuk menetapkan arah dan kebijakan bidang umum dan aset non produksi bagi PTPI dan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for setting the direction and policies for general affairs and non-production assets for PTPI and its Subsidiaries in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business in both the short and long term.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan terkait program tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi PTPI dan Anak Perusahaan sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan program TJSL Perusahaan serta mengevaluasi pelaksaan program TJSL Perusahaan untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada Perusahaan maupun kepada lingkungan. Directing, coordinating, supervising, and being responsible for establishing the direction and policies related to social and environmental responsibility programs for PTPI and its Subsidiaries as strategies and implementation guidelines to ensure the effectiveness and success of the Company's TJSL programs and evaluating the implementation of the Company's TJSL programs to measure performance and benefits to both the Company and the environment.
Tri Wahyudi Saleh Direktur Pemasaran Marketing Director	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Pemasaran PTPI dan Anak Perusahaan di bidang Strategic Marketing dan Marketing Operation sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan Pemerintah. Directs, coordinates, supervises and is responsible for tasks and work under the Marketing Directorate of PTPI and Subsidiaries in the field of Strategic Marketing and Marketing Operations in accordance with the provisions stipulated in the RKAP and long-term plans and Government regulations.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang Marketing Operation yang meliputi Logistic Optimization, PSO Planning Management, PSO Wilayah 1, PSO Wilayah 2 dan Commercial Marketing PTPI dan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Directs, coordinates, supervises and is responsible for establishing direction and policies in the field of Marketing Operations which includes Logistic Optimization, PSO Planning Management, PSO Region 1, PSO Region 2 and Commercial Marketing of PTPI and Subsidiaries in accordance with the provisions which applies to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang strategi pemasaran yang meliputi perencanaan strategi pemasaran, analisis pasar, strategi harga, menajemen produk dan komunikasi pemasaran di PTPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for setting directions and policies in the field of marketing strategy, including marketing strategy planning, market analysis, pricing strategy, product management, and marketing communications at PTPI in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business in both the short and long term.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek strategis di bawah Direktorat Pemasaran PTPI. Directs, coordinates, supervises and is responsible for the implementation of strategic projects under the Marketing Directorate of PTPI.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Pemasaran PTPI dan Anak Perusahaan di bidang Strategic Marketing dan Marketing Operation sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan Pemerintah. Directs, coordinates, supervises and is responsible for tasks and work under the Marketing Directorate of PTPI and Subsidiaries in the field of Strategic Marketing and Marketing Operations in accordance with the provisions stipulated in the RKAP and long-term plans and Government regulations.

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duty of Each Director

Direksi Board of Directors	Tugas Tasks
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang Marketing Operation yang meliputi Logistic Optimization, PSO Planning Management, PSO Wilayah 1, PSO Wilayah 2 dan Commercial Marketing PTPI dan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Directs, coordinates, supervises and is responsible for establishing direction and policies in the field of Marketing Operations which includes Logistic Optimization, PSO Planning Management, PSO Region 1, PSO Region 2 and Commercial Marketing of PTPI and Subsidiaries in accordance with the provisions which applies to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang strategi pemasaran yang meliputi perencanaan strategi pemasaran, analisis pasar, strategi harga, menajemen produk dan komunikasi pemasaran di PTPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for setting directions and policies in the field of marketing strategy, including marketing strategy planning, market analysis, pricing strategy, product management, and marketing communications at PTPI in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business in both the short and long term.
Jamsaton Nababan Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Portfolio & Business Development Director	Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha PTPI dan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan Pemerintah. Direct, coordinate, supervise and be responsible for the tasks and work under the Directorate of Portfolio & Business Development of PTPI and its Subsidiaries in accordance with the provisions set out in the RKAP and long-term plans and Government regulations.
	Melakukan analisis, evaluasi, dan mengusulkan rencana pengembangan mencakup investasi, pengembangan, dan proyek-proyek strategis berskala besar di lingkungan PTPI dan Anak Perusahaan. Analyze, evaluate and propose development plans including investment, development and largescale strategic projects within PTPI and its Subsidiaries.
	Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan arah dan kebijakan di bidang Pengembangan PTPI dan Anak Perusahaan sesuai kewenangan Direksi yang mencakup investasi, pengembangan Perusahaan menggunakan teknologi yang sudah proven, dan proyek-proyek strategis berskala besar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis Perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Coordinate and supervise the implementation of directions and policies in the field of Development of PTPI and Subsidiaries in accordance with the authority of the Board of Directors which includes the implementation of investment, implementation of development investment, and investment management in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	Mengkoordinasikan terlaksananya supply gas baru dan kontinuitas supply gas existing di lingkungan PTPI dan Anak Perusahaan. Coordinating the implementation of new gas supply and continuity of existing gas supply within PTPI and its Subsidiaries.
	Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan arah dan kebijakan di bidang Portofolio Bisnis PTPI dan Anak Perusahaan sesuai kewenangan Direksi yang mencakup bidang portofolio Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, dan Afiliasi serta sinergi dan kinerja portofolio afiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis Perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Coordinate and supervise the implementation of directions and policies in the business portfolio of PTPI and its Subsidiaries in accordance with the authority of the Board of Directors which includes the portfolio of Subsidiaries, Subsidiary companies and affiliates as well as the synergy and performance of affiliate portfolios in accordance with applicable regulations to support smooth running Company business both short and long term.
	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan di lingkungan PTPI dan Anak Perusahaan. Conduct monitoring, evaluation, and control of ongoing projects within PTPI and its Subsidiaries.
	Melakukan analisa, evaluasi, dan arah kebijakan serta mengusulkan investasi penyertaan termasuk penguasaan bahan baku non gas di PTPI dan Anak Perusahaan untuk kemajuan bisnis Perusahaan. Conduct analysis, evaluation, and policy direction and propose investment participation, including control of non-gas raw materials at PTPI and its Subsidiaries for the advancement of the Company's business.

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duty of Each Director

Direksi Board of Directors	Tugas Tasks
Ninis Kesuma Adriani Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas pekerjaan di bawah bidang Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan, serta Hukum PTPI sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP), Anggaran Dasar, peraturan perundangan, ketentuan pemerintah dan pemegang saham, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta Keputusan RUPS/Menteri. Directing, coordinating, supervising, and being responsible for work tasks under the Risk Management, Governance and Compliance, and Legal departments of PTPI in accordance with the Company Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJP), Articles of Association, laws and regulations, government provisions and shareholder provisions, principles of Good Corporate Governance (GCG) and the decisions of the General Meeting of Shareholders/Minister.
	Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas penetapan strategi dan kebijakan bidang Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan, serta Hukum termasuk harmonisasi pelaksanaannya pada Anak Perusahaan dalam konglomerasi PI *Group*. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for the establishment of strategies and policies in the areas of Risk Management, Governance and Compliance, and Legal, including harmonization of their implementation in Subsidiaries within the PI Group conglomerate.
	Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, prosedur dan metode pelaksanaan fungsi manajemen risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan, serta Hukum. Direct, coordinate, supervise, and be responsible for the formulation of policies, procedures, and methods for the implementation of risk management, governance, compliance, and legal functions.
	Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pengembangan budaya risiko dan kepatuhan pada seluruh jenjang Organisasi di lingkungan PTPI dan Anak Perusahaan Direct, coordinate, supervise, and be responsible for the development of a risk and compliance culture at all levels of the organization within PTPI and its Subsidiaries.
	Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi dalam konglomerasi PI *Group*. Direct and coordinate the implementation of good corporate governance principles in an integrated manner within the PI Group conglomerate.
	Mengarahkan dan mengkoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab atas pengendalian kegiatan di bidang tata kelola dan kepatuhan di PI *Group* sesuai dengan kaidah Good Corporate Governance (GCG) Direct, coordinate, supervise, and be responsible for controlling activities in the areas of governance and compliance at PI Group in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG)
	Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan perundangan dan menjaga agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan Establishing necessary measures to ensure the Company complies with all applicable laws and regulations and that business activities do not deviate from legal provisions
	Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab atas pengendalian kegiatan di bidang hukum yang diperlukan oleh Perusahaan sehingga kepentingan Perusahaan dapat terlindungi secara hukum. Directing, coordinating, supervising, and being responsible for controlling legal activities required by the Company to ensure the Company's interests are legally protected.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI

Perusahaan memiliki mekanisme program orientasi bagi anggota Direksi yang baru untuk memastikan bahwa anggota Direksi dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Panduan pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Direksi baru telah diatur dalam Board Manual Perusahaan yang menyatakan bahwa anggota Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya. Program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
- Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
- Penjelasan mengenai stakeholders utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Tahun 2024 tidak dilaksanakan program pengenalan perusahaan bagi Direksi dikarenakan tidak adanya perubahan susunan anggota Direksi.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Direksi untuk menambah wawasan dan pengetahuan Direksi khususnya terkait pengelolaan Perusahaan serta kepemimpinan.

Realisasi

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi Direksi disampaikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

ORIENTATION PROGRAM FOR DIRECTORS

The Company has an orientation program mechanism for new members of the Board of Directors to ensure that members of the Board of Directors can immediately contribute to the Company's performance. Guidelines for implementing the orientation program for new members of the Board of Directors is governed by the Company's Board Manual which states that newly appointed members of the Board of Commissioners and Directors must be given an introduction program regarding the Company and should be conducted promptly after their appointment. The Introduction Program for new members of the Board of Directors includes the following:

- Implementation of GCG principles;
- An overview of the Company relating to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
- Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
- Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as things that are not permitted;
- Explanation of the Company's main stakeholders and the Company's social responsibilities.

In 2024, there was no company introduction program for the Board of Directors due to no changes in the composition of the Board of Directors.

TRAINING AND IMPROVING THE COMPETENCY OF DIRECTORS

Policy

The Company facilitates competency development programs for the Board of Directors to increase the Board of Directors' insight and knowledge, especially regarding Company management and leadership.

Realization

Details of the competency development activities for the Board of Directors are presented in the Company Profile section of this Annual Report.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
1.	Produksi Production	Tercapainya efisiensi biaya produksi dan operasional excellence. Achieving production cost efficiency and operational excellence.	• Optimasi biaya produksi melalui improvement reability • Optimizing production costs through improving reliability
			• Standardisasi target dan proses shutdown dan start up untuk pabrik Ammonia dan Urea. • Review & evaluasi proses shutdown dan start up pabrik Ammonia dan Urea. • Standardization of shutdown and start-up targets and processes for Ammonia and Urea plants. • Review & evaluation of shutdown and start-up processes for Ammonia and Urea plants.
		Efisiensi rasio konsumsi energi urea dan amoniak Efficiency ratio of urea and ammonia energy consumption	• Audit TA pabrik (tahap persiapan dan post TA) • Audit Energi • Plant Technical Audit • PlantTA Audit (preparation and post TA stage) • Energy Audit • Plant Technical Audit
		Penurunan Downtime Downtime Reduction	• Implementasi management asset berbasis ISO 55001 • Roll out Maintenance Excellence • Pelaksanaan Risk Based inspection (RBI) • Implementation of asset management based on ISO 55001 • Roll out Maintenance Excellence • Implementation of Risk Based Inspection (RBI)
		Pencapaian Zero Fatality dan Sustainability dalam pengelolaan Aspek K3LH melalui penerapan HSE Excellence. Achieving Zero Fatality and Sustainability in managing K3LH aspects through the implementation of HSE Excellence.	• Penyusunan pedoman dan prosedur kerja PSM bagi Anak Perusahaan. • Evaluasi PSM Implementasi Anak Perusahaan. • Integrasi CSMS PI *Group*. • Preparation of PSM work guidelines and procedures for Subsidiaries. • Evaluation of PSM Implementation of Subsidiaries. • Integration of CSMS PI Group.
			• Pengembangan Crisis Emergency Response Plan di PI Group. • Development of Crisis Emergency Response Plan in PI Group.
			• Evaluasi PROPER Beyond Compliance 2022-2023. • Bimtek Compliance (PPA, PPU, PLB3). • Evaluasi Prognosa Hijau PROPER 2023-2024. • PROPER Beyond Compliance Evaluation 2022-2023. • Compliance Technical Guidance (PPA, PPU, PLB3). • PROPER Green Prognosis Evaluation 2023-2024.
2	Pengadaan Procurement	Pelaksanaan Pengadaan dengan mencapai Procurement Exellence pada 5 Fokus Utama yaitu Sistem, Proses, Tim, Organisasi dan Strategi. Procurement Implementation by achieving Procurement Excellence in 5 Main Focuses, namely System, Process, Team, Organization and Strategy.	• Pengembangan dan implementasi end-to-end proses pengadaan melalui aplikasi Single Platform Procurement System (ProcureX). • Implementasi Roadmap Procurement Excellence PTPI. • Mencari sumber-sumber bahan baku yang baru untuk keandalan suplai. • Development and implementation of end-to-end procurement process through Single Platform Procurement System (ProcureX) application. • Implementation of PTPI Procurement Excellence Roadmap. • Seeking new sources of raw materials for supply reliability.
		Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Implementation of Increasing the Use of Domestic Products (P3DN) and Domestic Component Level (TKDN).	• Peningkatan nilai transaksi Produk Dalam Negeri (PDN). • Mempertahankan realisasi lebih besar dari Target TKDN 40% dari pengadaan barang & jasa. • Increase in the transaction value of Domestic Products (PDN). • Maintaining a realization greater than the TKDN Target 40% of procurement of goods & services.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Governance penentuan strategi material dengan kualitas data yang kredibel. Governance determines material strategy with credible data quality.	Assessment dan monitoring pelaksanaan penentuan strategi material di 5 Anper dan implementasi di Tools of Materials and Services (TOMS). Assessment and monitoring of the implementation of material strategy determination in 5 Anper and implementation in Tools of Materials and Services (TOMS).
		Peningkatan visibilitas master data material dan SPIR di PI *Group*. Improving visibility of material master data and SPIR in PI Group.	Harmonisasi material code dengan target 100% material code di 6 Anper. Harmonization of material code with a target of 100% material code in 6 Anpers.
		Pembiasaan proses kerja Logistic Concept Management (LCM) Material MRO di PI *Group*. Familiarization of Logistic Concept Management (LCM) Material MRO work processes at PI Group.	Perancangan Modul Manajemen kontrak PI Group di Procure X (single platform pengadaan). Design of PI Group Contract Management Module in Procure X (single procurement platform).
		Terciptanya kondisi stok dan spare parts yang optimal Terciptanya kondisi stok dan spare parts yang optimal	Harmonisasi Material Code dengan target 100% material code di 6 Anper. Harmonization of Material Code with a target of 100% material code in 6 Anpers
			Ekstensifikasi Implementasi Stock Holding Policy dalam penentuan strategi Material di Anper. Extending the Implementation of Stock Holding Policy in determining Material strategy at Anper.
			Penyusunan panduan manajemen konsep logistik. Preparation of logistics concept management guidelines.
		Pelaksanaan Pengadaan dengan mencapai Procurement Exellence pada 5 Fokus Utama yaitu Sistem, Proses, Tim, Organisasi dan Strategi Procurement Implementation by achieving Procurement Excellence in 5 Main Focuses, namely System, Process, Team, Organization and Strategy..	• Pengembangan dan implementasi end-to-end proses pengadaan melalui aplikasi Single Platform Procurement System (ProcureX). • Implementasi Roadmap Procurement Excellence PTPI. • Mencari sumber-sumber bahan baku yang baru untuk keandalan suplai. • Development and implementation of end-to-end procurement process through Single Platform Procurement System (ProcureX) application. • Implementation of PTPI Procurement Excellence Roadmap. • Seeking new sources of raw materials for supply reliability.
		Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Implementation of Increasing the Use of Domestic Products (P3DN) and Domestic Component Level (TKDN).	• Peningkatan nilai transaksi Produk Dalam Negeri (PDN). • Mempertahankan realisasi lebih besar dari Target TKDN 40% dari pengadaan barang & jasa. • Increase in the transaction value of Domestic Products (PDN). • Maintaining a realization greater than the TKDN Target • 40% of procurement of goods & services.
		Governance penentuan strategi material dengan kualitas data yang kredibel. Governance determines material strategy with credible data quality.	Assessment dan monitoring pelaksanaan penentuan strategi material di 5 Anper dan implementasi di Tools of Materials and Services (TOMS). Assessment and monitoring of the implementation of material strategy determination in 5 Anper and implementation in Tools of Materials and Services (TOMS).
		Peningkatan visibilitas master data material dan SPIR di PI *Group*. Improving visibility of material master data and SPIR in PI Group.	Harmonisasi material code dengan target 100% material code di 6 Anper. Harmonization of material code with a target of 100% material code in 6 Anpers.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Pembiasaan proses kerja Logistic Concept Management (LCM) Material MRO di PI *Group*. Familiarization of Logistic Concept Management (LCM) Material MRO work processes at PI Group.	Perancangan Modul Manajemen kontrak PI *Group* di Procure X (single platform pengadaan). Design of PI Group Contract Management Module in Procure X (single procurement platform).
		Terciptanya kondisi stok dan spare parts yang optimal Creating optimal stock and spare parts conditions	Harmonisasi Material Code dengan target 100% material code di 6 Anper. Harmonization of Material Code with a target of 100% material code in 6 Anpers.
			Ekstensifikasi Implementasi Stock Holding Policy dalam penentuan strategi Material di Anper. Extending the Implementation of Stock Holding Policy in determining Material strategy at Anper.
			Penyusunan panduan manajemen konsep logistik. Preparation of logistics concept management guidelines.
3	Distribusi Distribution	Peningkatan visibilitas proses distribusi Pupuk dengan pemantauan secara digital dan terpusat. Increased visibility of the fertilizer distribution process with digital and centralized monitoring.	• Pemasangan CCTV untuk Gudang Penyangga (dengan kriteria gudang di wilayah Jawa kapasitas di atas 3.000 ton dan wilayah Luar Jawa kapasitas di atas 10.000 ton). • Pemasangan GPS untuk kapal yang rutin digunakan oleh PI *Group*. • Installation of CCTV for Buffer Warehouses (with warehouse criteria in Java with a capacity of over 3,000 tons and Outside Java with a capacity of over 10,000 tons). • Installation of GPS for ships routinely used by PI Group.
		Efisiensi biaya distribusi dengan utilisasi aset PI *Group* Distribution cost efficiency with PI Group asset utilization	Pemanfaatan asset PTPI untuk penyimpanan produk PI *Group* Utilization of PTPI assets for PI Group product storage
4	Pemasaran Marketing	Tercapainya penjualan pupuk komersil melalui Channel Key Account. Achieving commercial fertilizer sales through Channel Key Accounts.	• Penetapan klasifikasi pelanggan. • meninjau potensi untuk melakukan up selling dan cross selling. • Determining customer classification. • Reviewing the potential for up-selling and cross-selling.
		Tercapainya penjualan pupuk sektor komersil melalui aplikasi penjualan digital. Achieving commercial sector fertilizer sales through digital sales applications.	Go Live aplikasi Andalan komersil sebagai sarana transaksi B2B PTPI untuk produk Urea, Amoniak, dan NPK. Go Live, the commercial application as a means of B2B transactions for PTPI for Urea, Ammonia and NPK products
		Tercapainya pendapatan circular economy. Achieving circular economy income.	Melakukan koordinasi dengan seluruh Anak Perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk Amoniak, Gypsum, Petrocas, NCG, Purified Gypsum, CO_2 Cair, Asam Sulfat, Asam Fosfat, AlF3, HCl, CO, dan H2 Coordinating with all Subsidiaries to increase sales of Ammonia, Gypsum, Petrocas, NCG, Purified Gypsum, Liquid CO_2, Sulfuric Acid, Phosphoric Acid, AlF3, HCl, CO, and H2 products

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Memperkuat Partnership dengan distributor dan UMKM/retailer. Strengthen partnerships with distributors and MSMEs/retailers.	• Melakukan penjualan produk ritel pada tahun 2024 sebanyak 734.312 ton. (Urea 465.800 Ton, NPK 77.570 Ton, ZA 155.642 ton, Phosphate 32.000 Ton, ZK 3.300 Ton). • Memilih distributor ritel pupuk lengkap • Performance-based Benefit Model • Menentukan stock point ritel • Penjualan ritel dengan alternatif skema franco kepada seluruh distributor. • Implementasi DF dan Performance Bond kepada masing-masing Distributor • Conduct retail product sales in 2024 as much as 734,312 tons. (Urea 465,800 tons, NPK 77,570 tons, ZA 155,642 tons, Phosphate 32,000 tons, ZK 3,300 tons). • Selecting a complete fertilizer retail distributor • Performance-based Benefit Model • Determining retail stock points • Retail sales with alternative franco schemes to all distributors. • Implementation of DF and Performance Bond to each Distributor
5.	Pengembangan Bisnis Business Development	Optimalisasi pabrik yang kurang efisien melalui digitalisasi/ revamp dan/atau pembangunan pabrik baru serta mendorong pengurangan emisi karbon. Optimization of less efficient factories through digitalization/ revamp and/or construction of new factories and encouraging carbon emission reduction.	• Pembangunan pabrik Pusri IIIB. • Pembangunan Pabrik Amurea Papua Barat. • Pembangunan Pabrik NPK Berbasis Nitrat di PKC. • Construction of the Pusri IIIB factory. • Construction of the West Papua Amurea Factory. • Construction of the Nitrate-Based NPK Plantin PKC.
		Memperkuat Circular Economy serta mendorong pengurangan emisi karbon. Strengthening the Circular Economy and encouraging carbon emission reduction.	Pembangunan Soda Ash PKG dan PKT. Development of Soda Ash PKG and PKT
		Implementasi Streamlining Anak, Cucu Perusahaan dan Afiliasi di lingkungan PI *Group* sesuai hasil klasterisasi yang di tetapkan. Implementation of Streamlining of Subsidiaries, Subsidiary Companies and Affiliates within PI Group according to the determined clustering results.	• Melakukan penguatan Operating Model Subholding PIHC. • Mengkoordinasikan dan melakukan aksi korporasi untuk Entitas Anak Perusahaan/afiliasi di PI *Group* sesuai dengan Kajian Streamlining • Strengthening the Operating Model Subholding PIHC. • Coordinating and carrying out corporate actions for Subsidiary/affiliated entities in PI Group in accordance with the Streamlining Study

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Peningkatan performa kinerja Anak Perusahaan dan afiliasi melalui inisiatif strategis dan evaluasi model bisnis. Improving the performance of Subsidiaries and affiliates through strategic initiatives and business model evaluation.	1. PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN") Optimalisasi penjualan ritel & korporasi dalam rangka peningkatan profitabilitas perusahaan. 2. PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU") Pengembangan bisnis utilitas dan memaksimalkan captive market utilitas di lingkungan PI *Group*. 3. PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG") Pengembangan logistik terintegrasi untuk seluruh PI *Group*. 4. Anak Perusahaan PT Petrokimia Gresik ("PKG") a. Penguatan Bisnis Crop Protection melalui integrasi penjualan produk pestisida dan pengembangan bisnis anorganik. b. Melakukan Restrukturisasi Bisnis Pestisida melalui strategi Business Turn-around atau strategi penyehatan lainnya. 1. PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN") Optimization of retail & corporate sales in order to increase the company's profitability. 2. PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU") Development of utility business and maximizing utility captive market in the PI Group environment. 3. PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG") Development of integrated logistics for the entire PI Group. 4. Subsidiary of PT Petrokimia Gresik ("PKG") a. Strengthening Crop Protection Business through integration of pesticide product sales and development of inorganic business. b. Restructuring Pesticide Business through Business Turn-around strategy or other recovery strategies.
		Terjaganya kebutuhan pasokan gas untuk pabrik eksisting dan pengembangan pabrik baru. Maintaining gas supply needs for existing factories and the development of new factories.	• Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pemasok gas bumi untuk mendapatkan komitmen pasokan gas dengan harga kompetitif. • Berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pengembangan wilayah-wilayah industri baru dengan sumber gas yang mencukupi untuk pengembangan pabrik. • Coordinate with the Ministry of Energy and Mineral Resources, SKK Migas, and natural gas suppliers to obtain commitments for gas supply at competitive prices. • Coordinate with the government in terms of developing new industrial areas with sufficient gas sources for factory development.
		Pengamanan terhadap pasokan bahan baku/raw material (non-gas) dan pengembangan bisnis baru. Securing the supply of raw materials (non-gas) and developing new businesses.	• Melakukan Kerja sama/integrasi vertikal untuk pengamanan supply bahan baku utama pupuk dan kimia. • Melakukan Kerja sama/integrasi vertikal untuk pengembangan bisnis di luar negeri. • Conducting vertical cooperation/integration to secure the supply of primary raw materials for fertilizers and chemicals. • Conducting vertical cooperation/integration to develop overseas businesses.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Mendukung pencapaian target net zero emission melalui partnership dengan mitra strategis global. Supporting the achievement of net-zero emission targets through partnerships with global strategic partners.	Rencana program kegiatan terdiri dari: • Joint Development Agreement antara PTPI, PLN, dan ACWA Power Joint Development Study untuk pengembangan PLTS Madura & PLTB Banyuwangi. • Joint Development Study untuk pengembangan green hydrogen/hybrid green ammonia di PKG. Mendapatkan persetujuan investasi proyek green hydrogen/ hybrid green ammonia di PKG. The program activity plan consists of: • Joint Development Agreement between PTPI, PLN, and ACWA Power Joint Development Study for the development of Madura PLTS & Banyuwangi PLTB. • Joint Development Study for the development of green hydrogen/hybrid green ammonia in PKG. Obtaining investment approval for the green hydrogen/hybrid green ammonia project in PKG.
		Menjaga Pasokan sumber bahan baku P dan K. Maintain supply of source materials standard P and K.	• Project Planning • Pre-Assessment • Establish An Official Communication Workstream • Pre Due Diligence • Project Planning • Pre-Assessment • Establish An Official Communication Workstream • Pre Due Diligence
		Peningkatan sinergi Anak Perusahaan dalam hal proyek investasi pengembangan untuk meningkatkan profitabilitas Anak Perusahaan PI Group. Increasing synergy of Subsidiaries in terms of development investment projects to increase the profitability of PI Group Subsidiaries.	Melaksanakan proses penunjukan langsung di lingkungan PI Group untuk pelaksanaan proyek. Carrying out direct appointment process within PI Group for project implementation.
6	Riset Research	Mengembangkan *Customer Centric* R&D dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman. Developing Customer Centric R&D and products that suit plant nutritional needs	*Advance Biofertilizer* berbasis NPK untuk pangan, hortikultura dan Perkebunan. Advance Biofertilizer based on NPK for food, horticulture and plantations
			Controlled Release Fertilizer berbasis NPK untuk hortikultura. NPK-based Controlled Release Fertilizer for horticulture.
			Validasi *Product to Market Fit*. Validation of Product to Market Fit.
			Pengembangan pupuk basis teknologi nano. Fertilizer development based on nano technology
		Mengembangkan solusi pertanian (agrosolutions) sebagai upaya keterikatan dengan konsumen. Developing agricultural solutions (agrosolutions) as an effort to engage with consumers.	Implementasi Pengembangan *Precision Farming* (Padi, Jagung, Kelapa Sawit dan Tebu). Implementation of Precision Farming Development (Rice, Corn, Palm Oil and Sugar Cane).
			Klasifikasi vegetasi tanaman berbasis data geospasial multitemporal. Geospatial data-based plant vegetation classification multitemporal
		Memperkuat R&D *Operating Model* dan organisasi serta *research* institute, riset pasar, dan advokasi kebijakan. Strengthening the R&D Operating Model and organization as well as research institutes, market research, and policy advocacy.	Riset Penerimaan Pelanggan terhadap Produk Baru. Customer Acceptance Research for New Products.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Menurunkan tingkat emisi karbon PI *Group* sesuai target NDC Pemerintah Indonesia. Reducing carbon emissions levels PI Group in accordance with the NDC target Indonesian Government.	Penyusunan Indeks Pemupukan dan Pertanian Berkelanjutan Indonesia. Compilation of Sustainable Fertilization and Agriculture Index in Indonesia.
7	SDM HR	Transformasi Pengelolaan SDM melalui Implementasi HC Shared Services dan Analisis Kebutuhan Bisnis Human Capital Management Transformation through HC Shared Services Implementation and Business Needs Analysis	Melakukan survei mengenai efektivitas tim SDM. Conduct a survey on the effectiveness of the HC team.
			HRBP design pilot project. HRBP design pilot project
			Melaksanakan HC *Shared Services* Implement HC Shared Services
			Melakukan Kajian Sentralisasi HC Operations PI *Group* Conducting a Centralization Study of PI Group's HC Operations
			Mengoptimalkan *self-service* karyawan dalam sistem administrasi HC. Optimizing employee self-service in the HC administration system.
			Memperkuat infrastruktur digital HC melalui *dashboard* dan *real time data processing* untuk memfasilitasi digitalisasi pada HXM. Strengthening HC digital infrastructure through dashboards and real-time data processing to facilitate digitalization in HXM.
			Otomatisasi proses dan fungsionalitas sistem administrasi SDM (AI, RPA, Chatbots). Automation of HC administration system processes and functionality (AI, RPA, Chatbots).
		Akselerasi kinerja dan kompetensi unggul pimpinan dan karyawan untuk peningkatan produktivitas karyawan Acceleration of performance and superior competence of leaders and employees to increase employee productivity	• Meningkatkan program pengembangan pegawai untuk memasuki pasar dan bisnis baru (Ritel, Industri Hijau, dan Keterampilan Bisnis Internasional). • Mengimplementasikan program Top Talent Acceleration. • Enhance employee development programs to enter new markets and businesses (Retail, Green Industry, and International Business Skills). • Implement Top Talent Acceleration program
			Membentuk *Competency based Career Movement* untuk meningkatkan mobilisasi pegawai (*Employee Exchange, Job Market*, dan *Tour of Duty*). Forming a Competency-based Career Movement to increase employee mobilization (Employee Exchange, Job Market, and Tour of Duty).
			Mendorong *leaders* untuk menumbuhkan budaya kinerja tinggi melalui dialog kinerja. Encourage leaders to foster a high-performance culture through performance dialogue.
			Meningkatkan kemampuan tim SDM berdasarkan praktik global SDM untuk menciptakan tim SDM yang berkinerja tinggi. Enhance HC team capabilities based on global HC practices to create high-performance HC teams.
			Meningkatkan program suksesi untuk menghadapi bisnis baru PIHC. Enhance succession program to meet PIHC's new business.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
			Merekrut pekerja profesional yang kompeten untuk mempercepat akselerasi bisnis dan kegiatan operasional. Recruiting competent professional workers to accelerate business acceleration and operational activities
		Optimalisasi budaya kolaboratif sejalan dengan pengembangan program *Employee Experience* berdasarkan *Employee Value Proposition* (EVP) Perusahaan Optimizing collaborative culture in line with the development of Employee Experience program based on the Company's Employee Value Proposition (EVP)	Mengimplementasikan dan mengevaluasi program budaya organisasi (termasuk kolaborasi dan inovasi). Implement and evaluate organizational culture programs (including collaboration and innovation).
			Mengembangkan dan menjalankan strategi EVP yang berfokus pada *Employee Experience*. Develop and execute an EVP strategy that focuses on Employee Experience.
			Mengembangkan dan menerapkan strategi hubungan karyawan (komunikasi karyawan, kesejahteraan karyawan). Develop and implement employee relations strategies (employee communications, employee well-being).
		Dukungan SDM dalam pembentukan Sub *Holding* Pupuk Indonesia HR support in the formation of Sub Holding Pupuk Indonesia	Penyusunan kajian struktur organisasi *Holding* & Sub *Holding* Preparation of organizational structure study of Holding and Subholding
		Penyusunan *roadmap* inklusivitas Preparation of an inclusivity roadmap	Implementasi *roadmap* inklusivitas dalam menyiapkan framework infrastruktur perusahaan inklusif yang terdiri dari infrastruktur sosial, organisasi, dan fisik dengan inisiatif tahun 2024 antara lain: • Melakukan rekrutmen untuk penyandang disabilitas dilaksanakan melalui Rekrutmen Bersama BUMN. • Pengembangan karir antara lain dengan memberikan pelatihan/peningkatan kompetensi sesuai dengan unit kerja penempatan, kesempatan pengembangan karir di perusahaan; • Menyusun program dan sistem pengupahan yang baik dan pemberian program jaminan sosial antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll. • Menyiapkan kemudahan bagi para penyandang disabilitas di area perkantoran antara lain penyiapan dan peningkatan fasilitas peralatan kerja, fasilitas umum perusahaan, dsb. • Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi karyawan disabilitas (program, peralatan K3, dsb). Implementation of the inclusivity roadmap in preparing an inclusive corporate infrastructure framework consisting of social, organizational, and physical infrastructure with initiatives in 2024 including: • Recruiting people with disabilities carried out through Joint SOE Recruitment. • Career development including providing training/ competency improvement according to the work unit placement, career development opportunities in the company; • Preparing good wage programs and systems and providing social security programs including BPJS Health, BPJS Employment, etc. • Preparing facilities for people with disabilities in office areas including preparing and improving work equipment facilities, public company facilities, etc. • Occupational Health and Safety Programs for employees with disabilities (programs, K3 equipment, etc.).

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Perbaikan pengelolaan dan kinerja Dana Pensiun PPIP Pusri secara berkesinambungan Continuous improvement of management and performance of PPIP Pusri Pension Fund	Implementasi *roadmap* penyehatan Dana Pensiun manfaat pasti Implementation of the roadmap for the recovery of the defined benefit pension fund
		Implementasi Pedoman Umum Pengelolaan Risiko Dana Pensiun dengan menggunakan Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR) Implementation of General Guidelines for Pension Fund Risk Management using the Early Risk Detection System (SDDR)	Optimalisasi Pengelolaan Pasca Kerja di Dana Pensiun Iuran Pasti yang ada di PI Group Optimization of Post-Employment Management in Defined Contribution Pension Funds at PI Group
8	Manajemen Risiko Risk Management	Terselenggaranya pengelolaan risiko berbasis teknologi informasi yang semakin efektif Implementation of increasingly effective information technology-based risk management.	Penyesuaian *Framework* dan Perangkat Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Permen 02 KBUMN beserta peraturan turunannya Adjustment of the Framework and Implementation Tools for Risk Management in accordance with Permen 02 Ministry of SOE and its derivative regulations.
			Integrasi BCM dengan *Crisis Management* untuk mendukung *resilience* Perusahaan. Integration of BCM with Crisis Management to support Company Resilience
			Optimalisasi penerapan *Key Risk Indicator* (KRI) untuk mendukung pencapaian Sasaran Perusahaan. Optimizing the implementation of Key Risk Indicators (KRI) to support the achievement of Company Targets
		Terbangunnya budaya sadar risiko Perusahaan yang berkelanjutan. Building a risk-aware culture A sustainable company.	Penguatan budaya risiko dengan *Risk Culture Activation*. Strengthening risk culture with Risk Culture Activation
			Penyusunan Kurikulum dan Silabus untuk Kompetensi Teknis Manajemen Risiko. Preparation of Curriculum and Syllabus for Risk Management Technical Competencies.
			Menyelenggarakan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko PI *Group*. Conducting Maturity Level Assessment of Risk Management Implementation of PI Group.
9	Keuangan dan Akuntansi Finance and Accounting	*Monitoring* profitabilitas dan HPP/ biaya jasa untuk PIU. Monitoring profitability and COGS/ service costs for PIU.	Ratifikasi Pedoman Alokasi Harga Pokok dan Biaya Usaha Produsen Pupuk ke PIU. Ratification of Guidelines for Allocation of Cost of Goods and Business Costs of Fertilizer Producers to PIU.
		Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Fiskal di PI *Group* untuk mendukung *Cash Flow Operation* Perusahaan. Optimizing the Utilization of Fiscal Facilities at PI Group to support the Company's Cash Flow Operation.	• Mapping Peluang Pemanfaatan Fasilitas Fiskal. • Evaluasi kebutuhan fasilitas fiskal di lingkungan Grup. • Berkoordinasi dengan KPP LTO III untuk pemanfaatan Fasilitas Fiskal. • *Monitoring* Proses Pengajuan Fasilitas Insentif Fiskal • Mapping Fiscal Facility Utilization Opportunities. • Evaluation of fiscal facility needs within the Group. • Coordinating with KPP LTO III for the utilization of Fiscal Facilities. • Monitoring the Fiscal Incentive Facility Submission Process

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Optimalisasi Pemanfaatan Insentif Fiskal di PI *Group* Optimizing the Utilization of Fiscal Incentives at PI Group	• Mapping Peluang Pemanfaatan Fasilitas Insentif Fiskal. • Evaluasi kebutuhan fasilitas insentif fiskal di lingkungan Grup. • Melaksanakan *Focus Group Discussion* lingkungan Grup bersama dengan instansi pemerintah perumus kebijakan pemberian insentif fiskal. • Monitoring Proses Pengajuan Fasilitas Insentif Fiskal. • Mapping Opportunities for Utilization of Fiscal Incentive Facilities. • Evaluation of the need for fiscal incentive facilities in the Group environment. • Conducting Focus Group Discussions in the Group environment together with government agencies that formulate policies for the provision of fiscal incentives. • Monitoring the Fiscal Incentive Facility Submission Process.
		Menjaga kondisi keuangan PI *Group* dan *capital structure* yang sehat dan efisien dengan fungsi pendanaan terpusat. Maintaining PI Group's financial condition and healthy and efficient capital structure with a centralized funding function.	PT PI dan/atau Anak Perusahaan menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS), efek lainnya, dan/atau instrumen pasar modal lainnya untuk membantu optimalisasi *capital structure* PI *Group* bergantung dengan kondisi pasar dan kebutuhan PI *Group*. Dana hasil emisi dapat diteruskan kepada Anak Perusahaan melalui Pinjaman Pemegang Saham. PT PI and/or Subsidiaries issue debt securities and/or sukuk (EBUS), other securities, and/or other capital market instruments to help optimize PI Group's capital structure depending on market conditions and PI Group's needs. Funds from the issuance can be forwarded to Subsidiaries through Shareholder Loans.
			• Melakukan *annual rating* dari *independent rating agency*. • Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* bidang keuangan antara lain: Investor, OJK, perbankan, KSEI, Wali Amanat, IDX, dll. • Memberikan masukan dan *review* atas rencana investasi, merger, akuisisi dari Anak Perusahaan, khususnya struktur pendanaan. • Koordinasi untuk pendanaan proyek investasi, merger, akuisisi, dan lainnya. • Negosiasi dengan perbankan terkait *term & condition* yang *favourable* bagi PI *Group*. • Persiapan atau Implementasi dari SDU (Strategic Delivery Unit) yang berkaitan dengan keuangan. • Melakukan kajian secara internal dan/atau eksternal untuk mendukung program kerja bidang keuangan. • Conduct annual rating from independent rating agency. • Communicate and coordinate with stakeholders in financial sector including: Investors, OJK, banking, KSEI, Trustees, IDX, etc. • Provide input and review on investment plans, mergers, acquisitions from Subsidiaries, especially funding structure. • Coordination for funding investment projects, mergers, acquisitions, and others. • Negotiation with banks regarding favorable terms & conditions for PI Group. • Preparation or Implementation of SDU (Strategic Delivery Unit) related to finance. • Conduct internal and/or external studies to support financial work programs.
		Penurunan risiko piutang. Reduction of receivables risk	Melakukan proses integrasi sistem *order to cash management*. Performing the order to cash management system integration process.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Peningkatan kecepatan dan keakuratan pencatatan transaksi di PI *Group* sehingga Laporan Keuangan *Audited* dapat dipertahankan pada tingkat minimum Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Increasing the speed and accuracy of transaction recording at PI Group so that the Audited Financial Report can be maintained at a minimum level of Unqualified Opinion (WTP).	• Implementasi sistem kolaborasi penyusunan laporan keuangan • Rekonsiliasi transaksi *intercompany* untuk menunjang pelaporan keuangan tepat waktu. • Penyampaian laporan audit keuangan selambat-lambatnya 15 April 2024 dan melakukan AUP, serta disampaikan pada SIM KBUMN paling lambat 30 April 2024 • Implementation of a collaborative system for preparing financial reports • Reconciliation of intercompany transactions to support timely financial reporting. • Submission of financial audit reports no later than April 15, 2024 and conduct AUP, and submitted to SIM Ministry of SOE no later than April 30, 2024.
		Terlaksananya *internal control over financial reporting* (ICoFR) untuk penyusunan laporan keuangan yang tepat dan akurat. Implementation of internal control over financial reporting (ICoFR) for the preparation of appropriate and accurate financial reports.	• Penyusunan Laporan *Gap Analysis* ICoFR • Identifikasi kelemahan control internal atas proses pelaporan keuangan yang dapat menyebabkan ketidakakuratan material • Usulan Perbaikan Kebijakan Akuntansi berkelanjutan. • Analisis kualitatif dan kuantitatif potensi koreksi atas Usulan Perbaikan Kebijakan. • Preparation of ICoFR Gap Analysis Report • Identification of weaknesses in internal control over the financial reporting process that may lead to material inaccuracies • Proposed Continuous Accounting Policy Improvements. • Qualitative and quantitative analysis of potential corrections to the Proposed Policy Improvements.
		Optimasi perlindungan asuransi terhadap seluruh *asset* dan/atau *interest* perusahaan. Optimization of insurance protection for all company assets and/or interests.	Pengadaan Bersama asuransi PI *Group* untuk mengoptimalkan spreading profil risiko PI *Group*. Joint Procurement of PI Group insurance to optimize the spreading of PI Group's risk profile.
		Pembayaran Piutang Subsidi. Payment of Subsidy Receivables	Berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait optimalisasi DIPA Tahun 2024. Coordinate with the Ministry of Agriculture regarding the optimization of DIPA in 2024
			Berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait penerbitan Revisi DIPA Tahun 2024. Coordinate with the Ministry of Finance regarding the issuance of the Revised DIPA for 2024.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Meningkatkan Kesehatan keuangan PTPI dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya. Improving the financial health of PTPI and its Subsidiaries and affiliates.	Penyediaan pendanaan dari PTPI kepada Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, dan/atau Perusahaan Afiliasi, antara lain (namun tidak terbatas pada): • Pembelian pinjaman, pinjaman pemegang saham, pembelian efek bersifat utang/sukuk/ekuitas dari Anak Perusahaan dan/atau skema lainnya. • Optimalisasi pemanfaatan National Pooling Account ("NPA") untuk transaksi internal antar PI *Group* dan/atau kebutuhan lainnya. Pembelian/pengalihan/anjak piutang subsidi Anak Perusahaan kepada PTPI dan/atau Lembaga keuangan. • Pemberian pinjaman yang bersifat *equity like*. • Skema pendanaan lainnya. Provision of funding from PTPI to Subsidiaries, Sub-Subsidiaries, and/or Affiliated Companies, including (but not limited to): • Purchase of loans, shareholder loans, purchase of debt/sukuk/equity securities from Subsidiaries and/or other schemes. • Optimization of the utilization of the National Pooling Account ("NPA") for internal transactions between PI Group and/or other needs. Purchase/transfer/factoring of subsidized receivables from Subsidiaries to PTPI and/or Financial institutions. • Provision of equity-like loans. • Other funding schemes.
			• Penyediaan dan perpanjangan fasilitas kredit modal kerja baik jangka pendek maupun jangka menengah/panjang dengan *term and condition* yang *favourable* bagi PI *Group*. • Mencari alternatif pendanaan yang kompetitif untuk menunjang operasional perusahaan. • Provision and extension of working capital credit facilities, both short-term and medium/long-term, with favorable terms and conditions for PI Group. • Seeking competitive funding alternatives to support the company's operations
			• Penempatan dana *idle* perusahaan pada deposito, giro, dan produk perbankan lainnya. • Penempatan dana *idle* perusahaan melalui pembelian instrumen pasar modal, antara lain: EBUS yang diterbitkan Pemerintah dan/atau perusahaan dengan *rating investment grade*, Reksadana, dan lainnya. • Placement of the company's idle funds in deposits, current accounts, and other banking products. • Placement of the company's idle funds through the purchase of capital market instruments, including: EBUS issued by the Government and/or companies with investment grade ratings, Mutual Funds, and others.
			Berkoordinasi dengan Rekind dalam melakukan negosiasi dengan perbankan terkait perpanjangan fasilitas pinjaman bersama, penurunan suku bunga, *covenant* perbankan, dan lain-lain Coordinate with Rekind in conducting negotiations with banks regarding the extension of joint loan facilities, interest rate reductions, banking covenants and others.
		Integrated Performance Management System untuk mendukung High Performance Culture. Integrated Performance Management System to support High Performance Culture.	Pengembangan lanjutan sistem informasi terintegrasi antar perusahaan di PI *Group* untuk kegiatan penyusunan anggaran serta proyeksi keuangan Further development of integrated information systems between companies in PI Group for budget preparation activities and financial projections

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
			1. KPI *Review & Refinement* 2. Pengembangan dan implementasi *Integrated Performance Management System* (PMS) PI Group. 3. Implementasi KITA Apps di seluruh Anak Perusahaan. 1. KPI Review & Refinement 2. Development and implementation of Integrated Performance Management System (PMS) PI Group. 3. Implementation of KITA Apps in all Subsidiaries
10	Teknologi Informasi Information Technology	Mendorong transformasi digital di perusahaan untuk menciptakan nilai korporasi. Driving digital transformation in companies to create corporate value.	• Implementasi Data *Science* bidang *Supply Chain & Operation*. • Mengikuti program Digital *Talent* BUMN dengan target peserta minimal 20% pada tahun 2024 yang merupakan akumulasi dari target 2022-2024 dari jumlah keseluruhan SDM. • Implementation of Data Science in the field of Supply Chain & Operation. • Participating in the SOE Digital Talent program with a target of at least 20% participants in 2024 which is the accumulation of the 2022-2024 target of the total number of HC.
			• Lanjutan Pengembangan dan implementasi *Single Platform Human Capital Xperience* (HCX). • Lanjutan Pengembangan dan implementasi *Single Platform Procurement System* (ProcureX). • Pengembangan dan implementasi *Manufacturing* 4.0. • Continued development and implementation of Single Platform Human Capital Xperience (HCX). • Continued development and implementation of Single Platform Procurement System (ProcureX). • Development and implementation of Manufacturing 4.0.
			Roll Out Digitalisasi Kios Nasional Roll Out National Kiosk Digitalization
			Implementasi Digitalisasi dan *Analytics End-to-end Supply Chain* Implementation of End-to-end Supply Chain Digitalization and Analytics
			Lanjutan Pengembangan & Implementasi Migrasi Data *Center* Aplikasi Pendukung ERP SAP dan Non SAP. Kajian Migrasi SAP ECC ke SAP S/4 HANA Advanced Development & Implementation of Data Migration SAP and Non SAP ERP Supporting Application Center. SAP ECC to SAP S/4 HANA Migration Study
		Pengelolaan layanan dan tata kelola TI yang efektif Effective IT service management and governance	• Implementasi *Security Operation Center* (SOC). • Implementasi dan *Improvement* IT *Security* berbasis ISO 27001 dan UU Perlindungan Data Pribadi. • *Improvement Cyber Security Maturity* (CSM). • Implementation of Security Operation Center (SOC). • Implementation and Improvement of IT Security based on ISO 27001 and Personal Data Protection Law. • Improvement of Cyber Security Maturity (CSM).
			• Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2025 – 2029. • Implementasi *Enterprise Architecture Horizontal Value Chain* Pupuk (Pengadaan, Produksi (PI/Anper), dan Pemasaran). • Pemutakhiran *Disaster Recovery Plan* (DRP) • Update of Information Technology Strategic Plan (RSTI) 2025 – 2029. • Implementation of Enterprise Architecture Horizontal Value Chain Fertilizer (Procurement, Production (PI/Subsidiary), and Marketing). • Update of Disaster Recovery Plan (DRP)

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
			• Peningkatan IT Maturity berbasis COBIT 2019 • Evaluasi efektivitas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) • Penyusunan roadmap INDI 4.0 PI Group • Increasing IT Maturity based on COBIT 2019 • Evaluation of the effectiveness of Information Technology (IT) implementation • Preparation of the INDI 4.0 PI Group roadmap
		Mendorong transformasi digital di perusahaan untuk menciptakan nilai korporasi. Driving digital transformation in companies to create corporate value	• Implementasi Data *Science* bidang *Supply Chain & Operation*. • Mengikuti program Digital *Talent* BUMN dengan target peserta minimal 20% pada tahun 2024 yang merupakan akumulasi dari target 2022-2024 dari jumlah keseluruhan SDM. • Implementation of Data Science in the field of Supply Chain & Operation. • Participating in the SOE Digital Talent program with a target of at least 20% participants in 2024 which is the accumulation of the 2022-2024 target of the total number of HC.
			• Lanjutan Pengembangan dan implementasi *Single Platform Human Capital Xperience* (HCX). • Lanjutan Pengembangan dan implementasi *Single Platform Procurement System* (ProcureX). • Pengembangan dan implementasi *Manufacturing* 4.0. • Continued development and implementation of Single Platform Human Capital Xperience (HCX). • Continued development and implementation of Single Platform Procurement System (ProcureX). • Development and implementation of Manufacturing 4.0.
			Roll Out Digitalisasi Kios Nasional Roll Out National Kiosk Digitalization
			Implementasi Digitalisasi dan *Analytics End-to-end Supply Chain* Implementation of End-to-end Supply Chain Digitalization and Analytics
			• Lanjutan Pengembangan & Implementasi Migrasi Data Center Aplikasi Pendukung ERP SAP dan Non SAP. • Kajian Migrasi SAP ECC ke SAP S/4 HANA • Continued Development & Implementation of Data Migration SAP and Non SAP ERP Supporting Application Center. • SAP ECC Migration Study to SAP S/4 HANA
		Pengelolaan layanan dan tata kelola TI yang efektif Effective IT service management and governance	• Implementasi *Security Operation Center* (SOC). • Implementasi dan *Improvement* IT *Security* berbasis ISO 27001 dan UU Perlindungan Data Pribadi. • *Improvement Cyber Security Maturity* (CSM). • Implementation of Security Operation Center (SOC). • Implementation and Improvement of IT Security based on ISO 27001 and Personal Data Protection Law. • Improvement of Cyber Security Maturity (CSM).
			• Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2025 – 2029. • Implementasi *Enterprise Architecture Horizontal Value Chain* Pupuk (Pengadaan, Produksi (PI/Anper), dan Pemasaran). • Pemutakhiran *Disaster Recovery Plan* (DRP) • Update of Information Technology Strategic Plan (RSTI) 2025 – 2029. • Implementation of Enterprise Architecture Horizontal Value Chain Fertilizer (Procurement, Production (PI/Subsidiary), and Marketing). • Update of Disaster Recovery Plan (DRP)

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
			• Peningkatan IT Maturity berbasis COBIT 2019 • Evaluasi efektivitas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) • Penyusunan roadmap INDI 4.0 PI Group • Increasing IT Maturity based on COBIT 2019 • Evaluation of the effectiveness of Information Technology (IT) implementation • Preparation of the INDI 4.0 PI Group roadmap
11	Sekretariat, Hukum, Tata Kelola, dan Komunikasi Korporat Secretariat, Legal, Governance, and Corporate Communications	Terpenuhinya aspek *compliance* dalam pelaksanaan program sentralisasi PTPI. Fulfillment of compliance aspects in the implementation of PTPI's centralization program.	• Melakukan sosialisasi dan pembekalan ke Unit Kerja terkait dan Anak Perusahaan. • Penanganan permasalahan hukum strategis oleh Tim Ad Hoc. • Pengadaan Jasa Konsultan Hukum untuk penanganan permasalahan hukum strategis • Conducting socialization and briefing to related Work Units and Subsidiaries. • Handling of strategic legal issues by the Ad Hoc Team. • Procurement of Legal Consultant Services for handling strategic legal issues
			• Pendampingan aspek hukum terhadap kegiatan praproyek. • Pendampingan aspek hukum terhadap pelaksanaan proyek. • Pendampingan aspek hukum terhadap kegiatan pasca. • Legal aspect assistance for pre-project activities. • Legal aspect assistance for project implementation. • Legal aspect assistance for post-project activities.
			• Menentukan parameter penyelesaian permasalahan hukum sebagai berikut : • Penyelesaian permasalahan hukum tanpa melalui proses di pengadilan (mediasi) • Penyelesaian permasalahan hukum melalui mediasi di Pengadilan Penyelesaian permasalahan hukum melalui BANI/ Pengadilan • Determine the parameters for resolving legal problems as follows: • Resolving legal problems without going through the court process (mediation) • Resolving legal problems through mediation in the Court Resolving legal problems through BANI/Court
		Memastikan administrasi perkantoran/kesekretariatan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Perusahaan berjalan dengan baik. Ensure that office/secretarial administration and archiving within the Company are running well.	Pengembangan dan implementasi aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Development and implementation of supporting applications for the implementation of secretarial activities
			Pengelolaan arsip/dokumen perusahaan. Company archive/document management.
		Terbangunnya Kapabilitas Organisasi dan SDM Manajemen Kepatuhan. Building Compliance Management Organization and Human Capitals Capability.	• Menyusun kebijakan dan *Road map* penerapan *Governance-Risk Management Compliance* (GRC) 4.0 terintegrasi PI *Group*. • Menetapkan upaya tindak lanjut temuan/rekomendasi audit kepatuhan sebagai KPI Unit Kerja dengan target pemenuhan minimal sebesar 80%. • Develop policies and Roadmaps for the implementation of integrated Governance-Risk Management Compliance (GRC) 4.0 for PI Group. • Determine follow-up efforts for compliance audit findings/ recommendations as KPI for Work Units with a minimum fulfillment target of 80%.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Terselenggaranya manajemen Kepatuhan berbasis teknologi informasi yang semakin efektif Implementation of increasingly effective information technology-based compliance management	• Penguatan kepatuhan perusahaan melalui pelaksanaan Sertifikasi SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan. • Penguatan Tata Kelola melalui implementasi *standard* internasional ISO 37000:2021 Tata Kelola Organisasi. • Strengthening corporate compliance through the implementation of SNI ISO 37301:2021 Compliance Management System Certification. • Strengthening Governance through the implementation of the international standard ISO 37000:2021 Organizational Governance.
		Terbangunnya budaya Kepatuhan perusahaan yang berkelanjutan. Building a sustainable corporate compliance culture.	Percepatan peningkatan Maturitas GCG di PI Group dengan pencapaian target skor GCG tahun 2023 sesuai yang ditetapkan dalam RKAP. Acceleration of GCG Maturity improvement in PI Group by achieving the 2023 GCG score target as stipulated in the RKAP.
		Pemetaan *Holding's Strategic Stakeholder*. Holding's Strategic Mapping Stakeholders.	*Holding's Stakeholder Management System.* Holding's Stakeholder Management System
		Konsistensi dan pengembangan saluran komunikasi Internal. Consistency and development of internal communication channels	• Menjalankan program-program campaign fokus pada *engagement* karyawan. • Menempatkan materi-materi korporasi (Compro book), *compro* (PPT) dalam saluran. • Running campaign programs focused on employee engagement. • Placing corporate materials (Compro book), compro (PPT) in the channel.
		Manajemen Isu: Melakukan Perumusan Agenda Setting sesuai dengan perkembangan isu dan arahan KBUMN. Issue Management: Conducting Agenda Formulation Setting in accordance with issue developments and Ministry of SOE directives.	• Agenda Setting • Media visit (explore issue) • Pendampingan konsultan untuk isu relevan • NgoPI • PIMA • Media brief • Kerja sama KOL • Agenda Setting • Media visit (explore issue) • Consultant assistance for relevant issues • NgoPI • PIMA • Media brief • KOL cooperation
		Citra positif dan reputasi perusahaan. Positive image and reputation of the company.	• Mengelola *employee influencer*. • Promosi dan partnership yang relevan dan berdampak terhadap citra perusahaan. Mendukung promosi melalui media *sponsorship* sebagai bentuk *stakeholder management* Perusahaan. • Managing employee influencers. • Relevant and impactful promotions and partnerships towards the company's image. Supporting promotions through media sponsorship as a form of the Company's stakeholder management.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Meningkatkan pemahaman dan dukungan akan program strategis PI *Group* disampaikan melakukan optimalisasi saluran komunikasi majalah internal PI *Group* dan Podcast. Increasing understanding and support for strategic programs PI Group is conveyed by optimizing communication channels PI Group's internal magazine and Podcast.	Pelaksanaan proses workshop bersama dengan fokus *repositioning*, strategi, dan implementasi saluran komunikasi Majalah Internal dan Podcast. Implementation of the workshop process together with a focus on repositioning, strategy, and implementation of communication channels Internal Magazine and Podcast
			Pelaksanaan benchmark serta pelatihan pada masing-masing saluran komunikasi Majalah Internal dan Podcast pada profesional dengan tujuan untuk mengetahui operasional, *best practice* agar dapat meningkatkan readership dan engagement. Implementation of benchmarks and training on each communication channel of Internal Magazine and Podcast for professionals with the aim of knowing the operations, best practices in order to increase readership and engagement.
			• Optimalisasi kontribusi narasumber internal PI *Group* untuk dapat mengulas dan memberikan ulasan atas perihal perkembangan Perusahaan. • Pembentukan Tim Majalah Internal dan Podcast disertai ketetapan Perusahaan. • Optimization of the contribution of internal sources of PI Group to be able to review and provide reviews on the Company's developments. • Formation of the Internal Magazine and Podcast Team accompanied by the Company's provisions.
12	Perencanaan Strategis Strategic Planning	Penguatan *Operating Model* Strengthening Operating Model	• Penyusunan *operating model* dan penyiapan tata kelola untuk struktur Grup dan peran Holding sesuai RJP PTPI 2024-2028. • Seluruh Anper telah memiliki RJP 2024-2028 yang berlaku sebagai landasan strategis dan operasional. • Preparation of operating model and governance preparation for Group structure and Holding role according to PTPI RJP 2024-2028. • All Anper have RJP 2024-2028 which is valid as strategic and operational basis.
13	Pengelolaan Transformasi Bisnis Business Transformation Management	Peningkatan *value creation* terhadap Perusahaan melalui scale up inisiatif strategis transformasi bisnis tahun 2024. Increasing value creation for the Company through scale-up of strategic business transformation initiatives in 2024.	• Perencanaan dan *review* pencapaian KPI SPM melalui aplikasi yang terintegrasi dengan BoD dan BoD-1 lainnya. • Pendampingan aspek manajemen *project-project adhoc.* • Planning and review of SPM KPI achievement through an application integrated with BoD and other BoD-1. • Assistance in management aspects of ad hoc projects.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
14	Sistem Manajemen Terpadu & Inovasi Integrated Management System and Innovation	Penguatan ekosistem inovasi yang mendukung pencapaian inisiatif Strategis Perusahaan menuju Industri Global Strengthening the innovation ecosystem that supports the achievement of the Company's Strategic initiatives towards the Global Industry	• Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Manajemen Inovasi ISO 56002. • Klinikal Makalah Inovasi (metode *Design Thinking* & *Quality Excellent Activity*) kepada seluruh unit kerja. • Pendampingan Makalah Inovasi metode QEA pada 5 Anak Perusahaan Non Pupuk • Pelaksanaan Pelatihan Juri Pemula untuk 5 Anak Perusahaan Non Pupuk • Pelaksanaan Pelatihan Juri Lanjutan PI Group • Pelaksanaan Pelatihan Gerakan 5R dan *Business Pitch Idea* dibulan Oktober – November. • Socialization and Training of ISO 56002 Innovation Management System. • Clinical Innovation Paper (Design Thinking & Quality Excellent Activity methods) to all work units. • Mentoring of QEA method Innovation Papers in 5 Non-Fertilizer Subsidiaries • Implementation of Beginner Jury Training for 5 Non-Fertilizer Subsidiaries • Implementation of Advanced Jury Training for PI Group • Implementation of 5R Movement Training and Business Pitch Idea in October-November.
			Konvensi Inovasi di lingkungan PI Group Innovation Convention in PI Group environment
			Mengirimkan Tim Inovasi ke Konvensi Inovasi Nasional & Internasional. Sending Innovation Teams to National & International Innovation Conventions.
		Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai hasil melalui pengelolaan Dokumen Sistem Manajemen (DSM) dan penerapan Sistem Manajemen Terpadu. Improve the effectiveness and efficiency of the organization in achieving results through the management of Document Management System (DSM) and the implementation of Integrated Management System.	Penyusunan kerangka *single platform* Sistem Manajemen Development of a single platform framework for the Management System
			• Asistensi Unit Kerja dalam penyusunan dan/atau revisi DSM. • Reviu dan perbaikan DSM Unit Kerja pada Aspek Sistem Manajemen. • Evaluasi Pedoman/Prosedur Penyusunan dan pengendalian DSM sesuai kebijakan manajemen/perkembangan bisnis Perusahaan. • Penyelesaian penyusunan dan atau pemutakhiran pedoman yang terdampak PER-1/MBU/03/2023 dan PER-2/MBU/03/2023. • Assistance to Work Units in the preparation and/or revision of DSM. • Review and improvement of Work Unit DSM in the Management System Aspect. • Evaluation of Guidelines/Procedures for Preparation and control of DSM in accordance with the Company's management policies/business developments. • Completion of the preparation and/or updating of guidelines affected by PER-1/MBU/03/2023 and PER-2/MBU/03/2023.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
			• Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Internal (ASMI) secara terintegrasi. • Pelaksanaan Rapat Tinjauan Penerapan Sistem Manajemen secara terintegrasi. • Pelaksanaan *Surveillance Audit* Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 oleh Lembaga Sertifikasi. • *Monitoring* tindak lanjut Temuan Audit Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 baik hasil ASMI maupun hasil *Surveillance Audit*. • Implementation of Internal Management System Audit (ASMI) in an integrated manner. • Implementation of Integrated Management System Implementation Review Meeting. • Implementation of Surveillance Audit of Quality Management System SNI ISO 9001:2015 by Certification Institution. • Monitoring of follow-up of Quality Management System Audit Findings SNI ISO 9001:2015 both ASMI results and Surveillance Audit results.
		Membina ekosistem kinerja unggul berkelas dunia. Building a world-class superior performance ecosystem.	Pelatihan *examiner Internal Baldrige Excellence Framework* (BEF). Baldrige Excellence Framework Internal examiner training (BEF).
			• Tindak lanjut *Opportunity for Improvement* (OFI) hasil *assessment* BEF tahun 2023. • Penyusunan Dokumen Aplikasi BEF. • Pelaksanaan *assessment* kinerja unggul internal atau eksternal baik nasional ataupun internasional sesuai kebijakan manajemen. • Follow-up of Opportunity for Improvement (OFI) results of BEF assessment in 2023. • Preparation of BEF Application Documents. • Implementation of internal or external superior performance assessments, both nationally and internationally, in accordance with management policies.
			• Finalisasi Peta Proses Bisnis PI dan 5 Anper Pupuk • Implementasi penyesuaian proses bisnis sesuai perkembangan bisnis Perusahaan. • Finalization of PI Business Process Map and 5 Fertilizer Anper • Implementation of business process adjustments according to the Company's business development
15	Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit	Terlaksananya fungsi audit internal melalui pemberian jasa *assurance* dan konsultansi yang independent dan objektif untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional Perusahaan. Implementation of internal audit function through the provision of independent and objective assurance and consulting services to increase added value and improve the Company's operational performance.	Pelatihan, seminar, dan/atau sertifikasi yang relevan untuk setiap personal. Relevant training, seminars and/or certification for each individual.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
			• Menyusun PKPT berbasis risiko dan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. • Melaksanakan kegiatan *assurance*, konsultansi, dan/atau pendampingan atas proses bisnis Perusahaan yang berisiko tinggi. • *Monitoring* tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal dan eksternal. • Menyampaikan laporan kinerja SPI kepada *stakeholder* secara periodik • Prepare risk-based PKPT and approved by the President Director and Board of Commissioners. • Carry out assurance, consulting and/or mentoring activities on the Company's high-risk business processes. • Monitor follow-up on recommendations from internal and external audit results. • Submit SPI performance reports to stakeholders periodically
			Menyusun kebijakan dan tata Kelola digital *forensic*. Developing digital forensic policies and governance
		Meningkatnya harmonisasi dan sinergi fungsi internal audit dengan Anak Perusahaan dan Eksternal Audit. Increasing harmonization and synergy of internal audit functions with Subsidiaries and External Audit.	Melaksanakan sinergi PKPT SPI PI *Group*. Melaksanakan kegiatan audit bersama (*joint audit*) baik yang telah ditetapkan dalam PKPT maupun kegiatan pengawasan *adhoc* Implementing synergy of PKPT SPI PI Group. Implementing joint audit activities both those stipulated in PKPT and adhoc supervision activities
			• Melakukan Pendampingan Pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan. • Menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 terkait dengan penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik • Provide assistance to external parties in the context of implementing corporate governance. • Implement the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 9 of 2023 regarding the use of Public Accountant and Public Accounting Firm services
16	Umum dan TJSL General affair and CSR	Memastikan pengamanan seluruh aset properti berupa tanah dan bangunan di luar pabrik. Ensure the security of all property assets in the form of land and buildings outside the factory.	• Melakukan *review* pencatatan, inventarisasi dan pemantauan penyelesaian administrasi aset serta melakukan *monitoring* pengisian data SIMAP oleh Anak Perusahaan. • Melakukan verifikasi akurasi input data SIMAP oleh Anak Perusahaan melalui verifikasi dan/atau survei lapangan di lokasi aset properti. • Melakukan kegiatan *monitoring*, Rapat Kerja dan pemantauan kegiatan pengelolaan aset properti Anak Perusahaan secara berkala. • *Monitoring* penyelesaian hukum dan kajian hukum terkait aset properti yang bermasalah di *Holding* dan Anak Perusahaan. • Melakukan pembaruan atas pedoman/prosedur terkait pengelolaan aset properti di Perusahaan dan Anak Perusahaan jika terdapat perubahan pada peraturan yang berlaku • Conducting a review of recording, inventory and monitoring of asset administration settlement and monitoring SIMAP data entry by Subsidiaries. • Verifying the accuracy of SIMAP data input by Subsidiaries through verification and/or field surveys at property asset locations. • Conducting monitoring activities, Work Meetings and monitoring of Subsidiary Company property asset management activities periodically. • Monitoring legal settlements and legal studies related to problematic property assets in Holding and Subsidiaries. • Updating guidelines/procedures related to property asset management in the Company and Subsidiaries if there are changes to applicable regulations

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Task Implementation Year 2024

No.	Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
		Meningkatkan optimalisasi dan utilisasi aset properti tanah dan bangunan di luar pabrik. Increasing the optimization and utilization of land and building property assets outside the factory.	• Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi kepada *Person in Charge* (PIC) pengelolaan aset properti PI *Group*. • Melakukan kajian ekonomis terhadap beberapa aset prioritas. • Menuntaskan administrasi kerja sama aset properti PI *Group* • Conduct competency improvement training for the Person in Charge (PIC) of PI Group property asset management. • Conduct economic studies on several priority assets. • Complete administration of PI Group property asset cooperation
		Telah terciptanya pengamanan perusahaan yang merupakan *asset utilities* There has been a creation of corporate security which is a utilities asset	Melakukan audit Sistem Manajemen Perusahaan (SMP). Conducting an audit of the Company Management System (CMS).
		Kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program. Collaboration between SOE and other parties that have the appropriate competence in implementing the CSR program, with the aim of increasing the positive impact of the program.	Pelaksanaan program TJSL dalam bidang pendidikan, lingkungan, pengembangan PUMK, maupun bantuan program TJSL lainnya berkolaborasi dengan BUMN atau pihak lain. Implementation of CSR programmes in the fields of education, environment, PUMK development and other CSR programme assistance in collaboration with SOE or other parties.
		Penguatan identitas dan citra perusahaan melalui program TJSL. Strengthening corporate identity and image through CSR programs	Publikasi program TJSL berfokus pada dampak program. CSR program publications focus on program impacts.
		Peningkatan implementasi pendekatan CSV pada program comdev di seluruh Anak Perusahaan PI *Group*. Improving the implementation of the CSV approach to the comdev program across all PI Group Subsidiaries.	• Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan diskusi terkait CSV di PI *Group*. • Pelibatan masyarakat/komunitas dalam rantai nilai perusahaan dengan mengangkat isu sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan PI *Group*. • Capacity building through training and discussion related to CSV in PI Group. • Involvement of the community in the company's value chain by raising issues according to the conditions of each PI Group company

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENDUKUNG DIREKSI

Direksi dibantu oleh 6 (enam) komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan, yaitu Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Komite *Key Performance Indicators* (KPI), Komite Harga, Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Komite RWP, dan Komite Talenta. Direksi melakukan penilaian terhadap komite-komite di bawah Direksi berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, yaitu partisipasi kehadiran dalam rapat yang diadakan.

Direksi menilai bahwa di tahun 2024, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan rapat yang dilakukan oleh komite-komite tersebut telah berjalan dengan baik dan efektif. Hasil rapat komite dapat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

PENILAIAN DAN DASAR PENILAIAN ATAS KINERJA ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Direksi secara berkala juga melakukan penilaian atas kinerja organ pendukung Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal. Penilaian kedua organ pendukung Direksi tersebut berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan. Evaluasi dan penilaian juga dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dalam memperlancar hubungan atau menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pihak eksternal atau Stakeholders sebagai Pejabat Penghubung, melaksanakan fungsi implementasi GCG, komunikasi korporat, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat guna turut menjaga citra Perusahaan dan mewakili Direksi dalam setiap kegiatan komunikasi eksternal. Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Sepanjang tahun 2024, berdasarkan KPI dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya, Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun aspek KPI Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS SUPPORTING COMMITTEE

The Board of Directors is assisted by 6 (six) committees in carrying out its duties and responsibilities in managing the Company, namely the Corporate Work Plan and Budget Committee (RKAP), the Key Performance Indicators Committee (KPI), Pricing Committee, the Social and Environmental Responsibility Committee (TJSL), RWP Committee, and the Talent Committee. The Board of Directors evaluates the committees under its authority based on the performance of their assigned duties and responsibilities, including attendance at meetings held.

The Board of Directors assesses that in 2024, the implementation of duties, responsibilities and meetings held by these committees will run well and effectively. The results of committee meetings can help carry out the duties and responsibilities of the Board of Directors.

ASSESSMENT AND BASIS FOR EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE DIECTORS' SUPPORITNG ORGANS

The Board of Directors also periodically assesses the performance of the Board of Directors' supporting organs, namely the Corporate Secretary and Internal Audit. The assessment of the two supporting organs of the Board of Directors is based on the Key Performance Indicators (KPI) that have been determined. Evaluation and assessment are also carried out based on the results of the implementation of the duties and responsibilities of the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit.

CORPORATE SECRETARY PERFORMANCE ASSESSMENT

The Corporate Secretary supports the Board of Directors in managing external relations and aligning interests between the Company and external stakeholders as a Liaison Officer, carrying out the functions of implementing GCG, corporate communications, as well as managing policy documents and preparing meeting minutes to support the Company's corporate image and represent the Board of Directors in all external communication activities. The Corporate Secretary is led by the Corporate Secretary who is appointed and dismissed by the President Director upon approval from the Board of Commissioners in accordance with SOE Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of StateOwned Enterprises.

Throughout 2024, based on KPI and the implementation of his duties and responsibilities, the Board of Directors assesses that the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities well. The KPI aspects of the Corporate Secretary are as follows:

KPI Sekretaris Perusahaan
Company Secretary KPIs

Perspektif BSC BSC Perspective	No	Key Performance Indicators (KPI)
Financial	1	$ EBITDA $ EBITDA
	2	% Efektivitas Pengelolaan Biaya Operasional % Operational Cost Management Effectiveness
Customer	3	% Internal *Customer Satisfaction Index* % Internal Customer Satisfaction Index
	4	# Skor Akreditasi Kearsipan # Filing Accreditation Score
	5	# Skor *Corporate Reputation* # Corporate Reputation Score
	6	# Skor Penanganan Isu Strategis dan Krisis Komunikasi PI Group # PI Group Strategic Issue and Communication Crisis Management Score
	7	% ESG *Risk Rating* % ESG Risk Rating
Internal Business Process	8	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Completion of Audit Recommendations
	9	% Pelaksanaan RUPS Tahunan PI Group % Implementation of PI Group Annual General Meeting of Shareholders
	10	% Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial % Mass Media and Social Media Management
	11	% *Stakeholder Forum Effectiveness* % Stakeholder Forum Effectiveness
	12	% Stakeholder Engagement PI Group % PI Group Stakeholder Engagement
Learning & Growth	13	% *Learning & Development Effectiveness* % Learning & Development Effectiveness

PENILAIAN KINERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) membantu Direksi dalam melaksanakan audit internal Perusahaan guna menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses tata kelola Perusahaan serta memberikan saran perbaikan. SPI dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023.

Sepanjang tahun 2024, berdasarkan KPI dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi menilai bahwa SPI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun aspek KPI SPI, sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT UNIT PERFORMANCE ASSESSMENT

The Internal Audit Unit (SPI) assists the Board of Directors in carrying out the Company's internal audit to evaluate the effectiveness of internal controls, risk management and Company governance processes and provide recommendations for improvement. SPI is led by the Head of the Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by the President Director with approval from the Board of Commissioners in accordance with SOE Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/03/2023.

Throughout 2024, based on KPI and the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors concludes that SPI has effectively fulfilled its duties and responsibilities well. The SPI KPI aspects are as follows:

KPI Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Unit KPIs

Perspektif BSC BSC Perspective	No	Key Performance Indicators (KPI)
Financial	1	$ EBITDA $ EBITDA
	2	% Efektivitas Pengelolaan Biaya Operasional % Operational Cost Management Effectiveness
Customer	3	% Internal Customer Satisfaction Index % Internal Customer Satisfaction Index
	4	% Nilai Koreksi Audit Negatif terhadap Laba Tahun Berjalan % Negative Audit Correction Value to Current Year Profit
	5	% Laporan Keuangan *Audited* % Audited Financial Statements
Internal Business Process	6	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Completion of Audit Recommendations
	7	% Penyelesaian Diagnostik ICOFR % Completion of ICOFR Diagnostics
	8	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan PI Group % Completion of PI Group Audit Recommendations
	9	% Pelaksanaan PKPT % PKPT Implementation
	10	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Diagnostik ICOFR PI Group % Completion of PI Group ICOFR Diagnostic Recommendations
Learning & Growth	11	% *Learning & Development Effectiveness* % Learning & Development Effectiveness
	12	% Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko % Risk Management Body Qualification Compliance Ratio

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada kebijakan board manual. Pedoman tersebut mengatur kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Secara umum, kebijakan tersebut mendorong terpilihnya orang-orang dari latar belakang yang beragam untuk mengisi posisi manajemen, eksekutif, dan karyawan.

Pemegang saham menetapkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memerhatikan unsur keberagaman, baik dari sisi pendidikan, pengalaman kerja dan usia. Penetapan komposisi juga memperhatikan kebutuhan Perusahaan, khususnya bidang usaha bagi setiap Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per tanggal 31 Desember 2024 dijabarkan sebagai berikut:

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Provisions regarding diversity in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors refer to the board manual policy. These guidelines regulate the criteria for members of the Board of Commissioners and Directors. In general, this policy encourages the selection of people from diverse backgrounds to fill management, executive and employee positions.

Shareholders determine the composition of the Board of Commissioners and Directors by paying attention to elements of diversity, both in terms of education, work experience and age. Determining the composition also takes into account the needs of the Company, especially the business field for each Director. All members of the Board of Commissioners and Directors have integrity, competence, and a good reputation.

The diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 is described as follows:

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Gender**	**Usia** Age	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Pengalaman Profesional** Professional Experience	**Keahlian** Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Darmin Nasution	Indonesia	Laki-laki Male	76	Doktor Ilmu Ekonomi Doctor of Economics	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Minister for Economic Affairs	Ekonomi Makro dan Moneter Macro-economics and Monetary
Mustoha Iskandar	Indonesia	Laki-laki Male	64	Doktor Manajemen Bisnis Doctor of Business Management	Direktur Utama Perum Perhutani President Director of Perum Perhutani	Manajemen Perusahaan Company Management
Farhat Brachma	Indonesia	Laki-laki Male	48	Sarjana Teknik Kimia Bachelor of Chemical Engineering	Staf Ahli Wakil Presiden RI Expert Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia	Teknik Kimia Chemical Engineering

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Gender**	**Usia** Age	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Pengalaman Profesional** Professional Experience	**Keahlian** Expertise
Febrio Nathan Kacaribu	Indonesia	Laki-laki Male	46	Doktor Ilmu Ekonomi Doctor of Economics	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance	Kebijakan dan Pengelolaan Fiskal Fiscal Policy and Management
Suwandi	Indonesia	Laki-laki Male	57	Doktor Pengelolaan SDA dan Lingkungan Doctor of Natural Resources and Environmental Management	Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Director General of Food Crops, Ministry of Agriculture	Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Natural Resources and Environmental Management
Ari Dwipayana	Indonesia	Laki-laki Male	52	Doktor Ilmu Politik Doctor of Political Science	Staf Khusus Presiden RI Senior Advisor to the President of the Republic of Indonesia	Kebijakan Politik dan Sosial Political and Social Policy
Anwar Sanusi	Indonesia	Laki-laki Male	56	Doktor Studi Kebijakan dari National Graduate Institute for Po Doctor of Policy Studies from the National Graduate Institute for Po	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Secretary General of the Ministry of Manpower	Strategi dan Ilmu Kebijakan Strategy and Policy Science
Riswinandi	Indonesia	Laki-laki Male	67	Sarjana Ekonomi dan Bisnis Bachelor of Economics and Business	Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk Independent Commissioner of PT Bank Permata Tbk	Perbankan dan Keuangan Banking and Finance
Danar Rahmanto	Indonesia	Laki-laki Male	59	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah School of Sharia Economics Master of Humanities	Bupati Wonogiri Komisaris PT Pupuk Indonesia Pangan The Regent of Wonogiri is the Commissioner of PT Pupuk Indonesia Pangan	Administrasi Negara dan Manajemen Perusahaan Administrasi Negara dan Company Management
Irfan Ahmad Fauzi	Indonesia	Laki-laki Male	37	Magister Humaniora Master of Humanities	Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda Commissioner of PT Pupuk Iskandar Muda	Manajemen Perusahaan dan Pendidikan Company Management and Education
Direksi Board of Directors						
Rahmad Pribadi	Indonesia	Laki-laki Male	54	• Master in Public Administration dari Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Cambridge • Doktoral Administrasi Bisnis • Master in Public Administration from Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Cambridge • Doctorate in Business Administration	Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur President Director of PT Pupuk Kalimantan Timur	• Manajemen Bisnis dan Administrasi • Administrasi Bisnis • Business Management and Administration • Business Administration

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Gender**	**Usia** Age	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Pengalaman Profesional** Professional Experience	**Keahlian** Expertise
Gusrizal	Indonesia	Laki-laki Male	60	Master Manajemen Logistik dan Perkapalan Master of Management Logistics and Shipping	Direktur Pemasaran PTPI Marketing Director PTPI	Manajemen dan Logistik Management and Logistics
Bob Indiarto	Indonesia	Laki-laki Male	63	Magister Manajemen Master of Management	Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Director of HC and General Affairs PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Manajemen Produksi Production Management
Wono Budi Tjahyono	Indonesia	Laki-laki Male	57	Master of Business Administratif Master of Business Administration	Senior Vice President PT Bank Mandiri Senior Vice President of PT Bank Mandiri	Administrasi Bisnis Business Administration
Panji W. Ruky	Indonesia	Laki-laki Male	48	Magister Kebijakan Publik Master of Public Policy	Direktur Kemitraan dan Komunikasi Kartu Pra Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Director of Partnership and Communication for Pre-Employment Cards, Coordinating Ministry for Economic Affairs	Kebijakan Publik Public Policy
Tina T. Kemala Intan	Indonesia	Perempuan Female	65	Sarjana Psikologi Bachelor of Psychology	Direktur SDM dan Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Director of HC and Legal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Manajemen Sumber Daya Manusia Human Capital Management
Tri Wahyudi Saleh	Indonesia	Laki-laki Male	57	Magister Manajemen Agribisnis Master in Agribusiness Management	Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	• Manajemen dan Pemasaran • Manajemen Strategik dan Logistik • Management and Marketing • Strategic and Logistics Management
Jamsaton Nababan	Indonesia	Laki-laki Male	62	Sarjana Teknik Mesin Bachelor of Mechanical Engineering	President Director PT Pertamina EP Cepu President Director of PT Pertamina EP Cepu	Teknik Technique

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Ninis Kesuma Adriani	Indonesia	Perempuan Female	58	Magister Business Administration Bidang Keuangan dan Pemasaran Master of Business Administration in Finance and Marketing	Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani (2022-2023) Director of Strategic and Financial Planning PT Permodalan Nasional Madani (2022-2023)	Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Strategic Planning and Risk Management

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DISCLOSURE OF THE AFFILIATE RELATIONSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliation Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:			Hubungan Keluarga dengan: Family Relationship with:		
	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan) Government of the Republic of Indonesia (Major Shareholder/ Controlling Company	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Directors	Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan) Government of the Republic of Indonesia (Major Shareholder/ Controlling Company)
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Darmin Nasution	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Mustoha Iskandar	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Anhar Adel*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Farhat Brachma	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Febrio Nathan Kacaribu	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Suwandi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Ari Dwipayana	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Anwar Sanusi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Riswinandi**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Danar Rahmanto***	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Irfan Ahmad Fauzi***	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi
Affiliation Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:			Hubungan Keluarga dengan: Family Relationship with:		
	Dewan Komisaris Board of Commissioner	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Major Shareholder/ Controlling Company	**Dewan Komisaris** Board of Commissioner	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Major Shareholder/ Controlling Company)
Direksi Board of Directors						
Rahmad Pribadi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gusrizal	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Bob Indiarto	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Wono Budi Tjahyono	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Panji W. Ruky	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Tina T. Kemala Intan	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Tri Wahyudi Saleh	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Jamsaton Nababan	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Ninis Kesuma Adriani	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*Menjabat hingga 21 November 2024 | Serving until November 21, 2024
**Menjabat sejak 4 Maret 2024 | Serving since March 4, 2024
***Menjabat sejak 22 Juli 2024 | Serving since July 22, 2024

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
Concurrent Position of the Board of Commissioners and the Board Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As Member of the Board of Directors	**Jabatan Lain** Other Position
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Darmin Nasution	✓	✗	• Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020–sekarang) • Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Finance (2020–sekarang) • President Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk (2020–present) • President Commissioner of Indonesia Infrastructure Finance (2020–present)
Mustoha Iskandar	✗	✗	–
Anhar Adel*	✗	✗	–

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
Concurrent Position of the Board of Commissioners and the Board Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As Member of the Board of Directors	**Jabatan Lain** Other Position
Farhat Brachma	✓	✓	• Direktur PT REA Kaltim Plantation • Direktur PT Sasana Yudha Bakti • Penasihat Senior PT Barat Selatan Makmur Investindo • Direktur Hubungan Korporasi PT Robin Natayara • Direktur PT Cipta Davia Mandiri • Director of PT REA Kaltim Plantation • Director of PT Sasana Yudha Bakti • Senior Advisor to PT Barat Selatan Makmur Investindo • Director of Corporate Relations PT Robin Natayara • Director of PT Cipta Davia Mandiri
Febrio Nathan Kacaribu	✗	✗	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance
Suwandi	✗	✓	Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian Senior Advisior to The Ministry of Agriculture
Ari Dwipayana	✗	✗	Staf Pengajar/Dosen FISIPOL UGM Lecturer Staff of FISIPOL UGM
Anwar Sanusi	✗	✗	Kepala badan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan KEMENAKER RI Head of The Man Power Planning and Development Agency, Ministry of Man Power, Republic of Indonesia
Riswinandi**	✓	✗	Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk. Commissioner of PT Bank Permata Tbk
Danar Rahmanto***	✗	✗	-
Irfan Ahmad Fauzi***	✗	✓	Direktur Utama PT Fatijja Nusantara Inovasi President Director of PT Fatija Nusantara Inovasi
Direksi Board of Directors			
Rahmad Pribadi	✗	✗	✗
Gusrizal	✗	✗	✗
Bob Indiarto	✗	✗	✗
Wono Budi Tjahyono	✗	✗	✗
Panji W. Ruky	✗	✗	✗
Tina T. Kemala Intan	✗	✗	✗
Tri Wahyudi Saleh	✗	✗	✗
Jamsaton Nababan	✗	✗	✗
Ninis Kesuma Adriani	✗	✗	✗

*Menjabat hingga 21 November 2024 | Serving until November 21, 2024
**Menjabat sejak 4 Maret 2024 | Serving since March 4, 2024
***Menjabat sejak 22 Juli 2024 | Serving since July 22, 2024

Pengungkapan Kepemilikan Saham
Share Ownership Disclosure

Nama Name	Kepemilikan Saham Shareholding		
	Perusahaan Company	Entitas Anak dan Afiliasi Subsidiaries and Affiliated	Perusahaan Lain >50% Other Company >50%
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Darmin Nasution	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Mustoha Iskandar	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Anhar Adel*	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Farhat Brachma	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Febrio Nathan Kacaribu	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Suwandi	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Ari Dwipayana	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Anwar Sanusi	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Riswinandi**	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Danar Rahmanto***	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Irfan Ahmad Fauzi***	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Pengungkapan Kepemilikan Saham
Share Ownership Disclosure

Nama Name	Kepemilikan Saham Shareholding		
	Perusahaan Company	**Entitas Anak dan Afiliasi** Subsidiaries and Affiliated	**Perusahaan Lain >50%** Other Company >50%
Direksi Board of Directors			
Rahmad Pribadi	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Gusrizal	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Bob Indiarto	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Wono Budi Tjahyono	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Panji W. Ruky	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Tina T. Kemala Intan	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Tri Wahyudi Saleh	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jamsaton Nababan	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Ninis Kesuma Adriani	Nihil None	Nihil None	Nihil None

*Menjabat hingga 21 November 2024 | Serving until November 21, 2024
**Menjabat sejak 4 Maret 2024 | Serving since March 4, 2024
***Menjabat sejak 22 Juli 2024 | Serving since July 22, 2024

PENGUNGKAPAN INFORMASI PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

Hingga akhir tahun buku 2024, tidak ada perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan. Seluruh saham Perusahaan atau 100% masih dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

DISCLOSURE OF INFORMATION ON CHANGES IN SHARE OWNERSHIP

Until the end of the 2024 financial year, there will be no change in share ownership of the Company's Board of Commissioners or Directors. All of the Company's shares or 100% are still owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian Dewan Komisaris dilakukan melalui metode selfassessment sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP.KOM/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Piagam Dewan Komisaris PTPI

Kriteria Penilaian

Dewan Komisaris pada tahun 2018 telah melakukan penyempurnaan Pedoman Dewan Komisaris sesuai Keputusan No. 07/KEP.KOM/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Piagam Dewan Komisaris PTPI, yang salah satunya mengatur tentang pelaksanaan self-assessment kinerja Individu Dewan Komisaris. Implementasi atas kebijakan tersebut dimulai pada tahun 2020. Dewan Komisaris dengan Keputusannya No. 17/KEP. KOM/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 telah menetapkan Kebijakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PTPI.

Hasil Penilaian

Tahun 2024, pencapaian nilai Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris diperoleh skor 111,25. Adapun rincian hasil penilaian tersebut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT

Party Carrying Out the Assessment

The assessment of the Board of Commissioners is carried out using the self-assessment method as per Board of Commissioners Decree No. 07/KEP.KOM/XI/2018 dated November 2, 2018 concerning Determination of the Charter of the Board of Commissioners of PTPI

Assessment criteria

In 2018, the Board of Commissioners made improvements to the Board of Commissioners' Guidelines in accordance with Decree No. 07/KEP.KOM/XI/2018 dated November 2, 2018 concerning Determination of the Charter of the Board of Commissioners of PTPI, one of which regulates the implementation of self-assessment of individual performance of the Board of Commissioners. Implementation of this policy began in 2020. The Board of Commissioners with its Decree No. 17/KEP. KOM/X/2020 dated October 5, 2020 has established a Performance Measurement and Assessment Policy for the Board of Commissioners of the PTPI Company.

Rating result

In 2024, the Board of Commissioners' Key Performance Indicator (KPI) score will be 111.25. The details of the assessment results are presented in the table below.

No.	Kegiatan Activity	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Nilai Value
1.	**Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat** **Supervision and Advice Aspects**		70		76,67
	a. Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi Board of Commissioners meeting that includes the Board of Directors	12 kali times	10	12	10,00
	b. Rapat Internal Dewan Komisaris Meeting of the Board of Commissioners	12 kali times	10	12	10,00
	c. Pengawasan terhadap nilai ekonomi dan sosial Supervision of economic and social values	3 kali times	10	3	10,00
	d. Pengawasan terhadap inovasi model bisnis Supervision of business model innovation	3 kali times	10	4	13,33
	e. Kepemimpinan teknologi Technology leadership	3 kali times	10	3	10,00
	f. Peningkatan investasi Increased investment	3 kali times	10	3	10,00
	g. Pengembangan talenta Talent development	3 kali times	10	4	13,33
2.	**Aspek Pelaporan** **Reporting Aspects**		20		23,75
	a. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan Prepare and deliver an annual work program	1 kali time	5	1	5,00
	b. Menyusun laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham Prepare reports/opinions/suggestions to Shareholders	4 kali time	5	5	6,25
	c. Menyampaikan tanggapan Dewan Komisaris atas permohonan Direksi Convey the Board of Commissioners' response to the Board of Directors' request	100%	10	100%	10,00
3.	**Aspek Dinamis/Lain-lain** **Dynamic/Other Aspects**		10		10,83
	a. Peninjauan/kunjungan lapangan Field inspection/visit	12 kali times	5	14	5,83
	b. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan Increased competence and knowledge	3 kali times	5	3	5,00
Jumlah Total			**100**		**111,25**

PENILAIAN DIREKSI

Pihak yang Melakukan Penilaian

Di tahun 2024, pencapaian nilai KPI Direksi diperoleh skor 103,34.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian untuk Direksi, terutama berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Ada lima perspektif, yaitu:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Pengembangan Investasi
5. Pengembangan Talenta

BOARD OF DIRECTORS' ASSESSMENT

Party Carrying Out the Assessment

In 2024, the Board of Directors' KPI score was 103.34.

Assessment Criteria

The assessment criteria for the Board of Directors are primarily based on the achievement of predetermined Key Performance Indicators (KPI). There are five perspectives, namely:

1. Economic and Social Value for Indonesia
2. Business Model Innovation
3. Technology Leadership
4. Investment Development
5. Talent Development

Hasil Penilaian
Rating Result

Perspektif Perspective		No	KPI (Key Performance indicators)	Skor Score
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	FIN	1	$ EBITDA $ EBITDA	6,59
		2	% ROIC to WACC % ROIC to WACC	5,50
		3	# Interest Bearing Debt to EBITDA # Interest Bearing Debt to EBITDA	4,40
		4	% Interest Bearing Debt to Invested Capital % Interest Bearing Debt to Invested Capital	5,50
		5	% Laporan Keuangan *Audited* % Audited Financial Reports	5,50
	OPR	6	# HSSE *Score* # HSSE Score	3,74
		7	# Penurunan Emisi Karbon # Carbon Emission Reduction	5,50
		8	% *Plant Availability* % Plant Availability	7,35
	SOS	9	% Penyaluran Pupuk Subsidi/bantuan Langsung Pupuk % Distribution of Subsidized Fertilizer Direct Fertilizer Assistance	7,42
Subtotal				**51,50**
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation		10	% Diversifikasi Produk Baru % New Product Diversification	5,05
		11	% Penataan Bisnis PI Group % PI Group Business Arrangement	5,00
		12	% Restrukturisasi PT Rekayasa Industri % Restructuring of PT Rekayasa Industri	5,00
		13	% Implementasi *Roadmap* Perbaikan Manajemen Risiko % Implementation of Risk Management Improvement Roadmap	5,00
Subtotal				**20,05**

Hasil Penilaian
Rating Result

Perspektif Perspective	No	KPI (Key Performance indicators)	Skor Score
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	14	% Digitalisasi & *Integrated Supply Chain* % Digitalization & Integrated Supply Chain	5,40
	15	% *Rollout* i-Pubers secara Nasional % i-Pubers Rollout Nationally	5,50
Subtotal			**10,90**
Peningkatan Investasi Increased Investment	16	% Pengembangan Pabrik Pupuk % Fertilizer PlantDevelopment	10,27
Subtotal			**10,27**
Pengembangan Talenta Talent Development	17	% Rasio Top *Talent* Muda dalam *Nominated Talent* % Ratio of Young Top Talent in Nominated Talent	3,26
	18	% Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* % Female Ratio in Nominated Talent	2,17
	19	% Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko % Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio	2,99
	20	% Implementasi *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun % Implementation of Pension Fund Recovery Roadmap	2,20
Subtotal			**10,62**
Jumlah Total			**103,34**

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of the Board of Commissioners and Directors

Kebijakan penetapan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN No. SR-45/Wk1.MBU.D/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 Perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PTPI tahun 2024.

The policy for determining the income of the Board of Commissioners and Directors within the Company refers to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises as well as SOE Ministerial Decree No. SR-45/Wk1.MBU.D/07/2023 dated July 5, 2023 Regarding Determination of the Income of the Directors and Board of Commissioners of PTPI in 2024.

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tidak hanya didasarkan kepada Key Performance Indicator (KPI) tahunan. Pencapaian jangka pendek maupun panjang sebagai hasil dari sistem yang telah dibangun termasuk dalam pertimbangan.

Perusahaan juga melakukan kajian dengan memperhatikan sejumlah indikator: hasil kinerja keuangan Perusahaan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang memberikan motivasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kontribusinya terhadap Perusahaan.

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan peraturan BUMN, Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:
1. Faktor Skala Usaha;
2. Faktor Kompleksitas Usaha;
3. Tingkat Inflasi;
4. Kondisi dan Kemampuan Perusahaan.

Apabila perhitungan honorarium dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka honorarium yang dipakai adalah sama dengan honorarium tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pemberian kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

PROCEDURES FOR PROPOSING AND DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remuneration for the Board of Commissioners and Directors is not only based on the annual Key Performance Indicator (KPI). Short and long term achievements as a result of the system that has been built are included in the consideration.

The Company also carries out studies by taking into account a number of indicators: the results of the Company's financial performance and the fulfillment of reserves as regulated in applicable laws and regulations, fairness with peer groups, and consideration of the Company's long-term targets and strategies.

The Company provides appropriate rewards in the form of income which motivates the Board of Commissioners and Directors for their contribution to the Company.

Approval of remuneration for the Board of Commissioners and Directors is determined by the GMS. Based on SOE regulations, Shareholders determine adjustments to the remuneration of the Board of Commissioners and Directors by considering:
1. Business Scale Factor;
2. Business Complexity Factors;
3. Inflation Rate;
4. Company Conditions and Capabilities.

If the honorarium calculation takes into account factors that cause the honorarium to be lower than in the previous year, then the honorarium used is the same as the previous year's honorarium. The mechanism for providing compensation for the Board of Commissioners and Directors is as follows:

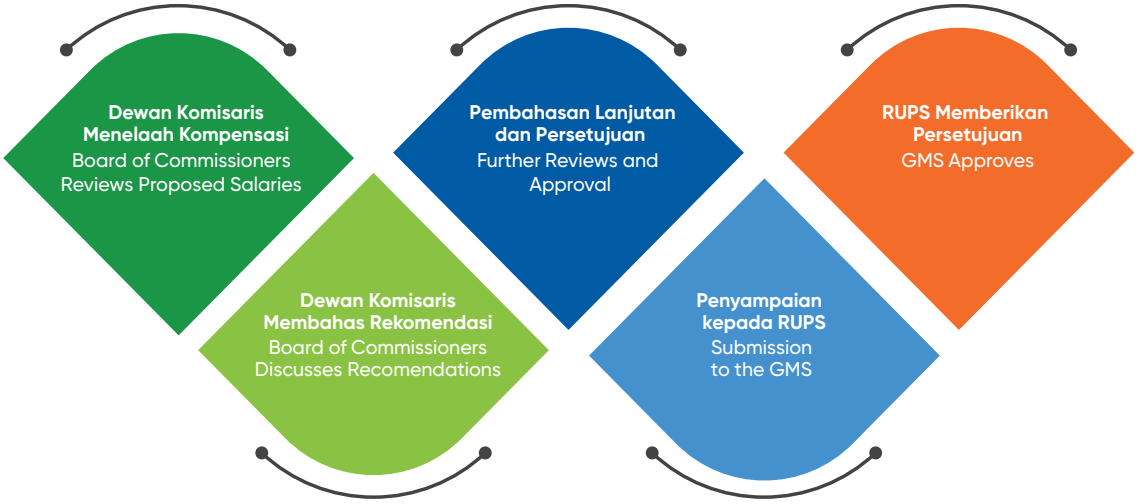
Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama;

1. Dengan memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Dewan Komisaris untuk menyiapkan rekomendasi;
2. Usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk pembahasan dan persetujuan dalam RUPS;
3. RUPS memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris. Skema Pemberian Remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

The Board of Commissioners reviews the compensation provided in the market for the work in question at other companies with the same line of business and status;

1. Taking into account the Company's business performance and the contribution of each individual, discussions are then carried out by the Board of Commissioners to prepare recommendations;
2. Proposals for remuneration for members of the Board of Commissioners are submitted to Shareholders for discussion and approval at the GMS;
3. The GMS gives approval and determines the remuneration of the Board of Commissioners. The Remuneration Scheme for the Company's Board of Commissioners is as follows:

Prosedur Pengusulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Hingga Penetapan Oleh RUPS
Procedures for Proposing the Board of Commissioners and the Board of Directors Remuneration up to the GMS Resolution



STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

REMUNERATION STRUCTURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The income structure of the Board of Commissioners and Directors refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises. Based on these regulations, the income components of the Board of Commissioners consist of:

Komponen Dan Struktur Remunerasi
Remuneration Components and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honor Salary/Honor	
Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama; • Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama. Fixed income in the form of money received every month due to his position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following conditions: • Calculation of the salary for the President Commissioner is 45% of the salary for the President Director; • Calculation of the Commissioner's salary is 90% of the Main Commissioner's salary	Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Gaji Direktur Utama ditetapkan menggunakan Pedoman Kementerian BUMN; • Perhitungan gaji Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari gaji Direktur Utama; • Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Fixed income in the form of money received every month due to his position as a member of the company's Board of Directors, with the following conditions: • The President Director's salary is determined using the Ministry of SOE Guidelines; • Calculation of the Vice President Director's salary at 90% of the President Director's salary; • Calculation of salaries for other Directors is 85% of the salary of the President Director
Tunjangan Allowance	
Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain honorarium, yang dapat berupa: • Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali honorarium di setiap tahunnya; • Tunjangan transportasi diberikan 20% dari honorarium per bulan; • Asuransi purna-jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun. Income in the form of money or which can be valued in money received at a certain time by members of the Board of Commissioners other than honorarium, which can be in the form of: • Holiday Allowance, given a maximum of 1 (one) honorarium each year; • Transportation allowance is given at 20% of the monthly honorarium; • Post-service insurance, provided with the provision that the premium borne by the company is a maximum of 25% of the honorarium per year	Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain gaji, yang dapat berupa: • Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji di setiap tahunnya; • Tunjangan perumahan diberikan sebesar Rp27.500.000 per bulan; • Asuransi purna-jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun. Income in the form of money or which can be valued in terms of money received at a certain time by members of the Board of Directors other than salary, which can be in the form of: • Holiday Allowance, given a maximum of 1 (one) times the salary each year; • Housing allowance is given in the amount of Rp27,500,000 per month; • Post-service insurance, provided with the condition that the premium borne by the company is a maximum of 25% of annual salary.

Komponen Dan Struktur Remunerasi
Remuneration Components and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas Facilities	
Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (at cost); • Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan perusahaan. Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Commissioners in the context of carrying out duties, authority, obligations and responsibilities based on statutory regulations, which can be in the form of: • Health facilities, provided in the form of reimbursement for medical costs (at cost); • Legal assistance facilities, provided if necessary, in the event of actions/deeds for and on behalf of their position related to the company	Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai faktor jabatan; • Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (at cost); • Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan perusahaan. Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Directors in the context of carrying out duties, authority, obligations and responsibilities based on statutory regulations, which can be in the form of: • Vehicle facilities, provided with 1 (one) official vehicle along with maintenance and operational costs with specifications and standards according to position factors; • Health facilities, provided in the form of reimbursement for medical costs (at cost); • Legal assistance facilities, provided if necessary, in the event of actions/deeds for and on behalf of their position related to the company.

Komponen Dan Struktur Remunerasi
Remuneration Components and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Tantiem Tantiem	

• Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian Key Performance Indicators melebihi 100%;
• Tantiem is income which is an award given to members of the Board of Commissioners if they make a profit and do not experience accumulated losses. The company can provide bonuses to members of the Board of Commissioners based on the GMS decision in ratifying the annual report if the realization of the achievement of Key Performance Indicators exceeds 100%;
 	
• Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris;
• Performance incentives are income which is an award given to members of the Board of Commissioners;
 	
• Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
  • Perhitungan tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari tantiem/insentif kinerja Direktur utama;
  • Perhitungan Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama.
• The calculation of bonuses/performance incentives for the Board of Commissioners is as follows:
  • Calculation of bonuses/performance incentives for the President Commissioner is 45% of the bonuses/performance incentives for the President Director;
  • Calculation of other Commissioners is 90% of the Main Commissioner's performance bonus/incentive.
	• Tantiem yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
	• Tantiem is income which is an award given to members of the SOE Board of Directors if they make a profit and do not experience accumulated losses.
	
	• Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa penghargaan jangka panjang (long term incentive/LTI). Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian Key Performance Indicators melebihi 100%;
	• Bonuses can be given in addition to long-term incentives (LTI). The company can provide bonuses to members of the Board of Directors based on the GMS decision in ratifying the annual report if the realization of the achievement of Key Performance Indicators exceeds 100%;
	
	• Insentif kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian;
	• Performance incentives, namely income which is an award given to members of the Board of Directors if there is an increase in performance even though they are still experiencing losses or accumulated losses;
	
	• Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:
	  • Tantiem/insentif kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN;
	  • Perhitungan tantiem/insentif kinerja Wakil Direktur Utama sebesar 90% tantiem/insentif kinerja gaji Direktur Utama
	  • Perhitungan tantiem/insentif kinerja Direktur lainnya sebesar 85% tantiem/insentif kinerja gaji Direktur Utama.
	• The calculation of bonuses/performance incentives for members of the Board of Directors is as follows:
	  • The President Director's performance bonus/incentive is determined using the Ministry of SOE guidelines;
	  • Calculation of bonuses/performance incentives for the Vice President Director is 90% of the bonuses/performance incentives for the President Director's salary
	  • Calculation of tantiem/performance incentives for other Directors is 85% of the bonus/performance incentives for the President Director's salary.

Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Tax on Honorarium, Allowances, and Facilities	
Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris. It is borne and borne by the Company, while taxes on bonuses/performance incentives for the Board of Commissioners are borne and borne by each member of the Board of Commissioners.	Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi. It is borne and borne by the Company, while taxes on bonuses/performance incentives for Directors are borne and borne by each Director.

KEBIJAKAN DASAR TERKAIT INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
5. Tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis; dan
6. Faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja/LTI yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Faktor kinerja;
2. Kemampuan keuangan Perusahaan;
3. Tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis; dan
4. Faktor lain yang relevan.

BASIC POLICY REGARDING INDICATORS FOR DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Determination of income in the form of salary or honorarium, allowances and permanent facilities is carried out by considering:

1. Business scale factor;
2. Business complexity factor;
3. Inflation rate;
4. Company's financial condition and capabilities;
5. Generally accepted income levels in similar industries; and
6. Other relevant factors, and must not conflict with statutory regulations.

Determination of income in the form of variable bonuses/performance incentives/LTI (merit rating) is carried out by considering:

1. Performance factors;
2. Company financial capabilities;
3. General income levels in similar industries; and
4. Other relevant factors.

PERHITUNGAN BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 diatur sebagai berikut:

BASIC POLICY RELATED TO INDICATORS FOR DETERMINING REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 is stipulated as follows:

Jabatan Position	**Besaran** Value
Direktur Utama President Director	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN) 100% (determined using Ministry of SOE guidelines)
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Sebesar 90% dari gaji/tantiem/insentif kinerja Direktur Utama 90% of the President Director's salary/tantiem/performance incentives
Direksi Lainnya Other Director	Sebesar 85% dari gaji/tantiem/insentif kinerja Direktur Utama 85% of the President Director's salary/tantiem/performance incentives
Komisaris Utama President Commissioner	Sebesar 45% dari gaji/tantiem/insentif kinerja Direktur Utama 45% of the President Director's salary/tantiem/performance incentives
Komisaris Lainnya Other Commissioner	Sebesar 90% dari honorarium/tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama 90% of the honorarium/tantiem/performance incentives for the President Commissioner

PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2024

Penetapan penghasilan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun buku ditetapkan sesuai dengan Surat Kementerian BUMN No. SR-98/Wk.MBU.04/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PTPI tahun 2024.

DETERMINATION OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN 2024

Determination of income for the Board of Commissioners and Directors in the financial year is determined in accordance with the Letter of the Ministry of SOE No. 45/Wk1. MBU.D/07/2023 dated 5 July 2023 concerning Determination of the Income of the Directors and Board of Commissioners of PTPI in 2024.

Remunerasi Aktual Dewan Komisaris Selama Tahun 2024
Actual Remuneration of the Board of Commissioners in 2024

Nama Name	Total Honorarium & Tunjangan 2024 dan Insentif Kinerja Tahun Buku 2023 Total Honorarium & Allowances 2024 and Performance Incentives of the Fiscal Year 2023	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Opsi/Saham yang Diterima di 2024 Option/Shares Received in 2024
Darmin Nasution	2.144.880.000	148.950.000	-
Mustoha Iskandar	1.946.916.000	134.055.000	-
Riswinandi*	1.593.092.353	116.326.477	-
Danar Rahmanto**	856.222.315	-	-
Irfan Ahmad Fauzi**	856.222.315	-	-
Anwar Sanusi	1.946.916.000	134.055.000	-
Suwandi	1.946.916.000	134.055.000	-
Febrio Nathan Kacaribu	1.946.916.000	134.055.000	-
Ari Dwipayana	1.946.916.000	134.055.000	-
Farhat Brachma	1.946.916.000	134.055.000	-

*Menjabat Sejak 4 Maret 2024 | Serving since March 4, 2024
**Menjabat Sejak 22 Juli 2024 | Serving since July 22, 2024

Remunerasi Aktual Direksi Selama Tahun 2024
Actual Remuneration of the Board of Directors in 2024

Nama Name	Total Honorarium & Tunjangan 2024 dan Insentif Kinerja Tahun Buku 2023 Total Honorarium & Allowances 2024 and Performance Incentives of the Fiscal Year 2023	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Opsi/Saham yang Diterima di 2024 Option/Shares Received in 2024
Rahmad Pribadi	4.302.000.000	331.000.000	-
Gusrizal	3.904.800.000	297.900.000	-
Bob Indiarto	3.706.200.000	281.350.000	-
Wono Budi Tjahyono	3.706.200.000	281.350.000	-
Panji Winanteya Ruky	3.706.200.000	281.350.000	-
Tina T. Kemala Intan	3.706.200.000	281.350.000	-
Tri Wahyudi Saleh	3.706.200.000	281.350.000	-
Jamsaton Nababan	3.706.200.000	281.350.000	-
Ninis Kesuma Adriani	3.706.200.000	281.350.000	-

Realisasi Remunerasi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Realization of Board Commissioners and Directors Remuneration in 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komponen Component	**Keputusan** Decision	**Komponen** Component	**Keputusan** Decision
Tunjangan Allowances			
a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali Honorarium 1 (one) time Honorarium	a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali Gaji 1 (one) time Salary
b. Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% Honorarium dalam 1 (satu) tahun Premiums borne by the Company Amounting to 25% of Honorarium, paid 1 (one) time per year	b. Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% Gaji dalam 1 (satu) tahun Premiums borne by the Company Amounting to 25% of Salary, paid 1 (one) time per year.
c. Tunjangan Transportasi Transport Allowance	Tunjangan Transportasi sebesar 20% Honorarium Transport Allowance Amounting to 20% of Honorarium	c. Tunjangan Transportasi Transport Allowance	1 Unit Kendaraan Maksimum Kapasitas 3.500 cc 1 Unit of Vihicle Max. Capacity 3.500 cc
Fasilitas Facilities			
a. Fasilitas Kesehatan Health Facility	Asuransi Kesehatan Health Insurance	a. Fasilitas Kesehatan Health Facility	Asuransi Kesehatan Health Insurance
b. Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar Pemakaian At cost	b. Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar Pemakaian At cost
Insentif Kinerja/Tantiem Performance Incentives/ Bonus	Total Tantiem Rp 40.420.047.489 Total Bonus of Rp 40.420.047.489	Insentif Kinerja/Tantiem Performance Incentives/ Bonus	Total Tantiem Rp 52.281.516.524 Total Bonus of Rp 52.281.516.524
Pajak Penghasilan (PPh) atas Tantiem Income Tax (PPh) on Bonus	Beban Penerima Payable by the Beneficiary	Pajak Penghasilan (PPh) atas Tantiem Income Tax (PPh) on Bonus	Beban Penerima Payable by the Beneficiary
Gaji Salary	Komisaris Utama : 45% dari Gaji Direktur Utama President Commissioners : 45% salary of President Commissioner's Honorarium	Gaji Salary	Direktur Utama: sesuai penetapan pada Surat Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Nomor SR-98/Wk.MBU.04/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024. President Director: according to the determination stated on the Letter of the Director of Portfolio and Business Development of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Number 370/E.DIRPPU/IX/2024 tanggal 19 September 19, 2024.
	Komisaris : 90% dari Honorarium Komisaris Utama Commissioner : 90% of President Commissioner Honorarium		Wakil Direktur Utama: 90% dari Gaji Direktur Utama Vice President Director: 90% of President Director's Salary
			Direktur: 85% dari Gaji Direktur Utama Vice President Director: 85% of President Director's Salary

Rekapitulasi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Commissioners and Directors Remuneration in 2024

Uraian Description	Total (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	55.618.014.941
Jumlah Remunerasi Direksi Total Directors' Remuneration	114.678.842.218
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024 Total Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2024	**170.296.857.159**

Rasio Gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan
Salary Ratio of Board of Commissioners, Directors, and Employees

Uraian Description	2024	2023
Direktur Utama terhadap Wakil Direktur Utama President Director to Vice President Director	1:0,90	1:0,90
Direktur Utama terhadap Direktur Lainnya President Director to Other Directors	1:0,90	1:0,85
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Members of the Board of Commissioners	1:0,90	1:0,90
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1:0,45	1:0,45
Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi President Director to the Highest Employee	1:0,27	1:0,24
Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah President Director to the Lowest Employee	1:0,04	1:0,03
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee to theLowest Employee	1:0,16	1:0,12
Karyawan Terendah terhadap Upah Minimum Regional (UMP) Rata-rata Lowest Employee to Average Regional Minimum Wage (UMP)	1:0,22	1:1,89

Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan

Board of Commissioners, Directors, and Joint Meetings

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan Perusahaan. Setiap rapat Dewan Komisaris, kecuali ditentukan lain, harus dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat.

Selain rapat internal, Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan. Pada kesempatan itu, Dewan Komisaris memberikan tanggapan.

Direksi secara rutin mengadakan Rapat Internal Direksi. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama terkecuali karena suatu dan lain hal Direktur Utama berhalangan hadir dan menunjuk salah seorang Direksi untuk memimpin Rapat Direksi.

Bagi setiap anggota Direksi yang telah menerima pemberitahuan rapat secara tertulis wajib menghadiri panggilan rapat dimaksud kecuali karena sesuatu dan lain hal yang bersangkutan berhalangan hadir. Bila karena sesuatu dan lain hal anggota Direksi berhalangan hadir maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Utama atau Direktur yang menandatangani undangan rapat, selanjutnya yang bersangkutan dapat mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain sesuai dengan aturan Anggaran Dasar.

Setiap keputusan yang diambil dalam rapat Direksi harus dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Direktur Utama/Ketua rapat yang menentukan. Adapun untuk penyampaian informasi akan diadakannya Rapat Internal Direksi, Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan dan di dalam panggilan rapat tersebut mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat

The Board of Commissioners holds meetings at least once every 1 (one) month or according to the Company's needs. Every meeting of the Board of Commissioners, unless otherwise specified, must be attended by the Secretary of the Board of Commissioners. Decisions at Board of Commissioners meetings are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is taken based on the majority of affirmative votes. The Board of Commissioners can also make legal and binding decisions without holding a meeting.

Apart from internal meetings, the Board of Commissioners holds joint meetings inviting the Directors as a form of coordination in order to discuss the Board of Directors' periodic reports and discuss business conditions and prospects as well as national policies that have an impact on the Company's performance. On that occasion, the Board of Commissioners provided a response.

The Board of Directors regularly holds Internal Board of Directors Meetings. All Board of Directors meetings are chaired by the President Director, unless for some reason the President Director is unable to attend and appoints one of the Directors to chair the Board of Directors Meeting.

Every member of the Board of Directors who has received written notice of a meeting is obliged to attend the meeting summons unless for some reason the person concerned is unable to attend. If for some reason or another a member of the Board of Directors is unable to attend, the person concerned must notify the President Director or the Director who signed the meeting invitation in writing, then the person concerned can represent their presence to another party in accordance with the Articles of Association.

Every decision taken at a Board of Directors meeting must be carried out by deliberation to reach consensus. If this is not achieved, then the decision must be taken based on the majority vote and if the votes for and against are balanced, then the President Director/Chairman of the meeting will decide. As for conveying information about the holding of an Internal Board of Directors Meeting, the Company will notify it in writing and convey it to members of the Board of Directors no later than 3 (three) days before the meeting is held and in the meeting invitation include the event, date, time and place of the meeting.

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

REALIZATION OF THE INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris Pada Rapat Internal Rutin dan RUPS

Frequency of Attendance of the Board of Commissioners at Regular Internal Meeting

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Darmin Nasution	14	14	100%
Mustoha Iskandar	14	14	100%
Anhar Adel*	12	7	58,33%
Farhat Brachma	14	13	92,85%
Febrio Nathan Kacaribu	14	8	57,14%
Suwandi	14	12	85,71%
Ari Dwipayana	14	14	100%
Anwar Sanusi	14	13	92,85%
Riswinandi **	10	10	100%
Danar Rahmanto ***	6	6	100%
Irfan Ahmad Fauzi***	6	5	83,33%
Rata-rata Average			**88,20%**

*Menjabat hingga 21 November 2024 | *Serving until November 21, 2024
** Menjabat sejak 4 Maret 2024 | ** Serving since March 4, 2024
*** Menjabat sejak 22 Juli 2024 | *** Serving since July 22, 2024

Agenda Rapat Internal Rutin Dewan Komisaris

Agenda of Regular Internal Meetings of the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	
1	25 Januari 2024 January 25, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Desember 2023; dan 2. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in December 2023; and 2. Discussion of other strategic issues.
2	30 Januari 2024 January 30, 2024	RUPS RKAP Tahun 2024	GMS RKAP Year 2024
3	22 Februari 2024 February 22, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Januari 2024; dan 2. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in January 2024; and 2. Discussion of other strategic issues.

Agenda Rapat Internal Rutin Dewan Komisaris
Agenda of Regular Internal Meetings of the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	
4	28 Maret 2024 March 28, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Februari 2024; 2. Pembahasan Laporan Pemberian Pinjaman Pemegang Saham PPS Jangka Panjang Anak Perusahaan ; 3. Pembahasan Penetapan Saham Seri A Dwiwarna pada Anak Perusahaan Eks BUMN dan/atau Anak Perusahaan Hasil Spin Off Eks BUMN; 4. Pembahasan Progres Audit Tahun 2023; 5. Pembahasan Updating Pelaksanaan Implementasi Tata Keloka Terintegrasi; 6. Pembahasan Evaluasi serta Penilaian Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris; 7. Pembahasan Pemaparan Draft Piagam Dekom; 8. Pemaparan SK Tata Tertib Rapat Dekom dan SK Tata Tertib Rapat Komite; dan 9. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of pending matters and the Company's performance in February 2024; 2. Discussion of Subsidiary's Long-Term PPS Shareholder Lending Report; 3. Discussion on the Determination of Series A Dwiwarna Shares in Ex-SOE Subsidiaries and/or Ex-SOE Spin Off Subsidiaries; 4. Discussion of Audit Progress Year 2023; 5. Discussion on Updating the Implementation of Integrated Governance; 6. Discussion of Evaluation and Assessment of the Board of Commissioners, Board of Directors and Supporting Organs of the Board of Commissioners; 7. Discussion on the Exposure of the Draft Decomm Charter; 8. Presentation of Decree on Rules of Procedure for Decommittee Meetings and Decree on Rules of Procedure for Committee Meetings; and 9. Discussion of other strategic issues.
5	29 April 2024 April 29, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Maret 2024; 2. Pembahasan Hasil Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan 3. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of pending matters and the Company's performance in March 2024; 2. Discussion of Integrated Governance Committee Meeting Results; and 3. Discussion of other strategic issues.
6	29 Mei 2024 May 29, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan April 2024; dan 2. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in April 2024; and 2. Discussion of other strategic issues.
7	24 Juni 2024 June 24, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Mei 2024; dan 2. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in May 2024; and 2. Discussion of other strategic issues.
8	28 Juni 2024 June 28, 2024	RUPS Kinerja Tahun 2023	AGM Performance in 2023
9	26 Juli 2024 July 26, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Juni 2024; 2. Pembahasan Arahan RUPS RKAP 2024; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in June 2024; 2. Discussion of GMS Direction for RKAP 2024; and 3. Other strategic issues.
10	27 Agustus 2024 August 27, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Juli 2024; dan 2. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in July 2024; and 2. Other strategic issues.
11	23 September 2024 September 23, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Agustus 2024; dan 2. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in August 2024; and 2. Other strategic issues.
12	24 Oktober 2024 October 24, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan September 2024; dan 2. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in September 2024; and 2. Other strategic issues.
13	25 November 2024 November 25, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Oktober 2024; dan 2. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in October 2024; and 2. Other strategic issues.

Agenda Rapat Internal Rutin Dewan Komisaris
Agenda of Regular Internal Meetings of the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	
14	20 Desember 2024 December 20, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan November 2024; 2. Pembahasan Penyesuaian Struktur Organisasi Fungsi Pemasaran PTPI; dan 3. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of pending matters and the Company's performance in November 2024; 2. Discussion on the Adjustment of the Organizational Structure of the Marketing Function of PTPI; and 3. Discussion of other strategic issues.

REALISASI RAPAT DIREKSI / REALIZATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETING

Frekuensi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal
Frequency of Attendance of Directors at Internal Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Rahmad Pribadi	55	38	69%
Gusrizal	55	45	82%
Bob Indiarto	55	42	76%
Wono Budi Tjahyono	55	46	84%
Panji W. Ruky	55	49	89%
Tina T. Kemala Intan	55	41	75%
Tri Wahyudi Saleh	55	44	80%
Jamsaton Nababan	55	46	84%
Ninis Kesuma Adriani	55	53	96%
Rata-rata Average		**45**	**82%**

Agenda Rapat Direksi
Board of Directors Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
1	02 Januari 2024 January 02, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 3. Selera Risiko RKAP 2024 4. Pembahasan Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia 5. Agenda Strategis Lainnya	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 3. Risk appetite of 2024 RKAP 4. Discussion of Human Capitals Directorate Agenda 5. Other Strategic Agenda
2	09 Januari 2024 January 09, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Produksi 3. Pembahasan Keputusan Debt to Equity Swap Cucu Perusahaan 4. Pembahasan Board Manual 5. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Production Directorate Agenda 3. Discussion on Debt to Equity Swap Decision of Grandson Company 4. Discussion of Board Manual 5. Other Strategic Agenda.
3	16 Januari 2024 January 16, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan 3. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran 4. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Finance Directorate Agenda 3. Discussion of Directorate Agenda 4. Other Strategic Agenda.

Agenda Rapat Direksi
Board of Directors Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
4	23 Januari 2024 January 23, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha 3. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko 4. Pembahasan Tema dan Desain untuk Annual dan Sustainable Report 5. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda 3. Discussion of Risk Management Directorate Agenda 4. Discussion of Theme and Design for Annual and Sustainable 5. Other Strategic Agenda.
5	31 Januari 2024 January 31, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia 3. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 4. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Human Capitals Directorate Agenda 3. Discussion of the Agenda of the Directorate of Business Transformation 4. Other Strategic Agenda.
6	06 Februari 2024 February 06. 2024	Pembahasan Materi Rapat Wamen tentang Distribusi Pupuk dan Reorganisasi Holding	Discussion of the Deputy Minister's Meeting Materials on Fertilizer Distribution and Holding Reorganization
7	13 Februari 2024 February 13, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan 3. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran 4. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Finance Directorate Agenda 3. Discussion of Marketing Directorate Agenda 4. Other Strategic Agenda.
8	20 Februari 2024 February 20, 2024	1. Update atas Sales and Operation Planning Report 2. Penataan Lini Bisnis (Streamlining) 3. ESG Rating 4. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko • Penetapan Direktur Pembina dan Fungsional Sesuai Permen • Laporan Bulanan Risiko Utama 5. Persetujuan Pinjaman Pemegang Saham ke Anak Perusahaan	1. Update on Sales and Operation Planning Report 2. Streamlining of Business Lines 3. ESG Rating 4. Discussion of Risk Management Directorate Agenda • Assignment of Supervisory and Functional Directors in accordance with Permen • Main Risk Monthly Report 5. Approval of Shareholder Loan to Subsidiary
9	21 Februari 2024 February 21, 2024	Pembahasan Kebijakan Cuti Bersama	Joint Leave Policy Discussion
10	27 Februari 2024 February 27. 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Updating Arahan Teknis RUPS RKAP Tahun 2024 3. Perpanjangan & Penambahan Bank Garansi Proyek JTB Rekind 4. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 5. Pembahasan Penataan Lini Bisnis/ Streamlining 6. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Updating Technical Direction of GMS RKAP Year 2024 3. Extension & Addition of JTB Project Bank Guarantee 4. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 5. Discussion of Line of 6. Other Strategic Agenda.
11	05 Maret 2024 March 05, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Penataan Lini Bisnis/ Streamlining 3. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan 4. Pembagasan Agenda Direktorat Pemasaran 5. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion on Business Line 3. Discussion of Finance Directorate Agenda 4. Division of Marketing Directorate Agenda 5. Other Strategic Agenda.
12	12 Maret 2024 March 12, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Produksi 3. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Production Directorate Agenda 3. Other Strategic Agenda.
13	19 Maret 2024 March 19, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha 3. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko 4. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda 3. Discussion of Risk Management Directorate Agenda 4. Other Strategic Agenda.

Agenda Rapat Direksi
Board of Directors Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
14	26 Maret 2024 March 26, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 3. Pembahasan Streamlining 4. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 3. Discussion on 4. Other Strategic Agenda.
15	02 April 2024 April 02, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Produksi 3. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Production Directorate Agenda 3. Other Strategic Agenda.
16	16 April 2024 April 16, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan 3. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran 4. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of S&OP Results 2. Discussion of Finance Directorate Agenda 3. Discussion of Marketing Directorate Agenda 4. Other Strategic Agenda.
17	23 April 2024 April 23, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha 3. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda 3. Discussion of Management Directorate Agenda
18	26 April 2024 April 26, 2024	Pembahasan RJP Tahun 2025 - 2029 Pupuk Indonesia	Discussion of RJP Year 2025 - 2029 Pupuk Indonesia
19	30 April 2024 April 30, 2024	1. Pembahasan Agenda Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 3. Pembahasan Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia 4. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of Strategic Management Support Agenda 2. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 3. Discussion of Human Capitals Directorate Agenda 4. Other Strategic Agenda.
20	7 Mei 2024 May 7, 2024	1. Pembahasan Agenda Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Produksi 3. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha 4. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of Strategic Management Support Agenda 2. Discussion of Production Directorate Agenda 3. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda 4. Other Strategic Agenda.
21	14 Mei 2024 May 14, 2024	1. Pembahasan Agenda Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan 3. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran 4. Agenda Strategis Lainnya.	1. Discussion of Strategic Management Support Agenda 2. Discussion of Finance Directorate Agenda 3. Discussion of Marketing Directorate Agenda 4. Other Strategic Agenda.
22	21 Mei 2024 May 21, 2024	1. Pembahasan Hasil S&OP 2. Progress Report Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha 3. Progress Report Direktorat Manajemen Risiko	1. Discussion of S&OP Results 2. Progress Report of Directorate of Portfolio & Business Development 3. Progress Report of the Directorate of Management
23	28 Mei 2024 May 28, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha 3. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda 3. Discussion of Management Directorate Agenda
24	04 Juni 2024 June 04, 2024	1. Isu Strategis Perusahaan 2. Update Dukungan Manajemen Strategis 3. Pembahasan Agenda Dir. Transformasi Bisnis 4. Usulan Penetapan Dividen Anak Perusahaan 5. Streamlining	1. Company Strategic Issues 2. Strategic Management Support Update 3. Discussion of Agenda Dir. Business Transformation 4. Proposed Determination of Dividends of Subsidiaries 5. Streamlining
25	11 Juni 2024 June 11, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Produksi 3. Agenda Strategis Lainnya	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Production Directorate Agenda 3. Other Strategic Agenda

Agenda Rapat Direksi
Board of Directors Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
26	18 Juni 2024 June 18, 2024	1. Agenda Direktorat Keuangan 2. Penyusunan Contingency Plan 3. Agenda Direktorat Pemasaran 4. Update Dukungan Manajemen Strategis	1. Finance Directorate Agenda 2. Preparation of Contingency Plan 3. Marketing Directorate Agenda 4. Strategic Management Support Update
27	25 Juni 2024 June 25, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis • SDU • S&OP 2. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha • Indigo • Streamlining	1. Strategic Management Support Update • SDU • S&OP 2. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda • Indigo • Streamlining
28	02 Juli 2024 July 02, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 3. Pendampingan Transformasi Bisnis EPC-Rekind 4. Streamlining 5. Agenda Strategis Lainnya	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 3. EPC Business Transformation Assistance- 4. Streamlinin 5. Other Strategic Agenda
29	09 Juli 2024 July 09, 2024	1. Agenda Direktorat Produksi 2. Isu Strategis Lainnya	1. Production Directorate Agenda 2. Other Strategic Issues
30	16 Juli 2024 July 16, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran 3. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha	1. Strategic Management Support Update 2. Marketing Directorate Agenda Discussion 3. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda
31	23 Juli 2024 July 23, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko 3. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha 4. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Risk Management Directorate Agenda 3. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda 4. Discussion of Finance Directorate Agenda
32	30 Juli 2024 July 30, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Isu Strategis lainnya	1. Strategic Management Support Update 2. Other Strategic Issues
33	06 Agustus 2024 August 06, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 3. Isu Strategis Perusahaan	1. Update on Strategic Management Support 2. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 3. Company Strategic Issues
34	13 Agustus 2024 August 13, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran 3. Streamlining 4. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan	1. Strategic Management Support Update 2. Marketing Directorate Agenda Discussion 3. Streamlining 4. Discussion of Finance Directorate Agenda
35	20 Agustus 2024 August 20, 2024	1. Isu Strategis Perusahaan 2. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 3. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko	1. Company Strategic Issues 2. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 3. Discussion of Risk Management Directorate Agenda
36	27 Agustus 2024 August 27, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Progress Report Buku Putih Pupuk Indonesia 3. Pembahasan Agenda Direktorat Produksi 4. Komite Investasi 5. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko 6. Agenda Strategis Lainnya	1. Strategic Management Support Update 2. Progress Report on Pupuk Indonesia White Paper 3. Discussion of Production Directorate Agenda 4. Investment Committee 5. Discussion of Risk Management Directorate Agenda 6. Other Strategic Agenda
37	03 September 2024 September 03, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Update Inbreng Aset Rekind 3. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 4. Agenda Strategis Lainnya	1. Strategic Management Support Update 2. Update on Rekind Asset Inbreng 3. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 4. Other Strategic Agenda

Agenda Rapat Direksi
Board of Directors Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
38	10 September 2024 September 10, 2024	1. Isu Strategis Perusahaan 2. Update Dukungan Manajemen Strategis 3. Pembahasan Agenda Dir. Pemasaran 4. Pembahasan Agenda Dir. Portbis 5. Struktur tim PMO Penetaan Lini Bisnis dan Transformasi EPC	1. Company Strategic Issues 2. Strategic Management Support Update 3. Discussion of Agenda Dir. Marketing 4. Discussion of Director's Agenda. Portbis 5. PMO team structure Line of Business Mapping and EPC Transformation 5.
39	17 September 2024 September 17, 2024	1. Isu Strategis Perusahaan 2. Update Dukungan Manajemen Strategis 3. Pembahasan Agenda Dir. Keuangan 4. Pembahasan Agenda Dir. Portbis 5. Pembahasan Agenda Dir. Manrisk	1. Company Strategic Issues 2. Strategic Management Support Update 3. Discussion of Agenda Dir. Finance 4. Discussion of Agenda Dir. Portbis 5. Discussion of Agenda Dir. Manrisk
40	24 September 2024 September 24, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Dir. Portofolio dan Pengembangan Usaha	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Agenda Dir. Portfolio and Business Development
41	25 September 2024 September 25, 2024	Rencana Inbreng Aset Tetap, Inbreng Saham PI di PIU, Capital Injection dalam Rangka RPP Rekind	Fixed Assets Investment Plan, PI Shares Investment in PIU, Capital Injection in Rekind RPP Framework
42	01 Oktober 2024 October 01, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Isu Strategis Perusahaan (Pembahasan Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia) 3. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha 4. Pembahasan Aksi Korporasi 2025 5. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 6. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran	1. Strategic Management Support Update 2. Company Strategic Issues (Discussion of Human Capitals Directorate Agenda) 3. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda 4. Discussion of Corporate Action 2025 5. Discussion on the Agenda of the Directorate of Business Transformation 6. Discussion of Marketing Directorate Agenda
43	08 Oktober 2024 October 08, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Produksi	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Production Directorate Agenda
44	15 Oktober 2024 October 15, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan 3. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran 4. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio Bisnis & Pengembangan Usaha 5. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko 6. Agenda Strategis Lainnya	1. Strategic Management Support Update 2. Finance Directorate Agenda Discussion 3. Discussion of Marketing Directorate Agenda 4. Discussion of the Agenda of the Directorate of Business Portfolio & Business Development 5. Discussion of Risk Management Directorate Agenda 6. Other Strategic Agenda
45	22 Oktober 2024 October 22, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Isu Strategis Perusahaan 3. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha	1. Strategic Management Support Update 2. Company Strategic Issues 3. Discussion of Portfolio & Business Development Directorate Agenda
46	29 Oktober 2024 October 29, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Prognosa Penjualan PSO 2024 3. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 4. Saham Dwiwarna 5. Apresiasi Atlet Olimpiade Paris 6. Isu Strategis Perusahaan (Pembahasan Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia)	1. Strategic Management Support Update 2. PSO Sales Prognosis 2024 3. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 4. Dwiwarna Shares 5. Appreciation of Paris Olympic Athletes 6. Company's Strategic Issues (Discussion of Human Capitals Directorate Agenda)
47	05 November 2024 November 05, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko 3. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Risk Management Directorate Agenda 3. Discussion of Portfolio & Development Directorate Agenda
48	12 November 2024 November 12, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Penyelesaian Piutang Distributor Pupuk Bersubsidi sesuai Arahan Dewan Komisaris 3. Pembahasan Agenda Direktorat Produksi 4. Isu Strategis Perusahaan 5. Konsultan Pengawas Implementasi Restrukturisasi PT Rekayasa Industri	1. Strategic Management Support Update 2. Settlement of Subsidized Fertilizer Distributor Receivables as directed by the Board of Commissioners. 3. Discussion of Production Directorate Agenda 4. Company Strategic Issues 5. Supervisory Consultant for PT Rekayasa Industri Restructuring Implementation

Agenda Rapat Direksi
Board of Directors Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
49	19 November 2024 November 19, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan 3. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran 4. Transformasi Bisnis Aset Properti 5. Isu Strategis Perusahaan (Pembahasan Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia) 6. PKPT 2025	1. Update on Strategic Management Support 2. Discussion of Finance Directorate Agenda 3. Discussion of Marketing Directorate Agenda 4. Property Asset Business Transformation 5. Company Strategic Issues (Discussion of Human Capitals Directorate Agenda) 6. PKPT 2025
50	26 November 2024 November 26, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. AD/ART Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) 3. Usulan Perpanjangan Bank Garansi ProyekPT Rekayasa Industri 4. Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 5. Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha 6. Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Perpres) 7. Pembagian Kewenangan (Threshold) 8. Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia	1. Strategic Management Support Update 2. Association of Indonesian Fertilizer Entrepreneurs (APPI) by-laws 3. Proposed Extension of Project Bank GuaranteePT Rekayasa Industri 4. Agenda of Directorate of Business Transformation 5. Agenda of Portfolio & Business Development Directorate 6. Subsidized Fertilizer Governance (Perpres) 7. Division of Authority (Threshold) 8. Resources Directorate Agenda
51	03 Desember 2024 December 03, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Potofolio & Pengembangan Usaha 3. Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko 4. Agenda Strategis Lainnya	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Potofolio & Business Development Directorate Agenda 3. Discussion of Risk Management Directorate Agenda 4. Other Strategic Agenda
52	10 Desember 2024 December 10, 2024	1. Update Dukungan Manajemen Strategis 2. Pembahasan Agenda Direktorat Produksi 3. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan 4. Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha	1. Strategic Management Support Update 2. Discussion of Production Directorate Agenda 3. Discussion of Finance Directorate Agenda 4. Discussion of Portfolio & Development Directorate Agenda
53	17 Desember 2024 December 17, 2024	1. Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran 2. Update Dukungan Manajemen Strategis 3. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan	1. Discussion of Marketing Directorate Agenda 2. Update on Strategic Management Support 3. Discussion of Finance Directorate Agenda
54	19 Desember 2024 December 19, 2024	1. Pelaksanaan Aksi Korporasi Penyehatan Rekind 2. Rapat SDM terkait Streamlining	1. Implementation of Corporate Action to Restructure Rekind 2. HR Meeting related to
55	24 Desember 2024 December 24, 2024	1. Pembahasan Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia 2. Update Dukungan Manajemen Strategis 3. Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan 4. Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis 5. Agenda Strategis Lainnya	1. Discussion of Human Capitals Directorate Agenda 2. Update on Strategic Management Support 3. Discussion of Finance Directorate Agenda 4. Discussion of Business Transformation Directorate Agenda 5. Other Strategic Agenda

REALISASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REALIZATION OF THE JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Pada Rapat Gabungan
Frequency of Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors at Joint Meeting

Peserta Participant	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Darmin Nasution	12	12	100,00%
Mustoha Iskandar	12	12	100,00%
Anhar Adel*	10	7	70,00%
Farhat Brachma	12	11	91,67%

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Pada Rapat Gabungan

Frequency of Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors at Joint Meeting

Peserta Participant	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Febrio Nathan Kacaribu	12	9	75,00%
Suwandi	12	11	91,67%
Ari Dwipayana	12	11	91,67%
Anwar Sanusi	12	11	91,67%
Riswinandi **	10	10	100,00%
Danar Rahmanto ***	6	6	100,00%
Irfan Ahmad Fauzi ***	6	5	83,33%
Direksi Board of Directors			
Rahmad Pribadi	12	9	75,00%
Gusrizal	12	10	83,33%
Bob Indiarto	12	9	75,00%
Tina T. Kemala Intan	12	11	91,67%
Panji W. Ruky	12	11	91,67%
Wono Budi Tjahyono	12	9	75,00%
Tri Wahyudi Saleh	12	11	91,67%
Jamsaton Nababan	12	11	91,67%
Ninis Kesuma Adriani	12	11	91,67%

*Menjabat hingga 21 November 2024 | *Serving until November 21, 2024
** Menjabat sejak 4 Maret 2024 | ** Serving since March 4, 2024
*** Menjabat sejak 22 Juli 2024 | *** Serving since July 22, 2024

Agenda Rapat Gabungan

Joint Meeting Agenda

NO	Tanggal Date	Agenda
1	26 Januari 2024 January 26, 2024	• Pembacaan tindak lanjut pending matters dan Kinerja Perusahaan s.d. bulan Desember 2023; • Pembahasan Persiapan RUPS RKAP Tahun Buku 2024; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of follow-up on pending matters and Company Performance up to December 2023; • Discussion of Preparation for the GMS of RKAP for the Financial Year 2024; and • Discussion of Other Strategic Issues.
2	23 Februari 2024 February 23, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan Desember 2023 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Januari 2024; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Direction on the Follow-up of Pending Matters in December 2023 and Discussion of Company Performance in January 2024; and • Discussion of Other Strategic Issues
3	28 Maret 2024 March 28, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan Januari 2024 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Februari 2024; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Direction on the Follow-up of Pending Matters in January 2024 and Discussion of Company Performance in February 2024; and • Discussion of Other Strategic Issues.
4	30 April 2024 April 30, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan Februari 2024 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Maret 2024; • Pembahasan KPI Diversifikasi Produk Baru; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Direction on the Follow-up of Pending Matters in February 2024 and Discussion of Company Performance in March 2024; • Discussion of New Product Diversification KPIs; and • Discussion of Other Strategic Issues.

Agenda Rapat Gabungan
Joint Meeting Agenda

NO	Tanggal Date	Agenda
5	31 Mei 2024 May 31, 2024	• Pembacaan arahan Dewan Komisaris atas tindak lanjut pending matters bulan Maret 2024 dan pembahasan kinerja Perusahaan bulan April 2024; • Pembahasan Buku Putih Rekind, Timeline 7 Langkah Penyelesaian Permasalahan Rekind, • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' direction on the follow-up of pending matters in March 2024 and discussion of the Company's performance in April 2024; • Discussion of Rekind White Paper, Timeline of 7 Steps to Resolve Rekind Issues, • Discussion of Other Strategic Issues.
6	26 Juni 2024 June 26, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan April 2024 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Mei 2024; • Pembahasan Financial Contingency Plan PTPI; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Direction on the Follow-up of Pending Matters in April 2024 and Discussion of Company Performance in May 2024; • Discussion on Financial Contingency Plan of PTPI; and • Discussion of Other Strategic Issues.
7	30 Juli 2024 July 30, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan Mei 2024 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Juni 2024; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Direction on Follow-up of Pending Matters in May 2024 and Discussion of Company Performance in June 2024; and • Discussion of Other Strategic Issues.
8	29 Agustus 2024 August 29, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan Juni 2024 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Juli 2024; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Direction on Follow-up of Pending Matters in June 2024 and Discussion of Company Performance in July 2024; and • Discussion of Other Strategic Issues.
9	24 September 2024 September 24, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan Juli 2024 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Agustus 2024; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Direction on Follow-up of Pending Matters in July 2024 and Discussion of Company Performance in August 2024; and • Discussion of Other Strategic Issues.
10	28 Oktober 2024 October 28, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan Agustus 2024 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan September 2024; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Direction on Follow-up of Pending Matters in August 2024 and Discussion of Company Performance in September 2024; and • Discussion of Other Strategic Issues.
11	28 November 2024 November 28, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan September 2024 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Oktober 2024; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Direction on Follow-up of Pending Matters in September 2024 and Discussion of Company Performance in October 2024; and • Discussion of Other Strategic Issues.
12	23 Desember 2024 December 23, 2024	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Pending Matters bulan Oktober 2024 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan November 2024; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Direction on Follow-up of Pending Matters in October 2024 and Discussion of Company Performance in November 2024; and • Discussion of Other Strategic Issues.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung di bawah Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Organ tersebut terdiri atas 5 (lima): Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Sekretaris Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan No. PER-3/MBU/03/2023 serta Surat Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN, maka Dewan Komisaris PTPI membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sejalan dengan berlakunya peraturan tersebut, Dewan Komisaris mengubah nomenklatur Komite GCG dan PMR menjadi Komite Pemantau Risiko ("KPR")

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris memimpin Sekretariat Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

KETENTUAN MASA JABATAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

PEJABAT SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Gempita Pratiwi. Dasar pengangkatannya adalah Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KEP/KOM/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PTPI.

The Board of Commissioners is assisted by supporting organs under the Board of Commissioners in carrying out its duties and functions. These organs consist of 5 (five): Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, Integrated Governance Committee, and Secretary to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also carries out remuneration functions for the Board of Commissioners and Directors.

Based on the Regulations of the Minister of State for SOE No. PER-2/MBU/03/2023 and No. PER-3/MBU/03/2023 as well as the Letter of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOE No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 dated May 26, 2023 concerning Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within SOE, the Board of Commissioners of PTPI formed an Integrated Governance Committee. In line with the enactment of this regulation, The Board of Commissioners changed the nomenclature of the GCG and PMR Committees to Risk Monitoring Committees ("KPR")

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary to the Board of Commissioners leads the Secretariat of the Board of Commissioners to assist the smooth running of administrative activities in implementing the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

TERM OF OFFICE TERMS

In accordance with the provisions of Article 5 of SOE Ministerial Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises, the term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years.

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS FUNCTIONARY

In 2024, the Secretary of the Board of Commissioners will be Gempita Pratiwi. The basis for his appointment is the Decree of the Board of Commissioners No. 002/KEP/KOM/II/2023 dated February 1, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PTPI.



Gempita Pratiwi

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commisioners

Periode Jabatan Position Period	Ke-2 2nd
Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	37 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP. KOM/I/2020 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/KEP/KOM/II/2023. Decree of the Board of Commissioners No. 04/KEP. KOM/I/2020 which was updated with Board of Commissioners Decree No.002/KEP/KOM/II/2023.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Rincian tugas yang diemban oleh Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan dalam uraian di bawah ini:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
5. Rincian realisasi pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris di Tahun 2024 diwujudkan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sebanyak 14 kali rapat yang terdiri dari rapat rutin kinerja bulanan maupun rapat non-rutin; membantu konsep surat/korespondensi Dewan Komisaris sebanyak 51 surat, menjadi liaison officer bagi Dewan Komisaris; serta memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

Details of the duties carried out by the Secretary of the Board of Commissioners are presented in the description below:

1. Ensure that the Board of Commissioners complies with statutory regulations and implements GCG principles;
2. Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Coordinate Committee members, if necessary in order to expedite the duties of the Board of Commissioners;
4. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.
5. Details of the realization of the competency development of the Secretary to the Board of Commissioners are presented in the "Company Profile" chapter contained in this annual report.

2024 Task Implementation Report

The performance assessment of the Secretary to the Board of Commissioners in 2024 is realized through holding 14 Board of Commissioners meetings consisting of routine monthly performance meetings and non-routine meetings; helped draft 51 letters/correspondence from the Board of Commissioners, served as liaison officer for the Board of Commissioners; and provide information required by the Board of Commissioners periodically and at any time.

KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian, dan objektivitas akuntan publik. Pembentukan Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Kualifikasi Komite Audit

Untuk dapat menjadi anggota Komite Audit khususnya dari pihak independen, seseorang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik, profesional, dan mempunyai pengetahuan, serta pengalaman kerja yang cukup di bidang keuangan/akuntansi/teknis dan/atau pengawasan/pemeriksaan;
2. Mampu berkomunikasi secara efektif;
3. Dapat menyediakan waktu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya;
4. Tidak memiliki benturan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar perusahaan (bukan anggota Dewan Komisaris) tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PI Group;
   b. Anggota Komite Audit pada Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PI Group;
   c. Anggota Komite Audit pada BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN lain;
   d. Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in supporting the implementation of good corporate governance, establishing an adequate internal control structure, improving the quality of disclosure and financial reporting, as well as reviewing the scope, accuracy, independence, and objectivity of public accountants. The formation of the Audit Committee refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises.

Audit Committee Qualifications

To become a member of the Audit Committee, especially an independent party, a person must fulfill the following requirements:

1. Have good integrity, be professional, and have sufficient knowledge and work experience in the fields of finance/accounting/technical and/or supervision/inspection;
2. Able to communicate effectively;
3. Can provide time to complete tasks and responsibilities;
4. Has no personal conflict of interest that could have a negative impact or conflict of interest on the Company;
5. Audit Committee members who come from outside the company (not members of the Board of Commissioners) may not hold concurrent positions as:
   a. Member of the Board of Commissioners of PI Group Subsidiaries and Grandchildren Companies;
   b. Member of the Audit Committee at PI Group Subsidiaries and Grand Subsidiaries;
   c. Member of the Audit Committee at SOE and/or other SOE Subsidiaries;
   d. Other positions that are prohibited from holding concurrent positions based on internal company policies and/or applicable laws and regulations

Appointment and Dismissal

The appointment and dismissal of Audit Committee members is carried out by the Board of Commissioners through a decision letter. Dismissal of members of the Audit Committee can be carried out if the member's term of office ends and based on the decision of the Board of Commissioners, they are dismissed because they do not fulfill the specified performance and/or are not competent in carrying out their duties.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan anggota Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 135 yang menyatakan, "Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."

Term of Office Terms

The terms of office of members of the Audit Committee are regulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises, in article 135 which states, "The term of office of members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/SOE Supervisory Board to dismiss him at any time."

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE AUDIT TAHUN 2024

NUMBER, COMPOSITION, AND COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2024

Susunan Komite Audit
Composition of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Mustoha Iskandar	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Coommittee	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 003/KEP.KOM/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 003/KEP.KOM/VII/2023 dated July 11, 2023	11 Juli 2023 – 28 Februari 2024 November 11, 2023– concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 003/KEP. KOM/II/2024 dated February 29, 2024	28 Februari – 7 Maret 2024 February 28 – March 7, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	8 Maret 2024 – 30 Juli 2024 March 8 - July 30, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP. KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris July 31, 2024 - concurrent with the term as Commissioner	
Febrio Nathan Kacaribu	Wakil Ketua I Vice Chairperson I	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 011/KEP.KOM/XI/2023 tanggal 29 November 2023 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 011/KEP. KOM/XI/2023 dated November 29, 2023	29 November 2023– 27 Februari 2024 November 29, 2023– concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 003/KEP. KOM/II/2024 dated February 29, 2024	28 Februari – 7 Maret 2024 February 28 – March 7, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	8 Maret 2024 – 30 Juli 2024 March 8 - July 30, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP. KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris July 31, 2024 - concurrent with the term as Commissioner	

Susunan Komite Audit
Composition of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Suwandi	Wakil Ketua II Vice Chairperson II	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 011/KEP.KOM/XI/2023 tanggal 29 November 2023 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 011/KEP. KOM/XI/2023 dated November 29, 2023	29 November 2023 – 27 Februari 2024 November 29, 2023– concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 003/KEP. KOM/II/2024 dated February 29, 2024	28 Februari – 7 Maret 2024 February 28 - March 7, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	8 Maret 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris March 8, 2024 - concurrent with the term as Commissioner	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP. KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris July 31, 2024 - concurrent with the term as Commissioner	
Danar Rahmanto	Wakil Ketua III Vice Chairperson III	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris July 31, 2024 - concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st
RM. Wiratmoko Prasidhanto	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 12/KEP.KOM/IX/2021 tanggal 27 September 2021 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 12/KEP. KOM/IX/2021 dated September 27, 2021	27 September 2021– 26 September 2024 September 27, 2021– September 26, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 19/KEP.KOM/X/2024 tanggal 28 September 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 019/KEP. KOM/X/2024 dated September 28, 2024	27 September 2024 – 26 September 2025 September 27, 2024 – September 26, 2025	Ke-2 2nd
Elly Fariani	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 012/KEP.KOM/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 012/KEP. KOM/XII/2023 dated December 1, 2023	1 Desember 2023– 28 Februari 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP. KOM/II/2024 dated February 29, 2024	29 Februari 2024 – 30 November 2024 February 29 - November 30, 2024	
Tubagus Donny Syafardan	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 021/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 021/KEP.KOM/XII/2024 dated December 5, 2024	9 Desember 2024 – 8 Desember 2025 December 9, 2024 - December 9, 2025	Ke-1 1st

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

PROFILE OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE



Mustoha Iskandar

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Coommittee

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Febrio Nathan Kacaribu

Wakil Ketua I
Vice Chairperson I

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Suwandi

Wakil Ketua II
Vice Chairperson II

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Danar Rahmanto

Wakil Ketua III
Vice Chairperson III

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



RM. Wiratmoko Prasidhanto

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	41 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Pendidikan Education	S1–Akuntasi Universitas Indonesia (2009) D3–Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003) S1–Accounting University of Indonesia (2009) D3–Accounting State College of Accountancy (2003)
Sertifikasi Profesi Professional Certificate	CACP
Pengalaman Kerja Work Experience	Kementerian BUMN Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Subkoordinator MR-1 (Desember 2020–sekarang) Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (Juni 2018–Agustus 2021) Ministry of SOEs Junior State Corporate Manager at Subcoordinator MR-1 (December 2020–present) Secretary of the Board of Commissioners of PT Pupuk Kalimantan Timur (June 2018– August 2021)



Tubagus Donny Syafardan

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Warga Negara **Citizen**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	58 tahun/years old
Domisili **Domicile**	Jakarta Jakarta
Pendidikan **Education**	S3-Universitas Padjadjaran, Ekonomics S2-Universitas Gadjah Mada, Administrasi Bisnis S1- Universitas Indonesia, Manajemen Keuangan Doctoral Degree-Padjadjaran University, Economics Masters Degree-Gadjah Mada University, Business Administration Bachelor Degree-University of Indonesia, Financial Management
Pengalaman Kerja **Work Experience**	Kepala Keuangan dan HC Officer PT POS Indonesia (2020-2022) Kepala Proyek Restrukturisasi Perusahaan PT POS Indonesia (2018-2020) VP Bisnis Digital dan Data Analisis (2017-2018) VP Transformasi (2014-2016) Supervisory Board-Hasan Sadikin Hospital (2017–May 2023) Head of Finance and HC Officer PT POS Indonesia (2020-2022) Head of Corporate Restructuring Project PT POS Indonesia (2018-2020) VP of Digital Business and Data Analysis (2017-2018) VP of Transformation (2014-2016) Supervisory Board-Hasan Sadikin Hospital (2017–May 2023)

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Independensi adalah syarat menjadi Komite Audit. Seorang anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional sebagaimana diatur dalam Audit Committee Charter yang diperbaharui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum dalam Audit Committee Charter, anggota Komite di bawah Dewan Komisaris menandatangani pernyataan independensi Komite Audit.

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

Independence is a requirement for being on the Audit Committee. A member of the Audit Committee must be independent, objective and professional as regulated in the Audit Committee Charter which is updated periodically in accordance with applicable laws and regulations. Apart from being stated in the Audit Committee Charter, Committee members under the Board of Commissioners sign a statement of Audit Committee independence.

Pengungkapan Independensi Komite Audit
Disclosure of Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Mustoha Iskandar	Febrio Nathan Kacaribu	Suwandi	Danar Rahmanto*	RM. Wiratmoko Prasidhanto	Elly Fariani**	Tubagus Donny Syafardan***
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has a management relationship in the Company, Subsidiaries or Affiliated Entities	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Own shares of the Company, either directly or indirectly	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Having a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Committee members	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah Serving as an administrator of political parties, officials and the Government	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

*Menjabat sejak 31 Juli 2024 | *Serving since July 31, 2024
** Menjabat hingga 30 November 2024 | ** Serving until November 30, 2024
*** Menjabat sejak 9 Desember 2024 | *** Serving since December 9, 2024

RANGKAP JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

CONCURRENT POSITION AS MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE

Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Rangkap Jabatan sebagai Concurrent Position as:		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Komite/Jabatan Lain Other Committees/ Positions
RM. Wiratmoko Prasidhanto	✗	✗	✗
Elly Fariani *	✗	✗	✗
Tubagus Donny Syafardan**	✗	✗	✗

* Menjabat hingga 30 November 2024 | * Served until November 30, 2024
** Menjabat sejak 9 Desember 2024 | ** Served since December 9, 2024

PEDOMAN KERJA: PIAGAM KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/KEP.KOM/II/2024 tentang Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI tanggal 29 Februari 2024 sebagai acuan Komite Audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang memenuhi ketentuan Good Corporate Governance. Kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite Audit dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas.

WORK GUIDELINES: AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Board of Commissioners has established work guidelines to support the implementation of the Audit Committee's duties which have been determined based on Board of Commissioners Decree No. 014/KEP.KOM/XI/2021 concerning the Audit Committee Charter of the Company (Persero) PTPI dated 5 December 2019 as a reference for the Audit Committee in carrying out its duties and functions in accordance with the provisions of Good Corporate Governance. This policy is a guideline to bind and regulate Audit Committee Members in carrying out and carrying out activities.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Secara rinci, tugas Komite Audit adalah:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Audit Committee is tasked with providing opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, and carrying out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners. In detail, the duties of the Audit Committee are:

1. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of carrying out the duties of external auditors and internal auditors;
2. Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors;
3. Provide recommendations regarding improvements to the management control system and its implementation;
4. Ensure that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the Company;
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners;

6. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
7. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Ekstern:
8. Memastikan objektifitas dan independensi auditor internal dan auditor eksternal;

9. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan BUMN yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
10. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;
11. Memastikan SPI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan auditor eksternal;

12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SPI;
13. Mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (fraud), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan SPI;
14. Mengevaluasi kinerja SPI;
15. Memastikan SPI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
16. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SPI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan audit intern BUMN Induk maupun Anak Perusahaan;
18. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern BUMN Induk dan Audit Intern Anak Perusahaan;
19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;

20. Melakukan evaluasi terhadap Perusahaan Pemeringkat yang akan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penunjukan Perusahaan Pemeringkat dimaksud kepada Dewan Komisaris; dan
21. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

6. Monitor and review the effectiveness of the implementation of Internal Audit and External Audit:

7. Ensure the objectivity and independence of internal and external auditors;
8. Ensure the credibility and objectivity of SOE financial reports to be issued to external parties and supervisory bodies, including
9. Ensure the credibility and objectivity of the SOE's financial reports to be issued to external parties and supervisory bodies, including the follow-up of complaints and/or notes of impropriety against the reports during the Audit Committee's review period;

10. Monitor and review the financial reporting process audited by external auditors;
11. Ensure that SPI communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners and external auditors;
12. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of SPI audit plans, scope and budget;
13. Evaluate periodic internal auditor reports and recommend corrective actions to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies and laws and regulations or other issues identified and reported by SPI;

14. Evaluate SPI performance;
15. Ensure that SPI upholds integrity in carrying out its duties;
16. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of SPI's annual remuneration as a whole and performance awards;
17. Monitor and evaluate the suitability of the implementation of financial policies and internal audits of the Parent and Subsidiary SOEs;
18. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding matters that support the effectiveness and accuracy of the financial reporting process and the suitability between the Parent SOE Internal Audit and Subsidiary Internal Audit policies;
19. Carry out monitoring and evaluation of the implementation of other Internal Audit functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister;
20. Conduct evaluations of the Rating Company that will assess the Company's Health Level and provide recommendations for the appointment of the Rating Company to the Board of Commissioners; and

21. Carry out other authorities, duties, and responsibilities related to its functions

In carrying out its duties, the Audit Committee has the authority to access employee records or information, funds, assets and other Company resources related to the implementation of its duties.

TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit telah melaksanakan tanggung jawab berkaitan dengan memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor eksternal, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, melalui surat No. 42.A/KA/PIHC/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024. Selanjutnya memberikan rekomendasi dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

AUDIT COMMITTEE RESPONSIBILITIES IN PROVIDING RECOMMENDATIONS FOR THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF EXTERNAL AUDITORS

The Audit Committee has carried out its responsibilities in relation to providing recommendations for the appointment of external auditors, based on the Evaluation Results Report on the Implementation of Audit Services for Annual Historical Financial Information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms, through letter No. 42.A/KA/PIHC/X/2024 dated October 23, 2024. Furthermore, it provides recommendations for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Rincian realisasi pengembangan kompetensi Komite Audit disampaikan dalam bab Profil Perusahaan yang terdapat di Laporan Tahunan ini.

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Details of the realization of the Audit Committee's competency development are presented in the Company Profile chapter contained in this Annual Report.

RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETING

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit Pada Rapat Tahun 2024
Recapitulation of Audit Committee Attendance at Meetings in 2024

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Mustoha Iskandar	14	14	100,00%
Febrio Nathan Kacaribu	14	4	28,57%
Suwandi	14	9	64,29%
Danar Rahmanto*	7	7	100,00%
RM. Wiratmoko Prasidhanto	14	13	92,86%
Elly Fariani**	13	11	84,62%
Tubagus Donny Syafardan***	1	1	100,00%
Rata-Rata Average			**81,48%**

*Menjabat sejak 31 Juli 2024 | *Serving since July 31, 2024
** Menjabat hingga 30 November 2024 | ** Serving until November 30, 2024
*** Menjabat sejak 9 Desember 2024 | *** Serving since December 9, 2024

Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
1	18 Januari 2024 January 18, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Development of Internal Control Work by SPI
2	15 Februari 2024 February 15, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Development of Internal Control Work by SPI

Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
3	18 Maret 2024 March 18, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Development of Internal Control Work by SPI
4	18 April 2024 April 18, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Development of Internal Control Work by SPI
5	17 Mei 2024 May 17, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Development of Internal Control Work by SPI
6	14 Juni 2024 June 14, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 3. Hasil Audit PIN 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Progress of Internal Control Work by SPI. 3. PIN Audit Results
7	17 Juli 2024 July 17, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Development of Internal Control Work by SPI
8	13 Agustus 2024 August 13, 2024	1. Pembahasan Arahan Pemegang Saham Terakit Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal dan Internal di Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya; 2. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 3. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion of Shareholder Directives Related to Follow-up on the Resolution of External and Internal Auditor Findings in 2023 and Previous Years; 2. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 3. 3. Progress of Internal Control Work by SPI.
9	13 September 2024 September 13, 2024	1. Pembahasan Arahan Pemegang Saham Terakit Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal dan Internal di Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya; 2. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 3. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion of Shareholder Directives Related to Follow-up on the Resolution of External and Internal Auditor Findings in 2023 and Previous Years; 2. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 3. 3. Progress of Internal Control Work by SPI.
10	14 October 2024 October 14, 2024	Klarifikasi & Negosiasi Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik PTPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2024 Clarification & Negotiation of Procurement of Public Accountant Office Services of PTPI and Subsidiaries for the Financial Year 2024
11	16 October 2024 October 16, 2024	Klarifikasi & Negosiasi Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik PTPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2024 Clarification & Negotiation of Procurement of Public Accountant Office Services of PTPI and Subsidiaries for the Financial Year 2024
12	18 October 2024 October 18, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Development of Internal Control Work by SPI
13	18 November 2024 November 18, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Development of Internal Control Work by SPI
14	17 Desember 2024 December 17, 2024	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of SPI Audit Findings; and 2. 2. Progress of Internal Control Work by SPI.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE AUDIT PADA 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE DUTIES AND ACTIVITIES IN 2024

Throughout 2024, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities which have been reported to the Board of Commissioners with the following details:

No.	Deskripsi Description
1	Evaluasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2024 – 2028. Evaluation of the Company's Long-Term Plan 2024-2028.
2	Kegiatan Memantau dan Mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Audit Intern dan Audit Ekstern, serta Memastikan Objektivitas dan Independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Activities to Monitor and Review the Effectiveness of Internal Audit and External Audit Implementation, and Ensure the Objectivity and Independence of Internal Auditors and External Auditors.
3	Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris Terkait Penyusunan Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran SPI. Provide Recommendations to the Board of Commissioners Regarding the Preparation of SPI Audit Plan, Scope, and Budget.
4	Mengevaluasi Laporan Auditor Internal Berkala dan Merekomendasikan Tindakan Perbaikan Untuk Mengatasi Kelemahan Pengendalian, Kecurangan (fraud), Masalah Kepatuhan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan atau Masalah Lain yang Diidentifikasi dan Dilaporkan Oleh SPI. Evaluate Periodic Internal Auditor Reports and Recommend Corrective Actions to Address Control Weaknesses, Fraud, Compliance Issues with Policies and Regulations or Other Issues Identified and Reported by SPI.
5	Mengevaluasi Kinerja SPI. Evaluating SPI Performance.
6	Kegiatan Evaluasi atau Analisis terhadap Kebijakan Akuntansi, Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023 dan Audited Tahun 2023 PTPI. Evaluation or Analysis of Accounting Policies, Unaudited Financial Statements for the Year 2023 and Audited for the Year 2023 of PTPI.
7	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perusahaan yang menekankan pada Compliance pada Keputusan RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2024 serta Aspirasi Pemegang Saham. Company Performance Evaluation Activities that emphasize Compliance with the GMS Decision regarding the Company's Work Plan and Budget or RKAP Year 2024 and Shareholder Aspirations.
8	Kegiatan Penelaahan untuk Memberikan Persetujuan atau Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Pasal 11. Review Activities to Provide Written Approval or Response of the Board of Commissioners in accordance with Article 11 of the Articles of Association.
9	Kegiatan Koordinasi antar Komite Dewan Komisaris Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa Rapat Komite dengan Direksi. Coordination Activities between Committees of the Board of Commissioners in the Context of Implementing their Duties and Functions in the form of Committee Meetings with the Board of Directors.
10	Kegiatan Evaluasi atau Analisis terhadap Laporan Manajemen Triwulanan PTPI Tahun 2024. Evaluation or Analysis of the Quarterly Management Report of PTPI in 2024.
11	Kegiatan Kunjungan Kerja ke Direktorat – Direktorat PTPI dan Anak Perusahaan. Working Visit Activities to Directorates of PTPI and Subsidiaries.
12	Kegiatan Penilaian Kinerja Komite Audit. Audit Committee Performance Assessment Activities.
13	Kegiatan Melaksanakan Penugasan Dewan Komisaris Lainnya Sesuai dengan Fungsi Komite Audit. Other Assignments of the Board of Commissioners in Accordance with the Audit Committee Functions.

No.	Deskripsi Description
14	Telaah Komite berkenaan dengan Usulan Penetapan Jasa Pemeringkat untuk penilaian Tingkat Kesehatan PTPI. Committee Review regarding the Proposed Determination of Rating Services for the Health Level Assessment of PTPI.
15	Kunjungan Kerja Komite dengan Dewan Komisaris ke: • PT Pupuk Iskandar Muda • PT Pupuk Kujang Cikampek • PT Pupuk Sriwijaya Palembang • PT Petrokimia Gresik • PT Pupuk Indonesia Utilitas • PT Pupuk Indonesia Logistik Working Visit of the Committee with the Board of Commissioners to: • PT Pupuk Iskandar Muda • PT Pupuk Kujang Cikampek • PT Pupuk Sriwijaya Palembang • PT Petrokimia Gresik • PT Pupuk Indonesia Utilitas • PT Pupuk Indonesia Logistik
16	Evaluasi Kinerja KAP atas Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan dan Laporan Lainnya PTPI Tahun Buku 2022 Serta Rekomendasi Penunjukkan KAP Untuk Tahun Buku 2023. Evaluation of KAP Performance on the Audit of Financial Statements and Other Reports of PTPI for Fiscal Year 2022 and Recommendations for the Appointment of KAP for Fiscal Year 2023.
17	Evaluasi Perubahan Lingkungan Strategis Dan Permasalahan Perusahaan. Evaluation of Strategic Environmental Changes and Company Issues.
18	Koordinasi Komite Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris. Board of Commissioners Committee Coordination with the Board of Commissioners.
19	Evaluasi atas Perubahan Nama KAP dan Rekomendasi Penunjukkan KAP untuk Tahun Buku 2024. Evaluation on Change of KAP Name and Recommendation on KAP Appointment for Financial Year 2024.
20	Mengikuti Pelatihan Certified Governance Oversight Professional (CGOP). Participated in Certified Governance Oversight Professional (CGOP) Training.
21	Evaluasi atas Laporan Keuangan Un-Audited Tahun Buku 2023. Evaluation of Un-Audited Financial Statements for Financial Year 2023.
22	Evaluasi dan Rekomendasi Kepada Dewan Komisaris atas Penyusunan Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran SPI. Evaluation and Recommendation to the Board of Commissioners on the Preparation of SPI Audit Plan, Scope, and Budget.
23	Pemutakhiran Piagam Komite Audit PTPI. Update of the Audit Committee Charter of PTPI.
24	Telaah Komite berkenaan dengan Usulan Penetapan Jasa Pemeringkat untuk penilaian Tingkat Kesehatan PTPI. Review of the Committee in relation to the Proposed Determination of Rating Services for the assessment of the Health Level of PTPI.
25	Keikutsertaan Dewan Komisaris dalam Kegiatan PKPT PIHC di Pekanbaru. Board of Commissioners Participation in PIHC PKPT Activities in Pekanbaru.
26	Melakukan Supervisi atas pelaksanaan GAP Diagnostic ICOFR, perbaikan pengendalian intern bedasarkan GAP analisis, serta memberikan masukan awal pada tahap pre-desain ICOFR. Supervise the implementation of ICOFR GAP Diagnostic, internal control improvement based on GAP analysis, and provide initial input at the ICOFR pre-design phase.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Pangangkatan anggota Komite Pemantau Risiko di lingkungan Perusahaan harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Persyaratan kemampuan adalah profesional dalam bidang manajemen risiko, sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, dan membuat surat pernyataan bebas dari conflict of interest apabila diperlukan.

Anggota komite tersebut juga harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan kepatutan, antara lain: memiliki integritas yang baik, pengetahuan yang memadai tentang bisnis Perusahaan, pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang lainnya yang relevan, jujur, independen (tidak ada conflict of interest), objektif dan profesional serta dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.

Standar kompetensi yang ditunjukkan oleh anggota Komite Pemantau Risiko, antara lain melalui sertifikasi:

1. ISO 31000, International Risk Standard, ERM Fundamentals;
2. Certification in Risk Management Assurance (CRMA).

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 135 yang menyatakan, "Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."

RISK MONITORING COMMITTEE

Qualifications of Risk Monitoring Committee Members

The rank of members of the Risk Monitoring Committee within the Company must meet the fit and proper requirements. The capability requirement is to be professional in the field of risk management, so as not to interfere with the objectivity of his opinion on the problems faced, and to make a statement free from conflict of interest if necessary.

Members of the committee must also have commendable characteristics and behavior and meet appropriateness requirements, including: having good integrity, adequate knowledge of the Company's business, sufficient work experience in the field of supervision/inspection and other relevant fields, honest, independent (not there is a conflict of interest), objective and professional as well as trustworthy and committed to their duties.

Competency standards demonstrated by members of the Risk Monitoring Committee include, among others, through certification:

1. ISO 31000, International Risk Standard, ERM Fundamentals;
2. Certification in Risk Management Assurance (CRMA).

Appointment and Dismissal

The Risk Monitoring Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners through a decision letter. Dismissal can be carried out if the member's term of office ends and based on the decision of the Board of Commissioners, he is dismissed for not fulfilling the specified performance and/or being incompetent in carrying out his duties.

Term of Office Terms

The terms of office for members of the Risk Monitoring Committee are regulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises, in article 135 which states, "The term of office of members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/SOE Supervisory Board to dismiss him at any time."

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan perubahan nomenklatur Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko menjadi Komite Pemantau Risiko.

Number, Composition and Structure of the Risk Monitoring Committee in 2024

In 2024, the Company changed the nomenclature of the GCG and Risk Management Monitoring Committee to become the Risk Monitoring Committee.

Susunan Komite Pemantau Risiko
Composition of the Risk Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Anwar Sanusi	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP. KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	11 November 2022-28 Februari 2024 November 11, 2022-28 Februari 2024	Ke-2 2nd
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 dated February 29, 2024	29 Februari 2024-7 Maret 2024 February 29, 2024-March 7, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	8 Maret 2024-30 Juli 2024 March 8, 2024-July 30, 2024	
Riswinandi	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024-bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris July 31, 2024-concurrently with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
	Wakil Ketua II Vice Chairman II	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	8 Maret 2024-30 Juli 2024 March 8, 2024-July 30, 2024	
Farhat Brachma	Wakil Ketua I Vice Chairperson I	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP. KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	11 November 2022—28 Februari 2024 November 11, 2022-February 28, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 dated February 29, 2024	29 Februari 2024-7 Maret 2024 February 29, 2024-March 7, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	8 Maret 2024-30 Juli 2024 March 8, 2024-July 30, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024-bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris July 31, 2024-concurrently with the term of office as Commissioner	
Irfan Ahmad Fauzi	Wakil Ketua II Vice Chairperson II	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024-Bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris July 31, 2024-Concurrently with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st

Susunan Komite Pemantau Risiko
Composition of the Risk Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Asri Saraswati	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 004/KEP.KOM/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 004/KEP.KOM/VII/2023 dated July 11, 2023	11Juli 2023-25 Agustus 2024 July 11, 2023-August 25, 2024	Ke-3 3rd
Riza Azmi	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 005/KEP.KOM/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 005/KEP.KOM/VII/2023 dated July 11, 2023	29 Juli 2023-24 Juli 2024 July 29, 2023-July 24, 2024	Ke-2 2nd
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 011/KEP.KOM/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 011/KEP.KOM/VI/2024 dated August 1, 2024	25 Juli 2024-24 Juli 2025 July 25, 2024-July 24, 2025	
Emmanuel Setyo Budi Nugroho	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 017/KEP.KOM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 017/KEP.KOM/VIII/2024 dated August 26, 2024	26 Agustus 2024-sekarang August 26, 2024-present	Ke-1 1st

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

PROFILE OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE RISK MONITORING COMMITTEE



Riswinandi

Ketua Komite
Committee Chair

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section contained in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Farhat Brachma

Wakil Ketua I
Deputy Chairperson I

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section contained in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Irfan Ahmad Fauzi

Wakil Ketua II
Deputy Chairman II

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section contained in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Riza Azmi

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	40 tahun/years old
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Pendidikan Education	• Master of Arts in Economics, Georgia State University (2013) • Master of Science in Economics, Gadjah Mada University (2013) • Sarjana Sains Terapan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2009) • Master of Arts in Economics, Georgia State University (2013) • Master of Science in Economics, Gadjah Mada University (2013) • Bachelor of Applied Science, State College of Accountancy (2009)
Sertifikasi Profesi Professional Certificate	CRMP, QRMP, dan CP3P
Pengalaman Kerja Work Experience	Kepala Seksi Risiko Dukungan dan Jaminan pada Penugasan Pemerintah, Kementerian Keuangan (2021–sekarang) Kepala Seksi Risiko Pinjaman pada BUMN, Kementerian Keuangan (2015–2021) Head of Support and Assurance Risk Section on Government Assignment, Ministry of Finance, Indonesia Finance (2021-present) Head of Loan Risk Section for SOEs, Ministry of Finance (2015- 2021)



Emmanuel Setyo Budi Nugroho

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	58 tahun/years old
Domisili Domicile	Cirebon, Jawa Barat Cirebon, West Java
Pendidikan Education	Sarjana Akuntansi, STAN (1993) Magister Manajemen, STIE Cirebon (2016)
Sertifikasi Profesi Professional Certificate	QIA, CRMP

Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Tim Ahli Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Bappenas (2024); • Menjadi dosen (pengajar) mata kuliah Manajemen Keungan di STIKES Ahmad Dahlan Cirebon Maret 2024 - Sekarang; • Tim Assesment Maturity Level SPI PT Kaltim Daya Mandiri (bersama Tim YPIA) (2022-2023). • Tim Seleksi Kompetensi Auditor Perum Pegadaian (bersama Tim YPIA) (2022); • Auditor Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-2022); • Kepala SPI PT Pelabuhan Tanjung Priok (2019 – 2021); • Kepala Audit PT Pelabuhan Tanjung Priok (2016 -2019); • Senior Auditor pada SPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)(2014-2016); • BPKP (1987-2013). • Member of the National Development Risk Management Expert Team of Bappenas (2024); • Lecturer (teacher) for Financial Management courses at STIKES Ahmad Dahlan Cirebon March 2024 - Present; • Maturity Level Assessment Team of SPI PT Kaltim Daya Mandiri (with the YPIA Team) (2022-2023). • Auditor Competency Selection Team of Perum Pegadaian (with the YPIA Team) (2022); • Main Auditor of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-2022); • Head of SPI of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2019 - 2021); • Head of Audit of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2016 -2019); • Senior Auditor at SPI of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014-2016); • BPKP (1987-2013).

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Independensi adalah syarat menjadi Komite Pemantau Risiko. Anggota Komite Pemantau Risiko harus bersikap independen, objektif, dan profesional sebagaimana diatur dalam Charter Komite Pemantau Risiko yang diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum dalam Charter, Komite Pemantau Risiko juga menandatangani pernyataan independensi. Seluruh anggota Komite tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan tentang pelaksanaan GCG.

INDEPENDENCE OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

Independence is a requirement to become a Risk Monitoring Committee. Members of the Risk Monitoring Committee must act independently, objectively and professionally as regulated in the Risk Management Monitoring Committee Charter which is updated periodically to conform to applicable laws and regulations.

Apart from being stated in the Charter, the Risk Monitoring Committee also signed a statement of independence. All Committee members do not hold concurrent positions which are prohibited by regulations regarding GCG implementation.

Pengungkapan Independensi Komite Pemantau Risiko
Disclosure of Independence of Risk Monitoring Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Anwar Sanusi*	Riswinandi**	Farhat Brachma	Irfan Ahmad Fauzi**	Asri Saraswati***	Riza Azmi	Emmanuel Setyo Budi Nugroho****
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has a management relationship in the Company, Subsidiaries or Affiliated Entities	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Own shares of the Company, either directly or indirectly	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Pengungkapan Independensi Komite Pemantau Risiko
Disclosure of Independence of Risk Monitoring Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Anwar Sanusi*	Riswinandi**	Farhat Brachma	Irfan Ahmad Fauzi**	Asri Saraswati***	Riza Azmi	Emmanuel Setyo Budi Nugroho****
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Having a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Committee members	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah Serving as an administrator of political parties, officials and the Government	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*Menjabat hingga 30 Juli 2024 | *Served until July 30, 2024
**Menjabat sejak 31 Juli 2024 | **Served since July 31, 2024
***Menjabat hingga 25 Agustus 2024 | ***Served until August 25, 2024
****Menjabat sejak 26 Agustus 2024 | ****Served since August 26, 2024

Pedoman Kerja: Piagam Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris mengacu pada pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/KEP.KOM/II/2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI tanggal 29 Februari 2024 sebagai acuan Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang memenuhi ketentuan Good Corporate Governance. Kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas

Work Guidelines: Risk Monitoring Committee Charter

Board of Commissioners refers to the work guidelines to support the implementation of the Risk Monitoring Committee's tasks as stipulated in the Board of Commissioners' Decree No. 005/KEP.KOM/II/2024 concerning the Charter of the Risk Monitoring Committee of the Company PTPI dated 29 February 2024 as a reference for the Risk Monitoring Committee in performing its duties and functions in accordance with the provisions of Good Corporate Governance. This policy serves as a guideline to bind and regulate the members of the Risk Monitoring Committee in carrying out and performing their activities.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai Piagam Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko, Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko bertugas untuk:

1. Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan fungsi pengawasan (oversight roles) dalam perspektif penerapan manajemen risiko terintegrasi Perseroan terhadap hal-hal berikut ini:
    a. Kinerja Operasional – meninjau pelaksanaan kegiatan dan kinerja operasional yang relevan dengan ruang lingkup penerapan manajemen risiko terintegrasi, sebagaimana yang diterapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.

Duties and Responsibility

In accordance with the GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter, the GCG and Risk Management Monitoring Committee is tasked with:

1. The Risk Monitoring Committee is tasked with performing oversight roles in the perspective of the Company's integrated risk management implementation regarding the following matters:
    a. Operational Performance - reviewing the implementation of activities and operational performance relevant to the scope of integrated risk management implementation, as implemented in the company's annual work plan and budget.

b. Manajemen Risiko – melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap proses manajemen risiko, memantau kesesuaian praktik manajemen risiko dengan kebijakannya, serta memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan. Efektivitas pengelolaan manajemen risiko, berkaitan dengan hal- hal sebagai berikut:
   - Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
   - Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fraud dan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat; dan
   - Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

c. Melakukan pemantauan dan penelaahan Laporan Manajemen Perseroan yang antara lain terdiri dari laporan kinerja Perseroan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, serta laporan laporan-laporan lain, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perseroan serta pelaksanaan operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal.

d. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perseroan (Induk) dan Anak Perusahaan Perseroan.

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perseroan (Induk) dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan Perseroan.

f. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

g. Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan, agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada Pemegang Saham dalam kurun waktu yang ditetapkan.

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS/Menteri.

b. Risk Management - monitoring and reviewing the risk management process, monitoring the conformity of risk management practices with its policies, and ensuring the implementation of principles, functions and implementation related to the Company's Risk Management policy. The effectiveness of risk management management, related to the following matters:
   - Implementation of a strong risk management oversight function;
   - Establishing a risk management culture that can reduce the possibility of fraud and unhealthy business practices; and
   - Identification of matters related to risk management that require the attention of the Board of Commissioners.

c. Monitoring and reviewing the Company's Management Report, which among others consists of the Company's monthly, quarterly, semi-annual and annual performance reports, as well as other reports, including but not limited to the implementation of risk management and its mitigation of the Company's business and investment plans and operational implementation reviewed from a financial and legal perspective.

d. Monitoring and reviewing the suitability of the implementation of the Company's (Parent) and Subsidiary Company's Risk Management policies and strategies.

e. Providing recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of the implementation of Risk Management and the suitability between the Company's (Parent) Risk Management policies and the Company's Subsidiary's Risk Management policies.

f. Reporting the results of monitoring and reviewing and providing recommendations on matters that require the Board of Commissioners' attention.

g. Assessing situations that are estimated to endanger the Company's business continuity, so that the Board of Commissioners can report to Shareholders within the specified time period.

h. Carrying out monitoring and evaluation of the implementation of other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/ or decisions of the GMS/Minister.

i. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Pemantau Risiko untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya.
   - Ketua bersama dengan anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
   - Menentukan rencana kerja tahunan.
   - Menentukan jadwal rapat tahunan.
   - Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Komite Pemantau Risiko.

i. The Chairperson of the Committee is tasked and responsible to coordinate all activities of the Risk Monitoring Committee to fulfill the objectives of the committee in accordance with its formation.
   - The Chairperson together with the members of the Risk Monitoring Committee are responsible for the following matters:
   - Determine the annual work plan.
   - Determine the annual meeting schedule.
   - Play an active role and contribute to every activity of the Risk Monitoring Committee.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Perusahaan mengikutsertakan Anggota Komite Pemantau Risiko dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Rincian pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Risk Monitoring Committee Competency Development

The Company involves Risk Monitoring Committee Members in competency development activities carried out through various training and education with funding being the full responsibility of the Company. Details of the implementation of training and competency improvement activities participated in by the Risk Monitoring Committee throughout 2024 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan rapat Komite Pemantau Risiko, yaitu dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 orang (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang ditunjuk oleh ketua Komite Pemantau Risiko. Setiap rapat Komite GCG dan Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir. Perbedaan pendapat dalam rapat dicantumkan dalam risalah rapat.

Risk Monitoring Committee Meeting

Risk Monitoring Committee meeting policy is that it can be held at least 1 (one) time in 1 (one) month. A Risk Monitoring Committee meeting can make a decision if it is attended by at least 66% or 2 people (including the Chair) of the total number of 3 members (including the Chair). Committee meeting decisions are made based on consensus deliberation. In the event that consensus deliberation does not occur, decisions are made by majority vote.

The Risk Monitoring Committee meeting is chaired by the Chair of the Risk Management Monitoring Committee who is appointed by the Chair of the Risk Monitoring Committee. Each meeting of the GCG and Risk Monitoring Committee is outlined in the minutes of the meeting which are signed by all members of the Risk Monitoring Committee who are present. Differences of opinion at the meeting are recorded in the minutes of the meeting.

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali.

Throughout 2024, the Risk Management Monitoring Committee have held 12 meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko Pada Rapat Tahun 2024
Recapitulation of Attendance of Risk Monitoring Committee at Meetings in 2024

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Anwar Sanusi*	8	4	50%
Riswinandi**	10	10	100%
Farhat Brachma	12	10	83%
Irfan Ahmad Fauzi	5	5	100%
Asri Saraswati***	8	8	100%
Riza Azmi	12	11	92%
Emmanuel Setyo Budi Nugroho****	4	4	100%
Rata-Rata Average			**89,33%**

*Menjabat hingga 30 Juli 2024 | *Served until July 30, 2024
**Menjabat sejak 31 Juli 2024 | **Served since July 31, 2024
***Menjabat hingga 25 Agustus 2024 | ***Served until August 25, 2024
****Menjabat sejak 26 Agustus 2024 | ****Served since August 26, 2024

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
1	19 Januari 2024 January 19, 2024	1. Update Toleransi Risiko, Kapasitas Risiko dan Strategi Risiko Tahun 2024; 2. Pembahasan pengukuran/kalibrasi atas Dampak dan Kemungkinan dalam Penetapan RTM Tahun 2024; dan 3. Progres Pelaksanaan Kewajiban PTPI atas Penerapan Manajemen Risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023. 1. Update on Risk Tolerance, Risk Capacity and Risk Strategy for 2024; 2. Discussion on the measurement/calibration of the Impact and Possibility in Determining the RTM in 2024; and 3. Progress on the Implementation of the Obligations of PTPI on the Implementation of Risk Management in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 Year 2023.
2	19 Februari 2024 February 19, 2024	1. Pembahasan strategi dan rencana mitigasi risiko RTM Downtime Pabrik; 2. Pembahasan Kinerja Manajemen Risiko dan Status RTM hingga akhir Januari 2024; 3. Pembahasan kinerja Tata Kelola hingga akhir Januari 2024; dan 4. Rekonsiliasi tindak Lanjut AOI tahun 2022 Aspek Dekom 1. Discussion of strategy and risk mitigation plan for PlantDowntime RTM; 2. Discussion of Risk Management Performance and RTM Status until the end of January 2024; 3. Discussion of Governance performance until the end of January 2024; and 3. 4. Reconciliation of AOI follow-up in 2022 Dekom Aspect
3	20 Maret 2024 March 20, 2024	1. Pembahasan Evaluasi atas Risiko Terintegrasi PI; 2. Pembahasan Risiko Proyek Pengembangan; 3. Pembahasan Kinerja Manajemen Risiko dan Status RTM hingga akhir Februari 2024; 4. Pembahasan kinerja Tata Kelola hingga akhir Februari 2024; dan 5. Isu Strategis lainnya. 1. Discussion on Evaluation of PI Integrated Risk; 2. Discussion of Development Project Risks; 3. Discussion of Risk Management Performance and RTM Status until the end of February 2024; 4. Discussion of Governance performance until the end of February 2024; and 5. Other Strategic Issues.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
4	25 April 2024 April 25, 2024	1. Potensi Dampak Eskalasi Konflik Timur Tengah terhadap kenaikan harga bahan baku dan keuangan PI 2. Pembahasan Penyebab dan Tindak Lanjut Kejadian Kecelakaan Kerja Turn Around di Pabrik PKG 3. Kinerja Manajemen Risiko dan Status RTM PTPI s.d. Maret 2024 4. Kinerja Tata Kelola s.d. Maret 2024 1. Potential Impact of Middle East Conflict Escalation on rising raw material prices and PI finance 2. Discussion of Causes and Follow-up of Turn Around Accidents at PKG Factory 3. Risk Management Performance and RTM Status of PTPI until March 2024 4. Governance Performance until March 2024
5	20 Mei 2024 May 20, 2024	1. Progres Persiapan Pelaksanaan Risk Maturity Level Tahun 2024 PTPI; 2. Pembahasan Arahan Kementerian BUMN terkait Penyusunan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Tata Kelola Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) pada PTPI; 3. Pembahasan Perkembangan Risk That Matters (RTM) PI s.d. bulan April 2024 dan Tanggapan Arahan Dekom terkait Pending Matriks RTM; 4. Pembahasan Update Stress Test PTPI; 5. Pembahasan Progres GCG assessment Tahun 2023; dan 6. Isu Strategis Lainnnya. 1. Progress of Preparation for the Implementation of Risk Maturity Level Year 2024 PTPI; 2. Discussion of the Direction of the Ministry of SOEs regarding the Preparation and Strengthening of the Implementation of Conflict of Interest Governance Policies at PTPI; 3. Discussion on the Development of PI's Risk That Matters (RTM) until April 2024 and Response to Dekom's Direction related to Pending RTM Matrix; 4. Discussion of PTPI Stress Test Update; 5. Discussion of GCG assessment progress in 2023; and 5. 6. Other Strategic Issues.
6	20 Juni 2024 June 20, 2024	1. Pembahasan Progress Penyusunan Contingency Plan PTPI; 2. Pembahasan Perkembangan Risk That Matters (RTM) PI s.d. bulan Mei 2024 dan Tanggapan Arahan Dekom terkait Pending Matriks RTM; 3. Kinerja Tata Kelola s.d. Mei 2024; dan 4. Isu Strategis Lainnnya. 1. Discussion of Progress in the Preparation of Contingency Plan PTPI; 2. Discussion on the Development of PI's Risk That Matters (RTM) until May 2024 and Response to Dekom's Direction related to Pending RTM Matrix; 3. Governance Performance until May 2024; and 3. 4. Other Strategic Issues.
7	22 Juli 2024 July 22, 2024	1. Pembahasan Progres penilaian *Risk Maturity Index* tahun 2024; 2. Progres tindak lanjut atas arahan Dekom RTM 03-Risiko K3; 3. Pembahasan Perkembangan *Risk That Matters* (RTM) PI sampai dengan bulan juni 2024 dan tanggapan arahan Dekom terkait pending Matriks RTM; dan 4. Kinerja Tata Kelola sampai dengan Juni 2024. 1. Discussion on the progress of the 2024 Risk Maturity Index assessment; 2. Progress on follow-up actions on the Board of Commissioners' directives RTM-03 on Occupational Health and Safety Risk; 3. Discussion on the development of Risk That Matters (RTM) PI up to June 2024 and responses to the Board of Commissioners' directives regarding the pending RTM Matrix; and 4. Governance performance up to June 2024.
8	17 Agustus 2024 August 17, 2024	1. Pembahasan Perpetual Loan ke Rekind; 2. Pembahasan Risiko dan Kinerja Teknologi Informasi; 3. Status RTM dan Kinerja MR s.d. Juli 2024; dan 4. Kinerja Tata Kelola s.d. Juli 2024. 1. Discussion on Perpetual Loan to Rekind; 2. Discussion of Information Technology Risk and Performance; 3. RTM status and MR performance up to July 2024; and 4. 4. Governance Performance until July 2024.
9	17 September 2024 September 17, 2024	1. Progress Penilaian Risk Maturity Index 2024; 2. Progress GCG Self Assessment tahun 2024; 3. Pembahasan Perkembangan Risk That Matters (RTM) PI s.d. bulan Agt 2024 dan Tanggapan Arahan Dekom terkait Pending Matriks RTM; dan 4. Kinerja Tata Kelola s.d. Agustus 2024 1. Progress of Risk Maturity Index Assessment 2024; 2. Progress GCG Self Assessment in 2024; 3. Discussion on the Development of PI's Risk That Matters (RTM) up to Aug 2024 and Response to Dekom's Direction related to Pending RTM Matrix; and 4. Governance Performance until August 2024

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
10	21 October 2024 October 21, 2024	1. Progress Penilaian Risk Maturity Index 2024; 2. Progress GCG Self Assessment tahun 2024; 3. Pembahasan Perkembangan Risk That Matters (RTM) PI s.d. bulan Agt 2024 dan Tanggapan Arahan Dekom terkait Pending Matriks RTM; dan 4. Kinerja Tata Kelola s.d. Agustus 2024 1. Progress of Risk Maturity Index Assessment 2024; 2. Progress GCG Self Assessment in 2024; 3. Discussion on the Development of PI's Risk That Matters (RTM) until Aug 2024 and Response to Dekom's Direction related to Pending RTM Matrix; and 4. Governance Performance until August 2024
11	20 November 2024 November 20, 2024	1. Progress Penilaian Risk Maturity Index 2024; 2. Progress GCG Self Assessment tahun 2024; 3. Pembahasan Perkembangan Risk That Matters (RTM) PI s.d. bulan Agt 2024 dan Tanggapan Arahan Dekom terkait Pending Matriks RTM; dan 4. Kinerja Tata Kelola s.d. Agustus 2024 1. Progress of Risk Maturity Index Assessment 2024; 2. Progress GCG Self Assessment in 2024; 3. Discussion on the Development of PI's Risk That Matters (RTM) until Aug 2024 and Response to Dekom's Direction regarding Pending RTM Matrix; and 4. Governance Performance up to August 2024
12	18 Desember 2024 December 18, 2024	1. Pembahasan Peran Manajemen Risiko dalam Peraturan Teknis ICOFR; 2. Pembahasan Progress Proyek Revamping Ammonia Kaltim-2 dan Penyebab Keterlambatannya; 3. Status RTM dan Kinerja Manajemen Risiko s.d. November 2024 dan Proyeksi Level/Status Risiko Hingga Akhir Tahun 2024; dan 4. Kinerja Tata Kelola s.d. November 2024. 1. Discussion on the Role of Risk Management in ICOFR Technical Regulations; 2. Discussion on the Progress of the Kaltim-2 Ammonia Revamping Project and the Causes of Delay; 3. RTM Status and Risk Management Performance as of November 2024 and Projected Risk Level/ Status Until End of Year 2024; and 3. 4. Governance Performance until November 2024.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PADA 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah merealisasikan pelaksanaan tugas melalui sejumlah kegiatan, yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND ACTIVITIES OF THE RISK MONITORING COMMITTEE IN 2024

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee has realized the implementation of its duties through a number of activities, the details of which are presented in the table below.

No.	Deskripsi Description
1	Evaluasi/Monitoring Pelaksanaan RKAP 2024, yang menekankan pada aspek Governance, Risk dan Compliance (GRC) pada Keputusan RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2024 Evaluation/Monitoring of the Implementation of RKAP 2024, which emphasizes the aspects of Governance, Risk and Compliance (GRC) in the GMS Resolution regarding the Company's Work Plan and Budget or RKAP Year 2024.
2	Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PTPI Tahun 2024 Evaluation of the Implementation of Governance (GCG) of PTPI in 2024
3	Pemantauan Manajemen Risiko Risk Management Monitoring
4	Evaluasi/Kajian atas Usulan Permohonan Persetujuan atau Tanggapan Dewan Komisaris yang Disampaikan Direksi untuk Aksi Korporasi Tertentu, sesuai Anggaran Dasar Evaluation/Review of Proposed Request for Approval or Board of Commissioners' Response Submitted by the Board of Directors for Certain Corporate Actions, in accordance with the Articles of Association
5	Melaksanakan Penugasan dari Dewan Komisaris Carrying out Assignments from the Board of Commissioners
6	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Komite Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2024 Preparation of Committee Program Implementation Report for Quarter I, Quarter II and Quarter III Year 2024

No.	Deskripsi Description
7	Kegiatan Koordinasi Komite Dewan Komisaris dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa: Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Komite dengan Direksi, Rapat dengan unit-unit kerja terkait dan rapat-rapat lainnya Coordination Activities of the Board of Commissioners Committee in the Implementation of its Duties and Functions in the form of: Internal Meetings of the Board of Commissioners and Committee Meetings with the Board of Directors, Meetings with related work units and other meetings.
8	Telaah atas Permohonan Tanggapan Tertulis Untuk Melakukan Perbuatan Melepaskan Penyertaan Modal pada Anak Perusahaan Dalam Rangka Penetapan Saham Istimewa Seri A Dwiwarna pada Anak Perusahaan Eks BUMN dan/atau Anak Perusahaan Hasil Spin Off Eks BUMN Review of Request for Written Responses to Perform Acts of Releasing Capital Participation in Subsidiaries in the Framework of Establishment of Series A Dwiwarna Special Shares in Subsidiaries of Ex-SOEs and/or Subsidiaries of Spin Off Results of Ex-SOEs
9	Melakukan telaah bersama Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi dalam bentuk Kajian atas Usulan Draft KPI Individu Direksi PTPI Tahun 2024 Conducting a joint review with the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee in the form of a Study on the Proposed Draft KPI for Individual Directors of PTPI in 2024.
10	Melakukan telaah bersama Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi terkait Kebijakan Ambang Batas Transaksi di PTPI dan Entitas Anak Conducting a joint review with the Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee regarding the Transaction Threshold Policy at PTPI and its Subsidiaries.
11	Melakukan telaah bersama Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi terkait Rancangan RJP 2025-2029 PTPI Conduct a joint review with the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee regarding the Draft RJP 2025-2029 of PTPI.
12	Melakukan telaah bersama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sehubungan dengan penyusunan/pemutakhiran Kebijakan Tata Kelola Benturan Kepentingan Pupuk Indonesia Grup Tahun 2024 Conduct a joint review with members of the Integrated Governance Committee in connection with the preparation/ update of the Conflict of Interest Governance Policy of Pupuk Indonesia Group Year 2024
13	Mendampingi Dewan Komisaris dalam kunjungan kerja ke PT Petrokimia Gresik Accompanying the Board of Commissioners on a working visit to PT Petrokimia Gresik
14	Telaah atas Rencana Darurat (Contingency Plan) PTPI Review of the Contingency Plan of PTPI
15	Kunjungan Kerja Komite dengan Dewan Komisaris k 1. PT Pupuk Iskandar Muda 2. PT Pupuk Kujang Cikampek 3. PT Pupuk Sriwijaya Palembang 4. PT Petrokimia Gresik 5. PT Pupuk Indonesia Utilitas 6. PT Pupuk Indonesia Logistik Committee Working Visit with the Board of Commissioners k 1. PT Pupuk Iskandar Muda 2. PT Pupuk Kujang Cikampek 3. PT Pupuk Sriwijaya Palembang 4. PT Petrokimia Gresik 5. PT Pupuk Indonesia Utilities 6. PT Pupuk Indonesia Logistik
16	Mengikuti Pelatihan Certified Governance Oversight Professional (CGOP) Participated in Certified Governance Oversight Professional (CGOP) Training
17	Pemutakhiran Piagam Komite Pemantau Risiko PTPI PTPI Risk Monitoring Committee Charter Update
18	Evaluasi Komite atas Update Rancangan RJP 2025-2029 PTPI Committee Evaluation on the Update of the Draft RJP 2025-2029 PTPI
19	Evaluasi Komite atas Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris Dalam Rangka Pelaksanaan Inisiatif-Inisiatif sesuai dengan RPP Rekind Committee Evaluation of the Board of Commissioners' Request for Written Response to the Implementation of Initiatives in accordance with the Rekind RPP
20	Evaluasi dan Penilaian Teknis Pengadaan Jasa Akuntan Publik PTPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2024 Evaluation and Technical Assessment of Public Accountant Services Procurement of PTPI and Subsidiaries for the Financial Year 2024
21	Evaluasi atas rencana Restrukturisasi Portofolio Bisnis Pupuk Indonesia Grup Evaluation of Pupuk Indonesia Group's Business Portfolio Restructuring plan
22	Evaluasi atas Rencana Akuisisi PT Prakarsa Nusa Sinergi Evaluation of the Proposed Acquisition of PT Prakarsa Nusa Sinergi

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Surat Kementerian BUMN No. S-254/MBU/04/2020 pada tanggal 17 April 2020 perihal Talent & Succession Management Direksi BUMN. Pada angka 3 huruf c disebutkan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar segera membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) atau nomenklatur lain yang disamakan fungsinya dengan memperluas peran sebagai Talent Committee untuk Eksekutif BUMN (Direksi dan BOD-1) dengan format susunan sebagai berikut:

1. Ketua: Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawasan/ Komisaris Independen;
2. Sekretaris: Ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
3. Anggota: Ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kualifikasi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 06/KEP.KOM/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 06/KEP.KOM/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Pada tahun 2021, terjadi perubahan komposisi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, sehingga diperbarui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 serta pengangkatan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP.KOM/VI/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan No. 011/KEP.KOM/IX/2021 tanggal 27 September 2021.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Kendati demikian, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

The formation of the Nomination and Remuneration Committee refers to the Letter of the Ministry of SOE No. S-254/MBU/04/2020 on April 17, 2020 concerning Talent & Succession Management for SOE Directors. In number 3 letter c, it is stated that the Board of Commissioners/ Supervisory Board should immediately form a Nomination and Remuneration Committee (KNR) or other nomenclature whose function is equivalent to expanding the role as a Talent Committee for SOE Executives (Board of Directors and BOD-1) with the following composition format:

1. Chairman: President Commissioner/Chair of the Supervisory Board/Independent Commissioner;
2. Secretary: Determined through the decision of the Board of Commissioners/Supervisory Board meeting;
3. Members: Determined through the decision of the Board of Commissioners/Supervisory Board meeting.

Qualifications of Nomination & Remuneration Committee Members

The Board of Commissioners has formed a Nomination & Remuneration Committee based on PTPI Board of Commissioners Decree No. 06/KEP. KOM/IV/2020 dated April 22, 2020. In 2022, the Board of Commissioners has formed a Nomination & Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 06/KEP.KOM/IV/2020 dated April 22, 2020. In 2021, there was a change in the composition of the Nomination & Remuneration Committee Members, so it was updated again through Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021 dated March 5, 2021 as well as the appointment of Nomination & Remuneration Committee Members through Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.KOM/VI/2021 dated July 9, 2021 and No. 011/KEP.KOM/IX/2021 dated September 27, 2021.

Appointment and Dismissal

Members of the Nomination & Remuneration Committee are appointed and dismissed through the Board of Commissioners Meeting for a certain term of office and can be reappointed in the following period. Replacement of members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners shall be carried out no later than 60 days after the member of the Nomination and Remuneration Committee is no longer able to carry out their functions.

Term of Office Terms

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee is no longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association. However, the Board of Commissioners has the right, from time to time, to replace them.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI TAHUN 2024

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE IN 2024

Susunan Komite Nominasi & Remunerasi
Composition of Nomination & Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Anhar Adel	Ketua Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP.KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP.KOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No. 08/KEP.KOM/VIII/2020 dated August 14, 2020 and updated through the Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021	14 Agustus 2020–28 Februari 2024 August 14, 2020–February 28, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 dated 29 February 2024	29 Februari 2024-7 Maret 2024 Fabruary 29, 2024-March 7, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	8 Maret 2024-30 Juli 2024 March 8, 2024-July 30, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024-21 November 2024 July 31, 2024-November 21, 2024	
Ari Dwipayana	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP.KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP KOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No. 08/KEP.KOM/VIII/2020 dated August 14, 2020 and updated through the Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021	14 Agustus 2020–28 Februari 2024 August 14, 2020–28 Februari 2024	Ke-1 1st
	Wakil Ketua I Vice Chairperson I	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 dated 29 February 2024	29 Februari 2024-7 Maret 2024 February 29, 2024-March 7, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	8 Maret 2024-30 Juli 2024 March 8, 2024-July 30, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated 31 July 2024	31 Juli 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris	

Susunan Komite Nominasi & Remunerasi
Composition of Nomination & Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Anwar Sanusi	Wakil Ketua II Vice Chairperson II	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 003/KEP.KOM/II/2024 dated 29 February 2024	29 Februari 2024-7 Maret 2024 February 29, 2024-March 7, 2024	Ke-2 2nd
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	8 Maret 2024-30 Juli 2024 March 8, 2024-July 30, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 015/KEP.KOM/VII/2024 dated July 31, 2024	31 Juli 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris July 31, 2024 - concurrent with term of office as Commissioner	
R. Nurhidayat	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP.KOM/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.KOM/VI/2021 dated June 9, 2021	9 Juni 2021–8 Juni 2024 June 9, 2021–June 8, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 012/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 012/KEP.KOM/VII/2024 dated July 9, 2024	9 Juni 2024-8 Juni 2025 June 9, 2024-June 8, 2025	Ke-2 2nd

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Sampai dengan 31 Desember 2024 belum ditunjuk Ketua Komite Nominasi & Remunerasi. Rincian profil Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Nominasi & Remunerasi disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.

PROFILE OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Until December 31, 2024 no Chairman of the Nomination & Remuneration Committee has been appointed. Details of the profile of the Chairman and Members of the Nomination & Remuneration Committee are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section contained in the "Company Profile" Chapter of this Annual Report.



Ari Dwipayana

Wakil Ketua I
Vice Chairperson I

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Anwar Sanusi

Wakil Ketua II
Vice Chairperson II

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



R. Nurhidayat

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	50 tahun/years old
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Pendidikan Education	Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada (2012) Master of Economic Development, Gadjah Mada University (2012)
Sertifikasi Profesi Professional Certificate	CRMP dan QRMP, CA
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (2020–sekarang) • Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) - Kementerian Keuangan (2020–sekarang) • Anggota Komite Audit pada Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (2021) • Anggota Komite Manajemen Pemantau Manajemen Risiko pada Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (2017–2020) • Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah, Kementerian Keuangan (2018–2019) • Member of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) (2020–present) • Associate Expert Researcher at the Fiscal Policy Agency (BKF) - Ministry of Finance (2020–present) • Member of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) (2021) • Member of the Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) (2017–2020) • Director of Funding and Financing Cooperation of the Investment Centre Ministry of Finance (2018–2019)

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Seluruh anggota Komite Nominasi & Remunerasi tela memenuhi semua kriteria independensi. Sesuai dengan amanat regulasi, Komite juga mampu menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan serta tidak dapat dipengaruh oleh pihak mana pun.

INDEPENDENCE OF THE NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

All members of the Nomination & Remuneration Committee have met all independence criteria. In accordance with regulatory mandates, the Committee is also able to carry out its duties independently, upholding the Company's interests and cannot be influenced by any party.

Pengungkapan Independensi Komite Nominasi & Remunerasi
Disclosure of Independence of Nomination & Remuneration Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Anhar Adel*	Anwar Sanusi**	Ari Dwipayana	R. Nurhidayat
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Director	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has a management relationship in the Company, Subsidiaries or Affiliated Entities	✗	✗	✗	✗
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Own shares of the Company, either directly or indirectly	✗	✗	✗	✗

Pengungkapan Independensi Komite Nominasi & Remunerasi
Disclosure of Independence of Nomination & Remuneration Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Anhar Adel*	Anwar Sanusi**	Ari Dwipayana	R. Nurhidayat
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Having a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Committee members	✗	✗	✗	✗
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah Serving as an administrator of political parties, officials and the Government	✗	✓	✗	✗

*Menjabat hingga 21 November 2024 | *Serving until November 21, 2024
** Menjabat sejak 29 Februari 2024 | ** Serving since February 29, 2024

Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi & Remunerasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 perihal Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Nominasi & Remunerasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/KEP.KOM/II/2024 tentang Piagam Komite Nominasi & Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI tanggal 29 Februari 2024 sebagai acuan Komite Nominasi & Remunerasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang memenuhi ketentuan Good Corporate Governance. Kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas.

Di antara isi piagam yang menjadi pegangan Komite Nominasi & Remunerasi adalah:
Latang Belakang dan Tujuan;
1. Lingkup Tugas;
2. Wewenang;
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
4. Organisasi dan Keanggotaan;
5. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Kode Etik;
7. Pertanggung Jawaban;
8. Honorarium dan Pembebanan Biaya;
9. Amandemen Piagam dan Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Work Guidelines: Nomination & Remuneration Committee Charter

The implementation of the duties and functions of the Nomination & Remuneration Committee refers to applicable laws and regulations, including Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises and Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination & Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

The Board of Commissioners has established work guidelines to support the implementation of the duties of the Nomination & Remuneration Committee which have been determined based on Board of Commissioners Decree No. 004/KEP. KOM/II/2024 concerning the Charter of the Nomination & Remuneration Committee of the Company (Persero) PTPI dated February 29, 2024 as a reference for the Nomination & Remuneration Committee in carrying out its duties and functions in accordance with the provisions of Good Corporate Governance. This policy is a guideline to bind and regulate Nomination & Remuneration Committee Members in implementing and carrying out activities.

Among the contents of the charter that the Nomination & Remuneration Committee relies on are:
Background and Objectives;
1. Scope of Duties;
2. Authority;
3. Obligations and Responsibilities;
4. Organization and Membership;
5. Meeting of the Nomination and Remuneration Committee;
6. Code of Ethics;
7. Accountability;
8. Honorarium and Cost Charges;
9. Amendment to the Charter and Performance of the Nomination and Remuneration Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan membantu Dewan Komisaris dan bertugas untuk menyusuan konsep dan analisis yang berhubungan dengan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Melakukan tinjauan secara berkala atas Sistem Manajemen Talenta (Talent Management System) perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya.
3. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi.
4. Melakukan evaluasi terhadap kriteria yang digunakan dalam proses talent classification yang dilakukan oleh Direksi.
5. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (Selected Talent), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (Nominated Talent) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri.
6. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
7. Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators (KPI) Individu anggota Direksi.
8. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
9. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun.
10. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
11. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
12. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan tugas dan pelaporannya secara mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
2. Bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
3. Melakukan penelaahan atas usulan KPI Direksi secara individual serta melakukan review atas pencapaiannya secara berkala;
4. Menyusun Laporan Triwulanan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris pada bulan pertama setelah triwulan yang bersangkutan;

Duties and Responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee have at least the following duties and responsibilities:

1. The Nomination and Remuneration Committee plays a role in assisting the Board of Commissioners and is tasked with preparing concepts and analysis related to the functions of the Nomination and Remuneration Committee;
2. Conducting periodic reviews of the company's Talent Management System and monitoring and evaluating its implementation.
3. Conducting evaluations of the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors.
4. Conducting evaluations of the criteria used in the talent classification process carried out by the Board of Directors.
5. Validate and calibrate Selected Talents, to produce a list of Nominated Talents nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister.
6. Evaluate prospective Company representatives who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of Subsidiaries, before being submitted to the GMS/Minister.
7. Evaluate the proposed Key Performance Indicators (KPI) for Individual members of the Board of Directors.
8. Prepare a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
9. Assess the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared.
10. Prepare a proposal for a development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
11. Evaluate the remuneration policy for employees who require approval/response from the Board of Commissioners.
12. Evaluate the proposal of the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
13. Carry out other tasks as requested by the Board of Commissioners.

Responsibilities

1. Carry out duties and reports independently and be directly responsible to the Board of Commissioners;
2. Work collectively in carrying out their duties to assist the Board of Commissioners;
3. Conduct individual reviews of the Board of Directors' KPI proposals and conduct periodic reviews of their achievements;
4. Prepare a Quarterly Report on the Nomination and Remuneration Committee's Activities and submit it to the Board of Commissioners in the first month after the relevant quarter;

5. Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris, jika diminta;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
7. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris jika diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris;
8. Melakukan penelaahaan atas usulan pengangkatan/ pemberhentian Kepala SPI dan Sekretaris Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
9. Melakukan penelaahaan atas usulan perubahan struktur organisasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan review terhadap setiap aktivitas dalam lingkup tugasnya, dan setiap saat dapat mencari serta meminta informasi yang dibutuhkan dari:

1. Direksi;
2. Setiap pegawai (dan seluruh pegawai diarahkan bekerja sama untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Komite Nominasi & Remunerasi);
3. Pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya manusia dan remunerasi;
4. Manajemen; dan
5. Pihak-pihak yang terkait

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi & Remunerasi

Perusahaan mengikutsertakan anggota Komite Nominasi & Remunerasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Nominasi & Remunerasi di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Kebijakan pelaksanaan rapat Komite Nominasi & Remunerasi dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat komite dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah.

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi & Remunerasi telah menyelenggarakan 13 kali rapat dengan rekapitulasi kehadiran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

5. Make special reports to the Board of Commissioners, if requested;
6. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information;
7. Provide opinions to the Board of Commissioners if requested regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and identify matters that require the Commissioners' attention;
8. Conduct reviews of proposals for the appointment/ dismissal of the Head of SPI and the Corporate Secretary that require the approval of the Board of Commissioners;
9. Conducting a review of proposed changes to the organizational structure that require the approval of the Board of Commissioners.

Authority of the Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners authorizes the Nomination and Remuneration Committee to review every activity within the scope of its duties, and at any time can seek and request the required information from:

1. Directors;
2. Every employee (and all employees are directed to work together to fulfill what is required by the Nomination & Remuneration Committee);
3. Parties who carry out Human Capital management and remuneration functions;
4. Management; And
5. Related parties.

Development of Nomination & Remuneration Committee Competency

The Company involves members of the Nomination & Remuneration Committee in competency development activities carried out through various training and education with funding being the full responsibility of the Company. A list of training and competency improvement activities that the Nomination & Remuneration Committee will participate in throughout 2024 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

Nomination & Remuneration Committee Meeting

The implementation policy for the Nomination & Remuneration Committee meeting can be held at least 1 (one) time in 1 (one) month. A committee meeting can make a decision if it is attended by at least 66% or 2 people (including the Chairman) of the total of 3 members (including the Chairman). Committee meeting decisions are made based on consensus deliberation. In the event that there is no deliberation.

Throughout 2024, the Nomination & Remuneration Committee has held 13 meetings with a recapitulation of attendance as presented in the table below.

Agenda Rapat Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda
1	18 Maret 2024 March 18, 2024	Pembahasan Kebijakan Talent dan Succession Management Direksi BUMN Discussion of Talent and Succession Management Policies for Directors of SOEs
2	21 Maret 2024 March 21, 2024	Wawancara Calon Dir. Keuangan dan SDM PT Rekayasa Industri Interview Candidate Dir. Finance and HC PT Rekayasa Industri
3	21 Maret 2024 March 21, 2024	Wawancara Calon Dir. Keuangan dan SDM PT Rekayasa Industri Interview Candidate Dir. Finance and HC PT Rekayasa Industri
4	21 Maret 2024 March 21, 2024	Wawancara Calon Dir. Keuangan dan SDM PT Rekayasa Industri Interview Candidate Dir. Finance and HC PT Rekayasa Industri
5	4 Juni 2024 June 4, 2024	Wawancara Calon Direktur Keuangan dan SDM PT Rekayasa Industri Interview Candidate for Director of Finance and HC PT Rekayasa Industri
6	03 September 2024 September 03, 2024	Undangan Wawancara Calon Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Niaga Invitation to Interview Candidates for President Director of PT Pupuk Indonesia Niaga
7	03 September 2024 September 03, 2024	Wawancara Calon Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Niaga & PT Pupuk Indonesia Utilitas Interview Candidates for President Director of PT Pupuk Indonesia Niaga & PT Pupuk Indonesia Utilitas
8	03 September 2024 September 03, 2024	Wawancara Calon Direktur Komersil & Operasi PT Pupuk Indonesia Niaga Interview Candidates for Commercial & Operation Director of PT Pupuk Indonesia Niaga
9	03 September 2024 September 03, 2024	Wawancara Calon Direktur Komersil & Operasi PT Pupuk Indonesia Niaga Interview Candidates for Commercial & Operation Director of PT Pupuk Indonesia Niaga
10	03 September 2024 September 03, 2024	Wawancara Calon Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Utilitas PT Pupuk Indonesia Utilitas President Director Candidate Interview
11	03 September 2024 September 03, 2024	Wawancara Calon Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Utilitas PT Pupuk Indonesia Utilitas Operations Director Candidate Interview
12	03 September 2024 September 03, 2024	Wawancara Calon Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Utilitas PT Pupuk Indonesia Utilitas Operations Director Candidate Interview
13	17 Desember 2024 December 17, 2024	Pembahasan Persetujuan atas Penyesuaian Struktur Organisasi Fungsi Pemasaran PTPI Discussion on Approval of the Adjustment of the Marketing Function Organizational Structure of PTPI

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi & Remunerasi Pada Rapat Tahun 2024
Recapitulation of Attendance of Nomination & Remuneration Committee in Meetings in 2024

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Anhar Adel*	12	12	100%
Ari Dwipayana	13	13	100%
Anwar Sanusi**	8	8	90%
R. Nurhidayat	13	13	100%
Rata-rata Average			**97,50%**

*Menjabat hingga 21 November 2024 | *Serving until November 21, 2024
** Menjabat sejak 29 Februari 2024 | ** Serving since February 29, 2024

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) PTPI telah melaksanakan fungsinya secara aktif dan strategis dalam mendukung Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, khususnya dalam hal tata kelola sumber daya manusia, struktur organisasi, penilaian kinerja, serta perencanaan remunerasi.

KNR melakukan kajian terhadap sejumlah agenda strategis, dimulai dengan analisis dan evaluasi kinerja Perseroan secara bulanan maupun konsolidasi hingga akhir setiap triwulan. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan strategi, pencapaian target kinerja, serta mendukung perumusan kebijakan yang berbasis pada pencapaian kinerja aktual.

Dalam aspek pengembangan organisasi dan tata kelola, KNR melakukan kajian atas permohonan persetujuan penyesuaian struktur organisasi, khususnya pada fungsi pemasaran, yang telah diajukan dua kali sepanjang tahun. Komite juga melakukan telaahan atas usulan Direksi Anak Perusahaan dan memberikan tanggapan tertulis atas rencana restrukturisasi portofolio bisnis Grup Pupuk Indonesia, serta mendukung proses implementasi streamlining yang merupakan bagian dari transformasi Perseroan.

Terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, KNR mengkaji dan menyusun usulan perbaikan KPI Individu Direksi, serta menelaah draf KPI Direksi PTPI untuk tahun berjalan, termasuk menyusun usulan evaluasi penilaian terhadap Direksi sebagai bagian dari mekanisme penilaian berkala berbasis kinerja. KNR juga berkontribusi aktif dalam proses evaluasi dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan 2025.

Selain itu, KNR melakukan telaahan atas kebijakan ambang batas transaksi serta memberikan pertimbangan atas berbagai usulan strategis yang memerlukan persetujuan atau masukan Dewan Komisaris, termasuk telaahan atas update Rancangan Jangka Panjang (RJP) 2025–2029 dan inisiatif-inisiatif sesuai RPP Rekind.

Task Implementation of Nomination and Remuneration Committee for 2024

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee (KNR) of PTPI has actively and strategically carried out its functions in supporting the Board of Commissioners in performing its supervisory and advisory duties to the Board of Directors, particularly in the areas of Human Capital management, organizational structure, performance evaluation, and remuneration planning.

The KNR conducted reviews of several strategic agendas, starting with monthly and consolidated performance analyses and evaluations of the Company until the end of each quarter. These evaluations serve as an important basis for assessing the effectiveness of strategy implementation, achievement of performance targets, and supporting the formulation of policies based on actual performance achievements.

In terms of organizational development and governance, the KNR reviews requests for approval of organizational structure adjustments, particularly in the marketing function, which have been submitted twice throughout the year. The Committee also reviews proposals from the Board of Directors of Subsidiaries and provides written responses to the business portfolio restructuring plan of the Pupuk Indonesia Group, as well as supporting the implementation of streamlining efforts as part of the Company's transformation.

Regarding performance planning and evaluation, KNR reviewed and prepared proposals for improvements to the individual KPIs of the Board of Directors, and reviewed the draft KPIs of the Board of Directors of PTPI for the current year, including preparing proposals for the evaluation of the Board of Directors as part of the performance-based periodic evaluation mechanism. KNR also actively contributed to the evaluation and discussion of the 2024 and 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

Additionally, KNR reviews transaction threshold policies and provides input on various strategic proposals requiring approval or input from the Board of Commissioners, including reviews of updates to the Long-Term Plan (RJP) 2025–2029 and initiatives in line with the RPP Rekind.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN, maka Dewan Komisaris PTPI membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Keanggotaannya tidak hanya berasal dari PTPI sebagai Entitas Utama. Pengurus dari Entitas Anak juga akan masuk dalam komposisi keanggotaan.

Kualifikasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengangkatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Perusahaan harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Persyaratan kemampuan adalah profesional dalam bidang GCG, sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, dan membuat surat pernyataan bebas dari conflict of interest apabila diperlukan. Anggota komite tersebut juga harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan kepatutan, antara lain: memiliki integritas yang baik, pengetahuan yang memadai tentang bisnis Perusahaan, pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang lainnya yang relevan, jujur, independen (tidak ada conflict of interest), objektif dan profesional serta dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan anggota disesuaikan dengan No. PER-03/MBU/03/2023.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Letter from the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOE No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 dated 26 May 2023 concerning Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within SOE, the Board of Commissioners PTPI formed an Integrated Governance Committee in the Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated 14 August 2023. Membership does not only come from PTPI as the Main Entity. Management from Subsidiary entities will also be included in the membership composition.

Qualifications of Integrated Governance Committee Members

The appointment of members of the Integrated Governance Committee within the Company must meet the fit and proper requirements. The capability requirement is to be professional in the field of GCG, so as not to interfere with the objectivity of his opinion regarding the problems faced, and to make a statement free from conflict of interest if necessary. Members of the committee must also have commendable characteristics and behavior and meet appropriateness requirements, including: having good integrity, adequate knowledge of the Company's business, sufficient work experience in the field of supervision/inspection and other relevant fields, honest, independent (not there is a conflict of interest), objective and professional as well as trustworthy and committed to their duties.

Appointment and Dismissal

The Integrated Governance Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners through a decision letter. Dismissal can be carried out if the member's term of office ends and based on the decision of the Board of Commissioners, he is dismissed for not fulfilling the specified performance and/or being incompetent in carrying out his duties.

Term of Office Terms

Terms of term of office for members are adjusted to No. PER-03/MBU/03/2023

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Number, Composition and Structure of the Integrated Governance Committee

The composition of the Integrated Governance Committee in 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023	14 Agustus 2023- 17 Januari 2024 August 14, 2023-January,17 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/III/2024 dated March 8, 2024	18 Januari 2024 – 17 Desember 2024 January 18, 2024 – December 17, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term of office as Commissioner	
Anwar Sanusi	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023	14 Agustus 2023-17 Desember 2024 August 14, 2023-December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term of office as Commissioner	
Ari Dwipayana	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 01/KEP.KOM/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 01/KEP.KOM/I/2024 dated January 18, 2024	18 Januari 2024 – 17 Desember 2024 January 18, 2024 - December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term of office as Commissioner	
Mustoha Iskandar	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 01/KEP.KOM/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 01/KEP.KOM/I/2024 dated January 18, 2024	18 Januari 2024 – 17 Desember 2024 January 18, 2024 - December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term of office as Commissioner	

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Suwandi	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 01/KEP.KOM/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 01/KEP.KOM/I/2024 dated January 18, 2024	18 Januari 2024 – 17 Desember 2024 January 18, 2024 – December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term of office as Commissioner	
Febrio Nathan Kacaribu	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 dated July 21, 2024	21 Juli 2024 – 17 Desember 2024 July 21, 2024 - December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term of office as Commissioner	
Danar Rahmanto	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Riswinandi	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 dated July 21, 2024	21 Juli 2024 – 17 Desember 2024 July 21, 2024 - December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term of office as Commissioner	
Farhat Brachma	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.013/KEP.KOM/VII/2024 dated July 21, 2024	21 Juli 2024 – 17 Desember 2024 July 21, 2024 - December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term as Commissioner	
Irfan Ahmad Fauzi	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris December 18, 2024 - concurrent with term as Commissioner	Ke-1 1st

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Iqbal Billy Wahid Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik Independent Commissioner of PT Petrokimia Gresik	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 018/KEP. KOM/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 018/KEP. KOM/XII/2023 dated December 19, 2023	19 Desember 2023 – 17 Januari 2024 December 18, 2024 - January 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 01/KEP. KOM/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 01/KEP.KOM/I/2024 dated January 18, 2024	18 Januari 2024 – 17 Desember 2024 January 18, 2024 - December 17, 2024	
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - 17 Januari 2027 December 18, 2024 - January 17, 2027	
Mahmud Nurwindu Komisaris Independen PT Pupuk Kujang Independent Commissioner of PT Pupuk Kujang	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023	14 Agustus 2023-17 Desember 2024 Agustus 14, 2023-Desember 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - 13 Agustus 2026 December 18, 2024 - August 13, 2026	
Musthofa Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023	14 Agustus 2023-17 Desember 2024 August 14, 2023-17 December 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - 13 Agustus 2026 December 18, 2024 - August 13, 2026	
Marzuki Daud Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pupuk Iskandar Muda President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PT Pupuk Iskandar Muda	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023	14 Agustus 2023-17 Desember 2024 August 14, 2023-17 December 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - 13 Agustus 2026 December 18, 2024 - August 13, 2026	
Bambang Supriyambodo Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023	14 Agustus 2023-17 Desember 2024 August 14, 2023-coincides with his term of office as Commissioner	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - 13 Agustus 2026 December 18, 2024 - August 13, 2026	

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Monica Desideria Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia Utilitas Independent Commissioner of PT Pupuk Indonesia Utilitas	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023	14 Agustus 2023-17 Desember 2024 August 14, 2023-December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - 13 Agustus 2026 December 18, 2024 - August 13, 2026	
MM Restu Hapsari Komisaris PT Rekayasa Industri Commissioner of PT Rekayasa Industri	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023	14 Agustus 2023-20 Juli 2024 August 14, 2023-July 20, 2024	Ke-1 1st
Doddy Rahadi Komisaris PT Rekayasa Industri Commissioner of PT Rekayasa Industri	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 dated 21 July 2024	21 Juli 2024 – 17 Desember 2024 July 21, 2024 - December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - 20 Juli 2027 December 18, 2024 - July 20, 2027	
Eko Suseno Agung Cahyanto Komisaris PT Pupuk Indonesia Niaga Commissioner of PT Pupuk Indonesia Niaga	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 dated July 21, 2024	21 Juli 2024 – 17 Desember 2024 December 18, 2024 - July 20, 2027	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - 20 Juli 2027 December 18, 2024 - July 20, 2027	
Rudi Rusli Komisaris PT Pupuk Indonesia Logistik Commissioner of Pupuk Indonesia Logistik	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024 Decision of the Board of Commissioners of PTPI No. 013/KEP.KOM/VII/2024 dated 21 July 2024	21 Juli 2024 – 17 Desember 2024 July 21, 2024 - December 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 - 20 Juli 2027 December 18, 2024 - July 20, 2027	
Achmad Suhawi Komisaris PT Pupuk Indonesia Pangan Commissioner of PT Pupuk Indonesia Pangan	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024	18 Desember 2024 -17 Desember 2027 December 18, 2024 - December 17, 2027	Ke-1 1st

Profil Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profile of the Chairman and Members of the Integrated Governance Committee



Darmin Nasution

Ketua Komite
Committee Chair

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.

Anggota Lainnya

Others Members



Mustoha Iskandar

Anggota
Member

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Suwandi

Anggota
Member

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Febrio Nathan Kacaribu

Anggota
Member

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Danar Rahmanto

Anggota
Member

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Anwar Sanusi

Anggota
Member

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Ari Dwipayana

Anggota
Member

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Riswinandi

Anggota
Member

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Farhat Brachma

Anggota
Member

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Irfan Ahmad Fauzi

Anggota
Member

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.
Profile details are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter in this Annual Report.



Iqbal Billy Wahid

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	55 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18 2024



Mahmud Nurwindu

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	64 tahun/years old
Domisili Domicile	Semarang, Jawa Tengah Semarang, Central Java
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18 2024



Musthofa

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	70 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18 2024



Marzuki Daud

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	71 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18 2024



Bambang Supriyambodo

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	65 tahun/years old
Domisili Domicile	Yogyakarta, DI Yogyakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18 2024



Monica Desideria

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	60 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18 2024



Doddy Rahadi

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	60 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18 2024



Eko Suseno Agung Cahyanto

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	52 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18 2024



Rudi Rusli

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	54 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18 2024



Achmad Suhawi

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	49 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTPI No.022/KEP.KOM/XII/2024 dated December 18, 2024

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Independensi adalah syarat menjadi Komite Tata Kelola Terintegrasi. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi harus bersikap independen, objektif, dan profesional.

INDEPENDENCE OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Independence is a requirement to become an Integrated Governance Committee. Members of the Integrated Governance Committee must act independently, objectively, and professionally.

PENGUNGKAPAN INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

DISCLOSURE OF THE INDEPENDENCE OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Aspek Independensi Independence Aspect	**Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi** Has financial relationships with the Board of Commissioners and Directors	**Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi** Having management relationships in the Company, Subsidiaries and Affiliated Entities	**Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung** Own Company shares, either directly or indirectly	**Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite** Has a family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow Committee members	**Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah** Served as administrator of political parties, officials and the Government
Darmin Nasution	✗	✗	✗	✗	✗
Anwar Sanusi	✗	✗	✗	✗	✓
Ari Dwipayanan	✗	✗	✗	✗	✗
Mustoha Iskandar	✗	✗	✗	✗	✗
Suwandi	✗	✗	✗	✗	✓
Febrio Nathan Kacaribu	✗	✗	✗	✗	✓
Farhat Brachma	✗	✗	✗	✗	✗
Riswinandi	✗	✗	✗	✗	✗
Danar Rahmanto	✗	✗	✗	✗	✗
Irfan Ahmad Fauzi	✗	✗	✗	✗	✗
Iqbal Billy Wahid	✗	✗	✗	✗	✗
Mahmud Nurwindu	✗	✗	✗	✗	✗

Aspek Independensi Independence Aspect	**Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi** Has financial relationships with the Board of Commissioners and Directors	**Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi** Having management relationships in the Company, Subsidiaries and Affiliated Entities	**Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung** Own Company shares, either directly or indirectly	**Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite** Has a family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow Committee members	**Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah** Served as administrator of political parties, officials and the Government
Musthofa	✗	✗	✗	✗	✗
Marzuki Daud	✗	✗	✗	✗	✗
Bambang Supriyambodo	✗	✗	✗	✗	✗
MM Restu Hapsari*	✗	✗	✗	✗	✗
Doddy Rahadi	✗	✗	✗	✗	✗
Monica Desideria	✗	✗	✗	✗	✗
Eko Suseno Agung	✗	✗	✗	✗	✗
Rudi Rusli	✗	✗	✗	✗	✗
Achmad Suhawi	✗	✗	✗	✗	✗

*Menjabat hingga 20 Juli 2024 | *Serving until July 20, 2024

Pedoman Kerja: Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam tahap penyusunan yang ditargetkan dapat disahkan pada Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas.

Work Guidelines: Charter of the Integrated Governance Committee

work guidelines to support the implementation of the duties of the Integrated Governance Committee in the preparation stage which is targeted to be ratified in 2025. This policy is a guideline to bind and regulate Integrated Governance Committee Members in carrying out and carrying out activities.

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan cara:

1. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk atau Anak Perusahaan BUMN;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;

Duties and responsibilities

Evaluate the implementation of Integrated Governance by:

1. Evaluate Integrated Governance policies;
2. Monitor and evaluate the suitability of the Integrated Governance policies of the Parent SOE or SOE Subsidiaries;
3. Evaluate the implementation of Integrated Governance, at least through assessing the adequacy of internal control and the implementation of integrated compliance functions;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners to improve Integrated Governance policies;

5. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan terintegrasi;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS atau Menteri BUMN;
7. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya;
8. Menyusun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan reviu atau penyesuaian terhadap Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dimaksud sesuai dengan ketentuan dan arahan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PTPI;
9. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Komite Tata Kelola Terintegrasi dan laporan-laporan berkala yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perusahaan mengikutsertakan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Komite Tata Kelola Terintegrasi di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat komite dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah

Sepanjang tahun 2024, Komite Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 6 kali rapat dengan rekapitulasi kehadiran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

5. Communicate with work units for functions including internal audit, legal and compliance, finance and risk management, Human Capitals and required aspects of business operational functions, to obtain information, clarification and request reports required in an integrated manner to discuss matters- matters related to integrated internal control, risk management and compliance systems;
6. Carry out monitoring and evaluation of the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or decisions of the GMS or the Minister of SOE;
7. Carry out other authorities, duties and responsibilities related to its functions;
8. Prepare the Charter of the Integrated Governance Committee and carry out reviews or adjustments to the Charter of the Integrated Governance Committee in accordance with the provisions and directions of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PTPI;
9. Prepare the Integrated Governance Committee's Annual Work Plan and Budget and periodic reports that have been determined in accordance with applicable regulations; and
10. Carry out other tasks stipulated in the Integrated Governance Committee Charter.

Development of Integrated Governance Committee Competency

The Company involves members of the Integrated Governance Committee in competency development activities which is carried out through various training and education with funding being fully responsible Company. List of training and improvement activities. The competencies followed by the Integrated Governance Committee throughout 2024 can be seen in the Profile chapter Company in this annual report.

Integrated Governance Committee Meeting

Policy for implementing Integrated Governance Committee meetings can be held at least 1 (one) times in 1 (one) month. Committee meetings can take place decision if at least attended by 66% or 2 people (including the Chairman) of the total members 3 (including the Chairman). The decision of the committee meeting is carried out based on consensus deliberation. In case it doesn't happen discussion.

Throughout 2024, the Integrated Governance Committee has held 6 meetings with recapitulation attendance as presented in the table below.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Meeting Agenda

No	Tanggal	Agenda
1	22 Januari 2024 January 22, 2024	Pemaparan Draft Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Presentation of Draft Governance Guidelines and Significant Corporate Activities
2	16 Februari 2024 February 16, 2024	Rapat Pertemuan Awal Komite Tata Kelola Terintegrasi PTPI Initial Meeting of Integrated Governance Committee of PTPI
3	24 April 2024 April 24, 2024	1. Isu Join-Cost di masing-masing Anper. 2. Isu strategis lainnya di Anper selama TW I Tahun 2024 yang perlu ditindaklanjuti di holding. 1. Join-cost issues in each Anper. 2. Other strategic issues in Anper during TW I Year 2024 that need to be followed up in the holding.
4	20 Juni 2024 June 20, 2024	1. Isu Join Cost dan Join Audit di masing-masing Anper. 2. Pembahasan Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan. 1. Join Cost and Join Audit issues in each Anper. 2. Discussion of Conflict of Interest Management Guidelines.
5	21 Agustus 2024 August 21, 2024	1. Update Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui Manajemen Risiko Terintegrasi, Pengendalian Internal Terintegrasi dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi s.d. Semester I Tahun 2024; dan 2. Isu-isu Strategis Lainnya. 1. Update on the Implementation of Integrated Governance through Integrated Risk Management, Integrated Internal Control and Implementation of Integrated Compliance Function up to Semester I of 2024; and 2. Other Strategic Issues.
6	30 Oktober 2024 October 30, 2024	1. Update Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui Manajemen Risiko Terintegrasi, Pengendalian Internal Terintegrasi dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi s.d. Triwulan III Tahun 2024; 2. Pembahasan COGM dan COGS pada masing-masing Anper; dan 3. Isu-isu Strategis Lainnya. 1. Update on the Implementation of Integrated Governance through Integrated Risk Management, Integrated Internal Control and Implementation of Integrated Compliance Function until the third quarter of 2024; 2. Discussion of COGM and COGS in each Anper; and 3. Other Strategic Issues.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi Pada Rapat Tahun 2024
Recapitulation of Integrated Governance Committee Attendance at the 2024 Meeting

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Darmin Nasution	6	6	100,00%
Anwar Sanusi	6	6	100,00%
Ari Dwipayana	6	4	67,67%
Mustoha Iskandar	6	6	100,00%
Suwandi	6	5	83,33%
Febrio Nathan Kacaribu	5	1	20,00%
Danar Rahmanto*	2	2	100,00%
Riswinandi	4	4	100,00%
Farhat Brachma	5	4	80,00%
Irfan Ahmad Fauzi*	2	2	100,00%
Iqbal Billy Wahid	5	5	100,00%

Rekapitulasi Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi Pada Rapat Tahun 2024
Recapitulation of Integrated Governance Committee Attendance at the 2024 Meeting

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Mahmud Nurwindu	6	6	100,00%
Musthofa	6	6	100,00%
Marzuki Daud	6	6	100,00%
Bambang Supriyambodo	6	5	83,33%
Monica Desideria	6	5	83,33%
MM Restu Hapsari**	6	5	83,33%
Doddy Rahadi***	4	4	100,00%
Eko Suseno Agung Cahyanto	2	1	50,00%
Rudi Rusli	4	2	50,00%
Achmad Suhawi ****	-	-	-
Rata-rata Average			**85,00%**

*Menjabat sejak 22 Juli 2024 | Serving since July 22, 2024
**Menjabat hingga 20 Juli 2024 | Serving until July 20, 2024
***Menjabat sejak 21 Juli 2024 | Serving since July 21, 2024
****Menjabat sejak 18 Desember 2024 | Serving since December 18, 2024

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024
Task Implementation of the Integrated Governance Committee for 2024

No.	Wewenang dan Tanggung Jawab Authorities and Responsibilities	Realisasi Realization
1.	Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Evaluating the Integrated Governance Policy.	Evaluasi atas *draft* Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group. Evaluation of the draft Policy and Guidelines for Integrated Governance of Pupuk Indonesia Group.
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Entitas Induk atau Entitas Anak dan melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Monitoring and evaluating the compliance of the Integrated Governance policies of the Parent Entity or Subsidiary Entities and evaluating the implementation of Integrated Governance, at least through an assessment of the adequacy of internal controls and the implementation of integrated compliance functions.	Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Pupuk Indonesia Group. Evaluation of the Implementation of Integrated Governance of the Pupuk Indonesia Group.
3.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Providing recommendations to the Board of Commissioners for the improvement of Integrated Governance policies.	Telaah atas draft Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group. Review of the draft Integrated Governance Policy of Pupuk Indonesia Group.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024

Task Implementation of the Integrated Governance Committee for 2024

No.	Wewenang dan Tanggung Jawab Authorities and Responsibilities	Realisasi Realization
4	Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain: Audit Intern, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, serta dapat mengundang Direksi Holding dan Direksi Anak Perusahaan (jika sewaktu-waktu dibutuhkan) untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi. Communicating with work units for functions including: Internal Audit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Capital, and other necessary operational functions, and may invite the Holding Company's Board of Directors and Subsidiary's Board of Directors (if necessary) to obtain information, clarification, and request necessary reports in an integrated manner.	1. Melakukan pembahasan mengenai isu strategis di Anak Perusahaan Pupuk Indonesia Group. 2. Melakukan telaah terkait *Joint Cost* dan Jasa Administrasi Anper Pupuk Indonesia Group. 3. Telaah Atas Rencana Implementasi Streamlining bisnis PTPI Grup. 4. Telaah atas data COGM dan COGM Pupuk Indonesia Group. 1. Discuss strategic issues in the Pupuk Indonesia Group's Subsidiaries. 2. Review Joint Costs and Administrative Services of Pupuk Indonesia Group. 3. Review of PTPI Group's business streamlining implementation plan. 4. Review of COGM and COGM data for Pupuk Indonesia Group.
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. Monitoring and evaluating the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with applicable laws and regulations, the articles of association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) or the Minister.	Melakukan telaah Komite atas Revisi 2 Pedoman Tata Kelola Benturan Kepentingan PTPI Tahun 2024. Conduct a committee review of the 2nd revision of 2024 Conflict of Interest Management Guidelines for PTPI.
6	Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya. Carrying out other authorities, duties, and responsibilities related to its functions.	1. Melakukan Penyusunan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. 2. Telaah Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Komite Tata Kelola Terintegrasi PTPI Tahun 2025. 3. Evaluasi Komite atas RKAP PTPI dan Entitas Anak Konsolidasian Tahun 2025 dalam rangka Dewan Komisaris melakukan penelitian dan penelaahan serta memberikan persetujuan atas RKAP 2025 yang disiapkan Direksi. 1. Prepare the draft of Integrated Governance Committee Charter. 2. Review of the proposed Work Plan and Annual Budget (RKAT) of the Integrated Governance Committee of PTPI for 2025. 3. Evaluate the Committee's review of the 2025 Annual Work Plan and Budget (RKAP) of PTPI and its consolidated Subsidiaries, in order for the Board of Commissioners to conduct research and review, and approve the 2025 RKAP prepared by the Board of Directors.

Kebijakan dan Prosedur Nominasi serta Suksesi Direksi

Board of Directors Nomination and Succession Policies and Procedures

Pelaksanaan suksesi Direksi dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, profesionalisme serta kompetensi. Tujuan dari kebijakan itu dalam rangka menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan bisnis serta tujuan jangka panjang Perusahaan. Kendati demikian, sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka keputusannya diambil oleh pemerintah.

Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 mengatur prosesnya adalah sebagai berikut:

SUMBER TALENTA CALON DIREKSI

Sumber Talenta Calon Direksi berasal dari:

1. Talenta Kementerian BUMN yang terdiri atas pejabat eselon I, eselon II dan eselon III serta pejabat fungsional sekurang-kurangnya setara eselon III;
2. Talenta BUMN terdiri atas:
   a. Direksi BUMN;
   b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN; dan/atau
   c. Direksi pada Anak Perusahaan BUMN/ perusahaan patungan BUMN yang berkontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis bagi BUMN.
3. Talenta Eksternal.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/ MBU/03/2023, tata cara pengangkatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Kandidat
   a. Bagi kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi dapat ditetapkan menjadi anggota Direksi;

   b. Pemilihan Kandidat di luar usulan Komite Suksesi untuk menjadi anggota Direksi, dapat dilakukan sepanjang:

The implementation of the Board of Directors' succession is based on the principles of good governance, professionalism and competence. The purpose of this policy is to maintain the continuity of the leadership regeneration process, so as to ensure the sustainability of the business and the Company's long-term goals. However, as a SOE whose shares are entirely owned by the state, the decision is taken by the government.

The Board of Directors succession policy refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises; and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 regulates the process as follows:

SOURCES OF TALENT FOR CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Sources of Talent for Candidates for the Board of Directors come from:

1. Talent from the Ministry of SOEs consisting of echelon I, echelon II and echelon III officials and functional officials at least equivalent to echelon III;
2. SOE Talents consisting of:
   a. SOE Directors;
   b. Officials one level below the SOE Directors; and/ or
   c. Directors at SOE Subsidiaries/SOE joint ventures that contribute significantly and/or have strategic value to SOEs.
3. External Talents.

APPOINTMENT MECHANISMS AND PROCEDURES

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023, the procedures for appointing the Board of Directors are
as follows:

1. Determination of Candidates
   a. Candidates proposed by the Succession Committee can be appointed as members of the Board of Directors;
   b. The selection of Candidates outside the proposal of the Succession Committee to become members of the Board of Directors, can be done as long as:

- Kandidat yang berasal dari BUMN dan Kementerian BUMN merupakan talenta yang berada di dalam Talent Pool Kementerian BUMN; dan/atau
- Kandidat yang berasal dari eksternal merupakan talenta yang memenuhi persyaratan formal, materiel dan lainnya sebagai anggota Direksi BUMN sebagaimana dipersyaratkan.

2. Pengunduran Diri dari Jabatan yang Dilarang
   a. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi (jika ada);

   b. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.

3. Keputusan Pengangkatan/Penetapan
   a. Pengangkatan oleh Keputusan Menteri selaku pemegang saham
      - Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi terpilih;
      - Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor;
      - Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.

   b. Pengangkatan oleh RUPS
      - Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan;
      - Deputi mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi;
      - Kandidat yang telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

- Candidates from SOE and the Ministry of SOE are talents who are in the Talent Pool of the Ministry of SOE; and/or

- Candidates from external sources are talents who meet the formal, material and other requirements as members of the SOE Board of Directors as required.

2. Resignation from Prohibited Position
   a. Before being appointed as a member of the Board of Directors, the person concerned must sign a statement letter resigning from another position which is prohibited from being held concurrently with the position of member of the Board of Directors starting from the time the person concerned is appointed as a member of the Board of Directors (if any);
   b. In the event that the person concerned does not resign within the time period as stipulated in the statutory regulations, then his position as a member of the SOE Board of Directors ends at that time limit.

3. Appointment/Determination Decision
   a. Appointment by Ministerial Decree Appointment as Shareholder
      - In the event that the appointment decision is made by Ministerial Decree or circular decision of all shareholders, then after the Decree is determined, the Deputy processes the submission of the Decree to the elected members of the Board of Directors;
      - In the process of submitting the Decree, the Deputy is assisted by Echelon II officials who are responsible for the legal sector, Deputy Assistants, and Sector Deputy Assistants;
      - After submission of the Decree, all documents are handed over to the Deputy for administration.

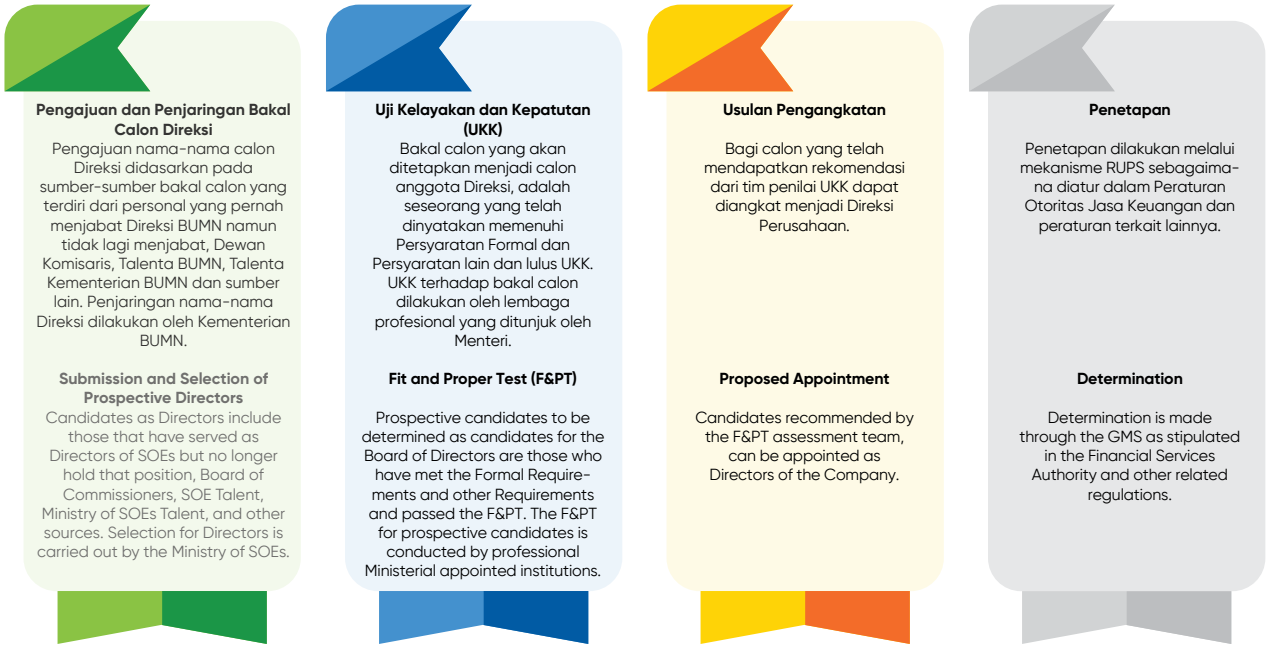
   b. Appointment by the GMS
      - In the event that the appointment will be determined at the GMS, the submission of the UKK results to the Minister is accompanied by a letter of determination of the candidate and a power of attorney to attend and make decisions at the GMS. After the GMS is held, all documents are submitted to the Deputy for administration;
      - Deputy administers all documents related to the appointment of members of the Board of Directors;
      - Candidates who have passed the Fit and Proper Test must sign a Management Contract before their appointment as a member of the Board of Directors is confirmed.

4. Penandatanganan Surat Pernyataan
   a. Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS;
   b. Direksi yang diangkat kembali harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi;
   c. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler;
   d. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Signing of the Statement Letter
   a. Elected members of the Board of Directors sign a statement letter containing their ability to carry out their duties well and are willing to be dismissed at any time based on the considerations of the Minister/GMS;
   b. Directors who are reappointed must sign a Management Contract before their appointment as members of the Board of Directors is confirmed;
   c. Members of the Board of Directors begin to serve effectively as of the date stipulated in the Ministerial Decree/GMS/all shareholders in a circular manner;
   d. The format of the statement letter relating to the appointment and dismissal of Directors is as stated in Attachment III which is an inseparable part of this Ministerial Regulation.

Skema dan Mekanisme Suksesi Direksi: Pengusulan Hingga Penetapan

Scheme and Mechanism of the Board of Directors Succession: Proposed to Determined



Komite dan Organ Pendukung Direksi

Committees and Supporting Organs of the Board of Directors

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan, Direksi dibantu oleh 6 (enam) komite: Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Komite Key Performance Indicator (KPI), Komite Harga, Komite Talenta, Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta Komite Respectful Workplace Policy (RWP).

Selain itu, Direksi juga didukung oleh sejumlah organ, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

In carrying out their duties and responsibilities in managing the Company, the Board of Directors is assisted by 6 (six) committees: Company Work Plan and Budget Committee (RKAP), Key Performance Indicator (KPI) Committee, Pricing Committee, Talent Committee, Social Responsibility Committee and Environment (TJSL), as well as the Respectful Workplace Policy (RWP) Committee.

Apart from that, the Board of Directors is also supported by a number of organs, namely the Corporate Secretary and Internal Audit.

KOMITE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi untuk membantu tugas Direksi dalam menyiapkan dan menyusun RKAP Perusahaan dan Anak Perusahaan atau PI Group sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 094/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PI *Group*.

Struktur dan Keanggotaan Komite RKAP

Pembentukan struktur dan keanggotaan Komite RKAP berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 094/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PI *Group* adalah sebagai berikut:

CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET COMMITTEE (RKAP)

The Company's Work Plan and Budget Committee (RKAP) is a supporting organ appointed by the Board of Directors to assist the Board of Directors in preparing and compiling the RKAP of the Company and its Subsidiaries or PI Group in accordance with Directors' Decree No. 094/A/KU/B30/SK/2022 dated 29 July 2022 concerning the PI Group Company Work Plan and Budget Committee (RKAP).

RKAP Committee Structure and Membership

Establishment of the structure and membership of the RKAP Committee based on Directors' Decree No. 094/A/KU/B30/SK/2022 dated 29 July 2022 concerning the PI Group Work Plan and Budget Committee (RKAP) is as follows:

Tabel Keanggotaan Komite RKAP
RKAP Committee Membership Table

Jabatan Position	Dijabat oleh: Served by:
Pengarah Director	Direktur Utama President Director Wakil Direktur Utama Vice President Director Direktur Produksi Production Director Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Directors Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation Direktur Pemasaran Marketing Director Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Director of Portfolio & Business Development

Tabel Keanggotaan Komite RKAP
RKAP Committee Membership Table

Jabatan Position	Dijabat oleh: Served by:
Penanggung Jawab Person in Charge	Direktur Keuangan Finance Director Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management
Ketua Chairman	SVP Kinerja Korporat SVP of Corporate Performance
Sekretaris Secretary	VP Anggaran VP Budget
Penanggung Jawab Bidang SVP Field Responsibility:	
Kesekretariatan, Hukum & GCG Secretariat, Legal, and GCG	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Portofolio Bisnis Business Portfolio	SVP Portofolio Bisnis SVP of Business Portfolio
Pengembangan Korporat Corporate Development	SVP Pengembangan SVP of Development
Operasi & K3LH Operation & HSE	SVP Operasi & K3LH SVP of Operation & HSE
Pengadaan Procurement	SVP Perencanaan Pengadaan SVP of Procurement Planning
Keuangan & Investasi Finance & Invetment	SVP Keuangan & Pendanaan Investasi SVP of Finance & Investment Funding
Inisiatif Strategis & Transformasi Bisnis Strategic Initiatives & Business Transformation	SVP Strategi Korporat SVP of Corporate Strategic
SDM HR	SVP Operasional Sumber Daya Manusia SVP of Human Capitals Operations SPM Manajemen Talenta & Kinerja SPM of Talent & Performance Management
Strategi Pemasaran Strategic Marketing	SVP Strategi Pemasaran SVP of Strategic Marketing
Manajemen PSO PSO Management	SVP Perencanaan & Manajemen PSO SVP of PSO Planning & Management
Pemasaran Komersil Commercial Marketing	SVP Pemasaran Komersil SVP of Commercial Marketing
Distribusi Distribution	SVP Distribusi SVP of Distribution
Supply Chain Management	SPM Inbound & Outbound Control Tower SPM of Inbound & Outbound Control Tower
Risiko RKAP RKAP Risk	SVP Manajemen Risiko Korporasi SVP of Enterprise Risk Management

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE RKAP

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite RKAP diuraikan dalam tabel di bawah ini.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RKAP COMMITTEE

Details of the RKAP Committee's duties and responsibilities are outlined in the table below.

Organ	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities
Pengarah Director	Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan penyusunan RKAP kepada Komite RKAP. Provide direction and determine policies and work plans for implementing the RKAP preparation to the RKAP Committee.
Penanggung Jawab Person in Charge	Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan Komite RKAP dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan prinsip ketaatan pada ketentuan/prosedur yang berlaku di perusahaan, transparansi serta efektivitas proses untuk mendukung penyusunan RKAP. Responsible for the implementation of all RKAP Committee activities and ensuring that these activities are in accordance with the principles of compliance with the provisions/procedures applicable in the company, transparency and effectiveness of the process to support the preparation of the RKAP.
Ketua Chairman	1. Bertanggung jawab dalam memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan Komite RKAP, termasuk pelaksanaan rapat-rapat dan tugastugas Komite RKAP. Responsible for leading, planning, coordinating and evaluating all RKAP Committee activities, including the implementation of RKAP Committee meetings and duties 2. Memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan penyusunan RKAP PI *Group* dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Ensure that the preparation and implementation of the RKAP PI Group is carried out and runs well 3. Melaporkan RKAP PI *Group* yang telah disusun kepada Direksi PTPI cq. Direktur Keuangan PTPI. Report the RKAP PI Group that has been prepared to the Board of Directors of PTPI cq. Finance Director of PTPI.
Sekretaris Secretary	Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan penyusunan RKAP di lingkungan PTPI Grup. Responsible for carrying out administrative tasks to support the preparation and implementation of RKAP preparation within the PTPI Group.
Penanggung Jawab Bidang Field Responsible	1. Bertanggung jawab dalam menyiapkan, menyusun dan mengkoordinir SVP dan SPM PI *Group* terkait sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya untuk penyusunan usulan prognosis pencapaian tahun berjalan, asumsi penyusunan RKAP serta arahan-arahan bersifat strategis di PI *Group* sesuai dengan bidangnya masing-masing, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKAP Anak Perusahaan dan RKAP Konsolidasian. Responsible for preparing, compiling and coordinating the SVP and SPM of the PI Group in accordance with the scope of responsibility for preparing the proposed prognosis for current year's achievements, assumptions for preparing the RKAP as well as strategic directions in the PI Group in accordance with their respective fields, to then becomes the basis for preparing the Subsidiary RKAP and Consolidated RKAP. 2. Melakukan review sesuai dengan bidangnya masing-masing atas target-target tahun penyusunan RKAP sesuai dengan timeline dalam RJPP dan Transformasi Bisnis. Conduct reviews according to their respective fields on the targets for the year of preparing the RKAP in accordance with the timeline in the RJPP and Business Transformation. 3. Menyiapkan dan menyusun risiko strategis utama sesuai dengan bidangnya masingmasing dalam penyusunan RKAP, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam pembuatan RKAP berbasis risiko. Prepare and arrange the main strategic risks according to their respective fields in preparing the RKAP, which will then become the basis for creating a risk-based RKAP 4. Memastikan bahwa persiapan kebutuhan terkait masing-masing bidang untuk penyusunan RKAP dilaksanakan dengan baik. Ensure that preparation of needs related to each sector for the preparation of the RKAP is carried out properly. 5. Menyampaikan perkembangan penyusunan RKAP pada masing-masing bidang kepada Ketua. Convey the progress of preparing the RKAP in each field to the Chairman.

Pelaksanaan Tugas Komite RKAP

Pada tahun 2024, Komite RKAP telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

Implementation of RKAP Committee Duties

In 2024, the RKAP Committee has implemented the following work program:

No.	Program
1	Persiapan penyusunan RKAP tahun 2025 yang meliputi penyiapan dan finalisasi asumsi penyusunan RKAP tahun 2024. Identifikasi risiko strategis dan penyiapan arahan strategis setiap bidang sebagai dasar penyusunan RKAP tahun 2024. Preparation of the 2025 RKAP which includes preparation and finalisation of assumptions for the preparation of the 2024 RKAP. Identification of strategic risks and preparation of strategic directions for each field as the basis for the preparation of the 2024 RKAP
2	Pembahasan inisiatif strategis serta milestone tahun 2024. Discussion of strategic initiatives and milestones for 2024.
3	Melakukan review atas usulan RKAP Tahun 2025 Anak Perusahaan. Reviewed the proposed 2025 RKAP of the Subsidiary.
4	Finalisasi asumsi RKAP Tahun 2025. Finalise the assumptions for the 2025 RKAP.
5	Memberikan keputusan dan arahan untuk RKAP Tahun 2025 kepada Anak Perusahaan. Provide decisions and directions for RKAP Year 2025 to Subsidiaries.

Rapat Komite RKAP

Sepanjang tahun 2024, Komite RKAP telah mengadakan rapat sebanyak 3 kali. Agenda pembahasannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

RKAP Committee Meeting

Throughout 2024, the RKAP Committee has held meetings 3 times. The agenda for discussion is outlined in the table below.

Tabel Rapat Komite RKAP
Table of the RKAP Committee

No	Agenda
1	Pembahasan dan penyelarasan asumsi operasional (sales and operation planning) RKAP tahun 2025. Discussion and alignment of operational assumptions (sales and operation planning) of the 2025 RKAP.
2	Sosialisasi asumsi RKAP tahun 2025 kepada Anak Perusahaan. Socialisation of 2025 RKAP assumptions to Subsidiaries.
3	Konsinyering penyelarasan usulan RKAP tahun 2025 dengan Anak Perusahaan. Consignment of alignment of the proposed 2025 RKAP with Subsidiaries.

KOMITE HARGA

Komite Harga merupakan organ untuk mendukung dalam rangka efektifitas dan sejalan dengan tuntutan perkembangan aktifitas bisnis perusahaan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 113/A/HK/C0400/SK/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pembentukan Komite Harga dan Tim Evaluasi Harga PI Group.

PRICING COMMITTEE

he Pricing Committee is a body established to support effectiveness and alignment with the evolving demands of the company's business activities, in accordance with the Board of Directors Decree No. 113/A/HK/C0400/SK/2024 dated October 1, 2024, concerning the Establishment of the Pricing Committee and Price Evaluation Team of PI Group.

Struktur dan Keanggotaan Komite Harga

1. Direktur Utama
2. Direktur Keuangan
3. Direktur Pemasaran

Pricing Committee Structure and Membership

1. President Director
2. Finance Director
3. Marketing Director

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Harga

1. Menetapkan harga jual rutin produk non subsidi Pupuk Indonesia atas usulan dari Fungsi Pemasaran PTPI.

2. Menetapkan harga jual non rutin produk non subsidi Pupuk Indonesia sesuai dengan otorisasi atas usulan dari Tim Evaluasi Harga.

Pelaksanaan Tugas Komite Harga

Komite Harga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses penetapan harga berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Komite melakukan koordinasi erat dengan Tim Evaluasi Harga agar seluruh proses berjalan selaras dan akuntabel.

KOMITE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Komite Key Performance Indicators (KPI) merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi untuk membantu tugas Direksi dalam menyiapkan dan menyusun KPI Perusahaan dan Anak Perusahaan atau PI Group sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 91/A/HK/B0303/S K/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Komite Key Performance Indicators (KPI) PI Group.

Struktur dan Keanggotaan Komite KPI

Struktur dan keanggotaan Komite KPI berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 91/A/HK/B0303/S K/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Komite Key Performance Indicators (KPI) PI Group adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the Pricing Committee

1. To determine the regular selling prices of Pupuk Indonesia's non-subsidized products based on proposals from the Marketing Function of PTPI.
2. To determine the non-regular selling prices of Pupuk Indonesia's non-subsidized products in accordance with the authorized level, based on proposals from the Price Evaluation Team.

Implementation of Pricing Committee Duties

The Pricing Committee plays a strategic role in ensuring that the price-setting process is conducted transparently, objectively, and in accordance with applicable regulations. The Committee coordinates closely with the Price Evaluation Team to ensure that the entire process runs in a consistent and accountable manner.

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) COMMITTEE

The Key Performance Indicators (KPI) Committee is a supporting organ appointed by the Board of Directors to assist the Board of Directors in preparing and compiling KPIs for the Company and Subsidiaries or Group PI in accordance with Directors' Decree No. 174/A/HK/B30/SK/2023 dated September 4, 2023 concerning the PI Group Key Performance Indicators (KPI) Committee.

KPI Committee Structure and Membership

The structure and membership of the KPI Committee is based on Directors' Decree No. 174/A/HK/B30/SK/2023 dated 4 September 2023 concerning the PI Group Key Performance Indicators (KPI) Committee is as follows:

Tabel Keanggotaan Komite KPI
KPI Committee Membership Table

Jabatan Position	Dijabat oleh: Served by:
Penasihat Advisor	Direktur Utama President Director Wakil Direktur Utama Vice President Director
Ketua I Chairman I	Direktur Keuangan Finance Director
Ketua II Chairman II	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Tranformation
Ketua III Chairman III	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Directors
Ketua IV	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris I Secretary I	SVP Kinerja Korporat SVP Corporate Performance
Sekretaris II Secretary II	SVP Strategi Korporat SVP Corporate Strategic
Sekretaris III Secretary III	SVP Manajemen & Pengembangan SDM SVP Talent & Performance Management

Tugas dan Tanggung Jawab Komite KPI

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite KPI diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Duties and Responsibilities of the KPI Committee

Details of the duties and responsibilities of the KPI Committee are outlined in the table below.

Organ	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities
Penasihat Advisor	Memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat, dan pertimbangan–pertimbangan pada ide atau program dalam proses bisnis KPI di lingkungan PI Group. Providing policy direction, input, advice and considerations regarding an idea or program in the KPI business process within the PI Group.
Ketua Chairman	• Bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan proses bisnis KPI di lingkungan PI Group. • Bertanggung jawab mengarahkan dan menetapkan kebijakan atas perselisihan atau dispute yang timbul pada saat proses perencanaan dan penilaian KPI di lingkungan PI Group. • Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama • Responsible for directing, supervising, and responsible for establishing policies and work plans for implementing KPI business processes within PI Group. • Responsible for directing and determining policies for disputes or disputes that arise during the KPI planning and assessment process within PI Group. • Responsible to the President Director and Vice President Director
Sekretaris I Secretary I	Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan proses bisnis KPI Korporat, Direktorat dan unit kerja satu tingkat di bawah Direksi di lingkungan PI Group. Responsible for carrying out administrative tasks to support the preparation and implementation of management KPI business processes, namely at the corporate level, directorate and officials/work units one level below the Board of Directors within PTPI and its Subsidiary PTPI.
Sekretaris II Secretary II	Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan proses bisnis KPI Senior Project Manager (SPM) di lingkungan PI Group. Responsible for carrying out administrative tasks to support the preparation and implementation of KPI Senior Project Manager (SPM) business processes within the PI Group.
Sekretaris III Secretary III	Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan proses bisnis KPI Level Individu Karyawan di lingkungan PI Group Responsible for carrying out administrative tasks to support the preparation and implementation of individual employee level KPI business processes within the PI Group

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KPI

IMPLEMENTATION OF KPI COMMITTEE DUTIES

Pelaksanaan Tugas Komite KPI

Pada tahun 2024, Komite KPI telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

Implementation of KPI Committee Duties

In 2024, the KPI Committee has implemented the following work program:

No.	Program
1	Strategic Session Penyusunan KPI Manajemen PI Group tahun 2025 bersama Komite KPI PIHC, Komite Dekom PIHC, dan SVP/SPM PIHC terkait pada 17 -18 Oktober 2024 di Hotel Mason Pine Bandung Strategic Session for Preparation of PI Group Management KPI in 2025 with PIHC KPI Committee, PIHC Dekom Committee, and related PIHC SVP/SPM on 17-18 October 2024 at Hotel Mason Pine Bandung
2	Pembahasan kesesuaian draft KPI Direksi PIHC dengan APS Ministry of SOE (S468) yang rilis tgl 20 Oktober 2024 bersama Komite Dekom PIHC di Sentul, Bogor pada tanggal 01 November 2024 Discussion on the suitability of the PIHC Board of Directors' KPI draft with the Ministry of SOE APS (S468) released on October 20, 2024 with the PIHC Board of Directors Committee in Sentul, Bogor on November 01, 2024
3	Konsinyering KPI Manajemen dan APS RKAP PI Group tahun 2025 antara Direksi Keuangan PIHC bersama Direksi dan BOD-1 Anak Perusahaan di Hotel Papandayan Bandung pada tanggal 18 November 2024 KPI Management and APS RKAP PI Group Consignment for 2025 between PIHC Finance Directors with Directors and BOD-1 of Subsidiaries at Papandayan Hotel Bandung on November 18, 2024

Rapat Komite KPI

Sepanjang tahun 2024, Komite KPI telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Agenda pembahasannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

KPI Committee Meeting

Throughout 2024, the KPI Committee has held 2 meeting. The discussion agenda is outlined in the table below.

Tabel Rapat Komite KPI
Table of the KPI Committee

Tanggal Date	Agenda	
17-18 Oktober 2024 October 17-18, 2024	Focus Group Discussion (FGD) Key Performance Indicators (KPI) Manajemen PI Group Tahun 2025, dengan agenda: • Framework KPI dan komposit risiko • KPI Direksi kolegial dan individu PI • Performance Boundary Indicator (PBI) PI Group • KPI Direksi kolegial Anak Perusahaan • Katalog cascading dan alignment KPI	Focus Group Discussion (FGD) PI Group Management Key Performance Indicators (KPI) Year 2025, with an agenda: • KPI framework and risk composite • KPIs for collegial and individual directors PI • Performance Boundary Indicator (PBI) PI Group • KPIs of collegial directors of Subsidiaries • Catalog cascading and KPI alignment
18 November 2024 November 18, 2024	Sosialisasi rancangan KPI Anak Perusahaan dan APS RKAP Tahun 2025, dengan agenda : • Pembahasan kesesuaian draft KPI DIreksi dengan APS KBUMN (S468) • Klinikal penyusunan KPI Direktorat anatara KPI Partner-KPI Officer • Konsinyering KPI Manajemen dan APS RKAP PI Group Tahun 2025 bersama Direksi dan BOD-1 Anak Perusahaan • Pelaksanaan PMF bersama KPI Officer dan KPI Partner POI Group untuk sosialisasi penyusutan KPI dari level korporat s.d individu karyawan tahun 2025	Socialization of the draft KPI of Subsidiaries and APS RKAP Year 2025, with the agenda: • Discussion of the suitability of the draft KPI DIreksi with APS Ministry of SOE (S468) • Clinical drafting of Directorate KPIs between KPI Partner-KPI Officer • Konsinyering KPI Management and APS RKAP PI Group Year 2025 with Directors and BOD-1 of Subsidiaries • Implementation of PMF with KPI Officer and KPI Partner POI Group to socialize KPI shrinkage from corporate level to individual employees in 2025.

KOMITE TALENTA

Dalam rangka keselarasan antara strategi dan program bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan strategi bisnis, Komite Pengembangan SDM diubah menjadi Komite Talenta melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 43/A/HK/P28/SK/2024. Komite Talenta merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi untuk membantu tugas Direksi dalam pengelolaan program pengembangan Sumber Daya Manusia di Perusahaan agar sesuai dengan kompetensi.

TALENT COMMITTEE

In order to align the strategies and programs in the field of Human Capital management with business strategies, the HC Development Committee was changed to the Talent Committee through the Decree of the Board of Directors Number 43/A/HK/P28/SK/2024. The Talent Committee is a supporting organ appointed by the Board of Directors to assist the duties of the Board of Directors in managing the Human Capitals development program in the Company in accordance with competencies.

Tabel Susunan Anggota Komite Talenta
Table of Talent Committee Members

Jabatan Position	Dijabat oleh: Served by:
Ketua Chairman	Direktur Utama President Directors
Sekretaris Secretary	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Directors
Anggota Member	Direksi Board of Directors

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite Talenta

1. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil kajian dan usulan dari Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia;
2. Menetapkan keputusan-keputusan strategis yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang meliputi namun tidak terbatas pada :
   a. Organizational Development
   b. Performance Management
   c. Career and Talent Development
   d. People Development
   e. HR System and Administration
   f. Compensation & Benefit
   g. Culture Management
3. Menetapkan usulan Top Talent yang bersumber dari Direksi Anak Perusahaan dan BoD-1 PI Group secara periodik yang disampaikan kepada Dewan Komisaris (Komite Nominasi dan Remunerasi) PTPI;
4. Menetapkan pengisian dan/atau penggantian BoD-1 PI Group;
5. Menetapkan BoD-2 sebagai suksesor untuk posisi kunci di PI Group;
6. Menetapkan usulan pengisian dan/atau penggantian Direksi Anak Perusahaan yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris PTPI;
7. Menetapkan usulan pengisian dan/atau penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Cucu Perusahaan/ Perusahaan Afiliasi yang memerlukan persetujuan dari PTPI;
8. Menetapkan pemberian apresiasi bagi karyawan yang memberikan kontribusi dan prestasi khusus dan/atau luar biasa dan berdampak secara signifikan bagi kinerja dan keberlangsungan Perusahaan;
9. Menetapkan pemberian sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Kepatuhan/ Tim Disiplin Perusahaan.

Main Duties and Responsibilities of the Talent Committee

1. Establish policies and strategies in the field of Human Capitals management based on the results of studies and proposals from the Directorate in charge of Human Capitals;
2. Establish strategic decisions related to Human Capitals management, including but not limited to:
   a. Organizational Development
   b. Performance Management
   c. Career and Talent Development
   d. People Development
   e. HR System and Administration
   f. Compensation & Benefit
   g. Culture Management
3. Establish Top Talent proposals originating from the Subsidiary Board of Directors and BoD-1 of PI Group periodically submitted to the Board of Commissioners (Nomination and Remuneration Committee) of PTPI;
4. Determine the filling and/or replacement of BoD-1 of PI Group;
5. Determine BoD-2 as successors for key positions in PI Group;
6. Determine the proposal for filling and/or replacing the Board of Directors of Subsidiaries that require approval from the Board of Commissioners of PTPI;
7. Determine the proposal for filling and/or replacing the Board of Directors and/or Board of Commissioners of Subsidiaries/Affiliated Companies that require approval from PTPI;
8. Determine the provision of appreciation for employees who provide special and/or extraordinary contributions and achievements and have a significant impact on the Company's performance and sustainability;
9. Determine the provision of sanctions for employees who commit serious violations by considering recommendations from the Compliance Team/ Company Discipline Team.

Pelaksanaan Tugas Komite Talenta

Implementation of the Duties of the Talent Committee

No.	Program
1.	Pemenuhan Posisi BOD -1, Direksi dan Dekom PI Group Fulfillment of BOD -1, Directors and PI Group Dekom Positions
2.	Talent Acquisition Fungsi Audit dan Operasi Talent Acquisition Audit and Operations Function
3.	Kebutuhan Manpower dan Talent Acquisition Fungsi Operasi Manpower and Talent Acquisition Needs for Operations Functions
4.	Fullfillmen Transisi Penataan Bisnis PTPI Fullfillment of PTPI Business Arrangement Transition
5.	Perubahan Organ Pendukung Dekom PI Group Changes in Supporting Organs of PI Group Dekom

Rapat Komite Talenta

Sepanjang tahun 2024, Komite Talenta telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Agenda pembahasannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Talent Committee Meeting

Throughout 2024, the Talent Committee has held 6 (six) times meetings. The discussion agenda is outlined in the table below.

Tanggal Date	Agenda
29 Oktober 2024 October 29, 2024	Pembahasan Keterisian Posisi BOD-1, Direksi dan Dewan Komisaris Pupuk Indonesia Group Discussion on Filling the Positions of BOD-1, Directors and Board of Commissioners of Pupuk Indonesia Group
16 November 2024 November 16, 2024	Talent Acquisition Fungsi Audit dan Operasi Talent Acquisition Audit and Operations Function
26 November 2024 November 26, 2024	Kebutuhan Manpower dan Talent Acquisition Fungsi Operasi Manpower and Talent Acquisition Needs for Operations Functions
3 Desember 2024 December 3, 2024	Fulfillment Transisi Penataan Bisnis PTPI Fulfillment of Transition of Business Arrangement of PTPI
19 Desember 2024 December 19, 2024	Fulfillment Transisi Penataan Bisnis PTPI Fulfillment Transition of Business Arrangement of PTPI
24 Desember 2024 December 24, 2024	Usulan Perubahan Organ Pendukung Dewan Komisaris PI Group Proposed Changes to the PI Group Board of Commissioners Supporting Organs

KOMITE TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 053/A/KU/E30/SK/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Komite Tim Komite TJSL PI *Group*.

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (TJSL)

The Social and Environmental Responsibility Committee (TJSL) is a supporting organ appointed by the Board of Directors in accordance with Directors' Decree No. 053/A/KU/E30/SK/2022 dated May 10, 2022 concerning PI Group TJSL Committee Team Committee.

Susunan Anggota Komite TJSL
Composition of TJSL Committee Members

Jabatan Position	Dijabat oleh: Served by:
Ketua Chairman	Direktur Sumber Daya Manusia PTPI Director of Human Reources PT Pupuk Indonesi (Persero)
Sekretaris Secretary	SVP TJSL PTPI SVP SER PTPI
Anggota Member	• Direktur Keuangan & Umum PT Petrokimia Gresik • Director of Finance & General Affairs PT Petrokimia Gresik • Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kujang • Director of Finance & General Affairs PT Pupuk Kujang • Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kalimantan Timur • Director of Finance & General Affairs PT Pupuk Kalimantan Timur • Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Iskandar Muda • Director of Finance & General Affairs PT Pupuk Iskandar Muda • Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang • Director of Finance & General Affairs PT Pupuk Sriwidjaja Palembang • Direktur Keuangan & SDM PT Rekayasa Industri • Director of Finance & Human Capitals PT Rekayasa Industri

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite TJSL Level Utama

1. Menerima usulan serta memberikan saran dan arahan strategis terkait program strategis yang dilakukan oleh Komite TJSL Level Madya;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi pada setiap konsolidasi kegiatan yang telah dilaporkan pada Laporan Bulanan kegiatan TJSL;
3. Membahas program strategis TJSL PI *Group* sehingga program tersebut tepat sasaran dan dapat memberikan nilai tambah bagi PI Group;
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program TJSL PI Group;
5. Bertanggung jawab atas pengelolaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TJSL PI *Group*.

Main Duties and Responsibilities of the Main Level TJSL Committee

1. Receive proposals and provide strategic advice and direction regarding strategic programs carried out by the Middle Level TJSL Committee;
2. Supervise and evaluate each consolidated activity that has been reported in the TJSL Monthly Activity Report;
3. Discuss PI Group's TJSL strategic program so that the program is right on target and can provide added value for PI Group;
4. Responsible for implementing the PI Group TJSL program;
5. Responsible for managing the Human Capitals (HR) development program in the TJSL sector of PI Group.

Tugas dan Wewenang Ketua Komite TJSL Level Utama

1. Menyerahkan daftar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program TJSL PI *Group* kepada Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("KBUMN") untuk diminta persetujuan;
2. Menyampaikan hasil realisasi kegiatan pada akhir tahun tutup buku kegiatan TJSL PI *Group* kepada Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial KBUMN;
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") lain berkaitan dengan program-progran TJSL kolaborasi yang mengedepankan kontribusi perusahaan pada masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi PI *Group*;
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite TJSL Level Madya berkaitan dengan pemenuhan target dan rencana kegiatan.

Duties and Authorities of the Chair of the Main Level TJSL Committee

1. Submit a list of Work Plans and Budgets (RKA) for the TJSL program of PI Group to the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility of the Ministry of State-Owned Enterprises ("Ministry of SOE") for approval;
2. Convey the results of the realization of activities at the end of the closing year for PI Group's TJSL activities to the Assistant Deputy for Social Responsibility of Ministry of SOE;
3. Coordinating with other State-Owned Enterprises ("SOE") regarding collaborative TJSL programs that prioritize the company's contribution to society so that it can provide added value for PI Group;
4. Evaluate the performance of the Middle Level TJSL Committee regarding the fulfillment of targets and activity plans.

Susunan Anggota Komite TJSL Level Madya

Composition of Middle Level TJSL Committee Members

Jabatan Position	Dijabat oleh: Served by:
Ketua Chairman	SVP TJSL PTPI SVP TJSL PTPI
Sekretaris Secretary	VP Pengelolaan TJSL PTPI VP TJSL Management PTPI
Anggota Member	Seluruh SVP Penanggung Jawab Unit TJSL pada setiap Anak Perusahaan All SVPs Responsible for TJSL Units in each Subsidiary

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite TJSL Level Madya

1. Melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan program TJSL PI Group;
2. Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program TJSL PI Group;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Program TJSL PI Group;
4. Melakukan pelatihan dan pemantauan Program TJSL PTPI Group;
5. Berperan dalam pengambilan keputusan pemberian bantuan kepada mitra binaan;
6. Melakukan penyaluran dana Program Kemitraan (Pendanaan UMK) bagi Anak Perusahaan PTPI, yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri (selanjutnya disebut "Anak Perusahaan") yang memiliki alokasi anggaran pada Program Kemitraan (Pendanaan UMK);
7. Melakukan pengawasan pada penagihan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan lapangan Program TJSL BUMN;
8. Menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memulihkan pinjaman (macet/bermasalah);
9. Melakukan evaluasi atas rekapitutasi profil mitra binaan yang mendapatkan pinjaman bantuan;
10. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas penyaluran bantuan program.

Main Duties and Responsibilities of the Middle Level TJSL Committee

1. Coordinate between units/directorates to formulate objectives and instructions for implementing the PI Group TJSL program;
2. Assist the Board of Directors in carrying out monitoring and evaluation of the implementation of the PI Group TJSL program;
3. Monitoring and evaluating the financial management of PI Group's TJSL Program;
4. Carrying out training and monitoring of the PI Group TJSL Program;
5. Play a role in making decisions on providing assistance to fostered partners;
6. Disbursed Partnership Program funds (UMK Funding) to Subsidiaries of PTPI, namely PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri (hereinafter referred to as "Subsidiary") which has a budget allocation for the Partnership Program (UMK Funding);
7. Supervise billing and be responsible for field implementation of the SOE TJSL Program;
8. Determine the efforts that can be taken to recover loans (non-performing/problematic);
9. Evaluate the recapitulation of profiles of fostered partners who received assistance loans;
10. Monitor and supervise the distribution of program assistance.

Tugas dan Wewenang Ketua Komite TJSL Level Madya

1. Menyerahkan daftar usulan dan susunan program TJSL BUMN kepada Direktur Sumber Daya Manusia untuk diminta persetujuan Direktur Sumber Daya Manusia;
2. Menyampaikan hasil penilaian Survei Kepuasan Lingkungan TJSL PI *Group*;
3. Memberikan arahan strategis pada setiap program yang diusulkan oleh Anggota komite TJSL Level Utama dan Level Madya.

Duties and Authorities of the Middle Level TJSL Committee Chair

1. Submit a list of proposals and structure of the SOE TJSL program to the Human Capital Directors for approval from the Human Capital Directors;
2. Submit the results of the PI Group TJSL Environmental Satisfaction Survey assessment;
3. Provide strategic direction for each program proposed by Main Level and Middle Level TJSL committee members.

Tugas dan Wewenang Sekretaris Komite TJSL Level Madya

1. Menyiapkan materi rapat monitoring bulanan TJSL PI *Group*;
2. Berkoordinasi dengan Person in Charge (PIC) perlaporan masing-masing Anak Perusahaan;
3. Memastikan kelengkapan dokumentasi serta data pada setiap laporan telah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.

Duties and Authorities of the Middle Level TJSL Committee Secretary

1. Prepare material for the PI Group TJSL monthly monitoring meeting;
2. Coordinate with the Person in Charge (PIC) reporting of each Subsidiary;
3. Ensure completeness of documentation and data in each report is in accordance with applicable regulations.

Tugas dan Wewenang Anggota Komite TJSL Level Madya

1. Menyiapkan daftar usulan dan susunan program TJSL BUMN;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan lapangan program TJSL BUMN;
3. Pemetaan dan penyusunan program TJSL PI Group;
4. Melakukan sosialisasi dan publikasi program TJSL PI Group;
5. Memastikan seluruh target dan sasaran kegiatan serta program TJSL berjalan sesuai dengan tata kelola Perusahaan serta manajemen risiko yang berlaku.

Duties and Authorities of Middle Level TJSL Committee Members

1. Prepare a list of proposals and structure of the SOE TJSL program;
2. Responsible for field implementation of the SOE TJSL program;
3. Mapping and preparing the TJSL program for PI Group;
4. Conducting socialisation and publication of PI Group CSR programmes;
5. Ensure that all targets and objectives of TJSL activities and programs run in accordance with applicable corporate governance and risk management.

Pelaksanaan Tugas Komite TJSL

Implementation of the Duties of the TJSL Committee

Rapat Komite TJSL

TJSL Committee Meeting

Sepanjang tahun 2024, Komite TJSL telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Agenda pembahasannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Throughout 2024, the TJSL Committee has held 2 (two) meeting. The discussion agenda is outlined in the table below.

Tabel Rapat Komite TJSL
Table of the SER Committee

Tanggal Date	Agenda
16 Januari 2024 January 16, 2024	Kordinasi Persiapan forum TJSL PI grup 2024 Coordination of Preparation of CSR Forum PI Group 2024
2 Oktober 2024 October 2, 2024	Sinergi Program Kerja Komite TJSL 2024 Synergy of the 2024 TJSL Committee Work Program

KOMITE RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP)

Komite Respectful Workplace Policy (RWP) merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 063/A/HK/E10/SK/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Wakil Perusahaan dan Wakil Pekerja serta Pembentukan Komite Respectful Workplace Policy (RWP).

Struktur dan Keanggotaan Komite RWP

Komite RWP dibentuk sebagai forum untuk menindaklanjuti segala bentuk pelaporan diskriminasi, kekerasan dan/atau pelecehan di Perusahaan.

Komite RWP beranggotakan:
1. 4 (empat) orang perwakilan dari Perusahaan;
2. 3 (tiga) orang perwakilan dari karyawan, meliputi:
   a. 1 (satu) orang berasal dari Srikandi PI;
   b. 1 (satu) orang berasal dari BUMN Muda;
   c. 1 (satu) orang berasal atasan terkait.

RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP) COMMITTEE

The Respectful Workplace Policy (RWP) Committee is a supporting organ appointed by the Board of Directors in accordance with Directors' Decree No. 063/A/HK/E10/SK/2023 dated 24 March 2023 concerning the Appointment of Company Representatives and Worker Representatives and the Establishment of a Respectful Workplace Policy (RWP) Committee.

RWP Committee Structure and Membership

The RWP Committee was formed as a forum to follow up on all forms of reporting of discrimination, violence and/or harassment in the Company.

The RWP Committee consists of:
1. 4 (four) representatives from the Company;
2. 3 (three) employee representatives, including:
   a. 1 (one) person comes from Srikandi PI;
   b. 1 (one) person comes from SOE Muda;
   c. 1 (one) person from the relevant superior.

Tabel Susunan Anggota Komite RWP
Table of Composition of RWP Committee

Jabatan Position	Dijabat oleh: Served by:
Anggota Member	• SVP Operasional SDM • SVP HC Operations • SVP Strategi & Kebijakan SDM • SVP HC Strategy & Policy • SVP Hukum • SVP of Law • SVP Satuan Pengawas Intern • SVP of Internal Control Unit • Ketua Srikandi Pupuk Indonesia atau perwakilannya • Chairman of Srikandi Pupuk Indonesia or his representative • Ketua BUMN Muda atau perwakilannya • Chairman of BUMN Muda or his representative • Atasan karyawan terkait • Relevant employee's supervisor

Tugas Pokok Komite RWP

1. Menjaga dan menjamin kerahasiaan atas segala data dan informasi terkait kejadian pelanggaran;
2. Melakukan tindak lanjut atas pelaporan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan;
3. Melakukan pendampingan secara terpisah terhadap pihak pelapor dan terlapor selama proses penanganan berlangsung;
4. Membuat pelaporan dan evaluasi atas pelaporan RWP secara berkala kepada Direktur Utama.

Pelaksanaan Tugas Komite RWP

Pada tahun 2024 tidak terdapat laporan terkait RWP yang diterima oleh Komite RWP sehingga belum terdapat pelaksanaan kegiatan yang khusus dilakukan oleh Komite RWP.

RWP Committee Main Duties

1. Maintain and guarantee the confidentiality of all data and information related to violations;
2. Follow up on reports that meet the specified requirements and conditions;
3. Provide separate assistance to the reporting party and the reported party during the handling process;
4. Make regular reports and evaluations of RWP reporting to the President Director.

Implementation of RWP Committee Duties

In 2024, there will be no reports related to RWP received by the RWP Committee, so there will be no specific activities carried out by the RWP Committee.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan eksternal. Di lingkungan organisasi internal, Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam memperlancar hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Keberadaan Sekretaris Perusahaan juga diharapkan terlaksananya pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam membantu Direksi, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama sebagai Pejabat Penghubung, implementasi GCG, komunikasi korporat, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat. Melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan publik, Sekretaris Perusahaan turut menjaga citra Perusahaan dan mewakili Direksi dalam setiap kegiatan komunikasi eksternal, khususnya dengan pihak regulator, investor, dan para Pemangku Kepentingan lainnya.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, Perusahaan wajib melaporkan pergantian atau pemberhentian dan pengangkatan pejabat Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.

PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Wijaya Laksana berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan PTPI.

The Corporate Secretary is the liaison party who bridges the interests between the Company and external stakeholders. In the internal organizational environment, the Corporate Secretary has an important role in smoothing the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. It is also hoped that the presence of the Corporate Secretary will ensure compliance with the provisions of the applicable laws and regulations.

In assisting the Board of Directors, the Corporate Secretary has the main function as a Liaison Officer, implementing GCG, corporate communications, as well as administering policy documents and meeting minutes. Through various activities related to the public, the Corporate Secretary helps maintain the Company's image and represents the Board of Directors in all external communication activities, especially with regulators, investors and other stakeholders.

The requirements and procedures for appointing a Corporate Secretary refer to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, and Financial Services Authority Regulation no. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies.

PARTY WHO APPOINTS AND DISMISSES THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed through a Board of Directors Decree based on the Company's internal mechanisms with approval from the Board of Commissioners. In accordance with OJK Regulation no. 35/POJK.04/2014, Companies are required to report the change or dismissal and appointment of Corporate Secretary officials to the OJK and the Indonesian Stock Exchange.

CORPORATE SECRETARY FUNCTIONARY

The Corporate Secretary is held by Wijaya Laksana based on Directors' Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024 concerning Appointment of Officials within PTPI.



Wijaya Laksana

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara **Citizen**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	47 tahun/years old
Domisili **Domicile**	Jakarta, DKI Jakarta Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan **Basis for Appointment**	Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024
Pendidikan **Education**	• Magister Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia (2012) • Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (2001) • Master of Communication Management from the University of Indonesia (2012) • Bachelor of Communication Science, Padjadjaran University (2001)
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Sekretaris Perusahaan PTPI (1 Februari 2024–sekarang) • SVP Sekretaris Perusahaan PTPI (1 Maret 2023–sekarang) • SVP Komunikasi Korporat PTPI (1 April 2016–28 Februari 2023) • Manajer Humas & Kesekretariatan (7 Desember 2015–31 Maret 2016) • Corporate Secretary PTPI (February 1, 2024–present) • SVP Corporate Secretary PTPI (1 March 2023–present) • SVP Corporate Communications PTPI (1 April 2016–28 February 2023) • Public Relations & Secretarial Manager (7 December 2015–31 March 2016)

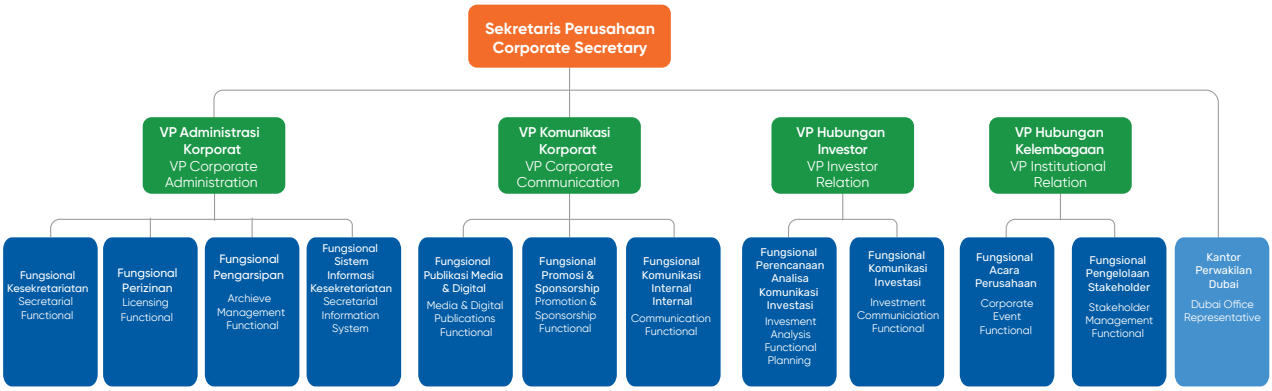
ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang ditetapkan sesuai Keputusan Direksi Surat Keputusan Direksi No. 95/A/HK/E0500/SK/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Direksi Nomor 6/A/HK/E50/SK/2024 Tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PTPI. Cakupan fungsi Sekretaris Perusahaan dan koordinasi di antara organ digambarkan dalam struktur organisasi di bawah ini.

CORPORATE SECRETARY ORGANIZATION

The organizational structure of the Corporate Secretary is determined in accordance with the Directors' Decree, Directors' Decree No. 06/A/HK/E50/SK/2024 dated February 1, 2024 concerning the Organizational Structure of the PTPI President Directorate. The scope of the Corporate Secretary's functions and coordination between organs is described in the organizational structure below.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
Organizational Structure of Corporate Secretary



Secara struktural, Sekretaris Perusahaan berada satu tingkat di bawah Direksi yang membawahi VP Administrasi Korporat, VP Komunikasi Korporat, VP Hubungan Kelembagaan, dan VP Hubungan Investor. Sekretaris Perusahaan diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan hubungan yang baik antara Perusahaan sebagai emiten dengan regulator dan lembaga-lembaga penunjang pasar modal, kalangan investor, masyarakat luas dan pemangku kepentingan pada umumnya, dan sebagai pengelola informasi yang terkait dengan lingkungan bisnis Perusahaan.

Structurally, the Corporate Secretary is one level below the Board of Directors who supervises the VP of Corporate Administration, VP of Corporate Communications and VP of Institutional Relations. The Corporate Secretary is expected to be able to assist the Board of Directors in maintaining good relations between the Company as an issuer with regulators and capital market supporting institutions, investors, the wider community and stakeholders in general, and as a manager of information related to the Company's business environment.

Pada tahun 2024, jumlah karyawan yang tergabung dalam kompartemen Sekretaris Perusahaan sebanyak 16 orang.

In 2024, the number of employees joining the Corporate Secretary compartment will be 16 people.

Fungsi Function	**Jumlah** Total
Administrasi Korporat Corporate Administration	6
Komunikasi Korporat Corporate Communication	5
Hubungan Kelembagaan Institutional Relationship	4
Hubungan Investor Investor Relations	1
Jumlah Total	**16**

FUNGSI DAN TUGAS POKOK SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2024, fungsi dan tugas pokok Sekretaris Perusahaan PTPI, yaitu:

1. Memimpin, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan kebijakan dalam bidang administrasi korporat, komunikasi korporat dan hubungan kelembagaan sesuai visi, misi dan strategi di PI Group sesuai dengan RJPP dan RKAP;
2. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama;

MAIN FUNCTIONS AND DUTIES OF THE CORPORATE SECRETARY

In 2024, main functions and duties of the PTPI Corporate Secretary are:

1. Leading, organizing, directing and controlling policies in the field of corporate administration, corporate communications and institutional relations in accordance with the vision, mission and strategy in PI Group in accordance with RJPP and RKAP;
2. The Corporate Secretary is directly responsible to the President Director and Vice President Director;

3. Menyusun dan mengendalikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Jangka Panjang (RJP) di lingkup Kompartemen Sekretaris Perusahaan untuk mendukung tercapainya target Perusahaan yang ditetapkan pemegang saham;
4. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah unit kerja Sekretaris Perusahaan yang meliputi administrasi korporat, komunikasi korporat, hubungan kelembagaan, hubungan investor;
5. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan tugas-tugas dan kaitannya dengan penyiapan administrasi/dokumentasi penyelenggaraan RUPS (RKAP dan Kinerja) dan RUPS Luar Biasa Holding bersama SVP Hukum dan unit kerja terkait sesuai dengan Anggaran Perusahaan;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas keputusan/arahan RUPS Holding dan tindak lanjut atas keputusan/arahan RUPS Anak Perusahaan di bidang komunikasi korporat, administrasi korporat, hubungan kelembagaan dan hubungan investor, agar sesuai dengan keputusan/arahan RUPS;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dalam kaitannya dengan hubungan dengan stakeholder (Pemegang Saham, Legislatif/DPR, Eksekutif/Pemerintah), agar dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara profesional;
8. Memberikan masukan kepada Direksi atas perkembangan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta memastikan bahwa Perusahaan memenuhi ketentuan/peraturan tersebut. Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang perlu kepada para Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan peraturan tersebut;
9. Mengelola keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk pengelolaan website, media, dan kegiatan publikasi lainnya;
10. Merencanakan, menetapkan, dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebijakan, strategi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi baik hubungan kelembagaan maupun komunikasi korporat di PTPI dan Anak Perusahaan;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas meliputi Annual Report, SI-Portal BUMN dengan unit kerja terkait, agar terdapat kesesuaian dengan ketentuan perusahaan;
12. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris, dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik;
13. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di unit kerjanya berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Profil Jabatan agar diperoleh SDM berkualitas;

3. Prepare and control the draft Company Work Plan and Budget and Long Term Plan (RJP) within the scope of the Corporate Secretary Compartment to support the achievement of Company targets set by shareholders;
4. Coordinate and be responsible for the duties and work under the Corporate Secretary work unit which includes corporate administration, corporate governance, corporate communications, institutional relations and strategic support;
5. Coordinate and manage the implementation of tasks and their relation to the preparation of administration/documentation for holding the GMS (RKAP and Performance) and Extraordinary Holding GMS together with SVP Legal and related work units in accordance with the Company's Budget;
6. Carry out monitoring and evaluation of the decisions/directions of the Holding GMS and follow up on decisions/directions of the Subsidiary GMS in the fields of corporate communications, corporate administration and corporate governance, so that they are in accordance with the GMS decisions/directions;
7. Coordinate the implementation of tasks in relation to relations with stakeholders (Shareholders, Legislative/DPR, Executive/Government), so that they can run smoothly and be coordinated professionally;
8. Provide input to the Board of Directors regarding developments in applicable laws and regulations and ensure that the Company complies with these provisions/regulations. The Company will disclose necessary information to Stakeholders relating to these regulations;
9. Manage information disclosure to the public, including managing websites, media and other publication activities;
10. Plan, determine and coordinate and evaluate policies, strategies and implementation of activities in the field of communication, both institutional relations and corporate communications at PTPI and Subsidiaries;
11. Coordinate the implementation of tasks including the Annual Report, SOE SI-Portal with related work units, so that there is conformity with company regulations;
12. Coordinate and evaluate the implementation of the fraud control system, compliance management system, and anti-bribery management system at Pupuk Indonesia which includes but is not limited to gratification control, compliance with officials' wealth reports, Whistleblowing System (WBS);
13. Responsible for developing and improving the competence, abilities and work attitudes of employees in their work units based on Company Regulations and Position Profiles in order to obtain quality Human Capitals;

14. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Kepatuhan, *Whistleblowing Management System, Good Corporate Governance* (GCG), *Total Quality Management* (TQM) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

14. Actively participate in the implementation of the Occupational Health and Safety (K3) management system, Risk Management System, Anti-Bribery Management System, Compliance Management System, Whistleblowing Management System, Good Corporate Governance (GCG), Total Quality Management (TQM) and Corporate Social Responsibility (CSR) in the work unit area to achieve K3 standards and quality standards in order to carry out continuous improvements.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Perusahaan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pengembangan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company involves the Corporate Secretary in development activities through various training and education with funding being the full responsibility of the Company. A list of training and competency improvement activities that the Corporate Secretary will participate in throughout 2024 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Implementation of Tasks in 2024

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi Realization
1	Memastikan administrasi perkantoran/kesekretariatan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Perusahaan berjalan dengan baik. Ensure administration office/ secretarial and organization archives in the environment Company runs well.	Pengembangan dan implementasi aplikasi Pendukung pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Development and application implementation Supporting the implementation of activities secretariat	• Pengembangan fitur di Aplikasi DOF dalam rangka Akreditasi Kearsipan • Pengembangan Aplikasi Perizinan bekerja sama dengan Tim Digitalisasi & Data Science • Feature development in DOF Application for Archives Accreditation • Licensing Application Development in collaboration with Digitalization & Data Science Team
		Pengelolaan arsip/dokumen perusahaan Management of company archives/documents	• Monitoring dan pendampingan pengisian data perizinan yang telah diregistrasi oleh PIC Perizinan Unit Kerja, dengan total 116 data perizinan, termasuk tambahan 30 data dari renewal perizinan s.d. Triwulan IV/2024. • Akreditasi Unit Kearsipan: • Sertifikasi Pengelolaan Arsip Dinamis PI *Group* tanggal 21-22 Agustus 2024 • Harmonisasi Instrumen Pengelolaan Arsip (Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis/SKKAAD) PI Group • Monitoring and assistance in filling in licensing data that has been registered by the Work Unit Licensing PIC, with a total of 116 licensing data, including an additional 30 data from license renewal until Quarter IV/2024. • Archives Unit Accreditation: • PI Group Dynamic Records Management Certification on August 21-22, 2024 • Harmonization of Records Management Instruments (Dynamic Records Access Security Classification System/SKKAAD) PI Group

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Implementation of Tasks in 2024

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi Realization
2.	• Pemetaan Holding's • Strategic Stakeholder. • Holding's Mapping • Strategic Stakeholder.	• Holding's Stakeholder • Management System • Holding's Stakeholder • Management System	39 stakeholder engagement activities telah terlaksana di tahun 2024 dengan berbagai instansi antara lain DPR RI, TNI, BPK, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, DPRD, Duta Besar RI, Kedutaan Tunisia. • Triwulan I: 6 Kegiatan • Triwulan II: 12 Kegiatan • Triwulan III: 8 Kegiatan • Triwulan IV: 13 Kegiatan 39 stakeholder engagement activities have been carried out in 2024 with various agencies including the House of Representatives, TNI, BPK, Ministry of Agriculture, Ministry of Energy and Mineral Resources, DPRD, Indonesian Ambassador, Tunisian Embassy. • 1st Quarter: 6 Activities • Second Quarter: 12 Activities • Quarter III: 8 activities • Fourth Quarter: 13 Activities Pemetaan Stakeholders dan Issues Pupuk Indonesia tahun 2024 Mapping Pemangku Kepentingan berdasarkan beberapa kategori: • Internal Stakeholders • Kementerian dan Lembaga • DPR RI • Mitra Bisnis dan Pelanggan • Asosiasi dan Serikat Pekerja • Kompetitor & Pelaku Industri Serupa • Pengamat, Analis, Lembaga Studi, LSM Stakeholders and Issues Mapping of Pupuk Indonesia in 2024 Stakeholder Mapping based on several categories: • Internal Stakeholders • Ministries and Agencies • HOUSE OF REPRESENTATIVES • Business Partners and Customers • Associations and Unions • Competitors & Similar Industry Players • Observers, Analysts, Study Institutions, NGOs
3.	• Konsistensi dan pengembangan saluran • komunikasi Internal. • Channel consistency and development • Internal communication.	• Menjalankan program-program campaign fokus pada engagement karyawan. • Menempatkan materi-materi korporasi (Compro book), compro (PPT) dalam saluran • Running campaign programs focused on employee engagement. • Placing corporate materials (Compro book), compro (PPT) in the channel	Menjalankan program internal campaign kerjasama dengan unit kerja lainnya dan melakukan pembaharuan compro Executing internal programs cooperation campaign with other work units and make updates compro

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Implementation of Tasks in 2024

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi Realization
4.	Manajemen Isu: Melakukan Perumusan Agenda Setting sesuai dengan perkembangan isu dan arahan KBUMN. Issue Management: Formulating Agenda Setting accordingly with development issues and directions of Ministry of SOE.	• Agenda Setting • Media visit (explore issue) • Pendampingan konsultan untuk isu relevan • NgoPI • PIMA • Media brief • Kerja sama KOL • Agenda Setting • Media visit (explore issue) • Consultant assistance for relevant issues • NgoPI • PIMA • Media brief • KOL cooperation	**Agenda Setting** Selama periode Januari - Desember 2024, Pupuk Indonesia telah menerbitkan 165 siaran pers **Agenda Setting** During the period of January - December 2024, Pupuk Indonesia has issued 165 press releases **Media Visit** Selama periode Januari- Desember 2024, Pupuk Indonesia telahmelaksanakan 140 media relation (media visit, liputan konferensi pers) dengan rincian sebagai berikut: **Media** During the period January - December 2024, Pupuk Indonesia has carried out 140 media relations (media visits, press conference coverage) with the following details: **Konsultan** • Kerjasama dengan Artemis Kreasi Indonesia untuk pendampingan PR & Media Relations untuk isu-isu strategis di tingkat nasional. • Kerjasama dengan KRA Indonesia untuk international media engagement. • Kerjasama dengan Kompas Grup untuk Menciptakan Persepsi Pentingnya posisi Pupuk Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional. **Consultant** • Collaboration with Artemis Kreasi Indonesia for PR & Media Relations assistance for strategic issues at the national level. • Collaboration with KRA Indonesia for international media engagement. • Cooperation with Kompas Group to Create Perception The importance of Pupuk Indonesia's position in supporting national food security. **NgoPi** Selama periode Januari-Desember 2024, Pupuk Indonesia telah melakukan program Ngobrol bareng Pupuk Indonesia (NgoPI) sebanyak 14 kali, yaitu bersama Forum Wartawan BUMN (FWBUMN), Forum Wartawan Perindustrian (Forwin), Forum Wartawan KESDM, Forum Wartawan Pertanian, Forum Wartawan Istana Kepresidenan, Wartawan Merauke, Wartawan Palembang, Wartawan Ponorogo, Wartawan Pacitan, Wartawan Wonosobo, Wartawan Banda Aceh, Wartawan Lombok. **NgoPi** During the January-December 2024 period, Pupuk Indonesia has conducted the Ngobrol bareng Pupuk Indonesia (NgoPI) program 14 times, namely with the SOE Journalists Forum (FWBUMN), Industry Journalists Forum (Forwin), MEMR Journalists Forum, Agriculture Journalists Forum, Presidential Palace Journalists Forum, Merauke Journalists, Palembang Journalists, Ponorogo Journalists, Pacitan Journalists, Wonosobo Journalists, Banda Aceh Journalists, Lombok Journalists **Pupuk Indonesia Media Award** Program Pupuk Indonesia Media Award (PIMA) 2024Sudah Diluncurkan Pada Desember 2024. **Pupuk Indonesia Media Award** The Pupuk Indonesia Media Award (PIMA) 2024 program was launched in December 2024. **Kerjasama KOL** Selama periode Juli -September, Pupuk Indonesia telah bekerja sama dengan 100 MIcro & Nano Influencer. **KOL Cooperation** During the July-September period, Pupuk Indonesia has worked with 100 MIcro & Nano Influencers.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Implementation of Tasks in 2024

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi Realization
5.	Citra positif dan reputasi perusahaan. Positive image and reputation Company.	• Mengelola employee influencer. • Promosi dan partnership yang relevan dan berdampak terhadap citra perusahaan. Mendukung promosi melalui media sponsorship sebagai bentuk stakeholder management Perusahaan. • Managing employee influencers. • Promotions and partnerships that are relevant and have an impact on the company's image. Support promotion through media sponsorship as a form of stakeholder management.	**Media Pers** • Selama periode Januari - Desember 2024 ini, pemberitaan berita positif • sebesar 9.825 dari target 7.000 pemberitaan atau mencapai 140 persen dari target. **Press Media** • During the period January - December 2024, positive news coverage • 9,825 out of a target of 7,000 news reports or 140 percent of the target. **Media Sosial Perusahaan** Selama periode Januari- Desember 2024, Instagram Pupuk Indonesia meraih reach sebesar 8.580.699 dari target tahunan sebesar 744.840 dan meraih engagement rate sebesar 10.91% dari target tahunan sebesar 10.84%. **Corporate Social Media** During the January-December 2024 period, Pupuk Indonesia's Instagram reached 8,580,699 out of annual target of 744,840 and reached an engagement rate of 10.91% of the annual target of 10.84%. **Sponsorship** • Selama periode Januari -Desember 2024 komitmen sponsorship perusahaan sebesar Rp 36.124.675.185,- dengan total 312 instansi dari berbagai bidang dengan rincian sebagai berikut: • Pendidikan : 14% (44 kegiatan) • Pemerintah : 70% (22 kegiatan) • Instansi/asosiasi: 51% (158 kegiatan) • Media : 13% (40 kegiatan) **Sponsorship** During the period January -December 2024, the company's sponsorship commitment amounted to IDR 36,124,675,185, - with a total of 312 agencies from various fields with the following details: • Education: 14% (44 activities) • Government: 70% (22 activities) • Agencies/associations: 51% (158 activities) • Media: 13% (40 activities) **Pameran** • Pada tahun 2024, Perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan pameran yaitu: • The 2nd International & Indonesia Carbon Capture Storage Forum 2024 • Indonesia Festival Copenhagen, Denmark • Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 • SNI Expo 2024 • Investor Daily Summit 2024 **Exhibition** In 2024, the Company participated in exhibition activities viz: • The 2nd International & Indonesia Carbon Capture Storage Forum 2024 • Indonesia Festival Copenhagen, Denmark • Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 • SNI Expo 2024 • Investor Daily Summit 2024

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024
Implementation of Tasks in 2024

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi Realization
6.	Meningkatkan pemahaman dan dukungan akan program strategis PI *Group* disampaikan melakukan optimalisasi saluran komunikasi majalah internal PI *Group* dan Podcast. Increase understanding and support for PTPI strategic program Group delivered perform optimization communication channel PTPI internal magazine Groups and Podcasts.	• Pelaksanaan proses workshop bersama dengan fokus repositioning, strategi, dan implementasi saluran komunikasi Majalah Internal dan Podcast. • Implementation of a joint workshop process with a focus on repositioning, strategy, and implementation of Internal Magazine and Podcast communication channels.	Penyusunan ulang Majalah Internal SINTESA & Kegiatan Podcast PI On Air Magazine reorganization Internal SINTESA & Activities PI Podcast On Air
		• Pelaksanaan benchmark serta pelatihan pada masing-masing saluran komunikasi Majalah Internal dan Podcast pada profesional dengan tujuan untuk mengetahui operasional, best practice agar dapat meningkatkan readership dan engagement. • Implementation of benchmarks and training on each of the Internal Magazine and Podcast communication channels for professionals with the aim of knowing operations, best practices in order to increase readership and engagement.	Menindaklanjuti pelaksanaan benchmark dan pelatihan setelah penerbitan Majalah Sintesa di tahun 2024 dan pelaksanaan Podcast PI On Air Follow up on implementation benchmarking and training after the publication of the Magazine Synthesis in 2024 and implementation of the PI On Podcast Water
		• Optimalisasi kontribusi narasumber internal PI *Group* untuk dapat mengulas dan memberikan ulasan atas perihal perkembangan Perusahaan. • Pembentukan Tim Majalah Internal dan Podcast disertai ketetapan Perusahaan. Anggota Tim 40% terdiri dari BUMN Muda (proses kreativitas dan kaderisasi). • Optimizing the contribution of internal sources of PI Group to be able to review and provide reviews on the development of the Company. • Establishment of Internal Magazine and Podcast Team with Company decree. Team members are 40% young SOEs (creativity and regeneration process).	Penyusunan SK Direksi untuk Redaksi Majalah Sintesa. Preparation of Board of Directors Decree for Editor of Sintesa Magazine.

Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan

Governance & Compliance Function

Pada tahun 2024, fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan dijalankan oleh Kompartemen Tata Kelola dan Kepatuhan yang dipimpin oleh seorang SVP Tata Kelola dan Kepatuhan di bawah koordinasi Direktorat Manajemen Risiko.

Sehubungan dengan terbitnya Omnibus Law BUMN berupa PER-2/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, maka pada awal tahun 2024, fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan menjadi unit kerja setingkat kompartemen di bawah koordinasi Direktur Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No. 94/A/HK/E0500/SK/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 13/A/HK/E50/SK/2024 Tentang Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko PTPI.

ORGANISASI TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Senior Vice President (SVP) Tata Kelola dan Kepatuhan dijabat oleh Ahmad Diponegoro. berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2024 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan PTPI.

In 2024, the Governance and Compliance function is carried out by the Corporate Governance Department led by a Vice President Director under the coordination of the Corporate Secretary Compartment.

In connection with the issuance of the SOE Omnibus Law in the form of PER-2/MBU/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of StateOwned Enterprises, at the beginning of 2024, the Governance and Compliance function will become a compartment-level work unit under the coordination of the Director of Risk Management as stated regulated in Directors' Decree No. 13/A/HK/E50/SK/2024 concerning Organizational Structure of the Risk Management Directorate of PTPI.

GOVERNANCE AND COMPLIANCE ORGANIZATION

The position of Senior Vice President (SVP) of Governance and Compliance is held by Ahmad Diponegoro, as per Board of Directors Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2024, concerning the Appointment of Officials within PTPI.



Ahmad Diponegoro

SVP Tata Kelola & Kepatuhan
SVP Compliance Governance

Warga Negara **Citizen**	Indonesia Indonesian
Usia **Age**	49 tahun/years old
Domisili **Domicile**	Jakarta, DKI Jakarta Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan **Basis for Appointment**	Surat Keputusan Direksi No. 81/A/HK/E0202/SK/2024 Board of Directors Decree No. 81/A/HK/E0202/SK/2024
Pendidikan **Education**	• Magister Bidang Manajemen Informasi dari Tilburg University (2006) • Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1998) • Master in Information Management from Tilburg University (2006) • Bachelor of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (1998

Pengalaman Kerja **Work Experience**	• SVP Manajemen Risiko PTPI (2020–sekarang) • SVP Tata Kelola Korporasi PTPI (2020) • Senior Project Manager Implementasi Budaya Perusahaan PTPI (2020) • Kepala Pembelajaran dan Manajemen Pengetahuan PTPI (2020) • SVP Corporate Strategy & Investment PT Rekayasa Industri (2019–2020) • VP Corporate Secretary PT Rekayasa Industri (2017–2019) • AVP Corporate Strategy (2012–2017) • Corporate Development Manager (2010–2012) • ICT Operation Manager (2007–2020) • 3D Integrated Design (2001–2007) • SVP Risk Management PTPI (2020–present) • SVP Corporate Governance PTPI (2020) • Senior Project Manager for Implementation of PTPI Corporate Culture (2020) • Head of Learning and Knowledge Management PTPI (2020) • SVP Corporate Strategy & Investment PT Rekayasa Industri (2019–2020) • VP Corporate Secretary PT Rekayasa Industri (2017–2019) • AVP Corporate Strategy (2012–2017) • Corporate Development Manager (2010–2012) • ICT Operations Manager (2007–2020) • 3D Integrated Design (2001–2007)

JUMLAH KARYAWAN

Hingga akhir tahun 2024, jumlah karyawan yang tergabung di bawah SVP Tata Kelola & Kepatuhan sebanyak 5 orang.

NUMBER OF EMPLOYEES

By the end of 2024, the number of employees joining under the SVP of Governance & Compliance is 5 people.

Fungsi Function	**Jumlah** Total
VP Governansi Korporat VP Corporate Governance VP Tata Kelola	1
Staf Governansi Korporat Corporate Governance Staf Staf Tata Kelola	4
Jumlah Total	**5**

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Departemen Governansi Korporat memiliki tugas pokok meliputi:

1. Merumuskan kebijakan dan program kerja bidang Tata Kelola dan Kepatuhan Perusahaan;
2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang tata kelola dan kepatuhan, yaitu:
   a. Implementasi peraturan dan kebijakan yang terkait *Good Corporate Governance* (GCG) di PI *Group*;
   b. Peningkatan kompetensi asesor GCG di PI *Group*;
   c. Pengukuran implementasi GCG di PI *Group*;
   d. Perbaikan atas *Area of Improvement* (AoI) hasil asesmen GCG untuk mendorong peningkatan pelaksanaan GCG;
   e. Pengendalian gratifikasi di PI *Group*;
   f. Peningkatan Kepatuhan LHKPN di PI *Group*;
   g. Pengembangan *Whistleblowing System* (WBS) di PI Grup;
   h. Pengendalian fraud di PI *Group*;
   i. Sosialisasi bidang tata kelola dan kepatuhan di Perusahaan guna meningkatkan pemahaman Insan Perusahaan.

MAIN DUTIES AND FUNCTIONS

The Corporate Governance Department has main tasks including:

1. Formulate policies and work programs in the field of Corporate Governance and Compliance;
2. Implement and coordinate activities in the field of governance and compliance, namely:
   a. Implementation of regulations and policies related to Good Corporate Governance (GCG) in the PI Group;
   b. Increasing the competency of GCG assessors in PI Group;
   c. Measuring GCG implementation in PI Group;
   d. Improvements to the Area of Improvement (AoI) as a result of the GCG assessment to encourage increased GCG implementation;
   e. Gratification control in PI Group;
   f. Increasing LHKPN Compliance in PI Group;
   g. Development of Whistleblowing System (WBS) in PI Group;
   h. Fraud control in PI Group;
   i. Socialization of governance and compliance in the Company to increase understanding of Company Personnel.

3. Mengevaluasi kebijakan, program kerja, dan kegiatan bidang tata kelola dan kepatuhan di PI *Group*.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2024

Realisasi kegiatan pada tahun 2024 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

1. Seluruh Insan Perusahaan di Perseroan dan 10 Entitas Anak Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas secara lengkap 100%.
2. Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan pemutakhiran Pedoman Pengendalian Gratifikasi sesuai Pedoman Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019. Adapun pemutakhiran pedoman Pengendalian Gratifikasi terkait dengan penerbitan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, saat ini dalam proses pengesahan Direksi.
3. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
4. Laporan Gratifikasi yang telah diterima dan ditindaklanjuti oleh UPG PI *Group* sebanyak 154 (serratus lima puluh empat) laporan, terdiri dari: Penolakan Gratifikasi sebanyak 8 (delapan) laporan, Penerimaan Gratifikasi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) laporan, tidak terdapat Laporan Pemberian Gratifikasi serta tidak terdapat Laporan Permintaan Gratifikasi.
5. Realisasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) PI *Group* Tahun 2024 sampai dengan Semester II Tahun 2024 telah diunggah pada aplikasi GOL KPK RI pada tanggal 31 Desember 2024.
6. Perseroan telah menetapkan Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, yaitu Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat, Nomor Dokumen: PI-SEK-PD-010 Rev. 3 Tanggal 25 Juli 2023.
7. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat (UPL) dan telah melakukan Sosialisasi Laporan Kekayaan Pejabat. Adapun pelaporan LHKPN dari 2.382 WL adalah: 2.053 WL telah seluruhnya diumumkan lengkap.
8. Kebijakan pengelolaan WBS di Perseroan dan Anak Perusahaan telah dilakukan pemutakhiran mengacu pada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-011 Rev.2 tanggal 29 Maret 2022.
9. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menetapkan fungsi Pengelola WBS dan telah melaksanakan sosialisasi pengelolaan WBS.
10. Aduan dugaan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di PI *Group* sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) aduan, terdiri dari: 420 (empat ratus dua puluh) aduan bukan pelanggaran dan 51 (lima puluh satu) aduan termasuk pelanggaran.

3. Evaluate policies, work programs and activities in the field of governance and compliance at PI Group.

IMPLEMENTATION OF TASKS IN 2024

The realization of activities in 2024 is described in the table below.

1. All employees of the Company and its 10 Subsidiaries have signed the Integrity Pact in full (100%).
2. The Company and its Subsidiaries have updated their Gratuity Control Guidelines in accordance with the Indonesian Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019. The update of the Gratuity Control Guidelines is related to the issuance of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023, which is currently undergoing approval by the Board of Directors.
3. The Company and its Subsidiaries have established a Gratuity Control Unit (GCU) and conducted Gratuity Control Socialization.
4. Gratuity reports received and followed up by the PI Group GCC amount to 154 (one hundred fifty-four) reports, consisting of: 8 (eight) reports of Gratuity Rejection, 145 (one hundred forty-five) reports of Gratuity Acceptance, no reports of Gratuity Giving, and no reports of Gratuity Request.
5. The implementation of the Gratuity Control Program (GCP) for PI Group for the year 2024 up to the second semester of 2024 has been uploaded to the GOL KPK RI application on December 31, 2024.
6. The Company has established Guidelines for Reporting the Assets of Officials in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023, namely the Guidelines for Reporting the Assets of Officials, Document Number: PI-SEK-PD-010 Rev. 3 dated July 25, 2023.
7. The Company and its Subsidiaries have established an Asset Reporting Unit for Officials (UPL) and have conducted awareness campaigns on asset reporting for officials. The reporting of LHKPN from 2,382 officials is as follows: 2,053 officials have fully disclosed their assets.
8. The WBS management policy at the Company and its Subsidiaries has been updated in accordance with the Whistleblowing System Guidelines, Document Number PI-SEKPD-011 Rev. 2 dated March 29, 2022.
9. The Company and its Subsidiaries have established the function of WBS Manager and have conducted socialization on WBS management.
10. Reports of alleged violations through the Violation Reporting System (WBS) at PI Group totaled 471 (four hundred seventy-one) reports, consisting of: 420 (four hundred twenty) non-violation reports and 51 (fifty-one) violation reports.

11. Telah dilakukan pengesahan rencana aksi WBS TPK Terintegrasi untuk Tahun 2024 pada tanggal 22 Februari 2024. Evaluasi atas penggunaan media WBS Terintegrasi PI *Group* telah dilakukan dan dalam proses pemutakhiran sistem berdasarkan hasil evaluasi. Progress Tindak Lanjut dari 11 Rencana Aksi WBS TPK Terintegrasi PI dan KPK yaitu: 2 rencana aksi (17%) Closed dan 8 rencana aksi (83%) *On Progress*.
12. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait penanganan Benturan Kepentingan dan telah melakukan sosialisasi terkait benturan kepentingan. Terdapat 2 (dua) aduan benturan kepentingan di PI *Group* dan ditetapkan tidak memenuhi syarat.
13. Pengembangan *Fraud Control System* (FCS) PI *Group* untuk tahun 2024 meliputi: Evaluasi atas implementasi FCS pada 6 (enam) entitas, yaitu: PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Bimbingan Teknis atas implementasi FCS pada 3 (tiga) entitas, yaitu: PT Pupuk Indonesia Niaga, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan PT Pupuk Indonesia Utilitas.
14. Progress tindak lanjut atas 204 AoI FCS dari 10 (sepuluh) entitas (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, REKIND, PIN, PILOG, PIU) yaitu: 135 (seratus tiga puluh lima) AoI (66%) Closed, 57 (lima puluh tujuh) AoI (28%) In Progress, 12 (dua belas) AoI (6%) Open.
15. Perseroan dan 10 (sepuluh) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, REKIND, PIN, Pilog, PIU dan PIP) telah memiliki sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016.
16. Telah dilakukan self assessment kepatuhan dan assessment kepatuhan PSA 62 untuk tahun buku Tahun 2023. Identifikasi Risiko Kepatuhan untuk seluruh Unit Kerja telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Pengembangan sistem Aplikasi Manajemen Kepatuhan (Compliance Management System Online Multi Company (COMPOS)) telah selesai dan telah dilakukan Key User Training.
17. Penilaian Penerapan GCG (GCG *Assessment*) PI *Group* Tahun Buku 2023 belum dilaksanakan dikarenakan kriteria penilaian penerapan GCG KBUMN telah dicabut dan belum diterbitkan kriteria pengganti. Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN.
18. Perseroan dan 3 (tiga) Anak Perusahaan (PKT, PSP dan PKC) mengikuti Program CGPI Tahun 2022 dan mendapatkan predikat "Sangat Tepercaya" (PI, PKT dan PSP) dan "Tepercaya" (PKC).

11. The Integrated WBS Action Plan for 2024 was approved on February 22, 2024. An evaluation of the use of the PI Group's Integrated WBS has been conducted, and the system is currently being updated based on the evaluation results. Progress on the follow-up actions from the 11 Integrated WBS Action Plans of PI and KPK is as follows: 2 action plans (17%) Closed and 8 action plans (83%) On Progress.
12. The Company and its Subsidiaries have policies regarding the handling of conflicts of interest and have conducted socialization related to conflicts of interest. There were 2 (two) reports of conflicts of interest in PI Group and were determined to be ineligible.
13. The development of the PI Group's Fraud Control System (FCS) for 2024 includes: Evaluation of the implementation of FCS in 6 (six) entities, namely: PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Technical guidance on the implementation of the FCS at three entities, namely: PT Pupuk Indonesia Niaga, PT Pupuk Indonesia Logistik, and PT Pupuk Indonesia Utilitas.
14. Progress on follow-up actions for 204 FCS AoIs from 10 (ten) entities (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, REKIND, PIN, PILOG, PIU) as follows: 135 (one hundred thirty-five) AoI (66%) Closed, 57 (fifty-seven) AoI (28%) In Progress, 12 (twelve) AoI (6%) Open.
15. The Company and 10 (ten) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, REKIND, PIN, Pilog, PIU, and PIP) have obtained SMAP SNI ISO 37001:2016 certification.
16. Self-assessment of compliance and PSA 62 compliance assessment for the fiscal year 2023 have been conducted. Risk identification for compliance across all business units has been conducted in accordance with procedures. The development of the Compliance Management System Online Multi Company (COMPOS) has been completed, and key user training has been conducted.
17. The GCG Implementation Assessment (GCG Assessment) for PI Group for the 2023 fiscal year has not been conducted due to the revocation of the GCG implementation assessment criteria by the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) and the absence of replacement criteria. This is also in line with the instructions from the Ministry of State-Owned Enterprises.
18. The Company and its three Subsidiaries (PKT, PSP, and PKC) participated in the CGPI Program for 2022 and received the rating of "Highly Trustworthy" (PI, PKT, and PSP) and "Trustworthy" (PKC).

Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern

Internal Audit/Internal Control Unit

Audit Internal merupakan organ pendukung Direksi dalam tata kelola Perusahaan berperan penting dalam sistem pengendalian internal Perusahaan. Secara garis besar, keberadaan Audit Internal bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan

Fungsi Audit Internal di lingkup Perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Tugasnya membantu Direksi dalam melaksanakan audit internal Perusahaan guna menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses tata kelola perusahaan serta memberikan saran perbaikan.

SPI merupakan unit kerja Perusahaan yang melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi (*consultative management*). SPI Perusahaan dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern. Dalam proses pelaksanaan pengawasan, SPI memerankan sebuah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi Perusahaan.

Pelaksanaan proses pengawasan dan audit harus mampu membantu Perusahaan mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan Perusahaan yang baik.

Keberadaan SPI menjadi wujud kepatuhan Perusahaan yang mengacu pada Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN, serta Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Internal Audit aims to help management realize its objectives/targets through examining the adequacy and implementation of internal control processes, risk management and corporate governance. Therefore, Internal Audit is a supporting organ for the Board of Directors which plays an important role in the Company's internal control system.

The Internal Audit function within the Company is carried out by the Internal Audit Unit (SPI). His job is to assist the Board of Directors in carrying out the Company's internal audit to assess the effectiveness of the internal control system, risk management and corporate governance processes and provide suggestions for improvement.

SPI is a Company work unit that carries out assurance and consulting activities (consultative management). The Company's SPI is led by the Head of Internal Control Unit. In the process of implementing supervision, SPI plays an independent, objective and consulting activity designed to provide added value and improve the Company's operations.

The implementation of the monitoring and audit process must be able to help the Company achieve its goals. This is done by implementing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the risk management process, the adequacy of controls and good management of the Company.

The existence of SPI is a form of company compliance which refers to Law no. 19 of 2003 concerning SOE, Government Regulation no. 12 of 1998 concerning Limited Liability Companies (Persero), SOE Ministerial Decree No. KEP117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practices in SOE, as well as OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter.

KEBIJAKAN AUDIT INTERNAL PI GROUP

Untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan PI Group, Direksi menetapkan kebijakan pengawasan intern sesuai SK Direksi No. SK/DIR/043/2015 tanggal 21 September 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pelaksanaan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat oleh SPI;
2. Penguatan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui:
   a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (*sustainable*);
   b. Pelaksanaan audit keuangan, audit operasional, dan audit khusus yang fokus pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi (*risk based audit*);
   c. Pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, tata kelola, dan manajemen risiko;
   d. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya SPI.
3. Program pengawasan intern dibuat oleh Kepala SPI dan ditetapkan oleh Direktur Utama;
4. SPI PTPI dapat melakukan audit kepada Entitas Anak atas penerapan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang bernilai strategis;
5. SPI PTPI berkoordinasi dengan SPI Entitas Anak dalam menetapkan program dan kegiatan pengawasan;
6. Kepala SPI menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan intern setiap Triwulan kepada Direktur Utama;
7. SPI Entitas Anak menyusun kebijakan pengawasan intern di masing-masing perusahaan dengan mengacu kepada Kebijakan pengawasan intern PTPI.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Persetujuan Dewan Komisaris. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan BUMN: PER-02/MBU/03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala SPI dijabat oleh Raden Eric Juliana Rachman berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 021/A/HK/P28/SK/2023 tanggal 1 Februari 2024.

PI GROUP INTERNAL AUDIT POLICY

To realize a strong internal control system within the PI Group, the Board of Directors has established an internal control policy in accordance with Directors' Decree No. SK/DIR/043/2015 dated 21 September 2015 with the following points:

1. Implementation of a strong internal control system by SPI;
2. Strengthening the internal control system is implemented through:
   a. Development and strengthening of sustainable internal control functions;
   b. Implementation of financial audits, operational audits and special audits that focus on activities that have high risk (risk based audit);
   c. Providing consultation to improve and increase the effectiveness of operations, governance and risk management;
   d. Increased capabilities and capacity of SPI resources.
3. The internal monitoring program is created by Head of SPI and determined by the President Director;
4. SPI PTPI can audit Subsidiaries regarding the implementation of policies issued by the Company and activities of strategic value;
5. SPI PTPI coordinates with SPI Subsidiaries in determining supervisory programs and activities;
6. Head of SPI submits a report on the implementation of internal supervision every quarter to the President Director;
7. SPI Subsidiaries prepare internal supervision policies in each company by referring to PTPI's internal supervision policy

PARTY THAT APPOINTS AND DISMISSES THE HEAD OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Head of of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. This policy is in line with SOE Regulations: PER-02/MBU/03/2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in StateOwned Enterprises.

PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

The Head of SPI is held by Raden Eric Juliana Rachman based on Directors' Decree No. 021/A/HK/P28/SK/2023 dated February 1, 2024.



Raden Eric Juliana Rachman

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Warga Negara Citizen	Indonesia Indonesian
Usia Age	45 tahun/years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/205/A/HK/2/P28/SK/2023 tanggal 8 November 2023 Board of Directors Decree No. SK/DIR/205/A/HK/2/P28/SK/2023 dated November 8, 2024
Pendidikan Education	Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran (2003) Bachelor of Economics, Padjadjaran University (2003)
Sertifikat Certification	• Supply Chain Training Certified (CSCA) • Chief Government Officer Certified (CCGO) • Fraud Examiner Certified (CFE) • Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) • Enterprise Risk Government Certified (CERG)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Satuan Pengawasan Intern/CAE (Chief Audit Executive) PTPI (November 2023-Sekarang). • Komisaris PT Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC) (April 2023-sekarang) • Senior Vice President PSO Planning Management, PTPI (September 2020-November 2023) • Senior Vice President Distribusi & Logistik PTPI (Oktober 2019-September 2020) • Vice President Non Komersil PTPI (Oktober 2017-Oktober 2019) • Manager Tata Kelola dan Kepatuhan PTPI (Desember 2015-Oktober 2017) • Staf GM Tata Kelola PTPI (Juni 2014-Desember 2015) • Ketua Tim Ketahanan Pangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedepuitan Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK -RI) (Januari 2009-Juni 2014) • Spesialis Pengembangan Sistem Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedepuitan Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK -RI) (November 2005-Januari 2009) • Analis Kebijakan Persaingan, Direktorat Kebijakan Persaingan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) (Maret 2004-November 2005) • Head of Internal Audit Unit/CAE (Chief Audit Executive) of PTPI (November 2023-Present) • Commissioner of PT Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC) (April 2023-Present) • Senior Vice President of PSO Planning Management of PTPI (September 2020-November 2023) • Senior Vice President of Distribution & Logistics of PTPI (October 2019-September 2020) • Vice President of Non-Commercial of PTPI (October 2017-October 2019) • Manager of Governance and Compliance of PTPI (December 2015-October 2017) • GM Staff of Governance of PTPI (June 2014-December 2015) • Head of Food Security Team, Directorate of Research and Development, Deputy for Prevention, Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI) (January 2009-June 2014) • System Development Specialist, Research and Development Directorate, Prevention Division, Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI) (November 2005–January 2009) • Competition Policy Analyst, Directorate of Competition Policy, Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia (KPPU RI) (March 2004-November 2005)

KUALIFIKASI

Standar kualifikasi audit internal di lingkungan Perusahaan, terutama:

1. Mampu menjelaskan standar audit internal sesuai dengan best practice dan standar yang berlaku antara lain tugas, wewenang, dan kode etik;
2. Mampu menjelaskan definisi, jenis penugasan assurance dan tujuan serta mekanisme kegiatan assurance yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring tindak lanjut;
3. Mampu menjelaskan konsep Risk Based Audit dan Three Lines Model;
4. Mampu menjelaskan konsep Governance, Risk, dan Control (GRC) sesuai dengan standar yang berlaku.

QUALIFICATION

Internal audit qualification standards within the Company, especially:

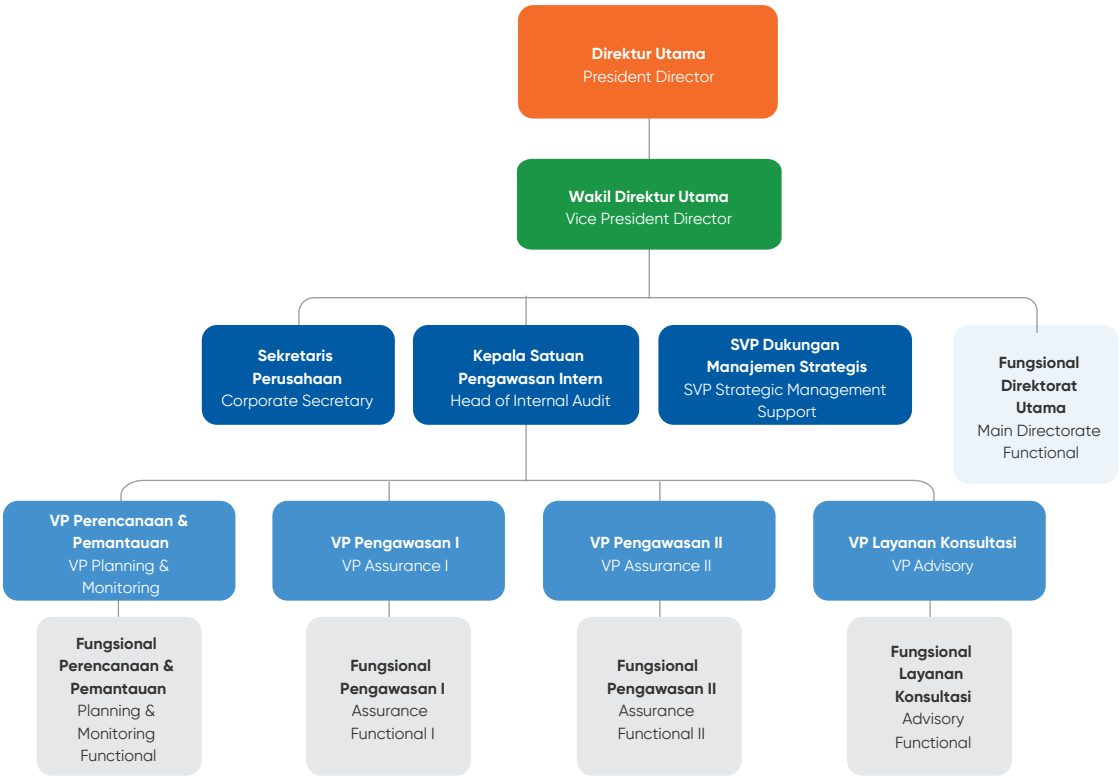
1. Able to explain internal audit standards in accordance with best practices and applicable standards, including duties, authority and code of ethics;
2. Able to explain the definition, types of assurance assignments and the objectives and mechanisms of assurance activities, namely planning, implementation, reporting and follow-up monitoring;
3. Able to explain the concept of Risk Based Audit and Three Lines Model;
4. Able to explain the concept of Governance, Risk and Control (GRC) in accordance with applicable standards.

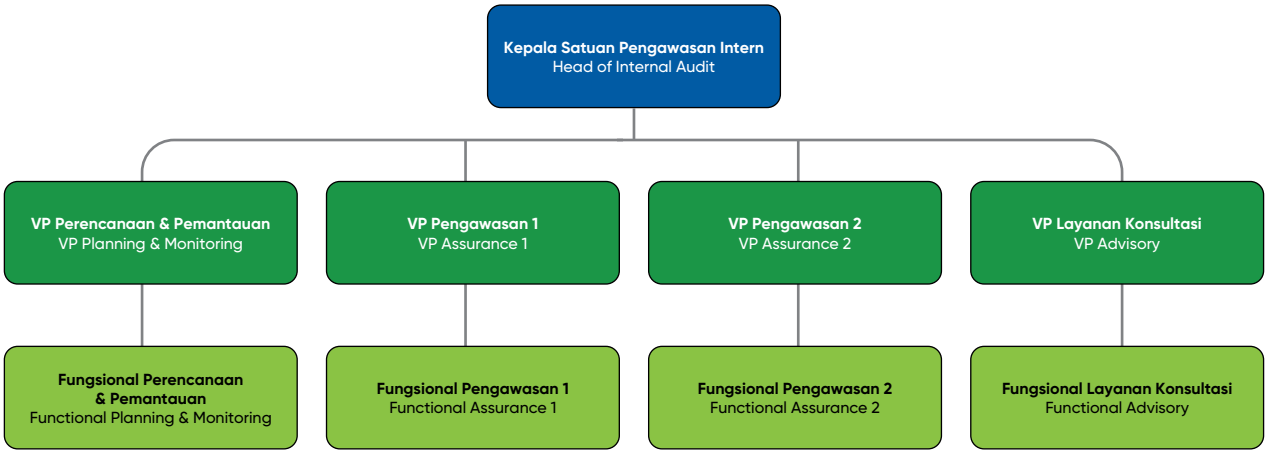
STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 95/A/HK/E0500/SK/2024 tentang Perubahan pertama atas Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 6/A/HK/E50/SK/2024, dijelaskan bahwa Kepala SPI secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berkooordinasi dengan Wakil Direktur Utama. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, Kepala SPI dibantu oleh 4 (empat) Orang Vice President (VP) yaitu VP Perencanaan & Pemantauan, VP Pengawasan 1, VP Pengawasan 2 dan VP Layanan Konsultansi beserta 12 (dua belas) Orang Auditor, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) admin dengan struktur organisasi, sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In accordance with the Decree of the Company's Directors No. 6/A/HK/E50/SK/2024 concerning the Organizational Structure of the PTPI President Directorate, it is explained that the Head of SPI is structurally responsible directly to the President Director and Vice President Director. In carrying out his work, the Head of SPI is assisted by 3 (three) Vice Presidents (VP), namely VP Planning & Monitoring, VP Supervision and VP Consultancy Services along with 2 (two) Senior Officers, 5 (five) Junior Officers, 1 (one) Secretary and 5 (five) admins with the organizational structure as follows:





KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perusahaan mengembangkan Sistem Pengendalian Internal agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengamankan investasi dan aset perusahaan serta menjaga pencapaian kinerja yang baik. Selain itu, pengendalian internal dibangun guna meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Entitas Anak guna memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

SPI Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. 6/A/HK/E50/SK/2024 dan SK Direksi Perubahan Pertama No. 021/A/HK/P28/SK/2024 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PTPI. Keberadaan dan tugas SPI BUMN mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bab VI Bagian Pertama, Satuan Pengawasan Intern serta Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern PTPI dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. Kepala SPI dalam organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
3. Kepala SPI secara struktural bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Personil SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

POSITION OF THE INTERAL AUDIT UNIT

The company developed an Internal Control System so that it can function effectively in securing company investments and assets and maintaining good performance. In addition, internal control is built to improve the integrated control function (integrated control system), both between the Company and Subsidiaries to ensure that operational activities are carried out well and can increase added value for the Company through effective implementation of risk management and Good Principles Corporate Governance.

The Company's SPI was formed based on the Directors' Decree, which was updated with Directors' Decree No. 6/A/HK/E50/SK/2024 concerning Organizational Structure of the PTPI President Directorate. The existence and duties of SPI SOE refer to Law (UU) no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE) Chapter VI Part One, Internal Audit Unit and Ministerial Regulation (Permen) of SOE.

The position of the PTPI Internal Audit Unit and Subsidiaries is as follows:

1. The Internal Audit Unit (SPI) is led by a Head who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
2. The Head of SPI in the organization is under and responsible to the President Director.
3. The Head of SPI is structurally responsible to the President Director and functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
4. SPI personnel report directly to the Head of SPI.

Hubungan kerja SPI secara internal dan eksternal dijabarkan sebagai berikut:

1. Hubungan Internal
   a. Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
   b. Kepala SPI membawahi 4 (empat) Departemen, yaitu:
      - Perencanaan & Pemantauan;
      - Pengawasan 1.
      - Pengawasan 2
      - Layanan Konsultansi
      - Tanggung jawab pelaksanaan masing-masing Departemen didelegasikan kepada Vice President (VP) terkait.
2. Hubungan Eksternal
   a. Hubungan dengan auditor eksternal;
   b. Hubungan dengan Komite Audit;
   c. Hubungan dengan pihak luar lainnya, antara lain dengan Satuan Pengawasan Intern Entitas Anak dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit bersama.

SPI's working relationships internally and externally are described as follows:

1. Internal Relations
   a. The Head of SPI reports directly to the President Director;
   b. The Head of SPI oversees 3 (three) Supervision Departments, namely:
      - Planning & Monitoring;
      - Supervision 1.
      - Supervision 2.
      - Consultancy Services
      - Responsibility for the implementation of each Department is delegated to the relevant Vice President (VP).
2. External Relations
   a. Relationship with external auditors;
   b. Relationship with the Audit Committee;
   c. Relationships with other external parties, including with the Internal Audit Unit of Subsidiaries in the form of coordinating the implementation of joint audits.

Jumlah Pegawai Satuan Pengawasan Intern
Number of Internal Audit Unit Employees

No.	Entitas Entity	Jumlah Karyawan Total Employee
Holding		
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	15
Entitas Anak Subsidiary		
2	PT Petrokimia Gresik	13
3	PT Pupuk Kujang	12
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	18
5	PT Pupuk Iskandar Muda	8
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	17
7	PT Rekayasa Industri	7
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	4
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	3
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas*	3
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	1
Jumlah SDM SPI PI Group Number of SPI PI Group HC		101

* Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024 | Subsidiaries until December 15, 2024

SERTIFIKASI PROFESI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Sebagai upaya untuk mendukung peran auditor agar lebih berkompeten dalam mengelola risiko yang ada di Perusahaan, maka Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi auditor yang diberikan secara sistematis dengan mengikutsertakan auditor internal dalam program sertifikasi. Adapun daftar sertifikasi kompetensi personel SPI di PI Group, sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT UNIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

As an effort to support the role of auditors to be more competent in managing risks in the Company, the Company facilitates a competency development program for auditors which is provided systematically by involving internal auditors in the certification program. The list of competency certification for SPI personnel in the PI Group is as follows:

No.	Sertifikasi Kompetensi Certificate of Competency	Jumlah Total
1	Certified Internal Auditor (CIA)	1
2	Certified Information System Auditor (CISA)	2
3	Qualified Internal Audit (QIA)	3
4	Certified Internal Audit Executive (CIAE)	1
5	Certified Supply Chain Analyst (CSCA)	3
6	Certified Program in Public Procurement (CPPP)	2
7	Certified in Risk and Information System Control (CRISC)	1
8	Certified Management Accountant (CMA)	1

PEDOMAN KERJA: PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pelaksanaan Fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh SPI, berpedoman pada standar pelaksanaan Fungsi Audit Internal yang berlaku dan kode etik Audit Internal. Piagam SPI revisi terakhir disahkan pada tanggal 3 Januari 2024. Piagam tersebut disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan.

Piagam SPI memuat visi, misi, fungsi, struktur, dan kedudukan Unit Satuan Pengawasan Intern, kualifikasi, ruang lingkup kerja operasional, wewenang, tugas dan tanggung jawab, standar profesional, persyaratan auditor internal, hubungan dengan auditor eksternal dan Komite Audit, kode etik, serta independensi dan objektivitas Auditor Intern, serta larangan perangkapan tugas oleh personel SPI. Piagam SPI menjadi dasar bagi auditor pada Satuan Pengawasan Intern Perusahaan dan menjadi acuan bagi Satuan Pengawasan Intern Anak Perusahaan. Diharapkan dengan dipatuhinya Piagam Audit Internal, maka akan mempermudah auditor dalam memahami mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Selain Piagam SPI, auditor internal Perusahaan juga dilengkapi dengan seperangkat pedoman kerja, mekanisme kerja dan supervisi dalam organisasinya, antara lain diatur dalam:

KODE ETIK-PEDOMAN-PROSEDUR-KENIJAKAN SPI

1. Kode Etik SPI PTPI;
2. Kebijakan Pengawasan Intern PTPI;
   a. Pedoman:
      - Pedoman Umum Audit Internal;
      - Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko;
      - Pedoman Audit Operasional;
      - Pedoman Sistem Pengendalian Intern;
      - Pedoman Penyusunan Pelaporan Kegiatan SPI;
      - Pedoman Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas (*Quality Assurance*) SPI;

WORK GUIDELINES: INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER

The implementation of the Internal Audit Function carried out by the Internal Audit Unit (SPI) is guided by applicable Internal Audit Function standards and the Internal Audit Code of Ethics. The most recent revision of the SPI Charter was ratified on January 3, 2024. The charter was approved by the President Commissioner and the President Director of the Company.

The SPI Charter contains the vision, mission, function, structure and position of the Internal Audit Unit, qualifications, scope of operational work, authority, duties and responsibilities, professional standards, internal auditor requirements, relationship with external auditors and the Audit Committee, code of ethics, as well as the independence and objectivity of the Internal Auditor, as well as the prohibition of concurrent duties by SPI personnel. The SPI Charter is the basis for auditors in the Company's Internal Audit Unit and is a reference for the Subsidiary's Internal Audit Unit. It is hoped that compliance with the Internal Audit Charter will make it easier for auditors to understand the level of maintenance of interests and commitment of all parties related to the Company.

In addition to the SPI Charter, the Company's internal auditors are also equipped with a set of work guidelines, work mechanisms and supervision within the organization, including those regulated in:

SPI CODE OF ETHICS-GUIDELINES-PROCEDURES-POLICIES

1. SPI PTPI Code of Ethics;
2. PTPI Internal Supervision Policy;
   a. Guidelines:
      - General Internal Audit Guidelines;
      - Risk Based Internal Audit Guidelines;
      - Operational Audit Guidelines;
      - Internal Control System Guidelines;
      - Guidelines for Preparing SPI Activity Reports;
      - SPI Quality Assurance and Quality Assurance Program Guidelines;

- Pedoman Pendampingan Audit Eksternal (*Counterpart*);
- Pedoman Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi;
- Pedoman Penunjukan Auditor Eksternal.

b. Prosedur:
- Prosedur Audit Internal;
- Prosedur Pemantauan Status Tindak Lanjut;
- Prosedur Audit Khusus;
- Prosedur Penyusunan PKPT;
- Prosedur Kearsipan SPI;
- Prosedur Audit Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan;
- Prosedur Evaluasi SPIP;
- Prosedur Penilaian Mandiri (Control Self-Assessment);
- Prosedur Pengadaan Bersama Jasa KAP.

c. Buku Ketentuan Lanjutan
- Buku Ketentuan Lanjutan Audit Operasional;
- Buku Ketentuan Audit Internal Berbasis Risiko;
- Buku Ketentuan Lanjutan Pendampingan Audit Eksternal (Counterpart);
- Buku Ketentuan Lanjutan Penyusunan Laporan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
- Buku Ketentuan Lanjutan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan;
- Buku Ketentuan Lanjutan Tata Kelola TI.

d. Kebijakan Internal
- Syarat Kompetensi per Penugasan;
- Mekanisme Review Berjenjang;
- Jabatan Fungsional;
- Jenjang Karir SPI;
- Audit Berbasis Komputer;
- Fungsi Konsultasi;
- Komunikasi Komite Audit;
- Pelaporan Informasi Biaya.

- Guidelines for Assistance to External Audits (Counterpart);
- Information Technology Governance Evaluation Guidelines;
- Guidelines for the appointment of external auditors.

b. Procedure:
- Internal Audit Procedures;
- Follow-up Status Monitoring Procedures;
- Special Audit Procedures;
- PKPT procedures;
- SPI Archive Procedures;
- Internal Control Audit Procedures for Financial Reports;
- SPIP Evaluation Procedure;
- Self-Assessment Procedure;
- KAP Services Procurement Procedures.

c. Advanced Terms Book
- Book of Advanced Conditions for Operational Audit;
- Risk Based Internal Audit Provisions Book;
- Advanced Provisions Book for External Audit Assistance (Counterpart);
- Advanced Provisions Book for Preparing Internal Audit Unit (SPI) Reports;
- Book of Advanced Terms and Conditions for Company Internal Control Systems;
- Book of Advanced Terms of IT Governance.

d. Internal Policy
- Competency Requirements per Assignment;
- Tiered Review Mechanism;
- Functional;
- SPI Career Path;
- Computer Based Audit;
- Consultation Function;
- Audit Committee Communication;
- Cost Information Reporting.

VISI DAN MISI

Visi
Menjadi mitra tepercaya dan profesional dalam mendukung pencapaian kinerja unggul Perusahaan.

Misi
1. Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pelaksanaan assurance dan konsultasi yang berbasis risiko, objektif, dan independen.
2. Meningkatkan harmonisasi dan sinergi fungsi internal audit antara Perusahaan dan Anak Perusahaan serta Eksternal Audit.
3. Meningkatkan kompetensi personil secara berkelanjutan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

VISION AND MISSION

Vision
Become a trusted and professional partner in supporting the Company's achievement of superior performance.

Mission
1. Provide added value to the Company through the implementation of risk-based, objective and independent assurance and consultation.
2. Increasing harmonization and synergy of the internal audit function between the Company and its Subsidiaries as well as External Audit.
3. Continuously improve personnel competency and optimize the use of information technology.

PERSYARATAN KEAHLIAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL

SPI merupakan unit kerja yang memiliki fungsi khusus, sehingga perlu adanya standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya seperti kompetensi dalam bidang audit, manajemen risiko, administrasi, akuntansi & keuangan dan manajemen Perusahaan.

Untuk menghasilkan personel SPI yang kompeten dan menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan PI Group, maka auditor SPI PTPI harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan yang relevan dengan tugas yang dijalankan;
4. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal dan manajemen risiko;
6. Menjaga kerahasiaan data/informasi perusahaan terkecuali apabila informasi tersebut harus diungkapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesinya secara terus-menerus;
8. Kepala SPI, VP, dan Ketua Tim Audit memiliki sertifikasi audit internal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun berdasarkan Risk That Matter (RTM) konsolidasi, risk register, hasil audit eksternal/internal, Arahan Direksi dan Dewan Komisaris c.q. Komite Audit, usulan unit kerja, serta pertimbangan lainnya yang diperlukan;

2. Melakukan kegiatan assurance yang meliputi audit kepatuhan, audit keuangan, dan audit operasional serta evaluasi atas keekonomisan, efektivitas dan efisiensi kegiatan di seluruh unit kerja Perusahaan serta Anak Perusahaan dan afiliasi yang bernilai strategis berdasarkan standar yang berlaku dengan praktik terbaik;
3. Melakukan kegiatan konsultasi (*advisory services*) kepada seluruh unit kerja Perusahaan baik diminta atau tidak diminta untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Oleh karenanya, jasa advis merupakan kegiatan

SKILLS AND PROFESSIONAL DUE CARE REQUIREMENTS

SPI is a work unit that has a special function, so it is necessary to have certain competency standards that must be met, including competencies in the fields of audit, risk management, administration, accounting & finance and company management.

To produce competent SPI personnel and support the successful implementation of supervisory functions within the PI Group, PTPI SPI auditors must meet the following qualifications:

1. Have integrity and professional, independent, honest and objective behavior in carrying out their duties;

2. Have knowledge and experience of audit techniques and scientific disciplines relevant to their field of work;

3. Have knowledge of laws and regulations relevant to the tasks being carried out;

4. Have the skills to interact and communicate both verbally and in writing effectively;
5. Understand the principles of good corporate governance, internal control and risk management;
6. Maintain the confidentiality of company data/information unless the information must be disclosed based on applicable regulations;
7. Willing to continuously improve their knowledge, skills and professional abilities;
8. Head of SVP, VP, and Audit Team Leader have internal audit certification.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES

The description of SPI's duties and responsibilities as determined based on the Internal Audit Charter is as follows:

1. Prepare and implement the Annual Supervision Work Program (PKPT). PKPT is prepared based on consolidated Risk That Matter (RTM), risk register, external/internal audit results, Directions from the Board of Directors and Board of Commissioners c.q. Audit Committee, work unit proposals, and other necessary considerations;
2. Carrying out assurance activities which include compliance audits, financial audits and operational audits as well as evaluation of the economics, effectiveness and efficiency of activities in all work units of the Company as well as Subsidiaries and affiliates with strategic value based on applicable standards and best practices;
3. Carrying out consulting activities (advisory services) to all Company work units, whether requested or not, to provide added value to the Company and improve company performance without replacing management responsibilities. Therefore, advice services are facilitation activities, not guarantees, which include

fasilitasi bukan penjaminan, yang meliputi pemberian pendampingan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat;
4. Melakukan evaluasi dan memberikan opini atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Teknologi Informasi;
5. Melakukan koordinasi dengan audit eksternal atau pengawasan fungsional lainnya seperti KAP, BPK-RI, BPKP, dan auditor/assessor eksternal lainnya, serta mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi Perusahaan untuk kebutuhan tersebut;
6. Melakukan evaluasi pengembangan sumber daya dan standardisasi infrastruktur SPI di lingkungan PI Group;
7. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan audit eksternal serta keputusan dan arahan RUPS Perusahaan oleh Pemegang Saham (KBUMN);
8. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direksi yang relevan;
9. Melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit;
10. Sebagai mitra kerja Komite Audit, auditor eksternal, asesor eksternal dan SPI Anak Perusahaan;
11. Melaksanakan penugasan adhoc sesuai permintaan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
12. Melaksanakan audit khusus berdasarkan pengembangan hasil audit dan permintaan Direksi.

providing assistance, reviewing system development, selfassessment of control and performance, counseling and providing advice;
4. Evaluate and provide opinions on the implementation of the Internal Control System, Risk Management and Information Technology Governance;
5. Coordinating with external audits or other functional supervision such as KAP, BPK-RI, BPKP, and other external auditors/assessors, as well as coordinating the provision of Company data and information for these needs;
6. Evaluate resource development and standardization of SPI infrastructure within the PI Group;
7. Monitoring the implementation of follow-up actions to the results of internal audits and external audits as well as decisions and directions of the Company's GMS by Shareholders (Ministry of SOE);
8. Report the results of supervision to the President Director and relevant Directors;
9. Report the results of supervision to the Board of Commissioners c.q. Audit Committee;
10. As a working partner of the Audit Committee, external auditors, external assessors and SPI Subsidiaries;
11. Carry out ad hoc assignments as requested by the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
12. Carrying out special audits based on the development of audit results and requests from the Board of Directors.

Sedangkan wewenang SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:
1. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh data, dokumen, informasi, dan sumber daya dari Perusahaan serta Anak Perusahaan dan Perusahaan afiliasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, dan pendekatan audit sesuai dengan profesi dan standar audit intern;
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan seluruh proses bisnis dan unit kerja Perusahaan, Anak Perusahaan dan afiliasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Memberikan pendapat, rekomendasi, dan saran-saran perbaikan kepada Direksi, SEVP, dan para pejabat Kompartemen, Departemen, dan Tim Adhoc Perusahaan serta Anak Perusahaan, baik diminta atau tidak diminta, dalam hal mengamankan harta dan kekayaan korporat;
5. Dapat meminta surat representasi kepada auditee atas keabsahan dan kelengkapan dokumen dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan penugasan pengawasan;
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
7. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta Unit Kerja Perusahaan;

Meanwhile, SPI's authority as determined based on the Internal Audit Charter is as follows:
1. Have unlimited access to all data, documents, information and resources from the Company as well as its Subsidiaries and affiliated Companies to carry out its duties and authority;
2. Determine the scope, methods, methods, techniques, strategies and audit approaches in accordance with the profession and internal audit standards;
3. Supervise the activities of all business processes and work units of the Company, Subsidiaries and affiliates in accordance with applicable rules and regulations;
4. Provide opinions, recommendations and suggestions for improvement to the Board of Directors, SEVP, and officials of Compartments, Departments and Ad Hoc Teams of the Company and Subsidiaries, whether requested or unsolicited, in terms of safeguarding corporate property and assets;
5. Can request a letter of representation from the auditee regarding the validity and completeness of the documents and supporting information required in the implementation of the supervisory assignment;
6. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee;
7. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee and Company Work Units;

8. Dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Unit Kerja di lingkungan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afilisasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terintegrasi yang dijalankan melalui koordinasi dengan masingmasing SPI Anak Perusahaan yang terkait;
9. Dapat meminta bekerja sama dan melakukan koordinasi pengawasan dengan SPI Anak Perusahaan dan afiliasi;
10. Melakukan koordinasi dengan auditor/assesor eksternal;
11. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai internal perusahaan maupun dari pihak luar perusahaan, dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
12. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara;
13. Dapat melakukan kegiatan digital forensik di Perusahaan serta Anak Perusahaan dan afiliasi sesuai dengan governance yang berlaku.

8. Can coordinate and communicate with the Board of Commissioners, Audit Committee and Work Units within Subsidiaries and Affiliated Companies in the context of implementing integrated supervision which is carried out through coordination with each SPI of the relevant Subsidiaries;
9. Can request to cooperate and coordinate supervision with SPI Subsidiaries and affiliates;
10. Coordinate with external auditors/assessors;
11. Request or obtain assistance from internal company employees or parties outside the company, in the context of carrying out supervision;
12. Participate in strategic meetings without having voting rights;
13. Can carry out digital forensic activities in the Company as well as Subsidiaries and affiliates in accordance with applicable governance.

INDEPENDENSI

Sebagai pemeriksaan internal, SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kebebasan bertindak (independen) secara objektif.

1. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam Perusahaan seperti manajemen dan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum;
3. Dalam pelaksanaan tugas audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun unit kerja yang diperiksa, dengan tetap menjunjung teguh kode etik yang telah ditetapkan.

INDEPENDENCE

As an internal audit, SPI in carrying out its duties and functions has the freedom to act (independently) objectively.

1. Not taking sides in the interests of parties in the Company such as management and Commissioners, either directly or indirectly;
2. Carrying out audits in accordance with generally accepted internal audit rules and principles;
3. In carrying out audit duties, free yourself from all personal interests and those of the work unit being examined, while still strictly upholding the established code of ethics.

RAPAT SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kebijakan Rapat

1. SPI PTPI secara bulanan melaksanakan rapat monitoring kinerja SPI dengan Komite Audit dengan pembahasan antara lain progres pelaksanaan audit, progres penyelesaian tindak lanjut dan isu-isu strategis;
2. Rapat bersama Direksi dilakukan secara insidentil, namun SPI rutin menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal setiap bulan dan menyampaikan laporan kinerja konsolidasi SPI Pupuk Indonesia Grup setiap triwulan.

INTERNAL AUDIT UNIT MEETING

Meeting Policy

1. SPI PTPI holds monthly SPI performance monitoring meetings with the Audit Committee to discuss, among other things, the progress of audit implementation, progress in completing followup actions and strategic issues;
2. Meetings with the Board of Directors are held incidentally, but SPI routinely submits follow-up monitoring reports on internal and external audit results every month and submits consolidated performance reports of the SPI Pupuk Indonesia Group every quarter.

Frekuensi Rapat
Meeting Frequency

Keterangan Description	Rapat dengan Meeting with		
	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komite Audit Audit Committee
Frekuensi Rapat Meeting Frequency	1 kali/bulan 1 time/month	1 kali/bulan 1 time/month	1 kali/bulan 1 time/month

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perusahaan mengikutsertakan Satuan Pengawasan Intern dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT COMPETENCY

The Company involves the Internal Audit Unit in competency development activities which are carried out through various training and education with funding being the full responsibility of the Company. The list of training and competency improvement activities that the Internal Audit Unit will participate in throughout 2024 is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2024
Competency Development Program in 2024

Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
QIA – Tingkat Dasar QIA - Basic Level	YPIA	4
Qualified Internal Auditor (QIA) (Tahap I) Qualified Internal Auditor (QIA) (Phase 1)	YPIA	1
Professional Internal Auditor Professional Internal Auditor	PIA	1
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	CRMS	2

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2024

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT UNIT DUTIES IN 2024

Ringkasan Realisasi Kinerja
Summary of Performance Realization

Uraian Description	PKPT Program Audit PKPT Audit Program	Realisasi Realization	%
Assurance Assurance	20	23	115
Konsultasi Consultancy	6	18	300
Counterpart Counterpart	16	39	244
Pengembangan & Penguatan Infrastruktur Infrstructure Development & Strengthening	4	10	250

Realisasi kegiatan assurance selama tahun 2024, yaitu:

1. Audit Atas Perhitungan HPP Subsidi Tahun Anggaran 2023 Year End
2. Evaluasi P3DN Triwulan IV 2023
3. Evaluasi P3DN Triwulan I 2024
4. Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan Trading PIN
5. Evaluasi P3DN Triwulan II 2024
6. Joint Audit kegiatan operasional di UPP Semarang
7. Evaluasi P3DN Semester I 2024 Format BPKP
8. Audit atas Sentralisasi Pemasaran Non Subsidi (Retail)
9. Joint Audit Penyaluran Pupuk Bersubsidi Wilayah Jawa Tengah
10. Monitoring Tindak Lanjut terkait Pengelolaan PSO pada periode Triwulan II 2024
11. Evaluasi P3DN Portal BUMN TW IV Tahun 2024
12. Joint Audit SPI PTPI bersama dengan SPI PT PKG atas Penyaluran Pupuk bersubsidi pada rayon PT PKG di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
13. Penilaian Risiko Investigasi atas Kegiatan Trading Batu Bara dan Barang Tambang Lainnya di PTPI
14. Telaah atas hasil Audit Internal dan Eksternal terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 di PT Pupuk Indonesia Pangan
15. Joint Audit Penyaluran dan Distribusi Pupuk Subsidi di Wilayah Jawa Timur
16. Joint Audit Penyaluran dan Distribusi Pupuk Subsidi di Wilayah Jawa Barat & Banten
17. Joint Audit Penyaluran Pupuk Subsidi di Wilayah Aceh & Sumatra Utara
18. Audit Perhitungan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024
19. Telaah atas hasil Audit Internal dan Eksternal terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 di PT Pupuk Indonesia Pangan
20. Joint Audit Penyaluran dan Distribusi Pupuk Subsidi di Wilayah Jawa Timur
21. Joint Audit Penyaluran dan Distribusi Pupuk Subsidi di Wilayah Jawa Barat & Banten
22. Joint Audit Penyaluran Pupuk Subsidi di Wilayah Aceh & Sumatra Utara
23. Audit Perhitungan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024

Realisasi kegiatan konsultansi tahun 2024, yaitu:

1. Konsultansi Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan dan Prosedur Self-Assesment Kepatuhan
2. Aksi Korporasi Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Gedung Kalibata
3. Konsultansi Permohonan Persetujuan Kerja Sama Sewa Pendayagunaan Aset PT Petrokimia Gresik dengan PTPI

Implementation of assurance activities during 2024, namely:

1. Audit of Subsidy Cost Calculation for Fiscal Year 2023 Year End
2. Evaluation of P3DN for Quarter IV 2023
3. Evaluation of P3DN for Quarter I 2024
4. Specific Purpose Audit on PIN Trading Activities
5. Evaluation of P3DN for the Second Quarter of 2024
6. Joint Audit of Operational Activities at the Semarang UPP
7. Evaluation of P3DN for the First Semester of 2024 in BPKP Format
8. Audit of the Centralization of Non-Subsidy Marketing (Retail)
9. Joint Audit of Subsidized Fertilizer Distribution in Central Java Region
10. Monitoring of Follow-up Actions Related to PSO Management in the Second Quarter of 2024
11. Evaluation of the P3DN Portal for State-Owned Enterprises in the Fourth Quarter of 2024
12. Joint SPI Audit of PTPI and SPI of PT PKG on the Distribution of Subsidized Fertilizer in the PT PKG Region in East Java, Central Java, and West Java
13. Risk Assessment of Coal Trading and Other Mining Commodities at PTPI
14. Review of Internal and External Audit Results on the 2022 Financial Statements of PT Pupuk Indonesia Pangan
15. Joint Audit of the Distribution and Disbursement of Subsidized Fertilizers in the East Java Region
16. Joint Audit of the Distribution and Disbursement of Subsidized Fertilizers in the West Java and Banten Regions
17. Joint Audit of the Distribution of Subsidized Fertilizers in the Aceh and North Sumatra Regions
18. Audit of the Calculation of the Cost of Sales for Subsidized Fertilizers for the 2024 Fiscal Year
19. Review of Internal and External Audit Results on the 2022 Financial Statements of PT Pupuk Indonesia Pangan
20. Joint Audit of the Distribution and Disbursement of Subsidized Fertilizers in the East Java Region
21. Joint Audit of the Distribution and Disbursement of Subsidized Fertilizers in the West Java and Banten Regions
22. Joint Audit of the Distribution of Subsidized Fertilizers in the Aceh and North Sumatra Regions
23. Audit of the Calculation of the Cost of Sales for Subsidized Fertilizers for the 2024 Fiscal Year

Realization of consultancy activities in 2024, namely:

1. Consultancy on the Preparation of Compliance Management System Guidelines and Self-Assessment Procedures
2. Corporate Action for the Write-off and Transfer of Fixed Assets of Land and Buildings in Kalibata
3. Consultation on the Request for Approval of a Cooperation Agreement for the Lease and Utilization of Assets between PT Petrokimia Gresik and PTPI

4. Reviu Draft Pedoman Penyelesaian Piutang Bermasalah pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
5. Reviu Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan

6. Konsultansi atas Rencana Kerja Sama Sewa Aset Gedung Kalibata dan Gedung Kemanggisan
7. Konsultansi atas Rencana Kerja Sama Sewa Gudang Nganjuk
8. Konsultansi Kerjasama Sewa Aset 17 Kantor PPD PSP dengan PTPI
9. Konsultansi atas Laporan Pengaduan LSM
10. Reviu Draft Pedoman Etika & Perilaku (*Code of Conduct*) PTPI
11. Reviu Rencana Pembentukan Unit Shared Service
12. Reviu Penilaian Komposit Manajemen Risiko
13. Konsultansi atas Rencana Inbreng Aset Kalibata-RPP Rekind
14. Konsultansi atas Pelaksanaan Program Nature Based Solutions
15. Reviu Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
16. Penelaahan atas aduan dugaan penyimpangan Pengadaan
17. Verifikasi Aduan Melalui *Whistleblowing System* (WBS)

18. Verifikasi aduan melalui *Whistleblowing System* (WBS) case 2

Realisasi kegiatan counterpart tahun 2024, yaitu:
1. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Perhitungan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Tahun 2023
2. BPK RI AKN IV-Pemeriksaan Kepatuhan dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk bersubsidi Tahun 2023 wilayah DKI Jakarta, Aceh, KalBar, Sulsel, Jabar dan Jatim
3. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Kepatuhan dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2020, 2021 dan 2022 PKT
4. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Kepatuhan dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2020, 2021 dan 2022 Pilog
5. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Kepatuhan dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2020, 2021 dan 2022 PIM
6. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Kepatuhan dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2020, 2021 dan 2022 PKG
7. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Kepatuhan dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2020, 2021 dan 2022 PKC
8. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Restrukturisasi Perusahaan dan Manajemen Proyek Tahun 2021, 2022 dan Semester I 2023 pada PT

4. Review of the Draft Guidelines for the Settlement of Problem Receivables under the Micro and Small Business Financing Program (PUMK)
5. Review of Guidelines for Conflict of Interest Management
6. Consultation on the Plan for the Lease of the Kalibata and Kemanggisan Buildings
7. Consultation on the Plan for the Lease of the Nganjuk Warehouse
8. Consultation on the Lease of 17 PPD PSP Offices with PTPI
9. Consultation on the NGO Complaint Report
10. Review of the Draft Code of Conduct for PTPI

11. Review of the Plan to Establish a Shared Service Unit
12. Review of the Composite Risk Management Assessment
13. Consultation on the Plan to Contribute Assets from Kalibata-RPP Rekind
14. Consultation on the Implementation of the Nature-Based Solutions Program
15. Review of Integrated Governance Guidelines
16. Review of Alleged Procurement Irregularities

17. Verification of Complaints Through the Whistleblowing System (WBS)
18. Verification of complaints through the Whistleblowing System (WBS) case 2

Realization of counterpart activities in 2024, namely:
1. BPK RI AKN VII-Audit of the Financial Statements of the Subsidy Expenditure Budget (BA 999.07) Calculation of the Cost of Sales of Subsidized Fertilizer in 2023

2. BPK RI AKN IV-Audit of Compliance and Management of the Distribution of Subsidized Fertilizer for the Year 2023 in the Jakarta Special Capital Region, Aceh, West Kalimantan, South Sulawesi, West Java, and East Java
3. BPK RI AKN VII-Audit of Compliance and Management of Revenue, Expenses, and Investments for the Years 2020, 2021, and 2022 PKT
4. BPK RI AKN VII-Compliance Audit and Management of Revenue, Expenses, and Investments for the Years 2020, 2021, and 2022 Pilog
5. BPK RI AKN VII-Compliance Audit and Management of Revenue, Expenses, and Investments for the Years 2020, 2021, and 2022 PIM
6. BPK RI AKN VII-Compliance Audit and Management of Revenue, Expenses, and Investments for the Years 2020, 2021, and 2022 PKG
7. BPK RI AKN VII-Compliance Audit and Management of Revenue, Expenses, and Investments for the Years 2020, 2021, and 2022 PKC
8. BPK RI AKN VII-Detailed Audit of the Performance of Corporate Restructuring and Project Management for the Years 2021, 2022, and the First Half of 2023 at PT

Rekayasa Industri dan Instansi Terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Jepang

9. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Kepatuhan dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2022 dan 2023 PSP
10. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan beban Operasional serta Pelaksanaan Kegiatan Sentralisasi Pemasaran Informasi Tahun 2021 s.d 2023 pada PTPI
11. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Kebijakan Holdingisasi BUMN
12. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja PTPI dan Anak Perusahaan Pupuk (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda)
13. BPK RI AKN VII-Pemeriksaan Terinci atas Kinerja PTPI dan Anak Perusahaan Pupuk (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda)
14. Itjen Kemenkeu-Ketepatan Pembebanan HPP Subsidi
15. Itjen Kementan-Verifikasi Sampel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI AKN IV atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2020 terkait stok opname dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2022 dan 2023 terkait kelebihan salur
16. BPKP-Evaluasi atas Efisiensi Industri Pupuk Nasional
17. BPKP-Reviu atas persiapan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) Kawasan industri Fak Fak PT Pupuk Kalimantan Timur
18. BPKP-Reviu atas Pelaksanaan Project Pioneer PT PKT
19. BPKP-Reviu atas persiapan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) Kawasan industri Fak Fak PT Pupuk Kalimantan Timur
20. BPKP-Penilaian ICORPAX
21. BPKP-Evaluasi Tata Kelola Pupuk Nasional
22. BPKP-Reviu terkait Tarif Pemanfaatan Tanah Reklamasi PT PKG
23. BPKP-Evaluasi atas Diversifiksi Energi pada PTPI
24. BPKP-Evaluasi atas Transisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon pada PTPI
25. BPKP-Reviu HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 dan Prognosa HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2025
26. BPKP-Permohonan reviu atas Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gudang Urea Ekspor Kapasitas 20.000 Ton PT PKG
27. BPKP-Permohonan pendampingan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat PT PKC
28. BPKP-Evaluasi atas Efisiensi Industri Pupuk Nasional
29. BPKP-Pendampingan reviu Data Penerimaan Pupuk Bersubsidi

Rekayasa Industri and Related Agencies in Jakarta, East Java, West Nusa Tenggara, East Kalimantan, and Japan

9. BPK RI AKN VII-Compliance Audit and Management of Revenue, Expenses, and Investments for the Years 2022 and 2023 PSP
10. BPK RI AKN VII-Compliance Audit on the Management of Operational Expenses and the Implementation of Centralized Marketing Activities for the Years 2021 to 2023 at PTPI
11. BPK RI AKN VII-Performance Audit on the Effectiveness of State-Owned Enterprise Holding Company Policies
12. BPK RI AKN VII-Preliminary Audit on the Performance of PTPI and its Fertilizer Subsidiaries (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, and PT Pupuk Iskandar Muda)
13. BPK RI AKN VII-Detailed Audit of the Performance of PTPI and its Fertilizer Subsidiaries (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, and PT Pupuk Iskandar Muda)
14. Itjen Kemenkeu-Accuracy of Subsidy HPP Allocation
15. Inspectorate General of the Ministry of Agriculture-Verification of Follow-Up Actions on the Audit Findings (TLHP) of the Indonesian Audit Board (BPK-RI) AKN IV on the Financial Statements of the Subsidy Expenditure Budget Section (BA 999.07) for the Year 2020 regarding inventory counts and the Audit Findings Report (LHP) of the Indonesian Audit Board (BPK RI) for the Years 2022 and 2023 regarding excess disbursements
16. BPKP-Evaluation of the Efficiency of the National Fertilizer Industry
17. BPKP-Review of the preparation for the implementation of the national strategic project (PSN) for the Fak Fak industrial area of PT Pupuk Kalimantan Timur
18. BPKP-Review of the implementation of the Pioneer Project of PT PKT
19. BPKP-Review of the preparation for the implementation of the national strategic project (PSN) for the Fak Fak industrial area of PT Pupuk Kalimantan Timur
20. BPKP-ICORPAX Assessment
21. BPKP-Evaluation of National Fertilizer Governance
22. BPKP-Review of Land Reclamation Utilization Tariffs at PT PKG
23. BPKP-Evaluation of Energy Diversification at PTPI
24. BPKP-Evaluation of the Transition to Low-Carbon Development at PTPI
25. BPKP-Review of Subsidized Fertilizer HPP for 2024 and Forecast of Subsidized Fertilizer HPP for 2025
26. BPKP-Request for review of the planning and implementation of the construction project for a 20,000-ton export urea warehouse at PT PKG
27. BPKP-Request for assistance in the construction of an NPK nitrate factory at PT PKC
28. BPKP-Evaluation of the efficiency of the national fertilizer industry
29. BPKP-Assistance in Reviewing Data on Subsidized Fertilizer Receipts

30. KAP-Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Pupuk Indonesia Grup Tahun Buku 2023
31. KAP-Pelaksanaan Audit Laporan Lainnya Pupuk Indonesia Grup Tahun Buku 2023
32. KAP-Audit KAP Audit Laporan Keuangan dan Laporan Lainnya Pupuk Indonesia Group 2024
33. Konsultan-Pendampingan (Counterpart) PT Deloitte Advis Indonesia dalam melakukan audit investigasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) pada periode tahun 2022
34. Konsultan-Pendampingan Diagnostik ICOFR
35. Konsultan-Tindaklanjut Diagnostik ICOFR
36. Konsultan-Pendampingan (counterpart) PT Alchemist Law Office sebagai Konsultan Eksternal dalam melakukan Penilaian Risiko Investigasi atas Kegiatan Trading Batu Bara dan Barang Tambang Lainnya di PTPI
37. Joint Counterpart Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja PTPI dan Anak Perusahaan Pupuk (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda) oleh BPK RI
38. Joint Counterpart Pendampingan verifikasi Kementan atas lebih salur petani 2020, 2022, 2023
39. Pendampingan reviu Data Penerimaan Pupuk Bersubsidi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam

Realisasi kegiatan pengembangan tahun 2024, yaitu:

1. Benchmarking terkait Fungsi SPI dan Tata Kelola ke Bank BRI
2. FGD Penguatan Peran SPI PI Group dalam Mengawal Capaian Perusahaan
3. Workshop Penilaian Kapabilitas SPI PI Group Berbasis IACM (Internal Audit Capability Model) oleh BPKP
4. Benchmarking dan Evaluasi Oprtimalisasi AMS (Audit Management System) ke Itjen Kementerian Keuangan
5. FGD Optimalisasi Pemanfaatan AMS SPI PI Group
6. FGD Asistensi Pemutakhiran Pedoman SPIP dan Pedoman Evaluasi SPIP PI Group
7. Workshop Percepatan Implementasi AMS SPI PI Group
8. Self Assessment berbasis IACM SPI PI Group
9. Konsinyering Finalisasi Laporan QA IACM SPI PI Group
10. FGD Pembangunan Infrastruktur Digital Forensic PI Group

30. KAP-Audit of the Consolidated Financial Statements of Pupuk Indonesia Group for the Fiscal Year 2023
31. KAP-Audit of Other Reports of Pupuk Indonesia Group for the Fiscal Year 2023
32. KAP-Audit of KAP Audit of Financial Statements and Other Reports of Pupuk Indonesia Group 2024
33. Consultant-Assistance (Counterpart) to PT Deloitte Advis Indonesia in conducting an investigative audit of the financial statements of PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) for the period of 2022
34. Consultant-Diagnostic Assistance for ICOFR
35. Consultant-Diagnostic Follow-up ICOFR
36. Consultant-Assistance (counterpart) to PT Alchemist Law Office as External Consultant in conducting an Investigative Risk Assessment on Coal Trading and Other Mining Commodities at PTPI
37. Joint Counterpart Preliminary Audit of the Performance of PTPI and its Fertilizer Subsidiaries (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, and PT Pupuk Iskandar Muda) by the Indonesian Audit Board (BPK RI)
38. Joint Counterpart Verification Assistance for the Ministry of Agriculture on additional farmer disbursements for 2020, 2022, and 2023
39. Assistance in reviewing data on the receipt of subsidized fertilizer conducted by the Financial and Development Supervision Agency, Directorate of Supervision of Food, Energy Management, and Natural Resources

Realization of development activities in 2024, namely:

1. Benchmarking related to SPI Functions and Governance to Bank BRI
2. FGD on Strengthening the Role of SPI PI Group in Monitoring Company Achievements
3. Workshop on SPI PI Group Capability Assessment Based on IACM (Internal Audit Capability Model) by BPKP
4. Benchmarking and Evaluation of AMS (Audit Management System) Optimization with the Inspectorate General of the Ministry of Finance
5. FGD on the Optimization of AMS SPI PI Group Utilization
6. FGD on Assistance in Updating SPIP Guidelines and SPIP Evaluation Guidelines for PI Group
7. Workshop on Accelerating the Implementation of AMS SPI PI Group
8. Self-Assessment Based on IACM SPI PI Group
9. Finalization of the QA Report for IACM SPI PI Group
10. FGD on the Development of Digital Forensic Infrastructure for PI Group

Audit Eksternal/ Akuntan Publik

External Audit/Public Accountant

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, audit juga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat perundang-undangan berlaku. Audit ini bertujuan untuk menyatakan pendapat, dalam semua hal yang material, apakah laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anggota Holding sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Dalam hal ini, Auditor Eksternal tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan demi menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan terhadap SAK di Indonesia.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan;
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI;

As part of the internal control system, audits are also carried out by a Public Accounting Firm that meets applicable statutory requirements. This audit aims to express an opinion, in all material respects, whether the consolidated financial statements of the Company and its Holding members comply with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

External auditors are not permitted to have conflicts of interest with the Company in order to ensure independence and quality of audit results. External Auditors are responsible for providing opinions on the suitability of the Company's Financial Reports to SAK in Indonesia.

COMPLIANCE WITH INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Management is responsible for presenting the Company's financial reports and complying with the SAK that apply in Indonesia as stipulated by the Indonesian Accountants Association (IAI) and the Decree of the Chairman of the Financial Institutions Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) which is now the Financial Services Authority (OJK) No. VIII.G.7, Attachment to Decree No. KEP-347/BL/2012, dated 25 June 2012 concerning Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Reports for Issuers or Public Companies.

EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS

1. Audits of the Company's financial reports are carried out in accordance with the professional standards of Public Accountants which include all audit procedures deemed necessary according to the circumstances;
2. Audit includes testing and evaluation of the internal control system, as well as examining, on a test basis, evidence that supports the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the financial statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI;

3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan;
4. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen;
5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

3. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts questions and answers to management regarding management statements presented in the financial reports;
4. Audits contain an inherent risk that there will be material errors and irregularities. If there is such a thing, KAP will convey it to management;

5. Management approves the KAP audit working paper for the Company to be reviewed by the relevant body or authority.

Audits are carried out based on the Professional Standards for Public Accountants published by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Indonesian Government, then the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Audit Agency (BPK).



Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan auditor eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan audit, Perusahaan selalu berupaya menciptakan komunikasi yang efektif antara Kantor Akuntan Publik dan manajemen PTPI, Entitas Anak, dan beberapa Cucu Perusahaan melalui aktivitas koordinasi yang mencakup kegiatan Eksternal Auditor yang diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui komunikasi seluruh unit kerja terkait dan melaksanakan pertemuan secara berkala, pendampingan ke unit kerja lainnya dalam Perusahaan dan SPI Entitas Anak, guna membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi Perusahaan dan KAP. Di samping itu, SPI PTPI juga bertanggung jawab membantu Komite Audit PTPI dalam melakukan evaluasi atas kinerja Kantor Akuntan Publik yang meliputi antara lain aspek pemahaman atas isu-isu yang dihadapi oleh Perusahaan.

Shareholders through the GMS have the authority to appoint an external auditor who will carry out an audit of the Company's financial reports.

In carrying out audits, the Company always strives to create effective communication between the Public Accounting Firm and the management of PTPI, Subsidiaries, and several Company Subsidiaries through coordination activities that include the activities of the External Auditor with the hope of achieving comprehensive and optimal audit results.

Coordination is carried out, among other things, through communication with all relevant work units and holding regular meetings, providing assistance to other work units within the Company and SPI Subsidiaries, to discuss matters deemed important to the Company and KAP. In addition, SPI PTPI is also responsible for assisting the PTPI Audit Committee in evaluating the performance of the Public Accounting Firm which includes, among other things, aspects of understanding the issues faced by the Company.

MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2024 didasarkan pada Keputusan RUPS Kinerja Tahun 2023 PT Pupuk Indonesia (Persero) KBUMN tanggal 22 Juli 2024 dengan berpedoman pada ketentuan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Adapun kronologis proses penetapan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagai auditor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja KAP Tahun Buku 2023 selanjutnya memberikan masukan dan usulan penetapan KAP kepada Pemegang Saham melalui Surat Dewan Komisaris Nomor S-055/KOM/PIHC/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Permohonan Penetapan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024 dan S-061/KOM/PIHC/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 perihal Perubahan Usulan Penetapan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024;
2. Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tersebut, Dewan Komisaris PTPI meminta kepada Direksi PTPI untuk menyiapkan tim Pengadaan Bersama Jasa Akuntan Publik Tahun Buku 2024 yang akan membantu proses penunjukan KAP melalui Surat Dewan Komisaris PTPI Nomor S-080/KOM/PIHC/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penunjukan KAP di Entitas Anak Perusahaan ditetapkan dalam RUPS masing-masing Entitas;
4. Proses pengadaan KAP dilakukan secara bersama untuk seluruh Entitas PI Group;
5. Dewan Komisaris PTPI merumuskan dan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 018/KEP.KOM/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 untuk kebutuhan pelaksanaan penunjukan KAP di lingkungan PI Group. Surat Keputusan tersebut menetapkan Tim Penanggung jawab dan Tim Pelaksanaan penetapan KAP yang melibatkan perangkat Dewan Komisaris di PTPI dan Entitas Anak;
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Pelaksanaan Audit ditandatangani sesuai prosedur yang ditetapkan di dalam prosedur penunjukan KAP yang diatur di dalam SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

MECHANISM FOR APPOINTING A PUBLIC ACCOUNTING FIRM

The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan to carry out an audit of the Company's Consolidated Financial Report, Financial Report on the Implementation of the Micro and Small Enterprise (UMK) Funding Program, and other reports for the 2023 financial year is based on the decision of PT's 2022 GMS Performance Pupuk Indonesia (Persero) ministry of SOE dated June 6, 2023, guided by the provisions of OJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

The chronology of the process of determining the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners Public Accounting Firm as external auditors is as follows:

1. The Board of Commissioners conducted an evaluation of the performance of the Public Accounting Firm (KAP) for the 2023 fiscal year and provided input and recommendations for the appointment of the KAP to the Shareholders through Board of Commissioners' Letter No. S-055/KOM/PIHC/V/2024 dated May 21, 2024, regarding the Request for the Appointment of Public Accounting Firm (KAP) Services for the 2024 Fiscal Year and S-061/KOM/PIHC/VI/2024 dated June 6, 2024, regarding the Change in the Proposal for the Appointment of Public Accounting Firm (KAP) for the 2024 Fiscal Year;
2. Based on the results of the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners of PTPI requested the Board of Directors of PTPI to prepare a Joint Procurement Team for Public Accounting Services for the 2024 Fiscal Year to assist in the appointment of KAP through Letter of the Board of Commissioners of PTPI Number S-080/KOM/PIHC/VIII/2024 dated August 22, 2024;
3. The appointment of the KAP for Subsidiary companies is determined in the respective General Meetings of Shareholders of each Subsidiary;
4. The procurement process for the KAP is conducted jointly for all entities within the PI Group;
5. The Board of Commissioners of PTPI formulates and issues Board of Commissioners' Decision Letter No. 018/KEP.KOM/VIII/2024 dated August 27, 2024, for the implementation of the appointment of the KAP within the PI Group. The Decision Letter establishes the Responsible Team and Implementation Team for the appointment of KAPs, involving the Board of Commissioners of PTPI and its Subsidiaries;
6. The Work Commencement Order (SPMK) and Audit Implementation Contract are signed in accordance with the procedures set forth in the KAP appointment procedures regulated in the Joint Decision of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris PTPI No. S-080/KOM/PIHC/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, Perusahaan telah menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Tahun Buku 2024. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Based on PTPI Board of Commissioners Letter No. S-080/KOM/PIHC/VIII/2024 dated August 22, 2024, the Company has appointed and appointed the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year. To guarantee the independence and quality of the audit results, The appointed External Auditor must not have a conflict of interest with the Company.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2024

PUBLIC ACCOUNTANT IN 2024

Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
Akuntan | Accountant	Heryanto
Tahun Audit | Audit Year	2024
Periode Penugasan Assignment Period	Ke-5 5th
Jasa Service	• Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (PI Grup) Tahun Buku 2024. Audit of the Consolidated Financial Statements of PI, Subsidiaries and Grand Subsidiaries (PI Group) for the 2024 Financial Year • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK untuk PTPI, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Rekayasa Industri Tahun Buku 2024. Audit of Financial Reports for the Implementation of the MSE Funding Program for PTPI, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur , PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Rekayasa Industri for the 2024 Financial Year.
Jasa Lainnya Other Service	1. Melaksanakan pengujian dan pelaporan atas kepatuhan PTPI dan Anak Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pengungkapan manajemen kepada KAP dan pengendalian internal tertentu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan "PSA No. 62: Audit Kepatuhan yang Diterapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah" yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. 2. Melakukan prosedur yang disepakati atas tingkat pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Direksi Kolegial dan Individu Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atas Konsolidasian PTPI dan Anak Perusahaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023. 3. Menerbitkan Laporan Management Letter atas Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk PTPI, Anak Perusahaan, dan Cucu Perusahaan. 4. Melakukan prosedur yang disepakati atas Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan dari: • RUPS RKAP tahun buku 2024 untuk PTPI dan PT Rekayasa Industri. • RUPS Laporan Kinerja Tahunan tahun buku 2023 untuk PTPI dan PT Rekayasa Industri. 5. Melakukan prosedur yang disepakati terkait tindak lanjut atas Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris di PTPI yang sifatnya strategis dan terukur periode Tahun Buku 2024. 6. Melakukan prosedur yang disepakati atas Paket Informasi dan Struktur Korporasi untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan ruang lingkup AUP. 7. Pelaporan Group Reporting ke BPK RI (SA 600). 1. Conduct testing and reporting on the compliance of PTPI and its Subsidiaries with applicable laws and regulations in accordance with management disclosures to the KAP and certain internal controls for the year ending December 31, 2024, in accordance with "PSA No. 62: Audit of Compliance Applied to Government Entities and Other Recipients of Government Financial Assistance" issued by the Indonesian Institute of Public Accountants. 2. Conduct agreed-upon procedures on the achievement level of Key Performance Indicators (KPIs) of the Collegial Board of Directors and Individual Directors for the year ended December 31, 2024, for the consolidated financial statements of PTPI and its Subsidiaries, in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023. 3. Issue a Management Letter Report on Internal Control for the year ending on December 31, 2024 for PTPI, Subsidiaries, and Sub-Subsidiaries. 4. Perform agreed procedures on the Follow-up to Decisions and Directives from: • The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on the 2024 Budget Plan for PTPI and PT Rekayasa Industri. • The AGMS on the 2023 Annual Performance Report for PTPI and PT Rekayasa Industri. 5. Carry out agreed procedures on follow-up to the Board of Commissioners' responses and suggestions at PTPI that are strategic and measurable for the 2024 fiscal year. 6. Carry out agreed procedures on the Information Package and Corporate Structure for the Ministry of State-Owned Enterprises within the scope of AUP. 7. Submit the Group Reporting to the Indonesian Audit Board (SA 600).
Biaya Cost	Rp21.200.000.000 (Diluar PPN | Exclude VAT)

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir
PTPI External Auditor in the Last 5 Years

Tahun Buku Year Book	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan** Accounting Name	**Opini** Opinion	**Lingkup Audit** Audit Scope	**Biaya (Rp)** Cost (Rp)	**Biaya Non Audit** Non-Audit Fee (Rp)
2024	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Heryanto No. Izin: AP.1784.	Wajar Tanpa Pengecualian Reasonable in all material respects	Perusahaan, 9 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Pupuk Indonesia Grup) Tahun Buku 2024. • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK untuk PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur , PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Rekayasa Industri Tahun Buku 2024. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perseroan. • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris. • Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN.	16.940.000.000	4.260.000.000
				The Company, 9 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial Statements of PI, Subsidiaries and Grand Subsidiaries (Pupuk Indonesia Group) for the 2024 Financial Year • Audit of Financial Reports for the Implementation of the MSE Funding Program for PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur , PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Rekayasa Industri for the 2024 Financial Year. • Audit of Compliance with Legislative Regulations and Internal Control. • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. • Review of the Evaluation Report on the Status of Follow-up to the Company's GMS Directions and the Board of Commissioners' directions. • Review of the Implementation of Agreed Procedures in Preparation for the Compilation of Aggregated Financial Information for the Ministry of SOE.		

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir
PTPI External Auditor in the Last 5 Years

Tahun Buku Year Book	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accounting Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya (Rp) Cost (Rp)	Biaya Non Audit Non-Audit Fee (Rp)
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Toto Harsono No. Izin: AP.1122	Wajar Tanpa Pengecualian Reasonable in all material respects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (PI Grup) Tahun Buku 2023. • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2023. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan. • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris. • Management Letter. • Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN.	21.200.000.000 (exc. PPN)	5.980.000 (exc. PPN)
				The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial Statements of PTPI, Subsidiaries and Subsidiaries (PI Group) for the 2023 Fiscal Year. • Audit of the Financial Report for the Implementation of the PTPI UMK Funding Program for the 2023 Fiscal Year. • Audit of Compliance with Legislative Regulations and Internal Control. • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. • Review of the Status Evaluation Report Follow-up to the Company's GMS Directions and the Board of Commissioners' directions. • Management Letter. • Review of the Implementation of Agreed Procedures in Preparation for the Compilation of Aggregated Financial Information for the Ministry of SOE.		

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir
PTPI External Auditor in the Last 5 Years

Tahun Buku Year Book	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan** Accounting Name	**Opini** Opinion	**Lingkup Audit** Audit Scope	**Biaya (Rp)** Cost (Rp)	**Biaya Non Audit** Non-Audit Fee (Rp)
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Toto Harsono	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (PI Grup) Tahun Buku 2022; • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2022; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal; • Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan; • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris; • Management Letter; • Reviu atas penerapan prosedur yang disepakati dalam rangka persiapan penyusunan informasi keuangan agregasi Kementerian BUMN.	20.700.000.000 (exc. PPN)	USD2.000 & Rp6.315.000.000
				The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial Statements of PTPI, Subsidiaries and Subsidiaries (PI Group) for the 2022 Fiscal Year; • Audit of the Financial Report for the Implementation of the PTPI UMK Funding Program for the 2022 Fiscal Year; • Audit of Compliance with Legislative Regulations and Internal Control; • Review of the Company Performance Evaluation Report; • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report; • Review of the Evaluation Report on the Status of Follow-up to the Company's GMS Directions and the Board of Commissioners' directions; • Management Letter; • Review of the implementation of agreed procedures in preparation for the compilation of aggregate financial information for the Ministry of SOE.		

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir
PTPI External Auditor in the Last 5 Years

Tahun Buku Year Book	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accounting Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya (Rp) Cost (Rp)	Biaya Non Audit Non-Audit Fee (Rp)
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Izin: 241/ KM.1/2015	Toto Harsono No. Izin: AP.1122	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (PI Grup) Tahun Buku 2021; • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2021; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Internal; • Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan; • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris; • Management Letter; • Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN.	21.350.000.000 (exc. PPN)	1.850.000.000 (exc. PPN)
				The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial Statements of PTPI, Subsidiaries and Subsidiaries (PI Group) for the 2021 Fiscal Year; • Audit of the Financial Report for the Implementation of the PTPI UMK Funding Program for the 2021 Fiscal Year; • Audit of Compliance with Legislative Regulations and Internal Control; • Review of the Company Performance Evaluation Report; • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report; • Review of the Evaluation Report on the Status of Follow-up to the Company's GMS Directions and the Board of Commissioners' directions; • Management Letter; • Review of the Implementation of Agreed Procedures in Preparation for the Compilation of Aggregated Financial Information for the Ministry of SOE.		

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir
PTPI External Auditor in the Last 5 Years

Tahun Buku Year Book	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan** Accounting Name	**Opini** Opinion	**Lingkup Audit** Audit Scope	**Biaya (Rp)** Cost (Rp)	**Biaya Non Audit** Non-Audit Fee (Rp)
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Izin: KEP-241/KM.1/2015	Toto Harsono No. Izin: AP.1122	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan; • Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Internal; • Reviu Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian Key Performance Indicator (KPI); • Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris; • Management Letter The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: • Financial Report Audit; • Review of Company Performance Evaluation Reports; • Audit of Compliance with Legislative Regulations and Internal Control; • Review the Key Performance Indicator (KPI) Achievement Level Assessment Report; • Audit of Partnership and Community Development Program Financial Reports; • Review of the Evaluation Report on the Status of Follow-up to the Company's GMS Directions and the Board of Commissioners' directions; • Management Letter.	19.500.000.000 (exc. PPN)	1.290.000.000 (exc.PPN)

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan upaya untuk mendukung manajemen meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sistem tersebut demi menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Perusahaan.

Pengendalian internal dibangun untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Entitas Anak. Tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki pedoman umum Sistem Pengendalian Internal melalui Dokumen No. PI-SPIPR-007 tanggal 29 Desember 2017 tentang Prosedur Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP). Dokumen tersebut telah disahkan bersama-sama oleh Direktur Utama, Direktur Keuangan, SVP Satuan Pengawasan Intern dan VP Pengawasan Keuangan. Pedoman ini memberikan gambaran tentang penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkup Perusahaan yang merupakan prosedur dengan tujuan untuk mengatur dan menjelaskan rangkaian aktivitas pelaksanaan evaluasi penerapan SPIP dan menilai tingkat kecukupan efektivitas penerapannya.

Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian assertion mengenai efektivitas pengendalian internal dan memberikan keyakinan kepada stakeholder lain bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah cukup memadai dalam mencapai tujuan. Prosedur ini juga menjelaskan langkah-langkah dan tahapan dalam mengevaluasi penerapan SPIP oleh Satuan Pengawasan Intern Perusahaan yang melingkupi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Implementation of the Internal Control System is an effort to support management in improving the Company's compliance with applicable laws and regulations. This system ensures the availability of correct, complete and timely financial reports and management reports, as well as meeting the efficiency and effectiveness of the Company's business activities.

Internal control is built to improve the integrated control function (integrated control system), both between the Company and Subsidiaries. The aim is to ensure that operational activities are carried out well and can increase added value for the Company through the effective implementation of risk management and the principles of Good Corporate Governance.

COMPANY INTERNAL CONTROL SYSTEM GUIDELINES

The Company has general Internal Control System guidelines through Document No. PI-SPIPR-007 dated 29 December 2017 concerning Evaluation Procedures for the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP). This document has been ratified jointly by the President Director, Finance Director, SVP Internal Audit Unit and VP Financial Supervision. This guideline provides an overview of the implementation of the Internal Control System within the Company, which is a procedure with the aim of organizing and explaining a series of activities for evaluating the implementation of SPIP and assessing the level of adequacy of the effectiveness of its implementation.

Evaluation of the implementation of the Company's Internal Control System is carried out to provide confidence to the Board of Directors in providing assertions regarding the effectiveness of internal control and to provide confidence to other stakeholders that the implementation of the Company's Internal Control System is sufficient to achieve its objectives. This procedure also explains the steps and stages in evaluating the implementation of SPIP by the Company's Internal Audit Unit which includes preparation, implementation and reporting activities.

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan Kesesuaian terhadap Framework Internasional

Company Internal Control System and Compliance with International Frameworks

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah sesuai dengan Internal Control Integrated Framework yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). Standar internasional itu dipublikasikan pada tahun 2013 dan berisi 5 (lima) komponen pengendalian internal, sebagai pengembangan dari COSO-Internal Control Framework yang dipublikasikan pada tahun 1992.

The Company's Internal Control System is in accordance with the Internal Control Integrated Framework developed by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). This international standard was published in 2013 and contains 5 (five) internal control components, as a development of the COSO-Internal Control Framework which was published in 1992.

Adapun 5 (lima) komponen pengendalian internal tersebut adalah:

The 5 (five) components of internal control are:

No	Komponen Component	Uraian Description
1	Lingkungan Pengendalian Control Environment	Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu perusahaan dan mempengaruhi kesadaran personal tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh elemen perusahaan. Terdapat 5 (lima) prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam Perusahaan untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu: 1. Direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika; 2. Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal; 3. Manajemen dengan pengawasan Direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan; 4. Perusahaan menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan; 5. Perusahaan meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan. The control environment creates an atmosphere of control within a company and influences personal awareness of control. The control environment is the foundation for all internal control components that form discipline and structure. The control environment is defined as a set of standards, processes and structures that provide the basis for implementing internal control across all elements of the company. There are 5 (five) principles that must be upheld or implemented within the Company to support the control environment so that it can be realized well, namely: 1. Directors, management and other personnel demonstrate a commitment to integrity and ethical values; 2. The Board of Directors demonstrates independence from management and in overseeing the development and performance of internal controls; 3. Management, with the supervision of the Board of Directors, determines the structure, reporting lines, authorities and responsibilities in pursuing goals; 4. The Company demonstrates a commitment to attracting, developing and retaining competent individuals in line with its objectives; 5. The company ensures individuals are responsible for their internal control duties and responsibilities in achieving goals.

No	Komponen Component	Uraian Description
2	Penilaian Risiko Risk Assessment	Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko adalah suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan; 2. Perusahaan mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola; 3. Perusahaan mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan; 4. Perusahaan mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal. Risk assessment involves a dynamic and interactive process to identify and assess risks to the achievement of objectives. Risk is the possibility that an event will occur and affect the achievement of company goals. The principles that support risk assessment are as follows: 1. The company sets objectives with sufficient clarity to enable identification and assessment of risks associated with the objectives; 2. The Company identifies risks to the achievement of objectives across entities and risk analysts as a basis for determining how risks should be managed; 3. The Company considers the potential for fraud in assessing risks to achieving objectives; 4. The company identifies and assesses changes that could significantly affect the internal control system.
3	Aktivitas Pengendalian Control Activities	Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. Prinsip-prinsip dalam Perusahaan yang mendukung aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima; 2. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan; 3. Perusahaan mendistribusikan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan. Control activities are actions established through policies and procedures that help ensure that management directives to reduce risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities include different activities such as: authorization, verification, reconciliation, analysis, work performance, maintaining security of company assets and separation of functions. The principles in the Company that support control activities are as follows: 1. The Company selects and develops control activities that contribute to mitigating the risk of achieving targets at an acceptable level; 2. The Company selects and develops general control activities over technology to support the achievement of objectives; 3. Companies distribute control activities through policies that define what is expected, and procedures that put the policies into action.
4	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	Informasi dan komunikasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Terdapat 3 (tiga) prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu: 1. Perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal; 2. Perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal; 3. Perusahaan berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal. The information and communication required by management is relevant and good quality information originating from internal and external sources and information used to support the function of other components of internal control. There are 3 (three) principles that support the information and communication components of internal control, namely: 1. The Company obtains or produces and uses quality and relevant information to support internal control functions; 2. The Company internally communicates information, including objectives and responsibilities for internal control in order to support the internal control function; 3. The company communicates with internal parties regarding matters that affect the internal control function.

No	Komponen Component	Uraian Description
5	Aktivitas Pemantauan Monitoring Activities	Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk, baik yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya, yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau Manajemen dan Direksi, dan kekurangan kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada Manajemen dan Direksi. Monitoring activities are evaluation activities in several forms, either continuous, separate or a combination of both, which are used to ensure whether each of the five components of internal control influences the functions within each component, exists and is functioning. Findings are evaluated against criteria established by policy makers, recognized standard-setting institutions or Management and Directors, and deficiencies found are communicated to Management and Directors.

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Terkait Kegiatan Keuangan dan Operasional

Kegiatan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern atas proses bisnis keuangan dan operasional dilakukan dalam setiap kegiatan audit. Rekomendasi dan saran perbaikan proses bisnis keuangan dan operasional tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterbitkan oleh Kompartemen SPI kepada Unit Kerja yang menjadi objek audit.

Selain itu, evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan. Rekomendasi dan saran perbaikan atas sistem pengendalian internal Perusahaan tercantum dalam Laporan PSA 62 dan Management Letter yang diterbitkan oleh KAP kepada manajemen Perusahaan.

Terkait Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan

Evaluasi atas Kepatuhan Perundang-undangan dilakukan oleh Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan. Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian fraud, maka Perusahaan melakukan pengembangan program kepatuhan melalui implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 yang meliputi :

1. Implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis ISO 37301:2021, dan
2. Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Kepatuhan (Compliance Management System Online Multi Company/COMPOS)
3. Membentuk Compliance Officer yang bertanggung jawab dalam memonitor dan memastikan seluruh aktivitas unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Related to Financial and Operational Activities

Evaluation activities on the Internal Control System for financial and operational business processes are carried out in every audit activity. Recommendations and suggestions for improving financial and operational business processes are contained in the Audit Result Report (LHA) issued by the SPI Compartment to the Work Unit that is the object of the audit.

In addition, evaluation of the Internal Control System is carried out by the Public Accounting Firm (KAP) which audits the Company's Financial Reports. Recommendations and suggestions for improvements to the Company's internal control system are contained in the PSA 62 Report and Management Letter issued by KAP to the Company's management.

Regarding Compliance With Legislation

Evaluation of Legislative Compliance is carried out by the Governance and Compliance Department. In order to increase compliance with legislation and control fraud, the Company is developing a compliance program through the implementation of the ISO 37301:2021 Compliance Management System which includes:

1. Implementation of a Compliance Management System based on ISO 37301:2021, and
2. Development of a Compliance Management Application System (Compliance Management System Online Multi Company (COMPOS))
3. Establish a Compliance Officer who is responsible for monitoring and ensuring all work unit activities comply with applicable regulations.

4. Melakukan pelatihan dan edukasi kepada semua insan perusahaan mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan operasional perusahaan dan pemahaman tentang implementasi serta audit Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis ISO 37301:2021.
5. Mengembangkan dan terus-menerus menyesuaikan kebijakan internal perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.
6. Melakukan audit internal secara berkala untuk memeriksa dan memastikan semua operasi perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengkomunikasikan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan tidak hanya kepada karyawan tapi juga kepada stakeholder eksternal seperti pelanggan, pemasok dan mitra lainnya.

4. Conduct training and education to all company personnel regarding laws and regulations relevant to company operations and understanding the implementation and audit of the ISO 37301:2021-based Compliance Management System.
5. Develop and continually adjust internal company policies to ensure compliance with applicable regulations.
6. Conduct regular internal audits to check and ensure that all company operations are running in accordance with applicable laws and regulations.
7. Communicate the company's commitment to compliance not only to employees but also to external stakeholders such as customers, suppliers and other partners.

Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
Results of Evaluation of the Effectiveness of Implementing the Company's Internal Control System

Komponen Penerapan SPIP SPIP Implementation Components	Bobot Weight	2023			2024		
		Nilai Value	% Tingkat Capaian % Achievement Rate	Keterangan Description	Nilai Value	% Tingkat Capaian % Achievement Rate	Keterangan Description
Lingkungan Pengendalian Control Environment	30	27,80	92,68	Sangat Baik Excellent	26,96	89,87	Baik Good
Penilaian Risiko Risk Assessment	20	18,35	91,77	Sangat Baik Excellent	18,14	90,68	Sangat Baik Excellent
Aktivitas Pengendalian Control Activities	20	18,24	91,20	Sangat Baik Excellent	17,75	88,76	Baik Good
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	15	14,13	94,22	Sangat Baik Excellent	14,01	93,40	Sangat Baik Excellent
Aktivitas Pemantauan Monitoring Activities	15	14,14	94,26	Sangat Baik Excellent	14,28	95,23	Sangat Baik Excellent
Jumlah Total	**100**	**92,67**	**92,67**	**Sangat Baik** Excellent	**91,14**	**91,14**	**Sangat Baik** Excellent

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM



PUPUK INDONESIA
HOLDING COMPANY

Surat Pernyataan Manajemen
Tentang
Sistem Pengendalian Intern Perusahaan
(SPIP)

Atas nama Direksi, kami menyatakan bahwa:

1. Setiap kegiatan dan transaksi perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan pada Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP) yang memadai sesuai dengan hasil Evaluasi Penerapan SPIP yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPIP di PT pupuk Indonesia (Persero) pada tahun 2024 mencapai skor **91,14%** atau berada pada tingkatan kecukupan **Sangat Baik**.
3. Direksi bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Intern Perusahaan secara keseluruhan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 31 Desember 2024
Atas nama dan mewakili Direksi

Rahmad Pribadi
Direktur Utama

Manajemen Risiko
Risk Management

Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-2/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara termasuk Petunjuk Teknis turunannya. Mengacu pada pasal 49, dalam rangka penerapan manajemen risiko dimana BUMN dikelompokkan berdasarkan kategori BUMN dan klasifikasi risiko BUMN berdasarkan intensitas risiko masing-masing BUMN. Berdasarkan hal tersebut, PTPI termasuk dalam Kategori BUMN Konglomerasi dan Klasifikasi Sistemik A.

Berdasarkan pada Pasal 56, PTPI selaku BUMN dengan Kategori BUMN Konglomerasi dan Klasifikasi Sistemik A memiliki kewajiban pemenuhan seluruh Organ Pengelola Risiko.

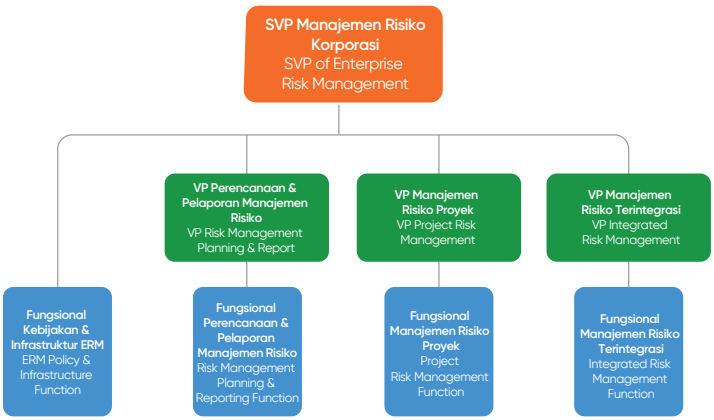
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Fungsi Manajemen Risiko di PTPI dilakukan dibawah koordinasi Direktur Manajemen Risiko yang membawahi SVP Manajemen Risiko Korporasi dengan 3 (Tiga) Departemen dan 1 (satu) Fungsional yaitu Departemen Perencanaan & Pelaporan Manajemen Risiko, Departemen Manajemen Risiko Terintegrasi, Departemen Manajemen Risiko Proyek dan 1 (satu) Fungsional Kebijakan & Infrastruktur ERM sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PTPI Nomor : 94/A/HK/E0500/SK/2024 Tanggal 01 Agustus 2024.

The implementation of Enterprise Risk Management in the Company refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of SOE, including its technical guidelines. Referring to Article 49, in the context of implementing risk management, SOE's are categorized based on the category of SOE's and the classification of risks of SOE's based on the intensity of each SOE's risks. Based on the aforementioned, PTPI is classified under the Conglomerate SOE Category and Systemic Classification A.

Pursuant to Article 56, PTPI, as an SOE classified under the Conglomerate SOE Category and Systemic Classification A, is required to fulfill all Risk Management Organs.

In connection with the above, the Risk Management Function at PTPI is implemmmented under the coordination of the Risk Management Director, who oversees the SVP of Enterprise Risk Management with 3 (three) departments and 1 (one) functional unit, namely the Risk Management Planning & Reporting Department, the Integrated Risk Management Department, the Project Risk Management Department, and one functional unit for ERM Policy & Infrastructure in accordance with the Board of Directors' Decision of PTPI No. 94/A/HK/E0500/SK/2024 dated August 1, 2024.

Organisasi Kompartemen Manajemen Risiko Korporasi
Enterprise Risk Management Compartment Organization



Hingga akhir Desember 2024, jumlah karyawan yang tergabung dalam Fungsi Manajemen Risiko Korporasi PTPI sebanyak 13 orang dan 38 karyawan di Unit Manajemen Risiko PI Group.

Until the end of December 2024, there were 13 employees in the Enterprise Risk Management Function of PTPI and 38 employees in the PI Group Risk Management Unit.

Fungsi Function	Jumlah (orang) Total (people)
SVP Manajemen Risiko Korporasi SVP of Enterprise Risk Management	1
VP Perencanaan & Pelaporan Manajemen Risiko VP Risk Management Planning & Report	1
VP Manajemen Risiko Terintegrasi VP Integrated Risk Management	1
VP Manajemen Risiko Proyek VP Project Risk Management	-
Fungsional Kebijakan & Infrastruktur ERM ERM Policy & Infrastructure Function	3
Fungsional Perencanaan & Pelaporan Manajemen Risiko Risk Management Planning & Reporting Function	2
Fungsional Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Function	4
Fungsional Manajemen Risiko Proyek Project Risk Management Function	1
Jumlah Total	**13**

SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN RISIKO

Untuk mendukung peran Fungsi Manajemen Risiko agar lebih kompeten dalam mengelola risiko yang ada di Perusahaan dan dalam rangka pemenuhan kualifikasi Organ Pengelola Risiko sesuai dengan Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN No. SK-3/DKU.MBU/05/2023, maka Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Fungsi Manajemen Risiko melalui sertifikasi dan pelatihan.

Adapun daftar sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Fungsi Manajemen Risiko PI Group adalah sebagai berikut :

RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL CERTIFICATION

To support the role of the Risk Management Function to be more competent in managing risks in the Company, the Company facilitates a competency development program for the Risk Management Organs. This development activity is provided systematically and in stages. This is in line with the implementation of the Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within SOE No. SK-3/DKU.MBU/05/2023.

The list of professional certifications held by PI Group Risk Management Function employees is as follows:

No	Sertifikasi Certification	Perusahaan Company										
		PI	PKG	PKC	PKT	PIM	PSP	REKIND	PIN	PILOG	PIU*	PIP
1	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	2	4			4	2	2			1	
2	Internal Audit Professional (CIAP)	1						1				
3	Certified Governance Professional (CGP)		2	3		3						

No	Sertifikasi Certification	Perusahaan Company										
		PI	PKG	PKC	PKT	PIM	PSP	REKIND	PIN	PILOG	PIU*	PIP
4	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	4	3	5	2	3	2	1	1	1	1	2
5	Certified GRC Professional (CGRCP)	5	2			1	2	4				
6	Internal Auditor SMAP ISO 37001:2016			2								
7	Certified Internal Audit Officer (CIAO)						1	2				
8	Certified Compliance Professional (CCP)	2				2		4				
9	Certified Chief Compliance Officer (CCCO)					1		1				
10	Enterprise Risk Management Certified Profesional (ERMCP)	4				1	2					
11	Certification in Audit Committee Practices (CACP)						3					
12	Qualified Internal Auditor (QIA)	2		1								
13	Resertifikasi AK3 Umum			1								
14	Chartered Certified Risk Analyst (CRA)			1								
15	Auditor SMK3			1								
16	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)				1							
17	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)				4							
18	Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) ISO 22301 & ISO 27032	4										

No	Sertifikasi Certification	Perusahaan Company										
		PI	PKG	PKC	PKT	PIM	PSP	REKIND	PIN	PILOG	PIU*	PIP
19	Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1				1						
20	Banking Risk Management - lv 1	1										
21	Banking Risk Management - lv 2	1										
22	Banking Risk Management - lv 3	1										
23	Qualification 5 Field of Banking Risk Management	1										
24	Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1	2				1					
25	Certified Management Accountant (CMA Australia)	1										
26	Proffesional Financial Modeller (PFM)	1										
27	Certified Project Management Associate (PMA)	1										
28	Ahli K3 lingkungan Kerja	1										
29	Ahli Higienie Industi Muda	1										
30	Penanggung jawab pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	1										
31	Certified Sustainability Reporting Specialist	2										
32	SDG Certified Leader	1										
33	Qualified Risk Management Officer (QRMO)				4							
34	Chartered Accountant (CA)					1						
	Jumlah Total	**39**	**13**	**14**	**11**	**17**	**13**	**15**	**1**	**1**	**2**	**2**
		128										

*) Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
*) Subsidiaries Until December 15, 2024

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam rangka implementasi Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN No. SK-3/DKU.MBU/05/2023, selain pemenuhan sertifikasi, Perusahaan perlu memastikan pemenuhan atas kompetensi bidang Manajemen Risiko di Fungsi Manajemen Risiko Perusahaan. Untuk itu sepanjang tahun 2024, Perusahaan secara aktif dalam mengembangkan kompetensi SDM Bidang Manajemen Risiko melalui program pelatihan publik maupun inhouse. Detail pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

In order to implement the Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within SOE No. SK-3/DKU.MBU/05/2023, apart from fulfilling certification, the Company needs to ensure compliance with competency in the field of Risk Management in the Company's Risk Management Function. throughout 2024, the Company will actively develop HC competencies in the field of Risk Management through public and in-house training programs. Details of the implementation of activities can be seen in the following table:

Program Pengembangan Kompetensi
Competency Development Program

Kegiatan Activity	Penyelenggara/Narasumber Organizer	Tanggal Date
Sharing Session Manajemen Risiko Risk Management Discussion Session	EY Indonesia	24 Januari 2024 January 24, 2024
Sharing Session Tata Kelola Terintegrasi & RMA Integrated Governance & RMA Discussion Session	EY Indonesia	7 Februari 2024 February 7, 2024
Workshop KNIME Analytic Platform KNIME Analytics Platform Workshop	KNIME	19 – 22 Februari 2024 February 19–22, 2024
Benchmark Loss Event Database Loss Event Benchmark Database	BRI	28 Februari 2024 February 28, 2024
Sertifikasi Certified Compliance Professional Certified Professional Compliance Certification	LSP MKS	27 Februari – 1 Maret 2024 February 27–March 1, 2024
Sharing Session Manajemen Risiko Risk Management Discussion Session	Mc Kinsey	4 April 2024 April 4, 2024
Pelatihan Risk Maturity Indeks (RMI) Batch II Risk Maturity Index (RMI) Training Batch II	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	8 April 2024 April 8, 2024
Pelatihan dan Sertifikasi CGRCP CGRCP Training and Certification	LSP GRK	6 – 9 Agustus 2024 August 6–9, 2024
GRC Summit Seminar dan Masterclass GRC Summit Seminar and Masterclass	CRMS Indonesia	22 – 23 Agustus 2024 August 22–23, 2024
Pelatihan Risk Based Planning & Risk Modelling Risk-Based Planning & Risk Modeling Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	2 – 3 September 2024 September 2–3, 2024
Implementasi GRC & ESG dalam mendukung Business Judgement Rule UU BUMN dan UU PT GRC & ESG Implementation in Supporting Business Judgment Rules under the State-Owned Enterprises Law and the Limited Liability Companies Law	Business News	19 – 20 September 2024 September 19–20, 2024
Workshop Peningkatan kompetensi Pengelola Risiko Kepatuhan dan Fraud Workshop on Enhancing the Competence of Compliance and Fraud Risk Managers	CRMS Indonesia PT Pupuk Indonesia (Persero)	12 November 2024 November 12, 2024
Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum Risk Management Implementation Forum for Accelerating National Development	BPKP	12 November 2024 November 12, 2024
Enterprise Strategic Risk Assessment Workshop dengan tema "Uncovering Strategic Risks to Protect and Create Value Workshop on Strategic Risk Assessment for Companies with the theme "Uncovering Strategic Risks to Protect and Create Value	EY Indonesia PT Pupuk Indonesia (Persero)	13 November 2024 November 13, 2024

Program Pengembangan Kompetensi
Competency Development Program

Kegiatan Activity	Penyelenggara/Narasumber Organizer	Tanggal Date
Sosialisasi Petunjuk Teknis ICOFR BUMN Socialization of Technical Guidelines for ICOFR in State-Owned Enterprises	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	18 November 2024 November 18, 2024
Dual Certification QCRO – CERG Dual Certification QCRO – CERG	ERMA – CRMS Indonesia	4 – 6 Desember 2024 December 4–6, 2024
Risk Beyond 2024 "Sustainable Symphony : Echoes of Change" Risk Beyond 2024 "Sustainable Symphony: Echoes of Change"	ERMA – CRMS Indonesia	5 – 6 Desember 2024 December 5–6, 2024
Risk Forum – Operational Risk Assessment to Navigate Uncertainty Risk Forum – Operational Risk Assessment to Address Uncertainty	EY Indonesia PT Pupuk Indonesia (Persero)	16 – 17 Desember 2024 December 16–17, 2024
Risk Culture Talkshow: Transforming Challenges into Opportunities Risk Culture Discussion: Turning Challenges into Opportunities	EY Indonesia PT Pupuk Indonesia (Persero)	18 Desember 2024 December 18, 2024

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, realisasi program kerja di Kompartemen Manajemen Risiko Korporasi sebagai berikut:

1. Penyesuaian Framework dan Perangkat Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan PER-02 KBUMN beserta peraturan turunannya. Telah dilakukan revisi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dokumen nomor PI-MRI-PD-001 tanggal 19 Maret 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023.
2. Integrasi BCM dengan Crisis Management untuk mendukung resilience perusahaan Proses bisnis kritikal Perusahaan termasuk Business impact analysis, Business Continuity Strategy (BCS) dan Business Continuity Plan (BCP).
3. Telah ditetapkan Parameter Metrik Strategi Risiko dan Key Risk Indicator (KRI) PTPI tahun 2024 yang dituangkan dalam RKAP. Realisasi atas Parameter Metrik Strategi Risiko dan Key Risk Indicator (KRI) dilakukan monitoring secara berkala setiap bulan dan disampaikan ke Manajemen serta Dewan Komisaris agar sasaran perusahaan dapat tercapai.
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Perseroan melakukan enhancement aplikasi PRISMA (Pupuk Indonesia Risk Management Application) dengan menambahkan modul Loss Event Database (LED). LED bertujuan untuk menjadi database dalam mencatat kejadian kerugian yang terjadi Perusahaan sehingga serta menjadi media lesson learned dalam pengelolaan risiko Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF TASKS IN 2024

Throughout 2024, the realization of the program in the Enterprise Risk Management Compartment is as follows:

1. Adjustment of Risk Management Implementation Framework and Tools in accordance with PER-02 ministry of SOE and its derivative regulations. The revision of Integrated Risk Management Implementation Guidelines has been carried out in accordance with document number PI-MRI-PD-001 dated March 19, 2024 which refers to the Regulation of the Minister of SOEs number PER-2/MBU/03/2023.
2. Integration of BCM with Crisis Management to support company resilience The Company's critical business processes include Business impact analysis, Business Continuity Strategy (BCS) and Business Continuity Plan (BCP).
3. Risk Strategy Metric Parameters and Key Risk Indicators (KRI) of PTPI have been determined for 2024 as outlined in the RKAP. Realization of the Risk Strategy Metric Parameters and Key Risk Indicator (KRI) is monitored regularly every month and submitted to the Management and Board of Commissioners so that the company's goals can be achieved.
4. Development of Risk Management Information System The Company enhances the PRISMA (Pupuk Indonesia Risk Management Application) application by adding a Loss Event Database (LED) module. LED aims to become a database in recording loss events that occur in the Company so as to become a medium for lesson learned in managing the Company's risks.

5. Klinikal Pengelolaan Risiko Perseroan melaksanakan klinikal risiko secara berkala guna meningkatkan pemahaman Risk Owner dan Risk Officer dalam melakukan Risk Control Self-Assessment (RCSA) serta memastikan implementasi manajemen risiko sesuai dengan Pedoman MRT.
6. Sosialisasi dan Workshop
   Perseroan telah mengadakan beberapa sosialisasi dan workshop antara lain Enteprise Risk Strategic Workshop, FGD Penyusunan Bab IV Manajemen Risiko RKAP, Workshop Strategi Risiko RKAP dan Workshop RCSA Risiko Non RTM RKAP 2025.

5. Risk Management Clinics The Company conducts regular risk clinics to improve the understanding of Risk Owners and Risk Officers in conducting Risk Control Self-Assessment (RCSA) and ensuring the implementation of risk management in accordance with the MRT Guidelines.
6. Socialization and Workshop
   The Company has held several socializations and workshops including Enteprise Risk Strategic Workshop, FGD on the Preparation of Chapter IV of RKAP Risk Management, RKAP Risk Strategy Workshop and RCSA Workshop on Non RTM Risk of RKAP 2025.

KAJIAN RISIKO AKSI KORPORASI

Untuk memberikan assurance kepada manajemen terhadap proses pengambilan keputusan atas Aksi Korporasi yang dilakukan. Adapun reviu Kajian Risiko Aksi Korporasi yang telah dilakukan oleh Kompartemen Manajemen Risiko Korporasi hingga Triwulan IV/2024 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) kajian risiko dengan detail sebagai berikut:

CORPORATE ACTION RISK ASSESSMENT

To provide assurance to management on the decision-making process of the Corporate Action. The review of the Corporate Action Risk Assessment that has been carried out by the Enterprise Risk Management Compartment until Quarter IV/2024 is 22 (twenty-two) risk assessments with details as follows:

No.	Judul Kajian Risiko Title of Risk Assessment	Jenis Kajian Assesment Type
1	Inbreng Aset Tanah dan Bangunan Kalibata Kalibata Land and Building Asset Inbreng	KPS shareholder resolution
2	Pembangunan Proyek PLTS Construction of Solar PV Project	KPS shareholder resolution
3	Pengajuan Pinjaman Pemegang Saham ke PI Shareholder Loan Application to PI	KPS shareholder resolution
4	Perpanjangan Bank Guarantee Proyek JTB JTB Project Bank Guarantee Extension	Non KPS non-shareholder resolution
5	Pemberian Pinjaman Pemegang Saham ke PIP Shareholder Loan to PIP	Non KPS non-shareholder resolution
6	Pemberian Pinjaman Pemegang Saham ke Pilog Shareholder Loan to Pilog	Non KPS non-shareholder resolution
7	Rencana Sinergi Angkutan Transportation Synergy Plan	Non KPS non-shareholder resolution
8	Sewa Aset dan Gedung Kalibata Rental of Kalibata Assets and Building	KPS shareholder resolution
9	Sewa Aset dan Gedung Kemanggisan Lease of Kemanggisan Assets and Building	KPS KPS shareholder resolution
10	Kerja sama Sewa Gudang Nganjuk Milik PTPI oleh PKG Cooperation of PTPI's Nganjuk Warehouse Lease by PKG	KPS shareholder resolution
11	Kajian Risiko Saham Dwi Warna Risk Assessment of Dwi Warna Stock	KPS shareholder resolution
12	Kajian Risiko Perpetual Loan PT Rekind PT Rekind Perpetual Loan Risk Assessment	Non KPS non-shareholder resolution
13	Kajian Risiko Inbreng Saham PTPI di PIU ke Rekind Risk Assessment for the Inbreng of PTPI Shares in PIU to Rekind	KPS shareholder resolution

No.	Judul Kajian Risiko Title of Risk Assessment	Jenis Kajian Assesment Type
14	Kajian Risiko Inbreng Aset & Bangunan Gedung Kalibata ke Rekind Risk Assessment for Inbreng of Kalibata Building Assets & Buildings to Rekind	KPS shareholder resolution
15	Kajian Risiko Capital Injection ke Rekind Risk Assessment of Capital Injection to Rekind	KPS shareholder resolution
16	Kajian Risiko Cybersecurity Implementasi Production Analytic Center Cybersecurity Risk Assessment of Production Analytic Center Implementation	Non KPS non-shareholder resolution
17	Kajian Risiko Pengajuan Pinjaman Pemegang Saham (PPS) Risk Assessment of Shareholder Loan Application (PPS)	Non KPS non-shareholder resolution
18	Kajian Risiko Perpanjangan Performance Bond Proyek PLTU Lombok Risk Assessment of Performance Bond Extension for Lombok PLTU Project	Non KPS non-shareholder resolution
19	Kajian Risiko Akuisisi Saham PNS Risk Assessment for the Acquisition of PNS Shares	KPS shareholder resolution
20	Kajian Risiko Perpanjangan BG Proyek JTB Risk Assessment of JTB Project BG Extension	Non KPS non-shareholder resolution
21	Kajian Risiko Pemanfaatan Sarana Transportasi Bahan Baku dan Utilitas PT Pupuk Kalimantan Timur oleh PT Kaltim Amonium Nitrat Risk Assessment of Utilization of Raw Material Transportation Facilities and Utilities of PT Pupuk Kalimantan Timur by PT Kaltim Ammonium Nitrate	KPS shareholder resolution
22	Kajian Risiko Pengajuan Threshold (Batasan Wewenang) Kerja sama Aset Properti PTPI Risk Assessment of Threshold Submission (Limitation of Authority) Property Asset Cooperation of PTPI	Non KPS non-shareholder resolution

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Pelaksanaan sistem manajemen risiko Perusahaan telah dilaksanakan secara terintegrasi. Inisiatif ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan memastikan pencapaian nilai bagi Pemegang Saham dan pemenuhan komitmen pada karyawan serta seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya. Manajemen Risiko diperlukan untuk memastikan pencapaian terhadap sasaran, termasuk sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Sejak tahun 2013, Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2011.

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN tanggal 24 Maret 2023, Perseroan melakukan penyesuaian kembali pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Nomor Dokumen PI-MRI-PD-001 Rev 2 tanggal 19 Maret 2024 dan menyusun Prosedur pendukung implementasi Pedoman Manajemen Risiko.

Sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Pemegang Saham dan Pupuk Indonesia Group, serta sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan berdasar pada Peraturan Menteri BUMN RI Nomor : PER-02/MBU/03/2023 dan anggaran dasar, maka seluruh Jajaran Direksi memastikan agar seluruh insan perusahaan di Pupuk Indonesia Group berkomitmen untuk :

The Company's risk management system has been implemented in an integrated manner. This initiative was carried out to realize good corporate governance and ensure the achievement of value for Shareholders and fulfillment of commitments to employees and all other relevant stakeholders. Integrated Risk Management (MRT) is needed to ensure achievement of targets, including the targets of the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

Since 2013, the Company has implemented a Risk Management System based on ISO 31000:2011.

Following up on the issuance of the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs dated March 24, 2023, the Company made adjustments to the Risk Management Implementation Guidelines based on Pupuk Indonesia Risk Management Guidelines Document Number PI-MRI-PD-001 Rev 2 dated March 19, 2024 and developed supporting procedures for the implementation of Risk Management Guidelines.

As a form of commitment in managing risks in accordance with the principles of risk management to protect and create value for Shareholders and Pupuk Indonesia Group, as well as in accordance with the policies set by Shareholders based on the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number: PER-02/MBU/03/2023 and the articles of association, the entire Board of Directors ensures that all company personnel in Pupuk Indonesia Group are committed to:

1. Menerapkan Manajemen Risiko yang menganut prinsip Model Tiga Lini (Three Lines Model) dan Tata Kelola Terintegrasi
2. Memastikan kecukupan Pedoman dan Prosedur Manajemen Risiko serta strategi manajemen risiko
3. Memastikan kecukupan proses Manajemen Risiko yakni identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi risiko.
4. Memastikan penerapan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen
5. Menyelaraskan pengelolaan risiko untuk setiap aktivitas strategis, bisnis dan/atau operasional di seluruh jenjang dalam Pupuk Indonesia Group dengan strategi dan proses bisnis yang berlaku di Pupuk Indonesia Group
6. Memastikan penerapan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS/Menteri.
7. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola risiko, menyediakan anggaran pengelolaan risiko, serta menyediakan dukungan teknologi informasi untuk pengelolaan risiko secara memadai dan menjadikan budaya sadar risiko sebagai bagian dari budaya Perusahaan.
8. Melakukan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Group secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Implementasi Manajemen Risiko yang efektif dan efisien dilakukan secara berkelanjutan pada setiap fungsi dan hierarki dalam Perusahaan. Dalam setiap tahapan implementasi, Perusahaan mengidentifikasi dan menganalisis seluruh risiko yang dapat mengganggu pencapaian Sasaran Perusahaan. Setiap risiko yang teridentifikasi dikategorikan berdasarkan taksonomi risiko yang berlaku di Perusahaan dan dilaksanakan secara efektif dengan dukungan sistem informasi Manajemen Risiko.

Untuk setiap tahun anggaran, Perusahaan menetapkan risiko utama konsolidasi yaitu risiko yang berkontribusi secara pareto terhadap ketidakpastian dalam pencapaian sasaran Perusahaan, Penetapan risiko utama dilakukan dengan menggunakan metode prioritisasi risiko utama untuk menentukan risiko-risiko kunci yang memiliki dampak signifikan bagi Perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan kriteria-kriteria signifikan yang mempertimbangkan aspek keberlangsungan perusahaan dalam kondisi bisnis yang terus berkembang dan penuh ketidakpastian. Dalam upaya memastikan seluruh risiko utama tersebut dapat dikendalikan, Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat risiko secara periodik.

Dalam mendukung penerapan kebijakan strategi risiko, Perusahaan memiliki strategi risiko yang dituangkan dalam Risk Appetite Statement (RAS) yang diselaraskan dengan selera risiko perusahaan

1. Implement Risk Management that adheres to the principles of the Three Lines Model and Integrated Governance
2. Ensure the adequacy of Risk Management Guidelines and Procedures and risk management strategies
3. Ensure the adequacy of Risk Management processes, namely identification, measurement, monitoring and risk control and risk information systems.
4. Ensure the implementation of the risk management function has operated independently
5. Aligning risk management for every strategic, business and/or operational activity at all levels in Pupuk Indonesia Group with the strategy and business processes applicable in Pupuk Indonesia Group.
6. Ensure the implementation of other Risk Management functions in accordance with the provisions of Laws and Regulations, Articles of Association, and/or GMS/ Ministerial Decisions.
7. Developing the competence of risk management Human Capitals, providing a risk management budget, as well as providing information technology support for adequate risk management and making a risk-aware culture part of the Company's culture.
8. Evaluate the Risk Management Implementation of Pupuk Indonesia Group periodically for continuous improvement.

Effective and efficient implementation of Risk Management is carried out on an ongoing basis in every function and hierarchy within the Company. At each implementation stage, the Company identifies and analyzes all risks that could disrupt the achievement of the Company's targets. Each identified risk is categorized based on the risk taxonomy applicable in the Company and implemented effectively with the support of the Risk Management information system.

For each fiscal year, the Company determines the main consolidated risks, namely risks that contribute Pareto to uncertainty in achieving the Company's targets. Determination of main risks is carried out using the main risk prioritization method to determine key risks that have a significant impact on the Company as a whole using criteria. -significant criteria that consider aspects of the company's sustainability in business conditions that continue to develop and are full of uncertainty. In an effort to ensure that all major risks can be controlled, the Company periodically monitors and evaluates risk levels.

In supporting the implementation of the risk strategy policy, the Company has a risk strategy outlined in the Risk Appetite Statement (RAS) which is aligned with the company's risk appetite.

STRATEGI RISIKO TAHUN 2024

Strategi pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan dengan metode pengelolaan risiko pada operasional sehari-hari secara efektif dengan dukungan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris. Metrik strategi risiko disusun menggunakan metode Risk to Performance Mapping dari setiap taksonomi risiko terhadap seluruh risiko utama yang telah teridentifikasi. Hasil pemetaan tersebut kemudian diprioritisasi, sehingga didapatkan metrik-metrik yang mencakup berbagai aspek risiko secara komprehensif. Metrik-metrik yang terpilih juga dipastikan bukan merupakan target atau KPI Perusahaan serta memiliki visibilitas untuk dihitung dan dimonitor oleh Perusahaan.

RISK APPETITE STATEMENT (RAS)

Dalam melakukan penyusunan Risk Appetite Statement (RAS) PTPI mempertimbangkan karakteristik dari seluruh lini bisnis Perusahaan. PTPI melakukan penyelarasan dengan tema strategis perusahaan dan menggunakan tiga basis acuan dalam penyusunan yaitu RAS KBUMN, data historis, dan tujuan strategis Perusahaan (management appetite). Pernyataan sikap risiko PTPI dituangkan dalam 4 sikap yaitu tidak toleran, strategis, konservatif dan moderat.

Pemilihan sikap risiko atas aktivitas bisnis mempertimbangkan kemampuan Perusahaan untuk mengeksplotasi opportunity, baik opportunity to improve maupun opportunity to grow. Perusahaan berkomitmen untuk melakukan perbaikan internal agar proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk sikap risiko tidak toleran, konservatif, dan moderat. Selanjutnya, Perusahaan berkomitmen untuk memanfaatkan peluang pasar sehingga dapat memaksimalkan keuntungan untuk sikap risiko strategis.

PENGELOLAAN RISIKO UTAMA/RISK THAT MATTERS (RTM) PERUSAHAAN KONSOLIDASI TAHUN 2024

Risiko utama PTPI merupakan risiko-risiko yang paling berpengaruh terhadap pencapaian target RKAP. Seluruh risiko utama juga sudah diperhitungkan nilai inheren dan residualnya dimana kedua nilai tersebut sudah diproyeksikan ke dalam target RKAP. Lebih lanjut, PTPI juga sudah memperhitungkan nilai eksposur risiko untuk setiap risiko utama dengan mempertimbangkan nilai dampak dan peluang keterjadian risiko. PTPI juga memastikan bahwa seluruh nilai eksposur inheren sudah berada pada level yang dapat diterima perusahaan.

RISK STRATEGY IN 2024

The Company's risk management strategy is carried out using risk management methods in daily operations effectively with the support of active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners. Risk strategy metrics are compiled using the Risk to Performance Mapping method from each risk taxonomy against all identified key risks. The results of the mapping were then prioritized, resulting in metrics that comprehensively cover various aspects of risk. The selected metrics are also ensured not to be the Company's targets or KPIs and have the visibility to be calculated and monitored by the Company.

RISK APPETITE STATEMENT (RAS)

In preparing the Risk Appetite Statement (RAS), PTPI considers the characteristics of all business lines of the Company. PTPI aligns with the company's strategic themes and uses three bases of reference in the preparation, namely ministry of SOE RAS, historical data, and the Company's strategic objectives (management appetite). PTPI's risk attitude statement is outlined in 4 attitudes, namely intolerant, strategic, conservative and moderate.

The selection of risk attitudes for business activities considers the Company's ability to exploit opportunities, both opportunities to improve and opportunities to grow. The Company is committed to making internal improvements so that business processes become more effective and efficient for intolerant, conservative and moderate risk attitudes. Furthermore, the Company is committed to exploiting market opportunities so as to maximize profits for strategic risk attitudes.

MAIN RISK MANAGEMENT/RISK THAT MATTERS (RTM) CONSOLIDATED COMPANY IN 2024

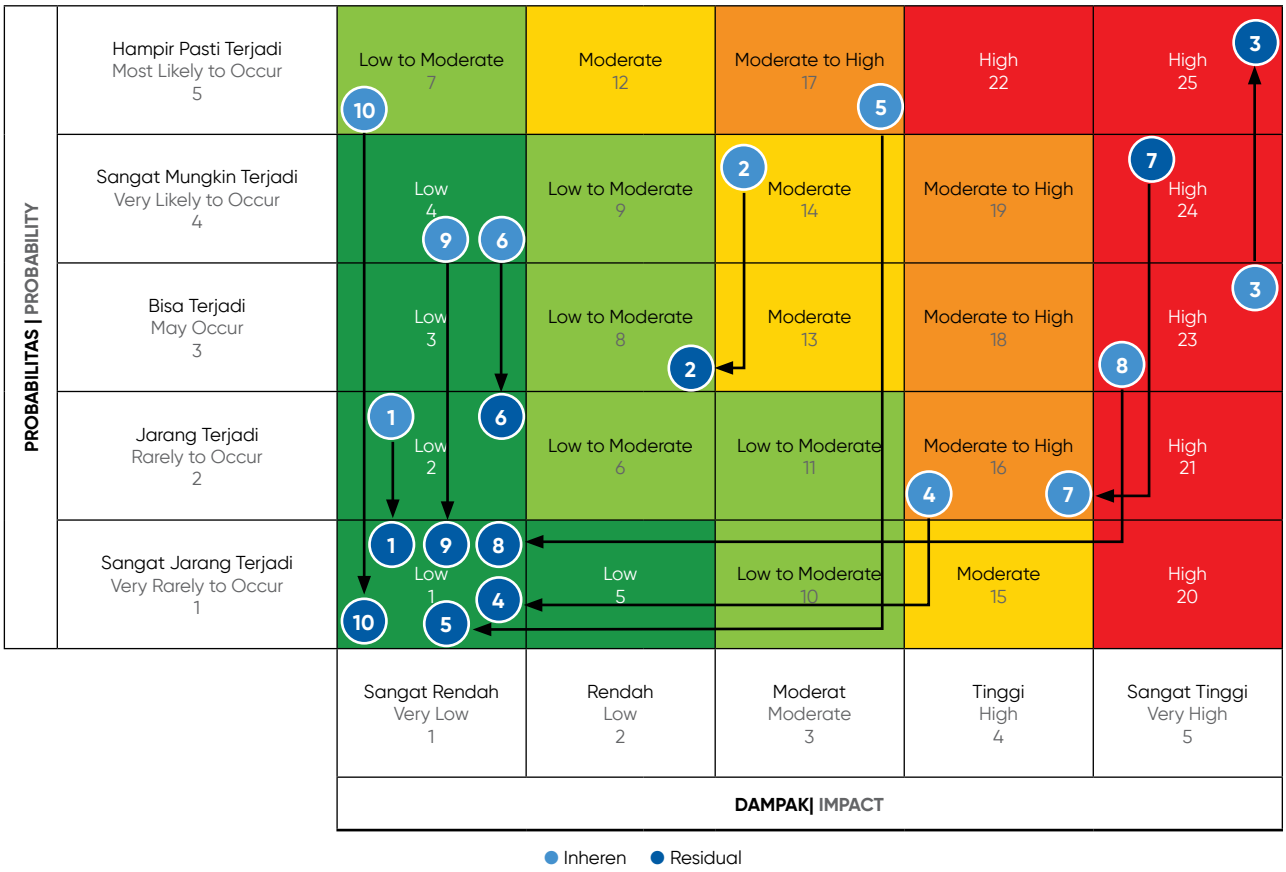
The main risks of PTPI are the risks that have the most influence on the achievement of the RKAP target. All main risks have also been calculated for their inherent and residual values where both values have been projected into the RKAP target. Furthermore, PTPI has also calculated the risk exposure value for each main risk by considering the value of the impact and chance of risk occurrence. PTPI also ensures that all inherent exposure values are at an acceptable level for the company.

Seluruh risiko utama yang ada di PTPI juga sudah memiliki rencana mitigasi. Seluruh rencana mitigasi ini sudah dimasukan ke dalam Program Kerja RKAP 2024. Selain itu, setiap risiko yang ada di perusahaan sudah memiliki Key Risk Indicators (KRI) sebagai Early Warning Signal (EWS) terjadinya risiko di PTPI. KRI yang dipilih merupakan KRI yang jenisnya leading/current indicator, sehingga manajemen punya cukup waktu untuk menyiapkan atau melakukan rencana perlakuan sebelum risiko terjadi. Pemilihan KRI juga sudah mempertimbangkan kesiapan perusahaan dalam pemantauannya, sehingga KRI dipastikan dapat dimonitor dan digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan atas risiko yang mungkin terjadi.

All major risks at PTPI also have mitigation plans. All of these mitigation plans have been included in the 2024 RKAP Work Program. In addition, each risk in the company already has Key Risk Indicators (KRI) as an Early Warning Signal (EWS) for the occurrence of risks at PTPI. The selected KRI is a leading/current indicator, so that management has enough time to prepare or carry out a treatment plan before the risk occurs. The selection of KRIs has also considered the company's readiness in monitoring, so that KRIs can certainly be monitored and used by management to make decisions on risks that may occur.

RTM konsolidasi yang dikelola oleh PI *Group* sampai dengan akhir 31 Desember Tahun 2024 ditunjukkan dalam Matriks Risiko sebagaimana berikut:

The consolidated RTM managed by PI Group until the end of December 31, Year 2024 is shown in the Risk Matrix as follows:



1. Bahan Baku (Feedstock Security)
2. Downtime Di Luar Rencana
3. Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Keselamatan Proses
4. Terjadi Pencemaran Lingkungan Hidup
5. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 Tidak Sesuai Rencana
6. Penjualan Produk Komersil Dibawah Rencana
7. Keterlambatan Progres Pelaksanaan Proyek Pengembangan
8. Proses Penyehatan Rekind Tidak Berjalan Sesuai Rencana
9. Gangguan Likuiditas Perusahaan
10. Kebutuhan Anggaran Subsidi Di Atas Rencana

1. Feedstock Security
2. Unplanned Downtime
3. Health, Occupational Accidents and Process Safety
4. Environmental Pollution Occurs
5. The Distribution of Subsidized Fertilizers for Fiscal Year 2024 is Not in accordance with the Plan
6. Commercial Product Sales Below Plan
7. Delay in Progress of Development Project Implementation
8. Rekind's Restructuring Process Did Not Go According to Plan
9. Company Liquidity Disruption
10. Subsidy Budget Requirement Above Plan

Profil Risiko Perusahaan Tahun 2024
Company Risk Profile for 2024

No	Uraian Risiko Risk Description	
1	**Nama Risiko:** Bahan Baku (Feedstock Security) • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 2 (Low Risk) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 1 (Low Risk) **Dampak Risiko:** • Bahan Baku Non Gas: Tidak ada opportunity loss produksi NPK karena tidak ada downtime yang disebabkan bahan baku s.d Desember 2024. • Bahan Baku Gas: Realisasi harga gas rata-rata s.d. Desember 2024 sebesar 99,8% dari RKAP 2024 **Realisasi Mitigasi Risiko:** • Bahan Baku NPK (Non Gas) 1. Evaluasi pemberlakuan sanksi terhadap pemasok 2. Pelaksanaan Pengadaan lebih awal mempertimbangkan lama waktu pengurusan ijin ekspor pemasok 3. Koordinasi dengan S&OP terkait rencana produksi 4. Pencarian pemasok baru bahan baku 5. Antisipasi Dampak Penyaluran Bahan Baku melalui Red Sea • Bahan Baku Gas 1. Mencari tambahan suplai gas dari sumber lain dengan harga yang kompetitif (Ex:PSP membeli dari sumber lain (Excess gas Medco E&P Indonesia) serta perpanjangan/Addendum kontrak gas yang berakhir di 2023 & akan berakhir di 2024 2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait antara lain Kementerian ESDM, SKK Migas dan lain-lain untuk keberlanjutan kebijakan HGBT dalam rangka ketahanan pangan nasional	**Risk Name:** Feedstock Security • Initial Risk Level 2024: 2 (Low Risk) • End Risk Level 2024: 1 (Low Risk) **Risk Impact:** • Non-Gas Raw Materials : There is no opportunity loss in NPK production because there is no downtime caused by raw materials until December 2024. • Gas Raw Materials: Realization of gas price averaged until December 2024 99.8% of the RKAP 2024. **Risk Mitigation Realization:** • NPK Raw Materials (Non Gas) 1. Evaluation of the implementation of sanctions against suppliers 2. Implementation of early procurement considering the length of time for processing supplier export licenses 3. Coordination with S&OP regarding production plans 4. Search for new suppliers of raw materials 5. Anticipate the Impact of Raw Material Distribution through Red Sea • Raw Material Gas 1. Seek additional gas supply from other sources at competitive prices (Ex: PSP buys from other sources (Excess gas Medco E&P Indonesia) as well as extension/Addendum of gas contracts that expire in 2023 & will expire in 2024 2. Coordinate with relevant Ministries and institutions including the Ministry of Energy and Mineral Resources, SKK Migas and others for the sustainability of the HGBT policy in the context of national food security.
2	**Nama Risiko:** Downtime diluar rencana • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 14 (Moderate) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 8 (Low to Moderate) **Dampak Risiko:** Tidak terdapat pencemaran lingkungan **Realisasi Mitigasi Risiko:** 1. Penggantian peralatan kritis tiap pabrik 2. Audit Perencanaan dan Post TA 3. Impementasi Maintenance Excellence 4. Penerapan manejemen aset pemeliharaan pabrik 5. Melakukan asesmen SIMPRO 6. Monitoring kondisi harian pabrik 7. Pengembangan Digital Fertilizer & Production Command Center 8. Pelaksanaan Plant Audit & Energy Audit 9. Melakukan monitoring bulanan atau triwulan mengenai kondisi pabrik di setiap Anak Perusahaan serta kendala yang dihadapi 10. Meningkatkan sharing knowledge baik di bidang Produksi, Pemeliharaan, dan Safety dengan melakukan FGD/POKJA 11. Pengaturan rate produksi 12. Evaluasi dan pemenuhan manpower SDM Produksi PI Group anper Pupuk 13. Melakukan revamping pabrik atau penggantian pabrik baru untuk menurunkan konsumsi energi	**Risk Name:** Unplanned downtime • Initial Risk Level Year 2024: 14 (Moderate) • Final Risk Level Year 2024: 8 (Low to Moderate) **Risk Impact:** No environmental pollution **Realization of Risk Mitigation:** 1. Replacement of critical equipment for each plant 2. Planning and Post TA Audit 3. Implementation of Maintenance Excellence 4. Implementation of plant maintenance asset management 5. Conducting SIMPRO assessment 6. Monitoring daily plant conditions 7. Development of Digital Fertilizer & Production Command Center 8. Implementation of Plant Audit & Energy Audit 9. Conducting monthly or quarterly monitoring of plant conditions in each Subsidiary and the obstacles faced 10. Increasing knowledge sharing both in the fields of Production, Maintenance, and Safety by conducting FGD/Working Group 11. Setting production rates 12. Evaluation and fulfillment of manpower of Production HC PI anper Pupuk Group 13. Revamping factories or replacing new factories to reduce energy consumption

Profil Risiko Perusahaan Tahun 2024
Company Risk Profile for 2024

No	Uraian Risiko Risk Description	
3	**Nama Risiko:** Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Keselamatan Proses • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 23 (High) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 25 (High) **Dampak Risiko:** Kehilangan jam kerja aman sebesar 101.870.411 jam kerja dan penurunan reputasi Perusahaan. **Realisasi Mitigasi Risiko:** 1. Standaridisasi & implementasi 12 Elemen-elemen Process Safety Management 2. Pelaksanaan Behavior Based Safety berupa evaluasi tindak lanjut Unsafe Action – Condition (UAC) 3. Pelaksanaan Major Accident Hazard (MAH) Risk Assessment pada 3 Anper Pupuk (PKC, PKT dan PIM) 4. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut rekomendasi Process Safety Inspection pada 5 Anper Pupuk	**Risk Name:** Health, Accident and Process Safety • Initial Risk Level 2024: 23 (High) • Final Risk Level 2024: 25 (High) **Risk Impact:** Loss of safe working hours amounting to 101,870,411 working hours and decline in the Company's reputation. **Risk Mitigation Realization:** 1. Standardization & implementation of 12 Elements of Process Safety Management 2. Implementation of Behavior Based Safety in the form of Unsafe Action - Condition (UAC) follow-up evaluation 3. Implementation of Major Accident Hazard (MAH) Risk Assessment at 3 Anper Pupuk (PKC, PKT and PIM) 4. Monitoring and Evaluation of follow-up Process Safety Inspection recommendations at 5 Anper Pupuk.
4	**Nama Risiko:** Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 16 (Moderate to High) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 1 (Low) **Dampak Risiko:** 1. Tidak ada sanksi dari regulator 2. Reputasi Perusahaan baik **Realisasi Mitigasi Risiko:** 1. Pemantauan kinerja pengolahan air limbah, emisi dan limbah B3 2. FGD aspek ketaatan & lebih dari taat dengan narasumber KLHK/Lainnya 3. Pelatihan dan/atau Sertifikasi Pengelolaan lingkungan	**Risk Name:** Environmental Pollution • Initial Risk Level 2024: 16 (Moderate to High) • Final Risk Level 2024: 1 (Low) **Risk Impact:** 1. No sanctions from regulators 2. Company reputation is good **Risk Mitigation Realization:** 1. Performance monitoring of wastewater treatment, emissions and hazardous waste 2. FGD on aspects of compliance & beyond compliance with KLHK/other resource persons 3. Environmental Management Training and/or Certification.
5	**Nama Risiko:** Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 Tidak Sesuai Rencana • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 17 (Moderate to High) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 1 (Low) **Dampak Risiko:** Tidak ada dampak s.d. Desember 2024 **Realisasi Mitigasi Risiko:** 1. Berkoordinasi dengan tim Digitalisasi Pemasaran dan tim Pusdatim Kementan dalam padu padan data 2. Melaksanakan program pemerintah dengan prinsip Single Platform 3. Mengimplementasikan perubahan regulasi/kebijakan tersebut 4. Melakukan evaluasi kinerja vendor angkutan secara berkala untuk mengantisipasi kinerja vendor angkutan yang tidak perform 5. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan data petani tervalidasi 6. Melakukan evaluasi penyaluran dan disampaikan ke kementan sebagai pertimbangan realokasi serta mendorong dilakukannya realokasi untuk mengoptimalkan penyaluran meliputi : • mendorong Dinas Kabupaten untuk melakukan realokasi tingkat Kecamatan; • mendorong Dinas Provinsi untuk melakukan realokasi tingkat kabupaten/kota; dan • mendorong Kementan untuk melakukan realokasi tingkat Provinsi	**Risk Name:** Distribution of Subsidized Fertilizers for Fiscal Year 2024 Not as Planned • Initial Risk Level for 2024: 17 (Moderate to High) • Final Risk Level for 2024: 1 (Low) **Risk Impact:** No impact until December 2024 **Risk Mitigation Realization:** 1. Coordinate with the Marketing Digitalization team and the Ministry of Agriculture's Pusdatim team in matching data 2. Implement the government program with the Single Platform principle 3. Implement the regulation/policy changes 4. Evaluate the performance of transport vendors periodically to anticipate the performance of transport vendors who do not perform 5. Coordinate with provincial and district governments to ensure validated farmer data 6. Evaluate the distribution and submit it to the Ministry of Agriculture as a consideration for reallocation and encourage reallocation to optimize distribution, including: • Encouraging the District Office to reallocate at the sub-district level; • Encouraging the Provincial Office to reallocate at the district/city level; and • Encouraging the Ministry of Agriculture to reallocate at the provincial level.

Profil Risiko Perusahaan Tahun 2024
Company Risk Profile for 2024

No	Uraian Risiko Risk Description	
6	**Nama Risiko:** Penjualan Produk Komersil dibawah Rencana • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 4 (Low) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 2 (Low) **Dampak Risiko:** Tidak ada Dampak s.d. Desember 2024, Realisasi Pendapatan komersil diatas RKAP. **Realisasi Mitigasi Risiko:** 1. Melakukan analisis pasar secara berkala untuk memahami tren harga, permintaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar sehingga dapat membantu dalam perencanaan strategi penjualan 2. Meminta Anper untuk menurunkan COGS di bawah harga pasar jika harga pasar lebih rendah daripada COGS, untuk optimalisasi target penjualan 3. Mengoptimalkan penjualan ekspor untuk Pupuk Majemuk karena masih memiliki harga yang kompetitif. 4. Mengoptimalkan penjualan NPK berbasis rock phosphate untuk sektor dalam Negeri 5. Melakukan penjualan skema bundling NPK dengan urea. 6. Monitoring Certificate of Analysis (CoA) untuk produk 7. Melakukan rapat koordinasi S&OP secara rutin 8. Melakukan kegiatan aktivasi brand melalui media Above The Line (ATL), Below The Line (BTL) dan Through The Line (TTL) sesuai dengan evaluasi pasar. 9. Melakukan evaluasi brand untuk produk single branding Urea dan NPK 10. Meningkatkan penjualan melalui Program Promo. 11. Melakukan kajian penjualan dan penetrasi pasar baru akibat over supply produk guna mencapai laba optimal. 12. Melakukan training dan sosialisasi product knowledge kepada salesforce terkait produk non subsidi retail 13. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk proses pengadaan angkutan sesuai tenggat waktu kebutuhan. 14. Melakukan evaluasi dan perencanaan kebutuhan angkutan di masing-masing wilayah distribusi. 15. Melakukan monitoring dan mendorong tersedianya stok pupuk non subsidi di kios. 16. Melakukan Program Kegiatan Benefit Model dan reward untuk mitra yang bergabung pada program makmur. 17. Melakukan Sosialisasi secara intensif kepada calon mitra 18. Melakukan customer approach untuk menjaga hubungan berkelanjutan dengan Key Account melalui kunjungan/pertemuan rutin. 19. Melakukan customer approach untuk memelihara hubungan dengan Key Account melalui awarding saat dilakukannya customer gathering.	**Risk Name:** Commercial Product Sales Below Plan • Initial Risk Level 2024: 4 (Low) • Final Risk Level 2024: 2 (Low) **Risk Impact:** No impact until December 2024, commercial revenue realisation is above the RKAP. **Risk Mitigation Realization:** 1. Conduct regular market analysis to understand price trends, demand, and other factors affecting the market so as to assist in sales strategy planning 2. Request Anper to lower COGS below market price if market price is lower than COGS, for sales target optimization 3. Optimize export sales for Compound Fertilizer as it still has a competitive price. 4. Optimizing rock phosphate based NPK sales for domestic sector 5. Conducting sales of NPK bundling scheme with urea. 6. Monitoring Certificate of Analysis (CoA) for products 7. Conducting regular S&OP coordination meetings 8. Conducting brand activation activities through Above The Line (ATL), Below The Line (BTL) and Through The Line (TTL) media in accordance with market evaluation. 9. Conduct brand evaluation for Urea and NPK single branding products 10. Increase sales through Promo Programs. 11. Conduct sales review and new market penetration due to product over supply in order to achieve optimal profit. 12. Conduct training and socialization of product knowledge to salesforce related to non-subsidized retail products 13. Coordinate with related work units for the procurement process of transportation according to the deadline. 14. Evaluate and plan transportation needs in each distribution area. 15. Monitoring and encouraging the availability of non-subsidized fertilizer stocks at kiosks. 16. Conducting Benefit Model Activity Programs and rewards for partners who join the prosperous program. 17. Conduct intensive socialization to prospective partners 18. Conduct customer approach to maintain sustainable relationship with Key Account through regular visits/ meetings. 19. Conducting customer approach to maintain relationship with Key Account through awarding during customer gathering.

Profil Risiko Perusahaan Tahun 2024
Company Risk Profile for 2024

No	Uraian Risiko Risk Description	
7	**Nama Risiko:** Keterlambatan progress pelaksanaan proyek pengembangan • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 24 (High) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 16 (Moderate to High) **Dampak Risiko:** Realisasi investasi pengembangan s.d Desember 2024 sebesar 127,67% dari RKAP s.d Desember 2024 dengan nilai sebesar Rp 4,1 T. **Realisasi Mitigasi Risiko:** 1. Improvement tata Kelola investasi Pengembangan 2. Melakukan monitoring Proyek dengan intensif dengan Anak Perusahaan ataupun kontraktor proyek 3. Memastikan kontrak EPC mengamankan Anak Perusahaan dan/atau PI sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi 4. Pendetailan lingkup dan item pekerjaan dalam perencanaan proyek Proyek Amurea Fak-Fak 1. Melakukan koordinasi intensif bersama Pemerintahan Pusat dalam hal penugasan Proyek Fak-Fak Amurea 2. Koordinasi untuk mendapatkan Tax Holiday Proyek Amurea Fak Fak Proyek Nitrat PKC Monitoring atas keputusan dan arahan Manajemen dalam pelaksanaan Proyek NPK Nitrat PKC	**Risk Name:** Delay in progress of development project implementation • Initial Risk Level 2024: 24 (High) • Risk Level End Year 2024: 16 (Moderate to High) **Risk Impact:** Realization of development investment up to December 2024 amounted to 127.67% of the RKAP up to December 2024 with a value of Rp 4.1 T. **Realization of Risk Mitigation:** 1. Improvement of Governance of Development investment. 2. Intensive monitoring of the Project with Subsidiaries or project contractors. 3. Ensure that EPC contracts secure Subsidiaries and/or PIs so as to reduce the possibility of default. 4. Detailed scope and work items in project planning. Amurea Fak-Fak Project 1. Intensive coordination with the Central Government in terms of the assignment of the Fak-Fak Amurea Project. 2. Coordination to obtain Tax Holiday for Fak Fak Amurea Project PKC Nitrate Project Monitoring of Management Decisions and directives in the implementation of PKC NPK Nitrate Project
8	**Nama Risiko:** Proses Penyehatan Rekind Tidak Berjalan sesuai Rencana • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 23 (High) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 1 (Low) **Dampak Risiko:** Rekind tidak dinyatakan Pailit dan ekuitasnya positif per Desember 2024. **Realisasi Mitigasi Risiko:** 1. Mendorong Rekind untuk melakukan negosiasi agar seluruh Vendor menerima proposal Perdamaian 2. Mendorong RekInd meminta mediasi dari KBUMN, BPKP, SKK Migas dan BPK agar RekInd mendapatkan pembebasan LD proyek JTB dan PLTU Lombok 3. Mendorong RekInd dan Bank Himbara menyepakati TOC kesepakatan Restrukturisasi hutang perbankan. 4. Menunjuk Pihak ketiga sebagai tim PMO untuk memonitoring tindak lanjut Pemenuhan komitmen proposal prodam dan implementasi RPP	**Risk Name:** Rekind's Restructuring Process Does Not Go according to Plan • Initial Risk Level in 2024: 23 (High) • End of Year 2024 Risk Level: 1 (Low) **Risk Impact:** Rekind is not declared bankrupt and its equity is positive as of December 2024. **Risk Mitigation Realization:** 1. Encouraging Rekind to negotiate so that all Vendors accept the Peace proposal 2. Encouraging RekInd to request mediation from ministry of SOE, BPKP, SKK Migas and BPK so that RekInd gets the LD exemption for the JTB and Lombok PLTU projects 3. Encouraging RekInd and Bank Himbara to agree on the TOC of the banking debt restructuring agreement. 4. Appoint a third party as a PMO team to monitor the follow-up of the fulfillment of prodam proposal commitments and the implementation of the RPP.

Profil Risiko Perusahaan Tahun 2024
Company Risk Profile for 2024

No	Uraian Risiko Risk Description	
9	**Nama Risiko:** Gangguan Likuiditas Perusahaan • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 4 (Low) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 1 (Low) **Dampak Risiko:** 1. Tidak ada tambahan beban keuangan dikarenakan realisasi beban keuangan dibawah RKAP. 2. Cash flow Perusahaan s.d Desember 2024 sebesar Rp 22,48 T. **Realisasi Mitigasi Risiko:** 1. Memastikan dokumen invoicing dapat tersedia dengan akurat dan tepat waktu dengan melakukan aktivitas penagihan piutang subsidi dan piutang usaha lebih intensif bersama-sama seluruh Anak Perusahaan. 2. Melakukan advokasi ke Pemerintah terkait mekanisme pembayaran kurang bayar subsidi, serta memonitor pencairan subsidi agar dibayarkan tepat waktu untuk menjaga cashflow Perusahaan. 3. Memastikan fasilitas pendanaan dari bank serta melakukan monitoring tingkat suku bunga pinjaman secara berkala dan mencari skema pinjaman dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah/kompetitif. 4. Membuat perencanaan arus kas perusahaan dengan cermat yang realisasinya dimonitor secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan 5. Melakukan monitoring kebutuhan modal kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan untuk memastikan kebutuhan modal kerja telah dan dapat dipenuhi	**Risk Name:** Company Liquidity Disruption • Initial Risk Level 2024: 4 (Low) • Final Risk Level 2024: 1 (Low) **Risk Impact:** 1. No additional financial expenses due to the realisation of financial expenses below the RKAP. 2. The Company's cash flow up to December 2024 amounted to Rp 22.48 T. **Risk Mitigation Realization:** 1. Ensure that invoicing documents are available accurately and on time by conducting more intensive collection activities for subsidy receivables and trade receivables with all Subsidiaries. 2. Advocate to the Government regarding the payment mechanism of subsidy underpayments, and monitor the disbursement of subsidies to be paid on time to maintain the Company's cash flow. 3. Ensure funding facilities from banks and monitor loan interest rates regularly and look for loan schemes with lower/competitive interest rates. 4. Carefully planning the company's cash flow, the realization of which is monitored periodically and/or as needed. 5. Monitoring working capital needs periodically and/or as needed to ensure working capital needs have been and can be met.
10	**Nama Risiko:** Kebutuhan Anggaran Subsidi diatas Rencana • Skala Risiko Awal Tahun 2024: 7 (Low to Moderate) • Skala Risiko Akhir Tahun 2024: 1 (Low) **Dampak Risiko:** Nilai Selisih antara Anggaran Subsidi (DIPA 2024) terhadap piutang subsidi tahun berjalan dan tahun – tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kinerja subsidi s.d Desember 2024 senilai Rp 3,37 T. **Realisasi Mitigasi Risiko:** 1. Menjalin komunikasi intens dengan Kementerian Pertanian dan/atau Kementerian Keuangan sehubungan dengan proyeksi kebutuhan anggaran subsidi pupuk untuk dijadikan referensi penyusunan RAPBN 2. Mencari alternatif instrumen sumber pendanaan yang kompetitif	**Risk Name:** Subsidy Budget Requirement above Plan • Initial Risk Level 2024: 7 (Low to Moderate) • Final Risk Level 2024: 1 (Low) **Risk Impact:** Difference between Subsidy Budget (DIPA 2024) and subsidy receivables for the current year and previous years by considering subsidy performance until December 2024 amounting to Rp 3.37 T. **Risk Mitigation Realization:** 1. Establish intense communication with the Ministry of Agriculture and/or the Ministry of Finance in relation to the projected budget requirements for fertilizer subsidies to serve as a reference for the preparation of the RAPBN 2. Seek alternative competitive funding source instruments.

PENILAIAN RISK MATURITY INDEX (RMI) TAHUN 2024

Untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah efektif dijalankan dan mendukung pencapaian sasaran Perseroan, maka Perseroan melakukan Penilaian Risk Maturity Index (RMI) setiap tahun.

PTPI telah melakukan penilaian Risk Maturity Index (RMI) tahun 2024 atas Tahun Buku 2023 yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen dari PT Deloitte Konsultan Indonesia. Observasi penilaian dilakukan terhadap periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 2024

To ensure that the implementation of risk management has been effectively implemented and supports the achievement of the Company's goals, the Company conducts a Risk Maturity Index (RMI) Assessment every year.

PTPI has conducted a Risk Maturity Index (RMI) assessment in 2024 for the 2023 Financial Year conducted by an Independent Assessment Team from PT Deloitte Konsultan Indonesia. Observation of the assessment is carried out for the period January 1 to December 31, 2023.

Penilaian RMI Kinerja Tahun Buku 2023 berdasarkan aspek dimensi dengan realisasi kinerja yang terdiri dari tingkat kesehatan peringkat akhir (final rating) dan peringkat komposit risiko. Aspek dimensi dalam penilaian RMI terdiri dari 5 aspek dimensi diantaranya budaya dan kapabilitas risiko, organisasi dan tata kelola risiko, kerangka risiko dan kepatuhan, proses dan kontrol risiko & model, data, dan teknologi risiko.

Hasil penilaian indeks kematangan risiko (Risk Maturity Index) PTPI dan Anak Perusahaan atas Kinerja Tahun Buku 2023 sebesar 2,8 kategori Berkembang+.

Pada bulan Oktober tahun 2024, telah disampaikan hasil Pelaporan Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) PTPI atas Kinerja Tahun Buku 2023 kepada Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sesuai dengan No SK-8/DKU.MBU/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 Perihal Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index).

RMI Performance Assessment for Financial Year 2023 is based on dimensional aspects with performance realization consisting of final rating health level and risk composite rating. Dimensional aspects in RMI assessment consist of 5 dimensional aspects including risk culture and capability, risk organization and governance, risk and compliance framework, risk process and control & risk model, data, and technology.

The results of the risk maturity index assessment (Risk Maturity Index) of PTPI and its Subsidiaries for the 2023 Financial Year Performance amounted to 2.8 in the Developing+ category.

In October 2024, the results of the Risk Maturity Index Assessment Report (Risk Maturity Index) of PTPI for the 2023 Financial Year Performance were submitted to the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia in accordance with No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 dated December 6, 2023 Regarding Technical Guidelines for Risk Maturity Index Assessment.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECAKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Sebagai bentuk komitmen Direksi PTPI dalam menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang sistemasis, terstruktur, dan berkelanjutan guna menjamin pencapaian Sasaran Perusahan, PTPI melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Risiko melalui pelaksanaan Penilaian Risk Maturity Index (RMI) setiap tahun sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI Nomor : SK-8/DKU. MBU/12/2023.

Hasil evaluasi tahunan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Manajemen Risiko di PTPI selama tahun 2024 telah memadai.

STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND/ OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE REGARDING THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

As a form of commitment from the Board of Directors of PTPI in implementing a systematic, structured and sustainable Integrated Risk Management System (MRT) to ensure the achievement of the Company's Goals, PTPI conducted an evaluation of the implementation of the MRT System through implementing an Implementation Maturity Level Assessment Risk Management (PMPMR) every year.

The results of the annual evaluation that has been carried out show that the implementation of the MRT system at PTPI during 2024 has been adequate.

PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Penilaian atas penerapan sistem manajemen risiko perusahaan, dapat tercermin dari hasil penilaian KPI Direktur Manajemen Risiko tahun 2024. Adapun beberapa indikator penilaian terkait Manajemen Risiko antara lain:

1. Implementasi roadmap perbaikan manajemen risiko;
2. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko;
3. Penurunan Tingkat Risiko Utama PI Group;
4. Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
5. % Penyampaian Contigency Plan KBUMN.

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The assessment of the implementation of the company's risk management system can be reflected in the results of the 2024 MR Compartment KPI assessment. Several assessment indicators related to Risk Management include:

1. Reducing PI Group's Main Risk Level;
2. Fulfillment of SLA for Corporate Action Risk Assessment;
3. Risk Maturity Index (RMI) score;
4. Fulfillment of Risk Management Organ Qualifications;
5. % Submission of Contigency Plan for ministry of SOE.

Atas implementasi sistem manajemen risiko Perusahaan sepanjang tahun 2024, diperoleh pencapaian KPI 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kinerja Manajemen Risiko Korporasi PTPI Tahun 2024 berjalan dengan baik.

For the implementation of the Company's risk management system throughout 2024, the KPI achievement was 100% as targeted. This indicates that the Enterprise Risk Management Performance of PTPI in 2024 is running well.

REALISASI DAN RENCANA SISTEM MANAJEMEN RISIKO KE DEPAN

Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko di Perusahaan, dalam kurun waktu tahun 2024–2025, Perusahaan melakukan beberapa kegiatan dan rencana pengembangan sistem manajemen risiko sebagai berikut:

REALIZATION AND RISK MANAGEMENT SYSTEM PLAN

In order to increase the effectiveness of risk management in the Company, in the period 2024–2025, the Company carry out several risk management activity and system development plans as follows:

2024	1. Penyebaran informasi tentang manajemen risiko yang disampaikan melalui media internal Perusahaan. 2. Melaksanakan penyampaian informasi tentang manajemen risiko yang disampaikan oleh Top Management. 3. Melaksanakan Risk Knowledge Sharing Program. 4. Melaksanakan program implementasi budaya risiko di lingkungan unit kerja dan program kolaborasi risiko antar unit kerja. 5. Memberikan apresiasi kepada karyawan Non-risk Officer yang sudah berperan aktif dalam mendukung pengelolaan risiko di unit kerja dengan penilaian dari pimpinannya melalui ajang penghargaan Guardian of Risk. 6. Memberikan apresiasi kepada Risk Officer yang sudah mendukung melakukan pengelolaan risiko di unit kerja melalui ajang penghargaan Risk Officer Awards. 7. Menyusun dan/atau memutakhirkan dokumen kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dengan memerhatikan kondisi dan kebutuhan Perusahaan serta regulasi yang berlaku. 8. Melakukan asesmen terhadap kategori dan klasifikasi risiko Perusahaan sebagai dasar penentuan komposisi organisasi dan kualifikasi SDM pengelola risiko. 9. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bidang Manajemen Risiko sesuai kondisi dan kebutuhan Perusahaan. 10. Menyelenggarakan klinik risiko secara berkala dan berkelanjutan bersama unit pemilik risiko. 11. Menyusun Strategi Risiko yang terdiri dari tujuan dan kebijakan manajemen risiko, selera risiko, toleransi risiko, batasan risiko, dimensi risiko, dan peta risiko. 12. Menyusun Risiko Utama/Risk That Matters (RTM) yang disertai dengan Indikator Risiko Utama (Key Risk Indicators) dan rentang Aman–Waspada–Bahaya. 13. Memantau efektivitas pengendalian risiko melalui penyusunan laporan kinerja pengendalian risiko. 14. Menerapkan Risk based Budgeting (RBB). 15. Melakukan reviu atas kajian risiko sehubungan dengan aksi korporasi Perusahaan. 16. Melaksanakan Uji Ketahanan (Stress Testing) dan Uji Kontrol Internal (Internal Control Testing) dalam rangka pemantauan risiko secara berkala. 17. Menyusun laporan efektivitas penerapan manajemen risiko di Perusahaan secara berkala. 18. Menyelenggarakan penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi penilaian tingkat maturitas dan/atau hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko di Pupuk Indonesia Grup lainnya.	1. Dissemination of information about risk management via the Company's internal media. 2. Carry out the delivery of information about risk management submitted by Top Management. 3. Implementing the Risk Knowledge Sharing Program. 4. Carry out a risk culture implementation program in the work unit environment and a risk collaboration program between work units. 5. Give appreciation to Non-risk Officer employees who have played an active role in supporting risk management in work units with assessments from their leaders through the Guardian of Risk award event. 6. Give appreciation to Risk Officers who have supported risk management in work units through the Risk Officer Awards. 7. Prepare and/or update Company Risk Management policy documents by taking into account the conditions and needs of the Company as well as applicable regulations. 8. Conduct an assessment of the Company's risk categories and classifications as a basis for determining the organizational composition and qualifications of risk management Human Capitals. 9. Organize training and certification in the field of Risk Management according to the conditions and needs of the Company. 10. Organizing risk clinics on a regular and ongoing basis with the risk owner unit. 11. Develop a Risk Strategy consisting of risk management objectives and policies, risk appetite, risk tolerance, risk limits, risk dimensions and risk map. 12. Develop the Main Risks/Risks That Matters (RTM) accompanied by Key Risk Indicators and a range of Safe–Alert–Danger. 13. Monitor the effectiveness of risk control through preparing risk control performance reports. 14. Implement Risk based Budgeting (RBB). 15. Review risk studies related to the Company's corporate actions. 16. Carrying out Stress Testing and Internal Control Testing in the context of regular risk monitoring. 17. Prepare reports on the effectiveness of risk management implementation in the Company on a regular basis. 18. Carrying out an assessment of the maturity level of risk management implementation and monitoring the follow-up to recommendations for the maturity level assessment and/or evaluation results of the implementation of risk management in other Pupuk Indonesia Group.

2025	1. Integrasi risk profile dan metrik strategi risiko. 2. Memformulasikan permodelan metrik strategi risiko. 3. Menyusun Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, Risk Assessment Criteria Matrix (RACM), Key Risk Indicator (KRI) dan Proses Manajemen Risiko. 4. Mengidentifikasi dan memantau emerging risk berkala. 5. Mengoptimalkan tupoksi dan pemenuhan personil. 6. Memutakhirkan landasan penerapan internal control. 7. Memastikan pemenuhan kebijakan dan dokumentasi Entity Level Control. 8. Mengidentifikasi aplikasi untuk standarisasi risiko, nearmiss dan loss event management. 9. Melengkapi Kebijakan Manajemen Risiko dan evaluasi berkala. 10. Memenuhi kualifikasi personil manajemen risiko sesuai regulasi. 11. Melakukan penguatan cybersecurity. 12. Meningkatkan kapabilitas Manajemen Risiko dan Internal Control. 13. Menentukan nilai ambang batas risiko dengan *statistical modelling*.	1. Integration of risk profile and risk strategy metrics. 2. Formulate risk strategy metrics modelling. 3. Develop Integrated Risk Management Guidelines, Risk Assessment Criteria Matrix (RACM), Key Risk Indicator (KRI) and Risk Management Process. 4. Identify and monitor emerging risks periodically. 5. Optimising duties and fulfilment of personnel. 6. Updating the foundation of internal control implementation. 7. Ensure the fulfilment of Entity Level Control policies and documentation. 8. Identify applications to standardise risk, nearmiss and loss event management. 9. Complete Risk Management Policy and periodic evaluation. 10. Qualify risk management personnel according to regulations. 11. Strengthen cybersecurity. 12. Improve Risk Management and Internal Control capabilities. 13. Determine risk threshold values with statistical modelling.

Kebijakan Kompensasi Jangka Panjang: Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen Perseroan (MSOP/ESOP)

Long-Term Compensation Policy: Share Ownership Program by Employees and/or Management of the Company (MSOP/ESOP)

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak memiliki program kompensasi jangka panjang yang ditunjukkan melalui pelasakanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau Management Stock Option Program (MSOP) dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau Employees Stock Option Program (ESOP). Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Until the end of 2024, the Company does not have a longterm compensation program demonstrated through the implementation of the Management Stock Option Program (MSOP) and the Employees Stock Option Program (ESOP). All shares of the Company are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

PERKARA PENTING

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2024 atau telah dinyatakan selesai di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

LEGAL MATTERS

Details of the legal issues faced by the Company in 2024 or which have been declared resolved in 2024 are as follows.

No	Perusahaan Company	Nilai Pokok dan Perkara Close Principal and Value	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company
1.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
2.	PT Petrokimia Gresik ("PKG")	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
3.	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP").	PSP mengajukan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Distributor Pupuk. PSP filed a civil lawsuit over alleged breach of contract by the Fertilzer Distributor	Dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI. In the process of Cassation at the Supreme Court of Indonesia	Melaksanakan penanganan perkara dengan berkoordinasi bersama konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perusahaan. Handling the case by coordinating with legal consultants appointed by the Company	Nilai gugatan/ klaim sebesar Rp2.122.568.597,-. Lawsuit/claim value of Rp 2,122,568,597,-

No	Perusahaan Company	Nilai Pokok dan Perkara Close Principal and Value	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company
4.		PSP sebagai Turut Tergugat dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan sengketa waris atas sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat. PSP as Co-Defendant in a lawsuit for Unlawful Act related to a land inheritance dispute between the Plaintiff and Defendant	Dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI. In the process of Cassation at the Supreme Court of Indonesia	Melaksanakan penanganan perkara dengan berkoordinasi bersama konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perusahaan. Handling the case by coordinating with legal consultants appointed by the Company	Tidak ada risiko hukum atau dampak materiil bagi Perusahaan. No legal risk or material impact for the Company
5.		PSP mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) dalam perkara perdata terhadap tindakan eksekusi yang dilakukan oleh juru sita pengadilan, terkait dengan perkara sengketa pertanahan PSP filed a third-party opposition (derden verzet) in a civil case against execution actions carried out by the court bailiff, related to a land dispute case.	Dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI. In the process of Cassation at the Supreme Court of Indonesia	Melaksanakan penanganan perkara dengan berkoordinasi bersama konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perusahaan. Handling the case by coordinating with legal consultants appointed by the Company	Ada risiko hukum atau dampak materiil bagi Perusahaan. There is a legal risk or material impact for the Company
6.	PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN")	PIN sebagai Tergugat II dalam perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dari transaksi jual beli batubara antara Penggugat sebagai pihak penjual dan Tergugat I sebagai pihak pembeli. PIN as Defendant II in a civil lawsuit for Unlawful Act arising from a coal sale and purchase transaction between the Plaintiff as seller and Defendant I as buyer	Perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi, dengan hasil PT Pupuk Indonesia Niaga dinyatakan menang. The case has been decided by the Supreme Court of Indonesia at the cassation level, with PT Pupuk Indonesia Niaga being declared victorious	Evaluasi internal terhadap sistem kontraktual telah dilakukan untuk mencegah kejadian serupa Internal evaluation of the contractual system has been carried out to prevent similar occurrences	Tidak ada risiko hukum atau dampak materiil bagi Perusahaan. No legal risk or material impact for the Company
7.		Sengketa Arbitrase antara PIN sebagai penjual dan penjual sehubungan dengan klaim ganti rugi atas transaksi jual beli batu bara. Arbitration dispute between PIN as seller and seller regarding a claim for damages for coal sale and purchase transactions	Dalam Proses Arbitrase di SIAC In Arbitration Process at SIAC	Manajemen telah menunjuk kuasa hukum dan sedang mengikuti seluruh proses arbitrase secara aktif. Management has appointed legal counsel and is actively following all arbitration processes	Memiliki dampak nilai klaim Guggatan kurang lebih USD 957.931,60 dan berpotensi PIN menanggung biaya pengadilan sebesar SGD 49,343.20 Has a claim value of approximately USD 957,931.60 and potentially PIN bearing court costs of SGD 49,343.20

No	Perusahaan Company	Nilai Pokok dan Perkara Close Principal and Value	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company
8.	PT Pupuk Kujang ("PKC")	PKC mengajukan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Distributor Pupuk. PKC filed a civil lawsuit for alleged breach of contract by Fertilizer Distributor	Dalam proses sidang gugatan di Pengadilan Negeri Karawang In the process of litigation at the Karawang District Court	Melaksanakan penanganan perkara berkoordinasi dengan konsultan hukum yang ditunjuk Perusahaan. Handling the case by coordinating with legal consultants appointed by the Company	Nilai gugatan Rp 2.666.967.431 Lawsuit value Rp 2,666,967,431
9.	PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP")	Perkara perdata gugatan Wanprestasi terkait dengan kelalaian pembayaran dalam penjualan beras. Civil case of breach of contract related to payment negligence in rice sales	Dalam proses sidang gugatan di Pengadilan Negeri kota Bandung In the process of litigation at the Bandung City District Court	Melaksanakan penanganan perkara dengan berkoordinasi bersama konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perusahaan. Handling the case by coordinating with legal consultants appointed by the Company	Nilai Piutang usaha PIP sebesar Rp2.800.000.000 dapat dipulihkan PIP's trade receivables worth Rp2,800,000,000 can be recovered
10.	PT Rekayasa Industri (Rekind).	Perkara Perdata, Rekind menjadi Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi oleh vendor proyek. Civil Case, Rekind as Defendant in a Breach of Contract Lawsuit by a project vendor.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak. The High Court of DKI Jakarta issued a decision upholding the District Court's decision, so the appeal filed by the Plaintiff was rejected	Melaksanakan penanganan perkara dengan berkoordinasi bersama konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perusahaan. Handling the case by coordinating with legal consultants appointed by the Company	Nilai Gugatan Rp1.642.422.131 Lawsuit Value Rp 1,642,422,131
11.		Rekind menjadi Turut Tergugat dalam perkara Perdata dalam Gugatan Wanprestasi antara owner dengan vendor. Rekind as Co-Defendant in a Civil Case in a Breach of Contract Lawsuit between the owner and the vendor	Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak. The East Jakarta District Court issued a decision stating that the lawsuit filed by the Plaintiff was rejected.	Melaksanakan penanganan perkara dengan berkoordinasi bersama konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perusahaan. Handling the case by coordinating with legal consultants appointed by the Company	Nilai Gugatan Rp3.661.265.000 Lawsuit Value Rp 3,661,265,000

No	Perusahaan Company	Nilai Pokok dan Perkara Close Principal and Value	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company
12.		Rekind menjadi Turut Tergugat dalam perkara Perdata Gugatan Wanprestasi terkait dengan perjanjian jual beli peralatan proyek. Rekind as Co-Defendant in a Civil Breach of Contract Lawsuit related to a project equipment sale and purchase agreement	Perkara dalam proses Banding di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Case in appeal process at the High Court of DKI Jakarta	Menghadiri setiap proses persidangan dan berkoordinasi dengan Tim Proyek Attending every court process and coordinating with the Project Team	Nilai Gugatan Rp2.030.600.000 Lawsuit Value Rp 2,030,600,000
13.		Rekind menjadi Penggugat dalam perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan penyerobotan tanah milik Rekind. Rekind as Plaintiff in a Civil Lawsuit for Unlawful Act related to land encroachment owned by Rekind	Perkara dalam proses di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Case in cassation process at the Supreme Court	Berkoordinasi dengan konsultan hukum Coordinating with legal consultants	Nilai Gugatan Rp1.817.000.000 Lawsuit Value Rp 1,817,000,000
14.		Rekind menjadi Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi Proyek Pemasangan SPM. Rekind as Plaintiff in a Breach of Contract Lawsuit for SPM Installation Project	Perkara dalam proses Banding di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Case in appeal process at the High Court of DKI Jakarta	Berkoordinasi dengan konsultan hukum Coordinating with legal consultants	Nilai gugatan Rp 5.680.484.382 Lawsuit value Rp 5,680,484,382
15.		Rekind menjadi Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi. Rekind as Defendant in a Breach of Contract Lawsuit	Pada tanggal 1 November 2024 telah dilakukan penandatangan akta perdamaian. On November 1, 2024, a peace agreement deed was signed	Menghadiri setiap proses persidangan dan berkoordinasi dengan Tim Proyek Attending every court process and coordinating with the Project Team	Tidak ada risiko hukum atau dampak materiil bagi Perusahaan. No legal risk or material impact for the Company
16.	PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
17.	PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
18.	PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG")	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, maupun Direksi tidak ada yang mendapatkan sanksi administrasi.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY THE RELEVANT AUTHORITIES

Throughout 2024, no Company, Subsidiaries, Board of Commissioners or Directors will receive administrative sanctions.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan melalui kemudahan akses informasi dan data Perusahaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi prinsip transparansi Informasi.

Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan, "bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik", dan sebagai pelaksanaan prinsip GCG.

Perusahaan selalu menyediakan informasi yang lengkap, bermanfaat, dan termutakhir terkait pemberian informasi kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yang dalam hal ini adalah Sekretaris Perusahaan.

Informasi-informasi yang relevan terkait Perusahaan telah disampaikan melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Penyampaian Laporan Manajemen Tahunan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris senantiasa tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Penyebaran informasi Perusahaan disampaikan melalui berbagai media komunikasi, seperti website, siaran pers, portal, media cetak, media elektronik dan surat edaran internal.

WEBSITE KORPORAT

Website korporat memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan yang menampilkan kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan. Situs web ini dapat diakses melalui link www.pupuk-indonesia.com.

The Company is committed to implementing information disclosure to stakeholders through easy access to Company information and data. This initiative is part of the implementation of the principle of information transparency.

This policy refers to Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information which states, "that openness of public information is a means of optimizing public supervision of the administration of the State and other Public Bodies and everything that has an impact on the public interest", and as an implementation of GCG principles.

The company always provides complete, useful and upto-date information regarding providing information to shareholders and stakeholders. Disclosure of this information is carried out by officials or work units in accordance with their duties, authority and responsibilities, which in this case is the Corporate Secretary.

Relevant information related to the Company has been submitted through Quarterly and Annual Management Reports to the Board of Commissioners before being submitted to Shareholders. Submission of Annual Management Reports to Shareholders and the Board of Commissioners is always on time, in accordance with established provisions.

Dissemination of Company information is conveyed through various communication media, such as websites, press releases, portals, print media, electronic media and internal circulars.

CORPORATE WEBSITE

Corporate websites have a significant role in managing information disclosure. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to the public and stakeholders by displaying the Company's operational activities and performance. This website can be accessed via the link www.pupuk-indonesia.com.

Melalui situs tersebut para stakeholder dapat menemukan banyak konten yang memuat berbagai informasi terkini Perusahaan seperti Profil PTPI, produk dan jasa, pemasaran, CSR & HSE, stok pupuk harian, Berita Terkini dan e-Proc, Tata Kelola Perusahaan termasuk Laporan Tahunan maupun Laporan Keberlanjutan. Guna meningkatkan kualitas informasi dan berita terkini mengenai Perusahaan yang disampaikan kepada publik, Perusahaan senantiasa memutakhirkan konten secara berkala dan berkelanjutan.

Through this site, stakeholders can find a lot of content containing the latest company information such as PTPI profiles, products and services, marketing, CSR & HSE, daily fertilizer stocks, Latest News and e-Proc, Corporate Governance including Annual Reports and Sustainability Reports. In order to improve the quality of the latest information and news regarding the Company that is conveyed to the public, the Company always updates content regularly and continuously.

MEDIA DIGITAL "SINTESA"

SINTESA merupakan majalah digital yang terbit setiap bulan yang digunakan sebagai media komunikasi seluruh karyawan Perusahaan. SINTESA memuat berbagai artikel informatif terkait kegiatan PTPI dalam kurun waktu dua bulan yang bertujuan menyebarkan informasi kepada karyawan mengenai informasi terkait Perusahaan.

Sebagai media internal Perusahaan, SINTESA menjadi wadah dan sarana bagi jajaran manajemen untuk dapat mensosialisasikan program kerja, strategi bisnis yang dijalankan serta target yang harus tercapai oleh Perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Informasi yang tercantum dalam majalah dikemas dalam bahasa informatif sehingga mudah dipahami oleh seluruh karyawan. SINTESA dibagikan terbatas hanya kepada internal karyawan serta Entitas Anak.

DIGITAL MEDIA "SINTESA"

SINTESA is a digital magazine published every month which is used as a communication medium for all Company employees. SINTESA contains various informative articles related to PTPI activities within a period of two months which aim to disseminate information to employees regarding information related to the Company.

As the Company's internal media, SINTESA is a forum and means for management to socialize work programs, business strategies being implemented and targets that must be achieved by the Company in the short, medium and long term. The information contained in the magazine is packaged in informative language so that it is easy for all employees to understand. SINTESA is distributed only to internal employees and Subsidiaries.

FORUM KOMUNIKASI INTERNAL

Perusahaan menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi karyawan dengan manajemen yang secara berkala dilakukan oleh Direksi kepada seluruh karyawan, Direksi kepada jajaran manajemen, serta masingmasing unit kerja baik melalui family gathering, rapat kerja, morning briefings, dan kegiatan perusahaan lainnya.

INTERNAL COMMUNICATION FORUM

The company provides communication facilities that serve as a means of discussion for employees and management which is periodically carried out by the Board of Directors to all employees, the Board of Directors to management, as well as each work unit through family gatherings, work meetings, morning briefings, and other company activities.

MEDIA SOSIAL

Perusahaan mengoptimalkan jejaring sosial media sebagai sarana komunikasi dua arah antara Perusahaan dengan stakeholders maupun dengan pelanggan dan masyarakat. Sarana komunikasi ini digunakan sebagai penyebaran informasi produk maupun sarana customer care. Sosial media perusahaan dapat diakses melalui:

- X : @Pupuk_Indonesia
- Instagram : PT PupukIndonesia
- Facebook : PT Pupuk Indonesia
- TikTok : pupuk.indonesia
- Youtube : PT Pupuk Indonesia Official

SOCIAL MEDIA

The Company optimizes social media networks as a means of two-way communication between the Company and its stakeholders as well as with customers and the public. This communication facility is used to disseminate product information and as a means of customer care. Company social media can be accessed via:

- X : @Pupuk_Indonesia
- Instagram : PT PupukIndonesia
- Facebook : PT Pupuk Indonesia
- TikTok : pupuk.indonesia
- Youtube : PT Pupuk Indonesia Official

LAPORAN TAHUNAN

Perusahaan juga menyediakan sarana informasi melalui Laporan Tahunan yang disusun setiap tahun. Laporan Tahunan ini akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi massa, media massa, dan masyarakat. Rincian tema Laporan Tahunan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah:

ANNUAL REPORT

The company also provides information facilities through the Annual Report which is prepared every year. This Annual Report will be submitted to Shareholders, regulators, mass organizations, mass media and the public. Details of the Annual Report themes for the last 5 (five) years are:

Tahun Year	Tema Theme
2024	Mendorong Keberlanjutan, Mengawal Ketahanan Pangan Promoting Sustainability, Safeguarding Food Security
2023	Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan Forging a Sustainable Future
2022	Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih Transformation Towards a Greener and Cleaner Industry
2021	Memperkuat Konsolidasi, Melewati Tantangan, Menyambut Peluang Strengthening Consolidation, Overcoming Challenges, Welcoming Opportunities
2020	Agrosolusi untuk Indonesia Agrosolutions for Indonesia

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Selain itu, PTPI juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan Perusahaan secara menyeluruh melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan bersamaan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi massa, media massa, dan masyarakat.

SUSTAINABILITY REPORT

Apart from that, PTPI also provides a means of information regarding the Company's activities as a whole through the Sustainability Report which is published simultaneously with the Annual Report. The Sustainability Report will be submitted to Shareholders, regulators, mass organizations, mass media and the public.

Tahun Year	Tema Theme
2024	Mendorong Keberlanjutan, Mengawal Ketahanan Pangan Promoting Sustainability, Safeguarding Food Security
2023	Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan Forging a Sustainable Future
2022	Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih Transformation Towards a Greener and Cleaner Industry
2021	Mengembangkan Keberlanjutan demi Ketahanan Pangan Developing Sustainability for Food Security
2020	Transformasi demi Mensukseskan Kedaulatan Pangan Nasional Transformation for the Success of National Food Sovereignty

MEDIA UNTUK PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Perusahaan juga memiliki ragam media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

MEDIA FOR SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

The Company also has a variety of communication media that are used to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements that have been achieved by the Company which can be seen in the table below.

Pemangku Kepentingan Stakeholder	**Media** Media
Regulator Regulator	Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja Komisi, dan Rapat dengan Kementerian/Lembaga Negara, publikasi kepatuhan di media massa. Public Hearings, Commission Working Meetings, and Meetings with Ministries/State Agencies, publication of compliance in the mass media.
Pemegang Saham Shareholders	RUPS, RUPSLB, rapat dengan Pimpinan Kementerian BUMN, publikasi kinerja dan capaian di media massa. GMS, EGMS, meetings with the leadership of the Ministry of SOE, publication of performance and achievements in the mass media.
Investor Investor	Website Perusahaan, akun media sosial Perusahaan, publikasi kinerja dan capaian di media massa. Company website, company social media accounts, publication of performance and achievements in mass media.
Lembaga Publik Public Institutions	Website Perusahaan dan akun media sosial Perusahaan Company Website and Company social media accounts
Konsumen Consumer	Website Perusahaan, akun media sosial Perusahaan, kanal media sosial Entitas Anak Company Website, Company social media accounts, Subsidiary Entity social media channels
Karyawan Employee	Majalah SPIN, TV Media, video, poster/e-flyer, TBanner, spanduk, e-mail Perusahaan, dan desktop background SPIN Magazine, TV Media, video, poster/e-flyer, TBanner, banner, company e-mail, and desktop background
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similiar Companies	Akun media sosial Perusahaan Company social media accounts
Mitra Kerja dan Rekanan Partners and Associates	Akun media sosial Perusahaan Company social media accounts
Organisasi Profesi Professional Organizations	Akun media sosial Perusahaan Company social media accounts
Masyarakat/Umum General/Public	Akun media sosial Perusahaan, publikasi kinerja dan capaian di media massa Company social media accounts, publication of performance and achievements in mass media

Pedoman Etika dan Perilaku
Ethical and Behavioral Guidelines

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) adalah bagian penting dari upaya Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, yang selama ini mendukung Perusahaan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Pedoman ini menjadi acuan bagi jajaran di lingkungan organisasi Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kegiatan seharihari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para pelanggan, rekanan maupun rekan kerja.

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan prinsip GCG. Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, yang tidak hanya bermanfaat bagi Pemegang Saham namun juga segenap pemangku kepentingan lain. Untuk itulah, Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman Etika dan Perilaku.

PENETAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PERUSAHAAN

Pedoman Etika dan Perilaku pertama kali diterbitkan dan ditandatangani secara bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada pada tanggal 5 November 2012. Sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 023/KEP/KOM/XII/2024 dan 141/A/HK/1/D0201/SK/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PTPI.

MAKSUD, TUJUAN, SERTA MANFAAT PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Maksud penerapan Pedoman Etika dan Perilaku bagi setiap Insan Perusahaan sebagai berikut:
1. Setiap Insan Perusahaan memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Setiap Insan Perusahaan agar berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
3. Setiap Insan Perusahaan menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;

The Code of Ethics and Behavior (Code of Conduct) is an important part of the Company's efforts to implement governance principles, which have supported the Company to achieve its stated Vision and Mission. This guideline is a reference for staff within the Company's organizational environment in carrying out daily tasks and activities as well as in conducting business relationships with customers, partners and co-workers.

Implementation of this Code of Ethics and Behavior is an important part of implementing GCG principles. The Company realizes the importance of implementing GCG as an effort to increase value and sustainable long-term business growth, which not only benefits Shareholders but also all other stakeholders. For this reason, the Company is committed to implementing GCG consistently, one of which is through the preparation of Ethics and Behavior Guidelines.

DETERMINATION OF COMPANY ETHICS AND BEHAVIOR GUIDELINES (CODE OF CONDUCT)

The Ethics and Behavior Guidelines were first issued and jointly signed by the President Commissioner and President Director on November 5 2012. In line with the Company's business developments, the Ethics and Behavior Guidelines has been updated through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTPI No. 023/KEP/KOM/XII/2024 and 141/A/HK/1/D0201/SK/2024 dated 20 December 2024 concerning the Code of Conduct of PTPI.

AIM, OBJECTIVES, AND BENEFITS OF THE CODE OF ETHICS AND BEHAVIOR

The purpose of implementing the Code of Ethics and Behavior for every Company Person is as follows:
1. Every Company Person understands that all Company activities are based on the principles of good corporate governance;
2. Every Company Personnel must behave well in carrying out all Company activities;
3. Every Company Personnel creates a healthy and comfortable working atmosphere within the Company environment;

4. Setiap Insan Perusahaan meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan sebagai bagian dari pengelolaan risiko sekaligus membangun reputasi Perusahaan.

Tujuan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bertingkah laku tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
2. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai secara menyeluruh;
3. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pegawai, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
4. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para stakeholders dalam berhubungan dengan PTPI sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
5. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham bahwa PTPI dikelola secara hati-hati (prudent), efisien, transparan, akuntabel, dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan; dan
6. Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan stakeholders.
7. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku ini secara konsisten dan konsekuen oleh Insan Perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

Perusahaan

- Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan; dan
- Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
- Pemegang Saham Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati (prudent), efisien, transparan, akuntabel, dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

4. Every Company Personnel minimizes the opportunity for deviations to occur as part of risk management while building the Company's reputation.

The objectives of implementing the Code of Ethics and Behavior (Code of Conduct) for the Company are as follows:

1. Becomes a guide to behavior regarding what can and cannot be done;
2. Creating a work environment that upholds company values and culture so that it will improve employee performance and productivity as a whole;
3. Encourage operational activities to be more efficient and effective considering that relationships with employees, work partners, customers, society, government and other stakeholders have ethical standards that must be observed;
4. Increase the value of the Company by providing certainty and protection to stakeholders in dealing with PTPI so as to produce a good reputation, which ultimately results in long-term business success;
5. Increase shareholder confidence that PTPI is managed prudently, efficiently, transparently, accountably and fairly to achieve the expected level of profitability while still paying attention to the Company's interests; And
6. Creating harmonious and mutually beneficial relationships with stakeholders.
7. The consistent and consistent application of this Code of Ethics and Behavior by Company Personnel is expected to provide benefits for:

Company

- Encourage the Company's operational activities to be more efficient and effective considering that relationships with customers, society, government and other stakeholders have ethical standards that must be observed; And
- Increasing the value of the Company by providing certainty and protection to stakeholders in their dealings with the Company, resulting in a good reputation, which ultimately results in long-term business success.
- Shareholders Increase confidence that the Company is managed in a trustworthy, prudent, efficient, transparent, accountable and fair manner to achieve the level of profitability expected by Shareholders while still paying attention to the interests of the Company.

Insan Perusahaan

- Memberikan pedoman kepada setiap Insan Perusahaan tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan; dan
- Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Insan Perusahaan secara menyeluruh.
- Masyarakat dan Pihak Lain yang Terkait Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

POKOK-POKOK ISI PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Adapun muatan yang terkandung dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan terdiri dari:

- Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud, Tujuan, dan Manfaat, Landasan Penyusunan, Visi-Misi, Tata Nilai Perusahaan, dan Daftar Istilah).
- Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan (Karyawan, Pemerintah, Pemegang Saham, Pelanggan, Mitra Usaha, Pesaing, Kreditur/Investor, Penyedia Barang/Jasa, Masyarakat dan Lingkungan Sekitar, Media Massa, dan Entitas Anak sebagai Anggota Holding).
- Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan (Komitmen Insan Perusahaan, Etika Kerja Insan Perusahaan, Tata Perilaku Insan Perusahaan).

- Penegakkan Pedoman Etika dan Perilaku (Komitmen Penegakkan Etika dan Perilaku, Sosialisasi dan Internalisasi, Pelanggaran).

PENGUNGKAPAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan tanggung jawab seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya Perusahaan sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

Pelaksanaan kode etik ini merupakan upaya untuk:

- Memberikan pemahaman kepada seluruh Insan Perusahaan bahwa Perusahaan beroperasi secara jujur dan terbuka, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, dengan tingkat perputaran karyawan yang rendah dan peningkatan kesejahteraan;

Company People

- Provide guidance to each Company Personnel regarding behavior that is desired or prohibited by the Company; And
- Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics and openness so that it will improve the performance and productivity of every Company Person as a whole.
- Community and Other Related Parties Creating a harmonious and mutually beneficial relationship with the Company, which will ultimately create economic and social prosperity for the community and other related parties.

KEY CONTENTS OF THE CODE OF ETHICS AND BEHAVIOR

The content contained in the Company's Code of Ethics and Conduct consists of:

- Introduction (Background, Purpose, Objectives and Benefits, Foundation for Preparation, Vision-Mission, Company Values and Glossary of Terms).
- Company Ethics with Stakeholders (Employees, Government, Shareholders, Customers, Business Partners, Competitors, Creditors/Investors, Goods/Service Providers, Community and Surrounding Environment, Mass Media, and Subsidiaries as Holding Members).
- Commitment, Work Ethics and Code of Conduct for Company Personnel (Commitment of Company Personnel, Work Ethics of Company Personnel, Code of Conduct for Company Personnel).
- Enforcement of Ethics and Behavior Guidelines (Commitment to Enforcement of Ethics and Behavior, Socialization and Internalization, Violations).

DISCLOSURE THAT THE CODE OF ETHICS APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Code of Ethics and Behavior is the responsibility of all employees, Directors, Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners to behave in accordance with the Company's culture so that professional, responsible, reasonable, appropriate and trustworthy behavior is realized in conducting business relations with fellow workers. and work partners.

Implementation of this code of ethics is an effort to:

- Provide understanding to all Company Personnel that the Company operates honestly and openly, thereby creating a good work environment, with low employee turnover and increased welfare;

- Menjadi bagian dari komunitas tertentu, di mana menjaga hubungan baik merupakan hal mendasar bagi sukses jangka panjang Perusahaan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi; dan
- Menjadi bagian dari industri pupuk nasional, di mana pelaksanaan dan komitmen terhadap Kode Etik dapat mendukung Perusahaan dalam berbagai perkara penting, serta menjadi bagian dari manajemen risiko yang baik, dan mampu membangun reputasi Perusahaan.

- Be part of a particular community, where maintaining good relations is fundamental to the Company's longterm success in achieving social prosperity and economic improvement; and
- Become part of the national fertilizer industry, where implementation and commitment to the Code of Ethics can support the Company in various important matters, as well as being part of good risk management, and able to build the Company's reputation.

UPAYA PENYEBARAN, SOSIALISASI PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU, SERTA PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS

Sebagai wujud komitmen terhadap penegakan prinsip GCG, Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku, karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan PTPI yang berperilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi serta seluruh karyawan.

Penandatanganan pernyataan komitmen, dalam bentuk Pakta Integritas, terhadap Pedoman Etika dan Perilaku sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

DISSSEMINATION EFFORTS, SOCIALIZATION OF ETHICS AND BEHAVIOR GUIDELINES, AND SIGNING OF THE INTEGRITY PACT

As a form of commitment to upholding GCG principles, the Company always disseminates the Code of Ethics and Behavior, because socialization is an important stage in creating PTPI people who behave in accordance with the Company's Culture. The Ethics and Behavior Guidelines are communicated and disseminated to the Board of Commissioners and its supporting organs, the Board of Directors and all employees.

Signing a statement of commitment to the Code of Ethics and Behavior until 2024 as follows:

Jumlah Insan PTPI yang Telah Menandatangani Pernyataan Komitmen Tahun 2024
Number of PTPI People Who Have Signed the Commitment Statement for 2024

2.185

Persentase Insan PTPI yang Telah Menandatangani Pernyataan Komitmen Tahun 2024
Percentage of PTPI People Who Have Signed the 2024 Commitment Statement

100%

Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

The details can be seen in the table below.

No.	Jabatan Position	Jumlah Total	Jumlah yang Sudah Mendatangani Pakta Integritas Number Who Have Signed the Integrity Pact	Persentase Percentage
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	11	11	100%
2	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organ of the Board of Commissioners	12	12	100%
3	Direksi Board of Directors	9	9	100%
4	Karyawan Employee	2.153	2.153	100%
	Jumlah Total	**2.185**	**2.185**	**100%**

KEBIJAKAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan dan menyediakan fasilitas pengaduan terhadap pelanggaran etika Perusahaan melalui aplikasi Whistleblowing System (WBS) Perusahaan. Dalam Pedoman Etika dan Perilaku, apabila terdapat pelanggaran etika maka untuk memberikan efek jera kepada seluruh Insan Perusahaan, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

DISCIPLINARY ENFORCEMENT AND VIOLATION HANDLING POLICY

The Company always carries out regular monitoring of enforcement and provides complaint facilities for violations of Company ethics through the Company's Whistleblowing System (WBS) application. In the Ethics and Behavior Guidelines, if there is an ethical violation, to provide a deterrent effect to all Company Personnel, sanctions will be given in accordance with the applicable rules and regulations.

SANKSI PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Berdasarkan Peraturan Perusahaan No. 079/SK/DIR/2017 jenis sanksi diklasifikasikan dari sanksi yang teringan hingga yang terberat.

SANCTIONS FOR VIOLATING THE CODE OF ETHICS AND BEHAVIOR

Based on Company Regulation No. 079/SK/DIR/2017 types of sanctions are classified from the lightest to the heaviest sanctions.

No.	Pedoman Guidelines	Uraian Description
1	Klasifikasi Sanksi: Sanction Classification:	Jenis Sanksi: Type of Sanction:
	Sanksi Ringan Light Sanction	Teguran Lisan dan Tertulis Oral and Written Reprimands
	Sanksi Sedang Medium Sanction	• Surat Peringatan Tertulis (Warning Slip) A berlaku 6 (enam) bulan, Surat • Peringatan Tertulis (Warning Slip) B berlaku 6 (enam) bulan, dan Surat • Peringatan Tertulis (Warning Slip) C berlaku 6 (enam) bulan • Written Warning Slip (Warning Slip) A is valid for 6 (six) months, Letter • Written Warning (Warning Slip) B is valid for 6 (six) months, and a Letter of • Written Warning (Warning Slip) C valid 6 (six) months
	Sanksi Berat Heavy Sanction	Surat Peringatan Tertulis (Warning Slip) C dan penurunan Grade atau jabatan minimal satu tingkat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Written Warning Slip C and downgrading of Grade or position at least one level, and Termination of Employment
	Ganti Kerugian Compensation	• Apabila terjadi kerugian material terhadap Perusahaan, akibat dari perbuatan pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja, di samping sanksi hukuman seperti tersebut di atas, diberikan juga sanksi/hukuman ganti rugi senilai kerugian yang ditimbulkan. • Ganti rugi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji, jasa operasi, bantuan cuti, dan hak-hak lainnya. Apabila karyawan tidak bersedia mengganti maka akan diproses secara hukum. • In the event of a material loss to the Company, as a result of an act of violations of work rules and discipline, in addition to punitive sanctions above, sanctions/penalties of compensation shall also be imposed worth the loss incurred. • Compensation can be made through salary deductions, operating services, assistance leave, and other rights. If the Employee is not willing to replace then will be prosecuted.

No.	Pedoman Guidelines	Uraian Description
2	Bentuk Sanksi Form of Sanction	• Perusahaan akan memberikan sanksi/hukuman kepada karyawan yang melakukan pelanggaran sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran yang dilakukan karyawan; • Pemberian sanksi/hukuman tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan usaha korektif dari Perusahaan, agar karyawan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari; • Teguran lisan bersifat internal unit kerja dan harus menjadi perhatian serius dari karyawan, bahwa teguran lisan tersebut sudah merupakan catatan dari atasan untuk menilai konduite karyawan yang bersangkutan; • Teguran tertulis berlaku untuk seluruh lingkungan unit kerja di Perusahaan dan juga akan mempengaruhi konduite dari karyawan yang bersangkutan; • Selama masa proses penyelesaian kasus pelanggaran hingga berlakunya sanksi seperti tersebut di atas, karyawan tidak berhak atas kenaikan pangkat baik promotion increase maupun merit increase; • Apabila ada atasan yang tidak mau melaksanakan dan/atau mengeluarkan sanksi/hukuman terhadap karyawan yang patut menerimanya dalam kurun waktu tertentu, maka pejabat/atasan tersebut akan diberikan sanksi administratif atau warning slip oleh pejabat yang lebih tinggi lagi dan diketahui oleh Departemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). • The Company will impose sanctions/punishments on employees who commits an offense according to the level of guilt/violation done by employees; • The provision of sanctions/punishments is intended as an effort coaching and corrective efforts from the Company, so that employees can improve their attitudes and behavior in the future; • Oral reprimands are internal to the work unit and must be taken seriously from employees, that the oral reprimand is already a record of the supervisor to assess the conduct of the employee concerned; • Written reprimands apply to all work units in the Company and will also affect the conduct of the employee concerned; • During the process of resolving infringement cases until the entry into force sanctions as mentioned above, the employee will not be entitled to promotion both promotion increase and merit increase; • If there are superiors who are unwilling to implement and/or issue sanctions/punishments against employees who deserve it in a certain period of time, then the official/superior will be sanctioned administrative or warning slip by a higher official and known by the Human Capital Management Department (HRM)

JUMLAH PELANGGARAN ETIKA

Dalam rangka penegakan terhadap etika Perusahaan, PTPI senantiasa melakukan tindak disiplin dengan rincian sanksi yang dikenakan selama tahun 2024, 2023, dan 2022.

NUMBER OF ETHICS VIOLATIONS

In order to enforce Company ethics, PTPI always carries out disciplinary actions with details of sanctions imposed during 2024, 2023 and 2022.

Sanksi Sanction	2024	2023	2022
Tindakan Disiplin Disciplinary Action	27	41	42
Jumlah Total	**27**	**41**	**42**

MANAJEMEN REVIEW TERHADAP PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Perusahaan secara konsisten melakukan kajian terhadap penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dalam rangka mengevaluasi kinerja Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku sekarang ditetapkan pada tahun 2021 dan merupakan pemutakhiran dari pedoman sebelumnya.

MANAGEMENT REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF ETHICS AND BEHAVIOR GUIDELINES

The Company consistently reviews the implementation of the Code of Ethics and Behavior in order to evaluate the Company's performance. The current Code of Ethics and Conduct was established in 2021 and is an update of the previous guideline.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

PTPI berkomitmen dan menerapkan aturan untuk setiap bentuk pemberian, permintaan dan penerimaan gratifikasi. Para Insan PTPI dilarang mencemarkan nama baik Perusahaan melalui tindakan penyelewengan atau tindakan yang merugikan citra Perusahaan. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada diberikannya sanksi oleh Perusahaan mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat. Kebijakan ini merupakan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perusahaan memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. PI-SEK-PD-009 Rev. 2 tanggal 22 November 2021 dan Prosedur Pengelolaan Laporan Gratifikasi No. PI-SEKPR-019 Rev. 2 tanggal 14 Agustus 2019. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi Insan PTPI dalam penerapan pengendalian gratifikasi.

Pada tahun 2020, Perusahaan sedang melakukan proses pemutakhiran Pedoman dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi mengacu pada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Pada tanggal 17 Desember 2020 Direksi dan Dewan Komisaris melakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi PTPI dan Entitas Anak yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK RI, sebagai wujud penguatan komitmen Perusahaan dalam mengendalikan gratifikasi.

KATEGORI GRATIFIKASI

Kategori gratifikasi yang diatur dalam pedoman di atas mencakup penolakan terhadap gratifikasi, penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi, dan permintaan gratifikasi.

PENOLAKAN GRATIFIKASI

Seluruh Insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) "DILARANG" menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan:

PTPI is committed to and applies rules for every form of giving, requesting and receiving gratuities. PTPI personnel are prohibited from defaming the Company through acts of fraud or actions that are detrimental to the Company's image. Violation of this rule may result in sanctions being imposed by the Company ranging from light sanctions to heavy sanctions. This policy is an effort to apply the principles of Good Corporate Governance consistently and sustainably in every Company business activity.

GRATIFICATION CONTROL GUIDELINES

The company has Gratification Control Guidelines No. PI-SEKPD-009 Rev. 2 dated November 22 2021 and Gratification Report Management Procedure No. PI-SEK-PR-019 Rev. 2 dated 14 August 2019. These guidelines are a reference for PTPI personnel in implementing gratuity control.

In 2020, the Company is carrying out the process of updating the Gratification Control Guidelines and Procedures referring to KPK Regulation No. 2 of 2019 dated 5 November 2019 concerning Gratification Reporting.

On December 17 2020, the Board of Directors and Board of Commissioners signed a Statement of Commitment to Implement Gratification Control for PTPI and Subsidiaries, witnessed by the Gratification Director of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, as a form of strengthening the Company's commitment to controlling gratification.

GRATIFICATION CATEGORY

The categories of gratification regulated in the guidelines above include refusal of gratification, acceptance of gratification, giving of gratification, and request for gratification.

REFUSAL OF GRATIFICATION

All Company Personnel who, because of their position and contrary to their duties and obligations, and/or members of the immediate family (husband/wife, children) are "PROHIBITED" from receiving directly or indirectly gratification from any party who has a business relationship or is a competitor of the Company:

- Berupa/dalam bentuk uang/setara uang;
- Barang;
- Rabat (discount);
- Komisi;
- Pinjaman tanpa bunga;
- Undangan makan;
- Tiket perjalanan;
- Fasilitas penginapan;
- Perjalanan wisata;
- Pengobatan gratis;
- Voucher;
- Traveller cheque;
- Kompensasi;
- Hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi;
- Hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Terhadap tawaran/pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan ini, Insan Perusahaan wajib "MENOLAK" setiap tawaran/pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak pemberi. Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka Insan Perusahaan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai alat pemantauan kepatuhan Insan Perusahaan terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

PENERIMAAN GRATIFIKASI

Penerimaan gratifikasi terbagi dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan sehingga dapat dianggap suap, dan gratifikasi dalam kedinasan.

Sebaliknya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan atau penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar, serta pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat.

- In the form of/in the form of money/money equivalent;
- Goods;
- Rebates (discounts);
- Commission;
- Interest-free loans;
- Dining invitations;
- Travel ticket;
- Lodging facilities;
- Tour;
- Free treatment;
- Vouchers;
- Traveler's checks;
- Compensation;
- Gifts that have high financial value;
- Entertainment and other things that provide personal benefits for oneself and one's family, received at home or abroad and carried out using electronic means or without electronic means.

Regarding offers/giving of gratuities that do not comply with the provisions set out in this policy, Company Personnel are obliged to "REFUSE" each offer/giving in question by providing an explanation of this regulation to the party giving it. Upon rejection of receipt of gratification, the Company Personnel must report it to the Gratification Control Unit as a means of monitoring the Company Personnel's compliance with the Gratification Control Guidelines.

ACCEPTANCE OF GRATUITIES

Acceptance of gratuities is divided into 2 (two) approaches, namely gratuities that must be reported and gratuities that do not have to be reported. Gratifications that must be reported are gratifications related to their position or duties in official duties or outside of official duties so that they can be considered bribes, and gratifications in the official service.

On the other hand, gratuities that are not required to be reported are gratifications that are generally accepted, do not conflict with applicable laws, are seen as a form of expression of hospitality or respect in social relations within the limits of reasonable values, as well as gifts that are within the realm of customs, customs and norms. exist in society

PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pemberian gratifikasi yang "DILARANG" adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dapat dianggap suap.

PERMINTAAN GRATIFIKASI

Dalam konteks permintaan gratifikasi, Insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan "PENOLAKAN" setiap permintaan dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak peminta secara sopan dan santun dan apabila diperlukan dapat menyampaikan ketentuan dalam pedoman tersebut sebagai bagian dari sosialisasi aturan.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Sebagai upaya pencegahan terjadinya gratifikasi, Perusahaan telah menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/072/2017 tentang Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PTPI tanggal 26 Desember 2017. Dalam Surat Keputusan tersebut, fungsi UPG melekat pada fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan dengan tugas pokok, yaitu melakukan review kebijakan, melakukan pemantauan, dan pengendalian gratifikasi, serta melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi antara lain:
1. Menerima pelaporan gratifikasi dari Insan Perusahaan;
2. Melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima;
3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada penerima, pemberi, atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi;
4. Menentukan atau memberikan rekomendasi penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Perusahaan;
6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh Perusahaan maupun oleh penerima;
7. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Kerja Satuan Pengawasan Internal apabila terjadi pelanggaran pedoman gratifikasi oleh Insan Perusahaan;
8. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Direksi dan KPK.

GIVING GRATUITIES

Giving "PROHIBITED" gratuities is giving that is done with the aim of bribery or gratification that can be considered bribery.

GRATIFICATION REQUEST

In the context of requests for gratuities, if Company Personnel are asked to provide gratuities that are not in accordance with the provisions for giving, they should "REFUSE" each request by providing an explanation of this regulation to the requesting party in a polite and courteous manner and if necessary, convey the provisions in the guidelines as follows. part of the socialization of the rules.

GRATIFICATION CONTROL UNIT

As an effort to prevent the occurrence of gratification, the Company has established a Gratification Control Unit (UPG) based on Directors' Decree No. SK/DIR/072/2017 concerning the PTPI Gratification Control Unit (UPG) dated 26 December 2017. In this Decree, the function of the UPG is attached to the Governance and Compliance function with the main tasks, namely conducting policy reviews, monitoring and controlling gratuities, as well as conducting socialization about gratuities within the Company.

The duties and authorities of the Gratification Control Unit include among others:
1. Receive gratification reports from Company Personnel;
2. Process reports of gratuities received;
3. Confirm directly the gratification report to the recipient, giver, or other third party related to the incident of receiving/giving gratification;
4. Determine or provide recommendations for the handling and use of gratuities;
5. Coordinate, consult and write to the Corruption Eradication Commission on behalf of the Company;
6. Monitor follow-up on the use of gratuity receipts by the Company and by recipients;
7. Provide follow-up recommendations to the Internal Audit Work Unit if there is a violation of gratification guidelines by Company Personnel;
8. Report the results of handling gratuity reporting to the Board of Directors and the Corruption Eradication Committee.

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka menjamin Pedoman Pengendalian Gratifikasi dapat diketahui oleh seluruh Insan Perusahaan, maka:

- Seluruh unit kerja berkewajiban mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada mitra/rekanan atau pihak ketiga lainnya;
- Seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga berkewajiban menyampaikan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak dalam mata rantai pemasok (penyedia barang/jasa, agen, distributor, konsultan, auditor/assessor dan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya);
- Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak eksternal terkait dengan adanya Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
- Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban memonitor pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi;
- Perusahaan secara periodik menyampaikan "Imbauan Larangan Penerimaan dan/atau Pemberian Gratifikasi" pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri serta menjelang Hari Raya Natal dan tahun baru.

PROSES PELAPORAN GRATIFIKASI

Insan Perusahaan dapat melaporkan penerimaan, pemberian, penolakan, dan permintaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan dan/atau langsung melalui sistem aplikasi pelaporan gratifikasi online yang diakses melalui www.gol.kpk.go.id serta melalui media pelaporan dugaan pelanggaran yang disediakan perusahaan www.pihclean.pupuk-indonesia.com.

IMPLEMENTATION OF GRATIFICATION CONTROL

In order to ensure that the Gratification Control Guidelines can be known by all Company Personnel, then:

- All work units are obliged to include provisions prohibiting the receipt or giving of gratuities (gifts/facilities) in every announcement in the process of procuring goods/services and/or in contracts for the procurement of goods and services as well as in letters sent to partners/associates or third parties other;
- All work units that have working relationships with third parties are obliged to convey the Gratification Control Policy to all parties in the supply chain (goods/service providers, agents, distributors, consultants, auditors/assessors and customers and other stakeholders);
- The Gratification Control Unit is obliged to continuously provide information to all workers and external parties regarding the Gratification Control Policy;
- The Gratification Control Unit is obliged to monitor the implementation of the Gratification Control Policy and provide regular reports to the Board of Directors;
- The Company periodically conveys an "Advice on the Prohibition of Accepting and/or Giving Gratuities" in the run-up to Eid al-Fitr and before Christmas and New Year.

GRATIFICATION REPORTING PROCESS

Company personnel can report receipt, giving, rejection and requests for gratification through the Company's Gratification Control Unit and/or directly through the online gratification reporting application system which is accessed via www.gol. kpk.go.id as well as through reporting media for suspected violations provided by the company www.pihclean.pupukindonesia.com.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Violations of the provisions stipulated in the Gratification Control Guidelines will be subject to sanctions in accordance with the provisions applicable to the Company

Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2024
Number of Gratification Reports in 2024

Kategori Laporan Gratifikasi Category of Gratification Report	Jumlah Laporan Number of Report
Penolakan Rejection	8
Penerimaan Reception	145
Dikelola Perusahaan Company Managed	66
Menjadi Milik Negara Bacome State Owned	10
Dikembalikan ke Penerima Return to Recipient	58
Dalam Proses Analisis KPK In KPK Analysis Process	11
Pemberian Giving	1
Permintaan Inquiry	0
Jumlah Laporan Gratifikasi Total Gratification Report	**154**

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Conflict of Interest Management

Sebagai upaya menghindari segala potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan, PTPI menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan No. Dok. PI-TKK-PD-001 Rev.0 tanggal 8 September 2017. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan pada tahun 2021 yaitu Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan No. Dok. PI-SEK-PD-008 Rev. 1 tanggal 27 Desember 2021 yang telah disampaikan kepada Anak Perusahaan melalui Surat Edaran No. SE-03/KK/610/SE/2022 tanggal 26 Januari 2022.

In an effort to avoid any potential conflicts of interest that could be detrimental to the Company, PTPI has established Guidelines for Handling Conflicts of Interest No. Dock. PI-TKKPD-001 Rev.0 dated September 8, 2017. These guidelines have been updated in 2021, namely Guidelines for Management of Conflicts of Interest No. Dock. PI-SEK-PD-008 Rev. 1 dated December 27, 2021 which has been submitted to Subsidiaries through Circular Letter No. SE-03/KK/610/SE/2022 dated January 26, 2022.

Selama Tahun 2024 terdapat 2 aduan benturan kepentingan, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat.

During 2024 there were 2 conflict of interest complaints, but all declared ineligible.

Guna menghindari benturan kepentingan, pejabat Perusahaan wajib menggunakan kewenangannya secara baik dan benar. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan Perusahaan dan berbagai faktor lain.

In order to avoid conflicts of interest, Company officials are required to use their authority properly and correctly. This is done by considering the interests of the Company, the interests of the community, the interests of Company Personnel and various other factors.

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan seluruh Insan Perusahaan. Insan Perusahaan harus menyadari dan memahami masalah benturan kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Implementing policies to prevent conflicts of interest requires the involvement of all Company Personnel. Company personnel must be aware of and understand the issue of conflicts of interest and must be able to anticipate and prevent conflicts of interest.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Perusahaan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mempublikasikan Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingan;
2. Secara berkala mengingatkan Insan Perusahaan adanya Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingan;
3. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
4. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan.
5. Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami Kebijakan dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihakpihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Perusahaan.

To encourage participation and involvement of Company Personnel, the following efforts are made:

1. Publish Conflict of Interest Policies and Guidelines;
2. Periodically remind Company Personnel of the Conflict of Interest Policy and Guidelines;
3. Ensure that rules and procedures are easy to obtain and understand;
4. Provide guidance on how to handle conflicts of interest.
5. Providing consultation assistance and advice for those who do not understand the Policy and Guidelines for Handling Conflicts of Interest, including to external parties related to or related to the Company

Kebijakan Anti-Fraud/ Antikorupsi

Anti-Fraud/Anti-Corruption Policy

Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang antikorupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan hal di atas, Perusahaan telah menetapkan beberapa Kebijakan yang meliputi:

1. Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016, tanggal 18 Januari 2022 telah dimutakhirkan melalui Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi pada tanggal 28 November 2024.

The Company has a high commitment to creating a healthy business climate, avoiding actions, behavior or actions that could give rise to conflicts of interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritizing the Company's interests above personal, family, group or class interests. The company also always pays attention to anti-corruption policies as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. In line with the above, the Company has established several Policies which include:

1. The Anti-Bribery Policy and Commitment in the context of implementing the SNI ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System, dated January 18, 2022 has been updated through the Integrated Management System Policy on November 28, 2024.

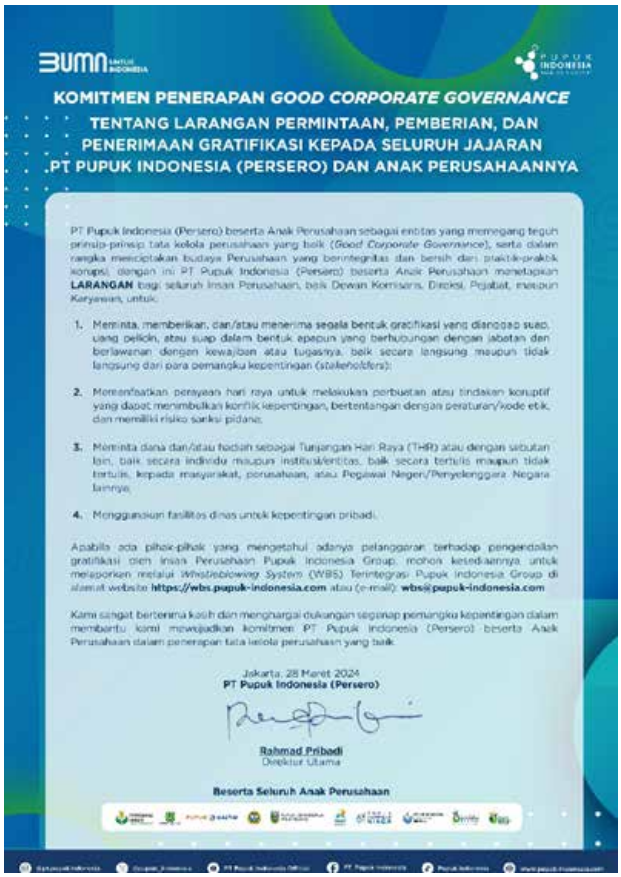

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

POLICY ON INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Rahmad Pribadi
Direktur Utama
President Director

2. Komitmen Pengendalian Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 28 Maret 2024.

2. Gratification Control Implementation Control Commitment which was updated on March 28, 2024.



KOMITMEN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TENTANG LARANGAN PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI KEPADA SELURUH JAJARAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAANNYA

PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anak Perusahaan sebagai entitas yang menegang teguh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta dalam rangka menciptakan budaya Perusahaan yang berintegritas dan bersih dari praktik-praktik korupsi, dengan ini PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anak Perusahaan menetapkan **LARANGAN** bagi seluruh Insan Perusahaan, baik Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat, maupun Karyawan, untuk:

1. Meminta, memberikan, dan/atau menerima segala bentuk gratifikasi yang disinggah suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
2. Memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Meminta dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun institusi/entitas, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, kepada masyarakat, perusahaan, atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya;
4. Menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Apabila ada pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pengendalian gratifikasi oleh Insan Perusahaan Pupuk Indonesia Group, mohon kesediaannya untuk melaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) Terintegrasi Pupuk Indonesia Group di alamat website **https://wbs.pupuk-indonesia.com** atau (e-mail) **wbs@pupuk-indonesia.com**

Kami sangat berterima kasih dan menghargai dukungan seganap pemangku kepentingan dalam membantu kami mewujudkan komitmen PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anak Perusahaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Jakarta, 28 Maret 2024
PT Pupuk Indonesia (Persero)

Rahmad Pribadi
Direktur Utama

Beserta Seluruh Anak Perusahaan

PENGEMBANGAN PROGRAM ANTI-FRAUD

Perusahaan berkomitmen dalam pengembangan program anti-fraud melalui beberapa program strategis di antaranya:

1. Fraud Control System
   PI *Group* bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan Fraud Control System (FCS) secara bertahap dimulai pada tahun 2017, dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Tahun 2017:
      Workshop Fraud Control System Pupuk Indonesia Group "Menciptakan Trusted Company di Era Disruptif Melalui Penerapan Fraud Control System" bersama BPKP pada tanggal 5 Desember 2017;

   b. Tahun 2018:
      Diagnostic Assessment Tahap I untuk 4 (empat) entitas (PI, PKG, PKT, dan PSP).

ANTI-FRAUD PROGRAM DEVELOPMENT

The company is committed to developing anti-fraud programs through several strategic programs including:

1. Fraud Control System
   PI Group, in collaboration with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), has developed a Fraud Control System (FCS) in stages starting in 2017, with the following stages:

   a. Year 2017:
      Pupuk Indonesia Group Fraud Control System Workshop "Creating a Trusted Company in a Disruptive Era Through the Implementation of a Fraud Control System" with BPKP on December 5 2017;
   b. Year 2018:
      Diagnostic Assessment Phase I for 4 (four) entities (PI, PKG, PKT, and PSP).

c. Tahun 2019:
   - Bimbingan Teknis FCS di PI;
   - Monitoring pengembangan FCS dan tindak lanjut Area of Improvement FCS di 4 (empat) entitas (PI, PKG, PKT, dan PSP);
   - Diagnostic Assessment Tahap II untuk 3 (tiga) entitas (PKC, PIM, dan REKIND).

d. Tahun 2020:
   - Bimbingan Teknis FCS untuk 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND);
   - Monitoring pengembangan FCS dan tindak lanjut Area of Improvement FCS di 7 (tujuh) entitas (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
   - Diagnostic Assessment Tahap III untuk 4 (empat) entitas (ME,PILOG, PIU, dan PIP); iv. Evaluasi Program FCS di PI.

e. Tahun 2021:
   - Bimbingan Teknis FCS untuk 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP);
   - Monitoring pengembangan FCS dan tindak lanjut Area of Improvement FCS di 11 (sebelas) entitas PI Group;
   - Evaluasi Program FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).

f. Tahun 2022:
   - Monitoring pengembangan FCS dan tindak lanjut Area of Improvement FCS di 11 (sebelas) entitas PI Group;
   - Evaluasi Program FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP).

g. Tahun 2023:
   - Tindak Lanjut Evaluasi FCS di PI.
   - Evaluasi FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
   - Bimbingan Teknis FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP).

h. Tahun 2024:
   - Evaluasi FCS di PI
   - Tindak Lanjut Evaluasi FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
   - Evaluasi FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP)

Perusahaan melakukan penyesuaian roadmap pengembangan FCS tahun 2022–2024 sebagai berikut:

a. Evaluasi FCS di PI.
b. Bimbingan Teknis FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
c. Diagnostic Assessment FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP)

c. Year 2019:
   - FCS Technical Guidance at PI;
   - Monitoring FCS development and follow-up on FCS Areas of Improvement in 4 (four) entities (PI, PKG, PKT, and PSP);
   - Diagnostic Assessment Phase II for 3 (three) entities (PKC, PIM, and REKIND).

d. Year 2020:
   - FCS Technical Guidance for 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND);
   - Monitoring FCS development and follow-up on FCS Areas of Improvement in 7 (seven) entities (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
   - Diagnostic Assessment Phase III for 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP); iv. Evaluation of the FCS Program at PI.

e. Year 2021:
   - FCS Technical Guidance for 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP);
   - Monitoring FCS development and follow-up on FCS Areas of Improvement in 11 (eleven) PI Group entities;
   - Evaluation of the FCS Program in 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).

f. Year 2022:
   - Monitoring FCS development and follow-up on FCS Areas of Improvement in 11 (eleven) PI Group entities;
   - Evaluation of the FCS Program in 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP).

g. Year 2023:
   - Follow-up FCS Evaluation at PI.
   - FCS evaluation in 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
   - FCS Technical Guidance in 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP).

h. Year 2024:
   - FCS Evaluation in PI
   - Follow-up FCS Evaluation in 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
   - FCS Evaluation in 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP)

The Company has adjusted the FCS development roadmap for 2022–2024 as follows:

a. Evaluation of FCS in PI.
b. FCS Technical Guidance in 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
c. Diagnostic Assessment FCS in 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP)

2. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Berikut sertifikasi yang diperoleh:

2. Implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) SNI ISO 37001:2016 The Company and Subsidiaries have obtained the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certificate. The following are the certifications obtained by the Subsidiaries:

No	Perusahaan Company	Lembaga Sertifikasi Certification Organization	Nomor Sertifikasi Certification Number	Tanggal Sertifikasi Certification Date	Berlaku Sampai Valid Until
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	TUV Nord Indonesia	0313 F 23000427	27 Juni 2023 June 27, 2023	26 Juni 2026 June 26, 2026
2	PT Petrokimia Gresik	Sucofindo	SAB 00145	24 November 2023 November 24, 2023	23 November 2026 November 23, 2026
3	PT Pupuk Kujang	Sucofindo	SAB 00014	3 Oktober 2023 October 3, 2023	9 Agustus 2026 August 9, 2026
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	British Standards Institution	IABMS 729332	16 Juni 2023 June 16, 2023	15 Juni 2026 June 15, 2026
5	PT Pupuk Iskandar Muda	Sucofindo	SAB 00009	31 Juli 2023 July 31, 2023	22 Juli 2026 July 22, 2026
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	TUV Nord Indonesia	0313 L 23000701	26 Oktober 2023 October 26, 2023	25 Oktober 2026 October 25, 2026
7	PT Rekayasa Industri	Mutu International	ABMS-031	22 September 2023 September 22, 2023	10 Agustus 2026 August 10, 2026
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	TUV Nord Indonesia	0313 F 23000414	21 Juni 2023 June 21, 2023	20 Juni 2026 June 20, 2026
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	TUV Nord Indonesia	0313 F 23000415	21 Juni 2023 June 21, 2023	20 Juni 2026 June 20, 2026
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas	TUV Nord Indonesia	0313 B 24000915	3 Februari 2023 February 3, 2023	6 Januari 2026 January 6, 2026
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	TUV Nord Indonesia	0313 F 23000416	21 Juni 2023 June 21, 2023	20 Juni 2026 June 20, 2026

PROGRAM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN ANTIKORUPSI

Perusahaan telah menetapkan infrastruktur berupa Pedoman dan prosedur untuk menumbuhkan budaya antikorupsi di antaranya :

ANTI-CORRUPTION IMPLEMENTATION PROGRAMS AND PROCEDURES

The company has established infrastructure in the form of guidelines and procedures to foster an anti-corruption culture, including:

No	Nomor Dokumen Document Number	Nama Dokumen Document Name	Tanggal Dokumen Document Date
1	PI-SEK-PD-007	Pedoman Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management Guidelines	9 Desember 2021 December 9, 2021
2	PI-SEK-PD-008	Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan Guidelines for Managing Conflicts of Interest	27 Desember 2021 December 27, 2021
3	PI-SEK-PD-009	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	22 November 2021 November 22, 2021
4	PI-SEK-PD-010	Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Guidelines for Reporting Official Assets	8 Juni 2022 June 8, 2022
5	PI-SEK-PD-011	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Violation Reporting System Guidelines (Whistleblowing System)	29 Maret 2022 March 29, 2022
6	PI-SEK-PD-013	Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan Compliance Management System Guidelines	30 Desember 2021 December 30, 2021

No	Nomor Dokumen Document Number	Nama Dokumen Document Name	Tanggal Dokumen Document Date
7	PI-SEK-PD-014	Pedoman Sistem Pengendalian Fraud (Fraud Control System) Fraud Control System Guidelines	28 April 2021 April 28, 2021
8	PI-SEK-PR-009	Prosedur Pelaporan Kejadian Fraud kepada Penegak Hukum Procedures for Reporting Fraud Incidents to Law Enforcement	21 April 2021 April 21, 2021
9	PI-SEK-PR-012	Prosedur Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Procedures for Reporting Official Assets	25 November 2021 November 25, 2021
10	PI-SEK-PR-013	Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Violation Reporting System Management Procedures (Whistleblowing System)	26 September 2022 September 26, 2022
11	PI-SEK-PR-015	Prosedur Pengelolaan Risiko Fraud Fraud Risk Management Procedures	28 Desember 2021 December 28, 2021
12	PI-SEK-PR-019	Prosedur Pengelolaan Laporan Gratifikasi Gratification Report Management Procedures	25 November 2021 November 25, 2021
13	PI-SEK-PR-020	Prosedur Pemberian Penghargaan atas Pelaporan Pelanggaran Melalui WBS Procedures for Giving Rewards for Reporting Violations Through WBS	26 September 2022 September 26, 2022

SOSIALISASI KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

Perusahaan melakukan sosialisasi antikorupsi dengan berbagai kegiatan di antaranya:

1. Sosialisasi dilakukan melalui penandatangan Pakta Integritas tahun 2024 oleh seluruh Insan Perusahaan serta dilakukan dalam proses pengajuan aksi korporasi, proses pengadaan, dan proses uji kelayakan anti penyuapan.
2. Internalisasi Pelaporan LHKPN Tahun 2023 PI Group dengan tema "Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Pengelolaan SDM, Pengawasan, dan Akuntabilitas" bersama KPK RI.
3. Learning & Sharing "Meningkatkan Kesadaran & Pemahaman Budaya Anti-Fraud untuk Mendukung Pencapaian Visi Perusahaan Menjadi World Class Company"
4. Penyampaian Imbauan tentang Larangan Permintaan, Pemberian, dan Penerimaan Gratifikasi oleh Insan Pupuk Indonesia terkait Hari Raya Idul Fitri melalui surat Direktur Utama kepada insan Perusahaan.
5. Learning & Sharing: "Pengendalian Benturan Kepentingan dalam Upaya Pencegahan Fraud untuk Mendukung Pencapaian Visi Perusahaan menjadi World Class Company"
6. Sosialisasi Anti Gratifikasi melalui media TV di lobby kantor PTPI Kemanggisan.
7. Sosialisasi melalui media sosial Perusahaan, e-poster, dan video
8. Penyampaian Imbauan tentang Larangan Permintaan, Pemberian, dan Penerimaan Gratifikasi oleh Insan PTPI terkait Hari Raya Idul Fitri melalui surat Direktur Utama No. 44138/A/MR/D0201/IT/2024.

ANTI-CORRUPTION POLICY SOCIALIZATION

The company carries out anti-corruption outreach with various activities including:

1. Socialization is carried out through the signing of the 2024 Integrity Pact by all Company Personnel and is carried out in the corporate action submission process, procurement process, and anti-bribery due diligence process.
2. Internalization of PI Group's 2023 LHKPN Reporting with the theme "Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption, Human Capital Management, Supervision and Accountability" with the Indonesian Corruption Eradication Commission.
3. Learning & Sharing "Increasing Awareness & Understanding of Anti-Fraud Culture to Support the Achievement of the Company's Vision of Becoming a World Class Company"
4. Submitting an Appeal regarding the Prohibition of Requesting, Giving and Receiving Gratuities by Pupuk Indonesia Personnel regarding Eid al-Fitr through a letter from the President Director to Company personnel.
5. Learning & Sharing: "Controlling Conflicts of Interest in Fraud Prevention Efforts to Support the Achievement of the Company's Vision to become a World Class Company"
6. Anti-Gratification socialization via TV media in the lobby of the PTPI Kemanggisan office.
7. Socialization via company social media, e-posters and videos
8. Submission of an Appeal regarding the Prohibition of Requesting, Giving and Receiving Gratuities by PTPI Personnel regarding Eid al-Fitr through the President Director's letter No. 44138/A/MR/D0201/IT/2024.

9. Penyampaian Imbauan tentang Larangan Permintaan, Pemberian, dan Penerimaan Gratifikasi oleh Insan Pupuk Indonesia terkait Hari Raya Idul Fitri melalui media cetak.
10. Workshop Penguatan Budaya dan Komitmen Anti-Fraud PI Group bersama BPKP.
11. Workshop Penguatan Budaya dan Komitmen Anti-Fraud di lingkungan PI Grup bersama KPK.
12. Workshop Optimalisasi Program Pengendalian Fraud dan Keterlibatan Insan PI Group dalam Rangka Mewujudkan SDM Unggul yang Bersih dan Bebas dari Korupsi untuk Mencapai Visi Perusahaan.
13. Workshop ISO 37002:2021 Whistleblowing Management System (WMS) oleh CRMS.

9. Submitting an Appeal regarding the Prohibition of Requesting, Giving and Receiving Gratuities by Pupuk Indonesia Personnel regarding Eid al-Fitr via print media.
10. Workshop on Strengthening Culture and Anti-Fraud Commitment of PI Group with BPKP.
11. Workshop on Strengthening Anti-fraud Culture and Commitment within the PI Group with the KPK.
12. Workshop on Optimizing the Fraud Control Program and Involvement of PI Group Personnel in the Context of Creating Superior Human Capitals that are Clean and Free from Corruption to Achieve the Company's Vision.
13. Whistleblowing Management System (WMS) Workshop by CRMS.

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Information on Funding for Political Activities

PTPI memberikan kebebasan kepada setiap individu yang bekerja untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mendukung partai atau kandidat pilihannya tanpa pengaruh apapun.

PTPI tidak berpihak kepada partai politik atau tidak memberi sumbangan dan/atau donasi baik dalam bentuk uang tunai atau yang lainnya kepada partai politik maupun organisasi atau perwakilan yang terafiliasi di lokasi manapun PTPI beroperasi.

PTPI dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PTPI provides freedom to every working individual to participate in the political process and support the party or candidate of their choice without any influence.

PTPI does not take sides with political parties or make donations and/or donations in cash or otherwise to political parties or affiliated organisations or representatives in any location where PTPI operates.

PTPI within the limits of propriety, can only make donations for charity or social purposes in accordance with statutory regulations.

Etika Perusahaan dalam Berhubungan dengan Pejabat Publik

Corporate Ethics in Dealing with Public Officials

Perusahaan memiliki kebijakan etika yang mengatur hubungan dengan pejabat publik melalui Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran pejabat publik yang memiliki wewenang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Perusahaan memelihara hubungan dengan pejabat publik dalam batas toleransi yang diperbolehkan hukum, dan menghindari terjadinya penyelewengan.

Perusahaan juga melarang pembayaran secara langsung atau tidak langsung kepada pegawai atau pejabat publik di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis. Larangan ini berlaku tidak hanya terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, namun juga terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan oleh wakil Perusahaan.

Jamuan terhadap pejabat publik dapat dilakukan oleh wakil Perusahaan sepanjang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang pantas dan dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan terhadap pejabat publik tersebut atau situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap integritas yang bersangkutan atau motif Perusahaan dalam melakukan tindakan tersebut.

The Company has an ethics policy that regulates relations with public officials through the Company's Code of Ethics and Conduct. This policy was created to develop and maintain good relations and effective communication with every level of public official who has authority regarding the Company's operations. The Company maintains relations with public officials within the limits of tolerance permitted by law, and avoids abuse.

The company also prohibits direct or indirect payments to employees or public officials outside their official capacity and which are contrary to the law and healthy and ethical business practices. This prohibition applies not only to payments and expenses made by the Company, but also to payments and expenses made for and on behalf of the Company by representatives of the Company.

Entertainment for public officials can be provided by representatives of the Company as long as it is in accordance with the applicable legal corridors, in an appropriate manner and in situations that do not allow for compromise and partiality towards the public official or situations that could raise suspicion about the integrity of the person concerned or the Company's motives in doing so. that action.

Pelaporan Kekayaan Pejabat
Official Wealth Reporting

PRINSIP DASAR PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT

Sebagai BUMN, Perusahaan juga terikat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban melaporkan kekayaan oleh pejabatnya. Tujuan dari pelaporan kekayaan pejabat adalah untuk mendorong agar pejabat menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

DASAR HUKUM PENERAPAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT DI PERUSAHAAN

Dalam menerapkan kebijakan mewajibkan Pejabatnya untuk melaporkan kekayaannya, Perusahaan menimbang dasar hukum penerapan kewajiban tersebut, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara juncto Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 12 tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

BASIC PRINCIPLES OF REPORTING OFFICIAL WEALTH

As a SOE, the Company is also bound by laws and regulations which regulate the obligation to report assets by its officials. The purpose of reporting officials' assets is to encourage officials to comply with the general principles of state administration which are free from practices of corruption, collusion and nepotism, as well as other disgraceful acts.

LEGAL BASIS FOR IMPLEMENTING OFFICIAL WEALTH REPORTING OBLIGATIONS IN COMPANIES

In implementing the policy of requiring its officers to report their assets, the Company considers the legal basis for implementing this obligation, as follows:

1. Law no. 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;
2. Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes;
3. Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in conjunction with Law of the Republic of Indonesia no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement and Examination of State Officials' Asset Reports in conjunction with Corruption Eradication Commission Regulation no. 2 of 2020 concerning Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation no. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement and Examination of State Officials' Asset Reports;
6. Corruption Eradication Commission Circular No. 12 of 2017 dated 13 October 2017 concerning Guidelines for Management of Asset Reports of State Officials within State-Owned Enterprises;

7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK341/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. INS-01/MBU/2009 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
8. Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 016/KEP.KOM/XII/2021 dan No. 116.1/A/KU/E42/SK/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) PTPI;
10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 002/KEP.KOM/II/2022 dan No. 12.1/A/KU/A24/SK/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PTPI;
11. Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen, Dokumen No. PI-STK-PD-001;
12. Pedoman Manajemen Anti Penyuapan, Dokumen No. PISEK-PD-007;
13. Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (Code of Group Governance), Dokumen No. PI-SEK-PD-012.

7. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-341/MBU/10/2021 dated 5 October 2021 concerning the Revocation of Instruction of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. INS-01/MBU/2009 concerning State Administrators who are Obligated to Submit Asset Reports on State Officials (LHKPN) within State-Owned Enterprises;
8. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE-12/MBU/10/2021 dated 5 October 2021 concerning the Obligation to Submit Wealth Reports of State Officials (LHKPN) for Officials within State-Owned Enterprises;
9. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTPI No. 016/KEP. KOM/XII/2021 and No. 116.1/A/KU/E42/SK/2021 dated 16 December 2021 concerning PTPI Ethics and Behavior Guidelines (Code of Conduct);
10. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTPI No. 002/KEP. KOM/II/2022 and No. 12.1/A/KU/A24/SK/2022 dated 16 February 2022 concerning PTPI Corporate Governance Guidelines (Code of Corporate Governance);
11. Guidelines for Preparing and Controlling Management System Documents, Document No. PI-STK-PD-001;
12. Anti-Bribery Management Guidelines, Document No. PISEK-PD-007;
13. Business Group Governance Guidelines (Code of Group Governance), Document No. PI-SEK-PD-012.

KEWAJIBAN YANG MEWAJIBKAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN

Kebijakan tentang pelaporan kekayaan pejabat telah ditetapkan oleh Perusahaan pada tahun 2013 dengan pembaruan terakhir pada tahun 2022, yaitu Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 tanggal 8 Juni 2022. Pedoman ini disampaikan ke Anak Perusahaan melalui Surat Edaran No. 10/A/KK/A24/SE/2022 tanggal 8 Juni 2022. Pemutakhiran tersebut mengacu pada Perubahan Lingkup Wajib Lapor dan Kewajiban Pemenuhan LHKPN sebagai Persyaratan Promosi Karyawan.

Pejabat yang termasuk Wajib Lapor adalah seluruh pejabat di Perusahaan dan Entitas Anak meliputi:

POLICY REQUIRING REPORTING OF COMPANY OFFICIALS' WEALTH

The policy regarding reporting of officials' assets was established by the Company in 2013 with the latest update in 2022, namely Guidelines for Reporting Officials' Assets No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 dated June 8 2022. These guidelines were conveyed to Subsidiaries via Circular Letter No. 10/A/KK/A24/SE/2022 dated 8 June 2022. This update refers to changes in the scope of mandatory reporting and the obligation to fulfill LHKPN as a requirement for employee promotions.

Officials who are required to report are all officials in the Company and Subsidiaries including:

Pejabat Official	**Induk Perusahaan** Parent Company	**Anak Perusahaan** Subsidiary Company	**Perusahaan Terafiliasi Terkonsolidasi** Consolidated Affiliated Company
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting
Direksi Board of Directors	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting
Grade I/Setara Grade I/Equivalent	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	-
Grade II/Setara Grade II/Equivalent	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	-
Grade III/Setara Grade III/Equivalent	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	-

Hal ini merupakan perluasan Wajib Lapor yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat merupakan persyaratan wajib untuk promosi karyawan di PTPI, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi yang terkonsolidasi dengan PTPI, yang secara teknis diatur dalam Pedoman dan Prosedur tersendiri berkaitan dengan promosi.

PENGELOLAAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN

Perusahaan telah menetapkan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (UPL). Unit tersebut adalah yang membidangi Fungsi Kepatuhan Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan/atau unit yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk menjadi mitra kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat dan melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi pengelolaan e-LHKPN di Perusahaan dan Anak Perusahaan.

UPL memiliki fungsi sebagai Admin Induk Perusahaan dan Admin Anak Perusahaan yang terbagi atas:

1. Admin Induk Perusahaan dikelola oleh unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan SDM dan/atau unit yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Perusahaan. Admin Induk Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Unit yang membidangi fungsi kepatuhan di Perusahaan:
      - Berkoordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor di PI Group dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta penggunaan aplikasi e-LHKPN;
      - Berkoordinasi dengan KPK dalam kegiatan sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat di PI Group;
      - Mengingatkan Wajib Lapor di Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat;
      - Melakukan koordinasi dengan UPL di Anak Perusahaan untuk mendorong kepatuhan Wajib Lapor di Anak Perusahaan;

This is an expansion of Mandatory Reporting mandated by Law no. 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism and refers to Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE-12/MBU/10/2021 dated 5 October 2021 concerning the Obligation to Submit Wealth Reports of State Officials (LHKPN) for Officials within StateOwned Enterprises.

Compliance with submitting Official Asset Reports is a mandatory requirement for employee promotions at PTPI, Subsidiaries and Affiliated Companies consolidated with PTPI, which are technically regulated in separate Guidelines and Procedures relating to promotions.

MANAGEMENT OF COMPANY OFFICIALS' WEALTH REPORTING

The company has established an Official Asset Report Management Unit (UPL). This unit is in charge of the Compliance and Human Capitals (HR) function and/or the unit appointed by the Company and Subsidiaries to be a working partner of the Corruption Eradication Commission (KPK) in managing Official Asset Reports and coordinating with the Corruption Eradication Committee regarding changes to management regulations. e-LHKPN in Companies and Subsidiaries.

UPL has the function as Admin of the Parent Company and Admin of the Subsidiaries which are divided into:

1. The Main Company Admin is managed by a unit in charge of compliance and HC functions and/or a unit appointed by the Company to manage Official Asset Reports in the Company. The Parent Company Admin has the following duties and responsibilities:
   a. Units in charge of compliance functions in the Company:
      - Coordinate with the Corruption Eradication Committee in terms of monitoring and evaluating the PI Group's Mandatory Reporting compliance in reporting and announcing its assets as well as the use of the e-LHKPN application;
      - Coordinate with the Corruption Eradication Commission in socialization activities for filling out Official Asset Reports in the PI Group;
      - Remind Compulsory Reporting Companies to comply with the obligation to submit Official Asset Reports;
      - Coordinating with UPL in Subsidiaries to encourage Mandatory Reporting compliance in Subsidiaries;

- Mengajukan permintaan akun (username dan password) untuk Admin Induk Perusahaan dan Admin Anak Perusahaan kepada KPK;
- Melakukan approval, aktivasi, dan non aktivasi akun Wajib Lapor di PI Group, serta membuat akun Admin Anak Perusahaan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Lapor, baik dalam pelaporan Harta Kekayaan maupun pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Perusahaan;
- Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Direksi Perusahaan yang membawahi fungsi kepatuhan terhadap Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap di Perusahaan.

b. Unit yang membidangi fungsi SDM di Perusahaan:
   - Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor di Perusahaan sewaktu-waktu, setiap terjadi mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan pensiun serta melakukan pemutakhiran berkala setiap bulan;
   - Melakukan koordinasi dengan UPL di Anak Perusahaan untuk pemutakhiran data Wajib Lapor di seluruh Anak Perusahaan;
   - Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor PI Group kepada KPK sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPK.

2. Admin Anak Perusahaan dikelola oleh unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan SDM dan/atau unit yang ditunjuk oleh Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan. Admin Anak Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Unit yang membidangi fungsi kepatuhan di masingmasing Anak Perusahaan:
      - Berkoordinasi dengan Admin Induk Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan penggunaan aplikasi e-LHKPN;
      - Mengajukan approval, aktivasi, dan non aktivasi akun Wajib Lapor serta Admin Anak Perusahaan di masing-masing Anak Perusahaan kepada Admin Induk Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan;
      - Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan;

- Submit an account request (username and password) for the Parent Company Admin and Subsidiary Admin to the KPK;
- Approving, activating and de-activating the Mandatory Reporting account at PI Group, as well as creating a Subsidiary Admin account;
- Monitoring and evaluating the level of compliance with Mandatory Reporting, both in reporting Assets and announcing Asset Reports for Officials in the Company;
- Submit recommendations for imposing sanctions to the Company's Directors who are in charge of the compliance function for Mandatory Reports who do not comply in submitting Official Asset Reports along with complete documents at the Company.

b. Units in charge of HC functions in the Company:
   - Updating the Company's Mandatory Reporting data at any time, every time there is a mutation, rotation, promotion, demotion and retirement, as well as periodically updating it every month;
   - Coordinating with UPL in Subsidiaries to update Mandatory Reporting data in all Subsidiaries;
   - Submit personnel data and position change data. Group PI is required to report to the Corruption Eradication Commission according to the schedule set by the Corruption Eradication Commission.

2. Subsidiary Admin is managed by a unit in charge of compliance and HC functions and/or a unit appointed by the Subsidiary to manage Official Asset Reports in each Subsidiary. Subsidiary Admin has the following duties and responsibilities:
   a. Units in charge of compliance functions in each Subsidiary:
      - Coordinate with the Parent Company Admin in charge of compliance functions in terms of monitoring and evaluating Mandatory Reporting compliance in reporting and announcing assets and use of the e-LHKPN application;
      - Submit approval, activation and non-activation of Mandatory Reporting accounts and Subsidiary Admins in each Subsidiary to the Parent Company Admin in charge of compliance functions;
      - Organizing socialization and assistance in filling out Official Asset Reports in each Subsidiary;

- Mengingatkan Wajib Lapor di masing-masing Anak Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Lapor, baik dalam pelaporan Harta Kekayaan maupun pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan;
- Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Direksi Anak Perusahaan yang membawahi fungsi kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk oleh Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat terhadap Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap di masingmasing Anak Perusahaan.

b. Unit yang membidangi fungsi SDM di masing-masing Anak Perusahaan:
   - Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor di masing-masing Anak Perusahaan posisi akhir tahun untuk pejabat aktif dan sesuai waktu pensiun untuk pejabat yang pensiun;
   - Menyampaikan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor di masing-masing Anak Perusahaan kepada Admin Induk Perusahaan bidang SDM untuk posisi akhir tahun paling lambat tanggal 1 Desember setiap tahunnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh KPK.

SANKSI ATAS KELALAIAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT DI PERUSAHAAN

Jika ada Wajib Lapor tidak melaporkan harta kekayaannya atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Pedoman dan/atau Peraturan KPK, Direksi yang membawahi kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat dapat memberikan sanksi administratif kepada Wajib Lapor berdasarkan rekomendasi dari KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Lapor yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Sanksi bagi Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran secara lisan;
2. Teguran secara tertulis;
3. Penundaan hak atas:

- Remind the Compulsory Report in each Subsidiary to comply with the obligation to submit Official Asset Reports;
- Monitoring and evaluating the level of compliance with Mandatory Reporting, both in reporting Assets and announcing Asset Reports for Officials in each Subsidiary;
- Submit recommendations for imposing sanctions to the Directors of Subsidiaries who are in charge of the compliance function or Directors appointed by the Subsidiaries in managing Official Asset Reports for Mandatory Reports who are not compliant in submitting Official Asset Reports along with complete documents in each Subsidiary.

b. Units in charge of HC functions in each Subsidiary:
   - Updating Mandatory Reporting data in each Subsidiary for year-end positions for active officers and according to retirement time for retiring officers;
   - Submit updated personnel data and mandatory reporting position change data in each Subsidiary to the Parent Company Admin in the HC sector for year-end positions no later than December 1 each year or another time determined by the Corruption Eradication Commission.

SANCTIONS FOR FAILURE TO REPORT THE WEALTH OF OFFICIALS IN THE COMPANY

If a Compulsory Report does not report its assets or does not fulfill its obligations as regulated in the Corruption Eradication Commission Guidelines and/or Regulations, the Director in charge of compliance or a Director appointed by the Company and Subsidiaries in managing the Official Asset Report can impose administrative sanctions on the Compulsory Report based on recommendations from the Corruption Eradication Commission in accordance with applicable regulations. Compulsory Reporters who provide false information regarding their Assets may be subject to sanctions in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Types of Sanctions for Mandatory Reporting Persons who do not comply in submitting Official Asset Reports along with complete documents are given the following sanctions:

1. Verbal warning;
2. Written warning;
3. Postponement of rights to:

a. pembayaran jasa operasi/bantuan biaya cuti tahunan/sejenisnya bagi pejabat yang pertama kali menjabat, pejabat aktif, dan pejabat yang diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
b. pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan; atau
c. pembayaran pesangon atau sejenisnya bagi pejabat yang berakhir masa jabatan atau pensiun.

a. payment of operational services/assistance with annual leave costs/similar for first-time officials, active officials, and officials who are reappointed after the end of their term of office or retirement; or
b. definitive appointment for officials who receive promotions; or
c. severance pay or similar payments for officials whose term of office ends or retires.

Sanksi penundaan hak pada huruf c dapat dicabut setelah kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap telah dilaksanakan oleh Wajib Lapor sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman. Ketentuan terkait sanksi tersebut ditetapkan dalam Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 tanggal 8 Juni 2023.

Sanctions for suspension of rights in letter c can be revoked after the obligation to submit a complete Official Assets Report and documents has been carried out by the Reporting Officer in accordance with the provisions in the Guidelines. Provisions related to sanctions are stipulated in the Guidelines for Reporting Official Assets No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 dated June 8, 2023.

TRANSPARANSI PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2024

Pada periode tahun 2024, seluruh Wajib Lapor Perusahaan telah melaksanakan pelaporan kekayaannya dengan tingkat kepatuhan 100%. Berikut jumlah Wajib Lapor yang melaporkan kekayaannya per masing-masing jabatan.

TRANSPARENCY IN REPORTING THE WEALTH OF COMPANY OFFICIALS IN 2024

In the 2024 period, all Mandatory Reporting Companies have carried out their wealth reporting with a 100% compliance level. The following is the number of Compulsory Reporters who report their assets per each position.

Penyampaian LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2024
Submission of LHKPN for Company Officials in 2024

Pejabat Wajib LHKPN Officials Required to LHKPN	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Has Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	8	8	100
Direksi Board of Directors	9	9	100
Pejabat Grade I Grade I Official	38	38	100
Pejabat Grade II Grade II Official	115	115	100
Pejabat Grade III Grade III Official	177	177	100
Jumlah Total	**347**	**347**	**100**

Status Pelaporan Kekayaan Pejabat Tahun 2024 di Entitas Anak
Reporting Status of 2024 Officials' Wealth in Subsidiaries

Perusahaan Company	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Has Reported	
		Jumlah Total	%
PT Petrokimia Gresik	335	335	100
PT Pupuk Kujang	267	267	100
PT Pupuk Kalimantan Timur	393	393	100
PT Pupuk Iskandar Muda	132	132	100
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	504	504	100
PT Rekayasa Industri	302	302	100
PT Pupuk Indonesia Niaga	45	45	100
PT Pupuk Indonesia Logistik	28	28	100
PT Pupuk Indonesia Utilitas*	25	25	100
PT Pupuk Indonesia Pangan	11	11	100
Jumlah Total	**2.382**	**2.382**	**100**

* Entitas Anak sampai dengan 15 Desember 2024
* Subsidiaries until December 15, 2024

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

KEBIJAKAN SERTA PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan dilakukan dengan prinsip cepat dan transparan, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik tanpa adanya benturan kepentingan dalam prosesnya. Kebijakan yang diterapkan dalam proses ini mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297);
2. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756);
3. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2005 No. 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4556);
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 3 tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBN);
6. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. tentang 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN;
7. Surat Edaran Menteri BUMN No. S-563/MBU/08/2020 tentang Penggunaan Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PADI UMKM") pada Proses Pengadaan dan Pembelanjaan Barang dan/atau Jasa pada UMKM di Lingkungan BUMN Disertai Pelaporannya;
8. Anggaran Dasar Perusahaan dan Perubahannya;
9. Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan Perubahannya;

POLICIES AND GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The procurement of goods and services within the Company is carried out with principles of speed and transparency, and applies good corporate governance principles without any conflict of interest in the process. The policies applied in this process refer to:

1. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 No. 70, additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4297);
2. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 No. 106, additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4756);
3. Government Regulation no. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises (Indonesian State Institution of 2005 No. 117, addition to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4556);
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. 3 of 2014 concerning Guidelines for Increasing the Use of Domestic Products in Procurement of Government Goods and Services that are Not Funded by the State Revenue and Expenditure Budget and Regional Revenue and Expenditure Budget (Non APBN);
6. Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. concerning 16 of 2011 concerning Provisions and Procedures for Calculating TKDN;
7. ministry of SOE Circular No. S-563/MBU/08/2020 concerning the Use of the Digital Market for Micro, Small and Medium Enterprises ("PADI UMKM") in the Process of Procuring and Purchasing Goods and/or Services for MSMEs in the SOE Environment, Along with Reporting;
8. Company Articles of Association and Amendments thereto;
9. Articles of Association of Subsidiaries and Amendments thereto;

10. Perjanjian Bersama antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan No. 209/A/HK/A21/SP/2020, No. 1475/B/HK.01.01/13/SP/2020, No. 520/PK/SP/UK/XI/2020, No. 10610/SP-BTG/2020, No. 196/SP/DIR/PIM/LSM/2020, No. 265/SP/DIR/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Implementasi Kewenangan PTPI sehubungan dengan Penyelenggaraan Fungsi/Bidang Tertentu untuk Anak Perusahaan;
11. Surat Keputusan Direksi PTPI No. SK/DIR/044/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Struktur Organisasi PTPI dan Perubahannya;
12. Surat Keputusan Direksi PTPI No. SK/DIR/048/2021 tanggal 12 April 2021 tentang tanggung jawab Penandatanganan dan Pemaraf Dokumen PTPI;
13. Surat Keputusan Direksi PTPI No. 079/A/KU/G13/SK/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Otorisasi Pengesahaan Dokumen Sistem Manajemen di PTPI;
14. Pedoman pengelolaan kepegawaian dalam program transformasi bisnis di Pupuk Indonesia Group Dokumen No. PI-SDM-PD-003;
15. Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Group PTPI No. PIADAPD-002 Revisi 4 tanggal 8 November 2021;
16. Pedoman Pengelolaan Inventory Material No. PIADAPD-001 Revisi 1 tanggal 10 Desember 2020;
17. Pedoman Manajemen Anti Penyuapan No. PI-SEKPD-007;
18. Pedoman Pengelolaan Rekanan No. PI-ADA-PD-003 tanggal 10 Desember 2020;
19. Pedoman implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa di Pupuk Indonesia Grup No. PI-ADA-PD-005.

Dalam pelaksanaannya, PTPI senantiasa menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kemandirian dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses serta prosedur pengadaan barang dan jasa.

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADUAN

Pengelolaan pengadaan dilaksanakan untuk memastikan kecukupan sumber daya dari segi barang dan jasa. Kegiatan pemenuhannya dilakukan secara wajar, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam menunjang kegiatan operasional agar berjalan lancar efektif dan efisien.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ada di Perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk mengatur kegiatan pengadaan jasa yang diperlukan oleh

10. Collective Agreement between the Company and Subsidiaries No. 209/A/HK/A21/SP/2020, No. 1475/B/HK.01.01/13/SP/2020, No. 520/PK/SP/UK/XI/2020, No. 10610/SP-BTG/2020, No. 196/SP/DIR/PIM/NGO/2020, No. 265/SP/DIR/2020 dated 9 November 2020 concerning Implementation of the Authority of PTPI in relation to the Implementation of Certain Functions/Fields for Subsidiaries;
11. Decree of the Board of Directors of PTPI No. SK/DIR/044/2021 dated 7 January 2021 concerning the Organizational Structure of PTPI and its Amendments;
12. Decree of the Board of Directors of PTPI No. SK/DIR/048/2021 dated 12 April 2021 concerning the responsibility for signing and initialing PTPI documents;
13. Decree of the Board of Directors of PTPI No. 079/A/KU/G13/SK/2021 dated 26 July 2021 concerning Authorization of Ratification of Management System Documents at PTPI;
14. Guidelines for personnel management in the business transformation program at Pupuk Indonesia Group Document No. PI-SDM-PD-003;
15. General Guidelines for Implementing Procurement of Goods and Services in the PTPI Group No. PIADAPD-002 Revision 4 dated 8 November 2021;
16. Material Inventory Management Guidelines No. PIADAPD-001 Revision 1 dated 10 December 2020;
17. Anti-Bribery Management Guidelines No. PI-SEK-PD-007;
18. Partner Management Guidelines No. PI-ADA-PD-003 dated 10 December 2020;
19. Guidelines for implementing the Domestic Component Level (TKDN) in the Procurement of Goods and Services activities in Pupuk Indonesia Group No. PI-ADA-PD-005.

In its implementation, PTPI consistently upholds the principles of honesty and independence from parties directly or indirectly involved in the process and procedures of goods and services procurement.

COMPLAINT PROCEDURES AND PROCEDURES

Procurement management is carried out to ensure adequate resources in terms of goods and services. Fulfillment activities are carried out fairly, in accordance with the Company's needs in supporting operational activities so that they run smoothly, effectively and efficiently.

The company's goods and services procurement policy is carried out with the aim of regulating the procurement of services required by the company by considering the

Perusahaan dengan memperhatikan kriteria: spesifikasi, harga, aspek mutu, dan aspek K3HL untuk menjamin jasa yang diadakan sesuai dengan yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan serta melalui proses pengadaan memiliki prinsip kompetitif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Prosedur ini menjelaskan rangkaian aktivitas dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan Perusahaan melalui tender/seleksi umum, tender/seleksi terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung, swakelola, e-catalogue, e-purchasing, agen pengadaan, dan PADI UMKM.

Manajemen bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh dalam prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa. Proses tersebut dimulai dengan rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset oleh divisi terkait untuk mendapatkan persetujuan. Prosedur dan tata cara pengadaan meliputi:

1. Prosedur Pengadaan Barang (PI-ADA-PR-001) tanggal 4 Maret 2021;
2. Prosedur Pengadaan Jasa (PI-ADA-PR-002) Revisi 2 tanggal 31 Desember 2022;
3. Prosedur Perencanaan Pengadaan (PI-ADA-PR-004) Revisi 1 tanggal 2 Januari 2023;
4. Prosedur Pengadaan Jasa Distribusi dan Pemasaran (PI-ADA-PR-005) tanggal 25 April 2022;
5. Prosedur Pengadaan Bahan Baku dan Penolong (PI-ADAPR-006) tanggal 21 Januari 2022;
6. Prosedur Pengelolaan Rekanan (PI-ADA-PR-008) tanggal 18 Oktober 2019.

RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam memastikan pengelolaan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efektif, Perusahaan memiliki target dan perencanaan dalam wujud realisasi program pengadaan barang dan jasa yang disampaikan dalam tabel di bawah ini.

criteria: specifications, prices, and quality aspects and HSE aspects and to ensure that the services provided are in accordance with what is required and can be accounted for and through the process. procurement has the principles of competitive, transparent, accountable, effective and efficient.

This procedure explains the series of activities in carrying out procurement activities for goods and services required by the Company through general tender/selection, limited tender/selection, direct selection, direct appointment, direct procurement, self-management, e-catalogue, e-purchasing, procurement agent, and PADI MSMEs.

Management is responsible and has full authority in the procedures and procedures for procuring goods and services. The process begins with a procurement plan, procurement process, receipt and storage, as well as use, use and management of assets by the relevant division to obtain approval. Procurement procedures and procedures include:

1. Goods Procurement Procedure (PI-ADA-PR-001) dated 4 March 2021;
2. Services Procurement Procedures (PI-ADA-PR-002) Revision 2 dated 31 December 2022;
3. Procurement Planning Procedure (PI-ADA-PR-004) Revision 1 dated January 2 2023;
4. Procedures for Procurement of Distribution and Marketing Services (PI-ADA-PR-005) dated 25 April 2022;
5. Procedures for Procurement of Raw and Auxiliary Materials (PI-ADA-PR-006) dated January 21 2022;
6. Partner Management Procedures (PI-ADA-PR-008) dated 18 October 2019.

PLAN AND IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN 2024

In ensuring that the management of procurement of goods and services run effectively, the company has targets and plans in the form of realization of the procurement program for goods and services that are presented in the table below.

Target dan Realisasi Kegiatan
Activity Target and Realization

No.	Kegiatan Activity
1	Pelaksanaan Vendor Gathering Tahun 2024 Implementation of Vendor Gathering of 2024
2	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Increased Used of Domestic Products

Dampak dan Capaian di Bidang Pengadaan
Impact and Outcomes in Procurement

Dampak dari Pelaksanaan Kegiatan Impact of Activity Implementation	Capaian Kegiatan Activity Outcomes
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Increased Use of Domestic Products	Nilai transaksi Penggunaan Produk Dalam Negeri mencapai Rp50,7 Triliun The transaction value of the use of domestic products reached Rp50.7 trillion

KRITERIA PEMILIHAN PEMASOK

Dalam hal menjalankan proses bisnis pengadaan barang dan jasa Perusahaan menjaring pemasok melalui kriteria yang harus dipenuhi salah satunya adalah kriteria administrasi, legalitas, lingkungan serta kriteria mengenai kepatuhan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

SUPPLIER SELECTION CRITERIA

To execute its goods and services procurement, the Company evaluates suppliers based on comprehensive criteria, encompassing administrative, legal, environmental, and strict adherence to Good Corporate Governance (GCG) principles.

Rantai Pasok
Supply Chain

Dalam menjalankan usaha, PI Group bekerja sama dengan pemasok barang dan jasa mengingat Perusahaan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan barang dan jasa secara mandiri. Berikut adalah rincian jumlah pemasok secara geografis dan nilai realisasi kontrak sepanjang tahun 2024.

To support its operations, PI Group partners with various goods and services suppliers, as the Company is unable to fulfill all its needs independently. The following details the number of suppliers by geographical region and the total contract value realized in 2024.

Jumlah Pemasok dan Nilai Kontrak
Number of Suppliers and Contract Value

Kategori Pemasok Supplier Category	Jumlah Pemasok Number of Supplier			Nilai Kontrak (Rp miliar) Contract Value (Rp billion)		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Pemasok Nasional National Supplier	2.781	2.647	2.868	50.729	44.630	48.558
Pemasok Internasional International Supplier	113	106	127	9.527	9.886	22.123
Jumlah Total	**2.894**	**2.753**	**2.995**	**60.256**	**54.516**	**70.681**

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN & PEMENUHAN PEMASOK

Dalam Upaya peningkatan kemampuan serta pemenuhan pemasok Perusahan secara rutin melaksanakan program Vendor Gathering minimal 1 (satu) tahun sekali yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pemasok yang berkinerja baik, sekaligus digunakan sebagai forum diskusi dan sosialisasi kebijakan dan aturan terkini mengenai proses pengadaan barang dan jasa dalam mendukung implementasi kebijakan keberlanjutan dalam aspek *Environmental, Social & Goverment* (ESG) serta *Good Corporate Governance* (GCG).

Perusahaan juga menyediakan sosialisasi dan coaching dan klinik terkait CSMS sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapabilitas, terutama bagi pemasok lokal, sehinga mereka memiliki kemampuan seluruh aspek yang dibutuhkan Perusahaan.

EFFORTS TO INCREASE SUPPLIER CAPABILITIES & FULFILLMENT

In an effort to increase the capabilities and fulfillment of suppliers. The Company routinely organizes an annual Vendor Gathering to bolster supplier capabilities and meet procurement needs. This initiative not only acknowledges top-performing suppliers but also facilitates discussion and communication of current goods and services procurement policies and rules, aligning with the Company's sustainability efforts in Environmental, Social & Governance (ESG) and Good Corporate Governance (GCG).

The Company offers CSMS-related socialization, coaching, and clinics to boost capabilities, particularly among local suppliers, ensuring they acquire proficiency in all aspects essential to the Company's needs.

KEBIJAKAN KEPADA PEMASOK TERKAIT HAK ASASI MANUSIA, TJSL, KEBERLANJUTAN, KEADILAN

1. Pakta Integritas serta komitmen pemasok merupakan sebuah kebijakan yang diperuntukan bagi seluruh pemasok agar memastikan implementasi prinsipprinsip HAM kepada karyawan di seluruh lingkungan kerjanya, program TJSL yang dilakukan, serta laporan keberlanjutan pemasok tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pemasok.
2. Salah satu kriteria sosial yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa adalah implementasi Contractor Safety Management System (CSMS). Dalam CSMS, pihak-pihak yang bekerja di wilayah operasi Perusahaan, terutama pemasok yang bergerak di bidang konstruksi harus memenuhi perysratan minimimum aspek HSSE berdasarkan risiko pekerjaan sebagai persyaratan mengikuti proses tender.
3. Untuk mendapatkan sertifikast CSMS, salah satu syarat yang dimiliki oleh pemasok adalah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen HSSE dari Lembaga Sertifikasi Eksternal, seperti ISO 45001 serta ISO 14001.
4. Jika terdapat pemasok yang menyalahi ketentuan dalam perysratan tender, Perusahaan secara tegas akan menjatuhkan sanksi kepada pemasok sesuai ketentuan blaclist/suspend yang diatur oleh peraturan Perusahaan yang berlaku.

POLICIES FOR SUPPLIERS REGARDING HUMAN RIGHTS, TJSL, SUSTAINAILITY, JUSTICE

1. The Integrity Pact and supplier commitment is a policy intended for all suppliers to ensure the implementation of human rights principles for employees throughout their work environment, the TJSL program carried out, and the supplier's sustainability report is carried out completely by the supplier.

2. One of the social criteria used in the procurement of goods and services is the implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS). In CSMS, parties working in the Company's operational areas, especially suppliers engaged in the construction sector, must meet the minimum requirements for HSSE aspects based on work risks as a requirement for participating in the tender process.
3. To obtain CSMS certification, one of the requirements for suppliers is to have HSSE Management System certification from an External Certification Agency, such as ISO 45001 and ISO 14001.
4. If there is a supplier who violates the provisions in the tender requirements, the Company will strictly impose sanctions on the supplier in accordance with the blacklist/suspend provisions regulated by the applicable Company regulations.

Whistleblowing System
Whistleblowing System

Perusahaan telah mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) yang bertujuan agar Perusahaan dapat:

1. Menerapkan budaya kerja yang konsisten dalam menegakkan tata nilai Perusahaan;
2. Mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial dalam rangka menjaga serta melindungi aset serta reputasi Perusahaan;
3. Mendorong upaya pengawasan oleh semua pihak sehingga menciptakan budaya malu untuk melakukan pelanggaran; dan
4. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Perusahaan.

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WBMS)

Dalam mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perusahaan mengacu pada landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

The Company has implemented a Whistleblowing System which aims to enable the Company to:

1. Implementing a consistent work culture in upholding the Company's values;
2. Encourage reporting of matters that cause losses to the Company both financially and non-financially in order to safeguard and protect the Company's assets and reputation;
3. Encourage monitoring efforts by all parties so as to create a culture of shame for committing violations; And
4. Creating a transparent and accountable environment within the Company

VIOLATION REPORTING SYSTEM (WBMS) POLICY

In implementing the Whistleblowing System, the Company refers to the following legal basis:

1. Law No. 28/1999 on Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion and Nepotism;
2. Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission Jo. Law Number 19 of 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission;
3. Law Number 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises;
4. Law Number 13/2006 on Witness and Victim Protection;
5. Law Number 40/2007 on Limited Liability Companies;
6. Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies jo. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2016 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in StateOwned Enterprises and Limited Liability Companies;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MSU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE- 2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;

11. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan PTPI Nomor 79 Tahun 2020 dan No. 018/A/PA.08.01/E42/SP/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penanganan Pengaduan terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (WSS Terintegrasi PI-KPK), dan perubahannya;
12. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (*Whistleblowing System*-WBS), Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2008;
13. SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Persyaratan dengan Panduan Penggunaan;
14. ISO 37002 : 2021 *Whistleblowing Management System* Panduan Penggunaan;
15. ISO 37301 : 2021 Compliance Management System Persyaratan dengan Panduan Penggunaan;
16. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan TPK Terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021 yang disampaikan melalui surat Pimpinan KPK No. S/4136/PM.00.00/30-35/07/2021 tanggal 23 Juli 2021;
17. Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya;

18. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 016/KEP. KOM/XI 1/2021 dan No. 116.1/A/KU/E42/SK/202 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PTPI;
19. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 002/KEP. KOM/11/2022 dan No. 012.1/A/KU/A24/SK/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PTPI;
20. Surat Keputusan Direksi PTPI No. SK/DIR/048/2021 Tanggal 12 April 2021 tentang Tanggung Jawab Penandatangan dan Pemaraf Dokumen di PTPI;

7. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises jo. Government Regulation No. 23/2022 on the Amendment to Government Regulation No. 45/2005 on the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of StateOwned Enterprises;
8. Government Regulation No. 43/2018 on Procedures for Implementing Community Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption;

9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER- 2/MSU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of StateOwned Enterprises;
10. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SE- 2/MBU/07/2019 dated July 29, 2019 concerning Clean Management of State-Owned Enterprises through the implementation of Prevention of Corruption, Collusion, and Nepotism, and Handling Conflicts of Interest and Strengthening Internal Supervision;
11. Cooperation Agreement between the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia and PTPI Number 79 of 2020 and No. 018/A/PA.08.01/E42/SP/2021 dated March 2, 2021 concerning Handling of Complaints related to Corruption in Efforts to Eradicate Corruption (PI-KPK Integrated WSS), and its amendments;
12. Guidelines for Whistleblowing System (WBS), National Committee on Governance Policy, 2008;

13. SNI ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System Requirements with Usage Guidelines;
14. ISO 37002 : 2021 Whistleblowing Management System - User Guide;
15. ISO 37301 : 2021 Compliance Management System - Requirements with Usage Guidelines;
16. Guidelines for the Integrated Corruption Eradication Commission (KPK) Complaint Handling System, 2021, which was conveyed through KPK Chairman's letter No. S/4136/PM.00.00/30-35/07/2021 dated July 23, 2021;
17. Articles of Association of the Company and amendments thereto;
18. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors Number 016/KEP. KOM/XI 1/2021 and Number: 116.1/A/KU/E42/SK/202 dated 16 December 2021 concerning the Code of Conduct of PTPI;
19. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors Number 002/KEP. KOM/11/2022 and Norn or 012.1/A/KU/A24/SK/2022 dated 16 February 2022 concerning the Code of Corporate Governance of PTPI;

20. Decree of the Board of Directors of PTPI No. SK/DIR/048/2021 dated April 12, 2021 concerning Responsibilities for Signing and Attesting Documents at PTPI;

21. Surat Keputusan Direksi PTPI No. 079/A/KU/G13/SK/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Otorisasi Pengesahan Dokumen Sistem Manajemen di PTPI;
22. Surat Keputusan Direksi PTPI No. 082/KU/E1 0/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi PTPI dan perubahannya;
23. Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen, Dokumen No. PI-STK-PD-001;
24. Pedoman Manajemen Anti Penyuapan, Dokumen No. PISEK-PD-007;
25. Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*) Dokumen No. PI-SEK-PD-012;
26. Pedoman Sistem Manajemen Pengendalian Fraud (*Fraud Control System*), Dokumen No. PI-SEK-PD-014.

Mengacu pada hal di atas, Perusahaan telah menetapkan mekanisme Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) yang diatur dalam Pedoman Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (WBMS) Dokumen No. PI-SEK- PD-011 Rev.3 tanggal 13 Juli 2023 dan Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Dokumen No. PI-SEK-PR-013 Rev.2 Tanggal 13 Juli 2023.

PRINSIP DASAR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan selalu berupaya mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan pelanggaran. Karena itu, Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

21. Decree of the Board of Directors of PTPI No. 079/A/KU/G13/SK/2021 dated 26 July 2021 concerning Authorization for Ratification of Management System Documents at PTPI;
22. Decree of the Board of Directors of PTPI No. 082/KU/E1 0/SK/2021 dated 5 August 2021 concerning the Organizational Structure of PTPI and its amendments;
23. Guidelines for the Preparation and Control of Management System Documents, Document No. PI-STK-PD-001;
24. Anti-bribery Management Guidelines, Document No. PISEK-PD-007;
25. Code of Group Governance Document No. PI-SEKPD-012;
26. Fraud Control Management System Guidelines, Document No. PI-SEK- PD-014.

Referring to the above, the Company has established a mechanism for managing the Whistleblowing System (WBS) as stipulated in the Whistleblowing Management System (WBMS) Guidelines Document No. PI-SEK- PD-011 Rev.3 dated July 13, 2023 and the Whistleblowing System Management Procedure (WBS) Document No. PI-SEK-PR-013 Rev.2 dated July 13, 2023.

BASIC PRINCIPLES OF VIOLATION REPORTING SYSTEMS

The company always strives to speed up and simplify the follow-up process for reporting violations. Therefore, the Company's Violation Reporting System is implemented by upholding the following principles:

No	Prinsip Principle	Penjelasan Explanation
1	Kepastian Hukum Legal Certainty	Pelaksanaan WBMS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait. The implementation of WBMS prioritizes the basis of laws and regulations and applicable internal provi-sions, as well as considering aspects of propriety and fairness, and can provide protection for related parties.
2	Akuntabel Accountable	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya. The implementation of the Whistleblowing System upholds the truth of the data and information submitted and its accountability.
3	Transparan Transparent	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku. The implementation of the Whistleblowing System upholds the transparency of information to the authorities if there is a deviation from the implementation of the applicable business processes.

No	Prinsip Principle	Penjelasan Explanation
4	Kehati-hatian Caution	Dalam pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personel terkait. The implementation of the Whistleblowing System Guidelines must adhere to the principle of prudence, namely by taking into account the smallest impact/risk for the Company and/or related Officials/Personnel.
5	Non Diskriminatif Non-Discriminatory	Setiap Insan Perusahaan memiliki hak yang sama untuk dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan. Every employee of the Company has the same right to be able to report violations committed by every employee of the Company that occur within the Company in accordance with the forms of violations that can be reported.
6	Itikad Baik Good Intention	Setiap pelaporan pelanggaran dilakukan atas dasar itikad baik dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, bukan dilakukan atas dasar fitnah atau tanpa dasar/bukti. Any reporting of violations is done on the basis of good faith with the aim of the interests of the Company, not done on the basis of slander or without basis/evidence.
7	Kerahasiaan Confidentiality	Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap Pelaporan Pelanggaran, WBMS harus mampu mengakomodir dan/atau menjaga kerahasiaan serta asas praduga tidak bersalah. In conducting the follow-up process for each Whistleblower, WBMS must be able to accommodate and/or maintain confidentiality and the principle of presumption of innocence.
8	Koordinasi Coordination	Penanganan pengaduan harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pejabat yang berwenang. Complaint handling should be carried out with good cooperation between authorized officials.
9	Objektivitas Objectivity	Penanganan Pelaporan Pelanggaran WBMS harus berdasar fakta atau bukti yang dapat dinilai. Handling of WBMS Whistleblowing must be based on facts or evidence that can be assessed.
10	Kepercayaan Trust	Perusahaan mengakui kejujuran dan kebenaran atas Pelaporan Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan pemenuhan kecukupan bukti dan analisis yang dilakukan atas tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran. The Company recognizes the honesty and truthfulness of the Whistleblowing carried out based on the fulfillment of the adequacy of evidence and analysis carried out on the follow-up to the Whistleblowing.
11	Ketidakberpihakan Unbiased	Memegang keputusan berdasarkan bukti objektif yang diperoleh selama penilaian, bukan berdasarkan bias atau prasangka yang disebabkan oleh pengaruh kepentingan individu atau pihak terkait lainnya. Make decisions based on objective evidence obtained during the assessment, not based on bias or prejudice caused by the influence of individual interests or other related parties.
12	Perlindungan Protection	Perusahaan memberikan perlindungan terhadap Pelapor dan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan atas Pelaporan Pelanggaran serta memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi. The company provides protection to the Reporter and parties related parties in handling of whistleblowing and ensure that there is no intimidation and discrimination.
13	Efektif Effective	Penerapan WBMS dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Pedoman ini dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. The implementation of WBMS is carried out in a standardized and law-abiding manner referring to the general provisions contained in this Guideline and applicable laws and regulations.
14	Efisien Efficient	Aktivitas WBMS dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan/atau perangkat perusahaan secara efisien dalam mendukung pelaksanaan. WBMS activities are carried out while taking into account the efficient use of various company resources and/or devices in supporting the implementation of the WBMS.

RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan memberikan batasan yang jelas untuk setiap pelaporan yang dapat diproses lebih lanjut oleh Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (WBMS). Batasan dan kategori aduan yang ditindaklanjuti oleh WBMS adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, baik secara finansial maupun non finansial, meliputi:

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan
   a. Pelanggaran Kode Etik/Perilaku merupakan perbuatan yang melanggar kode etik/perilaku dan peraturan relevan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
   b. Pelanggaran kebijakan/peraturan Perusahaan merupakan pelanggaran terhadap kebijakan/peraturan Perusahaan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan adanya kerugian material dan tidak material bagi Perusahaan.
   c. Perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk.

   Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:
   a. Bertindak diluar kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan & merusak/memperburuk citra Perusahaan.
   b. Perbuatan yang melanggar sistem dan prosedur yang diatur dalam Pedoman/Prosedur Perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;

2. Penipuan
   Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

   Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan penipuan kepada pihak eksternal dan/atau internal dengan mengatasnamakan Perusahaan, dimana secara riil hal yang disampaikan tidak benar/fiktif dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan/orang yang ditipu;

3. Korupsi
   Perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

SCOPE AND COVERAGE OF THE VIOLATION REPORTING SYSTEM

The Company provides clear boundaries for each report that can be further processed by the Whistleblower Management System (WBMS). The limitations and categories of complaints followed up by WBMS are actions that can harm the Company, both financially and non-financially, including:

1. Violation of the Code of Ethics/Behavior and Company Regulations
   a. Violation of the Code of Ethics/Behavior is an act that violates the code of ethics/behavior and other relevant regulations set by the Company.
   b. Violation of the Company's policies/regulations is a violation of the Company's policies/regulations that is done intentionally and results in material and immaterial losses to the Company.
   c. Behavior deemed inappropriate according to individual values or social norms.

   Examples of these actions are not limited to:
   a. Acting outside of authority with the aim of benefiting oneself or other parties that can harm & damage/deteriorate the image of the Company.
   b. Actions that violate the system and procedures set out in the Company's Guidelines/Procedures and causes losses to the Company;

2. Fraud
   Actions with intent to unlawfully benefit oneself or another person, by using a false name or false dignity, by deceit, or by a series of lies, to induce another person to surrender something to him, or to give a debt or to cancel a debt.

   Examples of these actions are not limited to: committing fraud to external and/or internal parties on behalf of the Company, where in real terms the things conveyed are not true/fictitious with the aim of benefiting themselves or others which cause losses to the Company/the person being defrauded;

3. Corruption
   Actions that unlawfully enrich themselves or others or a corporation that can harm the State's finances or the State's economy.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan mark-up pada proses pengadaan barang dan jasa, penjualan, pembelian dan lainnya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan;

Examples of these actions are not limited to: mark-ups in the procurement of goods and services, sales, purchases and others for the purpose of benefiting oneself or others that cause losses to the Company;

4. Penyuapan
   Tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

   Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan suap dan/atau memberi suap kepada pihak lain dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bribery
   The act of giving or promising something to a person with the intention of inducing the person to do something or not to do something in his/her duty, which is contrary to his/her authority or duty concerning the public interest.

   Examples of these actions are not limited to: committing bribery and/or giving bribes to other parties where such acts violate the applicable laws and regulations;

5. Pemerasan
   Tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.

   Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan pungutan tidak sah dengan unsur paksaan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;

5. Extortion
   The act of unlawfully benefiting oneself or another by forcing someone by force or threat of force to give something which wholly or partially belongs to that person or to another, or to make a debt or to cancel a debt, shall be punished as extortion.

   Examples of these actions are not limited to: making unauthorized levies with elements of coercion in any form in carrying out their duties for personal/group/other parties;

6. Gratifikasi yang tidak sah (ilegal)
   Perbuatan memberi dan/atau menerima dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.

   Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:
   a. Menerima hadiah/imbalan dari penyedia jasa sebagai wujud ucapan terima kasih yang melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.
   b. Menerima janji/hadiah/imbalan dari pihak lain untuk mempengaruhi suatu keputusan yang dapat merugikan Perusahaan melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan;

6. Unauthorized (illegal) gratuities
   The act of giving and/or receiving in a broad sense, which includes the provision of money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities, whether received domestically or abroad, and whether conducted electronically or otherwise, which are carried out by Company personnel related to their authority/position in the Company, so that it can lead to conflicts of interest that affect the independence, objectivity and professionalism of Company personnel.

   Examples of these actions are not limited to:
   a. Receiving gifts/remuneration from service providers as a form of gratitude that violates the provisions in the Company's Gratification Control Guidelines.
   b. Receiving promises/gifts/reward from other parties to influence a decision that may harm the Company violates the provisions in the Company's Gratification Control Guidelines;

7. Kecurangan
   Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat, meliputi penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau pihak lain.

   Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga merugikan Perusahaan dan menguntungkan diri sendiri/kelompok;

8. Pelanggaran hukum
   Tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.

   Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan hal-hal yang melanggar hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan/orang lain;

9. Pencurian
   Perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

   Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: mengambil aset milik Perusahaan dan/atau orang lain/karyawan untuk kepentingan pribadi atau orang lain;

10. Penggelapan
    Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta Perusahaan oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan Perusahaan, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

    Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: menyalahgunakan atau mengambil tanpa alasan uang, barang, data, dokumen atau barang berharga lainnya milik Perusahaan dan/atau orang lain yang dikuasakan kepadanya;

11. Kelalaian yang berdampak besar
    Jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan seseorang kurang berhati-hati dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

    Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: kelalaian yang dilakukan oleh Insan Perusahaan atas pelaksanaan proses bisnis sehingga memberikan dampak pada terhentinya proses operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian Perusahaan baik kerugian finansial dan non finansial;

7. Cheating
   Dishonest or deceitful acts, including fraud, extortion, forgery, concealment or destruction of documents/reports, making of and the use of false documents, committed by a person or group of people who cause potential or actual losses to the Company or other parties.

   Examples of these actions are not limited to: making and/or using and/or providing and/or changing and/or copying and/or duplicating data and/or information that is not in accordance with the actual conditions so as to harm the Company and benefit oneself/group;

8. Violation of the law
   The actions of a person or group that violates rules that are not in accordance with applicable laws.

   Examples of these actions are not limited to: doing things that violate the law with the aim of benefiting oneself or others that cause harm to the Company/others;

9. Theft
   The act of taking property, which wholly or partially belongs to another, with intent to unlawfully possess it.

   Examples of these actions are not limited to: taking assets belonging to the Company and/or other people/employees for personal or other interests;

10. Embezzlement
    Dishonest actions by hiding the Company's goods/assets by one or more persons without the Company's knowledge, with the aim of transferring, controlling, or using for other purposes.

    Examples of these actions are not limited to: misusing or taking without reason money, goods, data, documents or other valuables belonging to the Company and/or other persons authorized by him/her;

11. Negligence that has a major impact
    The type of error that occurs because someone is less careful in acting which can cause losses to the Company.

    Examples of these actions are not limited to: negligence committed by the Company's employees on the implementation of business processes that have an impact on the cessation of the company's operational processes and cause losses to the Company both financial and non-financial losses;

12. Diskriminasi
Setiap pembedaan, peminggiran (marjinalisasi), pembatasan dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau pembedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas Perusahaan serta dalam interaksi di lingkungan kerja.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: perbedaan perlakuan, pengecualian, atau preferensi dalam hal proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pengupahan dan pemberian manfaat, promosi/demosi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh atasan dengan bawahan, pekerja dengan pekerja, atau kelompok dengan kelompok lain berdasarkan etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas, atau karakteristik lainnya;

13. Intimidasi
Tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu), gertakan, atau ancaman.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: perbuatan pemaksaan dari atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas yang melanggar Peraturan Perusahaan atau hukum;

14. Kekerasan
Setiap tindakan termasuk ancaman yang dilakukan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik maupun privat, sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis, maupun seksual.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: penganiayaan secara fisik/non fisik yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, maupun seksual di lingkungan tempat kerja;

15. Pelecehan
Segala perbuatan di tempat kerja maupun media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi, merendahkan, menghina, mempermalukan seseorang.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada pelecehan fisik, verbal, nonverbal, dan visual serta bentuk pelecehan lainnya;

12. Discrimination
Any distinction, marginalization, restriction and/or exclusion made directly or indirectly on the basis of religion, tribe, race, ethnicity, group, class, social status, including marital status, economic status, gender, language, political preference, disability, which has the effect or purpose of reducing or eliminating the recognition, exercise or exercise of human rights and fundamental freedoms, resulting in inequality of opportunity or differential treatment of a person or group of people in the Company's activities and in interactions in the work environment.

Examples of this conduct are not limited to: differences in treatment, exclusion, or preference in terms of recruitment and selection processes, performance appraisal, training and development, wages and benefits, promotion/demotion, termination of employment (PHK) carried out by superiors with subordinates, workers with workers, or groups with other groups based on ethnicity, race, nationality, color, religion, gender, age, disability, or other characteristics;

13. Intimidation
An act of frightening (especially to force another person or party to do something), bluffing, or threatening.

Examples of this conduct are not limited to: coercive actions from superiors to subordinates to perform tasks that violate Company Regulations or the law;

14. Violence
Any act, including threats, against another person in the workplace, which occurs in public or private, causing physical, psychological or sexual harm.

Examples of these acts are not limited to: physical/nonphysical abuse that causes physical, psychological, or sexual harm in the workplace environment;

15. Harassment
Any act in the workplace or communication media that is not in accordance with the law or statutory provisions on human rights that aims to intimidate, degrade, humiliate, embarrass a person.

Examples of this conduct are not limited to physical, verbal, nonverbal, and visual abuse and other forms of harassment;

Penggunaan dan atau sumber daya publik yang tidak sah Penggunaan dana atau sumber daya publik yang tidak sah oleh Insan Perusahaan sehingga dapat memberikan kerugian bagi internal dan eksternal perusahaan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: penggunaan dana/sumbangan dari partai/pihak eksternal lainnya dalam melaksanakan program kerja perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur Perusahaan;

16. Penyalahgunaan wewenang
Insan Perusahaan dengan kekuasaan/jabatan yang dimilikinya melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara merugikan Negara dan/atau Perusahaan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: Penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia;

17. Benturan kepentingan
Situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

18. Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:
Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melalui prosedur yang seharusnya, dimana Insan Perusahaan tersebut memiliki kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

Melakukan suatu tindakan/pemberian keputusan yang menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan melanggar prosedur Perusahaan; dan

19. Mismanajemen
Suatu kesalahan/kekeliruan tindakan pada saat proses pemberian bimbingan atau fasilitas-fasilitas manajerial itu berlangsung, atau mismanajemen terjadi karena adanya kesalahan tindakan pada saat proses pencapaian tujuan sedang berlangsung.

Contoh perbuatan ini adalah namun tidak terbatas pada: kesalahan pengambilan keputusan dalam aktivitas bisnis dikarenakan kesalahan/kekeliruan tindakan tanpa ada dasar yang jelas sehingga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.

WBS Perusahaan hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan/tindakan sebagaimana tersebut diatas pada nomor 1 sampai dengan 19.

Unauthorized use of and or public resources Unauthorized use of public funds or resources by Company personnel so as to cause harm to internal and external companies.

Examples of these actions are not limited to: use of funds/donations from parties/other external parties in implementing company work programs that are not in accordance with the provisions regulated by the Company;

16. Abuse of authority
Company personnel with the power/position they hold misuse their authority with the aim of benefiting themselves or others or a corporation by harming the State and/or the Company.

Examples of these actions are not limited to: Abuse of authority which can occur in various forms such as abuse of authority in decision making, financial management, Human Capital management;

17. Conflict of interest
Situation or condition where the Company's employees who get power and authority have or are suspected of having personal/group interests in every use of their power and authority, so that it can affect the quality and performance that should be.

18. Examples of these actions are not limited to:
The decision to appoint a certain party as a provider of goods/services by not going through the proper procedures, where the Company's employees have an economic interest in the appointed party.

Performing an action/decision that benefits oneself/others by violating Company procedures; and

19. Mismanagement
An action error/mistake during the process of providing managerial guidance or facilities, or mismanagement occurs due to an action error during the process of achieving goals.

Examples of these actions are but not limited to: decision-making errors in business activities due to errors/mistakes in actions without a clear basis that cause losses to the Company.

The Company's WBS will only follow up on complaints of acts/actions as mentioned above in number 1 through 19.

Pelaporan Pelanggaran terkait dengan Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH), Sumber Daya Manusia, dan fasilitas Perusahaan dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan yang berlaku di Perusahaan.

Violation Reporting related to Safety, Health, Work and Environment (K3LH), Human Capitals, and Company facilities can be submitted to related parties by using the applicable reporting mechanism in the Company.

Pelaporan Pelanggaran terkait dengan *Respectful Workplace Policy* (RWP) ditindaklanjuti oleh Perusahaan melalui mekanisme yang diatur secara khusus pada Pedoman implementasi *Respectful Workplace Policy* (RWP) di PI Grup.

Violation Reports related to the Respectful Workplace Policy (RWP) are followed up by the Company through a mechanism specifically regulated in the Guidelines for the implementation of the Respectful Workplace Policy (RWP) in PI Group.

WBS Perusahaan dapat diakses oleh seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal, dengan memberikan pilihan pelaporan pelanggaran bersifat anonymous (anonim/tanpa mengungkapkan identitas) dan memberikan kesempatan apabila bila Pelapor ingin mengungkapkan identitasnya jika pengungkapan identitas dilakukan oleh Pelapor sendiri).

The Company's WBS can be accessed by all stakeholders, both internal and external, by providing the option of anonymous reporting of violations (anonymous/without disclosing identity) and providing an opportunity if the Whistleblower wants to disclose his identity if the disclosure of identity is carried out by the Whistleblower himself).

Perusahaan menjamin kerahasiaan setiap Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor.

The Company guarantees the confidentiality of each Whistleblower submitted by the Whistleblower.

PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan adalah Direktur Utama yang dapat dibantu oleh Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, maupun Direktur yang membawahi fungsi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Direktur Utama menetapkan unit yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di Perusahaan sebagai Tim Penanganan Aduan (TPA), dengan tugas mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran.

TPA bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, maupun Direktur yang membawahi fungsi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Tugas dan Tanggung Jawab TPA sekurang-kurangnya meliputi, hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan klarifikasi atas aduan pelanggaran yang disampaikan pelapor;
2. Mengkoordinasikan pengungkapan tindak lanjut aduan pelanggaran dan perlindungan pelapor;
3. Melakukan reviu dan evaluasi perbaikan sistem WBS;
4. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
    a. berhubungan dengan pihak terlapor untuk memperoleh penjelasan mengenai fakta yang diadukan ataupun klarifikasi atas pengaduan;
    b. mendiskusikan kasus yang ditangani dengan pihak yang tidak terkait/berwenang;
    c. berusaha untuk melakukan investigasi atau wawancara atas kasus yang dilaporkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

VIOLATION REPORTING SYSTEM MANAGER

The person responsible for the Violation Reporting System in the Company is the President Director who can be assisted by the Director who oversees the Governance and Compliance function, as well as the Director who oversees other functions appointed by the President Director. The President Director appointed the unit in charge of Governance and Compliance functions in the Company as the Complaint Handling Team (TPA), with the task of managing the Violation Reporting System.

The TPA is responsible to the Director who oversees the Governance and Compliance function, as well as the Director who oversees other functions appointed by the President Director. TPA Duties and Responsibilities at least include the following, but are not limited to:

1. Clarify complaints of violations submitted by the reporter;
2. Coordinate disclosure of follow-up complaints of violations and protection of whistleblowers;
3. Review and evaluate improvements to the WBS system;
4. It is not permitted to do the following things, but not limited to:
    a. liaise with the reported party to obtain an explanation of the facts complained of or clarification of the complaint;
    b. discussing cases handled with unrelated/authorized parties;
    c. attempting to conduct investigations or interviews on reported cases without permission from the competent authorities.

WBS TINDAK PIDANA KORUPSI TERINTEGRASI PTPI DAN KPK RI

Perusahaan senantiasa berkomitmen dalam mencegah fraud yang salah satunya melalui pengembangan WBS. Sejalan dengan komitmen tersebut dan menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-489/S. MBU/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Kerja sama WBS di BUMN dengan KPK RI, maka Perusahaan telah melaksanakan kerja sama terkait dengan WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi PI dan KPK RI pada tanggal 2 Maret 2021. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal PTPI terkait penanganan pengaduan tindak pidana korupsi;
2. Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi;
3. Penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi melalui aplikasi;
4. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi; dan
5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait tindak pidana korupsi.

Adapun rincian kegiatan yang telah dilakukan bersama dengan KPK RI pada tahun 2024 sebagai berikut:

WBS INTEGRATED CORRUPTION CRIMES OF PTPI AND KPK RI

The company is always committed to preventing fraud, one of which is through developing a WBS. In line with this commitment and following up on the letter from the Secretary of the Ministry of SOE No. S-489/S. MBU/12/2020 dated 22 December 2020 regarding WBS Cooperation in SOE with the Indonesian Corruption Eradication Committee, the Company has carried out cooperation related to the Integrated WBS for Corruption Crimes (TPK) PI and the Indonesian Corruption Eradication Committee on March 2 2021. The scope of the Cooperation Agreement includes:

1. Preparation and/or strengthening of PTPI's internal regulations regarding handling complaints of criminal acts of corruption;
2. Commitment to managing complaints related to criminal acts of corruption;
3. Handling complaints related to criminal acts of corruption through applications;
4. Coordination and joint activities for handling complaints related to criminal acts of corruption; And
5. Exchange of data and/or information related to criminal acts of corruption.

The details of activities carried out together with the Indonesian Corruption Eradication Committee in 2024 are as follows:

No.	Kegiatan Activity
1.	Pembahasan monitoring dan evaluasi WBS TPK Terintegrasi Semester II 2023 dan Pembahasan Rencana Aksi WBS TPK Terintegrasi Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024. Discussion of monitoring and evaluation of the Integrated WBS TPK Semester II 2023 and Discussion of the Integrated WBS TPK Action Plan for 2024 which was held on February 7, 2024.
2.	Penyampaian final Rencana Aksi WBS TPK Terintegrasi Tahun 2024 kepada KPK pada tanggal 22 Februari 2024. Final submission of the 2024 Integrated WBS TPK Action Plan to KPK on February 22, 2024.
3.	Penyusunan KAK kegiatan internalisasi dan sosialisasi WBS Terintegrasi Pupuk Indonesia Group kepada stakeholder internal dan eksternal terkait penggunaan WBS terintegrasi untuk stakeholder internal dan eksternal dengan narasumber KPK RI. Preparation of KAK for internalization and socialization of Pupuk Indonesia Group Integrated WBS to internal and external stakeholders related to the use of integrated WBS for internal and external stakeholders with resource persons from KPK RI.

SOSIALISASI PENERAPAN WBS

SOCIALIZATION OF WBS IMPLEMENTATION

Sosialisasi penerapan WBS 2024
Socialization of WBS Implementation in 2024

No	Perusahaan Company	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan WBS Socialization of WBS Implementation
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1. Sosialisasi melalui website Perusahaan 2. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada acara "*Integrity Commitment Signing Ceremony For Corporate Buyers*" tanggal 23 Februari 2024 3. Sosialisasi WBS pada saat pelaksanaan Refreshment Auditor ASMI pada 14 April 2024, 4. Sosialisasi terkait Program Pengendalian Gratifikasi, WBS, dan SMAP pada Rapat Koordinasi Ops. Distribusi Wilayah 2 tanggal 27 Mei 2024 di Yogyakarta. 1. Socialization through the Company's website. 2. Socialization of Good Corporate Governance at the "Integrity Commitment Signing Ceremony for Corporate Buyers" event on February 23, 2024. 3. Socialization of WBS during the ASMI Auditor Refreshment on April 14, 2024. 4. Socialization related to Gratification Control Program, WBS, and SMAP at the Coordination Meeting of Ops. Region 2 Distribution Coordination Meeting on May 27, 2024 in Yogyakarta.
2	PT Petrokimia Gresik	1. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan SMAP kepada Mahasiswa Prakerin (Praktik Kerja Industri) dan Mahasiswa Magenta (Magang Bertalenta). 2. Blasting Whatsapp kepada Insan PG terkait Integritas dan WBS kepada seluruh karyawan. 3. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan SMAP kepada Tenaga Pro Hire Petrokimia Gresik. 4. Blasting Whatsapp terkait Anti Gratifikasi . 5. Penandatanganan Kebijakan Anti Penyuapan dan Komitmen Pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 oleh seluruh karyawan. 6. Signing Komitmen Anti Gratifikasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris. 7. Signing Komitmen Anti Gratifikasi oleh Pejabat Grade I sd II . 8. Larangan Permintaan, Pemberian, dan Penerimaan Gratifikasi Tahun 2024. 9. Komitmen Penerapan GCG tentang Larangan Permintaan, Pemberian, dan Penerimaan Gratifikasi PT Petrokimia Gresik kepada Stakeholder/Mitra Bisnis Unit Kerja dalam Peringatan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. 10. Blasting Whatsapp terkait Pentingnya Implementasi WBS di Perusahaan 11. Publikasi Kebijakan dan Komitmen Implementasi SMAP melalui DOF. 12. Distribusi Pakta Integritas Komitmen Anti Gratifikasi oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Grade I - II dan Kepala Proyek melalui Dof. 13. Penyampaian Materi Sosialisasi AntiFraud dan Implementasi SMAP kepada seluruh unit kerja. 14. Blasting Implementasi Anti Gratifikasi kepada mitra bisnis melalui email Perusahaan kepada seluruh stakeholders terkait. 15. Publikasi Hasil Audit SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui instagram dan website resmi Perusahaan. 16. Eksternalisasi Komitmen GCG Perusahaan kepada Mitra Bisnis melalui email unit kerja. 17. Komitmen dan Kebijakan Implementasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui website resmi Perusahaan melalui website resmi Perusahaan. 18. Sosialisasi Anti-Fraud kepada Mitra Petroganik Subsidi 2024 di Wisma Kebomas. 1. Socialization of GCG, Gratification and SMAP to Prakerin (Industrial Work Practice) Students and Magenta (Talented Internship) Students. 2. Whatsapp blasting to PG personnel related to Integrity and WBS to all employees. 3. Socialization of GCG, Gratification and SMAP to Petrokimia Gresik Pro Hire Personnel. 4. Whatsapp Blasting related to Anti Gratification. 5. Signing of Anti-Bribery Policy and Commitment to Implement SMAP ISO 37001:2016 by all employees. 6. Signing of Anti Gratification Commitment by the Board of Directors and Board of Commissioners. 7. Signing of Anti Gratification Commitment by Grade I to II Officials. 8. Prohibition of Requesting, Giving, and Receiving Gratuities in 2024. 9. Commitment of GCG Implementation regarding the Prohibition of Request, Granting, and Receiving Gratuities of PT Petrokimia Gresik to Stakeholders/Business Partners of Work Units in Commemoration of Idul Fitri 1445 H. 10. Whatsapp Blasting related to the Importance of WBS Implementation in the Company. 11. Publication of SMAP Implementation Policy and Commitment through DOF. 12. Distribution of Anti-Gratification Commitment Integrity Pact by the Board of Commissioners, Directors, Grade I - II Officers and Project Heads through DOF. 13. Submission of AntiFraud and SMAP Implementation Socialization Materials to all work units. 14. Blasting Anti Gratification Implementation to business partners through the Company's email to all relevant stakeholders. 15. Publication of SNI ISO 37001 Audit Results: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) through Instagram and the Company's official website. 16. Externalization of the Company's GCG Commitment to Business Partners via work unit email. 17. Commitment and Policy Implementation of ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) through the Company's official website. 18. Anti-Fraud Socialization to Petroganik Subsidy 2024 Partners at Wisma Kebomas.

Sosialisasi penerapan WBS 2024
Socialization of WBS Implementation in 2024

No	Perusahaan Company	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan WBS Socialization of WBS Implementation
3	PT Pupuk Kujang	1. Sosialisasi Kebijakan WBS dan sosialisasi penerapan FCS terus dilakukan kepada pihak internal agar implementasinya didukung oleh segenap pihak secara efektif. Sosialisasi kepada pihak internal dilakukan melalui berbagai media antara lain dengan workshop, intranet, banner, maupun Laporan Tahunan (*Annual Report*). 2. Pada saat ini PTPI sudah melakukan pengembangan WBS Multi Company dan akan diberlakukan untuk semua Anak Perusahaan Pupuk Indonesia. 3. Sosialisasi Pemasangan spanduk, banner di tempat- tempat strategis dan pemasangan di gedung admin di lingkungan perusahaan. 4. Sosialisasi WBS dilakukan pada saat Internalisasi Pemahaman Gratifikasi kepada Insan Perusahaan PT Pupuk Kujang bersama KPK-RI pada tanggal 3 Juni 2024. 1. Socialization of the WBS Policy and socialization of FCS implementation continues to be carried out to internal parties so that its implementation is effectively supported by all parties. Socialization to internal parties is carried out through various media, including workshops, intranet, banners, and the Annual Report. 2. At this time PTPI has developed a Multi Company WBS and will be applied to all Pupuk Indonesia Subsidiaries. 3. Socialization Installation of banners, banners in strategic places and installation in the admin building in the company environment. 4. WBS socialization was carried out during the Internalization of Understanding Gratification to PT Pupuk Kujang Company Personnel with KPK-RI on June 3, 2024.
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	1. Standing Banner "Cegah Penyuapan Dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Sosialisasi sistem WBS dan sistem gratifikasi online (Granol.pupukkaltim.com) Seluruh Stakeholders Perusahaan X-banner di Unit Kerja Kritikal 2. Poster "Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berprinsip 4 No's : No Bribery, No Kickback, No Gift dan No Luxurious Hospitality Seluruh Stakeholders Perusahaan Website 3. Webinar Kode Etik Perusahaan dan Launching Pakta Integritas (19 Januari 2024) Seluruh Karyawan Via Zoom Meeting 4. Sosialisasi Penghargaan Pengelolaan WBS Terbaik dan Pelaporan LHKPN 2022 Tercepat PI Group (27 Januari 2024) Stakeholders Eksternal dan Internal Sosial Media Perusahaan 5. Sosialisasi GCG & MR "Bermain Bersama, Ber-GCG Ria" (1 Maret 2024) Karyawan TKNO Sosialisasi Offline di Ruang Mahoni Pupuk Kaltim 6. Sosialisasi GCG dan Gratifikasi Departemen Pengadaan Jasa (15 Maret 2024) Seluruh Karyawan Pengadaan dan Jasa Sosialisasi Offline di Kantor Pengadaan Jasa PKT 7. Sosialisasi GCG pada Roadshow Distributor Gathering Wilayah Jawa Timur (11 Juni 2024) Distributor & Gudang Sosialisasi Offline di Surabaya 8. Sosialisasi GCG pada Roadshow Distributor Gathering Wilayah Kalimantan Timur (12 Juni 2024) Distributor & Gudang Sosialisasi Offline di Samarinda 9. Sosialisasi GCG pada Roadshow Distributor Gathering Wilayah Kalimantan Selatan (14 Juni 2024) Distributor & Gudang Sosialisasi Offline di Banjarmasin 10. Sosialisasi GCG pada Roadshow Distributor Gathering Wilayah Gorontalo (19 Juni 2024) Distributor & Gudang Sosialisasi Online Zoom 11. Sosialisasi GCG pada Roadshow Distributor Gathering Wilayah Sulawesi Utara (21 Juni 2024) Distributor & Gudang Sosialisasi Online Zoom 12. Sosialisasi GCG pada Roadshow Distributor Gathering Wilayah Kalimantan Tengah (25 Juni 2024) Distributor & Gudang Sosialisasi Offline di Pangkalan Bun 13. Sosialisasi GCG pada Roadshow Distributor Gathering Wilayah Kalimantan Utara (27 Juni 2024) Distributor & Gudang Sosialisasi Offline di Tarakan

Sosialisasi penerapan WBS 2024

Socialization of WBS Implementation in 2024

No	Perusahaan Company	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan WBS Socialization of WBS Implementation
		1. Standing Banner "Prevent Bribery with Anti-Bribery Management System (SMAP), Socialization of WBS system and online gratification system (Granol.pupukkaltim.com) All Company Stakeholders X-banner in Critical Work Units 2. Poster "Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) with 4 No's principle: No Bribery, No Kickback, No Gift and No Luxurious Hospitality" All Company Stakeholders Website 3. Webinar on the Company's Code of Ethics and Integrity Pact Launching (January 19, 2024) All Employees Via Zoom Meeting 4. Socialization of the Best WBS Management Award and PI Group's Fastest 2022 LHKPN Reporting (January 27, 2024) External and Internal Stakeholders Company Social Media 5. GCG & MR Socialization "Playing Together, Ber-GCG Ria" (March 1, 2024) TKNO Employees Offline Socialization at Mahoni Room Pupuk Kaltim 6. GCG and Gratification Socialization of Services Procurement Department (March 15, 2024) All Procurement and Services Employees Offline Socialization in PKT Services Procurement Office 7. GCG Socialization at Roadshow Distributor Gathering East Java Region (June 11, 2024) Distributors & Warehouse Offline Socialization in Surabaya 8. GCG Socialization at Roadshow Distributor Gathering East Kalimantan Region (12 June 2024) Distributors & Warehouse Offline Socialization in Samarinda 9. GCG Socialization at the Distributor Gathering Roadshow in South Kalimantan Region (June 14, 2024) Distributor & Warehouse Offline Socialization in Banjarmasin 10. GCG Socialization at Gorontalo Region Distributor Gathering Roadshow (June 19, 2024) Distributor & Warehouse Online Socialization Zoom 11. GCG Socialization at Roadshow Distributor Gathering North Sulawesi Region (21 June 2024) Distributors & Warehouses Online Zoom Socialization 12. GCG Socialization at Roadshow Distributor Gathering Central Kalimantan Region (June 25, 2024) Distributors & Warehouse Offline Socialization in Pangkalan Bun 13. GCG Socialization at the North Kalimantan Region Distributor Gathering Roadshow (27 June 2024) Distributor & Warehouse Offline Socialization in Tarakan
5	PT Pupuk Iskandar Muda	1. Departemen Tata Kelola & Manajemen Risiko akan melakukan roadshow Sosialisasi WBS kepada seluruh Insan PIM pada semester II Tahun 2024. 2. Sosialisasi kepada Stakeholders akan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Departemen Pengadaan dan Departemen Mitra Bisnis Pemasaran. 3. Pemasangan spanduk, baliho, banner di ruang public dan lintasan aktivitas karyawan, 4. sosialisasi berkala melalui e-mail PIM Bersih (pimbersih@pim.co.id) 1. The Governance & Risk Management Department will conduct a WBS Socialization roadshow to all PIM personnel in the second semester of 2024. 2. Socialization to Stakeholders will be carried out in collaboration with the Procurement Department and the Marketing Business Partner Department. 3. Installation of banners, billboards, banners in public spaces and employee activity paths. 4. periodic socialization through PIM Bersih e-mail (pimbersih@pim.co.id)
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1. Sosialisasi melalui IAM Pusri 2. Materi Fraud dalam Pelatihan Inhouse Enterprise Risk Management (ERM) Fundamental Batch 1 1. Socialization through IAM Pusri 2. Fraud Material in Inhouse Enterprise Risk Management (ERM) Fundamental Training Batch 1
7	PT Rekayasa Industri	Sosialisasi terealisasi sampai dengan Semester-1 Tahun 2024, Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran telah dilakukan dengan: 1. Sosialisasi melalui media Instagram @rekind_official 2. Sosialisasi Sistem Pop Up di website setiap mengakses website www.rekayasa.com 3. Pemasangan Standing Banner 3 Tiga Titik Gedung (ROB 1, ROB 2 & RTO 1). 4. Tata Cara Pelaporan WBS telah di Pop Up pada Intranet.rekayasa.co.id. Socialization is realized until Semester-1 Year 2024, Socialization of the Whistleblowing System has been carried out with: 1. Socialization through Instagram media @rekind_official 2. Socialization of the Pop Up System on the website every time you access the website www.rekayasa.com3. Installation of Standing Banners 3. Three Building Points (ROB 1, ROB 2 & RTO 1). 4. The WBS Reporting Procedure has been Pop Up on Intranet.rekayasa.co.id..

Sosialisasi penerapan WBS 2024
Socialization of WBS Implementation in 2024

No	Perusahaan Company	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan WBS Socialization of WBS Implementation
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) yang terbaru telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui aplikasi Digital Office (DOF), whatsapp grup dan website PT Pupuk Indonesia Niaga. Untuk tata cara pelaporan sudah tertuang dalam kebijakan dan disosialisasikan melalui website dan banner yang ada di lobby perusahaan The latest Whistleblowing System (WBS) guidelines have been socialized to all employees through the Digital Office (DOF) application, WhatsApp group and PT Pupuk Indonesia Niaga website. For reporting procedures, it has been stated in the policy and socialized through the website and banners in the company lobby.
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	Sosialisasi tentang Pengelolaan WBS dilakukan melalui website, banner, dan kotak pengaduan di PT Pupuk Indonesia Logistik Socialization of WBS Management is carried out through the website, banners, and complaint boxes at PT Pupuk Indonesia Logistik.
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas	Telah dilakukan sosialisasi pedoman WBS melalui aplikasi Greatday dan melalui Sarana Terpadu Layanan Informasi Kepegawaian (Sapa Lania) kepada seluruh karyawan WBS guidelines have been socialized through the Greatday application and through the Integrated Personnel Information Service (Sapa Lania) to all employees.
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	Pada Semester I tahun 2023, Perusahaan telah melakukan sosialisasi WBS ke semua unit kerja, hasil survey menunjukan pemahaman Karyawan terhadap Tata Kelola pada kategori "Baik". In the first semester of 2023, the Company has conducted WBS socialization to all work units, the survey results show that employees' understanding of Governance is in the "Good" category.

MEDIA PELAPORAN

Perusahaan menyediakan media pelaporan dugaan pelanggaran melalui website, e-mail, telepon, dan desk pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor, yaitu:

REPORTING MEDIA

The Company provides media for reporting suspected violations via website, e-mail, telephone and complaint desk that can be used by reporters, namely:

Website http://wbs.pupuk-indonesia.com
Email wbs@pupuk-indonesia.com
Phone/SMS/WA (+62) 811 1069 1069
Complaint Desk
Tim WBS PIHC – Kantor Pusat PT Pupuk Indonesia (Persero)
Gedung Pusri Lantai 1 Jalan Taman Anggrek
Kemanggisan Jaya, Jakarta, 11480

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN ADUAN

Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Perusahaan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan aduan melalui media pelaporan yang disediakan Perusahaan;
2. Tim Pengelola Aduan (TPA) menerima pengaduan yang masuk melalui media pelaporan dan melakukan verifikasi aduan sesuai dengan ketentuan. Apabila Pelapor tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak TPA2 memberikan tanggapan atas aduan, maka TPA2 dapat menetapkan bahwa aduan tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan closed;
3. Apabila aduan terverifikasi memenuhi persyaratan aduan maka TPA melakukan Tahap penelaahan/ analisis aduan melalui menggali informasi dari Pelapor, TPA2, dokumen aduan, pihak-pihak lainnya, serta dokumen yang dianggap perlu, dan dapat bekerja sama dengan pihak eksternal untuk dapat ditarik simpulan dan tindak lanjut;
4. TPA1 melakukan telaah/analisis aduan dalam jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil verifikasi dari TPA2;
5. Kewenangan penanganan pelaporan, sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham
      Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan aduan yang terkait dengan Dewan Komisaris/Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan, berdasarkan hasil verifikasi, telaah/analisis, Laporan Hasil Investigasi, dan rekomendasi putusan aduan yang disampaikan oleh Tim Investigasi;

   b. Dewan Komisaris
      Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan aduan yang terkait dengan Direktur Utama Perusahaan, berdasarkan hasil verifikasi, telaah/analisis, Laporan Hasil Investigasi, dan rekomendasi tindak lanjut aduan yang disampaikan oleh Tim Investigasi;
   c. Direktur Utama
      Direktur Utama memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan aduan yang terkait dengan Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Direksi Anak Perusahaan, dan Karyawan Perusahaan, berdasarkan hasil verifikasi, telaah/analisis, Laporan Hasil Investigasi, dan rekomendasi putusan aduan yang disampaikan oleh Tim Investigasi;

REPORTING AND COMPLAINT HANDLING MECHANISM

Everyone can report suspected violations that occur within the Company through the Company's Violation Reporting System (WBS) with the following mechanism:

1. The reporter submits a complaint through reporting media provided by the Company;
2. The Complaint Management Team (TPA) receives incoming complaints through reporting media and verifies complaints in accordance with the provisions. If the Reporting Party cannot fulfill the requirements within 7 (seven) days after TPA2 responds to the complaint, then TPA2 can determine that the complaint does not meet the requirements and is declared closed;

3. If the verified complaint meets the complaint requirements, the TPA carries out a complaint review/ analysis stage by gathering information from the Reporter, TPA2, complaint documents, other parties, as well as documents deemed necessary, and can collaborate with external parties to draw conclusions and follow-up;
4. TPA1 carries out a review/analysis of complaints within a maximum period of 15 (fifteen) days after receiving the verification results from TPA2;
5. Authority to handle reporting, as follows:
   a. Shareholders
      Shareholders have the authority to determine complaints decisions related to the Board of Commissioners/Supporting Organs of the Company's Board of Commissioners, based on the results of verification, review/ analysis, Investigation Result Reports, and recommendations for complaint decisions submitted by the Investigation Team;
   b. Board of Commissioners
      The Board of Commissioners has the authority to determine decisions on complaints related to the Company's President Director, based on the results of verification, review/analysis, Investigation Result Reports, and recommendations for follow-up complaints submitted by the Investigation Team;
   c. President Director
      The President Director has the authority to determine complaints decisions related to the Company's Directors, Board of Commissioners of Subsidiaries/Supporting Organs of Board of Commissioners of Subsidiaries/Directors of Subsidiaries, and Company Employees, based on the results of verification, review/ analysis, Investigation Result Reports, and recommendations for decision on complaints submitted by the Investigation Team;

d. Pengaduan yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Direksi Anak Perusahaan yang diteruskan oleh TPA di masing-masing Anak Perusahaan kepada Direktur Utama Perusahaan dan ditembuskan kepada Direktur yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan Perusahaan serta Pemegang Saham lainnya, akan diproses tindak lanjut oleh TPA Perusahaan dengan tahapan yang sama dengan tindak lanjut aduan yang diterima oleh TPA Perusahaan dari Pelapor WBS secara umum.

6. Tahap Investigasi
   Investigasi merupakan langkah lanjutan dari hasil penelaahan/analisis pengaduan, yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Utama/Dewan Komisaris. Tahapan kegiatan investigasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Prosedur Audit Khusus, Dokumen No. PI-SPI-PR-003;

7. Tahap Pelaporan Kejadian Fraud kepada Aparat Penegak Hukum
   Apabila berdasarkan hasil keputusan Pihak yang Berwenang aduan ditetapkan untuk dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum, maka SVP yang membidangi Unit Tata Kelola dan Kepatuhan (Koordinator TPA) paling lambat 7 (tujuh) hari menyampaikan kepada Unit yang membidangi Hukum Korporasi untuk dapat diproses pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.

Pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Prosedur Pelaporan Kejadian Fraud kepada Penegak Hukum, Dokumen No. PI-SEK-PR-009 dan perubahannya.

PENANGANAN ADUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK) BERSAMA KPK

1. Apabila dari hasil telaah/analisis dan/atau investigasi aduan termasuk kategori TPK serta direkomendasikan untuk dilakukan penanganan bersama dengan KPK, maka aduan tersebut diusulkan kepada Direktur Utama untuk dikoordinasikan penanganannya dengan KPK;

2. Apabila Direktur Utama menyetujui untuk dilakukan penanganan bersama dengan KPK, maka proses perencanaan dan pelaksanaan penanganan bersama KPK dilakukan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing institusi (Perusahaan dan KPK) sebagaimana termuat dalam pada Perjanjian Kerja Sama (PKS);
3. Penanganan bersama KPK atas pengaduan terkait dugaan TPK dikoordinasikan baik pada saat proses penanganan dilakukan dan/atau setelah kegiatan selesai.

d. Complaints related to and/or made by the Board of Commissioners of Subsidiaries/Supporting Organs of the Board of Commissioners of Subsidiaries/Directors of Subsidiaries which are forwarded by the TPA in each Subsidiary to the President Director of the Company and copied to the Director in charge of Corporate Governance and Compliance functions as well as Other Shareholders will be followed up by the Company's TPA at the same stages as the follow-up to complaints received by the Company's TPA from WBS Reporters in general.

6. Investigation Phase
   Investigation is a follow-up step to the results of the review/analysis of complaints, which is carried out based on recommendations from the President Director/Board of Commissioners. The stages of investigative activities are carried out based on the provisions contained in the Special Audit Procedures, Document No. PI-SPI-PR-003;

7. Stage of Reporting Fraud Incidents to Law Enforcement Officials
   If based on the decision of the Competent Party the complaint is determined to be reported to the Law Enforcement Officials, then the SVP in charge of the Governance and Compliance Unit (TPA Coordinator) submits it no later than 7 (seven) days to the Unit in charge of Corporate Law so that the report can be processed to the Enforcement Officials. Law.

Reporting to Law Enforcement Officials is carried out based on the provisions contained in the Procedure for Reporting Fraud Incidents to Law Enforcement, Document No. PI-SEK-PR-009 and its amendments.

HANDLING COMPLAINTS OF ALLEGED CORRUPTION CRIME VIOLATIONS (TPK) WITH THE KPK

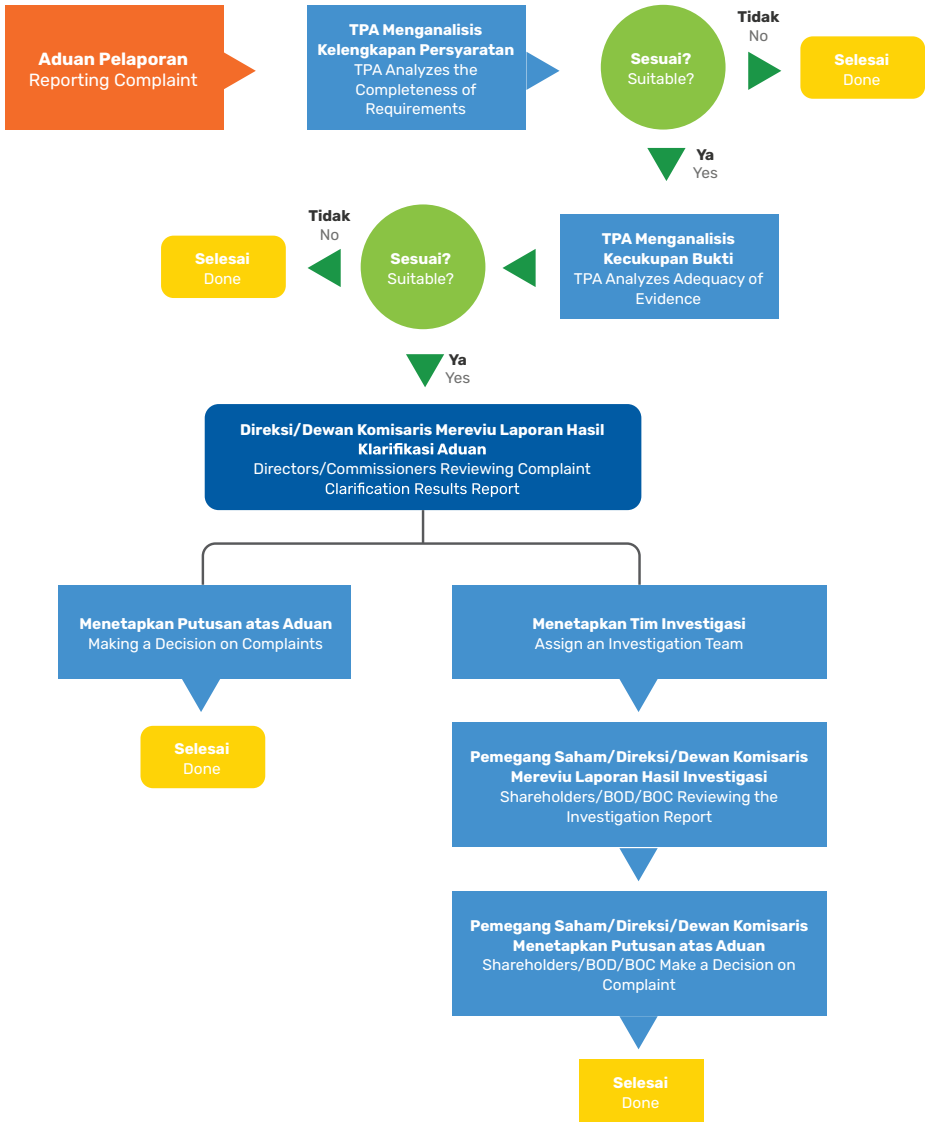
1. If the results of the review/analysis and/or investigation of the complaint fall into the Corruption Eradication category and are recommended for joint handling with the Corruption Eradication Commission, then the complaint is proposed to the President Director for coordination with the Corruption Eradication Commission;
2. If the President Director agrees to carry out joint handling with the KPK, then the planning and implementation process for joint handling with the KPK is carried out in accordance with the internal provisions applicable in each institution (Company and KPK) as contained in the Cooperation Agreement (PKS);

3. Handling with the Corruption Eradication Commission (KPK) of complaints related to alleged TPK is coordinated both during the handling process and/ or after the activity is completed.

Hasil penanganan bersama pengaduan dugaan TPK didiskusikan dalam Rapat Koordinasi untuk ditentukan tindak lanjutnya.

The results of joint handling of alleged TPK complaints are discussed at the Coordination Meeting to determine follow-up action.

Bagan Alur Sistem Pengaduan
Grievance System Flow Chart



SANKSI BAGI TERLAPOR

Setiap terlapor yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

SANCTIONS FOR REPORTED PERSONS

Every reported party who is proven to have committed a violation will be given sanctions in accordance with applicable regulations.

PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan diberikan kepada pelapor yang telah beritikad baik dan berjasa menyampaikan pengaduan pelanggaran;
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan:
   a. telah terbukti terjadi pelanggaran;
   b. pengaduan telah selesai ditindaklanjuti oleh Tim Investigasi.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:
   a. piagam; dan/atau
   b. insentif sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Direksi dan atas persetujuan pelapor terkait pengungkapan identitasnya

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR/WHISTLEBLOWER DAN PETUGAS TERKAIT

Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun. Hal itu dilakukan sepanjang pelapor menjaga kerahasiaan identitas dan pelaporan pelanggaran yang diadukan kepada pihak mana pun. Perlindungan juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait pengaduan tersebut.

Dalam hal pelapor atau petugas TPA dan/atau Tim Investigasi menerima ancaman terhadap pekerjaan fisik, hak remunerasi maupun fasilitas pekerjaan yang diterima dari Perusahaan, maka Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan kepada Pemegang Saham dan/atau Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama melalui Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga pelapor, TPA, atau Tim Investigasi. Pemberian perlindungan tersebut dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.

1. Bentuk Perlindungan pada pelapor dan petugas terkait bentuk-bentuk perlindungan kepada pelapor dan petugas terkait antara lain namun tidak terbatas pada:
   a. perlindungan kerahasiaan informasi yang diberikan;
   b. perlindungan atas pengenaan sanksi administrasi/kepegawaian Perusahaan;
   c. perlindungan dari diskriminasi atau ancaman dari terlapor dan pihak-pihak terkait penyimpangan yang dilaporkan;

AWARD

1. Awards are given to reporters who have acted in good faith and contributed to submitting complaints of violations;
2. The award as intended is given with the following conditions:
   a. a violation has been proven;
   b. the complaint has been followed up by the Investigation Team.
3. The awards referred to are given in the form of:
   a. charter; and/or
   b. incentives in accordance with the provisions applicable in the Company.

Awards are given based on the decision of the Board of Directors and with the approval of the reporter regarding the disclosure of his identity.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS AND RELATED OFFICIALS

The company guarantees protection for whistleblowers from all forms of threats, intimidation or unpleasant actions from any party. This is done as long as the reporter maintains the confidentiality of his identity and reports the violation to any party. Protection also applies to parties carrying out investigations and parties providing information related to the complaint.

In the event that the reporter or TPA officer and/or Investigation Team receives threats to their physical work, remuneration rights or work facilities received from the Company, then the Reporting Party submits a request for protection to the Shareholders and/or President Commissioner and/or President Director through the Violation Reporting System Manager.

With certain considerations, the Company can also provide protection to the reporting family, TPA, or Investigation Team. The provision of this protection can be refused or terminated if there is evidence that the person concerned has not carried out his obligations in maintaining the confidentiality of his personal identity and reports.

1. Forms of protection for whistleblowers and related officers. Forms of protection for whistleblowers and related officers include but are not limited to:
   a. protection of the confidentiality of the information provided;
   b. protection against the imposition of Company administrative/employee sanctions;
   c. protection from discrimination or threats from the reported party and parties related to the reported deviation;

d. perlindungan berupa bantuan hukum bagi pelapor dalam kondisi pelapor mendapat tuntutan hukum dari pihak yang dilaporkan;
e. bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.

2. Pihak yang bertanggung jawab khusus melindungi Pelapor:
   a. Perusahaan melindungi pelapor baik dari ancaman internal maupun eksternal melalui unit yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan serta Fungsi Hukum, serta fungsi lain di dalam Perusahaan yang memiliki kompetensi dalam menjamin perlindungan pelapor;
   b. Perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan saksi dalam upaya perlindungan bagi pelapor sebagai saksi atas aduan yang disampaikan.

d. protection in the form of legal assistance for the reporter in the condition that the reporter receives legal action from the party being reported;
e. The form of protection provided is adjusted to the form of threat/retaliation received. Providing protection is carried out while still observing the principles of confidentiality and related provisions that apply in the Company.

2. The party with special responsibility to protect the Whistleblower:
   a. The Company protects whistleblowers from both internal and external threats through units in charge of Governance and Compliance functions as well as Legal Functions, as well as other functions within the Company that have competence in ensuring the protection of whistleblowers;
   b. Companies can collaborate with government institutions that have competence in the field of witness protection in efforts to protect whistleblowers as witnesses to complaints submitted.

JUMLAH PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2024

Berikut laporan yang masuk melalui media WBS sepanjang tahun 2024 dan 2023.

NUMBER OF VIOLATION REPORTS IN 2024

The following are reports submitted via WBS media throughout 2024 and 2023.

No.	Status	Jumlah Aduan berdasarkan Media Sosial Total of Complaints based on Social Media								Jumlah Aduan Total of Complaints			
		Website		E-mail		Telepon Phone		Pengaduan Desk Complaint Desk		2024		2023	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	Total	%	Total	%
1	Aduan Dugaan Pelanggaran Complaint of Alleged Violations	45	25	4	2	0	0	2	0	51	11	27	5
2	Bukan Aduan Dugaan Pelanggaran Complaints of Non Alleged Violation	6	19	414	473	0	0	0	0	420	89	504	95
	Jumlah Total	**51**	**44**	**418**	**475**	**0**	**0**	**2**	**0**	**471**	**100**	**531**	**100**

KEBIJAKAN PENCEGAHAN INSIDER TRADING

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, PTPI belum memperdagangkan sahamnya di bursa saham mana pun. Dengan demikian, segala informasi terkait dengan perdagangan orang dalam (insider trading) tidak dapat diuraikan.

INSIDER TRADING PREVENTION POLICY

Until the end of the 2024 financial year, PTPI has not yet traded its shares on any stock exchange. Thus, all information related to insider trading cannot be deciphered.

Keterbukaan Dalam Praktik Bad Governance
Openness in Bad Governance Practices

Pengungkapan Disclosure	Penjelasan Explanation
Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan & Laporan Tahunan Timeliness of Publication of Financial Reports & Annual Reports	
Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan Date of publication of the Annual Financial Report	Penerbitan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan PTPI tahun 2024 mengalami sedikit keterlambatan. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa laporan yang diterbitkan mencerminkan transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku. Proses penerbitan yang teliti ini diharapkan dapat memberikan pemangku kepentingan informasi yang komprehensif mengenai kinerja dan prospek Perseroan, sekaligus memperkuat kepercayaan dalam keberlanjutan bisnis Perseroan. The publication of PTPI Annual Financial Report and Annual Report for the year 2024 has been slightly delayed. However, the Company remains committed to ensuring that the published reports reflect transparency, accuracy, and compliance with applicable regulatory standards. This thorough publication process is expected to provide stakeholders with comprehensive information regarding the Company's performance and prospects, while strengthening confidence in the sustainability of the Company's business.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Konsistensi dalam Mewujudkan Perubahan untuk Generasi Penerus

Consistency in Realizing Change for Next Generation

Para Insan PI konsisten membantu mewujudkan niat baik. idealis dalam menciptakan perubahan. Dalam semangat Sinergi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional, PTPI menanamkan nilai Idealis sebagai landasan dalam setiap langkah dan kontribusinya bagi negeri. Idealisme ini tercermin dalam konsistensi perusahaan dalam mewujudkan perubahan positif, terutama dalam mendukung program Makan Siang Bergizi yang diamanahkan oleh pemerintah.

The PI's personnel consistently help realize good intentions. idealistic in creating change. In the spirit of Synergy to Realize National Food Self-Sufficiency, PTPI instills the value of Idealism as a foundation in every step and contribution to the country. This idealism is reflected in the company's consistency in realizing positive changes, especially in supporting the Nutritious Lunch program mandated by the government.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Perseroan menyampaikan informasi terkait pencapaian kinerja keberlanjutan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Keberlanjutan 2024, yang disajikan secara terpisah namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024. Laporan Keberlanjutan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 mengenai Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain itu, Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 juga mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB), yaitu Global Reporting Initiative (GRI) Standard, untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan praktik keberlanjutan global.

The Company discloses information regarding its sustainability performance achievements and the implementation of its social and environmental responsibilities in the 2024 Sustainability Report, which is presented separately but remains an integral part of the Company's 2024 Annual Report. This Sustainability Report has been prepared in accordance with the provisions set forth in the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, as well as OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

In addition, the 2024 Sustainability Report also refers to international standards set by the Global Sustainability Standards Board (GSSB), namely the Global Reporting Initiative (GRI) Standard, to ensure quality and compliance with global sustainability practices.



Ekonomi | Economy

Produk Ramah lingkungan (Jenis)
Eco-Friendly Product (Type)

2024	2023	2022
17	16	16

Persentase Nilai Pengadaan dari Pemasok Lokal (%)
Percentage of Procurement Value from Local Suppliers (%)

2024	2023	2022
84,19	81,87	69,00

	2024	2023	2022
Total Energi (GJ) Total Energy (GJ)	125.936.370	121.549.377	33.130.201
Intensitas Energi (GJ/ton Pupuk) Energy Intensity (GJ/ton Fertilizer)	29,84	29,64	29,36
Total Emisi (Ton Co2eq) Total Emissions (Ton Co2eq)	54.198.950	50.490.801	2.525.698

Ikhtisar Keberlanjutan
Sustainability Highlights

Sosial | Social

Total Dana PUMK dan CSR (Rp Miliar)
Total MSE and CSR Funds (Rp Billion)

2024	2023	2022
317.985	276.253	242.367

Jumlah Mitra Binaan
Number of Fostered Partners

2024	2023	2022
1.501	2.277	1.301

Total Dana CSR (Rp Miliar)
Tota ICSR Funds (Rp Billion)

2024	2023	2022
294.755	210.914	177.052

Nilai Penyaluran Dana Kemitraan (Rp Juta)
Values of Partner Fund Distribution (Rp Million)

2024	2023	2022
59.748	90.491	164.045



Lingkungan | Environment

Intensitas Emisi Urea (Ton Co2eq/ton Pupuk)
Urea Emission Intensity (Ton Co2eq/ton Fertilizer)

2024	2023	2022
1,26	1,25	1,32

Pengurangan Emisi (Ton Co2eq)
Emission Reduction (Ton Co2eq)

2024	2023	2022
2.046.927	2.974.443	2.203.799

Tata Kelola | Governance

100% **Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN Mencapai 100%, dengan total Wajib Lapor sebanyak 2.382 orang.**
LHKPN (State Officials Wealth Report) Compliance Rate Reaches 100%, with a total of 2,382 individuals submitting their mandatory reports.

100% **Pelatihan Antikorupsi Diikuti Seluruh Insan PTPI.**
Anti-Corruption Training was attended by all PTPI personnel.

PTPI terus berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan.

HIGHLIGHT KINERJA 2024:

1. Jumlah Mitra Binaan Aktif Swakelola dan Kerjasama **BRI 3.559 mitra** dengan total penyaluran dana PUMK oleh BRI sebesar **Rp53,62 miliar** dan dana PUMK swakelola yang masih dipinjam oleh mitra binaan sebesar **Rp35,17 miliar.**
2. Total Dana TJSL **Rp294,03 miliar**, meningkat 40% dibandingkan tahun 2023.
3. **Pengurangan Emisi CO_2eq 1.592.484 ton CO_2eq** pada tahun 2024.
4. **Pengurangan Limbah 393.674 ton** limbah berhasil dikurangi.
5. **Penggunaan Energi Terbarukan**: Implementasi energi terbarukan untuk mendukung operasional yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Perseroan berhasil mewujudkan berbagai program TJSL yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mencakup tiga pilar utama: Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Berikut adalah highlight dari program TJSL yang dijalankan pada tahun 2024:

1. Pilar Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan

Total Dana TJSL: Pada tahun 2024, PTPI mengalokasikan dana TJSL sebesar **Rp294,03 miliar**, meningkat 40% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar **Rp210,91 miliar**.

a. **Program Rumah BUMN**: Perseroan membina **1.186 UMKM** melalui Rumah BUMN yang berlokasi di Sumatera Selatan. Program ini fokus pada peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM lokal, membantu mereka mendapatkan akses pelatihan dan fasilitas yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.

b. **Pemberdayaan Perempuan dan Pelatihan Keterampilan**: Perseroan juga memberikan dukungan untuk pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, serta program-program untuk meningkatkan kapasitas wirausaha yang berfokus pada kesetaraan gender dan kesejahteraan sosial (SDGs 5: Kesetaraan Gender, SDGs 4: Pendidikan Berkualitas).

c. **Pengentasan Kemiskinan**: Program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional PTPI mendukung pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

d. **Program Kesehatan**: Program-program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di daerah sekitar operasional, dengan fokus pada akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan.

PTPI remains committed to carrying out social and environmental responsibilities, which are an integral part of the company's sustainability strategy.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2024:

1. Number of Active Assisted Partners in Self-Management and **BRI Cooperation 3,559 partners** with a total disbursement of PUMK funds by BRI of **Rp53.62 billion** and self-managed PUMK funds still borrowed by fostered partners of **Rp35.17 billion**.
2. Total Social Security Funds: **Rp294,03 billion**, an increase of 40% compared to 2023.
3. **Reduction of CO_2eq Emissions: 1,592,484 tons of CO_2eq** by 2024.
4. **Waste Reduction: 393,674 tons** of waste successfully reduced.
5. **Use of Renewable Energy**: Implementation of renewable energy to support sustainable operations.

In 2024, the Company successfully implemented various CSR programs that support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), covering three main pillars: Social, Economic, and Environmental. The following are highlights of the CSR programs carried out in 2024:

1. Social Pillar: Community Empowerment and Welfare Improvement

Total CSR Funds: In 2024, PTPI allocated a CSR fund of **Rp294.03 billion**, an increase of 40% compared to 2023 which amounted to **Rp210.91 billion**.

a. **SOE House Program**: The company fosters **1,186 MSMEs** through the SOE House located in South Sumatra. This program focuses on increasing the capacity and competitiveness of local MSMEs, helping them gain access to training and facilities that support the sustainability of their businesses.

b. **Women's Empowerment and Skills Training:** The Company also provides support for women's empowerment through skills training, as well as programs to increase entrepreneurial capacity that focus on gender equality and social welfare (SDGs 5: Gender Equality, SDGs 4: Quality Education).

c. **Poverty Alleviation:** Community empowerment-based assistance programs around PTPI's operational areas support poverty reduction and equitable development.

d. **Health Programs:** Programs that support improved community health in areas around operations, with a focus on better access to health services.

2. **Pilar Ekonomi: Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan UMKM**
   a. **Pendanaan UMKM**: PTPI menyalurkan **Rp88,79 miliar** untuk pendanaan kemitraan dan UMKM melalui BRI pada tahun 2024. Dana ini disalurkan kepada sektor-sektor seperti perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, industri, perkebunan, jasa dan lainnya dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal (SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).
   b. **Mitra Binaan**: Jumlah mitra binaan pada tahun 2024 mencapai **3.559 mitra**, dengan sektor perdagangan dan pertanian menerima dana terbesar. Program ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
   c. **Pengembangan Sektor Pertanian**: Program-program pemberdayaan sektor pertanian, termasuk pendanaan bagi petani dan pengembangan agribisnis, mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

3. **Pilar Lingkungan: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengurangan Jejak Karbon**
   a. **Pengurangan Emisi**: Pada tahun 2024, PTPI berhasil mengurangi **1.592.484 ton CO_2eq** emisi gas rumah kaca setara dengan pengurangan 13% dari baseline, melalui implementasi berbagai inisiatif dekarobonisasi. Capaian ini berhasil memenuhi target pengurangan emisi tahun 2024.

   b. **Pengurangan Limbah**: Perseroan berhasil mengurangi limbah sebanyak **17.019 ton** pada tahun 2024, berkontribusi terhadap pengelolaan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
   c. **Program Konservasi Alam:**
      - Green Barrier for Mangrove Petrokimia Gresik: 7,48 Ha dengan 4 spesies mangrove
      - Konservasi Keanekaragaman Hayati Taman Kehati Pupuk Kujang: 47,7 Ha dengan 128 jenis tumbuhan
      - Rehabilitasi Terumbu Karang Pupuk Kalimantan Timur: 1,11 Ha dengan 8.322 terumbu karang buatan
      - Konservasi Pengembangan Rusa Sambar Pupuk Iskandar Muda: 6,75 Ha dengan 41 ekor rusa
      - Integrated Forestry Farming System Pupuk Sriwidjaja Palembang: 10 Ha dengan 12.500 vegetasi kopi arabika dan 1.100 alpukat

2. **Economic Pillar: Economic Empowerment and MSME Development**
   a. **UMKM funding:** PTPI channelled **Rp88.79 billion** for partnership and UMKM funding through BRI in 2024. These funds are channelled to sectors such as trade, agriculture, fisheries, livestock, industry, plantations, services, and others with the aim of creating jobs and improving local economic welfare (SDGs 8: Decent Work and Economic Growth).

   b. **Fostered Partners:** The number of fostered partners in 2024 reached **3,559 partners**, consisting of active self-managed fostered partners and BRI cooperation fostered partners with the largest recipient sectors in trade and agriculture.
   c. **Agricultural Sector Development:** Agricultural sector empowerment programs, including funding for farmers and agribusiness development, support food security and farmer welfare.

3. **Environmental Pillar: Natural Resource Management and Carbon Footprint Reduction**
   a. **Emission Reduction:** In 2024, PTPI successfully reduced 1,592,484 tons of CO_2eq of greenhouse gas emissions equivalent to a 13% reduction from the baseline, through the implementation of various decarbonization initiatives. This achievement successfully met the 2024 emission reduction target.Waste Reduction:
   b. The Company managed to reduce waste by **17,019 tons** in 2024, contributing to more efficient and environmentally friendly waste management.

   c. **Nature Conservation Program:**
      - Green Barrier for Mangrove Petrokimia Gresik: 7.48 Ha with 4 mangrove species
      - Pupuk Kujang Biodiversity Park: 47.7 Ha with 128 species of plants
      - Coral Reef Rehabilitation Pupuk Kalimantan Timur: 1.11 Ha with 8,322 artificial coral reefs
      - Sambar Deer Development Conservation Pupuk Iskandar Muda: 6.75 Ha with 41 deer
      - Integrated Forestry Farming System Pupuk Sriwidjaja Palembang: 10 Ha with 12,500 arabica coffee vegetation and 1,100 avocados

d. **Penggunaan Energi Terbarukan**: PTPI terus mengimplementasikan penggunaan energi terbarukan di beberapa fasilitas operasionalnya, yang berkontribusi pada pengurangan penggunaan energi fosil.

4. Investasi Lingkungan dan Dukungan terhadap Keberlanjutan

a. **Investasi Lingkungan**: Pada tahun 2024, PTPI mengalokasikan Rp66,3 miliar untuk investasi lingkungan yang digunakan dalam mendukung program pemeliharaan lingkungan, konsultasi-audit-perizinan, pengelolaan limbah, peningkatan awareness dan penghijauan.

b. **Kepatuhan terhadap Peraturan Lingkungan**: Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku, serta melaporkan dampak lingkungan secara transparan kepada publik dan regulator.

HIGHLIGHT PROGRAM CREATING SHARED VALUE (CSV) PTPI 2024

1. Pendekatan CSV:

a. Strategi bisnis yang mengintegrasikan tujuan sosial dan lingkungan dengan tujuan bisnis.

b. Fokus pada memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan sambil tetap menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan.

c. Menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan mengukur dampak sosial serta finansial dari program-program yang dilaksanakan.

2. Prinsip Utama CSV:

a. **Merekonstruksi Produk dan Pasar**: Memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produk dan layanan yang menciptakan nilai ekonomi dan dampak sosial.

b. **Mendefinisikan Produktivitas dalam Rantai Nilai**: Meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

c. **Mendukung Pengembangan Klaster Lokal**: Berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan komunitas lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3. Program-Program CSV PTPI 2024:

a. **Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI):**

- Fokus pada memperkuat kolaborasi antara karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Menyediakan pelatihan dan fasilitas yang mendukung pengembangan kapasitas individu dan organisasi dalam berbagai inisiatif sosial.

d. **Use of Renewable Energy:** PTPI continues to implement the use of renewable energy in several of its operational facilities, which contributes to the reduction of fossil energy use.

4. Environmental Investment and Support for Sustainability

a. **Environmental Investment:** In 2024, PTPI allocated IDR 66.3 billion for environmental investment used in supporting environmental maintenance programs, consulting-audit-permitting, waste management, awareness raising and reforestation..

b. **Compliance with Environmental Regulations:** The Company ensures that all of its operational activities comply with applicable environmental regulations and reports environmental impacts transparently to the public and regulators.

HIGHLIGHT OF THE CREATING SHARED VALUE (CSV) PROGRAM OF PTPI 2024

1. Approach to CSV:

a. A business strategy that integrates social and environmental goals with business goals.

b. Focus on providing sustainable social and environmental benefits while still creating economic value for the company.

c. Collaborate with stakeholders and measure the social and financial impact of the programs implemented.

2. Key Principles of CSV:

a. **Reconstructing Products and Markets:** Meeting the needs of the community through products and services that create economic value and social impact.

b. **Defining Productivity in the Value Chain:** Improving efficiency and reducing costs by considering social and environmental aspects.

c. **Supporting the Development of Local Clusters:** Investing in education, infrastructure, and the welfare of local communities to support inclusive economic growth.

3. CSV Programs of PTPI 2024:

a. **Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI):**

- Focuses on strengthening collaboration between employees, communities, and other stakeholders.
- Provides training and facilities that support individual and organizational capacity building in various social initiatives.

b. **Program Tani Maju Makmur Sejahtera (Tajumase) Desa Hadakewa:**
   - Menyediakan pelatihan dan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas petani lokal.
   - Fokus pada peningkatan hasil pertanian yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien.

c. **Program Tani Maju Makmur Sejahtera (Tajumase) Desa Wowong:**
   - Program yang mengedepankan pengembangan agribisnis lokal dengan menyediakan pelatihan dan akses ke modal untuk petani.
   - Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengelola hasil pertanian dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

d. **Program Tani Maju Makmur Sejahtera (Tajumase) Desa Sriwijaya Mataram:**
   - Memberikan akses kepada petani untuk teknologi pertanian yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
   - Program ini berfokus pada pengembangan sektor pertanian yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Dampak Positif Program CSV:

a. **Pemberdayaan UMKM**: 1.186 UMKM dibina melalui Rumah BUMN di Sumatera Selatan, meningkatkan daya saing produk lokal.

b. **Pengurangan Kemiskinan**: Membantu mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar operasional PTPI.

c. **Peningkatan Produktivitas Pertanian**: Program-program pertanian yang berkelanjutan membantu meningkatkan hasil pertanian dan produktivitas petani.

d. **Penciptaan Lapangan Kerja**: Program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, dalam menciptakan lapangan kerja baru.

5. Komitmen Masa Depan:

a. PTPI akan terus memperluas dan mengembangkan program CSV untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dan lingkungan.

b. Program CSV akan tetap menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan, dengan fokus pada dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

b. **Tani Maju Makmur Sejahtera (Tajumase) Program in Hadakewa Village:**
   - Provides training and environmentally friendly agricultural technology to increase the productivity of local farmers.
   - Focuses on sustainable improvement of agricultural yields and efficient management of natural resources.

c. **Tani Maju Makmur Sejahtera (Tajumase) program in Wowong village**
   - A program that promotes the development of local agribusiness by providing training and access to capital for farmers.
   - Develops the community's capacity to manage agricultural products using an environmentally friendly and sustainable approach.

d. **Program Tani Maju Makmur Sejahtera (Tajumase) Sriwijaya Village Mataram:**
   - Provides farmers with access to agricultural technology that can improve the quality and quantity of production.
   - The program focuses on developing an environmentally friendly agricultural sector and improving community welfare.

4. Positive Impact of CSV Programs:

a. **Empowerment of MSMEs:** 1,186 MSMEs are fostered through the SOE House in South Sumatra, increasing the competitiveness of local products.

b. **Poverty Reduction:** Helping to reduce poverty through community empowerment around PTPI's operations.

c. **Increased Agricultural Productivity:** Sustainable agricultural programs help increase agricultural yields and farmer productivity.

d. **Job Creation:** Training and capacity building programs that focus on empowering communities, especially farmers, to create new jobs.

5. Future Commitment:

a. PTPI will continue to expand and develop its CSV program to provide greater benefits to society and the environment.

b. The CSV program will remain an integral part of the company's sustainability strategy, with a focus on sustainable social and environmental impacts.



Laporan Keuangan

Financial Report


PUPUK
INDONESIA

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2024 DAN 2023/
31 DECEMBER 2024 AND 2023

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023 AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

1.	Nama	: Rahmad Pribadi	:	*Name* 1.
	Alamat Kantor	: Gedung PT Pupuk Indonesia (Persero) Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya Jakarta 11480	:	*Office Address*
	Alamat Domisili	: Jl. Tebet Mas Indah Blok F/3, Tebet Barat, Jakarta 12810	:	*Address of Domicile*
	Telepon	: +6221 536 54900	:	*Telephone*
	Jabatan	: Direktur Utama/*President Director*	:	*Title*
2.	Nama	: Wono Budi Tjahyono	:	*Name* 2.
	Alamat Kantor	: Gedung PT Pupuk Indonesia (Persero) Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya Jakarta 11480	:	*Office Address*
	Alamat Domisili	: Vila Bogor Indah CC. 10/29, Ciparigi, Kota Bogor	:	*Address of Domicile*
	Telepon	: +6221 536 54900	:	*Telephone*
	Jabatan	: Direktur Keuangan/*Finance Director*	:	*Title*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak; / *We are responsible for the preparation and presentation of PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements;*

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information in the PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak. / *We are responsible for PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *Thus this statement is made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi. / *For and on behalf of the Board of Directors.*

Jakarta, 08 Mei/*May* 2025



Rahmad Pribadi
Direktur Utama/
President Director

Wono Budi Tjahyono
Direktur Keuangan/
Finance Director

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

00862/2.1457/AU.1/04/1784-1/1/V/2025

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. **Provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi**

   Lihat Catatan 2n (Informasi kebijakan akuntansi material - provisi), Catatan 3j (Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi signifikan - provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi), dan Catatan 36c (Pengadaan gas bumi PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")) dan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi) atas laporan keuangan konsolidasian.

   Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, Grup melakukan pembalikan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi sebesar Rp1.734.876 juta dikarenakan provisi tersebut sudah tidak relevan sehubungan dengan telah disepakatinya harga jual beli gas antara Grup dengan pemasok melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG").

   Kami mengidentifikasi ini sebagai hal audit utama karena signifikansi dari nilai pembalikan provisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian dan tingkat pertimbangan yang diperlukan untuk menilai kesesuaian pembalikan provisi tersebut.

   Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

   Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:
   - Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian Grup yang relevan untuk memantau provisi;
   - Kami memperoleh pemahaman apakah terdapat perubahan peraturan yang secara signifikan berdampak pada provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi dan status amendemen kontrak serta dampaknya terhadap provisi tersebut;
   - Kami membaca PJBG, risalah rapat dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit untuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi informasi terkait provisi tersebut termasuk pembalikan provisi di tahun berjalan;
   - Kami menelaah asersi manajemen untuk pembalikan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi dengan data pendukung; dan
   - Kami menelaah kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. ***Provision with respect to the procurement of natural gas***

   Refer to Note 2n (Material accounting policy information - provision), Note 3j (Significant accounting judgements, estimates and assumptions - provision with respect to the procurement of natural gas), and Note 36c (Procurement of PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")'s natural gas) and provision for underpayment of natural gas procurement) to the consolidated financial statements.

   During the year ended 31 December 2024, the Group reversed the provision for underpayment of natural gas procurement of Rp1,734,876 million because this provision was no longer relevant following the agreement on the sale and purchase price of gas between the Group and the suppliers upon the signing of the Gas Sales Purchase Agreement ("GSPA").

   We identified this as a key audit matter due to the significance of the amount of provision reversal to the consolidated financial statements and the level of judgement required to assess the appropriateness of the reversal of provision.

   How our audit addressed the Key Audit Matter

   Our audit procedures included the following:
   - *We understood the Group's relevant controls to monitor the provision;*
   - *We understood whether there were any significant regulatory changes affecting provision with respect to the natural gas procurement and the status of contract amendments and their impact on the provision;*
   - *We read the GSPA, minutes of the board of directors, board of commissioners and audit committee meetings to check the completeness and consistency of information regarding the provision including the reversal of provision in the current year;*
   - *We assessed management's assertion of the reversal of provision for underpayment of natural gas procurement against supporting data; and*
   - *We assessed the adequacy of the disclosures in the consolidated financial statements in accordance with the requirements of Indonesian Financial Accounting Standards.*

2. **Pengukuran nilai tercatat aset dan liabilitas berkaitan dengan basis akuntansi kelangsungan usaha PT Rekayasa Industri ("Rekind")**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian, pertimbangan signifikan diperlukan untuk menentukan pengukuran nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind pada 31 Desember 2024 menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang dihadapi oleh Rekind yang berpotensi memengaruhi kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kondisi tersebut antara lain sebagai berikut:

- Keputusan homologasi terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") pada 31 Januari 2024;
- Pelanggaran beberapa ketentuan rasio keuangan terkait fasilitas pinjaman dengan beberapa bank;
- Modal kerja negatif sebesar Rp465.651 juta pada 31 Desember 2024; dan
- Akumulasi kerugian sebesar Rp4.295.723 juta pada 31 Desember 2024.

Kondisi-kondisi ini berdampak pada apakah nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind telah diukur secara tepat pada laporan keuangan konsolidasian Grup berdasarkan asumsi basis akuntansi kelangsungan usaha, dimana memerlukan pertimbangan signifikan. Berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut, Rekind bergantung pada dukungan dari kreditur dan pemasok yang ada melalui penundaan pembayaran liabilitas dan kemampuannya untuk memperbaiki kinerja serta kondisi keuangannya.

Kami mengidentifikasi ini sebagai hal audit utama karena dampak signifikan yang mungkin timbul dari penyesuaian nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind yang disebabkan oleh ketidakpastian material atas keberhasilan rencana manajemen Rekind untuk memperbaiki kinerja dan kondisi keuangannya.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:

- Kami menelaah penilaian manajemen terkait pengukuran nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind pada 31 Desember 2024 berdasarkan basis akuntansi kelangsungan usaha yang diterapkan oleh manajemen Rekind;

2. ***Measurement of the carrying value of assets and liabilities in relation to the going concern basis of accounting of PT Rekayasa Industri ("Rekind")***

As disclosed in Note 37 to the consolidated financial statements, significant judgement is required to determine the measurement of the carrying value of Rekind's assets and liabilities as at 31 December 2024 using the going concern basis of accounting. This is due to conditions faced by Rekind which potentially impacts its ability to continue as a going concern. The conditions were as follows:

- *A homologation decision related to Debt Payment Obligation Suspension ("PKPU") on 31 January 2024;*
- *Breach of certain financial ratio covenants related to borrowing facilities with several banks;*
- *Negative working capital of Rp465,651 million as at 31 December 2024; and*
- *Accumulated loss of Rp4,295,723 million as at 31 December 2024.*

These conditions impact whether Rekind's carrying value of assets and liabilities has been properly measured in the Group's consolidated financial statements based on the going concern basis of accounting assumption, which requires significant judgement. With respect to the conditions above, Rekind is reliant on the support from existing lenders and vendors in deferring the payment of its liabilities and its ability to improve its performance and financial condition.

We identified this as a key audit matter due to the significant impact that may arise from adjustments to the carrying value of Rekind's assets and liabilities caused by the material uncertainty of the success of Rekind management's plans to improve Rekind's performance and financial condition.

How our audit addressed the Key Audit Matter

Our audit procedures included the following:

- *We assessed management's assessment related to the carrying value measurement of Rekind's assets and liabilities as at 31 December 2024 based on the going concern basis of accounting applied by Rekind management;*

- Kami memperoleh pemahaman penilaian manajemen Rekind terkait kelangsungan usaha. Ini termasuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal Rekind dan proses sehubungan dengan penyusunan proyeksi arus kas dan menilai risiko bawaan atas salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan proyeksi arus kas;
- Kami membandingkan asumsi-asumsi kunci yang digunakan dalam proyeksi arus kas, antara lain termasuk estimasi pendapatan dan beban di masa depan beserta sumber pendanaan, dengan data pendukung dan tren historis;
- Kami membaca dan memperoleh pemahaman keputusan homologasi PKPU, yang mencakup rencana manajemen Rekind sesuai dengan Rencana Penyelamatan Perusahaan;
- Kami menelaah kemajuan pelaksanaan Rencana Penyelamatan Perusahaan; dan
- Kami menelaah kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- *We understood Rekind management's going concern assessment. This included understanding Rekind's internal controls and processes in relation to the preparation of cash flow projections and assessing the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and judgement involved in preparing the cash flow projections;*
- *We compared the key assumptions used in the cash flow projections, which include the future estimated revenue and expenses as well as source of financing, against supporting data and historical trends;*
- *We read and understood the homologation decision of PKPU, which included Rekind management's plans as stated in the Corporate Recovery Plan;*
- *We assessed the implementation progress of the Corporate Recovery Plan; and*
- *We assessed the adequacy of the disclosures in the consolidated financial statements in accordance with the requirements of Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. **Keakurasian pengakuan penghasilan sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang timbul dari keputusan homologasi terkait dengan PKPU Rekind**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3k (Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi signifikan – keuntungan dari pengukuran ulang pinjaman dan utang dari restrukturisasi) dan Catatan 38 (Pengakuan penghasilan sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang timbul dari keputusan homologasi terkait dengan PKPU Rekind) atas laporan keuangan konsolidasian, proses PKPU Rekind yang dimulai pada tanggal 16 November 2023, berakhir dengan keputusan homologasi pada tanggal 31 Januari 2024.

Hasil PKPU dituangkan dalam bentuk Rencana Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga. Berdasarkan Rencana Perdamaian, salah satu skema penyelesaian dengan kreditur Rekind adalah modifikasi menjadi skema pembayaran baru jangka panjang. Rekind mengevaluasi apakah restrukturisasi utang diperhitungkan sebagai modifikasi dari utang awal atau sebagai penghapusan utang awal dan penerbitan utang baru. Hal ini melibatkan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi signifikan.

3. ***Accuracy of income recognition as a result of debt restructuring arising from homologation decision related to the Rekind's PKPU***

As disclosed in Note 3k (Significant accounting judgements, estimates and assumptions – gain of remeasurement loan and payable from restructuring) and Note 38 (Income recognition as a result of debt restructuring arising from homologation decision related to the Rekind's PKPU) to the consolidated financial statements, Rekind's PKPU process which started on 16 November 2023, ended with a homologation decision on 31 January 2024.

The PKPU results were set out in the form of a Composition Plan that was ratified by the Panel Judge at the Commercial Court. Based on the Composition Plan, one of the settlement schemes with Rekind's creditors is modification into new payment long terms scheme. Rekind evaluated whether the restructuring debt was accounted as either a modification of the original debts or as an extinguishment of the original debts and issuance of new debts. This involved significant accounting judgements, estimates and assumptions.

Kami mengidentifikasi ini sebagai hal audit utama karena kompleksitas perhitungan restrukturisasi utang yang dapat menimbulkan risiko salah saji atas penghasilan yang diakui dalam laba rugi konsolidasian. Utang baru perlu dicatat pada nilai wajar dan selisih antara nilai tercatat utang awal dan nilai wajar utang baru dicatat dalam laba rugi konsolidasian.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:

- Kami memperoleh pemahaman terkait skema penyelesaian Rekind dengan para kreditur, dengan menelaah Rencana Perdamaian dan berdiskusi dengan manajemen;
- Kami membandingkan asumsi kunci dalam penentuan tingkat diskonto, seperti *risk-free rate* dan risiko kredit spesifik atas Rekind;
- Untuk menilai kelengkapan dari kajian restrukturisasi utang, kami memperoleh dan menelaah rekonsiliasi yang dilakukan oleh manajemen antara basis utang yang digunakan dalam kajian terhadap keputusan homologasi, *side letter*, ataupun rekening koran jika terdapat pembayaran sebelum keputusan homologasi;
- Kami memperoleh kajian manajemen atas penentuan apakah utang tersebut perlu dianggap sebagai modifikasian atau penghapusan dari utang awal dan penerbitan utang baru. Kami menelaah dan melakukan penghitungan ulang atas akurasi matematis perhitungan manajemen untuk membandingkan antara nilai sekarang dari utang baru menggunakan suku bunga diskonto dan nilai sekarang dari utang awal menggunakan suku bunga awal, lalu selisih antar kedua nilai utang tersebut apakah lebih dari 10% dari utang awalnya;
- Kami memperoleh suku bunga diskonto yang dipakai manajemen dalam menghitung nilai sekarang dari utang baru tersebut. Kami menilai apakah suku bunga diskonto tersebut sebanding dengan suku bunga pasar dimana sudah mempertimbangkan profil risiko kredit Rekind dan *risk free rate* di Indonesia, sesuai dengan jangka waktu utang tersebut; dan
- Kami melakukan penghitungan ulang atas akurasi matematis terkait perhitungan manajemen atas penghasilan yang timbul dari penghapusan utang awal dan penerbitan utang baru tersebut, menggunakan tingkat diskonto baru.

We identified this as a key audit matter due to the complexity of debt restructuring calculation which can present a risk of misstatement of income recognised in the consolidated profit or loss. The new debts shall be recorded at fair value and the difference between carrying amount of original debts and fair value of new debts are recognised in the consolidated profit or loss.

How our audit addressed the Key Audit Matter

Our audit procedures included the following:

- *We understood the Rekind's settlement schemes with its creditors, by assessing the Composition Plan and inquiry with management;*
- *We compared the key assumptions used in determining the discount rate, such as risk-free rate and specific credit risk of Rekind;*
- *To assess the completeness of the restructured debt assessment, we obtained and assessed management's reconciliation between underlying debt used in the assessment to either homologation decision, side letters or bank statements if there were payments made before the homologation decision;*
- *We obtained management's assessment on the determination of whether the debt should be accounted as a modification or extinguishment of original debts and issuance of new debts. We assessed and recalculated the mathematical accuracy of management's calculation to compare between present value of new debts using the discount rate and present value of the original debts using the original interest rate, then the difference between two debt values are more than 10% of the original debts;*
- *We obtained the management's discount rate used in calculating the present value of the new debt. We assessed whether the discount rate used are comparable to market rate which consider the Rekind's credit risk profile and risk free rate in Indonesia, in accordance with the loan period; and*
- *We recalculated the mathematical accuracy of management's calculation of income recognised arising from the initial debt extinguishment and the issuance of new debts, using the new discount rate.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
8 Mei/*May* 2025

Heryanto, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1784

Pupuk Indonesia (Persero)
00862/2.1457/AU.1/04/1784-1/1/V/2025

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4	17,278,272	16,585,416	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha:	5			*Trade receivables:*
- Pihak berelasi		516,725	671,636	*Related parties -*
- Pihak ketiga		1,933,974	2,353,673	*Third parties -*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	6a	1,165,380	8,895,378	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia*
Piutang subsidi yang belum ditagih	6b	930,933	1,159,665	*Unbilled subsidy receivables*
Piutang lainnya:				*Other receivables:*
- Pihak berelasi		36,686	346,726	*Related parties -*
- Pihak ketiga		41,802	35,278	*Third parties -*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	7	369,944	529,813	*Construction contract work in progress - due from customers*
Persediaan	8	13,720,295	17,089,004	*Inventories*
Uang muka dan beban dibayar di muka		392,294	454,092	*Advances and prepayments*
Pajak dibayar di muka:	10a			*Prepaid taxes:*
- Pajak penghasilan badan		365,855	183,650	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		447,042	563,152	*Other taxes -*
Aset lancar lainnya	9	13,144,598	9,571,873	*Other current assets*
Jumlah aset lancar		50,343,800	58,439,356	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang lainnya - tidak lancar		18,462	323,972	*Other receivables - non-current*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia - tidak lancar	6a	452,313	551,863	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia - non-current*
Pajak dibayar di muka - tidak lancar:	10a			*Prepaid taxes - non-current:*
- Pajak penghasilan badan		630,818	703,303	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		747,640	186,074	*Other taxes -*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama		1,927,194	1,502,881	*Investment in associates and joint ventures*
Properti investasi		1,956,409	1,862,663	*Investment properties*
Aset tetap	11	79,680,596	75,695,175	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	10d	273,360	217,751	*Deferred tax assets*
Aset imbalan pascakerja	18b	654,558	279,112	*Post-employment benefits assets*
Aset tidak lancar lainnya		2,611,505	3,234,180	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		88,952,855	84,556,974	*Total non-current assets*
JUMLAH ASET		**139,296,655**	**142,996,330**	***TOTAL ASSETS***

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka pendek	15	4,209,975	7,332,631	*Short-term bank loans*
Utang usaha:	12			*Trade payables:*
- Pihak berelasi		338,205	596,107	*Related parties -*
- Pihak ketiga		1,997,138	2,972,982	*Third parties -*
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	6a	1,435,708	-	*Subsidy payable to the Government of Indonesia*
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi		5,040	5,677	*Amounts due to customers for construction contract work*
Utang lainnya	13	1,264,821	1,204,700	*Other payables*
Utang pajak:	10b			*Taxes payables:*
- Pajak penghasilan badan		207,819	95,346	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		410,974	633,930	*Other taxes -*
Liabilitas yang masih harus dibayar	14a	9,543,703	6,842,022	*Accrued liabilities*
Provisi	14b	860,530	3,414,344	*Provisions*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	18a	2,638,986	3,082,704	*Short-term employee benefit liabilities*
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang:				*Current portion of non-current borrowings:*
- Pinjaman bank dan lainnya	16	1,376,976	1,524,210	*Bank and other loans -*
- Utang obligasi	17	857,394	2,435,029	*Bonds payable -*
- Liabilitas sewa		138,920	138,734	*Lease liabilities -*
Jumlah liabilitas jangka pendek		25,286,189	30,278,416	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman jangka panjang:				*Non-current borrowings:*
- Pinjaman bank dan lainnya	16	7,986,445	13,459,479	*Bank and other loans -*
- Utang obligasi	17	2,823,534	3,687,742	*Bonds payable -*
- Liabilitas sewa		115,362	147,684	*Lease liabilities -*
Liabilitas imbalan pascakerja	18b	2,701,672	2,712,734	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	10d	828,425	708,007	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya		194,302	37,090	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang		14,649,740	20,752,736	*Total non-current liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**39,935,929**	**51,031,152**	***TOTAL LIABILITIES***

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owner of the parent entity***
Modal saham - modal dasar 100.000.000 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 25.000.000 lembar dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	19	25,000,000	25,000,000	*Share capital - authorised 100,000,000 shares; issued and fully paid 25,000,000 shares at a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share*
Saldo laba:				*Retained earnings:*
- Ditentukan penggunaannya		39,018,434	34,031,056	*Appropriated -*
- Belum ditentukan penggunaannya		5,412,512	2,944,386	*Unappropriated -*
Komponen ekuitas lainnya		29,656,092	29,908,402	*Other components of equity*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		99,087,038	91,883,844	*Total equity attributable to owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		273,688	81,334	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**99,360,726**	**91,965,178**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**139,296,655**	**142,996,330**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Lampiran 2/1 ***Schedule***

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA				***SALES AND OTHER REVENUES***
Penjualan produk	22	44,202,966	44,221,081	*Sales of products*
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia	23	33,323,915	32,512,230	*Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia*
Pendapatan jasa	24	4,089,327	2,473,956	*Rendering of services*
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan		**81,616,208**	**79,207,267**	***Total revenue from contract with customers***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	25	(65,590,416)	(63,303,146)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**16,025,792**	**15,904,121**	***GROSS PROFIT***
Beban penjualan	26	(1,039,742)	(1,276,030)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	27	(5,970,735)	(5,031,467)	*General and administrative expenses*
Pendapatan lainnya - bersih	28	3,677,940	157,838	*Other income - net*
		(3,332,537)	(6,149,659)	
LABA OPERASI		**12,693,255**	**9,754,462**	***OPERATING PROFIT***
Pendapatan keuangan		1,026,960	925,137	*Finance income*
Biaya keuangan	29	(1,917,934)	(2,519,821)	*Finance costs*
Bagian atas (rugi)/laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama		(581,710)	447,295	*Share of net (loss)/profit of associates and joint ventures*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**11,220,571**	**8,607,073**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	10c	(2,334,533)	(2,353,514)	*Income tax expenses*
LABA TAHUN BERJALAN		**8,886,038**	**6,253,559**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak		73,991	(14,330)	*Difference in foreign currency arising from translation of the financial statements of subsidiaries*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti	18b	(408,978)	(500,415)	*Remeasurement loss on defined benefit plans*
Lainnya		(7,298)	(319)	*Others*
Manfaat pajak penghasilan terkait	10d	89,975	137,265	*Related income tax benefit*
		(326,301)	(363,469)	
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		**(252,310)**	**(377,799)**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR AFTER TAX***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**8,633,728**	**5,875,760**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		8,668,906	6,200,780	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		217,132	52,779	*Non-controlling interests*
		8,886,038	**6,253,559**	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		8,416,596	5,822,981	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		217,132	52,779	*Non-controlling interests*
		8,633,728	**5,875,760**	
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK - DASAR DAN DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	**20**	**346,756**	**248,031**	***EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNER OF THE PARENT ENTITY - BASIC AND DILUTED (in full Rupiah)***

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owner of the parent entity*								Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
			Saldo laba/ *Retained earnings*		Komponen ekuitas lainnya/ *Other components of equity*							
		Modal saham/ *Share capital*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Difference in foreign currency due to translation of financial statements*	Surplus revaluasi aset/ *Assets revaluation surplus*	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ *Remeasurement on defined benefit plans*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*			
Saldo pada 1 Januari 2023		**25,000,000**	**20,615,244**	**15,205,418**	**228,223**	**32,160,334**	**(2,176,856)**	**74,501**	**91,106,864**	**53,436**	**91,160,300**	***Balance as at 1 January 2023***
Pencadangan laba ditahan	21	-	13,415,812	(13,415,812)	-	-	-	-	-	-	-	*Appropriation of retained earnings*
Dividen kas	21	-	-	(5,046,000)	-	-	-	-	(5,046,000)	(24,881)	(5,070,881)	*Cash dividend*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	6,200,780	12,844	-	(390,325)	(319)	5,822,980	52,779	5,875,759	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada 31 Desember 2023		**25,000,000**	**34,031,056**	**2,944,386**	**241,067**	**32,160,334**	**(2,567,181)**	**74,182**	**91,883,844**	**81,334**	**91,965,178**	***Balance as at 31 December 2023***
Pencadangan laba ditahan	21	-	4,987,378	(4,987,378)	-	-	-	-	-	-	-	*Appropriation of retained earnings*
Dividen kas	21	-	-	(1,213,402)	-	-	-	-	(1,213,402)	(24,778)	(1,238,180)	*Cash dividend*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	8,668,906	73,991	-	(319,003)	(7,298)	8,416,596	217,132	8,633,728	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada 31 Desember 2024		**25,000,000**	**39,018,434**	**5,412,512**	**315,058**	**32,160,334**	**(2,886,184)**	**66,884**	**99,087,038**	**273,688**	**99,360,726**	***Balance as at 31 December 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/1 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	49,452,261		46,130,668	*Receipts from customers*
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia	42,291,595	6a	37,721,752	*Receipts of fertiliser subsidy from the Government of Indonesia*
Penerimaan pendapatan keuangan	1,029,782		922,635	*Receipts from finance income*
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	70,197		-	*Receipts from corporate income tax restitutions*
Penerimaan klaim asuransi	233,540		-	*Receipt from insurance claim*
Pembayaran kepada pemasok	(57,652,339)		(60,742,495)	*Payments to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(7,620,292)		(7,679,864)	*Payments to employees*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(2,247,193)		(6,587,735)	*Payments of corporate income tax*
Pembayaran beban keuangan dan transaksi utang obligasi	(1,896,893)		(2,575,340)	*Payment of finance cost and bonds payable transaction*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(1,171,995)		(707,874)	*Placement of restricted cash*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	22,488,663		6,481,747	*Net cash flows generated from operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	74,211		351	*Receipts of dividend from associates*
Pembelian aset tetap	(8,556,724)		(6,459,195)	*Purchase of fixed assets*
Penempatan deposito berjangka	(6,772,514)		(7,270,500)	*Placement of time deposits*
Pencairan deposito berjangka	4,218,752		-	*Withdrawal of time deposits*
Pelepasan investasi asosiasi	30,000		-	*Disposal of investment in associates*
Penerimaan atas penjualan aset tetap	44,665	11	117	*Receipts from sale of fixed assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(10,961,610)		(13,729,227)	*Net cash flows used in investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	18,276,737	33b	9,258,794	*Proceeds from short-term bank loans*
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(17,973,760)	15, 33b	(7,703,360)	*Repayments of short-term bank loans*
Penerimaan pinjaman jangka panjang	2,313,012	33b	4,511,462	*Proceeds from non-current borrowings*
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(9,645,714)	16, 33b	(7,623,638)	*Repayments of non-current borrowings*
Penerimaan utang salam	150,000	33b	291,927	*Proceeds from salam payables*
Pembayaran utang salam	-	33b	(1,478,631)	*Repayments of salam payables*
Pembayaran dividen kepada entitas non-pengendali	(24,778)		(24,881)	*Payment of dividends to non-controlling interest*
Pembayaran utang obligasi	(2,435,000)	33b	(1,146,825)	*Repayments of bonds payable*
Pembayaran liabilitas sewa	(376,183)	33b	(350,118)	*Repayment of lease liabilities*
Pembayaran dividen kas	(1,213,402)	21	(5,046,000)	*Payment of cash dividends*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(10,929,088)		(9,311,270)	*Net cash flows used in financing activities*

Lampiran 4/2 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**597,965**		**(16,558,750)**	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	94,891		(316,454)	*Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents*
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**16,585,416**	4	**33,460,620**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**17,278,272**	4	**16,585,416**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 33a.

Additional information regarding non-cash activities is presented in Note 33a.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), dahulu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang didirikan dengan akta notaris Eliza Pondaag No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960 dan Tambahan Berita Negara No. 186. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta.

Nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) telah berubah menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan akta notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, No. 3 tanggal 3 April 2012, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 April 2012 dengan Surat Keputusan No. AHU-17695.AH.01.02 tahun 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dimuat dalam akta notaris No. 01 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Daftar Perseroan No. AHU-0175443.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020 sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0071253.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020.

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang-bidang sebagai berikut:

a) perdagangan besar;
b) aktivitas perusahaan *holding*;
c) aktivitas kantor pusat;
d) industri;
e) jasa konsultasi manajemen;
f) penelitian dan pengembangan;
g) kawasan industri;
h) reparasi;
i) pergudangan dan penyimpanan;
j) ekspedisi;
k) konstruksi;
l) pengadaan listrik; dan
m) pertambangan batu bara, lignit, serta mineral.

1. GENERAL

a. The Company's establishment

PT Pupuk Indonesia (Persero) (the "Company"), formerly PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), is a State-Owned Enterprise which was established based on notarial deed No. 177 dated 24 December 1959, of Eliza Pondaag and published in the State Gazette No. 46 dated 7 June 1960 and State Gazette Suplement No. 186. The head office of the Company is located at Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta.

The name of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was changed to PT Pupuk Indonesia (Persero) based on notarial deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, No. 3 dated 3 April 2012, which was approved by the Minister of Law and Human Rights on 5 April 2012 by Decree No. AHU-17695.AH.01.02 year 2012.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by notarial deed No. 01 dated 12 October 2020, made by Lumassia, S.H., notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta which has been received by and recorded in the Legal Entity Administration System Register of Companies No. AHU-0175443.AH.01.11 year 2020 dated 18 October 2020 as stated in the Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration No. AHU-0071253.AH.01.02 year 2020 dated 18 October 2020.

The Company's share capital is wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia as of 31 December 2024 and 2023.

In accordance with the Company's Articles of Association, the aims, objectives, and business activities of the Company are to engage in business in the following fields:

a) trade sector;
b) holding company activities;
c) head office activities;
d) industry;
e) management consulting services;
f) research and development;
g) industrial estate sector;
h) repair sector;
i) warehousing and storage sector;
j) expedition sector;
k) construction sector;
l) electricity supply sector; and
m) coal, lignite and mineral mining sector.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") telah disusun dan disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2025.

c. Struktur Grup

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, struktur Grup adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

b. Completion of the consolidated financial statements

The Company and its subsidiaries' (collectively referred to as the "Group") consolidated financial statements were prepared and authorised for issuance by the Company's Board of Directors on 8 May 2025.

c. Group structure

As at 31 December 2024 and 2023, the structure of the Group were as follows:

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)*	
				31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/*Held directly by the Company*							
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	Gresik	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1971	99.99	99.99	39,982,278	42,003,902
PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	Bontang	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1985	99.99	99.99	38,110,873	37,919,967
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")	Palembang	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	2011	99.99	99.99	25,535,320	27,180,230
PT Pupuk Kujang ("PKC")	Cikampek	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1975	99.99	99.99	10,819,908	9,789,802
PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	Aceh	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1982	99.99	99.99	8,593,949	8,570,777
PT Rekayasa Industri ("Rekind")	Jakarta	Konstruksi/ *Construction*	1981	99.11	95.03	6,237,356	5,967,594 (disajikan kembali/ *as restated)*
PT Pupuk Indonesia Logistik ("Pilog")	Jakarta	Logistik/ *Logistics*	2013	100.00	100.00	628,791	671,510
PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN")	Jakarta	Konstruksi dan lain-lain/ *Construction and others*	1970	100.00	100.00	651,162	379,510
PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	2015	100.00	100.00	83,678	104,875
Dimiliki melalui PKG/*Held through PKG*							
PT Petrosida Gresik ("PSG")	Gresik	Produksi, distribusi, dan perdagangan bahan aktif pestisida serta bertindak sebagai distributor pupuk/ *Producing, distributing and trading the active ingredients of pesticides and also as a distributor of fertilizer*	1983	99.99	99.99	845,612	1,008,541
PT Petrokimia Kayaku ("PKY")	Gresik	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida/*Producing, formulating and marketing pesticide*	1976	60.00	60.00	1,039,720	970,090

1. UMUM (lanjutan) / ***1. GENERAL** (continued)*

c. Struktur Grup (lanjutan) / ***c. Group structure** (continued)*

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)*	
				31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023
Dimiliki melalui PKC/*Held through PKC*							
PT Kawasan Industri Kujang Cikampek ("KIKC")	Cikampek	Pengelolaan kawasan industri/ *Managing industrial area*	1990	96.19	96.19	98,441	76,965
PT Sintas Kurama Perdana ("SKP")	Cikampek	Perdagangan, jasa dan pergudangan sektor industri kimia/ *Trading, services and warehousing related to chemical industry*	1988	99.00	99.00	94,651	67,024
Dimiliki melalui PKT/*Held through PKT*							
PT Kaltim Industrial Estate ("KIE")	Bontang	Pengelolaan kawasan industri/*Managing industrial area*	1991	99.99	99.99	1,291,506	1,219,601
PT Kaltim Adhiguna Dermaga ("KAD")	Bontang	Penyedia jasa bongkar muat/*Providing loading and unloading services*	1990	50.99	50.99	78,756	53,754
PT Kaltim Jasa Sekuriti ("KJS")	Bontang	Jasa pengamanan/ *Security services*	2002	70.00	70.00	50,157	37,953
Dimiliki melalui PIM/*Held through PIM*							
PT PIM Prima Medika	Lhokseumawe	Rumah Sakit/ *Hospital*	2017	96.00	96.00	40,722	35,210
Dimiliki melalui PSP/*Held through PSP*							
PT Pusri Agro Lestari ("PAL")	Jakarta	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida dan produk agrokimia lainnya/*Producing, formulating and marketing pesticide and other agrochemical products*	2015	51.00	51.00	55,480	57,851
Dimiliki melalui Rekind/*Held through Rekind*							
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangunan pembangkit tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik/ *Construction of power plants, sale of electrical power and distribution of electrical power*	2013	90.00	90.00	1,699,369	1,703,269
PT Tracon Industri	Jakarta	Penyedia jasa konsultasi dan perdagangan/ *Consulting services and general trading*	2001	80.00	80.00	327,070	436,722
PT Rekayasa Engineering ("RE")	Jakarta	Penyedia jasa teknik dan *engineering*/ *Technical and engineering services*	2001	80.00	80.00	298,432	287,160
PT Yasa Industri Nusantara ("YIN")	Jakarta	Perancangan dan perencanaan konstruksi, penyediaan dan pengawasan peralatan/ *Design and plan for construction, construction equipment and maintenance*	1999	99.67	99.67	81,028	133,031
PT Rekayasa Cakrawala Resources	Jakarta	Penyedia jasa rekrutmen, pelatihan, konsultasi dan pendidikan/ *Recruitment services, training, consulting and education*	2006	51.00	51.00	104,733	101,651
PT Puspetindo	Gresik	Industri logam dan permesinan umum/ *Metal industry and general machinery*	1991	91.38	91.38	72,572	82,462

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

***1. GENERAL** (continued)*

***c. Group structure** (continued)*

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December* 2024	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December* 2023	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)* 31 Desember/ *December* 2024	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)* 31 Desember/ *December* 2023
Dimiliki melalui Rekind/*Held through Rekind* (lanjutan/*continued*)							
PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU")*)	Jakarta	Pengelolaaan usaha industri, pembangunan, perdagangan dan jasa dibidang energi/ *Managing industry business, development, trading and services in energy sector*	2014	100.00	100.00	1,709,680	1,665,018
PT Recon Sarana Utama	Jakarta	Penyedia jasa *engineering,* pengadaan dan konstruksi/ *Technical engineering, procurement and construction*	2014	80.00	80.00	85,171	77,340
Rekind Malaysia Sdn. Bhd.	Malaysia	Penyedia jasa teknik perancangan dan pengadaan/ *Technical engineering and procurement services*	2014	100.00	100.00	12,667	13,914
PT Tracon Industri Solusindo ("TIS")	Jakarta	Penilaian, Audit Energi, *Project Management Consultant* ("PMC"), desain rekayasa/ *Assessment, Audit Energy, PMC, engineering design*	2019	98.00	98.00	14,315	8,839
PT Kaltim Daya Mandiri ("KDM")	Bontang	Produsen listrik dan utilitas/*Electricity and utilities producers*	2002	95.00	95.00	666,138	592,067
PT KDM Agro Energi ("KDM AE")	Bontang	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	2011	99.98	99.98	42,321	41,203
PT Banyumas Energi Lestari ("BEL")	Purwokerto	Pembangkit listrik	**)	51.00	51.00	2,745	2,745
Dimiliki melalui PIN/*Held through PIN*							
PT Sigma Utama ("SU")	Cibinong	Manufaktur cat/ *Paint manufacturing*	1982	99.91	99.91	115,913	145,901

*) Perusahaan menyerahkan kepemilikan sahamnya di PIU kepada Rekind di bulan Desember 2024 melalui transaksi inbreng saham.
**) Belum beroperasi secara komersial.

*) *The Company transferred its share ownership in PIU to Rekind in December 2024 through a share inbreng transaction.*
**) *Not yet operated commercially.*

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

d. Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee

The composition of the Company's Board of Commissioners as at 31 December 2024 and 2023 were as follows:

31 Desember/*December* 2024

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Darmin Nasution	*President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mustoha Iskandar	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Riswinandi	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Danar Rahmanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Irfan Ahmad Fauzi	*Independent Commissioner*
Komisaris	Febrio Nathan Kacaribu	*Commissioner*
Komisaris	Anwar Sanusi	*Commissioner*
Komisaris	Ari Dwipayana	*Commissioner*
Komisaris	Farhat Brachma	*Commissioner*
Komisaris	Suwandi	*Commissioner*

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit (lanjutan)

***1. GENERAL** (continued)*

***d. Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee** (continued)*

31 Desember/*December* 2023

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Darmin Nasution	*President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mustoha Iskandar	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Anhar Adel	*Independent Commissioner*
Komisaris	Febrio Nathan Kacaribu	*Commissioner*
Komisaris	Anwar Sanusi	*Commissioner*
Komisaris	Ari Dwipayana	*Commissioner*
Komisaris	Farhat Brachma	*Commissioner*
Komisaris	Suwandi	*Commissioner*

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors as at 31 December 2024 and 2023 were as follows:

31 Desember/*December* 2024 dan/*and* 2023

Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Rahmad Pribadi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Gusrizal	*Vice President Director*
Direktur Produksi	Bob Indiarto	*Production Director*
Direktur Keuangan	Wono Budi Tjahyono	*Finance Director*
Direktur Transformasi Bisnis	Panji Winanteya Ruky	*Business Transformation Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	Tina T. Kemala Intan	*Human Resource Director*
Direktur Pemasaran	Tri Wahyudi Saleh	*Marketing Director*
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha	Jamsaton Nababan	*Portfolio and Business Development Director*
Direktur Manajemen Risiko	Ninis Kesuma Adriani	*Risk Management Director*

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2024 and 2023 were as follows:

31 Desember/*December* 2024

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Mustoha Iskandar	*Chairman*
Wakil Ketua I	Febrio Nathan Kacaribu	*Vice Chairman I*
Wakil Ketua II	Suwandi	*Vice Chairman II*
Wakil Ketua III	Danar Rahmanto	*Vice Chairman III*
Anggota	R.M. Wiratmoko Prasidhanto	*Member*
Anggota	Tubagus Donny Syafardan	*Member*

31 Desember/*December* 2023

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Mustoha Iskandar	*Chairman*
Wakil Ketua I	Febrio Nathan Kacaribu	*Vice Chairman I*
Wakil Ketua II	Suwandi	*Vice Chairman II*
Anggota	R.M. Wiratmoko Prasidhanto	*Member*
Anggota	Elly Fariani	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah karyawan tetap Grup masing-masing sebanyak 7.796 dan 7.441 karyawan (tidak diaudit).

As at 31 December 2024 and 2023, the Group had 7,796 and 7,441 employees (unaudited), respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Peraturan No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi terkait revaluasi tanah (aset tetap), dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan dinyatakan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan di Catatan 3.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") and the Regulations and Guidelines No. VIII.G.7 concerning Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority ("OJK").

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, as modified for revaluation of land (fixed assets), and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and other comprehensive income, and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 3.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Mulai 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akutan Indonesia ("DSAK-IAI").

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

- Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar;
- Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amandemen PSAK 116: Sewa tentang Jual dan Sewa Balik;
- Amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional Ketentuan Model Pilar Dua; dan
- Amandemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan Amandemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi; dan
- Amandemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amandemen terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***a. Basis of preparation of the consolidated financial statements** (continued)*

Changes to the SFAS and IFAS

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and IFAS have been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2024 did not result in changes to theGroup's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior financial periods:

- *Amendment of SFAS 201: Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current;*
- *Amendment of SFAS 201: Presentation of Financial Statements - Non-Current Liabilities with Covenants;*
- *Amendment of SFAS 116: Leases regarding Sale and Lease Back;*
- *Amendment of SFAS 212: Income Taxes - International Tax Reform Pillar Two Model Rules; and*
- *Amendment of SFAS 207: Statement of Cash Flows and amendment of PSAK 107: Financial Instrument: Disclosure - Supplier Finance Agreements.*

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2025, but early adoption is permitted, are as follows:

- *SFAS 117: Insurance Contracts; and*
- *Amendment of SFAS 221: Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability.*

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

(i) Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

b. Principles of consolidation

(i) Subsidiaries

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 109, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi atas kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

***(i) Subsidiaries** (continued)*

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination achieved in stages, at the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that are deemed to be an asset or liability are recognised in accordance with SFAS 109, in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition date fair value of any previously held interest in the acquiree over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset bersih yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor. Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal tahun komparatif penyajian pelaporan keuangan.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

(ii) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

***(i) Subsidiaries** (continued)*

A business combination transaction between entities under common control is accounted for in accordance with SFAS 338: Business Combination of Entities Under Common Control. The difference between transfer price paid and carrying value of net assets acquired is presented as additional paid-in capital. The financial statement items of the combined entities are consolidated to the Group's consolidated financial statements as if the combination had occurred from the beginning of the comparative financial reporting year presented.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

(ii) Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of profit or loss. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi (lanjutan)

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi secara tepat.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama" di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

***(ii) Associates** (continued)*

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the difference to "share of net profit/(loss) of associates and joint ventures" in profit of loss. Unrealised lossess are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates are changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's financial statements only for the portion of other investors' interest in the associates.

Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognised in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(iii) Pengaturan bersama

Menurut PSAK 111, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Pada tanggal pelaporan, Grup hanya memiliki ventura bersama.

Ventura bersama

Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian Grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

c. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

(iii) Joint arrangements

Under SFAS 111, investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. At the reporting date, the Group only has joint ventures.

Joint ventures

Joint ventures are accounted for using the equity method. Under the equity method, interests in joint ventures are initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses and movements in other comprehensive income. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint venture (which includes any long-term interest that, in substance, forms part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated for the portion of the Group's interest in the joint ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures are changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

c. Foreign currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah currency, which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Group.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

(i) Mata uang fungsional dan penyajian (lanjutan)

Untuk tujuan konsolidasi, entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional berbeda, maka aset dan liabilitas entitas anak Grup tersebut ditranslasikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Sementara itu, pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata dari kurs tengah Bank Indonesia selama periode laporan laba rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak Grup tersebut ke dalam Rp disajikan dalam akun "Komponen ekuitas lainnya" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rp disesuaikan untuk mencerminkan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui di dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (nilai penuh):

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Foreign currency translation** (continued)*

***(i) Functional and presentation currency** (continued)*

For consolidation purposes, the Group's subsidiaries that have different functional currency, the Group's subsidiaries' assets and liabilities are translated using the Bank of Indonesia middle rate at the end of each reporting period. Revenue and expenses are translated using the average of the Bank of Indonesia middle rate during profit or loss period.

The difference arising from the translation of the Group's subsidiaries' financial statements into Rp is presented as "Other components of equity" account in the equity section of the consolidated statement of financial position.

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transactions.

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the reporting dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full amount):

	2024	2023	
Euro ("EUR")	16,851	17,140	*Euro ("EUR")*
Dolar Amerika Serikat ("USD")	16,162	15,416	*United States Dollar ("USD")*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya disajikan pada akun "aset lancar lainnya" apabila jatuh temponya kurang dari satu tahun dan "aset tidak lancar lainnya" apabila jatuh temponya lebih dari satu tahun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya juga disajikan pada akun "aset lancar lainnya" dan "aset tidak lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Piutang

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang lainnya merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi cadangan atas penurunan nilai.

Piutang lainnya dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

Sesuai peraturan OJK, piutang lainnya dari pihak berelasi disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada kondisi tertentu pada piutang lainnya dari pihak berelasi untuk disajikan sebagai aset lancar.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Time deposits with original maturity of more than three months at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted are presented as "other current assets" if mature less than one year and "other non-current assets" if mature more than one year in the consolidated statement of financial position.

Cash in banks and time deposits that are restricted are also presented as "other current assets" and "other non-current assets" in the consolidated statement of financial position.

e. Receivables

(i) Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are receivables arising from transactions outside of the ordinary course of business. If collection of the trade receivables is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to the related parties of the Group.

In accordance with OJK regulation, other receivables from related parties are classified as non-current assets unless there are specific circumstances ruled these other receivables from related parties to be presented as current assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Piutang (lanjutan)

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya (lanjutan)

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lainnya ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan piutang digunakan untuk mencatat dampak kerugian kredit ekspektasian, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban umum dan administrasi" pada laba rugi. Ketika piutang usaha dan piutang lainnya, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, diakui sebagai "Pendapatan lainnya - bersih" pada laba rugi.

(ii) Piutang subsidi dan piutang subsidi yang belum ditagih dari Pemerintah Indonesia

Piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk bersubsidi.

Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia diakui berdasarkan berita acara verifikasi bulanan yang divalidasi oleh Kementerian Pertanian yang pada akhir tahun perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK-RI").

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***e. Receivables** (continued)*

***(i) Trade and other receivables** (continued)*

Collectibility of trade and other receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. A provision account is used to record impact from expected credit losses, using exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is charged to profit or loss as "General and administrative expenses" in profit or loss. When a trade and other receivable for which an impairment provision had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written-off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are recognised as "Other income - net" in profit or loss.

(ii) Subsidy receivables and unbilled subsidy receivables from the Government of Indonesia

Subsidy receivables represent the subsidy receivables balance from the Government of Indonesia for the distribution of subsidised fertiliser.

Subsidy receivables from the Government of Indonesia are recognised based on monthly verification minutes validated by the Ministry of Agriculture, which at the end of the year needs to be audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK-RI").

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Piutang (lanjutan)

(ii) Piutang subsidi dan piutang subsidi yang belum ditagih dari Pemerintah Indonesia (lanjutan)

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk subsidi ke distributor namun belum tersalurkan ke petani.

(iii) Piutang retensi

Piutang retensi adalah jumlah termin yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga ketidaksesuaian telah diperbaiki.

(iv) Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - kepada pelanggan dan utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak

Jumlah pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - kepada pelanggan adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dan dikurangi jumlah kerugian dan termin yang diakui, untuk semua pekerjaan dalam proses dimana biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) melebihi termin.

Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi jumlah yang diakui dan termin, untuk semua kontrak dimana termin melebihi biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) dan merupakan bagian dari liabilitas kontrak yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***e. Receivables** (continued)*

***(ii) Subsidy receivables and unbilled subsidy receivables from the Government of Indonesia** (continued)*

Unbilled subsidy receivables arise from the sales of subsidised fertiliser to distributors which have not yet distributed to the farmers.

(iii) Retention receivables

Retention receivables are amounts of progress billings that are not paid until the conditions specified in the contract for the payment of such amount have been satisfied or until defects have been rectified.

(iv) Construction contract work in progress - due from customers and amounts due to customers for contract work

Construction contract work in progress - due from customers is the net amount of costs incurred plus recognised profits and less the sum of recognised losses and progress billings, for all contracts in progress for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceeds progress billings.

Amounts due to customers for contract work is the net amount of costs incurred plus recognised profits, less the sum of recognised losses and progress billings, for all contracts in progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) and part of contract liabilities related to revenue from contracts with customers.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Persediaan

Persediaan dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersihnya. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* langsung maupun tidak langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penurunan nilai atas persediaan dan suku cadang yang usang dan perputarannya lambat, jika ada, ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap umur persediaan dan kondisi persediaan akhir periode laporan. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

g. Uang muka dan beban dibayar di muka

Uang muka pelanggan adalah jumlah yang diterima oleh Grup sebelum pekerjaan dilakukan. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang telah diberikan oleh penyedia barang dan jasa.

Beban dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

h. Properti investasi

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, dan prasarana yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh entitas di dalam Grup konsolidasian. Properti investasi juga termasuk properti yang sedang dikonstruksi atau pembangunan untuk penggunaan di masa yang akan datang sebagai properti investasi.

Properti investasi dalam bentuk tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Properti investasi lainnya diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis properti investasi yaitu 5 sampai dengan 40 tahun.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

f. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted-average method. The cost of finished goods and work in process comprises materials, labour and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Impairment for obsolete and slow moving inventories and spare parts, if any, is determined based on a review of the inventories aging and physical condition of the inventories at the end of reporting period. Any reversal of decline in value of inventories due to an increase in net realisable value is recognised as a reduction in the amount of cost of inventories in the period in which the recovery occurs.

g. Advances and prepayments

Advances from customers are amounts received by the Group before the related work is performed. The amounts will be compensated with invoices from supplier of goods and services.

Prepayments are amortised on a straight-line basis over the estimated beneficial periods of the prepayments.

h. Investment properties

Investment properties represent land, buildings and infrastructure that are held for long-term rental yields or for capital appreciation or both and that are not occupied by the companies in the consolidated Group. Investment properties also includes properties that is being constructed or developed for future use as investment properties.

Investment properties in the form of land are presented at acquisition cost and not depreciated.

Other investment properties are recognised at cost and depreciated over the estimated economic life. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the investment properties which is 5 to 40 years.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Properti investasi (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi. Properti investasi yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok properti investasi berikut akumulasi penyusutan dan penurunan nilainya, jika ada. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti investasi tersebut dibukukan dalam laba rugi pada tahun penjualan terjadi.

Manajemen melakukan penilaian atas properti investasi secara berkala untuk memastikan ada tidaknya penurunan nilai permanen yang material.

i Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi dalam periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Tanah dinyatakan berdasarkan model revaluasi dan tidak disusutkan. Aset tetap yang tidak digunakan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat atau jumlah terpulihkan.

Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala (3 tahun sekali) untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***h. Investment properties** (continued)*

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Expenditures which extends the useful lives of the property or results in increasing future economic benefits such as an increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance, is capitalised. When the property is unused or otherwhise disposed of, the carrying value and accumulated impairment losses, if any, are removed from the investment property account. Gains or losses from the sale of investment properties are recorded in profit or loss in the year of sale.

Management performs valuation of investment properties regularly to check whether or not there is a material permanent impairment.

i. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its acquisition cost and any cost directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance costs are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Land is stated at revaluation model and not depreciated. Unused fixed assets are stated at the lower of carrying value or recoverable amount.

Valuation of land is performed by external independent appraisers who are registered at OJK. Valuations are performed regularly (once every 3 years) to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai "Surplus revaluasi aset" di ekuitas. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya dicatat atas aset yang sama dibebankan di penghasilan komprehensif lainnya dan didebitkan terhadap "Surplus revaluasi aset" di ekuitas; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Keuntungan atau kerugian bersih dari pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil bersih pelepasan dengan nilai tercatat dan diakui dalam "Pendapatan lainnya - bersih" di laba rugi.

Penyusutan aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***i. Fixed assets** (continued)*

Increases in the carrying amount arising on the revaluation of land are credited to other comprehensive income and shown as "Assets revaluation surplus" in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited against "Assets revaluation surplus" in equity; all other decreases are charged to profit or loss.

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "Other income - net" in profit or loss.

Depreciation on other fixed assets are calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan dan prasarana permanen	20	*Permanent buildings and infrastructure*
Bangunan dan prasarana tidak permanen	10	*Non-permanent buildings and infrastructure*
Pabrik dan peralatan	8 - 40	*Plants and equipment*
Mesin bengkel kerja	8	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	4 - 8	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	4	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	10 - 35	*Ships and facilities*
Aset penyangga	8 - 20	*Supporting assets*

Hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan.

Land rights are recognised at cost.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116: Sewa. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216: Aset tetap.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 116: Leases. If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 216: Fixed assets.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

j. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset tetap, properti investasi dan aset tidak lancar lainnya, kecuali *goodwill*, ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Goodwill sebagai bagian dari investasi di asosiasi diuji penurunan nilainya bersamaan dengan investasi di asosiasi sebagai satu unit penghasil kas.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pemulihan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***i. Fixed assets** (continued)*

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

The accumulated costs of the construction of buildings, plants and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

j. Impairment of non-financial assets

Fixed assets, investment properties and other non-current assets, excluding goodwill, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is an amount which is higher between an asset's fair value less cost of disposal and value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Goodwill as part of investment in associates is assessed for impairment together with investment in associate as one cash generating unit.

Reversal on impairment losses of assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal in impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses related to goodwill would not be reversed.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam dua kategori sebagai berikut:
(i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
(ii) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual ketika menentukan apakah arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang bukan termasuk dimiliki untuk diperdagangkan, tergantung apakah Grup telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

k. Financial instruments

Classifications, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following two categories:
(i) Financial assets at amortised cost; and
(ii) Financial assets at fair value though profit or loss ("FVTPL") or fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at FVOCI.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those financial assets changes.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

As at 31 December 2024 and 2023, the Group had financial assets which were categorised as at amortised cost and fair value through other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikan instrumen utang:

(i) Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

(ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan lainnya - bersih. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lainnya, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***k. Financial instruments** (continued)*

***Classifications, recognition and measurement** (continued)*

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

(i) Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses). Impairment losses of financial assets are presented as separate line item in the statement of profit or loss.

(ii) FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through Other Comprehencive Income ("OCI"), except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income - net. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikan instrumen utang: (lanjutan)

(iii) Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode keterjadiannya.

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kerugian penurunan nilai (dan pembalikan kerugian penurunan nilai) pada investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***k. Financial instruments** (continued)*

***Classifications, recognition and measurement** (continued)*

***Debt instruments** (continued)*

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments: (continued)

(iii) FVTPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at FVTPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVTPL and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it occurs.

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from changes in fair value.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of assets ownership.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

l. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan metode sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* terhadap kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya, dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian terhadap instrumen utang yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***k. Financial instruments** (continued)*

***Classifications, recognition and measurement** (continued)*

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

l. Impairment of financial assets

The Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and contract assets without a significant financing component.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and FVOCI. The impairment method applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Utang usaha dan utang lainnya

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang lainnya terdiri dari uang muka kontrak pelanggan, utang iuran, dan utang retensi. Utang usaha dan utang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

n. Provisi

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan. Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus kas keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan.

o. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

m. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables consist of contractual cash advances, contribution payables and retention payables. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

n. Provision

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (either legal or constructive) as a result of past events, it is more likely than not than an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and the obligation can be reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses. Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole.

o. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pinjaman (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup, pada atau sebelum akhir periode pelaporan, dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan perjanjian pinjaman dengan kovenan sebagai lancar atau tidak lancar. Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup setelah periode pelaporan tidak memengaruhi klasifikasi pada tanggal pelaporan.

Perjanjian pembiayaan pemasok

Grup memiliki fasilitas pembiayaan pemasok yang mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran dari 7 - 30 hari menjadi 45 - 180 hari setelah tanggal faktur dan Grup tidak lagi mampu menghapus utang yang diperoleh dengan nota kredit yang diterima dari pemasok.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Borrowings** (continued)*

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are derecognised from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has a right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Covenants that the Group is required to comply with, on or before the end of the reporting period, are considered in classifying loan arrangements with covenants as current or non-current. Covenants that the Group is required to comply with after the reporting period do not affect the classification at the reporting date.

Supplier financing agreement

The Group has supplier financing agreement that change the payment due from 7 - 30 days to 45 - 180 days after the invoice date and the Group is no longer being able to offset the acquired payables against the credit notes received from the supplier.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pinjaman (lanjutan)

Perjanjian pembiayaan pemasok (lanjutan)

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, manajemen telah menentukan bahwa jumlah tersebut bukan merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama entitas, sehingga menyajikan arus kas keluar untuk melunasi kewajiban pembiayaan pemasok ke bank dalam aktivitas pendanaan.

Manajemen menganggap bahwa penyedia keuangan melunasi faktur sebagai agen pembayaran atas nama Grup. Oleh karena itu, pembayaran yang dilakukan oleh penyedia keuangan disajikan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dan arus kas masuk aktivitas pendanaan dalam jumlah yang sama tetapi berlawanan pada saat penyedia keuangan membayar pemasok. Ketika Grup kemudian membayar jumlah yang terutang kepada penyedia keuangan, hal ini disajikan sebagai arus kas keluar pada aktivitas pendanaan. Akibatnya, kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan pemasok dimasukkan dalam rekonsiliasi utang bersih.

p. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Borrowings** (continued)*

Supplier financing agreement (continued)

For the purpose of the consolidated cash flow statement, management has determined that the amounts are not part of the working capital used in the entity's principal revenue-generating activities, so it presents the cash outflows to settle the supplier financing liability to the bank in the financing activities.

Management considers that the finance provider settles the invoices as a payment agent on behalf of the Group. The payments made by the finance provider are therefore presented as operating activities cash outflows and financing activities cash inflows in equal but opposite amounts at the point when the finance provider pays the supplier. When the Group subsequently pays the amount outstanding to the finance provider, this is presented as a financing activities cash outflow. As a result, the liabilities under the supplier financing agreement are included in the net debt reconciliation.

p. Borrowing cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Biaya emisi penerbitan utang obligasi

Utang obligasi pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

r. Imbalan kerja

(i) Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan manfaat pasti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan imbalan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung beberapa faktor, misalnya usia, masa kerja dan kompensasi.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang Rp sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

q. Bonds payable issuance costs

Bonds payable are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognised on an effective interest rate method.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognised over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

r. Employee benefits

(i) Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised and accrued to the employees.

(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits

The Group provides defined benefits in accordance with the Collective Labour Agreement ("CLA"), which are higher than those required under prevailing regulations related to manpower. Since manpower regulations and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the manpower regulations or the CLA represent defined benefit plans.

Defined benefit pension plan program defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually depending on factors such as age, years of service and compensation.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in Rp, the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya seperti uang penghargaan, santunan kematian, penghargaan pengabdian, dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan atau PKB. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya, kecuali imbalan jangka panjang lainnya dimana keuntungan dan kerugian aktuarial diakui langsung sebagai beban pada laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

(iii) Imbalan kesehatan pascakerja

Grup menyediakan imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum tertentu. Perkiraan biaya imbalan ini dicatat sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***r. Employee benefits** (continued)*

***(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits** (continued)*

The Group also provides other post-employment benefits and other long-term benefits such as long service reward, death allowance, jubilee rewards, and separation reward. The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualified family members pass away. The value of benefits provided to the employee is based on the Company's regulation or the CLA. The separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise, except for other long-term benefits where actuarial gains and losses are directly recognised as expenses in profit or loss.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

(iii) Post-retirement healthcare benefits

The Group provides post-retirement healthcare benefits to its retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using the projected unit credit method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:
(i) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
(ii) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
(iii) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
(iv) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
(v) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:
(i) Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
(ii) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

s. Revenue and expense recognition

Revenue recognition has to fulfil five steps of assessment as follows:
(i) Identify contract(s) with a customer;
(ii) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

(iii) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer which will be paid during the contract period;

(iv) Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin;

(v) Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

A performance obligation may be satisfied:
(i) At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

(ii) Over the time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over the time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang (pupuk subsidi, pupuk nonsubsidi, amonia dan produk lainnya) diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:
- Grup telah memindahkan kontrol kepemilikan barang;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi pejualan tersebut dapat diukur secara andal.

Terpenuhinya kondisi tersebut tergantung persyaratan penjualan dengan setiap pelanggan. Secara umum risiko dan manfaat dianggap telah berpindah ke pelanggan ketika terjadi transfer kepemilikan dan risiko.

Subsidi pupuk Pemerintah

Subsidi pupuk Pemerintah diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Pendapatan jasa

Bila suatu transaksi pendapatan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***s. Revenue and expense recognition** (continued)*

Sales of goods

Revenue from the sale of goods (subsidised fertiliser, non-subsidised fertiliser, ammonia and other products) are recognised when all of the following conditions are fulfilled:
- *the Group has transferred control of the goods to the buyer;*
- *the Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the goods sold;*
- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and*
- *the cost incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.*

The fulfilment of these conditions depends upon the terms of the sales with individual customers. Generally, the risks and rewards are considered to be transferred to the customers when the title and risk are transferred.

Government's fertiliser subsidy

The Government's fertiliser subsidy is recognised as revenue on an accrual basis which is calculated in accordance with the requirements stipulated in the Decree of Minister of Finance, Minister of Agriculture and Minister of Trade of the Republic of Indonesia.

Rendering of services

When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, the revenue that is associated with the transaction is recognised with reference to the stage of completion of the transaction as at the consolidated statement of financial position date.

The outcome of a transaction can be estimated reliably when all of the following conditions are met:
- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits that are associated with the transaction will flow to the Group;*
- *the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and*
- *the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan jasa (lanjutan)

Bila hasil transaksi pendapatan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

Grup mengakui aset kontrak dan liabilitas kontrak sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Aset kontrak terdiri dari pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan serta piutang retensi dan pendapatan yang belum ditagihkan yang disajikan sebagai bagian dari aset lancar lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian. Liabilitas kontrak terdiri dari utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi dan pendapatan diterima di muka yang disajikan sebagai bagian dari utang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian.

t. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus ini, masing-masing beban pajak juga diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan di negara dimana Grup beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan terkait dengan situasi dimana diperlukan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Grup dikenakan pajak final atas pendapatan dari *real estate* dan jasa konstruksi. Pajak final dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***s. Revenue and expense recognition** (continued)*

Rendering of services (continued)

When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognised only to the extent of the recognised expenses that are recoverable.

The Group has recognised contract assets and contract liabilities related to revenue from contract with customers. Contract assets consist of construction contract work in progress - due from customers and retention receivables and unbilled revenues which are presented as part of other current assets in the consolidated statements of financial position. Contract liabilities consist of amounts due to customers for construction contract work and unearned revenue which is presented as part of other payables in the consolidated statements of financial position.

t. Current and deferred income tax

The tax expense for the year comprises current and deferred tax. The tax expense is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns ("SPT") in situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. Where appropriate, it establishes a provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

The Group is subject to final income tax on revenue from real estate and construction services. The final income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date.

Final income tax is presented outside income tax expenses in profit or loss.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities related to the final income tax, and their respective final tax bases is not recognised as deferred tax assets or liabilities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan dimana waktu pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Liabilitas atas ketidakpastian eksposur perpajakan atas pajak badan diklasifikasikan sebagai utang pajak dan untuk pajak lainnya diklasifikasikan sebagai provisi.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan" dalam laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***t. Current and deferred income tax** (continued)*

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (or laws) that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax liabilities are provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries and associates, except for deferred income tax liabilities where the timing of the reversal of temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

Liabilities related to uncertain tax exposure of corporate income tax is classified as taxes payables and of other taxes are classified as provisions.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there are legally-enforceable rights to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entities and where there is an intention to settle the balances on a net basis.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Income tax expenses" in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Aset keuangan dari perjanjian konsesi jasa

Piutang dari proyek konsesi merupakan jasa yang berhubungan dengan perjanjian konsesi jasa dimana pembayaran minimum yang dijamin telah disetujui tanpa dipengaruhi tingkat penggunaan listrik. Karena jangka waktu pembayaran yang panjang, piutang diukur sebesar nilai kini dari penerimaan kas yang dijamin di masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Akumulasi tahunan dari bunga atas piutang ini disajikan sebagai pendapatan keuangan dari perjanjian konsesi jasa menggunakan metode suku bunga efektif. Pembayaran akan dibagi menjadi porsi pengurang piutang dan bunga dari jumlah pokok yang belum dibayarkan dan porsi atas bagian konsesi jasa lainnya.

Aset keuangan dari perjanjian konsesi jasa disajikan pada akun "aset lancar lainnya" dan "aset tidak lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

v. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

w. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor.

x. Laba bersih per saham dasar dan dilusian

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam periode yang bersangkutan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Perusahaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

u. Financial assets from service concession arrangement

Receivables due from service concession project represents service provided in connection with a service concession arrangement for which guaranteed minimum payments have been agreed irrespective of the extent of use of the electricity. Due to the length of the payment period, receivables are measured using the present value of future guaranteed cash receipts discounted using certain interest rate. The annual accumulation of interest on these receivables is presented as finance income from service concession arrangement using the effective interest method. Payments will be divided into a portion to be deducted from the receivables and interest on the unpaid amounts and a portion for the other service concessions.

Financial assets from service concession arrangement is presented as "other current assets" and "other non-current assets" in the consolidated statement of financial position.

v. Segment reporting

Operating segments are reported in a consistent manner with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing the performance of the operating segments and making strategic decisions is the Board of Directors.

w. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuing of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax from the proceeds. Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital account.

x. Basic and diluted earnings per share

The amount of basic earnings per share is computed by dividing earnings for the period attributable to owners of the parent by the weighted-average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen dideklarasikan dan telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.

z. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 224: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan OJK No. VIII.G.7.

Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan pihak berelasi dari Grup. Entitas berelasi dengan Pemerintah mencakup entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan dalam Catatan 30.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

y. Dividend distributions

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

z. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS 224: Related Party Disclosures and OJK Regulation No. VIII.G.7.

Based on OJK Regulation No. VIII.G.7, Government-related entities are considered related parties of the Group. Government-related entities include entities which are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.

The details of significant balances and transactions entered into with related parties are presented in Note 30.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian aset keuangan

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

b. Ketidakpastian eksposur perpajakan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan besaran fasilitas pengurang pajak (*capital allowance*) dan pengurangan beban tertentu untuk tujuan fiskal selama proses estimasi atas perhitungan beban pajak penghasilan masing-masing perusahaan dalam Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

a. Provision for expected credit losses of financial assets

The Group calculates expected credit losses for cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

b. Uncertain tax exposures

Judgements and assumptions are required to determine the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for each company within the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

All judgements and estimates taken by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, can take several years to complete and in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which this determination is made.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, besaran *capital allowance* dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset nonkeuangan" asumsi atas laba kena pajak masa depan yang dapat dihasilkan sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas dan lain-lain; yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan keadaan akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

d. Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun bersih mencakup tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa datang dan kenaikan biaya kesehatan. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 18.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

c. Income taxes

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered probable that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Similar to "impairment of non-financial assets", assumptions about the generation of future taxable profits is heavily affected by management's estimates and assumptions regarding expected production levels, sales volumes, commodity prices, etc; which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

d. Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase and future medical costs. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of post-employment benefits liabilities.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

Other key assumptions for post-employment benefits liabilities are based on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 18.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Estimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi

Grup mengestimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi berdasarkan ekspektasi utilisasi aset yang sesuai dengan rencana dan strategi usaha setelah mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Di samping itu, estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi juga mempertimbangkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan keterbatasan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan dari aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis properti investasi dan aset tetap antara 4 sampai dengan 40 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa properti investasi dan aset tetap.

Nilai tercatat atas aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 11.

f. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan konstruksi mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang dilaporkan. Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

e. The estimated useful lives of fixed assets and investment properties

The Group estimates the useful lives of its fixed assets and investment properties based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviour. In addition, the Group's collective assessment of industry practice, an internal technical evaluation and experience with similar assets are also considered when estimating the useful lives of fixed assets and investment proprties. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

The costs of fixed assets and investment properties are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management estimates the useful life of these investment properties and fixed assets to be within 4 to 40 years. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful life and the residual values of these investment properties and fixed assets.

The net carrying amounts of the Group's fixed assets at reporting dates are disclosed in Note 11.

f. Revenue and expense recognition of construction contract

The revenue recognition policy for construction contract requires the use of estimates which may impact the reported amount of revenue. Revenue related to construction contracts is recognised based on the completion stage of contract activities at the end of reporting period (percentage of completion method).

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi (lanjutan)

Untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak konstruksi, Grup mengestimasi kemajuan proyek berdasarkan pengukuran langsung atas nilai barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan sampai akhir periode pelaporan secara relatif terhadap sisa barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak. Dalam menentukan estimasi kemajuan proyek, diperlukan juga pertimbangan manajemen karena tidak terdapat cara pengukuran yang baku untuk menentukan kemajuan proyek. Estimasi dan pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi tingkat presisi nilai persentase penyelesaian. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa estimasi dan pertimbangan yang dibuat adalah wajar dan tepat, perbedaan persentase dapat mempengaruhi besaran pendapatan konstruksi yang dicatat pada suatu periode.

Grup mengestimasi jumlah imbalan yang bersifat variabel atas penyerahan jasa konstruksi yang dijanjikan ke pelanggan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak. Apabila terdapat kemungkinan Grup kehilangan hak atas sebagian imbalan yang akan dibayarkan atau berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan karena satu dan lain hal, maka nilainya akan dibukukan sebagai provisi pada saat kondisi yang dapat menimbulkan hal tersebut teridentifikasi dan nilainya diestimasi berdasarkan informasi yang tersedia sampai dengan tanggal pelaporan.

Grup juga secara berkelanjutan mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak konstruksi. Dalam mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak, Grup perlu menggunakan pertimbangan dan pengetahuan Grup atas situasi terkini dari proyek karena tidak terdapat cara pengukuran yang baku untuk menentukan jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak. Estimasi dan pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi tingkat presisi hasil perhitungan kontrak yang merugikan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

f. Revenue and expense recognition of construction contract *(continued)*

To determine the completion stage of a construction contract, the Group estimates the progress of the project on the basis of direct measurements of the value of goods or services transferred to a customer as of the period end, relative to the remaining goods or services promised under the contract. In estimating the progress of project, management needs to include their judgements as there is no standardised measurement to calculate the progress of a project. These estimates and judgements may affect the level of precision of percentage of completion. While management believes that their estimates and judgements are reasonable and appropriate, differences in percentage of the actual completion stage may affect the amount of construction revenue recorded for a period.

The Group estimates the variable consideration amount from fulfilling promised construction services to the customer in line with the terms and conditions in the contract. If there is a possibility that the Group loss its entitlement of a portion of consideration that will be paid or liable to pay a compensation to the customer for one reason or another, the amount will be booked as a provision when the condition that indicates it arise and the amount is estimated based on the latest available information up to the reporting date.

The Group also continuously estimates the cost to complete a construction contract. In estimating the cost to complete a contract, the Group needs to include their judgements and knowledge of the latest project situation as there is no standardised measurement to calculate the cost to complete a contract. These estimates and judgements may affect the level of precision of the onerous contract calculation result.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi pupuk melalui Grup berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ("Permendag") No. 04 Tahun 2023. Subsidi pupuk diberikan untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk jenis urea, NPK, dan NPK Kakao yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 249/2024, sejak diterbitkan pada tanggal 22 April 2024, penyaluran pupuk bersubsidi menjadi pupuk urea, NPK, dan organik.

Tata cara perhitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan bersubsidi dengan harga eceran tertinggi.

Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian ("Permentan") No. 10 Tahun 2022 yang mengubah jenis pupuk bersubsidi menjadi Urea dan NPK dan diperbaharui dalam Permentan No. 1 Tahun 2024.

Pendapatan subsidi dari Pemerintah dibukukan berdasarkan biaya pupuk subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan estimasi kuantitas penyaluran pupuk yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut yang didasarkan pada kuantitas tersalur bulanan yang telah diverifikasi Kementerian Pertanian. Secara historis, aktual kuantitas penyaluran pupuk yang disetujui dan estimasi dari kuantitas penyaluran tidak berbeda signifikan.

Klasifikasi piutang subsidi antara porsi lancar dan tidak lancar ditentukan berdasarkan estimasi dan pertimbangan manajemen selama setahun ke depan berdasarkan ketersediaan sisa anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") dan pos anggaran lainnya untuk tahun berikutnya yang dapat digunakan untuk penagihan piutang subsidi serta konfirmasi dari Kementerian Pertanian pada tanggal neraca.

Selain itu, klasifikasi bagian lancar dan tidak lancar atas piutang subsidi didukung oleh tren pembayaran historis dari Pemerintah Indonesia.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

g. Revenue and receivable recognition of subsidy

The Government of Indonesia provides a fertiliser subsidy through the Group based on Ministry of Trading ("Permendag") Regulation No. 04 of 2023. Subsidised fertilisers are given in accordance with the needs of farmer groups and/or farmers in the agricultural sector, including the fertiliser types of urea, NPK and NPK Kakao stipulated by the Ministry of Agriculture.

Based on the Regulation of the Minister of Agriculture No. 249/2024, since its issuance on 22 April 2024, the distribution of subsidised fertilisers is only for urea, NPK, and organic fertilisers.

The procedure for the calculation, settlement and accountability of subsidised fertiliser is stipulated by the Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Subsidised fertiliser amount is calculated based on the difference between subsidised cost of goods sold and the highest retail price.

Procedures for Determining the Allocation and Highest Retail Price of Subsidised Fertilisers in the Agricultural Sector are regulated in the Regulation of the Minister of Agriculture ("Permentan") No. 10 of 2022 which changed the type of subsidised fertiliser to Urea and NPK and updated in the Permentan No. 1 Year 2024.

Revenue from the Government subsidy is recorded based on subsidised fertiliser costs audited by BPK-RI as stated in the Minutes of Audit Result and estimates of distributed quantity as stated in the Minutes of Audit Result which is based on monthly distributed quantity that has been verified by the Ministry of Agriculture. Historically, the actual approved distributed quantity and estimates of distributed quantity are not significantly different.

The classification of current and non-current portion of subsidy receivables is determined based on management's estimation and judgement for a year using the availability of the remaining budget of Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") and other budget items for the following year that available for collection of subsidy receivables including confirmation from the Ministry of Agriculture as of balance sheet date.

In addition, the classification of the current and non-current portions of subsidy receivables is supported by historical payment trends from the Government of Indonesia.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Provisi atas penurunan nilai persediaan

Grup melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

i. Nilai wajar aset tetap yang menggunakan model revaluasi

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Penentuan nilai wajar dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi signifikan yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

j. Provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan apakah kemungkinan besar terdapat kewajiban kini pada tanggal posisi keuangan bagi Grup untuk mengakui provisi. Secara khusus, pengakuan provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi melibatkan penafsiran terhadap dampak perubahan peraturan dan perselisihan kontraktual.

Grup melakukan estimasi atas provisi kurang bayar tarif gas bumi, menggunakan asumsi formula harga gas bumi dan penentuan wilayah kerja ("WK") yang terdampak penyesuaian harga gas bumi. Pertimbangan dan asumsi yang digunakan Grup dapat berbeda ketika Grup menerima keputusan dari Menteri atau regulator atas penyesuaian harga gas bumi atau apabila terdapat perubahan tarif di Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG"). Sebagai akibatnya, terdapat ketidakpastian atas hasil akhir penentuan harga gas bumi.

Lihat Catatan 36c untuk pengungkapan provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi dimana terdapat pertimbangan manajemen yang diperlukan untuk menginterpretasikan peraturan serta pertimbangan manajemen dalam membukukan pembalikan provisi di tahun 2024.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

h. Provision for impairment of inventories

The Group provides provision of impairment of inventories based on estimated future usage and the condition of the inventories. Uncertainty associated with these factors may result in the realisable amount being different from the reported carrying amount of the inventories.

i. Fair value of fixed assets that use revaluation model

Land is stated at fair value. The determination of the fair value was performed by an independent public appraiser.

Management, with the assistance of an independent public appraiser, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the appraisers as part of the valuation process. The approaches and methods that are used in the revaluation depend upon the group of assets. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs, or significant changes in assumptions, may materially affect the value of the assets that use the revaluation model.

j. Provision with respect to the procurement of natural gas

Judgements and assumptions are required to determine whether it is more likely than not that a present obligation exists at the financial position date for the Company to recognise a provision. In particular, the recognition of the Group's provision with respect to the procurement of natural gas involves the interpretation of regulatory changes and contractual disputes.

The Group has estimated the provision for underpayment of natural gas rates for natural gas, using assumptions of natural gas prices formula and determination of working areas ("WK") that are affected by the natural gas price adjustment. Judgements and assumptions used by the Group may differ when the Group receives the decision from the Minister or regulator for the adjustment of natural gas prices or if there is any price changes stated in Gas Sales Purchase Agreement ("GSPA"). As a result, there is an uncertainty for the settlement of natural gas price.

Refer to Note 36c for the disclosure of a provision with respect to the procurement of natural gas which involve management's judgement to interpret the regulation including management's judgement to record reversal of provision in 2024.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Keuntungan dari pengukuran ulang pinjaman dan utang dari restrukturisasi

Rekind telah melanggar beberapa ketentuan perjanjian pinjaman dengan beberapa bank, khususnya terkait dengan persyaratan untuk mempertahankan rasio keuangan minimum, yang mendorong Rekind untuk memulai proses PKPU. Selanjutnya, proses PKPU Rekind yang dimulai pada tanggal 16 November 2023, berakhir dengan keputusan homologasi pada tanggal 31 Januari 2024.

Hasil PKPU dituangkan dalam bentuk Rencana Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga. Berdasarkan Rencana Perdamaian, salah satu skema penyelesaian dengan para kreditur Rekind adalah modifikasi menjadi ketentuan pembayaran jangka panjang baru. Rekind mengevaluasi apakah restrukturisasi utang diperhitungkan sebagai modifikasi dari utang awal atau sebagai penghapusan utang awal dan penerbitan utang baru. Hal ini melibatkan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi signifikan.

Rekind menentukan tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai sekarang dari utang baru untuk menilai apakah nilai sekarang dari utang baru dan utang awal berbeda lebih dari 10%. Apabila perbedaan tersebut lebih dari 10%, utang tersebut perlu diperhitungkan sebagai penghapusan utang awal dan penerbitan utang baru. Utang baru perlu dicatat pada nilai wajar dan selisih antara nilai awal utang dan nilai wajar utang baru dicatat sebagai penghasilan. Penentuan tingkat diskonto berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen dimana melibatkan kompleksitas dan subjektivitas.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

k. Gain of remeasurement loan and payable from restructuring

Rekind has breached certain borrowing covenants with several banks, specifically related to the requirement to maintain a minimum financial ratio, prompting Rekind to initiate the PKPU process. Furthermore, Rekind's PKPU process which started on 16 November 2023, ended with a homologation decision on 31 January 2024.

The PKPU results were set out in the form of a Composition Plan that was ratified by the Panel Judge at the Commercial Court. Based on the Composition Plan, one of the settlement schemes with Rekind's creditors is modification into new long-term payments. Rekind evaluated whether the debt restructuring should be accounted as a modification of the original debts or as an extinguishment of the original debts and issuance of new debts. This involves significant accounting judgements, estimates and assumptions.

Rekind determines the discount rate used in calculating the present value of the new debts to assess if the present value between the new debts and original debts differ by 10%. If it exceeds 10%, the debt should be accounted as extinguishment of original debts and issuance of new debts. The new debts shall be recorded at fair value and the difference between initial recognition of the debts and fair value of new debts is recognised as an income. The determination of the discount rate is based on management's judgements and estimates which involve complexity and subjectivity.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2024	2023	
Kas			***Cash on hand***
Rp	7,414	6,419	*Rp*
USD	814	621	*USD*
Lainnya	25	29	*Others*
Jumlah	8,253	7,069	*Total*
Bank			***Cash in banks***
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	5,605,687	3,275,169	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	3,603,978	2,896,308	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	2,749,638	2,422,415	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	1,321,942	1,250,264	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	238,704	12,869	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")	451,043	63,243	*PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")*
PT Bank DKI ("Bank DKI")	190,498	94,898	*PT Bank DKI ("Bank DKI")*
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	125,021	91,527	*PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")*
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")	100,891	3,837	*PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC") dahulu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")	54,975	39,038	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC") formerly PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim")	50,075	15	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim")*
PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")	25,259	2,306	*PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")*
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	673	23,627	*PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	13,168	3,651	*Others (each below Rp10,000)*
	14,531,552	10,179,167	
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related parties***
BNI	573,413	677,662	*BNI*
Bank Mandiri	149,776	707,102	*Bank Mandiri*
BRI	130,506	874,716	*BRI*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	2,169	30	*Others (each below Rp10,000)*
Pihak ketiga			***Third parties***
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	20,563	9,849	*Others (each below Rp10,000)*
	876,427	2,269,359	

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	2024	2023	
Mata uang asing lainnya			***Other currency***
Pihak berelasi			***Related party***
Bank Mandiri	94	228	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			***Third party***
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")	6,504	7,826	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")*
	6,598	8,054	
Jumlah	15,414,577	12,456,580	*Total*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
BRI	764,615	883,662	*BRI*
BSI	583,152	697,416	*BSI*
BTN	74,160	786,750	*BTN*
BNI	45,611	132,861	*BNI*
Bank Mandiri	43,877	1,256,477	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	14,500	-	*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
SMBC	12,700	9,000	*SMBC*
Bank BJB	400	10,000	*Bank BJB*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")	-	10,000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")*
PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bukopin")	-	10,000	*PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bukopin")*
PT Bank Muamalat Tbk ("Bank Muamalat")	-	10,000	*PT Bank Muamalat Tbk ("Bank Muamalat")*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("Mayapada")	-	10,000	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("Mayapada")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	2,000	10,038	*Others (each below Rp10,000)*
	1,541,015	3,826,204	
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related parties***
BNI	161,620	198,866	*BNI*
BRI	149,983	96,697	*BRI*
BSI	2,824	-	*BSI*
	314,427	295,563	
Jumlah	1,855,442	4,121,767	*Total*
Jumlah kas dan setara kas	**17,278,272**	**16,585,416**	***Total cash and cash equivalents***

Kisaran tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka (jangka waktu 1 - 3 bulan) per tahun sebagai berikut:

The range of contractual interest rates per annum on time deposits (time period 1 - 3 months) are as follows:

	2024	2023	
Rp	2.25% - 6.90%	2.25% - 7.70%	*Rp*
USD	2.50% - 5.25%	1.00% - 4.45%	*USD*

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	2024	2023	
Pihak ketiga	2,667,975	2,925,036	*Third parties*
Cadangan penurunan nilai	(734,001)	(571,363)	*Provision for impairment*
	1,933,974	2,353,673	
Pihak berelasi (Catatan 30)	638,598	800,671	*Related parties (Note 30)*
Cadangan penurunan nilai	(121,873)	(129,035)	*Provision for impairment*
	516,725	671,636	
Jumlah - bersih	**2,450,699**	**3,025,309**	***Total - net***

Nilai tercatat piutang usaha Grup berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The carrying amounts of the Group's trade receivables are denominated in the following currencies:

	2024	2023	
Rp	2,903,323	2,507,387	*Rp*
USD	403,250	1,218,320	*USD*
	3,306,573	3,725,707	
Cadangan penurunan nilai	(855,874)	(700,398)	*Provision for impairment*
Jumlah - bersih	**2,450,699**	**3,025,309**	***Total - net***

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of the trade receivables is as follows:

	2024	2023	
Lancar	1,647,584	2,242,206	*Current*
Sudah jatuh tempo:			*Overdue:*
1-90 hari	736,435	529,845	*1-90 days*
91-120 hari	112,208	136,456	*91-120 days*
121-365 hari	130,023	135,601	*121-365 days*
>365 hari	680,323	681,599	*>365 days*
	3,306,573	3,725,707	
Cadangan penurunan nilai	(855,874)	(700,398)	*Provision for impairment*
Jumlah - bersih	**2,450,699**	**3,025,309**	***Total - net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movement of the provision for impairment losses were as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	700,398	713,114	*Beginning balance*
Penambahan	341,640	80,631	*Additional*
Pemulihan	(176,378)	(49,716)	*Reversal*
Penghapusan	(9,786)	(43,631)	*Write-off*
Saldo akhir	855,874	700,398	*Ending balance*

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Provision for impairment losses for individual receivables are provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Karena jatuh temponya yang pendek, nilai wajar piutang usaha kurang lebih sama dengan jumlah tercatatnya.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang individual dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 15).

Lihat Catatan 30 untuk informasi mengenai pihak berelasi.

5. TRADE RECEIVABLES *(continued)*

Provision for impairment losses for collective receivables are provided for customers that have insignificant balances and with possibilities of payment default. This calculation considers trends of payment made by customers, relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

Due to the short-term nature, the fair value of trade receivables approximates their carrying amount.

Based on the review of the status of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that the provision for the impairment of trade receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible trade receivables.

Trade receivables of the Group are used as collateral on short-term bank loans (Note 15).

Refer to Note 30 for related parties information.

6. PIUTANG/(UTANG) SUBSIDI

a. Piutang/(utang) subsidi dari Pemerintah Indonesia

Rincian saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

6. SUBSIDY RECEIVABLES/(PAYABLES)

a. Subsidy receivables/(payables) from the Government of Indonesia

The balance of the subsidy receivables from the Government of Indonesia is as follows:

	2024	**2023**	
Tahun			***Year***
2020	430,237	430,237	*2020*
2022	178,451	178,451	*2022*
2023	5,127	9,873,988	*2023*
2024	1,293,571	-	*2024*
	1,907,386	10,482,676	
Dikurangi:			*Less:*
Utang Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	(185,525)	(1,035,435)	*Value Added Tax ("VAT") out payable from unpaid subsidy receivables*
	1,721,861	9,447,241	
Cadangan penurunan nilai	(104,168)	-	*Allowance for impairment*
Jumlah	**1,617,693**	**9,447,241**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	**1,165,380**	**8,895,378**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**452,313**	**551,863**	***Non-current portion***
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Utang subsidi")	**(1,435,708)**	**-**	***Excess subsidy paid by the Government of Republic of Indonesia ("Subsidy payables")***

6. PIUTANG/(UTANG) SUBSIDI (lanjutan)

a. Piutang/(utang) subsidi dari Pemerintah Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan estimasi manajemen, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang subsidi tahun 2024 akan terealisasi dalam 12 bulan ke depan, sehingga seluruh piutang subsidi ini diklasifikasikan sebagai aset lancar.

Estimasi piutang subsidi dari Pemerintah merupakan estimasi piutang subsidi atas penyaluran pupuk dari tahun 2020 sampai 2024. Lihat Catatan 2s dan 3g mengenai pengakuan pendapatan dan piutang subsidi.

Mutasi saldo piutang/(utang) subsidi Grup adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Saldo awal	10,482,676	17,082,861	*Beginning balance*
Penyesuaian	(24,962)	(94,654)	*Adjustment*
Subsidi Pemerintah (Catatan 23)	33,552,647	32,039,190	*Government subsidy (Note 23)*
PPN atas pendapatan	3,690,791	3,524,311	*VAT related to revenue*
Penerimaan dari Pemerintah	(42,291,595)	(37,721,752)	*Settlement from the Government*
PPN atas penerimaan	(4,696,049)	(4,169,003)	*VAT related to settlements*
PPh 22 atas penerimaan	(399,758)	(178,277)	*Income tax article 22 related to settlements*
Jumlah	313,750	10,482,676	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	(185,525)	(1,035,435)	*VAT out payable from unpaid subsidy receivables*
Ditambah:			*Add:*
Utang PPN keluaran atas utang subsidi kepada Pemerintah	157,928	-	*VAT payable related to subsidy payable to the Government*
	286,153	9,447,241	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan penurunan nilai	(104,168)	-	*Allowance for impairment*
Saldo akhir	**181,985**	**9,447,241**	***Ending balance***

Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan merupakan utang PPN atas penjualan subsidi yang penyelesaiannya akan dilakukan melalui saling hapus dengan porsi PPN atas pelunasan piutang subsidi.

Utang subsidi merupakan kelebihan pembayaran dari Pemerintah dikarenakan perbedaan harga subsidi per ton antara Kementerian Pertanian dengan hasil audit BPK-RI. Utang subsidi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.435.708 (2023: nihil).

6. SUBSIDY RECEIVABLES/(PAYABLES) (continued)

a. Subsidy receivables/(payables) from the Government of Indonesia (continued)

As at 31 December 2024, based on management's estimation, management is of the opinion that all of the 2024 subsidy receivables will be realised within the next 12 months, therefore all of these subsidy receivables are classified as current assets.

Estimated subsidy receivables from Government represent estimated receivable related to fertiliser distribution from 2020 up to 2024. Refer to Notes 2s and 3g regarding subsidy revenue and receivable recognition.

The movement of the subsidy receivables/(payable) of the Group are as follows:

VAT out payable from unpaid subsidy receivables is VAT payable from subsidy sales, settlement of which will be performed by offsetting VAT portion from settlement of subsidy receivables.

Subsidy payable is an overpayment from the Government due to the difference in the subsidised fertiliser price per tons between the Ministry of Agriculture and BPK-RI audit result. Subsidy payable as at 31 December 2024 was amounting to Rp1,435,708 (2023: nil).

6. PIUTANG/(UTANG) SUBSIDI (lanjutan)

a. Piutang/(utang) subsidi dari Pemerintah Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Kuantum Subsidi Pupuk Tahun 2022 oleh BPK-RI tertanggal 29 Mei 2023, terdapat selisih lebih salur atas kuantum penyaluran pupuk subsidi tahun 2022 sebanyak 40.491 ton yang diakibatkan karena belum terintegrasinya sistem penyaluran antara aplikasi T-Pubers dan Kartu Tani dengan nilai sebesar Rp164.810 yang disajikan sebagai piutang subsidi bagian tidak lancar. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, kelebihan volume penyaluran pupuk subsidi tersebut telah diverifikasi ulang oleh Grup dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Selanjutnya hasil verifikasi ulang tersebut perlu mendapat persetujuan dari BPK-RI.

Pada tahun 2020, terdapat 97.957 ton pendapatan pupuk subsidi yang masih dalam proses penelusuran kelengkapan bukti oleh BPK-RI. Menindaklanjuti hal ini, Grup telah memberikan seluruh bukti dokumen tambahan yang diminta di tahun 2021 dan berdasarkan hasil verifikasi lanjutan, terdapat penyesuaian pendapatan subsidi 2020 sebesar Rp296 berdasarkan notulen rapat tertanggal 3 Desember 2021. Berdasarkan notulen rapat tertanggal 9 Januari 2024, piutang subsidi tahun 2020 masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh BPK-RI. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih menunggu laporan BPK-RI terkait hal ini. Oleh karena itu, manajemen mereklasifikasi piutang subsidi dari porsi lancar menjadi porsi tidak lancar.

Secara umum, tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dianggap dapat diabaikan, sebab pihak debitur merupakan Pemerintah Republik Indonesia dan Grup memperoleh penggantian bunga atas keterlambatan pelunasan piutang subsidi ini. Namun, terkait dengan saldo piutang subsidi tahun 2020, 2022 dan 2023, dikarenakan ekspektasi jeda waktu atas proses verifikasi dan validasi data oleh BPK-RI, Grup telah mencadangkan provisi sejumlah Rp104.168 pada tanggal 31 Desember 2024.

6. SUBSIDY RECEIVABLES/(PAYABLES) *(continued)*

a. Subsidy receivables/(payables) from the Government of Indonesia *(continued)*

Based on the Minutes of Audit Results on the Year 2022 Subsidised Fertiliser Quantum Calculation by BPK-RI dated 29 May 2023, there were dfferences due to excess distribution of 40,491 tonnes as a result of disintegration of distribution system between T-Pubers application and Kartu Tani amounting to Rp164,810 which presented as a non-current portion of subsidy receivables. As of the issuance date of these consolidated financial statements, the excess volume of subsidy distribution had been re-verified by the Group and Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities of Ministry of Agriculture. Subsequently, the results of the re-verification are required to obtain approval from the BPK-RI.

In 2020, there were 97,957 tons of subsidised fertiliser revenue still under investigation by the BPK-RI for completeness of documentation. As a response, the Group provided all the requested additional documentation in 2021, and based on the results of the follow-up verification, there was an adjustment to the 2020 subsidy revenue amounting to Rp296, according to the minutes of the meeting dated 3 December 2021. Based on the minutes of the meeting dated 9 January 2024, the 2020 subsidy receivables are still under verification and validation by the BPK-RI. As of the completion date of these consolidated financial statements, management is still awaiting the BPK-RI report on this matter. Therefore, management has reclassified the subsidy receivables from current to non-current portion.

In substance, no impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. The credit risk on receivables from the fertiliser subsidy is considered negligible, since the counterparty is the Government of the Republic of Indonesia and the Group is compensated with interest reimbursement as a result of late payment of subsidy's receivables. However, regarding the subsidy receivables for year 2020, 2022 and 2023, due to the expected time lag in the process of verification and validation of data by BPK-RI, the Group has recorded the provision amounting to Rp104,168 as at 31 December 2024.

6. PIUTANG/(UTANG) SUBSIDI (lanjutan) / *SUBSIDY RECEIVABLES/(PAYABLES) (continued)*

b. Piutang subsidi yang belum ditagih / *Unbilled subsidy receivables*

Piutang subsidi yang belum ditagih adalah sebagai berikut:

Unbilled subsidy receivables were as follows:

	2024	2023	
Piutang subsidi belum ditagih	1,033,336	1,287,228	*Unbilled subsidy receivables*
Dikurangi:			*Less:*
Utang PPN keluaran atas piutang subsidi yang belum ditagih	(102,403)	(127,563)	*VAT out payable from unbilled subsidy receivables*
Jumlah	**930,933**	**1,159,665**	***Total***

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk subsidi ke distributor namun belum tersalurkan ke petani. Piutang ini akan diakui sebagai piutang subsidi pada periode dimana pupuk bersubsidi tersalurkan ke petani.

Unbilled subsidy receivables arise from the sales of subsidised fertiliser to distributors which have not yet distributed to the farmers. These receivables will be recognized as subsidy receivables in the period when the subsidized fertilizer is distributed to farmers.

7. PEKERJAAN DALAM PENYELESAIAN KONTRAK KONSTRUKSI - DARI PELANGGAN / *CONSTRUCTION CONTRACT WORK IN PROGRESS - DUE FROM CUSTOMERS*

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan adalah bagian dari kontrak aset yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Construction contract work in progress - due from customers is recognised as part of contract assets related to revenue from contracts with customers.

Rincian pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of construction contract work in progress - due from customers are as follows:

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 30)	214,116	408,323	*Related parties (Note 30)*
Pihak ketiga	155,828	121,490	*Third parties*
Jumlah	**369,944**	**529,813**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan atas individu dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa potensi kerugian atas jumlah tagihan bruto pelanggan tidak tertagih sangat minimum sehingga tidak terdapat provisi atas penurunan nilai jumlah tagihan bruto pelanggan yang dibukukan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Based on the assessment of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that there were minimal potential losses from uncollectible gross amount due from customers, hence there was no provision booked for the impairment of gross amount due from customers as at 31 December 2024 and 2023.

Rincian pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:

The details of construction contract work in progress - due from customers based on currencies are as follows:

	2024	2023	
Rp	164,195	342,020	*Rp*
USD	205,749	187,793	*USD*
Jumlah	**369,944**	**529,813**	***Total***

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan dijaminkan oleh Grup sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 15 dan 16).

Construction contract work in progress - due from customers is used by the Group as collateral for short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 16).

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

	2024	2023	
Barang jadi	8,869,458	11,154,266	*Finished goods*
Suku cadang dan bahan pembantu	2,753,635	2,705,608	*Spare parts and supporting materials*
Bahan baku	1,942,662	3,551,191	*Raw materials*
Persediaan barang dalam proses	501,838	589,044	*Work in process inventories*
Persediaan dalam perjalanan	711,007	175,242	*Inventories in transit*
	14,778,600	18,175,351	
Provisi penurunan nilai	(1,058,305)	(1,086,347)	*Provision for impairment*
Jumlah	**13,720,295**	**17,089,004**	***Total***

Mutasi provisi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movement of provision for impairment of inventories is as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	1,086,347	1,136,566	*Beginning balance*
Penambahan	163,440	72,798	*Addition*
Pemulihan	(185,720)	(92,629)	*Reversal*
Penghapusan	(5,762)	(30,388)	*Write-off*
Saldo akhir	**1,058,305**	**1,086,347**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa provisi tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari persediaan usang atau penurunan nilai.

Based on a review at the reporting date, the Group's management believes that the above provision is adequate to cover any losses from obsolescence or impairment of inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2024, persediaan barang jadi diasuransikan terhadap risiko kerugian, gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (semua risiko) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp10.901.823 dan USD21.930.000 (2023: Rp10.989.360 dan USD21.930.000). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

As at 31 December 2024, finished goods are covered by insurance against the risk of losses, earthquake, fire and other risks (all risks) with total sum insured of Rp10,901,823 and USD21,930,000 (2023: Rp10,989,360 dan USD21,930,000). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on inventories insured.

Persediaan dalam perjalanan merupakan pembelian bahan baku.

Inventories in transit represents purchase of raw materials.

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 15).

The inventories are used as collaterals for the short-term bank loans (Note 15).

9. ASET LANCAR LAINNYA / *9. OTHER CURRENT ASSETS*

	2024	2023	
Deposito berjangka lebih dari 3 bulan			***Time deposit more than 3 months***
Pihak berelasi			*Related parties*
BRI	5,610,162	4,051,000	*BRI*
BSI	1,165,500	1,837,000	*BSI*
BTN	1,150,000	600,000	*BTN*
BNI	808,600	500	*BNI*
PT Bank Mandiri Taspen	300,000	-	*PT Bank Mandiri Taspen*
Bank Mandiri	-	500,000	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			*Third party*
Bank BJB	790,000	282,000	*Bank BJB*
	9,824,262	7,270,500	

9. ASET LANCAR LAINNYA (lanjutan) / 9. OTHER CURRENT ASSETS (continued)

	2024	2023	
Kas yang dibatasi penggunaannya			***Restricted cash***
Pihak berelasi			*Related parties*
BRI	2,541,531	-	*BRI*
BNI	99,611	1,028,964	*BNI*
Bank Mandiri	58,987	33,784	*Bank Mandiri*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	7,239	5,859	*Others (each below Rp10,000)*
	2,707,368	1,068,607	
Pendapatan yang belum ditagihkan	357,379	813,174	*Unbilled revenue*
Piutang jasa konsesi - lancar	216,442	205,198	*Service concession receivables - current*
Dana titipan	-	171,671	*Entrusted funds*
Piutang retensi - lancar	10,825	17,299	*Retention receivables - current*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	28,322	25,424	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah aset lancar lainnya	**13,144,598**	**9,571,873**	***Total other current assets***

Grup memiliki kas yang dibatasi penggunaannya pada BNI yang diperuntukan untuk Perjanjian Pelayanan Jasa *Notional Pooling* ("PPJNP").

The Group has restricted cash in BNI for the Notional Pooling Service Agreement ("NPSA").

Kas yang dibatasi penggunaannya di BRI merupakan saldo giro terblokir oleh BRI dalam jangka waktu kurang dari satu tahun dimana Grup memperoleh pendapatan bunga atas saldo tersebut.

Restricted cash in BRI represents blocked current account balances by BRI for a period of less than one year which the Group earns interest income on these balances.

Kisaran tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka (jangka waktu lebih dari 3 bulan) adalah sebagai berikut:

The range of contractual interest rates per annum on time deposits (time period more than 3 months) are as follows:

	2024	2023	
Rp	2.75% - 6.95%	2.50% - 7.50%	*Rp*
USD	5.25%	-	*USD*

10. PERPAJAKAN / 10. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka / a. Prepaid taxes

	2024	2023	
Pajak penghasilan badan ("PPh badan")			***Corporate income tax ("CIT")***
Perusahaan			*The Company*
Pasal 28A			*Article 28A*
Tahun 2023	-	18,263	*Year 2023*
Tahun 2022	-	71,143	*Year 2022*
	-	89,406	
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pasal 28A			*Article 28A*
Tahun 2024	242,432	-	*Year 2024*
Tahun 2023	614,667	649,557	*Year 2023*
Tahun 2022	1,715	12,317	*Year 2022*
Tahun 2021	4,493	2,308	*Year 2021*
Tahun 2019	97,635	97,635	*Year 2019*
Tahun 2017	35,731	35,731	*Year 2017*
	996,673	797,548	

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / *TAXATION (continued)*

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan) / *Prepaid taxes (continued)*

	2024	2023	
Pajak lainnya:			***Other taxes:***
Perusahaan			*The Company*
PPN	23,495	3,456	*VAT*
Entitas anak			*Subsidiaries*
PPN	1,171,187	745,769	*VAT*
	1,194,682	749,225	
Jumlah	**2,191,355**	**1,636,179**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	**(812,897)**	**(746,802)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**1,378,458**	**889,377**	***Non-current portion***

b. Utang pajak / *Taxes payable*

	2024	2023	
PPh badan:			***CIT:***
Pasal 25/29	**207,819**	**95,346**	*Article 25/29*
Pajak lainnya:			***Other taxes:***
Pasal 21	60,173	341,772	*Article 21*
PPN	266,804	201,191	*VAT*
Pasal 22	22,301	35,830	*Article 22*
Pasal 23	27,869	19,036	*Article 23*
Pasal 4(2)	30,700	18,995	*Article 4(2)*
Lainnya	3,127	17,106	*Others*
	410,974	**633,930**	

c. Beban pajak penghasilan / *Income tax expenses*

	2024	2023	
Perusahaan:			***The Company:***
Pajak kini	94,401	75,584	*Current tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	31,837	-	*Prior year adjustment*
	126,238	75,584	
Entitas anak:			***Subsidiaries:***
Pajak kini	2,078,230	2,107,094	*Current tax*
Pajak tangguhan	154,784	94,098	*Deferred tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	(24,719)	76,738	*Prior year adjustment*
	2,208,295	2,277,930	
Konsolidasian:			***Consolidated:***
Pajak kini	2,172,631	2,182,678	*Current tax*
Pajak tangguhan	154,784	94,098	*Deferred tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	7,118	76,738	*Prior year adjustment*
	2,334,533	**2,353,514**	

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

***10. TAXATION** (continued)*

***c. Income tax expenses** (continued)*

The reconciliation between profit before income tax of the Company and estimated taxable income of the Company is as follows:

	2024	2023	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	11,220,571	8,607,073	*Consolidated profit before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(13,275,989)	(10,097,937)	*Profit before income tax of subsidiaries*
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasian	4,152,303	10,355,346	*Adjusted for consolidation elimination entries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	2,096,885	8,864,482	*Profit before income tax - the Company*
Koreksi fiskal:			*Fiscal corrections:*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(2,794,672)	(10,376,050)	*Income subject to final income tax*
Beban pokok pendapatan yang telah dikenakan pajak final	1,242,792	1,442,240	*Cost of revenues subject to final income tax*
(Pembalikan)/provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	(990,716)	70,243	*(Reversal)/provision for impairment of trade receivables and other receivables*
Provisi penurunan nilai investasi	-	127,975	*Provision for impairment of investment*
Bonus, insentif, dan tantiem	197,484	(150,270)	*Bonus, incentive and tantiem*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut perpajakan	677,321	364,942	*Non-deductible expenses*
Laba kena pajak	429,094	343,562	*Taxable income*
Pajak kini	94,401	75,584	*Current tax*
Pembayaran pajak di muka - Perusahaan:			*Prepaid taxes - the Company:*
Pasal 23	(54,345)	(35,142)	*Article 23*
Pasal 25	(24,339)	(58,705)	*Article 25*
Kurang bayar/(lebih bayar) pajak penghasilan badan - Perusahaan	15,717	(18,263)	*Underpayment/(overpayment) of corporate income tax - the Company*

Perusahaan merupakan *strategic investment holding* dengan penghasilan utama berupa dividen yang merupakan penghasilan bukan objek pajak. Dengan demikian, semua biaya yang terkait dengan dividen sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan.

The Company is a strategic investment holding whose main income is from dividend which is not a tax object. As such, all expenses incurred relating to dividend income are not deductible for taxation purpose.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian Grup dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup sebagai berikut:

The reconciliation between the Group's consolidated income tax expense and the theoretical tax amount on the Group's consolidated profit before income tax is as follows:

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / *10. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / *c. Income tax expenses (continued)*

	2024	2023	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	11,220,571	8,607,073	*Consolidated profit before income tax*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak efektif	2,468,526	1,893,556	*Income tax calculated at effective tax rates*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(1,955,379)	(1,228,173)	*Income subject to final income tax*
Beban pokok pendapatan yang telah dikenakan pajak final	937,600	1,081,756	*Cost of revenues subject to final income tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	978,969	429,826	*Non-deductible expenses*
Beban pajak final	25,675	1,406	*Final tax expense*
Bagian atas (laba)/rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(127,976)	98,405	*Share in net (profit)/loss of associates and joint ventures*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	7,118	76,738	*Adjustment of tax expense in respect of prior years*
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	**2,334,533**	**2,353,514**	***Consolidated income tax expenses***

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan / *d. Deferred tax assets and liabilities*

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *(Charged)/ credited to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	78,152	32,398	-	110,550	*Provision for impairment of trade receivables and other receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	90,183	4,942	(8,182)	86,943	*Post-employment benefit liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(102,665)	32,316	-	(70,349)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Aset hak-guna	842	583	-	1,425	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	(892)	(595)	-	(1,487)	*Lease liabilities*
Provisi penurunan nilai persediaan	66,993	(8,991)	-	58,002	*Provision for impairment of inventories*
Bonus, insentif, dan tantiem	54,023	1,083	-	55,106	*Bonus, incentive and tantiem*
Lain-lain	31,115	1,499	556	33,170	*Others*
Aset pajak tangguhan	**217,751**	**63,235**	**(7,626)**	**273,360**	*Deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan:					***Deferred tax liabilities:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha	72,292	(27,272)	-	45,020	*Provision for impairment of trade receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	485,767	18,822	98,211	602,800	*Post-employment benefits liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1,475,747)	(118,534)	-	(1,594,281)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Aset hak-guna	(345,203)	124,585	-	(220,618)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	271,218	(130,538)	-	140,680	*Lease liabilities*
Provisi penurunan nilai persediaan	172,575	(3,399)	-	169,176	*Provision for impairment of inventories*
Penurunan nilai investasi	12,522	(61,274)	-	(48,752)	*Impairment of investment*
Bonus, insentif, dan tantiem	221,573	(16,115)	-	205,458	*Bonus, incentive and tantiem*
Aset keuangan lainnya	(60,991)	84	-	(60,907)	*Other financial assets*
Lain-lain	(62,013)	(4,378)	(610)	(67,001)	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(708,007)**	**(218,019)**	**97,601**	**(828,425)**	*Deferred tax liabilities*
Jumlah – bersih	**(490,256)**			**(555,065)**	*Total – net*

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***10. TAXATION*** *(continued)*

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred tax assets and liabilities*** *(continued)*

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss***	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *(Charged)/ credited to other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	76,309	1,843	-	78,152	*Provision for impairment of trade receivables and other receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	113,914	(24,933)	1,202	90,183	*Post-employment benefit liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(165,651)	62,986	-	(102,665)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Aset hak-guna	259	583	-	842	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	(297)	(595)	-	(892)	*Lease liabilities*
Provisi penurunan nilai persediaan	68,471	(1,478)	-	66,993	*Provision for impairment of inventories*
Bonus, insentif, dan tantiem	76,822	(22,799)	-	54,023	*Bonus, incentive and tantiem*
Lain-lain	5,081	26,034	-	31,115	*Others*
Aset pajak tangguhan	**174,908**	**41,641**	**1,202**	**217,751**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan:					***Deferred tax liabilities:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha	73,934	(1,642)	-	72,292	*Provision for impairment of trade receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	328,539	48,339	108,889	485,767	*Post-employment benefits liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1,563,385)	87,638	-	(1,475,747)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Aset hak-guna	(469,788)	124,585	-	(345,203)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	401,756	(130,538)	-	271,218	*Lease liabilities*
Provisi penurunan nilai persediaan	180,886	(8,311)	-	172,575	*Provision for impairment of inventories*
Penurunan nilai investasi	13,402	(880)	-	12,522	*Impairment of investment*
Bonus, insentif, dan tantiem	302,618	(81,045)	-	221,573	*Bonus, incentive and tantiem*
Aset keuangan lainnya	(63,866)	2,875	-	(60,991)	*Other financial assets*
Lain-lain	87,574	(176,760)	27,173	(62,013)	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(708,330)**	**(135,739)**	**136,062**	**(708,007)**	***Deferred tax liabilities***
Jumlah - bersih	**(533,422)**			**(490,256)**	***Total - net***

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

***10. TAXATION** (continued)*

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

f. Surat ketetapan pajak

Berikut adalah status pemeriksaan pajak pada tanggal 31 Desember 2024:

f. Tax assessment letters

Below is the status of tax examinations as of 31 December 2024:

Entitas/ *Entity*	Jenis pajak/ *Type of taxes*	Tahun pajak dan status pada 31 Desember 2024/ *Fiscal year and status as at 31 December 2024*	Nilai sengketa/ *Amount of disputes*	Nilai yang dibayarkan/ *Amount paid*	Pajak dibayar di muka/ *Prepaid tax*	Provisi pajak/ *Tax provision*
PSP	PPh badan/*CIT*	2019 (Banding/*Appeal*)	97,635	-	97,635	-
PKC	PPh Badan/*CIT*	2017 (Keberatan/ *Objection*)	35,730	-	35,730	-
PKT	PPh badan/*CIT*	2019 (Banding/*Appeal*)	23,647	23,647	-	-
Rekind	PPh Badan/*CIT*	2014, 2017 (Peninjauan kembali/ *Judicial review*)	148,639	148,639	-	-
	Pajak lainnya/*Other taxes*	2014, 2017 (Peninjauan kembali/ *Judicial review*)	178,588	178,588	-	-

Grup berkeyakinan bahwa hasil banding dan keberatan tidak akan memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

The Group believes that the appeal and objection results will not have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

g. Tarif pajak

Undang-Undang No. 7/2021

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU No. 7/2021 memuat sejumlah perubahan aturan perpajakan antara lain membatalkan penurunan tarif PPh Badan sebelumnya dari 22% ke 20% di tahun pajak 2022, sehingga tarif PPh Badan tetap di 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, kenaikan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi sebesar 35% dengan penghasilan kena pajak diatas Rp5.000 berlaku mulai tahun pajak 2022, kenaikan bertahap tarif PPN menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 dan program pengungkapan sukarela wajib pajak.

Pada 1 Januari 2025, Pemerintah mengesahkan PMK 113/2024 yang mengatur tentang mekanisme dasar penerapan PPN 12%.

g. Tax rates

Law No. 7/2021

On 29 October 2021, the Government approved Law No. 7/2021 relating to Harmonisation of Tax Regulations. Law No. 7/2021 contains a number of changes to tax rules, including repealing the previous reduction in CIT rate from 22% to 20% in fiscal year 2022, so that the CIT rate remains at 22% for fiscal year 2022 onwards, an increase in the highest Personal Income Tax rate to 35% for taxable income above Rp5,000 from the 2022 fiscal year, a gradual increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and 12% no later than 1 January 2025 and a taxpayer voluntary disclosure programme.

On 1 January 2025, the Government ratified PMK 113/2024 which regulates the basic mechanism for implementing 12% VAT.

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Aturan model Pilar Dua *Organisation for Economic Cooperation and Development* ("OECD")

Pada tanggal 31 Desember 2024, Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024 ("PMK-136") diberlakukan di Indonesia, yurisdiksi tempat perusahaan didirikan, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Karena PMK-136 belum efektif pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki eksposur pajak saat ini yang terkait. Grup menerapkan pengecualian untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua, sebagaimana diatur dalam amandemen PSAK 212 yang diterbitkan pada Desember 2023.

Grup sedang dalam proses menilai apakah Grup termasuk dalam cakupan Model Pilar Dua dan apakah terdapat eksposur terhadap PMK-136. Karena kompleksitas dalam penerapan PMK-136 dan menghitung pendapatan *Global Anti-Base Erosion* ("GloBE"), dampak kuantitatif dari PMK-136 belum dapat diperkirakan secara wajar.

***10. TAXATION** (continued)*

h. Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules

On 31 December 2024, the Minister of Finance Regulation No. 136 Year 2024 ("PMK-136") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025. Since PMK-136 is not effective at the reporting date, the Group has no related current tax exposure. The Group applies the exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes, as provided in the amendment of SFAS 212 issued in December 2023.

The Group is in the process of assessing whether it is within the scope of Pillar Two model and if there is any exposure to the PMK-136 for when it comes into effect. Due to the complexities in applying the PMK-136 and calculating the Global Anti-Base Erosion ("GloBE") income, the quantitative impact of the enacted PMK-136 is not yet reasonably estimable.

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

	31 Desember/*December* 2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications**)	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation value***
Tanah	32,823,452	-	-	(60,361)	-	32,763,091	*Land*
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan dan prasarana	9,355,605	48,672	(7,565)	648,914	-	10,045,626	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan prasarana	59,801,758	625,519	(23,774)	2,791,459	-	63,194,962	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	3,880,289	63,231	(28,375)	12,670	-	3,927,815	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	562,758	24,127	(5,718)	33,604	-	614,771	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	1,397,353	142,490	(17,703)	30,830	-	1,552,970	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	624,486	74,248	-	37,560	-	736,294	*Ships and facilities*
Aset penyangga	1,092,778	181,163	-	62,753	-	1,336,694	*Supporting assets*
	109,538,479	1,159,450	(83,135)	3,557,429	-	114,172,223	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	709,296	24,130	(24,506)	-	-	708,920	*Land*
Bangunan dan prasarana	333,663	126,573	(233,751)	-	-	226,485	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	308,376	124,246	(108,576)	-	-	324,046	*Vehicles and heavy equipment*
	1,351,335	274,949	(366,833)	-	-	1,259,451	
Aset dalam penyelesaian	4,910,295	8,064,716	(13,070)	(3,655,611)	-	9,306,330	***Construction in progress***
	115,800,109	9,499,115	(463,038)	(98,182)	-	124,738,004	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	4,064,069	455,098	(7,521)	(3,861)	-	4,507,785	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan prasarana	31,504,984	4,105,872	(35,720)	-	-	35,575,136	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	1,742,696	165,250	(2,312)	-	-	1,905,634	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	378,971	32,883	(5,696)	-	-	406,158	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	1,049,390	100,960	(16,890)	-	-	1,133,460	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	444,540	53,946	-	-	-	498,486	*Ships and facilities*
Aset penyangga	457,931	86,127	-	-	-	544,058	*Supporting assets*
	39,642,581	5,000,136	(68,139)	(3,861)	-	44,570,717	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	68,363	34,756	(24,099)	-	-	79,020	*Land*
Bangunan dan prasarana	190,327	193,028	(233,225)	-	-	150,130	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	177,870	105,936	(106,396)	-	-	177,410	*Vehicles and heavy equipment*
	436,560	333,720	(363,720)	-	-	406,560	
	40,079,141	5,333,856	(431,859)	(3,861)	-	44,977,277	
Penurunan nilai	25,793	54,338	-	-	-	80,131	*Impairment*
	40,104,934	5,388,194	(431,859)	(3,861)	-	45,057,408	
Nilai buku bersih	**75,695,175**					**79,680,596**	***Net book value***

*) Pada tahun 2024, sejalan dengan perubahan fungsi dari aset tetap terkait, Grup melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dengan nilai sebesar Rp94.321.

**) In 2024, in line with changes of the function of its fixed assets, the Group reclassified from fixed assets to investment properties amounting to Rp94,321.*

11. ASET TETAP (lanjutan) / *11. FIXED ASSETS (continued)*

	31 Desember/*December* 2023						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications**)**	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai revaluasi							***Revaluation value***
Tanah	32,908,044	-	-	(84,592)	-	32,823,452	*Land*
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan dan prasarana	7,880,020	64,333	(2,904)	1,414,156	-	9,355,605	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan prasarana	56,639,219	372,275	(1,210)	2,791,474	-	59,801,758	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	3,850,520	10,672	-	19,097	-	3,880,289	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	521,641	44,527	(9,562)	6,152	-	562,758	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	1,202,824	141,896	(6,666)	59,299	-	1,397,353	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	526,502	228	-	97,756	-	624,486	*Ships and facilities*
Aset penyangga	991,491	99,306	(80)	2,061	-	1,092,778	*Supporting assets*
	104,520,261	733,237	(20,422)	4,305,403	-	109,538,479	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	561,483	149,217	(1,404)	-	-	709,296	*Land*
Bangunan dan prasarana	154,434	215,934	(36,705)	-	-	333,663	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	245,947	122,192	(59,763)	-	-	308,376	*Vehicles and heavy equipment*
	961,864	487,343	(97,872)	-	-	1,351,335	
Aset dalam penyelesaian	4,570,657	5,031,011	(140,885)	(4,550,488)	-	4,910,295	***Construction in progress***
	110,052,782	6,251,591	(259,179)	(245,085)	-	115,800,109	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	3,641,649	424,698	(2,278)	-	-	4,064,069	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan prasarana	27,931,160	3,575,034	(1,210)	-	-	31,504,984	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	1,457,993	284,703	-	-	-	1,742,696	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	361,970	26,563	(9,562)	-	-	378,971	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	924,104	131,549	(6,263)	-	-	1,049,390	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	373,213	71,327	-	-	-	444,540	*Ships and facilities*
Aset penyangga	437,914	20,017	-	-	-	457,931	*Supporting assets*
	35,128,003	4,533,891	(19,313)	-	-	39,642,581	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	37,655	31,823	(1,115)	-	-	68,363	*Land*
Bangunan dan prasarana	69,371	156,546	(35,590)	-	-	190,327	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	133,313	103,961	(59,404)	-	-	177,870	*Vehicles and heavy equipment*
	240,339	292,330	(96,109)	-	-	436,560	
	35,368,342	4,826,221	(115,422)	-	-	40,079,141	
Penurunan nilai	25,793	-	-	-	-	25,793	*Impairment*
	35,394,135	4,826,221	(115,422)	-	-	40,104,934	
Nilai buku bersih	**74,658,647**					**75,695,175**	***Net book value***

*) Pada tahun 2023, sejalan dengan perubahan fungsi dari aset tetap terkait, Grup melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dengan nilai sebesar Rp245.085.

**) In 2023, in line with changes of the function of its fixed assets, the Group reclassified from fixed assets to investment properties amounting to Rp245,085.*

11. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dialokasikan sebagai berikut:

***11. FIXED ASSETS** (continued)*

Depreciation expenses of fixed assets for the years ended 31 December 2024 and 2023 were allocated as follows:

	2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 25)	5,025,076	4,565,168	*Cost of revenues (Note 25)*
Beban penjualan (Catatan 26)	108,125	86,912	*Selling expenses (Note 26)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	200,655	174,141	*General and administrative expenses (Note 27)*
Jumlah	**5,333,856**	**4,826,221**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024, harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp15.857.641 (2023: Rp13.566.856).

As at 31 December 2024, the acquisition cost of fixed assets which have been fully depreciated and still being used are amounting to Rp15,857,641 (2023: Rp13,566,856).

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (semua risiko) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp18.707.737 dan USD3.873.046.309 (2023: Rp17.097.532 dan USD4.499.087.535). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As at 31 December 2024, fixed assets of the Group are insured against risks of earthquake, fire and other risks (all risks) with total sum insured amounting to Rp18,707,737 and USD3,873,046,309 (2023: Rp17,097,532 and USD4,499,087,535). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 15 dan 16).

Certain fixed assets are pledged as collateral for short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 16).

Revaluasi tanah

Revaluation of land

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat kenaikan signifikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi kelompok aset yang direvaluasi yang dicatat sebagai "Surplus revaluasi aset" yang terakhir dilakukan pada tahun 2022.

As at 31 December 2024 and 2023, there were no significant increases in the carrying amounts of the class of revalued assets recorded as the "Asset revaluation surplus" since the latest valuation performed in 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat tanah apabila menggunakan model biaya adalah masing-masing sebesar Rp668.756 dan Rp663.118.

As at 31 December 2024 and 2023, the carrying value of land using the cost model amounting to Rp668,756 and Rp663,118, respectively.

	Tingkat/pengukuran nilai wajar 31 Desember 2024 menggunakan/ *Level/fair value measurement at 31 December 2024 using*			
	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	Jumlah/ *Total*
Tanah/*Land*	-	32,763,091	-	32,763,091

Nilai wajar tingkat 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar. Data masukan yang digunakan diperoleh dari pasar yaitu harga jual per meter persegi atau harga sewa per meter persegi. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat perubahan hierarki nilai wajar.

The level 2 fair value of land is calculated using the market approach. Data inputs were obtained from the market which is sales price per square metre or rental price per square meter. For the years ended 31 December 2024 and 2023, there were no change in fair value hierarchy.

11. ASET TETAP (lanjutan) / *FIXED ASSETS (continued)*

Over-firing* pabrik Kaltim 5** / ***Over-firing Kaltim 5 plant

Pada tahun 2023, PKT menerima persetujuan dari perusahaan asuransi atas pembayaran klaim atas *over-firing* di dinding *primary reformer* di Pabrik Kaltim 5 Amonia sebesar Rp292.765. PKT mencatat klaim asuransi sebagai "Pendapatan lainnya – bersih – Denda dan klaim" di tahun 2023.

In 2023, PKT has received an approval from the insurance company for the claim payment of over-firing on the wall of the primary reformer at the Kaltim 5 Ammonia Plant amounting to Rp292,765. PKT recognised insurance claim as "Other income – net – Penalty and claim" in 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai aset dalam penyelesaian adalah sebesar Rp9.306.330 (2023: Rp4.910.295). Sebagian besar aset dalam penyelesaian diperkirakan akan selesai pada tahun 2025 dengan persentase penyelesaian saat ini antara 1% - 99%, kecuali untuk pembangunan pabrik Pusri-IIIB yang diperkirakan selesai di tahun 2027.

As at 31 December 2024, construction in progress was amounting to Rp9,306,330 (2023: Rp4,910,295). Most of the construction in progress are estimated to be completed in 2025 with current percentage of completion between 1% - 99%, except for the construction of Pusri-IIIB plant which is estimated to be completed in 2027.

Grup telah mengkapitalisasi biaya pinjaman masing-masing sebesar Rp154.810 dan Rp85.611 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023. Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkatan bunga antara 7,06% - 8,25%.

The Group has capitalised borrowing cost amounting to Rp154,810 and Rp85,611 for the years ended 31 December 2024 and 2023, respectively. Borrowing costs were capitalised at the rate of 7.06% - 8.25%.

Hak atas tanah diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir antara tahun 2029 sampai dengan tahun 2045. Mengacu pada praktik di masa lalu, Grup memiliki keyakinan dapat memperpanjang HGB tersebut.

Land rights are held under renewable Building Right Titles ("HGB") which will expire between 2029 up to 2045. Based on historical practices, the Group believes that it can renew these HGB.

Keuntungan/(kerugian) atas pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Gain/(loss) on disposal of fixed assets for the years ended 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	2023	
Nilai jual	44,665	117	*Selling price*
Nilai buku	(31,179)	(143,757)	*Book value*
Keuntungan/(kerugian) bersih	13,486	(143,640)	*Net gain/(loss)*

12. UTANG USAHA / *TRADE PAYABLES*

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 30)	338,205	596,107	*Related parties (Note 30)*
Pihak ketiga	1,997,138	2,972,982	*Third parties*
Jumlah	**2,335,343**	**3,569,089**	***Total***

Di 2024, utang usaha Rekind kepada beberapa pemasok telah direstrukturisasi dengan termin pembayaran menjadi 3 - 25 tahun tanpa bunga. Restrukturisasi tersebut berdasarkan keputusan homologasi tertanggal 31 Januari 2024. Utang usaha Rekind yang direstrukturisasi tersebut disajikan sebagai liabilitas tidak lancar lainnya.

In 2024, Rekind's trade payables to several vendors have been restructured with payment term of 3 - 25 years with no interest. The restructuring was based on the homologation decision dated 31 January 2024. Rekind's restructured trade payables were presented as other non-current liabilities.

12. UTANG USAHA (lanjutan) / *TRADE PAYABLES (lanjutan)*

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies are as follows:

	2024	2023	
Rp	1,847,729	2,708,821	*Rp*
USD	467,012	852,848	*USD*
EUR	16,768	3,583	*EUR*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	3,834	3,837	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	**2,335,343**	**3,569,089**	***Total***

Saldo utang usaha merupakan utang atas pembelian bahan baku, bahan pembantu, suku cadang, dan jasa.

Trade payables are payable for the procurement of raw materials, supporting materials, spare parts and services.

13. UTANG LAINNYA / *OTHER PAYABLES*

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 30)	34,314	34,584	***Related parties (Note 30)***
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Liabilitas kontrak	386,975	276,750	*Contract liabilities*
Pendapatan diterima di muka	283,676	281,831	*Unearned revenue*
Utang iuran	179,865	377,919	*Contribution payables*
Utang salam	150,000	-	*Salam payables*
Utang retensi	100,190	108,483	*Retention payables*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	129,801	125,133	*Others (each below Rp10,000)*
	1,230,507	1,170,116	
Jumlah	**1,264,821**	**1,204,700**	***Total***

14. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PROVISI / *ACCRUED LIABILITIES AND PROVISIONS*

a. Liabilitas yang masih harus dibayar / *Accrued liabilities*

	2024	2023	
Biaya bahan bakar dan gas alam	3,178,383	2,187,478	*Fuel and natural gas costs*
Bahan baku non-gas	1,989,027	1,857,141	*Non-gas raw materials*
Biaya proyek	1,681,902	1,449,463	*Project costs*
Biaya distribusi	958,042	597,434	*Distribution costs*
Akrual atas kurang bayar pengadaan gas bumi	714,070	-	*Accrual for underpayment of natural gas procurement*
Pembelian aset tetap	646,039	429,191	*Purchase of fixed assets*
Jasa	144,540	83,754	*Services*
Bunga pinjaman	111,683	186,262	*Interest expenses*
Sewa kapal	54,664	17,521	*Ship rental*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp50.000)	65,353	33,778	*Others (each below Rp50,000)*
Jumlah	**9,543,703**	**6,842,022**	***Total***

14. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PROVISI (lanjutan) / *ACCRUED LIABILITIES AND PROVISIONS (lanjutan)*

b. Provisi / *Provisions*

	2024	2023	
Provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi	-	1,691,907	*Provision for underpayment of natural gas procurement*
Provisi kerugian terkait proyek RDMP JO	523,608	-	*Provision for loss related to RDMP JO project*
Provisi *liquidated damage*	195,342	1,338,159	*Provision for liquidated damage*
Provisi kontrak merugikan	141,580	384,278	*Provision for onerous contract*
Jumlah	**860,530**	**3,414,344**	***Total***

Perubahan provisi adalah sebagai berikut: / *The movement in the provisions are as follows:*

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dibebankan/ (dikreditkan) pada laba rugi/ *Charged/(credited) to profit or loss**)***	**Realisasi selama tahun berjalan/ *Realisation during the year***	**Selisih kurs/ *Foreign exchanges***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Provisi kerugian terkait proyek RDMP JO	-	523,608	-	-	523,608	*Provision for loss related to RDMP JO project*
Liquidated damage	1,338,159	(1,142,817)	-	-	195,342	*Liquidated damage*
Kontrak yang merugikan	384,278	99,258	(341,956)	-	141,580	*Onerous contract*
Kurang bayar pengadaan gas bumi	1,691,907	(1,734,876)	(38,904)	81,873	-	*Underpayment of natural gas procurement*
Jumlah	**3,414,344**	**(2,254,827)**	**(380,860)**	**81,873**	**860,530**	*Total*

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dibebankan/ (dikreditkan) pada laba rugi/ *Charged/(credited) to profit or loss**)***	**Realisasi selama tahun berjalan/ *Realisation during the year***	**Selisih kurs/ *Foreign exchanges***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Kurang bayar pengadaan gas bumi	1,798,475	278,790	(356,483)	(28,875)	1,691,907	*Underpayment of natural gas procurement*
Liquidated damage	1,400,826	(62,667)	-	-	1,338,159	*Liquidated damage*
Kontrak yang merugikan	431,820	51,925	(99,467)	-	384,278	*Onerous contract*
Sengketa pajak	40,953	-	(40,953)	-	-	*Tax dispute*
Jumlah	**3,672,074**	**268,048**	**(496,903)**	**(28,875)**	**3,414,344**	*Total*

*) Termasuk dampak perubahan kurs/*Including foreign exchange impact*

Kurang bayar pengadaan gas bumi

Grup mengakui adanya kurang bayar pengadaan gas bumi pada tanggal 31 Desember 2024, seperti yang dijelaskan pada Catatan 36c, sebesar Rp714.070 yang dicatat sebagai liabilitas yang masih harus dibayar (2023: Rp1.691.907 yang dicatat sebagai provisi). Beban dan pemulihan provisi ini dibukukan sebagai bagian dari "Beban pokok pendapatan".

Underpayment of natural gas procurement

The Group recognised underpayment of natural gas procurement as of 31 December 2024, as described in Note 36c, amounting to Rp714,070 recorded as accrued liabilities (2023: Rp1,691,907 recorded as provision). This provision and recovery were booked as part of "Cost of revenues".

14. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PROVISI (lanjutan)

b. Provisi (lanjutan)

Liquidated damage

Grup memiliki kewajiban kontraktual untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat indikasi bahwa proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka Grup akan mencatatkan provisi atas potensi keterlambatan *liquidated damage* yang dapat dikenakan oleh pemilik proyek. Provisi diakui sebesar nilai dari perkiraan hari keterlambatan penyelesaian proyek dikalikan dengan tarif spesifik yang berlaku berdasarkan kontrak proyek. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah provisi sebesar Rp195.342 (2023: Rp1.338.159). Pemulihan atau beban provisi ini dibukukan sebagai penambah atau pengurang pendapatan.

Provisi tersebut dapat berubah apabila Grup mendapatkan perpanjangan waktu dari pemilik proyek dan/atau terjadi perubahan estimasi waktu penyelesaian.

Kontrak yang merugikan

Grup memiliki beberapa kontrak dengan indikasi rugi pada akhir proyek. Sebagian besar kerugian yang diestimasi merupakan nilai pekerjaan tambahan (*change order*) yang belum disetujui oleh pemilik proyek. Nilai provisi diakui sebesar total biaya yang dibutuhkan hingga kontrak selesai dikurangi dengan nilai kontrak yang sudah disetujui. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah provisi yang diperkirakan sebesar Rp141.580 (2023: Rp384.278). Beban provisi ini dibukukan sebagai bagian dari "Beban pokok pendapatan".

Provisi tersebut dapat berubah apabila Grup mendapatkan persetujuan pekerjaan tambahan dari pemilik proyek dan/atau terjadi perubahan estimasi total biaya yang dibutuhkan hingga penyelesaian kontrak.

Provisi kerugian proyek RDMP JO

Pada tanggal 31 Desember 2024, bagian Grup atas rugi proyek RDMP Balikpapan JO ("RDMP JO") melebihi jumlah tercatat investasinya, sehingga Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian lebih lanjut. Namun, dikarenakan Grup memiliki kewajiban konstruktif atas nama RDMP JO, Grup mengakui tambahan kerugian tersebut dan mencatat provisi sebesar Rp523.608.

***14. ACCRUED LIABILITIES AND PROVISIONS** (continued)*

***b. Provisions** (continued)*

Liquidated damage

The Group has contractual liabilities to complete their projects within the scheduled period. The Group has recorded provisions for potential delay liquidated damages that might be charged by the project owners if there were indications that the projects cannot be completed within the scheduled period. The provision is recognised for the amount estimated from delay on project schedule days multiplied by the applicable charge rate stated in the project contract. As of 31 December 2024, the total provision was amounting to Rp195,342 (2023: Rp1,338,159). The recovery or provision was recorded as revenue addition or deduction.

The provision stated above may change due to extension of time received by the Group from project owner and/or changes in estimated time of completion.

Onerous contract

The Group has several contracts which might be onerous by the end of projects. Most of the estimated loss represent the amount of additional work (change order) which has not been approved by the project owners. Provision was recognised for the amount estimated from total cost required to complete the project deducted by the approved contract value. As of 31 December 2024, the total provision is amounting to Rp141,580 (2023: Rp384,278). This provision was booked as part of "Cost of revenues".

The provision stated above may change due to approval of additional work from project owners and/or changes in estimated total cost required until completion of the contract.

Provision for loss of RDMP JO project

As at 31 December 2024, the Group's share of losses of RDMP JO project exceeded its carrying amount of investment, therefore the Group discontinued recognising its share of further losses. However, due to the Group has constructive obligations on behalf of the RDMP JO, the Group recognised the additional losses and recorded provision of Rp523,608.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK / *15. SHORT-TERM BANK LOANS*

	2024	2023	
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Mandiri	2,506,112	1,072,236	*Bank Mandiri*
BNI	382,878	997,499	*BNI*
BTN	3,034	7,485	*BTN*
BRI	2,652	79,320	*BRI*
BSI	2,613	-	*BSI*
	2,897,289	2,156,540	
Pihak ketiga			***Third parties***
CIMB	655,233	208,396	*CIMB*
BCA	503,104	1,779	*BCA*
SMBC	62,876	674,938	*SMBC*
Bank Panin	28,641	51,358	*Bank Panin*
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	23,742	26,982	*PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")*
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")	21,709	71,998	*PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")*
HSBC	-	74,074	*HSBC*
Bank BJB	-	48,563	*Bank BJB*
Bank Permata	-	30,000	*Bank Permata*
Bank DKI	-	11,709	*Bank DKI*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	17,381	-	*Others (each below Rp10,000)*
	1,312,686	1,199,797	
Jumlah pinjaman jangka pendek saldo Rp	4,209,975	3,356,337	*Total short-term loan in Rp amount*
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Mandiri	-	2,384,863	*Bank Mandiri*
BRI	-	920,619	*BRI*
BNI	-	670,812	*BNI*
Jumlah pinjaman jangka pendek saldo USD	-	3,976,294	*Total short-term loan in USD amount*
Jumlah	**4,209,975**	**7,332,631**	***Total***

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Informasi lain mengenai fasilitas pinjaman bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

***15. SHORT-TERM BANK LOANS** (continued)*

Other information relating to short-term bank loans facilities as at 31 December 2024 is as follows:

Kreditur/*Creditors**)	Jadwal pembayaran/ *Repayment schedule*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rates per annum*
Bank Mandiri	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 5.70% - 10.00%
BRI	Maks. 180 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 180 days after withdrawal date*	IDR: 11.45%
BNI	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: JIBOR 3 bulan/*months* + 1.8%
BTN	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 9.90%
Panin	90 - 240 hari setelah tanggal penarikan/*90 - 240 days after withdrawal date*	IDR: Ditentukan setiap penarikan/ *Determined on each withdrawal*
SMBC	Maks. 5 bulan setelah penarikan/*Max. 5 months after withdrawal date*	IDR: 4.65%
OCBC	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 8.50%
ICBC	180 - 360 hari setelah tanggal penarikan/*180 - 360 days after withdrawal date*	IDR: 9.50%
BCA	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 6.00%
CIMB Niaga	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 6.25% - 8.75%
BSI	Maks. 12 bulan setelah tanggal penarikan/*Max. 12 months after withdrawal date*	IDR: 4.00%

*) Lihat Catatan 16 untuk rincian perjanjian pinjaman bank jangka panjang/*See Note 16 for the detail of long-term bank loans agreements.*

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Liabilitas *supplier financing* adalah liabilitas kepada bank yang timbul akibat pembayaran yang dilakukan oleh bank atas transaksi pembelian yang dilakukan Grup dengan pemasok, sesuai dengan ketentuan perjanjian antara Grup dengan bank. Seluruh liabilitas *supplier financing* didenominasikan dalam mata uang USD dan Rp. Selama tahun 2024, bank telah melakukan pembayaran secara langsung kepada pemasok gas bumi atas instruksi Grup dengan menggunakan fasilitas *supplier financing* sebesar USD174.101.284 (ekuivalen dengan Rp2.733.427). Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh liabilitas *supplier financing* telah dilunasi oleh Grup kepada bank.

***15. SHORT-TERM BANK LOANS** (continued)*

Supplier financing liabilities are liabilities to the banks which arose from the payments made by the banks for the Group's purchases from suppliers, in accordance with the agreement between the Group and the banks. All the supplier financing liabilities are denominated in USD and Rp currencies. During 2024, the banks made direct payments to natural gas suppliers based on the Group's instructions using supplier financing facilities amounting to USD174,101,284 (equivalent to Rp2,733,427). As of 31 December 2024, all supplier financing liabilities were paid by the Group to the banks.

Rentang tanggal jatuh tempo pembayaran/ ***Range of payment due dates***	**2024**
Liabilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok/ *Liabilities under supplier financing arrangement*	1 - 180 hari setelah tanggal faktur/ *days after invoice date*
Utang usaha sejenis yang bukan merupakan bagian dari pembiayaan pemasok (lini bisnis yang sama)/ *Comparable trade payables that are not part of the supplier financing arrangement (same line of business)*	14 - 21 hari setelah tanggal faktur/ *days after invoice date*

Nilai tercatat liabilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok/ ***Carrying amount of liabilities under supplier financing arrangement***	**2024**
Liabilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok/ *Liabilities under supplier financing arrangement*	-
Jumlah yang vendor telah terima dari penyedia pembiayaan/ *The amount of which the suppliers have received payment from the banks*	2,733,427

Informasi lain yang signifikan terkait dengan fasilitas *supplier financing* adalah sebagai berikut:

Other significant information related to supplier financing facilities were as follows:

Kreditur/*Creditors*	**Jadwal pembayaran/** ***Repayment schedule***	**Tingkat suku bunga per tahun/** ***Interest rates per annum***	**Jumlah fasilitas/** ***Facility amount***
BRI	Maks. 180 hari setelah tanggal penarikan/ *Max. 180 days after withdrawal date*	JIBOR 3 bulan/*months* + 1.80%	3,900,000 (*Interchangeable* dengan fasilitas KMK dan lainnya/*Interchangeable with KMK and other facilities*)
BNI	Maks. 159 hari setelah tanggal penarikan/ *Max. 159 days after withdrawal date*	JIBOR 3 bulan/*months* + 1.80%	750,000 (*Interchangeable* dengan fasilitas KMK dan lainnya/*Interchangeable with KMK and other facilities*)

Jaminan pinjaman bank jangka pendek berupa piutang usaha (Catatan 5), piutang subsidi (Catatan 6), pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi (Catatan 7), persediaan (Catatan 8), dan aset tetap (Catatan 11).

The short-term bank loans collateral are trade receivables (Note 5), subsidy receivables (Note 6), construction contract work in progress - due from customers for construction contract work (Note 7), inventories (Note 8) and fixed assets (Note 11).

Dana yang diperoleh dari pinjaman bank jangka pendek digunakan untuk modal kerja dan pendanaan kegiatan umum. Grup mengawasi berbagai rasio yang diharuskan oleh pemberi pinjaman sehingga Grup tidak melanggar perjanjian untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

The funds received from short-term bank loans are used for working capital and general corporate funding. The Group monitors various ratios as required by the lenders so that the Group does not breach covenants on any borrowing facilities.

Sepanjang tahun 2024, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman jangka pendek sejumlah Rp17.973.760 (2023: Rp7.703.360).

In 2024, the Group has paid short-term bank loans amounting to Rp17,973,760 (2023: Rp7,703,360).

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG / *16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS*

	2024	2023	
Pinjaman bank	5,233,032	12,608,607	*Bank loans*
Pinjaman sindikasi	4,100,016	2,339,694	*Syndicated loans*
Pinjaman dari non-bank	30,373	35,388	*Non-bank loans*
	9,363,421	**14,983,689**	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(1,376,976)**	**(1,524,210)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**7,986,445**	**13,459,479**	***Non-current portion***

Pinjaman bank / *Bank loans*

	2024	2023	
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
BNI	2,580,000	3,347,668	*BNI*
Bank Mandiri	1,013,806	2,776,357	*Bank Mandiri*
BRI	53,453	12,696	*BRI*
BSI	41,372	32,907	*BSI*
	3,688,631	6,169,628	
Pihak ketiga			***Third parties***
SMBC	515,971	2,064,816	*SMBC*
Bank DKI	400,000	1,000,000	*Bank DKI*
Bank Jatim	293,400	-	*Bank Jatim*
Bank Muamalat	44,280	43,438	*Bank Muamalat*
BCA	5,432	1,836,906	*BCA*
Bank CIMB	-	698,307	*Bank CIMB*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	56,090	-	*Others (each below Rp10,000)*
	1,315,173	5,643,467	
Jumlah pinjaman bank saldo Rp	5,003,804	11,813,095	*Total bank loan in Rp amount*
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related party***
Bank Mandiri	-	479,987	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			***Third party***
SMBC	229,228	315,525	*SMBC*
Jumlah pinjaman bank saldo USD	229,228	795,512	*Total bank loan in USD amount*
Jumlah pinjaman bank	5,233,032	12,608,607	*Total bank loan*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(363,547)**	**(1,311,498)**	***Short-term portion***
Bagian jangka panjang	**4,869,485**	**11,297,109**	***Long-term portion***

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Di 2024, pinjaman jangka panjang Rekind senilai Rp890.109 adalah nilai kini dari pinjaman yang telah direstrukturisasi dengan termin pembayaran menjadi 20 tahun dengan tingkat suku bunga 2%-3,5% per tahun yang dibayarkan setiap kuartal. Restrukturisasi tersebut berdasarkan keputusan homologasi tertanggal 31 Januari 2024.

Informasi yang signifikan terkait dengan pinjaman bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)

In 2024, Rekind's long-term loans amounting to Rp890,109 represented the present value of loans which have been restructured with payment term of 20 years with an interest rate of 2%-3.5% per annum which are payable quarterly. The restructuring was based on the homologation decision dated 31 January 2024.

Significant information related to long-term bank loans as at 31 December 2024 were as follows:

Kreditur/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Facilities type*	Fasilitas/ *Facilities*	Periode jatuh tempo/ *Maturity period*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rates*	Jaminan/ *Collateral*
Bank Mandiri	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp450,000	18 November 2026	Suku bunga saat penarikan/*Interest rate at withdrawal date*	*Negative pledge*
		Rp3,141,000	23 Maret/*March* 2029	2.00%	Fidusia piutang/*Fiduciary receivables*
	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp5,416,000	5 April 2025	10.00%	Alat berat/*Heavy equipment*
		Rp1,112,000	11 August 2025	11.25%	Alat berat/*Heavy equipment*
	- Bank garansi/*Bank guarantee*	Rp229,267	23 Maret/*March* 2029	2.00%	Fidusia piutang/*Fiduciary receivables*
		USD27,363,000	23 Maret/*March* 2029	2.00%	Fidusia piutang/*Fiduciary receivables*
		Rp5,300,000	4 April/April 2026	*Tanpa bunga/interest-free*	Agunan tunai/*cash collateral*
Bank Muamalat	- *Line facility*	Rp43,436	28 Februari/ *February* 2021*)	11.00%	Tidak ada jaminan/*No collateral*
BNI	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp6,211,063	20 September 2026	IDR: JIBOR 3 bulan/ *months* + 1.00%	*Negative pledge*
SMBC	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp3,990,000	29 Januari/ *January* 2026	IDR: JIBOR 3 bulan/ *months* + 1.60% USD: *Cost of fund* 3 bulan/*months* +1.50%	Tanpa jaminan/*Clean basis*
		Rp600,000	31 Oktober/ *October* 2025	IDR: JIBOR 3 bulan/ *months* + 1.60%	*Negative pledge*
BCA	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp7,100,000	28 November/ *November* 2027	Suku bunga saat penarikan/*Interest rate at withdrawal date*	Tanpa jaminan/*Clean basis*
Bank DKI	- Kredit modal kerja aflopend/ *Working capital loan aflopend*	Rp200,000	31 Januari/ *January* 2026	8.00%	Tanpa jaminan/*Clean basis*
	- Kredit modal kerja aflopend/ *Working capital loan aflopend*	Rp200,000	31 Januari/ *January* 2028	8.00%	Tanpa jaminan/*Clean basis*

*) YIN mengikuti proses PKPU dan mencapai homologasi dengan para kreditur pada tahun 2021, sehingga fasilitas diatas tidak lagi berlaku. Pinjaman yang tersisa akan dibayarkan mengikuti keputusan homologasi.

*) *YIN followed the PKPU process and reached homologation with its creditors in 2021, resulting facilities above no longer effective. The outstanding loans are to be paid in accordance with the homologation result.*

Pinjaman sindikasi / *Syndicated loans*

	31 Desember/*December* 2024			
	Jumlah mata uang asing (nilai penuh)/ *Amount of foreign currency (full amount)*	Ekuivalen Rp/*Rp equivalent*		
		Jumlah/ *Total*	Jangka pendek/ *Current*	Jangka panjang/ *Non-current*
Pihak berelasi/*Related parties*				
BNI (Rp)	-	863,475	(43,722)	819,753
Bank Mandiri (Rp)	-	841,002	(43,722)	797,280
BSI (Rp)	-	510,249	(38,057)	472,192
Bank Mandiri (USD)	USD26,685,931	431,298	(431,298)	-
BRI (Rp)	-	254,710	-	254,710
BTN (Rp)	-	229,227	-	229,227
		3,129,961	(556,799)	2,573,162
Pihak ketiga/*Third parties*				
ICBC (USD)	USD26,685,931	431,298	(431,298)	-
BCA (Rp)	-	254,710	-	254,710
BJB (Rp)	-	164,797	-	164,797
Bank Sumsel Babel (Rp)	-	119,250	-	119,250
		970,055	(431,298)	538,757
Jumlah/*Total*		4,100,016	(988,097)	3,111,919

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan) / *16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)*

Pinjaman sindikasi (lanjutan) / *Syndicated loans (continued)*

	31 Desember/*December* 2023			
	Jumlah mata uang asing (nilai penuh)/ *Amount of foreign currency (full amount)*	Ekuivalen Rp/*Rp equivalent*		
		Jumlah/ *Total*	Jangka pendek/ *Current*	Jangka panjang/ *Non-current*
Pihak berelasi/*Related parties*				
BNI (Rp)	-	451,307	(20,442)	430,865
Bank Mandiri (Rp)	-	444,794	(20,442)	424,352
Bank Mandiri (USD)	USD26,754,648	412,450	(64,182)	348,268
BSI (Rp)	-	322,291	(20,442)	301,849
BRI (Rp)	-	73,821	-	73,821
BTN (Rp)	-	66,436	-	66,436
		1,771,099	(125,508)	1,645,591
Pihak ketiga/*Third parties*				
ICBC (USD)	USD26,754,648	412,450	(64,182)	348,268
BCA (Rp)	-	73,821	-	73,821
BJB (Rp)	-	47,762	-	47,762
Bank Sumsel Babel (Rp)	-	34,562	-	34,562
		568,595	(64,182)	504,413
Jumlah/*Total*		2,339,694	(189,690)	2,150,004

Informasi lain mengenai pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Other information related to syndicated loans as at 31 December 2024 were as follows:

Kreditur/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Facilities type*	Fasilitas/ *Facilities*	Periode jatuh tempo/ *Maturity period*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rates*	Jaminan/ *Collateral*
BRI	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp850,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
	- *Interest During Construction* ("IDC")	Rp150,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
Bank Mandiri	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp1,825,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
		Rp718,000	6 Oktober/ *October* 2029	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.75%	Aset tetap/*Fixed assets*
	- IDC	Rp325,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
BSI	- *Musyarakah Mutanaqishah*	Rp359,000	6 Oktober/ *October* 2029	*Hishshah (ownerhip share)*	Aset tetap/*Fixed assets*
	- Kredit Investasi/*Investment loan*	Rp900,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
BNI	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp1,900,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
		Rp718,000	6 Oktober/ *October* 2029	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.75%	Aset tetap/*Fixed assets*
	- IDC	Rp350,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
BCA	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp850,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
	- IDC	Rp150,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
BTN	- Kredit Investasi/*Investment loan*	Rp765,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B plant*
	- IDC	Rp135,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pinjaman sindikasi (lanjutan)

Informasi lain mengenai pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)

Syndicated loans (continued)

Other information related to syndicated loans as at 31 December 2024 were as follows:

Kreditur/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Facilities type*	Fasilitas/ *Facilities*	Periode jatuh tempo/ *Maturity period*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rates*	Jaminan/ *Collateral*
BJB	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp550,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B plant*
	- IDC	Rp100,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
BPD Sumsel	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp398,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B plant*
	- IDC	Rp69,000	13 Oktober/ *October* 2034	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,30%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
ICBC	- Pinjaman jangka panjang/ *Long-term loan*	USD37,350,000	30 Desember/ *December* 2025	*Term* SOFR 3 bulan/ *months* + 3.25%	Tanah dan bangunan, mesin dan peralatan yang dibiayai kreditur dan piutang PLN sesuai PPA/*Land and building, machine and equipment funded by creditor and receivables from PLN based on PPA*
	- Pinjaman jangka pendek/ *Short-term loan*	Rp27,000	6 Oktober/ *October* 2029	9.50%	Tanah dan bangunan, mesin dan peralatan yang dibiayai kreditur dan piutang PLN sesuai PPA/*Land and building, machine and equipment funded by creditor and receivables from PLN based on PPA*

Sesuai dengan perjanjian pinjaman sindikasi, Grup diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan antara lain rasio lancar, *debt to equity ratio*, dan *debt service coverage ratio*. Grup juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Grup telah memenuhi batasan rasio keuangan dan non-keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

As specified by the syndicated loan agreements, the Group is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants which are current ratio, debt to equity ratio, and debt service coverage ratio. The Group is also required to comply with certain terms and conditions in relation to its Articles of Association, the nature of business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters. The Group complied with the financial and non-financial ratio covenants as of 31 December 2024 and 2023.

Pinjaman dari non-bank

Non-bank loans

	2024	2023	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pemerintah RI (RDI-373)	34,049	34,049	*Government of RI (RDI-373)*
Pemerintah RI (RDI-014)	12,309	12,309	*Government of RI (RDI-014)*
Pemerintah RI (Bappenas)	6,187	6,187	*Government of RI (Bappenas)*
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")	2,809	2,809	*Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")*
	55,354	55,354	
Dikurangi: Selisih nilai wajar yang belum diamortisasi	(24,981)	(19,966)	*Less: Unamortised difference of fair value*
	30,373	35,388	
Dikurangi: **Bagian jangka pendek**	**(25,332)**	**(23,022)**	*Less:* ***Current portion***
Bagian jangka panjang	**5,041**	**12,366**	***Non-current portion***

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pinjaman dari non-bank (lanjutan)

Informasi lain mengenai pinjaman dari non-bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

***16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS** (continued)*

Non-bank loans (continued)

Other information related to non-bank loans as at 31 December 2024 were as follows:

Kreditur/ ***Creditors***	**Jumlah fasilitas/** ***Total facilities***	**Jadwal pembayaran/** ***Repayment schedule***	**Tingkat suku bunga/** ***Interest rates***
Pemerintah/ *Government*			
RDI - 373	20 tahun/*years*	Tahunan, setiap tanggal 30 Oktober 2019 - 30 Oktober 2038/*Annually, every 30 October 2019 - 30 October 2038*	0%
RDI - 014	20 tahun/*years*	Tahunan, setiap tanggal 30 Oktober 2019 - 30 Oktober 2038/*Annually, every 30 October 2019 - 30 October 2038*	0%

Informasi lainnya

Pada tahun 2024, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang sebesar Rp9.645.714 (2023: Rp7.623.638).

Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank, Grup diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman bank, kecuali Pilog. Berikut ini adalah surat pembebasan atas kewajiban-kewajiban tertentu untuk pinjaman jangka panjang dan pendek.

Other information

In 2024, the Group has paid long-term bank loans and other loans amounting to Rp9,645,714 (2023: Rp7,623,638).

As specified by the bank loan agreements, the Group is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. As at 31 December 2024, the Group had complied with the covenants stipulated in the bank loan agreements, except for Pilog. Below is the waiver letters from certain obligations obtained for long-term and short-term loans.

Nama entitas/ ***Entity name***	**Rasio keuangan/** ***Financial ratio***	**Kreditur/** ***Creditor***	**Jenis fasilitas/** ***Facility type***	**Saldo pinjaman/** ***Loan balance***	**Tanggal penerimaan surat *waiver*/** ***Date of waiver letter received***
Pilog	*Interest service coverage ratio, current ratio, gearing ratio, short-term loan<adjusted working capital*	SMBC	*Loan on note APF (Accelerated Payment Facility)*	62,876	Diterima pada/*Obtained on* 21 Januari/*January* 2025

17. UTANG OBLIGASI / *17. BONDS PAYABLE*

	2024	2023	
Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021	2,400,000	2,750,000	*Shelf Registration Bonds II Phase II PTPI Year 2021*
Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020	1,289,685	1,289,685	*Shelf Registration Bonds II Phase I PTPI Year 2020*
Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap I Tahun 2017	-	2,085,000	*Shelf Registration Bonds I Phase I PTPI Year 2017*
	3,689,685	6,124,685	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(8,757)	(1,914)	*Unamortised transaction costs*
Jumlah utang obligasi	**3,680,928**	**6,122,771**	***Total bonds payable***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(857,394)**	**(2,435,029)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**2,823,534**	**3,687,742**	***Non-current portion***

Rincian utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The details of bonds payable as at 31 December 2024 are as follows:

No.	Obligasi dan nilai nominal/ *Bonds and nominal amount*	Bunga per tahun/ *Interest per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity*
a.	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020/	7.70%	3 September 2025
	Shelf Registration Bonds II PTPI Phase I Year 2020	8.30%	3 September 2027
b.	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021/	6.20%	10 Maret/*March* 2026
	Shelf Registration Bonds II PTPI Phase II Year 2021	7.20%	10 Maret/*March* 2028

Dana yang diperoleh digunakan antara lain untuk modal kerja, pendanaan umum, pembiayaan kembali pinjaman dan kegiatan pembiayaan lainnya.

Funds received are used for working capital, general funding, loan refinancing and other financing activities.

Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, antara lain batasan rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi batasan rasio keuangan tersebut.

The Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. As at 31 December 2024 and 2023, the Company complied with the respective financial covenants.

Obligasi tersebut pada tangal 31 Desember 2024 mendapatkan peringkat "idAAA" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian lembaga pemeringkat atas kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

These bonds are rated "idAAA" by PT Pemeringkat Efek Indonesia as at 31 December 2024. The rating reflects the rating agency's assessment of the likelihood of timely payment of the principal and interest.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

The bonds are not guaranteed with a specific collateral, but are guaranteed with all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and the future ones. The bondholders' rights are pari passu without preference to the other creditors.

Pada bulan Maret dan Juli 2024, Perusahaan melakukan pelunasan atas Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar Rp350.000 dan Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap I Tahun 2017 Seri B sebesar Rp2.085.000 (2023: Rp1.146.825).

In March and July 2024, the Company repaid portion of Shelf Registration Bonds II Phase II PTPI Year 2021 Series A amounting to Rp350,000 and Shelf Registration Bonds I Phase I PTPI Year 2017 Series B amounting to Rp2,085,000, respectively (2023: Rp1,146,825).

18. IMBALAN KERJA / *18. EMPLOYEE BENEFITS*

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / *a. Short-term employee benefit liabilities*

	2024	2023	
Gaji, insentif, dan bonus	2,377,095	2,764,823	*Salaries, incentives and bonuses*
Manfaat pensiun	261,891	317,881	*Pension benefits*
Jumlah	**2,638,986**	**3,082,704**	***Total***

b. Liabilitas imbalan pascakerja / *b. Post-employment benefits liabilities*

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen. Tabel berikut menyajikan ikhtisar liabilitas imbalan pascakerja dan biaya yang dibebankan sebagaimana tercatat pada laporan keuangan konsolidasian:

The provision for post-employment benefits liabilities are calculated by independent actuaries. The table below presents a summary of the post-employment employee benefits liabilities and expenses reported in the consolidated financial statements:

	2024	2023	
Liabilitas di laporan posisi keuangan konsolidasian untuk:			*Liabilities on the consolidated statement of financial position for:*
Imbalan pascakerja ("IPK")	2,683,862	2,811,584	*Post-employment benefits ("PEB")*
Imbalan jangka panjang lainnya ("IJPL")	279,701	219,031	*Other long-term benefits ("OLTEB")*
	2,963,563	**3,030,615**	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek (Catatan 18a)	**(261,891)**	**(317,881)**	***Current portion (Note 18a)***
Bagian jangka panjang	**2,701,672**	**2,712,734**	***Non-current portion***

	2024	2023	
(Dikreditkan)/dibebankan pada laba rugi:			*(Credited)/charged to profit or loss:*
IPK	(455,094)	107,578	*PEB*
IJPL	190,925	123,473	*OLTEB*
Jumlah	**(264,169)**	**231,051**	***Total***
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
IPK	408,978	500,415	*PEB*

18. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *18. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

b. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan) / *b. Post-employment benefits liabilities (continued)*

Rincian estimasi liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan lainnya untuk masing-masing program yang diselenggarakan Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of estimated post-employment benefits liabilities and other long-term benefits for each of the programs operated by the Group as at 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	31 Desember/*December* 2024						
	IPK/*PEB*		IJPL/*OLTEB*				
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Dampak batas atas aset/ *Impact on assets ceillings*	Jumlah/ *Total*	
Pada 1 Januari 2024	4,973,751	(2,162,167)	219,031	-	-	3,030,615	*As at 1 January 2024*
Biaya jasa kini	102,743	3,129	153,116	-	35,671	294,659	*Current service cost*
Biaya bunga bersih	81,545	-	10,001	-	(185)	91,361	*Net interest cost*
Biaya jasa lalu	(505,876)	-	1,705	-	-	(504,171)	*Past service costs*
Pendapatan bunga	(164)	(171,957)	-	-	-	(172,121)	*Interest income*
Keuntungan aktuaria bersih yang diakui	-	-	26,103	-	-	26,103	*Net actuarial gain*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	**(321,752)**	**(168,828)**	**190,925**	**-**	**35,486**	**(264,169)**	***Balance recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali:							*Remeasurements:*
Imbal hasil aset program non-bunga - bersih	68,508	27,475	-	-	-	95,983	*Return on plan assets excluding interest income - net*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	83,773	-	-	-	-	83,773	*Actuarial loss from change in demographic assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	156,070	-	-	-	-	156,070	*Actuarial gain from change in financial assumptions*
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	71,509	1,643	-	-	-	73,152	*Actuarial loss from experience adjustment*
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**379,860**	**29,118**	**-**	**-**	**-**	**408,978**	***Balance recognised in other comprehensive income***
Pembayaran dari program:							*Payments from plans:*
Pembayaran iuran	(6,638)	(578,384)	(37,218)	-	-	(622,240)	*Contribution payments*
Imbalan yang dibayar	(471,895)	315,737	(93,037)	-	-	(249,195)	*Benefit payments*
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2024	**4,553,326**	**(2,564,524)**	**279,701**	**-**	**35,486**	**2,303,989**	***Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2024***
Dampak batas atas aset	5,016	35,486	-	-	(35,486)	5,016	*Impact on assets ceilling*
Aset program yang tidak memenuhi kriteria perspektif akuntansi	**-**	**654,558**	**-**	**-**	**-**	**654,558**	***Unqualified plan asset from an accounting perspective***
	4,558,342	**(1,874,480)**	**279,701**	**-**	**-**	**2,963,563**	

18. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *18. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

b. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan) / *b. Post-employment benefits liabilities (continued)*

	31 Desember/*December* 2023						
	IPK/*PEB*		IJPL/*OLTEB*				
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Dampak batas atas aset/ *Impact on assets ceillings*	Jumlah/ *Total*	
Pada 1 Januari 2023	4,698,436	(2,987,912)	221,013	-	35,856	1,967,393	*As at 1 January 2023*
Biaya jasa kini	137,483	-	110,650	-	-	248,133	*Current service cost*
Biaya bunga bersih	126,425	-	9,412	-	(185)	135,652	*Net interest cost*
Biaya jasa lalu	30,222	-	1,607	-	-	31,829	*Past service costs*
Pendapatan bunga	-	(186,367)	-	-	-	(186,367)	*Interest income*
Keuntungan aktuaria bersih yang akui	-	-	1,804	-	-	1,804	*Net actuarial gain*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	**294,130**	**(186,367)**	**123,473**	**-**	**(185)**	**231,051**	***Balance recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali:							*Remeasurements:*
Imbal hasil aset program non-bunga - bersih	228	24,870	-	-	-	25,098	*Return on plan assets excluding interest income - net*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	387,250	-	-	-	-	387,250	*Actuarial loss from change in demographic assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	-	-	-	-	-	-	*Actuarial gain from change in financial assumptions*
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	79,928	8,138	1	-	-	88,067	*Actuarial loss from experience adjustment*
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**467,406**	**33,008**	**1**	**-**	**-**	**500,415**	***Balance recognised in other comprehensive income***
Pembayaran dari program:							*Payments from plans:*
Pembayaran iuran	(22,182)	(214,079)	(49,213)	-	-	(285,474)	*Contribution payments*
Imbalan yang dibayar	(464,039)	881,529	(76,243)	-	-	341,247	*Benefit payments*
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2023	**4,973,751**	**(2,473,821)**	**219,031**	**-**	**35,671**	**2,754,632**	***Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2023***
Dampak batas atas aset	-	32,542	-	-	(35,671)	(3,129)	*Impact on assets ceiling*
Aset program yang tidak memenuhi kriteria perspektif akuntansi	**-**	**279,112**	**-**	**-**	**-**	**279,112**	***Unqualified plan asset from an accounting perspective***
	4,973,751	**(2,162,167)**	**219,031**	**-**	**-**	**3,030,615**	

18. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tunai aset program manfaat pasti pascakerja yang terbentuk pada PT Asuransi Jiwa IFG yang secara akuntansi tidak dapat disajikan secara bersih terhadap liabilitas adalah masing-masing sebesar Rp654.558 dan Rp279.112 disajikan sebagai "aset imbalan pascakerja". Nilai aset program pada Dana Pensiun sebesar Rp1.874.480 (2023: Rp2.162.167) memenuhi kriteria aset program secara akuntansi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset program ditempatkan dalam bentuk investasi deposito berjangka dan surat berharga yang tidak memiliki harga pasar yang dikutip dan nilai wajarnya mendekati nilai tercatatnya.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

***18. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

As at 31 December 2024 and 2023, the total investment values of plan assets in PT Asuransi Jiwa IFG which cannot be accounted for net of the liabilities amounting to Rp654,558 and Rp279,112, respectively, are presented as "post-employment benefits assets". Plan assets in Dana Pensiun amounting to Rp1,874,480 (2023: Rp2,162,167) meet the criteria of plan assets in accordance with accounting perspectives.

As at 31 December 2024 and 2023, the plan assets were mostly placed in the form of investments in time deposits and bonds, which did not have quoted market prices and their fair values approximate their carrying value.

The principal assumptions used in determining the Group's employee benefit liabilities are as follows:

	2024	2023	
Tingkat diskonto per tahun	6.46% - 7.55%	5.75% - 8.08%	*Discount rate per annum*
Tingkat kenaikan gaji	2.50% - 8.00%	2.80% - 10.00%	*Salary growth rate*
Tingkat mortalitas	TM IV 2019	TM IV 2019	*Mortality rate*
Usia pensiun normal (dalam tahun)	56	56	*Normal retirement age (in years)*

Melalui program pensiun manfaat pasti, Grup terekspos beberapa risiko seperti kenaikan gaji, volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi, sebagai berikut:

Through its defined benefits pension plans, the Group is exposed to a number of risks such as salary growth, assets volatility and changes in bonds yields, as follows:

Volatilitas aset

Asumsi yang berhubungan dengan tingkat pengembalian aset yang diharapkan ditentukan berdasarkan data historis dan ekspektasi manajemen terhadap pengembangan investasi dimasa yang akan datang. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Assets volatility

Assumptions regarding the expected return on plan assets are based on the historical data and management's expectation of the future investment development. If the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

Perubahan imbal hasil obligasi

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

Changes in bond yields

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit program.

A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

18. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perubahan imbal hasil obligasi (lanjutan)

Grup memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Grup adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.

Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama tertimbang pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

***18. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Changes in bond yields** (continued)*

The Group ensures that the investment positions are managed within an asset-liability matching ("ALM") framework that is developed to achieve long-term returns that are in line with the obligation in defined benefit pension plans. Within this ALM framework, the Group's objective is to match assets and the pension obligations by investing in a well-diversified portfolio that generates sufficient risk-adjusted returns.

Investment across the plans is well diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The sensitivity of the defined benefit obligation to the changes in the weighted actuarial principal assumptions as of 31 December 2024 were as follows:

	Dampak atas Kewajiban Imbalan Pasti/ *Impact on Defined Benefit Obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumptions***	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumptions***	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 6.77%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 6.60%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 5.19%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 5.05%	*Salary growth rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode proyeksi unit kredit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined medical benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

18. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Rata-rata durasi untuk masing-masing kewajiban imbalan pasti adalah 1,16 - 20,77 tahun.

PSP menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") untuk karyawan yang bekerja sebelum periode tahun 2007, dimana peserta dijamin dengan manfaat panjang bulanan seumur hidup dengan kenaikan otomatis sebesar 6% setiap tahun. Iuran program ini seluruhnya ditanggung oleh PSP.

Pada Juni 2024, terdapat perubahan atas kenaikan manfaat pensiun. Kenaikan yang sebelumnya sebesar 6% setiap tahun untuk periode 2003 hingga 2024 berubah menjadi 2% per tahun untuk periode 2025 hingga 2027. Perubahan ini menyebabkan pengurangan biaya jasa masa lalu pada tahun 2024 sebesar Rp535.784.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

***18. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

The weighted average duration of each defined benefit obligation is 1.16 - 20.77 years.

PSP provides a Defined Benefit Pension Program ("DBPP") for employees who work before the period of 2007. Under this plan, participants are guaranteed a lifetime pension benefit with 6% automatic increase every year. The total contribution of this program is borne by the PSP.

In June 2024, there was change in the increase of pension benefits. The increase, which was previously 6% annually for the period from 2003 to 2024, was changed to 2% annually for the period from 2025 to 2027. The change resulted in a reduction of past service costs in 2024 by Rp535,784.

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefits is as follow:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	1 sampai 5 tahun/ *Between 1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
IPK	477,155	1,672,914	12,222,785	14,372,854	*PEB*
IJPL	100,374	410,306	1,839,159	2,349,839	*OLTEB*
Jumlah	577,529	2,083,220	14,061,944	16,722,693	*Total*

19. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

As at 31 December 2024 and 2023, the composition of the shareholder were as follows:

	31 Desember/*December* 2024 dan/*and* 2023			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah/ *Amount*	
Pemerintah Indonesia	**25,000,000**	**100**	**25,000,000**	***The Government of Indonesia***

20. LABA BERSIH PER SAHAM / *20. EARNINGS PER SHARE*

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

Earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owner of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

	2024	2023	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8,668,906	6,200,780	*Profit for the year attributable to owner of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	25,000,000	25,000,000	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (shares)*
Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (nilai penuh)	**346,756**	**248,031**	***Earnings per shares - basic and diluted (full amount)***

Grup tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba bersih per saham dasar sama dengan laba bersih per saham dilusian.

The Group did not have potential dilutive ordinary shares, therefore basic earnings per share is the same as the diluted earnings per share.

21. PENCADANGAN SALDO LABA DAN PEMBAGIAN LABA / *21. APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTIONS OF INCOME*

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan wajib dari keuntungan paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Under Indonesian Limited Company Law, the company is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Kinerja Tahun Buku 2023 tanggal 22 Juli 2024 dan RUPS Kinerja Tahun Buku 2022 tanggal 6 Juni 2023, Perusahaan mencadangkan saldo laba sebesar masing-masing Rp4.987.378 dan Rp13.415.812 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023. Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya (*appropriated*) meliputi cadangan terkait pemenuhan kewajiban sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan cadangan umum lainnya.

Based on the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the Financial Year 2023 dated 22 July 2024 and GMS for the Financial Year 2022 dated 6 June 2023, the Company had appropriated retained earnings of Rp4,987,378 and Rp13,415,812 for the years ended 31 December 2024 and 2023, respectively. The reserves that have been designated for specific use (appropriated) include reserves related to fulfilling obligations in accordance with Limited Liability Company Law and other general reserves.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2023 berdasarkan Akta Notaris No. 5 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 22 Juli 2024, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp1.213.402.

As resolved during the Annual GMS concerning the approval of the Consolidated Financial Statements for the year 2023 based on Notarial Deed No. 5 by notary Lumassia S.H. dated on 22 July 2024, the shareholders approved cash dividend of Rp1,213,402.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2022 berdasarkan Akta Notaris No. 1 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 6 Juni 2023, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp5.046.000.

As resolved during the Annual GMS concerning the approval of the Consolidated Financial Statements for the year 2022 based on Notarial Deed No. 1 by notary Lumassia S.H. dated on 6 June 2023, the shareholders approved cash dividend of Rp5,046,000.

22. PENJUALAN PRODUK / *SALES OF PRODUCTS*

Pendapatan dari penjualan produk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The revenues from sales of products for the years ended 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 30)			***Related parties (Note 30)***
Penjualan pupuk:			*Fertiliser sales:*
- Subsidi	871,952	832,511	*Subsidy -*
- Non-subsidi	1,180,152	246,543	*Non-subsidy -*
Penjualan non-pupuk	1,006,055	988,545	*Non-fertiliser sales*
Penjualan produk lainnya	327	-	*Sales of other products*
	3,058,486	2,067,599	
Pihak ketiga			***Third parties***
Penjualan pupuk:			*Fertiliser sales:*
- Subsidi	12,366,016	10,359,189	*Subsidy -*
- Non-subsidi	21,704,804	22,373,663	*Non-subsidy -*
Penjualan non-pupuk	7,002,000	9,222,037	*Non-fertiliser sales*
Penjualan produk lainnya	71,660	198,593	*Sales of other products*
	41,144,480	42,153,482	
Jumlah	**44,202,966**	**44,221,081**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat penjualan produk kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari jumlah penjualan produk.

For the years ended 31 December 2024 and 2023, there were no customers which sales of product exceeded 10% of total sales of products.

Pendapatan dari penjualan produk diakui pada suatu titik waktu.

The revenues from sales of products are recognised at a point in time.

23. PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH INDONESIA / *REIMBURSEMENT OF SUBSIDY FROM THE GOVERNMENT OF INDONESIA*

Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia for the years ended 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	2023	
Subsidi pupuk:			***Subsidy of fertilisers:***
NPK	20,531,568	19,332,118	*NPK*
Urea	12,636,330	12,369,350	*Urea*
NPK kakao	339,164	337,722	*NPK cocoa*
Organik	45,585	-	*Organic*
	33,552,647	32,039,190	
Penyesuaian piutang subsidi dari Pemerintah, yang belum ditagih - bersih setelah penyesuaian tahun sebelumnya	(228,732)	473,040	*Adjusment of unbilled subsidy receivables from the Government - net of prior year adjusment*
Jumlah	**33,323,915**	**32,512,230**	***Total***

23. PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH INDONESIA (lanjutan)

Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah untuk tahun 2024 dibukukan berdasarkan harga pupuk subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 5 Mei 2025. Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah untuk tahun 2023 dibukukan berdasarkan harga pupuk subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 15 Maret 2024 untuk PSP, 22 Maret 2024 untuk PKT, dan 28 Maret 2024 untuk PKC, PKG dan PIM. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, volume penyaluran subsidi masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK-RI. Secara historis, kuantitas aktual penyaluran pupuk yang disetujui dan estimasi dari kuantitas penyaluran tidak berbeda secara signifikan.

23. REIMBURSEMENT OF SUBSIDY FROM THE GOVERNMENT OF INDONESIA (continued)

Reimbursement of subsidy from the Government for the year 2024 were recorded based on subsidised fertiliser price audited by BPK-RI as stated on Minutes of Audit Result dated 5 May 2025. Reimbursement of subsidy from the Government for the year 2023 were recorded based on subsidised fertiliser price audited by BPK-RI as stated on Minutes of Audit Result dated 15 March 2024 for PSP, 22 March 2024 for PKT and 28 March 2024 for PKC, PKG and PIM. As at the issuance date of these consolidated financial statements, the subsidy distributed volume are still being audited by BPK-RI. Historically, the actual approved distributed quantity and estimates of distributed quantity are not significantly different.

24. PENDAPATAN JASA / *24. RENDERING OF SERVICES*

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 30)	2,987,612	1,653,687	*Related parties (Note 30)*
Pihak ketiga	1,101,715	820,269	*Third parties*
Jumlah	**4,089,327**	**2,473,956**	***Total***

Pendapatan jasa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The rendering of services for the years ended 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	2023	
Pendapatan konstruksi	1,999,787	626,230	*Construction revenues*
Jasa operasi dan pemeliharaan	977,532	475,825	*Operation and maintenance services*
Jasa konstruksi pabrik dan rantai pasokan	451,076	640,694	*Plant construction services and supply chain*
Pendapatan dari transaksi penjualan tenaga listrik	174,078	386,673	*Revenue from electricity selling transactions*
Pendapatan keuangan dari perjanjian konsesi jasa	118,438	121,439	*Finance income from service concession arrangement*
Lainnya	368,416	223,095	*Others*
Jumlah	**4,089,327**	**2,473,956**	***Total***

Terdapat pendapatan konstruksi dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.093.535 (51,19%) dan Rp827.392 (33,44%) dari jumlah pendapatan jasa.

There were construction revenue from PT Pertamina (Persero) and its subsidiaries for the years ended 31 December 2024 and 2023 amounting to Rp2,093,535 (51.19%) and Rp827,392 (33.44%), respectively, from total rendering of services.

Manajemen memperkirakan bahwa harga transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp492.302 (2023: Rp578.028) dan akan diakui sebagai pendapatan selama rentang waktu antara 1-2 tahun ke depan.

Management expects that the transaction price allocated to the uncompleted contracts as of 31 December 2024 were amounting to Rp492,302 (2023: Rp578,028) and will be recognised as revenue within the next 1-2 years.

Terdapat pemulihan provisi *liquidated damage* yang dicatat sebagai penambah pendapatan konstruksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.142.817 dan Rp62.667.

There were recovery of liquidated damage provision which was recorded as revenue addition for the years ended 31 December 2024 and 2023 amounting to Rp1,142,817 and Rp62,667, respectively.

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *25. COST OF REVENUES*

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The cost of revenues for the years ended 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	2023	
Bahan baku yang digunakan	45,078,668	46,524,427	*Raw material used*
Biaya *overhead* lainnya	5,326,416	4,201,566	*Other overhead costs*
Beban penyusutan (Catatan 11)	5,025,076	4,565,168	*Depreciation expenses (Note 11)*
Biaya tenaga kerja langsung	3,516,350	3,703,274	*Direct labour*
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu	(331,567)	-	*Adjustment of post-employment benefit expense – past service cost*
Perbaikan dan pemeliharaan	895,865	1,298,132	*Repairs and maintenance*
Jumlah biaya produksi	59,510,808	60,292,567	*Total production costs*
Persediaan barang jadi dan barang dalam proses:			*Finished goods and work in progress inventories:*
Awal tahun	11,743,310	10,883,698	*Beginning of the year*
Akhir tahun	(9,371,296)	(11,743,310)	*End of the year*
	61,882,822	59,432,955	
Beban non-manufaktur:			*Non-manufacturing cost:*
Perdagangan	2,143,164	1,637,782	*Trading*
Listrik, *steam*, dan utilitas	1,189,284	876,859	*Electricity, steam and utilities*
Jasa konstruksi	220,253	645,757	*Construction services*
Properti dan jasa kawasan industri	51,577	49,683	*Properties and services industrial estate*
Lainnya	103,316	660,110	*Others*
Jumlah beban non-manufaktur	3,707,594	3,870,191	*Total cost of non-manufacturing*
Jumlah	**65,590,416**	**63,303,146**	***Total***

Pemasok yang memiliki transaksi pembelian lebih dari 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya dengan nilai sebesar Rp14.224.659 (17,42%) (2023: Rp13.072.416 (16,50%)).

Suppliers with purchase transactions that represent more than 10% of the total consolidated revenues for the years ended 31 December 2024 were PT Pertamina (Persero) and its subsidiaries amounting to Rp14,224,659 (17.42%) (2023: Rp13,072,416 (16.50%)).

Lihat Catatan 30 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30 for details of related parties balances and transactions.

26. BEBAN PENJUALAN / *26. SELLING EXPENSES*

	2024	2023	
Gaji, upah, dan kesejahteraan	392,362	491,574	*Salaries, wages, and welfare*
Beban promosi dan pemasaran	189,503	158,746	*Promotion and marketing expenses*
Beban jasa	125,482	138,191	*Service expenses*
Beban penyusutan (Catatan 11)	108,125	86,912	*Depreciation expenses (Note 11)*
Beban pemeliharaan	62,528	37,789	*Maintenance expenses*
Beban sewa	50,723	78,934	*Rent expenses*
Beban perlengkapan dan operasional kantor	39,863	40,161	*Supply and office operating expenses*
Beban perjalanan dinas	22,438	25,311	*Travel expenses*
Beban asuransi	20,265	22,916	*Insurance expenses*
Beban penelitian	14,159	14,130	*Research expenses*
Beban pelatihan	10,881	12,913	*Training expenses*
Beban unit pelayanan dan utilitas	8,560	20,420	*Service unit and utility expenses*
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu	(28,167)	-	*Adjustment of post-employment benefit expense – past service cost*
Beban lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	23,020	148,033	*Other expenses (each below Rp10,000)*
Jumlah	**1,039,742**	**1,276,030**	***Total***

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2024	2023	
Gaji, upah, dan kesejahteraan	2,452,417	2,054,588	*Salaries, wages, and welfare*
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang - bersih	546,925	29,341	*Additional provision for impairment of receivables - net*
Beban jasa	891,393	887,365	*Service expenses*
Beban promosi dan pemasaran	261,235	231,237	*Promotion and marketing expenses*
Beban bina wilayah	250,864	263,094	*Regional development expenses*
Beban penyusutan (Catatan 11)	200,655	174,141	*Depreciation expenses (Note 11)*
Beban perjalanan dinas	195,459	158,229	*Travel expenses*
Beban unit pelayanan dan utilitas	182,911	192,818	*Service unit and utility expenses*
Beban pajak lainnya	212,933	419,849	*Other tax expenses*
Beban perlengkapan dan operasional kantor	148,632	167,745	*Supply and office operating expenses*
Beban pelatihan	159,163	115,861	*Training expenses*
Beban pemeliharaan	129,679	78,386	*Maintenance expenses*
Beban sewa	81,839	37,007	*Rent expenses*
Penambahan penurunan nilai aset tetap	54,338	-	*Additional impairment of fixed assets*
Beban penelitian	50,693	61,905	*Research expenses*
Beban asuransi	17,773	22,354	*Insurance expenses*
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu	(164,275)	-	*Adjustment of post-employment benefit expense – past service cost*
Beban lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	298,101	137,547	*Other expenses (each below Rp10,000)*
Jumlah	**5,970,735**	**5,031,467**	***Total***

28. PENDAPATAN LAINNYA - BERSIH / *28. OTHER INCOME - NET*

	2024	2023	
Keuntungan atas restrukturisasi utang dan pinjaman (Catatan 38)	3,269,765	-	*Gain on restructurisation payable and loan (Note 38)*
Denda dan klaim	120,398	463,892	*Penalty and claim*
Kerugian selisih kurs - bersih	(65,678)	(375,718)	*Foreign exchange loss - net*
Pendapatan lainnya - bersih	353,455	69,664	*Other income - net*
Jumlah	**3,677,940**	**157,838**	***Total***

29. BIAYA KEUANGAN / *29. FINANCE COSTS*

	2024	2023	
Pinjaman bank jangka pendek	745,118	1,284,073	*Short-term bank loans*
Pinjaman jangka panjang	351,547	728,439	*Long-term loans*
Utang obligasi	350,799	514,730	*Bonds payable*
Amortisasi atas restrukturisasi utang dan pinjaman - Rekind	227,456	-	*Amortisation of restructured payables and loans - Rekind*
Biaya bank dan pinjaman	84,992	74,558	*Bank and loan cost*
Kerugian/(keuntungan) selisih kurs atas pinjaman	158,022	(81,979)	*Foreign exchange loss/(gain) on borrowing*
Jumlah	**1,917,934**	**2,519,821**	***Total***

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI / *30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES*

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of rexlationships with related parties

In the normal course of business, the Group entered into trade and other transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those for transactions between unrelated parties.

The details of the nature of relationships and types of significant transactions with related parties are as follows:

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

Nature of relationships with related parties *(continued)*

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties*	Transaksi/ *Transaction*
Pemerintah Indonesia/ *The Government of Indonesia*	Pemegang saham utama/ *Ultimate parent*	Dividen, piutang dan penggantian biaya subsidi/ *Dividend, receivables and reimbursement of subsidy*
Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI, PT Bank Mandiri Taspen	Entitas di bawah kendali Pemerintah/*Entities controlled by the Government*	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, fasilitas *Non Cash loan*, fasilitas *Bill Purchasing Line*, fasilitas Kredit Modal Kerja, fasilitas *Supply Chain Financing*, fasilitas *Treasury Line/ Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, placement of restricted cash, Non Cash Loan facility, Bill Purchasing Line facility, Working Capital Loans facility, Supply Chain Financing Facility, Treasury Line facility*
PT Adhi Karya (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Fokus Jasa Mitra, PT Graha Sarana Gresik, PT Industri Gula Glenmore, PT Pertamina (Persero) dan entitas anak/*and subsidiaries,* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak/*and subsidiaries*, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Dahana, PT Pembangunan Perumahan	Entitas di bawah kendali Pemerintah/*Entities controlled by the Government*	Penjualan pupuk subsidi, penjualan pupuk non-subsidi, pendapatan jasa EPC, pendapatan jasa non-EPC, pendapatan jasa, penjualan produk non-pupuk, pembelian bahan baku, sewa, jasa pemeliharaan mekanik, pemakaian listrik, jasa pengangkutan gas dan pengelola aset program manfaat pasti/*Subsidy fertiliser sales, non-subsidy fertiliser sales, revenue from EPC, revenue from non-EPC, rendering of services, non-fertiliser sales, purchase of raw material, rental, mechanic maintenance, electricities, gas transportation services and defined benefit plan asset manager*
PT Aneka Jasa Grhadika, PT Gresik Cipta Sejahtera, PT Petrokopindo Cipta Selaras, PT Multi Nitrotama Kimia ("MNK"), PT Yasida Makmur Abadi, Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik	Entitas asosiasi/*Associates*	Penjualan pupuk non-subsidi, penjualan non-pupuk, sewa dan pembelian non-bahan baku/*Non-subsidy fertiliser sales, non-fertiliser sales, rental and purchase of non-raw materials*
PT Petro Jordan Abadi ("PJA")	Ventura bersama/*Joint ventures*	Penjualan non-pupuk, piutang usaha dan utang usaha/*Non-fertiliser sales, trade receivables and trade payables*
RDMP Balikpapan JO	Ventura bersama/*Joint ventures*	Pendapatan, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan/*Revenues, trade receivables, unearned revenue, construction contract work in progress - due from customers*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Personil manajemen kunci (terdiri dari anggota direksi dan komisaris dan seluruh pihak yang melapor secara langsung kepada direksi)/*Key management personnel (consisting of members of the board of directors and commissioners and those who directly report to the board of directors)*	Kompensasi dan remunerasi/ *Compensation and remuneration*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant transactions with related parties are as follows:

Piutang usaha:

Trade receivables:

	2024	2023	
PT Gresik Cipta Sejahtera dan entitas anak	95,025	79,036	*PT Gresik Cipta Sejahtera and subsidiaries*
RDMP Balikpapan JO	88,761	102,191	*RDMP Balikpapan JO*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	69,870	12,323	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	61,716	73,213	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) dan entitas anak	59,379	5,746	*PT Semen Indonesia (Persero) and subsidiaries*
PT Pertamina (Persero)	46,615	66,388	*PT Pertamina (Persero)*
PT Yasida Makmur Abadi	40,899	45,278	*PT Yasida Makmur Abadi*
PJA	9,163	100,430	*PJA*
PT Industri Gula Glenmore	-	39,567	*PT Industri Gula Glenmore*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp30.000)	167,170	276,499	*Others (each below Rp30,000)*
	638,598	800,671	
Cadangan penurunan nilai	(121,873)	(129,035)	*Provision for impairment*
Jumlah	516,725	671,636	*Total*
Persentase terhadap jumlah aset	0.37%	0.46%	*As a percentage to total assets*

Piutang/(utang) subsidi dari Pemerintah Indonesia:

Subsidy receivables/(payables) from the Government of Indonesia:

	2024	2023	
Piutang subsidi			*Subsidy receivables*
Pemerintah Indonesia	1,721,861	9,447,241	*Government of Indonesia*
Cadangan penurunan nilai	(104,168)	-	*Allowance for impairment*
Jumlah	1,617,693	9,447,241	*Total*
Persentase terhadap jumlah aset	1.16%	6.61%	*As a percentage to total assets*
Utang subsidi			*Subsidy payables*
Pemerintah Indonesia	1,435,708	-	*Government of Indonesia*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	3.58%	0.00%	*As a percentage to total liabilities*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan:

Construction contract work in progress - due from customers:

	2024	2023	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	119,008	268,768	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	84,047	110,771	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	11,061	28,784	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	214,116	408,323	*Total*
Persentase terhadap jumlah aset	0.15%	0.29%	*As a percentage to total assets*

Utang usaha:

Trade payables:

	2024	2023	
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	90,591	378,965	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PT Freeport Indonesia	63,212	-	*PT Freeport Indonesia*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	24,912	5,768	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*
PT Petrokopindo Cipta Selaras	23,177	694	*PT Petrokopindo Cipta Selaras*
PT Kaltim Nusa Etika	-	20,429	*PT Kaltim Nusa Etika*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	-	30,737	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp20.000)	136,313	159,514	*Others (each below Rp20,000)*
Jumlah	338,205	596,107	*Total*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.84%	1.17%	*As a percentage to total liabilities*

Utang lainnya:

Other payables:

	2024	2023	
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	34,314	34,584	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	34,314	34,584	*Total*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.09%	0.07%	*As a percentage to total liabilities*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Pendapatan: / ***Revenues:***

	2024	2023	
Penjualan produk (Catatan 22)	3,058,486	2,067,599	*Sales of products (Note 22)*
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia (Catatan 23)	33,323,915	32,512,230	*Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia (Note 23)*
Pendapatan jasa (Catatan 24)	2,987,612	1,653,687	*Rendering of services (Note 24)*
Jumlah	39,370,013	36,233,516	*Total*

	2024	2023	
Pemerintah Indonesia (Catatan 23)	33,323,915	32,512,230	*Government of Indonesia (Note 23)*
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	2,582,210	827,392	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PT Gresik Cipta Sejahtera	601,299	526,746	*PT Gresik Cipta Sejahtera*
MNK	482,658	490,746	*MNK*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	393,625	313,448	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
PT Sang Hyang Seri	205,240	294,749	*PT Sang Hyang Seri*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	199,200	308,502	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	142,583	98,189	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Petrocentral	126,525	184	*PT Petrocentral*
PT Dahana	118,247	-	*PT Dahana*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak	121,301	21,125	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and subsidiaries*
PJA	107,783	160,476	*PJA*
Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik	82,008	96,664	*Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp70.000)	883,419	583,065	*Others (each below Rp70,000)*
Jumlah	39,370,013	36,233,516	*Total*
Persentase terhadap jumlah pendapatan	48.24%	45.75%	*As a percentage to total revenue*

Pembelian: / ***Purchases:***

	2024	2023	
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	14,224,659	13,072,416	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PJA	3,497,845	2,961,167	*PJA*
PT Bukit Asam Tbk	571,293	628,289	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Petrokopindo Cipta Selaras	464,439	232,443	*PT Petrokopindo Cipta Selaras*
PT Fokus Jasa Mitra	411,614	406,882	*PT Fokus Jasa Mitra*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	374,052	430,477	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Aneka Jasa Grhadika	349,879	310,412	*PT Aneka Jasa Grhadika*
PT Freeport Indonesia	308,174	-	*PT Freeport Indonesia*
Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik	218,064	179,192	*Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik*
PT Graha Sarana Gresik	208,021	201,607	*PT Graha Sarana Gresik*
PT Gresik Cipta Sejahtera	166,204	98,343	*PT Gresik Cipta Sejahtera*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	163,253	143,456	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	132,110	211,281	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp70.000)	754,084	484,809	*Others (each below Rp70,000)*
Jumlah	21,843,691	19,360,774	*Total*
Persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan	33.30%	30.58%	*As a percentage to total cost of revenues*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Kompensasi manajemen kunci:

Key management compensation:

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of the Company for the years ended 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	2023	
Direksi			***Board of Directors***
Gaji dan tunjangan rumah	34,150	29,983	*Salary and home allowance*
Tunjangan hari raya	2,598	2,226	*Holiday allowance*
Tantiem yang masih harus dibayar	59,875	113,735	*Accrued tantiem*
Imbalan pascakerja	9,089	3,684	*Post-employment benefit*
	105,712	149,628	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Gaji dan tunjangan rumah	18,802	12,536	*Salary and home allowance*
Tunjangan hari raya	1,204	1,045	*Holiday allowance*
Tantiem yang masih harus dibayar	33,878	47,695	*Accrued tantiem*
Imbalan pascakerja	4,195	2,367	*Post-employment benefit*
	58,079	63,643	
Jumlah	163,791	213,271	*Total*

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN / *31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*

	31 Desember/*December* 2024			
	Jumlah/ *Total*	**Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *At amortised cost***	**Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*At fair value through other comprehensive income***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	17,278,272	17,278,272	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	2,450,699	2,450,699	-	*Trade receivables*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	1,617,693	1,617,693	-	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia*
Piutang subsidi yang belum ditagih	930,933	930,933	-	*Unbilled subsidy receivables*
Piutang lainnya	96,950	96,950	-	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	369,944	369,944	-	*Construction contract work in progress - due from customers*
Aset lancar lainnya	13,144,598	13,144,598	-	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	2,429,759	2,335,584	94,175	*Other non-current assets*
Jumlah	38,318,848	38,224,673	94,175	*Total*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	2,335,343	2,335,343	-	*Trade payables*
Utang lainnya	1,264,821	1,264,821	-	*Other payables*
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	1,435,708	1,435,708	-	*Subsidy payable to the Government of Indonesia*
Liabilitas yang masih harus dibayar	9,543,703	9,543,703	-	*Accrued liabilities*
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	5,040	5,040	-	*Amounts due to customer for construction contract work*
Pinjaman bank jangka pendek	4,209,975	4,209,975	-	*Short-term bank loans*
Bagian lancar pinjaman jangka panjang	2,373,290	2,373,290	-	*Current portion of non-current borrowings*
Pinjaman jangka panjang	10,925,341	10,925,341	-	*Non-current borrowings*
Liabilitas tidak lancar lainnya	194,302	194,302	-	*Other non-current liabilities*
Jumlah	32,287,523	32,287,523	-	*Total*

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

	31 Desember/*December* 2023			
	Jumlah/ *Total*	**Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *At amortised cost***	**Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*At fair value through other comprehensive income***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	16,585,416	16,585,416	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	3,025,309	3,025,309	-	*Trade receivables*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	9,447,241	9,447,241	-	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia*
Piutang subsidi yang belum ditagih	1,159,665	1,159,665	-	*Unbilled subsidy receivables*
Piutang lainnya	705,976	705,976	-	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	529,813	529,813	-	*Construction contract work in progress - due from customers*
Aset lancar lainnya	9,571,873	9,571,873	-	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	2,984,412	2,942,359	42,053	*Other non-current assets*
Jumlah	44,009,705	43,967,652	42,053	*Total*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	3,569,089	3,569,089	-	*Trade payables*
Utang lainnya	1,204,700	1,204,700	-	*Other payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	6,842,022	6,842,022	-	*Accrued liabilities*
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	5,677	5,677	-	*Amounts due to customer for construction contract work*
Pinjaman bank jangka pendek	7,332,631	7,332,631	-	*Short-term bank loans*
Bagian lancar pinjaman jangka panjang	4,097,973	4,097,973	-	*Current portion of non-current borrowings*
Pinjaman jangka panjang	17,294,905	17,294,905	-	*Non-current borrowings*
Liabilitas tidak lancar lainnya	37,090	37,090	-	*Other non-current liabilities*
Jumlah	40,384,087	40,384,087	-	*Total*

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos berbagai risiko keuangan diantaranya: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko keuangan dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari ketidakpastian atau perubahan tak terduga dalam kondisi pasar dan kinerja keuangan konsolidasian Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko keuangan yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

Faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

(i) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Risiko suku bunga dari kas di bank dan deposito tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Grup memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga nilai wajar. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Tabel berikut berisi liabilitas keuangan yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dengan suku bunga mengambang:

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks as follows: market risk (including foreign currency exchange rates risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential losses arising from uncertainties or unexpected changes in market conditions and the Group's consolidated financial performance.

The Group uses various methods to measure financial risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange and other price risks and aging analysis for credit risk.

Financial risk factor

a. Market risk

(i) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from short-term borrowings and long-term borrowings. The interest rate risk from cash in bank and deposits is not significant and all other financial instruments are non-interest bearing. The Group has borrowings with fixed and floating interest rates. Borrowings with floating interest rates are exposed to cashflow interest rate risk. Borrowings with fixed rates exposes the Group to fair value interest risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

The following table contains the financial liabilities of the Group as at 31 December 2024 with floating rate:

	2024	
Pinjaman bank	7,156,797	*Bank loans*

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan panjang 100 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba rugi untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp92.407 (2023: Rp110.509).

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2024 jika Rp melemah/menguat sebesar 10% terhadap USD dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak tahun berjalan akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp488.568 (2023: lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp570.047), terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan/kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Grup didenominasikan dalam mata uang USD dan EUR. Deviasi pergerakan kurs untuk mata uang tersebut adalah masing-masing sebesar 2,91% dan 2,69% selama tahun 2024.

***32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***Financial risk factor** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(i) Interest rate risk (continued)

As at 31 December 2024, if interest rates on short-term and long-term borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit or loss for the year would have been Rp92,407 (2023: Rp110,509), lower/higher.

(ii) Foreign currency exchange risk

The Group is facing foreign exchange risk arising from various currency exposures. Foreign exchange risk primarily arises from recognised monetary assets and liabilities that are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. These exposures are managed partially by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency.

As at 31 December 2024, if the Rp had weakened/strengthened by 10% against the USD with all other variables held constant, the pre-tax profit for the year would have been Rp488,568 lower or higher (2023: Rp570,047 lower or higher), respectively, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

As at 31 December 2024, monetary assets and liabilities held by the Group are denominated in USD and EUR. The deviation for such currencies are 2.91% and 2.69%, respectively, during 2024.

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga

Harga komoditas seperti pupuk dan amonia tidak stabil seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pelanggan. Walaupun basis pelanggan Grup terdiversifikasi dan tidak tergantung pada satu pasar atau negara saja, pendapatan Grup tetap dapat mengalami dampak negatif dari menurunnya harga komoditas. Namun demikian, aset dan liabilitas keuangan Grup tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi harga pupuk dan amonia dunia karena penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli pupuk dan amonia yang ditentukan pada saat pengiriman.

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp38.310.595 (2023: Rp44.002.636). Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, piutang usaha, piutang subsidi, aset lancar dan tidak lancar lainnya, piutang lainnya dan pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan.

Semua kas di bank dan aset keuangan tidak lancar lainnya yang merupakan saldo bank yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan tersebut minimal.

Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dan piutang subsidi dari Pemerintah yang belum tertagih dianggap dapat diabaikan, sebab pihak yang bersangkutan merupakan Pemerintah Indonesia.

***32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***Financial risk factor** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(iii) Price risk

Commodity prices such as fertiliser and ammonia are unstable due to changes in supply and demand from customers. Although the Group has diverse customers and does not depend on a specific market or country, the Group revenue could be negatively affected by the decrease in commodity prices. However, the Group's financial assets and liabilities are not significantly exposed to the price volatility of fertilizers and ammonia markets because the settlement of financial assets and liabilities is based on the prices stipulated in the fertilizers and ammonia sales and purchase agreements that will be determined at the time of delivery.

b. Credit risk

As at 31 December 2024, the total maximum exposure from credit risk was Rp38,310,595 (2023: Rp44,002,636). Credit risk arises from cash in banks, trade receivables, subsidy receivables, other current and non-current assets, other receivables and construction contract work in progress - due from customers.

All the cash in banks and other non-current financial assets in the form of restricted deposits are placed in banks with good credit rating. Therefore, the Group believes the credit risk of such financial assets is minimal.

The credit risk on subsidy receivables and unbilled subsidy receivables from the Government are considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Terkait piutang retensi dan pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan, Grup mempunyai jaminan dalam bentuk garansi pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh bank atau institusi keuangan.

Selain itu, Grup juga memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan kepada pelanggan dengan sejarah kredit yang baik. Grup memiliki penilaian atas pelanggan dalam hal kemampuan membayar piutang saat jatuh tempo. Penilaian setiap pelanggan didasarkan pada kemampuan keuangan pelanggan serta pengalaman sebelumnya.

Atas dasar itu, penyisihan kerugian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ditetapkan sebagai berikut untuk piutang usaha dan piutang lainnya:

***32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***Financial risk factor** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

Related to retention receivables and construction contract work in progress - due from customers, the Group receives performance guarantees issued by banks or financial institutions.

In addition, the Group also ensures that sales are only made to customers with a good credit history. The Group has an assessment of customers in terms of ability to pay receivables when due. Each customer's valuation is based on the customer's financial ability and previous experience.

On that basis, the loss provisions as at 31 December 2024 and 2023 were determined as follows for trade receivables and other receivables:

	31 Desember/*December* 2024						
	Lancar/ ***Current***	**Sudah jatuh tempo 1-90 hari/** ***Overdue 1-90 days***	**Sudah jatuh tempo 91-120 hari/** ***Overdue 91-120 days***	**Sudah jatuh tempo 121-365 hari/** ***Overdue 121-365 days***	**Sudah jatuh tempo >365 hari/** ***Overdue >365 days***	**Jumlah/** ***Total***	
Tingkat kerugian yang diharapkan	3.51%	4.45%	3.18%	78.07%	99.67%	31.24%	*Expected loss rate*
Piutang usaha	1,647,584	736,435	112,208	130,023	680,323	3,306,573	*Trade receivables*
Piutang lainnya	57,876	28,398	8,402	152,938	266,217	513,831	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	369,944	-	-	-	-	369,944	*Construction contract work in progress - due from customer*
Piutang lainnya - tidak lancar	-	-	-	-	49,639	49,639	*Other receivables - non-current*
Penyisihan kerugian	(72,864)	(34,057)	(3,837)	(220,894)	(992,906)	(1,324,558)	*Provision*

	31 Desember/*December* 2023						
	Lancar/ ***Current***	**Sudah jatuh tempo 1-90 hari/** ***Overdue 1-90 days***	**Sudah jatuh tempo 91-120 hari/** ***Overdue 91-120 days***	**Sudah jatuh tempo 121-365 hari/** ***Overdue 121-365 days***	**Sudah jatuh tempo >365 hari/** ***Overdue >365 days***	**Jumlah/** ***Total***	
Tingkat kerugian yang diharapkan	0.38%	0.74%	2.64%	23.62%	63.32%	20.54%	*Expected loss rate*
Piutang usaha	2,242,206	529,845	136,456	135,601	681,599	3,725,707	*Trade receivables*
Piutang lainnya	59,809	35,828	8,109	30,392	441,901	576,039	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	529,813	-	-	-	-	529,813	*Construction contract work in progress - due from customer*
Piutang lainnya - tidak lancar	-	-	-	-	520,895	520,895	*Other receivables - non-current*
Penyisihan kerugian	(10,779)	(4,177)	(3,814)	(39,213)	(1,033,373)	(1,091,356)	*Provision*

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama dan hari lewat jatuh tempo. Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran pelanggan selama 36 bulan sebelum 1 Januari 2024 atau 31 Desember 2024 serta kerugian kredit historis yang dialami, bila ada. Tingkat kerugian historis kemudian disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi *forward-looking* mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Grup telah mencadangkan nilai piutang usaha dan piutang lainnya yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai.

Seluruh saldo piutang usaha dan piutang lainnya di atas yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai sebagian besar berasal dari pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi yang sudah ada lebih dari 12 bulan yang tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya yang telah dilakukan.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES *(continued)*

Financial risk factor *(continued)*

b. Credit risk *(continued)*

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due. The expected loss rates are based on the profile of payments from customers over a period of 36 months before 1 January 2024 or 31 December 2024 and historic credit losses, if any. The historical loss rates are then adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables.

As at 31 December 2024 and 2023, the Group had provided the provision for the balance of trade receivables and other receivables which were past due and impaired.

The entire balance from trade receivables and other receivables is mostly derived from third party and related party customers which have existed for more than 12 months and are spread over a large number of customers. The Group also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered.

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Kebijakan umum Grup untuk penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya untuk pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah sebagai berikut:

(i) memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik;

(ii) menerima pelanggan baru dan penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kewenangan Grup; dan

(iii) meminta pembayaran di muka untuk penjualan pupuk dan non-pupuk untuk pelanggan lama dan baru.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengelola risiko likuiditas dan memastikan ketersediaan kas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana. Selain itu, Grup juga memiliki fasilitas *stand-by loan* yang dapat ditarik sesuai dengan permintaan untuk mendanai kegiatan operasi pada saat diperlukan.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES *(continued)*

Financial risk factor *(continued)*

b. Credit risk *(continued)*

The Group's general policies for sale of fertiliser, non-fertiliser and other services rendered to new and existing customers are as follows:

(i) selecting customers with strong financial conditions and good reputations;

(ii) acceptance of new customers and sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered being approved by the authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy; and

(iii) requesting advance payments for sales of fertiliser and non-fertiliser for recurring and new customers.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the Group's cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. To manage its liquidity risk and ensuring cash availability, the Group monitors its level of cash and cash equivalents, and maintains these at a level deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan maturity profiles and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds. In addition, the Group has a stand-by loan facility which can be withdrawn upon request to fund its operations when needed.

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES *(continued)*

Financial risk factor *(continued)*

c. Liquidity risk *(continued)*

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	2024				
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	**1-5 tahun/ *years***	**Di atas 5 tahun/ *Over 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	2,335,343	-	-	2,335,343	*Trade payables*
Utang lainnya	1,264,821	-	-	1,264,821	*Other payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	9,543,703	-	-	9,543,703	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	4,374,263	-	-	4,374,263	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang	2,755,259	7,671,196	7,850,166	18,276,621	*Long-term bank loans and other loans*
Utang obligasi	1,082,947	3,034,576	-	4,117,523	*Bonds payable*
Liabilitas tidak lancar lainnya	36,608	142,098	930,124	1,108,830	*Other non-current liabilities*
Liabilitas sewa	135,118	141,791	5,147	282,056	*Lease liabilities*
Jumlah	21,528,062	10,989,661	8,785,437	41,303,160	*Total*

	2023				
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	**1-5 tahun/ *years***	**Di atas 5 tahun/ *Over 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	3,569,089	-	-	3,569,089	*Trade payables*
Utang lainnya	1,204,700	-	-	1,204,700	*Other payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	6,842,022	-	-	6,842,022	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	7,440,087	-	-	7,440,087	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang	5,204,396	9,104,171	726,973	15,035,540	*Long-term bank loans and other loans*
Utang obligasi	2,793,360	4,117,523	-	6,910,883	*Bonds payable*
Liabilitas sewa	148,581	162,742	-	311,323	*Lease liabilities*
Jumlah	27,202,235	13,384,436	726,973	41,313,644	*Total*

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

d. Estimasi nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajarnya:

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES *(continued)*

Financial risk factor *(continued)*

d. Fair value estimation

The table below describes the carrying amounts and fair value of financial liabilities that are not presented by the Group at fair value:

	2024		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Utang obligasi	3,680,928	3,681,142	*Bonds payable*
Pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap	928,641	1,101,120	*Long-term bank loans with fixed interest rate*

Nilai wajar dari utang obligasi diestimasi menggunakan harga pasar yang dikutip pada tanggal 31 Desember 2024 dan diklasifikasikan sebagai tingkat 1 dalam hierarki nilai wajar.

The fair value of bonds payable are estimated using the quoted market price as at 31 December 2024 and is within level 1 of the fair value hierarchy.

Nilai wajar dari pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap diestimasi menggunakan *input* tingkat 2 dalam hierarki nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024.

The fair value of long-term bank loan with fixed interest rate is estimated using the inputs within level 2 of the fair value hierarchy as at 31 December 2024.

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

e. Manajemen risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Financial risk factor *(continued)*

e. Capital risk management

In managing the capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowings and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach regarding capital management during the year.

33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

a. Aktivitas investasi non-kas yang signifikan

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan aktivitas non kas adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Aktivitas investasi			***Investing activities***
Perolehan aset tetap melalui utang lainnya dan beban akrual	216,848	429,191	*Acquisition of fixed assets through other payables and accrued expenses*
Perolehan aset tetap melalui uang muka	295,784	1,186,052	*Acquisition of fixed assets through advances*
Perolehan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	274,949	487,343	*Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities*
Perolehan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	154,810	85,611	*Acquisition of fixed assets through capitalisation of borrowing cost*
Penambahan investasi asosiasi melalui penyesuaian nilai wajar	566,881	-	*Addition of investment in associate through fair value adjustment*

33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

a. Significant non-cash investing activities

Supplementary information to the consolidated statements of cash flow relating to non-cash activities is as follows:

33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (lanjutan) / *33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (continued)*

b. Rekonsiliasi utang bersih / *b. Net debt reconciliation*

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

Table below presents a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2024 and 2023, as follows:

	Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	Pinjaman/ *Borrowings*	Jumlah/ *Total*	
Saldo pada 1 Januari 2023	139,155	32,326,301	32,465,456	*Balance as at 1 January 2023*
Arus kas masuk	-	14,062,183	14,062,183	*Cash in flows*
Arus kas keluar	(350,118)	(17,952,454)	(18,302,572)	*Cash out flows*
Akuisisi - liabilitas sewa	487,343	-	487,343	*Acquisition - lease liabilities*
Transaksi non kas lainnya	10,038	3,061	13,099	*Other non-cash transactions*
Saldo pada 31 Desember 2023	286,418	28,439,091	28,725,509	*Balance as at 31 December 2023*
Arus kas masuk	-	20,739,749	20,739,749	*Cash in flows*
Arus kas keluar	(376,183)	(30,054,474)	(30,430,657)	*Cash out flows*
Akuisisi - liabilitas sewa	274,949	-	274,949	*Acquisition - lease liabilities*
Dampak restrukturisasi pinjaman	-	(2,436,146)	(2,436,146)	*Loan restructurisation impact*
Transaksi non kas lainnya	69,098	716,104	785,202	*Other non-cash transactions*
Saldo pada 31 Desember 2024	254,282	17,404,324	17,658,606	*Balance as at 31 December 2024*

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING / *34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES*

Aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

The Group's monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

		2024		2023		
		Mata uang/ *Currency* (000)	Setara Rp/ *Rp equivalent*	Mata uang/ *Currency* (000)	Setara Rp/ *Rp equivalent*	
Aset keuangan						***Financial assets***
Kas dan setara kas	USD	73,733	1,191,668	166,421	2,565,543	*Cash and cash equivalents*
	Lainnya/*Others*		6,623		8,083	
Piutang usaha	USD	24,951	403,250	78,876	1,218,320	*Trade receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	USD	12,730	205,749	12,182	187,793	*Construction contract work in progress - from customers*
Jumlah aset			1,807,290		3,979,739	*Total assets*
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Utang usaha	USD	28,895	467,012	55,322	852,848	*Trade payables*
	EUR	995	16,768	209	3,583	
	Lainnya/*Others*		3,834		3,837	
Liabilitas yang masih harus dibayar	USD	315,263	5,095,259	312,094	4,811,244	*Accrued liabilities*
	EUR	1,083	18,250	1,137	19,793	
	Lainnya/*Others*		20		20	
Pinjaman bank jangka pendek	USD	-	-	257,933	3,976,294	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	USD	67,555	1,091,824	105,112	1,620,412	*Long-term bank loans*
Jumlah liabilitas			6,692,967		11,288,031	*Total liabilities*
Liabilitas moneter - bersih			(4,885,677)		(7,308,292)	*Monetary liabilities – net*

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain Rp pada tanggal 31 Desember 2024 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, liabilitas moneter bersih akan naik sekitar Rp237.174.

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES *(continued)*

Monetary assets and liabilities mentioned above are translated using the Bank Indonesia closing rate as at 31 December 2024 and 2023.

If assets and liabilities in currencies other than Rp as at 31 December 2024 are translated using the exchange rate as at the issuance date of the consolidated financial statements, the total net monetary liabilities will increase by approximately Rp237,174.

35. INFORMASI SEGMEN USAHA

Untuk kepentingan pelaporan manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut:

a. Pupuk dan amoniak

Segmen pupuk dan amoniak melakukan kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa di bidang perpupukan.

b. Jasa konstruksi

Segmen jasa konstruksi melakukan kegiatan usaha dalam *engineering*, *procurement,* dan *construction* (“EPC”).

c. Lainnya

Segmen lainnya melakukan kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi, pergudangan, dan kegiatan terkait lainnya.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba segmen dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

35. SEGMENT INFORMATION

For management reporting purposes, the Group is organised into business units based on their products and services and has three reportable operating segments as follows:

a. Fertiliser and ammonia

The fertiliser and ammonia segment involves in production, trading and services in fertiliser.

b. Construction services

The construction services segment involves in engineering, procurement and construction (“EPC”).

c. Others

The other segment involves in transportation business activities, expedition, storage and other related activties.

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of decision-making about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on segment income and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements.

35. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / *35. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/*December* 2024					
	Sebelum eliminasi/*Before elimination*					
	Pupuk dan amoniak/ *Fertiliser and ammonia*	**Jasa konstruksi/ *Construction sevices***	**Lainnya/ *Other***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan eksternal	78,709,747	4,376,461	1,302,021	(2,772,021)	81,616,208	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	2,472,135	-	4,397,883	(6,870,018)	-	*Inter-segment revenues*
Pendapatan bersih	81,181,882	4,376,461	5,699,904	(9,642,039)	81,616,208	*Net revenues*
LABA USAHA						***OPERATING INCOME***
Beban pokok pendapatan	(66,075,932)	(1,969,974)	(2,783,144)	5,238,634	(65,590,416)	*Cost of revenues*
Beban penjualan	(2,412,945)	(1,791)	(15,351)	1,390,345	(1,039,742)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(3,025,440)	(720,988)	(1,558,300)	(666,007)	(5,970,735)	*General and administrative expenses*
Pendapatan lainnya - bersih	650,417	3,363,275	(12,239)	(323,513)	3,677,940	*Other income - net*
Pendapatan keuangan	427,729	11,865	1,058,028	(470,662)	1,026,960	*Finance income*
Beban keuangan	(1,504,294)	(352,380)	(384,390)	323,130	(1,917,934)	*Finance costs*
Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	306,406	(885,925)	-	(2,191)	(581,710)	*Share of net profit/(loss) of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak	9,547,823	3,820,543	2,004,508	(4,152,303)	11,220,571	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(2,095,318)	(108,251)	(130,964)	-	(2,334,533)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	7,452,505	3,712,292	1,873,544	(4,152,303)	8,886,038	*Profit for the year*
LAPORAN POSISI KEUANGAN						***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	123,042,326	6,237,359	47,681,994	(37,665,024)	139,296,655	*Segment assets*
Liabilitas segmen	34,840,555	5,113,090	6,580,166	(6,597882)	39,935,929	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	9,172,188	759,596	373,037	(791,916)	9,512,905	*Capital expenditures*

35. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / *35. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/*December* 2023					
	Sebelum eliminasi/*Before elimination*					
	Pupuk dan amoniak/ *Fertiliser and ammonia*	Jasa konstruksi/ *Construction sevices*	Lainnya/ *Other*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan eksternal	77,398,190	2,225,789	2,258,473	(2,675,185)	79,207,267	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	1,539,520	-	11,117,806	(12,657,326)	-	*Inter-segment revenues*
Pendapatan bersih	78,937,710	2,225,789	13,376,279	(15,332,511)	79,207,267	*Net revenues*
LABA USAHA						***OPERATING INCOME***
Beban pokok pendapatan	(61,931,094)	(1,819,636)	(2,711,524)	3,159,108	(63,303,146)	*Cost of revenues*
Beban penjualan	(2,332,737)	(1,408)	(97,633)	1,155,748	(1,276,030)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(3,222,550)	(391,910)	(2,540,243)	1,123,236	(5,031,467)	*General and administrative expenses*
Pendapatan lainnya - bersih	635,370	(81,130)	29,909	(426,311)	157,838	*Other income - net*
Pendapatan keuangan	436,281	11,364	993,357	(515,865)	925,137	*Finance income*
Beban keuangan	(2,304,257)	(172,713)	(560,212)	517,361	(2,519,821)	*Finance costs*
Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	332,356	126,542	-	(11,603)	447,295	*Share of net profit/(loss) of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak	10,551,079	(103,102)	8,489,933	(10,330,837)	8,607,073	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(2,216,718)	(21,816)	(114,980)	-	(2,353,514)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	8,334,361	(124,918)	8,374,953	(10,330,837)	6,253,559	*Profit for the year*
LAPORAN POSISI KEUANGAN						***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	126,258,940	4,301,682	49,888,584	(37,452,876)	142,996,330	*Segment assets*
Liabilitas segmen	42,440,186	11,307,509	9,690,369	(12,406,912)	51,031,152	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	6,231,338	7,670	326,146	(313,563)	6,251,591	*Capital expenditures*

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI / *36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Penugasan dari Pemerintah / *a. Public service obligation*

Permendag No. 4 tahun 2023 menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, disebutkan bahwa wilayah tanggung jawab atau wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani mulai dari lini I, lini II, lini III, sampai dengan lini IV yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Permendag No. 4 tahun 2023 replace Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 on Procurement and Distribution of Subsidised Fertiliser to the agricultural sector, stated that the responsibility or the procurement and distribution of subsidised fertiliser to farmers' groups and/or farmers start of line I, line II, line III, up to the line IV determined by the Company.

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Penugasan dari Pemerintah (lanjutan)

Pada tanggal 18 Januari 2023 dan 12 Januari 2024, Perusahaan menerbitkan surat No. 00075/D/HK/D11200/SP/2023 dan No. 00128/D/HK/D11200/SP/2024, yang di amandemen terakhir melalui adendum II pada tanggal 28 Juni 2024 perihal pembagian wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku masing-masing terhitung, 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2024.

Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi:

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Public service obligation (continued)

On 18 January 2023 and 12 January 2024, the Company issued letter No. 00075/D/HK/D11200/SP/2023 and No. 00128/D/HK/D11200/SP/2024, which was last amended through addendum II on 28 June 2024 regarding the segregation of responsibility area for procurement and distribution of subsidised fertiliser to apply starting 1 January 2023 and 1 January 2024, respectively.

The highest retail prices of subsidised fertilisers are as follows:

Peraturan Menteri Pertanian/*Decree Of the Minister of Agricultural*	Tanggal terbit/ *Date of issuance*	Berlaku/ *Effective period*	Urea per kilogram	NPK per kilogram	Organik/ *Organic* per kilogram	ZA per kilogram	SP-36 per kilogram	Organik cair/ *Liquid organic* per liter/*litre*	NPK Kakao per kilogram
Permentan No. 734 Tahun/ *Year* 2022	24 September 2022	2023	2,250	2,300	-	-	-	-	3,300
Permentan No. 744 Tahun/ *Year* 2023	20 Desember/ *December* 2023	2024	2,250	2,300	-	-	-	-	3,300
Permentan 249/KPTS/SR. 320/M/04/2024	22 April 2024	2024	2,250	2,399	-	-	-	-	-

b. Pengadaan gas bumi

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kep134") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu mengatur harga gas bumi tertentu dimana Menteri atau regulator berhak melakukan evaluasi terhadap harga gas bumi tertentu tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2023, oleh karena ketidakpastian yang dapat timbul dari kemungkinan adanya perbedaan antara pertimbangan dan asumsi yang digunakan oleh Grup dan keputusan dari Menteri atau regulator atas penyesuaian harga gas bumi tahun 2022 dan 2023, Grup melakukan estimasi atas provisi kurang bayar tarif gas bumi untuk penyaluran gas bumi tahun 2022 dan 2023 dengan menggunakan asumsi formula harga gas bumi dan penentuan Wilayah Kerja ("WK") yang terdampak penyesuaian harga gas bumi. Sampai dengan tahun 2023, Grup belum menerima surat pemberitahuan dari Menteri atau regulator terkait harga gas bumi untuk penyaluran gas bumi tahun 2022 dan 2023.

b. Supply of natural gas

Based on the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources ("MOEMR") No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kep134") regarding the Use and the Price of Natural Gas in the Industry Sector regulates certain natural gas price, which the Minister or regulator evaluates the price of certain natural gas. As of 31 December 2023, due to the uncertainty which may arise due to the possibility that there may be a difference between the Group's judgements and assumptions which were used by the Group and the decision from the Minister or regulator for the adjustment of natural gas prices for 2022 and 2023, the Group has estimated the provision for underpayment of natural gas rates for natural gas distribution in 2022 and 2023, using assumptions of natural gas prices formula and determination of Working Areas ("WK") that are affected by the natural gas price adjustment. Up to 2023, the Group has not yet received any further notification from the Minister or regulator regarding the natural gas price for gas procurement in 2022 and 2023.

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Pengadaan gas bumi (lanjutan)

Harga dan volume gas bumi tertentu yang telah ditetapkan untuk Grup melalui perjanjian sebagai berikut:

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Supply of natural gas *(continued)*

The prices and volumes of certain natural gas that have been set for the Group through agreements as follows:

Entitas/ *Entity*	Pemasok/ *Supplier*	Periode kontrak/ *Contract period*	*Volume*
PSP	PT Pertamina EP	1 Januari/*January* 2024 - 31 Desember/*December* 2028	95 *British Thermal Unit per Day* (“BBTUD”)
	PT Pertamina Gas	1 Januari/*January* 2019 - 31 Desember/*December* 2034	40.35 – 95 MMSCFD
	PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	11 September 2024 - 31 Desember/*December* 2028	11 – 29 BBTUD
	PT Tropik Energi Pandan	1 September 2019 - 31 Desember/*December* 2027	1 - 10 BBTUD
	PT Medco E&P Grissik	20 Desember/*December* 2023 - 31 Desember/*December* 2028	73 BBTUD
	PT Medco E&P Indonesia	1 Agustus/*August* 2021 - 27 November 2033	5 - 15 BBTUD
	PT Medco E&P Indonesia dan/*and* PT Medco E&P Lematang	1 Januari/*January* 2023 - 27 November 2033	5 - 17.63 BBTUD
PKG	Kangean Energy Indonesia Ltd	1 Januari/*January* 2022 - 31 Desember/*December 2026*	14.69 *Million Standard Cubic Feet per Day* (“MMSCFD”)
	Husky CNOOC Madura Limited (MDA – MBH)	11 November 2022 - 11 November 2032	85 MMSCFD
	Husky CNOOC Madura Limited (MAC)	4 September 2023 - 30 Juni/*June* 2026	15 MMSCFD
	Husky CNOOC Madura Limited (BD)	24 Januari/*January* 2018 - 19 Oktober/*October* 2032	5 MMSCFD
	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	1 Februari/*February* 2018 - 31 Desember/*December* 2026	10 MMSCFD
	PT Pertamina EP Cepu	21 September 2023 - 16 September 2035	15 MMSCFD
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1 April 2023 - 31 Maret/*March* 2028	0.34 MMSCFD
PIM	PT Pertagas Niaga	30 Juli/*July* 2020 - 31 Mei/*May* 2033	54 BBTUD
PKC	PT Pertamina EP	1 Januari/*January* 2025 - 31 Desember/*December* 2029	30.00 - 33.00 *million cubic feet per day* (“MMCFD”)
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1 Januari/January 2025 - 31 Desember/*December* 2027	22 - 33 BBTUD
	PT Pertamina Hulu Energi	27 Desember/*December* 2023 - 31 Desember/*December* 2030	45 BBTUD

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Pengadaan gas bumi PKT

PKT menandatangani PJBG untuk pembelian gas bumi yang digunakan untuk operasi pabrik pupuk dengan rincian sebagai berikut:

***36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

c. Procurement of PKT's natural gas

PKT entered into GSPA for the purchase of natural gas to be used in the operation of its fertiliser plants, with details as follows:

Periode berlaku/ *Validity period*	Pabrik/ *Plant*	Volume	Pemasok/ *Supplier*
1 Juli/*July* 2003 - 31 Desember/*December* 2022	Kaltim-4	51 BBTUD	PT Pertamina (Persero)
1 Januari/*January* 2012 - 31 Desember/*December* 2021	Kaltim-1 atau/*or* 5[*)]	88 BBTUD	Pearl Oil (Sebuku) Ltd
1 Januari/*January* 2020 31 Desember/*December* 2021	Kaltim-2, Kaltim-3 dan/*and* Kaltim-1A	200.53 BBTUD	PT Pertamina (Persero)
	Amurea[**)]	102 BBTUD	Genting Oil Kasuri Pte. Ltd

[*)] Untuk tahun 2022, penyaluran gas bumi untuk Kaltim-5 ditagih oleh PT Pertamina (Persero)/*For 2022, the distribution of natural gas for Kaltim-5 was billed by PT Pertamina (Persero)*

[**)] Tanggal efektif perjanjian adalah 1 Januari 2025 atau tanggal lain yang disepakati oleh PKT dan pemasok, dengan ketentuan syarat tangguh telah terpenuhi/*The effective date of agreement is on 1 January 2025 or other date agreed by PKT and supplier, provided that the conditions precedent have been satisfied*

Berdasarkan Kep134 poin 8 dan lampiran III serta Keputusan Menteri ESDM No.91.K/MG.01/MEM/2023 ("Kep91") poin 9, Menteri atau regulator melakukan evaluasi terhadap harga gas bumi tertentu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Based on Kep134 point 8 and attachment III and Decree of the MOEMR No.91.K/MG.01/MEM/2023 ("Kep91") point 9, the Minister or regulator evaluates the price of certain natural gas by considering domestic economic conditions.

Pada bulan Desember 2022, PKT membukukan tambahan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi untuk tahun 2021 sebesar Rp357.773. Pembukuan provisi ini disebabkan PKT menerima surat pemberitahuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas"), yang menyampaikan surat dari Kementerian ESDM dimana tarif gas bumi untuk sebagian Wilayah Kerja ("WK") gas yang menyalurkan gas bumi ke pabrik Kaltim-2, 3, 1A, dan 4 diberlakukan kembali menggunakan tarif harga PJBG bukan tarif Kep134.

In December 2022, PKT recorded an additional provision for underpayment of natural gas for 2021 amounting to Rp357,773. This provision is recognised due to PKT received a notification letter from the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities ("SKK Migas"), which conveyed a letter from the MOEMR in which the natural gas rates for some gas Working Area ("WK") that distributed natural gas to Kaltim-2, 3, 1A and 4 were re-enforced to use the price rates in accordance with the GSPA instead of Kep134.

Pada tanggal 24 Februari 2023, PKT menerima surat pemberitahuan dari SKK Migas mengenai harga gas bumi PKT untuk tahun 2022 dan seterusnya dimana SKK Migas bersama produsen gas Kalimantan Timur dan PT Pertamina (Persero) sedang melakukan evaluasi guna mendapatkan harga gas bumi baru untuk menggantikan tarif berdasarkan Kep134 dikarenakan tidak mencukupinya penerimaan bagian negara di WK tertentu untuk melaksanakan skema *Kept-Whole* bagian Kontraktor untuk tahun 2022 ke depan.

On 24 February 2023, PKT received a notification letter from the SKK Migas regarding the natural gas price of PKT for year 2022 onwards in which SKK Migas together with the gas producers in East Kalimantan and PT Pertamina (Persero) are evaluating the new natural gas price to replace the rates based on the Kep134 due to insufficient state revenues in certain WK to implement the Kept-Whole scheme of Contractors' share for 2022 onwards.

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Pengadaan gas bumi PKT (lanjutan)

Pada tanggal 27 September 2023, SKK Migas menyampaikan salinan surat Menteri ESDM terkait penyesuaian harga gas bumi kepada PKT untuk periode 30 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021, yaitu dengan diberlakukannya kembali penggunaan tarif harga formula berdasarkan PJBG untuk beberapa WK tertentu dan bukan berdasarkan tarif Kep134. Sumber pasokan gas bumi dari WK Rapak, Makassar Strait, dan Muara Bakau dihitung secara prorata atas penyerahannya ke pabrik Kaltim-2, 3, 1A dan 4. Kemudian, PKT dan Pertamina telah menandatangani *Letter of Agreement* ("LOA") untuk penyesuaian harga gas bumi untuk periode 30 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021 pada bulan Desember 2023. Oleh karena itu, provisi penyesuaian harga gas bumi sebesar Rp356.483 telah di reklasifikasi menjadi utang usaha kepada PT Pertamina (Persero) pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah dibayarkan penuh pada bulan Januari 2024.

Namun, karena PKT belum menerima pemberitahuan lebih lanjut dari SKK Migas maupun Kementerian ESDM terkait dengan harga gas bumi atas pengadaan gas bumi Kaltim-2, 3, 1A, 4 dan 5 tahun 2022 dan 2023, PKT melakukan estimasi atas provisi kurang bayar tarif gas bumi untuk penyaluran gas bumi tahun 2022 dan 2023, dengan menggunakan asumsi formula harga gas bumi dan penentuan WK yang terdampak penyesuaian harga gas bumi. Dengan estimasi tersebut, PKT membukukan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi sebesar Rp1.691.907 pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 24 Juni 2024, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Menteri ESDM No. T-260/MG.04/MEM.M/2024 ("Surat Menteri ESDM No. T-260") terkait dengan "Perubahan Harga Penyesuaian dan Harga Gas Bumi Tertentu di *Plant Gate* kepada Pengguna Gas Bumi PT Pupuk Kalimantan Timur", yang menjelaskan bahwa harga gas bumi untuk Kaltim-4 pada tahun 2022 ditetapkan untuk disesuaikan dengan Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") untuk Kaltim-4 yang masa berlakunya berakhir pada tahun 2022. Atas penerbitan surat ini, manajemen berpandangan bahwa provisi yang telah dibukukan atas Kaltim-4 (senilai Rp38.904) di tahun 2022 telah sesuai.

***36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***c. Procurement of PKT's natural gas** (continued)*

On 27 September 2023, SKK Migas delivered a copy of the MOEMR letter regarding natural gas price adjustments to PKT for the period of 30 July 2021 up to 31 December 2021, reintroducing the use of formula price rates based on GSPA for certain WKs instead of the KEP134 rate. Sources of natural gas supply from WK Rapak, Makassar Strait and Muara Bakau are calculated on a prorated basis for delivery to the Kaltim-2, 3, 1A and 4 plants. Then, PKT and Pertamina signed a Letter of Agreement ("LOA") for the natural gas price adjustment for the period of 30 July 2021 up to 31 December 2021 in December 2023. Therefore, the natural gas price adjustment provision amounting to Rp356,483 was reclassified as a trade payable to PT Pertamina (Persero) and was paid in January 2024.

However, since PKT has not yet received any further notification from SKK Migas or the MOEMR regarding the natural gas price for Kaltim-2, 3, 1A, 4 and 5 gas procurement in 2022 and 2023, PKT has estimated the provision for underpayment of natural gas rates for natural gas distribution in 2022 and 2023, using assumptions of natural gas prices formula and determination of WK that are affected by the natural gas price adjustment. Based on the estimation, PKT recorded a provision for the underpayment for natural gas procurement amounting to Rp1,691,907 as at 31 December 2023.

On 24 June 2024, the MOEMR issued Letter of MOEMR No. T-260/MG.04/MEM.M/2024 ("ESDM Ministerial Letter No. T-260") regarding "Changes in Adjustment Prices and Certain Natural Gas Prices at Plant Gate to Natural Gas Users of PT Pupuk Kalimantan Timur", which explains that the natural gas price for Kaltim-4 in 2022 is set to be adjusted to the Gas Sales and Purchase Agreement ("PJBG") for Kaltim-4 which expires in 2022. Based on the issuance of this letter, management is of the view that the provision that has been recorded for Kaltim-4 (amounting to Rp38,904) in 2022 was appropriate.

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Pengadaan gas bumi PKT (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, PKT telah menerima tagihan dari PT Pertamina (Persero) atas kurang bayar atas Kaltim-4 tahun 2022 dan mereklasifikasikan provisi atas Kaltim-4 tahun 2022 sebesar Rp38.904 sebagai utang usaha. Pada Januari 2025, PKT telah melakukan pembayaran untuk tagihan ini.

Pada tanggal 12 Juli 2024, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Menteri ESDM No. T-298/MG.04/MEM.M/2024 (”Surat Menteri ESDM No. T-298”) yang menyatakan bahwa harga gas bumi tertentu berdasarkan Kep 91 poin 9 tidak lagi berlaku sejak 1 Januari 2024 dan memberikan informasi mengenai rumus perhitungan harga gas bumi terbaru yang akan berlaku sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2028.

Surat Menteri ESDM No. T-298 juga menyatakan bahwa harga gas bumi tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar USD5.88/MMBTU sehingga PKT membukukan pembalikkan provisi untuk tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp1.734.876. Selain itu, untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2024 dimana PKT masih menerima tagihan dari PT Pertamina (Persero) dengan harga berdasarkan Kep 91, PKT juga telah mencatat pembebanan kurang bayar pengadaan gas bumi tahun 2024 sebesar Rp714.070 yang dicatat sebagai liabilitas yang masih harus dibayar.

Pada tanggal 9 Oktober 2024, Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 (”Kep 255”) yang kembali menekankan bahwa sejak 1 Januari 2024, Harga Gas Bumi Tertentu (”HGBT”) berdasarkan Kep 91 tidak lagi berlaku kepada PKT dan penetapan harga gas bumi harus didasari oleh Surat ESDM No. T-298.

***36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***c. Procurement of PKT's natural gas** (continued)*

On 31 December 2024, PKT has received an invoice from PT Pertamina (Persero) for the underpayment of Kaltim-4 in 2022 and reclassified the provision for Kaltim-4 in 2022 amounting to Rp38,904 as trade payable. In January 2025, PKT has made a payment for this invoice.

On 12 July 2024, the MOEMR issued the Letter of MOEMR No. T-298/MG.04/MEM.M/2024 (”Letter of MOEMR No. T-298”) which stated that the natural gas price based on Kep91 point 9 was no longer applicable since 1 January 2024 and provided the information regarding the new formula for the calculation of the natural gas price which will apply from 1 January 2024 up to 31 December 2028.

The Letter of MOEMR No. T-298 also stated that natural gas price for the year 2022 and 2023 is set at USD5.88/MMBTU, hence PKT booked a reversal of provision for the year of 2022 and 2023 amounting to Rp1,734,876. In addition, for the period of January up to June 2024 which PKT still received invoices from PT Pertamina (Persero) with the price based on Kep 91, PKT has also recorded an underpayment of natural gas procurement amounting to Rp714,070 recorded as accrued liabilities.

On 9 October 2024, the MOEMR published the Decree of the MOEMR No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 (”Kep 255”) which stipulated that since 1 January 2024, the Specific Price of Natural Gas (”HGBT”) which was based on Kep 91 is no longer applicable for PKT and the determination of natural gas price shall refer to the Letter of MOEMR No. T-298.

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Pengadaan gas bumi PKT (lanjutan)

Pada tanggal 17 Februari 2025, PJBG untuk tahun 2022 – 2028 telah difinalisasi dan ditandatangani oleh PKT, Pertamina dan seluruh pihak yang terkait. PJBG ini menggunakan Surat Menteri ESDM No. T-298 sebagai acuan dalam menentukan harga gas bumi dan mengatur bahwa:

- Harga gas bumi untuk pengadaan pada tahun 2022 – 2023 serta keperluan produksi pupuk bersubsidi untuk tahun 2024 dan seterusnya adalah USD5,88/MMBTU; dan
- Harga gas bumi untuk keperluan produksi pupuk non-subsidi untuk tahun 2024 dan seterusnya mengacu kepada rumus yang disediakan pada Surat Menteri ESDM No. T-298.

Menyusul kepastian mengenai harga gas bumi untuk tahun 2022 - 2028 oleh karena terbitnya Surat Menteri ESDM No. T-298 dan PJBG untuk tahun 2022 - 2028, PKT membukukan nilai kurang bayar pengadaan gas bumi pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai liabilitas yang masih harus dibayar.

Selanjutnya, pada Maret 2025, PKT dan Pertamina telah melakukan rekonsiliasi dan menyetujui bahwa jumlah kurang bayar pengadaan gas bumi untuk periode Januari – Juni 2024 adalah sebesar Rp714.070. PKT telah membayar secara penuh atas kurang bayar pengadaan gas bumi pada tanggal 18 Maret 2025.

d. Perjanjian kontrak konstruksi

Rekind

Berikut adalah kontrak yang signifikan dan masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2024:

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Procurement of PKT's natural gas *(continued)*

On 17 February 2025, the GSPA for the year of 2022 – 2028 has been finalised and signed by PKT, Pertamina and all of the affiliated parties. The GSPA refers to Letter of MOEMR No. T-298 as a benchmark in determining the price of natural gas and regulates that:

- *The price of natural gas for the procurement in 2022 – 2023 and for the purpose of production of subsidised fertilisers for the year of 2024 onwards is USD5.88/MMBTU; and*
- *The price of natural gas for the purpose of production of non-subsidised fertilisers for the year 2024 onwards shall refer to the formula which is provided in the Letter of MOEMR No. T-298.*

Following the certainty regarding the price of natural gas for the year of 2022 - 2028 due to the issuance of MOEMR Letter No. T-298 and the GSPA for the year of 2022 - 2028, PKT recognised the amount of underpayment of natural gas procurement as at 31 December 2024 as accrued liabilities.

Subsequently, in March 2025, PKT and Pertamina have performed a reconciliation and mutually agreed that the amount of the underpayment of natural gas procurement for the period of January - June 2024 was Rp714,070. PKT has fully paid the underpayment of natural gas procurement on 18 March 2025.

d. Construction contract agreements

Rekind

Below are the significant contracts that are still ongoing up to 31 December 2024:

Nama proyek/ *Project name*	Pemilik proyek/ *Project owner*	Jadwal/*Schedule*		Nilai kontrak/ *Contract price* (Nilai penuh/*Full amount*)
		Mulai/*Start*	Selesai/ *Completed*	
PLTU Lombok	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	11 April 2018	13 September 2023*	USD18,855,000 Rp1,667,559,287,979
EWTP Balongan	PT Pertamina (Persero)	19 Desember/ *December* 2018	19 April 2025*	Rp128,019,981,000
RDMP OC	RDMP Balikpapan JO	27 Maret/ *March* 2019	23 September 2025	USD6,000,000 Rp524,637,877,559

*Sedang dalam proses perpanjangan/*Extension is in progress.*

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Perjanjian kontrak konstruksi (lanjutan)

PSP

Pada tanggal 13 Oktober 2023, PSP menandatangani perjanjian kontrak konstruksi dengan Wuhuan Engineering Co., Ltd. dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkait proyek pembangunan pabrik Pusri-IIIB Amonia dan Urea yang diperkirakan akan selesai pada Maret 2027. Nilai kontrak dengan Wuhuan Engineering Co., Ltd sebesar USD456.255.000 dan Rp1.171.673 dan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp1.445.857.

e. Klaim tambahan atas proyek pembangunan pabrik NPK di PIM

PIM melakukan perjanjian pembangunan pabrik NPK dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) ("PTPP") pada tanggal 28 Februari 2019 dengan total nilai kontrak sebesar Rp724.500 dan USD21.984.532 (nilai penuh), yang kemudian diperpanjang waktu penyelesaian proyek ini sampai dengan 25 September 2022. Di bulan Januari 2023, PTPP telah menyelesaikan proyek ini. Pada tanggal 15 Agustus 2023, PTPP mengajukan klaim tambahan atas proyek pembangunan pabrik NPK sebesar Rp1.012.652 yang ditolak oleh PIM.

PIM telah melakukan beberapa kali pembahasan penyelesaian klaim atas biaya tambahan terkait penyelesaian pembangunan proyek NPK dengan PTPP yang dimediasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ("Jamdatun") sejak Agustus 2023 hingga April 2024. Berdasarkan hasil mediasi dan pembahasan lanjutan tersebut, PIM dan PTPP sepakat untuk melakukan prosedur tertentu dan melibatkan beberapa pihak independen terkait penyelesaian klaim tersebut.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses penyelesaian atas klaim-klaim tersebut masih berlangsung dan belum terdapat hasil atas prosedur penyelesaian yang disepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut, PIM telah melakukan analisa atas aktivitas, legalitas dan dampak keuangan yang diperkuat dengan opini legal dan penilaian independen dari pihak ketiga untuk mendukung posisi PIM. Manajemen percaya bahwa hasil akhir dari perselisihan ini tidak akan memberikan dampak material yang merugikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup. Oleh karena itu, manajemen tidak membukukan provisi atas perselisihan ini pada tanggal 31 Desember 2024.

***36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***d. Construction contract agreements** (continued)*

PSP

On 13 October 2023, PSP entered into construction contract with Wuhuan Engineering Co., Ltd and PT Adhi Karya (Persero) Tbk related to construction of the Ammonia and Urea Pusri-IIIB plant, which estimated to be completed in March 2027. The contract with Wuhuan Engineering Co., Ltd amounting to USD456,255,000 and Rp1,171,673 and with PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to Rp1,445,857.

e. Additional claim related to construction of NPK's plant at PIM

PIM entered into NPK's plant construction agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) ("PTPP") on 28 February 2019 with a total contract of Rp724,500 and USD21,984,532 (full amount), which the completion of this project was extended to 25 September 2022. In January 2023, PTPP has completed this project. On 15 August 2023, PTPP submitted an additional claim related to construction of NPK's plant amounting to Rp1,012,652 which has been rejected by PIM.

PIM has held several discussions related to claim settlement for additional cost related to completion of NPK's construction with PTPP which mediated by the Deputy Attorney General for Civil and State Administration ("Jamdatun") since August 2023 up to April 2024. Based on the results of the mediation and further discussions, PIM and PTPP agreed to carry out certain procedures and involved several independent parties with the aim of resolving the claim.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the settlement process for these claims is still ongoing and there have been no results from the agreed settlement procedures.

Related to these matters, PIM has carried out analysis related to activities, legality and financial impact which is supported by legal opinions and independent assessments from third party to support PIM's position. Management believes that the final outcome of this dispute will not have a material adverse effect on the Group's consolidated financial statements. Therefore, management did not record any provision for disputes as of 31 December 2024.

37. PENGUKURAN NILAI TERCATAT ASET DAN LIABILITAS BERKAITAN DENGAN BASIS AKUNTANSI KELANGSUNGAN USAHA REKIND

Pada tanggal 31 Desember 2024, Rekind memiliki modal kerja negatif sebesar Rp465.651 dan akumulasi kerugian sebesar Rp4.295.723. Manajemen telah berhasil melaksanakan sebagian besar agenda dari Rencana Penyelamatan Perusahaan ("RPP") untuk memastikan kemampuan Rekind untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Implementasi tersebut telah memperbaiki modal kerja dan mengubah defisiensi modalnya menjadi ekuitas positif. Berikut ini adalah langkah-langkah yang telah berhasil diimplementasikan pada tahun ini dari RPP:

- Merestrukturisasi utang vendor melalui jalur PKPU;
- Merestrukturisasi pinjaman jangka pendek dari bank menjadi jangka panjang dengan periode pelunasan 20 tahun dan bunga 2,0% - 3,5%;
- Merestrukturisasi pinjaman bersama dan pinjaman dari pemegang saham menjadi *perpetual loan*;
- Mendapatkan tambahan modal disetor dari Perusahaan dan tambahan perpetual loan dari Perusahaan untuk pembelian surat utang Perusahaan;
- Memaksimumkan upaya untuk memperoleh persetujuan perpanjangan waktu kontrak dari pemilik proyek untuk menghapuskan kewajiban Rekind atas kerugian akibat keterlambatan yang diatur di dalam kontrak;
- Pelaksanaan inbreng dari Perusahaan atas saham PIU dan aset tanah dan bangunan di Kalibata kepada Rekind.

Langkah dari RPP yang masih belum diimplementasikan adalah proyek-proyek yang diberikan kepada Rekind dengan skema penunjukan khusus, dimana merupakan salah satu dukungan dari Perusahaan. Operasional Rekind kedepannya akan sangat bergantung pada proyek yang dijanjikan dalam rencana pemulihan oleh Perusahaan untuk secara bertahap meningkatkan modalnya.

Kegagalan dalam mendapatkan proyek yang dijanjikan dapat mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Rekind untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Secara keseluruhan, manajemen berkeyakinan bahwa rencana yang dijelaskan di atas akan dapat memperbaiki profitabilitas, meningkatkan likuiditas dan modalnya.

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan dasar bahwa Rekind akan terus berkelangsungan usaha, dan tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakpastian di atas. Manajemen juga telah mengukur nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind agar tetap sesuai dengan basis akuntansi kelangsungan usaha pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian Grup.

37. MEASUREMENT OF THE CARRYING VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES IN RELATION TO THE GOING CONCERN BASIS OF ACCOUNTING OF REKIND

As at 31 December 2024, Rekind has a negative working capital of Rp465,651 and accumulated loss of Rp4,295,723. Management has successfully implemented most agenda of its Corporate Recovery Plan aimed at ensuring Rekind's ability to continue as a going concern. Those implementations have improved its working capital and change its capital deficiency into a positive equity. The followings are successfully implemented in current year from the recovery plan:

- *Restructure its payables to vendors through the PKPU process;*
- *Restructure its short-term bank loans into long-term loans with a 20 years payment period and interest ranging from 2.0% to 3.5%;*
- *Restructure its co-borrowing loans and shareholder's loans into perpetual loans;*
- *Obtain additional capital injection from the Company and additional perpetual loan from the Company to purchase the Company's bonds;*
- *Maximise efforts to obtain approvals for extension of time from project owners to derecognise Rekind's liability for delay liquidated damages;*
- *Execution of asset contributions from the Company for shares in PIU and land and building in Kalibata to Rekind.*

The remaining recovery plan that has not been implemented is the projects offered to Rekind by specific appointment, which is part of support from the Company. The Rekind's future operation will depend on the promised projects in the recovery plan by the Company to steadily increase its capital.

Failure to obtain the promised projects could indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt on Rekind's ability to continue as a going concern.

In overall, management believes that the projects will be obtained as intended and will help improve profitability, enhance liquidity and its capital.

These consolidated financial statements have been prepared on the basis that Rekind will continue as a going concern, and do not include any adjustments that might arise as the result of the above uncertainty. Management has also measured the carrying value of Rekind's assets and liabilities to align with the going concern basis of accounting when preparing the Group's consolidated financial statements.

38. PENGAKUAN PENGHASILAN SEBAGAI AKIBAT DARI RESTRUKTURISASI UTANG YANG TIMBUL DARI KEPUTUSAN HOMOLOGASI TERKAIT DENGAN PKPU REKIND

Proses PKPU dimulai pada tanggal 16 November 2023 dan berakhir dengan keputusan Homologasi pada tanggal 31 Januari 2024. Keputusan tersebut tertuang dalam Rencana Perdamaian yang mengatur skema dan jadwal penyelesaian utang dan pinjaman dengan para kreditur Rekind.

Keputusan Homologasi yang tercapai pada tanggal 31 Januari 2024 memberi dampak keuntungan yang diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.269.765. Rincian keuntungan yang diakui adalah sebagai berikut:

Restrukturisasi utang usaha

Utang usaha Rekind merupakan utang usaha kepada beberapa pemasok yang jadwal pembayarannya telah direstrukturisasi menjadi 3 - 25 tahun tanpa bunga. Dampak selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat utang yang direstrukturisasi menghasilkan keuntungan sebesar Rp833.619 dan amortisasi dampak restrukturisasi utang sebesar Rp53.352 (dicatat sebagai biaya keuangan) yang diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Restrukturisasi pinjaman

Pinjaman jangka panjang Rekind merupakan hasil restrukturisasi pinjaman bank jangka pendek yang jadwal pembayarannya menjadi 20 tahun dengan tingkat bunga 2,0%-3,5% per tahun yang dibayarkan setiap kuartal. Dampak selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat pinjaman yang direstrukturisasi menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.436.146 dan amortisasi dampak restrukturisasi pinjaman sebesar Rp174.104 (dicatat sebagai biaya keuangan) yang diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

38. INCOME RECOGNITION AS A RESULT OF DEBT RESTRUCTURING ARISING FROM HOMOLOGATION DECISION RELATED TO THE REKIND'S PKPU

The PKPU process was started on 16 November 2023 and concluded with the Homologation decision on 31 January 2024. The decision is outlined in the Composition Plan which establishes the scheme and schedule for debt and loan repayment with Rekind's creditors.

Homologation decision reached on 31 January 2024 resulted the gain recognised in the consolidated statements of profit or loss for the year ended 31 December 2024 amounting to Rp3,269,765. The details of the gain recognised are as follows:

Restructured trade payables

Rekind's trade payables represent trade payables to several vendors which the payment schedule have been restructured to 3 – 25 years with no interest. The difference between fair value and the book value of the restructured trade payables resulting gain amounting to Rp833,619 and amortisation of the impact of debt restructuring impact amounting to Rp53,352 (recorded as finance costs) which was recognised in the consolidated statement of profit or loss for the year ended 31 December 2024.

Restructured loans

Rekind's long-term loans are the result of restructuring short-term bank loans, with a repayment schedule extended to 20 years and an interest rate of 2.0%-3.5% per annum which are paid quarterly. The difference between fair value and the book value of the restructured loans resulting gain amounting to Rp2,436,146 and amortisation of the impact of loans restructuring amounting to Rp174,104 (recorded as finance costs) which was recognised in the consolidated statement of profit or loss for the year ended 31 December 2024.

39. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Perubahan kepemilikan dan komposisi pemegang saham untuk saham Perusahaan yang diotorisasi

Berdasarkan Akta Notaris Lumassia, S.H. No. 2 tanggal 20 Maret 2025 perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia (Persero), pemegang saham menyetujui perubahan modal dasar Perusahaan yang terdiri dari 100.000.000 saham tanpa alokasi jenis saham, menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (jumlah penuh) dan 99.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (jumlah penuh).

Sesuai dengan akta notaris, terdapat pula perubahan kepemilikan dan komposisi pemegang saham untuk saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan, dari 25.000.000 saham yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan total nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (jumlah penuh) dan 24.999.999 saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (jumlah penuh).

Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima persetujuan atas Akta Notaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Nomor 121 tanggal 22 Maret 2025, Pemerintah mengalihkan kepemilikan 24.999.999 Saham Seri B, atau 99,99% dari seluruh saham Perusahaan, kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI") melalui proses penyertaan saham inbreng.

Pengalihan saham ini merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan-Pemerintah No. 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham BKI Untuk Pendirian *Holding* Operasional, dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("Danantara"). BKI, sebagai penerima pengalihan, merupakan Perusahaan Induk Operasional (*Holding Operational*) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah melalui Menteri BUMN dan Danantara.

39. SUBSEQUENT EVENTS

Change in ownership and composition of the Company's shareholders for the shares that are authorised

Based on Notarial Deed No. 2 dated 20 March 2025 by Lumassia, S.H., regarding the Changes in Share Types and Changes of the Articles of Association of PT Pupuk Indonesia (Persero), the shareholders approved the change in the Company's authorised share capital which consist of 100,000,000 shares without allocation of share types, into 1 Series A Dwiwarna share with a nominal value amounting to Rp1,000,000 (full amount) and 99,999,999 Series B shares, each with a nominal value amounting to Rp1,000,000 (full amount).

According to the notarial deed, there is also a change in ownership and composition of shareholders for the shares that are issued and fully paid by the Company, from 25,000,000 shares that could only be owned by the Government of the Republic of Indonesia to 1 Series A Dwiwarna share with a total nominal value amounting to Rp1,000,000 (full amount) and 24,999,999 Series B shares, which can be owned by the Government of the Republic of Indonesia and/or the public, each with a nominal value amounting to Rp1,000,000 (full amount).

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Company has not received approval of the Notarial Deed from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Based on Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 121 dated 22 March 2025, the Government transferred its ownership of 24,999,999 Series B shares, representing 99.99% of the Company's total shares, to PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI") through a capital contribution in form of an inbreng transaction.

This share transfer was carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, which is Government Regulation No.15 Year 2025 regarding the Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of BKI for the Establishment of an Operational Holding Company, and Government Regulation No. 16 Year 2025 regarding the Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("Danantara"). BKI, as the recipient of the share transfer, serves as the Operational Holding Company wholly owned by the Government through the Ministry of State-Owned Enterprises and Danantara.

39. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

Perubahan kepemilikan dan komposisi pemegang saham untuk saham Perusahaan yang diotorisasi (lanjutan)

Pemerintah tetap berkedudukan sebagai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan (*Ultimate Beneficial Owner*) melalui kepemilikan langsung 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan kepemilikan tidak langsung saham Seri B milik BKI melalui Danantara.

Penarikan dan pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek

Penarikan

Selama bulan Januari sampai April 2025, Grup melakukan penarikan atas pinjaman bank jangka pendek dari SMBC dan BNI masing-masing sebesar Rp2.090.000 dan Rp500.000.

Pembayaran

Pada bulan Januari dan Maret 2025, Grup melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek kepada Mandiri, SMBC, dan BNI masing-masing sebesar Rp650.000, Rp400.000, dan Rp320.000.

Pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang

Pada bulan Februari 2025, PIU melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang kepada SMBC sebesar Rp5.321 dan USD1.331.211 (nilai penuh).

Pembayaran atas utang salam

Pada bulan Januari 2025, PKG melakukan pembayaran atas utang salam kepada CIMB sebesar Rp150.000.

***39. SUBSEQUENT EVENTS** (continued)*

***Change in ownership and composition of the Company's shareholders for the shares that are authorised** (continued)*

Government of Indonesia remains the ultimate controlling shareholder of the Company (Ultimate Beneficial Owner) through the direct ownership of one Series A Dwiwarna share with special rights and the indirect ownership of BKI's Series B shares through Danantara.

Withdrawals and payment of short-term bank loans

Withdrawals

During January up to April 2025, the Group made withdrawals on short-term bank loans from SMBC and BNI amounting to Rp2,090,000 and Rp500,000, respectively.

Payment

In January and March 2025, the Group made payment of short-term bank loan to Mandiri, SMBC, and BNI amounting to Rp650,000, Rp400,000, and Rp320,000, respectively.

Payment of long-term bank loans

In February 2025, PIU made payment of long-term bank loan to SMBC amounting to Rp5,321 and USD1,331,211 (full amount), respectively.

Payment of salam payables

In January 2025, PKG made payment of salam payable to CIMB amounting to Rp150,000.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

Referensi POJK No. 29/POJK.04/2016 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

POJK NO. 29/POJK.04/2016 and
SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Reference

No.	Uraian Description	Halaman Page
1.	**Ketentuan Umum** **General Terms**	
	a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai: 1. ikhtisar data keuangan penting; 2. informasi saham (jika ada); 3. laporan Direksi; 4. laporan Dewan Komisaris; 5. profil Emiten atau Perusahaan Publik; 6. analisis dan pembahasan manajemen; 7. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; 8. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; 9. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan 10. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan; a. The Annual Report shall at least include the following information: 1. an overview of important financial data; 2. share information (if any); 3. board of Directors' report; 4. board of Commissioners' report; 5. issuer or Public Company profiles; 6. management discussion and analysis; 7. issuer or Public Company governance; 8. issuer or Public Company social and environmental responsibility; 9. audited annual financial statements; and 10. a statement from the Board of Directors and the Board of Commissioners on their responsibility for the Annual Report;	v
	b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami/ Annual reports can present information in the form ofpictures, graphs, tables, and/or diagrams clearly statingthe title and/or description, which is easy to read and understand	v
2.	**Uraian Isi Laporan Tahunan** **Annual Report Contents Description**	
A.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** **Summary of Important Financial Data**	20-39
	Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Financial Highlights includes financial information presented in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting a business if the Issuer's or the Public Company's business activities are less than 3 (three) years, and should at least include:	
	1. pendapatan/penjualan; revenue/sales;	21
	2. laba bruto; gross profit;	21
	3. laba (rugi); profit (loss);	21
	4. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests;	21
	5. total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	21

No.	Uraian Description	Halaman Page
	6. jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent and non- controlling interests;	21
	7. laba (rugi) per saham; profit (loss) per share;	21
	8. jumlah aset; total assets;	20
	9. jumlah liabilitas; total liabilities;	20
	10. jumlah ekuitas; total equities;	20
	11. rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; profit (loss) to total assets ratio;	24
	12. rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; profit (loss) to equity ratio;	24
	13. rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; profit (loss) to revenue/sales ratio;	24
	14. rasio lancar; current ratio;	24
	15. rasio liabilitas terhadap ekuitas; liabilities to equity ratio;	24
	16. rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan liabilities to total assets ratio;	24
	17. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or a Public Company and its industry type;	24
B.	**Informasi Saham** **Share Information**	29
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company shall at least contain: 1. saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares issued for each quarter are presented in the form of comparison for the last 2 (two) years, to include at least: a. jumlah saham yang beredar; total outstanding shares; b. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the Stock Exchange where the securities are listed; c. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share price based on the Stock Exchange where the securities are listed; and d. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. the volume of trading on the Stock Exchange where the securities are listed; Informasi dalam huruf b), huruf c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information on the letter b), c), and d) is only disclosed if the shares are listed on the Stock Exchange;	29

No.	Uraian Description	Halaman Page
	2. dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham *(stock split)*, penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the shares' nominal value, conversion securities issuance, as well as capital additions and deductions, share information as referred to in number 1) shall be added with, at least, explanation regarding: a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; corporate action execution date; b. rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of shares outstanding before and after the corporate action; d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; share price before and after the corporate action;	29
	3. dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham *(delisting)* dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham *(delisting)* tersebut; dan in the event of share trading temporary suspension (suspension) and/or shares delisting during the fiscal year, the shares' suspension and/or delisting reasons shall be explained; and	29
	4. dalam hal penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham *(delisting)* masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham *(delisting)* tersebut. if the share trading temporary suspension as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting) shall be explained.	29
C.	**Laporan Direksi** **Board of Directors Report**	54-67
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' Report shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the Board of Directors' report shall, at the minimum, contain a brief description of:	
	a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; the strategy and strategic policy of the Issuer or Public Company;	57-61
	b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; the Board of Directors' role in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	62-63
	c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; the process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	62-63
	d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	65-66
	e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; the constraints faced by the Issuer or Public Company;	57
	2. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan business prospects overview of the Issuer or Public Company; and	66
	3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. governance implementation of the Issuer or Public Company.	66-67

No.	Uraian Description	Halaman Page
D.	**Laporan Dewan Komisaris** **Board of Commissioner Report**	42-51
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' Report shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; the Board of Directors' performance evaluation regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the strategies formulation and implementation for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	44-46
	2. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan view on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors;	46-47
	3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. view on the Issuer or Public Company's application of governance;	47-48
E.	**Profil Emiten atau Perusahaan Publik** **Profile of the Issuer or Public Company**	74-189
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of the Issuer or Public Company contains, at the minimum, information of: 1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; the name of the Issuer or Public Company, including if there was any change of name, the reason for the change, and effective date of the name change during the fiscal year;	74-75
	2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuer or Public Company, including any branch offices or representative offices, which allows the public access to information on the Issuer or Public Company, including: a. alamat; address; b. nomor telepon; telephone number; c. alamat surat elektronik; dan electronic mail address; and d. alamat situs *web*; web site address;	75
	3. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; a brief history of Issuer or Public Company;	76-81
	4. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan; the vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	96-98
	5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the last articles of association, the business activities carried out during the fiscal year, as well as the type of goods and/or services produced;	85-86
	6. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; the operational area of the Issuer or Public Company; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. the operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operating activities.	90-94
	7. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; the organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at the minimum, the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	104-105
	8. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; a list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	180

No.	Uraian Description	Halaman Page
	9. profil Direksi, paling sedikit memuat: the profile of Directors, to at least include: a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; the name and position per the duties and responsibilities; b. foto terbaru; a recent photograph; c. usia; age; d. kewarganegaraan; nationality; e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; educational and/or certification history; f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on: i. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned; ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and iii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. period of work experience both inside and outside the Issuer or Public Company. g. hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. If the member has no affiliation relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and h. perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, This should be stated clearly;	126-134

No.	Uraian Description	Halaman Page
	10. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The profile of Board of Commissioners, to at least include: a. nama dan jabatan; the name and position; b. foto terbaru; a recent photograph; c. usia; age; d. kewarganegaraan; nationality; e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; educational and/or certification history; f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on: i. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; the legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company concerned; ii. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned; iii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and iv. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. period of work experience both inside and outside the Issuer or Public Company. g. hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. If the member has no affiliation relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and h. pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed; i. perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	116-125
	11. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event of changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners' members that occurred after the fiscal year ends until the deadline for submission of the Annual Report, the composition to be included in the Annual Report is the latest and the previous composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners' members;	106-109
	12. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	139-142

No.	Uraian Description	Halaman Page
	13. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: shareholders names and ownership percentage at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding: a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in the Issuer or Public Company. If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders whom each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	154
	14. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the shares' indirect ownership percentage of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	154
	15. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: the number of shareholders and the percentage of ownership at the fiscal year-end based on the classification of: a. kepemilikan institusi lokal; local institutions ownership; b. kepemilikan institusi asing; foreign institutional ownership; c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	154
	16. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the major and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, presented in the form of schematics or charts;	154
	17. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	159-171, 184-187
	18. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); a chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and the offer price from the start of recording until the end of the financial year and the name of the Stock Exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	172-173

No.	Uraian Description	Halaman Page
	19. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	174-175
	20. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: information on the use of the services of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) and their networks/associations/allies include: a. nama dan alamat; name and address; b. periode penugasan; assignment period; c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided; d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fee for each assignment given during the fiscal year; and e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan if AP and KAP and their networks/associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies can be presented in tabular form.	181
	21. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	182-183
F.	**Analisis dan Pembahasan Manajemen** **Management Discussion and Analysis**	192-349
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management Discussion and Analysis shall include analysis and discussion of the financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the fiscal year, to at least have: 1. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per operating segment based on the Issuer or Public Company's type of industry, to name a few: a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, including the process, capacity, and its development; b. pendapatan/penjualan; dan revenue/sales; and c. profitabilitas; profitability;	196-216
	2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance including a comparison of financial performance in the last 2 (two) years, an explanation of the cause of any changes and the impact of such changes, to name a few: a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets; b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c. ekuitas; equity; d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and e. arus kas; cash flow;	220-261 221-227 227-232 232-234 235-351 251-258
	3. kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay the debt by presenting the relevant ratios;	262-266

No.	Uraian Description	Halaman Page
	4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; the collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	266-268
	5. struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on capital structure accompanied by the basis for determining the policy;	268-269
	6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion on material commitments for capital investments with explanations, to name a few: a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of such commitments; b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; sources of funds to meet such commitments; c. mata uang yang menjadi denominasi; dan currency-denominated; and d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; planned measures by the Issuer or Public Company to cover the risks of foreign currency positions;	269-271
	7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion regarding capital goods investments realized in the last fiscal year, to name a few: a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investments; b. tujuan investasi barang modal; dan capital goods investment objectives; and c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; value of capital goods investments realized;	269-272
	8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); material information and facts occurring after the date of the auditor's report (if any);	273
	9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; business prospects of the Issuer or Public Company based on the condition of the industry, the general economy, and the international markets supporting quantitative data from trusted data sources;	284-285
	10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the targets/projections at the beginning of the year with the results achieved (realized), including: a. pendapatan/penjualan; revenue/sales; b. laba (rugi); profit (loss); c. struktur modal (capital structure); atau capital structure; or d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	274-279
	11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for one (1) year ahead, including: a. pendapatan/penjualan; revenues/sales; b. laba (rugi); profit (loss) c. struktur modal (*capital structure*); capital structure; d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	279-284
	12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; The Issuer or Public Company's marketing of goods and/or services, at least including the marketing strategy and market share;	217-219

No.	Uraian Description	Halaman Page
	13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least: a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income; b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. If the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	285-287
	14. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: realization of the use of proceeds from the public offering, provided that: a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan if, during the fiscal year, the Issuer must submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; if there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	289-290

No.	Uraian Description	Halaman Page
	15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, business merger/ consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing: a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; the date, value, and object of the transaction; b. nama pihak yang melakukan transaksi; the name of the party conducting the transaction; c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); the nature of the affiliation relationship (if any); d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction; e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksuddalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: if there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information: i. pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); dan a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and ii. peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle;	290-293
	g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; for affiliated or material transactions, which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. If the affiliated or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added. h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added; i. dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; if there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction; then this matter shall be disclosed;	
	16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in regulations and legislation that significantly impact the Issuer or Public Company and the impact on the financial statements (if any); and	295-296
	17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons, and impact on the financial statements (if any);	297

No.	Uraian Description	Halaman Page
G.	**Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik** **Corporate Governance of Issuer or Public Company**	351-749
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at the minimum, contains:	
	a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year include:	
	i. keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan the GMS' resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year are realized in the fiscal year; and	430-436
	ii. keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that has not been realized and the reasons for not realizing them;	431-439
	b. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; if the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	426, 427
	2. Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at the minimum, contains:	
	a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are described and can be presented in tabular form.	492-500
	b. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam *(charter)* Direksi; a statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	487
	c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the Board of Directors' meeting frequency, Board of Directors' meeting with the Board of Commissioners, and the Board of Directors member's attendance level in the meeting including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the Board of Directors member's level of attendance at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form.	547-555
	d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency improvement of the Board of Directors members:	
	i. kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan training and/or improving the competence of members of the Board of Directors policy, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	501
	ii. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	145-146
	e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain: i. prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and ii. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	523-525

No.	Uraian Description	Halaman Page
	f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. if the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	523-525
	3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at the minimum, contains:	
	a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	448-450, 452-453
	b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	448
	c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the Board of Commissioners meeting frequency, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in such meetings including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the Board of Commissioners members' attendance level at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	547-550
	d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	
	i. kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on training and/or improving the Board of Commissioners members' competence, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	454
	ii. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	144-145
	e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at the minimum containing:	
	i. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	534-537
	ii. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	534-537
	iii. pihak yang melakukan penilaian; dan the party conducting the assessment; and	534-537
	f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: the Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	
	i. prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	477-478
	ii. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence, and attendance at meetings;	477-478
	4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
	a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and members nomination process of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and	441-442, 484, 609-611

No.	Uraian Description	Halaman Page
	b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
	i. prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	538-539
	ii. struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus, and others; and	539-542
	iii. besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	543-544
5.	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The Sharia Supervisory Board, the Issuer or Public Company that runs the business activities based on Islamic principles as stated in the articles of association shall, at the minimum, include: a. nama; names; b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; the legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; c. periode penugasan dewan pengawas syariah; the period of assignment of the sharia supervisory board; d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the Shariah Supervisory Board; and e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and mode of administration advice and suggestions as well as monitoring compliance with Sharia Principles in the Capital Market of the Issuer or Public Company;	N/R
6.	Komite audit, paling sedikit memuat: The Audit Committee, including, at the minimum:	
	a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; names and positions of the committee members;	561-563
	b. usia; age;	563-565
	c. kewarganegaraan; nationality;	563-565
	d. riwayat pendidikan; education history;	563-565
	e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including:	563-565
	i. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as a committee member;	561-563
	ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any); and	563-565
	iii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	563-565
	f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and tenure of Audit Committee members;	561-563
	g. pernyataan independensi komite audit; statement of Audit Committee independence;	565-566
	h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any);	146
	i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policy and implementation of Audit Committee meeting frequency and level of attendance of Audit Committee members at the meetings;	569

No.	Uraian Description	Halaman Page
	j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit; implementation of Audit Committee activities in the fiscal year in the Audit Committee guidelines or charter;	570-572
	7. komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at the minimum, containing:	
	a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; names and positions of the committee members;	586-587
	b. usia; age;	587-588
	c. kewarganegaraan; nationality;	587-588
	d. riwayat pendidikan; education history;	587-588
	e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including:	
	i. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as a committee member;	586-587
	ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any); and	587-588
	iii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	587-588
	f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and tenure of committee members;	586-587
	g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	589-590
	h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that has been followed in the financial year (if any);	146
	i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	590-591
	j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); statement that it has established committee guidelines or charter;	589
	k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policy and implementation of committee meeting frequency and level of attendance of committee members at the meetings;	592-593
	l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan a brief description of the committee's activities in the fiscal year;	590-591
	m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: if no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	N/R
	i. alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	N/R
	ii. pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	N/R
	8. komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and responsibilities of the Board of Commissioners, at the minimum, containing:	
	a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	594-603
	b. usia; age;	594-603

No.	Uraian Description	Halaman Page
	c. kewarganegaraan; nationality;	594-603
	d. riwayat pendidikan; educational history;	594-603
	e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	594-603
	i. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as a committee member;	594-603
	ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	594-603
	iii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period both inside and outside the Issuer or Public Company;	594-603
	f. periode dan masa jabatan anggota komite; the period and term of office of the committee members;	594-603
	g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	594-603
	h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any); and	146
	i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	604-605
	j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam *(charter)* komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	604
	k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members in those meetings; and	605-607
	l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	607-609
9.	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate Secretary, including, at the minimum:	
	a. nama; name;	625-626
	b. domisili; domicile;	625-626
	c. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
	i. dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as Corporate Secretary; and	626
	ii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	626
	d. riwayat pendidikan; education history;	626
	e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competence improvement followed during the fiscal year; and	146
	f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the Corporate Secretary activities in the fiscal year;	629-633
10.	Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal Audit Unit, including, at the minimum:	
	a. nama kepala unit audit internal; name of the Internal Audit Unit head;	639-640
	b. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
	i. dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan the legal basis for the appointment as Internal Audit Unit head; and	639

No.	Uraian Description	Halaman Page
	ii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience with its period both inside and outside of the Issuer or Public Company;	
	c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); professional internal audit qualifications or certifications (if any);	640-641
	d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	146
	e. struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and positions within the Internal Audit Unit;	641-643
	f. uraian tugas dan tanggung jawab; duties and responsibilities description;	646-648
	g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan statement that it has established Internal Audit Unit guidelines or charter; and	644-645
	h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year, including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	649-653
11.	uraian mengenai sistem pengendalian internal *(internal control)* yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the internal control system applied by the Issuer or Public Company, at the minimum, including:	
	a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control and compliance with other laws and regulations; and	664-667
	b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the internal control system effectiveness;	667
	c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	668
12.	sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the risk management system applied by the Issuer or Public Company, at the minimum, including:	
	a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; a general description of the Issuer or Public Company risk management system;	669-670, 677-678
	b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; risks types and their management; and	679-685
	c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the Issuer or Public Company risk management system effectiveness;	685, 686-6878
	d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the risk management system;	686
13.	perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners (if any), at the minimum, contain:	
	a. pokok perkara/gugatan; case/litigation description;	689-692
	b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan case/litigation settlement status; and	689-692
	c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; impact on the Issuer or Public Company condition;	689-692
14.	informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any)	692
15.	informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information regarding the Issuer or Public Company code of ethics, including:	

No.	Uraian Description	Halaman Page
	a. pokok-pokok kode etik; code of ethics content;	699
	b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of code of ethics socialization and enforcement efforts; and	700
	c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company	699-700
16.	uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program/MSOP*) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP);	689
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
	a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	N/R
	b. jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	N/R
	c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	N/R
	d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	N/R
17.	uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	N/R
	a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	N/R
	b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the said policy;	N/R
18.	uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the whistleblowing system in the Issuer or a Public Company (if any), including:	
	a. cara penyampaian laporan pelanggaran; violation report submission;	744-746
	b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistle-blowers;	747-748
	c. penanganan pengaduan; complaint handling;	748-749
	d. pihak yang mengelola pengaduan; dan the party managing the complaint;	738
	e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: complaint handling results, at the minimum:	
	i. jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed during the fiscal year; and	748
	ii. tindak lanjut pengaduan; complaint follow up; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter must be disclosed.	748
19.	uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at the minimum containing:	

No.	Uraian Description	Halaman Page
	a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa *(kickbacks), fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratuities in Issuers or Public Companies; and	710-713, 703, 706
	b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. If the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy must be explained.	713-714
	20. penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of Code of Corporate Governance guidelines by the Issuer that issues equity securities or the Public Company, including:	N/R
	a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau statement regarding recommendations have been implemented; and/or	N/R
	b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). description of the recommendations that have not been implemented, the reasons, and the implementation alternatives (if any); Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	N/R
H.	**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik (Lampiran SEOJK 16/2021)** **Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company (SEOJK 16/2021 Attachment)**	752-757
	Bagian Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik disajikan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini. The Social and Environmental Responsibility section of the Issuer or Public Company is presented in the form of a Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report.	752-757
I.	**Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit** **Audited Annual Financial Report**	760-895
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared following financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulate the periodic reports of securities companies if the Issuer is a securities company.	760-895
J.	**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.** **Board of Directors and Board of Commissioners' Statement on Responsibility for The Annual Report**	70-71
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Board of Directors and Board of Commissioners' Affidavit on the responsibility for the Annual Report prepared following the format of the Board of Directors and Board of Commissioners' Statement on Responsibility for the Annual Report.	70-71

Referensi Kriteria Annual Report Award (ARA)

Annual Report Award (ARA) Criteria Reference

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
Laporan Tahunan Annual Report		
A.1.1	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Contents of the Annual Report	1-757
A.1.1.1	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	760-895
A.1.1.2	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan Statement letter from members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report	70-71
A.1.2	Ikhtisar Data Keuangan Penting Overview of Important Financial Data	
A.1.2.0	Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun Financial information presented in comparative form for 3 (three) financial years or since starting its business if the Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years	20-39
A.1.2.1	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah asset Profit (loss) to total assets ratio	24
A.1.2.2	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Profit (loss) to equity ratio	24
A.1.2.3	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan Profit (loss) to revenue/sales ratio	24
A.1.2.4	Rasio lancar Current ratio	24
A.1.2.5	Rasio liabilitas terhadap ekuitas Liabilities to equity ratio	24
A.1.2.6	Rasio liabilitas terhadap jumlah asset Liabilities to total assets ratio	24
A.1.2.7	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Perusahaan dan jenis industrinya Other information and financial ratios relevant to the Company and its industry type	24
A.1.3	Informasi Saham (Jika Ada) Share Information (If Any)	29
A.1.3.1	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Shares issued for each quarter are presented in the form of comparison for the last 2 (two) years.	29
A.1.3.1.a	Jumlah saham yang beredar Total outstanding shares	29
A.1.3.1.b	Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan Market capitalization based on the price on the Stock Exchange where the securities are listed	29
A.1.3.1.c	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan The highest, lowest, and closing share price based on the Stock Exchange where the securities are listed	29
A.1.3.1.d	Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan The volume of trading on the Stock Exchange where the securities are listed	29

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.3.2	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal If of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the shares' nominal value, conversion securities issuance, as well as capital additions and deductions	29
A.1.3.3	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut If share trading temporary suspension (suspension) and/or shares delisting during the Financial year, the shares' suspension and/or delisting reasons shall be explained	29
A.1.3.4	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut If the share trading temporary suspension as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting) shall be explained	29
A.1.4	Laporan Direksi Board of Directors Report	54-67
A.1.4.1	Kinerja Perusahaan The Company Performance	65-66
A.1.4.1.a	Strategi dan kebijakan strategis Perusahaan The strategy and strategic policy of the Company	57-61
A.1.4.1.b	Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan The Board of Directors' role in formulating strategies and strategic policies of the Company	62-63
A.1.4.1.c	Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi The process carried out by the Board of Directors to ensure the strategy implementation	62-63
A.1.4.1.d	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perusahaan Comparison between the results achieved and those targeted by the Company	65-66
A.1.4.1.e	Kendala yang dihadapi The constraints faced by the Company	57
A.1.4.2	Gambaran tentang prospek usaha Perusahaan Business prospects overview of the Company	66
A.1.4.3	Penerapan governansi Perusahaan Governance implementation of the Company	66-67
A.1.5	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioner Report	42-51
A.1.5.1	Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Perusahaan, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan The Board of Directors' performance evaluation regarding the Company' management, including the supervision of the Board of Commissioners in the strategies formulation and implementation	44-46
A.1.5.2	Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yang disusun oleh Direksi View on the business prospects of the Company prepared by the Board of Directors	46-47
A.1.5.3	Pandangan atas penerapan governansi Perusahaan View on the Company's application of governance	47-48
A.1.6	Profil Perusahaan Profile of the Company	74-189
A.1.6.1	Akses terhadap Perusahaan termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perusahaan Access to Issuer or Public Company, including any branch offices or representative offices, which allows the public access to information on the Company	74-75
A.1.6.1.a	Alamat Address	75

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.6.1.b	Nomor telepon Telephone number	75
A.1.6.1.c	Alamat surat elektronik Electronic mail address	75
A.1.6.1.d	Alamat situs web Website address	75
A.1.6.2	Riwayat singkat Perusahaan A brief history of the Company	76-81
A.1.6.3	Visi dan misi Perusahaan serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan The vision and mission of the Company as well as the corporate culture or corporate values	96-98
A.1.6.4	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan Business activities according to the last articles of association, the business activities carried out during the Financial year, as well as the type of goods and/or services produced	85-86
A.1.6.5	Wilayah operasional Perusahaan. wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan The operational area of the Company. The operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the Company's operating activities	90-94
A.1.6.6	Struktur organisasi Perusahaan dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan The organizational structure of the Company in the form of a chart, at the minimum, the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and the Board of Commissioners, accompanied by names and positions	104-105
A.1.6.7	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan A list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance	180
A.1.6.8	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk table Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the Financial year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	139-142
A.1.6.9	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of the services of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) and their networks/associations/allies include:	181
A.1.6.9.a	Nama dan Alamat Name and Address	181
A.1.6.9.b	Periode Penugasan Assignment Period	181
A.1.6.9.c	Informasi Jasa Audit yang Diberikan Information on Audit and/or Non Audit Services Provided	181
A.1.6.9.d	Biaya jasa (fee) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the Financial year	181
A.1.6.9.e	Informasi jasa non audit yang diberikan Information on non-audit services provided	181
A.1.6.9.f	Biaya jasa (fee) non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the Financial year	181
A.1.6.9.g	Catatan: dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut (atas poin A.1.6.9.e & f) Note: If AP and KAP and their networks/associations/allies, which are appointed do not provide nonaudit services, then the information is disclosed (at point A.1.6.9.e & f)	181
A.1.6.10	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP	181

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.7	Profil Direksi Profile of the Board of Directors	126-134
A.1.7.1	Nama dan Jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab The name and position per the duties and responsibilities	126-134
A.1.7.2	Usia Age	126-134
A.1.7.3	Kewarganegaraan Nationality	126-134
A.1.7.4	Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi Educational and/or Certification History	126-134
A.1.7.5	Riwayat Jabatan, meliputi informasi: Position History, including information on:	126-134
A.1.7.5.a	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Company concerned	126-134
A.1.7.5.b	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member, and other positions inside and outside the Company.	126-134
A.1.7.5.c	Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.5.b) Note: If a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, this will be disclosed (at point A.1.7.5.b)	126-134
A.1.7.5.d	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Period of work experience both inside and outside the Company	126-134
A.1.7.6	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including vthe names of affiliated parties.	126-134
A.1.7.7	Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.7.6) Note: If a member of the Board of Directors does not have an affiliate relationship, the Company shall disclose this (at point A.1.7.6)	126-134
A.1.7.8	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi yang terakhir dan sebelumnya Changes in the composition of members of the Board of Directors and reasons for the changes. If a change in the composition of members of the Board of Directors occurs after the financial year ends until the deadline for submitting the Annual Report, the composition listed in the Annual Report is the composition of the latest and previous members of the Board of Directors	106-109
A.1.7.9	Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.8). If there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed; (at point A.1.7.8).	106-109
A.1.8	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	116-125
A.1.8.1	Nama dan Jabatan Name and Position	116-125
A.1.8.2	Usia Age	116-125
A.1.8.3	Kewarganegaraan Nationality	116-125
A.1.8.4	Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi Educational and/or Certification History	116-125

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.8.5	Riwayat Jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	116-125
A.1.8.5.a	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris The legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners	116-125
A.1.8.5.b	Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Perusahaan yang bersangkutan The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned	116-125
A.1.8.5.c	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, and other positions inside and outside the Company	116-125
A.1.8.5.c1	Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.5.c1). Note: If a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed (at point A.1.8.5.c1)	116-125
A.1.8.5.d	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Period of work experience both inside and outside the Company	116-125
A.1.8.6.a	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties	116-125
A.1.8.6.b	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.8.6.a). If the member has no affiliation relationship, the Company shall disclose this matter (at point A.1.8.6.a).	116-125
A.1.8.7	Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode Statement of independence of the independent commissioner if the independent commissioner has served more than 2 (two) terms	116-125
A.1.8.8.a	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya Changes in the composition of members of the Board of Commissioners and reasons for the changes. If that a change in the composition of the members of the Board of Commissioners occurs after the financial year ends until the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the composition of the latest and previous members of the Board of Commissioners	106-107
A.1.8.8.b	Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.8.a) If there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this will be disclosed (at point A.1.8.8.a)	106-107
A.1.9	Informasi Pemegang Saham Shareholder Information	154
A.1.9.1	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Shareholders names and ownership percentage at the beginning and end of the Financial year, which consists of information regarding:	154
A.1.9.1.a	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Public Company	154
A.1.9.1.b1	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in the Company.	154
A.1.9.1.b2	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.1.b.1). If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed (at point A.1.9.1.b.1);	154

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.9.1.c	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik Community shareholder group, namely the group of shareholders whom each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company	154
A.1.9.2.a	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris The shares' indirect ownership percentage of the Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the Financial year,including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners	154
A.1.9.2.b	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris TIDAK memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham perusahaan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.2.a) If all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed (at point A.1.9.2.a)	154
A.1.9.3	Klasifikasi kepemilikan yang dimiliki perusahaan Classification of ownership owned by the company	154
A.1.9.3.a	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi The number of shareholders and the percentage based on the classification	154
A.1.9.4	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the major and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, presented in the form of schematics or charts;	154
A.1.9.5	Apakah perusahaan memiliki pengendalian dan/atau pengendalian bersama atas: Whether the company has control and/or joint control over:	
A.1.9.5.a	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Perusahaan memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut The name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	159-171, 184-187
A.1.9.6	Apakah perusahaan pernah melakukan aksi korporasi berikut ini: Does the company ever carried out the following corporate actions:	
A.1.9.6.a	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada) A chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and the offer price from the start of recording until the end of the financial year and the name of the Stock Exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any)	172-173
A.1.9.7	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud sebelumnya, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada) Other securities listing information other than the securities as referred before, which have not yet matured in the Financial year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	174-175
A.1.10	Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	192-349
A.1.10.1	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Perusahaan A review of operations per operating segment based on the Company's type of industry	192-216
A.1.10.1.a	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya Production, including the process, capacity, and its development	192-216

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.10.1.b	Pendapatan/Penjualan Revenue/Sales	192-216
A.1.10.1.c	Profitabilitas Profitability	192-216
A.1.10.2	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut Comprehensive financial performance including a comparison of financial performance in the last 2 (two) years, an explanation of the cause of any changes and the impact	220-261
A.1.10.2.a	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total asset Current assets, non-current assets, and total assets	221-227
A.1.10.2.b	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas Current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities	227-232
A.1.10.2.c	Ekuitas Equity	232-234
A.1.10.2.d	Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi), komprehensif; dan Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	235-351
A.1.10.2.e	Arus Kas Cash Flow	251-258
A.1.10.3	Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan Ability to pay the debt by presenting the relevant ratios	262-266
A.1.10.4	Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan The collectibility level of the Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations	266-268
A.1.10.5	Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud Capital structure and management policies on capital structure accompanied by the basis for determining the policy	268-269
A.1.10.6	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan Discussion on material commitments for capital investments with explanations	269-271
A.1.10.6.a	Tujuan dari ikatan tersebut The purpose of such commitments	269-271
A.1.10.6.b	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut Sources of funds to meet such commitments	269-271
A.1.10.6.c	Mata uang yang menjadi denominasi Currency-denominated	269-271
A.1.10.6.d	Langkah yang direncanakan Perubahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Planned measures by the Issuer or Public Company to cover the risks of foreign currency positions	269-271
A.1.10.7	Bahasan mengenai investasi barang modal yang yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir: Discussion regarding capital goods investments realized in the last Financial year	269-272
A.1.10.7.a	Jenis investasi barang modal Type of capital goods investments	269-272
A.1.10.7.b	Tujuan investasi barang modal Capital goods investment objectives	269-272
A.1.10.7.c	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan Value of capital goods investments realized	269-272
A.1.10.8	Prospek usaha dari Perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya Business prospects of the Issuer or Public Company based on the condition of the industry, the general economy, and the international markets supporting quantitative data from trusted data sources	284-285
A.1.10.9	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) Comparison between the targets/projections at the beginning of the year with the results achieved (realized)	274-279

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.10.9.a	Pendapatan/penjualan Revenue/sales	276
A.1.10.9.b	Laba (rugi) Profit (loss)	277
A.1.10.9.c	Struktur modal (capital structure) Capital structure	278
A.1.10.9.d	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other matters that are considered important for the Company	279
A.1.10.10	Target/proyeksi yang ingin dicapai Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang Targets/projections to be achieved by the Company for one (1) year ahead	279-284
A.1.10.10.a	Pendapatan/penjualan Revenues/sales	280
A.1.10.10.b	Laba (rugi) Profit (loss)	281
A.1.10.10.c	Struktur modal (*capital structure*) Capital structure	281-282
A.1.10.10.d	Kebijakan dividen Dividend policy	282-284
A.1.10.10.e	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other matters that are considered important for the Company	284
A.1.10.11	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Perusahaan, paling sedikit mengenai Strategi pemasaran dan Pangsa pasar The Company's marketing of goods and/or services, at least including the marketing strategy and market share;	217-219
A.1.10.12	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir Description of dividends for the last 2 (two) Financial years	285-287
A.1.10.12.a	Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income	285
A.1.10.12.b	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends	286-287
A.1.10.12.c	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) The amount of dividends per share (cash and/or non-cash)	286-287
A.1.10.12.d	Jumlah dividen per tahun yang dibayar The amount of dividends paid annually	286-287
A.1.10.12.d1	Catatan: Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Note: If the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed	286-287
A.1.10.13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	289-290
A.1.10.13.a	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku If, during the Financial year, the Issuer must submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the Financial year	289-290
A.1.10.13.b	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut If there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change	289-290

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.10.14	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku Material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliatedtransactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the Financial year	290-294
A.1.10.14.	Apakah perusahaan mengalami transaksi berikut ini selama tahun buku? Does the Company experience the following transactions during the Financial year?	
A.1.10.14.a	Tanggal, nilai, dan objek transaksi The date, value, and object of the transaction	290-294
A.1.10.14.b	Nama pihak yang melakukan transaksi The name of the party conducting the transaction	290-294
A.1.10.14.c	Sifat hubungan afiliasi (jika ada) The nature of the affiliation relationship (if any)	290-294
A.1.10.14.d	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi Explanation of the fairness of the transaction	290-294
A.1.10.14.e	Pemenuhan ketentuan terkait Compliance with related provisions	290-294
A.1.10.14.f	Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Perusahaan juga mengungkapkan informasi: If there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information	290-294
A.1.10.14.f1	Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle	290-294
A.1.10.14.f2	Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*) The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle	290-294
A.1.10.14.g	Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan For affiliated or material transactions, which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously	290-294
A.1.10.14.h	Catatan: Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut (atas point A.1.10.14.g) If the affiliated or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added (at point A.1.10.14.g)	290-294
A.1.10.14.i	Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi tersebut for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added	290-294
A.1.10.14.j	Catatan: dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (atas point A.1.10.14.i) Note: if there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction; then this matter shall be Disclosed (at point A.1.10.14.i)	290-294

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.10.15	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada) Changes in regulations and legislation that significantly impact the Issuer or Public Company and the impact on the financial statements (if any)	290-294
A.1.11	Governansi Perusahaan 1 Corporate Governance 1	
A.1.11.1.a	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku Information regarding the resolutions of the GMS in the Financial year and 1 (one) year before the Financial year	430-436
A.1.11.1.a1	Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku The GMS' resolutions in the Financial year and 1 (one) year before the Financial year are realized in the Financial year	431-439
A.1.11.1.a2	Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan Resolutions of the GMS in the Financial year and 1 (one) year before the Financial year that has not been realized and the reasons for not realizing them	430-436, 431-439
A.1.11.1.b	Dalam hal Perusahaan menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; If the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	426, 427
A.1.11.2	Pengungkapan terkait Direksi Disclosures related to the Board of Directors	
A.1.11.2.a	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors	492-500
A.1.11.2.b	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi Statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors	487
A.1.11.2.c	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Directors' meeting frequency, Board of Directors' meeting with the Board of Commissioners, and the Board of Directors member's attendance level in the meeting including attendance at the GMS;	547-555
A.1.11.2.c1	Kebijakan terkait frekuensi rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Policies regarding the frequency of Board of Directors meetings and meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners	547-555
A.1.11.2.c2	Frekuensi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Frequency of holding Board of Directors meetings and meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners	547-555
A.1.11.2.c3	Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat direksi, rapat direksi dekom, RUPS Information on the Board of Directors member's level of attendance at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS	547-555
A.1.11.2.d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi Training and/or competency improvement of the Board of Directors members	145-146
A.1.11.2.d1	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada) Training and/or improving the competence of members of the Board of Directors policy, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any)	501
A.1.11.2.d2	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the Financial year (if any)	145-146
A.1.11.2.e	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the Financial year	523-525
A.1.11.2.e1	Prosedur penilaian kinerja Performance appraisal procedures	523-525

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.2.e2	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat The criteria used, such as performance achievements during the Financial year, competence and attendance at meetings	523-525
A.1.11.2.f	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.2.e1 & e2) Note: If the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed (at point A.1.11.2.e1 & e2)	523-525
A.1.11.3	Pengungkapan terkait Dewan Komisaris Disclosures related to the Board of Commissioners	
A.1.11.3.a	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Duties and responsibilities of the Board of Commissioners	448-450, 452-453
A.1.11.3.b	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris A statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners	448
A.1.11.3.c	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Commissioners meeting frequency, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in such meetings including attendance at the GMS;	547-550
A.1.11.3.d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners	144-145
A.1.11.3.d1	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat Policy on training and/or improving the Board of Commissioners members' competence, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners	454
A.1.11.3.d2	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the Financial year (if any)	144-145
A.1.11.3.e	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners	534-537
A.1.11.3.e1	Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Procedures for implementing performance appraisals	534-537
A.1.11.3.e2	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat The criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings	534-537
A.1.11.3.e3	Pihak yang melakukan penilaian The party conducting the assessment	534-537
A.1.11.3.f	Penilaian Dewan komisaris terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku, meliputi: The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the Financial year, include:	477-478
A.1.11.3.f1	Prosedur penilaian kinerja Performance appraisal procedures	477-478
A.1.11.3.f2	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat The criteria used such as performance achievements during the Financial year, competence, and attendance at meetings	477-478
A.1.11.4	Pengungkapan terkait Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Disclosures related to nomination and remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	441–442, 484, 609-611

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.4.a	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Nomination procedure, including a brief description of the policies and members nomination process of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners	441–442, 484, 609-611
A.1.11.4.b	Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	538-539
A.1.11.4.b1	Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	538-539
A.1.11.4.b2	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus, and others	539-542
A.1.11.4.b3	Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners;	543-544
A.1.11.5	Pengungkapan terkait Dewan Pengawas Syariah, bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Disclosures related to the Sharia Supervisory Board, for companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association	N/R
A.1.11.5.a	Nama Name	N/R
A.1.11.5.b	Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah The legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board	N/R
A.1.11.5.c	Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah The period of assignment of the Sharia Supervisory Board	N/R
A.1.11.5.d	Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Duties and responsibilities of the Shariah Supervisory Board	N/R
A.1.11.5.e	Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Perusahaan Frequency and mode of administration advice and suggestions as well as monitoring compliance with Sharia Principles in the capital market of the Company	N/R
A.1.12	Governansi Perusahaan 2 Corporate Governance 2	
A.1.11.6	Pengungkapan terkait Komite Audit Disclosures related to the Audit Committee	561-571
A.1.11.6.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Names and positions of the committee members	561-564
A.1.11.6.b	Usia Age	561-564
A.1.11.6.c	Kewarganegaraan Nationality	561-564
A.1.11.6.d	Riwayat Pendidikan Education History	561-564
A.1.11.6.e	Riwayat jabatan Position history	561-564
A.1.11.6.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	561-564
A.1.11.6.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any)	561-564
A.1.11.6.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.6.e2) Note: If there are no concurrent positions, this will be disclosed (at point A.1.11.6.e2)	561-564

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.6.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company	561-564
A.1.11.6.f	Periode dan masa jabatan anggota komite audit Period and tenure of Audit Committee members	561-564
A.1.11.6.g	Pernyataan independensi komite audit Statement of Audit Committee independence	565-566
A.1.11.6.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the Financial year (if any)	146
A.1.11.6.i	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut Policy and implementation of Audit Committee meeting frequency and level of attendance of Audit Committee members at the meetings	568-569
A.1.11.6.j	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku Implementation of Audit Committee activities in the Financial year	570-571
A.1.11.7a	Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan. Disclosures related to the Committee or the Company's nomination and remuneration functions	
A.1.11.7a.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Names and positions of the committee members	585-587
A.1.11.7a.b	Usia Age	585-587
A.1.11.7a.c	Kewarganegaraan Nationality	585-587
A.1.11.7a.d	Riwayat Pendidikan Education history	585-587
A.1.11.7a.e	Riwayat jabatan Position history	585-587
A.1.11.7a.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	585-587
A.1.11.7a.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any);	585-587
A.1.11.7a.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7a.e2) Note: If there are no concurrent positions, this will be disclosed; (A.1.11.7a.e2)	585-587
A.1.11.7a.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and period both inside and outside the Company	585-587
A.1.11.7a.f	Periode dan masa jabatan anggota komite The period and term of office of the committee members	585-587
A.1.11.7a.g	Pernyataan independensi komite Statement of committee independence	587-588
A.1.11.7a.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the Financial year (if any);	146
A.1.11.7a.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	589-590
A.1.11.7a.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) A statement that the committee has had guidelines or charters	588
A.1.11.7a.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members in those meetings	590-591
A.1.11.7a.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku A brief description of the committee's activities for the Financial year	592
A.1.11.7a.m	Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: Note: If no nomination and remuneration committee is formed	N/R

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.7a.m1	Alasan tidak dibentuknya komite Reasons for not forming the committee	N/R
A.1.11.7a.m2	Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi The party carrying out the nomination and remuneration function	N/R
A.1.11.7b	Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Disclosures related to the Committee or the Company's nomination and remuneration functions	
A.1.11.7b.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Names and positions of the committee members	585-587
A.1.11.7b.b	Usia Age	585-587
A.1.11.7b.c	Kewarganegaraan Nationality	585-587
A.1.11.7b.d	Riwayat Pendidikan Education history	585-587
A.1.11.7b.e	Riwayat jabatan Position history	585-587
A.1.11.7b.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	585-587
A.1.11.7b.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any)	585-587
A.1.11.7b.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7a.e2) Note: If there are no concurrent positions, this will be disclosed; (A.1.11.7a.e2)	585-587
A.1.11.7b.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience both inside and outside the Public Company	585-587
A.1.11.7b.f	Periode dan masa jabatan anggota komite Period and tenure of committee members	585-587
A.1.11.7b.g	Pernyataan independensi komite Statement of committee independence	587-588
A.1.11.7b.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the financial year (if any)	146
A.1.11.7b.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	589-590
A.1.11.7b.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Statement that it has established committee guidelines or charter	588
A.1.11.7b.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policy and implementation of committee meeting frequency and level of attendance of committee members at the meetings	590-591
A.1.11.7b.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku A brief description of the committee's activities in the Financial year	592
A.1.13	Governansi Perusahaan 3 Corporate Governance 3	
A.1.11.8a	Pengungkapan terkait Komite Manajemen Risiko Disclosures related to the Risk Management Committee	
A.1.11.8a.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in committee membership	573-576
A.1.11.8a.b	Usia Age	573-576
A.1.11.8a.c	Kewarganegaraan Nationality	573-576
A.1.11.8a.d	Riwayat Pendidikan Educational history	573-576

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.8a.e	Riwayat jabatan Position history	573-576
A.1.11.8a.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	573-576
A.1.11.8a.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any)	573-576
A.1.11.8a.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.8a.e2) Note: If there is no concurrent positions, this will be disclosed (at point A.1.11.8a.e2)	573-576
A.1.11.8a.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and period both inside and outside the Company	573-576
A.1.11.8a.f	Periode dan masa jabatan anggota komite manajemen risiko The period and term of office of the risk management committee members	573-576
A.1.11.8a.g	Pernyataan independensi komite Statement of committee independence	577-579
A.1.11.8a.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the Financial year (if any)	146
A.1.11.8a.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	579-580
A.1.11.8a.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement that it has guidelines or charter	577
A.1.11.8a.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members in those meetings	579-582
A.1.11.8a.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku A brief description of the committee's activities for the Financial year	582-583
A.1.11.8b	Pengungkapan terkait Komite lain yang dimiliki Perusahaan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris: Disclosure regarding other committees owned by the Company to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners:	
A.1.11.8b.	Apakah perusahaan memiliki komite lain dalam mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris? Does the company have other committees to support the functions and duties of the Board of Directors and/or Board of Commissioners?	Ya Yes
A.1.11.8b.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Names and positions of the committee members	594-603
A.1.11.8b.b	Usia Age	594-603
A.1.11.8b.c	Kewarganegaraan Nationality	594-603
A.1.11.8b.d	Riwayat Pendidikan Education history	594-603
A.1.11.8b.e	Riwayat jabatan Position history	594-603
A.1.11.8b.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	594-603
A.1.11.8b.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any)	594-603
A.1.11.8b.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Note: If there are no concurrent positions, this will be disclosed	594-603

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.8b.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company	594-603
A.1.11.8b.f	Periode dan masa jabatan anggota komite lain Period and tenure of other Committee members	594-603
A.1.11.8b.g	Pernyataan independensi komite Statement of Committee independence	603
A.1.11.8b.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the Financial year (if any)	146
A.1.11.8b.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	604-605
A.1.11.8b.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement that it has established committee guidelines or charter	604
A.1.11.8b.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policy and implementation of committee meeting frequency and level of attendance of committee members at the meetings	605-607
A.1.11.8b.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku A brief description of the committee's activities in the Financial year	607-609
A.1.11.9	Pengungkapan terkait Sekretaris perusahaan Disclosures regarding the company secretary	
A.1.11.9.a	Nama Name	625-626
A.1.11.9.b	Domisili Domicile	625-626
A.1.11.9.c	Riwayat jabatan Position history	625-626
A.1.11.9.c1	Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan Legal basis for appointment as Corporate Secretary	626
A.1.11.9.c2	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience both inside and outside the Public Company	626
A.1.11.9.d	Riwayat Pendidikan Education history	626
A.1.11.9.e	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Training and/or competence improvement followed during the Financial year	146
A.1.11.9.f	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku A brief description of the Corporate Secretary activities in the Financial year	629-633
A.1.14	Governansi Perusahaan 4 Corporate Governance 4	
A.1.11.10	Pengungkapan terkait Unit Audit Internal, paling sedikit memuat Disclosures related to the Internal Audit Unit contain at least	639-640
A.1.11.10.a	Nama kepala unit audit internal Name of the Internal Audit Unit head	639-640
A.1.11.10.b	Riwayat jabatan Position history	639-640
A.1.11.10.b1a	Dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal The legal basis for the appointment as Internal Audit Unit head	639-640
A.1.11.10.b1	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience with its period both inside and outside of the Company	639-640
A.1.11.10.c	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada) Professional internal audit qualifications or certifications (if any)	640-641
A.1.11.10.d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Training and/or competency improvement to be followed during the Financial year	146
A.1.11.10.e	Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal Structure and positions within the Internal Audit Unit	641-643

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.10.f	Uraian tugas dan tanggung jawab Duties and responsibilities description	646-648
A.1.11.10.g	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Unit Audit Internal Statement that it has established Internal Audit Unit guidelines or charter	644-645
A.1.11.10.h	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the Financial year, including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	649-653
A.1.11.11	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Perusahaan Description of the internal control system applied by the Company	664-667
A.1.11.11.a	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya Financial and operational control, and compliance with other laws and regulations	664-667
A.1.11.11.b	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal Review of the internal control system effectiveness	667
A.1.11.11.c	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system	668
A.1.11.12	Uraian mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan Description of the risk management system implemented by the Company	669-686
A.1.11.12.a	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perusahaan A general description of the Company risk management system	669-670, 677-678
A.1.11.12.b	Jenis risiko dan cara pengelolaannya Risks types and their management	679-685
A.1.11.12.c	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Perusahaan Review of the Company risk management system effectiveness	685, 686-687
A.1.11.12.d	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the risk management system	686
A.1.11.14	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku Information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the Financial year (if any)	692
A.1.11.15	Informasi mengenai kode etik Perusahaan Information regarding the Company code of ethics	
A.1.11.15.a	Pokok-pokok kode etik Code of ethics content	699
A.1.11.15.b	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya Form of code of ethics socialization and enforcement efforts	700
A.1.11.15.c	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company	699-700
A.1.11.16	Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: (atas point A.1.11.16) If there is compensation provided in the form of a share ownership program by management (management stock ownership program/MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must contain at least (at point A.1.11.16)	689

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.16.a	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/ MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP) A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP);	N/R
A.1.11.16.b	Apakah terdapat pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan dalam tahun buku? Is there long-term performance-based compensation provided to management and/or employees in the financial year?	N/R
A.1.11.16.c	Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	N/R
A.1.11.16.c1	Jumlah saham dan/atau opsi Number of shares and/or options	N/R
A.1.11.16.c2	Jangka waktu pelaksanaan Implementation period	N/R
A.1.11.16.c3	Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak Requirements for eligible employees and/or management	N/R
A.1.11.16.c4	Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan Exercise price or determination of exercise price	N/R
A.1.11.17	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai A brief description of the information disclosure policy regarding	
A.1.11.17.a	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company	130
A.1.11.17.b	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud Implementation of the policy in question	130
A.1.11.18	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Perusahaan: Description of the whistleblowing system in the Company	
A.1.11.18.a	Cara penyampaian laporan pelanggaran Violation report submission	744-746
A.1.11.18.b	Perlindungan bagi pelapor Protection for whistleblowers	747-748
A.1.11.18.c	Penanganan pengaduan Complaint handling	748-749
A.1.11.18.d	Pihak yang mengelola pengaduan The party managing the complaint	738
A.1.11.18.e	Hasil dari penanganan pengaduan: Complaint handling results:	
A.1.11.18.e1	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku Number of complaints received and processed during the Financial year	748
A.1.11.18.e2	Tindak lanjut pengaduan Complaint follow up	748
A.1.11.18.e3	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. (atas point A.1.11.18) Note: If the Company does not have a whistleblowing system, this matter must be disclosed. (at point A.1.11.18)	748

Nomor Number	**Pertanyaan ARA** ARA Question	**Halaman** Page
A.1.11.19	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Perusahaan A description of the anti-corruption policy of the Company	
A.1.11.19.a	Program dan prosedur yang dilakukan Programs and procedures implemented	710-713, 703, 706
A.1.11.19.b	Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Perusahaan Anti-corruption training/socialization to employees of the Company	713-714
A.1.11.19.c	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud (atas point A.1.11.19) Note: If the Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy must be explained (at point A.1.11.19)	710
A.1.11.20a	Penerapan atas pedoman governansi Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: Implementation of Code of Corporate Governance guidelines by the Issuer that issues equity securities or the Public Company, including:	N/R
A.1.11.20a.a	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan Statement regarding recommendations have been implemented	N/R
A.1.11.20a.b	Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence/explanation showing that the company has implemented these recommendations	N/R
A.1.11.20a.c	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Description of the recommendations that have not been implemented, the reasons, and the implementation alternatives	N/R
A.1.11.20b	Pengungkapan terkait penerapan atas pedoman governansi Perusahaan dengan pendekatan "*comply or explain*" atau "*apply or explain*", meliputi: Disclosures related to the implementation of the Company's governance guidelines using the "comply or explain" or "apply or explain" approach, include:	N/R
A.1.11.20b.a	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan Statement regarding recommendations have been implemented	N/R
A.1.11.20b.b	Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence/explanation showing that the company has implemented these recommendations	N/R
A.1.11.20b.c	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Description of the recommendations that have not been implemented, the reasons, and the implementation alternatives	N/R

Pemenuhan Pertanyaan Bonus dan Penalti Kriteria ARA

Fulfillment of Bonus and Penalty Questions of ARA Criteria

	Pertanyaan Question	Uraian Jawaban Answer Description
B.A.0	**Pengungkapan dalam Laporan Tahunan atas item-item berikut ini:** Disclosure in the Annual Report of the following items:	
B.A.1	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (PUGKI 1.3.2) Types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners (PUGKI 1.3.2)	Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris antara tain: 1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek. 2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa Kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan Kerjasama lainnya dengan jangka waktu atau nilai tertentu yang ditetapkan RUPS, sepanjang bukan merupakan pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan. 3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diterima dari atau diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman yang diterima dari atau diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. 4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. 6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. 7. Melakukan penyertaan modal dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perseroan lain dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 8. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 9. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 10. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 11. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 12. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS. 13. Melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang dengan kriteria atau nilai tertentu yang ditetapkan RUPS.

	Pertanyaan Question	**Uraian Jawaban** Answer Description
		Actions of the Board of Directors that require written approval from the Board of Commissioners include: 1. Collateralizing fixed assets for short-term credit withdrawals. 2. Establishing cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operations (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation with a certain period or value determined by the GMS, as long as it is not the implementation of the Company's main business activities. 3. Receiving or providing medium/long-term loans with a certain value determined by the GMS, except for loans (debts or receivables) arising from business transactions, and loans received from or given to subsidiaries of the Company with the provision that loans received from or given to subsidiaries of the Company are reported to the Board of Commissioners. 4. Writing off bad debts and dead stock from the books with a certain value determined by the GMS. 5. Dispose of movable fixed assets with an economic life that is generally applicable in the industry up to 5 (five) years. 6. Determine the organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors. 7. Make capital participation and reduce the percentage of capital participation in other companies with a certain value determined by the GMS. 8. Dispose of capital participation in subsidiaries and/or joint ventures with a certain value determined by the GMS. 9. Conduct mergers, amalgamations, takeovers, separations, and dissolutions of subsidiaries and/or joint ventures with a certain value determined by the GMS. 10. Bind the Company as a guarantor (borg or avalist) with a certain value determined by the GMS. 11. No longer collect bad debts that have been written off with a certain value determined by the GMS. 12. Propose representatives of the company to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that make significant contributions to the Company and/or have strategic value determined by the GMS. 13. Make long-term investments and financing with certain criteria or values determined by the GMS.

	Pertanyaan Question	Uraian Jawaban Answer Description
		Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan terlebih dahulu memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris antara lain: 1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/ panjang. 2. Melakukan penyertaan modal dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perseroan lain dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. 4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 6. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 7. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa Kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan jangka waktu atau nilai tertentu yang ditetapkan RUPS, sepanjang bukan merupakan pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan. 8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun. 10. Menetapkan blue print organisasi Perseroan. 11. Menetapkan dan merubah logo Perseroan. 12. Melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini yang belum ditetapkan dalam RKAP. 13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan. 14. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. 15. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS. 16. Melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang dengan kriteria atau nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 17. Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perseroan.

	Pertanyaan Question	**Uraian Jawaban** Answer Description
		Actions of the Board of Directors that require approval from the General Meeting of Shareholders by first obtaining a written response from the Board of Commissioners include: 1. Pledge fixed assets for medium/long-term credit withdrawals. 2. Make capital participation and reduce the percentage of capital participation in other companies with a certain value determined by the GMS. 3. Establish subsidiaries and/or joint ventures. 4. Release capital participation in subsidiaries and/or joint ventures with a certain value determined by the GMS. 5. Conduct mergers, amalgamations, takeovers, separations, and dissolutions of subsidiaries and/or joint ventures with a certain value determined by the GMS. 6. Bind the Company as a guarantor (borg or avalist) with a certain value determined by the GMS. 7. Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, asset rental, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation with a certain period or value determined by the GMS, as long as it is not the implementation of the Company's main business activities. 8. No longer collect bad debts that have been written off with a certain value determined by the GMS. 9. Release and write off the Company's fixed assets with an economic life that is generally applicable in the industry of more than 5 (five) years. 10. Determine the Company's organizational blueprint. 11. Determine and change the Company's logo. 12. Take actions as referred to in paragraph 8 of this Article that have not been determined in the RKAP. 13. Form foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company that can have an impact on the Company. 14. Charging of fixed and routine company costs for foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company. 15. Proposing Company representatives to become candidates for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that provide significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the GMS. 16. Making long-term investments and financing with certain criteria or values determined by the GMS. 17. Issuing bonds and other debt securities by the Company.
B.A.2	**Rincian tugas Komisaris Utama (PUGKI 1.3.13.1)** Details of the duties of the Main Commissioner (PUGKI 1.3.13.1)	
B.A.3	Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal (ASEAN CG ScoreCard E.2.24) The Audit Committee's responsibility in providing recommendations on the appointment and dismissal of external auditors (ASEAN CG ScoreCard E.2.24)	Komite Audit telah memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor eksternal melalui Surat Komite Audit No: 042/KA/PIHC/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Pengadaan dan Usulan Penetapan Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2024 The Audit Committee has provided recommendations on the appointment of an external auditor through the Audit Committee Letter No. 042/KA/PIHC/X/2024 dated October 22, 2024 concerning the Implementation of Procurement and Proposal for the Determination of Public Accounting Firm Service Providers for PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries for the 2024 Financial Year.
B.A.4	Sertifikasi profesi (misalnya dalam bidang Risiko, Akuntansi, Perpajakan, IT, Hukum) yang dimiliki oleh (Kriteria tambahan ARA 2019) Professional certification (e.g. in the fields of Risk, Accounting, Taxation, IT, Law) held by (Additional Criteria ARA 2019)	Sertifikasi yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024 sebagai berikut: 1. Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP) 2. ESG Governance Programme: Exploring a New Approach to Corporate Governance through the Integration of Sustainability and ESG The certifications followed by the Board of Commissioners during 2024 are as follows: 1. Certified Governance Oversight Professional (CGOP) Certification 2. ESG Governance Programme: Exploring a New Approach to Corporate Governance through the Integration of Sustainability and ESG

	Pertanyaan Question	Uraian Jawaban Answer Description
B.A.4.a	Komite Audit Audit Committee	1. Melakukan penelaahan atas efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan untuk mendapatkan keyakinan tentang: • Akurasi laporan keuangan, apakah sudah disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku. • Pengamanan harta kekayaan perusahaan termasuk optimalisasi penggunaannya; • Pencegahan kemungkinan timbulnya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk keputusan Direksi. 2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Kompartemen Audit Internal, sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar; 3. Menelaah independensi dan obyektivitas Auditor Eksternal; 4. Melakukan penelahaan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan; 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal; 6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan; 7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan; 8. Membuat pedoman kerja Komite Audit (Committee Audit Charter); 9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris. 1. Conduct a review of the effectiveness of the company's internal control system to obtain assurance about: • The accuracy of financial reports, whether they have been prepared in accordance with applicable accounting standards. • Safeguarding the company's assets including optimizing their use; • Preventing the possibility of deviations from applicable laws and regulations including decisions of the Board of Directors. 2. Assess the implementation of activities and audit results conducted by the Internal Audit Compartment, so that implementation and reporting that do not meet standards can be prevented; 3. Review the independence and objectivity of the External Auditor; 4. Review the company's compliance with laws and regulations in the capital market sector and laws and regulations related to the company's activities; 5. Review the implementation of audits by the Internal Auditor; 6. Review and report to the Board of Commissioners on complaints related to the company; 7. Maintain the confidentiality of company documents, data and information; 8. Create work guidelines for the Audit Committee (Committee Audit Charter); 9. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners.
B.A.4.b	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	1. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta BUMN serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya; 2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi BUMN; 3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (selected talent), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (nominated talent) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN kepada RUPS/Menteri; 4. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil BUMN yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri; 5. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi BUMN; 6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; 7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; 8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan 9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi BUMN mengenai struktur organisasi BUMN

	Pertanyaan Question	**Uraian Jawaban** Answer Description
		1. Conduct periodic reviews of the BUMN Talent Management system and supervision and evaluation of its implementation; 2. Conduct evaluations of the Talent classification system and procedures carried out by the BUMN Board of Directors; 3. Conduct validation and calibration of Selected Talents, to produce a list of Nominated Talents nominated by the BUMN Board of Commissioners/ Supervisory Board to the GMS/Minister; 4. Conduct evaluations of BUMN representative candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or Board of Commissioners of Subsidiaries, before being submitted to the GMS/Minister; 5. Conduct evaluations of the individual KPI proposals of BUMN Board of Directors members; 6. Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners/ Supervisory Board of BUMN; 7. Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN; 8. Conduct evaluations of remuneration policies for employees who require approval/response from the BUMN Board of Commissioners/Supervisory Board; and 9. Conduct evaluations of BUMN Board of Directors proposals regarding the BUMN organizational structure.
B.A.4.c	Komite Manajemen Risiko	1. Mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan pemberian pendapat kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko. 2. Mengkaji dan mengevaluasi risiko-risiko yang timbul dari pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris. 3. Mengevaluasi dan melakukan analisis risiko atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan asset perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Komisaris. 4. Mengevaluasi dan mengkaji risiko-risiko yang timbul dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, Rencana Jangka Panjang (RJP) untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Komisaris. 5. Memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut. 6. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan. 7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.
		1. Periodically review the risk management policy and provide opinions to the Board of Commissioners as a consideration in providing recommendations or approval of the risk management policy. 2. Review and evaluate the risks arising from the Board of Directors' responsibilities related to business relationships or business activities that must obtain recommendations or approval from the Board of Commissioners. 3. Evaluate and conduct risk analysis on each proposal of the Board of Directors related to investment cooperation, capital participation, establishment of joint ventures, establishment of subsidiaries, disposal of company assets, and other company activities to obtain recommendations or approval from the Board of Commissioners. 4. Evaluate and review the risks arising from the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Company Business Plan, Long-Term Plan (RJP) to obtain recommendations or approval from the Board of Commissioners. 5. Monitor the main risks faced by the Company and ensure that the Board of Directors has taken the necessary steps to identify, measure, monitor and control these risks. 6. Provide input to the Board of Commissioners in order to improve and develop the Company's Risk Management policy. 7. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners.

	Pertanyaan Question	Uraian Jawaban Answer Description
B.A.4.d	Komite Lainnya	Komite Talent, dengan Ketua Direktur Utama, Sekretaris oleh Direktur Sumber Daya Manusia, dan Direksi lainnya sebagai Anggota dengan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil kajian dan usulan dari Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia; 2. Menetapkan keputusan-keputusan strategis yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang meliputi namun tidak terbatas pada : • Organizational Development • Performance Management • Career and Talent Development • HR System and Administration • Compensation & Benefit • Culture Management 3. Menetapkan usulan Top Talent yang bersumber dari Direksi Anak Perusahaan dan BOD-1 Pupuk Indonesia Group secara periodok yang disampaikan kepada Dewan Komisaris (Komiter Nominasi dan Remunerasi) PT Pupuk Indonesia (Persero); 4. Menetapkan pengisian dan/atau penggantian BOD01 Pupuk Indonesia Group; 5. Menetapkan BOD-2 sebagai suksesor untuk posisi kunci di Pupuk Indonesia Group; 6. Menetapkan usulan pengisian dan/atau penggantian Direksi Anak Perusahaan yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) 7. Menetapkan usulan pengisian dan/atau penggantian Direksi dan/atau Dewas Komisaris Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi yang memerlukan persetujuan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) 8. Menetapkan pemberian apresiasi bagi karyawan yang memberikan kontribusi dan prestasi khusus dan/atau luar biasa dan berdampak secara signifikan bagi kinerja dan keberlangsungan Perusahaan; 9. Menetapkan pemberian sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Kepatuhan/Tim Disiplin Perusahaan
		Talent Committee, with the Chairman as the President Director, Secretary by the Director of Human Resources, and other Directors as Members with the following responsibilities: 1. Establish policies and strategies in the field of Human Resources management based on the results of studies and proposals from the Directorate in charge of Human Resources; 2. Establish strategic decisions related to Human Resources management which include but are not limited to: - Organizational Development - Performance Management - Career and Talent Development - HR System and Administration - Compensation & Benefit - Culture Management 3. Establish Top Talent proposals sourced from the Board of Directors of Subsidiaries and BOD-1 Pupuk Indonesia Group periodically which are submitted to the Board of Commissioners (Nomination and Remuneration Committee) of PT Pupuk Indonesia (Persero); 4. Determine the filling and/or replacement of BOD01 Pupuk Indonesia Group; 5. Determine BOD-2 as successors for key positions in Pupuk Indonesia Group; 6. Determine the proposal for filling and/or replacing the Board of Directors of Subsidiaries that require approval from the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) 7. Determine the proposal for filling and/or replacing the Board of Directors and/or Board of Commissioners of Subsidiary Companies/Affiliated Companies that require approval from PT Pupuk Indonesia (Persero) 8. Determine the provision of appreciation for employees who provide special and/or extraordinary contributions and achievements and have a significant impact on the performance and sustainability of the Company; 9. Determine the provision of sanctions for employees who commit serious violations by considering recommendations from the Company's Compliance Team/Discipline Team

	Pertanyaan Question	**Uraian Jawaban** Answer Description
		Komite KPI dengan Penasihat Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, dan Ketua oleh Direktur Keuangan, memiliki tugas: Merancang KPI Tahunan 2025 yang terdiri dari KPI Direksi Kolegial, KPI Individu Direksi dan Katalog KPI untuk Anak Perusahaan The KPI Committee with Advisors to the President Director and Deputy President Director, and Chaired by the Finance Director, has the following duties: Designing the 2025 Annual KPI consisting of the Collegial Board of Directors KPI, Individual Board of Directors KPI and KPI Catalog for Subsidiaries
B.A.5	Deskripsi proses governansi terkait isu IT termasuk disruption (gangguan), cyber security (keamanan dunia maya), dan disaster recovery (pemulihan bencana) untuk memastikan semua risiko utama telah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan pada Direksi (ASEAN CG Score Card B.E.5.1) Description of governance processes related to IT issues including disruption, cyber security and disaster recovery to ensure all key risks are identified, managed and reported to the Board of Directors (ASEAN CG Score Card BE5.1)	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait Business Continuity Management (BCM) yang didalamnya terdapat IT Disaster Recovery Plan (DRP) dalam hal menanggapi disrupsi/bencana dalam rangka memastikan keberlangsungan usaha Perusahaan The company has a related policyBusiness Continuity Management (BCM) which includes ITDisaster Recovery Plan (DRP) in terms of respondi
B.A.6	Kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. (Aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar) (PUKGI 7.2.3) Policy to prevent insider trading. (Clear rules regarding any trading in corporate shares conducted by directors, commissioners and insiders to ensure that no one can directly or indirectly benefit from information that is not/not yet available in the market) (PUKGI 7.2.3)	Perusahaan telah menetapkan kebijakan ini pada Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Tahun 2024 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. The Company has set out this policy in its Code of Ethics and Conduct. (Code of Conduct)2024 which has been approved by the Board of Commissioners and Directors.
B.A.7	Kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang (ASEAN CG Score Card C.3.3) Reward/compensation policies that take into account long-term company performance (ASEAN CG Score Card C.3.3)	Tidak Ada There isn't any
B.A.8	Kebijakan untuk melakukan penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi yang material/signifikan (ASEAN CG Score Card D.3.1) Policy for reviewing and approving transactions with material/significant related parties (ASEAN CG Score Card D.3.1)	Perusahaan memiliki Basis nilai dan otorisator persetujuan pengadaan yang dituangkan ke dalam Prosedur The company has a value base and procurement approval authorizer which are outlined in the Procedure.

	Pertanyaan Question	Uraian Jawaban Answer Description
B.A.9	Kebijakan terkait perencanaan atas suksesi anggota Direksi dan managemen kunci (ASEAN CG Score Card E.5.3) Policy related to planning for succession of members of the Board of Directors and key management (ASEAN CG Score Card E.5.3)	Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas usulan Perubahan Anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang direkomendasi Komite Talenta dan memberikan tanggapan tertulis Usulan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dari Perusahaan sebelum batas waktu pemberian tanggapan dilalui. The Board of Commissioners shall evaluate the proposed Changes to the Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries recommended by the Talent Committee and shall provide a written response to the Proposals of Candidate Members of the Board of Directors and Candidate Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries from the Company before the deadline for providing responses has passed.
B.A.10.a	Kerangka pelaporan berkelanjutan yang diakui secara internasional (contoh: GRI, Integrated Reporting, SASB) yang diadopsi oleh Perusahaan Internationally recognized sustainability reporting framework (e.g. GRI, Integrated Reporting, SASB) adopted by the Company	Perseroan menggunakan referensi Global Reporting Initiative (GRI) Standards tahun 2021, dengan opsi pelaporan sesuai dengan GRI pada level komprehensif, Sustainability Accounting Standard Board (SASB), dan Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) untuk penyusunan laporan keberlanjutan sebagaimana yang disampaikan pada Laporan Keberlanjutan Bab Tentang Laporan. The Company uses the 2021 Global Reporting Initiative (GRI) Standards reference, with reporting options in accordance with GRI at a comprehensive level, the Sustainability Accounting Standard Board (SASB), and the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) for the preparation of sustainability reports as stated in the Sustainability Report Chapter About the Report.
B.B.0	**Pertanyaan Tambahan** Additional Questions	
B.B.2	Pengungkapan kerangka governansi, pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan di perusahaan (GRI) Disclosure of governance framework, management and control of tax aspects in the company (GRI)	PTPI telah menerapkan kerangka kerja tata kelola dan pengendalian pajak yang komprehensif. Dewan Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap strategi pajak perusahaan. Pendekatan pajak diintegrasikan ke dalam seluruh proses bisnis dengan menanamkan kesadaran taat pajak kepada seluruh karyawan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan dan penyediaan informasi yang relevan agar setiap individu memahami pentingnya kepatuhan pajak dalam menjalankan tugasnya. Risiko pajak diidentifikasi melalui berbagai analisis dan dipantau secara berkala. Unit kerja pajak berperan aktif dalam mengelola risiko perpajakan dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko sejak tahap awal pengembangan bisnis. Selain itu, perusahaan secara rutin melakukan audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang telah diterapkan. PTPI has implemented a comprehensive tax governance and control framework. The Board of Directors is responsible for compliance with the company's tax strategy. The tax approach is integrated into all business processes by instilling tax compliance awareness in all employees. These efforts are carried out through training and providing relevant information so that each individual understands the importance of tax compliance in carrying out their duties. Tax risks are identified through various analyses and monitored regularly. The tax work unit plays an active role in managing tax risks by identifying and anticipating potential risks from the early stages of business development. In addition, the company routinely conducts internal and external audits to evaluate the effectiveness of the risk management system that has been implemented.

	Pertanyaan Question	**Uraian Jawaban** Answer Description
B.B.3	Jelaskan bagaimana visi dan misi serta purpose statement, perusahaan dalam upaya mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan serta peran organ-organ Perusahaan yang dapat mencerminkan implementasi governansi (ETAK) dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholders Explain how the company's vision, mission and purpose statement support sustainable company performance and the role of company organs that can reflect the implementation of governance (ETAK) by considering stakeholder interests.	PTPI mengadopsi kebijakan keberlanjutan yang diterapkan di seluruh operasionalnya, dimulai dari visi perusahaan dan nilai-nilai yang menjadi dasar budaya perusahaan. Kebijakan keberlanjutan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, dan menjadi panduan integral dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dalam bidang tata kelola, PTPI menerapkan prinsip tata kelola yang baik (ETAK) dan berkelanjutan berdasarkan standar GCG. Perusahaan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk pengelolaan sumber daya, pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan. PTPI juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, serta menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang terbuka. PTPI adopts a sustainability policy that is applied throughout its operations, starting from the company's vision and values that are the basis of the company's culture. This sustainability policy reflects the company's commitment to act responsibly towards social, environmental, and economic aspects, and becomes an integral guide in decision-making and the implementation of daily activities. In the field of governance, PTPI applies the principles of good governance (ETAK) and sustainability based on GCG standards. The company upholds transparency, accountability, and integrity in every aspect of its operations, including resource management, financial reporting, and decision-making. PTPI also ensures compliance with applicable rules and regulations, and maintains good relations with stakeholders through open communication.
B.B.4	Jelaskan implementasi konsep keberlanjutan dan integrasinya dalam proses bisnis Perusahaan termasuk bagaimana perusahaan mengantisipasi risiko perubahan lingkungan bisnis (pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan) dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang dengan berlandaskan pilar governansi (ETAK) Explain the implementation of the sustainability concept and its integration into the Company's business processes, including how the company anticipates the risk of changes in the business environment (in economic, social and environmental aspects) in carrying out the company's current and future operational activities based on the governance pillar (ETAK).	Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, perusahaan telah mengadopsi pendekatan yang mendalam terhadap pengelolaan risiko yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Perusahaan telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), memastikan pencapaian nilai Pemegang Saham dan pemenuhan komitmen pada karyawan serta seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan mandat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan peningkatan pengelolaan risiko di lingkungan BUMN yang tertuang di dalam Peraturan Menteri BUMN RI nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN yang diterbitkan tanggal 24 Maret 2023. Setelah terbitnya Permen Risiko, Perusahaan menyesuaikan Pedoman Manajemen Risiko pada tanggal 29 Mei 2023. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem manajemen risiko dan sistem manajemen kepatuhan, termasuk risiko terkait keberlanjutan dan perubahan iklim, untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang bertanggung jawab. As part of its sustainability strategy, the company has adopted a comprehensive approach to managing risks arising from changes in the business environment, both in terms of economic, social and environmental aspects. The company has implemented Integrated Risk Management (MRT) to realize Good Corporate Governance (GCG), ensure the achievement of Shareholder value and fulfillment of commitments to employees and all other relevant stakeholders. This is in line with the mandate of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) in improving risk management in the BUMN environment as stated in the Regulation of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN issued on March 24, 2023. After the issuance of the Risk Regulation, the Company adjusted the Risk Management Guidelines on May 29, 2023. The company is committed to continuously improving its risk management system and compliance management system, including risks related to sustainability and climate change, to support responsible long-term growth.

	Pertanyaan Question	Uraian Jawaban Answer Description
B.B.5	Jelaskan sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Perusahaan, termasuk kesiapan prosedur dan sistem informasi Perusahaan, untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2, terutama terkait pengungkapan atas empat pilar yang ada (Governance, Strategy, Risk Management, Metrics & Target) Explain the extent of preparation that has been made by the Company, including the readiness of the Company's procedures and information systems, to prepare a sustainability report referring to IFRS S1 and IFRS S2, especially regarding disclosure of the four existing pillars (Governance, Strategy, Risk Management, Metrics & Targets)	Saat ini perusahaan sedang mempersiapkan penerapan standar IFRS S1 dan IFRS S2, di antaranya dengan menyelenggarakan pelatihan berupa: 1. Pelatihan PSAK Bootcamp Terkini sesuai Konvergensi IFRS; 2. PSAK Bootcamp 2023: PSAK Terkini sesuai Konvergensi IFRS; 3. The ACMF-ISSV Joint Conference and Technical Training on the IFRS Sustainability Disclosure Standards. Currently, the company is preparing for the implementation of IFRS S1 and IFRS S2 standards, including by organizing training in the form of: 1. Latest PSAK Bootcamp Training according to IFRS Convergence; 2. PSAK Bootcamp 2023: Latest PSAK according to IFRS Convergence; 3. The ACMF-ISSV Joint Conference and Technical Training on the IFRS Sustainability Disclosure Standards.
Pertanyaan Penalti Penalty Question		
B.C.0	Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan & laporan tahunan Timeliness of publication of financial statements & annual reports	Penerbitan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2024 mengalami sedikit keterlambatan. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa laporan yang diterbitkan mencerminkan transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku. Proses penerbitan yang teliti ini diharapkan dapat memberikan pemangku kepentingan informasi yang komprehensif mengenai kinerja dan prospek Perseroan, sekaligus memperkuat kepercayaan dalam keberlanjutan bisnis Perseroan. The publication of the Annual Financial Report and Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero) for 2024 has experienced a slight delay. Nevertheless, the Company remains committed to ensuring that the published reports reflect transparency, accuracy, and compliance with applicable regulatory standards. This thorough publication process is expected to provide stakeholders with comprehensive information regarding the Company's performance and prospects, while strengthening trust in the sustainability of the Company's business.
B.C.1	Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan (ASEAN CG Score Card B.D.1.1 & Peraturan OJK) Date of issuance of Annual Financial Report (ASEAN CG Score Card BD1.1 & OJK Regulation)	08 Mei 2025 May 08, 2025
B.C.2	Tanggal penerbitan Laporan Tahunan (ASEAN CG Score Card B.D.1.1 & Peraturan OJK) Date of publication of Annual Report (ASEAN CG Score Card BD1.1 & OJK Regulation)	xxx [diisi dengan tanggal penerbitan laporan tahunan] xxx [filled with the date of publication of the annual report]
B.C.3	Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan Independent auditor's opinion on the company's financial statements	Wajar Tanpa Pengecualian Fair Without Exception
B.C.4	Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? (ASEAN CG Score Card P.B.1.1) Has there been any insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the last three years? (ASEAN CG Score Card PB1.1)	Tidak Ada There isn't any

	Pertanyaan Question	**Uraian Jawaban** Answer Description
B.C.5	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir? (ASEAN CG Score Card P.B.2.1) Have there been any cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to significant or material related party transactions in the last three years? (ASEAN CG Score Card PB2.1)	Tidak Ada There isn't any
B.C.6	Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan (P.C.1.1) Have there been any violations of laws relating to labor/ employment/ consumer/ bankruptcy/ commercial/competition or environmental issues (PC1.1)	Tidak Ada There isn't any
B.C.7	Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event)? (ASEAN CG Score Card P.C.2.1) Does the company face sanctions from regulators for not making announcements within the specified timeframe for material events? (ASEAN CG Score Card PC2.1)	Tidak Ada There isn't any
B.C.8	Apakah perusahaan memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun selama tiga tahun terakhir Has the company received a guilty verdict from the highest tax court regarding any tax issues during the last three years?	Tidak Ada There isn't any
B.C.9	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan? (P.E.1.1) Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations during the past year other than disclosure rules? (PE1.1)	Tidak Ada There isn't any

PUPUK INDONESIA
HOLDING COMPANY

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pusat
Head Office

Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan Jaya
Jakarta 11480, Indonesia
E-mail : info@pupuk-indonesia.com
Hotline : +62 800 100 800 1
SMS : +62 822 100 100 81
Tel. : +62 21 5365 4900
Fax. : +62 21 548 0607

www.pupuk-indonesia.com

PT Pupuk Indonesia
@pupuk_indonesia
pt.pupukindonesia
PTPupukIndonesiaOfficial
pupuk.indonesia

Scan QR Code di atas untuk melihat versi digital dari Laporan Tahunan ini
Scan the QR Code above to view a digital version of this Annual Report